

BUKU II

DOKUMEN
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 660 / 0457 / DLHK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU, AP., M.Si., M.Si

Jabatan : PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Dengan ini menyatakan bahwa penetapan isu prioritas lingkungan hidup pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah didasarkan pada proses yang partisipatif dan melibatkan para pemangku kepentingan. Adapun isu prioritas lingkungan hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah
2. Kerusakan Pesisir dan Laut
3. Belum Optimalnya Tata Kelola dan Manajemen Lingkungan Hidup
4. Peningkatan Eksploitasi dan Alih Fungsi Lahan
5. Penurunan Kualitas Air

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 28 Juli 2023

PJ. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Dr. SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU, AP., M.Si., M.Si





GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SURAT PERNYATAAN

NOMOR: 660 /0458 /DLHK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu, AP., M.Si., M.Si

Jabatan : PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Dengan ini menyatakan bahwa inovasi sebagai berikut:

1. Gule Kabung
2. Gerakan Jum'at Bersih dan Babel Menanam
3. Hijau Biru Babel ku
4. Kompos BABEL
5. Sedekah Pohon
6. Agro Eduwisata
7. Abang Timah Untuk Bu Disa
8. Literasi Lingkungan
9. Agro Eduwisata
10. Pembangkit Listrik Tenaga Surya *Rooftop*
11. Pelet Sampah
12. *Eco Brick* Sampah
13. Pembuatan BBM dengan Teknologi Pirolisis Sampah
14. Si Terbit DLHK
15. Kampung Keluarga Cikar

16. Kampung Bebas Malaria

17. Si Centing (Siap Cegah Stunting)

merupakan inovasi yang berasal dari inisiatif kami selaku kepala daerah atau pengembangan dari inisiatif masyarakat/LSM/ Organisasi Perangkat Daerah di wilayah kami.

Pangkalpinang, 28 Juli 2023

PJ. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



DR. SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU, AP., M.Si, M.Si



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33418
Telp/Fax. (0717) 436975, email : dlhk@babelprov.go.id, website : dlhk.babelprov.go.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fery Afriyanto
NIP : 19700409 199603 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Menyatakan bahwa:

1. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 disusun oleh tim pokja dan tim penyusun Dokumen IKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Proses penyusunan dilaksanakan secara partisipatif melibatkan berbagai unsur dan pihak berkepentingan seperti tim pokja, akademisi, LSM dan masyarakat.
3. Dokumen IKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 disusun berdasarkan data dan informasi tahun 2022 - 2023 dan data-data yang diperoleh pada saat dokumen disusun, validitas data dilakukan dan data yang digunakan dikeluarkan oleh wali data dan tertera pada sumber data dalam Dokumen IKPLHD.

Mengetahui,
PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Dr. SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU, AP., M.Si., M.Si



Pangkalpinang, 28 Juli 2023
Yang membuat pernyataan,



FERY AFRIYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19700409 199603 1 004



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Dokumen IKPLHD ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup dan sebagai sarana untuk menyajikan data dan informasi mengenai kondisi Lingkungan hidup di daerah. Dokumen IKPLHD juga berguna sebagai bahan untuk melakukan penilaian dan menentukan prioritas masalah, serta membuat rekomendasi dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan.

Dokumen IKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berisi data dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di antaranya adalah kondisi dan kualitas lingkungan hidup, tekanan-tekanan yang dialami antara lain terhadap tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, perkotaan serta tata kelola, gambaran aktivitas perekonomian penduduk, dampak-dampak lingkungan yang timbul, dan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan ataupun direncanakan akan dilaksanakan. Informasi yang tersaji dalam Dokumen IKPLHD ini dilengkapi dengan grafik dan peta yang diharapkan bisa memperjelas penyajian informasi.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Dokumen IKPLHD ini. Kami berharap dokumen ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan bijaksana sebagai referensi dalam perencanaan program pembangunan ataupun untuk keperluan positif lainnya dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, 2 Juli 2023

PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,



Dr. SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU, AP., M.Si., M.Si

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ISU PRIORITAS DIKPLHD TAHUN 2022	i
SURAT PERNYATAAN INOVASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	ii
PAKTA INTEGRITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
I.1. Latar Belakang.....	I-1
I.2. Profil Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I-3
I.2.1 Karakteristik Wilayah.....	I-3
I.2.2. Karakteristik Bentang Lahan	I-8
I.2.3 Potensi Unggulan Daerah	I-10
I.3. Proses Perumusan Isu Prioritas dan Penyusunan Dokumen.....	I-18
I.4. Maksud dan Tujuan.....	I-22
I.5. Ruang Lingkup Penulisan.....	I-22
BAB II ANALISIS DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT, DAN RESPONSE ISU LINGKUNGAN HIDUP	II-1
II.I Tata Guna Lahan.....	II-5
II.1.1 Driving Force	II-8
II.1.1.1 Kemudahan Berinvestasi	II-8
II.1.1.2 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Mineral Non Logam dari Pusat Ke Daerah	II-11
II.1.1.3 Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang yang belum optimal	II-12
II.1.1.4 Tata kelola pertambangan yang belum optimal.....	II-13
II.1.2 Pressure.....	II-14
II.1.2.1 Alih Fungsi lahan	II-14
II.1.2.3 Deforestasi dan Degradasi Hutan.....	II-51
II.1.2.4 Eksploitasi Lahan	II-55

II.1.3 State.....	II-59
II.1.3.1 Kondisi Eksisting Penutup/ Penggunaan Lahan	II-59
II.1.3.2 Kondisi Pesisir dan Laut	II-62
II.I.3.3 Lahan Kritis.....	II-73
II.1.3.4 Erosi dan Sedimentasi	II-84
II.1.3.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.....	II-85
II.1.4 Impact	II-88
II.1.4.1 Penurunan Daya Dukung Lingkungan Hidup	II-88
II.1.4.2 Peningkatan Emisi GRK dan Perubahan Iklim.....	II-90
II.1.4.3 Perubahan Garis Pantai	II-97
II.1.4.4 Ancaman Bencana Banjir	II-99
II.1.4.5 Penurunan Keanekaragaman Hayati.....	II-100
II.1.5 Response	II-102
II.1.5.1 Pengendalian Pemanfaatan Ruang	II-103
II.1.5.2 Penata kelolaan Pertambangan.....	II-110
II.1.5.3 Pengendalian Pemanfaatan Fungsi Kawasan Hutan.....	II-115
II.1.5.4 Pengendalian Kerusakan Lahan	II-119
II.1.5.5 Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.....	II-132
II.1.5.6 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan	II-159
A. Mekanisme Perhutanan Sosial	II-159
II.1.5.7. Pelestarian Keanekaragaman Hayati	II-160
II.1.5.8 Sosialisasi, Edukasi dan Peningkatan Kapasitas.....	II-164
II.2 Kualitas Air	II-166
II.2.1 Driving Force	II-170
II.2.1.1 Konsumsi Air	II-170
II.2.1.2 Perubahan Tata Guna Lahan	II-177
II.2.2 Pressure.....	II-179
II.2.2.1 Pencemaran air	II-179
II.2.2.2 Erosi dan Sedimentasi.....	II-183
II.2.3 State.....	II-184
II.2.3.1 Kualitas air	II-184
II.2.3.2 Kualitas Air Hujan	II-188
II.2.3.3 Kualitas air Laut.....	II-190
II.2.3.4 Sumber Air Minum Rumah Tangga.....	II-193
II.2.3.5 Sampah di perairan.....	II-194

II.2.4 Impact	II-196
II.2.4.1 Kerugian Ekonomi.....	II-196
II.2.4.2 Kerusakan Ekosistem Sungai	II-198
II.2.4.3 Penurunan Kesehatan Masyarakat	II-201
II.2.4.3 Peningkatan Emisi GRK	II-203
II.2.5 Respons	II-205
II.2.5.1 Kebijakan dan Perencanaan	II-205
II.2.5.2 Pendidikan dan penyadartahuan.....	II-208
II.2.5.3 Program Peningkatan Hidup Bersih dan Sehat	II-209
II.2.5.4 Konservasi Air	II-211
II.2.5.5 Pemanenan Air Hujan	II-213
II.3 Kualitas Udara.....	II-215
II.3.1 Faktor Pendorong (Driving Force)	II-217
II.3.1.1 Pertambahan Penduduk dan Tingkat Ekonomi	II-217
II.3.1.1 Aktivitas dan Mobilitas Masyarakat.....	II-218
II.3.2 Tekanan (Pressure).....	II-220
II.3.2.1 Kenaikan Penggunaan Bahan Bakar	II-220
II.3.3 Kondisi (State).....	II-222
II.3.3.1 Potensi Kenaikan Gas Pencemar Udara	II-222
II.3.3.2 Indeks Kualitas Udara	II-226
II.3.4 Dampak (Impact)	II-233
II.3.4.1 Perubahan Suhu Udara	II-233
II.3.4.2 Gas Rumah Kaca (GRK)	II-235
II.3.5 Respon (Response)	II-236
II.3.4.1 Program Penghijauan.....	II-236
II.3.4.2 Peningkatan Kapasitas Pengawasan.....	II-240
II.IV Risiko Bencana.....	II-242
II.4.1 Driving force.....	II-244
II.4.1.1 Letak Geografis	II-245
II.4.1.2 Kondisi Topografi.....	II-247
II.4.1.3 Kondisi Geologi.....	II-250
II.4.1.4 Peningkatan Jumlah Penduduk	II-257
II.4.1.5 Aktivitas Perekonomian	II-260
II.4.2 Pressure.....	II-263
II.4.2.1 Meningkatnya Luas Penutup Lahan Permukiman.....	II-263
II.4.2.2 Curah Hujan.....	II-269
II.4.2.2 Meningkatnya Sampah Tak Terkelola	II-270

II.4.2.3 Meningkatnya Emisi Gas Rumah Kaca	II-275
II.4.2.4 Lahan Kritis	II-284
II.4.2.5 Jasa Lingkungan	II-285
II.4.3 State	II-289
II.4.3.1 Indeks Kualitas Lahan	II-289
II.4.3.2 Kejadian Bencana	II-290
II.4.4 Impact	II-319
II.4.4.1 Dampak Bencana	II-320
II.4.4.2 Penyakit Pascabencana	II-321
II.4.4.2 Kondisi Indeks Risiko Bencana	II-322
II.4.5 Rensponses	II-322
II.4.5.1 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	II-323
II.4.5.2 Dokumen Kajian Risiko Bencana	II-327
II.4.5.3	II-329
II.4.5.6 Peningkatan Kapasitas Kebencanaan	II-332
II.4.5.7 Program Gule Kabung	II-335
II.5 Perkotaan	II-338
II.5.1 Driving forces	II-341
II.5.2 Pressures	II-347
II.5.3 States	II-357
II.5.4 Impacts	II-369
II.5.4.1 Pengangguran dan kemiskinan	II-370
II.5.4.2 Penurunan kualitas udara	II-372
II.5.4.4 TPA Sampah yang Melebihi Kapasitas	II-374
II.5.4.5 Gangguan estetika dan kebauan	II-376
II.5.4.6 Pencemaran air dan penyakit	II-377
Banjir	II-380
II.5.4.7 Kenaikan suhu rata-rata (pemanasan global)	II-382
II.5.5 Responses	II-385
II.5.5.1 Respon pada driving forces	II-385
II.5.5.2 Respon pada pressures	II-389
II.5.5.3 Respon pada states	II-395
II.5.5.4 Respon pada impacts	II-402
II.6 Tata Kelola	II-405
II.6.1 Driving Force	II-413
II.6.1.1 Perizinan	II-413

II.6.1.2 Produk hukum bidang pengelolaan lingkungan hidup.....	II-421
II.6.1.3 Anggaran pengelolaan lingkungan	II-423
II.6.1.4 Pendapatan Asli Daerah	II-425
II.6.2 Pressure.....	II-426
II.6.2.1 Pengaduan Masyarakat	II-426
II.6.3 State.....	II-428
II.6.3.1 Jumlah personel dalam pengelolaan lingkungan hidup	II-428
II.6.4 Impact	II-432
II.6.4.1 Status Pengaduan Masyarakat.....	II-432
II.6.5 Response	II-438
II.6.5.2 Program yang diinisiasi masyarakat	II-441
II.6.5.3 Penghargaan lingkungan hidup.....	II-445
 BAB III ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	 III-1
III.1 Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup	III-2
III.2 Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah	III-6
III.3 Kerusakan Pesisir dan Laut	III-9
III.4 Belum Optimalnya Tata Kelola dan Manajemen Lingkungan Hidup	III-13
III.5 Eksploitasi dan Alih Fungsi Lahan	III-16
III.6 Penurunan Kualitas Air	III-18
 BAB IV INOVASI LINGKUNGAN HIDUP.....	 IV-1
IV.1. Inovasi Pengelolaan Lahan	IV-2
IV.2. Inovasi "GULE KABUNG	IV-20
IV.3. Inovasi Persampahan	IV-22
IV.5. Inovasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTS EBT.....	IV-37
 BAB V PENUTUP.....	 V-1
IV.1. Kesimpulan	V-1
IV.2. Rekomendasi Tindak Lanjut.....	V-6
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN 1 PENGOLAHAN DATA ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP	
 LAMPIRAN II TABEL DATA ALAM DIKPLHD TAHUN 2023	
 LAMPIRAN III PETA TEMATIK	
 LAMPIRAN IV SK TIM POKJA PENYUSUN DIKPLHD	

LAMPIRAN V TAHAPAN PENYUSUNAN

LAMPIRAN VI DOKUMENTASI

LAMPIRAN VII CURICULLUM VITAE TIM PENYUSUN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Luas Wilayah Daratan dan Persebaran Penduduk	I-4
Tabel 1. 2 Pulau-Pulau Bernama Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	I-4
Tabel 1. 3 Karakteristik Bentang Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I-9
Tabel 1. 4 Luas Kawasan Hutan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I-12
Tabel 1. 5 Potensi Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I-15
Tabel 1. 6 Potensi Bahan Galian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I-16
Tabel 2.1. 1 Luas Kawasan Lindung dan Budidaya Beserta Lahan Eksistingnya	II-21
Tabel 2.1. 2 Luasan Hutan Berdasarkan Fungsinya.....	II-27
Tabel 2.1. 3 Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian	II-35
Tabel 2.1. 4 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama.....	II-59
Tabel 2.1. 5 Alokasi Pemanfaatan Ruang Laut Dalam RZWP3K.....	II-63
Tabel 2.1. 6 Perbandingan Luas Lahan Kritis Tahun 2018 dan 2022	II-75
Tabel 2.1. 7 Luasan lahan kritis berdasarkan wilayah administrasi.....	II-76
Tabel 2.1. 8 Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering.....	II-78
Tabel 2.1. 9 Usulan Nilai IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-88
Tabel 2.1. 10 Emisi GRK periode tahun 2018 – 2020	II-96
Tabel 2.1. 11 Status Keanekaragaman Hayati Kepulauan Bangka Belitung	II-100
Tabel 2.1. 12 Indikasi Arahan Zonasi Pola Ruang Revisi RTRWP.....	II-104
Tabel 2.1. 13 Jenis Bibit yang Ditanam pada Kegiatan RHL.....	II-120
Tabel 2.1. 14 Realisasi Penanaman RHL	II-121
Tabel 2.1. 15 Kegiatan Reboisasi Intensif Sepanjang Tahun 2022	II-124
Tabel 2.1. 16 Progress IGRK Kabupaten/Kota	II-135
Tabel 2.1. 17 Aksi Pembangunan Rendah Karbon Melalui Aksara.....	II-137
Tabel 2.1. 18 Lokasi ProKlim Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022.....	II-145
Tabel 2.1. 19 Lokasi ProKlim tahun 2023 pendanaan GCF.....	II-151
Tabel 2.1. 20 Lokasi ProKlim tahun 2023 pendanaan APBD.....	II-152
Tabel 2.1. 21 Luasan Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung...	II-155
Tabel 2.1. 22 Arahan Pelaksanaan Mitigasi Berdasarkan Wilayah Administrasi.....	II-157
Tabel 2.1. 23 Arahan Pelaksanaan Mitigasi Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan.....	II-158
Tabel 2.1. 24 Perhutanan Sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-160
Tabel 2.1. 25 Lokasi Pengambilan Data Dan Informasi Kehati	II-161
Tabel 2.1. 26 Penangkaran Satwa	II-163
Tabel 2.2. 1 Kolong yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-168

Tabel 2.2. 2 Tabel informasi kependudukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-172
Tabel 2.2. 3 Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum Tahun 2022.....	II-174
Tabel 2.2. 4 Dinamika Perubahan Luasan Penutup Lahan Tahun 2018-2021	II-178
Tabel 2.2.5 Beban Pencemaran yang Dihasilkan Sektor Industri.....	II-181
Tabel 2.2.6 Status Mutu Sungai Baturusa dan Sungai Buding tahun 2022	II-185
Tabel 2.2.7 Kualitas air hujan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022...	II-189
Tabel 2.2.8 Beberapa Rekomendasi Dalam Dokumen Rencana Aksi.....	II-207
Tabel 2.3. 1 Perhitungan Indeks Kualitas Udara	II-227
Tabel 2.3. 2 Kategori Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota Tahun 2023	II-229
Tabel 2.3. 3 Lokasi ProKlim yang berbatasan/berdekatan dengan Kawasan Hutan...	II-238
Tabel 2.3. 4 Lokasi ProKlim Berdekatan dengan Kawasan Hutan	II-239
Tabel 2.4. 1 Kelas Kemiringan Lereng Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-250
Tabel 2.4. 2 Jenis Kendaraan Bermotor dan Bahan Bakar Tahun 2022.....	II-279
Tabel 2.4. 3 Jenis Kendaraan Bermotor dan Bahan Bakar Tahun 2021.....	II-279
Tabel 2.4. 4 Perbandingan Luas Tutupan Hutan Tahun 2019-2021	II-290
Tabel 2.4. 5 Kejadian Bencana Alam Cuaca Ekstrem.....	II-294
Tabel 2.4. 6 Kejadian Bencana Kebakaran	II-307
Tabel 2.4. 7 Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	II-311
Tabel 2.4. 8 Kejadian Bencana Banjir dan Banjir Rob.....	II-315
Tabel 2.4. 9 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	II-324
Tabel 2.4. 10 Produk Hukum Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020-2023.....	II-331
Tabel 2.5. 1 Jumlah Penduduk Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022	II-341
Tabel 2.5. 2 Rata-rata Lama Sekolah di Kepulauan Bangka Belitung	II-344
Tabel 2.5. 3 Penggunaan Kendaraan Pribadi Tahun 2021 dan 2022.....	II-354
Tabel 2.5. 4 Timbulan Sampah Tahun 2022	II-368
Tabel 2.5. 5 Kondisi TPA di Kabupaten/Kota Tahun 2022.....	II-374
Tabel 2.5. 6 Kawasan Kumuh di Pangkalpinang.....	II-377
Tabel 2.5. 7 Jenis Penyakit Utama Penduduk	II-379
Tabel 2.5. 8 Daftar Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi 2022	II-392
Tabel 2.5. 9 Penerimaan Penghargaan Adipura Kabupaten/Kota	II-394
Tabel 2.5. 10 Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2020-2021.....	II-396
Tabel 2.5. 11 Kebijakan Daerah Menanggapi Timbulan Sampah	II-396
Tabel 2.5. 12 Perbandingan Biaya Pengelolaan Sampah dan PDRB.....	II-404
Tabel 2.6. 1 Kriteria Nilai IKLH	II-407
Tabel 2.6. 2 Peraturan Perundangan Turunan UU 11 Tahun 2021	II-415
Tabel 2.6. 3 Daftar IUPJLWA Yang Sudah Mempunyai Izin	II-419
Tabel 2.6. 4 Daftar Perusahaan Berizin Penyimpanan Dan Pengumpulan LB3	II-421

Tabel 2.6. 5 Produk Hukum Bidang Lingkungan Hidup.....	II-422
Tabel 2.6. 6 Pendapatan Asli Daerah	II-425
Tabel 2.6. 7 Daftar Aduan Masyarakat Terkait Masalah Lingkungan.....	II-426
Tabel 2.6. 8 Tingkat Pendidikan Pegawai di DLHK Babel	II-429
Tabel 2.6. 9 Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	II-431
Tabel 2.6. 10 Daftar Progress Pengaduan Masyarakat	II-434
Tabel 2.6. 11. Agenda Kegiatan BECAK Babel Tahun 2022 – 2023.....	II-442
Tabel 2.6. 12 Tren Pencapaian ADIPURA Tahun 2013 - 2022.....	II-447
Tabel 2.6. 13 Daftar Sekolah Adiwiyata Provinsi Tahun 2023	II-448
Tabel 2.6. 14 Daftar sekolah adiwiyata Provinsi Tahun 2023	II-449
Tabel 2.6. 15 Daftar Inovasi Bank Sampah	II-455
Tabel 3. 1 Rekapitulasi Nilai Isu Lingkungan Hidup.....	III-4
Tabel 3. 2 Gap Capaian Pengelolaan Sampah dan Target Jakstrada.....	III-8
Tabel 4.1 Realisasi Reklamasi Darat PT. Timah,TbK 2011-2020	IV-14
Tabel 4.2 Daftar Literasi Lingkungan Dibidang Persampahan tahun 2019-2020	IV-26
Tabel 4.3 Data Reklamasi di perairan Laut Matras dan Pesaren	IV-36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I-3
Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I-7
Gambar 1.3 Jumlah Penduduk dan Persentase Per Kabupaten/Kota	I-8
Gambar 1.4 Peta Bentang Lahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I-9
Gambar 1. 5 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Kep. Bangka Belitung 2019	I-12
Gambar 1.6 Pertumbuhan Produksi Perikanan	I-14
Gambar 1.7 Distribusi Sumber Daya Mineral dan Batuan	I-15
Gambar 1.8 Peta Sebaran Pariwisata Unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..	I-18
Gambar 2.1. 1 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-6
Gambar 2.1. 2 Kerangka DPSIR Tata Guna Lahan	II-8
Gambar 2.1. 3 Realisasi Investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-9
Gambar 2.1. 4 Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-10
Gambar 2.1. 5 Perbandingan luasan kawasan lindung dan budidaya pada RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034	II-15
Gambar 2.1. 6 Perubahan Penutup Lahan Tahun 2020-2021 dalam Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034	II-16
Gambar 2.1. 7 Perubahan Penutup/Penggunaan Lahan Tahun 2020-2021 dalam Pola Ruang Kawasan Lindung RTRW	II-17
Gambar 2.1. 8 Kenampakan Penutup Lahan Pertanian Lahan Kering Campur Semak Hasil Konversi Lahan Belukar di Kabupaten Bangka Tengah melalui Citra Satelit Perekaman Bulan Juli 2021 dan Juli 2022	II-19
Gambar 2.1. 9 Penutup Lahan Hutan yang Berubah Sepanjang 2020-2021 dalam Pola Ruang Kawasan Budidaya RTRW	II-20
Gambar 2.1. 10 Penutup Lahan Pertanian Lahan Kering Campur Semak dalam Pola Ruang Kawasan Lindung RTRW 2014 - 2034	II-22
Gambar 2.1. 11 Penutup Lahan Perkebunan dalam Pola Ruang Kawasan Lindung RTRW 2014 - 2034	II-22
Gambar 2.1. 12 Penutup Lahan Eksisting Pertambangan dalam Pola Ruang Hutan Lindung dan Hutan Konservasi RTRW 2014 - 2034	II-23
Gambar 2.1. 13 Penutup Lahan Eksisting Tambak Udang Vaname hingga ke Pola Ruang Sempadan Pantai	II-24
Gambar 2.1. 14 Persentase Luas Penutup Hutan Berdasarkan Luas Keseluruhannya yang Tersebar dalam Kawasan Lindung dan Budidaya RTRW	II-25

Gambar 2.1. 15 Perubahan Penutup Lahan Sepanjang Tahun 2020-2021 Terhadap Fungsi Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-28
Gambar 2.1. 16 Pertanian Lahan Kering Campur Semak dalam Hutan Produksi.....	II-29
Gambar 2.1. 17 Sebaran lahan gambut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-31
Gambar 2.1. 18 Aktivitas Penambangan di dalam lahan gambut.....	II-32
Gambar 2.1. 19 Kerusakan Lahan Gambut di Kabupaten/Kota.....	II-33
Gambar 2.1. 20 Kelas Penutup Lahan Pertanian Lahan Kering Campur Semak	II-34
Gambar 2.1. 21 Kawasan Pertanian dalam Pola Ruang RTRW	II-35
Gambar 2.1. 22 Kesesuaian penutup lahan eksisting 2021 terhadap	II-35
Gambar 2.1. 23 Pola Sebaran Areal Pertambangan Timah dari Citra Sentinel 2A	II-38
Gambar 2.1. 24 Dinamika Perubahan Penutup Lahan 2020 menjadi Pertambangan...	II-39
Gambar 2.1. 25 Pola Ruang Pertambangan dalam RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034	II-40
Gambar 2.1. 26 Penutup lahan pertambangan yang mulai berubah menjadi perkebunan di Kabupaten Bangka	II-41
Gambar 2.1. 27 Peningkatan luasan Perkebunan tahun 2016 – 2021.....	II-42
Gambar 2.1. 28 Pola Ruang Perkebunan RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .	II-43
Gambar 2.1. 29 Kesesuaian Penutup Lahan Eksisting terhadap Pola Ruang Perkebunan RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-44
Gambar 2.1. 30 Persebaran tambak udang di pesisir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Perekaman Citra Planetscope.....	II-45
Gambar 2.1. 31 Tambak Udang Vaname Di Kabupaten Bangka.....	II-46
Gambar 2.1. 32 Perbandingan luasan tambak tahun 2018 – 2021	II-47
Gambar 2.1. 33 Tambak Udang Vaname Eksisting di Kabupaten Belitung Timur Berdasarkan Citra Planetscope Perekaman 18 Desember 2022	II-48
Gambar 2.1. 34 Tambak Udang Vaname Eksisting di Kabupaten Belitung Timur.....	II-48
Gambar 2.1. 35 Hotspot yang Teridentifikasi Sepanjang Tahun 2022 Berdasarkan Citra Satelit Aqua, NOAA20 dan SNPP	II-49
Gambar 2.1. 36 Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar di Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Februari 2022	II-50
Gambar 2.1. 37 Perubahan luasan penutup hutan tahun 2015 – 2021	II-52
Gambar 2.1. 38 Persebaran Deforestasi Hutan Antara Tahun 2015 - 2021	II-53
Gambar 2.1. 39 Persentase luasan penutup lahan hutan mengalami deforestasi	II-54
Gambar 2.1. 40 Degradasi Hutan tahun 2015-2021	II-54
Gambar 2.1. 41 Wilayah Izin Pertambangan Mineral Logam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-55
Gambar 2.1. 42 Bentang Alam di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-56

Gambar 2.1. 43 Formasi Geologi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-56
Gambar 2.1. 44 Potensi Mineral Non Logam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..	II-57
Gambar 2.1. 45 Izin Penambangan Mineral Non Logam Sepanjang Tahun 2022.....	II-58
Gambar 2.1. 46 Pertanian Lahan Kering Campur Semak di Kab Bangka Selatan	II-60
Gambar 2.1. 47 Perkebunan di Kabupaten Bangka Barat dari Citra Satelit	II-61
Gambar 2.1. 48 Lahan Pertambangan di Kabupaten Belitung Timur dari Citra	II-61
Gambar 2.1. 49 Peta Rencana Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040	II-63
Gambar 2.1. 50 Mangrove <i>Rhizophora apiculata</i> di Muara Sungai Jering Menduyung Kabupaten Bangka Barat.....	II-64
Gambar 2.1. 51 Persebaran Mangrove di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-66
Gambar 2.1. 52 Lokasi Mangrove dengan Status Rusak di Kabupaten Bangka.....	II-67
Gambar 2.1. 53 Kondisi Mangrove di Pulau Kayuanak di Kabupaten Bangka	II-68
Gambar 2.1. 54 Ekosistem Terumbu Karang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..	II-69
Gambar 2.1. 55 Terumbu Karang Tertutup Sedimen di Pulau Ketawai	II-70
Gambar 2.1. 56 Ekosistem Lamun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-71
Gambar 2.1. 57 Ekosistem Lamun di Pulau Ketawai di Kabupaten Bangka Tengah	II-72
Gambar 2.1. 58 Aktivitas Penambangan Ilegal di Teluk Kelabat Dalam	II-72
Gambar 2.1. 59 Peta Lahan Kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-74
Gambar 2.1. 60 Tingkat kekritisan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-75
Gambar 2.1. 61 Lahan Kritis di Wilayah TWA Permisan.....	II-77
Gambar 2.1. 62 Wilayah DAS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-81
Gambar 2.1. 63 Citra Multitemporal Tahun 2021-2022 di Wilayah DAS Diniang	II-82
Gambar 2.1. 64 Penutup Lahan Pertambangan dalam wilayah DAS	II-83
Gambar 2.1. 65 Sedimentasi di Muara Jelitik	II-84
Gambar 2.1. 66 Trend Nilai IKLH dan IKL di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-86
Gambar 2.1. 67 Lokasi Penambangan Pasir Kuarsa Kabupaten Belitung Timur	II-89
Gambar 2.1. 68 (a) Kondisi Bumi Tanpa GRK suhu -18°C (b) dengan GRK suhu 15°C	II-90
Gambar 2.1. 69 Konsentrasi CO ₂ di atmosfer tahun 2021.....	II-91
Gambar 2.1. 70 Konsentrasi CO ₂ di atmosfer tahun 2022.....	II-91
Gambar 2.1. 71 Trend perubahan suhu udara global 2011 - 2021	II-92
Gambar 2.1. 72 Tren kenaikan suhu udara sepanjang 2017-2022	II-93
Gambar 2.1. 73 Emisi dan Serapan sepanjang Tahun 2020-2021	II-97
Gambar 2.1. 74 Perubahan Garis Pantai Akresi.....	II-98
Gambar 2.1. 75 Perubahan Garis Pantai Abrasi	II-99
Gambar 2.1. 76 Pola Ruang Revisi RTRW Prov Kepulauan Bangka Belitung	II-103
Gambar 2.1. 77 Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	II-107

Gambar 2.1. 78 Sosialisasi Integrasi RZWP-3-K ke dalam RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-108
Gambar 2.1. 79 Alur Proses Aplikasi Si Tawas	II-109
Gambar 2.1. 80 Pembentukan Satgas Tambang Timah Ilegal tanggal 19 Juni 2022.	II-110
Gambar 2.1. 81 Alur Proses Pengaduan Melalui Lapor.Pak	II-111
Gambar 2.1. 82 Larangan Penambangan Timah secara Ilegal di Sekitar Komplek Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-112
Gambar 2.1. 83 Penertiban Tambang Timah Di Perairan Teluk Kelabat.....	II-112
Gambar 2.1. 84 Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Menerima Audiensi Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia Babel	II-113
Gambar 2.1. 85 Rakor Gugus Tugas Reforma agraria tanggal 19 April 2022.....	II-114
Gambar 2.1. 86 Sosialisasi dan Inventarisasi Keterlanjuran Kegiatan Terbangun di Dalam Kawasan Hutan oleh KPHP Jebu Bembang Antan dan KPHP Rambat Menduyung.....	II-117
Gambar 2.1. 87 Sosialisasi dan Inventarisasi Keterlanjuran Kegiatan Terbangun di Dalam Kawasan Hutan oleh KPHP Sungai Sembulan 2023	II- 117
Gambar 2.1. 88 Verifikasi Lapangan Keterlanjuran Kegiatan Terbangun di Dalam Kawasan Hutan oleh KPHP Jebu Bembang Antan.....	II-118
Gambar 2.1. 89 Hasil Inventarisasi Kegiatan Terbangun Dalam Kawasan Hutan di UPT KPHP Sigambir Kotawaringin dan Sungai Sembulan.....	II-118
Gambar 2.1. 90 Lokasi Penanaman RHL Hingga Oktober 2022	II-119
Gambar 2.1. 91 Kegiatan Hijau Biru Babelku	II-123
Gambar 2.1. 92 Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Keposang,.....	II-124
Gambar 2.1. 93 Kegiatan GNP DAS di Kabupaten Bangka Selatan	II-126
Gambar 2.1. 94 Surat Edaran Gerakan Jumat Bersih dan Babel Menanam	II-127
Gambar 2.1. 95 Rapat Pembahasan Pemanfaatan FABA dalam Reklamasi Lahan Bekas Tambang.....	II-128
Gambar 2.1. 96 Penggunaan Kompos Block Untuk Lahan Bekas Tambang	II-129
Gambar 2.1. 97 Upaya Penegakan Hukum Aktivitas Tambang Ilegal	II-131
Gambar 2.1. 98 Upaya Penegakan Hukum Aktivitas Pembukaan Kebun di dalam Hutan Produksi Sungai Sembulan	II-132
Gambar 2.1. 99 Dokumentasi Rapat Koordinasi Dan Peningkatan Kapasitas Pelaporan Inventarisasi Emisi GRK Tahun 2022	II-136
Gambar 2.1. 100 Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Rendah Karbon	II-140
Gambar 2.1. 101 Tahapan pelaksanaan ProKlim.....	II-142
Gambar 2.1. 102 Kategori ProKlim.....	II-143
Gambar 2.1. 103 Sosialisasi Proklm ke Lingkungan Jelitik, Kabupaten Bangka	II-144

Gambar 2.1. 104 Lokasi ProKlim Tahun 2022	II-145
Gambar 2.1. 105 Contoh Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim	II-146
Gambar 2.1. 106 Contoh Kegiatan Mitigasi Perubahan iklim	II-147
Gambar 2.1. 107 Aspek Kelembagaan dan Dukungan Keberlanjutan.....	II-147
Gambar 2.1. 108 Kegiatan Kampung Amoi Kelurahan Tanjung	II-148
Gambar 2.1. 109 Penyerahan Penghargaan ProKlim	II-149
Gambar 2.1. 110 Lembar Excel Isian Proklm	II-150
Gambar 2.1. 111 Sosialisasi FoluNet Sink Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-154
Gambar 2.1. 112 Peta Arahana Pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim...	II-156
Gambar 2.1. 113 Penyerahan SK Perhutanan Sosial.....	II-159
Gambar 2.1. 114 Lokasi Survei Pengambilan Data dan Informasi Kehati	II-162
Gambar 2.1. 115 Proses Penyelamatan Satwa Jenis Trenggiling.....	II-163
Gambar 2.1. 116 Pelepasliaran Penyu Hijau yang Dilindungi	II-164
Gambar 2.1. 117 Sosialisasi Pencegahan Karhutla	II-164
Gambar 2.1. 118 Kegiatan Peran Saka Nasional tahun 2022	II-165
Gambar 2.2. 1 Peta jaringan sungai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-167
Gambar 2.2. 2 Diagram DDPSIR Framework kualitas air	II-170
Gambar 2.2. 3 Sungai di Kabupaten Belitung Timur.....	II-171
Gambar 2.2. 4. Kebutuhan Air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-173
Gambar 2.2. 5. Trend pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..	II-175
Gambar 2.2.6 Kondisi Lahan Kritis Di Desa Deniang	II-179
Gambar 2.2.7. Peta Sebaran Status Mutu Air Tahun 2021-2022	II-187
Gambar 2.2.8 IKA Provinsi Kepulauan bangka Belitung Tahun 2015-2022.....	II-188
Gambar 2.2. 9. Curah hujan bulanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-189
Gambar 2.2.10. Lokasi pemantauan kualitas air laut Tahun 2022	II-191
Gambar 2.2.11 Kualitas air laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022....	II-192
Gambar 2.2.12 Tren Nilai IKA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-193
Gambar 2.2.13. Jumlah Pengguna Sumber Air Minum	II-194
Gambar 2.2. 14 Pencemaran Sungai Oleh Sampah Plastik.....	II-195
Gambar 2.2.15 Gangguan Estetik, Bau Dan Pemandangan Pada Sungai	II-200
Gambar 2.2.16. Kura-Kura Air Tawar Di Kebun Raya Pangkalpinang.....	II-200
Gambar 2.2.17. Persentase Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak.....	II-201
Gambar 2.2.18. Sarana Pembuangan Limbah Domestik Tahun 2021	II-203
Gambar 2.2.19 Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020	II-206
Gambar 2.2.20 Penyampaian Informasi Pengolahan Sampah Kepada Siswa.....	II-209
Gambar 2.2.21 Aksi bersih sampah bersama berbagai instansi	II-209
Gambar 2.2.22 Jamban Sehat dan Bioseptic Tank Dibangun Melalui PHBS.....	II-210

Gambar 2.2.23 Konservasi Air Di Rumah Tangga Dengan	II-211
Gambar 2.2.24 Konservasi Sumber Air Di Lingkungan Masyarakat.....	II-212
Gambar 2.2. 25 Pemanenan Air Hujan Mandiri Dirumah Warga	II-213
Gambar 2.3. 1 Visualisasi Skematik DPSIR Kualitas Udara.....	II-217
Gambar 2.3. 2 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bangka Belitung	II-218
Gambar 2.3. 3 Pertumbuhan Kendaraan Bermotor	II-219
Gambar 2.3. 4 Konsumsi Bahan Bakar Bidang Transportasi.....	II-220
Gambar 2.3. 5 Konsumsi Bahan Bakar Bidang Energi.....	II-221
Gambar 2.3. 6 Sumber Pencemar Gas NO ₂ Tahun 2023.....	II-222
Gambar 2.3. 7 Sumber Pencemar Gas SO ₂ Tahun 2023	II-223
Gambar 2.3. 8 Profil Gas NO ₂ Per Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	II-224
Gambar 2.3. 9 Profil Gas SO ₂ Per Kabupaten/Kota Tahun 2023	II-224
Gambar 2.3. 10 Profil Gas NO ₂ Berdasarkan Titik Pantau	II-225
Gambar 2.3. 11 Profil Gas SO ₂ Berdasarkan Titik Pantau.....	II-226
Gambar 2.3. 12 Hubungan Indeks Kualitas Udara dan Konsentrasi Pencemar	II-228
Gambar 2.3. 13 Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota Tahun 2023	II-229
Gambar 2.3. 14 Profil Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota	II-230
Gambar 2.3. 15 Hubungan Indeks Kualitas Udara dengan PDRB	II-231
Gambar 2.3. 16 Hubungan Indeks Kualitas Udara dengan Kendaraan Bermotor	II-232
Gambar 2.3. 17 Profil Suhu Tahun 2022	II-234
Gambar 2.3. 18 Profil Suhu Rata Rata 5 Tahun	II-234
Gambar 2.3. 19 Hubungan Gas Rumah Kaca dengan Penggunaan Bahan Bakar	II-235
Gambar 2.3. 20 Aksi – Aksi Program Hijau Biru Babelku.....	II-237
Gambar 2.3. 21 Contoh Kawasan Hijau di Lokasi ProKlim Desa Air Limau	II-240
Gambar 2.4. 1 Kerangka DPSIR untuk analisis risiko bencana	II-244
Gambar 2.4. 2 A kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-246
Gambar 2.4. 3 Perbandingan Luas Kabupaten Kota dalam Persen	II-246
Gambar 2.4. 4 Peta Ketinggian Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-249
Gambar 2.4. 5 Peta Kemiringan Lereng Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-249
Gambar 2.4. 6 Distribusi batuan granitoid pada The Southeast Asian Tin Belt.	II-251
Gambar 2.4. 7 Potensi timah yang berasosiasi dengan batuan granit.....	II-252
Gambar 2.4. 8 Ppotensi timah yang berasosiasi granit di Pulau Belitung.	II-252
Gambar 2.4. 9 Jalur Mineralisasi dan Sebaran Lokasi Cadangan Mineral.....	II-253
Gambar 2.4. 10 Sabuk Timah Asia Tenggara melewati Wilayah Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung hingga ke Kalimantan Bagian Timur.	II-253
Gambar 2.4. 11 Peta Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	II-254

Gambar 2.4. 12 Analisis DPSIR pada kejadian bencana terkait dengan PETI.	II-255
Gambar 2.4. 13 Dinamika Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ...	II-259
Gambar 2.4. 14 Kepadatan Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-260
Gambar 2.4. 15 Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 dalam Satuan Persen	II-261
Gambar 2.4. 16 PDRB Per Kapita Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2022	II-262
Gambar 2.4. 17 Peta Penutup Lahan Permukiman Tahun 2019	II-264
Gambar 2.4. 18 Peta Penutup Lahan Permukiman Tahun 2020	II-265
Gambar 2.4. 19 Peta Penutup Lahan Permukiman Tahun 2021	II-265
Gambar 2.4. 20 Tumpang Susun Peta Penutupan Lahan Permukiman Tahun 2021 Dengan Data Kawasan Hutan	II-266
Gambar 2.4. 21 Tangkapan Layar Hasil Perekaman Citra Google Earth.	II-266
Gambar 2.4. 22 Hasil Tumpang Susun Data Penutup Lahan BPKH Wilayah XIII Tahun 2015 Dengan Data Kawasan Hutan	II-267
Gambar 2.4. 23 Hasil Tumpang Susun Data Penutup Lahan Permukiman Tahun 2021 Dan Data Kawasan Hutan Di Lokasi Yang Sama	II- 267
Gambar 2.4. 24 Peta Penutupan Lahan Pertanian Lahan Kering, Pertanian Lahan Kering Campur Semak, Dan Sawah Tahun 2021	II-268
Gambar 2.4. 25 Grafik Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Tahun 2022.....	II-269
Gambar 2.4. 26 Profil Persentase Pengurangan Sampah Di Bangka Belitung	II-271
Gambar 2.4. 27 Profil Persentase Penanganan Sampah Di Bangka Belitung	II-272
Gambar 2.4. 28 Profil Persentase Sampah Terkelola di Bangka Belitung	II-272
Gambar 2.4. 29 Persentase Komposisi Sampah Berdasarkan Jenisnya	II-272
Gambar 2.4. 30 Profil Emisi GRK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-276
Gambar 2.4. 31 Profil Emisi GRK Sektor Energi Bangka Belitung.....	II-277
Gambar 2.4. 32 Penggunaan Bahan Bakar Untuk Transportasi	II-278
Gambar 2.4. 33 Peta Penutup Lahan Pertambangan Tahun 2019	II-281
Gambar 2.4. 34 Peta Penutup Lahan Pertambangan Tahun 2020	II-281
Gambar 2.4. 35 Peta Penutup Lahan Pertambangan Tahun 2021	II-282
Gambar 2.4. 36 Tumpang Susun Penutup Lahan Pertambangan Tahun 2021 Dengan Peta Kawasan Hutan	II-282
Gambar 2.4. 37 Kawasan Hutan Mangrove Di Kabupaten Belitung Timur Rusak Akibat Aktivitas Tambang Illegal.	II-283
Gambar 2.4. 38 Hasil Tangkapan Layar Citra <i>Google Earth</i> Perekaman Bulan September 2018, Salah Satu Lokasi Kolong Yang Berdekatan Dengan Permukiman Warga Di Daerah Kabupaten Bangka.....	II-284

Gambar 2.4. 39 Peta Lahan Kritis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Beserta Luas Per Status Lahan	II-285
Gambar 2.4. 40 Peta Indikatif Jasa Lingkungan Pengatur Iklim	II-286
Gambar 2.4. 41 Peta Indikatif Jasling Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir	II-287
Gambar 2.4. 42 Peta Indikatif Jasling Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam.....	II-288
Gambar 2.4. 43 Tren dan nilai Indeks Kualitas Lahan Tahun 2015-2022	II-290
Gambar 2.4. 44 Jumlah kejadian bencana sepanjang tahun 2022.....	II-291
Gambar 2.4. 45 Sebaran kejadian bencana cuaca ekstrem di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-292
Gambar 2.4. 46 Dampak bencana alam angin puting beliung terhadap rumah penduduk di Kelurahan Ampui.....	II-293
Gambar 2.4. 47 Dampak bencana alam angin puting beliung terhadap rumah penduduk di Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru.....	II-294
Gambar 2.4. 48 Proses pemadaman api kebakaran pada sebuah ruko perusahaan...II-	306
Gambar 2.4. 49 Proses pemadaman api pada kebakaran Gudang Agen Minyak Premium Solar (AMPS) di Manggar Kabupaten Belitung Timur	II-307
Gambar 2.4. 50 Upaya pemadaman api yang berasal dari kejadian bencana karhutla pada tanggal 11 April 2022 di Kelurahan Arung Dalam, ...	II-314
Gambar 2.4. 51 Kondisi kejadian banjir rob yang bersamaan dengan turunnya hujan lebat tanggal 5 Januari 2022 di Kabupaten Bangka Barat.....	II-315
Gambar 2.4. 52 Dokumentasi sebelum helikopter terbang dari Pangkalan Bun ke Tanjungpandan.	II-317
Gambar 2.4. 53 Kondisi rumah warga Pulau Gresik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung terdampak pasca gelombang pasang	II-318
Gambar 2.4. 54 Proses evakuasi awak kapal Roro MV Serasi 1 dari KM Lotus ke kapal milik Basarnas pada tanggal 1 Desember 2022.....	II-319
Gambar 2.4. 55 Peta Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-328
Gambar 2.4. 56 Peta Bahaya Cuaca Ekstrem Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. ..	II-328
Gambar 2.4. 57 Peta Bahaya Karhutla Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-329
Gambar 2.4. 58 Kegiatan Simulasi Penanggulangan Bencana.	II-333
Gambar 2.4. 59 Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla.	II-334
Gambar 2.4. 60 Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana.	II-334
Gambar 2.4. 61 Layanan DLHK pada salah satu kegiatan Program Gule Kabung.	II-336
Gambar 2.4. 62 Sosialisasi Bank Sampah 'EL HA KA'.....	II-336
Gambar 2.4. 63 Gerakan Jumat Bersih.....	II-337
Gambar 2.4. 64 Pembagian Kantong Belanja 'Belanja Asik tanpa Kantong Plastik	II-337

Gambar 2.5.1 Kerangka DPSIR Analisis Perkotaan.....	II-340
Gambar 2.5. 2 Tren Pertambahan Penduduk di Kepulauan Bangka Belitung	II-342
Gambar 2.5. 3 IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022	II-343
Gambar 2.5. 4 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi dengan Nasional	II-345
Gambar 2.5. 5 PDRB ADHB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2022 ..	II-346
Gambar 2.5. 6 Tren Persentase Penggunaan Lahan untuk Aktivitas Antropogenik ..	II-348
Gambar 2.5. 7 Konsumsi Beras dan PDRB ADHK Tahun 2018-2022	II-350
Gambar 2.5. 8 Konsumsi Beras Per Kapita Per Minggu.....	II-351
Gambar 2.5. 9 Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah Tahun 2020-2022 ...	II-352
Gambar 2.5. 10 Nilai IPKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-353
Gambar 2.5. 11 Konsumsi Listrik dan Jumlah Pelanggan PLN Tahun 2016-2022.....	II-355
Gambar 2.5. 12 Konsumsi Listrik Per Kapita Tahun 2016-2022.....	II-356
Gambar 2.5. 13 Konsumsi Energi Listrik dan Pertumbuhan Ekonomi 2016-2022	II-357
Gambar 2.5. 14 Persebaran Kepadatan Penduduk dan Tingkat Pengangguran.....	II-358
Gambar 2.5. 15 Persentase Penduduk Miskin dan TPT Tahun 2017-2022.....	II-359
Gambar 2.5. 16 Tren IKP Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2021	II-360
Gambar 2.5. 17 Produksi dan Konsumsi Beras Tahun 2018-2021	II-361
Gambar 2.5. 18 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	II-362
Gambar 2.5. 19 Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak	II-362
Gambar 2.5. 20 Distribusi Indikasi Jasling Penyediaan Air	II-363
Gambar 2.5. 21 Perbandingan IKU Provinsi, Pangkalpinang, dan Kab. Bangka	II-365
Gambar 2.5. 22 Suhu Rata-rata Unsur Iklim Tahun 2016-2022	II-366
Gambar 2.5. 23 Perbandingan Bahan Bakar Pembangkit Tahun 2020 dan 2021	II-367
Gambar 2.5. 24 Komposisi Sumber Timbulan Sampah Tahun 2022	II-369
Gambar 2.5. 25 Persebaran Penduduk Miskin Di Tujuh Kabupaten/Kota	II-370
Gambar 2.5. 26 Persentase Penduduk Miskin Di Perkotaan dan Pedesaan.....	II-371
Gambar 2.5. 27 Perbandingan IKU Kabupaten/Kota	II-372
Gambar 2.5. 28 Keterkaitan PDRB ADHK dan IKU	II-373
Gambar 2.5. 29 Nilai IKA Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	II-378
Gambar 2.5. 30 Distribusi Indikasi Jasling Tata Aliran Air dan Pengendalian Banjir .	II-380
Gambar 2.5. 31 Proporsi Cara Pengelolaan Sampah di Rumah Tangga	II-381
Gambar 2.5. 32 Emisi Sektor Limbah.....	II-383
Gambar 2.5. 33 Emisi Sektor Energi	II-384
Gambar 2.5. 34 Jumlah Pasangan Subur Peserta KB.....	II-386
Gambar 2.5. 35 Sosialisasi Bank Sampah El Ha Ka	II-400
Gambar 2.6.1 Pejabat Gubernur Kepulauan Babel Nirwasita Tantra dari KLHK.....	II-409
Gambar 2.6. 2 Kerangka DPSIR Tata Kelola	II-410

Gambar 2.6. 3 Model Kolaborasi Pentahelix dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup ..	II-411
Gambar 2.6. 4 Struktur Organisasi DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-429
Gambar 2.6. 5 SOP Proses Pengaduan Masyarakat.....	II-433
Gambar 2.6. 6 Pelaksanaan Verifikasi Aduan Masyarakat.....	II-437
Gambar 2.6. 7 Kegiatan Pengawasan Lingkungan	II-440
Gambar 2.6. 8 Kabupaten yang Meraih Anugerah Adipura	II-447
Gambar 2.6. 9 Sekolah Adiwiyata Provinsi Tahun 2023.....	II-450
Gambar 2.6. 10 Tim Penilai DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Melakukan Penilaian Bank Sampah.....	II-453
Gambar 2.6. 11 Jumlah Peserta PROPER Tahun 2023.....	II-460
Gambar 2.6. 12 PT.Timah Tbk Meraih Proper Emas.....	II-461
Gambar 2.6. 13 Kegiatan Proklamasi Babel	II-462
Gambar 3. 1 Formulir Penilaian Isu Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023.....	III-3
Gambar 3. 2 Perbandingan Keempat Kriteria dalam Isu Prioritas Lingkungan	III-5
Gambar 3. 3 Perubahan Tutupan Mangrove Primer dan Sekunder	III-11
Gambar 3. 4 Praktik Manajemen Lingkungan yang Banyak Diadopsi Di Indonesia ..	III-15
Gambar 3. 5 Tren Alih Fungsi Lahan di Kepulauan Bangka Belitung.....	III-17
Gambar 3. 6 Tren Kualitas Air yang Ditandai dengan IKA.....	III-18
Gambar 4.1 Visualisasi Skematik Inovasi Tata Guna Lahan	IV-3
Gambar 4. 2 Jejaring Inovasi Hijau Biru Babelku	IV-4
Gambar 4.3 Inisiasi awal dan launching program Hijau Biru Babelku	IV-5
Gambar 4.4 Pembentukan Satgas Pertambangan Ilegal	IV-5
Gambar 4.5 Kegiatan Hijau Biru Babelku.....	IV-6
Gambar 4.6 Program Penanaman yang dilakukan oleh PJ. Gubernur	IV-7
Gambar 4.7 Edaran Gubernur untuk Jumat bersih dan Babel Menanam	IV-8
Gambar 4.8 Proses Pembuatan Kompos Babel	IV-10
Gambar 4. 9 Aplikasi "Si Terbit DLHK" dan proses pengecekan dan pemantauan penggunaan lahan	IV-11
Gambar 4.10 Kegiatan Sedekah Pohon	IV-13
Gambar 4.11 Reklamasi PT. Timah Air Jangkang	IV-14
Gambar 4. 12 Reklamasi Lahan Pasca Tambang Dengan Tanaman Produktif	IV-15
Gambar 4.13 MOU Kegiatan Literasi Lingkungan	IV-16
Gambar 4.14 Pembelian bibit tanaman program literasi lingkungan oleh PT. RBT	IV-17
Gambar 4. 15 Lokasi penanaman Tanaman Energi-IA ITB	IV-18
Gambar 4.16 Penanaman Pohon penghijauan oleh Polda Kep.Babel	IV-18

Gambar 4.17 Beberapa Program Gule Kabung PJ. Gubernur di 7 Kabupaten/Kota ..	IV-20
Gambar 4. 18 Beberapa Program Gule Kabung PJ. Gubernur Penghijauan	IV-21
Gambar 4.19 Penyerapan aspirasi masyarakat dalam Program Gule Kabung	IV-21
Gambar 4. 20 Visualisasi Skematik Inovasi Persampahan	IV-22
Gambar 4.21 Jejaring Inovasi Pelet Sampah	IV-23
Gambar 4.22 Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam MOU antara PLN dengan Pemprov Babel Tahun 2019	IV-24
Gambar 4.23 Proses Pembuatan Sampah.....	IV-25
Gambar 4.24 Proses Pembuatan Pelet Sampah dan Tindak lanjut MOU	IV-25
Gambar 4.25 Komposter yang digunakan dalam pelatihan	IV-26
Gambar 4.26 Pelatihan Komposting dan sedekah pohon tahun 2023 kepada Pramuka SMA di Pangkalpinang	IV-28
Gambar 4.27 Pelatihan pembuatan Ecobrick	IV-29
Gambar 4.28 Proses Pembuatan Eco Enzim	IV-30
Gambar 4.29 Coastal Clean Up PLN- Prov.Kep.Babel , 11 Juni 2023.....	IV-31
Gambar 4.30 Insinerator di Kawasan Industri Sadai	IV-32
Gambar 4.31 Bimbingan Transplantasi karang di Desa Tuing	IV-35
Gambar 4.32 Restocking telur cumi tahun 2020	IV-35
Gambar 4.33 Trasplantasi Terumbu Karang Dan Fish Shelter Tahun 2020	IV-36
Gambar 4.34 Implementasi Inovasi "Si Terbit DLHK" terhadap pesisir	IV-37
Gambar 4.35 Audiensi Gubernur dalam Pengembangan PLTS	IV-38
Gambar 4.36 PLTS Rooftop di Labkesda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	IV-38

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi kepulauan dengan berbagai potensi sumber daya alam yang dimiliki baik kekayaan sumber daya alam pesisir, pertanian, perkebunan serta berbagai potensi mineral tambang terutama timah dengan berbagai mineral ikutannya. Sebagai provinsi yang memiliki berbagai potensi sumber daya alam tentunya terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaannya di satu sisi tuntutan pemenuhan ekonomi daerah namun di sisi yang lain terdapat potensi kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Keberhasilan pembangunan sering diukur dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi namun tetap harus memperhatikan lingkungan sebagai daya dukung dan faktor pembangunan berkelanjutan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memandang aspek keberlanjutan pembangunan menjadi fokus dan tantangan yang harus dipersiapkan sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi arah pembangunan yang tidak hanya fokus terhadap peningkatan perekonomian daerah namun tetap menjaga kelestarian lingkungan serta keberlanjutan sosial masyarakat.

Jika dilihat struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh sektor primer seperti sektor pertanian dan pertambangan serta sektor sekunder seperti industri pengolahan. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa visi provinsi adalah *Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai wilayah Agri-Bahari yang maju dan berwawasan Lingkungan, Didukung oleh Sumber Daya Manusia Handal dan Pemerintah yang Amanah Menuju Masyarakat*

Sejahtera. Dalam rangka mencapai visi tersebut, salah satunya dicapai dengan misi pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah.

Potensi Permasalahan lingkungan kedepan akan semakin meningkat dengan berbagai aktivitas pembangunan, eksploitasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, perkembangan industry. Permasalahan lingkungan yang dihadapi sekarang dan akan datang tidak bisa diselesaikan dengan tinjauan teknis semata, namun juga dibutuhkan tinjauan kondisi sosial masyarakat karenanya kajian tentang lingkungan hidup dan arah kebijakan yang diambil merupakan kajian interdisipliner karena fenomena lingkungan berkaitan dengan kondisi geografis, biologis, teknologi, politik dan sosial budaya sehingga peranan data- data tersebut sangat dibutuhkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memandang penting dan mempunyai kewajiban menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkan informasi tentang kondisi lingkungan hidup yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, isu lingkungan yang sedang *booming*, penyebab dan dampak permasalahannya serta respon pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup tersebut.

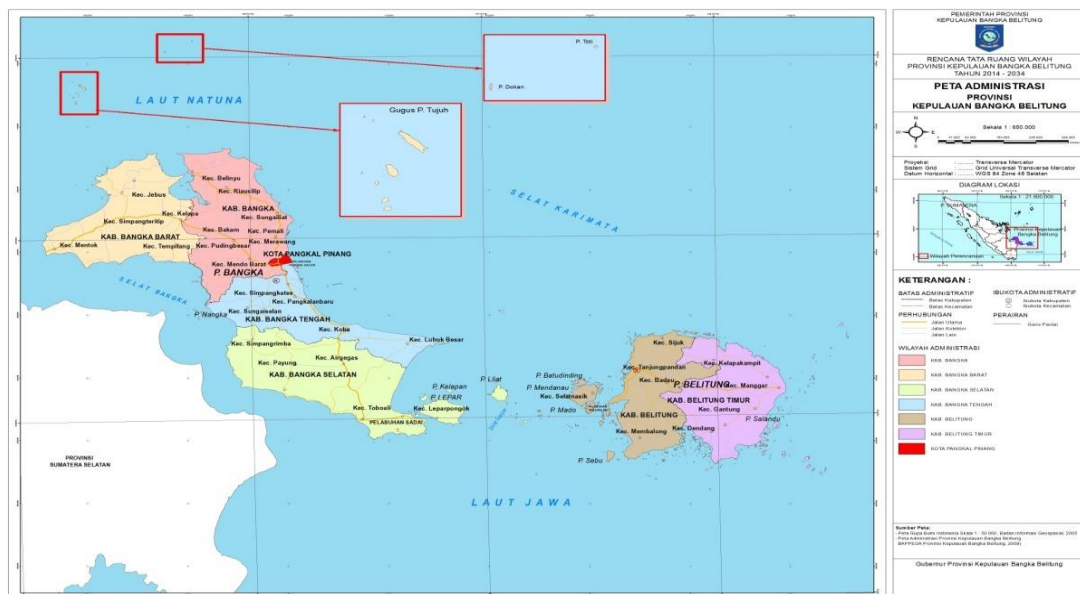
Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun sebagai langkah awal dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang penyediaan data dan informasi lingkungan hidup yang pada tahap selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengedepankan lingkungan pada setiap pembangunannya yang bermuara pada pembangunan berkelanjutan.

1.2. Profil Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.2.1 Karakteristik Wilayah

1. Administrasi Wilayah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000, terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Bangka, Belitung dan 1 (satu) Kota yaitu Pangkalpinang. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2003 telah dibentuknya 4 (empat) kabupaten baru yaitu Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan dan Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota dengan peta wilayah administrasinya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan luas mencapai 81.725,23 km², Luas daratan lebih kurang 16.424,23 km² atau 20,1% dari total wilayah dan luas laut lebih kurang 65.301 km² atau 79,9% dari luas total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut ini disajikan tabel tentang pembagian wilayah administrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 1. 1 Luas Wilayah Daratan dan Persebaran Penduduk di Kepulauan Bangka Belitung

No	Nama Kabupaten/Kota	Nama Ibu Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	Sungailiat	2.950,69	8	19	62
2	Bangka Barat	Muntok	2.820,61	6	4	60
3	Bangka Tengah	Koba	2.126,36	6	7	56
4	Bangka Selatan	Toboali	3.607,08	8	3	50
5	Belitung	Tanjung Pandan	2.293,69	5	7	42
6	Belitung Timur	Manggar	2.507,00	7	0	39
7	Pangkalpinang	Pangkalpinang	118,80	7	42	0
	Provinsi Kep. Bangka Belitung		81.725,23	47	82	309
	Luas Daratan		16.424,23			
	Luas Laut		65.301,00			

Sumber: *Bangka Belitung Dalam Angka, 2023*

Tabel 1. 2 Pulau-Pulau Bernama Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten	Jumlah	Keterangan
Bangka	78	Tersebar di Kecamatan Mendobarat, Sungailiat, Riau Silip, Belinyu dan Kecamatan Merawang.
Bangka Barat	94	Tersebar di Kecamatan Jebus dan Tempilang.
Bangka Tengah	24	Terdapat di Kecamatan Koba, Lubuk Besar, Pangkalan Baru dan Kecamatan Sungai Selan.
Bangka Selatan	62	Tersebar di Kecamatan Toboali, Pulau Besar dan Simpang Rimba.
Belitung	165	Tersebar di Kecamatan Tanjung Pandan, Sijuk, Badau dan Membalong.
Belitung Timur	152	Tersebar di Kecamatan Dendang, Gantung, Manggar, dan Kecamatan Kelapa Kampit.
Total	575	

Sumber : *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 137 Tahun 2017*
Bangka Belitung dalam Provinsi Bangka Belitung dalam angka 2023

2. Letak Geografis

Secara geografis, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada 104°50' sampai 109°30' Bujur Timur dan 0°50' sampai 4°10' Lintang Selatan, terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau

Belitung. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Pulau Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh, sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Pulau Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya. Letak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan Selat Bangka di sebelah barat, Selat Karimata di sebelah timur, Laut Natuna di sebelah utara, dan Laut Jawa di Sebelah Selatan.

3. Klimatologi

Kondisi iklim di Kepulauan Bangka Belitung sama seperti kondisi iklim di sebagian besar wilayah Indonesia, yaitu beriklim tropis. Iklim di Kepulauan Bangka Belitung dipengaruhi oleh angin musim yang mengalami bulan basah selama tujuh bulan sepanjang tahun dan bulan kering selama lima bulan terus menerus. Temperatur rata-rata selama tahun 2022 28,1 °C dan suhu maksimum 34,6 °C suhu serta suhu minimum 21,6 °C Selama tahun 2022 total curah hujan yang teramati di Kota Pangkalpinang sebesar 3.026,7 mm.

4. Topografi

Keadaan topografi di Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar merupakan dataran rendah, lembah, dan sebagian kecil pegunungan dan perbukitan. Profil wilayah pada umumnya beragam mulai dari daratan, bergelombang berbukit, hingga bergunung, dengan komposisi lahan datar mencapai luas sekitar 46,19%, bergelombang 41,08% dan 12,37% sisanya merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan air laut, sedangkan ketinggian pegunungannya beragam, seperti Pegunungan Maras yang mencapai ketinggian 699 meter di atas permukaan air laut dan Pegunungan Tajam yang ketinggiannya kurang dari 500 meter di atas permukaan air laut. Untuk ketinggian perbukitan, seperti Bukit Menumbing

ketinggiannya mencapai sekitar 455 meter, sedangkan Bukit Mangkol mencapai sekitar 395 meter di atas permukaan air laut.

5. Hidrologi

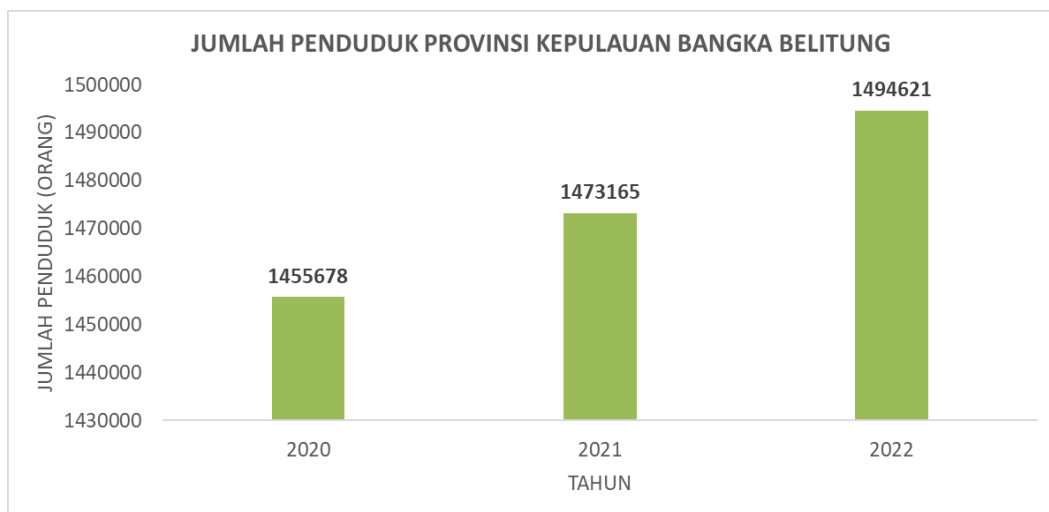
Hasil kajian hidrologi menyatakan bahwa daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (Sunda *Shelf*) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter. Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka. Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai seperti: Sungai Baturusa, Sungai Kepoh, Sungai Buluh, Sungai Kotawaringin, Sungai Kampa, Sungai Layang, Sungai Manise dan Sungai Kurau di Pulau Bangka. Sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cecuruk, Sungai Buding, dan Sungai Lenggang.

6. Geologi

Pulau Bangka dan Belitung termasuk bagian tengah dari "*Tin Mayor South East Asian Tin Belt*" dengan tipe *granit main range* yang mempunyai ciri-ciri megakristal (terutama *K-Feldspar*) dan terjadi mineralisasi timah beserta mineral ikutannya. Granit ini umumnya terdiri atas granit biotit dan granit muskovit yang semuanya merupakan tipe sedimen tipe S yang diperkirakan umurnya Trias (Sumber: Arsip PT.Koba Tin: *Survey dan Geology Department*, 2007). Oleh karena itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki cadangan timah terbesar di Indonesia yang berpotensi sebagai modal dasar pembangunan. Terdapat pula mineral-mineral ikutan

timah seperti *Zircon* (ZrSiO_4), *Monazite* ($((\text{Ce}, \text{La}, \text{Dy})\text{PO}_4 (\text{ThSi})\text{O}_2)$), *Hematite* (Fe_2O_3), *Pyrite* (FeS_2), *Ilmenite* (FeTiO_3), dan *Xenotime* (YPO_4). Sedangkan secara geologis mineralisasi timah di Indonesia terikat pada sabuk granit (*granitebelt*) Asia Tenggara yang memanjang dari Yunan (China) melalui Myanmar, Thailand, Semenanjung Melaka sampai pada Kepulauan Indonesia terutama di Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Singkep dan Pulau Karimun. Selain produk timah dan mineral ikutannya, ada pula produk tambang lainnya seperti pasir kuarsa (SiO_2), material Kaolin, dan *bilitonite* (dikenal dengan nama "satam"). Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya. Sedangkan Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca.

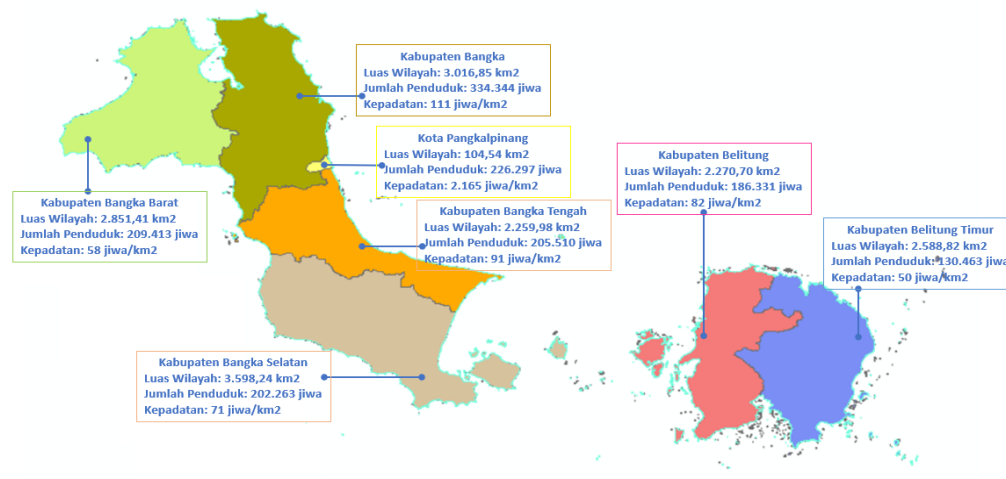
7. Jumlah Penduduk



Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 berjumlah 1.494.621 jiwa berdasarkan data mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan penduduk sekitar 1,52 % /tahun (BPS Prov.Kep.Babel, 2023). Jika dilihat persebaran jumlah

penduduk kabupaten Bangka Mempunyai jumlah penduduk yang paling besar 334.344 jiwa atau sebesar 22% dari jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu di Kabupaten Belitung Timur sebanyak 130.463 jiwa atau sebesar 9 % dari jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



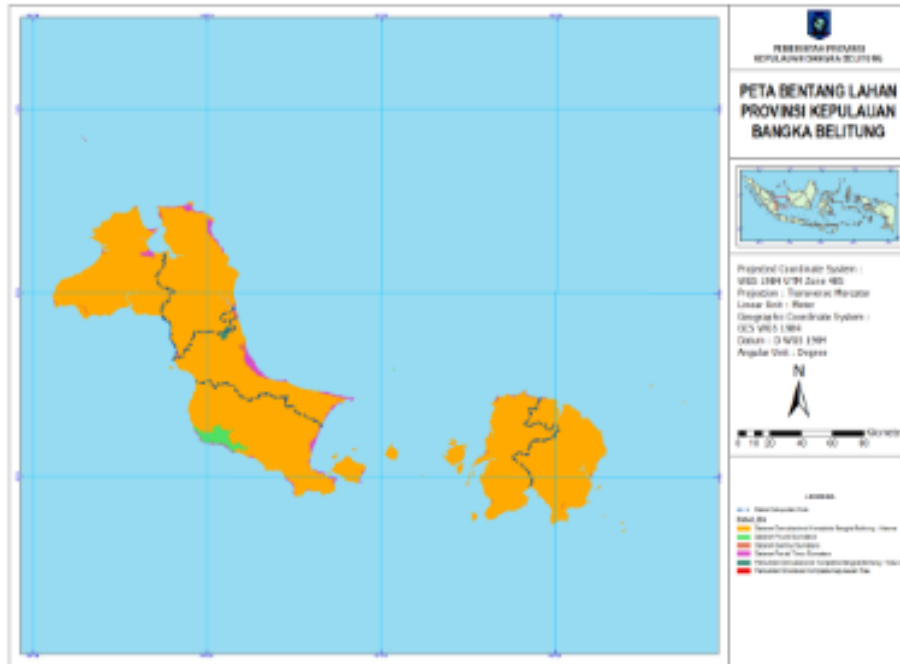
Gambar 1.3 Jumlah Penduduk dan Persentase Per Kabupaten/Kota

Menurut data dari BPS , sebagian besar penduduk di Kepulauan Bangka Belitung bekerja di sektor perikanan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Hal ini sesuai dengan kondisi geologi di Kepulauan Bangka Belitung yang cukup potensial sebagai kawasan pengembangan sektor-sektor tersebut. Hampir di seluruh wilayah provinsi ini memiliki kandungan material timah, kaolin, kuarsa dan bilitonite. Aktivitas perekonomian penduduk ini mempengaruhi keadaan ekologi di Kepulauan Bangka Belitung, baik di daratan maupun di lautan yang telah mengalami kerusakan di banyak wilayah.

1.2.2. Karakteristik Bentang Lahan

Kondisi fisik lingkungan salah satunya dipengaruhi oleh faktor bentang lahan atau bentuk lahan. Dilihat dari peta diatas, secara umum wilayah Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar didominasi oleh jenis bentuk lahan denudasional. Adapun jenis bentuk lahan ini terjadi karena

proses eksogen seperti erosi dan tanah longsor. Pada skala yang lebih detail, bentuk lahan denudasional secara umum akan menurunkan satuan bentuk lahan bukit sisa, *peneplain* serta lembah sungai serta perbukitan terkikis.



Gambar 1.4 Peta Bentang Lahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Hasil tumpang susun antara peta bentuk lahan dengan peta wilayah administrasi menggambarkan pembagian satuan bentuk lahan beserta luasannya di setiap Kabupaten/ Kota seperti yang ditunjukkan ada Tabel I.3 berikut.

Tabel 1. 3 Karakteristik Bentang Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bentang Lahan	Bangka	Bangka Barat	Bangka Selatan	Bangka Tengah	Belitung	Belitung Timur	Pangkalpinang	Jumlah
Dataran Denudasional Kompleks Bangka Belitung-Natuna	294.778	277.434	326.896	201.296	212.961	243.597	3.479	1.560.440

Bentang Lahan	Bangka	Bangka Barat	Bangka Selatan	Bangka Tengah	Belitung	Belitung Timur	Pangkalpinang	Jumlah
Dataran Fluvial Sumatera	-	-	20.523	123	-	-	-	20.646
Dataran Gambut Sumatera	1.890	1.485	-	1.615	2.798	1.070	1.272	10.131
Dataran Pantai timur Sumatera	7.497	3.263	8.492	12.028	-	-	-	31.280
Perbukitan Denudasional Kompleks Bangka Belitung-Natuna	623	-	-	2.243	-	-	-	2.866
Perbukitan Struktural Kompleks	-	35	-	-	-	-	-	35
Jumlah	309.105	287.463	362.501	220.754	227.738	263.492	4.787	1.675.840

1.2.3 Potensi Unggulan Daerah

1. Potensi Pertanian

Potensi sektor pertanian yang dapat dikembangkan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah durian, jeruk, nanas, cempedak, manggis, duku, salak, rambutan, dan pisang. Dari sektor perkebunan, potensi perkebunan yang dapat dikembangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain lada, kelapa sawit, karet, cengkeh, dan coklat. Luas lahan sawah dan lahan ladang yang berpotensi ditanami padi hanya berkisar 25.058 ha dan 27.435 ha. Sementara itu, luas lahan sawah yang telah memiliki irigasi hanya 4.234 ha. Potensi pertanian juga dapat terlihat dari andil sub sektor peternakan dan sub sektor kelautan dan perikanan.

Pada tahun 2017 produksi penangkapan ikan mengalami kenaikan dibanding tahun 2016, yaitu sebanyak 208.019,70 ton.

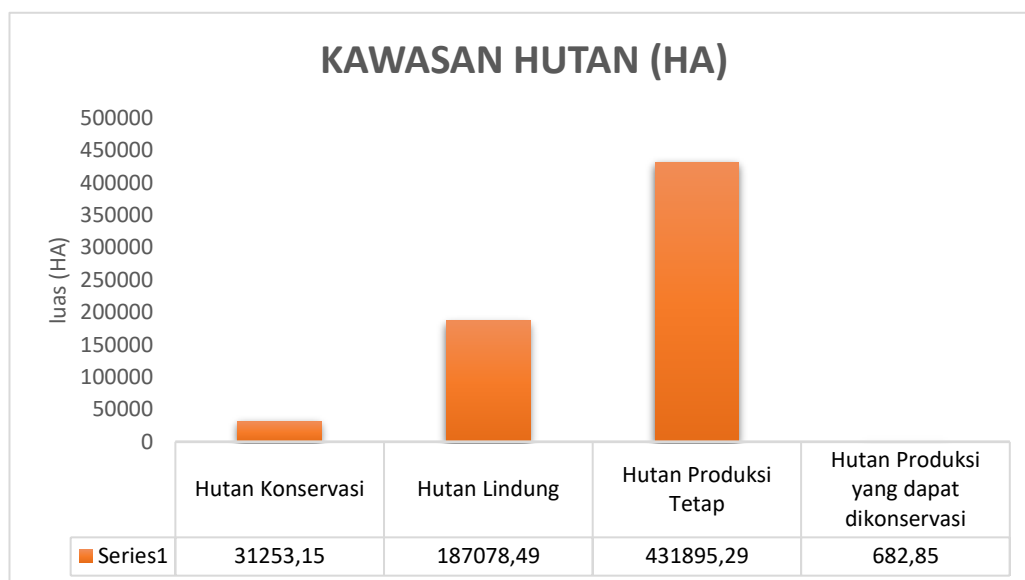
Potensi lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat besar untuk pengembangan kawasan pertanian, sebagai contoh terdapat lahan yang tidak diusahakan sebesar 6% dari potensi yang ada dan masih terdapat lahan lainnya yang juga belum dimanfaatkan sebesar 23%. Gambaran tersebut berarti bahwa upaya pengembangan pembangunan sektor pertanian masih sangat dimungkinkan melalui perluasan areal tanam dengan penambahan bahan baku lahan dan optimalisasi lahan yang ada.

2. Potensi Kehutanan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.357/Menhut-II/2004 tanggal 01 Oktober 2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah seluas 657.510 hektar, di mana luas hutan di Pulau Bangka seluas 480.089 hektar dan hutan di Pulau Belitung seluas 177.421 hektar. Hutan tersebut dikelompokkan ke dalam dua kategori hutan, yaitu hutan produksi dan hutan lindung. Luas hutan produksi adalah 466.090 hektar yang tersebar di Pulau Bangka seluas 378.224 hektar dan di Pulau Belitung seluas 87.866 hektar serta kelompok hutan lindung seluas 156.730 hektar yang tersebar di Pulau Bangka seluas 69.766 hektar dan di Pulau Belitung seluas 86.964 hektar. Dalam perkembangan selanjutnya, terdapat perubahan luas kawasan hutan karena adanya beberapa kebijakan perubahan penggunaan lahan. Tabel I.4 menyajikan luas kawasan hutan berdasarkan beberapa penetapan.

Berdasarkan data dari BPKH Wilayah XIII berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK: 8093/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 serta berdasarkan data penutupan lahan hasil interpretasi citra satelit Landsat tahun 2019, luas konservasi seluas 31.253,15 Ha, hutan lindung seluas 187.078,49

Hektar, hutan produksi tetap dan hutan produksi konservasi seperti yang tertera di bawah ini, secara umum perubahan Kawasan hutan tidak signifikan.



Gambar 1. 5 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Kep. Bangka Belitung 2019
Sumber: BPKH wilayah XIII Pangkalpinang

Tabel 1. 4 Perkembangan Luas Kawasan Hutan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dasar	Tanggal	Fungsi Kawasan Hutan					Jumlah (Ha)
		KSA/KPA	HL	HPT	HP	HPK	
SK. No: 357/Menhut-II/2004	1 Oktober 2004	34.690	156.730	-	466.090	-	657.510
SK. No: 798/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	35.454	185.531	-	432.884	693	654.562
SK. No : 1940/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2 /4/2017	3 April 2017	36.000	190.572	-	432.228	709	659.509
Perkembangan tata batas dan penetapan	-	35.760,84	184.276,95	-	436.647.89	692,58	657.378,26
SK.8093/MENLHK-PTKL/ KUH/ PLA.2/II/2018	23 November 2018	31253,15	187.078,49		431.895,29	682,85	650.909,8

Keterangan:

KSA/KPA : Kawasan Suaka Alam / Kawasan Pelestarian Alam

HL : Hutan Lindung

HPT : Hutan Produksi Terbatas

HP : Hutan Produksi

HPK : Hutan Produksi Konversi

Sumber : BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang

Hutan produksi difokuskan untuk menghasilkan beberapa jenis komoditas kehutanan, yaitu berupa kayu dan produk turunannya. Hutan produksi yang ada di Pulau Bangka dan Pulau Belitung menghasilkan beberapa jenis produk yang meliputi kayu persegi (*wood block*), moulding, kayu glondongan (*logs*), kayu tiang poles (*wood production*), kayu junjung (*climbing pole*), kayu bakar (*fire wood*), serta arang (*charcoal*). Kegiatan reboisasi hutan yang ada di Pulau Bangka dan Belitung berdasarkan data statistik juga telah dilakukan. Sejak tahun 2000 kegiatan penanaman kembali kawasan hutan telah dilakukan. Pada tahun tersebut pengadaan bibit reboisasi direncanakan untuk lahan kawasan seluas 1.710 hektar dimana 260 hektar di Pulau Bangka dan 1.350 hektar di Pulau Belitung.

3. Potensi Pesisir, Kelautan dan Perikanan

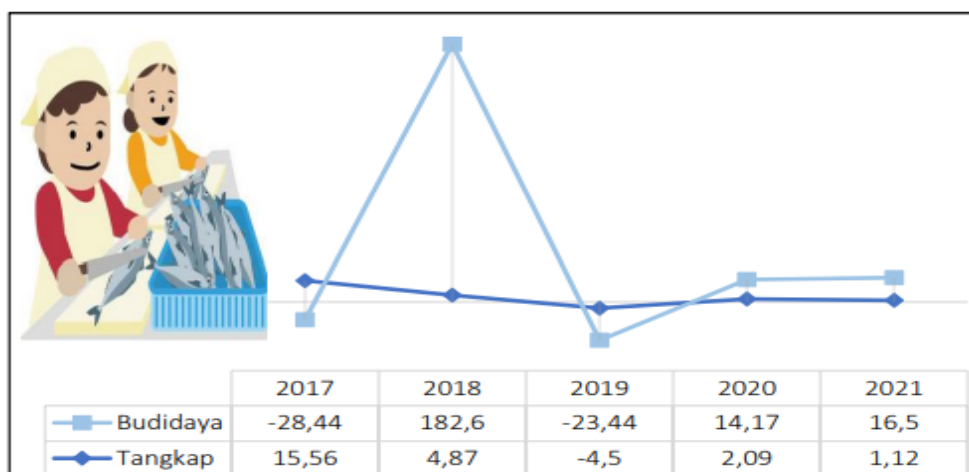
Wilayah Kepulauan Bangka Belitung menyimpan dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar, baik perikanan pantai maupun perikanan laut. Kondisi desa-desa pantai di wilayah ini di sepanjang pantainya merupakan alam yang memiliki karakteristik pantai berpasir, pantai berlumpur, pantai berbatu, mangrove, hutan pantai, semak belukar dan permukiman.

Pantai berpasir umumnya dikembangkan sebagai daerah wisata terutama disebabkan keindahan alam yang diselingi oleh batu granit. Desa pantai berlumpur terutama yang berada di muara dan disebabkan oleh buangan limbah pertambangan dan perkebunan. Sedangkan desa pantai yang dihiasi oleh hutan mangrove merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya ikan, udang, kepiting dan berbagai biota laut lainnya.

Perkembangan produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif. Produksi perikanan tangkap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan tahun 2020 sebesar 222.789 ton menjadi 223.680,33 ton pada tahun 2019 dan 228.980,33 ton pada tahun 2018 kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 225.292 ton. Demikian pula dengan

produksi perikanan budidaya, pada tahun 2018 tercatat sebesar 9.340,93 ton turun menjadi 7.150,663 ton pada tahun 2019 dan naik pada tahun 2020 menjadi 8.164,26 dan pada tahun 2021 sebesar 9.512,118 ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara kuantitas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Produksi yang meningkat secara signifikan berasal dari komoditas udang vaname untuk budidaya air payau, komoditas lele untuk budidaya air tawar dan kerang darah (kekerangan) untuk kegiatan budidaya laut.

Pertumbuhan Produksi Perikanan

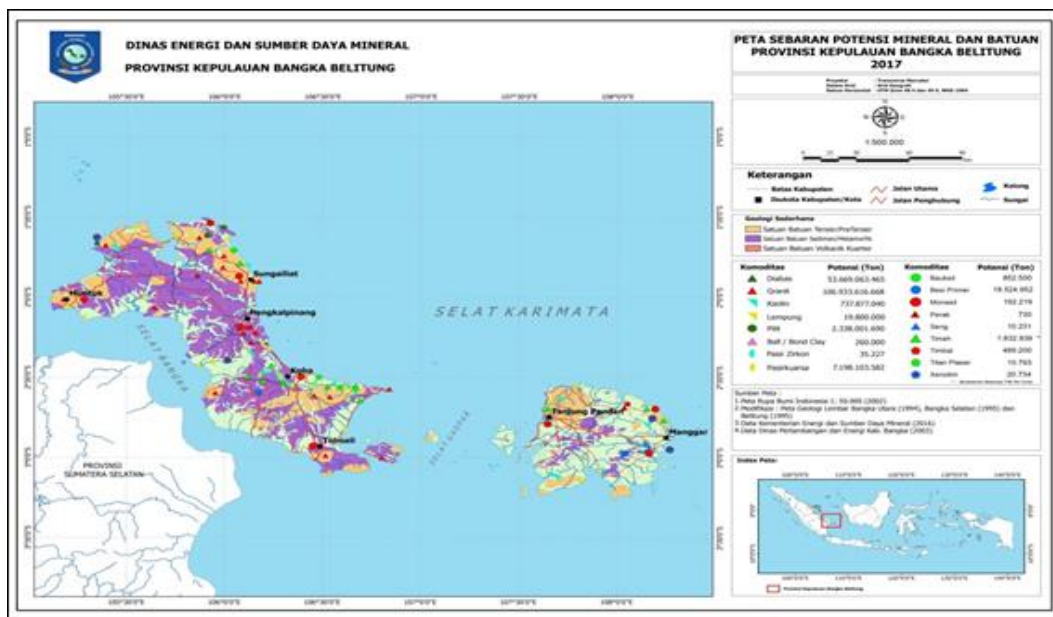


Gambar 1.6 Pertumbuhan Produksi Perikanan

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya DKP Prov. Kep. Babel Tahun 2021

4. Potensi Pertambangan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi bahan tambang yang cukup besar berupa timah dan merupakan penghasil utama timah di Indonesia. Potensi pertambangan lainnya adalah bahan tambang galian golongan C antara lain pasir kuarsa, pasir bangunan, kaolin, dan sebagainya, serta diperkirakan juga terdapat cadangan minyak dan gas bumi di sekitar utara Pulau Bangka. Secara terperinci, mineral yang dominan terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada Tabel I.5.



Gambar 1.7 Distribusi Sumber Daya Mineral dan Batuan
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber : Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Tabel 1. 5 Potensi Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (ton)

No	Jenis Bahan Galian	Tipe	Potensi Sumber Daya dan Cadangan					
			Timah	Bauksit	Monasit	Xenotim	Diabas	Titan Plaser
1	Logam	Sumber daya	2.564.388,929		181.735,62	20.734,223		515.188,8
		Cadangan	2.068.069,829	868.000	3.311	0,058		562
2	Bijih	Sumber daya	9.970.982.968		6.384.384.512	970.843.849		6.869.184
		Cadangan	2.010.642.708,109	3.100.000	1.084	0,089		
			Titan Plaser	Besi Primer	Seng	Timbal	Perak	
1	Logam	Sumber daya	515.188,8	18.524.967,61	1.679.138	1.027.076	1.531,67	
		Cadangan	562	14,781				
2	Bijih	Sumber daya	6.869.184	36.629.375,54	25.610.000	25.610.000	25.610.000	
		Cadangan		328.465,96				

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Potensi pertambangan lainnya terdapat di 6 (enam) wilayah kabupaten kecuali Kota Pangkalpinang di Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Dari 10 (sepuluh) potensi sumber daya alam, diketahui potensi sumber daya paling banyak adalah bijih timah sebesar 9.970.982.967,54 ton, disusul bijih monasit yaitu sebesar 6.384.384.512,00 ton. Sedangkan

untuk logam perak merupakan potensi yang paling sedikit sebesar 1.531,67 ton. Sumber daya pasir kuarsa menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 690.424.868 ton, disusul granit sebesar 528.553.883 ton. Untuk data potensi bahan galian non logam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik potensi sumber daya maupun cadangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 6 Potensi Bahan Galian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (ton)

No (1)	Jenis Bahan Galian (2)	Potensi Sumber Daya dan Cadangan (3)	Potensi (4)
1	Kaolin	Sumber Daya	376.687.532
		Cadangan	5.990.630
2	Pasir kuarsa	Sumber Daya	690.424.868
		Cadangan	18.389.856
3	Diabas	Sumber Daya	
		Cadangan	
4	Granit	Sumber Daya	528.553.883
		Cadangan	

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

5. Potensi Perindustrian dan Perdagangan

Secara umum industri yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini masih didominasi oleh industri dengan skala rumah tangga. Industri yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah industri kerajinan yang dapat menunjang sektor pariwisata seperti kerajinan pewter, akar bahar, batu satam, renda, kopiah resam, dan rotan. Saat ini, industri menengah yang dikelola antara lain industri kaolin, batu granit, pembuatan batu bata yang berasal dari bahan galian golongan C. Selain itu, terdapat juga industri pengolahan karet, kelapa sawit, pengolahan kayu dan pendukung usaha perikanan, yaitu pabrik es. Peluang pengembangan industri berbasis hasil perkebunan sangat berpotensi untuk dikembangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6. Potensi Pariwisata

Pariwisata menjadi sektor unggulan bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan merupakan sektor yang diharapkan dapat menggantikan sektor pertambangan. Sektor pariwisata diharapkan menjadi *multiplayer Effect* bagi sektor-sektor lainnya. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi pariwisata yang besar diantaranya daya Tarik wisata alam, budaya, maupun sejarah menjadikan provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai destinasi unggulan nasional setelah Bali dan Lombok.

Dalam Konteks kepariwisataan regional dan nasional, potensi bahari dan geowisata kepulauan Bangka Belitung merupakan daya Tarik yang dapat dikembangkan untuk menjadikan provinsi Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata unggulan. Kekayaan sosial dan budaya masyarakat pesisir yang sangat terkait dengan bahari dan geowisata dan sumber daya alam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jika dikembangkan secara terintegrasi sebagai desa wisata dapat menjadikan daya Tarik wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Potensi di bidang kepariwisataan yang sangat dominan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah wisata pantai. Hal ini dikarenakan wilayah Bangka Belitung merupakan daerah kepulauan dan memiliki garis pantai yang cukup panjang, yaitu kurang lebih 1.200 km dengan hamparan pantai pasir putih, panorama yang indah, air yang jernih, dan di beberapa tempat dihiasi berbagai formasi batuan beraneka ragam bentuk yang sangat menarik untuk dikembangkan.

Potensi wisata lainnya yang dapat dikembangkan adalah wisata budaya seperti upacara-upacara Rebo Kasan, Buang Jong, Ceriak Nerang, Perang Ketupat, Sepintu Sedulang, dan Sembahyang Kubur. Wisata sejarah juga dapat menjadi objek wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti Batu Balai, Wisma Ranggam, Vihara Dewi Kwan In, Phak Kak Liam

dan Klenteng China Jebus. Secara terperinci, jumlah jenis objek wisata yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

- ▪ Wisata Alam : 56 Objek
- ▪ Wisata Budaya : 45 Objek
- ▪ Wisata Sejarah : 8 Objek
- ▪ Agro Wisata : 20 Objek



Gambar 1.8 Peta Sebaran Pariwisata Unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

I.3. Proses Perumusan Isu Prioritas dan Penyusunan Dokumen IKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dimulai dengan pembentukan Tim Kelompok Kerja yang susunannya terdiri dari perwakilan beberapa perangkat daerah terkait, perwakilan perguruan tinggi, dan perwakilan dari lembaga masyarakat, serta pembentukan Tim Penyusun Dokumen yang susunan keanggotaannya berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembentukan Tim Kelompok Kerja dan Tim Penyusun Dokumen ini dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Tugas Tim Kelompok Kerja di antaranya adalah menetapkan isu prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup daerah, menginventarisasi data terbaru dari *stakeholder* terkait yang diperlukan untuk penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023, mendiskusikan hasil tahapan penyusunan yang dilakukan Tim Penyusun dalam sebuah *focus group discussion*. Adapun tugas Tim Penyusun meliputi kegiatan menginput dan menganalisis data status lingkungan hidup daerah yang telah diinventarisasi oleh Tim Kelompok Kerja menggunakan metode *Driving Force – Pressure – State – Impact – Response (DPSIR)*, mengidentifikasi data dan mengevaluasi dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, menyusun Buku Ringkasan Eksekutif dan Buku Laporan Utama Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Tim Kelompok Kerja. Untuk efektifitas penyusunan dan pelaksanaan Dokumen IKPLHD dilakukan secara virtual termasuk identifikasi isu prioritas yang menggunakan aplikasi *google form*.

Tahapan yang dilalui dalam Penyusunan Dokumen IKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Pembentukan Tim Kelompok Kerja dan Tim Penyusun Dokumen IKPLHD yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/224/DLHK/2023;
2. Pelaksanaan *workshop* dan Sosialisasi Penyusunan Dokumen IKPLHD yang diikuti oleh Tim Kelompok Kerja Penyusun Dokumen IKPLHD provinsi dan Perwakilan dari kabupaten/kota dilanjutkan dengan penarikan isu prioritas yang dilakukan secara virtual menggunakan zoom meeting dan aplikasi google form;
3. Identifikasi data-data yang diperlukan untuk penyusunan Dokumen IKPLHD sesuai pedoman penyusunan yang terbaru;

4. Pelaksanaan FGD ke-1 untuk melakukan analisis cepat terhadap data-data yang telah ada dengan metode DPSIR secara singkat, dilanjutkan dengan identifikasi dan penyaringan isu;
5. Pengelompokan isu dan pengolahan isu dengan;
6. Melakukan analisis dengan metode DPSIR;
7. Pendokumentasian dan penulisan Dokumen IKPLHD;
8. Pengiriman Dokumen IKPLHD;
9. Penginputan data ke dalam sistem informasi lingkungan hidup di aplikasi data alam;
10. FGD untuk menyampaikan hasil penyusunan Dokumen IKPLHD kepada Tim Kelompok Kerja, dan mempublikasikan Dokumen IKPLHD Tahun 2023 yang telah tersusun.

Perumusan isu prioritas dilakukan dengan melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* yang melibatkan Tim Kelompok Kerja. Perumusan Isu Prioritas dimulai dengan menyajikan data-data terkait yang telah dikumpulkan kepada Tim Kelompok Kerja serta melakukan analisis cepat terhadap data-data tersebut dengan metode *Driving Force – Pressure – State – Impact – Response*. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis cepat tersebut peserta FGD mengidentifikasi isu-isu lingkungan, ekonomi, dan sosial yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, kemudian dilakukan diskusi dan pengelompokan isu-isu tersebut. Selanjutnya, daftar isu hasil FGD dinilai menggunakan skala dengan rentang nilai 1–10. Semakin besar nilai yang diberikan, maka isu tersebut semakin diprioritaskan. Penilaian dilakukan oleh responden yang berasal dari berbagai instansi terkait, dengan menggunakan fasilitas *google form* (https://bit.ly/ISU_IKPLHD2023). Kriteria yang digunakan untuk pertimbangan saat dilakukan penilaian adalah:

1. *Urgency* (isu yang dinilai mendesak untuk segera diselesaikan atau ditangani),
2. *Seriousness* (isu yang dinilai menimbulkan dampak serius dan membahayakan),

3. *Growth* (isu yang dinilai terus berkembang dan sulit dicegah),
4. *Rationally* (isu yang dinilai bersifat rasional untuk diselesaikan dengan waktu dan sumber daya yang tersedia).

Daftar isu hasil FGD yang dilakukan penilaian terdiri atas isu-isu lingkungan hidup berikut:

1. Eksploitasi dan alih fungsi lahan,
2. Erosi dan sedimentasi,
3. Penurunan kualitas air,
4. Peningkatan konsumsi energi fosil,
5. Penurunan kualitas udara,
6. Bencana akibat cuaca ekstrim (banjir, angin kencang/puting beliung),
7. Belum optimalnya pengelolaan sampah,
8. Masalah ketahanan pangan,
9. Belum optimalnya tata kelola dan manajemen lingkungan hidup,
10. Kerusakan pesisir dan laut.

Berdasarkan kesepakatan bersama Tim Kelompok Kerja, maka ditetapkan empat isu dengan peringkat tertinggi menjadi isu prioritas. Keempat jenis isu prioritas yang ditetapkan tersebut adalah :

- 1. Belum optimalnya pengelolaan sampah,**
- 2. Kerusakan pesisir dan laut,**
- 3. Belum optimalnya tata kelola dan manajemen lingkungan hidup,**
- 4. Peningkatan Eksploitasi dan alih fungsi lahan,**
- 5. Penurunan kualitas air.**

Pembahasan lebih lanjut mengenai perumusan isu prioritas tercantum dalam Bab III.

I.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari dilaksanakannya penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menyediakan informasi lingkungan hidup. Tujuan dilaksanakannya penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Menyediakan data dan informasi mengenai status lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbaru dan bisa diakses publik atau pihak-pihak yang berkepentingan serta sebagai bentuk akuntabilitas publik;
2. Menyediakan informasi kinerja yang menggambarkan keberhasilan kinerja pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup;
3. Menyediakan data dan informasi lingkungan hidup sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan dan memperbaiki kualitas lingkungan yang telah rusak.

I.5. Ruang Lingkup Penulisan

Lingkup penulisan dokumen IKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 ini dibatasi pada data dan informasi lingkungan hidup yang terkait dengan status lingkungan hidup di Kepulauan Bangka Belitung, serta informasi terkait yang menggambarkan kinerja daerah Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Ruang lingkup Dokumen IKPLHD dengan metode analisis DPSIR meliputi :

1. Faktor-faktor pendorong (*driving forces*) yang memotivasi aktivitas yang merubah kondisi lingkungan, baik unsur ekonomi maupun sosial beserta analisisnya;
2. Faktor-faktor tekanan (*pressure*) yang memicu aktivitas-aktivitas yang menyebabkan perubahan kondisi lingkungan;
3. Keadaan atau status kondisi lingkungan (*state*);
4. Dampak (*impact*) yang timbul akibat perubahan kondisi lingkungan;
5. Tanggapan (*respons*) dan inovasi yang dilaksanakan oleh berbagai pihak untuk mencegah, menanggulangi, atau mengurangi dampak negatif yang muncul;
6. Rekomendasi-rekomendasi perbaikan untuk ditindaklanjuti dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dokumen IKPLHD terdiri dari dua buku, yaitu Buku Ringkasan Eksekutif dan Buku Utama IKPLHD. Buku Utama Dokumen IKPLHD terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut.

1. Bagian Awal, terdiri dari :
 - 1) Halaman Judul.
 - 2) Halaman Surat Pernyataan.
 - 3) Kata Pengantar.
 - 4) Daftar Isi.
 - 5) Daftar Tabel.
 - 6) Daftar Gambar.
 - 7) Daftar Lampiran.
2. Bagian Utama, terdiri dari :
 - 1) Bab I Pendahuluan
 - 2) Bab II Analisis dengan DPSIR
 - 3) Bab III Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah
 - 4) Bab IV Inovasi Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 5) Bab V Penutup

3. Bagian Akhir, terdiri dari :

- 1) Daftar Pustaka
- 2) Lampiran

BAB II

ANALISIS *DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT,* DAN *RESPONSE* ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Permasalahan lingkungan hidup yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas waktu bersifat sangat kompleks sehingga seringkali tidak dapat diatasi hanya dengan penelitian dan keputusan ilmiah, maupun keputusan pemangku kepentingan. Pendekatan cara berpikir yang digunakan harus menggunakan pendekatan suatu sistem yang bisa menghubungkan antar masalah yang luas dan mengambil keputusan dengan cara yang terstruktur. Salah satu cara penyelesaian masalah yang menggunakan pendekatan sistem adalah metode kerangka kerja *Driving force – Pressure – State – Impact – Response (DPSIR)* yang bisa digunakan untuk menghubungkan antar isu lingkungan yang kompleks.

DPSIR adalah sistem kerangka kerja yang mengasumsikan hubungan sebab-akibat antar komponen yang saling berinteraksi dari sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan. Metode DPSIR telah banyak diaplikasikan untuk pemecahan berbagai macam persoalan, terutama masalah lingkungan. *Driving force* adalah faktor-faktor yang menjadi motivasi dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Driving force* memiliki distribusi secara spasial dengan luasan dan intensitas yang berbeda-beda, bisa secara global, regional, ataupun lokal. *Driving force* menggambarkan perkembangan sosial, demografi, dan ekonomi dalam masyarakat. *Driving force* ekonomi mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya seperti pangan, tempat tinggal, air, kesehatan, keamanan, budaya, bahan baku, dan infrastruktur. Beberapa jenis *driving force* di bidang ekonomi, di antaranya adalah: Sektor yang memenuhi kebutuhan pangan dan bahan baku, seperti pertanian, perkebunan, budidaya perairan, perikanan, dan pertambangan;

1. Sektor yang memenuhi kebutuhan air, seperti pasokan air minum (perusahaan air minum, industri rumahan isi ulang air minum, dll.) dan irigasi;
2. Sektor yang memenuhi kebutuhan pakaian dan tempat tinggal, seperti perumahan (konstruksi, real estate, dll.), tekstil dan pakaian jadi;
3. Sektor yang memenuhi kebutuhan kesehatan, seperti *health care*, rumah sakit, farmasi, kosmetik, dan pengolahan limbah;
4. Sektor yang memenuhi kebutuhan budaya, seperti pariwisata, pendidikan, informasi, dan organisasi sosial;
5. Sektor yang memenuhi kebutuhan keamanan, seperti pertahanan dan keamanan nasional, dan administrasi publik;
6. Sektor yang memenuhi kebutuhan infrastruktur, seperti manufaktur, perdagangan, konstruksi, keuangan, asuransi, dan utilitas.

Driving force sosial mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan hubungan sosial, kesejahteraan sosial, pemerintahan, dan identitas budaya. *Driving force* sosial secara umum meliputi rangkaian sosial, komunitas, dan karakteristik politik yang mempengaruhi struktur dan fungsi sektor ekonomi, serta bertindak sebagai penentu utama kesehatan manusia. Misalnya, kurangnya keadilan atau pemerintahan yang represif dapat mempengaruhi kemampuan sektor ekonomi untuk berfungsi dengan baik atau bahkan bisa membatasi kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Beberapa jenis *driving force* di bidang sosial, di antaranya adalah:

1. Hubungan sosial, seperti hubungan antar agama, organisasi kemasyarakatan, dan hubungan pernikahan;
2. Kesejahteraan sosial, seperti akses untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan;
3. Pemerintahan, seperti bentuk pemerintahan, pola pemungutan suara dalam pemilihan umum, dan regulasi-regulasi dalam pemerintahan;

4. Identitas budaya, seperti etnik budaya, keyakinan/kepercayaan yang dianut, dan hukum-hukum adat atau kearifan lokal yang ada di wilayah tertentu.

Pressure didefinisikan sebagai aktivitas manusia yang timbul akibat *driving force* sosial dan ekonomi yang mendorong perubahan lingkungan atau perilaku manusia yang bisa mempengaruhi lingkungan. *Pressure* bisa digolongkan menjadi *environmental pressure* dan *human behavior pressure*. Beberapa hal yang bisa menjadi *environmental pressure* di antaranya adalah perubahan tutupan lahan atau penggunaan lahan, emisi limbah dan polutan, dan aktivitas-aktivitas manusia yang merubah atau memanipulasi kondisi lingkungan, seperti pengerukan, penambangan, pergerakan kapal, penangkapan ikan, dan deforestasi. Beberapa hal yang bisa menjadi *human behavior pressure* di antaranya adalah karakter dan tindakan manusia yang berpengaruh terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan, gaya hidup, serta mobilitas penduduk.

State menggambarkan kondisi lingkungan, baik lingkungan yang alami maupun lingkungan buatan (misalnya kuantitas dan kualitas komponen fisik, kimia, dan biologis) dan kondisi manusia (misalnya kepadatan penduduk, persebaran penduduk, status ekonomi, kesehatan masyarakat, dan karakteristik individu). Proses kimia, fisik, dan biologis, serta aktivitas/tindakan manusia saling berinteraksi memberikan tekanan dan mempengaruhi berbagai komponen lingkungan hidup yang dapat diukur kondisinya melalui parameter-parameter yang berkaitan.

Impact didefinisikan sebagai dampak yang ditimbulkan akibat adanya perubahan kondisi lingkungan hidup. Perubahan kualitas maupun kuantitas lingkungan ini berdampak pada kesejahteraan manusia, termasuk berdampak juga pada kemampuan layanan jasa lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Beberapa jenis *impact* terhadap lingkungan, di antaranya adalah penurunan kemampuan layanan jasa penyediaan (air, pangan, serat), jasa pengaturan (iklim, kualitas air, pengolahan limbah, dll.), jasa estetika dan budaya, jasa pendukung

(produksi primer, unsur hara, dll.). Beberapa jenis *impact* terhadap kesejahteraan manusia, di antaranya berpengaruh terhadap produktivitas, pendapatan, biaya kesehatan, keamanan, serta kebahagiaan.

Response adalah tindakan yang diambil oleh suatu kelompok atau individu dalam masyarakat dan pemerintah untuk mencegah, mengganti rugi, memperbaiki atau beradaptasi dengan perubahan keadaan lingkungan, serta untuk memodifikasi perilaku manusia yang berkontribusi terhadap munculnya dampak atau resiko. Di dalam metode DPSIR, *response* bisa berupa upaya untuk mengontrol atau mengendalikan *driving force, pressure, state*, ataupun *impact*. Contohnya, penerapan beberapa kebijakan dan teknologi pendukung, manajemen sumber daya alam dan lahan, monitoring kualitas lingkungan, valuasi lingkungan, dan kompensasi terhadap kerugian yang timbul.

II.I Tata Guna Lahan

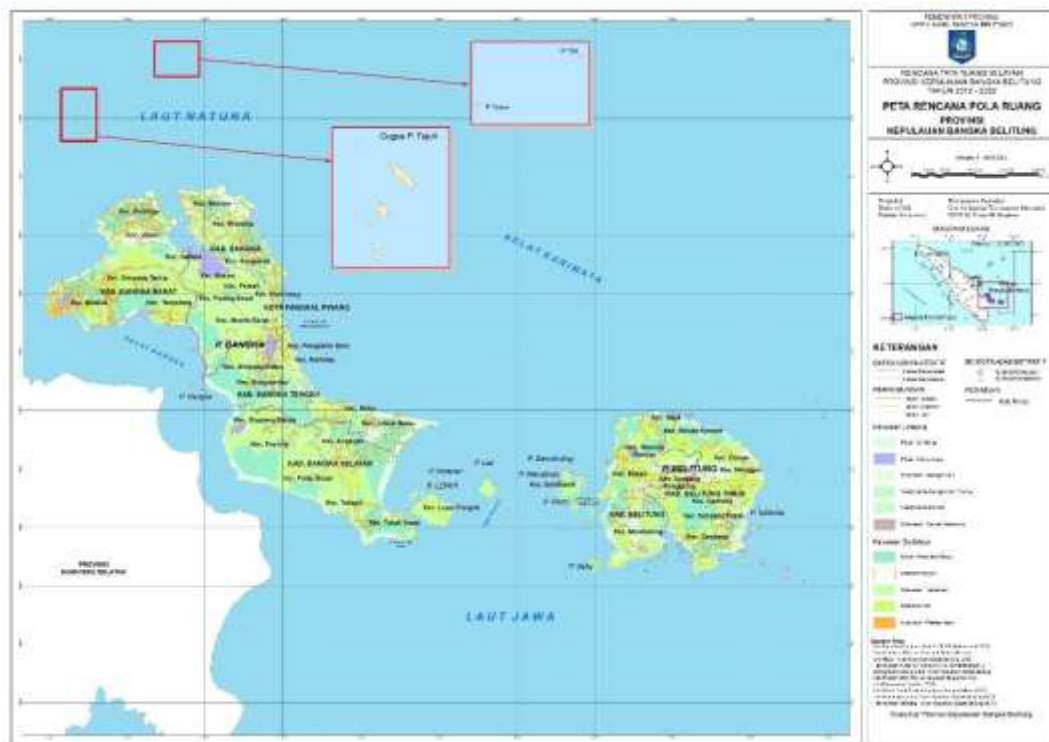
Perencanaan wilayah merupakan suatu desain dan pengaturan penggunaan ruang yang berfokus pada bentuk fisik, fungsi ekonomi, dan dampak sosial dari lingkungan wilayah serta lokasi kegiatan yang berbeda di dalamnya. Berkenaan dengan pembahasan pas sub tema ini, dalam ilmu perencanaan wilayah dikenal istilah perencanaan tata guna lahan (*land use planning*).

Tata guna lahan adalah suatu upaya dalam merencanakan penggunaan lahan dalam suatu wilayah yang meliputi pembagian kawasan untuk pengkhususan fungsi-fungsi tertentu baik lindung maupun budidaya (Catanese & Snyder, 1988). Tata guna lahan merupakan salah satu faktor penentu utama dalam pengelolaan lingkungan. Keseimbangan antara kawasan budidaya dan lindung merupakan kunci dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Suatu konsep yang mengatur penggunaan lahan secara terencana dan terpadu untuk memenuhi kebutuhan manusia dan lingkungan hidup. Konsep tata guna lahan juga merupakan bagian dari salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya pada tujuan 15 berkenaan dengan ekosistem daratan yaitu melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Dengan adanya tata guna lahan yang baik dan teratur maka dapat dicapai beberapa manfaatnya yaitu diantaranya mendukung perkembangan ekonomi suatu wilayah, menjadikan pemerataan fungsi lahan yang baik sekaligus menjaga sumber daya alam yang ada agar tidak mengalami degradasi, menciptakan suatu lahan hunian yang tertata dengan baik sekaligus mengurangi terjadinya kepadatan penduduk yang tidak berimbang antara suatu wilayah administrasi dengan wilayah

administrasi lainnya serta dapat mengurangi kerugian jika terjadi bencana alam yang menimpa wilayah tersebut jika tata guna lahannya direncanakan dan dieksekusi dengan baik dan berkesesuaian.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, alokasi pemanfaatan lahan di wilayah darat telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2034 (Gambar 2.1.1). Sementara itu sebagai provinsi kepulauan disamping perencanaan tata guna lahan di daratan, terdapat pula perencanaan ruang laut yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 (Gambar 2.1.1).



Gambar 2.1. 1 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Permukiman Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada tahun 2022, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan revisi tata ruang wilayah darat sekaligus mengintegrasikannya dengan tata ruang laut. Keterpaduan penataan ruang

darat (terrestrial) dan laut (zona pesisir) penting dilakukan terkait evaluasi program atau kebijakan baru yang berdimensi ruang. Pasca ditetapkan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, paradigma integrasi rencana tata ruang matra darat dan matra laut digabungkan untuk mempermudah dan mempercepat dokumen hukum berkenaan dengan rencana tata ruang. Rencana tata ruang laut yang sebelumnya terpisah, saat ini perlu disatukan dengan tata ruang darat, diintegrasikan dalam satu dokumen. Pemanfaatan ruang darat dan laut saat ini telah bergeser dari paradigma izin menuju pada konsepsi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada rencana tata ruang (Priyanta, 2021).

Dalam implementasinya, ada banyak permasalahan yang terjadi dalam tata guna lahan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang disajikan mulai dari faktor pemicunya (*driving force*) hingga kebijakan (*responses*) yang diambil dalam menyikapi permasalahan tersebut. Adapun tabel utama dalam analisis ini mengacu pada pedoman penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023 khususnya pada tabel ke 1 hingga 17 tabel data alam serta didukung oleh data penunjang terkait lainnya.

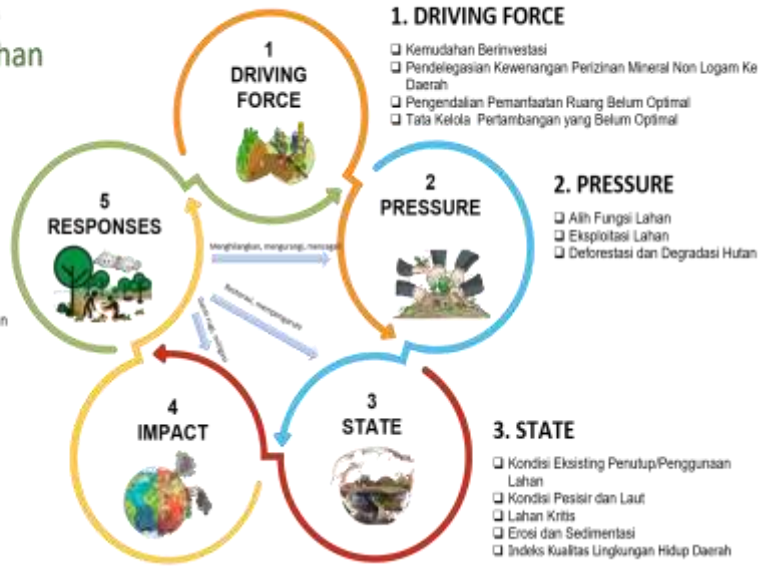
KERANGKA DPSIR DIKPLHD 2023 Sub Tata Guna Lahan

5. RESPONSES

- ❑ Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- ❑ Penatakelolaan Pertambangan
- ❑ Pengendalian Pemanfaatan Fungsi Kawasan Hutan
- ❑ Pengendalian Kerusakan Lahan
- ❑ Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
- ❑ Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan
- ❑ Pelestarian Kehati
- ❑ Sosialisasi, Edukasi dan Peningkatan Kapasitas

4. IMPACT

- ❑ Penurunan D3TLH
- ❑ Peningkatan GRK dan Ancaman Perubahan Iklim
- ❑ Perubahan garis Pantai
- ❑ Ancaman Bencana Banjir
- ❑ Penurunan Kehati



Gambar 2.1. 2 Kerangka DPSIR Tata Guna Lahan

II.1.1 Driving Force

II.11.1 Kemudahan Berinvestasi

Investasi telah menjadi fokus pemerintah sebagai salah satu pendorong pertumbuhan perekonomian sejak diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu implementasinya yaitu melalui *sistem Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) sebagai strategi meningkatkan iklim investasi. *Online Single Submission* (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko. Melalui sistem OSS, perizinan berusaha menjadi pasti, mudah, efektif, dan transparan.

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, realisasi investasi

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2022 mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 188% atau hampir 2 kali lipat jika dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Gambar di bawah ini memperlihatkan trend kenaikan realisasi investasi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, target investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal sebesar Rp. 6,76 triliun dan target ini berhasil dilampaui dengan capaian realisasi sebesar 8,17 triliun rupiah.

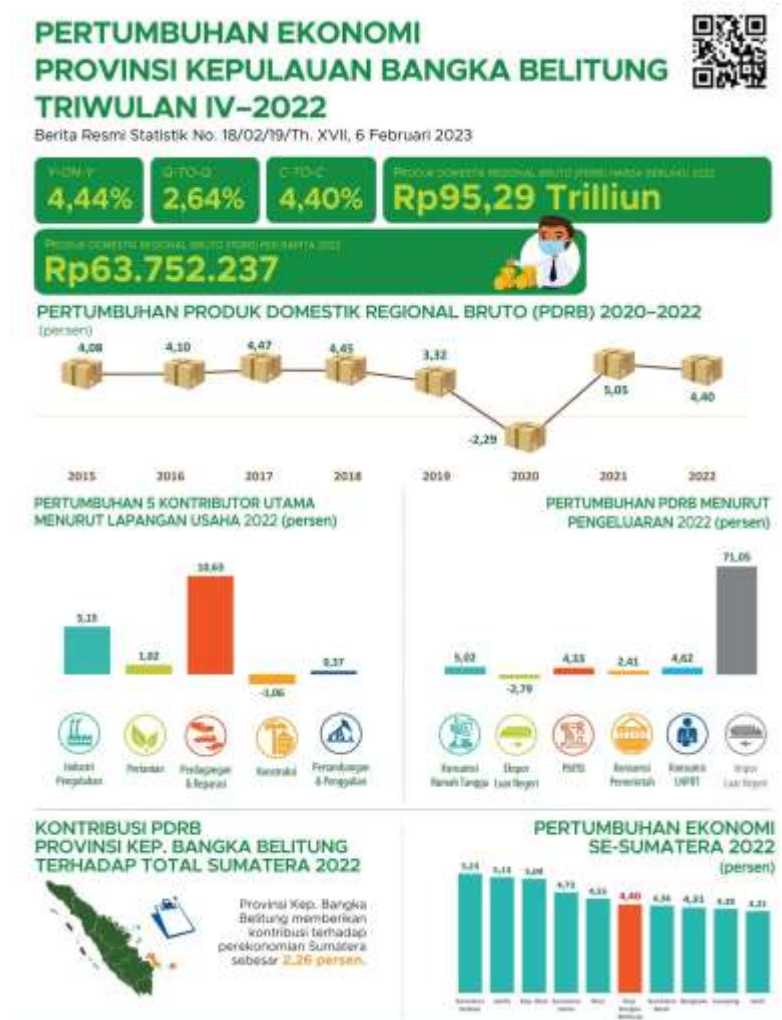


Gambar 2.1. 3 Realisasi Investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2020 – 2022

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terbuka Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan realisasinya maka sektor yang paling diminati investor yaitu untuk Penanaman Modal Dalam Negeri didominasi oleh sektor tanaman pangan dan perkebunan (32%), industri makanan (23%) serta industri logam dasar dan bahan logam(16%), sementara itu untuk Penanaman Modal Asing (PMA) didominasi oleh sektor tanaman pangan dan perkebunan, listrik, industri perdagangan serta perhotelan. Melalui iklim investasi yang baik akan dapat meningkatkan laju pertumbuhan

ekonomi, membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan daya beli masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada gambar 2.1.4 berikut.



Gambar 2.1. 4 Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Secara umum pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 sebesar 4,40 % masih terkategori baik namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya memang terjadi mengalami penurunan karena di tahun 2021 pertumbuhan ekonominya sebesar 5,05%. Laju pertumbuhan ekonomi ini ditunjang dari seberapa besar investasi, ekspor dan tingkat konsumsi

masyarakat dan tingginya pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 tersebut dikarenakan volume ekspor yang meningkat.

Realisasi investasi yang meningkat signifikan pada tahun 2022 berbanding lurus dengan izin berusaha yang diterbitkan. Ada tiga sektor yang paling banyak diterbitkannya izin selama tahun 2022 yaitu sektor Kelautan dan Perikanan sebanyak 1.149 izin; Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral terutama terkait izin mineral non logam bukan timah sebanyak 107 izin serta Sektor Perhubungan dan Transportasi dalam hal ini izin trayek dan izin kartu pengawas sebanyak 65 izin. Dari sektor yang mendominasi realisasi investasi tersebut, kegiatan berusaha di bidang Pertambangan khususnya non logam, Perkebunan serta Perikanan dan Kelautan masih menjadi primadona untuk dikembangkan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan kemudahan berinvestasi melalui sistem perizinan OSS di satu sisi membawa manfaat yang baik bagi pertumbuhan ekonomi namun di sisi lain sekaligus akan meningkatkan jumlah kegiatan berusaha yang jika tidak melalui pengelolaan yang baik akan menjadi tekanan bagi lingkungan.

II.1.1.2 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Mineral Non Logam dari Pusat Ke Daerah

Pemerintah pusat resmi mendelegasikan sejumlah kewenangan terkait perizinan pertambangan ke daerah berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditandatangani pada tanggal 11 April 2022. Dengan adanya kebijakan ini maka pemerintah provinsi kembali memiliki kewenangan izin usaha pertambangan setelah sebelumnya kewenangan tersebut ditarik ke pemerintah pusat melalui revisi UU Minerba atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam pasal 2 disebutkan pendelegasian meliputi pemberian sertifikat dan izin, pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang

didelegasikan serta pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan. Pemberian standar ini meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa pertambangan di bidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan serta reklamasi pasca tambang. Selanjutnya pemberian izin salah satunya terdiri atas izin usaha pertambangan (IUP) dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam dengan ketentuan, berada dalam satu provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil.

Dengan adanya pendelegasian ini memicu angin segar bagi pelaku usaha pertambangan mineral non logam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengurus perizinan di daerah tanpa harus melalui proses dan waktu yang cukup panjang di pemerintah pusat sekaligus memicu tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha baru yang menimbulkan tekanan terhadap lingkungan jika tidak dikelola secara optimal.

II.1.1.3 Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang yang belum optimal

Mengacu pada peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya sedangkan II - 15 penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang. Kenyataan yang terjadi di lapangan terkait dengan permasalahan diatas menandakan bahwa penggunaan dan pemanfaatan ruang terhadap RTRW belum konsisten dengan peraturan tentang penataan ruang dimana masih dijumpai adanya pelanggaran terhadap penataan ruang dan hal ini sekaligus membuktikan masih lemahnya

pengawasan dan pengendalian terhadap tata ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Suatu daerah bisa saja telah memiliki perencanaan tata ruang yang baik namun demikian jika tidak memperhatikan aspek pengendalian dan pengawasan maka tetap saja akan menimbulkan banyak persoalan salah satunya terkait permasalahan ketidaksesuaian peruntukan lahan yang disebutkan pada tabel diatas. Aspek pengendalian dan pengawasan ini adalah tahapan yang bersifat krusial dalam penyelenggaraan penataan ruang. Pada pasal 147 PP Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disebutkan bahwa pelaksanaan pengendalian pemanfaatan tata ruang diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya penataan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap tata ruang ini menjadi salah satu *driving force* dalam tata guna lahan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

II.1.1.4 Tata kelola pertambangan yang belum optimal

Kepulauan Bangka Belitung sangat terkenal dengan potensi mineral timahnya. Hal ini membuat Indonesia dikenal sebagai negara produsen timah terbesar kedua dunia dunia setelah Cina dan menduduki peringkat pertama sebagai eksportir timah terbesar dunia. Hal ini berbanding terbalik dengan Cina yang hampir semua hasil produksi timahnya dipergunakan di dalam negeri. Indonesia hampir setiap tahun memproduksi timah hingga hampir mencapai 80 ribu metric ton hanya menggunakan 5% saja untuk kebutuhan dalam negeri sementara sisanya yaitu sekitar 95% ditujukan untuk pasar ekspor.

Industri pertambangan khususnya mineral logam timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak lepas dari sejumlah masalah seperti daya dukung lingkungan yang terbatas, tumpang tindih pemanfaatan ruang, penambangan tanpa izin, konflik sosial masyarakat dan penambang, tata niaga dan wacana larangan ekspor logam timah pada tahun 2023. Hal ini

menandakan bahwa tata kelola pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berjalan secara optimal. Dalam hubungannya dengan bahasan sub tata guna lahan tentu saja permasalahan terbesarnya berkenaan dengan tumpang tindih pemanfaatan ruang serta aspek perizinan dalam upaya mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya mineral ini. Tata kelola pertambangan yang belum optimal ini memicu tekanan hingga dampak kepada media lingkungan sehingga keseimbangannya terganggu.

II.1.2 Pressure

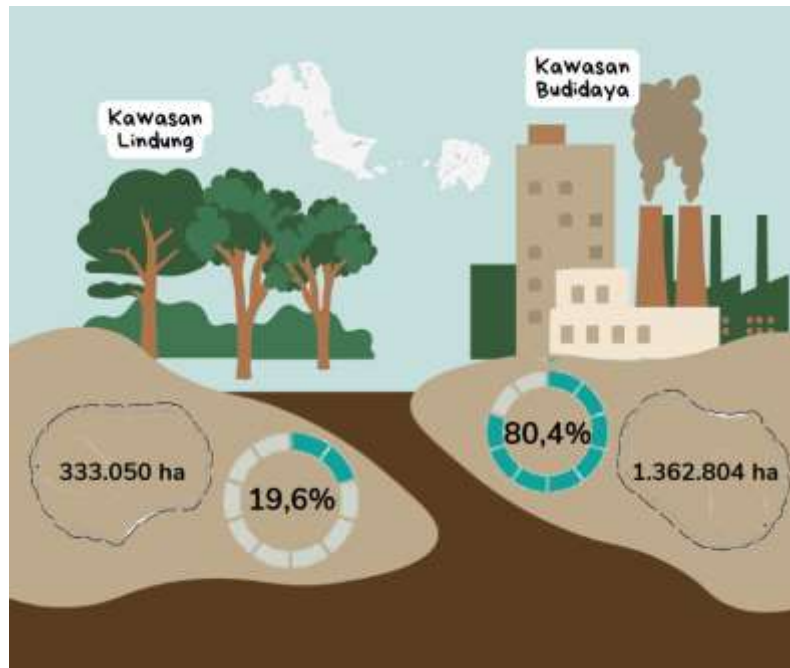
II.1.2.1 Alih Fungsi lahan

A. Alih Fungsi Lahan Terhadap Tata Ruang

Alih fungsi lahan atau dalam istilah lain konversi lahan merupakan proses perubahan penutup/penggunaan lahan dari satu bentuk atau fungsi ke bentuk atau fungsi lainnya. Hal ini terjadi ketika suatu wilayah yang sebelumnya digunakan untuk tujuan tertentu kemudian diubah untuk menjadi tujuan lainnya yang berbeda karena sejumlah faktor pemicu seperti yang telah dijabarkan pada bagian *driving force* di sub bab sebelumnya. Dengan berbagai faktor pemicu tersebut maka perubahan penutup/penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan tata gunanya menjadi hal yang hampir tidak dapat dihindari.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota bahwa pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Berdasarkan data spasial pola ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034,

perbandingan porsi luasan kawasan lindung dan kawasan budidaya
diperlihatkan pada ilustrasi berikut.



Gambar 2.1. 5 Perbandingan luasan kawasan lindung dan budidaya pada RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034

Sumber: IGT Pola Ruang RTRW Prov Kep Babel 2014-2034, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan data spasial rencana pola ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, perbandingan antara pola ruang kawasan lindung dan budidaya yaitu 19,6% dan 80,4%. Jika dilihat dari persentase ini, luasan kawasan lindung tidak sampai angka 20% namun yang lebih penting dari luasan tersebut adalah kesesuaian penutup lahan sesuai dengan kawasan yang ditempati karena melihat pengertiannya bahwa lindung ditujukan pada kelestarian sementara kawasan budidaya ditujukan pada pemanfaatan. Alih fungsi lahan terhadap peruntukan tata ruang dianalisis menggunakan metode tumpang susun data spasial penutup lahan KLHK skala 1:250.000 tahun 2020 dan 2021 (sebagai catatan bahwa penutup lahan KLHK tahun 2022 belum dirilis pada saat dokumen ini disusun) serta data spasial pola ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga diperoleh informasi lokasi

dan luasan penutup/penggunaan lahan yang mengalami perubahan serta perbandingannya terhadap peruntukan tata ruangnya.

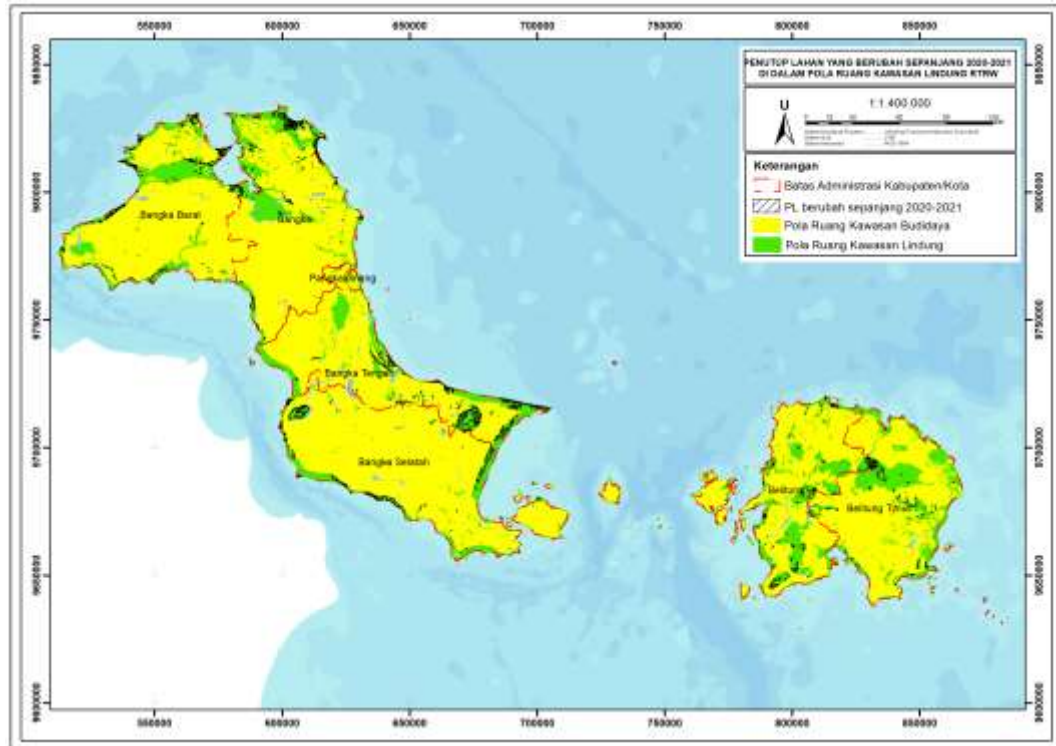


Gambar 2.1. 6 Perubahan Penutup/Penggunaan Lahan Tahun 2020-2021 dalam Pola ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034

Sumber: IGT Pola Ruang RTRW Prov Kep Babel 2014-2034, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; IGT Penutup Lahan Skala 1:250.000 Tahun 2020 dan 2021, BPKHTL XIII Pangkalpinang

Gambar diatas memperlihatkan dinamika perubahan penutup/penggunaan lahan sepanjang tahun 2020-2021 terhadap pola ruang RTRW masih terus terjadi. Dari sisi kawasan lindung walaupun sebagian besar atau 67% tidak mengalami perubahan namun persentase 33% perlu dianalisis lebih jauh apakah perubahan yang terjadi tersebut bersifat positif dalam artian mengembalikan penutup lahan kepada fungsinya sebagai kawasan lindung atau malah sebaliknya. Begitu pula dengan perubahan penutup/penggunaan lahan yang terjadi di kawasan budidaya. Hakikatnya setiap pola ruang telah dirancang sesuai dengan fungsi dan

peruntukannya dan idealnya penutup/penggunaan lahannya tentunya harus berkesesuaian dengan masing-masing fungsi dalam pola ruang tersebut.



Gambar 2.1. 7 Perubahan Penutup/Penggunaan Lahan Tahun 2020-2021 dalam Pola Ruang Kawasan Lindung RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034
Sumber: IGT Pola Ruang RTRW Prov Kep Babel 2014-2034, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; IGT Penutup Lahan Skala 1:250.000 Tahun 2020 dan 2021, BPKHTL XIII Pangkalpinang

Gambar diatas memperlihatkan pola sebaran penutup lahan yang mengalami perubahan sepanjang tahun 2020-2021 di dalam kawasan lindung RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara administrasi perubahan ini terjadi di semua kabupaten yang ada di lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kecuali kota Pangkalpinang. Wilayah yang mengalami perubahan penutup lahan sepanjang tahun 2020-2021 yang paling banyak yaitu di Kabupaten Bangka Tengah dengan estimasi luasan sekitar 10.500 hektar dan paling sedikit terjadi di Kabupaten Belitung dengan luasan sekitar 2.700 hektar. Dari perubahan ini akan dicermati apakah sifatnya positif atau negatif sesuai dengan fungsi ruang yang ditempati.

Berdasarkan hasil analisis spasial diketahui bahwa sepanjang tahun 2020 hingga 2021 penutup lahan belukar yang berada di kawasan lindung paling banyak mengalami konversi menjadi penutup lahan lainnya dengan perkiraan konversi seluas 17.255 hektar sedangkan luasan belukar yang tidak mengalami perubahan atau tetap yaitu seluas 32.428 hektar. Dari luasan yang berubah tersebut, 11.403 hektar belukar terkonversi menjadi pertanian lahan kering campur semak; perkebunan 1.055 hektar; pertambangan 767 hektar; tambak 176 hektar; permukiman 116 hektar serta beberapa penutup lahan lainnya. Dalam juknis KLHK penafsiran citra pada resolusi sedang untuk update penutup lahan nasional disebutkan definisi belukar yaitu seluruh kenampakan areal/kawasan yang didominasi oleh vegetasi rendah yang berada pada lahan kering yang berpotensi untuk mengalami regenerasi menjadi hutan sehingga alih fungsi lahan belukar dalam kawasan lindung berarti sama saja dengan mengurangi potensi munculnya ekosistem hutan baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dari penjabaran luasan diatas terlihat sebagian besar alih fungsi lahan terjadi akibat aktivitas antropogenik manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup serta lokasi untuk bermukim. Di bawah ini adalah gambar yang memperlihatkan kondisi penutup lahan hasil konversi lahan belukar menjadi pertanian lahan kering campur semak dalam kawasan lindung RTRW di tahun 2021 serta kondisi eksisting pada perekaman citra tahun 2022 yang secara visual tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan terhadap penutup lahannya pada kondisi saat ini.

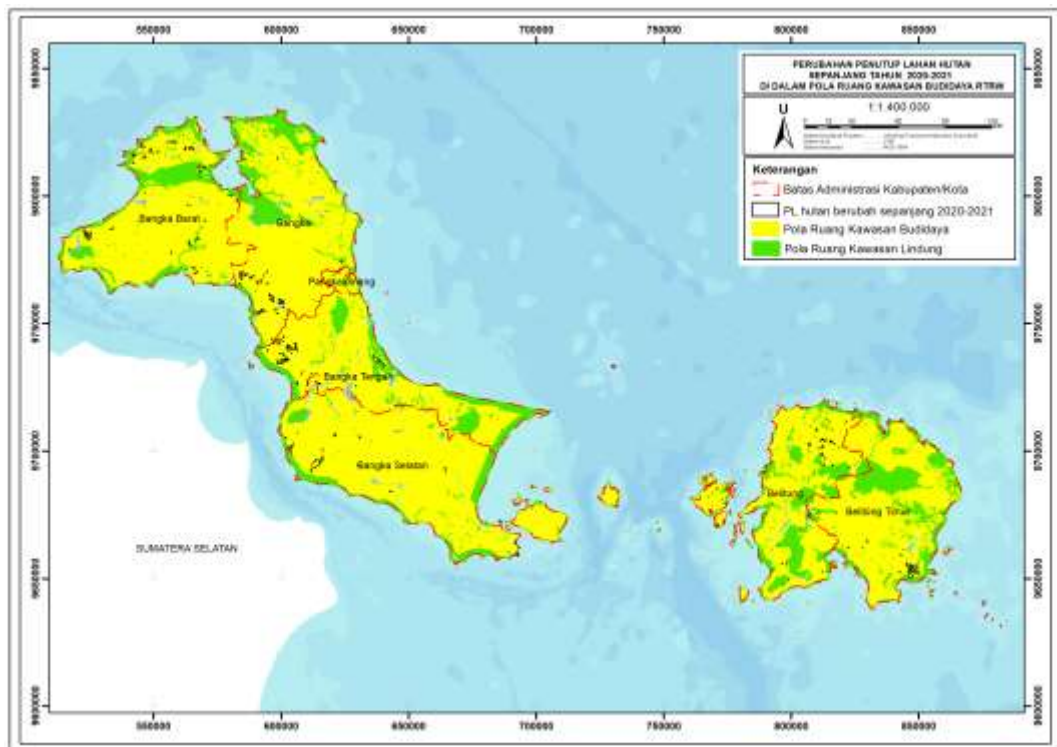


Gambar 2.1. 8 Kenampakan Penutup Lahan Pertanian Lahan Kering Campur Semak Hasil Konversi Lahan Belukar di Kabupaten Bangka Tengah melalui Citra Satelit Perekaman Bulan Juli 2021 (kiri) dan Juli 2022 (kanan)
Sumber: Citra PlanetScope RGB 321 Perekaman Juli 2021, Planetlabs

Alih fungsi lahan tidak hanya terjadi di pola ruang kawasan lindung namun terjadi pula di kawasan budidaya dan pada bahasan ini akan difokuskan pada penutup lahan hutan yang berada di dalam kawasan budidaya. Hasil analisis spasial memperlihatkan sekitar 8.258 hektar penutup lahan hutan yang berada di dalam kawasan budidaya mengalami konversi. Dari beberapa kelas penutup lahan hutan yang ada, hutan rawa sekunder yang paling banyak mengalami konversi yaitu sekitar 4.305 hektar yang diikuti oleh hutan lahan kering sekunder seluas 2.621 hektar; hutan mangrove sekunder seluas 897 hektar serta hutan mangrove primer seluas 159 hektar sementara itu hutan lahan kering primer dan hutan rawa primer tidak mengalami alih fungsi.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034 bahwa kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan namun demikian keberadaan penutup lahan hutan dalam kawasan budidaya harus mendapat perhatian penting untuk meminimalisir potensi deforestasi

maupun degradasi hutan yang terus terjadi yang akan berdampak pada terganggunya keseimbangan lingkungan.



Gambar 2.1. 9 Penutup Lahan Hutan yang Berubah Sepanjang 2020-2021 dalam Pola Ruang Kawasan Budidaya RTRW

Sumber: IGT Penutup Lahan BPKH wilayah XIII Pangkalpinang Skala 1:250.000 Tahun 2021, BPKHTL wilayah XIII; Pola Ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, DPUPRPRKP ; Batas Administrasi Kepmendagri 050-145 Tahun 2022 (data diolah)

Pada gambar diatas terlihat persebaran lokasi penutup lahan hutan yang mengalami perubahan sepanjang tahun 2020-2021 dalam pola ruang kawasan budidaya RTRW di semua wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan luasnya, perubahan paling banyak terjadi di wilayah Kabupaten Bangka Tengah dengan perkiraan sebesar 1.795 hektar yang berada di peruntukan hutan produksi dan penutup lahan hutan yang banyak terkonversi dalam kawasan ini yaitu hutan rawa sekunder. Sementara itu penutup lahan hutan kering sekunder yang berada dalam kawasan budidaya paling banyak terkonversi di wilayah Kabupaten Belitung Timur pada peruntukan kawasan pertanian dengan luas sekitar 880 hektar.

Pola ruang RTRW berdasarkan kondisi penutup lahan eksistingnya disajikan pada Tabel 2.1. 1 berikut.

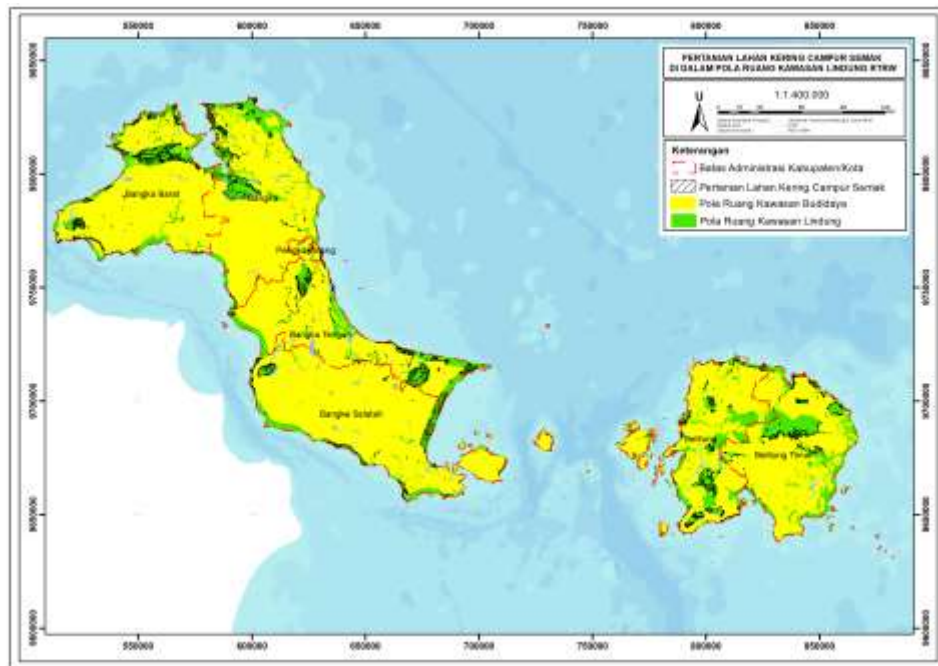
Tabel 2.1. 1 Luas Kawasan Lindung dan Budidaya Beserta Penutup Lahan Eksistingnya

Nama Kawasan		Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
			Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
Kawasan Lindung	Kawasan Lindung terhadap Kawasan Bawahannya	239.099,38	210.995,63	6.724,17	25.983,46	3.919,09
	Kawasan Perlindungan Setempat	43.596,18	39.825,93	810,75	2.026,66	1.269,55
	Kawasan Rawan Bencana	13.701,49	13.670,19	27,93	3,37	0,00
Kawasan Budidaya		1.362.864,7	1.159.085,9	38.192,7	136.011,7	12.159,9

Sumber: IGT Penutup Lahan BPKH wilayah XIII Pangkalpinang Skala 1:250.000 Tahun 2021, BPKHTL wilayah XIII; Pola Ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, DPUPRPRKP (data diolah)

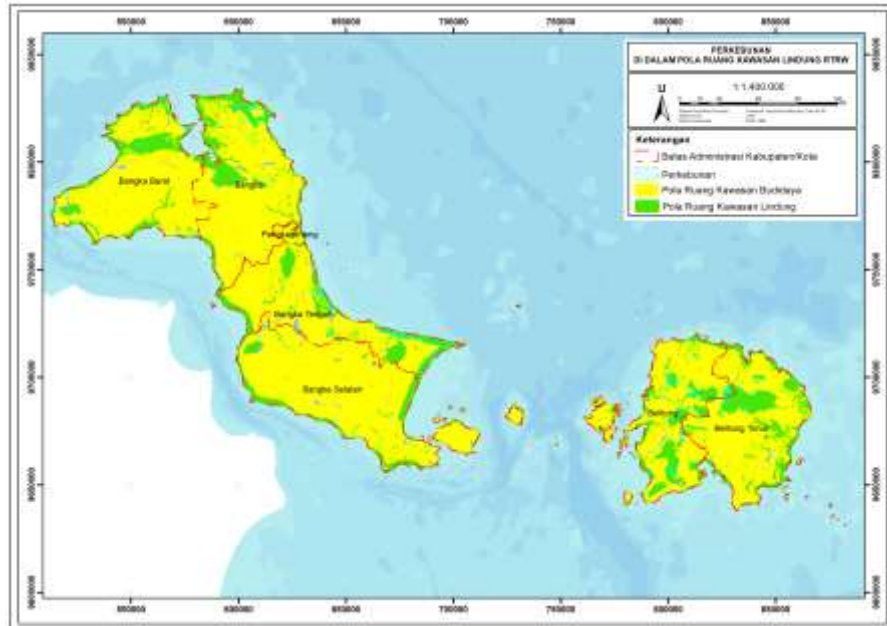
Dari data diatas secara umum terlihat bahwa kawasan lindung yang masih berupa penutup lahan bervegetasi yaitu seluas 264.491,75 ha atau setara dengan 89,2 % jika dibandingkan dengan luas keseluruhan kawasan tersebut. Penutup lahan yang tidak bervegetasi khusus di kawasan pola ruang hutan lindung sebagian besar merupakan tanah terbuka yaitu seluas 20.588,73 ha; area terbangun seluas 4.484,44 ha dan tubuh air seluas 3.293,49 ha. Jika ditinjau berdasarkan persentase luasannya terhadap luas keseluruhan kawasan pola ruang hutan lindung maka masing-masing penutup lahan tersebut mempunyai persentase 6,9%; 1,5% dan 1,1%.

Hasil analisis tumpang susun antara data spasial peta pola ruang RTRW Provinsi dan peta penutup lahan memperlihatkan kondisi eksisting vegetasi penutup pada kawasan lindung didominasi pertanian lahan kering campur semak dengan luasan mencapai 74.055 hektar (Gambar 2.1.10), hutan lahan kering sekunder 51.097 hektar serta perkebunan seluas 27.878 hektar (Gambar 2.1.11).



Gambar 2.1. 10 Penutup Lahan Pertanian Lahan Kering Campur Semak dalam Pola Ruang Kawasan Lindung RTRW 2014 - 2034

Sumber: IGT Penutup Lahan BPKH wilayah XIII Pangkalpinang Skala 1:250.000 Tahun 2021, BPKHTL wilayah XIII; Pola Ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, DPUPRPRKP (data diolah)



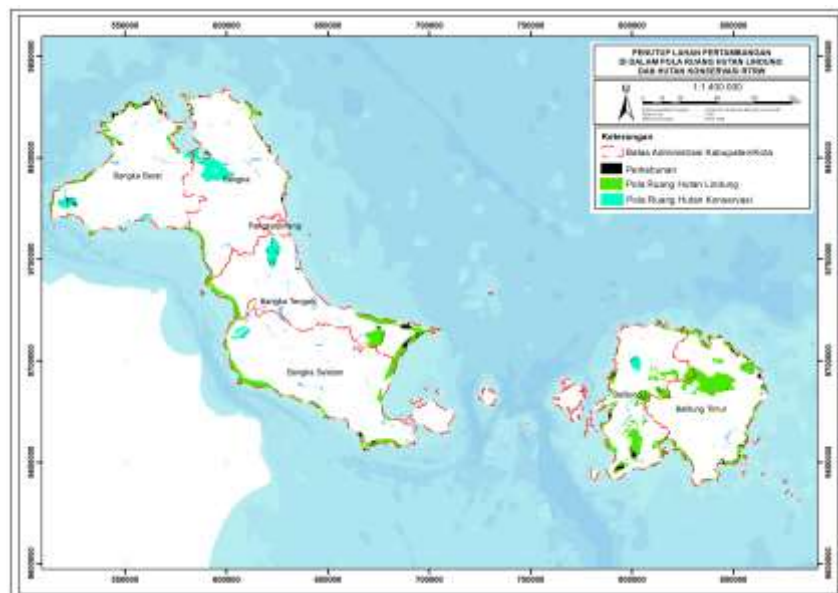
Gambar 2.1. 11 Penutup Lahan Perkebunan dalam Pola Ruang Kawasan Lindung RTRW 2014 - 2034

Sumber: IGT Penutup Lahan BPKH wilayah XIII Pangkalpinang Skala 1:250.000 Tahun 2021, BPKHTL wilayah XIII; Pola Ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, DPUPRPRKP (data diolah)

Secara administrasi, penutup lahan pertanian lahan kering campur dalam pola ruang hutan lindung banyak terdapat di Kabupaten Bangka

Barat sementara untuk luasan tertinggi penutup lahan perkebunan dalam pola ruang hutan lindung berada di Kabupaten Belitung. Dominansi penutup lahan pertanian lahan kering campur semak dan perkebunan menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perekonomian berlangsung pada kawasan yang tidak sesuai peruntukannya. Idealnya ekosistem yang terbangun di dalam kawasan lindung berupa hutan atau vegetasi alami dengan karakteristik dan komposisi tertentu sehingga dapat berperan secara optimal dalam mempertahankan fungsi kawasan tersebut.

Seperti yang ditampilkan pada tabel 2.1.1 selain vegetasi terdapat pula penutup lahan eksisting non vegetasi yang terdiri atas rawa, tubuh air, lahan terbuka, permukiman serta pertambangan. Penutup lahan pertambangan dalam pola ruang kawasan lindung menempati luasan hampir 25 ribu hektar diikuti oleh penutup lahan permukiman yang mencapai kurang lebih 4 ribu hektar. Dari luasan pada kawasan tersebut diketahui pertambangan berada dalam pola ruang peruntukan hutan lindung yaitu sekitar 12.344 hektar serta sekitar 1.575 hektar berada dalam pola ruang peruntukan hutan konservasi.



Gambar 2.1. 12 Penutup Lahan Eksisting Pertambangan dalam Pola Ruang Hutan Lindung dan Hutan Konservasi RTRW 2014 - 2034

Sumber: IGT Penutup Lahan BPKH wilayah XIII Pangkalpinang Skala 1:250.000 Tahun 2021, BPKHTL wilayah XIII; Pola Ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, DPUPRPRKP (data diolah)

Sementara itu penutup lahan permukiman menempati sekitar 1.250 hektar pada pola ruang peruntukan hutan lindung. Dengan adanya penutup lahan non vegetasi tersebut menandakan bahwa kawasan lindung dijadikan sebagai tempat bermukim yang direpresentasikan oleh adanya lahan terbangun sekaligus tempat berusaha yang ditandai oleh adanya lahan terbuka penambangan.

Selain pola ruang hutan lindung, lokasi yang secara tata ruang merupakan kawasan perlindungan setempat seperti sempadan, baik itu sempadan pantai atau sungai juga tidak sepenuhnya berfungsi dengan baik yang ditandai oleh penutup lahan eksistingnya berupa lahan terbuka, lahan terbangun ataupun pertambangan seperti pada Gambar... di bawah ini yang memperlihatkan kegiatan budidaya udang vaname yang berlokasi di Kabupaten Bangka Selatan yang merambah hingga ke wilayah sempadan pantai.

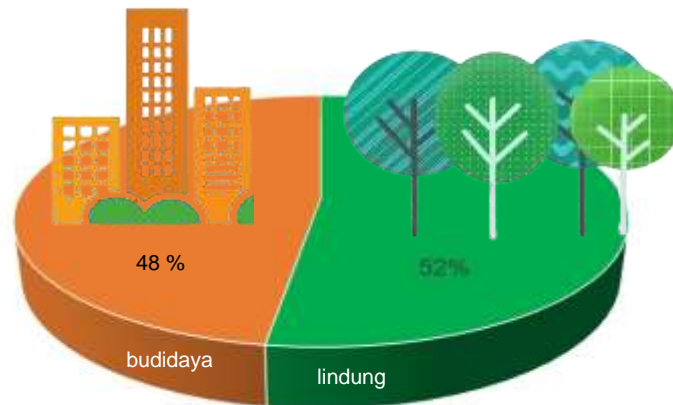


Gambar 2.1. 13 Penutup Lahan Eksisting Tambak Udang Vaname hingga ke Pola Ruang Sempadan Pantai

Sumber: Citra Satelit Resolusi Tinggi Maxar Tech Perekam Tahun 2021, diakses via Google Earth Pro, 2023; IGD Garis Pantai RTRW Prov Kep Bangka Belitung, DPUPRPRKP 2023

Ditinjau secara spesifik, jika membandingkan luasan penutup lahan vegetasi hutan yaitu hutan lahan kering primer dan sekunder, hutan

mangrove primer dan sekunder serta hutan rawa primer dan sekunder yang berada di dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, sekitar 107.429 hektar penutup lahan hutan berada di dalam kawasan lindung dan 97.545 hektar berada di dalam kawasan budidaya. Persentase luasan hutan pada masing-masing kawasan dibandingkan dengan luas keseluruhan penutup lahan hutan diperlihatkan pada gambar berikut.



Gambar 2.1. 14 Persentase Luas Penutup Hutan Berdasarkan Luas Keseluruhannya yang Tersebar dalam Kawasan Lindung dan Budidaya RTRW

Sumber: IGT Penutup Lahan BPKH wilayah XIII Pangkalpinang Skala 1:250.000 Tahun 2021, BPKHTL wilayah XIII; Pola Ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, DPUPRPRKP (data diolah)

Berdasarkan luas keseluruhan penutup lahan hutan, terlihat bahwa masing-masing kawasan diisi oleh penutup lahan hutan dengan luasan yang hampir tidak berbeda jauh namun sesuai dengan fungsi atau peruntukan dari hutan itu sendiri, idealnya penutup lahan hutan berada di dalam kawasan lindung RTRW, bahkan penutup lahan hutan lahan primer seluruhnya berada di dalam kawasan budidaya khususnya pola ruang peruntukan hutan produksi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 disebutkan bahwa hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan sementara hutan primer sendiri

berdasarkan definisi KLHK merupakan hutan alami yang belum terganggu oleh aktivitas manusia sehingga akan lebih baik jika penutup lahan hutan primer ini difungsikan sebagai kawasan lindung.

Kondisi diatas baru sebatas fungsi lindung sesuai RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa pada wilayah yang seharusnya menjadi kawasan yang berperan melindungi kelangsungan perikehidupan justru sudah dirambah oleh aktivitas antropogenik baik dalam bentuk lahan terbangun untuk permukiman maupun tempat berusaha termasuk di dalamnya pembukaan ladang berpindah-pindah maupun aktivitas penambangan yang memang mengkonversi penutup lahan yang sebelumnya bervegetasi menjadi lahan terbuka tak bervegetasi. Ketidaksesuaian tata guna lahan dengan kondisi eksisting saat ini merupakan hal krusial yang harus mendapat perhatian serius untuk menghindari ekspansi kegiatan antropogenik yang semakin meluas dan tidak terkendali di dalam kawasan lindung sekaligus meminimalisir munculnya dampak negatif yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian yang terjadi terhadap keberlanjutan lingkungan.

B. Alih Fungsi Lahan Terhadap Kawasan Hutan

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengertian kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan dibedakan menjadi fungsi lindung, fungsi produksi dan fungsi konservasi. Luas kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan fungsinya disajikan pada tabel 2.1.2 di bawah ini.

Tabel 2.1. 2 Luasan Hutan Berdasarkan Fungsinya

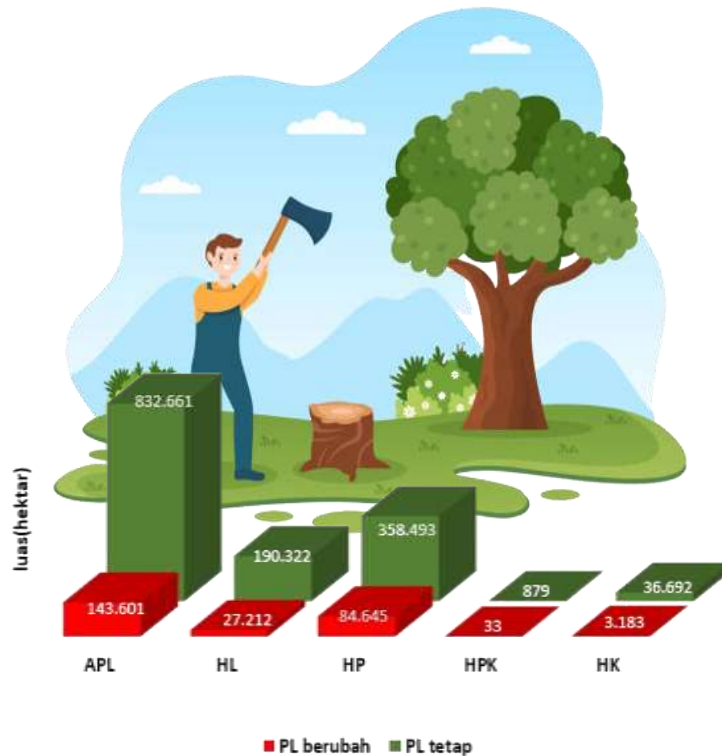
No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1.	Hutan Produksi	435.892,06
2.	Hutan Lindung	186.426,25
3.	Taman Nasional	17.244,84
4.	Taman Wisata Alam	7.155,11
5.	Taman Buru	
6.	Cagar Alam	
7.	Suaka Margasatwa	
8.	Taman Hutan Raya	11.953,89

Sumber: IGT Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai SK 6614/MENLHK/KUH/PLA/10/2021, BPKTL XIII Pangkalpinang 2022

Jika dilihat dari tabel di atas, hutan produksi mempunyai luasan yang paling besar dibandingkan kawasan hutan lindung dan hutan konservasi dengan persentase sekitar 26,1 % dari luas keseluruhan kawasan hutan yang tentu saja telah memperhitungkan luasan areal penggunaan lain didalamnya sementara untuk porsi hutan lindung dan hutan konservasi masing-masing berada pada kisaran 11,2 % dan 2,18%. Fungsi hutan produksi terbagi atas hutan produksi tetap dengan luasan sekitar 435.197 hektar serta hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luasan sekitar 695 hektar. selain itu terdapat areal penggunaan lain menempati porsi luasan sekitar 60,4% dari luasan keseluruhan kawasan hutan.

Jika dibandingkan dengan data pemutakhiran kawasan hutan hingga tahun 2018, terdapat kenaikan luasan hutan produksi maupun hutan lindung masing-masing sekitar 2.8194 hektar dan 895 hektar. Peningkatan luasan khususnya di dalam kawasan hutan lindung merupakan hal positif dalam penataan kawasan hutan, dan sejatinya kawasan hutan dengan fungsi lindung dan konservasi seharusnya berupa penutup lahan hutan namun demikian alih fungsi lahan terus terjadi

sehingga kondisi eksisting penutup lahan di beberapa wilayah sudah tidak merepresentasikan fungsi dari kawasan hutan itu sendiri.



Gambar 2.1. 15 Perubahan Penutup Lahan Sepanjang Tahun 2020-2021 Terhadap Fungsi Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: : IGT Penutup Lahan BPKH wilayah XIII Pangkalpinang Skala 1:250.000 Tahun 2021; IGT Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai SK 6614/MENLHK/KUH/PLA/10/2021, BPKHTL XIII Pangkalpinang 2022

Mengacu pada Gambar 2.1.15 di atas, sepanjang tahun 2020-2021, perubahan penutup lahan paling banyak terjadi di kawasan Area Penggunaan Lain (APL) yaitu seluas 143.601 hektar atau setara dengan 8,56% yang dilanjutkan dengan perubahan penutup lahan dalam kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 84.645 hektar atau setara dengan 5,04%; pada kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 27.212 hektar atau setara dengan 1,62%; pada kawasan Hutan Konservasi (HK) seluas 3.183 hektar atau setara dengan 0,19% serta pada kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 33 hektar atau setara dengan 0,001%. Persentase luasan tersebut diatas jika dibandingkan porsi perubahan

penutup lahan terhadap luas kawasan hutan dan areal penggunaan lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kondisi eksisting penutup lahan saat ini banyak yang tidak merepresentasikan fungsi kawasan hutannya. Hasil analisis spasial dan simulasi secara sederhana tentang kondisi penutup lahan setelah perubahan terhadap fungsi kawasan hutan memperlihatkan dari sejumlah dinamika perubahan penutup lahan yang terjadi sepanjang tahun 2020-2021 tersebut menghasilkan angka kesesuaian sebesar 70% terhadap fungsi kawasan dan artinya sebesar 30% luasan penutup lahan tidak sesuai dengan fungsi kawasan hutannya yang ditempatinya. Jika dikonversi dalam luasan maka dari sekitar total luasan 1,677 juta hektar, sekitar 496.719 hektar diantaranya tidak saling berkesesuaian antara penutup lahan dan fungsi kawasan hutannya. Dari luasan 496.719 hektar tersebut, 43,2% nya merupakan penutup lahan pertanian lahan kering campur semak. Hal ini sekaligus menandakan kegiatan ladang berpindah maupun pembukaan kebun campuran banyak dilakukan di dalam fungsi kawasan hutan khususnya hutan produksi. Simulasi sederhana ini mengabaikan kelas penutup lahan tubuh air dan rawa yang dianggap sesuai berada di kawasan areal penggunaan lain.



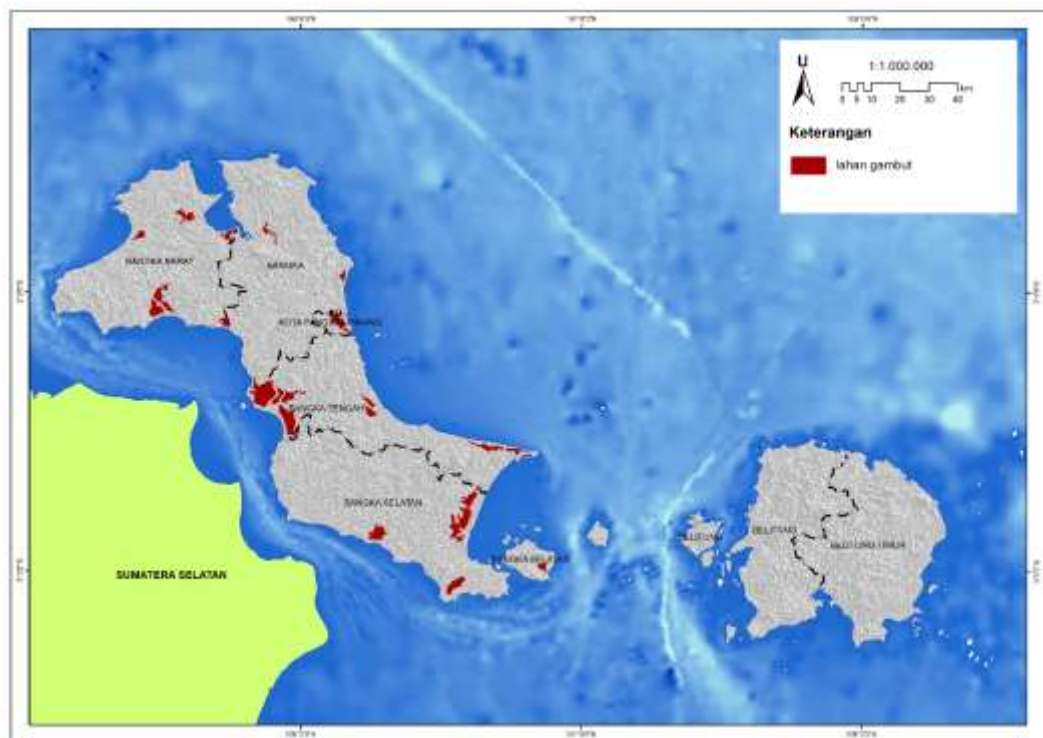
Gambar 2.1. 16 Pertanian Lahan Kering Campur Semak dalam Kawasan Hutan Produksi
Sumber: Citra PlanetScope RGB 321 Perekaman Juli 2022, Planetlabs 2023

Selanjutnya, hasil analisis spasial juga memperlihatkan kesesuaian kelas penutup lahan hutan yang mengalami perubahan sepanjang 2020-2021 di dalam kawasan hutan dan areal penggunaan lain sebesar 89% sehingga luasan penutup lahan hutan yang tidak berkesesuaian terhadap fungsi kawasannya yaitu sebesar 11%. Diantara kesemua kelas penutup lahan hutan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kelas hutan lahan kering sekunder mempunyai tingkat ketidaksesuaian paling besar yaitu mencapai 17.450 hektar karena lokasinya berada di areal penggunaan lain atau APL yang rawan untuk dialihfungsikan terutama untuk kegiatan berusaha.

Sementara itu alih fungsi lahan menjadi pertambangan maupun perkebunan serta permukiman yang berada di dalam kawasan hutan hingga kini terus terjadi yang dapat dilihat dari hasil tumpang susun data spasial penutup lahan tahun 2020 – 2021 dan data spasial kawasan hutan bahwa aktivitas pertambangan yang merambah hingga masuk ke dalam kawasan hutan lindung yaitu seluas 14.680 hektar bahkan hingga ke hutan konservasi seluas 1.719 hektar. Begitu pula dengan aktivitas perkebunan yang ekspansi hingga ke kawasan hutan lindung dengan perkiraan luasan sebesar 15.054 hektar serta hutan konservasi seluas 1.439 hektar. Di sisi lain, adanya permukiman dalam kawasan hutan turut menjadi salah satu bukti bahwa alih fungsi lahan dalam kawasan hutan terus terjadi. Sekitar 1.270 hektar permukiman berada di dalam kawasan hutan lindung dan 42 hektar berada dalam kawasan hutan konservasi. Maraknya aktivitas manusia yang merambah hingga masuk ke dalam kawasan hutan terutama yang sifatnya melanggar ketentuan seperti penambangan secara terbuka, penebangan pohon secara liar, pembukaan lahan dengan cara dibakar dan sebagainya tentunya menjadi tekanan yang berat bagi lingkungan.

C. Alih Fungsi Lahan Gambut

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut disebutkan bahwa gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi secara tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, lahan gambut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebar di 5 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bangka Barat, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, serta Kota Pangkalpinang dengan total luasan hampir mencapai 45 ribu hektar dengan kedalaman rata-rata kurang dari 3 meter atau terkategori gambut dangkal (Gambar 2.1.17).



Gambar 2.1. 17 Sebaran lahan gambut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: Kementerian Pertanian, 2012

Hasil analisis spasial antara peta sebaran lahan gambut dengan peta penutup lahan tahun 2021 memperlihatkan alih fungsi lahan juga turut terjadi di lahan gambut dengan perkiraan luasan sekitar 20.502

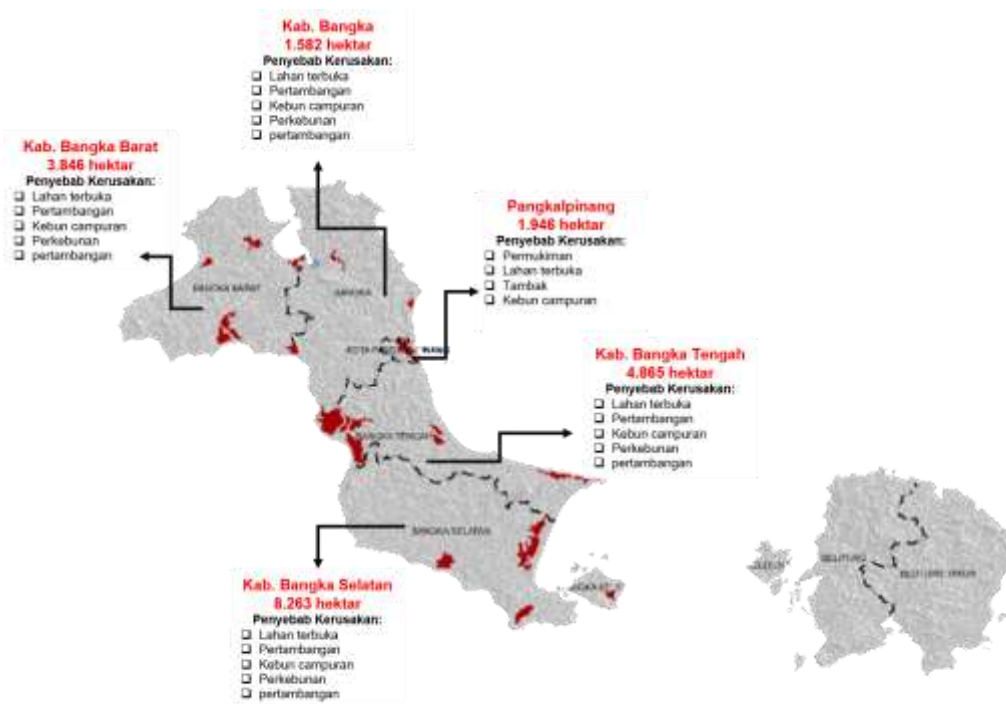
hektar yang beralih fungsi menjadi lahan pertambangan, perkebunan, pertanian lahan kering, permukiman hingga tambak. Hal ini berarti kerusakan akibat alih fungsi lahan tersebut sudah hampir mencapai 50% dari luas lahan gambut yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 2.1. 18 Aktivitas Penambangan di dalam lahan gambut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: Kementerian Pertanian, 2012; CSRT Maxar Tech via google earth, diakses 2023

Secara administrasi, Kabupaten Bangka Selatan merupakan wilayah dengan kerusakan gambut terluas yaitu sebesar 8.263 hektar. Secara rinci luasan kerusakan akibat alih fungsi lahan gambut di masing-masing kabupaten/kota disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 2.1. 19 Kerusakan Lahan Gambut di Kabupaten/Kota

Sumber: IGT penutup lahan BPKH wilayah XIII tahun 2021, peta lahan gambut Kementan, data diolah

Hasil analisis tumpang susun antara data spasial penutup lahan tahun 2021 dengan peta lahan gambut yang dikeluarkan oleh Kementan diketahui bahwa secara umum kerusakan lahan gambut yang terjadi di wilayah Kabupaten di Pulau Bangka disebabkan karena aktivitas yang berlangsung di atasnya dalam bentuk perkebunan, pertambangan, ladang berpindah atau pertanian lahan kering campur semak atau lahan terbuka diusahakan sedangkan di kota Pangkalpinang, pengembangan lahan terbangun untuk pemukiman maupun kegiatan budidaya udang vaname turut berkontribusi terhadap terjadinya kerusakan lahan gambut di wilayah tersebut. Alih fungsi lahan gambut menjadi lahan perkebunan diindikasikan spesifik merujuk pada komoditas kelapa sawit yang memang membutuhkan banyak air dalam budidayanya sementara itu alih fungsi lahan gambut menjadi permukiman merupakan salah satu bukti bahwa terbatasnya lahan di kota Pangkalpinang sementara kebutuhan lahan

untuk permukiman yang terus meningkat menjadikan ekspansi ke lahan gambut tidak dapat dihindari.

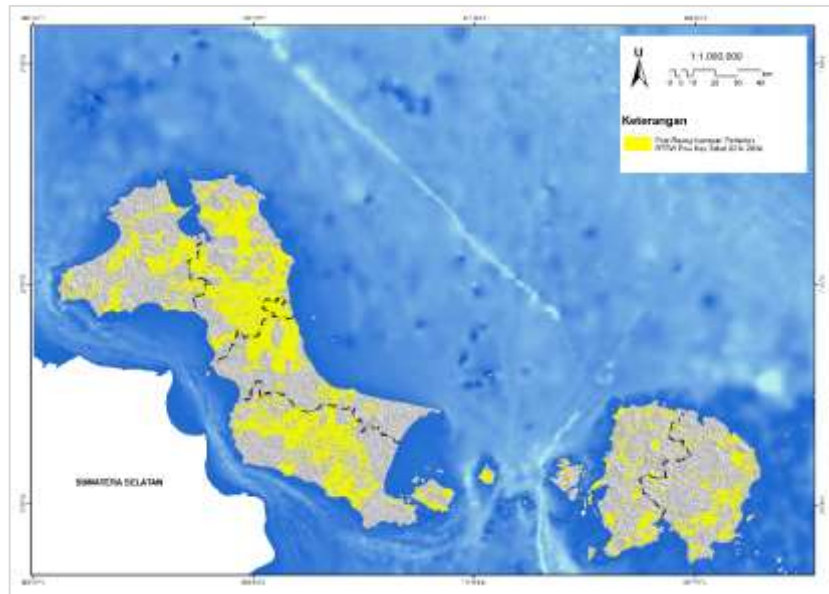
D. Alih Fungsi Lahan Pertanian

Secara umum, lahan pertanian yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas lahan pertanian basah atau sawah, lahan pertanian kering serta lahan pertanian kering campur semak atau kebun campuran. Berdasarkan data spasial pola ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kawasan peruntukan pertanian mempunyai luasan sekitar 491.590 hektar dengan sebaran lokasi ditunjukkan pada Gambar 2.1.20.



Gambar 2.1. 20 Kelas Penutup Lahan Pertanian Lahan Kering Campur Semak di Desa Bakit Kabupaten Bangka Barat

Sumber: CSRT Maxar – Google Earth



Gambar 2.1. 21 Kawasan Pertanian dalam Pola Ruang RTRW
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034

Sumber: IGT Penutup Lahan BPKH wilayah XIII Pangkalpinang Skala 1:250.000 Tahun 2021, BPKHTL wilayah XIII; Pola Ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, DPUPRPRKP (data diolah)

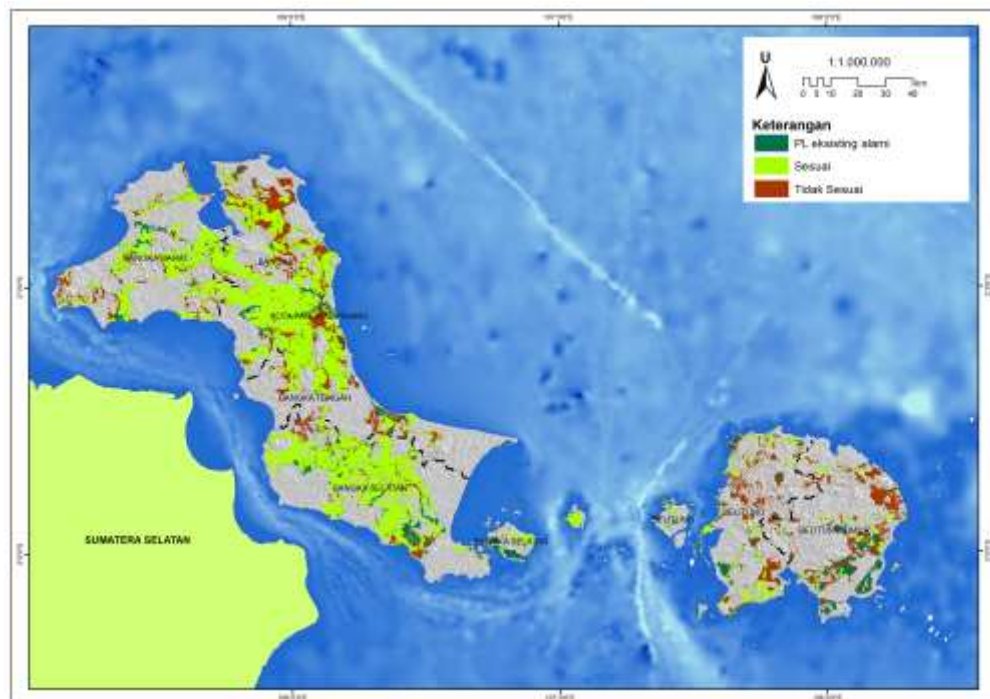
Jika dibandingkan dengan kondisi eksistingnya maka penutup lahan yang ada di dalam kawasan ini tidak semuanya sesuai dengan pola ruang tersebut dan di kawasan tersebut tidak terlepas dari adanya dinamika perubahan lahan seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. 3 Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian

No.	Jenis Penggunaan Baru	Luas Lama (Ha)	Luas Baru (Ha)
1.	Permukiman	17.928	19.814
2.	Industri	0	0
3.	Tanah kering	-	-
4.	Perkebunan	51.789	61.352
5.	Semak belukar	86.180	33.241
6.	Tanah kosong		
7.	Perairan/kolam	4.064	4.330
8.	Lahan Terbuka	2.019	1.449
9.	Tambak	305	457
10.	Pertambangan	50.633	50.562

Sumber: IGT Penutup Lahan BPKH wilayah XIII Pangkalpinang Skala 1:250.000 Tahun 2021, BPKHTL wilayah XIII; Pola Ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, DPUPRPRKP

Dari keterangan pada tabel diatas terlihat bahwa jenis penggunaan lahan baru yang ada di dalam kawasan pola ruang pertanian selain dari penutup lahan pertanian itu sendiri yaitu sebagian besar di tahun 2020 masih didominasi oleh penutup lahan alami berupa semak belukar seluas 86.180 hektar disusul oleh perkebunan seluas 51.789 hektar; pertambangan sebesar 50.633 hektar serta permukiman lahan terbangun sebesar 17.928 hektar. Luasan ini mengalami perubahan di tahun 2021 dimana penutup lahan perkebunan dan permukiman masing-masing mengalami kenaikan menjadi 61.352 hektar dan 19.814 hektar sementara penutup lahan pertambangan sendiri cenderung tetap.



Gambar 2.1. 22 Kesesuaian penutup lahan eksisting 2021 terhadap pola ruang RTRW kawasan pertanian

Sumber: IGT Penutup Lahan BPKH wilayah XIII Pangkalpinang Skala 1:250.000 Tahun 2021, BPKHTL wilayah XIII; Pola Ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, DPUPRPRKP

Di lain sisi peningkatan luasan perkebunan dan permukiman diikuti oleh terjadinya penurunan luasan belukar sebesar 52.939 hektar menjadi 33.241 hektar di tahun 2021. Pada tabel diatas juga terlihat tren kenaikan luasan penggunaan lahan baru berupa kelas tambak walaupun dalam

jumlah yang terbilang tidak signifikan besarnya dibandingkan kelas penutup lahan yang lain, namun demikian peningkatan ini perlu mendapat perhatian seiring dengan semakin massifnya budidaya tambak udang di sekitar wilayah pesisir.

Gambar 2.1.22 di atas menyajikan persebaran spasial penutup lahan eksisting pada tahun 2021 yang ditumpangsusunkan dengan peta pola ruang kawasan pertanian sehingga diperoleh estimasi ketidaksesuaian antara penutup lahan terhadap pola ruangnya. Kategori sesuai merupakan penutup lahan pertanian lahan kering, kebun campuran atau pertanian lahan kering campur semak serta sawah sedangkan kategori tidak sesuai lebih ditekankan pada penutup lahan buatan yaitu perkebunan pertambangan, tambak serta permukiman. Sementara itu untuk penutup lahan eksisting alami berisi hutan, belukar, rawa, tubuh air serta savana. Berdasarkan analisis pendahuluan perubahan penutup lahan yang menjadi *pressure* bagi tata guna lahan terutama yang terjadi sepanjang tahun 2020 hingga 2021 yang mana tipikalnya hampir sama dengan tahun sebelumnya maka pada bab *Pressure* ini akan difokuskan pada alih fungsi lahan yang berkenaan dengan peningkatan luasan Pertanian Lahan Kering Campur Semak, Perkebunan, Pertambangan, Permukiman serta Tambak yang kesemuanya ini berkaitan pula dengan peningkatan taraf hidup masyarakat.

E. Alih Fungsi Lahan Menjadi Pertambangan

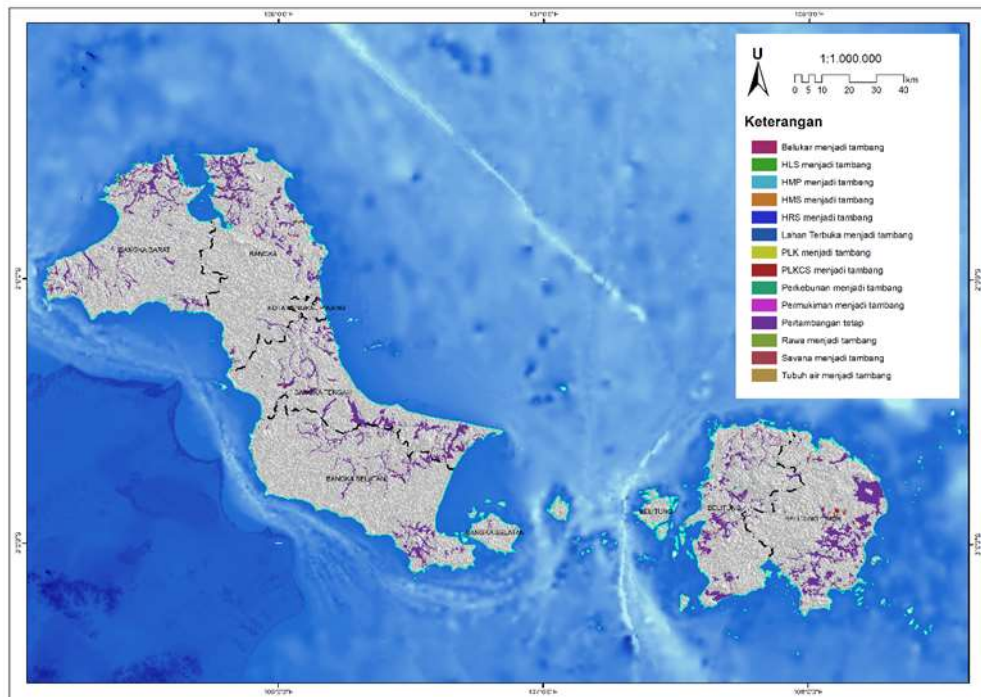
Kepulauan Bangka Belitung sangat terkenal dengan potensi mineral timahnya. Faktor ekonomi terkait dengan besarnya keuntungan yang didapatkan dari sektor ini membuat banyaknya penutup lahan utamanya yang bervegetasi yang beralih fungsi menjadi lahan pertambangan illegal. Selain itu aktivitas penambangan illegal juga berlangsung di lahan reklamasi yang seharusnya steril dari kegiatan tersebut. Melalui interpretasi citra secara visual, terlihat aktivitas penambangan membentuk pola spasial memanjang (deliniasi warna merah pada gambar 2.1.23)

mengikuti jaringan sungai yang memang dibutuhkan saat proses pencucian bijih timah yang sekaligus membawa lumpur hasil proses penambangan tersebut ke arah hilir sungai sehingga mengakibatkan terjadinya sedimentasi atau pendangkalan sungai.



Gambar 2.1. 23 Pola Sebaran Areal Pertambangan Timah dari Citra Sentinel 2A MSI
RGB 836 Perekaman 16 Februari 2022
Sumber: esa copernicus, 2023

Dalam rentang tahun 2020 hingga 2021 luasan lahan pertambangan mengalami kenaikan dari 155.203 hektar menjadi 156.325 hektar atau tidak terlihat peningkatan secara signifikan. Dalam dinamikanya, luasan penutup lahan pertambangan yang cenderung tetap di tahun 2020 yaitu sebesar 145.603 sehingga kontribusi sekitar 10.722 hektar berasal dari konversi lahan lain menjadi pertambangan yang didominasi oleh perubahan penutup lahan belukar seluas 3.090 hektar; pertanian lahan kering campur semak seluas 3.649 hektar; belukar rawa seluas 2.488 hektar serta beberapa penutup lahan lain termasuk kelas lahan terbuka sebesar 2.764 hektar.



Gambar 2.1. 24 Dinamika Perubahan Penutup Lahan 2020 menjadi Pertambangan di Tahun 2021

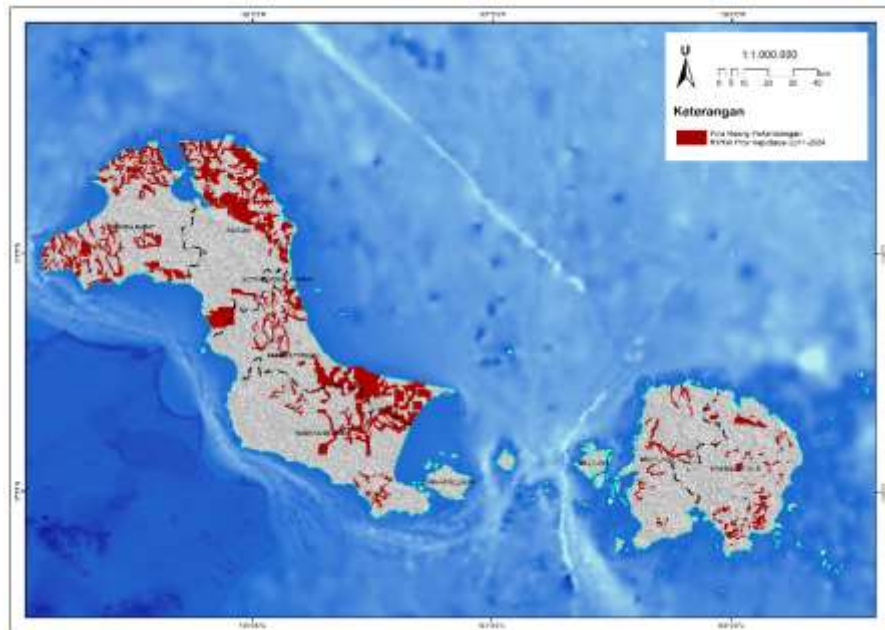
Sumber: IGT Penutup Lahan BPKH wilayah XIII Pangkalpinang Skala 1:250.000 Tahun 2021, BPKHTL wilayah XIII; Pola Ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, DPUPRPRKP (data diolah)

Terhadap kenaikan luasan pertambangan yang tidak terlalu signifikan pada tahun 2021 disebabkan karena penutup lahan pertambangan juga turut mengalami konversi menjadi penutup lahan lainnya yaitu sebagian besar menjadi semak belukar seluas 2.065 hektar; perkebunan seluas 3.145 hektar serta beberapa penutup lahan lainnya.

Perubahan penutup lahan pertambangan menjadi belukar menandakan bahwa lokasi tersebut sudah ditinggalkan oleh penambang sehingga proses alami mengubah penutup lahannya menjadi semak belukar. Di satu sisi dinamika ini membawa dampak positif bagi lingkungan dengan kembali bervegetasinya penutup lahan yang sebelumnya terbuka. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan pula lahan tersebut akan kembali dibuka untuk aktivitas yang sama di masa mendatang. Selanjutnya perubahan penutup lahan pertambangan menjadi areal perkebunan mengindikasikan terjadinya peralihan mata pencaharian dari penambang menjadi petani kebun khususnya komoditas sawit apalagi

ditunjang dengan kenaikan harga tandan buah segar sepanjang tahun 2021.

Alih fungsi lahan merupakan perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam pola ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat tumpang tindih antara kawasan peruntukan pertambangan dengan beberapa pola ruang lainnya. Persebaran spasial kawasan ini disajikan pada Gambar 2.1. 25 berikut.



Gambar 2.1. 25 Pola Ruang Pertambangan dalam RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034

Sumber: IGT Penutup Lahan BPKH wilayah XIII Pangkalpinang Skala 1:250.000 Tahun 2021, BPKHTL wilayah XIII; Pola Ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, DPUPRPRKP

F. Alih fungsi lahan menjadi perkebunan

Hingga saat ini kelapa sawit masih menjadi komoditas utama sektor perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Produktivitasnya menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya perusahaan kelapa sawit skala besar serta peningkatan produksinya. Penambahan luas kebun sawit tersebut membuktikan minat masyarakat mengembangkan sektor sawit cukup besar yang didorong oleh asumsi investasi ekonomi masa depan yang berkelanjutan. Hal ini dibuktikan pula oleh signifikannya realisasi investasi

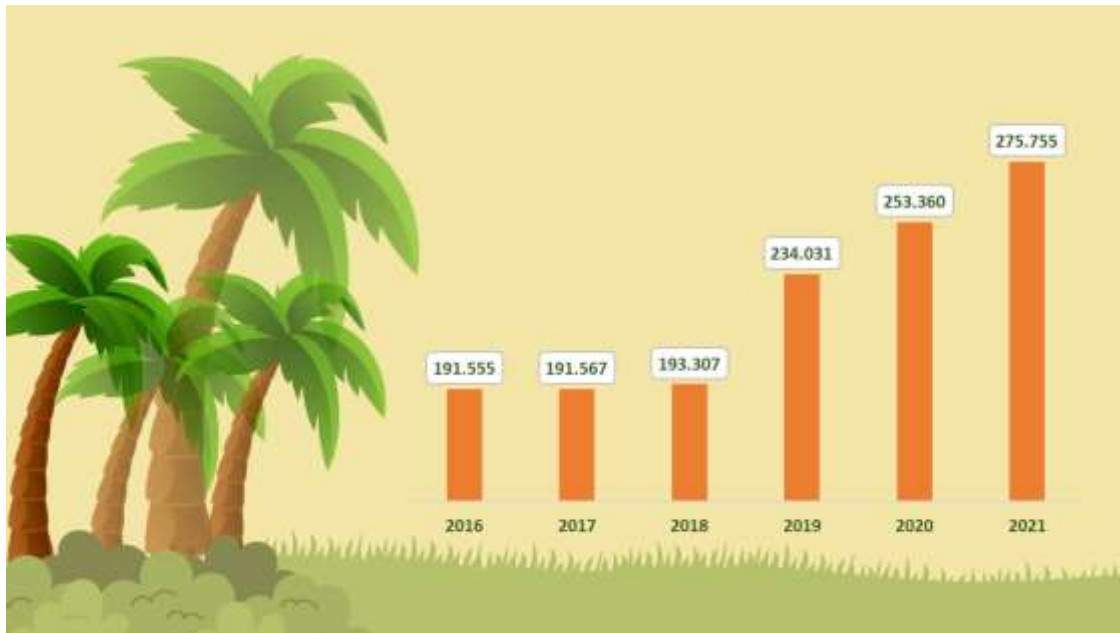
pada tahun 2022 yang mencapai 8,17 triliun dimana salah satu sektor yang mendominasi yaitu sektor perkebunan.



Gambar 2.1. 26 Penutup lahan pertambangan yang mulai berubah menjadi perkebunan di Kabupaten Bangka

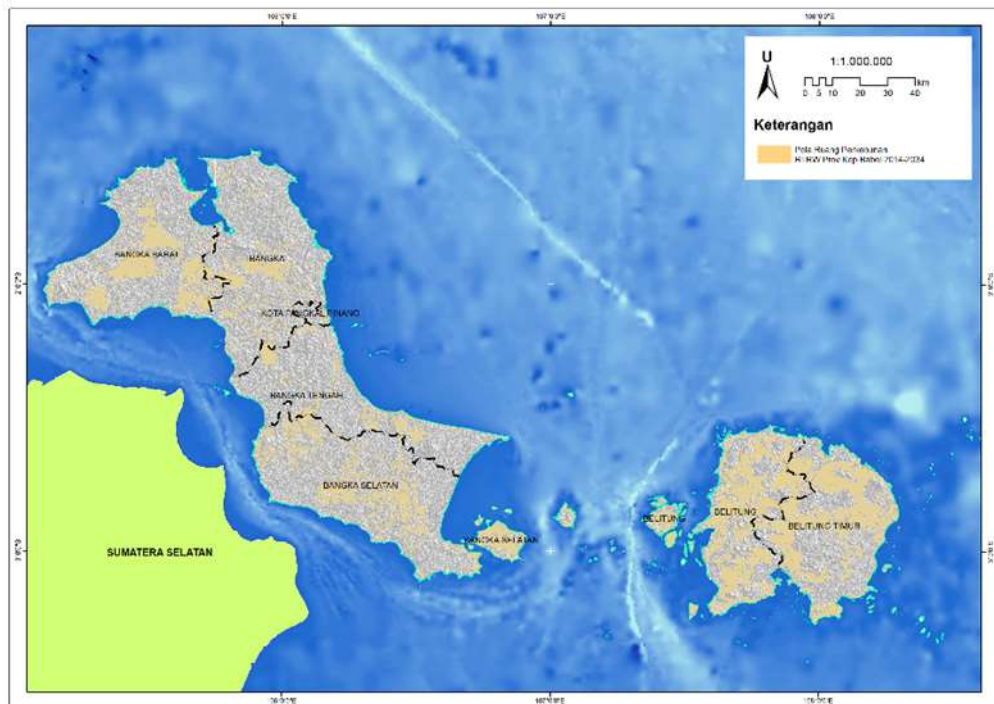
Sumber: CSRT Maxar – Google Earth, diakses 2022

Ditinjau dari dinamika perubahan penutup lahan, dalam rentang waktu lima tahun saja yaitu terhitung 2016 hingga tahun 2021 kelas penutup lahan perkebunan mengalami tren kenaikan luasan sebesar 84.200 hektar. Lebih rinci kenaikan luasan perkebunan per tahunnya berdasarkan data spasial penutup lahan diperlihatkan dalam Gambar 2.1. 27 di bawah ini.



Gambar 2.1. 27 Peningkatan luasan Perkebunan tahun 2016 – 2021
Sumber: IGT penutup lahan tahun 2016-2021, BPKHTL wilayah XIII Pangkalpinang(data diolah)

Perkebunan meningkat di tahun 2021 luasannya hingga mencapai 22.395 hektar. Peningkatan luasan perkebunan ini merupakan hasil alih fungsi penutup lahan yang sebagian besar didominasi oleh perubahan pertanian lahan kering campur semak sebesar 12.845 hektar; belukar sebesar 7.807 hektar, belukar rawa sebesar 2.488 hektar, lahan terbuka sebesar 2.763 hektar; pertambangan sebesar 3.145 hektar serta beberapa penutup lahan lainnya. Namun demikian secara umum jika membandingkan luasan penutup lahan perkebunan pada tahun 2020 dan 2021 terlihat kenaikan terlihat peningkatan luasan perkebunan tahun 2020 hingga 2021 hanya sebesar 22.395 hektar saja. dalam dinamika perubahan penutup lahan tahun 2020-2021 kelas perkebunan yang cenderung tetap sekitar 244.070 hektar saja. dilain sisi masih ada perkebunan yang terkonversi menjadi pertambangan sekitar 921 hektar mengindikasikan terjadinya peralihan mata pencaharian dimana penambangan dipandang lebih cepat menghasilkan dibandingkan berkebun.

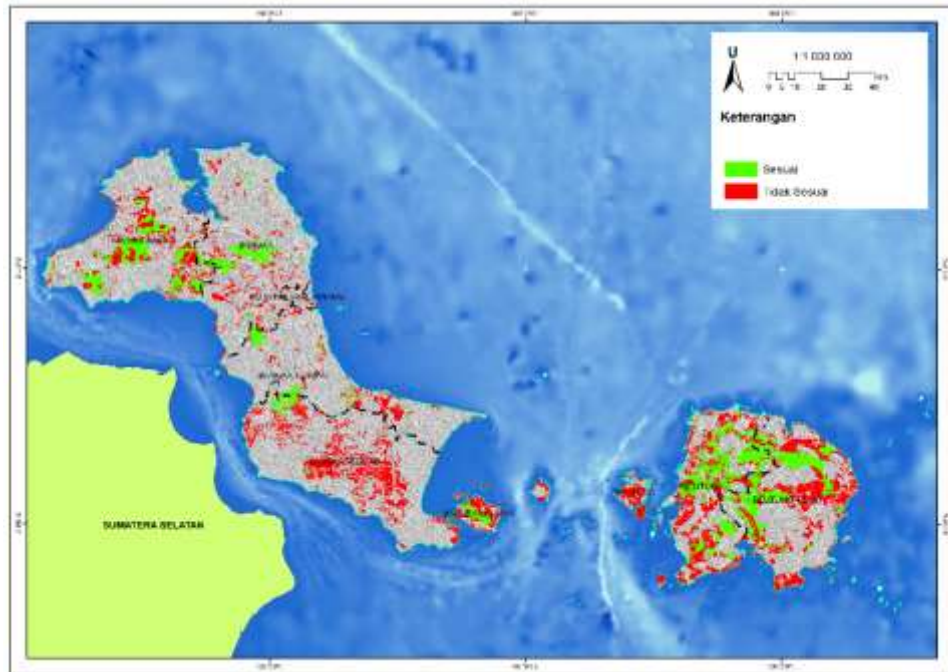


Gambar 2.1. 28 Pola Ruang Perkebunan RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: DPUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, data diolah 2023

Berdasarkan pola ruangnya kawasan perkebunan di RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki luasan sekitar 452.185 hektar. Jika dibandingkan dengan kondisi eksistingnya di tahun 2021, sekitar 36,1 % atau sekitar 158.063 hektar merupakan perkebunan sementara selebihnya terkategori tidak sesuai yang sebagian besar merupakan kelas pertanian lahan kering campur semak dengan persentase 33,6 % atau seluas 146.823 hektar ; belukar 7,12 % atau sekitar 31.179 hektar ; pertambangan dengan persentase 6,12% atau sekitar 26.785 hektar.

Dalam juknis penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan nasional dijelaskan definisi masing-masing penutup lahan salah satunya yaitu kelas pertanian lahan kering campur semak yang diartikan sebagai seluruh kenampakan yang merupakan campuran areal pertanian, perkebunan serta semak belukar. Terhadap luasan penutup lahan pertanian lahan kering campur semak yang mendominasi ketidaksesuaian yang terjadi pada pola ruang perkebunan salah satunya diindikasikan bisa berasal dari delineasi penutup lahan hingga interpretasi

terhadap kelas penutup lahan pertanian lahan kering campur semak dimana lahan perkebunan termasuk didalam definisinya. Kesesuaian penutup lahan eksisting di tahun 2021 terhadap pola ruang perkebunan disajikan pada Gambar 2.1. 29 berikut.



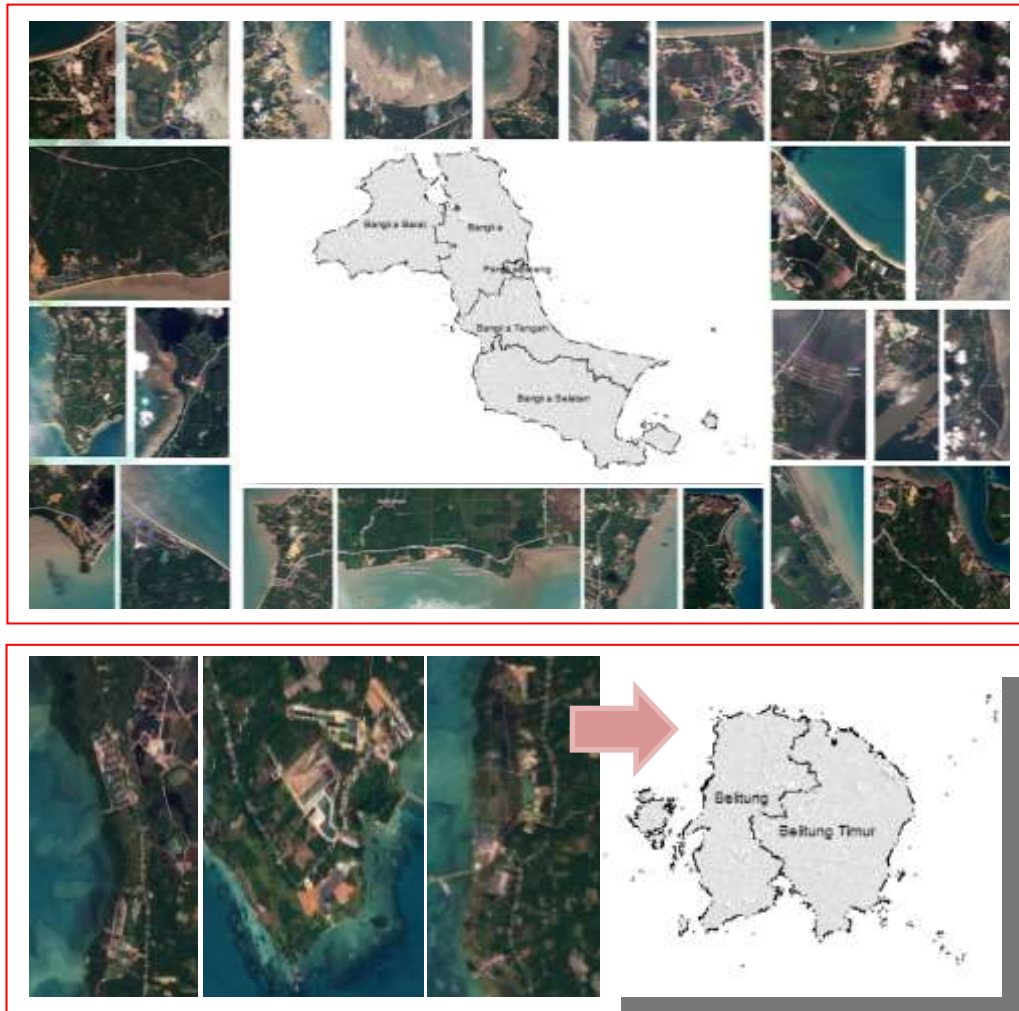
Gambar 2.1. 29 Kesesuaian Penutup Lahan Eksisting terhadap Pola Ruang Perkebunan RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: IGT Penutup Lahan BPKH wilayah XIII Pangkalpinang Skala 1:250.000 Tahun 2021, BPKHTL wilayah XIII; Pola Ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, DPUPRPRKP

Dari gambar diatas secara umum terlihat bahwa ketidaksesuaian pola ruang perkebunan dengan penutup lahan eksisting tahun 2021 lebih banyak terjadi di Pulau Bangka. Selanjutnya hasil analisis spasial antara pola ruang perkebunan di dalam RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penutup lahan tahun 2021 serta batas administrasi tata ruang diperoleh informasi bahwa alih fungsi lahan perkebunan yang tidak sesuai dengan peruntukan pada pola ruangnya terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten Belitung merupakan wilayah administrasi dengan luasan kesesuaian pola ruang terhadap kondisi eksisting paling besar yaitu sekitar 45.684 hektar sementara

ketidaksesuaian arahan pemanfaatan ruang paling banyak terjadi di Kabupaten Bangka Selatan yaitu seluas 75.243 hektar.

G. Alih Fungsi Lahan menjadi Tambak di Wilayah Pesisir



Gambar 2.1. 30 Persebaran tambak udang di pesisir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Perekaman Citra PlanetScope

Sumber: planetlabs, diakses tahun 2022-2023

Kegiatan budidaya udang vaname di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih dipandang mempunyai prospek keuntungan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi pengajuan izin memang terdapat penurunan namun demikian untuk diketahui bahwa faktanya banyak kegiatan budidaya udang vaname yang sudah eksisting di lapangan namun belum mengurus perizinan. Dari segi perekonomian,

adanya kegiatan ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah namun di sisi lain, dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut harus mendapatkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekosistem pesisir.

Dengan semakin bertambahnya jenis usaha/ kegiatan tersebut sementara ketersediaan ruang sesuai dengan peruntukannya cenderung terbatas maka pelanggaran terhadap penataan ruang merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Alih fungsi lahan berkenaan dengan massifnya perkembangan usaha budidaya udang vaname ini menjadi salah satu *pressure* terhadap lingkungan.



Gambar 2.1. 31 Tambak Udang Vaname Di Kabupaten Bangka
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Berdasarkan data spasial penutup lahan KLHK, dalam rentang waktu tahun 2018 hingga tahun 2021 luasan tambak udang cenderung mengalami peningkatan terutama di Pulau Bangka. Adapun perbandingan luasan tambak tiap tahunnya disajikan pada Gambar 2.1. 32 berikut ini



Gambar 2.1. 32 Perbandingan luasan tambak tahun 2018 – 2021
Sumber: IGT Penutup Lahan BPKH wilayah XIII Pangkalpinang Skala 1:250.000 Tahun 2018-2021, BPKHTL wilayah XIII (data diolah)

Luasan tambak meningkat secara signifikan terlihat dalam rentang tahun 2020 hingga 2021 dengan kenaikan luasan mencapai 818 hektar. peningkatan luasan tambak di tahun 2021 merupakan hasil perubahan penutup lahan lainnya yang didominasi oleh perubahan belukar seluas 175,4 hektar; hutan rawa sekunder seluas 100,6 hektar; pertanian lahan kering campur semak seluas 187,46 hektar; belukar rawa seluas 92,4 hektar serta beberapa penutup lahan lainnya. Hutan mangrove sekunder merupakan salah satu kelas penutup lahan yang turut mengalami konversi menjadi tambak walaupun jumlahnya tidak terlalu besar yaitu seluas kira-kira 11,04 hektar. Angka ini dapat saja bertambah semakin besar jika pengawasan terhadap izin usaha atau kegiatan tidak diperketat. dengan bertambahnya luasan tersebut sekaligus menandakan kontribusi tambak dalam deforestasi hutan khususnya di wilayah pesisir.

Tahun 2022 luasan tambak diestimasikan mengalami kenaikan, walaupun secara data luasan penutup lahan tahun 2022 belum dipublish hingga di pertengahan tahun 2023 namun dari hasil identifikasi dan interpretasi citra planetscope pada perekaman desember 2022 sudah terlihat 10 lokasi eksisting tambak udang vaname di Pulau Belitung khususnya di Desa Tanjung Kelumpang Kecamatan Dendang Kabupaten

Belitung Timur dengan perkiraan luasan hasil deliniasi sebesar ± 152 hektar (Gambar 2.1.33)



Gambar 2.1. 33 Tambak Udang Vaname Eksisting di Kabupaten Belitung Timur
Berdasarkan Citra PlanetScope Perekaman 18 Desember 2022
Sumber: planetlabs, 2023

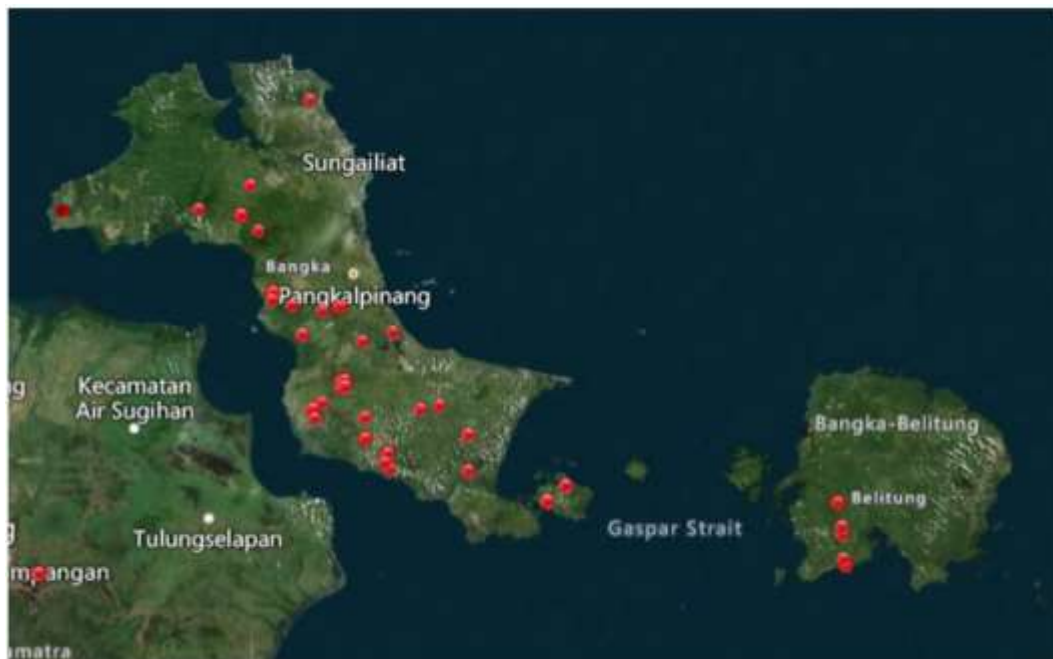
Dari gambar diatas terlihat indikasi alih fungsi lahan tambak di kawasan sempadan pantai yang merupakan kawasan perlindungan setempat (gambar 2.1.34). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21/Permen-KP/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai bahwa lebar sempadan pantai minimal 100 meter ke arah darat.



Gambar 2.1. 34 Tambak Udang Vaname Eksisting di Kabupaten Belitung Timur
Di Wilayah Sempadan Pantai
Sumber: citra planetscope perekaman 18 Desember 2022, planetlabs, 2023

Pemanfaatan ruang di wilayah pesisir untuk kegiatan budidaya udang vaname idealnya harus memperhatikan kesesuaian lokasi berdasarkan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam penataan ruang. Namun demikian kenyataan yang ada di lapangan justru kebalikannya. Kegiatan tambak tersebut beberapa diantaranya telah merambah hingga masuk ke wilayah sempadan pantai yang merupakan kawasan perlindungan setempat menurut rencana tata ruang ataupun berekspansi hingga memasuki kawasan hutan lindung. Ditambah lagi tidak semua tambak yang sudah eksisting mempunyai perizinan yang jelas khususnya di bidang lingkungan. Hal ini merupakan salah satu tantangan dalam upaya monitoring atau pengawasan terhadap kegiatan tersebut karena ketidaklengkapan data pemrakarsa maupun lokasi kegiatan.

H. Pembukaan Lahan dengan Cara Bakar



Gambar 2.1. 35 Hotspot yang Teridentifikasi Sepanjang Tahun 2022 Berdasarkan Citra Satelit Aqua, NOAA20 dan SNPP

Sumber: brin.go.id, diakses 2023

Pembukaan lahan dengan cara dibakar merupakan salah satu cara mengalih fungsi lahan yang banyak terjadi di wilayah di Indonesia

termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat dalam membuka lahan kebun baru karena dipandang lebih ekonomis daripada menggunakan alat berat yang biayanya lebih tinggi.

Sepanjang tahun 2022, terdapat sekitar 25 (Dua Puluh Lima) kejadian karhutla atau kebakaran hutan dan lahan berdasarkan data spasial hotspot atau titik api yang terindikasi dari citra satelit Aqua, S.NPP, NOAA-20 pada tingkat kepercayaan tinggi yang diunduh dari laman brin.go.id sedangkan jika mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat setidaknya ada 37 kejadian bencana di tahun 2022. Faktor musim memang tidak dapat dilepaskan dari penyebab terjadinya karhutla yang biasanya berpotensi tinggi terjadi di musim kemarau.



Gambar 2.1. 36 Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar di Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Februari 2022
Sumber: Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, 2022

BMKG melalui publikasinya Prakiraan Musim Kemarau 2022 di Indonesia menyebutkan bahwa awal musim kemarau tahun 2022 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimulai antara bulan Mei-Juli 2022

serta puncaknya diprediksi pada bulan September 2022. Jika data sebaran kejadian karhutla di tahun 2022 dihubungkan awal musim kemarau tersebut yang baru berlangsung di pertengahan tahun maka terdapat beberapa kejadian yang diindikasikan merupakan praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar yang didukung pula oleh dokumentasi lapangan.

II.1.2.3 Deforestasi dan Degradasi Hutan

Deforestasi dan degradasi pada hakikatnya merupakan bentuk alih fungsi penutup lahan hutan yang sengaja ditempatkan pada pokok sub bahasan tersendiri di luar pembahasan alih fungsi lahan yang telah disampaikan sebelumnya. Hal yang menjadi pertimbangan yaitu tidak semua penutup lahan hutan berada dalam kawasan lindung baik itu secara tata ruang maupun status fungsi kawasan hutan. Deforestasi adalah perubahan dari hutan menjadi non hutan sedangkan degradasi adalah penurunan kualitas hutan yang ditandai dengan terjadinya perubahan dari kelas hutan primer menjadi hutan tipe sekunder. Secara umum ditinjau dari data spasial penutup lahan tahun 2020-2021, hutan terlihat mengalami perkembangan positif yang ditandai oleh kenaikan luasan sebesar 7.719 hektar yaitu pada tahun 2020 sebesar 197.255 hektar menjadi 204.974 hektar di tahun 2021. Namun demikian karena penutup lahan cenderung untuk mengalami perubahan sering dengan perkembangan wilayah dan perekonomian maka deforestasi maupun degradasi hutan hampir tidak dapat dihindari.



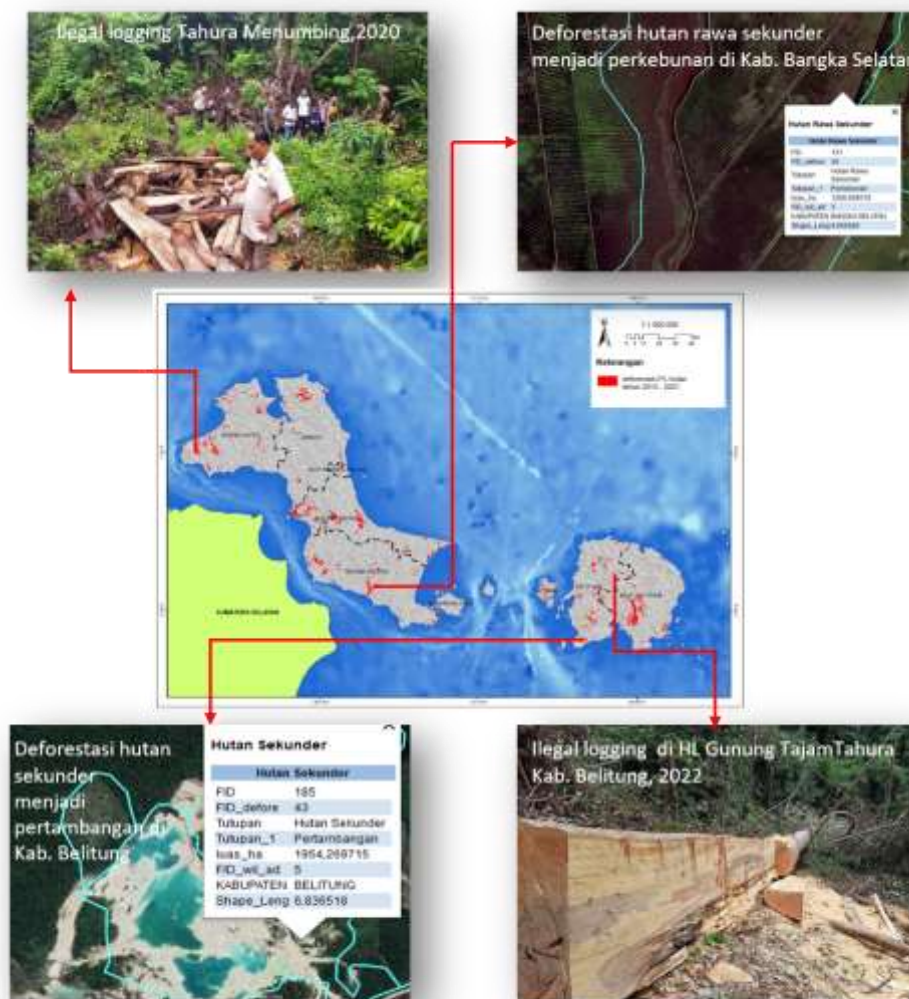
Gambar 2.1. 37 Perubahan luasan penutup hutan tahun 2015 – 2021

Sumber: IGT penutup lahan Prov Kep Babel Skala 1:250.000 Tahun 2015-2021, BPKHTL wil XIII, (data diolah)

Deforestasi merupakan proses penurunan luasan hutan sebagai akibat alih fungsi menjadi lahan non hutan seperti infrastruktur, permukiman, pertanian, pertambangan dan perkebunan (Wahyuni, Herpita & Suranto, 2021). Dari hasil analisis spasial antara 2 data penutup lahan digital tahun 2015 dan tahun 2021 diketahui bahwa secara umum dalam kurun tahun 2015 ke 2021 telah terjadi deforestasi hutan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luasan sekitar 62.378 hektar namun demikian jika melihat jumlah penutup lahan hutan seperti pada Gambar 2.1.37 di atas maka selisih pengurangan luas hutan tidak mencapai angka 62.378 hektar, hal ini disebabkan karena dinamika perubahan penutup lahan tiap tahunnya dan memungkinkan semak belukar berkembang menjadi hutan sekunder jika tidak diganggu oleh manusia.

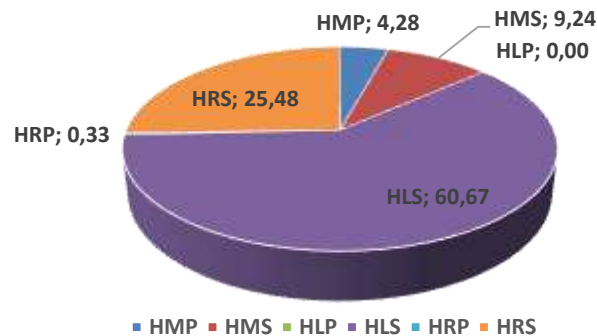
Seperti definisi diatas, deforestasi yang banyak terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan hasil alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan, pertambangan, permukiman maupun pertanian lahan kering campur semak serta praktek *illegal logging* atau penebangan hutan

secara liar. Kabupaten Bangka Tengah merupakan wilayah administrasi yang paling banyak mengalami deforestasi hutan dengan luasan sekitar 12.336 hektar disusul oleh Kabupaten Bangka Barat seluas 11.753 hektar; Kabupaten Belitung Timur 11.240 hektar; Kabupaten Bangka Selatan seluas 10.237 hektar; Kabupaten Belitung seluas 10.024 hektar serta Kota Pangkalpinang seluas 220 hektar.



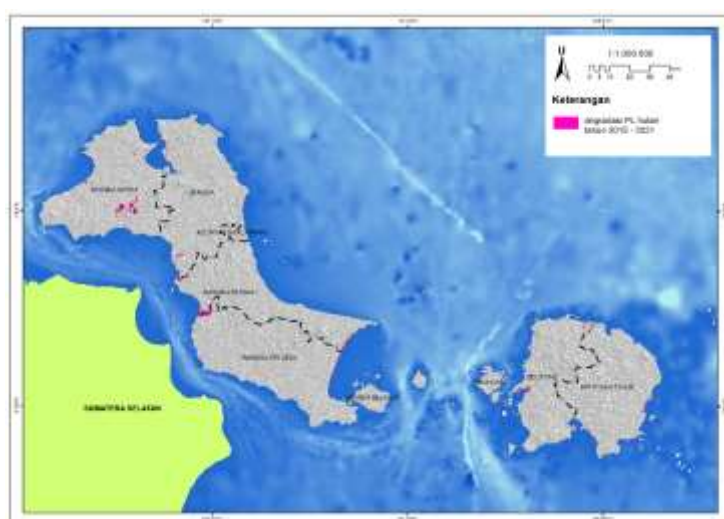
Gambar 2.1. 38 Persebaran Deforestasi Hutan Antara Tahun 2015 - 2021

Sumber: IGT Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai SK 6614/MENLHK/KUH/PLA/10/2021, BPKTL XIII Pangkalpinang 2022, data diolah; bangkatribunnews 2020, fordasbangkabelitung 2022



Gambar 2.1. 39 Persentase luasan penutup lahan hutan yang mengalami deforestasi
Sumber: IGT Penutup Lahan BPKH wilayah XIII Pangkalpinang Skala 1:250.000 Tahun 2015 dan 2021, BPKHTL wilayah XIII (data diolah)

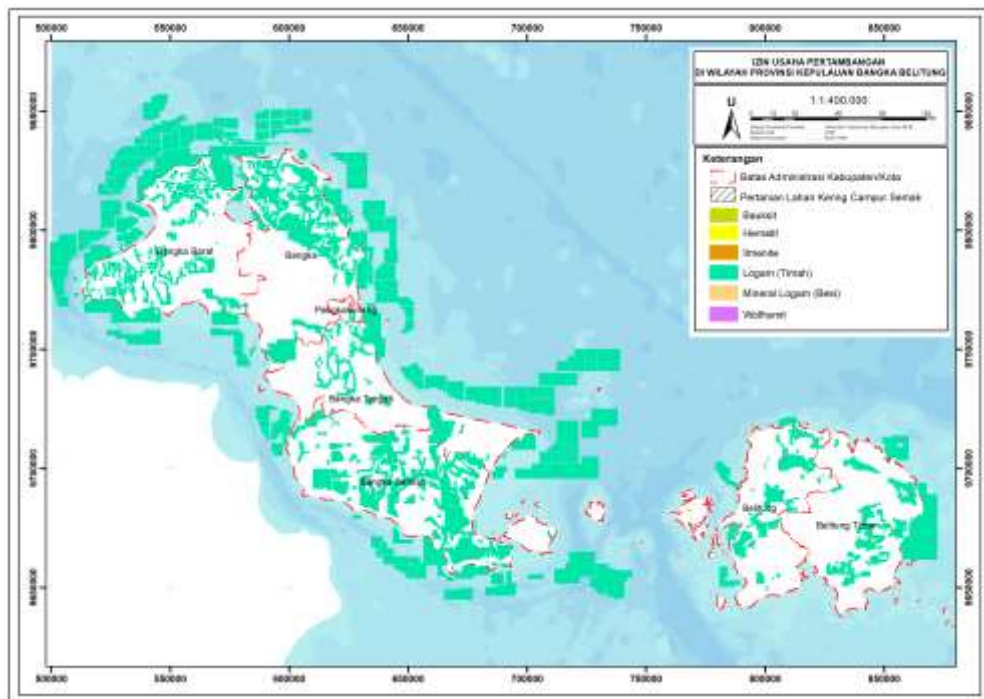
Degradasi hutan merupakan penurunan kualitas penutup lahan dari penutup lahan hutan yang masih alami atau primer menjadi hutan sekunder. Kelas penutup hutan primer sesuai dengan klasifikasi penutup lahan oleh KLHK yaitu terdiri atas hutan lahan kering primer, hutan mangrove primer dan hutan rawa primer. Diantara penutup lahan tersebut, hutan mangrove primer yang paling banyak mengalami degradasi hutan. Secara administrasi, Kabupaten Bangka Barat merupakan wilayah yang paling banyak mengalami degradasi hutan dalam rentang tahun 2015 ke 2021.



Gambar 2.1. 40 Degradasi Hutan tahun 2015-2021
Sumber: IGT Penutup Lahan BPKH wilayah XIII Pangkalpinang Skala 1:250.000 Tahun 2015 dan 2021, BPKHTL wilayah XIII (data diolah)

II.1.2.4 Eksploitasi Lahan

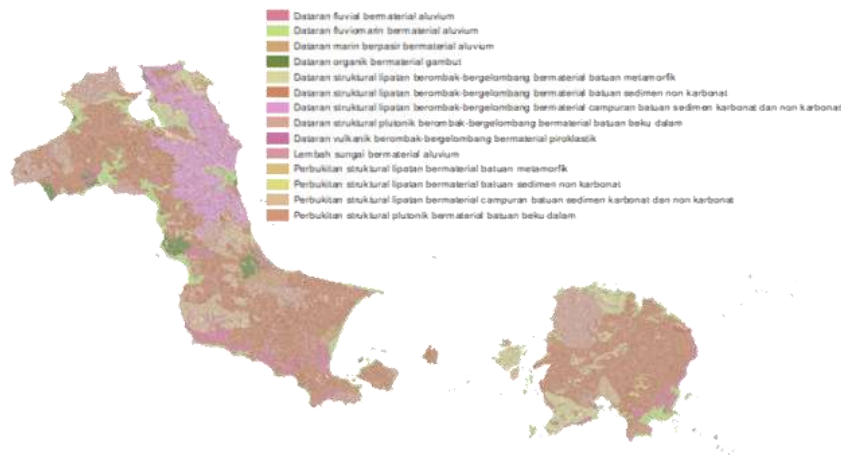
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak lama telah dikenal sebagai salah satu produsen timah terbesar di dunia dengan potensi cadangan timah alluvial yang tersebar di hampir seluruh wilayah administrasi kabupaten/kota. Disamping timah, terdapat pula potensi mineral bahan galian non logam lainnya yang sebagian besar didominasi oleh pasir bangunan, pasir kuarsa, granit serta tanah liat.



Gambar 2.1. 41 Wilayah Izin Pertambangan Minerral Logam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

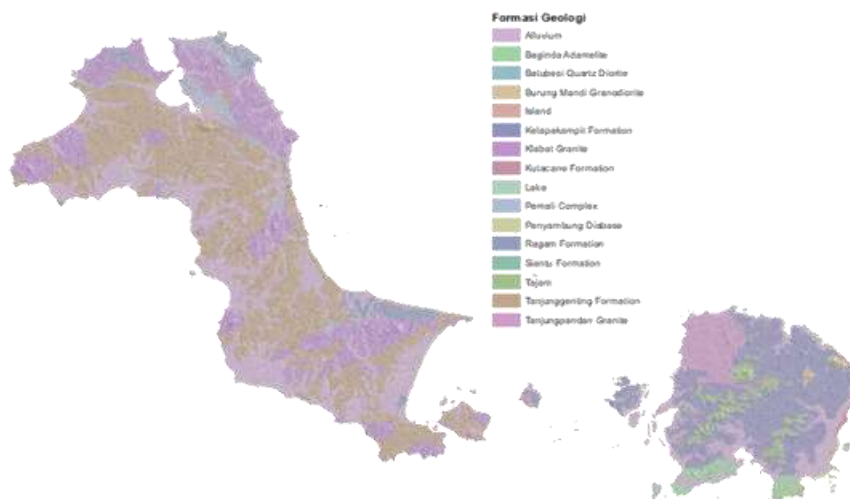
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Potensi mineral ini dapat diindikasikan dari kondisi tanah, geologi hingga bentang alam wilayah. Berdasarkan bentang alamnya (Gambar 2.1.42), wilayah Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh jenis bentang alam dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat dengan luasan mencapai 729.113 hektar atau setara dengan 43,7% dari luas total wilayah menurut hasil analisis spasial tersebut.



Gambar 2.1. 42 Kondisi Bentang Alam di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: IGT Bentang Alam sesuai dengan SK 1272/2021 KLHK, 2022

Tipikal bentang alam ini terbentuk di atas struktur tektonik kulit bumi berupa lipatan yang mempunyai relief berombak hingga bergelombang dan tersusun atas batuan sedimen non karbonat seperti batu pasir, tanah liat, atau jenis lainnya.

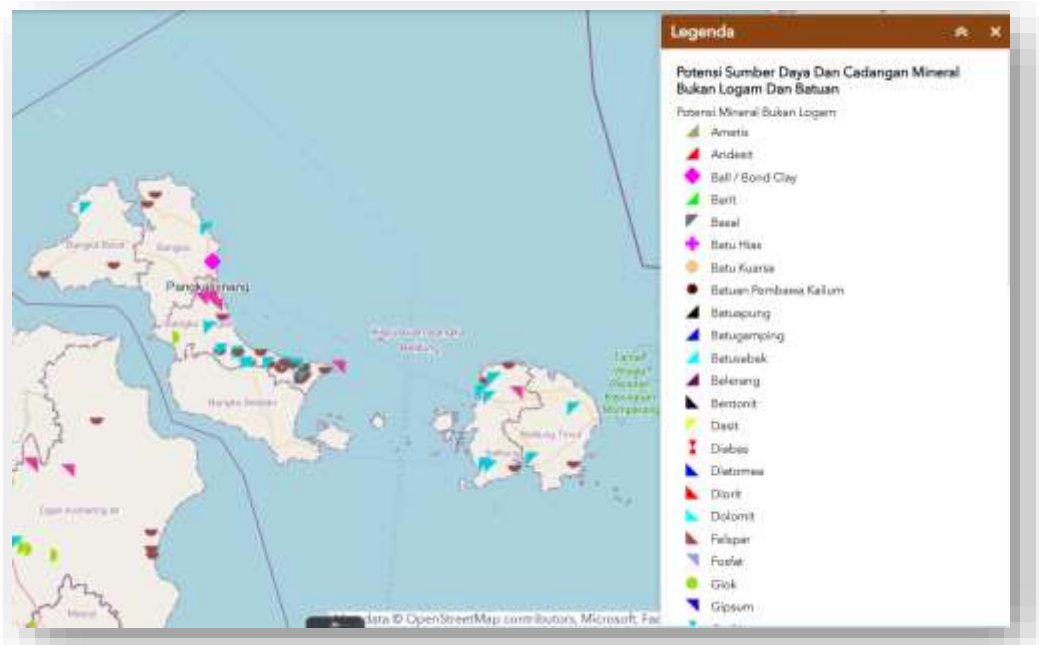


Gambar 2.1. 43 Formasi Geologi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, DPUPRPRKP

Pemerintah pusat resmi mendelegasikan sejumlah kewenangan terkait perizinan pertambangan ke daerah berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditandatangani pada tanggal 11 April 2022. Dengan adanya kebijakan ini maka pemerintah

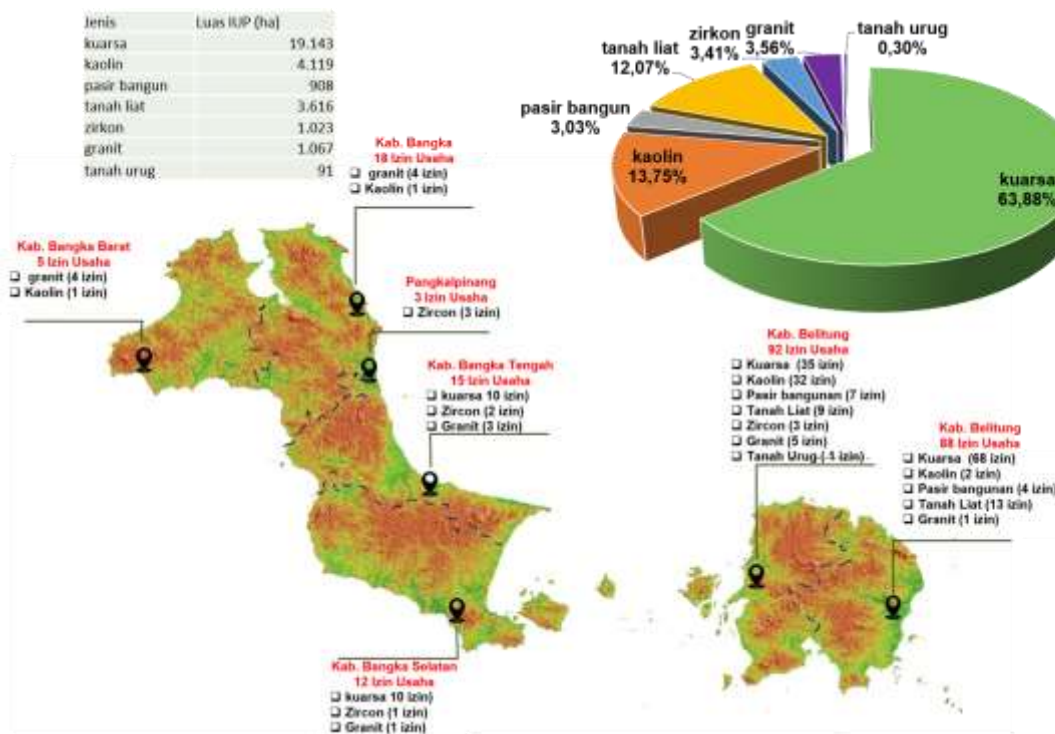
provinsi kembali memiliki kewenangan izin usaha pertambangan setelah sebelumnya kewenangan tersebut ditarik ke pemerintah pusat melalui revisi UU Minerba atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam pasal 2 disebutkan pendelegasian meliputi pemberian sertifikat dan izin, pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan serta pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan. Pemberian standar ini meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa pertambangan di bidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan serta reklamasi pasca tambang. Selanjutnya pemberian izin salah satunya terdiri atas izin usaha pertambangan (IUP) dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam dengan ketentuan, berada dalam satu provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil.



Gambar 2.1. 44 Potensi Mineral Non Logam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: [ESDM One Map - Exploring Energy and Mineral Resources of Indonesia](#), diakses 2023

Dengan adanya pendelegasian ini memicu angin segar bagi pelaku usaha pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengurus perizinan di daerah tanpa harus melalui proses yang cukup panjang di pemerintah pusat. Sebagai imbas dari adanya kebijakan tersebut terlihat adanya peningkatan pengurusan izin usaha pertambangan mineral non logam sepanjang tahun 2022 yang didominasi oleh mineral pasir kuarsa. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel... berikut. Eksploitasi mineral baik logam maupun non logam yang saat ini semakin marak terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain nantinya membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat juga berdampak negatif bagi lingkungan seperti yang diperlihatkan pada kondisi lahan saat ini yang ditandai oleh meningkatnya lahan kritis.



Gambar 2.1. 45 Sebaran Izin Penambangan Mineral Non Logam Sepanjang Tahun 2022
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

II.1.3 State

II.1.3.1 Kondisi Eksisting Penutup/ Penggunaan Lahan

Mengacu pada SNI 7645-1:2014 tentang Klasifikasi Penutup Lahan Skala Kecil dan Menengah disebutkan bahwa penutup lahan merupakan tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati sedangkan penggunaan lahan merupakan bentuk pemanfaatan atau fungsi dari perwujudan suatu bentuk penutup lahan. Hasil tumpang susun data spasial penutup lahan skala 1:250.000 tahun 2021 yang merupakan data termutakhir yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Bulan Juni 2023 dengan data spasial administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pemutakhiran tahun 2022 memperlihatkan kondisi eksisting penutup/ penggunaan lahan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1.4 berikut.

Tabel 2.1. 4 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama

No.	Kabupaten	Lahan Non Pertanian (Ha)	Lahan Sawah (Ha)	Lahan Kering (Ha)	Perkebunan (Ha)	Hutan (Ha)	Badan Air (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bangka	34.665	1.123	180.673	48.267	25.081	1.991,4
2	Bangka Barat	32.248	1.487	154.015	50.631	34.759	1.566,7
3	Bangka Selatan	27.556	4.467	245.886	17.375	37.282	480,9
4	Bangka Tengah	30.568	0	118.757	35.261	23.019	476,3
5	Belitung	31.466	58	74.495	67.494	40.501	1,7
6	Belitung Timur	45.978	588	90.229	56.677	43.275	350,3
7	Kota Pangkal Pinang	3.842	0	5.900	0	206	789,8
	JUMLAH	206.324	7.726	869.958	275.708	204.127	426,6

Sumber: IGT Penutup Lahan BPKH wilayah XIII Pangkalpinang Skala 1:250.000 Tahun 2021; Batas Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termutakhir sesuai Kepmendagri 050-145 Tahun 2022

Pada tabel diatas terlihat bahwa lahan kering mendominasi penutup/penggunaan lahan utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luasan mencapai 869.958 hektar atau setara dengan 55,4 % dari total luasan penggunaan lahan pada tabel diatas. Jika dibandingkan dengan dokumen IKPLHD tahun lalu terdapat sedikit perbedaan luasan

dikarenakan analisis spasial pada tahun ini menggunakan data spasial penutup lahan tahun 2021 dan batas administrasi terupdate sesuai dengan Kepmendagri 050 142 tahun 2022.

Kelas lahan kering yang dimaksud pada tabel diatas terdiri atas penutup lahan semak belukar, pertanian lahan kering serta pertanian lahan kering campur semak dengan porsi luasan terbesar berada di Kabupaten Bangka Selatan. Dari ketiga jenis penutup lahan tersebut, kelas pertanian lahan kering campur semak mempunyai porsi luasan paling besar di semua kabupaten di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sekaligus menandakan bahwa sebagian besar masyarakat khususnya lokal memanfaatkan pekarangan dan tanah yang dimiliki untuk ditanami dengan vegetasi budidaya campuran ataupun pemanfaatan semak belukar untuk dijadikan ladang berpindah.



Gambar 2.1. 46 Pertanian Lahan Kering Campur Semak di Kabupaten Bangka Selatan dari Citra Satelit (kiri) ; Kondisi Lapangan Penutup Lahan Pertanian Lahan Kering Campur Semak di Kabupaten Bangka Selatan (kanan)

Sumber: Citra Sentinel 2A RGB 432 Perakaman Januari 2022, Google Earth Engine (kiri); Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (kanan)

Lahan perkebunan merupakan penggunaan lahan utama terbesar kedua setelah lahan kering dengan luas mencapai 275.708 hektar dengan lokasi persebaran paling banyak di Kabupaten Belitung. Berdasarkan data timeseries tahun 2016 hingga tahun 2021, perkebunan memang menunjukkan tren kenaikan luasan dari tahun ke tahunnya.



Gambar 2.1. 47 Perkebunan di Kabupaten Bangka Barat dari Citra Satelit (kiri) ; Kondisi Lapangan Perkebunan di Kabupaten Bangka Barat (kanan)

Sumber: Citra Sentinel 2A RGB 432 Perekam Januani 2022, Google Earth Engine (kiri); Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (kanan)

Selanjutnya kelas lahan non pertanian yang terdiri atas kelas penutup lahan permukiman, pertambangan serta lahan terbuka menempati urutan ketiga penggunaan lahan utama setelah lahan kering dan lahan perkebunan dengan luasan sebesar 206.324 hektar (13,1%). Dari beberapa kelas penutup lahan tersebut, luasan terbesar didominasi oleh pertambangan yang memang menjadi penunjang sektor perekonomian dengan melimpahnya cadangan sumber daya mineral logam dan non logam terutama timah, kaolin serta pasir kuarsa. Secara administrasi, Kabupaten Belitung Timur merupakan wilayah dengan luasan lahan non pertanian terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 2.1. 48 Penutup Lahan Pertambangan di Kabupaten Belitung Timur dari Citra Satelit (kiri) ; Kondisi Lapangan Pertambangan di Kabupaten Belitung Timur (kanan)

Sumber: Citra Sentinel 2A RGB 432 Perekam 2022, Google Earth Engine (kiri); Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023 (kanan)



Penutup/penggunaan lahan terbesar keempat setelah lahan kering, lahan perkebunan, lahan non pertanian yaitu lahan hutan. Kelas penutup lahan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada klasifikasi lahan KLHK terdiri atas hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer serta hutan rawa sekunder dengan luas total mencapai 204.127 hektar atau setara dengan 13,0 % dari total luasan penggunaan lahan utama pada tabel diatas. Berdasarkan angkanya, hutan lahan kering sekunder mempunyai luasan sebesar 87.245 hektar atau setara dengan 42,74% dari keseluruhan kelas penutup lahan hutan sedangkan hutan lahan kering primer menempati luasan terkecil yaitu hanya sebesar 486,7 hektar atau sekitar 0,24 % saja dari total luasan penutup lahan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luasnya hutan lahan kering sekunder yang mendominasi mengindikasikan tingginya aktivitas masyarakat yang memanfaatkan hutan.

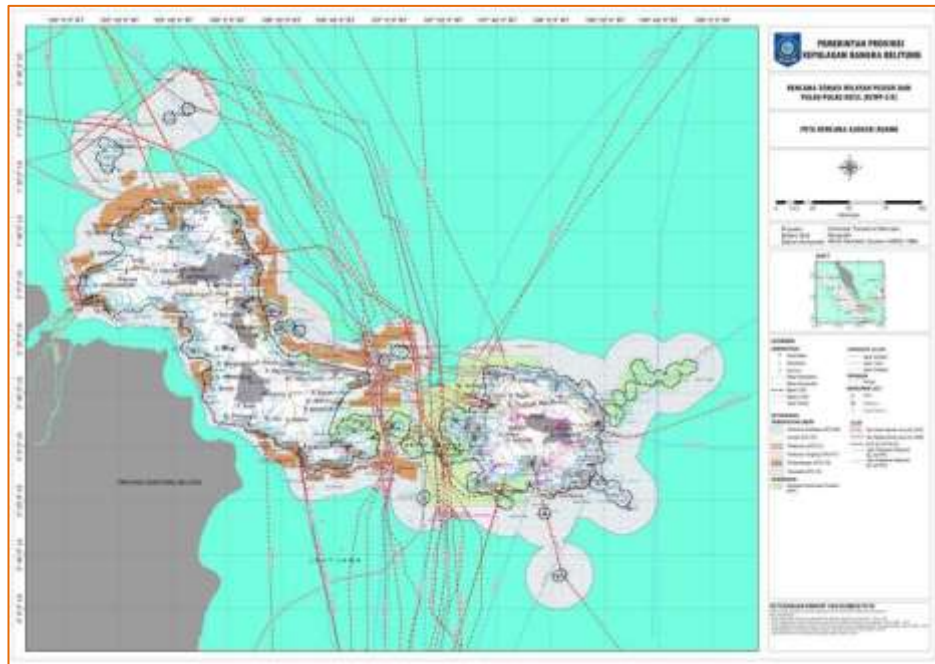
Dari sejumlah penutup/penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sawah mempunyai luasan paling kecil yaitu sebesar 7.726 hektar saja. Hal ini menandakan pertanian lahan basah bukan merupakan mata pencaharian masyarakat lokal yang utama dan bahan pangan khususnya beras masih mengandalkan suplai dari luar pulau.

II.1.3.2 Kondisi Pesisir dan Laut

Sebagai wilayah kepulauan yang mengalami perkembangan cukup pesat, aktivitas pemanfaatan lahan berlangsung hingga di sepanjang wilayah pesisir. Beragam tindakan yang menghasilkan *pressure* terhadap lingkungan pesisir mempengaruhi kelestarian ekosistemnya yang sebetulnya penting untuk dijaga.

Selain rencana tata ruang wilayah darat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki rencana penataan ruang laut (Gambar dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2020 – 2040 (Gambar 2.1.49) yang telah ditetapkan pada tanggal 27 April 2020. Luas keseluruhan rencana alokasi ruang pada RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 4.259.119,352 ha dengan pembagian alokasi ruang meliputi Kawasan Pemanfaatan Umum seluas 3.442.413,189 ha; Kawasan Konservasi seluas 627.612.93 ha; serta Alur Laut dengan luasan 189.093.23 ha. Rincian alokasi ruang di dalam RZWP3K terlihat pada Tabel 2.1.5 berikut ini.



Gambar 2.1. 49 Peta Rencana Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kep. Babel, 2021

Tabel 2.1. 5 Alokasi Pemanfaatan Ruang Laut Dalam RZWP3K

Alokasi ruang	Zona	Luas (ha)
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	138327,1
	Pelabuhan	49638,78
	Pertambangan	477077,6
	Perikanan Budidaya	185627,6
	Perikanan Tangkap	2591,38
	Industri	310,26
Kawasan Konservasi		627.612,9

Alokasi ruang	Zona	Luas (ha)
Alur Laut		189.093,2
Luas Keseluruhan		425.119

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

A. Kondisi Mangrove

Mangrove adalah ekosistem hutan bakau yang hidup di perairan pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut. Ekosistem ini sangat penting karena memiliki peran krusial dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir. Mangrove berfungsi sebagai tempat berlindung bagi berbagai spesies laut, mengurangi dampak banjir dengan menyerap air, menyimpan karbon dari atmosfer serta mencegah erosi pantai.



Gambar 2.1. 50 Mangrove *Rhizophora apiculata* di Muara Sungai Jering Menduyung Kabupaten Bangka Barat

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

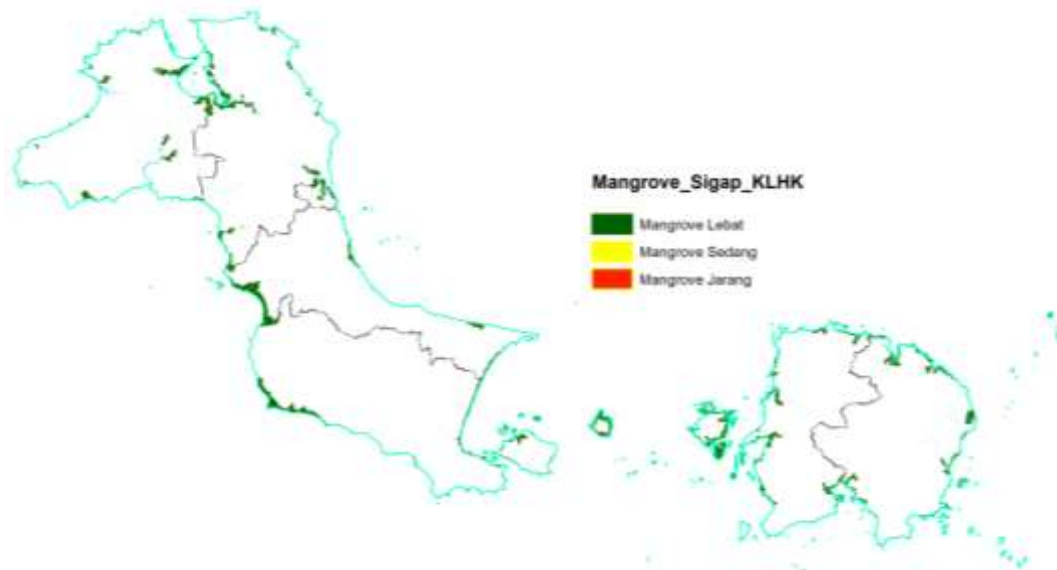
Berdasarkan dokumen awal RZWP-3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 disebutkan bahwa hasil analisis citra dan survei menunjukkan bahwa variasi jenis mangrove banyak ditemukan di Kabupaten Bangka Barat. Hasil survei di seluruh Kabupaten Bangka Barat ditemukan jenis *Rhizophora apiculata*, *Sonneratia alba*, *Rhizophora stylosa*,

Rhizophora mucronata, *Bruguera gymnoriza*, *Bruguera cylindrical*, *Bruguera sp*, *Xylocarpus granatum*, *Sonneratia caseolaris*, *Avicennia alba*, *Avicennia marina* dan *Avicennia sp*. Dari kesemua jenis tersebut, jenis *Rhizophora apiculata* dan *Avicennia alba* yang paling mendominasi.

Sementara itu hasil survei lapangan di wilayah pesisir Kabupaten Belitung ditemukan 6 jenis mangrove yang dominan yaitu *Avicennia alba*, *Rhizophora apiculata*, *Sonneratia alba*, *Rhizophora mucronata*, *Xylocarpus granatum* dan *Bruguiera gymnoriza* sedangkan di Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh jenis *Rhizophora apiculata*, *Rhizophora mucronata* dan *Lumnitzeralittorea*.

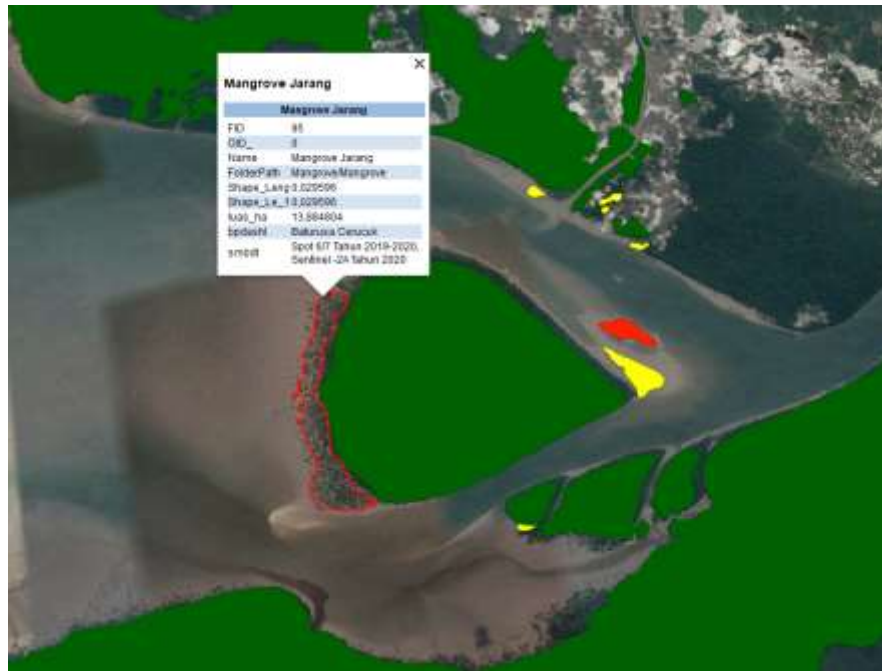
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove menyatakan bahwa salah satu upaya pengendalian untuk melindungi mangrove dari kerusakan adalah dengan mengetahui adanya tingkat kerusakan berdasarkan kriteria baku kerusakannya. Kriteria status mangrove baik yaitu yang berada pada kerapatan sangat padat dan sedang sementara itu status rusak jika kerapatan mangrove berada pada kelas jarang. Kriteria mangrove sangat padat terdiri atas penutupan $\geq 75\%$ dengan kerapatan ≥ 1500 pohon/hektar. Sementara itu kriteria sedang terdiri atas penutupan $\geq 50 - < 75\%$ dengan kerapatan $\geq 1000 - < 1500$ pohon/hektar sedangkan kriteria jarang terdiri atas penutupan $< 50\%$ dengan kerapatan < 1000 pohon/hektar.

Berdasarkan informasi geospasial tematik mangrove yang berasal dari Balai Pengelolaan Aliran Sungai Baturusa Cerucuk, terdapat sekitar 39.882 hektar hutan mangrove yang tersebar di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1.51 berikut.



Gambar 2.1. 51 Persebaran Mangrove di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: SIGAP – KLHK, 2022

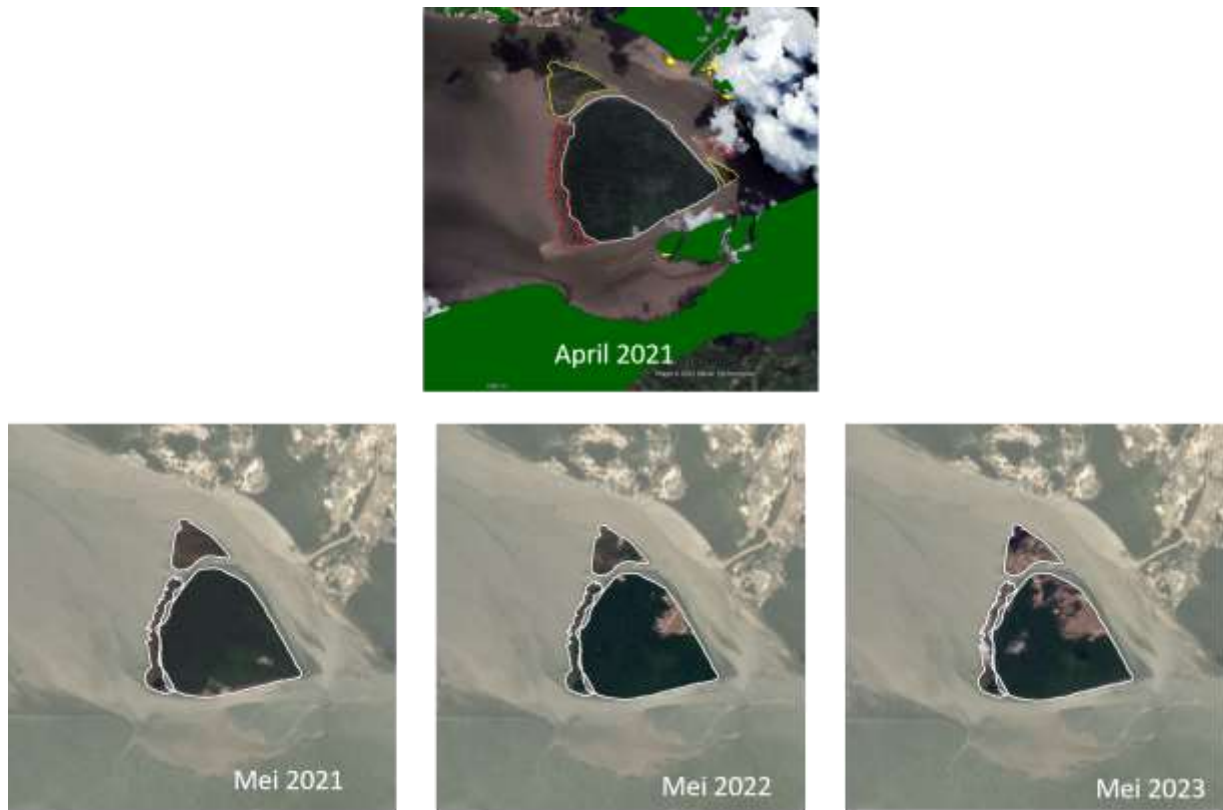
Kriteria Baku Kerusakan Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 KepmenLH Nomor 201 Tahun 2004 merupakan cara untuk menentukan status kondisi mangrove yang diklasifikasikan Baik (tingkat kerapatan lebat dan sedang) serta kondisi Rusak (tingkat kerapatan jarang) dan berdasarkan ketentuan tersebut maka secara umum status kondisi mangrove di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terkategori baik yang ditandai oleh dominasi luasan hutan mangrove dengan persentase tutupan diatas 75% dan tingkat kerapatan diatas 1500 pohon/hektar dan sekitar 131 hektar yang terkategori rusak. Secara administrasi, Kabupaten Bangka merupakan wilayah yang memiliki luasan mangrove dengan status rusak yang paling besar yaitu sekitar 54 hektar.



Gambar 2.1. 52 Lokasi Mangrove dengan Status Rusak (Kerapatan Jarang) di Kabupaten Bangka

Sumber: IGT Mangrove, BPDAS Baturusa Cerucuk 2022; CSRT Maxar Tech diakses via Google Earth, 2023

Sebagai catatan bahwa data spasial yang digunakan bersumber dari citra Spot 6/7 Tahun 2019-2020 serta Sentinel 2A tahun 2020 dan mengingat dinamika perubahan penutup lahan yang terus berlangsung hingga saat ini sangat memungkinkan luasan ekosistem mangrove yang mengalami kerusakan bisa saja sudah bertambah. Mengambil contoh pada lokasi yang sama diatas, berdasarkan perekaman citra secara timeseries pada tahun 2021 hingga 2023 dengan menggunakan sumber data citra Maxar perekaman Bulan April 2021 yang diakses di Google Earth serta citra Planetscope resolusi spasial 3 m perekaman masing-masing bulan Mei 2021, Mei 2022 serta Mei 2023 yang difokuskan pada area of interest lokasi mangrove tersebut, terlihat adanya perubahan yang cukup signifikan yang mempengaruhi status kondisi mangrove di lokasi tersebut seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut.



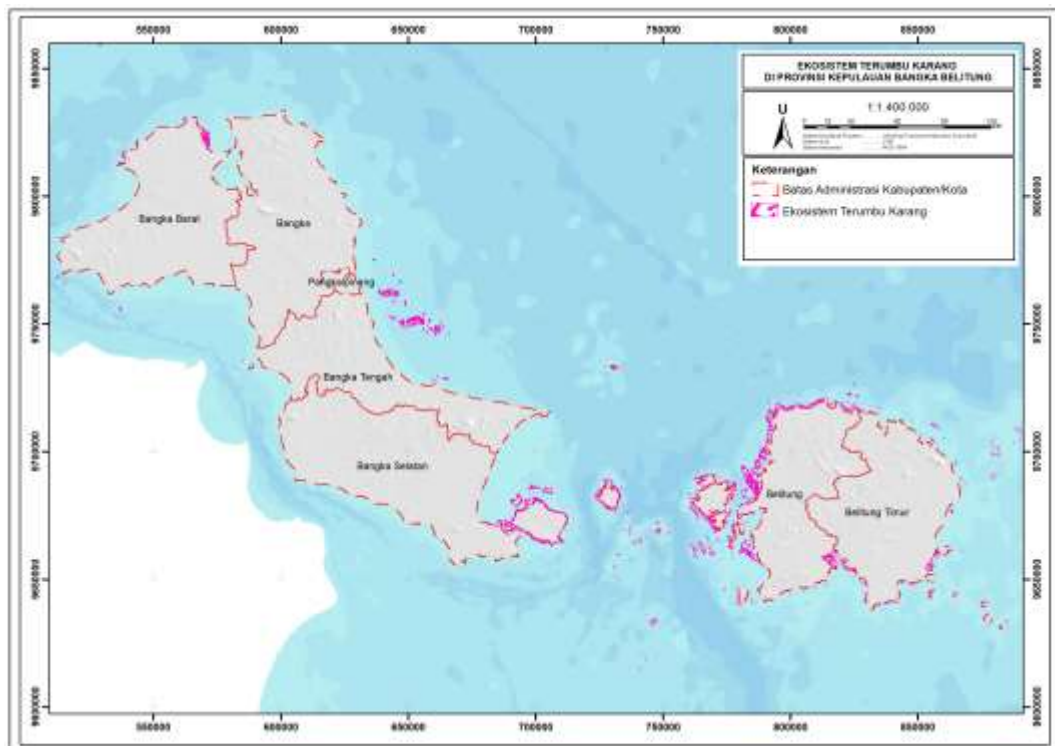
Gambar 2.1. 53 Kondisi Mangrove di Pulau Kayuanak di Kabupaten Bangka Melalui Data Citra Multitemporal

Sumber: IGT Mangrove, BPDAS Baturusa Cerucuk 2022; CSRT Maxar Tech diakses via Google Earth, 2023

Hasil perekaman citra diatas menunjukkan lokasi ekosistem mangrove yang sebelumnya rusak (garis merah) hampir tidak mengalami perubahan secara signifikan sedangkan mangrove kategori baik dengan kerapatan sedang (warna kuning) serta lebat (warna putih) justru mengalami perubahan tutupan seperti yang terlihat pada perekaman citra Bulan Mei 2022 dan semakin meluas seperti yang ditunjukkan pada perekaman citra Bulan Mei 2023 sehingga dapat disimpulkan sementara bahwa perubahan penutup lahan mangrove di lokasi tersebut sekaligus menambah luasan mangrove dengan status rusak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya dan Kabupaten Bangka pada khususnya. Hal ini mempertegas bahwa alih fungsi lahan khususnya hutan hingga saat ini terus marak terjadi. Kecepatan pengrusakan hutan yang tidak seimbang dengan kecepatan pemulihan menjadi tantangan besar dalam masalah tata guna lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Kondisi Terumbu Karang dan Lamun

Terumbu karang merupakan salah satu potensi sumber daya alam di wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang penting untuk dijaga kelestariannya. Organisme ini berperan besar sebagai benteng alami dalam menahan abrasi pantai seperti halnya kawasan hutan mangrove. Selain itu kondisi terumbu karang dapat mengindikasikan kualitas lingkungan perairan dimana organisme ini berada.



Gambar 2.1. 54 Ekosistem Terumbu Karang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: IGT Ekosistem Pesisir Terumbu Karang, Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan hasil analisis data pada dokumen awal RZWP-3-K Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang bahwa luas ekosistem terumbu karang yaitu sebesar 17.744,85 hektar dengan sebaran lokasi seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.1.54 di atas. Dari luasan tersebut, 12.474,54 hektar terkategori baik dan 5.270,31 hektar terkategori rusak. Secara pesentase masing-masing yaitu 70% dan

30%. Hasil pengukuran di 23 titik di wilayah perairan Pulau Bangka menunjukkan rata-rata persentase *live coral* sebesar 33% dan pengamatan tutupan terumbu karang di perairan Pulau Belitung yang dilakukan di 37 lokasi titik menunjukkan rata-rata persentase *live coral* sebesar 49%. Aktivitas pembangunan dermaga serta penambangan timah di pesisir dan laut membuat laju sedimentasi meningkat dan hal ini berbahaya karena butiran sediment dapat menutupi polip karang hingga menimbulkan kerusakan hingga kematian karang di wilayah tersebut. Rusaknya ekosistem terumbu karang pada akhirnya akan berdampak negatif bagi lingkungan khususnya di wilayah pesisir.

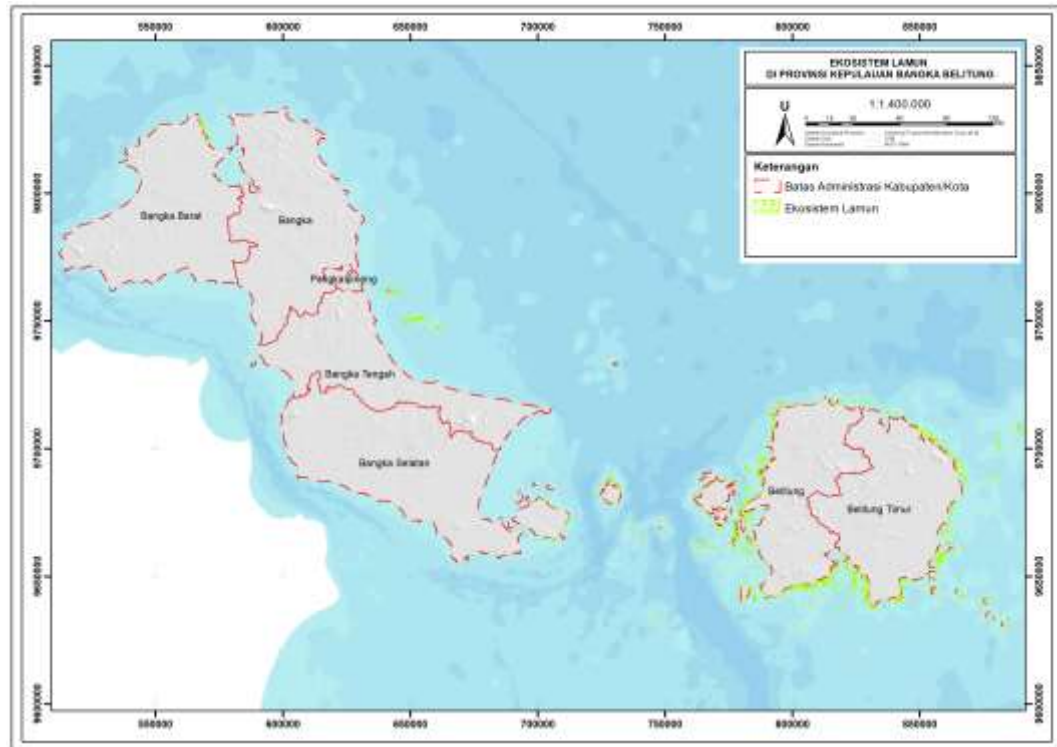


Gambar 2.1. 55 Terumbu Karang Tertutup Sedimen di Pulau Ketawai Kabupaten Bangka Tengah

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Selain terumbu karang, terdapat pula ekosistem lamun yang tersebar hampir di seluruh pesisir wilayah Pulau Belitung serta di pesisir timur Pulau Bangka dengan luasan sekitar 11.646,90 hektar (Gambar 2.1.56). Di kalangan masyarakat lokal Kepulauan Bangka Belitung, ekosistem lamun (*seagrass*) tidak terlalu populer jika dibandingkan dengan ekosistem pesisir lainnya seperti mangrove ataupun terumbu karang. Namun demikian sejumlah riset telah membuktikan bahwa keberadaan ekosistem lamun ini sama pentingnya dengan kedua ekosistem yang telah disebutkan sebelumnya dalam bersinergi menjaga keseimbangan lingkungan hidup di wilayah pesisir. Lamun bersama halnya

dengan mangrove berperan utama dalam memperangkap sedimen yang mempengaruhi kejernihan air laut serta menyimpan karbon yang sangat potensial.



Gambar 2.1. 56 Ekosistem Lamun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

*Sumber: IGT Ekosistem Pesisir Terumbu Karang, Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*

Berdasarkan dokumen awal RZWP-3-K disebutkan bahwa kondisi lamun di Pulau Bangka berdasarkan kriteria baku KepmenLH Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan Dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun masuk dalam kondisi buruk dengan status kurang kaya atau kurang sehat sedangkan persentase tutupan lamun di Pulau Belitung menunjukkan % cover lamun yang merata dan masuk dalam kondisi <29% dan masuk kategori rusak dengan status miskin namun khususnya di Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung persentase tutupan lamunnya dikategorikan baik atau sehat.



Gambar 2.1. 57 Ekosistem Lamun di Pulau Ketawai di Kabupaten Bangka Tengah
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

C. Aktivitas Tambang Laut



Gambar 2.1. 58 Aktivitas Penambangan Ilegal di Teluk Kelabat Dalam
Sumber: Citra PlanetScope perekaman November 2022, planetlabs diakses 2023

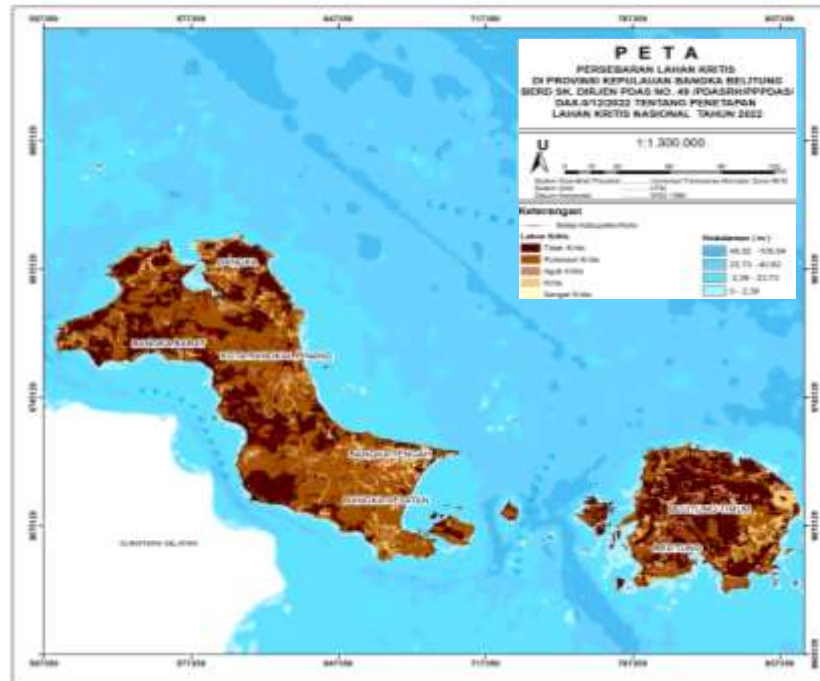
Diantara alokasi pemanfaatan ruang laut seperti yang tertuang di dalam RZWP3K, zona pertambangan yang mempunyai porsi luasan 477.077,6 hektar mayoritas selalu menjadi pembahasan. Seperti yang



telah diketahui bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan negeri yang kaya akan sumber daya alam mineral khususnya timah. Sifat mineral yang *unrenewable resources* serta eksploitasi yang sudah berlangsung sejak lama tentu saja membuat cadangan timah di daratan menurun hingga akhirnya penambangan beralih ke wilayah perairan laut. Kegiatan ini pada akhirnya menimbulkan ancaman bagi kelestarian ekosistem laut sekaligus kesejahteraan para nelayan terutama jika dilaksanakan tidak di dalam alokasi ruang yang telah ditetapkan. Gambar 2.1.58 merupakan contoh aktivitas penambangan mineral timah secara ilegal yang berlangsung di wilayah perairan Teluk Kelabat Dalam, Kabupaten Bangka. Secara zonasi RZWP-3-K, kawasan tersebut merupakan sebab alokasi ruang di kawasan tersebut merupakan zona perikanan budidaya. Persinggungan antara kepentingan mata pencaharian memunculkan konflik di pesisir antara nelayan dan pelaku tambang.

II.I.3.3 Lahan Kritis

Tekanan atau *pressure* yang diberikan kepada lahan dalam bentuk alih fungsi lahan serta eksploitasi lingkungan secara terus menerus dan tidak diimbangi oleh pengelolaan yang optimal mengarah pada terjadinya perubahan kondisi biofisik lingkungan seperti yang terlihat pada saat ini melalui banyaknya lahan yang mengalami degradasi atau dikenal dengan istilah lahan kritis. Berdasarkan PermenLHK 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan disebutkan bahwa Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air Daerah Aliran Sungai (DAS).

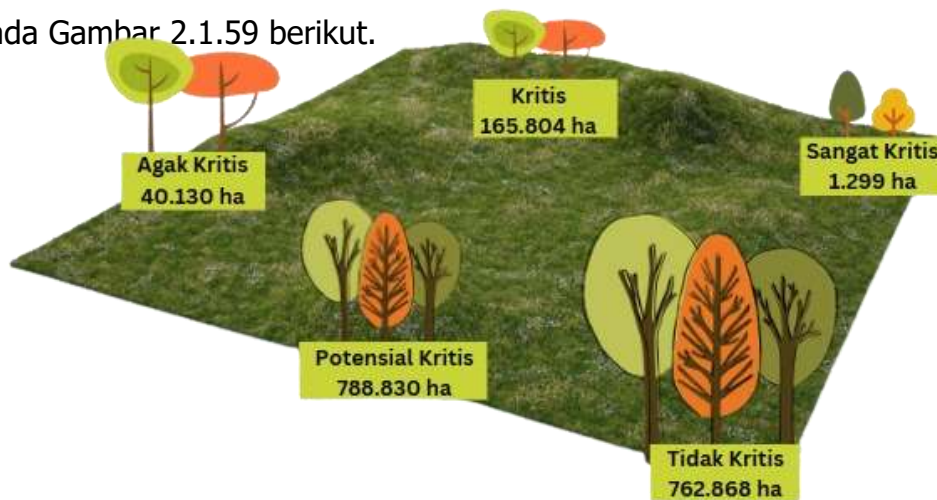


Gambar 2.1. 59 Peta Lahan Kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: IGT Lahan Kritis sesuai SK. 49/2022, BPDAS Baturusa Cerucuk

Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial Nomor : P. 4/V-Set/2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis, kategori lahan kritis terdiri atas tidak kritis, potensial kritis, agak kritis, kritis hingga sangat kritis. Parameter penilaian tingkat kekritisan lahan yang berada pada kawasan lindung tidak sama dengan penilaian di kawasan budidaya. Pada kawasan lindung, penilaian dikaitkan dengan fungsi perlindungan sumber daya hutan dalam hal ini penutup lahan vegetasi ,tanah dan air, faktor kemiringan lereng, tingkat erosi serta manajemen pengelolaan kawasan. Sementara itu penilaian tingkat kekritisan lahan di kawasan budidaya selain tetap mempertimbangkan parameter kelerengan, tingkat erosi, jenis batuan juga menitikberatkan pada fungsi produksi dan pelestarian sumberdaya lahan itu untuk kepentingan produktivitas.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Nomor SK. 49/PDASRH/PPDAS/DAS.0/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022, luasan lahan

kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 167.065 hektar. Rincian luasan per kategori berdasarkan hasil analisis spasial disajikan pada Gambar 2.1.59 berikut.



Gambar 2.1. 60 Tingkat kekritisan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: IGT lahan kritis SK. 49/PDASRH/PPDAS/DAS.0/12/2022, BPDAS BRC 2023

Dilihat dari gambar diatas, lahan dengan kategori potensial kritis mendominasi tingkat kekritisan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luasan sekitar 788.830 hektar atau setara dengan 47,3% dari luas total wilayah berdasarkan analisis spasial, sedangkan lahan kategori sangat kritis mempunyai luasan paling kecil yaitu sebesar 1.299 hektar atau setara dengan persentase 0,08%. Jika dibandingkan dengan hasil *review* lahan kritis sebelumnya pada SK.306/Menlhk/PDASHL/DAS.0/7/2018 maka terdapat perubahan signifikan pada beberapa dua kategori lahan, selengkapnya pada Tabel berikut.

Tabel 2.1. 6 Perbandingan Luas Lahan Kritis Tahun 2018 dan 2022 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kategori	Luasan pada tahun (hektar)	
	2018	2022
Tidak Kritis	460.693	672.868
Potensial kritis	798.136	788.830
Agak kritis	393.379	40130
Kritis	20.438	165.804
Sangat Kritis	248	1.299

Sumber: IGT Lahan Kritis Tahun 2018 dan 2022, BPDAS BRC 2023

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa dalam rentang tahun 2018 hingga 2022 terjadi perubahan luasan untuk setiap kategorinya dimana secara umum terlihat adanya peningkatan maupun penurunan. Peningkatan terjadi pada kategori lahan tidak kritis sebesar 212.175 hektar yang sifatnya positif sedangkan peningkatan yang bersifat negatif terjadi pada kategori lahan kritis sebesar 145.366 hektar serta lahan sangat kritis sebesar 1.051 hektar.

Selanjutnya penurunan luasan terjadi pada lahan kategori agak kritis secara signifikan yaitu seluas 353.249 hektar. Peningkatan luasan yang bersifat positif menandakan terjadinya perbaikan kualitas lahan terutama dari segi penutup lahannya sebagai parameter dengan bobot paling besar dalam penentuan tingkat kekritisan lahan. Sementara itu peningkatan yang bersifat negatif berkorelasi dengan penurunan luasan yang terjadi sangat signifikan yang artinya peningkatan luasan lahan kritis merupakan hasil konversi dari menurunnya kualitas lahan yang tadinya agak kritis.

Tabel 2.1. 7 Luasan lahan kritis berdasarkan wilayah administrasi

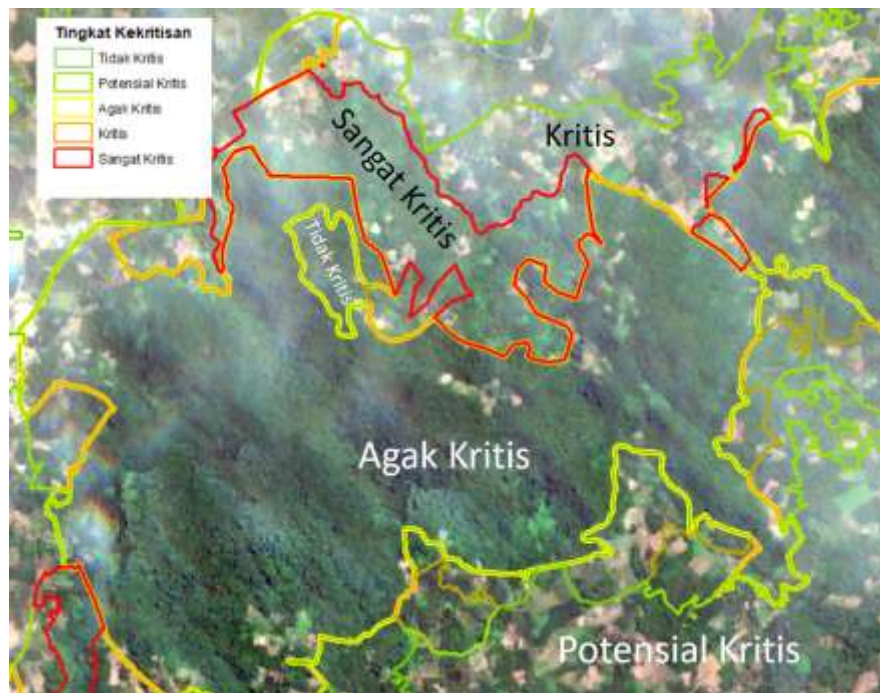
No.	Kabupaten/Kota	Kritis (Ha)		Sangat Kritis (Ha)		Potensial Kritis (Ha)		Agak Kritis (Ha)		Tidak Kritis (Ha)	
		Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bangka	8	4	203	19	30	127	3	4	52	61,33
2	Bangka Barat	10.134	1.456	0	0	26.678	98.287	1.613	1.456	77,95	59.194
3	Bangka Selatan	17.682	4.741	323	20	65.857	173.372	2.738	4.741	53.125	38.41
4	Bangka Tengah	20.213	2.406	696	3	44.022	58.811	3.673	2.406	55.773	20.373
5	Belitung	7.828	2.223	0	0	25.347	49.316	5.984	2.223	45.389	75.907
6	Belitung Timur	9.307	2.561	34	0	21.696	63.588	4.144	2.561	65.025	64.581
7	Pangkalpinang	0	1,2	0	0	0	5.018	0	1,2	0	4.255

Sumber: IGT Lahan Kritis tahun 2022 BPDAS BRC. 2023; IGT Fungsi Kawasan Hutan. BPKHTL XIII; Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Adanya peningkatan luasan lahan kategori kritis yang sangat signifikan menandakan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun sebelum *review* terbaru, aktivitas antropogenik semakin massif terjadi. Selanjutnya tentu saja peningkatan lahan kritis akan berpengaruh terhadap nilai Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara administrasi, luasan lahan kritis di masing-masing kabupaten kota dapat terlihat pada Tabel 2.1.7 di atas.

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat kekritisan lahan “kritis” dan “sangat kritis” sebagian besar terjadi di dalam kawasan hutan sedangkan pada lahan dengan kategori “potensi kritis” serta “agak kritis” sebagian besar terjadi diluar kawasan hutan. Jika ditinjau per kategori hutan dan non hutan maka Kabupaten Bangka Tengah menjadi wilayah dengan luasan lahan kritis dan sangat kritis di dalam kawasan hutan terbesar dibandingkan wilayah kabupaten/kota lainnya sedangkan pada review lahan kritis sebelumnya kabupaten dengan luasan lahan kategori kritis dan sangat kritis dalam kawasan hutan yaitu Kabupaten Bangka Selatan. Hal ini menandakan adanya peningkatan kualitas tutupan lahan di Kabupaten Bangka Selatan.



Gambar 2.1. 61 Lahan Kritis di Wilayah TWA Permisan

Sumber: Sentinel 2A MSI RGB 432 Perekaman Februari 2023 – esa copernicus, diakses 2023

Gambar diatas menunjukkan kondisi eksisting lahan yang berlokasi di sekitar Taman Wisata Alam Bukit Permisan terhadap tingkat kekritisannya, dari perekaman citra Sentinel 2A perekaman bulan Februari

Tahun 2023 terlihat hampir sebagian besar kawasan Bukit Permisan terkategori agak kritis, hanya sebagian kecil luasan saja yang terkategori tidak kritis bahkan terdapat pula lahan dengan kategori kritis dan sangat kritis di wilayah ini. Dengan statusnya sebagai hutan konservasi tentunya hal ini harus mendapatkan penanganan yang serius dari semua pihak yang terkait termasuk elemen masyarakat dalam menjaga keberlangsungan hutan konservasi ini. Dari citra tersebut dapat pula dilihat bahwa aktivitas pertanian lahan kering campur semak mendominasi wilayah kaki bukit hingga ke lereng tengah yang berkontribusi terhadap tingkat kekritisannya.

Tanah sebagai salah satu komponen lahan memiliki banyak fungsi dalam kehidupan. Di samping sebagai ruang hidup, tanah memiliki fungsi produksi, yaitu antara lain sebagai penghasil biomassa, seperti bahan makanan, serat, kayu, dan bahan obat-obatan. Selain itu, tanah juga berperan sebagai penjaga kelestarian lingkungan sehingga sudah seharusnya daya dukungnya dipertahankan. Agar tanah dapat bermanfaat secara berkelanjutan maka kegiatan pengendalian kerusakan tanah sangat penting untuk dilaksanakan seperti yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Bangka Tengah pada tabel 2.1.8.

Tabel 2.1. 8 Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering

No	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a	Perkebunan Karet di Desa Air Mesu, Kabupaten Bangka Tengah	Ketebalan Solum	< 20 cm	> 20 cm	Melebihi
1		Kebatuan Permukaan	> 40 %	< 40 %	Tidak
2		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	71 % pasir*	Melebihi
3.A		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
3.B		Berat Isi	> 1.4 g/cm ³	0.5 g/cm ³	Tidak
4		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-
5		Derajat Pelulusan air	< 0.7 cm/jam; > 8.0 cm/jam	-	-
6		pH (H ₂ O) 1 : 2.5	< 4.5 ; > 8.5	5.0	Melebihi
7		Daya Hantar Listrik /DHL	> 4.0 mS/cm	0.030	Melebihi
8		Redoks	< 200 mV	491	Melebihi
9		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1.08 x 10 ⁷	Melebihi
10					

No	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
b	Perkebunan Singkong di Desa Puput, Kabupaten Bangka Tengah				
1		Ketebalan Solum	< 20 cm	> 20 cm	Melebihi
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	0	Tidak
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	70 % pasir*	Melebihi
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1.4 g/cm ³	0.5 g/cm ³	Tidak
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-
6		Derajat Pelulusan air	< 0.7 cm/jam; > 8.0 cm/jam	-	-
7		pH (H ₂ O) 1 : 2.5	< 4.5 ; > 8.5	4.8	Melebihi
8		Daya Hantar Listrik /DHL	> 4.0 mS/cm	0.090	Melebihi
9		Redoks	< 200 mV	500	Melebihi
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1.96 x 10 ⁷	Melebihi
c	Perkebunan Kopi di Desa Teru, Kabupaten Bangka Tengah				
1		Ketebalan Solum	< 20 cm	> 20 cm	Melebihi
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	0	Tidak
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	52 % pasir*	Melebihi
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1.4 g/cm ³	0.5 g/cm ³	Tidak
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-
6		Derajat Pelulusan air	< 0.7 cm/jam; > 8.0 cm/jam	-	-
7		pH (H ₂ O) 1 : 2.5	< 4.5 ; > 8.5	5.0	Melebihi
8		Daya Hantar Listrik /DHL	> 4.0 mS/cm	0.050	Melebihi
9		Redoks	< 200 mV	489	Melebihi
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1.14 x 10 ⁷	Melebihi
d	Perkebunan Lada di Desa Pinang Sebatang, Kabupaten Bangka Tengah				
1		Ketebalan Solum	< 20 cm	> 20 cm	Melebihi
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	37.50%	Tidak
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	33 % pasir*	Melebihi
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1.4 g/cm ³	0.5 g/cm ³	Tidak
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-
6		Derajat Pelulusan air	< 0.7 cm/jam; > 8.0 cm/jam	-	-
7		pH (H ₂ O) 1 : 2.5	< 4.5 ; > 8.5	4.5	Melebihi
8		Daya Hantar Listrik /DHL	> 4.0 mS/cm	0.063	Melebihi
9		Redoks	< 200 mV	496	Melebihi
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1.52 x 10 ⁷	Melebihi
e	Perkebunan Singkong di Desa				
1		Ketebalan Solum	< 20 cm	> 20 cm	Melebihi
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	18.75%	Tidak
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	69 %	Melebihi

No	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.B	Perlang. Kabupaten Bangka Tengah	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	pasir*	
4		Berat Isi	> 1.4 g/cm ³	0.5 g/cm ³	Tidak
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-
6		Derajat Pelulusan air	< 0.7 cm/jam; > 8.0 cm/jam	-	-
7		pH (H ₂ O) 1 : 2.5	< 4.5 ; > 8.5	4.8	Melebihi
8		Daya Hantar Listrik /DHL	> 4.0 mS/cm	0.036	Melebihi
9		Redoks	< 200 mV	457	Melebihi
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	2.76 x 10 ⁷	Melebihi
f	Hutan Taman Industri Bangkanesia di Desa				
1		Ketebalan Solum	< 20 cm	> 20 cm	Melebihi
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	12.50%	Tidak
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	49 %	Melebihi
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	pasir*	
4		Berat Isi	> 1.4 g/cm ³	0.5 g/cm ³	Tidak
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-
6		Derajat Pelulusan air	< 0.7 cm/jam; > 8.0 cm/jam	-	-
7	Kabupaten Bangka Tengah	pH (H ₂ O) 1 : 2.5	< 4.5 ; > 8.5	4.8	Melebihi
8		Daya Hantar Listrik /DHL	> 4.0 mS/cm	0.029	Melebihi
9		Redoks	< 200 mV	426	Melebihi
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1.36 x 10 ⁷	Melebihi

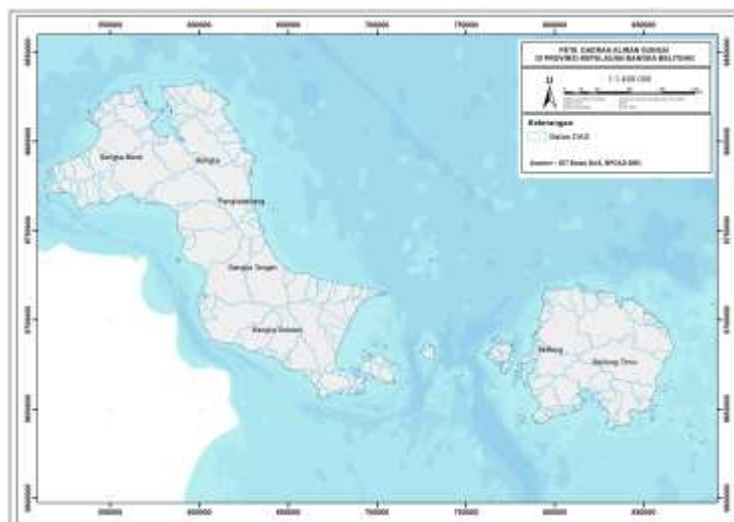
Sumber: Inventarisasi dan Pengelolaan Lahan Kritis Kabupaten Bangka Tengah. DLH Kabupaten Bangka Tengah. 2021

Dari kegiatan inventarisasi lahan kritis pada beberapa lokasi yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah. terlihat bahwa parameter ketebalan solum. komposisi fraksi. pH H₂O. daya hantar listrik. redoks serta jumlah mikroba pada masing-masing lokasi telah melebihi baku mutunya sesuai PP nomor 150 tahun 2000 tentang Baku Mutu Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.

Komposisi fraksi yang sudah melebihi baku mutu mengindikasikan banyaknya kandungan pasir dalam tanah tersebut sehingga sulit untuk menyimpan unsur hara maupun air. Dari kesemua lokasi pengambilan sampel juga diketahui bahwa ketebalan solum yaitu diatas 20 cm. Mengacu pada PP 150 Tahun 2000. ketebalan solum merupakan sebagai jarak vertikal dari permukaan tanah sampai ke lapisan yang membatasi

keleluasaan perkembangan sistem perakaran. Aktivitas land clearing terutama pada kegiatan pertambangan secara terbuka pada umumnya mengupas bagian top soil tanah yang kemudian berperan besar dalam menurunnya ketebalan solum tanah.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa lahan kritis sangat berkaitan dengan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS). Peningkatan kegiatan eksploitasi sumber daya alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan semakin berpengaruh terhadap perubahan ekosistem DAS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di satu sisi kegiatan tersebut berkontribusi positif utamanya di sektor perekonomian namun di sisi lain eksploitasi SDA seringkali mengakibatkan ketidakseimbangan kondisi ekosistem. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, disebutkan bahwa jumlah keseluruhan DAS yaitu sebanyak 433 buah dengan rincian 357 DAS sudah mempunyai nama sedangkan sisanya 76 DAS belum mempunyai nama. Berdasarkan klasifikasinya, ada sekitar 162 DAS yang dipulihkan daya dukungnya serta 271 DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya. Wilayah DAS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Gambar 2.1.61 di bawah ini.



Gambar 2.1. 62 Wilayah DAS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: peta penutup lahan tahun 2021 BPKH Wil XIII dan peta lahan kritis BPDASHL, data diolah

Aktivitas antropogenik seperti pertambangan, perkebunan, pengembangan permukiman serta aktivitas lainnya di dalam wilayah DAS secara berlebihan dan terus menerus akan menurunkan daya dukung dan daya tampungnya terutama yang berkenaan dengan fungsi tata kelola aliran air, biodiversitas serta pencegahan terhadap bencana. Aktivitas pertambangan hingga saat ini dipandang memberikan dampak yang signifikan terhadap meningkatnya kerusakan daerah aliran sungai. Menurut Dubey et al.(2006) dalam Priasty (2014), kegiatan penambangan menyebabkan terjadinya perubahan besar pada landscape dan berdampak negatif pada ekologi karena hilangnya flora and fauna serta kesuburan tanah, menyebabkan erosi, menurunkan kualitas air dan menghancurkan komunitas mikrobial.



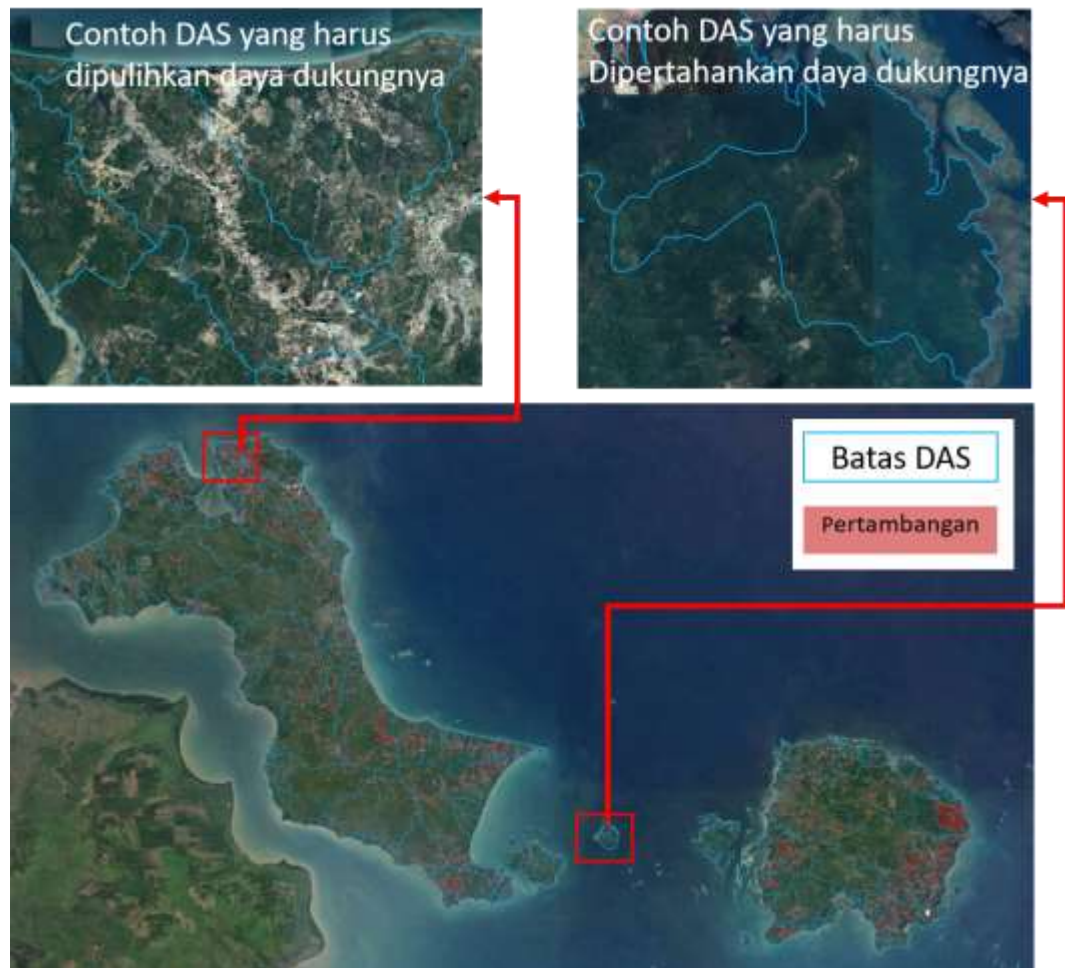
Gambar 2.1. 63 Citra Multitemporal Tahun 2021-2022 di Wilayah DAS Diniang
Kabupaten Bangka

Sumber: Citra Sentinel 2A MSI Perekam Juni 2021 dan Desember 2022, Esa Copernicus

Gambar di atas memperlihatkan perubahan penutup lahan terutama pertambangan di dalam wilayah DAS Diniang yang ditandai oleh pola memanjang teratur mengikuti pola aliran sungai dengan warna putih hingga kecoklatan dan terdapat tubuh air di dalam pola tersebut dengan kecenderungan penambahan luasan penutup lahan pertambangan hingga ke arah pesisir timur.

Dengan kembali maraknya aktivitas penambangan timah khususnya yang bersifat ilegal sekaligus menjadi ancaman bertambahnya daerah aliran sungai yang akan mengalami penurunan fungsi hidrologi dan

ekologisnya. DAS dengan kondisi penutup lahannya berupa lahan pertambangan merupakan jenis DAS yang harus dipulihkan daya dukungnya sedangkan DAS yang kondisi penutup lahannya masih berupa vegetasi alami harus dipertahankan daya dukungnya. Sebaran penutup lahan pertambangan pada daerah aliran sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperlihatkan pada Gambar 2.1.64 berikut.



Gambar 2.1. 64 Penutup Lahan Pertambangan dalam wilayah DAS

Sumber: IGT penutup lahan Prov Kep Babel, BPKH wil XIII; IGT Batas DAS, BPDAS BRC (data diolah)

Berdasarkan hasil analisis tumpang susun antara informasi geospasial tematik batas DAS terhadap penutup lahan pertambangan tahun 2021 diketahui bahwa aktivitas ini berlangsung di dalam 202 daerah aliran sungai yang persebarannya dapat dilihat pada gambar diatas. DAS Linggang yang terletak di Kabupaten Belitung Timur merupakan daerah dimana terdapat aktivitas penambangan terbesar yaitu seluas 13.140

hektar. Luas DAS Linggang itu sendiri yaitu sekitar 73.570 hektar sehingga jika dipersentasekan aktivitas tersebut yaitu sekitar 17,9%. Angka ini belum ditambah dengan alih fungsi lahan menjadi perkebunan atau lahan terbangun yang berpengaruh negatif terhadap fungsi daerah aliran sungai. Upaya pemulihan terhadap DAS sangatlah penting dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk mengembalikan daya dukungnya yang semakin menurun terutama karena aktivitas manusia.

II.1.3.4 Erosi dan Sedimentasi

Erosi dan sedimentasi saat ini masih banyak ditemukan di sejumlah daerah aliran sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Erosi dan sedimentasi adalah dua peristiwa yang memiliki keterkaitan yang erat dimana sedimentasi merupakan proses akhir yang terjadi setelah adanya erosi. Diantara kedua peristiwa ini faktor transportasi menjadi penghubung prosesnya. Proses erosi diawali dengan pengelupasan partikel tanah akibat tetesan air hujan. Semakin tinggi intensitas hujan akan mempercepat lepasnya partikel tanah. Selanjutnya terjadi proses transportasi atau pengangkutan artikel tanah tersebut oeh aliran air permukaan yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti kemiringan lereng, penutup lahan dan debit aliran sungai hingga ke arah hilir sungai.



Gambar 2.1. 65 Sedimentasi di Muara Jelitik
Sumber: Sentinel 2A MSI Tahun 2021 dan 2022, Google Earth Engine

Dengan kontur yang cenderung lebih datar daripada di hulu, debit aliran mulai berkurang dan disinilah mulai terjadi proses sedimentasi atau pengendapan partikel akibat erosi sebelumnya (Sabri, 2017). Alih fungsi lahan yang terjadi di daerah hulu terutama akibat proses penambangan berkontribusi tinggi dalam menambah laju sedimentasi di hilir sungai yang akhirnya akan menyebabkan pendangkalan sungai seperti halnya yang terjadi di Muara Jelitik (Gambar 2.1.64).

II.1.3.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

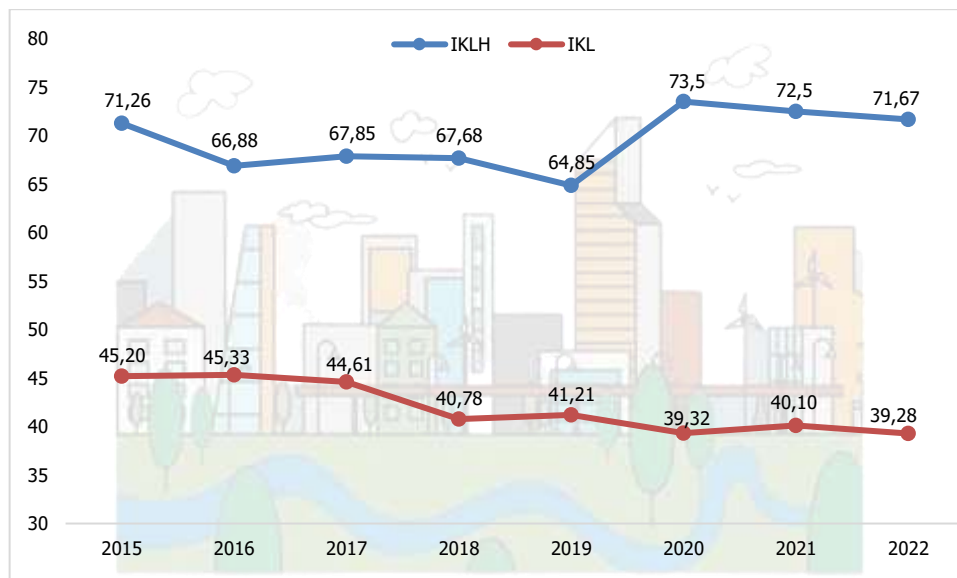
Dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan disebutkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dijadikan indeks kinerja pengelolaan lingkungan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024. Mempertimbangkan RPJMD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional maka RPJMD perlu memasukkan IKLH sebagai indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Mengacu pada PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, bahwa salah satu komponennya adalah Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang digambarkan melalui gabungan indeks tutupan lahan dan ekosistem gambut. Dalam perhitungan ini data utama yang dibutuhkan adalah vegetasi hutan berupa kelas penutup lahan hutan sesuai klasifikasi dari KLHK dan vegetasi non hutan berupa data luasan belukar dan belukar rawa yang berada di dalam kawasan hutan, fungsi lindung serta kawasan perlindungan setempat ditambah dengan data ruang terbuka hijau, kebun raya serta taman kehati.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) atau yang sebelumnya dikenal dengan istilah Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan salah satu komponen yang berkontribusi dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

dengan faktor pembobot sebesar 0,133. Dengan semakin bertambahnya tekanan yang diberikan kepada lingkungan dalam bentuk eksploitasi lahan maupun alih fungsi lahan hingga menurunnya luasan hutan merupakan kontributor utama yang membuat nilai IKL cenderung mengalami penurunan.

Berdasarkan target IKLH dan masing-masing komponennya yang disampaikan oleh KLHK melalui surat edaran Menteri LHK nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, ditetapkan nilai IKL pada tahun 2022 hingga 2024 masing-masing 41,33; 43,34; 45,36 dan 47,37. Jika secara sederhana mensimulasikan perhitungan IKL dengan mengabaikan faktor koreksi kanal gambut maka untuk menaikkan IKL dari 40,10 di tahun 2021 menjadi 43,34 di tahun 2022 sesuai dengan target diatas maka paling tidak dibutuhkan penambahan luasan penutup lahan hutan kurang lebih sebesar 59.000 hektar atau kurang lebih sebesar 98.000 hektar luas RTH atau rehabilitasi hutan dan lahan dalam waktu 1 (satu) tahun.



Gambar 2.1. 66 Trend Nilai IKLH dan IKL di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Dari grafik diatas terlihat bahwa nilai IKLH mengalami fluktuasi nilai yang dipengaruhi oleh perubahan metode maupun kualitas lingkungan itu

sendiri. Dalam tiga tahun terakhir nilai IKLH cenderung mengalami penurunan. Hal ini berbanding lurus dengan nilai IKL yang hampir sebagian besar menunjukkan trend penurunan dalam rentang waktu tahun 2015 hingga 2022. Pada tahun 2020 angka IKL mengalami penurunan sebesar 1,89 poin yang disebabkan oleh berkurangnya luasan sekitar 16.000 hektar penutup lahan hutan, sementara itu pada tahun 2021 nilai IKL mengalami kenaikan sebesar 0,78 poin yang setelah diamati merupakan kontribusi dari meningkatnya luasan semak belukar yang berubah menjadi hutan. Sementara itu pada tahun 2022, IKL kembali mengalami penurunan sebesar 0,82 poin menjadi 39,28 yang dipengaruhi oleh konversi semak belukar menjadi penutup lahan lainnya. Hal ini sekaligus menandakan belum optimalnya upaya untuk menjaga kelestarian ekosistem hutan maupun tutupan vegetasi alami yang ada dari campur tangan aktivitas manusia sekaligus belum optimalnya upaya rehabilitasi hutan dan lahan.

Berdasarkan data historis IKLH tahun 2015-2022 seperti yang disajikan pada Gambar 2.1.64 di atas dilakukan evaluasi dengan hasil yaitu bahwa:

- a. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi tidak pernah mencapai target yang ditetapkan sejak tahun 2020;
- b. Kesenjangan (*gap*) antara capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan targetnya semakin besar;
- c. Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi jauh lebih tinggi daripada rata-rata target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota;
- d. Kesiapan sumber daya manusia dan kondisi keuangan/penganggaran dinilai tidak siap untuk mencapai target yang *gap*-nya semakin besar dengan capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terakhir.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut maka dilakukan proyeksi nilai IKLH dan diajukan pengusulan perubahan target IKLH seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.1.9 berikut ini.

Tabel 2.1. 9 Usulan Nilai IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indikator	2023		2024	
	Target Lama	Target Baru	Target Lama	Target Baru
IKA	69,59	60,48	69,69	61,45
IKU	90,47	90,43	90,58	90,44
IKL	45,36	40,55	47,37	40,74
IKAL	70,88	82,93	71,48	83,04
IKLH	75,43	72,87	75,84	73,24

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

II.1.4 Impact

Aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan secara massif dan terus menerus hingga mengubah tata guna lahan dapat menyebabkan dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif yang dapat terukur yaitu adanya peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan berkenaan dengan lingkungan dan kelestarian ekosistem. Sub bagian *Impact* ini utamanya akan fokus pada penjabaran beberapa dampak negatif saja sebagai salah satu bagian penting dalam kinerja pengelolaan lingkungan daerah pada kurun waktu tertentu.

II.1.4.1 Penurunan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Daya dukung merupakan kapasitas maksimum lingkungan untuk menopang populasi tertentu atau aktivitas manusia tanpa mengalami degradasi atau kerusakan yang sifatnya tidak dapat diperbaharui sedangkan daya tampung berkaitan dengan kemampuan lingkungan untuk menyerap atau menyerap atau menangani tekanan dan dampak dari aktivitas manusia atau faktor-faktor lingkungan lainnya tanpa menyebabkan dampak negatif yang tidak dapat diperbaharui.

Secara spesifik, konsep mendasar dari daya dukung lahan yaitu perbandingan antara ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) dari lahan itu sendiri. Hal penting yang harus dipahami bahwa supply lahan bersifat terbatas sedangkan demandnya cenderung terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah. Banyaknya eksploitasi lahan secara berlebihan maupun alih fungsi lahan berkenaan dengan aktivitas pertambangan, perkebunan maupun lahan terbangun dalam rentang waktu beberapa tahun terakhir menyebabkan terjadinya perubahan daya dukung lahan maupun daya dukung lingkungan.

Pengaruh eksploitasi lahan secara terus menerus yang berdampak pada penurunan daya dukung lahan bisa terlihat pada hasil uji tingkat kesuburan tanah dari aktivitas penambangan di Pulau Bangka yang tergolong rendah yang ditandai oleh tingginya fraksi pasir dengan karakteristik sifat kimia pH rendah serta kandungan unsur hara seperti karbon, nitrogen, fosfor, kalsium, magnesium, kalium serta natrium yang sangat rendah (Asmarhansyah, 2015). Hal ini menyebabkan lahan bekas penambangan timah bukan merupakan media tanam yang ideal sehingga harus dilakukan upaya treatment atau pemulihan untuk meningkatkan kualitas lahan.

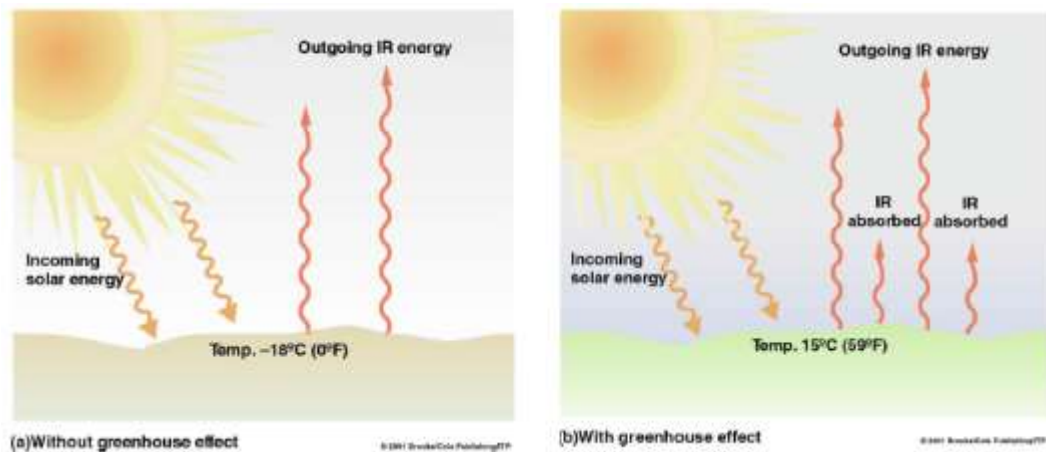


Gambar 2.1. 67 Kenampakan Tanah di Sekitar Lokasi Penambangan Pasir Kuarsa
Kabupaten Belitung Timur

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

II.1.4.2 Peningkatan Emisi GRK dan Perubahan Iklim

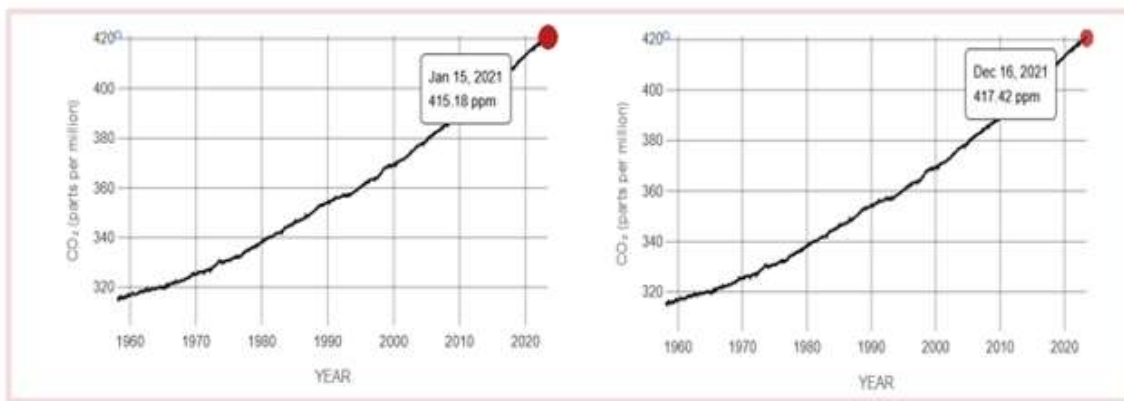
Kenaikan suhu udara dan perubahan iklim adalah dua fenomena yang erat kaitannya. Perubahan iklim mengacu pada perubahan pola cuaca dalam jangka waktu yang panjang di seluruh dunia sementara itu kenaikan suhu udara adalah salah satu aspek dari perubahan iklim. Fenomena ini secara luas dikaitkan dengan pemanasan global. Aktivitas manusia dalam pembukaan lahan berupa deforestasi yaitu proses penebangan hutan secara besar-besaran maupun konversi lahan yang mencakup perubahan penutup/penggunaan lahan dari hutan atau ekosistem alami menjadi lahan terbuka diusahakan maupun lahan terbangun berkontribusi terhadap peningkatan konsentrasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sekaligus kenaikan suhu daratan hingga ke perubahan iklim. Aktivitas ini berkontribusi melalui penurunan penyerapan karbon akibatnya banyaknya penebangan yang menghilangkan vegetasi yang berperan sebagai penyimpan karbondioksida yang diserap dari udara dalam bentuk stok karbon biomassa serta melalui proses pembukaan lahan dengan cara pembakaran sehingga karbon yang telah disimpan dalam vegetasi dilepaskan kembali ke atmosfer dalam bentuk gas karbondioksida.



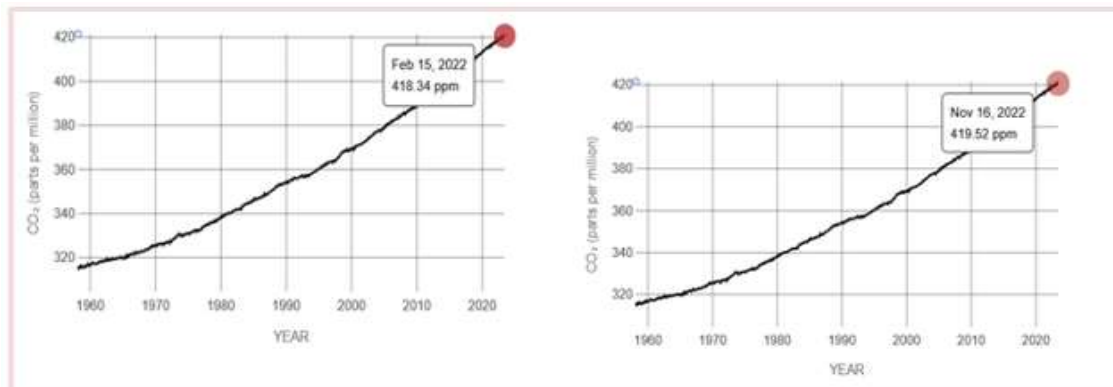
Gambar 2.1. 68 (a) Kondisi Bumi Tanpa GRK suhu -18°C (b) dengan GRK suhu 15°C
Sumber : Brooks/Cole Publishing

Pada dasarnya gas rumah kaca diperlukan untuk menjaga suhu bumi tetap hangat dan menyerap radiasi matahari sehingga hanya sedikit yang mencapai permukaan bumi dan sebagian besar radiasinya akan dipantulkan kembali ke atmosfer. Tanpa adanya gas rumah kaca maka suhu bumi akan sangat dingin yaitu -18°C , suhu ini terlalu rendah untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Menurut data yang diperoleh dari *National Aeronautics and Space Administration* (NASA), konsentrasi CO_2 di atmosfer terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2021 konsentrasi CO_2 berada pada kisaran 415,18 ppm – 417,42 ppm. Kemudian mengalami kenaikan di tahun 2022 yaitu 418,34 ppm – 419,52 ppm. Pada gambar 2.4.1.1. terlihat bahwa terjadi peningkatan konsentrasi setiap tahunnya. Bahkan NASA menyebutkan bahwa kenaikan ini meningkat sekitar 50% jika dibandingkan pada awal era industri tahun 1750.



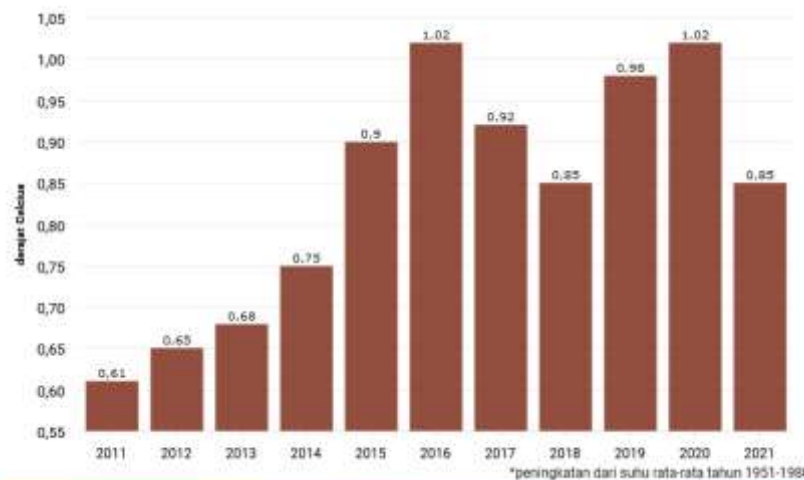
Gambar 2.1. 69 Konsentrasi CO_2 di atmosfer tahun 2021



Gambar 2.1. 70 Konsentrasi CO_2 di atmosfer tahun 2022

Sumber : NASA, 2023

Suhu permukaan bumi pada tahun 2021 telah mengalami kenaikan $0,85^{\circ}\text{C}$ bila dibandingkan dengan suhu rata-rata tahunan selama periode 1951 – 1980. Dan dalam periode 2011 – 2021, terlihat bahwa tahun 2106 dan 2020 suhu permukaan mencapai $1,02^{\circ}\text{C}$. Para ilmuwan NOAA mengatakan bahwa suhu bumi meningkat di atas rata-rata dan menemukan bahwa tahun 2016 lebih panas dibandingkan tahun 2020 karena kenaikan suhu di tahun 2020 lebih rendah $0,04^{\circ}\text{C}$ daripada tahun 2016. Sedangkan menurut analisis NASA tahun 2020 adalah tahun terpanas melampaui tahun 2016. Perbedaan analisis antara NOAA dan NASA kemungkinan besar disebabkan oleh perbedaan metode yang digunakan.

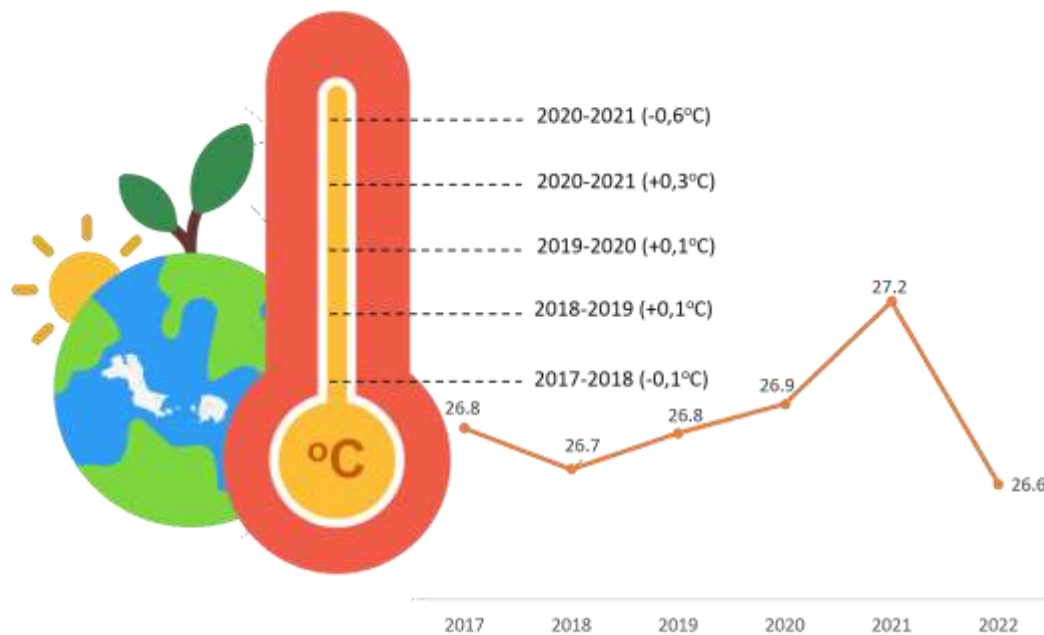


Gambar 2.1. 71 Trend perubahan suhu udara global 2011 - 2021
Sumber : NASA, 2023

Selanjutnya pada tahun 2021, NOAA merilis bahwa bulan Juli 2021 adalah bulan terpanas di dunia sejak pencatatan modern dimulai 142 tahun lalu. (noaa.gov, 2021). Perkembangan terakhir seperti yang disampaikan dalam laporan terbaru World Meteorological Organization (WMO) yang dirilis pada tanggal 12 Januari 2023 menyatakan bahwa tahun 2022 menjadi tahun terpanas secara global. Kenaikan suhu yang tercatat mencapai $1,15^{\circ}\text{C}$ lebih tinggi dari suhu sepanjang periode pra

industri pada rentang tahun 1850 – 1900. Tingginya suhu global pada tahun 2022 ini sekaligus menegaskan bahwa delapan tahun terakhir sejak tahun 2015 adalah rekor suhu bumi terpanas sepanjang sejarah dengan kenaikan suhu bumi naik diatas 1 derajat (WMO, 2023).

Berkenaan dengan parameter suhu udara yang erat kaitannya dengan perubahan iklim, dalam rentang waktu tahun 2017 hingga 2022 terlihat adanya trend fluktuasi suhu udara seperti yang terlihat pada Gambar 2.1.72 di bawah ini.



Gambar 2.1. 72 Tren kenaikan suhu udara sepanjang 2017-2022 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir, 2022; Data Online BMKG, diakses 2023

Dari gambar diatas terlihat bahwa rerata suhu udara pada tahun 2021 menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,3°C sedangkan pada tahun 2022 justru mengalami penurunan sebesar 0,6°C namun demikian dikutip dari laman BMKG.go.id bahwa suhu udara rata-rata Indonesia pada tahun 2022 adalah sebesar 27°C. Dalam pengukuran suhu udara terdapat istilah anomali suhu udara tahunan yang merupakan perbandingan suhu udara pada tahun tertentu relatif terhadap

rata-rata periode normal dalam hal ini yaitu rentang waktu tahun 1991-2020.

Berdasarkan data dari 91 stasiun pengamatan BMKG, normal suhu udara pada periode tahun tersebut diatas yaitu sebesar 26,8°C sehingga suhu udara pada tahun 2022 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk anomali negatif 0,2°C sementara itu anomali suhu udara rata-rata per stasiun pada tahun 2022 yang diperoleh dari 91 stasiun pengamatan BMKG di Indonesia hampir seluruhnya menunjukkan nilai anomali positif dan sedikit saja yang mengalami anomali negatif seperti yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh BMKG dari 91 stasiun BMKG menunjukkan suhu permukaan rata-rata Indonesia pada tahun 2022 lebih tinggi 0,9°C jika dibandingkan dengan periode tahun 1981- 2010 (Badan Meteorologi dan Geofisika, 2023). Sebagai catatan bahwa data suhu udara rata-rata pada tahun 2022 diperoleh dari UPT Stasiun Meteorologi BMKG Depati Amir Pangkalpinang dan UPT Stasiun Meteorologi Hanandjoeddin Tanjung Pandan.

Berkenaan dengan emisi GRK, Pemerintah Indonesia telah memperbarui janjinya dalam mengurangi emisi karbon melalui dokumen *Nationally Determined Contribution (NDC)* terbaru yang dinamai Enhanced NDC dan sudah didaftarkan ke UNFCCC pada September 2022. NDC adalah komitmen negara-negara yang terlibat dalam Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi karbon dan beradaptasi dengan perubahan iklim dan komitmen ini pada umumnya diperbaharui setiap lima tahun sekali. Dalam dokumen NDC pertama tahun 2016, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% dengan upaya sendiri atau 41% dengan bantuan internasional. Kemudian dalam Enhanced NDC baru, target penurunan emisi karbon naik menjadi 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,2% dengan bantuan internasional. Dalam skenario normal atau *business as usual*, emisi karbon Indonesia pada tahun 2030 diproyeksikan mencapai 2.869 juta ton karbondioksida ekuivalen (Mton

CO_{2e}) dan dengan adanya Enhanced NDC, pemerintah telah menargetkan emisi karbon Indonesia pada tahun 2030 menjadi 1.953 Mton CO_{2e} dengan usaha sendiri atau menjadi 1,632 Mton CO₂ dengan bantuan internasional.

Salah satu sektor utama yang menjadi target penurunan gas rumah kaca adalah perubahan lahan karena sektor ini merupakan penyumbang emisi GRK terbesar. Secara nasional, emisi GRK tertinggi berasal dari praktek deforestasi dan alih fungsi lahan yaitu sebesar 60 – 70% yang dipicu oleh aktivitas eksplorasi dan eksploitasi pertambangan dan sumber daya alam lainnya (Den Elzen, et. al, 2013). Aktivitas alih fungsi lahan khususnya areal hutan menjadi areal pertambangan, pertanian, perkebunan dan pemukiman menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Hilangnya vegetasi mempengaruhi siklus karbon dimana kemampuan menyerap karbondioksida (CO₂) pada proses fotosintesis mengalami penurunan yang mengakibatkan berkurangnya biomassa dan karbon tanah. Meningkatnya konsentrasi GRK seperti karbondioksida (CO₂), metana (CH₄) dan dinitrogen oksida (N₂O) yang dihasilkan dari aktivitas manusia menyebabkan semakin meningkatnya radiasi matahari yang terperangkap di atmosfer dan menyebabkan naiknya suhu bumi. Secara umum komponen GRK terbagi menjadi enam yaitu karbondioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitrogen oksida (N₂O), hidrofluorokarbon (HFC₅), perfluorokarbon (PFC₅) dan sulfurheksafluorida (SF₆) namun dari semua jenis gas tersebut yang paling banyak kandungannya adalah CO₂) sedangkan gas lainnya memiliki kandungan yang sedikit.

Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 sebesar 14.105,09 Gg CO₂ Eq, tahun 2019 sebesar 7.070,63 Gg CO₂ Eq dan tahun 2020 menunjukkan bahwa emisi yang dihasilkan sebesar 13.328,66 Gg CO₂ Eq, dapat terlihat pada tabel berikut emisi yang dihasilkan dari setiap sektor.

Tabel 2.1. 10 Emisi GRK periode tahun 2018 – 2020

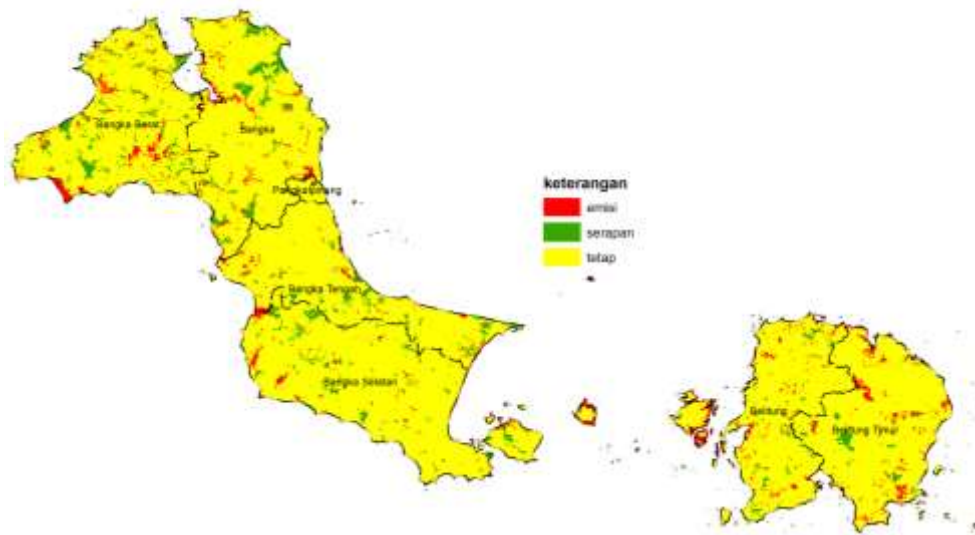
Tahun	Energi	IPPU	Pertanian	Kehutanan	Limbah	Total
	(Gg CO ₂ eq)	(Gg CO ₂ eq)	(Gg CO ₂ eq)	(Gg CO ₂ eq)	(Gg CO ₂ eq)	(Gg CO ₂ eq)
2018	3.000,36	0.89	145,58	10.440,9	435,24	14.105,09
2019	2.450,22	0.79	449,14	3.717,59	452,89	7.070,63
2020	2.758,48	0.79	459,84	9.622,99	486,56	13.328,66

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Perhitungan dilakukan melalui aplikasi *signsmart* yang merupakan penyempurnaan dari metode IPCC yang dapat diakses baik nasional maupun internasional yang dikembangkan sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Presiden NO. 7 tahun 2011, Peraturan Presiden No. 98 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.73 tahun 2017. *Sign smart* merupakan alat bantu pemantauan, pelaporan dan verifikasi dalam melakukan identifikasi data-data esensial terkait inventarisasi GRK. Terlihat bahwa total emisi di tahun 2019 mengalami penurunan dan kembali meningkat di tahun 2020. Data ini masih sangat fluktuatif karena perhitungan emisi/serapan GRK diperoleh melalui perkalian antara data aktivitas dan faktor emisi sedangkan data aktivitas menjadi sangat berpengaruh dalam perhitungan karena tergantung pada kelengkapan data dari instansi terkait. Sumber data aktivitas digunakan untuk mengestimasi besaran karbon pada suatu wilayah pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya adalah data perubahan tutupan lahan, data produksi kayu dan data luas kebakaran hutan dan lahan.

Sementara itu jika membandingkan data stok karbon berdasarkan data penutup lahan pada tahun 2020 dan 2021 yang berasal dari data faktor emisi tiap penutup lahan dikalikan dengan luasan masing-masing penutup lahan tersebut maka secara umum pada tahun 2021 nilai stok karbonnya lebih tinggi atau dapat dikatakan sudah mengalami serapan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Gambar 2.1.73 di bawah ini memperlihatkan pola emisi dan serapan berdasarkan asumsi bahwa

perubahan penutup lahan vegetasi menjadi non vegetasi sifatnya adalah mengemisikan; perubahan penutup lahan non vegetasi menjadi vegetasi bersifat menyerap; penutup lahan yang tidak mengalami perubahan artinya bersifat tetap atau dalam artian tidak terjadi emisi ataupun serapan serta penutup lahan vegetasi menjadi penutup lahan lainnya yang masih bervegetasi maka akan dibandingkan berdasarkan data stok karbon masing-masing penutup lahannya. Data penutup lahan yang dipergunakan yaitu peta penutup lahan skala 1:250.000 tahun 2020 dan 2021 yang berasal dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIII Pangkalpinang.



Gambar 2.1. 73 Emisi dan Serapan sepanjang Tahun 2020-2021
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

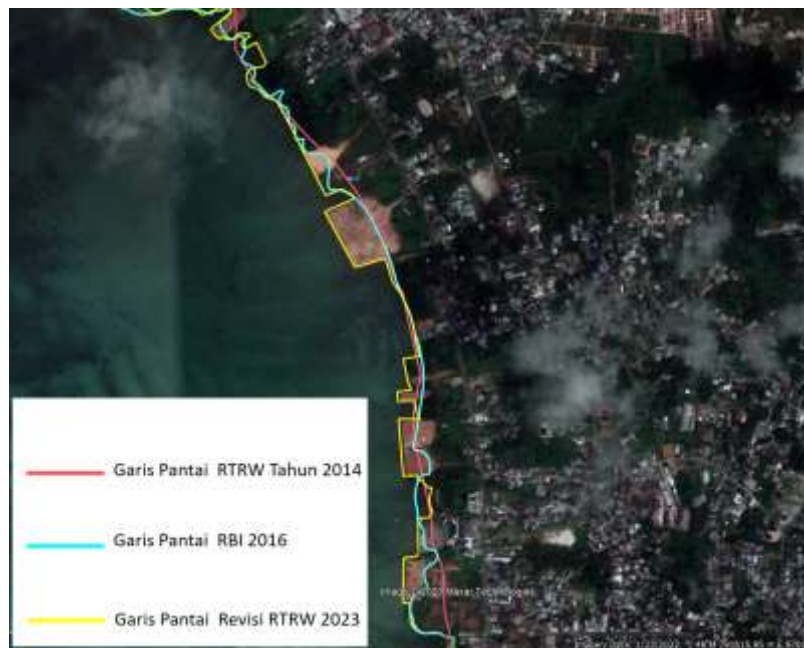
Sumber: IGT Penutup lahan skala 1:250.000 KLHK Tahun 2020-2021, Faktor Emisi KLHK (data diolah 2023)

II.1.4.3 Perubahan Garis Pantai

Perubahan garis pantai dipengaruhi oleh faktor alami maupun faktor non alami/buatan. Faktor alami yaitu berupa akresi dan abrasi pantai. Dalam definisinya, akresi adalah penambahan daratan diluar garis pantai yang disebabkan oleh proses sedimentasi dari daratan atau sungai menuju arah laut (Muchlisin, et.al., 2011). Proses sedimentasi di daratan dapat disebabkan oleh pembukaan areal lahan, limpasan air tawar dengan

volume yang besar karena hujan yang berkepanjangan dan proses transport sedimen dari badan sungai menuju laut. Akresi pantai juga dapat menyebabkan terjadi pendangkalan secara merata ke arah laut yang lambat laun akan membentuk suatu dataran berupa delta atau tanah timbul. Tanah timbul ini menjadi salah satu isu dalam pembahasan revisi rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Abrasi merupakan kebalikan dari proses akresi yaitu proses pengikisan yang terjadi akibat aktivitas gelombang, arus dan pasang surut sehingga menyebabkan terjadinya pengurangan daratan (Damaywanti, 2013). Selain faktor alami, perubahan garis pantai dapat disebabkan pula oleh faktor antropogenik berupa kegiatan reklamasi. Reklamasi pantai adalah kegiatan pengurukan atau penambahan material di wilayah pesisir pantai yang bertujuan untuk memperluas wilayah daratan.



Gambar 2.1. 74 Perubahan Garis Pantai Akresi

Sumber: IGD Garis Pantai RTRW tahun 2014; IGD Revisi RTRW Tahun 2023; RBI Garis Pantai 2016; Citra Maxar diakses via Google Earth 2023

Gambar diatas merupakan salah satu contoh terjadinya perubahan garis pantai akibat kegiatan reklamasi di salah satu pesisir pantai di Kabupaten Belitung yang menimbulkan akresi sehingga terdapat

penambahan luasan daratan sekaligus penambahan panjang garis pantai terutama di lokasi yang mengalami reklamasi tersebut. Sementara itu perubahan garis pantai yang terkait dengan abrasi atau pengikisan di pantai mengakibatkan garis pantai mengalami kemunduran ke arah darat sekaligus menyebabkan luasan daratan juga terus berkurang.



Gambar 2.1. 75 Perubahan Garis Pantai Abrasi

Sumber: IGD Garis Pantai Revisi RTRW Tahun 2023; RBI Garis Pantai 2016; Citra Maxar diakses via Google Earth 2023

Berkenaan dengan sinkronisasi data salah satunya dilaksanakan pemutakhiran data garis pantai sebagai informasi geospasial dasar dalam rangka penyusunan revisi tata ruang yang telah berproses sejak tahun tahun 2022.

II.1.4.4 Ancaman Bencana Banjir

Berdasarkan data BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kejadian banjir tahun 2022 yang terdata yaitu sebanyak 11 kejadian dan masih didominasi terjadi di wilayah Kota Pangkalpinang. Hal ini tidak terlepas dari selain faktor topografi yang cenderung datar, perkembangan lahan terbangun maupun lahan terbuka turut berperan dalam peningkatan ancaman bencana ini karena imbas dari banyaknya lahan terbangun dapat mengurangi jumlah infiltrasi air kedalam tanah ketika hujan sehingga meningkatkan *surface run off*. Kondisi ini diperparah pula oleh laju

sedimentasi sungai yang tinggi akibat aktivitas di wilayah hulu yang tidak berkelanjutan. Bercermin dari hal ini penting sekali kajian penataan ruang yang berbasis mitigasi terhadap bencana. Pembahasan lebih lanjut mengenai banjir akan dibahas di sub bab Risiko Bencana.

II.1.4.5 Penurunan Keanekaragaman Hayati

Sejumlah tekanan yang dibebankan kepada lingkungan khususnya lahan oleh aktivitas antropogenik manusia baik dalam bentuk alih fungsi lahan, eksploitasi lahan maupun deforestasi dan degradasi hutan yang berorientasi jangka pendek turut berdampak pada kelangsungan keanekaragaman hayati yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.1. 11 Status Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1. Mamalia	<i>Arctictis binturong</i>	Binturong			✓	
	<i>Rusa unicolor</i>	Rusa Sambar		✓	✓	
	<i>Arctogalidia trivirgata</i>	Musang Akar				✓
	<i>Tragulus napu</i>	Pelanduk		✓	✓	
	<i>Nycticebus bancanus</i>	Kukang	✓	✓	✓	
	<i>Muntiacus muntjak</i>	Kijang		✓	✓	
	<i>Cephalophacus bancanus</i>	Mentilin	✓	✓	✓	
	<i>Manis javanica</i>	Trenggiling		✓	✓	
	<i>Callosciurus prevostii</i>	Tupai 3 Warna				✓
	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>	Musang Pandan				✓
2. Aves	<i>Haliastur indus</i>	Elang Bondol			✓	
	<i>Anthracoseros malayanus</i>	Rangkong Hitam			✓	
3. Reptil	<i>Crocodylus porosus</i>	Buaya Muara			✓	
	<i>Chelonia mydas</i>	Penyu hijau		✓	✓	
	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Penyu Sisik		✓	✓	
	<i>Python reticulatus</i>	Sanca				✓

		Kembang				
4. Mamalia Laut	<i>Orcaella brevirotris</i>	Pesut		V	V	
5. Flora yang Dilindungi	<i>Amorphophallus titanum</i>	Bunga Bangkai		V	V	
	<i>Lipistona spp</i>	Palem Kipas				V
	<i>Nephentes spp</i>	Ketuyut				V
7. Tumbuhan	<i>Aquilaria malaccensis</i>	Gaharu				V
8. Moltri	<i>Trochus Niloticus</i>	Lola Merah			V	

Sumber: Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resort 17 Bangka, 2023

Dari tabel diatas, jenis satwa rusa sambar, pelanduk, kijang serta trenggiling bukan merupakan hewan endemik Bangka Belitung. Aksi deforestasi dan degradasi hutan yang terus terjadi hingga saat ini membuat satwa-satwa tersebut tidak hanya dilindungi saja namun sudah masuk status terancam kepunahan.

Penambangan laut menggunakan kapal keruk atau kapal isap sangat potensial merusak ekosistem laut. Pasir yang dikeruk kemudian dipisahkan antara bijih timah, pasir dan lumpur kemudian limbahnya dibuang ke laut mengakibatkan air laut menjadi keruh karena lumpur halus yang tercampur pada kolom perairan dan sedimennya menutupi terumbu karang sehingga menyebabkan terumbu karang menjadi rusak bahkan mati. Penambangan timah dengan menggunakan Kapal Isap Produksi (KIP) menghasilkan limbah yang disebut tailing dengan rata-rata 250 m³/jam, dan TI apung masyarakat juga menghasilkan tailing dengan rata-rata 20 m³/jam. Maka dampak yang ditimbulkan dari satu KIP saja setara dengan 12 TI apung masyarakat yang tersebar hampir di seluruh perairan Bangka.

Perairan Pemuja di Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu wilayah yang terdampak kegiatan penambangan timah di laut, terlihat dari banyaknya KIP dan TI apung yang berada di sekitar pulau. Kondisi terumbu karang di Pulau Pemuja berada pada kategori rusak dimana

tutupan karang yang hidup hanya sebesar 16,50%. Tingginya kadar lumpur (*silt*) di perairan yaitu sebesar 48,698%. Sedangkan nilaiutupan *Turf Alga* juga tinggi sebesar 19,967% hal ini mengindikasikan bahwa terumbu karang terdampak oleh sedimentasi lumpur. *Turf Alga* merupakan kelompok makroalga bentik yang banyak menyebabkan kerusakan karang. Sedimentasi lumpur menjadi substrat yang sesuai bagi alga tersebut. Nilaiutupan karang hidup di Pulau Pemuja yang paling tinggi adalah jenis *Coral Massive* (CM) dengan nilai 10,233% kemudian *Coral Encrusting* (CE) 2,167%, *Coral Branching* (CB) 2,0%, *Acropora Digitate* 1,60% dan yang nilainya paling rendah adalah *Coral Mussrom* (CMR) sebesar 0,5%. Hal yang sama juga terjadi di Karang Malang Duyung, terjadi perubahan kondisi terumbu dari kategori baik menjadi rusak. Nilai IMK sebesar 0,15% mengindikasikan bahwa masih banyak terumbu karang. Terdapatutupan lumpur sebesar 10,833% dan karang mati (*Dead Coral*) sebesar 0,8333% (Syari, Nugraha, & Hudatwi, 2022)

Rusaknya terumbu akan mengakibatkan berkurangnya sumber daya ikan di perairan Bangka Belitung karena terumbu karang merupakan habitat dan tempat berkembang biak ikan. Terumbu karang sangat penting untuk keberlangsungan dan keseimbangan biota-biota pada ekosistem laut karena menjadi tempat hidup bagi spesies tumbuhan laut, hewan laut dan mikroorganisme laut lainnya. Ekosistem terumbu sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan hidupnya terutama suhu, salinitas, sedimentasi dan eutrofikasi.

II.1.5 Response

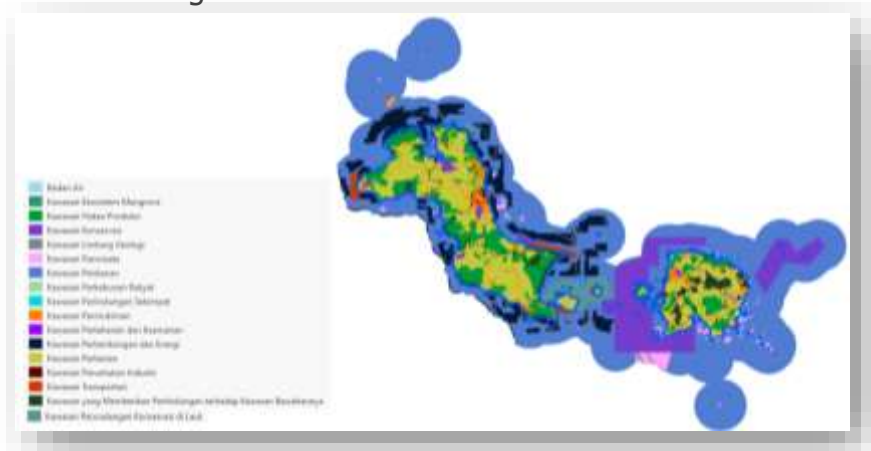
Kondisi lingkungan saat ini (*state*) merupakan refleksi dari tekanan (*pressure*) yang dibebankan kepada lingkungan secara terus menerus. Hal ini tidak terlepas dari faktor penyebab (*driving force*) yang membuat tekanan itu terus terjadi. Dampak (*impact*) yang ditimbulkan berupa kerusakan lingkungan menjadi ancaman bagi kelangsungan ekosistem

untuk itulah diperlukan sejumlah upaya (*responses*) untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang lebih besar.

II.1.5.1 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

A. Revisi Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 mulai melaksanakan kegiatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sesuai ketentuan. Revisi RTRWP dan integrasinya dengan RZWP3K juga sekaligus mengakomodasi dinamika yang berkembang seputar pemanfaatan ruang darat dan laut.



Gambar 2.1. 76 Rencana Pola Ruang Revisi RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2042

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Salah satu bagian penting dalam penyusunan revisi RTRWP yaitu mengenai arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi indikasi arahan zonasi pola ruang dan struktur ruang provinsi; penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang; arahan pemberian insentif dan disinsentif serta arahan pengenaan sanksi. Beberapa indikasi arahan zonasi pada kawasan lindung diperlihatkan pada Tabel 2.1.12. berikut.

Tabel 2.1. 12 Indikasi Arahan Zonasi Pola Ruang Revisi RTRWP
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kawasan Perlindungan Setempat		
Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
<ol style="list-style-type: none"> 1. cagar budaya dan ekosistem mangrove; 2. kegiatan hutan lindung dan lindung gambut; 3. kegiatan penataan batas kawasan hutan, perlindungan hutan, pengawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan; 4. pengendalian dan pemeliharaan ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim; 5. kegiatan lain yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu; 2. kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan; 3. kegiatan perhutanan sosial; 4. kegiatan pemanfaatan kawasan hutan untuk ketahanan pangan dan kegiatan kerja sama pembangunan jalan strategis; 5. kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, wisata terbatas, dan/atau perdagangan karbon di ekosistem gambut; 6. kegiatan pemanfaatan areal puncak kubah gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. pertanian, perikanan, dan permukiman, beserta jaringan prasarana sarana pendukungnya yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan; 8. kegiatan pertahanan dan keamanan; 9. kegiatan lain yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka di hutan lindung; 2. kegiatan mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utama kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; 3. menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; 4. merusak akuifer air tanah, dan mengubah bentang alam, termasuk membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam; 5. kegiatan lain yang mengganggu dan mengubah fungsi kawasan hutan lindung dan kawasan lindung gambut.
Kawasan Konservasi		
Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan suaka alam, pelestarian alam, suaka margasatwa Laut, taman wisata alam Laut, kegiatan konsevasi pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kegiatan konservasi maritim, dan kegiatan konservasi perairan; dan 2. kegiatan perlindungan dan pengamanan serta pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar; 3. pembangunan dan pengembangan koridor satwa liar; 4. perlindungan mutlak habitat, populasi ikan, dan alur migrasi biota Laut; 5. perlindungan ekosistem pesisir dan Laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan; 6. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; 7. transportasi perairan dan penempatan terumbu buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 8. rehabilitasi ekosistem Laut, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya; 9. pengawasan kawasan konservasi; 10. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; 11. kegiatan lain yang selaras dan tidak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam, koleksi kekayaan keanekaragaman hayati, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, pemanfaatan air serta energi air, energi angin, energi panas matahari, dan energi panas bumi, wisata alam terbatas, pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budi daya, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah, penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan yang diambil dari alam atau secara buatan; 2. sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada angka 1; 3. kegiatan pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam oleh Masyarakat secara tradisional; 4. kegiatan keagamaan dan/atau adat-budaya, serta pemeliharaan situs religi, budaya dan/atau sejarah; 5. kerja sama pembangunan strategis yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pertanian, perikanan, pertambangan dan energi, peruntukan industri, dan permukiman; 2. kegiatan yang merusak bentang alam, dan/atau merubah fungsi kawasan konservasi; 3. kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan konservasi di Laut; 4. kegiatan yang mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya; 5. kegiatan yang mengganggu alur migrasi biota Laut dan pemulihan ekosistemnya; 6. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem; 7. pengambilan terumbu karang; 8. pembuangan sampah, limbah, atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran; 9. pertambangan terbuka, pembuangan (dumping), dan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 10. kegiatan lain yang mengurangi nilai

<p>mengganggu serta mengubah fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>tidak dapat dilakukan, perhutanan sosial berupa kemitraan kehutanan dan pembangunan jalan strategis;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. pembangunan prasarana dan sarana; 7. pendirian dan/ atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut untuk fungsi wisata bahari dan pelayaran; 8. pemanfaatan sumber daya ikan; 9. wisata bahari dan pemanfaatan jasa lingkungan; 10. pembangunan fasilitas umum; 11. pemanfaatan air Laut selain energi; 12. pembangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di Perairan Pesisir; 13. penempatan terumbu buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 	<p>dan/atau mengganggu dan mengubah fungsi kawasan konservasi.</p>
Kawasan Pertanian		
Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; 2. kegiatan pembukaan dan pengolahan lahan, perbenihan dan perbibitan tanaman/ternak, penanaman benih, perlindungan tanaman dari organisme pengganggu, pemeliharaan kawasan pertanian, serta kegiatan panen dan pascapanen; 3. perlindungan, pelestarian, pengayaan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya genetik hortikultura dan ternak asli atau lokal; 4. penyediaan kawasan pengembalaan umum, penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian tumbuhan pakan ternak, serta pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; dan 5. penelitian untuk pengembangan kawasan pertanian; 6. perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan KP2B; 7. perlindungan dan pelestarian fungsi lindung ekosistem gambut; 8. kegiatan lain yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan perlindungan setempat, perkebunan rakyat, perikanan, industri, pariwisata, serta pertahanan dan keamanan; 2. perhutanan sosial; 3. kegiatan pertambangan dan energi harus mempunyai jarak aman dengan kawasan pertanian yang sudah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. kegiatan integrasi atau tumpang sari antara kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, atau peternakan dengan kegiatan perikanan, pariwisata, dan/atau kehutanan yang mendukung fungsi kawasan pertanian; 5. permukiman perdesaan, sarana dan prasarana, pelayanan jasa pemerintahan, dan pelayanan sosial yang terintegrasi dengan kawasan pertanian dan untuk petani atau pekerja pertanian; 6. kegiatan penyediaan prasarana budi daya kawasan pertanian; 7. kegiatan pengolahan, distribusi, perdagangan, pemasaran, dan usaha wisata agro yang didukung penyediaan prasarana dan sarana penunjang; 8. alih fungsi lahan KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B atau lahan sawah yang dilindungi dapat dilakukan untuk kepentingan umum atau terjadi bencana atau proyek strategis nasional; 9. alih fungsi kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. alih fungsi KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B atau lahan sawah yang dilindungi; 2. alih fungsi kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik; 3. kegiatan perkebunan di kawasan perlindungan setempat pada sempadan sungai bertanggul, kegiatan peternakan di kawasan cagar budaya dan kawasan ekosistem mangrove, serta kegiatan menggembala ternak di kawasan sekitar danau atau waduk; 4. kegiatan yang merusak irigasi dan prasarana kawasan pertanian, mengurangi kesuburan tanah, merusak lahan, membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar; 5. kegiatan menebang, merusak atau penghilangan pohon induk yang mengandung bahan perbanyakan sumber daya genetik; 6. pertambangan di KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B atau lahan sawah yang dilindungi, kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik; 7. kegiatan lain yang mengganggu dan mengubah fungsi kawasan pertanian.
Kawasan Pertambangan Minerba		
Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
<ol style="list-style-type: none"> 1. pertambangan mineral dan/atau batubara meliputi pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan, dan pertambangan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, dan pembangkitan tenaga listrik; 2. kegiatan pertambangan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di Wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara; 3. kegiatan pertambangan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, sarana pengendalian dampak lingkungan, reklamasi dan pascatambang, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, dan prasarana pendukung pertambangan di Wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pertambangan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi di kawasan pelestarian alam hanya untuk pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, Kawasan Lindung geologi tanpa melakukan kegiatan penggalian dan pengeboran, kawasan ekosistem mangrove, kawasan hutan produksi, kawasan perkebunan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan; 2. kegiatan pertambangan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, sarana pengendalian dampak lingkungan, reklamasi dan pascatambang, kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pertambangan eksplorasi di kawasan konservasi, Kawasan Lindung geologi, kawasan cagar budaya, serta kawasan pertahanan dan keamanan yang sudah ada; 2. kegiatan pertambangan operasi produksi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. kawasan konservasi Wilayah darat dan Perairan Pesisir, kawasan pencadangan konservasi di Laut, kawasan cagar alam geologi terutama situs warisan geologi, kawasan imbuhan air tanah, cagar budaya, dan kawasan ekosistem mangrove; 2. KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B atau lahan sawah yang dilindungi; 3. kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik; dan

<p>4. pertambangan tanah jarang di Pulau Kecil dengan luas di atas 10.000 (sepuluh) hektare;</p> <p>5. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan.</p>	<p>pengelolaan lingkungan hidup, dan prasarana pendukung pertambangan di:</p> <p>3. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan bawah tanah;</p> <p>4. kawasan perlindungan setempat dengan menjaga dimensi palung sungai, tidak merubah batas badan danau atau waduk, dan mempunyai jarak aman dengan badan air;</p> <p>5. kawasan perkebunan rakyat;</p> <p>6. kawasan pertanian, kecuali KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B atau lahan sawah yang dilindungi, kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik; dan</p> <p>7. kawasan hutan produksi, kawasan perikanan, kawasan pariwisata, serta kawasan pertahanan dan keamanan;</p> <p>8. kegiatan pertambangan operasi produksi wajib mempunyai jarak aman terhadap:</p> <p>9. kawasan cagar alam geologi terutama situs warisan geologi, kawasan imbuhan air tanah, cagar budaya, dan kawasan ekosistem mangrove;</p> <p>10. KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B atau lahan sawah yang dilindungi, kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik;</p> <p>11. Kawasan Permukiman termasuk sarana pelayanan umum dan prasarana; dan</p> <p>12. kawasan perikanan, kawasan pariwisata, serta kawasan pertahanan dan keamanan, guna mengurangi dampak negatif langsung dari kegiatan pertambangan;</p> <p>13. pertambangan tanah jarang di Pulau Kecil dengan luas antara 100 (seratus) sampai dengan 10.000 (sepuluh) hektar.</p>	<p>4. kawasan perikanan kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, serta kawasan pertahanan dan keamanan yang sudah ada;</p> <p>3. pertambangan mineral dan batubara di Pulau Kecil dengan luas di bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektare;</p> <p>4. pertambangan tanah jarang di Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 (seratus) hektare;</p> <p>5. pengambilan pasir laut di di Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 (seratus) hektare, kawasan ekosistem mangrove, kawasan terumbu karang, dan Pulau Kecil yang menyebabkan pengurangan luasan lebih dari</p> <p>6. pertambangan yang mengganggu dan mengubah daya tarik wisata;</p> <p>7. perpanjangan izin usaha pertambangan operasi produksi di kawasan pariwisata;</p> <p>8. perpanjangan izin usaha pertambangan operasi produksi di Kawasan Permukiman perkotaan;</p> <p>9. pertambangan tanpa izin, tidak mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan, mengurangi standar dan baku mutu lingkungan, menurunkan kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air, tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertambangan mineral dan batubara .</p>
---	--	--

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

B. Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Darat dan Laut

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan suatu perizinan dasar yang menjadi acuan baru dalam melakukan perizinan berusaha, sebelumnya istilahnya yaitu izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang darat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Selain KKPR terdapat istilah PKKPR atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang merupakan sebuah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang (RTR) selain RDTR. Pelaksanaan PKKPR saat ini dilaksanakan melalui sistem elektronik OSS dan sistem ini merupakan salah satu kemudahan dalam investasi.

Selain di darat, terdapat pula kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang selanjutnya dikenal dengan istilah PKKPRL. Masih mengacu pada PP 21 Tahun 2021 bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Sepanjang tahun 2022, PKKPRL untuk wilayah Bangka Belitung yang telah diterbitkan yaitu sebanyak 111 dokumen dan berdasarkan jumlah tersebut maka PKKPRL wilayah Bangka Belitung menjadi yang terbanyak di seluruh Indonesia yang didominasi oleh 79 PKKPRL. Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen dari Pemprov Babel dalam mengedukasi pelaku usaha dan atau kegiatan supaya memenuhi ketaatan dalam berinvestasi (DKP Babel, 2023).

C. Sosialisasi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut



Gambar 2.1. 77 Sosialisasi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terkait prosedur pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh peserta yang berasal dari OPD terkait serta

terutama para pelaku usaha dan atau kegiatan yang dalam kegiatannya akan bersinggungan dengan pemakaian ruang laut. Melalui sosialisasi ini sekaligus juga diharapkan dapat meminimalisir segala bentuk pelanggaran tata ruang baik di darat maupun di laut.

D. Sosialisasi Integrasi RZWP-3K ke dalam RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ke Kabupaten/Kota



Gambar 2.1. 78 Sosialisasi Integrasi RZWP-3-K ke dalam RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 30 November 2022

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah 6 kabupaten yang memiliki alokasi ruang laut. Adapun topik dari kegiatan ini yaitu berkenaan dengan alokasi ruang laut dalam Perda RZWP-3-K yang menjadi acuan dalam pemberian perizinan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL termasuk pula arahan pemanfaatan ruang zonasi baik itu untuk pemanfaatan umum hingga konservasi yang nantinya akan diintegrasikan secara terpadu dalam Revisi RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

E. Aplikasi Si Tawas untuk Pengaduan di Sektor Kelautan dan Perikanan



Gambar 2.1. 79 Alur Proses Aplikasi Si Tawas

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengembangkan "Si Tawas" atau Aplikasi Mata Pengawas Perikanan yang merupakan laman pengaduan secara online berkenaan dengan indikasi pelanggaran bidang kelautan dan perikanan, termasuk juga kaitannya dengan permasalahan alokasi ruang laut hingga tata cara pengambilan sumber daya laut yang melanggar peraturan.

Dengan adanya aplikasi ini maka masyarakat diberikan kemudahan dalam melaporkan dugaan pelanggaran sekaligus memberikan ruang sebagai bentuk partisipasinya dalam menjaga kelestarian pesisir dan laut.

Sementara itu bagi OPD terkait hal ini menjadi salah satu tools yang sangat bermanfaat dalam menangani laporan masyarakat terkait pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan tersebut.

II.1.5.2 Penata kelolaan Pertambangan

A. Pembentukan Satgas Tambang Timah Ilegal

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersinergi dengan para pengusaha tambang melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Tambang Timah Ilegal . Dengan adanya satgas ini diharapkan dapat meminimalisir perkembangan pertambangan ilegal di masa mendatang dan untuk itu diperlukan peran serta dari semua pihak terkait termasuk masyarakat didalamnya.



Gambar 2.1. 80 Pembentukan Satgas Tambang Timah Ilegal tanggal 19 Juni 2022

Sumber: Diskominfo – Babelprov.go.id

B. Pembuatan Portal Layanan Pengaduan Khusus Terkait Pertambangan Ilegal

Sebagai salah satu bentuk peran serta aktif dari masyarakat dalam meminimalisir maraknya aktivitas penambangan timah secara ilegal maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membuat layanan pengaduan terkait aktivitas tersebut secara online yang diberi nama “LAPOR PAK” atau Layanan Aspirasi Pengaduan secara Online dan

Dibukanya layanan pengaduan ini juga sejalan dengan pembentukan satuan tugas khusus penambangan ilegal. Diharapkan dengan adanya layanan tersebut dapat sebesar mungkin meminimalisir terjadinya kegiatan-kegiatan penambangan yang tidak mempunyai izin. Alur proses dalam portal "LAPOR PAK" ditampilkan pada gambar 2.1. 64 berikut ini.



Gambar 2.1. 81 Alur Proses Pengaduan Melalui Lapor.Pak
Sumber: Diskominfo – Babelprov.go.id, diakses 2023

C. Upaya Preventif Terhadap Aktivitas Penambangan Timah Ilegal

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan upaya preventif terhadap aktivitas penambangan timah di perairan laut melalui kegiatan patroli tim pengawasan keselamatan dan keamanan

wilayah laut ke sejumlah wilayah perairan yang terindikasi terdapat aktivitas penambangan ilegal tersebut. Melalui kegiatan ini dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku tambang untuk dapat sesegera mungkin mengurus perizinan secara legal sekaligus himbauan untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut sebelum mendapat tindakan tegas. Langkah preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini hanyalah salah satu cara dalam memberantas pertambangan timah laut secara ilegal yang sudah berdampak negatif baik terhadap ekosistem lingkungan maupun terhadap mata pencaharian nelayan.



Gambar 2.1. 82 Plang Larangan Penambangan Timah secara Ilegal di Sekitar Komplek Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: Kompas 28 Desember 2022, diakses 2023



Gambar 2.1. 83 Penertiban Tambang Timah Di Perairan Teluk Kelabat, 23 Juli 2022
Sumber: Antaranews, diakses 2023

D. Wilayah Pertambangan Rakyat

Berdasarkan pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2021, Wilayah Pertambangan Rakyat adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Dalam penanganan aktivitas pertambangan timah tanpa izin yang menambah dampak negatif bagi lingkungan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meresponnya dalam bentuk percepatan regulasi Wilayah Pertambangan Rakyat.



Gambar 2.1. 84 Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Menerima Audiensi Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia Babel
Sumber: Diskominfo – Babelprov, 2023

Setelah melalui beberapa tahapan, Kementerian Energi Sumberdaya Mineral telah menerbitkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 14 Maret 2023 melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor: 46.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 116.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara administrasi lokasi WPR berada di tiga

kabupaten yaitu Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur dengan masing-masing luasan 6.521 hektar (89 blok); 1.105 hektar (17 blok) serta 980 hektar (17 blok).

Dengan adanya WPR ini masyarakat dapat menambang secara legal sesuai dengan aturan dan kaidah pertambangan yang berlaku namun demikian terdapat beberapa ketentuan yang mengatur termasuk diantaranya WPR tersebut harus mempunyai Izin Penambangan Rakyat (IPR) terlebih dahulu baru bisa dilakukan penambangan; kelengkapan jangka waktu penambangan; luas maksimal yang dapat ditambang serta pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Terkait dengan IPR terdapat sejumlah dokumen yang harus dilengkapi dan salah satunya yang merupakan wewenang provinsi yaitu berkenaan dengan dokumen lingkungan yang saat ini masih berproses.

E. Sinergi Pemerintah dalam Gugus Tugas Reformasi Agraria

Kolaborasi dan Sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Tim Gugus Tugas Reforma Agraria



Gambar 2.1. 85 Rakor Gugus Tugas Reforma agraria tanggal 19 April 2022
Sumber: Diskominfo – Babelprov.go.id

Dalam mengatasi permasalahan lahan pasca tambang seperti sengketa antara pemilik lahan atau pemilik IUP (Izin Usaha

Pertambangan) dengan pemerintah daerah sekaligus memperjelas aturan terhadap status dan pemanfaatan lahan eks tambang kedepannya maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria. Tim ini terdiri atas gabungan dari berbagai stakeholder seperti Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kepolisian, kejaksaan serta TNI serta perangkat daerah terkait lainnya. Melalui pembentukan satgas ini diharapkan pemanfaatan dan pengelolaan lahan eks tambang dapat lebih optimal dengan tidak berbenturan pada undang-undang pertanahan serta undang-undang pertambangan

II.1.5.3 Pengendalian Pemanfaatan Fungsi Kawasan Hutan

A. Inventarisasi Keterlanjuran Kegiatan Terbangun Dalam Kawasan Hutan

Kebijakan pembangunan di bidang kehutanan mengamanatkan bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi hutan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan menjaga fungsi ekologis hutan sebagai penyangga kehidupan, seluruh kegiatan usaha di dalam Kawasan hutan wajib memiliki perizinan berusaha di bidang kehutanan, persetujuan Menteri, kerja sama, atau kemitraan di bidang kehutanan dengan ancaman sanksi pidana bagi siapapun yang melakukan pelanggaran. Berdasarkan analisis pada bagian *pressure* khususnya sub alih fungsi lahan diketahui adanya kegiatan perkebunan, pertambangan, pertanian hingga permukiman yang berada di dalam kawasan hutan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat terobosan kebijakan baru dengan menerapkan prinsip *ultimum remedium* yaitu mengedepankan pengenaan Sanksi Administratif sebelum dikenai sanksi pidana terhadap pelanggaran yang bersifat administratif dan tidak menimbulkan dampak kesehatan, keselamatan, dan atau lingkungan.

Terkait dengan sanksi administratif dimaksud, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal

dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan sebagai turunan UU Cipta Kerja telah mengatur substansi tata caranya yang terdiri atas :

1. Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan;
2. tata cara penyelesaian terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang memiliki izin lokasi dan atau izin usaha di bidang perkebunan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan;
3. tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap kegiatan usaha di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan;
4. tata cara perhitungan denda administratif;
5. PNPB yang berasal dari denda administratif
6. paksaan pemerintah

Berkenaan dengan implementasi peraturan tersebut sekaligus mengatasi permasalahan maraknya kegiatan perkebunan, pertambangan bahkan permukiman yang eksisting berada di dalam kawasan hutan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung/ Produksi (KPHL/KPHP) telah mulai melakukan langkah awal berupa sosialisasi sekaligus pendataan kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan dan belum memiliki perizinan. Melalui kegiatan ini dapat membantu masyarakat dalam rangka untuk mendapatkan legalitas kegiatannya yang sudah terlanjur terbangun di kawasan hutan. Legalitas ini sangat penting agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.



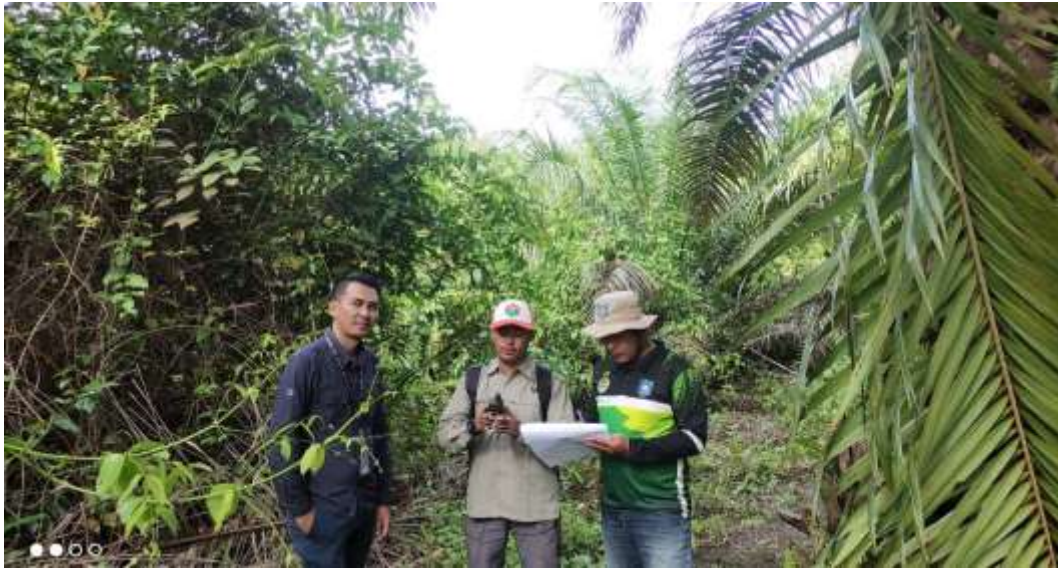
Gambar 2.1. 86 Sosialisasi dan Inventarisasi Keterlanjuran Kegiatan Terbangun di Dalam Kawasan Hutan oleh KPHP Jebu Bembang Antan dan KPHP Rambat Menduyung, 10 Februari 2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023



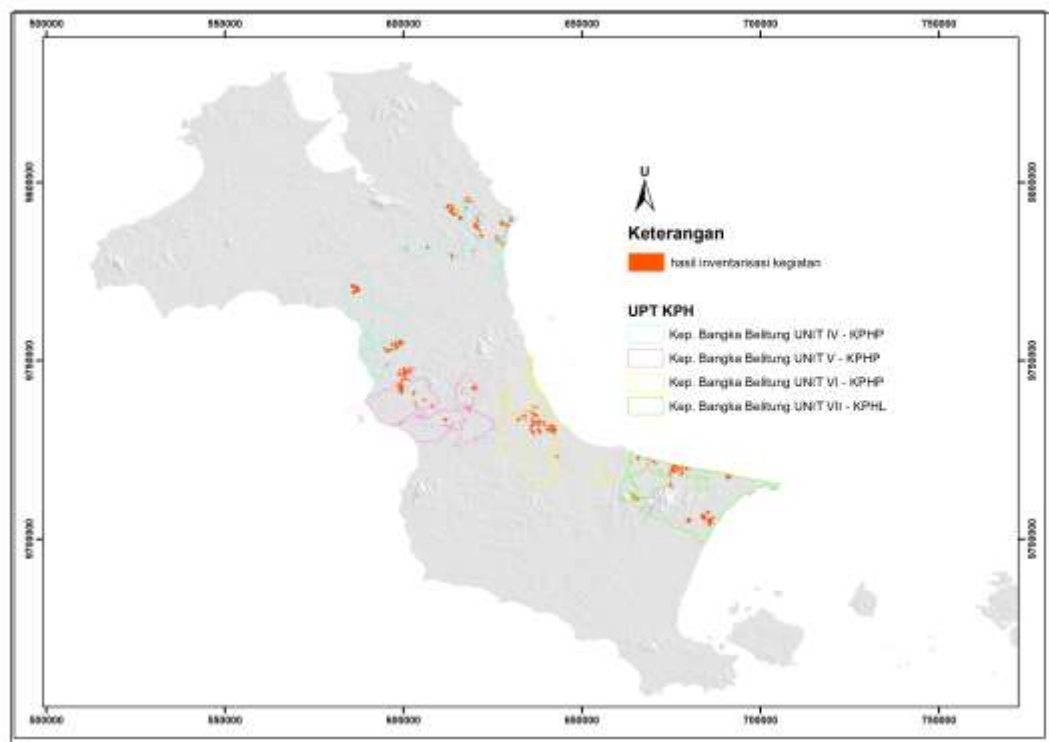
Gambar 2.1. 87 Sosialisasi dan Inventarisasi Keterlanjuran Kegiatan Terbangun di Dalam Kawasan Hutan oleh KPHP Sungai Sembulan, 28 Februari 2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023



Gambar 2.1. 88 Verifikasi Lapangan Keterlanjuran Kegiatan Terbangun di Dalam Kawasan Hutan oleh KPHP Jebu Bembang Antan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023



Gambar 2.1. 89 Hasil Inventarisasi Kegiatan Terbangun Dalam Kawasan Hutan di UPT KPHP Sigambir Kotawaringin dan UPT KPHP Sungai Sembulan

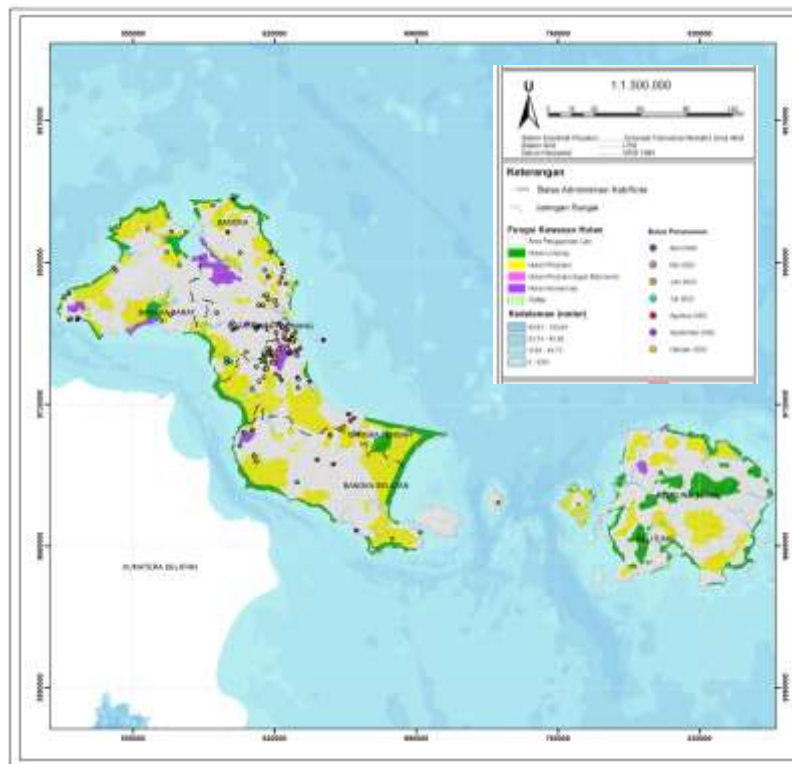
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023



II.1.5.4 Pengendalian Kerusakan Lahan

A. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Berdasarkan PermenLHK 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dinyatakan pengertian Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yaitu upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan merupakan sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan beberapa perangkat daerah terkait di beberapa wilayah kabupaten/kota dengan jumlah total bibit yang ditanam sebanyak 125.044 buah. Adapun jenis bibit yang paling banyak ditanam yaitu jenis kopi. Persebaran lokasi rehabilitasi hutan dan lahan pada tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.1.90 dan jenis bibit yang ditanam pada Tabel 2.1.13



Gambar 2.1. 90 Lokasi Penanaman RHL Hingga Oktober 2022
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Tabel 2.1. 13 Jenis Bibit yang Ditanam pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

kab/kota	Cemara	Gaharu	Pelawan	Tabebuaya	Bambu	Pucuk Merah	Ketapang Kencana	Sengon	Kopi	Durian	Rambutan	Cempedak	Pinang	Alpukat	Jambu Mete	Sirsak	Manggis	Jeruk Kunci	Jambu Biji	Jengkol	Mangrove	Karet	JUMLAH
Bangka Barat	1.900,0	1.545,0	100,0	200,0		500,0	1.020,0	700,0	4.500,0	2.020,0	120,0	170,0	350,0	250,0	2.420,0	100,0	20,0	70,0	330,0	120,0			16.175,0
Bangka	879,0	1.080,0	262,0	1.185,0	55,0	2.375,0	1.710,0	500,0	5.405,0	7.905,0	25,0	260,0	6.325,0	475,0	1.255,0	90,0	51,0	190,0	355,0	252,0	0,0	0,0	31.034,0
Bangka Tengah	1.370,0	593,0	52,0	1.240,0	0,0	6.328,0	1.015,0	1.415,0	14.882,0	2.623,0	601,0	717,0	4.225,0	2.830,0	2.670,0	740,0	151,0	1.074,0	422,0	215,0	0,0	0,0	43.182,0
Bangka Selatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	110,0	80,0	9.100,0	3.350,0	130,0	6.027,0	1.050,0	1.720,0	5.000,0	0,0	100,0	135,0	110,0	1.000,0	0,0	0,0	28.262,0
Pangkalpinang	250,0	40,0	10,0	225,0	0,0	760,0	250,0	0,0	211,0	106,0	77,0	50,0	4.170,0	17,0	25,0	27,0	34,0	62,0	77,0	0,0	0,0	0,0	6.391,0
total	4.399,0	3.258,0	424,0	2.850,0	55,0	10.118,0	4.105,0	2.695,0	34.098,0	16.004,0	953,0	7.224,0	16.120,0	5.292,0	11.370,0	957,0	356,0	1.531,0	1.294,0	1.587,0	0,0	0,0	125.044,0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Sementara itu realisasi rehabilitasi hutan dan lahan pada tahun 2023 yang dilaksanakan oleh beberapa instansi ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. 14 Realisasi Penanaman Rehabilitasi Hutan Dan Lahan sampai dengan Juni 2023

NO	NAMA INSTANSI	TANGGAL	LOKASI PENANAMAN	STATUS LAHAN		JENIS TANAMAN	JUMLAH TANAMAN	LUAS PENANAMAN
			Administrasi	Kawasan Hutan	Areal penggunaan Lain		(Batang)	(Ha)
1	UPTD KPHP Rambat Menduyung	- 20 Juni 2023	Desa Belo Laut	HL Tanjung Punai		Rizhopora	4.000	1
		- 20 Mar 2023	Desa Pelangas		APL	Alpukat	100	0,5
	Jumlah						4.100	1,5
2	POLDA Babel	20-06-2023	Desa Rebo, Kec. Merawang, Kab. Bangka	Eks Tambang		Kayu Putih	2.000	7
		20-06-2023	Pantai Pait, Desa Belo Laut, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat	HL		Rizhopora	4.000	5
		20-06-2023	Pantai Tanjung Bunga Kel. Temberan, Pangkalpinang	Eks Tambang		Mangrove	1.000	1
		20-06-2023	Desa Penyak, Kec. Koba Kab. Bangka Tengah		pantai	Prepat	1.000	2
		20-06-2023	Parit 3 Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan	Eks Tambang		Jambu Mete	1.500	3
		20-06-2023	Dusun Teluk Dalam, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung	Eks Tambang		- Kayu Putih - Jambu Mete	1.000 1.000	4

NO	NAMA INSTANSI	TANGGAL	LOKASI PENANAMAN	STATUS LAHAN		JENIS TANAMAN	JUMLAH TANAMAN	LUAS PENANAMAN
		20-06-2023	Desa Mengkubang, Kec. Damar, Kab. Belitung Timur	Eks Tambang		Mangrove	2.500	4
	Jumlah						14.000	26
3	UPTD KPHP Muntai Palas	23-06-2023	Kelurahan Toboali	HL		Jambu Mete	3.000	1
	Jumlah						3.000	1
4	DLH Kab. Bangka Selatan	19-05-2023	Kelurahan Toboali		Hutan Kota	- Jambu Mete - Alpukat - Durian - Pucuk Merah - Ketapang Kencana	500 500 500 250 250	2,88
		26-06-2023	Desa Tukak		Hutan Mangrove	Mangrove	2.000	2
	Jumlah						4.000	4,88
5	DLH Kab. Belitung	20-03-2023	Desa Dukong, Kec. Tanjungpandan		APL	Tanaman Berkayu	1.000	0,5
	Jumlah						1.000	0,5
Jumlah keseluruhan							26.100	33,88

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Beberapa dokumentasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ditunjukkan pada gambar-gambar di bawah ini.

Program Hijau Biru Babelku

Merupakan program reboisasi atau penghijauan di lahan kritis bekas penambangan yang ditanami dengan tanaman produktif/ energi yang diinisiasi oleh Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamiludin dan dicanangkan pada tanggal 20 Juni 2022. Program yang dimulai dari wilayah paling barat yang Kabupaten Bangka Barat ini melibatkan partisipasi aktif perangkat daerah, BUMN/ BUMD serta masyarakat

khususnya generasi muda daerah agar semakin peduli terhadap kondisi lingkungan.



Gambar 2.1. 91 Kegiatan Hijau Biru Babelku

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Citra Maxar diakses via Google Earth, 2023

Reboisasi Intensif

Kerusakan yang terjadi pada daerah aliran sungai menjadi salah satu masalah serius yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Mengembalikan kesehatan daerah aliran sungai menjadi salah satu solusi dalam mengembalikan fungsi sungai sesuai peruntukannya. Reboisasi merupakan salah satu kegiatan untuk mengembalikan fungsi hutan agar

alam menjadi hijau dan biasanya dilakukan di hutan yang sudah menjadi gundul agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Hutan ini memiliki fungsi sebagai penyimpan cadangan air, pelindung manusia dan juga aneka satwa. Dengan ditanaminya kembali hutan yang gundul tersebut persediaan udara, air dan bencana alam bisa dicegah. Kegiatan reboisasi intensif pada periode tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Baturusa Cerucuk tersebar pada 18 lokasi dengan luasan total sebesar 395 hektar yang mayoritas dikelola oleh kelompok tani hutan setempat.



Gambar 2.1. 92 Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Keposang, Kabupaten Bangka Selatan, 2022

Sumber: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk, 2023

Tabel 2.1. 15 Kegiatan Reboisasi Intensif Sepanjang Tahun 2022

No.	Lokasi (Desa/Kec/Kab)	Luas (Ha)	Pengelola
1.	Cit/ Riau Silip/ Bangka	15	KTH Berkah Panca
2.	Teluk Limau/ Parittiga/ Bangka Barat	20	KTH Karya Tani Abadi
3.	Tiram/ Tukak Sadai/ Bangka Selatan	15	KTH Rinba Tiram Lestari
4.	Pasir Putih/ Tukak Sadai/ Bangka Selatan	10	KTH Gunung Lang
5.	Keposang/ Toboali/ Bangka Selatan	10	KTH Mekar Jaya
6.	Keposang/ Toboali/ Bangka Selatan	10	KTH Fajar Jaya
7.	Batu Betumpang/ Pulau Besar/ Bangka Selatan	15	KTH Pokdarwis Mercusuar

Pulau Bangka		95	
8.	Perpat/ Membalong/ Belitung	25	KTH Tunggul Berkah
9.	Air Batu Buding/ Badau/ Belitung	44	KTH Aik Rangau
10.	Air Batu Buding/ Badau/ Belitung	46	KTH Aik Bilak
11.	Air Batu Buding/ Badau/ Belitung	44	KTH Aik Kimpang
12.	Air Batu Buding/ Badau/ Belitung	46	KTH Ujung Arak
13.	Air Batu Buding/ Badau/ Belitung	45	KTH Aik Serkuk
14.	Buding/ Kelapa Kampit/ Belitung Timur	37	KTH Pariwisata
15.	Buding/ Kelapa Kampit/ Belitung Timur	30	Kelompok Konservasi dan Sejarah
16.	Buding/ Kelapa Kampit/ Belitung Timur	26	Kelompok Pengamanan Lingkungan
17.	Buding/ Kelapa Kampit/ Belitung Timur	22	Kelompok Perbaikan dan Penataan Lingkungan
18.	Buding/ Kelapa Kampit/ Belitung Timur	30	Kelompok Agrowisata
Pulau Belitung		395	
Jumlah		490	Rata-rata

Sumber: Balai Pengelolaan Aliran Sungai Baturusa Cerucuk, 2023

Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai Tahun 2022

Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS) pertama kali dicanangkan pada tahun 2018 yang merupakan gerakan diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam memulihkan hutan dan lahan untuk penyelamatan sumber daya air, produktifitas lahan, perubahan iklim dan pencegahan bencana hidrometeorologi. Pada tahun 2022 pelaksanaan GNP DAS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipusatkan di Bumi Perkemahan Kabupaten Bangka Selatan yang kondisi eksistingnya berupa lahan gersang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta didukung oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk. Selain melakukan penanaman pohon, kegiatan GNP DAS di Kabupaten Bangka Selatan juga akan dilaksanakan penyerahan bibit produktif kepada masyarakat, organisasi masyarakat, pramuka dan instansi pemerintah serta juga penyerahan penghargaan kepada pemenang lomba Wana Lestari tingkat Provinsi tahun 2022.

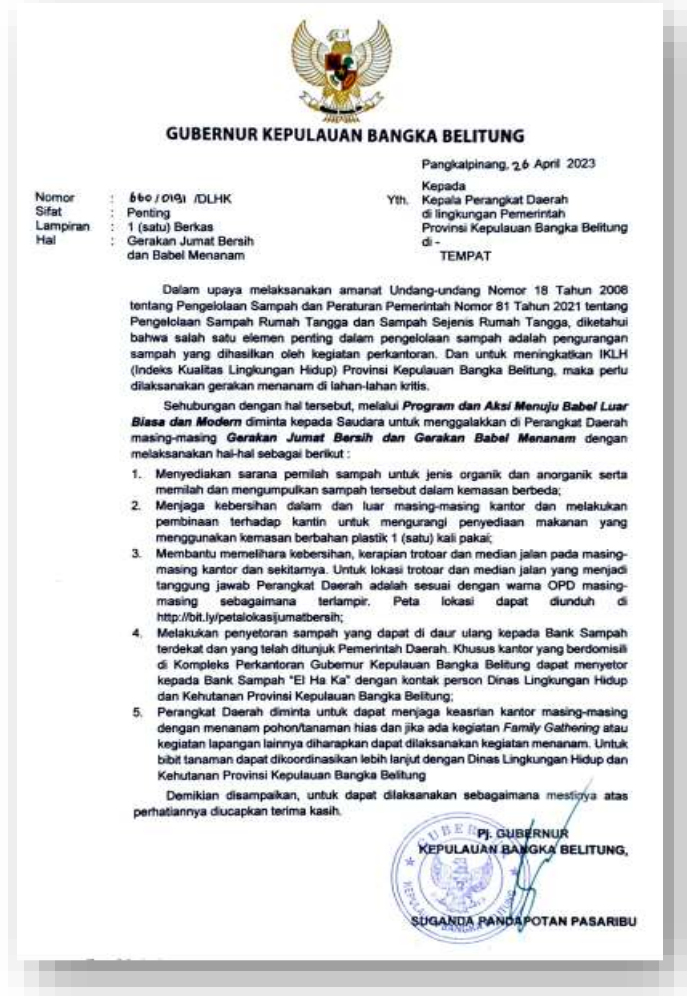


Gambar 2.1. 93 Kegiatan GNPDAS di Kabupaten Bangka Selatan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Gerakan Jumat Bersih dan Babel Menanam

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggalakkan Program “Jumat Bersih Babel Menanam” yang merupakan kelanjutan dari Program “Hijau Biru Babelku” yang telah digagas oleh Penjabat Gubernur sebelumnya yaitu Bapak Ridwan Djamaludin. Melalui program ini kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan serta pengendalian kerusakan lahan dapat ditingkatkan sekaligus mendapatkan nilai manfaat dari penanaman bibit buah-buahan yang bernilai ekonomi.



Gambar 2.1. 94 Surat Edaran Gerakan Jumat Bersih dan Babel Menanam
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

B. Pemanfaatan FABA untuk reklamasi area bekas tambang

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan direktorat jenderal ketenagalistrikan serta direktorat jenderal mineral dan batubara sepakat untuk melaksanakan optimalisasi serta mendorong pemanfaatan FABA (*fly ash bottom ash*) dari PLTU berbahan bakar batubara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai material pengisi (*backfilling*) di bekas lubang tambang pada kegiatan reklamasi dan pasca tambang.



Gambar 2.1. 95 Rapat Pembahasan Pemanfaatan FABA dalam Reklamasi Lahan Bekas Tambang di Rumah Dinas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: antaranews tanggal 27 Juli 2022

Pemanfaatan FABA yang sudah dikeluarkan dari kategori limbah B3 sudah memiliki dasar hukum yaitu antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada pasal 465 ayat 2 huruf a dan b serta Peraturan Menteri LHK Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non Bahan Beracun dan Berbahaya pasal 21 ayat 2 huruf a dan b yang menyatakan bahwa penimbunan limbah non B3 dapat dilakukan pada fasilitas penimbunan limbah B3 berupa: penimbunan akhir limbah non B3 dan penempatan di area bekas tambang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat mendukung pemanfaatan FABA ini sebagai bentuk perbaikan lahan bekas tambang yang akan berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas lingkungan.

C. Pemanfaatan Kompos Block

Salah satu kendala yang dihadapi dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah rendahnya ketersediaan unsur hara yang ada di lokasi penanaman yang tidak terlepas dari kekritisian lahan yang terjadi akibat sejumlah aktivitas yang berlangsung di permukaan hingga ke dalam tanah seperti pertambangan. Pengembalian keadaan lahan kepada kondisi awal memerlukan waktu yang lama, karena rusak komponen-komponen tanah, kandungan bahan organik yang rendah juga menyebabkan rendahnya aktivitas dan populasi mikroba. Untuk itu dibutuhkan unsur hara yang menunjang agar pertumbuhan tanaman dapat optimal sesuai dengan jenis tanaman yang direkomendasikan.



Gambar 2.1. 96 Penggunaan Kompos Block Untuk Lahan Bekas Tambang
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi ketersediaan unsur hara melalui pemberian pupuk dasar / tambahan media tanam dengan menggunakan pupuk dasar berupa pupuk organik atau anorganik yang bersifat slow release. Penggunaan kompos block dalam rehabilitasi hutan dan lahan (Gambar 2.1.90) dengan komposisi terdiri dari 30 % Serat fiber / Jongkos jangjang kosong, 30 % Abu Boiler, 30 % Solid sawit dan 10 % lainnya berupa , Enzim cair dan jelly sangat banyak manfaatnya seperti saat tanaman di lakukan penanaman sudah tersedia unsur hara yang akan di konsumsi oleh tanaman, penanaman lebih praktis, biaya pemupukan lebih murah, pemeliharaan tanaman lebih mudah dan efektifitas pemupukan lebih efisien serta secara teknis Efektivitas dan efisiensi pemupukan dapat dicapai dengan mengacu lima tepat pemupukan (kaidah 5T), yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat sasaran (Suriah, 2022).

D. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selain upaya preventif berupa sosialisasi ataupun pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan berusaha , upaya represif penegakan hukum sangat dipandang perlu untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang lebih besar akibat tekanan-tekanan yang diberikan kepada lahan akibat aktivitas antropogenik yang terindikasi melanggar undang-undang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama aparat penegak hukum terus aktif melaksanakan penertiban aktivitas tambang timah ilegal untuk mencegah kerusakan lingkungan serta kawasan hutan yang lebih luas lagi. Sepanjang tahun 2022, Polres Belitung Timur masuk ke dalam jumlah tertinggi se Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam hal penindakan kasus ilegal mining/ tambang ilegal. Angka tersebut jauh meningkat dibanding tahun 2021, bahkan meningkat hingga 355 persen yang sebelumnya 9 kasus kini meningkat menjadi 32 kasus (Belitung

Tribunnews, 2022). Beberapa dokumentasi terkait penegakan hukum tersebut diantaranya yaitu:

- Direktorat Polairud Polda Bangka Belitung mengamankan tersangka penambangan ilegal yang merambah Hutan Lindung Sembulan, Pantai Batu Ampar, Desa Penagan, Kabupaten Bangka 24 Agustus 2022. Penangkapan bermula dari pengaduan masyarakat terkait adanya aktivitas penambangan ilegal di lokasi tersebut. Tim kemudian menemukan aktivitas tambang ilegal dengan alat TI Sebu di perairan tersebut dengan jumlah ponton sekitar 200 unit (Bangkapos.com, 2023).



Gambar 2.1. 97 Upaya Penegakan Hukum Aktivitas Tambang Ilegal di Hutan Lindung Sembulan, Pantai Batu Ampar, Desa Penagan, Kabupaten Bangka 24 Agustus 2022
Sumber: Bangkapos.com, diakses 2023

- Penetapan Tersangka Kasus Perambahan Hutan Produksi Sungai Sembulan

Hasil patroli pengamanan hutan gabungan yang terdiri dari Balai Gakkum LHK Sumatera, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, UPT KPHP Sigambir Kotawaringin, Babinsa

Desa Penagan, Bhabinkamtibmas Desa Penagan dan PT. Agro Pratama Sejahtera menemukan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang diperkirakan berumur kurang dari satu tahun serta bangunan pondok kerja yang berlokasi dalam hutan produksi Sungai Sembulan. Selanjutnya penyidik menjerat tersangka dengan pasal 50 ayat (3) huruf a Jo. Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah pada paragraf 4 pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 7,5 milyar (<https://gakkum.menlhk.go.id>)



Gambar 2.1. 98 Upaya Penegakan Hukum Aktivitas Pembukaan Kebun di dalam Hutan Produksi Sungai Sembulan, 7 November 2022
Sumber: <https://gakkum.menlhk.go.id/>

II.1.5.5 Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Konferensi Perubahan Iklim Glasgow (COP 26) yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober – 12 November 2021 di Glasgow, Skotlandia telah menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam Dokumen *Glasgow Climate Change Pact* (GCP). Glasgow Climate Pact

menegaskan rencana untuk menjaga kenaikan suhu global tidak melebihi 1,5 derajat Celsius, mengurangi laju deforestasi, mengurangi penggunaan batubara secara bertahap dan target pengurangan emisi metana. Kesepakatan ini juga mendesak pengurangan emisi serta penggunaan energi terbarukan dan pendanaan bagi negara-negara berkembang.

Komitmen Indonesia direfleksikan dalam dokumen nasional yaitu Updated Nationally Determined Contribution (NDC) dan Long-term strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050). Dokumen NDC memuat target komitmen Indonesia dalam penurunan emisi GRK dan peningkatan ketahanan iklim dan dalam dokumen LTS-LCCR memuat visi dan formulasi kebijakan pengendalian perubahan iklim dalam jangka panjang. Dalam menghadapi perubahan iklim maka upaya adaptasi dan mitigasi menjadi sangat penting dilakukan dan mendesak untuk menghindari bencana dan kerugian yang lebih besar akibat terjadinya perubahan iklim.

Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim merupakan dua pendekatan yang berbeda dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Adaptasi perubahan iklim adalah upaya untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim yang sudah terjadi atau diperkirakan terjadi di masa depan. Adaptasi perubahan iklim sangat relevan dengan beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) terutama pada tujuan SDGs 2 (Pemberantasan Kelaparan) serta SDGs 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat) sedangkan mitigasi perubahan iklim mencakup upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan pemanasan global. Program dan kegiatan mitigasi sangat berkaitan erat dengan SDGs tujuan 7 (Energi Terbarukan dan Terjangkau); SDGs 11 (Kota yang Berkelanjutan) serta SDGs 13 (Tindakan terhadap Perubahan Iklim). Beberapa program dalam upaya

adaptasi mitigasi perubahan iklim yang telah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya yaitu:

A. Inventarisasi Gas Rumah Kaca

Sumber penghasil gas rumah kaca sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti alih fungsi lahan, penggunaan energi listrik yang berlebihan, penggunaan pestisida dan pupuk kimia, kotoran ternak dari peternakan, kebakaran hutan dan lahan, illegal logging, pengelolaan sampah yang tidak terkelola dengan baik dan lain-lain. Oleh sebab itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan inventarisasi gas rumah kaca (IGRK). Penyelenggaraan IGRK adalah proses yang berkesinambungan dalam memperoleh data dan informasi terkait tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi GRK dari berbagai sumber emisi dan penyerapnya. Dengan memahami sumber emisi dan jumlah emisi yang dihasilkan maka pemerintah daerah dapat mengidentifikasi sektor mana yang berkontribusi pada masalah perubahan iklim sehingga dapat mengembangkan strategi dan perencanaan mitigasi yang tepat.

Update data GRK dilakukan setiap tahun dan pelaporannya juga dilakukan setiap tahun mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Inventarisasi GRK juga berlaku pada usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan para pelaku usaha yang berpotensi mengeluarkan emisi GRK. Hal ini tertuang dalam pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.

DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah menyampaikan laporan IGRK tahun 2021 tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Maret 2022 yang memuat profil GRK mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2020 yang perhitungannya diproses melalui

aplikasi signsmart. Laporan tersebut sudah mendapat *review* sesuai dengan surat yang diterima dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: S.18/IGAS/IGRK/PPI.2/2/2023 tanggal 7 Februari 2023. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk tim koordinasi dan tim kelompok kerja berdasarkan SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/461/DLHK/2022. Tim ini selain melibatkan pegawai DLHK juga instansi terkait yang terlibat dalam pengumpulan data aktivitas yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Badan Pusat Statistik.

Untuk meningkatkan kapasitas pemahaman serta pengetahuan dalam melakukan inventarisasi termasuk melakukan update data dan informasi dengan menggunakan aplikasi berbasis web yakni signsmart, maka dilaksanakan rapat koordinasi dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan dan pelaporan inventarisasi emisi GRK tahun 2022 dengan mengundang tim pokja dan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota. Pada kegiatan tersebut dilakukan evaluasi pada masing-masing kabupaten/kota terkait pelaporan IGRK dan pengisian data pada aplikasi signsmart karena kabupaten/kota juga mempunyai kewajiban yang sama untuk menyampaikan laporan IGRK ke provinsi selaku pembina.

Tabel 2.1. 16 Progress IGRK Kabupaten/Kota

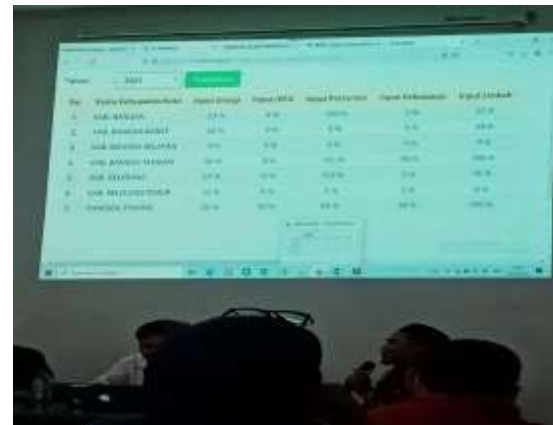
Kabupaten/kota	IGRK	Tahun 2021	Tahun 2022
Pangkalpinang	Signsmart	√	√
	Laporan	x	-
Bangka	Signsmart	√	√
	Laporan	x	-
Bangka Tengah	Signsmart	x	√
	Laporan	x	-
Bangka Barat	Signsmart	√	√
	Laporan	√	-

Bangka Selatan	Signsmart	X	X
	Laporan	X	-
Belitung	Signsmart	X	√
	Laporan	X	-
Belitung Timur	Signsmart	X	X
	Laporan	X	-

Ket: √ = sudah melakukan X = belum melakukan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi kepulauan Bangka Belitung, 2022

Terhadap kabupaten/kota yang belum secara rutin menyampaikan laporan IGRK dan melakukan pengisian data di *signsmart*, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan pembinaan secara berkala.



Gambar 2.1. 99 Dokumentasi rapat koordinasi dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan dan pelaporan inventarisasi emisi GRK tahun 2022

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi kepulauan Bangka Belitung, 2022

Komitmen terhadap pengendalian perubahan iklim nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca diimplementasikan pemerintah provinsi dengan menyusun Rencana Aksi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 36 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK). Diharapkan dokumen ini menjadi pedoman dalam menyusun RPJPD, RPJMD dan

RTRW provinsi/kabupaten/kota yang selanjutnya menjadi masukan dan dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Untuk mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan perlu dukungan sistem pemantauan yang baik untuk dapat mengevaluasi kinerja dari aksi mitigasi yang dilakukan. Oleh sebab itu Kementerian PPN/Bappenas membentuk sebuah sistem pemantauan evaluasi dan pelaporan aksi mitigasi atau yang disebut PEP berbasis web. Aplikasi ini dinamakan AKSARA yang berguna sebagai alat bantu dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja dari pembangunan rendah karbon (PRK) di daerah dengan koordinatonya adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda). Kegiatan pelaksanaan dan pemantauan aksi PRK terbagi menjadi kelompok kerja (pokja) berdasarkan sektor, dimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah pokja sektor berbasis lahan dan sektor limbah. Berikut ini beberapa aksi yang sudah dilakukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan pembangunan rendah karbon yang diinput melalui *platform* aksara.

Tabel 2.1. 17 Aksi Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaporkan melalui Aksara periode tahun 2018-2022

No.	Nama Kegiatan	Tahun Kegiatan	Bidang PPRK	Potensi Serapan Emisi (ton CO ₂ eq)	Status Pelaporan
1.	Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS)	2022	Lahan kategori peningkatan cadangan karbon	9,34	Dilaporkan tanggal 2 Maret 2023
2.	Penggunaan pupuk organik dalam kegiatan penanaman komoditas hortikultura (cabai besar)	2022	Lahan kategori penggunaan pupuk organik	57,20	Disetujui tanggal 15 Februari 2023
3.	Penggunaan pupuk organik dalam kegiatan penanaman komoditas hortikultura (cabai kecil)	2022	Lahan kategori penggunaan pupuk organik	28,60	Disetujui tanggal 15 Februari 2023
4.	Penggunaan pupuk organik dalam kegiatan penanaman komoditas hortikultura (bawang merah)	2022	Lahan kategori penggunaan pupuk organik	18,99	Disetujui tanggal 15 Februari 2023
5.	Penggunaan pupuk organik dalam kegiatan penanaman komoditas perkebunan (lada)	2022	Lahan kategori penggunaan pupuk organik	366,67	Disetujui tanggal 24 Februari 2022

No.	Nama Kegiatan	Tahun Kegiatan	Bidang PPRK	Potensi Serapan Emisi (ton CO ₂ eq)	Status Pelaporan
6.	Penggunaan pupuk organik dalam kegiatan penanaman komoditas hortikultura (cabai besar)	2022	Lahan kategori penggunaan pupuk organik	5,87	Disetujui tanggal 24 Februari 2022
7.	Penggunaan pupuk organik dalam kegiatan penanaman komoditas hortikultura (cabai kecil)	2022	Lahan kategori penggunaan pupuk organik	2,93	Disetujui tanggal 24 Februari 2022
8.	Penggunaan pupuk organik dalam kegiatan penanaman komoditas hortikultura (bawang merah)	2022	Lahan kategori penggunaan pupuk organik	0,29	Disetujui tanggal 24 Februari 2022
9.	Penggunaan pupuk organik dalam kegiatan penanaman komoditas hortikultura (durian)	2022	Lahan kategori penggunaan pupuk organik	20,17	Disetujui tanggal 24 Februari 2022
10.	Melaksanakan penyaluran benih padi bersertifikat	2020	Lahan kategori varietas padi rendah emisi	1.151,43	Perlu direvisi tanggal 8 Maret 2021
11.	Peningkatan penerapan pengelolaan tanaman terpadu tanaman pangan (GP-PTT)	2020	Lahan kategori pengelolaan tanaman terpadu (PTT)	182,46	Disetujui tanggal 1 Maret 2021
12.	Penggunaan pupuk organik dalam kegiatan penanaman komoditas perkebunan	2020	Lahan kategori penggunaan pupuk organik	249,33	Perlu revisi tanggal 8 Maret 2021
13.	Penggunaan pupuk organik dalam kegiatan penanaman komoditas tanaman pangan	2020	Lahan kategori penggunaan pupuk organik	2,05	Perlu revisi tanggal 8 Maret 2021
14.	Melaksanakan penyaluran benih padi bersertifikat	2019	Lahan kategori varietas padi rendah emisi	4.389,84	Dilaporkan tanggal 1 Maret 2021
15.	Peningkatan penerapan pengelolaan tanaman terpadu tanaman pangan (GP-PTT)	2019	Lahan kategori pengelolaan tanaman terpadu	355,80	Disetujui tanggal 1 Maret 2021
16.	Penggunaan pupuk organik dalam kegiatan penanaman komoditas perkebunan	2019	Lahan kategori penggunaan pupuk organik	548,53	Disetujui tanggal 1 Maret 2021
17.	Bantuan UPPO mendukung budidaya padi organik	2019	Lahan kategori unit pengolah pupuk organik (UPPO)	2.903,43	Disetujui tanggal 1 Maret 2021
18.	Rehabilitasi hutan dan lahan	2020	Lahan kategori peningkatan cadangan karbon	4.780,48	Disetujui tanggal 9 Maret 2021
19.	Pemberian bibit tanaman produktif kepada	2019	Lahan kategori peningkatan	2.290,86	Disetujui tanggal 18

No.	Nama Kegiatan	Tahun Kegiatan	Bidang PPRK	Potensi Serapan Emisi (ton CO ₂ eq)	Status Pelaporan
	masyarakat		cadangan karbon		Maret 2020
20.	Peningkatan penerapan pengelolaan tanaman terpadu tanaman pangan (GP-PTT)	2018	Lahan kategori pengelolaan tanaman terpadu (PTT)	364,92	Disetujui tanggal 18 November 2019
21.	Melaksanakan penyaluran benih bersertifikat	2018	Lahan kategori varietas padi rendah emisi	2.398,82	Disetujui tanggal 18 November 2019
22.	Bantuan UPPO mendukung budidaya padi organik	2018	Lahan kategori unit pengolah pupuk organik (UPPO)	2.568,42	Disetujui tanggal 20 Desember 2019
23.	Penggunaan pupuk organik dalam kegiatan penanaman komoditas hortikultura	2018	Lahan kategori penggunaan pupuk organik	44,0	Disetujui tanggal 18 November 2019
24.	Penggunaan pupuk organik dalam kegiatan penanaman komoditas perkebunan	2018	Lahan kategori penggunaan pupuk organik	491,33	Disetujui tanggal 18 November 2019

Sumber: https://pprk.bappenas.go.id/aksara/dashboard/kegiatan_mitigasi_v2/

Perencanaan pembangunan rendah karbon bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi GRK dan intensitas emisi GRK serta meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Kapasitas sumber daya alam termasuk emisi GRK dan intensitas emisi GRK, tutupan lahan dan air menjadi faktor penentu dalam merumuskan kebijakan dan menetapkan target pembangunan rendah karbon. Salah satu implementasi pembangunan rendah karbon di Bangka Belitung yang didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui dana perwakilan perubahan iklim Indonesia (ICCTF) adalah pemanfaatan lahan bekas tambang sebagai taman wisata mangrove dalam upaya rehabilitasi ekosistem dan sekuestrasi karbon kawasan Belitung Mangrove Park (BMP) di Desa juru Seberang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Proyek ini memberikan dampak bagi masyarakat lokal

dalam konservasi mangrove dan manfaat ekonomi dari ekowisata mangrove. Dari proyek ini terjadi pemulihan 50 hektar ekosistem bakau dan 150 hektar ekosistem hutan peisisir dengan potensi penurunan emisi sebesar 220.200 tCO₂ eq/tahun.



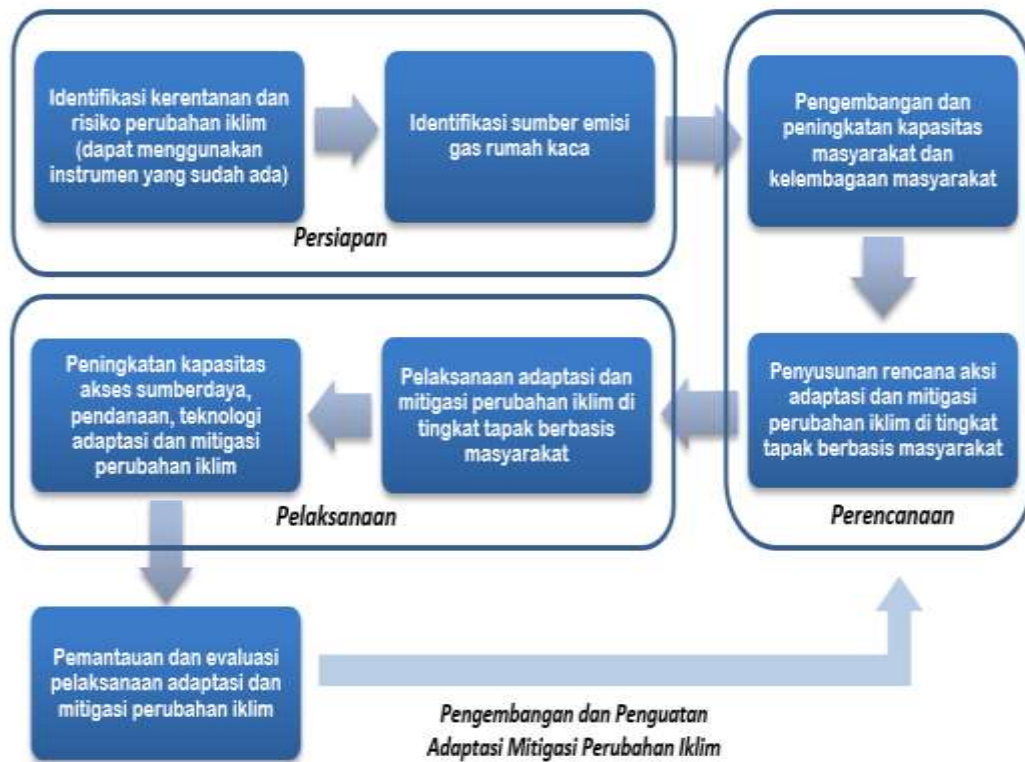
Gambar 2.1. 100 Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Rendah Karbon Di Tanjungpandan, Kabupaten Belitung
Sumber : Bappenas, 2020

B. Program Kampung Iklim (Proklam)

Indonesia menyatakan komitmennya untuk dapat menjaga suhu rata-rata global agar tidak melebihi dari 2 derajat celcius yang sudah disepakati dalam Paris Agreement tahun 2015 dengan menyelenggarakan program berwawasan iklim yang melibatkan seluruh pihak termasuk masyarakat dalam melakukan kegiatan adaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap dampak yang terjadi serta mitigasi untuk mengurangi emisi GRK melalui penerapan pola hidup rendah emisi dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu strategi nasional dalam upaya pengendalian perubahan iklim tersebut dalah dengan mendorong kerjasama multi pihak dalam memperkuat adaptasi dan mitigasi perubalan di tingkat tapak yaitu dengan penyelenggaraan Program Kampung Iklim (ProKlim). ProKlim merupakan program nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang memadukan upaya adaptasi dan mitigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi serta lembaga non pemerintah untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Pelaksanaan ProKlim juga memperkuat pengembangan daerah perkotaan yang ramah lingkungan dan membangun masyarakat yang lebih tahan terhadap perubahan iklim serta memiliki pola hidup rendah emisi karbon.

Pendataan adaptasi dan mitigasi dilaksanakan melalui pendekatan aksi lokal yang bersifat bottom-up dimana pendekatan ini mendorong banyak pihak dalam mengumpulkan dan menyampaikan informasi mengenai factor penyebab kerentanan, dampak perubahan iklim, sumber penghasil emisi GRK dan kegiatan lainnya yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat. Kampung iklim yang dibentuk pada lokasi dengan batas administrative minimal setingkat RW, atau dusun dan maksimal setingkat kelurahan atau desa atau wilayah administratif yang setara. Tahapan ProKlim dimulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan serta pengembangan dan penguatan aksi seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

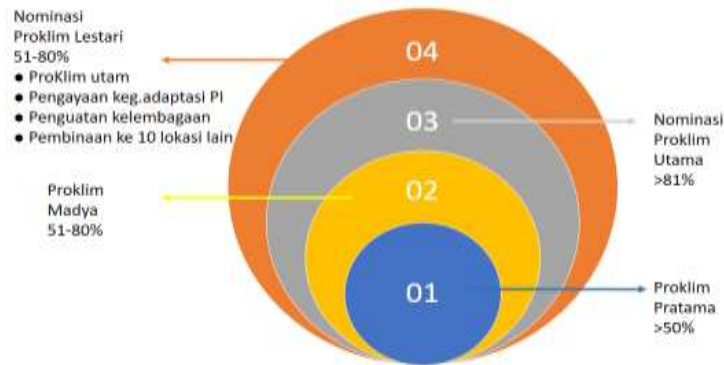


Gambar 2.1. 101 Tahapan pelaksanaan ProKlim

Sumber : Perdirjen PPI, 2017

Dalam acara *Climate Adaptation Summit* tahun 2021, Bapak Presiden Joko Widodo telah menyampaikan komitmen Indonesia untuk menggerakkan potensi masyarakat dalam menangani perubahan iklim melalui ProKlim dengan target 20.000 desa pada tahun 2024. Pencapaian target ini dihitung berdasarkan jumlah lokasi yang dilaporkan dan didaftarkan ke Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI), hal ini sejalan dengan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.37/MenLHK/Setjen/PPI.1/1/2022 dalam hal Perkembangan Perubahan Iklim dan Karbon. SRN adalah portal untuk pendaftaran ProKlim yang merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian perubahan iklim sehingga ada standarisasi data dan integrasi data dan informasi.

Adapun kategori proklam yang dihitung ke dalam SRN terbagi menjadi 4 kelas yaitu Pratama (nilai >50%), Madya (nilai 51-80%), Utama (nilai >81%) dan Lestari (ada persyaratan khusus).



Gambar 2.1. 102 Kategori Proklam

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017

Sebagai komitmen dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendukung program nasional ini maka DLHK menghimbau agar bupati/walikota turut serta dalam melaksanakan Proklam di wilayah masing-masing sesuai dengan surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/0088/DLHK tanggal 11 Maret 2022 dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Untuk mencapai target 20.000 desa Proklam tersebut, DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkoordinasi dengan DLH kabupaten/kota terkait lokasi yang akan disusulkan dan secara aktif melakukan sosialisasi ke dusun/desa atau kelurahan yang dianggap sudah melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi secara berkelanjutan minimal selama 2 tahun. Saat sosialisasi juga langsung dilakukan pendataan lokasi dan kunjungan lapangan. Sosialisasi Proklam bertujuan untuk memberikan wawasan dan mendorong masyarakat untuk melakukan adaptasi perubahan iklim dan kegiatan mitigasi.

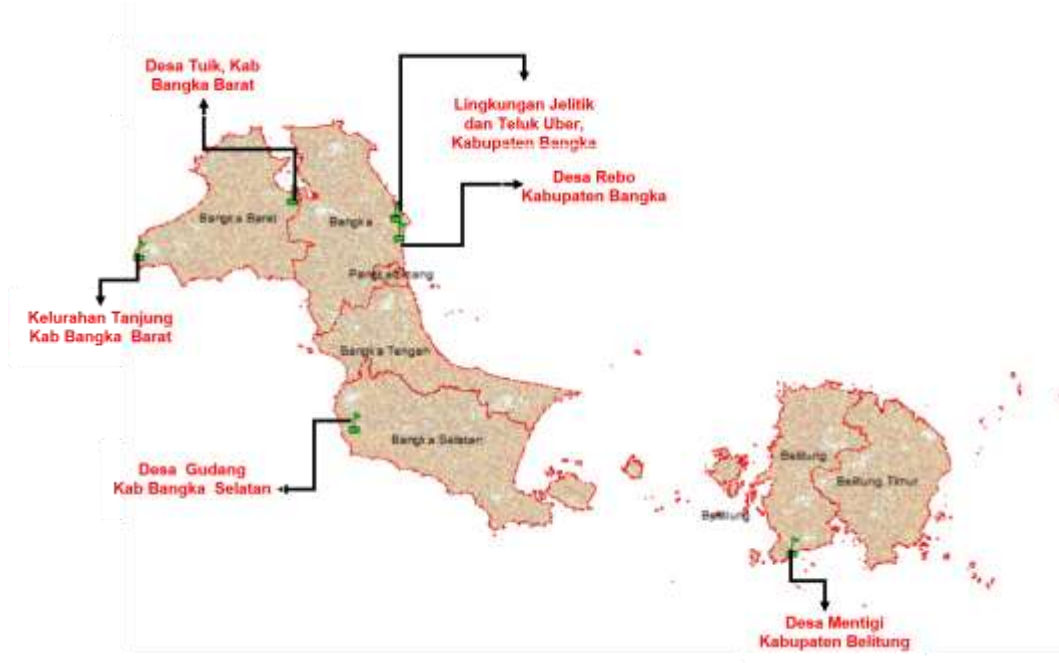


Gambar 2.1. 103 Sosialisasi Proklamasi ke Lingkungan Jelitik, Kabupaten Bangka
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022



Gambar 2.1.5.3. Sosialisasi Proklim ke Kelurahan Tanjung, Kabupaten Bangka Barat
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi kepulauan Bangka Belitung, 2022

Pada tahun 2022 sudah terbentuk 7 lokasi ProKlim dimana 3 lokasi diusulkan menggunakan akun provinsi, 2 lokasi menggunakan akun kabupaten dan 2 lokasi lainnya diusulkan oleh BKSDA Sumatera Selatan.



Gambar 2.1. 104 Lokasi ProKlim Tahun 2022

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Tabel 2.1. 18 Lokasi ProKlim Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

No.	Lokasi ProKlim	No.Registrasi	Kategori
1.	ProKlim Lingkungan Jelitik, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2022-9177	Pratama
2.	ProKlim Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2022-9212	Pratama
3.	ProKlim Desa Tuik, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2022-9217	Pratama
4.	ProKlim Lingkungan Teluk Uber, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2022-9467	Madya
5.	ProKlim Desa Rebo, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2022-9418	Pratama
6.	ProKlim Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2022-10267	Pratama
7.	ProKlim Desa Mentigi, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2022-10407	Pratama

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi kepulauan Bangka Belitung, 2022

Pendataan lokasi dilakukan dengan mengisi lembar excel SRN yang diterbitkan oleh KLHK yang mencakup tiga komponen kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan adaptasi perubahan iklim, meliputi kegiatan pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian penyakit terkait iklim.



Kolong yang dimanfaatkan untuk pertanian



Rorak



Bak penampungan air hujan dari talang



Perlindungan alami pantai



Pola tanam berselang



Budidaya tanaman pangan



Memasukkan ikan dalam kolam



Posyandu



Rumah dengan sirkulasi udara yang baik

Gambar 2.1. 105 Contoh Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

- 2) Kegiatan mitigasi perubahan iklim, meliputi pengelolaan sampah, limbah padat dan cair, penggunaan energi baru terbarukan, konversi energi dan penghematan energi, budidaya pertanian rendah emisi GRK, peningkatan tutupan vegetasi dan mencegah serta menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.



Gambar 2.1. 106 Contoh Kegiatan Mitigasi Perubahan iklim
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi kepulauan Bangka Belitung, 2022

3) Aspek kelembagaan dan dukungan keberlanjutan, meliputi kelembagaan masyarakat, dukungan kebijakan terkait perubahan iklim, partisipasi masyarakat, kapasitas masyarakat, dukungan sumber daya eksternal, pengembangan kegiatan, pengelolaan data aksi dan manfaat ekonomi, sosial, lingkungan dan pengurangan resiko bencana.



Gambar 2.1. 107 Aspek Kelembagaan dan Dukungan Keberlanjutan
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi kepulauan Bangka Belitung, 2022

Peran dunia usaha yang berada di sekitar lokasi juga sangat diharapkan partisipasinya sebagai lembaga pendukung untuk memfasilitasi terbentuknya kampung iklim baik dari teknis, peralatan, teknologi, pendanaan, sosialisasi, penyuluhan, peningkatan kapasitas dan dukungan lainnya. Dalam surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/0306/DLHK tanggal 27 April 2022 menyebutkan agar menggerakkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan ProKlim dimana kegiatan ini juga dapat mendukung pencapaian proper hijau bagi pelaku usaha. PT. Timah Tbk Unit Metalurgi sudah melakukan aksi yang mendukung kegiatan ProKlim di Kelurahan Tanjung, dengan mengangkat konsep sistem pertanian yang diintegrasikan dengan peternakan dalam satu kawasan dan diberi nama Kampung Amoi (Agro Mandiri dan Terintegrasi) sebagai salah satu inovasi sosial dalam meraih penghargaan Proper Emas di tahun 2021. Kegiatan ini berhasil memberdayakan kelompok masyarakat yang dominan adalah pekerja tidak tetap dan para penambang liar.



Gambar 2.1. 108 Kegiatan Kampung Amoi Kelurahan Tanjung
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi kepulauan Bangka Belitung, 2022

Kegiatan ProKlim ini akan terus dilakukan untuk meningkatkan jumlah lokasi ProKlim agar dapat berkontribusi nyata dalam menciptakan masyarakat yang berketahanan iklim dan menerapkan pola hidup rendah emisi. Sebagai apresiasi kepada desa/kelurahan yang sudah melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan sudah teregistrasi ke SRN maka DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan penghargaan ProKlim. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamalludin pada acara peringatan HUT ke-22 di lapangan kantor gubernur.



Gambar 2.1. 109 Penyerahan Penghargaan ProKlim

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi kepulauan Bangka Belitung, 2022

The image displays a collage of nine screenshots from the 'Lembar Excel Isian Proklam' (Proklam Filling Excel Sheet). The screenshots show various data entry forms and tables for climate change management. The forms include sections for:

- General information and location details.
- Climate change impact assessment (KAP).
- Climate change adaptation and mitigation measures.
- Climate change risk assessment.
- Climate change action plan.
- Climate change monitoring and evaluation.
- Climate change communication and education.
- Climate change financing.
- Climate change institutional arrangements.

 The forms are organized into a grid-like structure with multiple columns and rows for data entry. The background of the collage features a map of the Kepulauan Bangka Belitung region and a small boat on the water.

Gambar 2.1. 110 Lembar Excel Isian Proklam

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Pada tahun 2010 UNFCC mendirikan GCF (*Green Climate Change*) sebagai sumber pendanaan dunia yang membantu negara-negara berkembang dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan adaptasi perubahan iklim. Melalui Balai Pengendalian Perubahan Iklim Sumsel, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan bantuan dana GCF untuk mendaftarkan lokasi Proklam yang berbatasan dengan kawasan hutan ke SRN, tercatat ada 20 lokasi yang sudah teregistrasi. Sedangkan untuk pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terbentuk 14 lokasi Proklam yang berada di di luar kawasan hutan yaitu di perkotaan dan daerah pesisir. Diharapkan dengan terbentuknya 34 lokasi proklam ini akan memberikan semangat dan dorongan bagi lokasi lainnya agar segera menjadikan daerahnya sebagai kampung yang berketahanan iklim dan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim dan dampaknya.

Tabel 2.1. 19 Lokasi ProKlim tahun 2023 pendanaan GCF

No.	Lokasi ProKlim	No.Registrasi	Kategori
1.	Proklm Desa Mapur, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-III-2023-13542	Pratama
2.	Proklm Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-III-2023-13550	Madya
3.	ProKlim Desa Penagan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-III-2023-13759	Madya
4.	Proklm Dusun I Desa Pelangas, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-III-2023-13405	Pratama
5.	Proklm Dusun Belit Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-IV-2023-14143	Pratama
6.	Proklm Desa Tebing, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-III-2023-13406	Pratama
7.	Proklm Dusun Kemang Masam Desa Air Putih, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-III-2023-13441	Pratama
8.	Proklm Dusun Rambat Desa Sekar Biru, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-III-2023-13439	Pratama
9.	Proklm Desa Beruas, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-III-2023-13437	Pratama
10.	Proklm Dusun Namang Timur Desa Namang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-IV-2023-14010	Madya
11.	Proklm Dusun 2 Desa Belilik, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-IV-2023-14027	Utama
12.	Proklm Dusun Timur Desa Puput, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-IV-2023-13991	Madya
13.	Proklm RW 003, Desa Serdang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka	11-PK-IV-2023-14345	Pratama

	Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
14.	Proklam Dusun 4, Desa Nangka, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-IV-2023-14014	Pratama
15.	Proklam Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-III-2023-13603	Pratama
16.	Proklam Desa Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-III-2023-13601	Pratama
17.	Proklam Desa Kacang Butor, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-III-2023-13596	Pratama
18.	Proklam Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-III-2023-13589	Pratama
19.	Proklam Desa Jangkang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-III-2023-13638	Pratama
20.	Proklam Desa Limbongan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-III-2023-12895	Madya

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Tabel 2.1. 20 Lokasi ProKlim tahun 2023 pendanaan APBD

No.	Lokasi ProKlim	No.Registrasi	Kategori
1.	ProKlim Desa Karya Makmur, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2023-15783	Madya
2.	ProKlim Dusun Air Tepala Desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2023-15846	Madya
3.	ProKlim Dusun 6 (Sidomulyo) Desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2023-15757	Madya
4.	Proklam Desa Air Limau, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2023-15858	Madya
5.	Proklam Dusun Lampur Desa Lampur, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2023-14882	Madya
6.	Proklam Desa Sampur Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten	11-PK-V-2023-15329	Madya

	Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
7.	Proklam RW 03 Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2023-14958	Madya
8.	Proklam RW 01 Kelurahan Berok, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2023-14960	Madya
9.	Proklam Desa Kulur, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2023-14961	Madya
10.	Proklam Desa Tukak, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2023-12974	Madya
11.	Proklam Desa Seliu, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2023-15712	Madya
12.	Proklam Desa Juru Sebrang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2023-15603	Pratama
13.	Proklam RW 02, Kelurahan Pasir Garam, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2023-15418	Madya
14.	Proklam RW 01, Kelurahan Lontong Pancur, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2023-15486	Utama

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi kepulauan Bangka Belitung, 2023

Untuk menghitung langsung penurunan emisi GRK di lokasi proklam, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim menciptakan aplikasi berbasis android yaitu Spectrum. Spectrum merupakan Sistem Perhitungan Reduksi Emisi GRK secara Cepat, Tepat dan Responsible dan menjadi syarat untuk pelaksanaan verifikasi bagi lokasi yang memenuhi kriteria untuk diverifikasi. Dalam SRN jika nilai akhir $\geq 76,10$ % maka aksi mitigasi yang dilakukan harus didaftarkan ke aplikasi Spectrum. Dari 34 lokasi yang didaftarkan ke SRN terdapat 15 lokasi kategori pratama, 17 lokasi kategori madya dan 2 lokasi kategori utama yaitu Dusun 2 Desa Belilik, Kecamatan Namang nilai akhir 76,10 dan RW 01, Kelurahan Lontong Pancur, Kecamatan Pangkal Balam dengan nilai akhir 76,07.

Berdasarkan hasil *deskreview* maka kedua lokasi tersebut akan dilakukan verifikasi oleh Balai PPI pada bulan Agustus 2023.

C. Penyusunan Rencana Kerja Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kepulauan Bangka Belitung

Folu Net Sink 2030 merupakan suatu kondisi tingkat serapan karbon pada sektor kehutanan serta penggunaan lahan lainnya sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi daripada emisi yang dihasilkan pada sektor tersebut di tahun 2030. Untuk dapat mewujudkan hal itu maka diperlukan sebuah skema aksi mitigasi peningkatan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan lainnya sehingga dapat mencapai tingkat serapan karbon yang lebih tinggi dibandingkan tingkat emisi karbon pada sektor dimaksud.



Gambar 2.1. 111 Sosialisasi FoluNet Sink Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: Diskominfo-Babelprov.go.id, 2023

Dokumen Rencana Operasi (RENOPS) FOLU Net Sink 2030 merupakan arahan kebijakan bagi seluruh pihak yang berkepentingan pada sektor FOLU pada tingkat nasional. Agar rencana aksi mitigasi pada dokumen RENOPS dapat dilaksanakan secara efektif pada tingkat tapak, maka perlu dijabarkan dalam rencana aksi mitigasi pada tingkat sub-nasional atau provinsi. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6614/MenLHK-PKTL/Kuh/Plas.2/2021 tanggal

27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai tahun 2020, luas hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 1.664.670,24 hektar (setelah dikurang luas laut di dalam data spasial) yang tersebar di tujuh kabupaten/kota dengan rincian seperti yang terlihat pada Tabel 2.1.21 berikut.

Tabel 2.1. 21 Luasan Fungsi Kawasan Hutan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten	Luas Fungsi Kawasan (ha)						Total Luas (ha)
		APL	HL	HP	HPK	TORA	HK	
1	Bangka	206.813,54	16.391,16	60.930,51	23,92	639,19	15.934,59	300.732,92
2	Bangka Barat	168.462,63	29.293,05	80.139,42	190,13	117,52	8.481,59	286.684,35
3	Bangka Selatan	227.518,34	27.389,62	111.531,66	-	240,85	3.146,39	369.826,87
4	Bangka Tengah	92.937,34	28.086,26	84.977,57	-	202,19	6.025,73	212.229,09
5	Belitung	140.769,24	40.598,40	45.013,28	476,29	519,96	2.574,14	229.951,31
6	Belitung Timur	159.447,43	42.949,97	52.369,86	-	44,72	-	254.811,96
7	Pangkalpinang	10.433,73	-	-	-	-	-	10.433,73
	Total	1.006.382,25	184.708,46	434.962,30	690,35	1.764,44	36.144,44	1.664.670,24

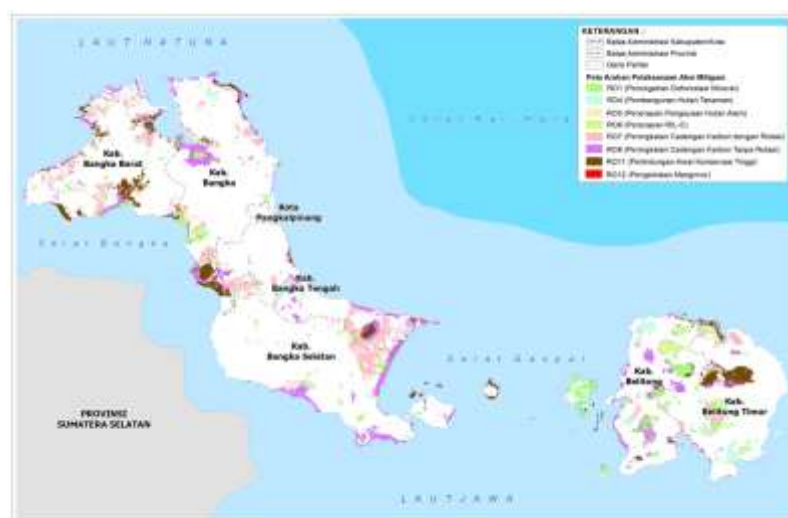
Sumber: Dokumen Renja Folu Net Sink Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Dengan potensi hutan yang ada maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat berkontribusi memenuhi target capaian pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia sehingga mencapai -140 juta ton CO_{2eq} pada tahun 2030. Dokumen Rencana Kerja IFNET Sub Nasional Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari pemerintah provinsi untuk mensukseskan target ambisius nasional dalam mengurangi dampak perubahan iklim.

Tim penyusun Rencana Kerja Sub Nasional FOLU *Net Sink* 2030 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/190/DLHK/2023 tertanggal 17 April 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030 Wilayah Sub Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023. FOLU *Net Sink* 2030 Sub Nasional Kepulauan Bangka Belitung akan dilaksanakan di dalam

kawasan hutan dan di lahan (luar kawasan hutan). Selanjutnya dalam pelaksanaannya akan didukung oleh 8 (delapan) UPT KPH; 20 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang terdiri dari 8 (delapan) PBH-Hutan Tanaman Industri, 4 (empat) PBPH-Pemanfaatan Hutan dan 8 (delapan) PBPH-Jasa Lingkungan serta 386 Perhutanan Sosial.

Rencana Kerja Aksi Mitigasi Sub Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2030 ini mencakup delapan rencana aksi mitigasi, meliputi : 1) Pencegahan Deforestasi Lahan Mineral (RO1), 2) Pembangunan Hutan Tanaman (RO4), 3) Pengayaan Hutan Alam (*Enhanced Natural Regeneration*, ENR) (RO5), 4) Penerapan RIL-C (RO6), 5) Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi (RO7), 6) Peningkatan Cadangan Karbon Non Rotasi (RO8), 7) Perlindungan Area Konservasi Tinggi (RO11), dan 8) Pengelolaan Mangrove (RO12). Rencana kerja aksi mitigasi tersebut akan dilaksanakan di dalam kawasan hutan di wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penetapan lokasi dan luas area rencana aksi mitigasi diperlukan analisis spasial dan analisis situasi yang mendukung untuk penyusunan rencana kerja aksi mitigasi. Berdasarkan hasil penetapan tersebut didapatkan area rencana aksi mitigasi seluas 359.926,52 hektar. Peta sebaran area rencana aksi mitigasi disajikan pada Gambar 2.1.112 berikut.



Gambar 2.1. 112 Peta Arahkan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
Sumber: Dokumen Renja Folu Net Sink Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Tabel 2.1. 22 Arahan Pelaksanaan Mitigasi Berdasarkan Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Jenis Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)								Luas Total (Ha)
		R01	R04	R05	R06	R07	R08	R011	R012	
		Pencegahan Deforestasi Mineral	Pembangunan Hutan Tanaman	Penerapan Pengayaan Hutan Alam	Penerapan RIL-C	Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi	Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi	Perlindungan Areal Konservasi Tinggi	Pengelolaan Mangrove	
1	Bangka	9.522,91	5.363,58	3.015,43	1.157,00	11.280,60	19.349,57	3.976,74	422,7	54.088,54
2	Bangka Barat	6.971,31	6.457,01	665,8	-	21.074,73	14.769,16	17.752,41	461,25	68.151,67
3	Bangka Selatan	8.011,57	1.328,04	214,66	751,88	15.888,57	20.134,27	3.079,02	-	49.408,00
4	Bangka Tengah	1.167,45	8.060,43	456,32	499,68	23.105,13	22.119,88	13.177,31	61,77	68.647,97
5	Belitung	25.515,70	5.684,17	313,66	5.444,92	4.316,56	20.487,63	3.542,56	7,71	65.312,92
6	Belitung Timur	5.758,04	9.134,21	75,06	7.262,36	9.108,47	6.559,62	16.078,44	23,85	54.000,05
7	Kota Pangkalpinang	122,42	-	-	-	-	194,96	-	-	317,38
Luas Total (Ha)		57.069,40	36.027,45	4.740,92	15.115,82	84.774,07	103.615,09	57.606,49	977,28	359.926,52

Sumber: Dokumen Renja Folu Net Sink Babel, 2023

Tabel 2.1. 23 Arahan Pelaksanaan Mitigasi Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan

No	Kawasan Hutan	Jenis Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)								Luas Total (Ha)
		R01	R04	R05	R06	R07	R08	R011	R012	
		Pencegahan Deforestasi Mineral	Pembangunan Hutan Tanaman	Penerapan Pengayaan Hutan Alam	Penerapan RIL-C	Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi	Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi	Perlindungan Areal Konservasi Tinggi	Pengelolaan Mangrove	
1	Hutan Lindung (HL)	18.742,37	154,62	212,4	-	74,16	62.367,01	37.146,97	-	118.697,53
2	Taman Nasional (TN)	3.833,16	21,53	59,53	-	111,83	10.948,57	-	-	14.974,61
3	Taman Wisata Alam (TWA)	1.916,07	18,4	7,17	-	81,06	1.628,07	-	11,91	3.662,68
4	Taman Hutan Raya (TAHURA)	8,13	-	-	-	8,25	2.489,87	-	-	2.506,26
5	Hutan Produksi Tetap (HP)	18.706,76	34.293,13	3.251,66	14.628,58	82.547,46	19.424,61	12.909,80	954,15	186.716,14
6	Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)	-	-	-	-	-	212,17	11,75	-	223,92
7	Area Penggunaan Lain (APL)	13.862,91	1.539,78	1.210,15	487,25	1.951,31	6.544,78	7.537,97	11,22	33.145,37
Luas Total (Ha)		57.069,40	36.027,45	4.740,92	15.115,82	84.774,07	103.615,09	57.606,49	977,28	359.926,52

Sumber: Dokumen Renja Folu Net Sink Babel, 2023

II.1.5.6 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

A. Mekanisme Perhutanan Sosial



Gambar 2.1. 113 Penyerahan SK Perhutanan Sosial Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 22 Februari 2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Program Perhutanan Sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Program ini membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah dan setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan sekaligus melibatkan masyarakat setempat sebagai pihak utama dan terdekat yang menjaga kelestarian hutan.

Pelaksanaan perhutanan sosial selaras dengan prinsip keenam belas (16) *Sustainable Development Goals* (SDG's) yaitu *peace, justice dan strong institution* yang dapat diartikan sebagai penguatan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, penyediaan akses keadilan untuk semua dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Pelaksanaan perhutanan sosial

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2023 dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. 24 Perhutanan Sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO.	Kab/KPH	Kelompok Tani Hutan (KTH)				Jumlah KTH/Ke Masyarakat/Perorangan Pemegang Izin/Persetujuan	Luas Izin PS (hektar)				Jumlah Luas Izin PS (hektar)
		H D	H T R	H K M	K K		HD	HTR	HKM	KK	
1	Bangka/Bubus Panca	0	4	18	0	22	0	866,15	1.368	0	2.234
2	Bangka/Sigambir Kota Waringin	0	1	8	0	9	0	29	631	0	660
3	Bangka/Tengah/Sungai Sembulan	2	9	8	4	23	265	342	4.299	102,03	5.008
4	Bangka/Selatan/Muntai Palas	0	1	3	0	4	0	2.405	134	0	2.539
5	Bangka/Barat/Jebu Bembang Antan	0	1	3	0	4	0	309	340	0	649
6	Bangka/Barat/Rambat Menduyung	0	143	1	0	144	0	459	471	0	930
7	Belitung/Belantu Mendanau	13	22	20	0	55	5.982	3.436	13.681	0	23.099
8	Belitung/Timur/Gunung Duren	8	94	14	2	118	4.734	1.856	6.215	151	12.956
Jumlah		23	275	75	6	379	10.981	9.702,44	27.139	253,03	48.075,47

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

II.1.5.7. Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Keberadaan keanekaragaman hayati harus terjaga untuk menjamin lingkungan hidup yang berkelanjutan. Perlindungan keanekaragaman hayati menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam dan ekosistem. Keanekaragaman hayati tiap-tiap daerah menunjukkan kekhasannya tersendiri baik tumbuhan, tanaman maupun satwa dan merupakan asset bagi daerah untuk memberikan peluang yang besar dari pemanfaatan keanekaragaman hayati dan bagian-bagiannya.

A. Penyusunan Dokumen Profil KEHATI

DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini sedang melakukan penyusunan dokumen profil KEHATI yang merupakan gambaran profil keanekaragaman hayati yang meliputi keanekaragaman

tingkat ekosistem, spesies dan genetik yang mempunyai manfaat dan nilai penting sebagai data dasar mengenai keanekaragaman hayati daerah dan sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati daerah.

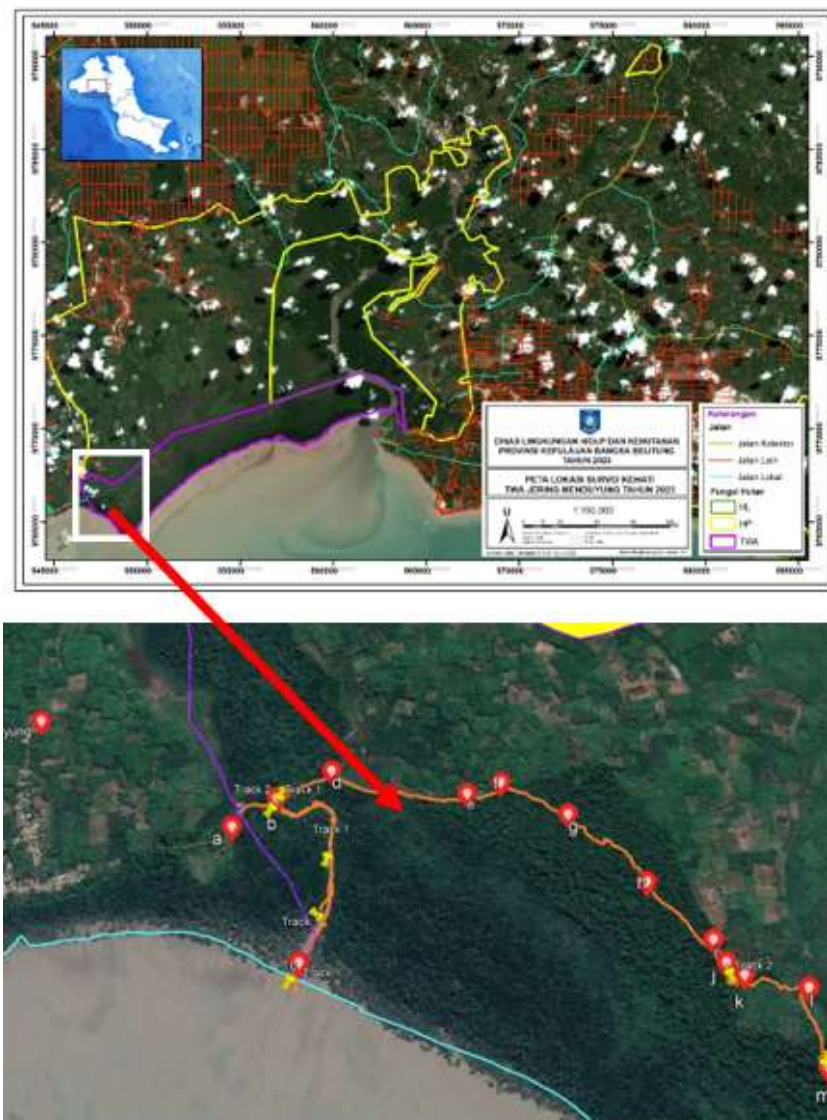
Dokumen ini melibatkan peran serta dari berbagai instansi terkait dan akademisi dari Universitas Bangka Belitung sebagai tim tenaga ahli yang diperkuat oleh Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/388/DLHK/2023 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023.

Terdapat 9 lokasi pengambilan data dan informasi keanekaragaman hayati yang tersebar di kabupaten/kota yang mewakili wilayah daratan, perairan darat dan laut. Berikut ini lokasi inventarisasi dan pengambilan data dan informasi keanekaragaman hayati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.1. 25 Lokasi Pengambilan Data Dan Informasi Kehati

No.	Lokasi	Kabupaten/Kota
1.	Kawasan Hutan Pelawan	Bangka Tengah
2.	Pulau Lengkuas	Belitung
3.	Tebat Rasau dan Gunung Lumut	Belitung Timur
4.	Pulau Kelapan	Bangka Selatan
	Taman Nasional Gunung Maras	Bangka
6.	Pulau Ketugar	Bangka Tengah
7.	Taman Wista Alam Gunung Permisan	Bangka Selatan
8.	Taman Wisata Alam Jering Menduyung	Bangka Barat
9.	Kebun Raya	Pangkalpinang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023



Gambar 2.1. 114 Lokasi Survei Pengambilan Data dan Informasi Kehati
Di TWA Jering Menduyung, Kabupaten Bangka Barat
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

B. Penangkaran Tumbuhan dan Satwa

Dengan semakin berkurangnya penutup lahan alami dalam hal ini merujuk ke hutan akibat alih fungsi lahan dalam bentuk deforestasi maupun degradasi serta eksploitasi lahan secara berlebihan telah berdampak pada terjadinya penurunan keanekaragaman hayati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu penangkaran yang berdasarkan Permenhut Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar adalah upaya

perbanyak melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Beberapa penangkaran yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan tahun penerbitan izin penangkaran dalam 2 tahun terakhir yaitu:

Tabel 2.1. 26 Penangkaran Satwa

No.	Nama Perusahaan	SK	Jenis Satwa yang Ditangkarkan
1	Ongky Budiato Tjhin	SK. 26/K.12/TU/KUM/1/2022 Tanggal 21 Januari 2020	Rusa Sambar (Rusa unicolor), Rusa Timor (Rusa timorensis), Rusa Totol (Axis axis) dan Kijang (Muntiacus muntjak)
2	PT. Timah Tbk	SK.845/KSDAE/SET.3/KSA.2/8/2021 Tanggal 4 Agustus 2021	Rusa Sambar (Rusa unicolor) dan Kijang (Muntiacus muntjak)

Sumber: Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resort 17 Bangka, 2022-2023

Pelestarian keanekaragaman hayati juga dilakukan oleh beberapa organisasi penggiat lingkungan yang concern dengan tema ini diantaranya yaitu Alobi Foundation. Beberapa dokumentasi kegiatan sepanjang tahun 2022 yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1. 115 Proses Penyelamatan Satwa Jenis Trenggiling yang Dilindungi, 13 Februari 2022 oleh PPS Alobi

Sumber: <https://alobi.org>, diakses 2023



Gambar 2.1. 116 Pelepasliaran Penyu Hijau yang Dilindungi oleh PPS Alobi bersama KLHK, Satpolair, PT. Timah dan LSM Gempa, 4 Agustus 2022

Sumber: <https://alobi.org>, diakses 2023

II.1.5.8 Sosialisasi, Edukasi dan Peningkatan Kapasitas

Sosialisasi Pencegahan Karhutla



Gambar 2.1. 117 Sosialisasi Pencegahan Karhutla

Sumber: dlhk.babelprov.go.id tanggal 10 Agustus 2022

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Povinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya mengantisipasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan disaat musim kemarau tahun 2022 salah satunya dengan melaksanakan sosialisasi melalui spanduk dengan tagline lebih baik mencegah daripada memadamkan dipasang diberbagai tempat yang mudah terlihat masyarakat sebagai bentuk kampanye pencegahan dan

penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, bersifat menghimbau untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara bakar sekaligus mengajak bersama sama mencegah terjadinya kebakaran hutan.

Kegiatan Peran Saka Nasional

Peran serta dan keaktifan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelestarian lingkungan juga ditanamkan kepada generasi muda yang tergabung dalam organisasi pramuka pada kegiatan Perkemahan Satuan Karya (Peran Saka) Tingkat Nasional pada bulan Oktober tahun 2022 di bumi perkemahan Depati Amir, Balun ijuk, Kabupaten Bangka.

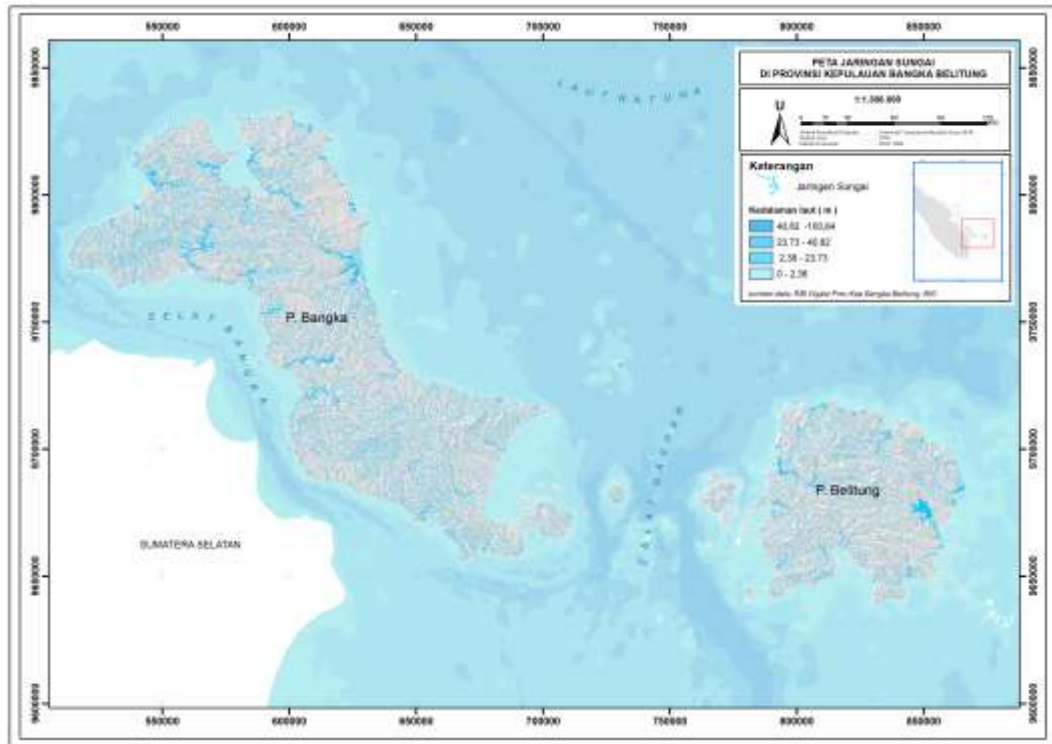


Gambar 2.1. 118 Kegiatan Peran Saka Nasional tahun 2022
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membimbing dua satuan karya bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan yaitu saka kalpataru dan saka wanabakti. Peserta Peran Saka Nasional mengikuti kegiatan pendalaman materi yang ditekankan pada isu lingkungan, pengelolaan sampah, perubahan iklim dan konservasi keanekaragaman hayati untuk membentuk generasi muda yang PACAK (Pramuka Aktif, Cendikia, Akrab dan Kreatif) dan ramah lingkungan.

II.2 Kualitas Air

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi yang berupa kepulauan memiliki banyak sumber air, baik air tawar maupun laut. Air tawar diperoleh dari air permukaan berupa sungai dan kolong, serta air tanah dan air laut. Sebagai daerah kepulauan, terdapat banyak sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan dua DAS utama yaitu DAS Baturusa dan DAS Cerucuk. Terdapat 2.412 sungai di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan panjang mencapai 10.546,84 km. Terdapat pula sungai besar pada setiap kabupaten/kota yaitu Sungai Rangkui yang membelah Kota Pangkalpinang, Sungai Kurau dan Sungai Selan yang berada di Kabupaten Bangka Tengah, Sungai Bangka Kota dan Sungai Kepoh di Kabupaten Bangka Selatan, Sungai Semenduk di Kabupaten Bangka, Sungai Mancung berada pada Kabupaten Bangka Barat, Sungai Cerucuk di Kabupaten Belitung dan Sungai Lenggang di Kabupaten Belitung Timur. Sungai-sungai tersebut merupakan sumber air bersih bagi masyarakat disekitarnya untuk keperluan domestik sehari-hari. Masyarakat juga memanfaatkan sungai tersebut sebagai lokasi penangkapan ikan dan udang serta merupakan alur transportasi air yang penting bagi kegiatan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gambar dibawah ini menunjukkan peta jaringan sungai yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 2.2. 1 Peta jaringan sungai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: Peta RBI Digital Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BIG 2022

Sumber air permukaan lain yang banyak terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah kolong. Kolong adalah istilah lokal untuk lubang bekas galian tambang timah yang menampung air hujan. Kolong biasanya dikelompokkan berdasarkan umur kolong menjadi kolong muda (0-5 tahun), kolong menengah (6-20 tahun) dan kolong tua yaitu kolong yang berumur lebih dari 20 tahun. Hingga saat ini terdapat ratusan kolong yang tersebar di berbagai lokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kolong ini memiliki kondisi yang beragam sesuai umur kolong. Kolong muda memiliki kandungan logam berat yang tinggi dan pH yang rendah berkisar 2-4, sedangkan kolong sedang memiliki pH 4-6. Kondisi kolong tua secara biogeofisik cenderung sudah normal dengan pH berkisar 5,5-7 dengan kandungan logam berat yang lebih rendah (Henny & Susanti, 2009). Tabel dibawah ini menunjukkan sebagian kolong yang sudah tercatat.

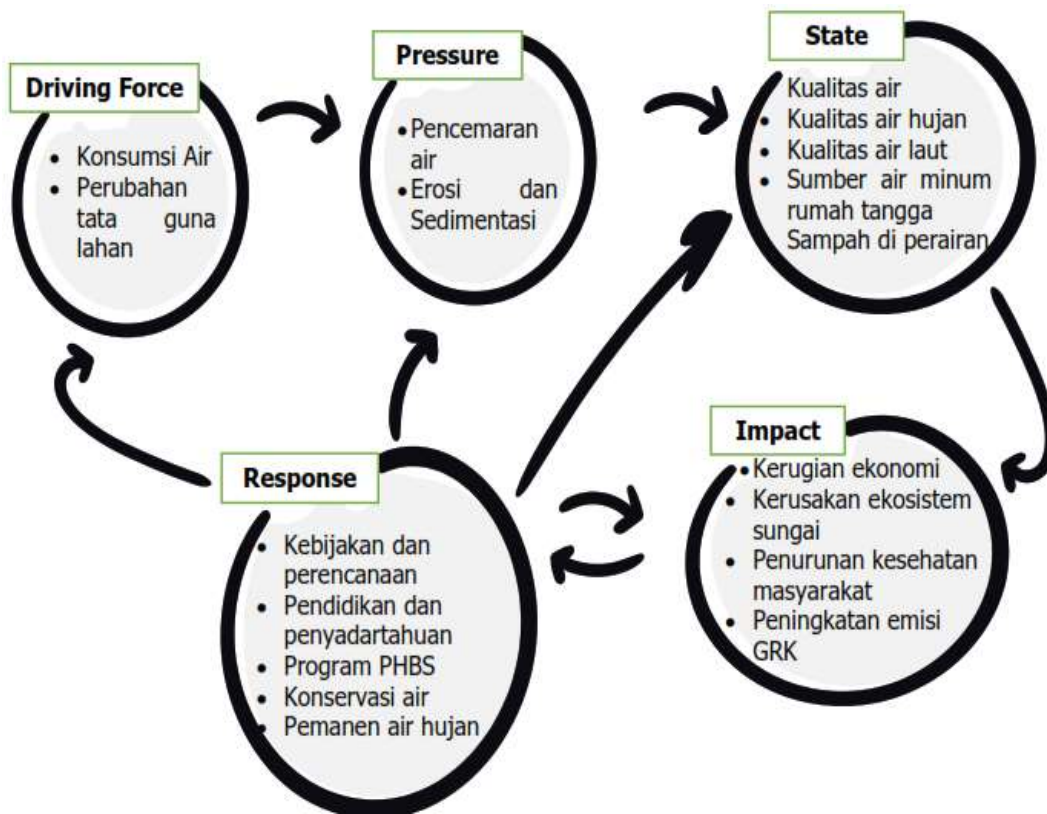
Tabel 2.2. 1 Kolong yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Nama Danau/Waduk/Situ/Embung	Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m ³)
1	Embung Air Baku Gunung Mentas	Kab. Belitung	9,34	720.000
2	Embung Bhay Park Kolong Polda	Kota Pangkalpinang	2,40	-
3	Kolam Retensi Pasar Ikan, Sungai Pedindang	Kab. Bangka Tengah	3,63	20.000
4	Kolong Air Besar		2,60	90.000
5	Kolong Air Kelubi	Kab. Belitung	10,44	480.000
6	Kolong Babi	Kab. Bangka Barat	2,00	50.000
7	Kolong Bacang	Kota Pangkalpinang	6	240.000
8	Kolong Bahar	Kab. Bangka Selatan	6	240.000
9	Kolong Bakam	Kab. Bangka	1,07	15.000
10	Kolong Beguruh	Kab. Bangka Tengah	7,5	80.000
11	Kolong Bikang	Kab. Bangka Selatan	0,1	150.000
12	Kolong Celuak	Kab. Bangka Tengah	2,18	70.000
13	Kolong Dam Jepang		6,44	188.000
14	Kolong Dendang	Kab. Belitung Timur	4,12	102.500
15	Kolong Dukong	Kab. Belitung	8,49	240.000
16	Kolong Enam Sungai Mayang	Kab. Belitung Timur	5,77	50.000
17	Kolong Gantung	Kab. Belitung Timur	0	600.000
18	Kolong Genangan Mentukul	Kab. Bangka Selatan	12	2.592.000
19	Kolong Gudang Padi	Kota Pangkalpinang	4,36	120.000
20	Kolong Juru Seberang	Kab. Belitung	14	240.000
21	Kolong Kacang Pedang	Kota Pangkalpinang	39,09	1.104.000
22	Kolong Kace	Kab. Bangka	2,68	60.000
23	Kolong Kampit	Kab. Belitung Timur	3,12	480.000
24	Kolong Kebintik	Kab. Bangka Tengah	1,85	62.000
25	Kolong Kepoh	Kab. Bangka Selatan	1,8	55.000
26	Kolong Kerang	Kab. Bangka Barat	0	60.000
27	Kolong Kerasak	Kab. Bangka Tengah	2,23	59.750
28	Kolong Lalang	Kab. Bangka Barat	4,22	320.000
29	Kolong Manggar 1	Kab. Belitung Timur	21,06	1.250.000
30	Kolong Manggar 2/Pancur	Kab. Belitung Timur	0	900.000
31	Kolong Mempadin	Kab. Belitung	4,86	137.500
32	Kolong Mempayak	Kab. Belitung Timur	4,12	960.000
33	Kolong Menjelang	Kab. Bangka Barat	1,8	320.000
34	Kolong Mentabak	Kab. Bangka	0	20.000
35	Kolong Merawang	Kab. Bangka	5,89	600.000
36	Kolong Mingki	Kab. Bangka Tengah	0	100.000
37	Kolong Muis	Kab. Bangka Tengah	2,41	180.000
38	Kolong Namang	Kab. Bangka Tengah	2,07	60.000
39	Kolong Nangka	Kota Pangkalpinang	0,3	30.000
40	Kolong Nibung	Kab. Bangka Tengah	34,06	60.000
41	Kolong Nona	Kab. Bangka Tengah	10,54	125.000
42	Kolong Pasar ikan	Kota Pangkalpinang	0	120.000

No.	Nama Danau/Waduk/Situ/Embung	Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m ³)
43	Kolong Pasir Merah	Kab. Bangka	19,95	262.500
44	Kolong Pedindang	Kota Pangkalpinang	4,69	120.000
45	Kolong Pemali Dam 3	Kab. Bangka	55,9	1.200.000
46	Kolong Penganak	Kab. Bangka Barat	2,54	61.000
47	Kolong Perawas	Kab. Belitung	4,15	-
48	Kolong Pice Besar	Kab. Belitung Timur	2128,19	77.192.000
49	Kolong PLN	Kab. Bangka	8,42	15.000
50	Kolong Pumpung	Kab. Bangka Selatan	5,56	267.000
51	Kolong Ramadan		0	25.000
52	Kolong Rindik	Kab. Bangka Selatan	2,55	70.000
53	Kolong Sekar Biru	Kab. Bangka Barat	4,22	62.500
54	Kolong Serkuk 1 & 2	Kab. Belitung	4,39	250.000
55	Kolong Selumar	Kab. Belitung	0,23	7.500
56	Kolong Senyubuk	Kab. Belitung Timur	34,71	450.000
57	Kolong Simpur	Kab. Bangka	18,65	495.000
58	Kolong Sinar jaya	Kab. Bangka	6,06	150.000
59	Kolong Sinar Surya	Kab. Bangka Barat	2,89	52.500
60	Kolong Spritus	Kota Pangkalpinang	2,6	85.000
61	Kolong Sungai Selan	Kab. Bangka Tengah	0	150.000
62	Kolong Tebat Gadung	Kab. Belitung Timur	23,14	320.000
63	Kolong Teluk Dalam	Kab. Belitung	4,12	75.000
64	Kolong Terabek	Kab. Bangka Barat	0,56	75.000
65	Kolong Teru	Kab. Bangka Tengah	2,83	37.500
66	Kolong Tujuh Sungai Mayang	Kab. Belitung Timur	5,77	85.000
67	Kolong Tukak Sadai	Kab. Bangka Selatan	2,06	53.000
68	Kolong Yamin	Kab. Bangka Selatan	9,6	331.000
69	T.O. Pemali	Kab. Bangka	18,6	120.000

Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai Bangka

Proporsi air laut menutupi 79,90% wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagi masyarakat Bangka Belitung, laut memiliki nilai ekonomi, sosial dan kultural yang tinggi. Berbagai aktivitas antropogenik yang dilakukan oleh masyarakat menyebabkan perubahan terhadap kualitas air. Untuk memahami kondisi kualitas air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan analisa mulai dari faktor pemicu hingga upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas air tersebut. Informasi mengenai kondisi kualitas air diperoleh dari data alam tabel 22 sampai dengan tabel 31, serta berbagai informasi terkait lainnya.



Gambar 2.2. 2 Diagram DDPSIR Framework kualitas air

II.2.1 Driving Force

II.2.1.1 Konsumsi Air

Air juga merupakan komponen kehidupan yang sangat penting bagi semua bentuk kehidupan di Bumi. Lebih dari 70% permukaan Bumi tercakup oleh air. Air juga merupakan kebutuhan vital bagi organisme, banyak organisme tergantung pada air untuk kelangsungan hidup mereka. Bagi manusia, hewan, dan tumbuhan, air merupakan sumber hidrasi yang menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan berperan dalam berbagai proses fisiologis. Bagi makhluk hidup, air sekaligus merupakan habitat bagi berbagai organisme akuatik sehingga mendukung keanekaragaman hayati. Air juga berperan dalam pengaturan iklim dan cuaca di bumi, menyediakan sumber energi bagi kehidupan manusia, serta memiliki nilai ekonomi dan sosial budaya yang sangat penting. Begitu pentingnya pengaruh air bagi perikehidupan manusia sehingga air yang merupakan sumberdaya hayati

banyak dieksploitasi untuk berbagai kepentingan, sehingga perlu dikelola dengan bijaksana agar dapat terus mendukung kehidupan di muka bumi ini.

Ketersediaan air di bumi selalu konstan, artinya ketersediaan air tidak mengalami penambahan maupun pengurangan karena adanya siklus hidrologi. Meskipun jumlah air di bumi selalu tetap, namun kualitas air mengalami perubahan (Rohmawati Y dan Kustomo, 2020). Kualitas air sendiri diartikan sebagai sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain di dalam air. Kualitas air digambarkan oleh beberapa parameter fisika, kimia dan biologi (Effendi, 2003). Kualitas air merujuk pada kondisi fisik, kimia, dan biologis air yang menentukan sejauh mana air tersebut sesuai untuk digunakan dalam berbagai keperluan, seperti minum, pertanian, industri, atau rekreasi. Kualitas air yang baik sangat penting bagi kehidupan manusia, lingkungan, dan ekosistem secara keseluruhan.

Ayat (1) Pasal 65 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk menjamin warga negara mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, termasuk diantaranya adalah akses terhadap air yang berkualitas baik sesuai dengan peruntukannya.



Gambar 2.2. 3 Sungai di Kabupaten Belitung Timur

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami bonus demografi yaitu pertumbuhan populasi penduduk. Menurut Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu. Pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh terjadinya pertumbuhan penduduk alami yaitu angka kelahiran (natalitas) yang tinggi, rendahnya mortalitas atau kematian, serta terjadinya migrasi atau perpindahan penduduk. Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2022 sebanyak 1,49 juta jiwa terdiri atas 767.582 jiwa penduduk laki-laki dan 727.039 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 1,52 persen dari tahun sebelumnya. Kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 mencapai 89,55 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di kabupaten/kota cukup beragam, dengan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di kota Pangkalpinang sebesar 2.164,69 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Belitung Timur sebesar 50,39 jiwa/Km (BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023). Jumlah penduduk dan persentase pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

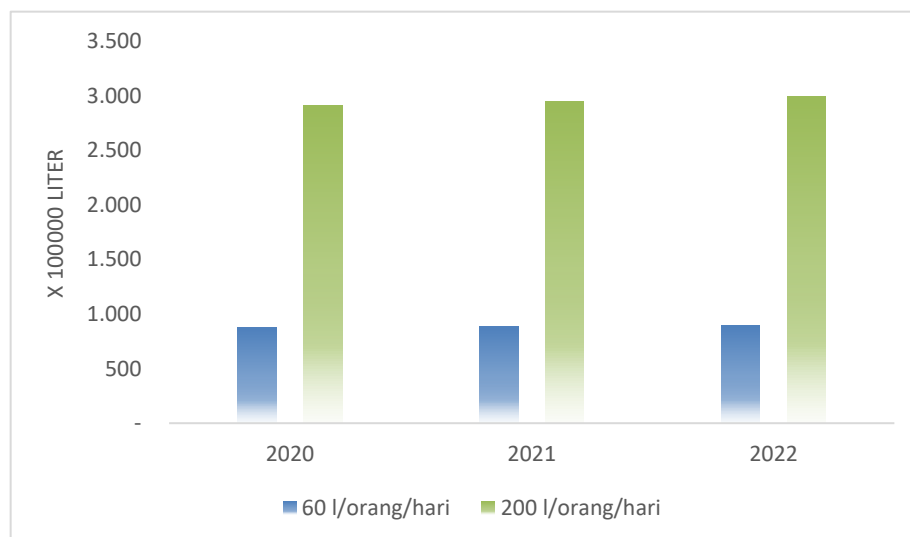
Tabel 2.2. 2 Tabel informasi kependudukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Rincian	Satuan	2020	2021	2022
1	Jumlah penduduk	Jiwa	1.455.700	1.473.100	1.494.600
2	Pertumbuhan penduduk	Persen	0,25	1,6	1,52
3	Penduduk miskin	Jiwa	63.890	73.710	69.690
4	Persentase penduduk miskin	Persen	4,53	4,9	3,48
5	Index pembangunan manusia	--	71,47	71,69	72,24

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Menurut Badan Standar Nasional Indonesia (BSNI) dalam Suheri et al. (2019) kebutuhan air penduduk perkotaan sebesar 120 liter/hari/kapita, dan kebutuhan air penduduk pedesaan sebesar 60 liter/hari/kapita. Selain itu UNESCO sendiri pada tahun 2002 telah menetapkan hak dasar manusia atas air yaitu sebesar 60 liter/orang/hari, bahkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 05 tahun 2022 disebutkan bahwa kebutuhan air untuk keperluan domestik sebesar 200 liter/orang.hari.

Peningkatan jumlah penduduk ini memicu terjadinya peningkatan konsumsi air untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Sehingga dengan jumlah populasi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022, maka kebutuhan air harian untuk keperluan domestik berkisar antara 89.676.000 liter sampai dengan 298.920.000 liter/hari. Peningkatan konsumsi air selama tahun 2020 hingga tahun 2023 ditunjukkan dalam gambar 2.2.3 dibawah ini. Dari gambar di bawah ini menunjukkan bahwa saat populasi penduduk terus meningkat, dan sumber daya alam tetap terbatas, mengakibatkan penggunaan dan eksploitasi sumberdaya alam berupa air akan semakin intensif (Oesterwind et al. 2016).



Gambar 2.2. 4. Kebutuhan Air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Untuk memenuhi keperluan konsumsi air di rumah tangga, masyarakat di Bangka Belitung memanfaatkan air sungai, air PAM, air sumur, dan lain-lain. Secara rinci jumlah rumah tangga dan sumber air minum ditunjukkan dalam tabel 2.2.3.

Tabel 2.2. 3. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Mata air	Ledeng/PAM	Sumur	Sungai	Hujan	Kemasan (liter)	Lainnya
1	Bangka	630	2.442	19.335	136	0,00	45.852	16.697
2	Belitung	942	0,00	6.042	14	217	37.602	3.429
3	Bangka Barat	584	346	18.805	622	0,00	21.656	12.086
4	Bangka Tengah	252	213	11.184	359	0,00	25.952	10.544
5	Bangka Selatan	765	296	10.419	0,00	158	30.569	8.792
6	Belitung Timur	308	208	3.685	80	0,00	25.668	3.551
7	Pangkalpinang	0	49	2.802	0,00	0,00	41.836	9.413

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 juga diikuti dengan penurunan persentase penduduk miskin dan peningkatan indeks pembangunan manusia. Sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa angka kelahiran di Bangka Belitung sebesar 2,54 sedangkan sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat kelahiran di Bangka Belitung mengalami penurunan menjadi 2,24. Hal ini menunjukkan bahwa angka kelahiran bayi dalam dekade ini menurun cukup tajam (Antara News Babel, 31 Januari 2023). Penurunan angka kelahiran bayi ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di Bangka Belitung sangat dipengaruhi oleh migrasi, yaitu perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap. Menurut Mujiburrahman *et al.* (2021) bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi adalah faktor ekonomi. Termasuk diantaranya yaitu ketersediaan lapangan kerja dan kondisi ekonomi masyarakat di lokasi yang dituju.

Dari sektor ekonomi terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi dari tahun sebelumnya. Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 tetap tumbuh positif di angka 4,40. Pertumbuhan ini lebih kecil dibandingkan tahun 2021 (5,05 persen). Penurunan pertumbuhan ekonomi

di tahun 2022 disebabkan oleh kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil. Namun demikian, PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 berjumlah sebesar 95.285,43 milyar rupiah. Nilai ini mengalami peningkatan dari PDRB tahun sebelumnya. PDRB ini menunjukkan performa ekonomi suatu wilayah (BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023).



Gambar 2.2. 5. Trend pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung juga ditandai dengan meningkatnya sisi produksi seperti yang dilaporkan oleh BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peningkatan ini juga dapat dilihat dari tumbuhnya berbagai kegiatan usaha baru pada tahun 2022. Di DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri tercatat terdapat 15 Dokumen Perizinan Lingkungan yang dikeluarkan sesuai dengan kewenangannya, demikian pula di DLH kabupaten/kota di wilayah Bangka Belitung. Usaha industri baru ini diantaranya bergerak dalam bidang pertambangan, budidaya udang, dan kegiatan jasa lainnya.

Dalam dunia industri, air digunakan berupa air proses, air umpan boiler (*boiler feed water*) dan air pendingin atau *coolant* serta air sanitasi. Besarnya kebutuhan air pada industri tergantung pada jenis industri dan jumlah karyawan pada industri tersebut, namun dapat dipastikan bahwa semakin banyak kegiatan industri yang dilaksanakan, maka konsumsi air pada suatu wilayah akan semakin tinggi. Selain itu, beberapa pengamat menyatakan bahwa industri dalam negeri mengonsumsi air lebih banyak

dari pada konsumsi air pada industri-industri sejenis di negara maju (Merdeka.com, 2013).

Pada tahun 2021, terdapat 97 perusahaan industri besar dan sedang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekitar 44 unit industri besar sedang ini merupakan industri makanan, 17 unit industri logam dasar, dan 15 unit industri barang galian bukan logam. Jumlah perusahaan industri besar dan sedang tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Belitung yakni sebanyak 26 unit perusahaan (BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013). Operasional kegiatan industri tersebut akan meningkatkan konsumsi air sesuai dengan kapasitasnya.

Selain itu, sebagai salah satu destinasi wisata, di Bangka Belitung juga banyak bermunculan jasa akomodasi dan penginapan. Ditinjau dari SNI 03-7065-2005, suatu bangunan hotel diharuskan memiliki jaringan air bersih yang mampu melayani sedikitnya 250 liter/orang/hari untuk kebutuhan tamu hotel dan 120 liter/orang/hari untuk kebutuhan karyawan. Laporan BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan bahwa pada tahun 2022, okupansi atau tingkat keterisian tempat tidur pada hotel berbintang sebesar 33,70% dengan jumlah empat tidur yang tersedia sebanyak 4666, sedangkan okupansi hotel non-bintang sebesar 17,82% dengan jumlah tempat tidur sebanyak 3.247. Sehingga untuk keperluan ini konsumsi air diperkirakan mencapai 59.433,98 liter/hari.

Salah satu jenis industri yang banyak terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah industri pengolahan kelapa sawit yang menghasilkan CPO (*crude palm oil*). Pada tahun 2022, produksi kelapa sawit sebesar 83.791,12 ton. Secara teoritis konsumsi air pada industri pengolahan kelapa sawit adalah 1,3 ton/ton TBS, namun konsumsi air faktual di pabrik adalah sebesar 2,27 ton/ton TBS (Sari *et. al*, 2011). Sehingga konsumsi air pada tahun 2022 pada industri kelapa sawit di Bangka Belitung berkisar antara 108.928,456 - 190.205,842 ton.

Kegiatan-kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup layak dan kegiatan ekonomi yang semakin tinggi membutuhkan konsumsi

air yang terus meningkat. Kegiatan industri, domestik, dan kegiatan lain berdampak negatif terhadap sumber daya air, termasuk penurunan kualitas air (Sasongko *et al.*, 2014). Semakin intensifnya eksploitasi sumberdaya alam, termasuk konsumsi air, akan menyebabkan perubahan pada ekosistem dan sumberdaya alam, termasuk perairan (Oesterwind *et. al*, 2016) karena tiap satuan volume air yang dikonsumsi bagi pelaksanaan kegiatan masyarakat dapat diikuti dengan menipisnya cadangan air (Susanti, 2012).

II.2.1.2 Perubahan Tata Guna Lahan

Hutan secara umum diyakini salah satunya berfungsi ekologis, yaitu sebagai pengatur tata air, menjaga waktu dan ketersediaan aliran air sungai, menjaga iklim mikro dan mampu melindungi daerah di hilirnya dari berbagai bencana seperti banjir (Asdak, 2022). Dibandingkan penutupan jenis vegetasi yang lain, hutan dapat menghasilkan debit banjir pada tingkat yang rendah dan meningkatkan stabilitas tanah, disebabkan karena tingginya kapasitas infiltrasi, adanya perlindungan dari tutupan tajuk pohon, tingginya konsumsi terhadap air tanah dan tingginya kekuatan regang dari perakaran pohon (Supangat, 2008).

Penggunaan lahan merupakan bentuk intervensi manusia terhadap lahan dipermukaan bumi yang bersifat dinamis dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup baik material maupun spiritual. Pennsylvania (2006) dalam Setyowati (2011) mengemukakan bahwa penggunaan lahan dapat menurunkan kualitas air, meningkatkan volume dan kecepatan air permukaan, meningkatkan frekuensi air banjir, meningkatkan aliran air dua kali lebih besar dari hutan alam, menyebabkan hilangnya bahan material dan mengakibatkan penurunan air tanah.

Tabel 2.2.4 dibawah ini menunjukkan perubahan luas penutup lahan dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Dari table ini dapat terlihat bahwa terjadi penurunan luas lahan hutan, baik hutan kering primer maupun hutan kering sekunder, dan badan air. Namun disisi lain terlihat penambahan luas

yang signifikan terhadap luas penutup lahan untuk kelas perumahan, lahan terbuka serta tambak. Alih fungsi lahan yang meningkat tiap tahunnya mengurangi proses peresapan air hujan dalam tanah sebagai cadangan sumberdaya air serta cenderung menurunkan daerah tangkapan air (Susanti, 2017).

Tabel 2.2. 4. Dinamika Perubahan Luasan Penutup Lahan Tahun 2018-2021

Kelas Tutupan Lahan	Luasan Pada Tahun (ha)			
	2018	2019	2020	2021
Hutan Lahan Kering Primer	600,38	531,4	486,4	486,8
Hutan Lahan Kering Sekunder	113.693,50	101.828,4	83.887,9	87.337,8
Hutan mangrove primer	33.797,41	33.647,1	22.789,1	25.852,5
Hutan rawa primer	596,05	550,9	277,4	380,8
Belukar	295.434,88	298.426,0	306.131,8	154.146,2
Perkebunan	194.548,81	234.031,0	253.359,8	275.754,9
Permukiman	33.174,72	35.462,0	38.845,9	41.700,8
Lahan Terbuka	75.630,75	75.368,1	8.381,3	8.235,9
Savana	7.080,022	7.055,6	7.423,6	8.744,3
Tubuh Air	5.598,81	5.652,4	11.945,7	4.914,5
Hutan Mangrove sekunder	33.391,82	32.403,3	40.665,5	40.771,3
Hutan rawa sekunder	44.621,88	44.539,9	49.148,8	50.144,8
Belukar rawa	58.005,27	54.421,5	73.472,0	77.787,2
Pertanian Lahan Kering	58.111,87	54.938,6	56.855,2	52.763,1
Pertanian Lahan campur semak	556.362,38	530.689,0	544.496,3	663.633,2
Sawah	1.762,78	1.762,8	4.705,2	7.726,0
Tambak	628,38	628,4	522,2	1.340,4
Bandara	146,08	257,3	257,3	257,3
Transmigrasi	2.416,80	2.416,8	2.416,8	374,3
Pertambangan	144.783,81	146.426,2	155.168,3	156.531,3
Rawa	10.964,11	10.556,1	10.673,1	10.504,6
Total luasan data spasial (ha)	1.671.592,9	1.671.592,9	1.671.592,9	1.669.387,8

Sumber: IGT penutup lahan skala 1:250.000 Tahun 2018-2021, BPKTLH Wilayah XIII Pangkalpinang

Hutan lindung dan sistem agroforestry yang dikembangkan di sekitar badan air lebih lanjut dapat memperbaiki kualitas air. Keberadaan hutan di tepian sungai dapat menjaga stabilitas tebing sungai, menurunkan tingkat

kandungan sampah dan bahan kimia berbahaya kedalam badan air, memelihara suhu air agar tetap dingin dan memperbaiki tingkat *dissolved oxygen* (DO) air (Susanti, 2017).

Faktor – faktor penduduk dan konversi lahan saling berkaitan mempengaruhi ketersediaan air bersih. Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan konsumsi air dan konversi lahan meningkat. Laju pembangunan yang meningkat mengakibatkan bertambahnya lahan terbangun dan lahan terbuka berkurang yang berdampak pada berkurangnya pertambahan air alami. Semakin kecil tutupan hutan dalam sub DAS serta semakin beragamnya jenis penggunaan lahan dalam sub DAS menyebabkan kondisi kualitas air sungai yang semakin buruk (Supangat, 2008).



Gambar 2.2.6 Kondisi Lahan Kritis Di Desa Deniang

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

II.2.2 Pressure

II.2.2.1 Pencemaran air

Pertambahan populasi penduduk berarti akan meningkatkan kebutuhan air, dan disisi lain peningkatan populasi juga akan menyebabkan bertambahnya air limbah domestik, dan apabila air limbah domestik

tersebut tidak dikelola dengan benar, maka akan menyebabkan meningkatkan beban pencemaran air ke media lingkungan dan selanjutnya akan menurunnya kualitas air. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 05 Tahun 2022, air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air, dimana 80% dari kebutuhan air akan menjadi air limbah.

Air limbah domestik berasal dari air limbah dapur, kamar mandi, toilet, cucian dan lain-lain. Air limbah domestik dibedakan menjadi *grey water* dan *black water*. *Black water* adalah limbah domestik yang mengandung tinja dan urin, sedangkan *grey water* sendiri tidak mengandung tinja dan urin. Limbah domestik ini mengandung lemak (33%), protein (25%), selulosa (8%), pati (8%), lignin (6%), abu (20%) dengan nilai BOD berkisar antara 275 – 3000 ppm. Limbah cair domestik juga memiliki kandungan bahan organik yang tinggi, yang biasa digambarkan dalam parameter BOD dan COD (Muhsinin, 2019). Hal ini sejalan dengan hasil kegiatan Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar yang dilakukan pada tahun 2016, yang menunjukkan bahwa rumah tangga merupakan sektor yang berkontribusi dominan terhadap beban pencemaran BOD, COD dan TSS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penentuan debit air limbah domestik dapat juga diperoleh dari besarnya pemakaian air bersih dengan memperhitungkan faktor kehilangan air, debit air limbah adalah 80% dari konsumsi air bersih. Apabila konsumsi air untuk keperluan domestik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 sebesar 89.676.000 liter/hari - 298.920.000 liter/hari, maka diperkirakan limbah domestik yang dihasilkan adalah 71.740.800 - 239.136.000 liter/hari. Hingga saat ini sebagian besar air limbah domestik yang dihasilkan langsung masuk ke drainase menuju ke media lingkungan, terutama sungai, tanpa melalui pengelolaan yang semestinya. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa limbah domestik berpengaruh besar

terhadap pencemaran sungai. Saragih *et. al* (2022) menyatakan bahwa sekitar 60 hingga 70 persen pencemaran sungai disebabkan oleh limbah domestik.

Air limbah tidak hanya diproduksi dari sektor domestik atau rumah tangga, namun juga dihasilkan oleh industri. Di Bangka Belitung terdapat sejumlah perusahaan pengolahan kelapa sawit, dan industri pertanian lainnya yang juga menghasilkan jumlah air limbah dalam jumlah besar, isalnya usaha karet remah atau *crumb rubber* dan industri pengolahan tapioka. Salah satu kewajiban jenis industri tersebut adalah melakukan penentuan beban pencemaran juga merupakan kewajiban dunia usaha sebagai salah satu bentuk kontrol terhadap kualitas air limbah yang dihasilkan agar limbah yang memasuki lingkungan tidak melebihi beban pencemaran yang dapat ditampungnya. Data beban pencemaran air dari beberapa sektor industri yang melakukan penghitungan beban pencemaran air. Data beban pencemaran dari sektor industri dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Data pada tabel tersebut diperoleh dari perusahaan peserta PROPER Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki kewajiban untuk menghitung beban pencemaran.

Tabel 2.2.5. Beban Pencemaran yang Dihasilkan Sektor Industri

No	Perusahaan	Beban Pencemaran (Ton/periode)					
		BOD	COD	TSS	SO4	ML	NH3N
1	CV. Mutiara Alam Lestari	110,94	150,83		0,93	1,93	0,03
2	PT. Bangka Agro Mandiri	--	--	--	--	--	--
3	PT. Belitung Permai Abadi	0,34	0,8	0,52		0,02	0,4
4	PT. Bumi Permai Lestari	495	2.220,04	0,01	0,96	1,33	0
5	PT. Fenyen Agro Lestari	--	--	--	--	--	--
6	PT. Gemilang Cahaya Mentari	55,91	1,16	0	2,22	0	0
7	PT. Grand Cirindo	--	--	--	--	--	--
8	PT. Gunung Maras Lestari	0,33	1,1	--	0,93	0,1	0

No	Perusahaan	Beban Pencemaran (Ton/periode)					
		BOD	COD	TSS	SO4	ML	NH3N
9	PT. Gunung Sawit Bina Lestari	392,82	6,17	124,4	--	0,09	0,01
10	PT. Hatika Wisata Makmur	0,02	0,11	0,04		0	0,03
11	PT. Mutiara Hijau Lestari						
12	PT. Parit Sembada	0,24	3,89		4,38	0,33	0,07
13	DPPU Depati Amir	0	0		0	0	0
14	Fuel Terminal Tanjungpandan	--	--	--	--	--	--
15	PLTD Padang	0	0	0	0	0	0
16	PLTD Koba	0	0	0	0	0	0
17	PLTD Merawang	0	0,05	0,01	0	0	0
18	PLTD Muntok	0	0	0	0	0	0
19	PLTD Pilang	0	0,02	0	0	0	0
20	PT. Putra Bangka Tani	--	--	--	--	--	--
21	PT. Putra Bangka Mandiri	14,41	37,51		0,17	0,05	0
22	PT. Rebinmas Jaya	34,81	183,8	0,01		1,58	0,06
23	PT. Sinar Baturusa Prima	--	--	--	--	--	--
24	PT. Steelindo Wahana Perkasa	496,4	1383,56		7,78	1,48	0
	JUMLAH	1.601,22	3.989,04	124,99	17,37	6,58	0,6

Sumber : Data Proper periode Juli 2021 – Juni 2022 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Perusahaan pengolahan dan perkebunan kelapa sawit di Bangka Belitung telah menerapkan metode *system land application* dengan mengembalikan limbah cair yang dihasilkan ke lahan perkebunan, sehingga air limbah tidak memasuki lingkungan, terutama badan air. Namun banyak kegiatan industri lainnya yang membuang air limbah yang sudah diolah ke media lingkungan. Kondisi faktual menunjukkan bahwa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021, terdapat 97 industri besar dan sedang serta 21.557 unit usaha industri kecil (BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023). Sehingga dapat disimpulkan bahwa beban pencemaran aktual yang dihasilkan dari sektor industri akan jauh lebih besar.

II.2.2.2 Erosi dan Sedimentasi

Pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat mengakibatkan terjadinya perubahan tataguna lahan sehingga terjadi perubahan tutupan lahan hutan menjadi area pertambangan, perkebunan, pemukiman dan tambak yang akan berdampak terhadap kualitas air. Pohon dan tanaman di hutan berfungsi untuk menyerap air hujan dan menahan tanah agar tidak tergerus air. Pengalihfungsian hutan akan berakibat pada terganggunya sistem hidrologi. Ketika terjadi penebangan pohon, akar humus kehilangan penahannya, lapisan tanah akan terkikis menyebabkan gangguan sistem hidrologi dan dapat menimbulkan bencana hidrologis banjir dan longsor. Gangguan sistem hidrologis ini dapat menurunkan kualitas air permukaan, karena terjadinya peningkatan sedimentasi di perairan (Kusumaningrum, 2018).

Aktivitas pemanfaatan lahan, antara lain *illegal logging*, perubahan tata guna lahan, pengembangan lahan pertanian, serta aktivitas lain yang bersifat mengubah kondisi tanah dapat meningkatkan jumlah mineral dan komponen (organik dan non-organik) lain yang terangkut masuk ke dalam sungai dan pada gilirannya akan menimbulkan dampak signifikan terhadap keseimbangan ion-ion dalam suatu DAS. Meningkatnya kehilangan unsur-unsur hara dari lokasi hutan yang terbuka serta meningkatnya air larian akan meningkatkan konsentrasi unsur hara yang memasuki badan perairan. Tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat terkikis dan terangkut kemudian diendapkan pada suatu tempat lain atau disebut sebagai erosi (Asdak, 2022).

Pada dasarnya erosi disebabkan oleh faktor iklim, terutama intensitas hujan. Namun, aktivitas manusia berupa proses pembangunan yang merusak fisik tanah mempengaruhi terjadinya erosi. Erosi dapat meningkat seiring dengan aktifitas manusia terhadap tata guna lahan yang meliputi penggundulan hutan, kegiatan kontruksi/ pembangunan, dan pertambangan (Hisyam dan Shodiq, 2019). Erosi dapat menurunkan kemampuan tanah untuk meresapkan air (infiltrasi), sehingga pada

akhirnya akan meningkatkan limpasan air permukaan yang akan mengakibatkan banjir di sungai (Azmeri, 2020).

Konversi lahan yang merusak fisik tanah juga menyebabkan pengendapan material yang terbawa oleh media air atau sedimentasi. Sedimentasi ini menyebabkan terganggunya aliran sungai berupa meningkatnya aliran permukaan dan menurunnya permukaan air tanah dan meluasnya lahan kedap air, yang ditandai dengan gejala ketika turun hujan akan mudah banjir dan ketika musim kemarau terjadi kekeringan dan pendangkalan sungai sehingga menyebabkan banjir (Kodoatie & Sugiyanto, 2002). Penelitian Fadillah Sabri (2017) menunjukkan bahwa peningkatan lahan kritis akibat berubahnya tata guna lahan menyebabkan terjadinya erosi dan sedimentasi. Hisyam dan Shodiq (2019) juga menyatakan bahwa besarnya jumlah erosi yang terjadi di DAS Deniang akibat pengaruh tataguna lahan yang buruk yaitu berupa aktivitas penambangan yang berada disamping sungai.

II.2.3 State

II.2.3.1 Kualitas air

Sebagai salah satu kebutuhan utama masyarakat, air diperlukan dalam jumlah yang besar dan kualitas yang baik, bahkan menjadi salah satu pilar dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yaitu air bersih dan sanitasi layak. Ketersediaan air bersih yang cukup dan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat akan meningkatkan hajat hidup masyarakat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki berbagai macam sumber air, misalnya sungai, laut, dan kolong. Namun selain ketersediaan air dari segi kuantitas, kualitas air tersebut juga perlu diperhatikan sebagai tolok ukur kelayakan sumber air agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kegiatan industri, domestik, dan kegiatan lain berdampak negatif terhadap sumber daya air, termasuk penurunan kualitas air (Sasongko et al., 2014)

Salah satu cara untuk mengetahui kualitas dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap sumber air. Pada tahun 2022, di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung telah dilakukan 358 kali pemantauan air sungai yang dilakukan pada 138 titik sungai, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil pemantauan yang dilakukan menyatakan status mutu perairan tersebut. Salah satu sungai yang dipantau adalah Sungai Baturusa di Pulau Bangka dan Sungai Cerucuk di Pulau Belitung, pemantauan masing-masing dilakukan sebanyak 8 titik dengan 3 periode pemantauan yang dilakukan pada bulan Juni Juli dan Oktober tahun 2022. Kedua sungai tersebut merupakan sungai lintas batas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Hasil pemantauan berupa status mutu sungai pada masing-masing titik dan periode pemantauan dapat dilihat pada tabel 2.2.6 berikut. Sedangkan Gambar 2.2.6 dibawah ini menunjukkan sebaran lokasi pemantauan air sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

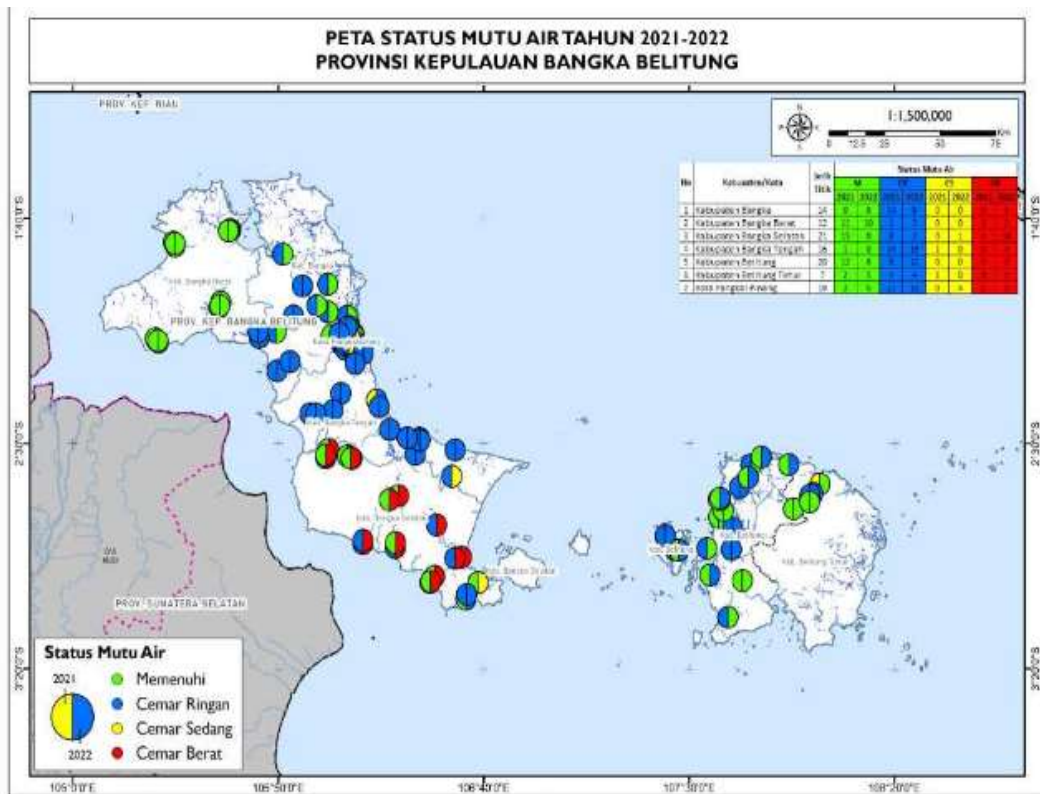
Tabel 2.2.6. Status Mutu Sungai Baturusa dan Sungai Buding tahun 2022

NO	Lokasi Pemantauan	Titik Koordinat		STATUS MUTU		
		Latitude	Longitude	Pantau 1	Pantau 2	Pantau 3
1	BUDING - Air Batu Buding	-2.74099	'107.92293	TIDAK CEMAR	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN
2	BUDING - Buding,	-2.71529	'107.98792	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN
3	BUDING - Buding	-2.71716	'107.99673	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN
4	BUDING - Aik Buding	-2.696194	'107.988028	CEMAR SEDANG	CEMAR SEDANG	CEMAR SEDANG
5	BUDING - Aik Buding	-2.649056	'108.030722	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN
6	BUDING - Buding	'-2.68352	'108.00414	CEMAR SEDANG	CEMAR SEDANG	CEMAR SEDANG
7	BUDING – Buding	'-2.696138	'107.988097	CEMAR SEDANG	CEMAR SEDANG	CEMAR RINGAN
8	BUDING – Muara Aik Jangkat	'-2.6895	'107.990611	CEMAR SEDANG	CEMAR SEDANG	CEMAR RINGAN
9	BATURUSA - S. Limbung	'-2.012889	'106.0355	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN
10	BATURUSA - S. Rangkui	'-2.100556	'106.138611	CEMAR RINGAN	CEMAR SEDANG	CEMAR RINGAN
11	BATURUSA - Pangkalbalam	'-2.093724	'106.139816	CEMAR SEDANG	CEMAR SEDANG	CEMAR RINGAN

NO	Lokasi Pemantauan	Titik Koordinat		STATUS MUTU		
		Latitude	Longitude	Pantau 1	Pantau 2	Pantau 3
12	BATURUSA – Muara S. Selindung	'-2.063388	'106.122054	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN
13	BATURUSA – S. Selindung	'-2.065806	'106.117611	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN
14	BATURUSA – S. Baturusa	'-2.028889	'106.111917	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN
15	BATURUSA – S. Kayu Besi	'-1.988556	'105.989556	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN
16	BATURUSA – S. Mabet	'-1.916056	'105.930667	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

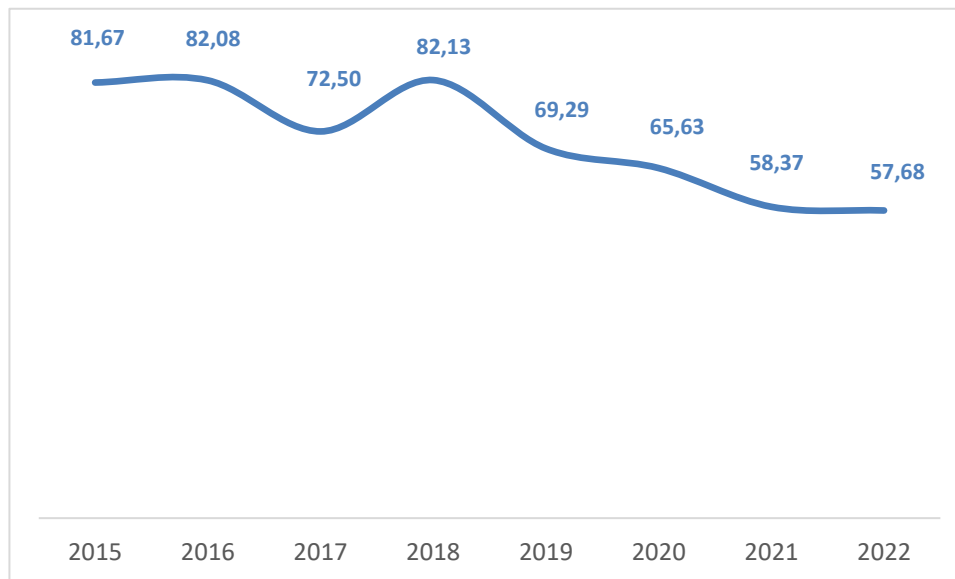
Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan (Masykur Et al, 2018). Penentuan status mutu perairan dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran kualitas air dengan baku mutu yang berlaku, dengan demikian dapat diketahui kelas air dan peruntukannya. Status mutu suatu badan air dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung *load* atau masukan beban pencemaran yang diterimanya serta debit perairan tersebut. Status mutu perairan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan status cemar ringan hingga cemar sedang, dan memenuhi air kelas 2. Air kelas 2 dapat dimanfaatkan prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Berdasarkan status mutu tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas air sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memenuhi syarat untuk dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Gambar dibawah ini menunjukkan persebaran status mutu air di berbagai lokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 2.2.7. Peta Sebaran Status Mutu Air Tahun 2021-2022

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Hasil pemantauan kualitas air sungai ini kemudian menjadi salah satu komponen dalam penentuan IKLH (indeks kualitas lingkungan hidup). Indeks kualitas air (IKA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 IKA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 57,68, dan masuk dalam kategori sedang. Nilai ini menurun sebesar 0,69 poin dari tahun sebelumnya. Gambar dibawah ini menunjukkan tren nilai IKA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2022. Penurunan nilai IKA ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan air yang dilakukan selama ini belum cukup optimal. Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan bahwa pencemaran terhadap sungai masih terus terjadi, baik yang disebabkan karena limbah yang berasal dari *point source* maupun limbah *non-point source*, misalnya dari aktivitas domestik di masyarakat.

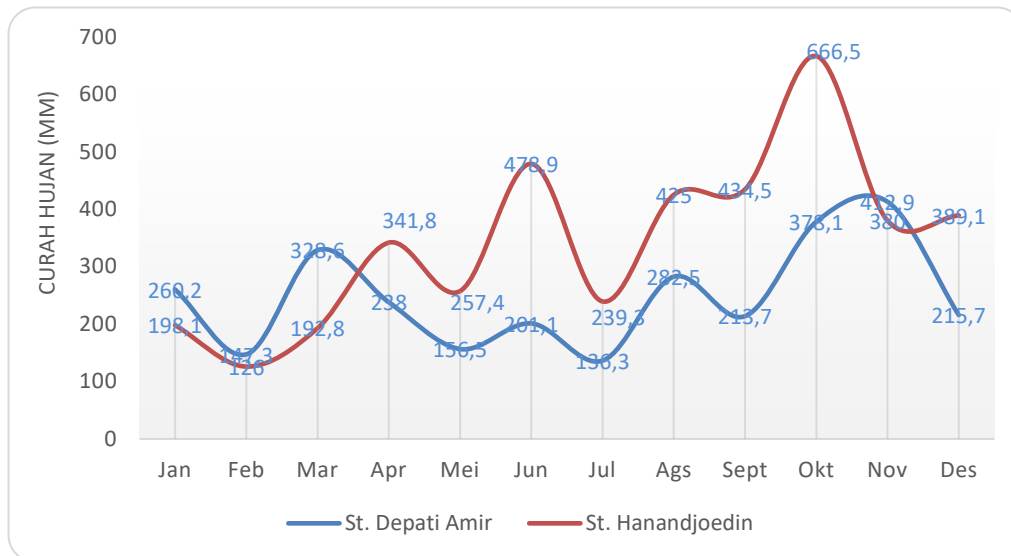


Gambar 2.2.8 IKA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2022

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

II.2.3.2 Kualitas Air Hujan

Sebagai daerah tropis hujan terjadi sepanjang tahun di wilayah Indonesia. Pada tahun 2022, curah hujan sebesar 3.026,7 mm dengan total hari hujan sebanyak 234 hari. Pengukuran curah hujan dilakukan pada dua lokasi yaitu Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang dan Stasiun Meteorologi Kelas III Hanandjoedin Tanjung Pandan Kabupaten Belitung. Curah hujan yang terukur pada kedua stasiun pengukuran tersebut pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Dari gambar tersebut diketahui bahwa curah hujan di Pulau Belitung lebih tinggi dari pada curah hujan di Pulau Bangka dengan rata-rata curah hujan di Belitung sebesar 344,116 mm sedangkan curah hujan di Pulau Bangka sebesar 247,75 mm.



Gambar 2.2. 9. Curah hujan bulanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

Sumber : UPT Badan Meteorologi dan Geofisika Depati Amir Pangkalpinang; data online BMKG, 2023

Selain pengukuran curah hujan, dilakukan juga pengukuran kualitas air hujan pada setiap bulan untuk mengetahui kualitas air hujan. Pengukuran kualitas air hujan ini dilakukan dari hujan yang terjadi di Kota Pangkalpinang.

Tabel 2.2.7. Kualitas air hujan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

Lokasi Pemantauan	Waktu Pemantauan	pH	DHL ($\mu\text{s}/\text{cm}$)	SO ₄ (mg/L)	NO ₃ (mg/L)	NH ₄ (mg/L)	Kesadahan (total) (mg/L)
Kota Pangkalpinang	Jan	5,16	21,2	5,17	0,5	<0,0351	31,6
	Feb	5,01	25,0	8,80	0,565	0,184	58,5
	Mar						
	Apr	5,91	25,9	8,45	0,6	0,175	27,4
	Mei	5,50	24,3	4,43	0,585	0,195	27,4
	Jun	5,76	19,9	5,25	0,6	<0,0377	84,1
	Jul	5,91	9,65	2,66	0,3	<0,0377	8,4
	Ags	5,13	20,1	2,81	0,6	0,0697	2,03
	Sep	5,23	24	2,48	0,3	<0,0377	8,25
	Okt	5,76	7,62	3,77	0,8	0,00403	33
	Nop	5,85	2,3	3,93	<0,230	<0,0377	51,6
	Des	5,5	8,06	5,19	0,4	0,138	38,8

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Parameter pH air hujan memperlihatkan nilai pH kurang dari 6 pada setiap bulan pemeriksaan. Nilai ini menunjukkan bahwa pH air hujan belum memenuhi baku mutu dalam Peraturan Menteri kesehatan Nomor 32 tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum yang mensyaratkan pH 6,5-8,5 sebagai salah satu parameter kimia dalam standar baku mutu kesehatan lingkungan pada media air untuk keperluan higiene sanitasi. Nilai pH air hujan sangat tergantung pada konsentrasi gas CO₂ di udara. CO₂ di udara dapat berasal dari emisi kendaraan maupun udara emisi yang berasal dari kegiatan industri dan aktivitas lainnya. Pertambahan moda transportasi kendaraan bermotor dan pertambahan industri di suatu daerah dapat mengakibatkan pencemaran sulfur dan nitrogen menjadi tinggi sehingga nilai pH menjadi asam (Untari & Kusnadi, 2015).

Parameter kunci lainnya dalam menilai kualitas air hujan adalah kesadahan yang merupakan gambaran kation logam divalen (valensi dua). Pada perairan tawar, kation divalent yang paling melimpah adalah kalsium dan magnesium, sehingga kesadahan pada dasarnya ditentukan oleh jumlah kalsium dan magnesium (Effendi, 2003). Uji kualitas air hujan tahun 2020 menunjukkan bahwa parameter nilai kesadahan berkisar antara 4,08 - 49,0 mg/l, nilai tersebut masih dibawah baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum yang mensyaratkan kesadahan kurang dari 500 mg/l.

II.2.3.3 Kualitas air Laut

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki luas laut kurang lebih 65.301 km² atau 79,90% dari luas total wilayah provinsi, dan memiliki sumber daya alam laut yang sangat beragam. Berbagai kegiatan dilakukan masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapat di laut, misalnya kegiatan kegiatan ekowisata, eksploitasi sumberdaya perikanan laut, bahkan kegiatan pertambangan timah di laut atau *off shore mining*.

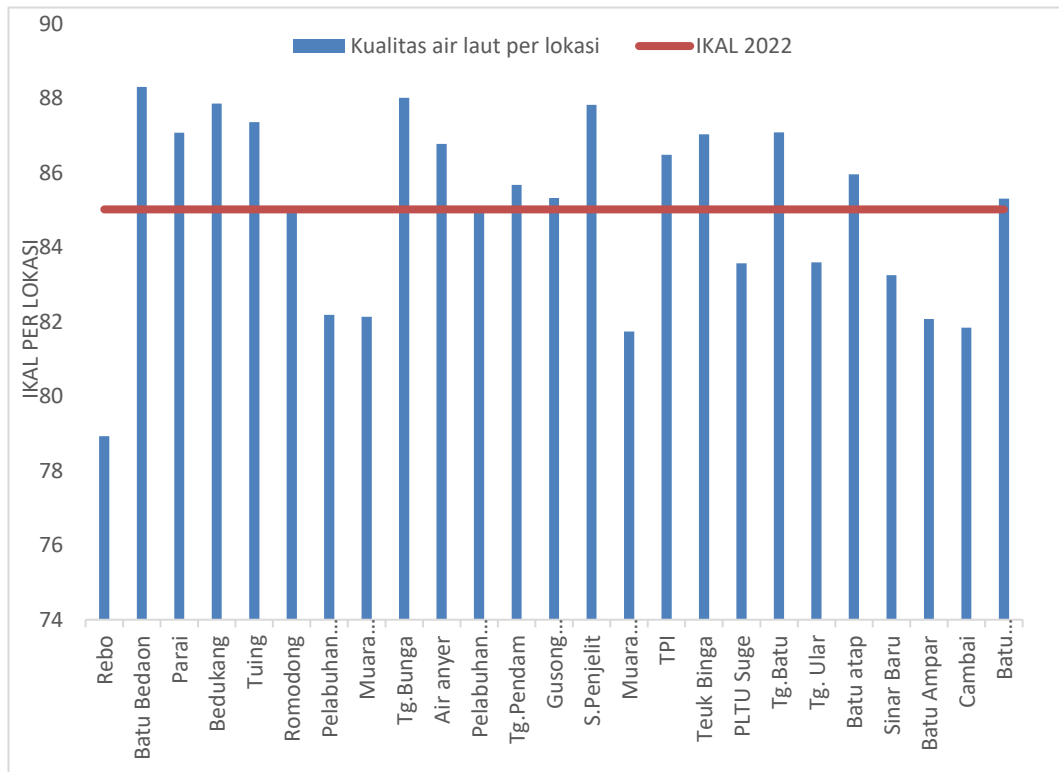
Berbagai kegiatan ini memberikan dampak baik secara ekonomi maupun ekologi. Pemantauan kualitas air laut ini memberikan gambaran mengenai kualitas air laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemantauan kualitas air laut dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KLL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengambilan sampel air laut tahun 2020 dilakukan di 25 titik pantau. Sebaran lokasi/titik pemantauan kualitas air laut di Bangka Belitung tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.2.10. Lokasi pemantauan kualitas air laut Tahun 2022
Sumber : Raport IKAL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa kondisi rata-rata perairan laut berada pada tingkat *good* (baik) dengan nilai indeks kualitas air laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 85,02 yang merupakan nilai rerata dari 25 titik sampling tersebut. Gambar 2.2.7 dibawah ini menunjukkan nilai

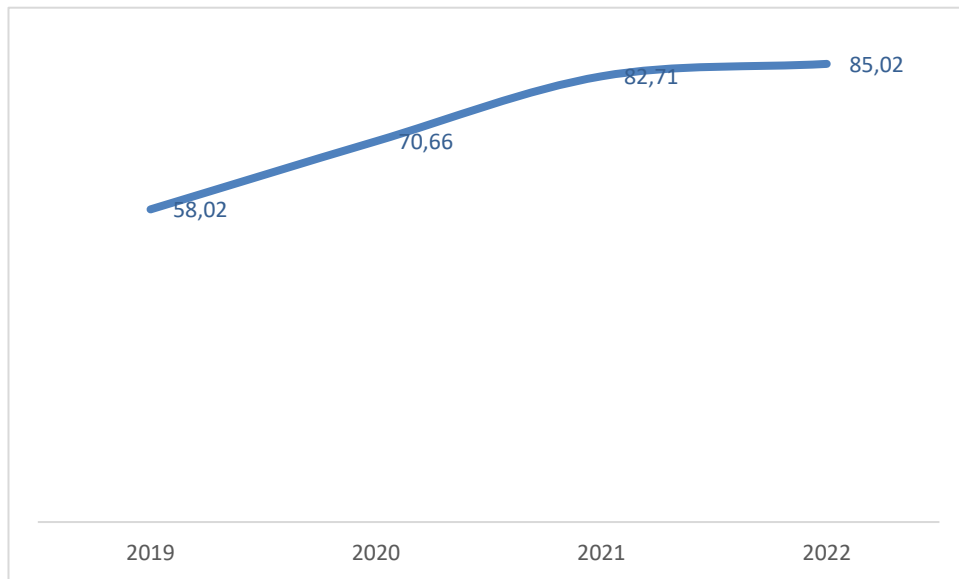
kualitas air setiap lokasi dan indeks kualitas air laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022.



Gambar 2.2.11 Kualitas air laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

Sumber : Raport IKAL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022

Meskipun kualitas air laut di Bangka Belitung masih menunjukkan nilai yang baik, namun berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat di pesisir pantai, termasuk kegiatan budidaya udang vaname yang meningkat pesat berpotensi menyebabkan terjadinya degradasi kualitas air laut di masa mendatang. Berbagai kegiatan di sepanjang pesisir laut akan menimbulkan berbagai jenis sampah dan bahan pencemar di laut, hal tersebut tentu dapat mengakibatkan degradasi lingkungan di wilayah pesisir dan ekosistem di sekitarnya. Sehingga, masuknya zat - zat organik dan anorganik ke badan air secara berlebihan, berdampak buruk pada perairan laut dan menyebabkan penurunan kualitas air laut secara fisik, kimia dan biologi (Hamuna et al. 2018). Gambar dibawah ini menunjukkan tren nilai indeks kualitas air laut tahun 2019 – 2022 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 2.2.12 Tren Nilai IKA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

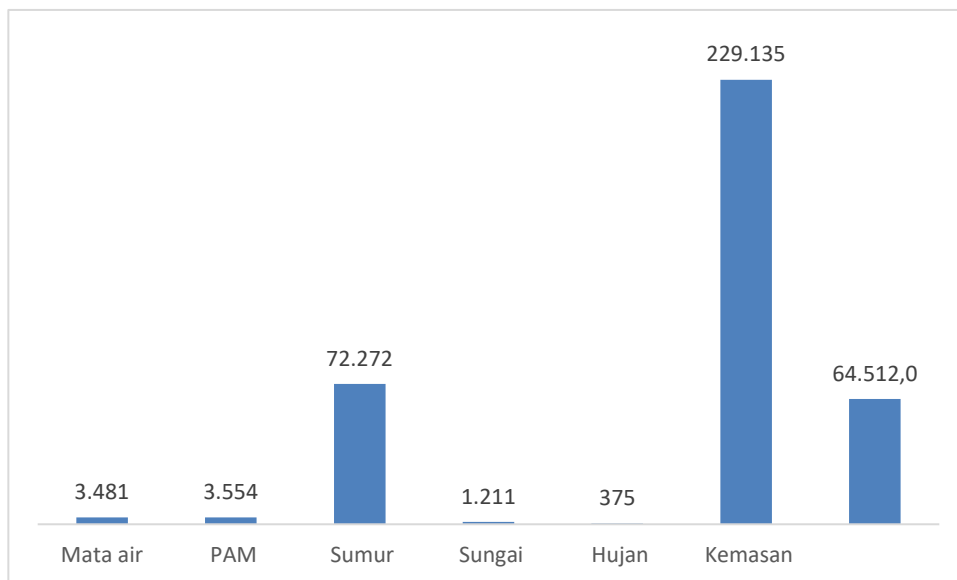
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

II.2.3.4 Sumber Air Minum Rumah Tangga

Meskipun ketersediaan air permukaan yang cukup besar, namun rendahnya kualitas air permukaan baik sungai maupun kolong tidak dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air minum. Sehingga sumber air minum yang digunakan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat beragam.

Penurunan kualitas sungai secara keseluruhan akan mengurangi pasokan air bersih yang dapat digunakan untuk keperluan domestik. Hal tersebut menyebabkan masyarakat harus mencari sumber air bersih lainnya, termasuk menggunakan air minum dalam kemasan sebagai salah satu alternatif lainnya. Sebagian besar masyarakat memilih menggunakan air minum kemasan. Air minum kemasan yang digunakan penduduk mayoritas adalah produk AMDK lokal yang berasal dari mata air maupun air tanah, sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk memenuhi keperluan air minum. Termasuk dalam kategori sumber air minum lainnya yang digunakan adalah air tanah yang diperoleh melalui sumur bor yang semakin banyak digunakan masyarakat.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 61,18% kepala keluarga menggunakan air minum kemasan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, sedangkan pengguna mata air, sungai, sumur dan air hujan sebagai sumber air minumnya digunakan oleh 20,6% kepala keluarga. Tingginya jumlah rumah tangga yang menggunakan air kemasan mengindikasikan rendahnya kualitas sumber air baik air sungai maupun air sumur. Sehingga masyarakat perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Jumlah kepala keluarga dan sumber air minum yang digunakan ditunjukkan dalam gambar dibawah ini.



Gambar 2.2.13. Jumlah Pengguna Sumber Air Minum Pada Rumah Tangga Tahun 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

II.2.3.5 Sampah di perairan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Salah satu jenis sampah yang harus dikelola dengan baik adalah sampah domestik, yaitu material buangan yang tidak lagi diinginkan berasal dari kawasan pemukiman, komersial, dan industri. Sampah domestik terdiri dari 12 golongan yaitu sisa makanan, kertas, nappies (diaper), sampah taman,

tekstil, karet dan kulit, logam, dan plastik. Peningkatan jumlah penduduk dan perubahan gaya hidup memicu peningkatan timbunan sampah. Sampah yang belum bisa diolah karena keterbatasan sarana dan prasana pengolahan sampah baik berupa TPA, bank sampah, TPS 3R serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah domestik dengan baik mengakibatkan sampah masih dibuang sembarang tempat, bahkan hingga memasuki perairan.

Dalam situs *Signsmart* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat 0,1% sampah yang dibuang ke kali/parit/laut. Apabila timbunan sampah pada tahun 2021 adalah sebesar 236815, 65 ton/tahun, maka 23.681,56 ton diantaranya akan berakhir di kali/parit/laut. Apabila timbunan sampah pada tahun 2022 sebanyak 209.974,83 ton, maka estimasi sampah yang dibuang ke kali/parit/laut adalah 20997,483 ton. Sampah yang dibuang ke kali/parit ini akan berakhir di laut.



Gambar 2.2. 14 Pencemaran Sungai Oleh Sampah Plastik

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Salah satu jenis sampah yang berdampak besar bagi lingkungan terutama badan air adalah sampah plastik, karena sebagian besar plastik yang digunakan saat ini tidak bersifat *biodegradable* (Vermaire *et al.* 2017). Mikroplastik secara umum digunakan untuk merujuk partikel plastik dengan diameter < 5 mm (Filella 2015; Lambert & Wagner 2017). Sejak

tahun 1970-an mikroplastik telah ditemukan pada sebagian besar badan air baik samudra, laut, danau, dan sungai (Masura *et al.* 2015).

Pencemaran oleh mikroplastik di Bangka Belitung pada tahun 2022 salahsatunya terjadi di Kabupaten Bangka Barat, yaitu di Sungai Desa Sukal dan Kolong Air Telabik dengan kelimpahan mikroplastik sebesar 40-82 partikel per 100 liter air. Sumber mikroplastik diduga berasal tempat penmbuangan sampah ilegal yang berada disekitar lokasi pengamatan. Partikel mikroplastik juga ditemukan di Sungai Baturusa dengan kelimpahan sebesar 94 partikel per 100 liter air. Partikel mikroplastik yang ditemukan dalam perairan tersebut didominasi partikel berupa fiber, fragmen maupun film (Ecoton, 2022).

II.2.4 Impact

II.2.4.1 Kerugian Ekonomi

Sumberdaya air merupakan sumberdaya yang *multi-purpose*, yaitu sumberdaya yang dapat dimanfaatkan secara luas dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk kepentingan tertentu misalnya pembangkit listrik dan irigasi. Untuk memanfaatkan sumberdaya air tersebut diperlukan berbagai sarana dan prasarana yang turut menentukan keberhasilan pengelolaan sumberdaya air. Menurunnya kualitas air menimbulkan berbagai kerugian bagi masyarakat sebagai penggunaan air itu sendiri, termasuk kerugian secara ekonomi.

Pada dasarnya, air merupakan barang publik (*common goods*), namun meningkatnya kebutuhan air dan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas air sehingga manusia mulai berpikir dan memandang air sebagai barang ekonomi (*economic goods*). Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air dijelaskan bahwa biaya pengelolaan sumber daya air ditanggung bersama oleh penerima manfaat melalui penerapan prinsip pembayaran penggunaan air dan prinsip pembayaran polusi atas dasar sistem subsidi silang menurut norma kelayakan umum. Biaya pengelolaan sumberdaya air ini akan digunakan

untuk keperluan perencanaan, operasional dan pemeliharaan agar sumberdaya air dapat dimanfaatkan secara *suistenable*. Biaya pengelolaan jasa sumberdaya air ini terutama akan dikenakan kepada pengguna air untuk keperluan usaha/komersial yaitu usaha industri rumah tangga, usaha industri pabrikan, usaha penyediaan air bersih baik pemerintah daerah maupun swasta, usaha pembangkitan energi tenaga air dan usaha lainnya (Kurniawan et al, 2022).

Peningkatan jumlah penduduk juga menyebabkan dampak negatif khususnya terhadap ekosistem. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan penduduk yang semakin bertambah. Penurunan kuantitas dan kualitas air tentu memerlukan adanya upaya pencegahan, penanganan dan pembaharuan (Lestari et al. 2021).

Salah satu komponen terbesar yang memerlukan pembiayaan dalam pengelolaan air ini adalah biaya eksternalitas, operasional dan perawatan. Termasuk dalam komponen ini adalah biaya pengelolaan kualitas air agar sesuai dengan kebutuhan kelompok penerima manfaat. Dengan demikian, kualitas sumber air akan sangat berpengaruh terhadap biaya, karena air dengan kualitas yang rendah, atau tidak memenuhi baku mutu air akan memerlukan biaya yang lebih besar dalam pengelolaannya. Peningkatan biaya pengelolaan air ini pada akhirnya akan meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh penerima manfaat.

Kualitas air yang tidak memadai untuk digunakan sebagai sumber air bersih juga menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Kerugian ekonomi bagi masyarakat bersumber dari peningkatan biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air. Tingginya jumlah rumah tangga yang menggunakan air kemasan mengindikasikan rendahnya kualitas sumber air baik air sungai maupun air sumur. Sehingga masyarakat perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan air bersih (Lestari et al. 2021).

Kandungan limbah yang berasal dari buangan limbah industri dan rumah tangga ini lambat laun mengakibatkan pendangkalan dan

penyempitan sungai. Pendangkalan sering menimbulkan banjir karena berkurangnya kemampuan (daya tampung) sungai untuk mengalirkan air hujan ke laut (Susmarkanto, 2002). Selain itu, terjadinya erosi dan sedimentasi di sungai memicu terjadinya kejadian banjir dan genangan air merupakan dampak penurunan kualitas air.

Secara teknis banjir adalah aliran air sungai yang mengalir melampaui kapasitas tampung sungai sehingga aliran air sungai tersebut akan melewati tebing sungai dan menggenangi daerah di sekitarnya (Asdak, 2022). Bencana banjir ini menimbulkan kerusakan pada ekosistem sungai dan kehidupan disekitarnya, menimbulkan kerugian secara ekonomi bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. Pada tahun 2022 terjadi sebelas kali kejadian banjir dan lima kali kejadian banjir rob di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Banjir tersebut berdampak kepada 767 kepala keluarga dan merusak fasilitas umum. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian banjir tentu menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit, termasuk biaya yang diperlukan untuk melakukan perbaikan terhadap sarana yang rusak.

II.2.4.2 Kerusakan Ekosistem Sungai

Loading limbah yang terus menerus terjadi, baik dari sektor domestik maupun dari sektor industri menyebabkan terjadinya pencemaran sungai. Dalam Undang-undang 32 Tahun 2009, pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan. Pencemaran sungai pada dasarnya berasal dari sumber *point source* misalnya outlet IPAL industri, dan sumber *non-point source*, misalnya buangan air limbah domestik, daerah pertanian, dan lain-lain.

Sungai merupakan salah satu ekosistem yang paling produktif dan beragam di dunia. Sungai menyediakan jalur air yang mengalir melalui berbagai jenis lingkungan, membentuk jaringan yang menghubungkan

daratan dengan lautan. Sungai dengan berbagai komponennya mulai dari substrat, kolom air, hingga riparian memiliki spesies khas tersendiri. Ekosistem sungai menyediakan habitat yang kaya akan keanekaragaman hayati. Terdapat berbagai spesies ikan, amfibi, serangga air, moluska, dan tumbuhan air. Keberagaman hayati ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menopang rantai makanan.

Pencemaran air di sungai menyebabkan terjadinya perubahan kondisi sungai akibat aktivitas manusia. Apabila kondisi ini terus berlangsung dan tidak diperhatikan, maka akan menyebabkan hilangnya sumber air bersih dan rusaknya ekosistem air (Khotimah dan Nasruddin, 2022). Perubahan kondisi fisik dan kimia perairan tersebut dapat mengubah keragaman komunitas makhluk hidup di sungai. Polutan atau bahan pencemar merupakan *stressor* bagi organisme-organisme tertentu (Merliyana, 2017). Hal tersebut dapat terjadi karena setiap spesies mempunyai batas toleransinya masing-masing, dan tidak semua organisme mampu bertahan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

Menurut Soegianto (2010) terdapat beberapa tingkat pengaruh pencemaran sungai sesuai dengan bahaya yang ditimbulkannya. Pengaruh tersebut adalah sebagai berikut :

Kelas 1 : Gangguan estetika (bau, rasa, pemandangan)

Kelas 2 : Gangguan atau kerusakan terhadap harta benda

Kelas 3 : Gangguan terhadap kehidupan hewan dan tumbuhan

Kelas 4 : Gangguan terhadap kesehatan manusia

Kelas 5 : Gangguan pada sistem reproduksi dan genetika manusia

Kelas 6 : Gangguan terhadap ekosistem utama



Gambar 2.2.15 Gangguan Estetik, Bau Dan Pemandangan Pada Sungai
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Kerusakan ekosistem sungai salah satunya ditandai dengan menurunnya keanekaragaman hayati di sungai tersebut. Wawancara dengan masyarakat setempat menyatakan bahwa pada saat ini banyak jenis-jenis ikan lokal yang mulai langka dan sulit ditemukan. Beberapa jenis biota perairan yang mulai sulit ditemukan di perairan misalnya Ikan Tilan (*Mastacembelus sp*), Ikan Baung Rasau (*Hemibagrus nemurus*), Ikan Tempala Biji Batu (*Parosphromenus bintan*), Ikan Seluang (*Rasbora einthovenii*), Ikan Belido putih (*Notopterus notopterus*), kura-kura air tawar dan lain-lain.



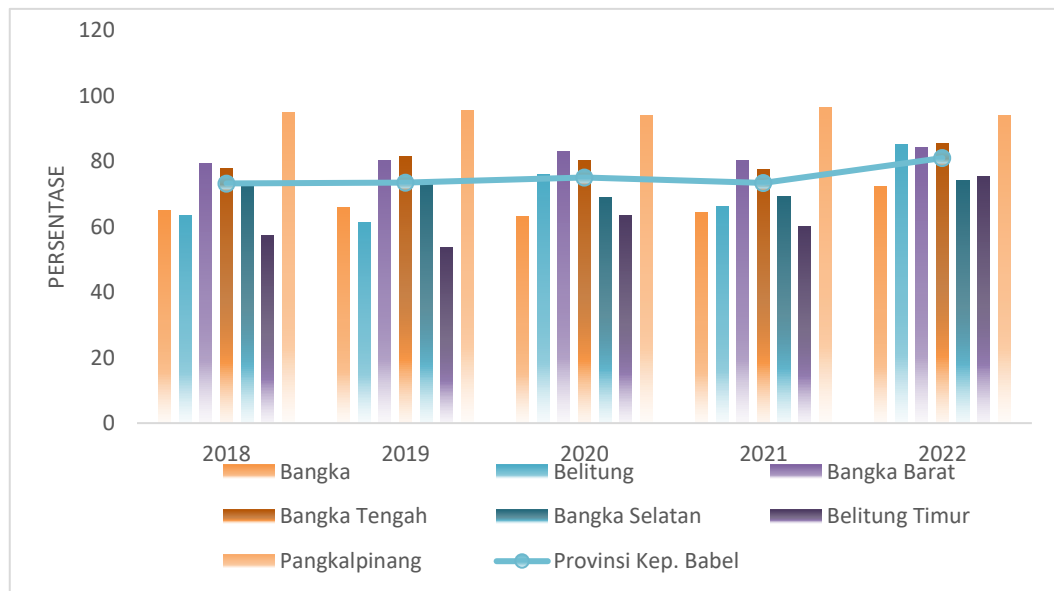
Gambar 2.2.16. Kura-Kura Air Tawar Di Kebun Raya Pangkalpinang

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

II.2.4.3 Penurunan Kesehatan Masyarakat

Kehidupan makhluk hidup sangat tergantung pada ketersediaan air. Mulai dari tingkat kehidupan terkecil yaitu sel, membutuhkan air. Bahkan 50-60% tubuh manusia terdiri dari air. Kuantitas pemakaian air berhubungan erat dengan tingkat risiko mengalami gangguan kesehatan. Semakin rendah pemakaian air, semakin tinggi risiko terjadinya gangguan kesehatan (Setioningrum Et al., 2020). Pertumbuhan penduduk yang pesat dan penurunan kualitas air menyebabkan akses terhadap air bersih menjadi terbatas. Hal tersebut salah satunya diindikasikan oleh tingginya penggunaan air kemasan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penjelasan teknis oleh BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2023) menyatakan bahwa sumber air minum layak yaitu sumber air minum utama yang digunakan meliputi ledeng, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung dan air hujan.



Gambar 2.2.17. Persentase Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak Tahun 2018 – 2022

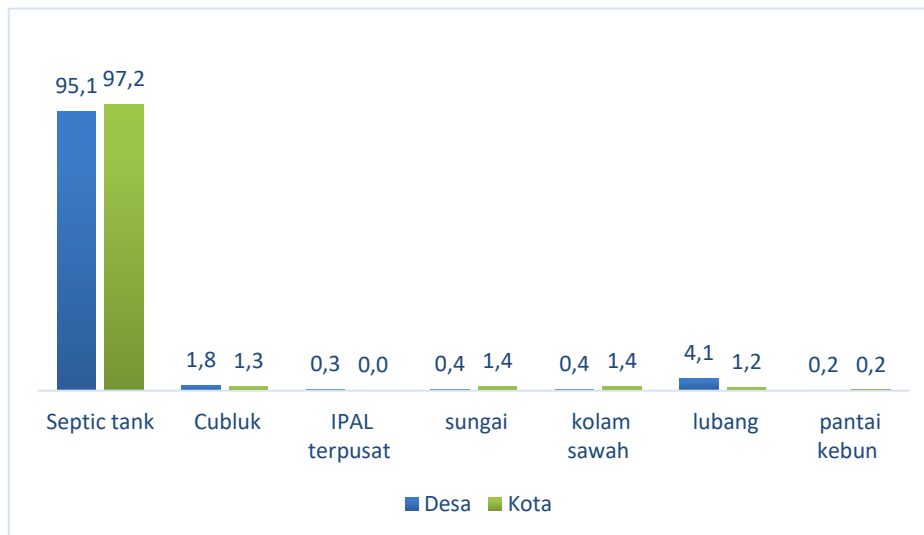
Penggunaan sumber air minum layak ini sangat penting untuk diperhatikan karena penggunaan air yang tercemar akan sangat mengganggu sistem kehidupan, karena makhluk hidup membutuhkan air dengan kualitas yang baik dan kuantitas yang cukup serta kontinyu.

Pada tahun 2022, sebesar 80,96% rumah tangga di Bangka Belitung telah memiliki sumber air minum yang layak. Rumah tangga dengan sumber air minum layak paling tinggi adalah di Kota Pangkalpinang yaitu sebanyak 93,96%, dan terendah adalah Kabupaten Bangka sebesar 72,23%. Secara umum jumlah rumah tangga dengan sumber air minum layak menunjukkan tren peningkatan, bahkan peningkatan ini terasa cukup signifikan antara tahun 2021 dan tahun 2022.

Peningkatan akses terhadap sumber air minum layak ini juga diikuti dengan menurunnya jumlah penderita diare di Bangka Belitung. Penyakit diare merupakan salah *satu waterborne disease* atau penyakit yang disebabkan karena konsumsi air dengan kualitas buruk. Water borne disease ini antara lain adalah kolera, *typhoid fever*, *paratyphoid fever*, disentri basiler, gastroenteritis, infantil diare dan leptospirosis (Tim Promkes RSST - RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, 2022). *Water borne disease* sendiri merupakan dampak dari keberadaan pathogen pada air menunjukkan kualitas air buruk. Pathogen dalam air diindikasikan oleh parameter *E. Coli* dan *Fecal coli* dalam pengukuran kualitas air. Oleh karena itulah parameter *E. Coli* dan *Fecal coli* dalam air minum harus 0 (nol). Hingga tahun 2020, diare merupakan salah satu penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat di Bangka Belitung. Penderita diare pada tahun 2019 mencapai 38.988 jiwa, dan terus menurun. Penurunan penderita diare ini merupakan dampak positif dari peningkatan rumah tangga dengan sumber air minum yang layak yang dilakukan melalui berbagai program.

II.2.4.3 Peningkatan Emisi GRK

Air limbah domestik yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat selain dapat menurunkan kualitas air, juga berkontribusi dalam menghasilkan gas rumah kaca berupa metana (CH_4) dan N_2O . Sementara air limbah industri akan menghasilkan metana. Air limbah domestik yang menghasilkan emisi GRK adalah air limbah yang tidak diolah, misalnya air limbah domestik yang masuk ke perairan, cubluk, dan lahan. Besarnya emisi GRK yang dihasilkan dari air limbah domestik ini dipengaruhi oleh persentase sarana pembuangan air limbah yang dilakukan masyarakat. Sarana pembuangan air limbah domestik di masyarakat pada tahun 2021 untuk masyarakat pedesaan dan perkotaan ditunjukkan dalam gambar dibawah ini.



Gambar 2.2.18. Sarana Pembuangan Limbah Domestik Tahun 2021

Gambar diatas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Bangka Belitung sudah melakukan pembuangan limbah domestik dengan menggunakan *septic tank*. Limbah domestik yang diolah dalam *septic tank* berasal dari buangan toilet yang biasanya berupa *black water* sedangkan air limbah dari kamar mandi dan dapur biasanya dialirkan melalui saluran drainase. Gambar ini juga memperlihatkan kecilnya persentase pengguna IPAL terpusat di kota maupun didesa, serta masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang membuang limbah domestik ke media lingkungan, yaitu

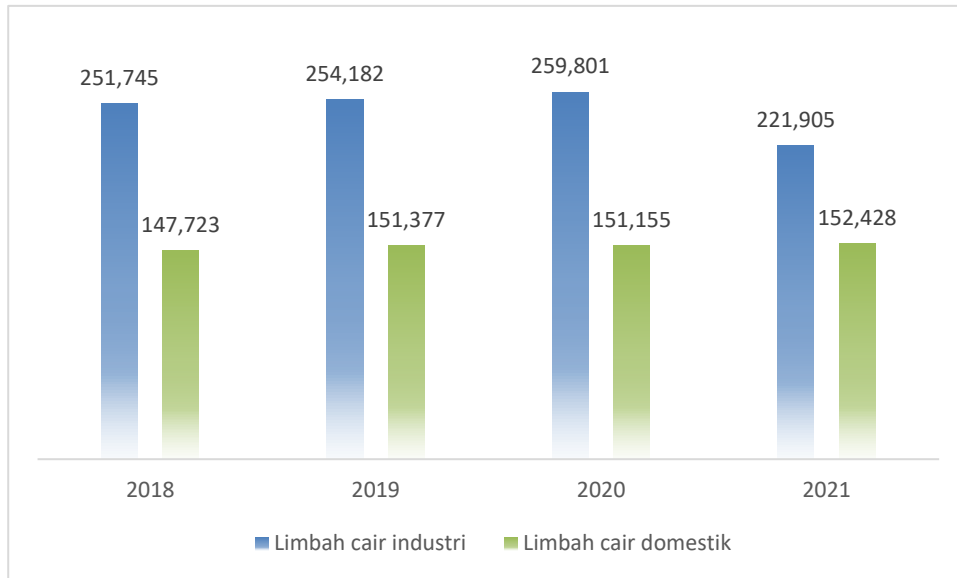
sungai kolam sawah, kebun dan pantai. Pengolahan limbah domestik yang tidak dilakukan melalui *septic tank* maupun IPAL ini kemudian akan melepaskan GRK ke atmosfer.

Dari sektor industri yang terdapat di Bangka Belitung, air limbah yang menghasilkan emisi GRK berasal dari industri pengolahan kelapa sawit dan industri pengolahan tepung yaitu pabrik tapioka. Data aktivitas yang digunakan adalah jumlah produksi dari masing-masing industri. Sehingga semakin besar produksi, akan menghasilkan air limbah yang lebih besar sehingga akan mengemisikan GRK yang lebih tinggi pula. Meskipun industri pengolahan kelapa sawit di Bangka Belitung sudah menerapkan *system land application* dengan mengembalikan air limbah ke lahan perkebunan, namun air limbah yang bersinggungan langsung dengan udara (aerob) masih menghasilkan emisi GRK ke udara.

Sebagai salah satu upaya untuk menurunkan emisi GRK yang dihasilkan dari air limbah pengolahan kelapa sawit dan tapioka, beberapa industri mulai menggunakan biodigester. Penggunaan biodigester ini akan berguna untuk menangkap metana yang dihasilkan dari pengolahan air limbah dan menghasilkan biogas. Biogas ini kemudian dapat dikonversi menjadi energi listrik untuk berbagai keperluan. Pada saat metana yang ditangkap dalam biodigester tidak digunakan, maka metana yang dihasilkan akan di flaring dan menghasilkan CO₂ yang memiliki GWP (*global warming potential*) yang lebih rendah daripada metana. Penggunaan biodigester untuk mengolah air limbah juga dilakukan pada industri tapioka. Hingga saat ini terdapat lima perusahaan pengolahan kelapa sawit dan tapioka yang memiliki biodigester di Bangka Belitung.

Pada tahun 2021, emisi GRK yang dihasilkan dari subsektor air limbah domestik adalah 221,905 Gg CO₂ Equivalen, sedangkan emisi GRK dari subsektor air limbah domestik sebesar 125,428 Gg CO₂ Equivalen. Emisi GRK dari subsektor air limbah domestik terus menunjukkan tren kenaikan. Peningkatan emisi ini dipengaruhi oleh besarnya volume air limbah yang di

produksi sektor domestik. Sedangkan emisi GRK dari air limbah industri sangat dipengaruhi oleh volume air limbah terproduksi.



Gambar 2.2.18 Emisi GRK yang dihasilkan sektor limbah cair (Gg CO₂ Eq)

II.2.5 Respons

II.2.5.1 Kebijakan dan Perencanaan

Kualitas air yang terus menurun perlu penanganan yang komprehensif serta memerlukan sinergi dengan berbagai pihak sesuai dengan perannya masing-masing. Salah satu peran pemerintah dalam upaya memperbaiki kualitas air adalah dengan membuat kebijakan dan perencanaan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait pengelolaan air adalah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 tentang pedoman pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan tambak udang, hal ini bertujuan sebagai bentuk antisipasi pencemaran perairan oleh usaha tambak udang yang marak terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baku mutu air dapat ditetapkan oleh menteri, gubernur maupun bupati sesuai kewenangannya. Baku mutu yang harus disiapkan termasuk baku mutu air limbah industri. Sebagiaian besar industri yang beroperasi di

wilayah Kepulauan Bangka Belitung merujuk pada baku mutu air limbah yang ditetapkan secara nasional oleh menteri, namun perkembangan saat ini menunjukkan tren peningkatan usaha/kegiatan budidaya udang, khususnya udang vanamae sehingga dipandang perlu oleh pemerintah daerah menetapkan baku mutu air limbah tersendiri bagi usaha/kegiatan ini. Salah satu ketentuan dalam Peraturan Gubernur tersebut adalah tentang baku mutu air limbah tambak udang, peraturan tersebut juga mewajibkan pelaku usaha/kegiatan tambak udang untuk menjaga kelestarian mangrove disekitar lokasi usaha sebagai cara untuk mencegah degradasi kualitas air dan lahan.

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN
AIR BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
BUDIDAYA TAMBAK UDANG.

BAKU MUTU AIR LIMBAH

A. BAKU MUTU AIR LIMBAH BUANGAN (*EFFLUENT*) TAMBAK UDANG

No.	Parameter	Satuan	Besaran
1.	Temperatur	°C	38
2.	Zat padat larut (TDS)	mg/L	2000
3.	Zat padat suspensi (TSS)	mg/L	200
1.	pH	-	6,0 – 9,0
	Besi terlarut (Fe)	mg/L	5
	Mangan terlarut (Mn)	mg/L	2
	Barium (Ba)	mg/L	2
	Tembaga (Cu)	mg/L	2
	Seng (Zn)	mg/L	5
	Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	mg/L	0,1
	Krom Total (Cr)	mg/L	0,5
	Cadmium (Cd)	mg/L	0,05
	Air Raksa (Hg)	mg/L	0,002
	Timbal (Pb)	mg/L	0,1

Gambar 2.2.19 Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020

Dari sisi perencanaan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki dokumen yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk sungai. Salah satunya adalah dokumen Rencana Aksi Pengelolaan Sungai Rangkui pada tahun 2019. Pengelolaan DAS melibatkan banyak pihak, baik pemerintah pusat yang di tingkat provinsi diwakili oleh BKSDA dan BPKH, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, lembaga swadaya masyarakat dan akademisi. Beberapa rekomendasi dalam dokumen rencana aksi pengendalian pencemaran sungai untuk pengendalian pencemaran Sungai Rangkui telah dilaksanakan oleh berbagai stake holder terkait dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2.8 Beberapa Rekomendasi Dalam Dokumen Rencana Aksi Pengendalian Sungai Rangkui

PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	STAKEHOLDER
Air Limbah industri melebihi baku mutu	Pengawasan ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya, pelaksanaan penegakan hukum,	Penerapan izin berbasis alokasi beban pencemar, Pemasangan alat pemantauan air limbah otomatis dan kontinyu, Reuse dan recycle air limbah	Dinas Deperindag, DLH Prov, KLHK, DLH Kab/Kota tergantung lokasinya
Tidak memiliki IPAL	Pengawasan dan pembinaan ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya, pelaksanaan penegakan hukum, Pembangunan IPAL Individu atau Kawasan	Pembangunan IPAL , Penerapan izin berbasis alokasi beban pencemar, Pemasangan alat pemantauan air limbah otomatis dan kontinyu, penegakan hukum, Reuse dan recycle air limbah	Dinas Deperindag, DLH Prov, KLHK, DLH Kab/Kota tergantung lokasinya
IPAL ada, operasi tidak sempurna	Pengawasan dan pembinaan ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya, pelaksanaan penegakan hukum	Pembangunan IPAL , Penerapan izin berbasis alokasi beban pencemar, Pemasangan alat pemantauan air limbah otomatis dan kontinyu, penegakan hukum, Reuse dan recycle air limbah,	Dinas Perindag, DLH Prov, KLHK, DLH Kab/Kota tergantung lokasinya
Regulasi belum optimal	Penyusunan regulasi yang memadai, Sosialisasi, pelibatan masyarakat	Sosialisasi, kampanye, monitoring oleh instansi DLH kab/kota, monitoring oleh masyarakat	Dinas Sosial, DLH Prov, KLHK, DLH Kab/Kota

Selain itu, pada tahun 2022 DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah melakukan penyusunan dokumen DDDTLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dokumen tersebut merupakan indikator keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dokumen DDDTLH juga berfungsi sebagai dasar bagi proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan, misalnya penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (RPPLH), penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pedoman bagi penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk semua bentuk aktivitas Kebijakan Rencana dan Program-program pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan air juga dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman (PUPR PRKP) pada tahun 2023 juga sedang melakukan penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

II.2.5.2 Pendidikan dan penyadartahuan

Kegiatan pendidikan dan penyadartahuan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan informasi tentang pengelolaan lingkungan, khususnya mengenai pengelolaan sampah secara baik dan benar, pelestarian ekosistem hutan, serta pengelolaan air limbah industri, dan lain-lain. Kegiatan pendidikan dan penyadartahuan ini dilakukan kepada generasi muda, siswa-siswa di sekolah, masyarakat umum dan LSM. Kegiatan ini juga seringkali dirangkaikan dengan aksi peduli lingkungan misalnya penanaman pohon, *world clean up day*, *coastal clean up* dan lain-lain. Pada tahun 2022, kegiatan penyadartahuan ini cukup intens dilakukan diberbagai

tempat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena mendukung program Hijau Biru BabelKu.



Gambar 2.2.20 Penyampaian Informasi Pengolahan Sampah Kepada Siswa
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023



Gambar 2.2. 21 Aksi bersih sampah bersama berbagai instansi
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

II.2.5.3 Program Peningkatan Hidup Bersih dan Sehat

Program Peningkatan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman (DPUPRPRKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Program ini merupakan program yang saling melengkapi dengan pelaksanaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Berbasis Masyarakat atau dikenal sebagai Pamsimas yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kota. Pamsimas adalah *platform* pembangunan air minum dan sanitasi pedesaan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Kegiatan PHBS ini bertujuan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan di kabupaten/kota sebagai solusi dalam penyediaan sarana air limbah domestik bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kegiatan PAMSIMAS biasanya berupa pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), sedangkan PHBS melakukan penyediaan jamban sehat dan bioseptiktank. Kegiatan juga bertujuan untuk meningkatkan akses air bersih pada masyarakat dan kepemilikan jamban sehat. Pada tahun 2022, di Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan program PHBS dengan melakukan pembangunan cubluk berupa jaringan jamban sehat dan bioseptik kepada 36 warga di Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka dan kabupaten Bangka Tengah. Melalui program ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan oleh air limbah domestik, terutama air limbah berupa *black water*.



Gambar 2.2.22 Jamban Sehat dan Bioseptic Tank Dibangun Melalui PHBS

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

II.2.5.4 Konservasi Air

Konservasi sumber daya air merupakan implementasi atau upaya penerapan hemat air yang berguna sebagai pengurangan konsumsi air yang berlebih dan bertujuan masih tersedianya kualitas dan kuantitas yang cukup untuk tercukupinya rasa kebutuhan akan air dalam jangka hidup yang dekat maupun yang akan datang. Konservasi sumber daya air sebagai salah satu upaya pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan dan keberadaan sumber daya air, termasuk daya dukung, daya tampung, dan fungsinya. Konservasi sumber daya air dapat dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, serta pengendalian pencemaran air, dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai, dan dipakai sebagai acuan dalam perencanaan tata ruang (PUSDIKLAT SDAK, 2017). Tujuan utama dilakukannya konservasi air ialah melestarikan air bersih dengan kegiatan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, mengurangi penggunaan air di rumah, sampai membangun sumur resapan air di perkarangan rumah.



Gambar 2.2.23 Konservasi Air Di Rumah Tangga Dengan Membuat Biopori Dan Penggunaan Kembali Air

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Upaya-upaya konservasi air di Bangka Belitung dilakukan oleh berbagai pihak sesuai dengan kapasitasnya. Upaya konservasi air di perumahan dan pemukiman masyarakat dilakukan dengan membuat biopori dan sumur resapan di halaman rumah, serta dengan melakukan penghematan penggunaan air untuk keperluan domestik. Kegiatan ini juga merupakan salah satu poin penilaian dalam Program Kampung Iklim (Proklim). Upaya konservasi air di rumah tangga juga dilakukan dengan pemanfaatan kembali air bekas.

Ditingkat masyarakat, upaya konservasi dilakukan dengan mengawetkan/menjaga sumber air. Upaya menjaga sumber air misalnya dilakukan oleh masyarakat di Desa Jelitik, Desa Bukit Layang Kabupaten Bangka, Desa Air Limau di Kabupaten Bangka Barat, dan lain-lain. Konservasi terhadap sumber air atau mata air dilakukan masyarakat dengan melakukan penanaman disekitar sumber mata air, serta membuat pelindung mata air. Konservasi air juga dilakukan oleh dunia industri dengan melakukan kampanye hemat air, serta menerapkan teknologi hemat air dalam proses produksi.



Gambar 2.2.24 Konservasi Sumber Air Di Lingkungan Masyarakat
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

II.2.5.5 Pemanenan Air Hujan

Pemanenan air hujan atau *rain water harvesting* didefinisikan sebagai suatu cara pengumpulan atau penampungan air hujan atau aliran permukaan pada saat curah hujan tinggi untuk selanjutnya digunakan pada saat dibutuhkan. Pemanenan air hujan merupakan salah satu bagian dari aplikasi konsep *Integrated Urban Water Resources Management* (IUWRM) untuk mengatasi masalah krisis sumberdaya air perkotaan. Salah satu teknik pemanen air hujan yang dapat dilakukan masyarakat adalah teknik pemanenan air hujan dengan atap bangunan (*roof top rain water harvesting*). Teknik ini dapat dilakukan secara individual di rumah warga (Harsoyo, B. 2010).

Pada dasarnya bagi warga masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemanenan air hujan ini merupakan salah satu kearifan lokal yang sudah dilakukan sejak dulu. Masyarakat Bangka Belitung memiliki kebiasaan menampung air hujan yang turun dari atap rumah atau pondok kebun untuk dimanfaatkan sebagai sumber air untuk keperluan mandi dan mencuci. Metode ini sejalan dengan *roof top rain water harvesting*. Pemanenan air hujan ini dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dengan menempatkan wadah penampung air di bawah atap, atau dengan membuat saluran air disepanjang atap dan dialirkan menuju wadah penampungan. Gambar dibawah ini menunjukkan pemanenan air hujan yang dilakukan masyarakat.



Gambar 2.2. 25 Pemanenan Air Hujan Mandiri Dirumah Warga
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Pemanenan air hujan ini merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan potensi air hujan, terlebih pada wilayah yang memiliki curah hujan tinggi dengan kualitas air hujan yang baik. Pemanenan air hujan ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan di Bangka Belitung, misalnya di Desa Bukit Layang, Desa Pulau Seliu, Desa Tanjung, dan lain-lain.

II.3 KUALITAS UDARA

Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya (PP 22 Tahun 2021). Kualitas udara ambien berperan penting terhadap kualitas kesehatan manusia. Kualitas udara dapat ditentukan dengan nilai Indeks Kualitas Udara yang dapat menunjukkan mutu udara ambien pada wilayah tertentu. Mutu udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan (PP 22 Tahun 2021). Standar perhitungan IKU mengacu pada kondisi rata rata konsentrasi NO_2 dan SO_2 sesuai dengan standar WHO yaitu $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ untuk NO_2 dan $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ untuk SO_2 .

Sumber pencemaran udara adalah setiap kegiatan manusia yang mengeluarkan pencemar udara ke dalam udara ambien. Pencemaran udara adalah masuk/dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu ambien yang telah ditetapkan (Permen LHK No. 5, 2021). Peningkatan penggunaan energi yang berasal dari bahan bakar fosil dan penggunaan transportasi telah berdampak terhadap penurunan kualitas udara perkotaan. Tingkat pencemaran udara tersebut dapat dikuantifikasi dengan metode perhitungan kualitas udara. Salah satu metode perhitungan adalah Indeks Kualitas Udara. Indeks Kualitas Udara dihitung menggunakan parameter gas yang dominan yaitu SO_2 dan NO_2 .

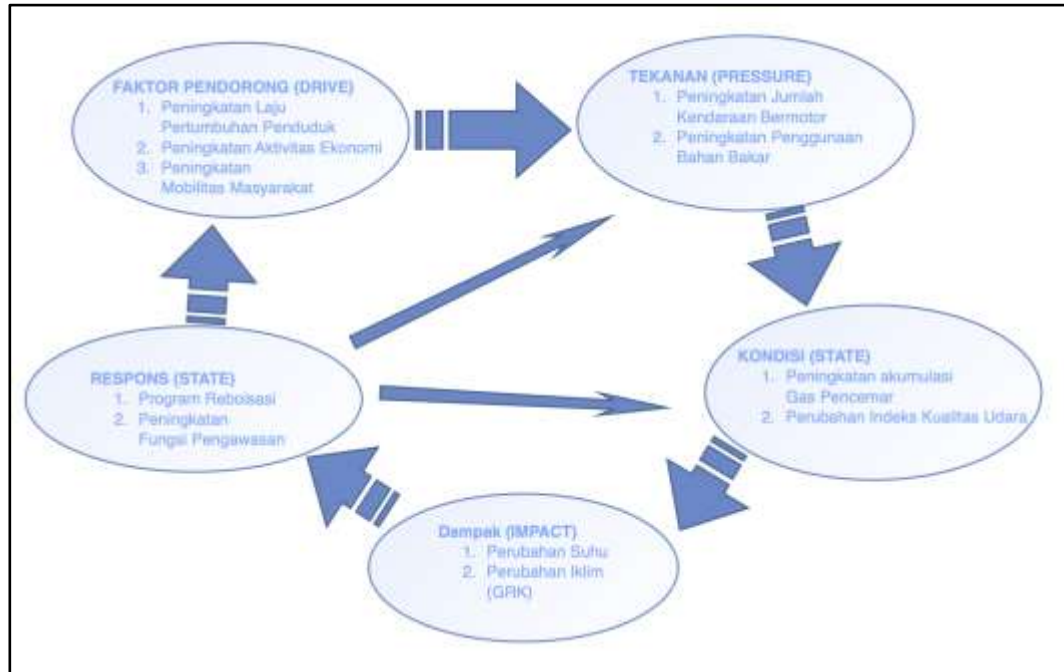
Aktivitas manusia merupakan tanda akan adanya penurunan kualitas udara di kota besar. Sektor transportasi merupakan sumber utama aktivitas manusia yang memiliki potensi terbesar dalam menurunkan kualitas udara ambien pada suatu daerah. Penggunaan bahan bakar pada system transportasi telah menyumbang lebih dari 37% penyumbang emisi gas yang berperan penting dalam penurunan kualitas udara (DIKLPHD Provinsi

Bangka Belitung, 2022). Energi yang digunakan oleh industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berbasis energi bersih yang dihasilkan dari sumber alamiah seperti air, angin maupun sinar matahari. Penggunaan energi pada aktivitas industri masih berbasis tenaga fosil yang berupa minyak bakar ataupun batu bara. Penggunaan energi fosil ini akan meningkatkan parameter utama yang berperan penting dalam menurunkan kualitas udara ambien yaitu SO_2 , NO_2 serta Oksidan ataupun partikulat.

Pada aktivitas transportasi, peningkatan jumlah kendaraan yang dimiliki masyarakat akan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah gas buang yang dihasilkan, sehingga menambah konsentrasi gas buang pada udara ambien yang berakibat penurunan kualitas udara perkotaan. Penggunaan BBM beroktan rendah akan cenderung menghasilkan tingkat polusi udara yang lebih tinggi daripada penggunaan BBM dengan oktan yang tinggi. Selain penurunan kualitas udara yang dihitung dari parameter SO_2 dan NO_2 , Peningkatan aktivitas pembakaran baik dari aktivitas industri dan perumahan akan turut menyumbang peningkatan emisi gas yang dilepaskan ke udara ambien. Dampak lain selain menurunkan kualitas udara ambien, pelepasan gas ke udara ambien juga akan meningkatkan emisi Gas Rumak Kaca (GRK), sehingga dampaknya adalah akan meningkatkan suhu rata rata tahunan. Aktivitas yang menghasilkan emisi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih didominasi oleh kegiatan transportasi, pembangkit listrik dan emisi yang berasal dari cerobong pembakaran pabrik. Industri spesifik pada wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dominasi oleh aktivitas peleburan timah pada *smelter* dan emisi *boiler* yang berasal dari pabrik CPO serta pembangkit listrik (PLTD) dan PLTU berbahan bakar batu bara. Penyusunan dan perhitungan indeks kualitas udara dapat difungsikan sebagai :

- Pelaporan kualitas udara yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang mudah dipahami kepada masyarakat tentang kondisi kualitas udara perkotaan.

- Memberikan informasi kualitas udara sehingga dapat dilakukan langkah preventif dalam mengendalikan kualitas udara perkotaan.



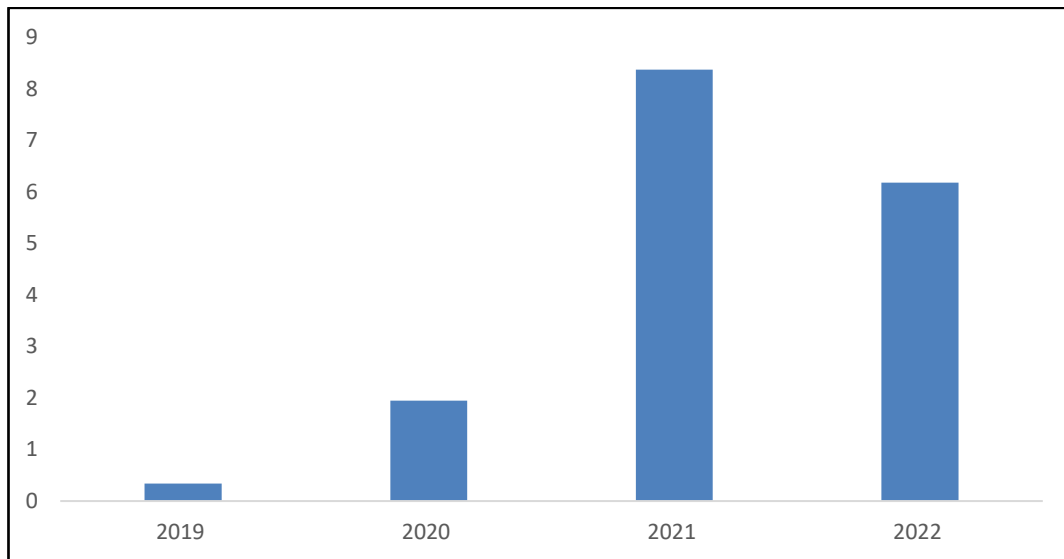
Gambar 2.3. 1 Visualisasi Skematik DPSIR Kualitas Udara.

II.3.1 Faktor Pendorong (Driving Force)

II.3.1.1 Pertambahan Penduduk dan Tingkat Ekonomi

Sumber pencemar udara adalah setiap kegiatan manusia yang mengeluarkan pencemar udara ke dalam udara ambien. Pencemar udara dapat berupa gas maupun partikel baik yang dihasilkan dari pembakaran ataupun kegiatan non pembakaran. Emisi yang dihasilkan dari gas buang hasil pembakaran merupakan sumber utama dalam penurunan kualitas udara. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka aktivitas produksi dan aktivitas masyarakat akan semakin meningkat. Peningkatan aktivitas produksi pasti akan dibarengi dengan peningkatan konsumsi energi sebagai faktor utama dalam kegiatan produksi. Peningkatan aktivitas ekonomi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dicermati dari data BPS terutama peningkatan PDRB menurut lapangan usaha. Laju PDRB berdasarkan data BPS dari tahun 2023

pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terlihat adanya perlambatan sebesar 2,19% dari tahun 2021.



Gambar 2.3. 2 **Pertumbuhan PDRB Provinsi Bangka Belitung**
Menurut Lapangan Usaha

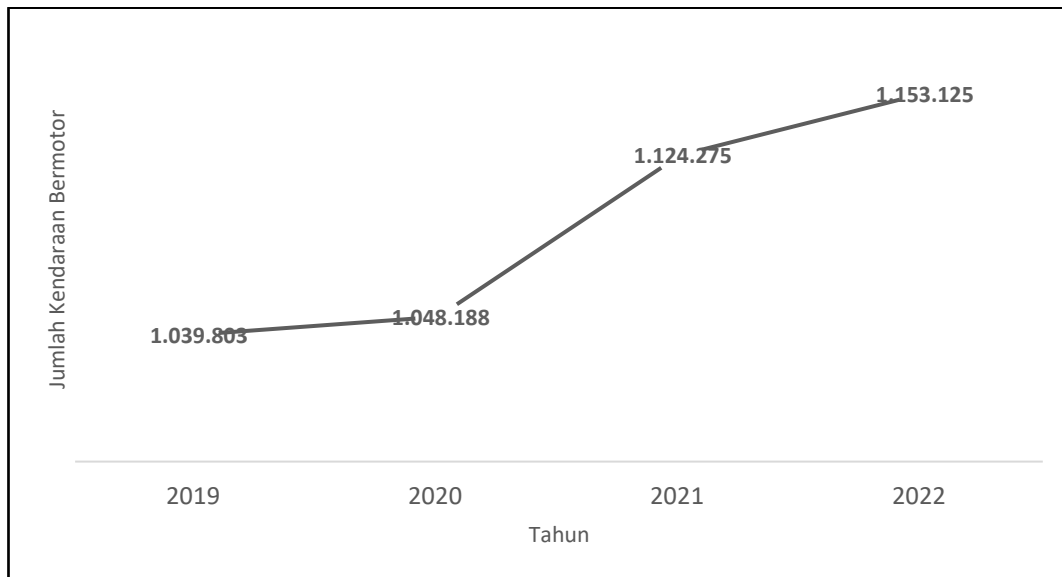
Sumber: Biro Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Pelambatan PDRB ini merupakan gambaran aktivitas ekonomi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PDRB menurut klasifikasi lapangan usaha ini memberikan gambaran bahwa dampak perlambatan ekonomi juga terjadi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perlambatan ekonomi ini merupakan gambaran aktivitas masyarakat terhadap kegiatan transportasi dan produksi.

II.3.1.1 Aktivitas dan Mobilitas Masyarakat

Sektor transportasi merupakan kegiatan yang menghasilkan sumber emisi yang signifikan dalam penentuan nilai kualitas udara. Pemantauan kualitas udara dari sumber transportasi dapat diketahui dengan pengambilan sampel pada lokasi pemantauan jalan raya. Emisi yang berasal dari sumber pembakaran dalam pada kendaraan bermotor akan menghasilkan gas pencemar seperti SO_2 , NO_2 , CO , HC dan partikulat khususnya untuk kendaraan dengan bahan bakar solar. Mobilisasi masyarakat

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang cenderung menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan umum semakin akan mendorong produksi gas pencemar yang dapat menekan kualitas udara ambien. Ketersediaan transportasi umum yang kurang menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan mode transportasi pribadi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



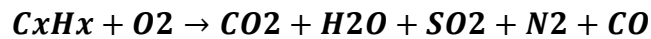
Gambar 2.3. 3 Pertumbuhan Kendaraan Bermotor di Provinsi Kep. Bangka Belitung

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan walaupun terjadi pelambatan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan tetapi terjadi kenaikan kepemilikan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2022. Kenaikan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 2,5% dibandingkan kenaikan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2020 ke 2021 yaitu sebesar 7,25%. Jika disimpulkan hubungan antara jumlah kendaraan bermotor dengan tingkat PDRB maka didapatkan nilai korelasi sebesar 0,891 dan berarti hubungan antara kepemilikan kendaraan bermotor dengan tingkat PDRB pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat tinggi, sedangkan nilai determinasi sebesar 0,794 mengindikasikan peningkatan kepemilikan kendaraan pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipengaruhi oleh laju PDRB sebesar 79,4%.

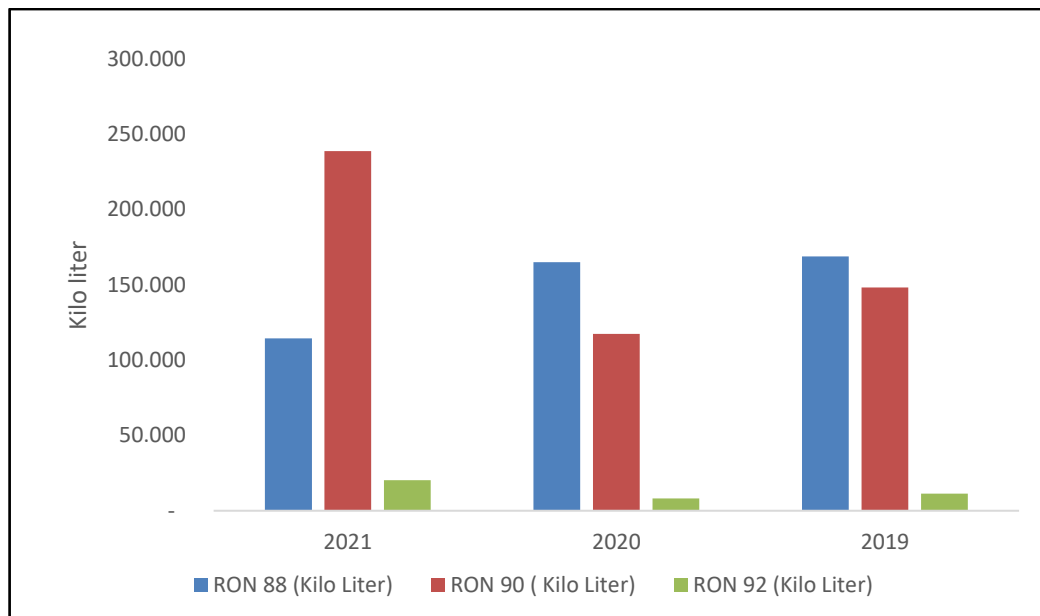
II.3.2 Tekanan (Pressure)

II.3.2.1 Kenaikan Penggunaan Bahan Bakar

Pembakaran menggunakan bahan bakar fosil baik berupa bahan bakar cair seperti bensin, minyak tanah ataupun solar akan menghasilkan gas pencemar udara seperti gas SO₂ dan NO_x. Untuk penggunaan bahan bakar padat seperti batu bara pada pembangkit listrik juga akan menghasilkan zat pencemar udara ditambah dengan peningkatan produksi GRK. Secara umum proses pembakaran sempurna akan ditunjukkan dengan reaksi berikut :



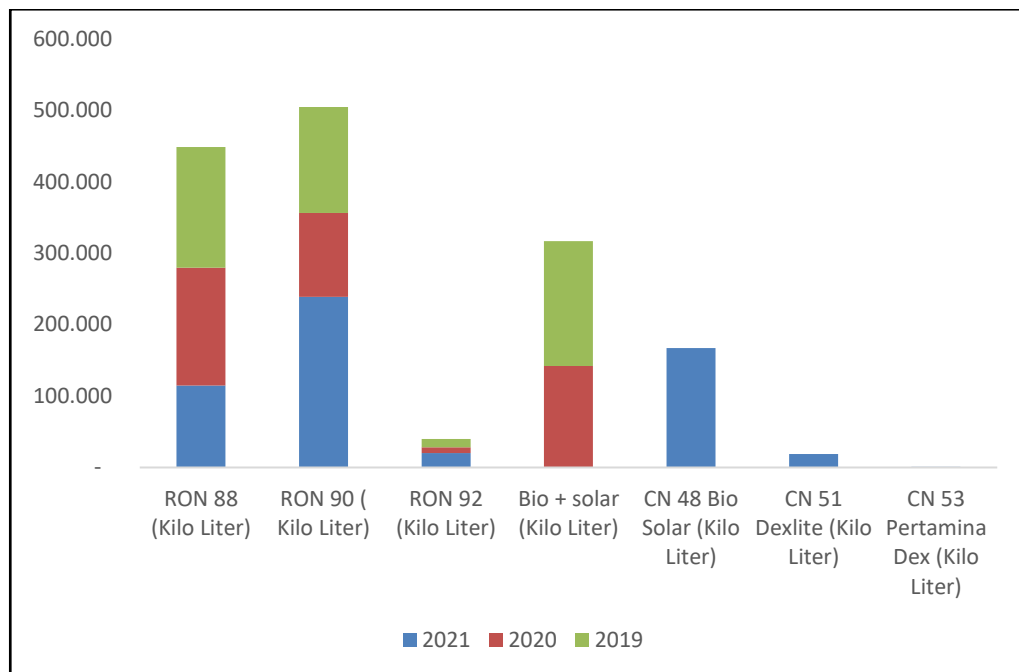
Kenaikan jumlah kendaraan bermotor akan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah bahan bakar yang digunakan. Peningkatan jumlah bahan bakar fosil yang digunakan akan menghasilkan sumber emisi sehingga menjadi faktor utama dalam menurunkan kualitas udara ambien. Tekanan dalam penggunaan energi berlebihan khususnya penggunaan bahan bakar fosil pada mode transportasi akan berdampak besar dalam menjaga kualitas udara ambien perkotaan.



Gambar 2.3. 4 Konsumsi Bahan Bakar Bidang Transportasi
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tentu akan meningkatkan penggunaan bahan bakar khususnya bensin dan solar pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kenaikan penggunaan bahan bakar pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 29,5%. Penggunaan bahan bakar untuk sektor transportasi tertinggi adalah menggunakan bahan bakar Pertalite Ron 90.

Selain pertambahan jumlah kendaraan bermotor, peningkatan aktivitas ekonomi juga mendorong peningkatan aktivitas industri. Peningkatan aktivitas industri tentu akan berdampak pada penggunaan listrik sebagai sumber tenaga. Pembangkit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat tergantung dari pembangkit yang berasal dari tenaga fosil seperti PLTU maupun PLTD. Pertumbuhan jenis industri baru seperti tambak udang ataupun pengolahan mineral logam ataupun nonlogam akan menambah kapasitas PLN dalam menyediakan kebutuhan listrik pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

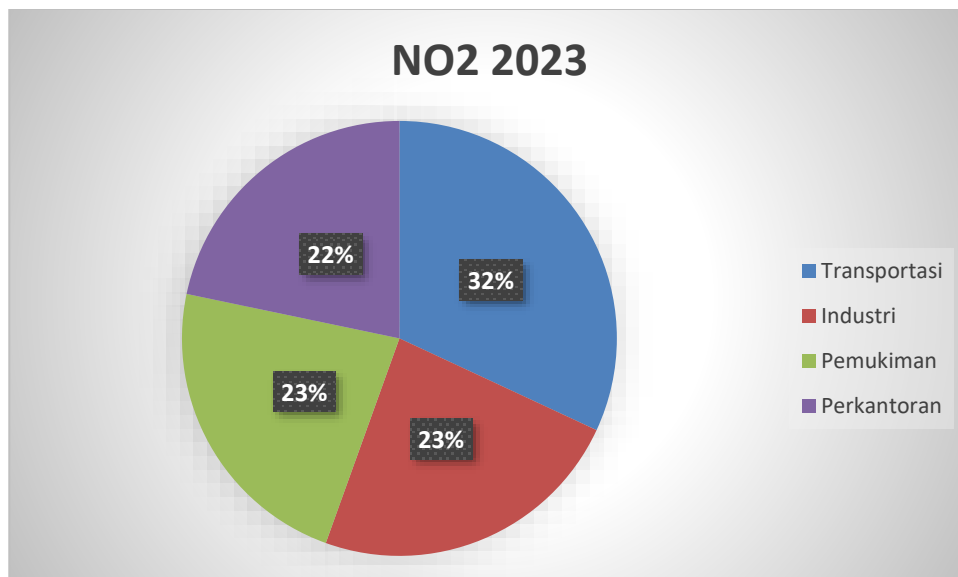


Gambar 2.3. 5 Konsumsi Bahan Bakar Bidang Energi
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

II.3.3 Kondisi (State)

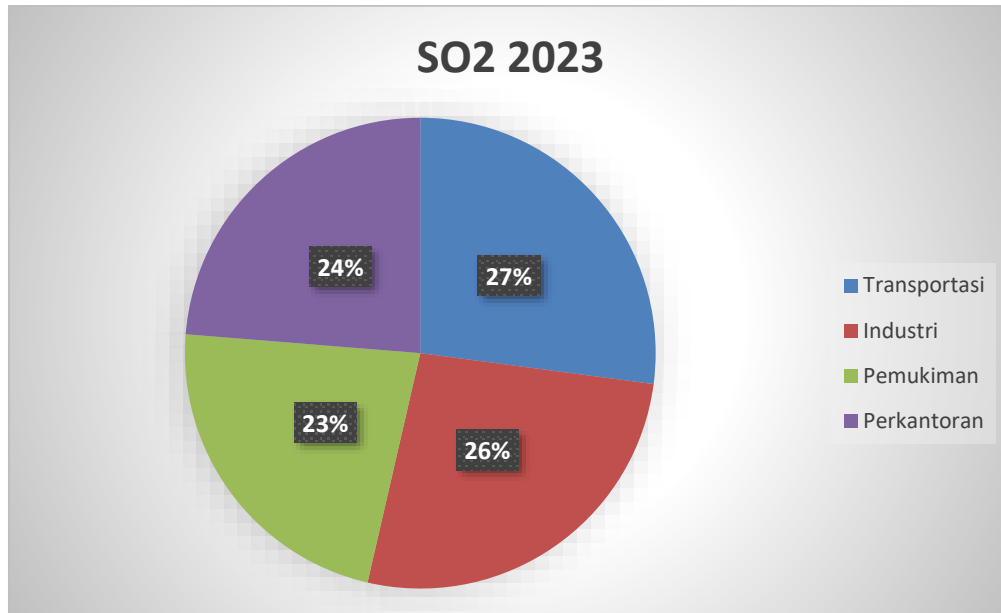
II.3.3.1 Potensi Kenaikan Gas Pencemar Udara

Sektor transportasi merupakan kegiatan yang menghasilkan sumber emisi yang signifikan dalam penentuan nilai kualitas udara. Pemantauan kualitas udara dari sumber transportasi dapat diketahui dengan pengambilan sampel pada lokasi pemantauan jalan raya. Emisi yang berasal dari sumber pembakaran dalam pada kendaraan bermotor akan menghasilkan gas pencemar seperti SO_2 , NO_2 , HC dan partikulat khususnya untuk kendaraan dengan bahan bakar solar. Berdasarkan dari pemantauan *passive sampler* yang dilakukan pada 4 jenis kegiatan yang mewakili aktivitas kota yaitu perumahan, perkantoran, industri dan jalan raya. Parameter yang dipantau adalah SO_2 dan NO_2 sebagai parameter penentu indeks kualitas udara. Hasil pemantauan udara didapatkan data sektor transportasi menyumbang 32%, sektor industri menyumbang 23% serta perumahan menyumbang 23% sedangkan perkantoran menyumbang 22% dalam penyumbang faktor emisi udara sumber gas NO_2 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tahun 2022.



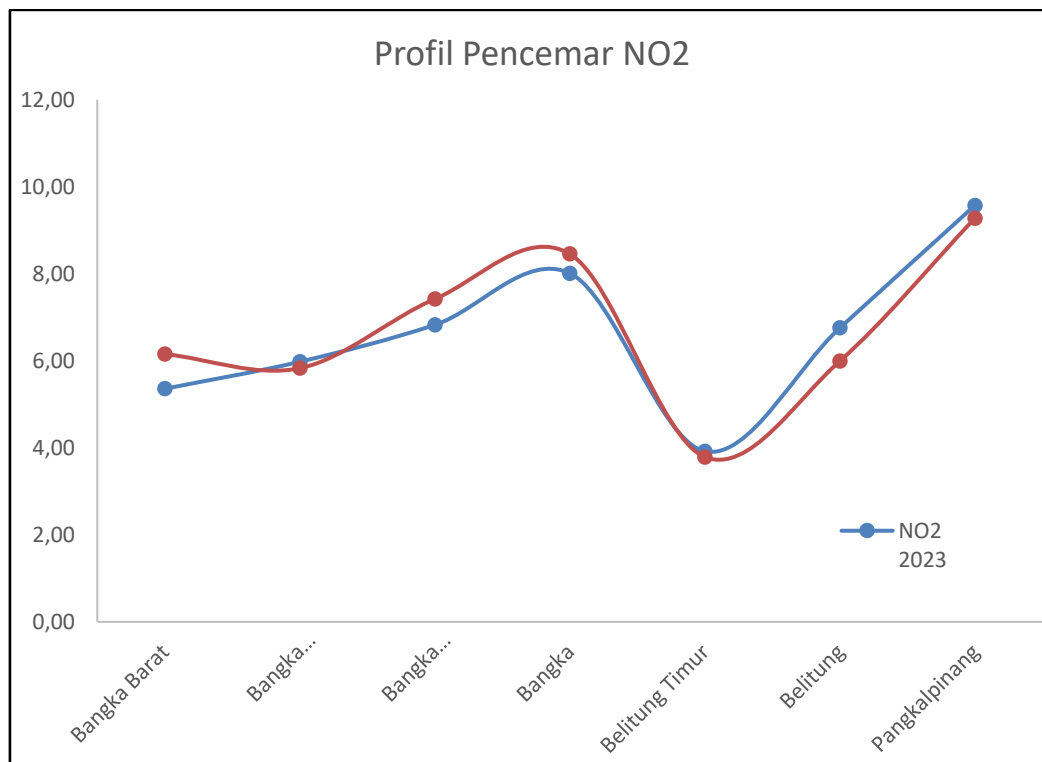
Gambar 2.3. 6 Sumber Pencemar Gas NO_2 Tahun 2023
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sedangkan untuk sumber pencemar gas SO_2 sektor transportasi menyumbang 27%, sektor Industri menyumbang 26%, sektor perkantoran menyumbang 24%, dan sektor pemukiman 23%.

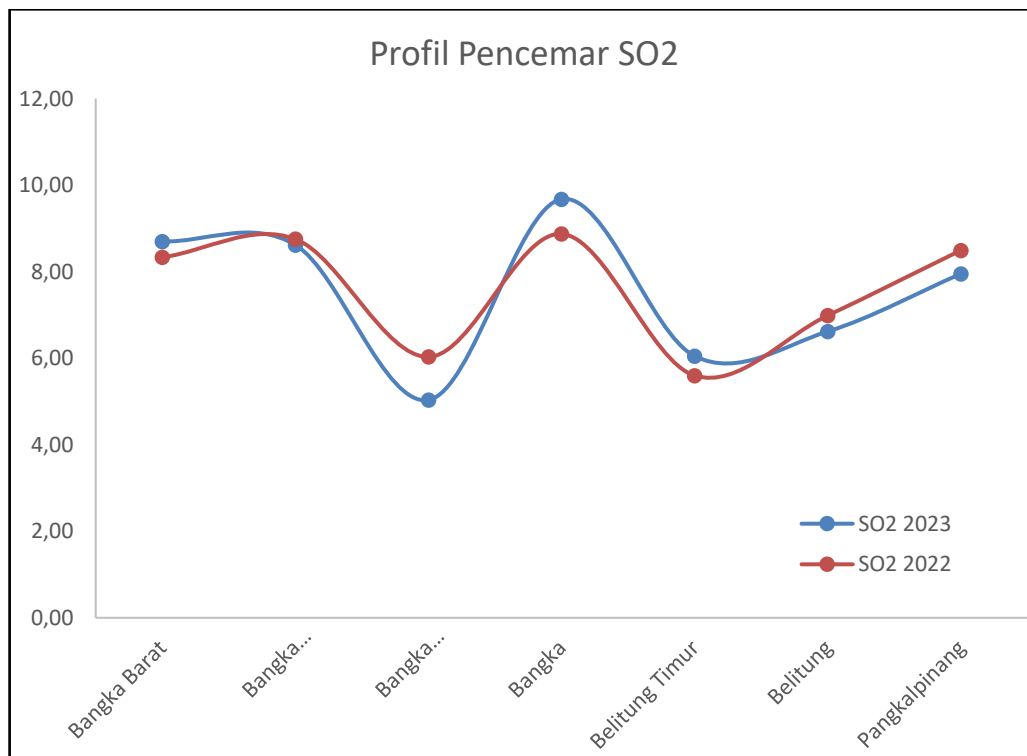


Gambar 2.3. 7 Sumber Pencemar Gas SO_2 Tahun 2023
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dari data diatas menunjukkan bahwa gas penyumbang penurunan indeks kualitas udara didominasi oleh sektor transportasi. Berdasarkan data pada tabel 2.3.3 menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,5% dari tahun 2021. Jenis kendaraan ini meliputi kendaraan bermotor, mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang. Jika di *breakdown* data gas pencemar yang dihasilkan pada masing masing kabupaten/kota untuk periode 2021 dan 2022 akan menunjukkan beberapa kenaikan maupun penurunan. Konsentrasi gas SO_2 dan NO_2 di udara ambien akan menentukan tinggi atau rendahnya indeks kualitas udara perkotaan. Semakin tinggi konsentrasi gas pencemar maka akan semakin rendah Indeks Kualitas Udara perkotaan dan sebaliknya semakin rendah konsentrasi gas pencemar yang berada di udara ambien maka semakin tinggi nilai Indek Kualitas Udara suatu perkotaan.

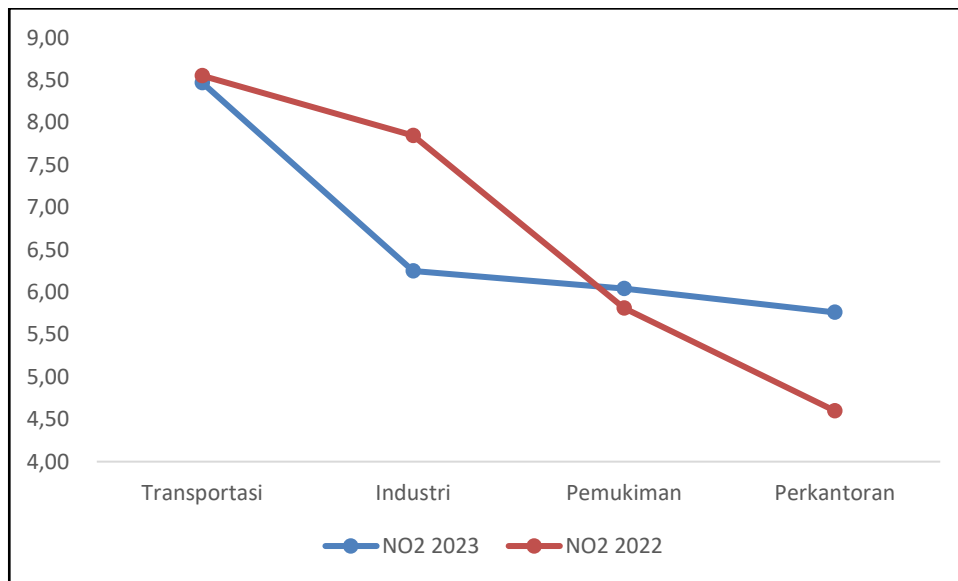


Gambar 2.3. 8 Profil Gas NO₂ Per Kabupaten/Kota Tahun 2023
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Gambar 2.3. 9 Profil Gas SO₂ Per Kabupaten/Kota Tahun 2023
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

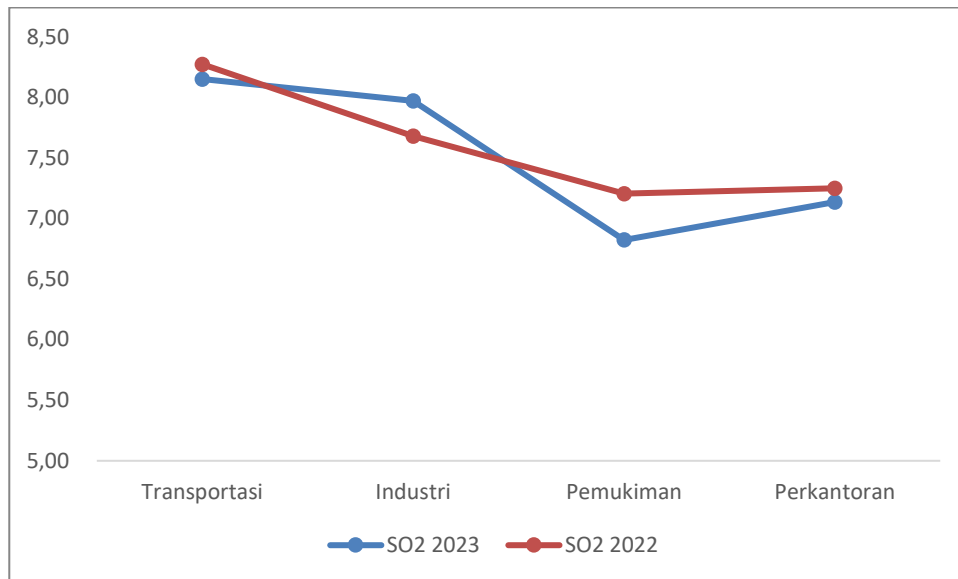
Jika dianalisis dari data profil gas pencemar pada tahun 2022 terdapat beberapa perbaikan pada rata rata konsentrasi gas SO_2 dan NO_2 . Konsentrasi rata rata gas NO_2 pada tahun 2023 turun sebesar 0,07 ppm dibandingkan dengan tahun 2022, sedangkan konsentrasi gas SO_2 turun sebesar 0,06 ppm. Terdapat 3 kabupaten yang mengalami penurunan konsentrasi gas NO_2 yaitu Kabupaten Bangka Barat sebesar 0,8 ppm, Kabupaten Bangka Tengah sebesar 0,59 ppm dan 0,44 ppm. Untuk kabupaten lainnya terdapat kenaikan konsentrasi gas pencemar NO_2 yaitu Kabupaten Belitung 0,76 ppm, Kota Pangkalpinang 0,29 ppm, Kabupaten Bangka Selatan 0,15 ppm dan Kabupaten Belitung Timur 0,13 ppm. Untuk gas pencemar SO_2 juga terdapat peningkatan dan penurunan di beberapa kabupaten/kota. Peningkatan tertinggi terjadi pada Kabupaten Bangka sebesar 0,8 ppm dan terkecil terjadi pada Kabupaten Bangka Barat sebesar 0,37 ppm.



Gambar 2.3. 10 Profil Gas NO_2 Berdasarkan Titik Pantau
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan titik pantau sumber konsentrasi gas pencemar pada sektor transportasi cenderung konstan/ tidak mengalami perubahan konsentrasi gas pencemar NO_2 . Jika dibandingkan dengan sektor industri konsentrasi gas NO_2 pada titik pantau industri turun 1,6 ppm, sedangkan

pada titik pantau pemukiman dan perkantoran konsentrasi gas NO_2 mengalami kenaikan masing masing sebesar 0,46 ppm dan 1,16 ppm.



Gambar 2.3. 11 Profil Gas SO_2 Berdasarkan Titik Pantau
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan titik pantau sumber konsentrasi gas pencemar pada sektor transportasi cenderung konstan/ tidak mengalami perubahan konsentrasi gas pencemar SO_2 . Jika dibandingkan dengan sektor industri konsentrasi gas SO_2 pada titik pantau industri naik 0,29 ppm, sedangkan pada titik pantau pemukiman dan perkantoran konsentrasi gas NO_2 mengalami penurunan masing masing sebesar 0,38 ppm dan 0,11 ppm. Perubahan kenaikan maupun penurunan gas pencemar ini dapat merupakan indikasi perubahan penggunaan bahan bakar pada industri maupun pemukiman dan perkantoran. Penggunaan listrik pada sektor industri dan perumahan cenderung akan menurunkan gas pencemar SO_2 .

II.3.3.2 Indeks Kualitas Udara

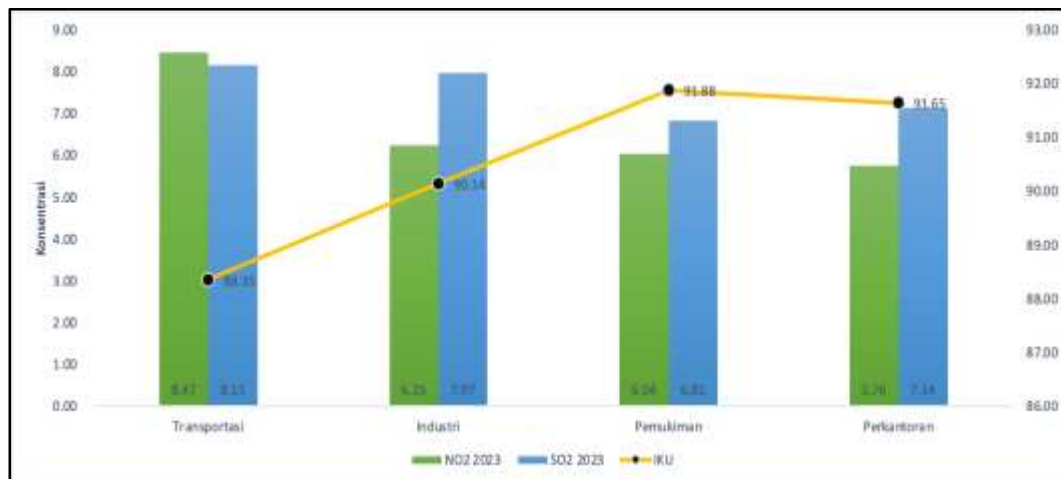
Perubahan konsentrasi gas pencemar yang diakibatkan oleh pembakaran baik pada sektor transportasi maupun energi dapat menentukan Indeks Kualitas Udara (IKU) ambien di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perhitungan Indeks Kualitas Udara Ambien dihitung

menggunakan parameter gas yang dominan yaitu SO_2 dan NO_2 . Standar perhitungan IKU mengacu pada kondisi rata rata konsentrasi NO_2 dan SO_2 sesuai dengan standar WHO yaitu $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ untuk NO_2 dan $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ untuk SO_2 . IKU dihitung berdasarkan dari pemantauan *passive sampler* yang dilakukan pada 4 jenis kegiatan yang mewakili aktivitas kota yaitu perumahan, perkantoran, industri dan jalan raya. Parameter yang dipantau adalah SO_2 dan NO_2 sebagai parameter penentu indeks kualitas udara.

Tabel 2.3. 1 Perhitungan Indeks Kualitas Udara
Di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2023

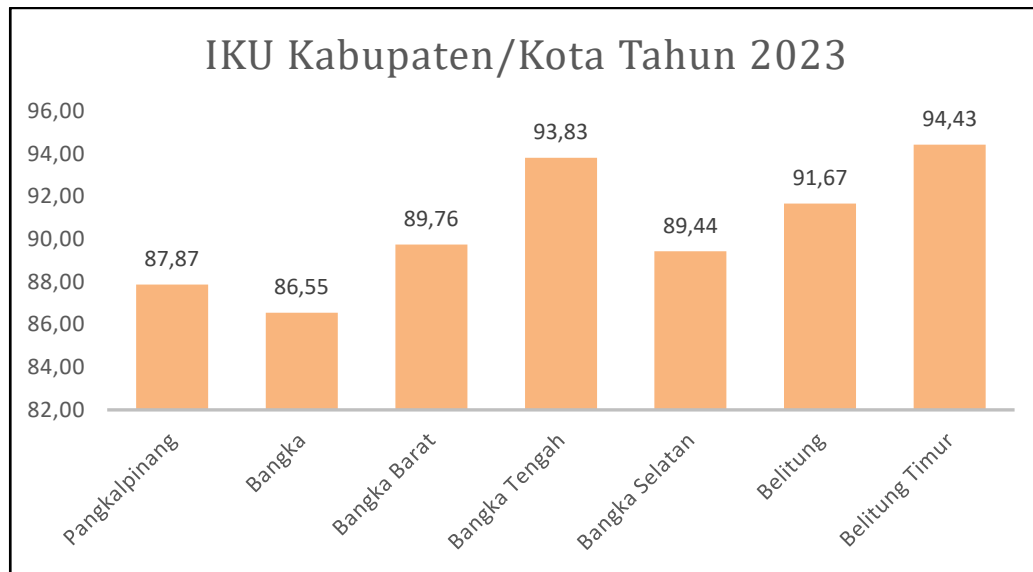
Parameter	Rerata Pemantauan	Baku Mutu	Index
NO_2	6,63	40	0,16575446
SO_2	7,51	20	0,37566071
Tanpa PM 2,5			
Indeks Udara (Indeks Annual Model EU-Ieu)			0,27070759
Indeks Kualitas Udara			90,52

Indeks Kualitas Udara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan hasil pemantauan *Passive Sampler* yang dilakukan selama 28 hari dalam satu tahun dan dilakukan pada 4 kegiatan yang mewakili suatu perkotaan yaitu transportasi, industri, perumahan, dan perkantoran serta mewakili musim hujan dan musim kemarau didapatkan nilai IKU untuk tahun 2023 sebesar 90,52. Nilai ini sedikit lebih baik daripada nilai IKU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 yaitu 90,37. Perbaikan nilai IKU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat disebabkan beberapa faktor diantaranya menurunnya konsentrasi gas pencemar pada beberapa kabupaten/kota.



Gambar 2.3. 12 Hubungan Indeks Kualitas Udara dan Konsentrasi Pencemar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi gas pencemar pada udara ambien maka indeks kualitas udara akan semakin kecil. Untuk sektor transportasi gas pencemar dominan adalah gas NO_2 sedangkan untuk sektor lainnya gas pencemar dominan adalah SO_2 . Gas pencemar NO_2 memiliki bobot pencemar lebih tinggi daripada gas SO_2 sehingga jika gas pencemar NO_2 tinggi di udara ambien maka indeks kualitas udara suatu daerah akan signifikan turun dibandingkan jika suatu daerah memiliki gas pencemar SO_2 yang lebih tinggi. Berdasarkan nilai Korelasi antara konsentrasi NO_2 dibandingkan dengan nilai Indeks Kualitas Udara didapatkan nilai -0,92. Ini artinya semakin besar nilai NO_2 maka semakin kecil nilai indeks kualitas udara. Untuk nilai determinasi hubungan antara gas NO_2 dengan Indeks Kualitas Udara didapatkan nilai 85,8%, sehingga dapat diartikan bahwa konsentrasi NO_2 sangat mempengaruhi nilai IKU. Untuk gas pencemar SO_2 juga terdapat hubungan yang kuat antara konsentrasi dan IKU sebesar 86,7%. Dengan nilai korelasi negatif yang didapatkan dari masing masing zat pencemar menunjukkan bahwa semakin besar nilai gas pencemar maka akan menurunkan IKU suatu daerah/kota.



Gambar 2.3. 13 Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota Tahun 2023
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bangka memiliki indeks kualitas udara terendah yaitu 86,55 dibandingkan dengan kabupaten lainnya, sedangkan Kabupaten Belitung Timur merupakan kabupaten dengan indeks kualitas udara tertinggi yaitu sebesar 94,43.

Tabel 2.3. 2 Kategori Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota Tahun 2023
Provinsi Bangka Belitung Tahun 2023

No.	Predikat	Nilai IKU	Jumlah Kabupaten	Kabupaten/ Kota
1.	Sangat Baik	$IKU > 91$	3	Bangka Tengah; Belitung dan Belitung Timur
2.	Baik	$81 \leq IKU \leq 91$	4	Bangka, Pangkalpinang, Bangka Barat dan Bangka Selatan
3.	Cukup baik	$71 \leq IKU \leq 81$	-	-
4.	Kurang Baik	$61 \leq IKU \leq 71$	-	-
5.	Sangat Kurang Baik	$51 \leq IKU \leq 61$	-	-
6.	Waspada	$IKU \leq 51$	-	-

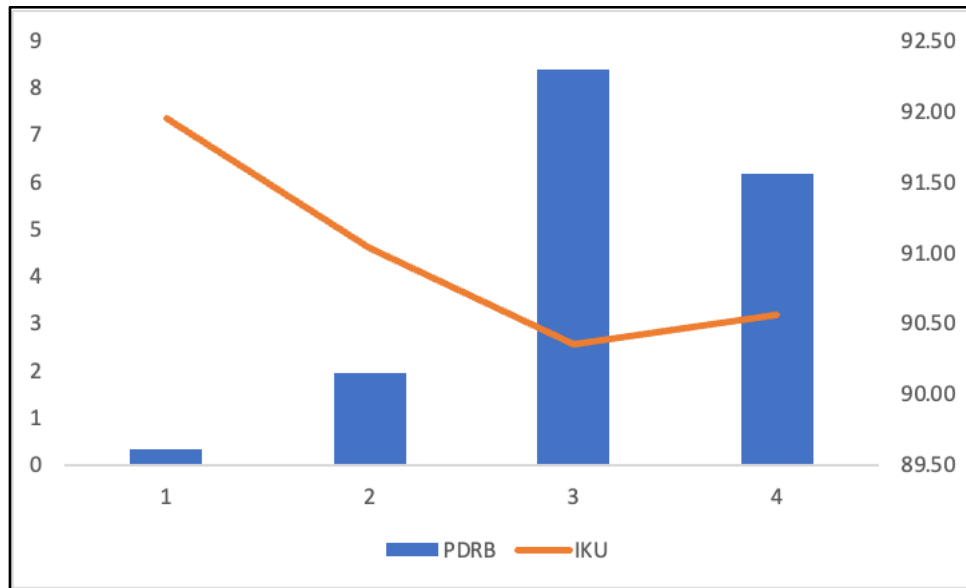
Berdasarkan tabel diatas dari 7 kabupaten/kota yang berada pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 3 kabupaten yang berada pada predikat sangat baik pada indeks kualitas udara tahun 2023 dan 4 kabupaten lainnya berada pada peringkat baik.



Gambar 2.3. 14 Profil Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

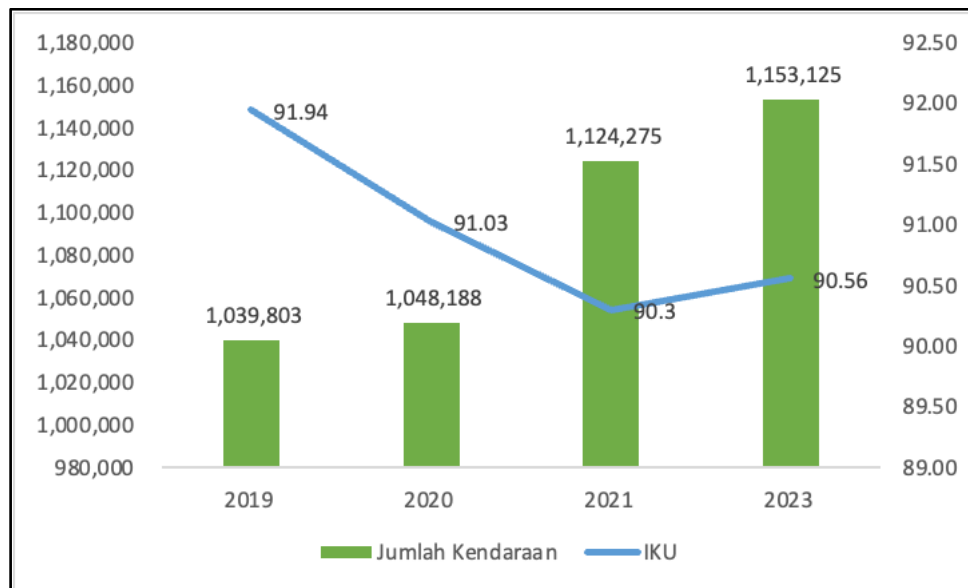
Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa pada Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur adalah kabupaten yang mengalami penurunan nilai indeks kualitas udara. Penurunan indeks kualitas udara terbesar terjadi pada Kabupaten Bangka sebesar 0,81, Kabupaten Belitung Timur sebesar 0,72 dan Kabupaten Belitung 0.01. Untuk empat (4) kabupaten lainnya terjadi kenaikan indeks kualitas udara masing masing kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Bangka Tengah sebesar 1,8, Kota Pangkalpinang 0,55, Kabupaten Bangka Selatan 0,08 dan Kabupaten Bangka Barat sebesar 0,05.

Kenaikan indeks kualitas udara pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat dipengaruhi oleh laju PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kenaikan jumlah kendaraan bermotor. Laju PDRB tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 2,19 dari tahun 2021, sedangkan dari pertumbuhan dari 2020 ke 2021 peningkatan PDRB sebesar 6,42.



Gambar 2.3. 15 Hubungan Indeks Kualitas Udara dengan PDRB
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan gambar diatas dapat dianalisis bahwa kenaikan PDRB akan menurunkan indeks kualitas udara pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Analisis berdasarkan nilai korelasi didapatkan sebesar -0,924. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PDRB maka indeks kualitas udara akan semakin kecil. Untuk nilai determinasinya didapatkan sebesar 85,5 %. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh PDRB terhadap indeks kualitas udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat tinggi. Penurunan laju PDRB pada Tahun 2022 sebesar 2,19 mampu menurunkan indeks kualitas udara sebesar 0,21.



Gambar 2.3. 16 Hubungan Indeks Kualitas Udara dengan Kendaraan Bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Hubungan antara kendaraan bermotor dengan penurunan nilai indeks kualitas lingkungan dapat ditunjukkan pada gambar diatas. Dari data diatas didapatkan nilai korelasi antara jumlah kendaraan bermotor dengan indeks kualitas udara sebesar $-0,83$. Artinya adanya korelasi yang kuat antara jumlah kendaraan bermotor dengan indeks kualitas udara pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Korelasi ini berbanding terbalik artinya semakin tinggi jumlah kendaraan bermotor maka semakin kecil indeks kualitas udara. Untuk nilai determinasi antara indeks kualitas udara dengan jumlah kendaraan bermotor sebesar $68,6\%$. Jumlah kendaraan bermotor masih berpengaruh kuat untuk menentukan indeks kualitas udara. Dari data kepemilikan kendaraan bermotor terjadi kenaikan sebesar $2,57\%$ dari tahun 2021. Akan tetapi jika dibandingkan dengan kenaikan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar $7,26\%$. Artinya walaupun terjadi kenaikan jumlah kendaraan bermotor tetapi laju kenaikannya hanya $2,57\%$ lebih kecil daripada laju kenaikan tahun sebelumnya yaitu $7,26\%$.

Berdasarkan data diatas maka dapat dianalisis bahwa terjadi perbaikan pada indeks kualitas udara di Provinsi Kepulauan Belitung terjadi karena adanya penurunan konsentrasi gas pencemar dan adanya

penurunan laju PDRB serta penurunan laju penambahan kendaraan bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

II.3.4 Dampak (Impact)

Peningkatan konsentrasi zat pencemar pada udara ambien dapat meningkatkan potensi peningkatan gas rumah kaca (GRK) yang ditandai dengan perubahan/pergeseran musim dan meningkatnya suhu. Sebaran gas SO₂ dan NO₂ yang dihasilkan dari proses pembakaran mesin industri, pembangkit listrik dan kendaraan bermotor merupakan sumber polutan utama yang menjadi zat pencemar pada udara ambien perkotaan. Tekanan penambahan beban pencemaran akan menurunkan kualitas udara perkotaan, sehingga akan menyebabkan penurunan kesehatan masyarakat.

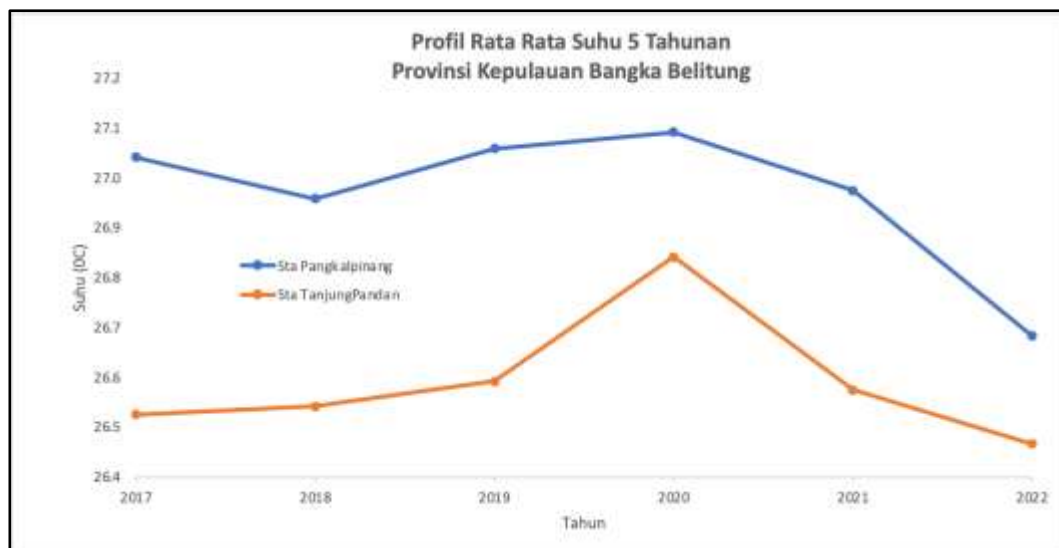
II.3.4.1 Perubahan Suhu Udara

Pergeseran musim hujan dan musim kemarau menjadi faktor penentu dalam keterwakilan data pemantauan udara. Hal ini disebabkan pada fase angin barat (musim hujan) angin akan mengandung banyak uap air dan lebih bersih sehingga hasil pemantauan udara ambien yang berupa gas NO₂ dan SO₂ akan cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan angin timur (musim kemarau). Pada musim kemarau udara akan bersifat kering dan cenderung akan berisi partikel debu, sehingga menyebabkan kualitas udara ambien cenderung akan lebih buruk. Tidak beraturannya musim hujan dan musim kemarau akan sangat mempengaruhi hasil pemantauan yang dilakukan dengan *passive sampler* dengan jumlah hari pemantauan yang minimal (28 data). Pada tahun 2022 DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak melakukan pemantauan secara manual aktif.



Gambar 2.3. 17 Profil Suhu Tahun 2022
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Tabel 37 data alam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 didapatkan bahwa suhu rata rata pada Kota Pangkalpinang sebesar 26.7°C dan pada Kabupaten Belitung sebesar 26.5°C . Suhu tertinggi dicapai pada rata rata suhu pada bulan Mei sedangkan rata rata bulanan terendah terjadi pada bulan Juni.

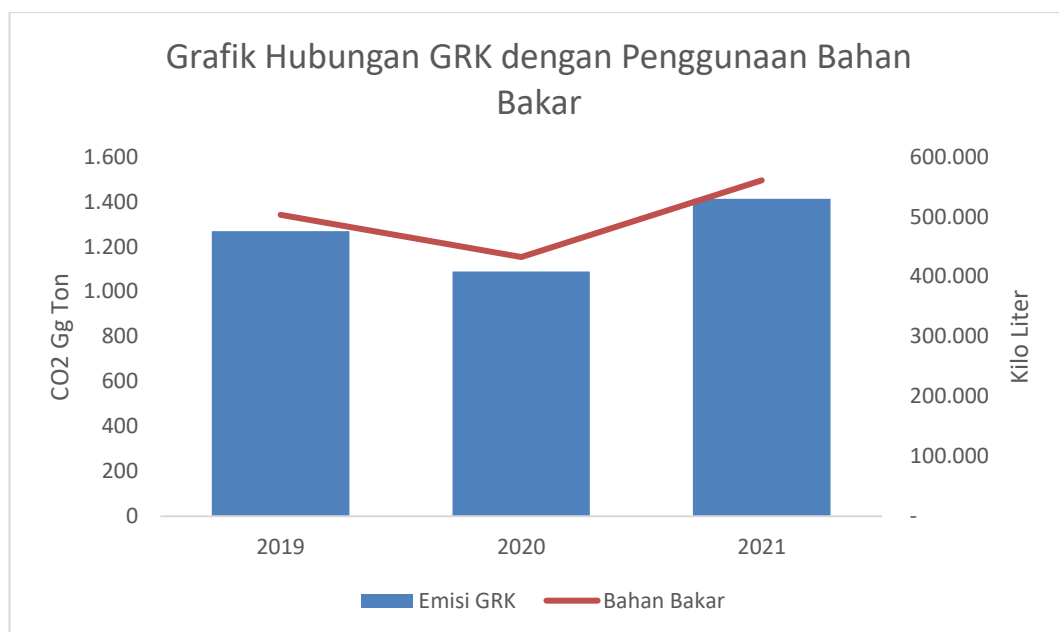


Gambar 2.3. 18 Profil Suhu Rata Rata 5 Tahun
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dari data diatas dapat disimpulkan rata rata suhu pada Kota Pangkalpinang lebih tinggi dari pada Kabupaten Belitung. Jika dihubungkan dengan indeks kualitas udara maka indeks kualitas udara pada Kota Pangkalpinang selalu lebih kecil daripada indeks kualitas udara di Kabupaten Belitung.

II.3.4.2 Gas Rumah Kaca (GRK)

Selain tekanan gas pencemar yang dapat menurunkan kualitas udara ambien, tekanan penggunaan bahan bakar fosil dapat mengakibatkan kenaikan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Berdasarkan data hasil inventarisasi emisi GRK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui <https://signsmart.menlhk.go.id/> terjadi peningkatan produksi Gas Rumah Kaca yang berasal dari sektor transportasi, khususnya transportasi darat. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan bahan bakar yang meningkat.



Gambar 2.3. 19 Hubungan Gas Rumah Kaca dengan Penggunaan Bahan Bakar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dari gambar di atas terlihat bahwa penggunaan bahan bakar bidang transportasi menunjukkan penggunaan bahan bakar terjadi peningkatan pada tahun 2021 dari pada tahun 2020. Hal ini mendukung data bahwa aktivitas masyarakat terutama sektor transportasi menjadi sektor yang menyumbang dalam peningkatan GRK. Gas *Nitrogen Oxide* (NO) dan

Nitrogen Dioxide (NO_2) adalah dua oksida oksigen yang paling penting dalam pencemaran udara. Gas NO_2 merupakan gas yang lebih berbahaya bagi kesehatan daripada NO, karena NO bersifat iritasi. Gas NO merupakan produk samping utama dari proses pembakaran yang timbul dari reaksi pada suhu tinggi antara N_2 dan O_2 . Gas NO juga dapat dihasilkan dari proses oksidasi yang terjadi pada pembakaran dengan menggunakan bahan bakar batubara dan minyak. Pada setiap pembakaran menggunakan bahan bakar minyak akan menghasilkan residu nitrogen sebesar 0,2 – 0,8% NO, sedangkan batu bara akan menghasilkan 1 – 2% NO. Konsentrasi gas hasil pembakaran ini akan terakumulasi di udara dan menyebabkan kenaikan gas rumah kaca, sehingga menimbulkan perubahan suhu dan iklim secara umum.

II.3.5 Respon (Response)

Berdasarkan *driving force, pressure, state dan impact* yang terjadi maka pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama perangkat daerah terkait melakukan langkah-langkah untuk mencegah penurunan kualitas udara perkotaan. Laju penambahan emisi yang menjadi sumber polutan utama dalam menentukan kualitas udara ambien merupakan tantangan dalam meningkatkan kualitas udara. Untuk menambah kualitas data yang akan digunakan dalam perhitungan IKU maka dilakukan beberapa kegiatan/program yang mendukung dalam pemuktahiran data pemantauan.

II.3.4.1 Program Penghijauan

Salah satu upaya PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Bapak Ridwan Djamaluddin dalam memperbaiki kualitas lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui program 'Hijau Biru Babelku' dengan aksi berupa kegiatan penanaman kembali pohon di lahan kritis akibat aktivitas pertambangan bersama seluruh lembaga pemerintah baik pusat

ataupun daerah, lembaga non pemerintah serta khususnya seluruh masyarakat provinsi kepulauan bangka belitung.



Gambar 2.3. 20 Aksi – Aksi Program Hijau Biru Babelku

Kegiatan ini diharapkan sebagai upaya perbaikan terhadap lahan kritis/lahan terbuka akibat kegiatan penambangan atau kegiatan lainnya sehingga mampu meminimalisir meningkatkan emisi gas rumah kaca dari lahan-lahan terbuka dan kedepan dari sektor kehutanannya ini dapat menyerap emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari sektor lain.

Selain itu, DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga terus-menerus memberikan pemahaman, sosialisasi serta membentuk kampung iklim di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, diantaranya aksi mitigasi berupa penghijauan ataupun perlindungan area hijau di Desa ProKlim (Program Kampung Iklim – KLHK). Pada tahun 2023 ini sudah terbentuk 34 lokasi ProKlim dengan rincian 20 lokasi yang berada atau berbatasan dengan kawasan hutan dan 14 lokasi di luar kawasan hutan dengan kategori Pertama, Madya dan Utama.

Tabel 2.3. 3 Lokasi ProKlim yang berbatasan/berdekatan dengan Kawasan Hutan

No.	Lokasi ProKlim	Nilai/Skor	KATEGORI PROKLIM
1	ProKlim Desa Mapur, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung	48,26%	Pertama
2	ProKlim Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	61,22%	Madya
3	ProKlim Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	58,95%	Madya
4	ProKlim Dusun I Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	49,73%	Pertama
5	Dusun Belit Desa Dendang Kecamatan Kelapa kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung	29,15%	Pertama
6	ProKlim Desa Tebing Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	21,95%	Pertama
7	ProKlim Dusun Kemang Masam Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	32,27%	Pertama
8	ProKlim Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	42,99%	Pertama
9	ProKlim Desa Beruas Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	30,39%	Pertama
10	ProKlim Dusun Namang Timur Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	73,88%	Madya
11	ProKlim Dusun 2 Desa Belilik Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	76,10%	Utama
12	ProKlim Dusun Timur Desa Puput Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	51,19%	Madya
13	ProKlim RW 003, Desa Serdang, Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	25,79%	Pertama
14	ProKlim Dusun 4, Desa Nangka, Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	36,35%	Pertama
15	ProKlim Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	37,33%	Pertama

16	ProKlim Desa Terong Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	40,02%	Pertama
17	ProKlim Desa Kacang Butor Kecamatan Badau Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	43,38%	Pertama
18	ProKlim Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	45,07%	Pertama
19	ProKlim Desa Jangkang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	45,09%	Pertama
20	ProKlim Desa Limbongan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	58,07%	Madya

Tabel 2.3. 4 Lokasi ProKlim di Luar berbatasan/berdekatan dengan Kawasan Hutan

No.	Lokasi ProKlim	Nilai/Skor	KATEGORI PROKLIM
1	ProKlim Desa Karya Makmur, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	55,85 %	Madya
2	ProKlim Dusun Air Tepala, Desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	66, 33 %	Madya
3	ProKlim Dusun 6 (Sidomulyo), Desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	68,83 %	Madya
4	ProKlim Desa Air Limau, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	66,61 %	Madya
5	ProKlim Desa Lampur, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	64,70 %	Madya
6	ProKlim Dusun Sampur, Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	66,72 %	Madya
7	ProKlim RW 03 Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	57,04 %	Madya
8	ProKlim RW 01 Kelurahan Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	57,06 %	Madya
9	ProKlim Desa Kulur Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	62,28 %	Madya

10	Proklam Desa Tukak, Kecamatan Tukak Sada, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	57,85 %	Madya
11	Proklam Desa Seliu, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	60,58 %	Madya
12	Proklam Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	47,18 %	Pertama
13	Proklam RW 02, Kelurahan Pasir Garam, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	67,29 %	Madya
14	Proklam RW 01. Kelurahan Lontong Pancur, Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	76,07 %	Utama



Gambar 2.3. 21 Contoh Kawasan Hijau di Lokasi Proklam Desa Air Limau, Kabupaten Bangka Barat

II.3.4.2 Peningkatan Kapasitas Pengawasan

Untuk menjamin terjaganya kualitas udara ambien pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara aktif memberikan persetujuan teknis untuk usaha yang akan melakukan aktivitas pembakaran yang berpotensi mengeluarkan emisi baik aktivitas pembakaran dari proses utama produksi maupun dari aktivitas pendukung kegiatan produksi. Pentingnya penilaian persetujuan teknis emisi ini terkait dengan pengelolaan dan perhitungan beban emisi yang akan dilepaskan ke udara oleh kegiatan industri yang ada di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung. Persetujuan teknis emisi udara untuk kegiatan industri yang akan membuang emisi merupakan amanat dari PP 22 Tahun 2022 yang telah dilengkapi Permen LHK No. 5 Tahun 2021. Kegiatan pengawasan terhadap industri ini khususnya terhadap emisi cerobong ditekankan pada kesesuaian metode teknis pengukuran emisi secara manual dan fasilitas sampling yang ada di cerobong. Kesesuaian metode dan cara sampling yang baik akan memberikan gambaran data beban pencemaran yang dihasilkan semakin sesuai dengan keadaan sebenarnya. Data beban pencemaran yang didapatkan dari laporan setiap industri dapat dijadikan tolak ukur beban pencemaran gas di udara ambien perkotaan.

II.IV Risiko Bencana

Risiko bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu potensi kerugian yang yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, serta gangguan kegiatan masyarakat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022-2026 yang merupakan pemutakhiran dari Kajian Risiko Bencana sebelumnya yang disusun pada periode tahun 2015-2020. Dokumen yang menginformasikan tingkat risiko bencana dengan komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana ini akan dimonitoring dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu jika terjadi kondisi ekstrem yang menyebabkan perubahan signifikan terhadap parameter-parameter risiko bencana tersebut.

Selain untuk melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penyusunan Dokumen KRB ini menghasilkan gambaran risiko bencana secara spasial yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan bidang kebencanaan dan perencanaan pembangunan wilayah lainnya. Hal ini sebagai upaya mewujudkan salah satu misi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yakni Meningkatkan Pengendalian Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup dengan sasaran untuk meningkatkan kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana serta dalam rangka mendukung visi “Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Meskipun upaya meningkatkan kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana merupakan salah satu sasaran pembangunan,

namun berdasarkan penilaian kapasitas pada KRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022-2026 menyatakan bahwa secara keseluruhan ketahanan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menghadapi potensi bencana masih memiliki indeks kapasitas daerah sebesar 0,31 yang menunjukkan tingkat kapasitas daerah yang rendah. Sejalan itu, hasil perhitungan indeks risiko bencana dalam Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022 oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih menempatkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 3 (tiga) besar provinsi berisiko paling tinggi dengan skor 158,52, hal ini menggembirakan setelah sebelumnya pada tahun 2021 menempati peringkat ke dua dengan skor 160,98, yang artinya indeks risiko bencana berhasil turun sebesar 2,46 poin.

Pembahasan risiko bencana kali ini akan dilihat dari sisi lingkungan hidup serta faktor lain yang menjadi permasalahan dan penyebab baik faktor pendorong, penekan, kondisi terkini, dampak-dampak yang terjadi, serta hal-hal yang dilakukan untuk mengatasi atau meminimalkan permasalahan lingkungan hidup oleh *stakeholders* yaitu pemerintah, swasta, serta masyarakat melalui kerangka kerja model *driving force-pressure-state-impact-respon* yang dibangun pada gambar 2.4.1.

Model *driving force-pressure-state-impact-respon* yang sering disebut dengan *DPSIR framework* ini mengadopsi *United Nations Environment Program* (UNEP) yang merupakan pengembangan dari model *pressure-state-respon* (PSR). Metode ini juga telah digunakan secara luas dan dikembangkan lebih lanjut oleh *European Environment Agency* (EEA). Menurut *United State Environment Protection Agency* (USEPA), 2015, kerangka DPSIR mampu menggambarkan dan mengkomunikasikan secara komprehensif berbagai permasalahan yang sangat kompleks. Bahkan seorang peneliti di Taiwan, Hsiang-Chieh Lee, pada 2013 mengembangkan dan membangun kerangka kerja DPSIR sebagai model untuk menganalisis risiko bencana di daerah Lusan Hot Spring, Taiwan, meskipun pada umumnya DPSIR dimanfaatkan dalam menganalisis permasalahan

lingkungan dengan komponennya yang mendeskripsikan bagaimana manusia mempengaruhi lingkungannya. Lee berkesimpulan bahwa model DPSIR ini dapat membantu peneliti mengeksplorasi penyebab bencana dan memeriksa manajemen risiko bencana dari sudut pandang berbeda. Di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah memanfaatkan model DPSIR secara luas untuk menggambarkan hubungan sebab akibat antara berbagai komponen dalam pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, lingkungan, serta sosial dan dinilai sangat relevan dalam pembahasan hubungan sebab akibat permasalahan lingkungan hidup, mempermudah para pengambil kebijakan untuk mengikuti informasi yang kompleks, dan selanjutnya dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup secara sistematis (KLHK, 2021).



Gambar 2.4. 1 Kerangka DPSIR untuk analisis risiko bencana
Sumber: Hasil Analisis, 2023

II.4.1 Driving force

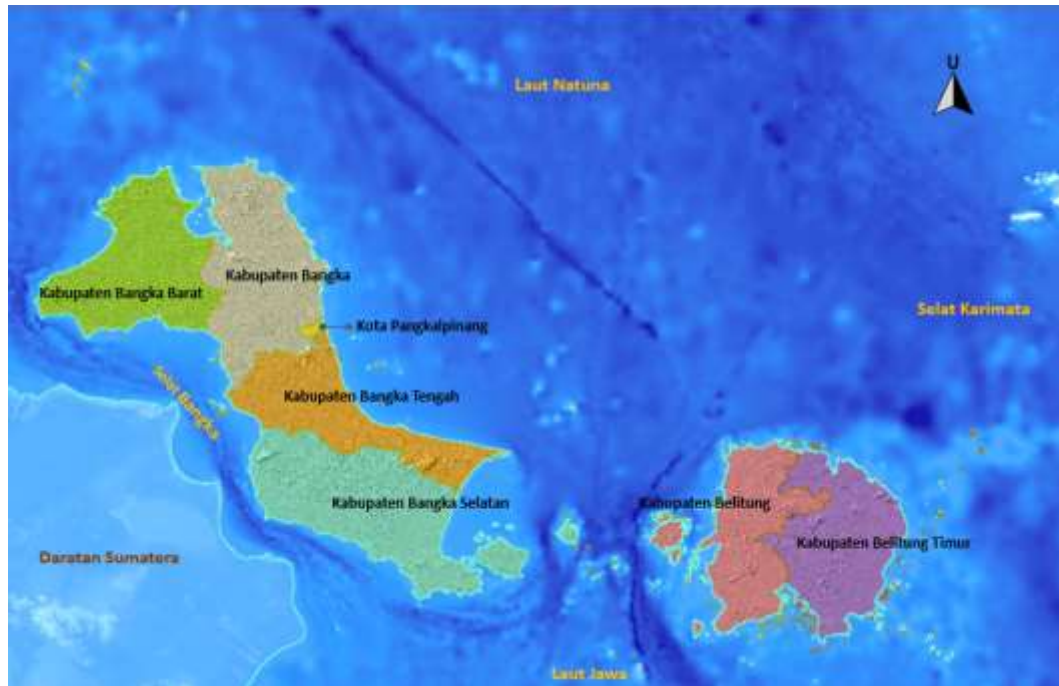
Driving force atau faktor pendorong merupakan penyebab potensial terjadinya permasalahan lingkungan yang kompleks dan sebagai pemicu tekanan (*pressure*). Pada analisis risiko bencana di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung sebagai faktor pendorong yaitu letak geografis, kondisi topografi, kondisi geologi, pertumbuhan penduduk, dan aktivitas ekonomi.

II.4.1.1 Letak Geografis

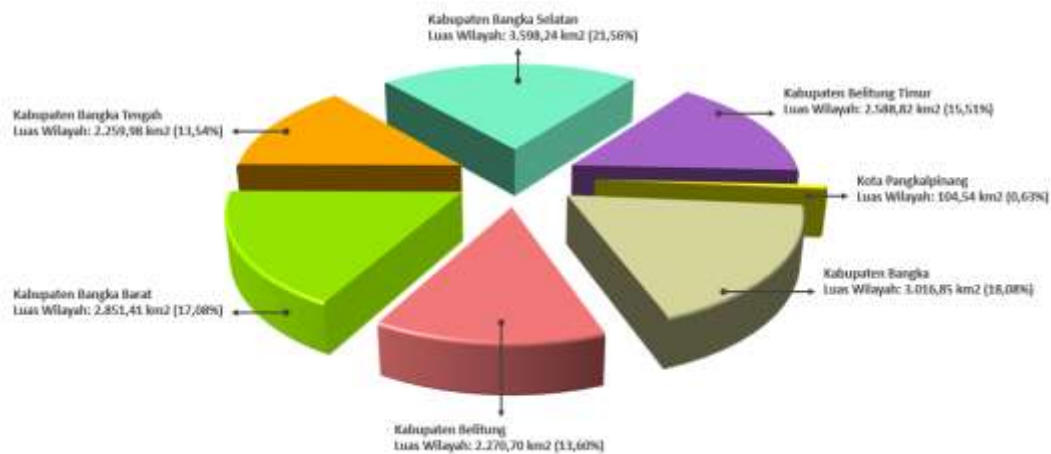
Menempati posisi astronomis $104^{\circ}50'$ sampai $109^{\circ}30'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}50'$ sampai $4^{\circ}10'$ Lintang Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki luas total mencapai $81.725,06 \text{ km}^2$. Meskipun demikian, provinsi ini didominasi oleh wilayah perairan laut dengan luas daratan kurang lebih $16.424,06 \text{ km}^2$, hanya seluas 20,10 persen dan selebihnya yang 79,90 persen atau kurang lebih 65.301 km^2 merupakan wilayah lautan (BPS, 2023). Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2021 mencatat wilayah daratan selain terdiri dari 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung, provinsi kepulauan ini juga memiliki 575 (lima ratus tujuh puluh lima) pulau kecil yang tersebar disekitar dua pulau utama tersebut. Penduduknya mayoritas menempati dua pulau besar yang terbagi dalam wilayah administrasi berupa 6 kabupaten dan 1 kota dengan luas wilayah terbesar yaitu Kabupaten Bangka Selatan, $3.598,24 \text{ km}^2$ dan luas wilayah terkecil adalah Kota Pangkalpinang, $104,54 \text{ km}^2$ (BPS Babel, 2023).

Berdasarkan posisi geografis, berdekatan dengan Pulau Sumatera, batas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bangka, sebelah Timur dengan Selat Karimata, sebelah Utara dengan Laut Natuna, serta sebelah Selatan dengan Laut Jawa. Kondisi geografis dan wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diamati pada gambar 2.4.2 dan 2.4.3.



Gambar 2.4. 2 Wilayah administrasi kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: DPUPRPRKP Babel, 2018, diolah



Gambar 2.4. 3 Perbandingan Luas Kabupaten Kota dalam Persen

Sumber: BPS Babel, 2023, diolah

Namun letak geografis dengan daratan yang dikelilingi lautan ini menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal pengelolaan sampah. Hasil studi Manajemen Persampahan pada Tahun 2018 menyatakan faktor pengangkutan yang harus melewati lautan menjadi kendala dalam pola

bisnis persampahan, tidak semudah seperti wilayah yang mayoritas merupakan daratan. Persoalan biaya menjadi salah satu kendala yang dipandang tidak sepadan dengan nilai jual sampah. Masalah lain yang disebabkan adanya perairan yang luas membuat masyarakat lebih permisif untuk membuang sampah ke laut.

Menurut Arinda, 2020, Ketua BECAK (Bangka Environment Creative Activist of “Kawa”) yaitu komunitas yang aktif membersihkan pantai Bangka dan berdiri sejak 2015, hampir semua pantai di Bangka yang pernah dikunjungi terutama daerah pesisir Lintas Timur Bangka tidak pernah benar-benar bebas dari sampah baik organik maupun nonorganik. Selama mengumpulkan sampah di pesisir Lintas Timur ini masing-masing titik berhasil terkumpul sampah minimal 1,3 ton. Jenis sampah terutama berasal dari rumah tangga, nelayan, serta wisatawan yang berkunjung. Bahkan di Pulau Nangka yang terletak di Selat Bangka, setiap bulan September hingga Desember terjadi penumpukan sampah dalam skala besar di garis pantainya yang dapat dipastikan 90 persen berasal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Tiongkok. Selain bulan-bulan tersebut sampah akan hanyut ke laut lepas. Pada Januari 2021, Kapolres Belitung saat itu, AKBP Jojo Sutarjo, SIK, MH, bersama Wakapolres, Kabag, dan seluruh Personil Polres Belitung Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan petugas kebersihan desa melaksanakan kurve hanya kurang lebih 2 (dua) jam berhasil mengumpulkan 7 (tujuh) ton sampah atau 1 (satu) truk sampah baik organik maupun nonorganik yang kemudian dibawa ke TPA Terafo Mayang, Kecamatan Damar.

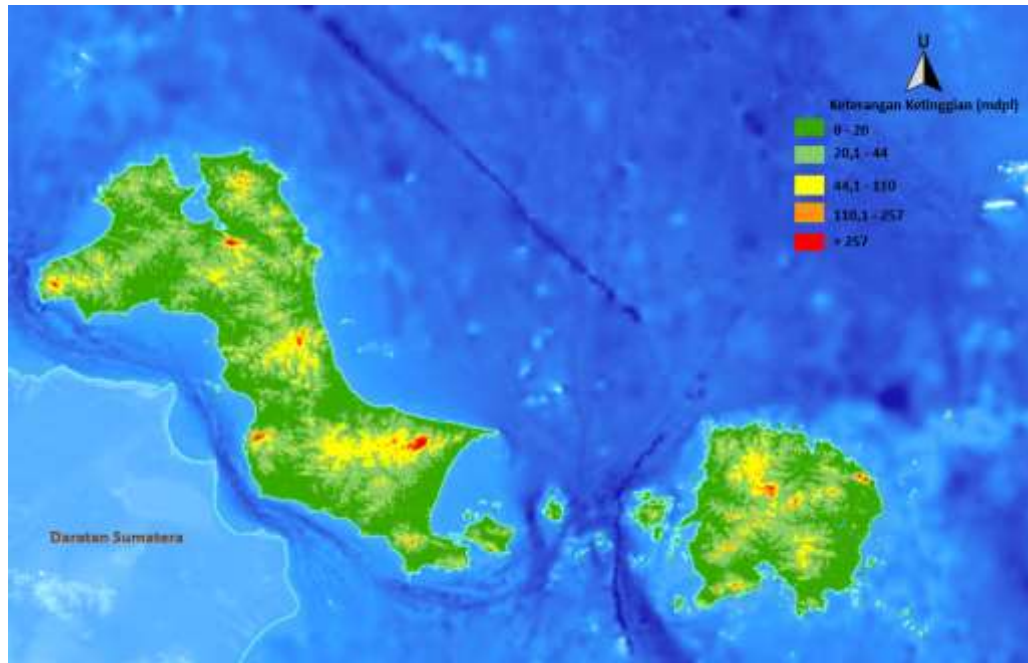
II.4.1.2 Kondisi Topografi

Hasil analisis pada Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, 2022, topografi wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh dataran bergelombang 82,13 persen dari total luas wilayah keseluruhan, dataran 11,01 persen, perbukitan 6,84 persen, serta sebagian kecil berupa pegunungan 0,02 persen.

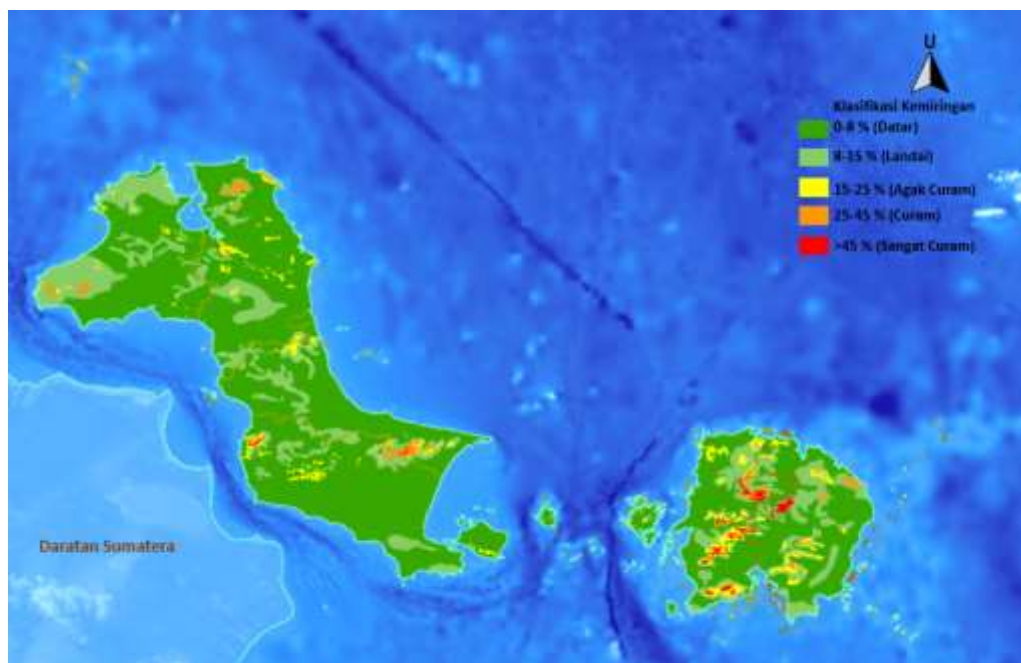
Kondisi topografi, terutama ketinggian dan kecuraman lereng menjadi penyebab utama kejadian bencana longsor di banyak kasus. Hasil penelitian Irvani dan Gunawan, 2015 dalam studi pendahuluan potensi geodisaster di Pulau Bangka dengan mengacu pada peta geologi yang dibuat oleh Mangga dan Djamal, 1994 serta Margono, dkk, 1995 secara alamiah Pulau Bangka dikatakan mempunyai potensi bencana longsor rendah karena sebagian besar daratan memiliki kemiringan lereng yang kecil dan rendah. Pulau Bangka disusun oleh satuan geomorfologi dataran atau dikenal dengan peneplain yang artinya dataran yang hampir rata, serta geomorfologi pedataran agak landai dan bergelombang, hanya sebagian kecil berupa bukit bersatuan geomorfologi perbukitan agak landai hingga agak curam. Formasi batuan ini memiliki daya tahan tinggi terhadap longsor karena bukit-bukit yang disusun oleh batuan formasi tua terkompaksikan dengan baik.

Syafitri, dkk, 2021 dalam penelitiannya melakukan analisis tingkat bahaya bencana puting beliung berbasis Sistem Informasi Geografis di Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan kemiringan lereng sebagai salah satu parameternya. Dalam penyusunan KRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021 terdapat 3 (tiga) parameter yang digunakan sebagai pendekatan untuk mengidentifikasi wilayah dengan bahaya cuaca ekstrem khususnya angin puting beliung yaitu kemiringan lereng, curah hujan, dan keterbukaan lahan. Potensi terjadinya angin puting beliung terjadi akan lebih besar di wilayah dengan keterbukaan lahan yang tinggi seperti area permukiman dan area pertanian. Sebaliknya wilayah dengan keterbukaan lahan sedikit seperti di hutan potensi terjadinya angin puting beliung lebih rendah. Terkait dengan curah hujan yang ada hubungannya dengan tekanan udara, wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi dan mempunyai curah hujan tinggi berpeluang lebih tinggi terjadinya bahaya akibat cuaca ekstrem. Wilayah dengan keterbukaan lahan yang tinggi ini biasanya terdapat pada dataran landai, sehingga wilayah dengan kemiringan lereng

diatas 25 persen dapat dianggap tidak memiliki potensi terkena bahaya cuaca ekstrem.



Gambar 2.4. 4 Peta Ketinggian Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: DEMNAS, 2022, diolah



Gambar 2.4. 5 Peta Kemiringan Lereng Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: DPUPRRKP Babel, 2018, diolah

Tabel 2.4. 1 Kelas Kemiringan Lereng Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kemiringan Lereng (%)	Morfologi Lereng	Luas (Ha)	Persentase dari Luas Total
0 - 8	Datar	1.198.443	71,98
8 - 15	Landai	361.107	21,69
15 - 25	Agak Curam	67.714	4,07
25 - 40	Curam	23.940	1,44
>40	Sangat Curam	13.703	0,82

Sumber: DPUPRPRKP Babel, 2018, diolah

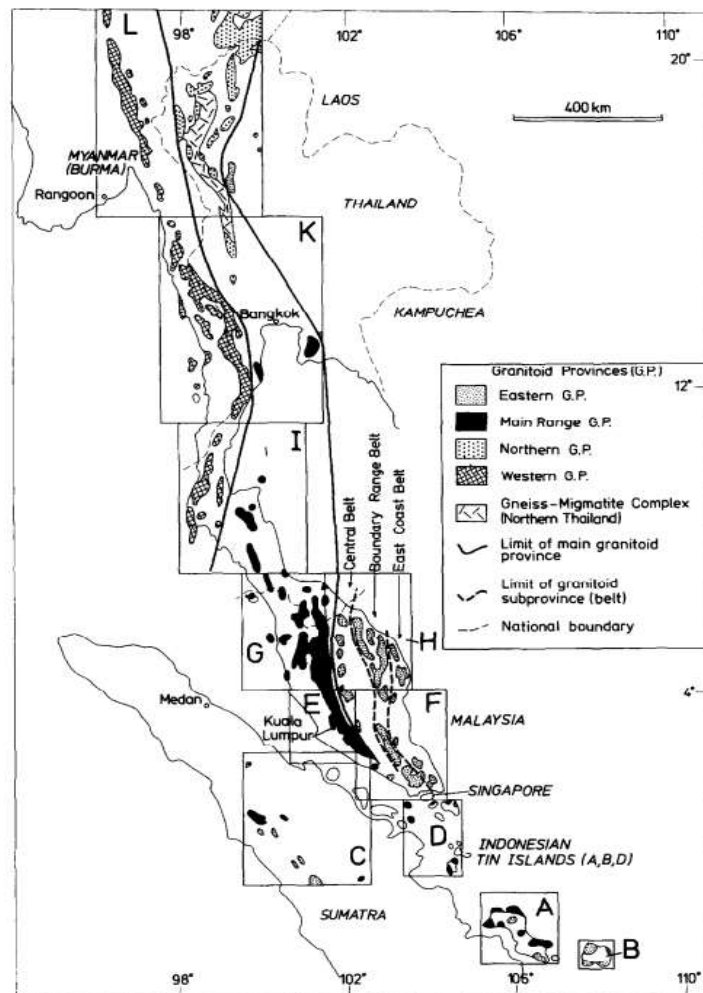
Hasil pengolahan data kemiringan lereng pada tabel 2.4.1 terlihat bahwa kelas kemiringan lereng di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh kelas kemiringan lereng datar seluas 1.198.443 Ha atau 71,98 persen dari total luas dan kelas kemiringan lereng landau seluas 361.107 Ha atau 21,69 persen dari luas total.

Kemiringan lereng berpengaruh terhadap risiko banjir, daerah dengan topografi rendah dan banyak cekungan memiliki risiko banjir yang tinggi karena air hujan sangat mudah menggenang dan kemudian lambat mengalir. Kemiringan lereng juga secara tidak langsung berpengaruh terhadap besar kecilnya suatu kejadian banjir (Astuti, dkk, 2013). Kemiringan lereng yang besar akan menyebabkan air hujan yang jatuh tidak menjadi genangan, namun akan diteruskan ke daerah yang lebih rendah. Semakin besar lereng, semakin cepat air jatuh ke daerah yang lebih rendah, akibatnya jika daerah lebih rendah tersebut memiliki kemiringan lereng yang kecil akan terjadi akumulasi air menyebabkan genangan.

II.4.1.3 Kondisi Geologi

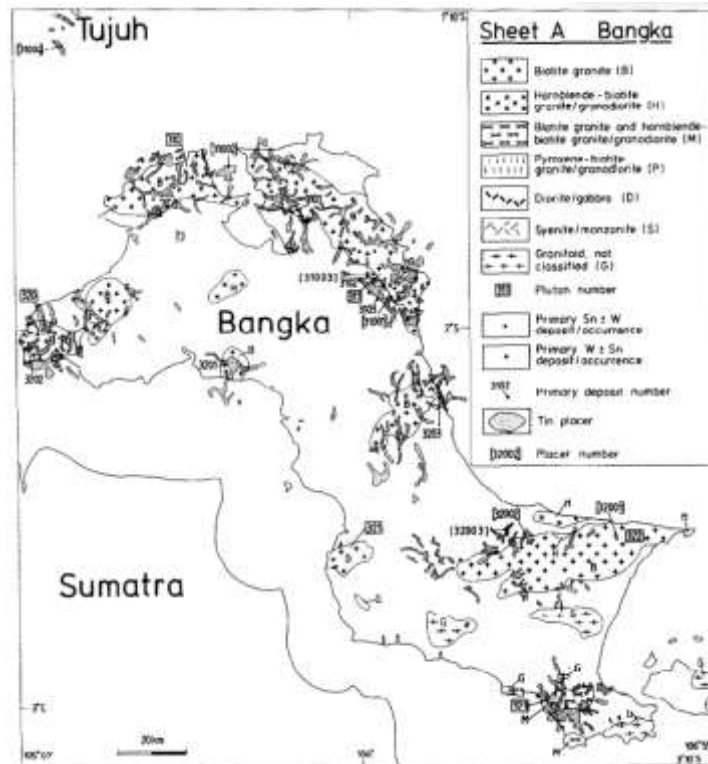
Indonesia bersama Malaysia, Thailand, serta Myanmar menjadi salah satu dari The Southeast Asian Tin Belt, daerah penting penghasil timah. Daerah-daerah ini secara keseluruhan memproduksi setara dengan 54% timah dunia sejak tahun 1800 an (Schwarzt, dkk, 1995). Laporan tahunan U.S Geological Survey pada Januari 2023, masih menempatkan Indonesia sebagai negara kedua yang memproduksi timah terbesar di dunia setelah China yaitu sejumlah 70.000 metrik ton pada 2021 dan pada 2022 sejumlah

74.000 metrik ton dengan cadangan sebesar 800.000 metrik ton. Jika di Malaysia, Thailand dan Myanmar sabuk timah tersebut terbentuk pada rantai perbukitan dan pegunungan, di Indonesia terdiri dari beberapa pulau dengan bentangan luas hingga ke perairan (Aleva, dkk, 1973). Timah di Indonesia tersebar di Kepulauan Sumatera dan sebagian di Kalimantan berasosiasi dengan batuan granitoid (Bramastya, dkk, 2018). Granitoid di Pulau Bangka dan Pulau Belitung terdiri tipe batuan granit main range dan tipe eastern (Gambar 2.4.6). Sebaran potensi timah yang berasosiasi dengan batuan granit merujuk pada tulisan Schwartz, dkk pada tahun 1995 dapat dilihat pada Gambar 2.4.7 dan 2.4.8.



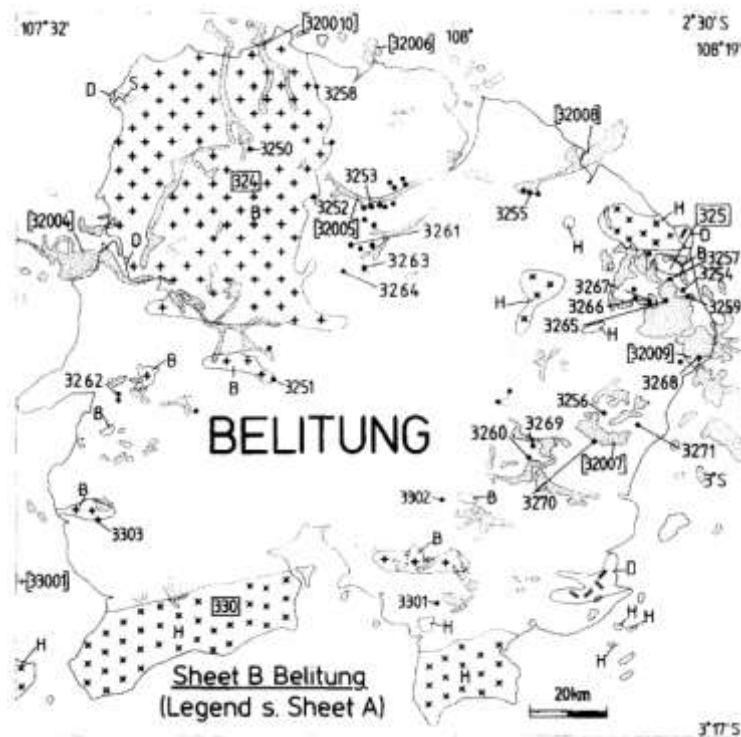
Gambar 2.4. 6 Distribusi batuan granitoid pada The Southeast Asian Tin Belt. Tipe granitoid di Pulau Bangka dan Belitung yaitu tipe main range dan tipe eastern.

Sumber: Schwartz, dkk, 1995, dimodifikasi dari Cobing, 1992.



Gambar 2.4. 7 Sebaran potensi timah yang berasosiasi dengan batuan granit di Pulau Bangka.

Sumber: Schwarz, dkk, 1995.



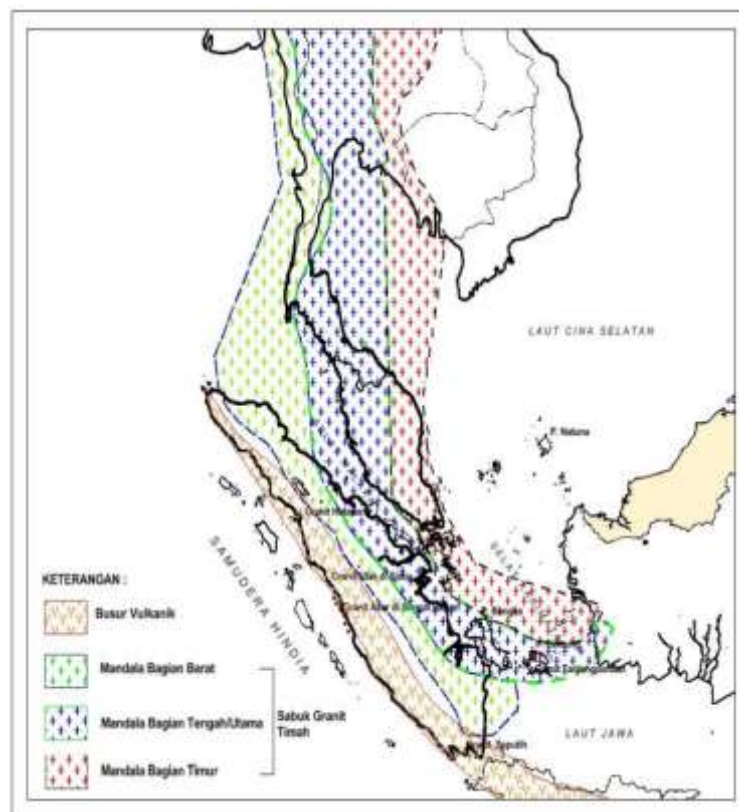
Gambar 2.4. 8 Sebaran potensi timah yang berasosiasi dengan batuan granit di Pulau Belitung.

Sumber: Schwarz, dkk, 1995.



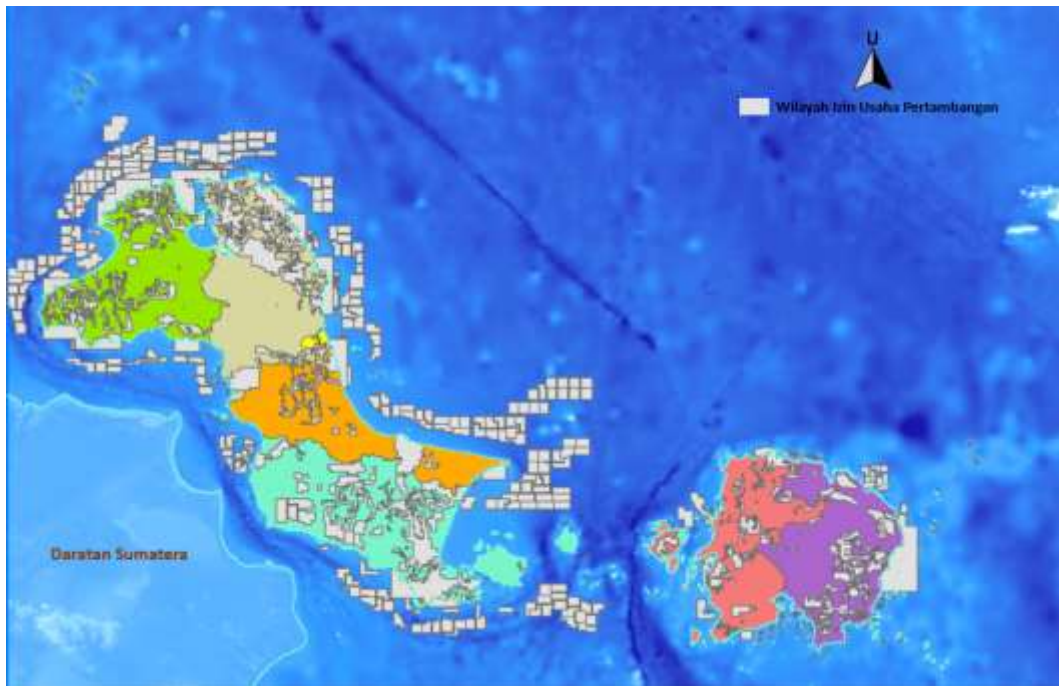
Gambar 2.4. 9 Jalur Mineralisasi dan Sebaran Lokasi Sumber Daya/Cadangan Mineral Indonesia.

Sumber: Badan Geologi Kementerian ESDM, 2019.



Gambar 2.4. 10 Sabuk Timah Asia Tenggara melewati Wilayah Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung hingga ke Kalimantan Bagian Timur.

Sumber: Badan Geologi Kementerian ESDM, 2019 dimodifikasi dari Cobing, 1992.

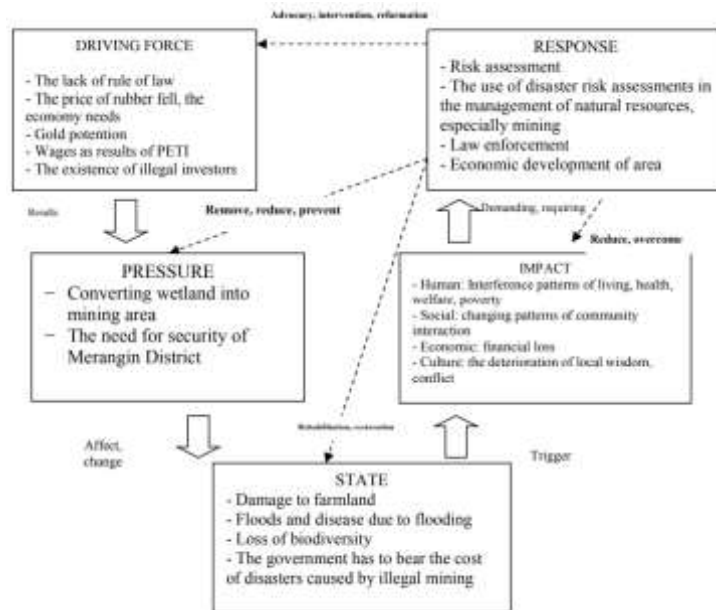


Gambar 2.4. 11 Peta Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sumber: DESDM Babel, 2022, diolah.

Selain sebagai pembawa logam timah, batuan granit beku juga membawa mineral logam *Rare Earth Elements* (REE) atau yang dikenal sebagai Logam Tanah Jarang (LTJ) seperti monasit, xenotim, dan zirkon (Syafrizal, dkk, 2019). Menurut Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 2019 diketahui LTJ terutama terpusat pada wilayah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan sebagian Kalimantan Barat (gambar. 2.4.9).

Lebih jauh menurut Kementerian ESDM, *The Southeast Asian Tin Belt* akan menjadi prioritas dalam pengembangan sumber daya LTJ bersama dengan penyelidikan penambangan timah dunia yang melewati wilayah Indonesia termasuk Pulau Bangka dan Belitung (gambar 2.4.10). Jalur tengah yang terdiri dari batuan granit sebagai sumber utama logam timah, monasit, xenotim, dan zirkon, yang terbentuk akibat tumbukan tektonik periode Trias Akhir merupakan potensi strategis yang dapat memberikan kontribusi besar akan pemenuhan kebutuhan bahan galian LTJ pada masa yang akan datang.



Gambar 2.4. 12 Analisis DPSIR pada kejadian bencana terkait dengan PETI.
Sumber: Sunarti, dkk, 2017.

Potensi bahan tambang melimpah merupakan salah satu kekayaan daerah sebagai modal pembangunan, namun jika pemanfaatannya tidak memperhatikan keberlanjutan akan memberikan dampak negatif. Sunarti, dkk, 2017 telah menggunakan metode DPSIR dalam menganalisis bencana banjir di daerah Merangin, Provinsi Jambi dan mengidentifikasi faktor pendorong (*driving force*) adalah potensi bahan tambang emas yang memicu terjadinya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Model DPSIR pada gambar 2.4.12 ini sekaligus membuktikan bencana tidak hanya disebabkan oleh alam tapi juga oleh faktor manusia.

Risdawati Ahmad, dkk, 2022 mengidentifikasi dampak pertambangan timah di Desa Lampur, Kabupaten Bangka Tengah khususnya tambang inkonvensional atau dikenal dengan TI menjadi 2 (dua) yaitu dampak sosial dan dampak lingkungan:

a. Dampak sosial:

- Munculnya dua kubu masyarakat Desa Lampur dalam merespon keberadaan TI. Kelompok protambang yang memiliki asumsi bahwa masyarakat desa bukan lagi hanya sebagai penonton dalam

pemanfaatan sumber daya alam daerahnya namun juga dapat terlibat secara langsung. Yang termasuk kelompok ini adalah orang-orang yang diuntungkan dengan keberadaan TI seperti penambang, pengusaha, bahkan jaringan mafia. Kelompok kedua yang kontra adalah golongan yang menganggap TI sebagai penyumbang kerusakan ekologis terbesar di wilayah Bangka Belitung dan menganggap keberadaan TI belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Lampur, terdiri dari para aktivis, akademisi, dan pejabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Transformasi profesi masyarakat dari petani, nelayan, buruh bangunan yang berpenghasilan rendah menjadi penambang TI yang menghasilkan uang dalam waktu cukup singkat.
- Meningkatnya angka putus sekolah di Desa Lampur karena banyak anak yang meninggalkan sekolah untuk menambang, bahkan salah satu sekolah mengeluhkan semakin berkurangnya jumlah murid di sekolah tersebut.
- Timbulnya konflik sosial yang disebabkan oleh aktivitas penambangan yang dekat dengan permukiman penduduk, kerap dilakukan pada malam hari ketika waktu istirahat. Selain itu terjadi konflik perebutan lahan diantara sesama penambang TI.
- Komposisi masyarakat Desa Lampur bersifat heterogen, meskipun hal ini telah terjadi sejak awal adanya PT. Timah. Telah terjadi migrasi baik oleh masyarakat Bangka Belitung sendiri maupun dari wilayah di luar Bangka Belitung.

b. Dampak lingkungan:

- Terjadi kerusakan wilayah hutan karena para penambang mulai membuka lahan-lahan di hutan. Ekspansi ini dilakukan karena ketersediaan timah di lokasi sebelumnya mulai berkurang sehingga perlu menambang di lokasi baru.
- Rusaknya sumber mata air di Desa Lampur karena proses penambangan menggunakan alat semprot untuk membasahi tanah,

menyebabkan aliran air bercampur lumpur mengalir ke sumber mata air masyarakat sehingga air yang semula bersih menjadi keruh.

- Munculnya penyakit malaria yang menyerang masyarakat setempat akibat kolong bekas tambang timah yang belum direklamasi menjadi sarang nyamuk. Sebagian besar penderita penyakit ini adalah para pendatang yang merupakan penambang dan tinggal di *camp* area pertambangan.

Ibrahim, 2015 menulis dampak lain akibat pertambangan yang tidak berkelanjutan ini adalah mengalirnya air bercampur lumpur hasil aktivitas penyemprotan tanah ke aliran sungai sehingga air yang semula mengalir jernih menjadi keruh bercampur lumpur, aliran ini bermuara ke laut menyebabkan sedimentasi dan pendangkalan. Selain itu lumpur ini juga mengganggu ekosistem mangrove yang berfungsi sebagai ekosistem penyangga di daerah pasang surut dan mengakibatkan kehidupan biota terganggu, serta berpotensi terjadi abrasi pantai.

II.4.1.4 Peningkatan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang meningkat dapat menjadi tanda adanya perputaran ekonomi yang tinggi, karena setiap orang membutuhkan berbagai macam kebutuhan dari kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, tempat tinggal, bahkan kebutuhan rohani seperti rekreasi. Dengan kata lain kebutuhan manusia sangat banyak dan tidak terbatas, sementara kebutuhan akan terpenuhi jika cadangan sumber daya alam masih pada posisi yang cukup. Menurut pandangan Malthus yang kita kenal dengan Teori Malthus bahwa pertumbuhan penduduk merupakan deret ukur sedangkan pertumbuhan bahan makanan merupakan deret hitung, sehingga menurut Suparmoko, 2014 pemenuhan kebutuhan manusia yang terus bertambah jenis dan jumlahnya pada akhirnya akan memberikan pengaruh berkurangnya produktivitas sumber daya alam yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan. Degradasi lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan kemudian memicu berbagai

permasalahan lingkungan hidup diantaranya menurunnya kualitas air bersih, udara, maupun tanah, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta perubahan iklim.

Telah banyak penelitian yang menyatakan bahwa perubahan iklim sebagai penyebab meningkatnya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan bencana akibat cuaca ekstrem termasuk puting beliung. Harmoni, 2005 dalam tulisannya menyatakan banyak model proyeksi iklim yang memperkirakan efek rumah kaca yang mempengaruhi siklus hidrologi, sehingga curah hujan yang tinggi berpengaruh langsung terhadap meluasnya daerah genangan banjir pada dataran rendah. Pemanasan global yang dipengaruhi oleh perubahan iklim akan meningkatkan temperatur permukaan yang menimbulkan perbedaan tekanan udara antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kondisi ini memicu kenaikan frekuensi terjadinya angin puting beliung dan hal ini telah jauh diungkapkan oleh Aldrian, dkk pada 2011 dalam bukunya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia. Rahmat, 2014 juga dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tingginya laju pertumbuhan penduduk berkorelasi searah dengan meningkatnya potensi korban terdampak banjir, karena kebutuhan akan lahan pertanian dan permukiman menyebabkan meningkatnya penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana.

Dalam tulisannya, Katherina, 2017 fokus terhadap risiko bencana yang terkait terhadap 3 (tiga) faktor yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas, bahwa perubahan yang terjadi akibat pertumbuhan jumlah penduduk diterjemahkan dalam peningkatan eksposur (keterpaparan) dan kerentanan terhadap dampak dari bencana alam. Katherina juga menyadur hasil penelitian Rogelio dan Sanahuj, 2012 yang mengidentifikasi hubungan antara peningkatan jumlah penduduk dan risiko bencana alam menjadi 2 (dua) jenis, yaitu langsung dan tidak langsung. Hubungan langsung (*direct*) terlihat saat eksposur risiko meningkat, baik dalam hal ukuran populasi dan aktivitasnya, sehingga semakin banyak jumlah orang yang menetap pada daerah risiko, semakin tinggi probabilitas korban manusia akibat bencana.

Sedangkan hubungan tidak langsung dicermati sebagai bagaimana suatu populasi dan aktivitas yang mereka lakukan terhadap lingkungannya berpengaruh terhadap cuaca ekstrem terkait perubahan iklim. Hal ini diketahui merupakan proses efek kumulatif bertahap dan sifatnya global, yang dampaknya tidak selalu terlihat nyata pada wilayah aktivitas atau kegiatan yang menghasilkan Gas Rumah Kaca (GRK) dan faktor lain yang menentukan perubahan iklim, akan tetapi dampaknya dapat mempengaruhi ekosistem dunia.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat jumlah penduduk provinsi ini terus meningkat. Data jumlah penduduk dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan satuan jiwa dapat dilihat pada gambar 2.4.13 berikut.



Gambar 2.4. 13 Dinamika Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: BPS Babel, 2023 (diolah)

Dengan 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, data BPS tahun 2022 menyatakan jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1.494.621 jiwa, sebaran penduduk paling banyak berada di Kabupaten Bangka yaitu 334.344 jiwa atau 22,37 persen diikuti oleh Kota Pangkalpinang 226.297 jiwa atau sebanyak 15,14 persen penduduk tersebar di ibukota provinsi ini. Jumlah sebaran penduduk paling rendah dimiliki oleh Kabupaten Belitung Timur sebanyak 130.463 jiwa atau hanya 8,73 persen.



Gambar 2.4. 14 Kepadatan Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: BPS Babel, 2023 (diolah)

Seperti wilayah kota di Indonesia yang memiliki sarana dan prasarana lebih lengkap dari daerah lainnya, Kota Pangkalpinang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi sebesar 2.165 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk paling rendah ada di wilayah Kabupaten Belitung Timur yaitu 50 jiwa/km². Informasi mengenai kependudukan ini dapat dilihat pada gambar 2.4.14.

II.4.1.5 Aktivitas Perekonomian

Aktivitas perekonomian digambarkan melalui pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rilis Berita Resmi Statistik oleh BPS, 2023 bahwa pada tahun 2022 ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh sebesar 4,40 persen, lebih lambat dari tahun 2021 yang tumbuh sebesar 5,05 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha Transportasi dan Perdagangan (20,96 persen) diikuti oleh lapangan usaha Jasa Perusahaan (10,99 persen), serta lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (10,63 persen) yang selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.4.15 berikut.



Gambar 2.4. 15 Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 dalam Satuan Persen
Sumber: BPS Babel, 2023

Dominasi 5 (lima) lapangan usaha utama terhadap struktur PDRB menurut lapangan usaha yaitu Industri Pengolahan (21,84 persen, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (19,19 persen) Perdagangan Besar dan Eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor (15,72 persen), Konstruksi (9,09 persen) serta Pertambangan dan Penggalian (8,60 persen).

Pertumbuhan yang tinggi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan disebabkan oleh semakin tingginya mobilitas penduduk pasca menurunnya kasus positif Covid-19 dan longgarnya persyaratan bepergian. Peningkatan mobilitas penduduk ini juga mendorong kinerja lapangan usaha pendukung pariwisata seperti Aktivitas Biro/Agen Perjalanan, Hotel, Restoran serta Jasa Hiburan dan Rekreasi.

Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah dalam pembangunan merupakan upaya untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat yang diukur melalui PDRB. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin baik kesejahteraan individu. Pada tahun 2022 PDRB per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp.63,75 juta, menunjukkan tren naik pada 3 (tiga) tahun terakhir (gambar 2.4.16).



Gambar 2.4. 16 PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2022 (Rupiah)

Sumber: BPS Babel, 2023

Mengacu pada Nunez (2019), Leonanda, 2019 menulis bahwa tolak ukur kemakmuran suatu daerah dapat dilihat dari tersedianya lapangan pekerjaan dan adanya jaminan pendidikan dan kesehatan, yang bisa terjadi ketika ekonomi tumbuh dan berkembang. Perkembangan ekonomi akan mendorong investasi diikuti dengan pembukaan lapangan kerja baru serta menuntut Pendidikan yang lebih tinggi lagi, sehingga menggiatkan ekonomi. Dampaknya, ekonomi terus tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat makin meningkat. Namun pada sisi lain pembangunan memerlukan sumber daya alam untuk mengubahnya melalui proses produksi menjadi produk-produk bernilai ekonomi yang bermanfaat dan dikonsumsi. Lebih lanjut Leonanda berpendapat bahwa pada perjalanannya produksi dan konsumsi ini banyak menimbulkan limbah dan polusi serta menyebabkan tekanan terhadap lingkungan yang pada gilirannya akan menurunkan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup. Suatu saat hal ini akan mempengaruhi dan memperlambat pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan pemanfaatan sumber daya alam seperti bahan bakar fosil dan sumber energi lainnya harus tetap dilakukan agar produksi terus berlanjut untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan.

II.4.2 Pressure

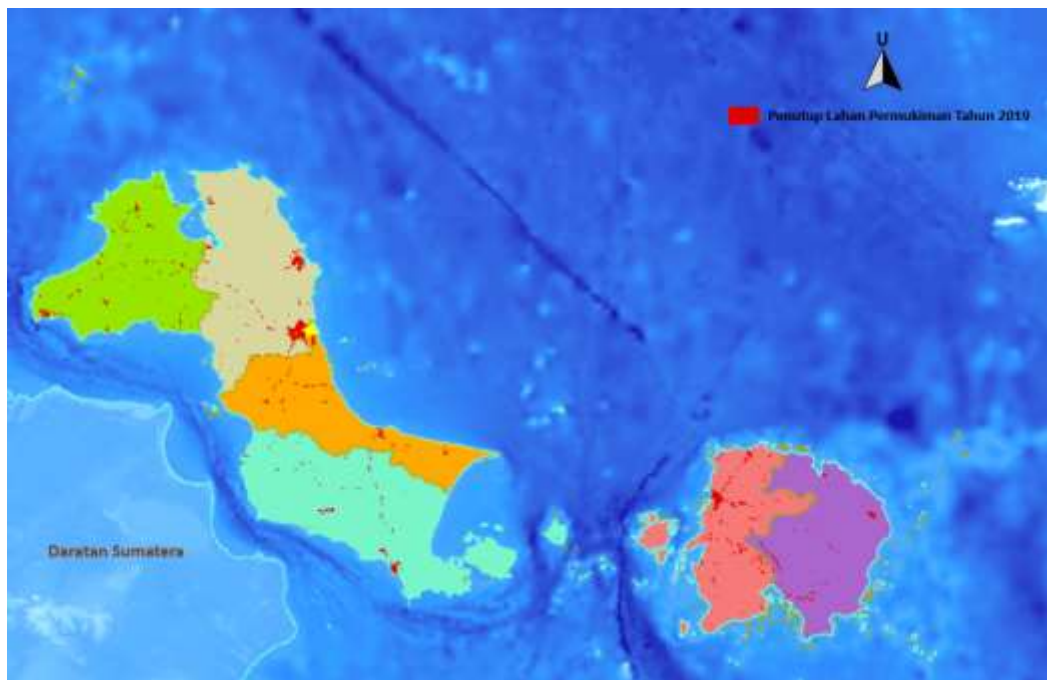
Bencana, seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. *Pressure* atau tekanan merupakan faktor-faktor pemicu terjadinya *state* atau dalam hal ini adalah kejadian bencana. Identifikasi faktor pemicu dalam analisis DPSIR risiko bencana adalah aktivitas antropogenik sebagai akibat pertumbuhan penduduk, berupa meningkatnya luas penutup lahan permukiman, meningkatnya timbunan sampah, meningkatnya emisi GRK, meningkatnya luas penutup lahan pertambangan, kondisi lahan kritis, serta kondisi jasa lingkungan. Manusia sebagai aktor pembangunan sangat berperan penting terhadap kualitas lingkungan. Tingginya laju pertumbuhan yang tidak dapat diimbangi dengan penyediaan berbagai kebutuhan hidup seperti pangan, sandang, papan, serta fasilitas seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, lingkungan, serta lapangan kerja dapat menyebabkan kualitas penduduk suatu daerah dalam kondisi rendah.

II.4.2.1 Meningkatnya Luas Penutup Lahan Permukiman

Analisis spasial menggunakan data penutup lahan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIII Pangkalpinang tahun 2019, 2020, dan 2021 terlihat semakin bertambahnya luas penutup lahan jenis permukiman (gambar 2.4.17, 2.4.18, dan 2.4.19). Pada tahun 2019 luas permukiman adalah 35.462,04 Ha, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 38.845,94 Ha, serta tahun 2021 menjadi seluas 41.765,82 Ha. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah akan diikuti pula dengan laju kebutuhan akan permukiman dan menyebabkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang

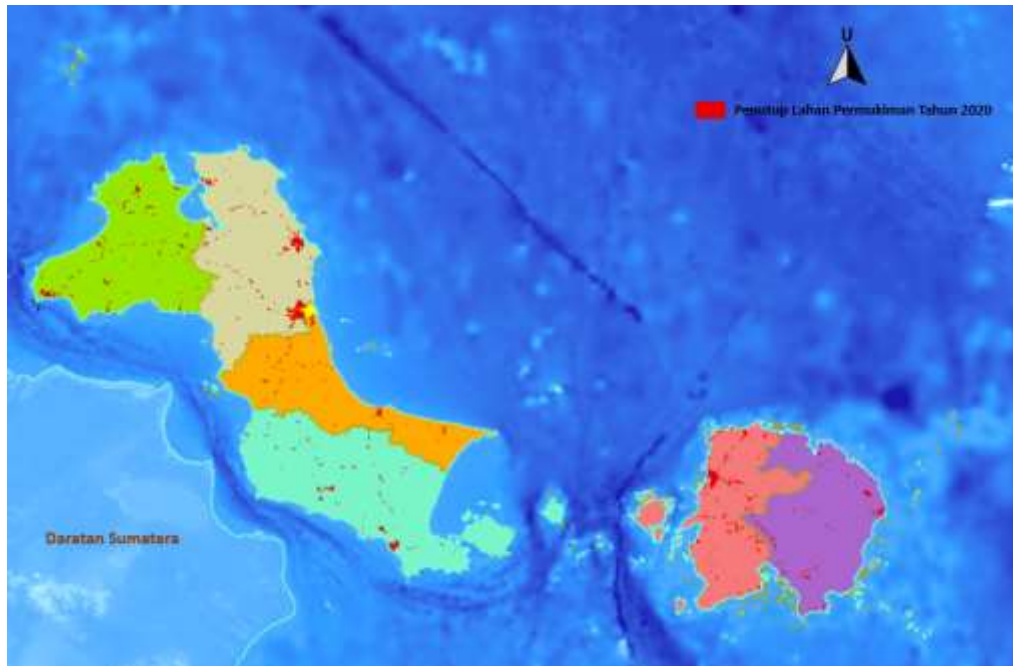
terus meningkat menyebabkan terjadinya perkembangan permukiman yang tidak terkontrol.

Hasil *overlay* penutup lahan permukiman yang berasal dari peta penutup lahan dari BPKH Wilayah XIII dengan data kawasan hutan SK.6614/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021, beberapa lokasi penutup lahan permukiman bahkan sebagian berada dalam kawasan hutan lindung (gambar 2.4.20). Dikuatirkan dengan telah terjadinya pembukaan lahan untuk permukiman, kawasan tersebut sudah terganggu fungsi lindungnya sehingga memperbesar risiko bencana. Kajian terhadap rencana pengembangan permukiman selayaknya dilaksanakan untuk memperkirakan dampak-dampak terhadap lingkungan sekitarnya karena kegiatan-kegiatan pada permukiman tersebut seperti air limbah, sampah, emisi udara serta kebisingan yang dapat mengganggu ekosistem terdekat yang pada akhirnya berdampak terhadap manusia itu sendiri. Tidak terencananya perkembangan permukiman membuat tidak adanya kajian terhadap rencana pembangunan permukiman tersebut, sehingga terdapat kemungkinan wilayah permukiman berada pada daerah rawan bencana.

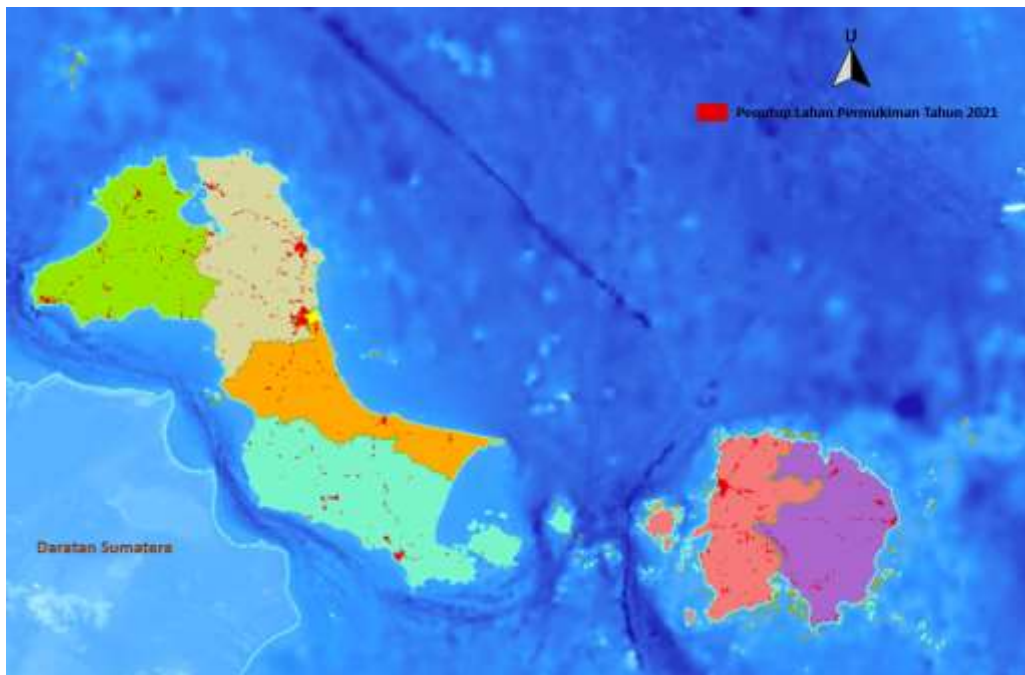


Gambar 2.4. 17 Peta Penutup Lahan Permukiman Tahun 2019

Sumber: BPKH Wilayah XIII, 2020, diolah



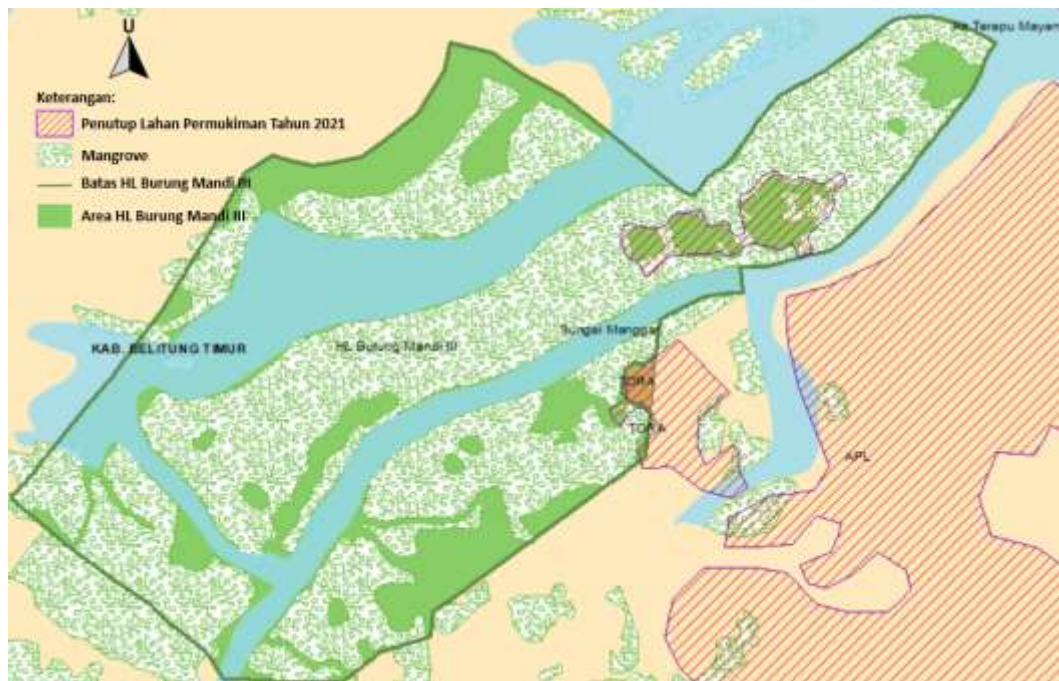
Gambar 2.4. 18 Peta Penutup Lahan Permukiman Tahun 2020
Sumber: BPKH Wilayah XIII, 2021, diolah



Gambar 2.4. 19 Peta Penutup Lahan Permukiman Tahun 2021
Sumber: BPKH Wilayah XIII, 2022, diolah

Seiring pertumbuhan penduduk dan kebutuhan permukiman yang meningkat, pengolahan data BPKH Wilayah XIII diperoleh luas penutup lahan permukiman tahun 2019 yaitu 35.462,04 Ha, mengalami kenaikan

sebesar 9,54 persen menjadi seluas 38.845,94 Ha di tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 penutup lahan permukiman kembali mengalami kenaikan sebesar 7,52 persen menjadi seluas 41.765,82 Ha.



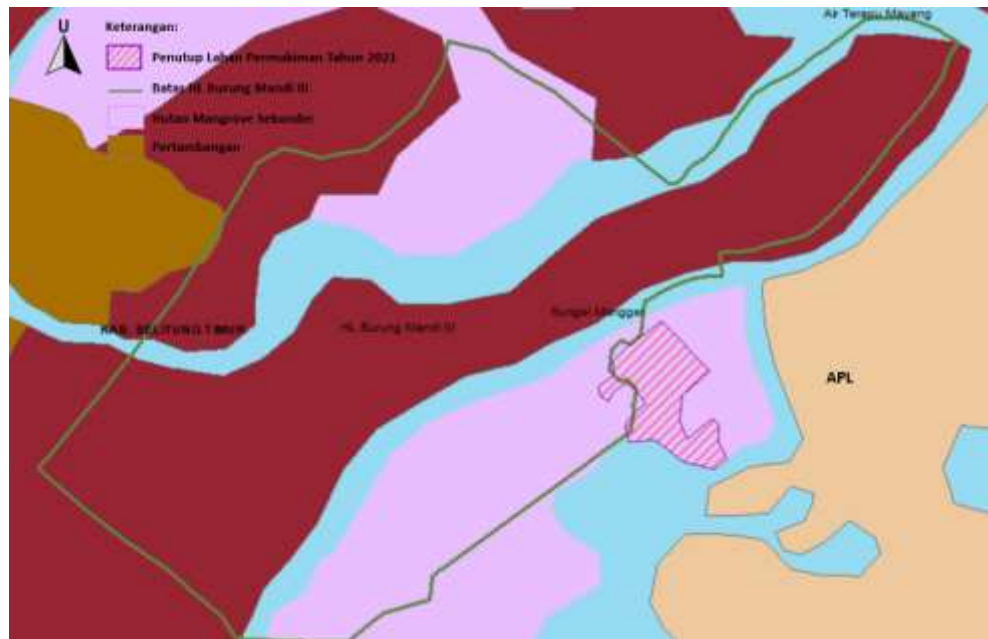
Gambar 2.4. 20 Hasil tumpang susun Peta Penutupan Lahan Permukiman Tahun 2021 dengan data kawasan hutan SK.6614/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 pada sebuah lokasi, terdapat kawasan permukiman/perumahan yang sebagian wilayahnya berada pada kawasan hutan lindung.

Sumber: BPKH Wilayah XIII, 2022, SK.6614/2021, dan SIGAP KLHK, 2023, diolah

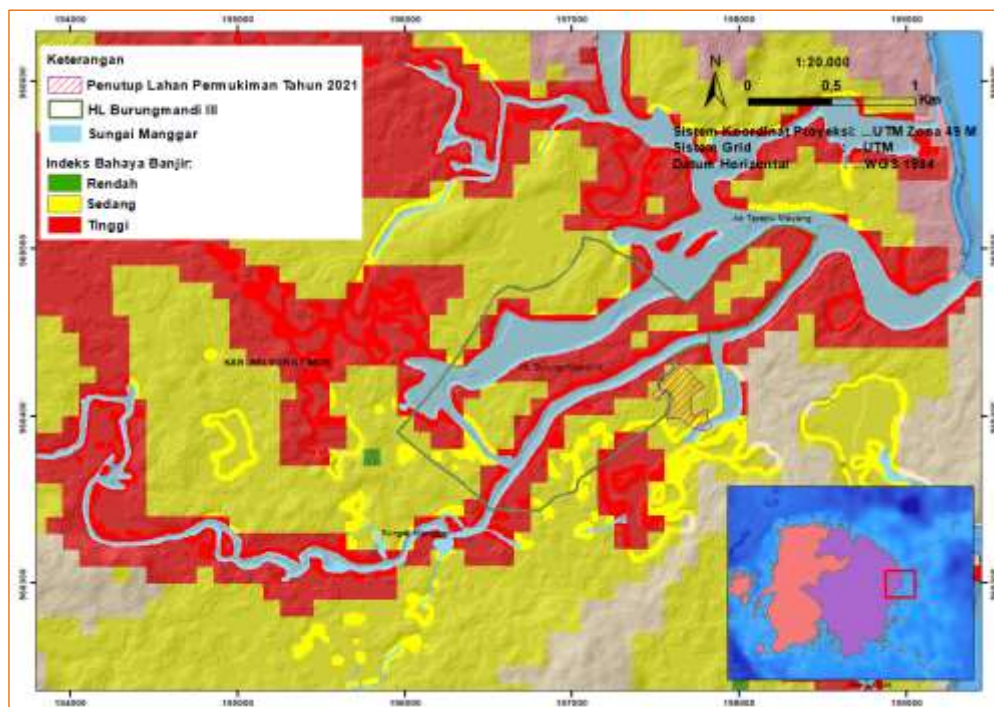


Gambar 2.4. 21 Tangkapan layar hasil perekaman citra Google Earth pada daerah yang sama pada gambar 2.4.20. Gambar kiri pada Bulan Maret 2015 area masih terlihat kosong (data penutupan lahan dari BPKH Wilayah XIII yaitu berupa jenis penutup lahan hutan mangrove sekunder, gambar 2.4.20) dan kanan pada Bulan April 2020, sudah terlihat lahan terbangun berupa permukiman/perumahan.

Sumber: BPKH Wilayah XIII, 2022, SK.6614/2021, 2022, diolah



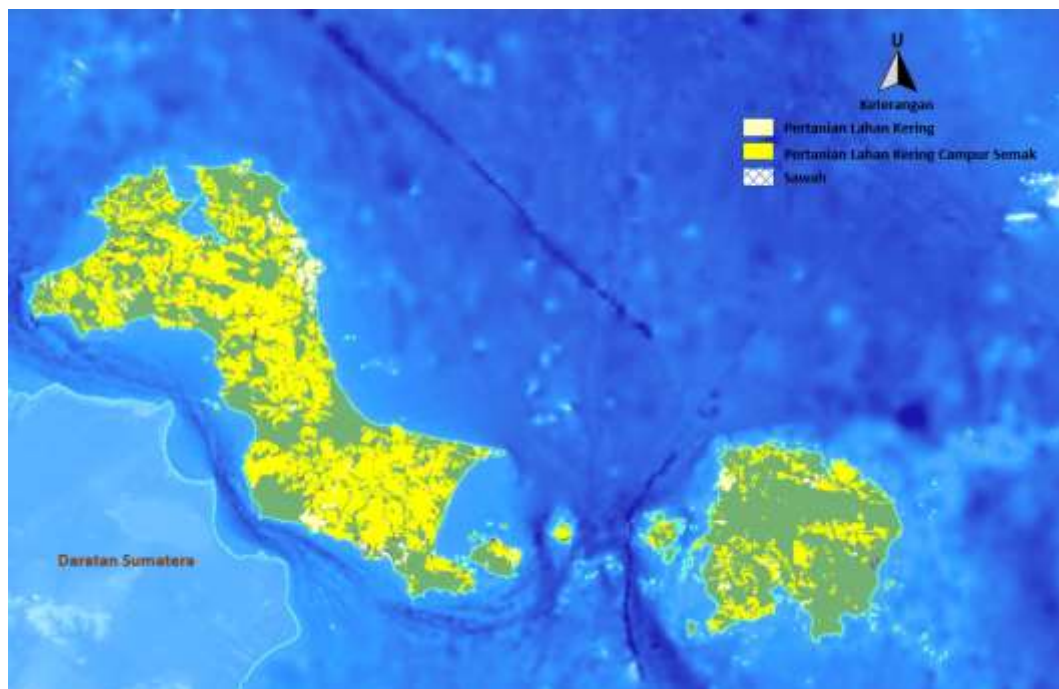
Gambar 2.4. 22 Hasil tumpang susun data Penutup Lahan BPKH Wilayah XIII Tahun 2015 dengan data kawasan hutan SK.6614/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 di lokasi yang sama pada gambar 2.4.20 pada Tahun 2021 berupa penutup lahan jenis permukiman, pada tahun 2015 berupa jenis penutup lahan hutan mangrove sekunder.
Sumber: BPKH Wilayah XIII, 2022, SK.6614/2021, 2022, diolah



Gambar 2.4. 23 Hasil tumpang susun data Penutup Lahan Permukiman Tahun 2021 dan data kawasan hutan di lokasi yang sama pada gambar 2.4.20 dengan peta bahaya banjir menunjukkan Penutup Lahan Jenis Permukiman berada pada bahaya banjir kelas sedang.

Sumber: BPKH Wilayah XIII, 2022, SK.6614/2021, 2022, dan BPBD Babel, 2022, diolah

Hasil kajian risiko bencana yang disusun oleh BPBD, 2021 parameter selain kemiringan lereng yang digunakan untuk mengidentifikasi wilayah yang memiliki potensi bahaya cuaca ekstrim adalah keterbukaan lahan dan curah hujan. Potensi cuaca ekstrim termasuk angin puting beliung terjadi akan lebih tinggi di wilayah dengan keterbukaan lahan yang tinggi seperti permukiman dan area pertanian. Berdasarkan peta penutupan lahan dari BPKH Wilayah XIII terdapat 3 (tiga) kelas penutupan lahan pertanian yaitu pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur semak, dan sawah (gambar 2.4.23). Terlihat kelas penutupan lahan pertanian didominasi oleh kelas penutupan lahan pertanian lahan kering campur semak seluas 664.889,20 Ha diikuti oleh kelas penutupan lahan pertanian lahan kering seluas 52.855,13 Ha, serta kelas penutupan lahan sawah 7.743,24 Ha.

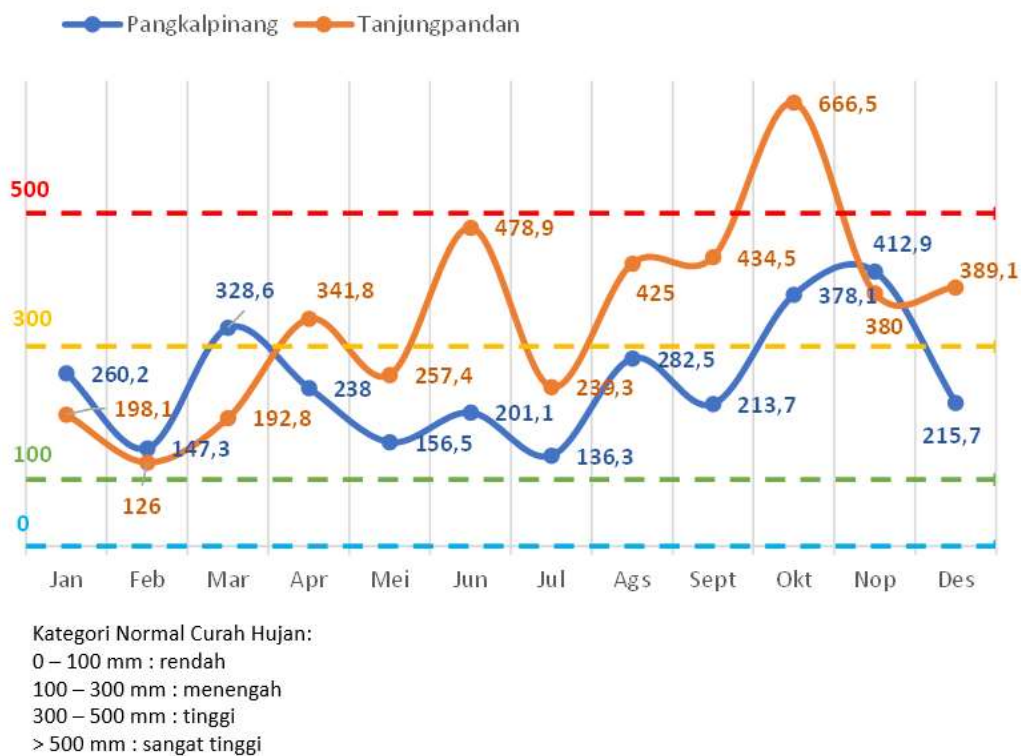


Gambar 2.4. 24 Peta Penutupan Lahan Pertanian Lahan Kering, Pertanian Lahan Kering Campur Semak, dan Sawah Tahun 2021

Sumber: BPKH Wilayah XIII, 2022, diolah

II.4.2.2 Curah Hujan

Curah hujan yang tinggi dapat menjadi pemicu bencana hidrometeorologi jika ditambah dengan rendahnya kualitas lingkungan, seperti kurangnya daerah tangkapan air dan adanya material yang menghadang aliran air seperti sampah di sungai. Curah hujan rata-rata bulanan diperoleh dari 2 (dua) stasiun pengamatan milik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yaitu Stasiun Meteorologi kelas I Depati Amir Pangkalpinang dan Stasiun Meteorologi Kelas III Hanandjoedin Tanjungpandan, Kabupaten Belitung.



Gambar 2.4. 25 Grafik curah hujan rata-rata bulanan tahun 2022
 Sumber: Stamet Depati Amir, 2022, diolah

Pada tahun 2022 curah hujan rata-rata bulanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkisar pada kategori menengah hingga sangat tinggi. Curah hujan rata-rata bulanan kategori sangat tinggi sempat terjadi dan terpantau di Stasiun Meteorologi Kelas III Hanandjoedin pada bulan Oktober mencapai 666,5 mm. Jika di Tanjungpandan hasil

pengamatan curah hujan rata-rata bulanan didominasi dengan kategori tinggi (antara 300 hingga 500 mm), hasil pengamatan di Kota Pangkajene didominasi oleh curah hujan rata-rata bulanan kategori menengah (antara 100 hingga 300 mm). Grafik curah hujan rata-rata bulanan dapat dilihat pada gambar 4.24.

II.4.2.2 Meningkatnya Sampah Tak Terkelola

Persoalan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menjadi perhatian serius dan menjadi salah satu isu yang diangkat dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah tahun 2023. Selain sering menjadi penyebab bencana banjir akibat terhambatnya aliran air, sampah juga menjadi penyebab bencana lingkungan karena dapat mencemari air, tanah, udara, berkontribusi terhadap perubahan iklim, hingga bencana longsor seperti yang terjadi pada 21 Februari 2005 di TPA Leuwigajah, Cimahi dan mengubur 157 orang. Tragedi ini menjadi peristiwa bencana alam terbesar kedua di dunia yang terjadi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) setelah sebelumnya pada 10 Juli 2000 sampah di TPA Payatas, Quezon City, Filipina terjadi longsor sampah yang memakan lebih dari 200 korban jiwa. Kini peristiwa longsor TPA Leuwigajah diperingati setiap tahun sebagai Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN).

Berdasarkan capaian kinerja Pengelolaan Sampah pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dibangun oleh KLHK menginformasikan persentase pengurangan dan penanganan sampah masih belum memenuhi target periode pengelolaan sampah tahun 2019 hingga tahun 2025 yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau yang sering sebut sebagai Jakstrada. Capaian kinerja Pengelolaan Sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diamati pada gambar berikut.

Meskipun pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilakukan melalui pembatasan, pemanfaatan kembali, serta pendauran ulang. Namun persentase capaian pengurangan masih fluktuatif dan masih jauh dari target yang dicita-citakan dalam Jakstrada (gambar 2.4.25).

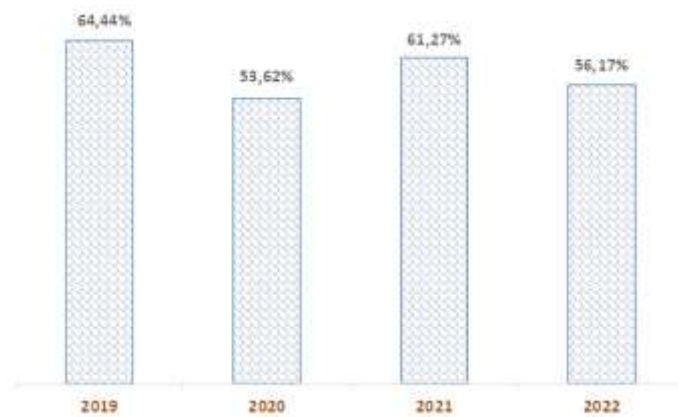


Gambar 2.4. 26 Profil persentase pengurangan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2022
Sumber: SIPSN KLHK, 2023, diolah

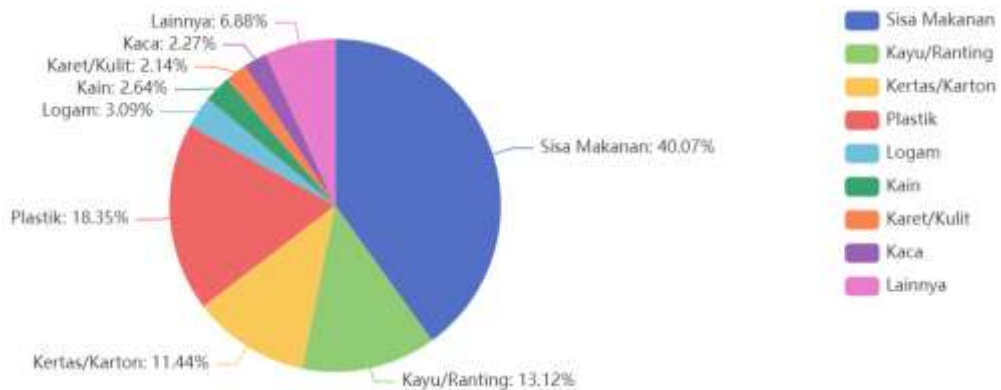
Persentase capaian penanganan sampah sempat memenuhi bahkan melebihi target pada tahun 2019, namun penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga yang mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir ini kemudian menurun pada tahun 2020, dan 2021 hingga 2022 terus berusaha naik walaupun masih tetap belum mencapai target (gambar 2.4.26).



Gambar 2.4. 27 Profil persentase penanganan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2022
Sumber: SIPSN KLHK, 2023, diolah



Gambar 2.4. 28 Profil persentase sampah terkelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2022
Sumber: SIPSN KLHK, 2023, diolah



Gambar 2.4. 29 Persentase komposisi sampah berdasarkan jenis sampah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022
Sumber: SIPSN KLHK, 2023

Dari data pengurangan dan penanganan sampah tersebut diperoleh persentase sampah terkelola (gambar 4.2.27). Rata-rata sampah terkelola setiap tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 baik di TPA, TPS-3R, dan bank sampah sebesar 58,88 persen. Sedangkan sisanya sebanyak 41,12 persen yang tak terkelola sangat mungkin dibuang sembarangan kemudian mencemari tanah dan badan air. Untuk sampah padat seperti sampah plastik, kayu, atau kaca yang sulit terurai dapat menyumbat saluran air atau saluran drainase, bahkan memenuhi sungai-sungai sehingga alirannya menjadi lambat. Hal ini menjadi salah satu penyebab bencana banjir, jika terjadi input air berupa hujan dari daerah hulu.

Dari SIPSN KLHK, gambar 2.4.28 diperoleh informasi berdasarkan komposisi jenis sampah di wilayah Bangka Belitung, setelah sisa makanan, jenis sampah padat yang paling banyak berupa sampah plastik sebesar 18,35 persen, diikuti kayu/ranting 13,12 persen, serta kertas/karton sebesar 11,44 persen, sisanya berupa logam, kain, kaca, karet/kulit, dan jenis sampah lainnya. Cauwenberghe, dkk, pada tahun 2013 menulis bahwa 10 persen plastik dari daratan akan berakhir di lautan karena dibuang di sungai. Riskiana, 2020 ketika melaksanakan penelitian mengenai sampah di Sungai Baturusa, 90 persen sampah plastik yang terkumpul saat pengambilan sampel merupakan sampah jenis plastik. Hasil perhitungan pada 3 (tiga) stasiun pengamatan di Pantai Mangkalok, Kabupaten Bangka oleh Utama, dkk, 2022 juga menegaskan dominasi sampah jenis plastik secara berat sebanyak 42,21 persen dan dominasi secara jumlah sebesar 26,85 persen dari keseluruhan sampah lainnya yang berupa kayu dan sejenisnya, logam, kain, kaca, karet, serta sampah lainnya. Sampah jenis plastik yang ditemukan juga berupa gelas minuman, botol minuman, *styrofoam*, bungkus, kemasan, berbagai tali, kantong plastik, sedotan, sendok, karung, wadah bekas makanan, pipa, selang, pecahan jeriken, dan jaring. Sedangkan Oktavia, et.al, 2020 memetakan kerapatan sampah plastik ukuran makro yang juga mendominasi pada 2 (dua) lokasi pantai di Bangka Belitung yaitu Pantai Temberan, Kabupaten Bangka dengan nilai

kepadatan 3 buah/m² dan Pantai Pasir Padi, Kota Pangkalpinang nilai kepadatan 11 buah/m².

Sampah plastik yang bersifat *non-biodegradable* berukuran makro yang terbuang ke lingkungan pada perjalanannya dengan dorongan proses fotodegradasi, oksidasi, degradasi hidrolitik serta disintegrasi mekanik dapat berubah ukuran, termakan oleh konsumen tingkat satu pada rantai makanan, ter-biomagnifikasi hingga puncak konsumen tertinggi. Hasil studi literatur oleh Firmansyah, dkk, 2021, cemaran plastik ukuran nano dalam tubuh manusia dapat memicu terjadinya kanker. Nanoplastik menutupi saluran pencernaan yang kemudian membatasi nutrisi. Jika masuk ke saluran pencernaan, dapat merobek usus maupun lambung, karena tidak dapat dicerna meskipun sebagian dapat keluar bersama kotoran. Jika masuk ke sel darah, nanoplastik dapat terserap ke jaringan sel darah dan mengganggu sistem saraf pusat.

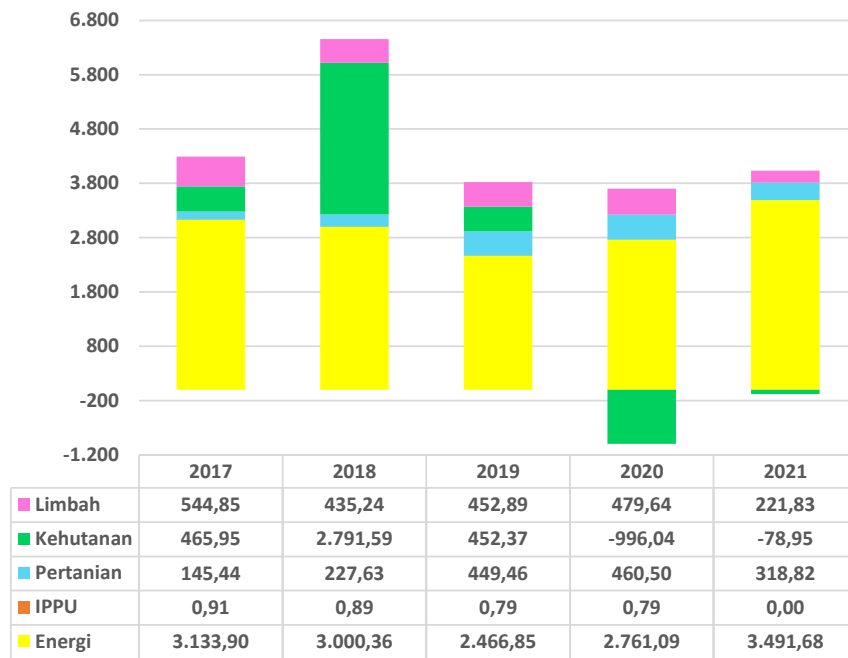
Riskiana, 2020, telah mengukur kandungan mikroplastik di Daerah Aliran Sungai (DAS) Baturusa pada 7 (tujuh) stasiun pengamatan sepanjang aliran sungai meliputi segmentasi hulu, tengah, hilir, beserta anak sungainya. Kelimpahan mikroplastik tertinggi berada pada Muara Sungai Rangkui dengan rata-rata 5.520 partikel/m³. Mikroplastik juga diteliti terhadap ikan yang hidup di DAS Baturusa tersebut, hasilnya 100 persen sampel ikan semuanya mengandung mikroplastik pada saluran pencernaannya dengan kelimpahan 24-27 partikel/individu. Pratiwi, dkk, 2023 meneliti potensi kontaminasi mikroplastik terhadap 3 (tiga) jenis kerang di Pulau Bangka, yaitu kerang darah (*Anadara granosa L*) mengandung mikroplastik 26-42 partikel/15 individu, kerang kepah (*Geloina sp*) berkisar antara 17-65 partikel/15 individu, serta kerang lokan (*Meretrix meretrix*) sebanyak 13-18 partikel/individu. Ecoton, 2022 merilis hasil penelitian kandungan mikroplastik sungai-sungai di Indonesia dan menempatkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi ke-4 sungainya terkontaminasi partikel mikroplastik tertinggi di Indonesia dengan 497 partikel/100 liter.

II.4.2.3 Meningkatnya Emisi Gas Rumah Kaca

Salah satu indikasi hasil aktivitas pemanfaatan sumber daya alam pada proses produksi dan konsumsi ini adalah emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Gas Rumah Kaca merupakan gas yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap efek rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Dalam konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim ada enam jenis yang digolongkan sebagai GRK yaitu karbondioksida (CO_2), gas metan (CH_4), dinitrogen oksida (N_2O), sulfurheksafluorida (SF_6), perfluorokarbon (PFCS) dan hidrofluorokarbon (HFCS). Selain itu ada beberapa gas yang juga termasuk dalam GRK yaitu karbonmonoksida (CO), nitrogen oksida (NOX), klorofluorokarbon (CFC), dan gas-gas organik non *metal volatile*. Ilmuwan menggunakan istilah GWP (*Global Warming Potential*) untuk membandingkan kekuatan pengaruh antara gas-gas rumah kaca tersebut terhadap pemanasan global (Team SOS, 2011). GWP didefinisikan sebagai ukuran pengaruh suatu gas rumah kaca dalam satuan berat terhadap pemanasan global. GWP antara gas-gas rumah kaca dibandingkan dengan CO_2 sehingga GWP CO_2 sama dengan 1 (satu). Penyebab utama dari emisi GRK menurut UNEP dan UNFCC (2002) adalah aktivitas manusia, dari pembakaran bahan bakar fosil, penebangan dan pembakaran hutan. Alikodra (2012) mengatakan bahwa pemanasan global terjadi karena penambahan konsentrasi GRK yang dihasilkan dari emisi sebagai hasil kegiatan manusia seperti limbah, perindustrian, deforestasi atau kegiatan pertanian. Sumber emisi GRK pada sektor industri berasal dari penggunaan energi khususnya energi fosil, proses produksi dan limbah (BPKIMI Kementerian Perindustrian RI, 2012). Menurut Purwanto (2013) karbondioksida memang bukan merupakan pencemar karena tidak beracun, namun mempunyai kontribusi yang cukup berarti pada pemanasan global.

Perpustakaan Emil Salim, KLHK mencatat laporan Lembaga Meteorologi Dunia (*World Meteorological Agency*) tentang meningkatnya konsentrasi karbondioksida mencapai 357 ppm pada 1994 menjadi 405,5 ppm pada 2017. Rekor konsentrasi GRK ini mendorong suhu global ke

tingkat berbahaya, memicu peningkatan intensitas dan frekuensi bencana hidrometeorologi, iklim ekstrem, dan mendorong krisis pangan. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto awal 2023 pada laman web BNPB memaparkan data bencana terkait iklim telah berdampak signifikan, tren kenaikan anomali suhu rata-rata global berbanding lurus dengan peningkatan frekuensi kejadian bencana alam terutama bencana hidrometeorologi. Tren kenaikan jumlah kejadian bencana alam mengalami kenaikan hingga 82% dari tahun 2010 hingga 2022.



Gambar 2.4. 30 Profil Emisi GRK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021 (GgCO₂)

Sumber: Signsmart KLHK dan DLHK Babel, 2023, diolah

Profil emisi GRK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap sektor Energi, *Industrial Process and Production Use (IPPU)*, Pertanian, Kehutanan, dan Limbah tahun 2017 hingga tahun 2021 disajikan pada gambar 2.4.28.

Meskipun fluktuatif, dapat terlihat bahwa sektor energi mempunyai andil yang terbesar sebagai sektor penghasil emisi GRK setiap tahunnya di

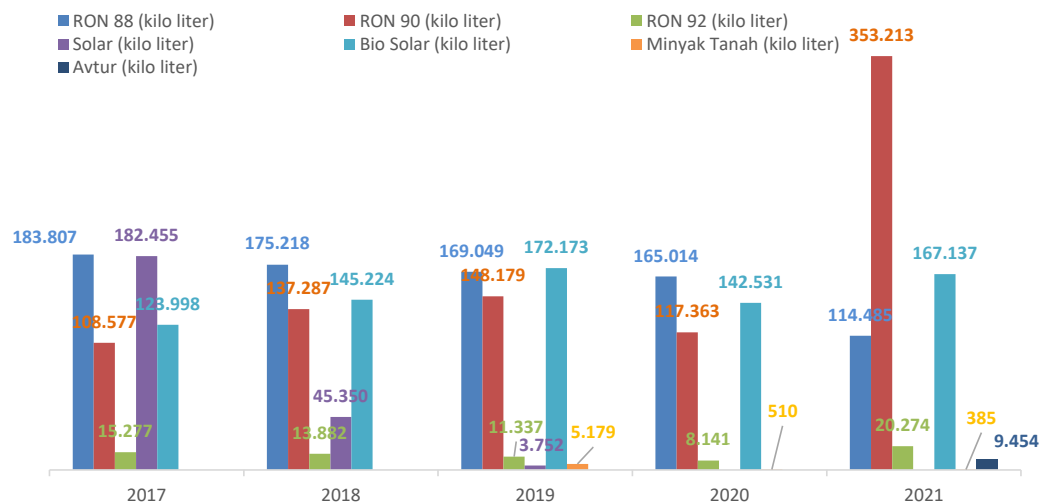
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga lebih dari 50 persen dan terus naik jumlahnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Sumber emisi GRK dari sektor energi didominasi oleh Industri Energi dan Transportasi. Perbandingannya dapat dilihat pada gambar hasil tangkapan layar pada laman *Signsmart* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diambil pada tahun 2023 (gambar 2.4.30). Pada subsektor transportasi, meskipun pernah mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 1.091,03 GgCO₂ setelah pada tahun 2019 sebesar 1.285,70 GgCO₂, jumlahnya kembali naik signifikan pada tahun 2021 sebesar 1.654,02 GgCO₂.



Gambar 2.4. 31 Profil Emisi GRK Sektor Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021 (GgCO₂)
Sumber: *Signsmart KLHK, 2023*

Penurunan emisi GRK pada tahun 2020 ini berkaitan dengan strategi pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 yang masa itu menetapkan adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan kemudian PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dengan membatasi kegiatan di fasilitas/tempat umum, liburan sekolah dan tempat kerja, serta membatasi kegiatan keagamaan. Dengan *tagline* #dirumahaja membuat penggunaan bahan bakar untuk transportasi

berkurang. Penggunaan bahan bakar untuk transportasi dari tahun 2017 hingga tahun 2021 yang diadopsi dari aplikasi Signsmart KLHK ditampilkan pada gambar 2.4.31. Dari tahun 2020 hingga tahun 2021 permintaan akan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dengan *research octan number* (RON) 90 terus meningkat tajam hingga 200,95 persen seiring melonggarnya kebijakan PPKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu mulai hadirnya sosialisasi pemerintah yang secara bertahap akan menghapus BBM jenis premium yang memiliki RON 88, membuat penggunaan BBM jenis ini sejak tahun 2017 mulai melandai turun.



Gambar 2.4. 32 Penggunaan bahan bakar untuk transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021 (kilo liter)
Sumber: Signsmart KLHK, 2023

Penggunaan bahan bakar tidak terlepas dari keberadaan kendaraan bermotor. Bersumber dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah kendaraan bermotor tahun 2022 disajikan pada tabel 2.4.2. Bila dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor tahun 2021 pada tabel 2.4.3 terjadi peningkatan terhadap jumlah sepeda motor sebesar 40,31 persen, mobil penumpang 24,33 persen, mobil barang 15,50 persen, serta kendaraan khusus sebesar 12,19 persen.

Tabel 2.4. 2 Jenis Kendaraan Bermotor dan Bahan Bakar Tahun 2022

Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (unit)	Jumlah Berdasarkan Jenis Bahan Bakar (unit)			
		Bensin	Solar	Gas	Listrik
Sepeda motor	1.054.869	1.054.789	0	0	80
Mobil penumpang	97.715	89.561	8.142	0	12
Mobil bus	88	7	81	0	0
Mobil barang	52.863	29.731	23.132	0	0
Kendaraan khusus	718	446	272	0	0
TOTAL	1.206.253	1.174.534	31.627	0	92

Sumber: Bakuda Babel, 2023

Tabel 2.4. 3 Jenis Kendaraan Bermotor dan Bahan Bakar Tahun 2021

Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (unit)	Jumlah Berdasarkan Jenis Bahan Bakar (unit)			
		Bensin	Solar	Gas	Listrik
Sepeda motor	751.795	751.795	0	0	0
Mobil penumpang	78.594	72.722	5.872	0	0
Mobil bus	1.266	120	1.146	0	0
Mobil barang	45.770	25.407	19.863	0	0
Kendaraan khusus	640	393	247	0	0
TOTAL	878.065	850.437	27.128	0	0

Sumber: Bakuda Babel, 2022

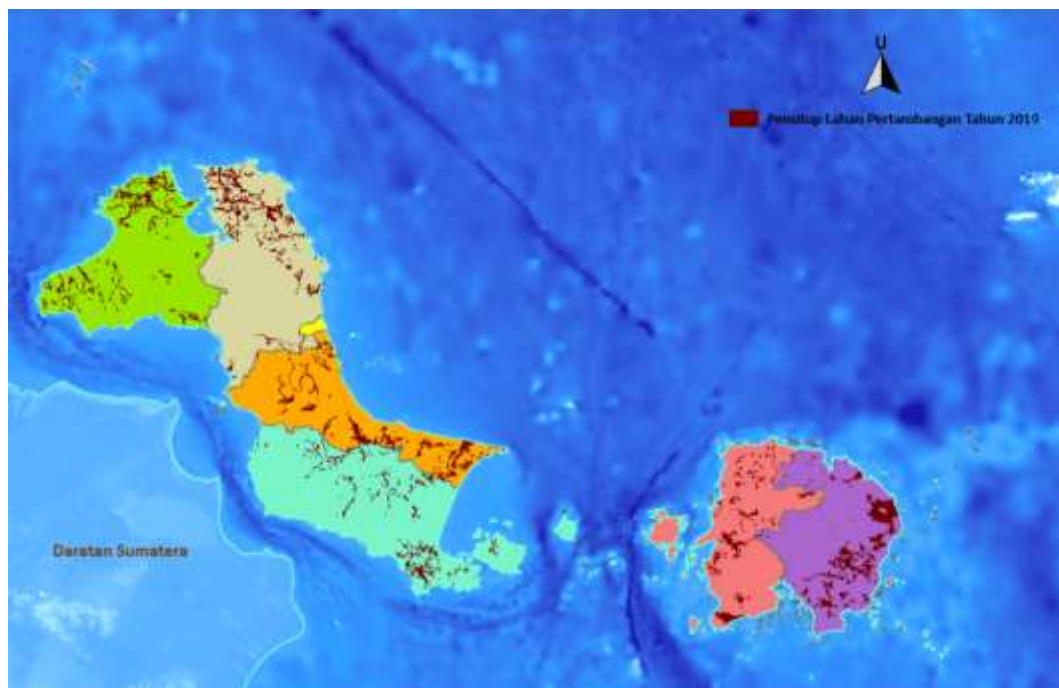
II.4.2.3 Meningkatnya Luas Penutup Lahan Pertambangan

Disisi lain pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diikuti oleh kerusakan lingkungan diakibatkan oleh kegiatan pertambangan. Meskipun harga komoditas timah pada tahun 2022 sempat turun, namun tetap memiliki peran terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama dari sisi pengeluaran. Sebagai salah satu komoditi strategis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, logam timah bersama lada dan sawit mempengaruhi pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat, sehingga membuat komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi sebesar 5,02 persen. Pertumbuhan ini mendorong ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh sebesar 4,40 persen pada tahun 2022 (BPS Babel, 2023).

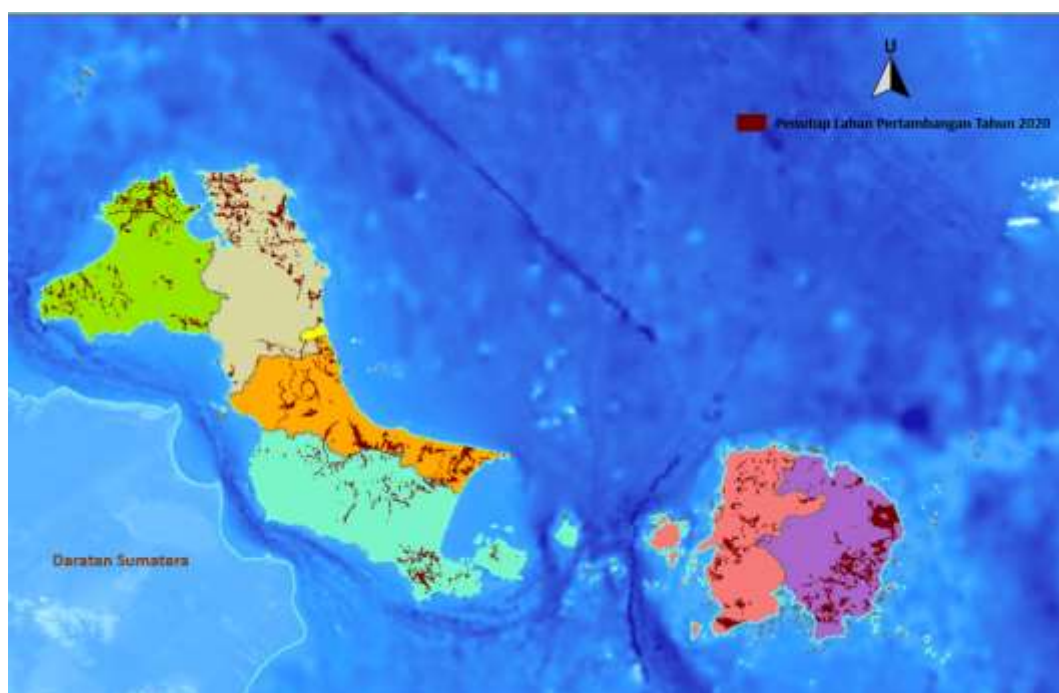
Sektor pertambangan memiliki potensi besar untuk menimbulkan dampak positif pembangunan terhadap ekonomi masyarakat dari aspek peningkatan nilai tambah, pemerataan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta penyerapan tenaga kerja dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Namun, penambangan yang tidak mengikuti ketentuan teknis pertambangan yang tidak berkelanjutan dapat menimbulkan dampak ke lingkungan yang merugikan.

Analisis spasial terhadap luas penutup lahan pertambangan pada peta penutup lahan series tahun 2019 hingga tahun 2021 dari BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang menunjukkan luas dan sebaran penutup lahan pertambangan terus bertambah setiap tahunnya. Lokasi penutup lahan pertambangan tersebut menyebar dengan keterdapatan merata pada setiap kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terkadang bahkan telah merambah masuk dalam kawasan hutan. Tumpang susun penutup lahan pertambangan dengan peta kawasan hutan menurut SK.6614/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 pada gambar 2.4.35.

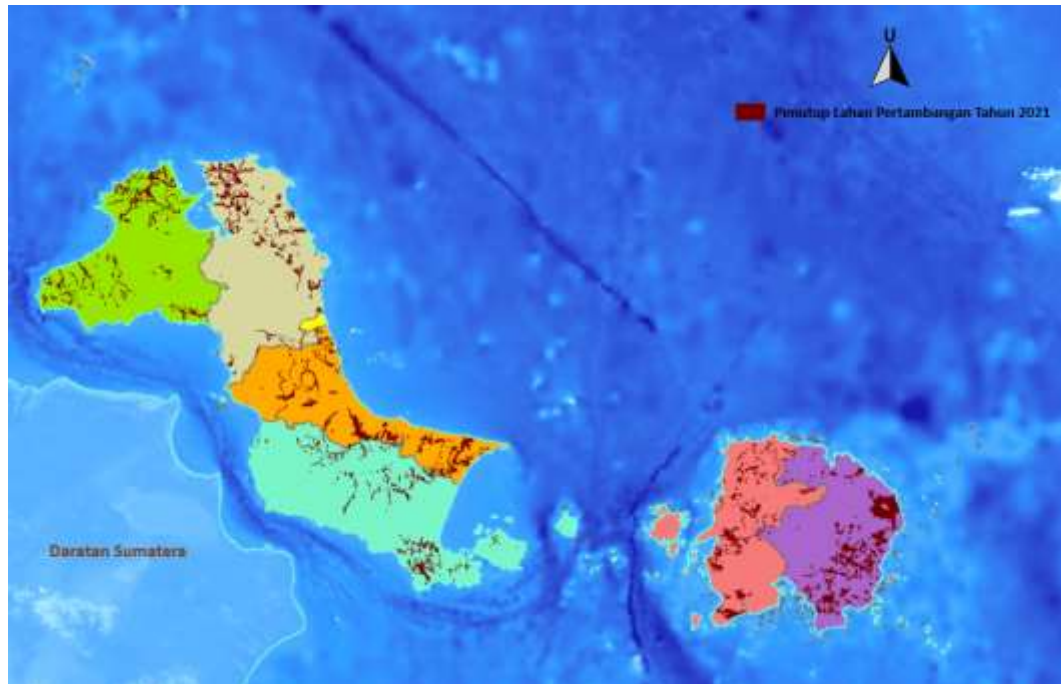
Hasil pengolahan data BPKH Wilayah XIII diperoleh luas penutup lahan pertambangan tahun 2019 (gambar 2.4.32) yaitu 146.426,21 Ha, kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 5,97 persen menjadi seluas 155.168,33 Ha (gambar 2.4.33), dan pada tahun 2021 penutup lahan pertambangan kembali mengalami kenaikan sebesar 1,02 persen menjadi seluas 156.758,62 Ha (gambar 2.4.34).



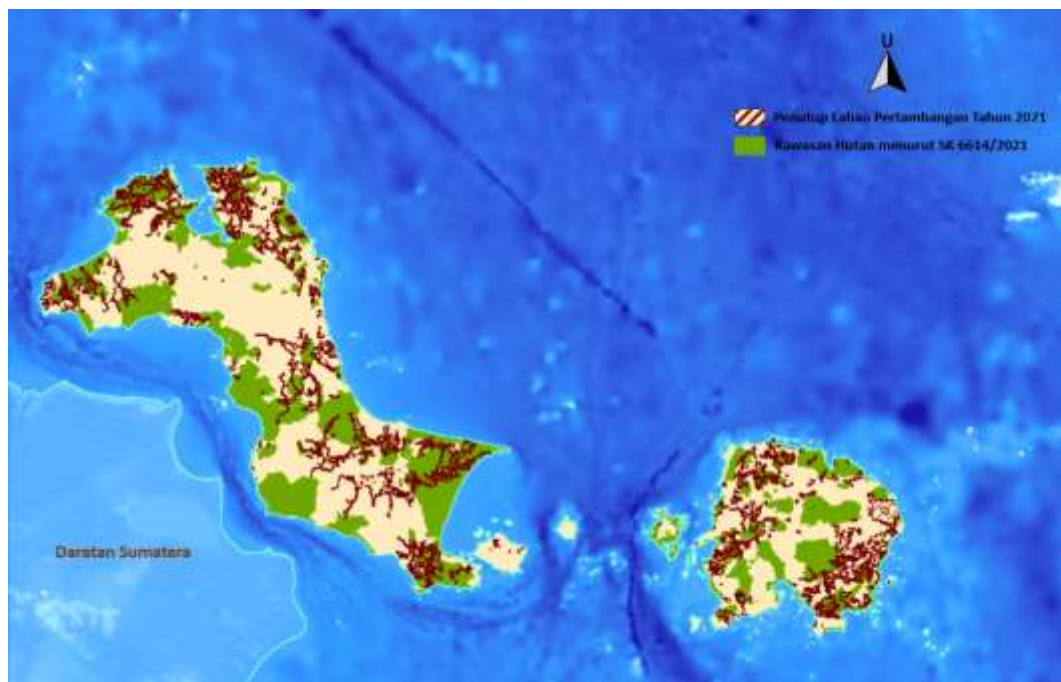
Gambar 2.4. 33 Peta Penutup Lahan Pertambangan Tahun 2019
Sumber: BPKH Wilayah XIII, 2020, diolah



Gambar 2.4. 34 Peta Penutup Lahan Pertambangan Tahun 2020
Sumber: BPKH Wilayah XIII, 2021, diolah



Gambar 2.4. 35 Peta Penutup Lahan Pertambangan Tahun 2021
Sumber: BPKH Wilayah XIII, 2022, diolah



Gambar 2.4. 36 Tumpang Susun Peta Penutup Lahan Pertambangan Tahun 2021 dengan Peta Kawasan Hutan SK.6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sampai Dengan Tahun 2020

Sumber: BPKH Wilayah XIII, 2022, SK 6614/2021, diolah



Gambar 2.4. 37 Sebuah kawasan hutan mangrove di Kabupaten Belitung Timur yang rusak akibat aktivitas tambang ilegal.

Sumber: Gakkum KLHK, 2023, dalam Mongabay, 2023.

Aktivitas penambangan di wilayah Bangka Belitung meninggalkan jejak “unik” berupa lubang bekas galian tambang yang tidak direklamasi. Bentuknya menyerupai kolam atau danau yang terisi air hujan. Oleh masyarakat lokal biasa disebut kolong, kulong atau lobang camuy. Hal ini merupakan salah satu konsekuensi dibalik kegiatan pertambangan timah di darat secara terbuka. Kolong ini jumlahnya ribuan, seiring dengan lokasi penambangan dan tersebar pada daratan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Informasi dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Baturusa Cerucuk, luas kolong ada yang mencapai 37 Ha. Pada beberapa tempat jarak kolong ini tak lebih dari 100 meter dari permukiman dan kerap dijadikan oleh anak-anak sebagai area bermain. Mongabay, 2022 mencatat keterangan dari Walhi bahwa antara tahun 2021-2022 sebanyak 17 kasus tenggelam di kolong, 8 kasus diantaranya anak-anak dan remaja dengan rentang usia 7-20 tahun.



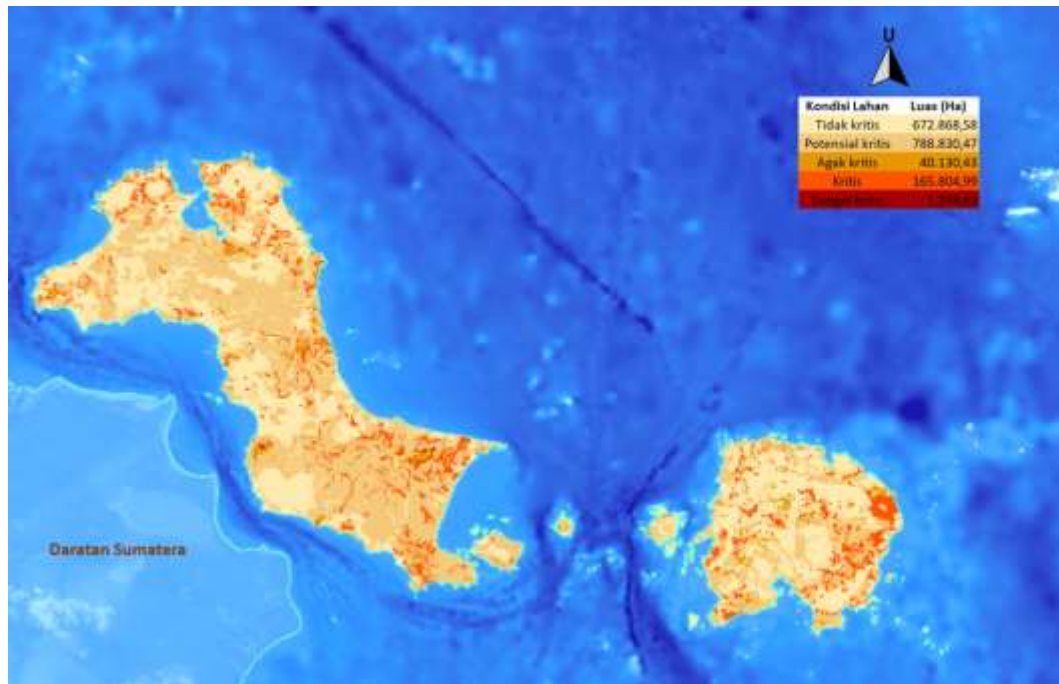
Gambar 2.4. 38 Hasil tangkapan layar citra *google earth* perekaman bulan September 2018, salah satu lokasi kolong yang berdekatan dengan permukiman warga di daerah Kabupaten Bangka
Sumber: Google Earth, 2018

II.4.2.4 Lahan Kritis

Sisi negatif lain pemanfaatan berlebihan akibat aktivitas pertambangan yang tidak berkelanjutan adalah kerusakan terhadap lahan. Pembukaan lahan hutan untuk kegiatan manusia terutama pertambangan yang tidak diiringi dengan reklamasi menyebabkan lahan menjadi kritis karena walaupun dapat memperbaiki diri secara alami namun tentunya memerlukan waktu yang lama. Lahan yang tidak terlindung dengan pepohonan juga jika hujan turun akan menghanyutkan unsur hara sehingga dapat menurunkan produktifitasnya, sehingga kemudian lahan menjadi kritis yang telah mengalami proses kerusakan fisika, kimia, dan biologi.

Seperti diketahui lahan kritis dapat menyebabkan terganggunya fungsi lahan sebagai media pengatur tata air, perlindungan banjir, serta mempengaruhi sedimentasi pada daerah hilir, karenanya lahan kritis berdampak pada penurunan fungsi konservasi, fungsi produksi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sebagai fungsi konservasi, lahan yang kritis tidak mampu lagi untuk menjaga tata air, sumber daya tanah, serta biodiversitas yang hidup di atasnya. Sebagai fungsi produksi lahan yang kritis dipandang tidak mampu lagi sebagai media tumbuh dan untuk

mengembangkan tanaman pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, permukiman, industri, maupun pariwisata. Kondisi lahan kritis ini tentunya dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang akan memanfaatkan lahan tersebut.



Gambar 2.4. 39 Peta lahan kritis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta luas per status lahan

Sumber: BPDAS Baturusa Cerucuk, 2022

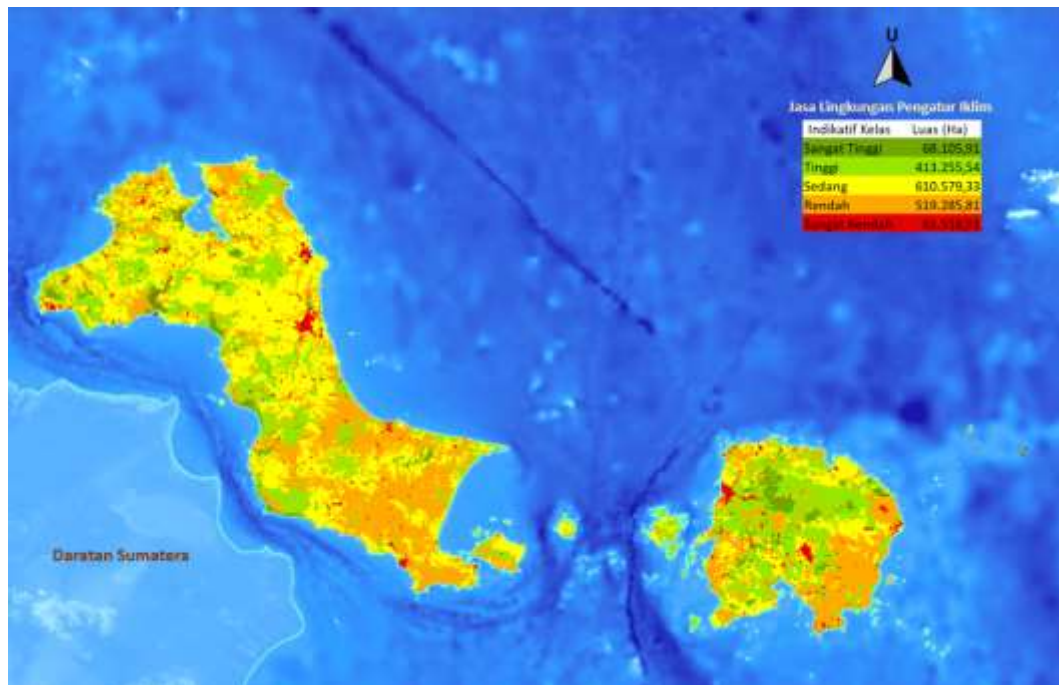
II.4.2.5 Jasa Lingkungan

Menurut Schneiders dan Muller (2017) dalam KLHK, 2019, jasa lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh fungsi ekologisnya. Fungsi ekologis yang selanjutnya disebut sebagai fungsi lingkungan hidup inilah yang ketika dimanfaatkan akan menghasilkan jasa lingkungan. Jasa lingkungan hidup maupun fungsi lingkungan hidup akan terbentuk sesuai dengan karakteristik wilayah yang dipengaruhi oleh karakteristik bentang alam, vegetasi alami serta penggunaan lahannya. Sedangkan karakteristik bentang alam dan vegetasi alami merupakan cerminan dari karakteristik masing-masing ekoregion yang terbentuk dari geomorfologi dan

morfogenesis serta ciri lainnya. Kondisi jasa lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan bencana dilihat dari jasa lingkungan pengatur iklim, jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir, serta jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana.

a. Jasa lingkungan pengatur iklim

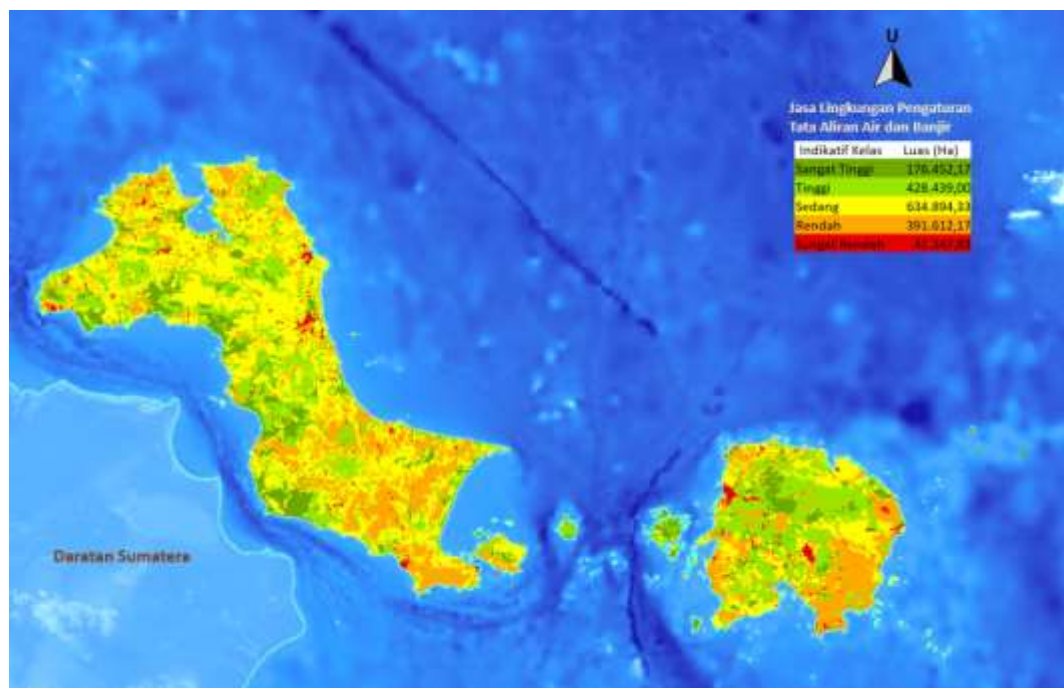
Jasa lingkungan pengatur iklim memiliki fungsi pengaruh ekosistem terhadap iklim lokal dan global melalui tutupan lahan dan proses yang dimediasi secara biologis, dipengaruhi oleh kondisi lahan yang bervegetasi. Peta indikatif jasa lingkungan pengatur iklim terlihat didominasi oleh indikatif kelas sedang 36,50 persen atau seluas 610.579 Ha dan yang paling sedikit luasannya adalah indikatif kelas sangat rendah sejumlah 61.518,91 Ha, sekitar 3,68 persen. Sedangkan indikatif kelas sangat tinggi seluas 68.105,91 Ha (4,07 persen), indikatif kelas tinggi dengan luasan sebesar 413.255,54 Ha (24,70 persen), serta indikatif kelas rendah seluas 519.285,81 Ha (31,04 persen), gambar 2.4.39.



Gambar 2.4. 40 Peta Indikatif Jasa Lingkungan Pengatur Iklim
Sumber: DLHK Babel, 2022

b. Jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir

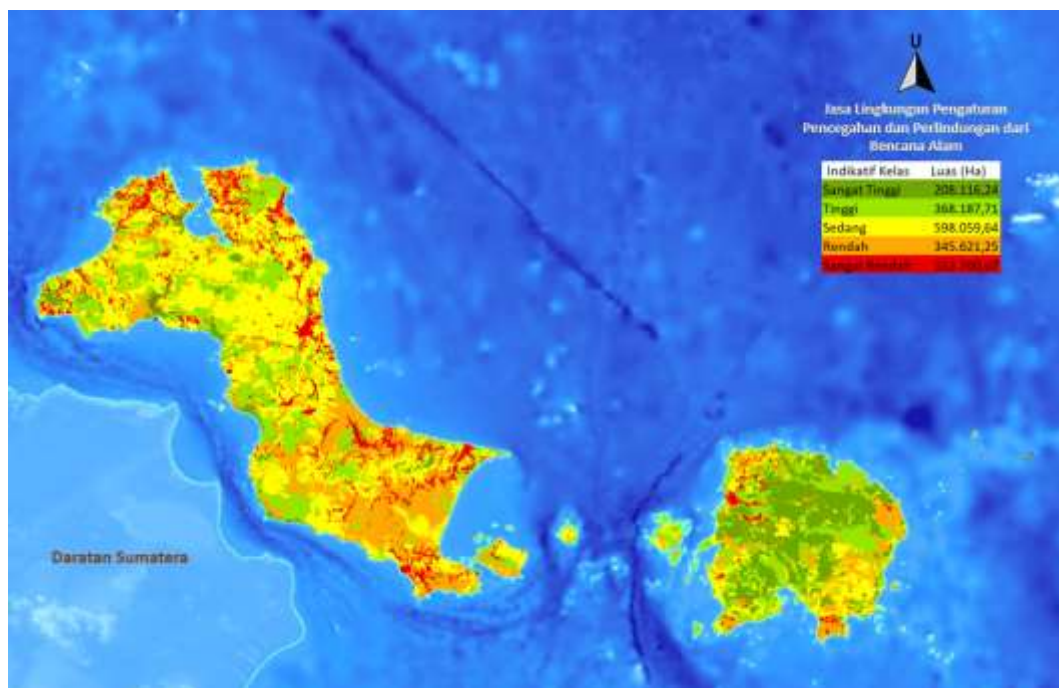
Fungsi jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir mempertimbangkan peran bentang alam dan penutup lahan dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala dengan indikator keadaan kapasitas infiltrasi yaitu litologi, topografi, curah hujan, vegetasi, tutupan lahan dan retensi air yaitu vegetasi, topografi, dan litologi. Peta indikatif jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir didominasi oleh indikatif kelas sedang seluas 634.894,33 Ha (37,96 persen) dan luasan paling kecil luasannya adalah indikatif kelas sangat rendah seluas 41.347,83 Ha (2,47 persen). Indikatif kelas sangat tinggi seluas 176.452,17 Ha (10,55 persen), indikatif kelas tinggi dengan luas 428.439,00 Ha (25,61 persen), serta indikatif kelas rendah dengan luas 391.612,17 Ha atau 24,41 persen dari seluruh luas daratan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 2.4. 41 Peta Indikatif Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir
Sumber: DLHK Babel, 2022

c. Jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam.

Jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam dilihat dari struktur alam yang berfungsi untuk pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, longsor, badai, gempabumi, banjir dan tsunami dengan indikator karakteristik bentangalam, vegetasi, dan penutup lahan. Pada peta indikatif jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam, luasan didominasi oleh indikatif kelas sedang 598.059,64 Ha (35,75 persen). Sedangkan luasan paling kecil ada pada indikatif kelas sangat rendah 152.760,67 Ha (9,13 persen), selanjutnya indikatif kelas sangat tinggi seluas 208.116,24 Ha (12,44 persen), indikatif kelas tinggi dengan luas sebesar 368.187,71 Ha (22,01 persen), serta kelas indikatif rendah seluas 345.621,25 Ha (20,66 persen) dari luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 2.4. 42 Peta Indikatif Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam
Sumber: DLHK Babel, 2022

II.4.3 State

State dipengaruhi oleh *pressure* dan menjadi kondisi atau status lingkungan. State atau kondisi saat ini adalah kondisi Indeks Kualitas Lahan dan berbagai kejadian bencana terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2022. Data kebencanaan tahun 2022 diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Babel), Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan memanfaatkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI BNPB), serta dukungan informasi yang dikumpulkan dari berbagai media.

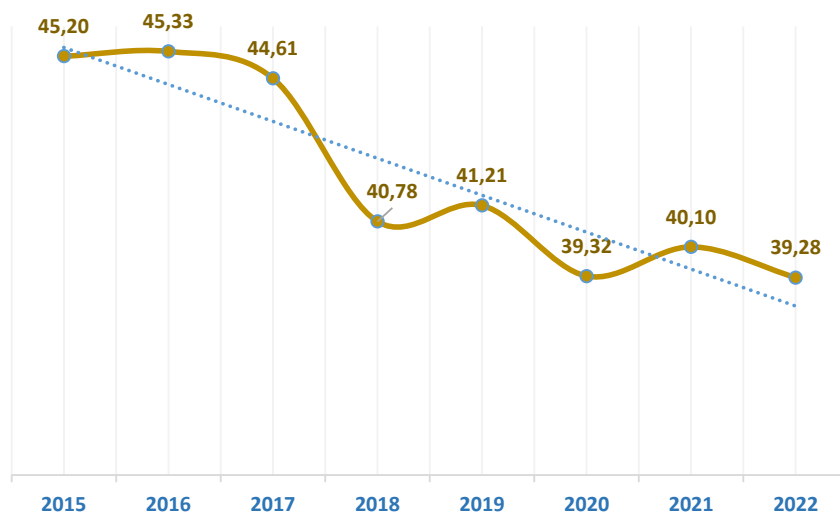
II.4.3.1 Indeks Kualitas Lahan

Berkurangnya tutupan lahan hutan berpengaruh terhadap nilai Indeks kualitas Lahan (IKL), karena kualitas lahan tergambar dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). Sedangkan IKTL merupakan nilai kualitas Tutupan Lahan (TL) yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nilai tutupan hutan merupakan penjumlahan dari 6 (enam) penutup lahan hutan terdiri dari hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, dan hutan rawa sekunder, karena di wilayah Bangka Belitung tidak terdapat jenis penutup lahan hutan tanaman. Sejak tahun 2015 nilai IKL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami *trend* menurun dan berada pada kategori kurang yaitu bernilai antara 25 – 50. Hasil perhitungan dan informasi dari aplikasi IKLH KLHK, 2023 menunjukkan nilai IKL tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 nilai IKL sebesar 41,21 kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 39,32, dan naik kembali tahun 2021 pada angka 40,10 (gambar 2.4.42). Sementara penutup lahan juga mengalami kenaikan dan penurunan antara tahun 2019 hingga 2021 (tabel 2.4.4).

Tabel 2.4. 4 Perbandingan Luas Tutupan Hutan Tahun 2019-2021

Tutupan Lahan Hutan	Luas (Ha)		
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Hutan lahan kering primer	531,44	486,43	487,62
Hutan lahan kering sekunder	101.828,41	83.735,70	87.435,78
Hutan mangrove primer	33.647,10	22.789,09	25.901,27
Hutan mangrove sekunder	32.403,31	40.665,51	40.835,63
Hutan rawa primer	550,92	277,42	381,60
hutan rawa sekunder	44.539,89	49.148,81	50.254,92
Total	213.501,07	197.102,96	205.296,82

Sumber: BPKH Wilayah XIII, 2022, diolah

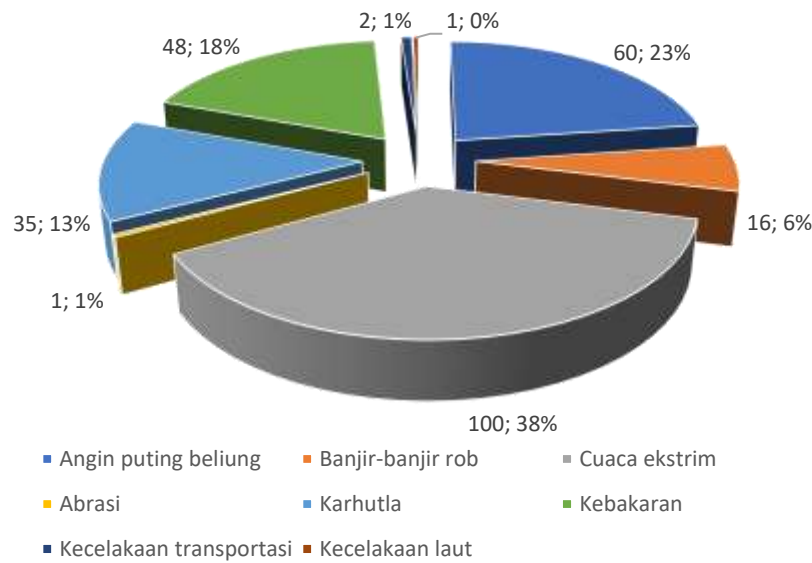


Gambar 2.4. 43 Tren dan nilai Indeks Kualitas Lahan Tahun 2015-2022

Sumber: DLHK Babel, IKLH KLHK, 2023, diolah.

II.4.3.2 Kejadian Bencana

Kejadian bencana baik alam maupun non alam di wilayah Bangka Belitung tercatat oleh BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 263 kejadian terdiri dari angin puting beliung, cuaca ekstrem, banjir dan banjir rob, abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran, kecelakaan transportasi, dan kecelakaan laut (gambar 2.4.3). Kejadian bencana cuaca ekstrem mendominasi sebanyak 100 kejadian atau 38 persen dari seluruh kejadian bencana tahun 2022.



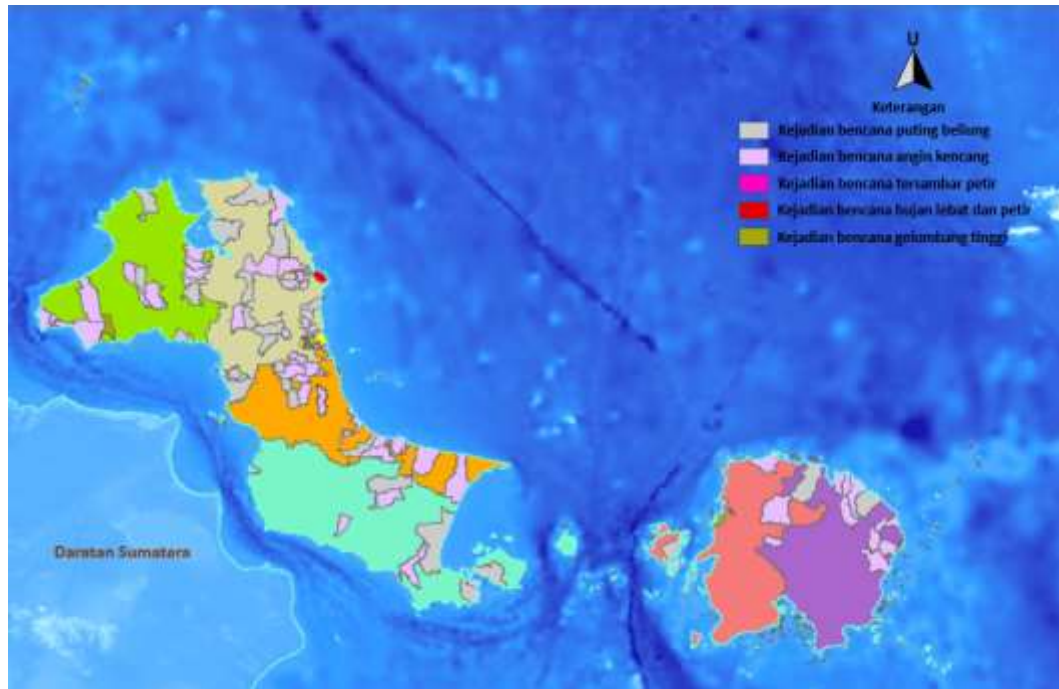
Gambar 2.4. 44 Jumlah kejadian bencana sepanjang tahun 2022
Sumber: BPBD Babel, 2023, diolah.

a. Cuaca Ekstrem

Melalui Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, cuaca ekstrem berkaitan dengan kejadian luar biasa yang menimbulkan bencana, meliputi angin tornado, badai siklon tropis, dan angin puting beliung. Namun, khusus untuk wilayah Indonesia BNPB menetapkan bahwa cuaca ekstrem untuk angin puting beliung saja (BNPB, 3023). Kejadian bencana alam cuaca ekstrem dalam Peraturan Kepala BMKG Nomor Kep.009 Tahun 2010, unsur-unsur cuaca yang dianggap ekstrem, yaitu kejadian cuaca yang tidak normal dan tidak lazim yang dapat mengakibatkan kerugian terutama keselamatan jiwa dan harta benda diantaranya yaitu angin kencang, angin puting beliung, hujan lebat, hujan es, suhu udara ekstrem, siklon tropis, angin puting beliung di lautan, gelombang laut ekstrem, serta gelombang pasang. Berdasarkan BNPB dan BMKG, pembahasan selanjutnya mengenai bencana alam cuaca ekstrem sudah termasuk dengan angin puting beliung.

Sepanjang tahun 2022, kejadian bencana alam cuaca ekstrem sebanyak 160 kejadian termasuk angin puting beliung. Angin puting beliung

sebanyak 60 kejadian, tersambar petir 2 kejadian, hujan lebat dan petir 1 kejadian, serta gelombang tinggi 2 kejadian, sisanya berupa angin kencang di sejumlah daerah (gambar 2.4.44).



Gambar 2.4. 45 Sebaran kejadian bencana cuaca ekstrem di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: BPBD Babel, 2023, diolah

Berdasarkan peta desa, terpetakan bahwa kejadian bencana cuaca ekstrem ini tersebar merata di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta terjadi hampir setiap bulan sepanjang tahun 2022 (tabel 2.4.6). Umumnya kejadian cuaca ekstrem ini berupa angin kencang atau bahkan puting beliung yang bersamaan dengan hujan sangat lebat. BMKG, 2022 menganalisis kejadian angin puting beliung di Kelurahan Ampui, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, pada tanggal 8 Februari 2022 yang berdampak pada 3 (tiga) unit rumah penduduk dan 1 (satu) fasilitas umum yaitu sebuah masjid. Ketika itu kecepatan angin 7 knot, pola angin pada ketinggian 3.000 ft menunjukkan adanya sirkulasi eddy sebelah barat Pulau Kalimantan. Adanya sirkulasi

eddy ini menyebabkan timbulnya daerah pertemuan angin yang disebut konvergensi di sekitar wilayah Bangka Belitung. Konvergensi ini menyebabkan potensi pertumbuhan awan konvektif sangat besar di wilayah Pulau Bangka dan sekitarnya. Pembentukan awan-awan konvektif juga didukung oleh kondisi suhu muka air laut yang hangat berkisar 28-30°C, sehingga memberikan pasokan uap air yang cukup banyak untuk membentuk hujan. Diketahui awan konvektif jenis *cumulonimbus* sebagai penyebab hujan lebat, angin kencang beserta badai petir.



Gambar 2.4. 46 Dampak bencana alam angin puting beliung terhadap rumah penduduk di Kelurahan Ampui, Pangkalpinang tanggal 8 Februari 2022.

Sumber: BPBD Kota Pangkalpinang dalam BMKG, 2022

Awan konvektif jenis *cumulonimbus* juga terbentuk karena belokan (*shear*) akibat adanya pusat tekanan di atas Laut Cina Selatan seperti yang terjadi di wilayah Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 29 Maret 2022, sehingga terjadi angin puting beliung dengan kecepatan angin 15 knot disertai hujan lebat. Kondisi muka air laut yang hangat berkisar 28-30°C juga memberikan kontribusi terhadap

pasokan uap air yang banyak untuk membentuk awan yang selanjutnya menjadi hujan. Sesuai dengan data yang diperoleh dari Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang, pada bulan Maret 2022 keadaan curah hujan rata-rata bulanan kategori normal curah hujan tinggi antara 300-500 mm tepatnya 328,6 mm (gambar 2.4.24). Curah hujan rata-rata bulanan kategori sangat tinggi terpantau dari Stasiun Meteorologi Kelas III Hanandjoedin Tanjungpandan pada Bulan Oktober mencapai 666,5 mm dan pada Bulan Oktober ini terjadi 3 kejadian bencana cuaca ekstrem berupa angin kencang dan hujan deras di wilayah Kabupaten Belitung.



Gambar 2.4. 47 Dampak bencana alam angin puting beliung terhadap rumah penduduk di Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 29 Maret 2022.

Sumber: BPBD Kota Pangkalpinang dalam BMKG, 2022

Tabel 2.4. 5 Kejadian Bencana Alam Cuaca Ekstrem

Lokasi	Tanggal	Keterangan
Desa Air Saga, Kecamatan Belitung, Kabupaten Belitung	10 Januari 2022	Terjadi angin kencang dan hujan lebat, menyebabkan 2 unit rumah rusak ringan, dan atap toko tertimpa baliho
Perairan Karangmiyang, Pasirpadi, Kota Pangkalpinang	12 Januari 2022	Angin kencang dan gelombang tinggi menyebabkan seorang pemancing

Lokasi	Tanggal	Keterangan
		terjatuh ke laut dan kemudian ditemukan tewas.
Dusun Teluk Dalam, Desa Juru Seberang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung	4 Februari 2022	Angin kencang dan gelombang tinggi menyebabkan pemancing terbawa arus dan ditemukan meninggal dunia.
Kelurahan Ampui, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang	8 Februari 2022	Angin puting beliung menyebabkan 3 unit rumah warga dan fasilitas umum yaitu 1 buah masjid rusak ringan.
- Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka - Dusun Bokor, Desa Air Duren, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka - Dusun Air Hanyut, Kelurahan Kudai, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka	6 Maret 2022	Angin puting beliung menyebabkan pohon tumbang menghalangi jalan sehingga mengganggu kegiatan masyarakat
Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka	6 Maret 2022	Angin puting beliung menyebabkan 7 unit rumah rusak ringan, berdampak pada 7 KK dan 21 jiwa
Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat	6 Maret 2022	Angin puting beliung menyebabkan sebuah rumah rusak ringan, berdampak pada 1 KK dan 3 jiwa
Kelurahan Lubuk Kelik, Kecamatan Sungailiat	6 Maret 2022	Angin puting beliung menyebabkan 3 unit rumah rusak ringan, berdampak pada 3 KK dan 9 jiwa
Dusun Pulau Panjang, Desa Penutuk, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	8 Maret 2022	Angin puting beliung menyebabkan sebuah rumah rusak berat dan 10 unit rumah rusak ringan, berdampak pada 11 KK dan 33 jiwa
Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah	11 Maret 2022	Angin puting beliung menyebabkan 26 unit rumah rusak ringan, berdampak pada 26 KK dan 92 jiwa, serta pohon tumbang menghalangi jalan mengganggu aktivitas warga
Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah	11 Maret 2022	Angin puting beliung diiringi angin kencang dan hujan deras
Desa Labu Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka	23 Maret 2022	Angin puting beliung menyebabkan 25 unit rumah rusak ringan, berdampak pada 25 KK dan 105 jiwa, serta pohon tumbang menghalangi jalan mengganggu aktivitas warga
Desa Bakam, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka	23 Maret 2022	Angin puting beliung menyebabkan 14 unit rumah rusak ringan, berdampak pada 14 KK dan 52 jiwa
Dusun Pasir dan Dusun Kalibening, Desa Baturusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka	26 Maret 2022	Angin puting beliung menyebabkan 73 unit rumah rusak ringan-sedang, 30 unit rumah berat, 3 fasilitas umum yaitu atap kantor PLTD Baturusa, podium lapangan bola

Lokasi	Tanggal	Keterangan
		Baturusa, dan satu gedung sekolah dasar rusak sedang, berdampak pada 125 KK, 439 jiwa
Desa Sinar Sari, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	26 Maret 2022	Angin puting beliung menyebabkan 46 unit rumah rusak ringan, 1 unit rumah rusak berat, 1 fasum rusak ringan yaitu atap sebuah masjid, berdampak pada 48 KK 205 jiwa
Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	26 Maret 2022	Angin puting beliung menyebabkan 1 unit rumah rusak ringan, berdampak pada 1 KK 3 jiwa
Dusun Assalam, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	26 Maret 2022	Angin puting beliung menyebabkan 1 unit rumah rusak ringan, berdampak pada 1 KK 4 jiwa
Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah	29 Maret 2022	Angin puting beliung menyebabkan 95 unit rumah rusak ringan, 32 unit rumah rusak sedang, 7 unit rumah rusak berat, 2 fasum rusak ringan, 2 fasum rusak sedang, berdampak terhadap 137 KK 482 Jiwa, 3 orang luka ringan, 1 orang luka berat
Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang	29 Maret 2022	Angin puting beliung menyebabkan 4 unit rumah rusak ringan, 4 unit rumah rusak sedang, 2 unit fasum rusak ringan, berdampak terhadap 8 KK, 30 jiwa
Kampung Sawah Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat	31 Maret 2022	Angin puting beliung menyebabkan 1 unit rumah rusak sedang, berdampak terhadap 1 KK, 3 jiwa
Kelurahan Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	31 Maret 2022	Angin kencang dan hujan lebat, menyebabkan pohon tumbang menutupi ruas jalan, mengganggu aktivitas masyarakat
Desa Simpang Yul, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat	1 April 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 44 unit rumah rusak ringan dan 1 fasum yaitu Kantor Desa Simpang Yul rusak ringan, 44 KK 88 jiwa terdampak
Dusun 1,2,3, dan 4 Desa Petaling, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka	1 April 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 85 unit rumah rusak ringan, 85 KK 255 jiwa terdampak
Desa Petaling, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka	1 April 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 9 unit rumah rusak ringan, 9 KK 27 jiwa terdampak
Dusun 4 dan Dusun 2, Desa Kemuja, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka	1 April 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 5 unit Rumah rusak ringan, 5 KK 15 jiwa terdampak
Desa Keretak Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah	2 April 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 1 unit rumah rusak sedang, 74 unit rumah rusak ringan, 1 fasum yaitu Pasar Keretak rusak berat, 1 fasum yaitu atap SMPN 1 Sungai Selan

Lokasi	Tanggal	Keterangan
		rusak ringan, 75 KK 226 jiwa terdampak
Desa Keretak Atas Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah	2 April 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 45 unit rumah rusak ringan, 1 fasum yaitu podium lapangan sepak bola rusak ringan, 45 KK 143 jiwa terdampak
Desa Air Buluh Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka	2 April 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 68 unit rumah rusak ringan, 68 KK 544 jiwa terdampak
Desa Nangka Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan	2 April 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 18 unit rumah rusak ringan, 1 fasum yaitu mushola rusak ringan, 18 KK 72 jiwa terdampak
Desa Baru Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	3 April 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 1 unit toko rusak ringan
Desa Air Kelik Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur	6 April 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 5 unit rumah rusak ringan
Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka	6 April 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 21 unit rumah rusak ringan, 2 rumah rusak sedang, 23 KK 77 jiwa terdampak
Desa Mislak Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat	7 April 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 1 unit rumah rusak ringan, 1 KK 4 jiwa terdampak
Dusun Jebu Laut, Desa Kelabat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat	7 April 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 1 unit rumah rusak ringan, 1 KK 5 jiwa terdampak
Desa Aik Madu, Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur	17 Mei 2022	Angin kencang dan hujan lebat, menyebabkan pohon tumbang menimpa tiang listrik, sehingga mengganggu aliran listrik ke rumah warga
Kawasan Industri Air Kantung, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka	18 Mei 2022	Hujan lebat dan petir, server/komputer rusak sedang karena tersambar listrik
Desa Jelutung Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka	26 Mei 2022	Angin kencang mengakibatkan 2 unit rumah rusak ringan, 2 KK 3 jiwa terdampak
Dusun Rambak Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka	26 Mei 2022	Angin kencang mengakibatkan 2 unit rumah rusak sedang, 2 KK 7 jiwa terdampak
Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka	26 Mei 2022	Angin kencang mengakibatkan 1 unit rumah rusak ringan, 1 KK 3 jiwa terdampak
Dusun Air Layang dan Dusun Sidomulyo, Kelurahan Bukit Layang Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka	26 Mei 2022	Angin kencang mengakibatkan 2 unit rumah rusak ringan, 2 KK 9 jiwa terdampak

Lokasi	Tanggal	Keterangan
Perairan Karang Gading, Kota Pangkalpinang	26 Mei 2022	Kapal terbalik karena angin kencang dan gelombang tinggi mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, 3 orang luka sedang
Desa Air Gegas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan	27 Mei 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 22 unit rumah rusak ringan, 22 KK 66 jiwa terdampak
Desa Maras Senang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka	28 Mei 2022	Angin kencang dan hujan deras mengakibatkan 1 unit rumah rusak ringan, 1 KK 3 jiwa terdampak
Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang	28 Mei 2022	Angin kencang dan hujan deras mengakibatkan 1 unit rumah rusak ringan, 1 KK 3 jiwa terdampak
Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang	28 Mei 2022	Angin kencang dan hujan deras menyebabkan 2 unit rumah rusak ringan, 2 KK 6 jiwa terdampak
Kelurahan Lontong Pancur, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang	28 Mei 2022	Angin kencang dan hujan deras menyebabkan 1 unit rumah rusak ringan, 7 KK 21 jiwa terdampak
Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang	28 Mei 2022	Angin kencang dan hujan deras menyebabkan 1 unit rumah rusak ringan
Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang	28 Mei 2022	Angin kencang dan hujan deras menyebabkan 1 unit rumah rusak ringan, 1 KK 3 jiwa terdampak
Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Grimaya, Kota Pangkalpinang	28 Mei 2022	Angin kencang dan hujan deras menyebabkan 1 unit rumah rusak ringan
Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	28 Mei 2022	Angin kencang dan hujan deras menyebabkan pohon tumbang
Kolong Kepoh, Kelurahan Semabung Lama, Kota Pangkalpinang	28 Mei 2022	Angin kencang dan hujan deras menyebabkan pohon tumbang
Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah	28 Mei 2022	Angin kencang dan hujan deras menyebabkan 14 unit rumah rusak ringan, 14 KK 42 jiwa terdampak
Desa Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah	28 Mei 2022	Angin kencang dan hujan deras menyebabkan 37 unit rumah rusak ringan, 1 unit rumah rusak sedang, 38 KK 114 jiwa terdampak
Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah	28 Mei 2022	Angin kencang dan hujan deras menyebabkan 15 unit rumah rusak ringan, 15 KK 45 jiwa terdampak
Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah	28 Mei 2022	Angin kencang dan hujan deras menyebabkan 5 unit rumah rusak ringan, 1 unit rumah rusak sedang, 6 KK 18 jiwa terdampak
Desa Teru Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah	28 Mei 2022	Angin kencang dan hujan deras menyebabkan 39 unit rumah rusak ringan, 39 KK 117 jiwa terdampak

Lokasi	Tanggal	Keterangan
Desa Pasir Garam Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah	28 Mei 2022	Angin kencang dan hujan deras menyebabkan 13 unit rumah rusak ringan, 13 KK 39 jiwa terdampak
Desa Mesu Timur Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah	28 Mei 2022	Angin kencang dan hujan deras menyebabkan 20 rumah rusak ringan, 20 KK 60 jiwa terdampak
Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah	28 Mei 2022	Angin kencang dan hujan deras menyebabkan 7 rumah rusak ringan, 7 KK 21 jiwa terdampak
Kelurahan Berok, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah	28 Mei 2022	Angin kencang dan hujan deras menyebabkan 13 unit rumah rusak ringan, 13 KK 39 jiwa terdampak
Desa Penyak Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah	28 Mei 2022	Angin kencang dan hujan deras menyebabkan 1 unit rumah rusak ringan, 1 KK 3 jiwa terdampak
Desa Terak Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah	28 Mei 2022	Angin kencang dan hujan deras menyebabkan 4 unit rumah rusak ringan, 4 KK 12 jiwa terdampak
Desa Beruas Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah	28 Mei 2022	Angin kencang dan hujan deras menyebabkan 2 unit rumah rusak ringan, 2 KK 6 jiwa terdampak
Desa Sungkap Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah	28 Mei 2022	Angin kencang dan hujan deras menyebabkan 4 unit rumah rusak ringan, 4 KK 12 jiwa terdampak
Desa Cambai Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah	28 Mei 2022	Angin kencang dan hujan deras menyebabkan 2 unit rumah rusak ringan, 2 KK 6 jiwa terdampak
Desa Cambai Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah	28 Mei 2022	Angin kencang dan hujan deras menyebabkan 2 unit rumah rusak ringan, 2 KK 6 jiwa terdampak
Desa Puput Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah	28 Mei 2022	Angin kencang dan hujan deras menyebabkan 2 unit rumah rusak ringan, 2 KK 6 jiwa terdampak
Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah	28 Mei 2022	Angin kencang dan hujan deras menyebabkan 2 unit rumah rusak ringan, 2 KK 6 jiwa terdampak
Kelurahan Koba Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah	28 Mei 2022	Angin kencang dan hujan deras menyebabkan 4 unit rumah rusak ringan, 4 KK 12 jiwa terdampak
Desa Padang Mulia Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah	28 Mei 2022	Angin kencang dan hujan deras menyebabkan 6 unit rumah rusak ringan, 16 KK 48 jiwa terdampak
Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah	28 Mei 2022	Angin kencang dan hujan deras menyebabkan 1 unit rumah rusak ringan, 1 KK 3 jiwa terdampak
Gunong Kik Kara Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur	28 Mei 2022	Angin kencang, hujan deras serta petir, 9 orang penambang yang sedang berteduh tersambar petir, 1 orang tewas, 8 orang luka ringan
Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat	28 Mei 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 1 unit rumah rusak ringan, 1 KK 4 jiwa terdampak

Lokasi	Tanggal	Keterangan
Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang	30 Mei 2022	Angin puting beliung menyebabkan 6 unit rumah rusak ringan, 6 KK 28 jiwa terdampak
Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan	15 Juni 2022	Angin puting beliung menyebabkan 3 unit rumah rusak ringan 2 unit rumah rusak berat, 5 KK 20 jiwa terdampak
Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	16 Juni 2022	Angin kencang dan hujan deras menyebabkan pohon tumbang sehingga jalan menuju kantor Kesbangpol terhalang pohon tumbang, 1 unit fasum (kantor Kesbangpol) rusak ringan
Dusun Damai Baru Desa Mengkubang Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur	16 Juni 2022	Angin kencang dan hujan deras, 1 unit rumah rusak sedang dan 1 unit kendaraan roda dua rusak sedang tertimpa pohon tumbang, 1 KK, 3 jiwa terdampak
Desa Bentaian Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	16 Juni 2022	Pohon tumbang akibat angin kencang dan hujan deras, menimpa kabel listrik dan jalan sehingga aktivitas warga terhambat
Desa Sidoharjo Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan	21 Juni 2022	Angin kencang dan hujan deras beserta petir menyambar kWh listrik, 1 unit rumah rusak ringan, 1 orang warga luka ringan, 1 KK 3 jiwa terdampak
Desa Mapur Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka	28 Juni 2022	Angin kencang dan hujan deras beserta petir menyambar kWh listrik, 1 unit rumah rusak ringan, 1 KK 3 jiwa terdampak
Dusun Jampan, Desa Kelabat, Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat	2 Juli 2022	Angin puting beliung menyebabkan 5 unit rumah rusak ringan, 3 unit rumah rusak sedang, 8 KK 30 jiwa terdampak
Desa Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah	7 Juli 2022	Angin puting beliung menyebabkan 18 unit rumah rusak ringan, 1 unit rumah rusak berat, 19 KK 68 jiwa terdampak
Desa Sempan Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka	22 Juli 2024	Angin puting beliung menyebabkan 1 unit rumah rusak sedang, 1 KK 4 jiwa terdampak
Kampung Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat	23 Juli 2022	Angin kencang dan hujan deras mengakibatkan 1 unit rumah rusak sedang, 1 KK 2 jiwa terdampak
Desa Pangkal Beras Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	24 Juli 2022	Angin kencang dan hujan deras beserta petir mengakibatkan 1 unit rumah rusak ringan, 1 KK 5 jiwa terdampak
Desa Ranggas,Desa Air Gegas,Desa Air Bara, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan	13 Agustus 2022	Angin kencang dan hujan deras beserta petir mengakibatkan 80 unit rumah rusak ringan, 80 KK, 320 jiwa terdampak

Lokasi	Tanggal	Keterangan
Desa Penyak Kecamatan Koba, Desa Perlang dan Desa Trubus Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah	13 Agustus 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 20 unit rumah rusak ringan, 1 unit rumah rusak sedang, 1 unit rumah rusak berat, 22 KK 88 jiwa terdampak
Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan	25 Agustus 2022	Angin kencang dan hujan deras mengakibatkan 1 buah fasilitas umum berupa pondok peneduh rusak ringan
Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat	2 September 2022	Angin kencang dan hujan deras beserta petir menyebabkan 1 unit rumah rusak ringan dan 1 orang terluka ringan, 1 KK 3 jiwa terdampak
Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat	2 September 2022	Angin kencang dan hujan deras mengakibatkan pohon tumbang menimpa rumah warga, 1 unit rumah rusak ringan, 1 KK 4 jiwa terdampak
Desa Pusuk Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	7 September 2022	Angin kencang dan hujan deras mengakibatkan pohon tumbang menimpa rumah warga, 1 orang warga luka sedang, 1 unit rumah rusak ringan, 1 KK 2 jiwa terdampak
Desa Benteng Kota, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat	7 September 2022	Angin puting beliung menyebabkan 1 unit rumah rusak sedang, 1 KK 4 jiwa terdampak
Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang	9 September 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 4 unit rumah rusak ringan, 4 KK 12 jiwa terdampak
Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang	9 September 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 11 unit rumah ringan, 11 KK 33 jiwa terdampak
Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang	9 September 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 50 unit rumah ringan, 1 unit fasilitas pendidikan rusak ringan, 50 KK 150 jiwa terdampak
Kelurahan Bukit Intan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	9 September 2022	Angin kencang hujan deras, menyebabkan pohon tumbang menghalangi jalan, aktivitas warga terganggu
Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	9 September 2022	Angin kencang hujan deras, menyebabkan pohon tumbang menghalangi jalan, aktivitas warga terganggu
Dusun Taruna Mulya Desa Lalang Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	9 September 2022	Angin kencang hujan deras, menyebabkan pohon tumbang menghalangi jalan, aktivitas warga terganggu
Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang	9 September 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 22 unit rumah ringan, 22 KK 66 jiwa terdampak

Lokasi	Tanggal	Keterangan
Kelurahan Kampung Bintang, Kecamatan Rangkui	9 September 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 1 unit rumah ringan, 1 KK 3 jiwa terdampak
Kelurahan Gajah Mada, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang	9 September 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 1 unit rumah ringan, 1 KK 3 jiwa terdampak
Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang	9 September 2022	1 unit fasilitas peribadatan rusak ringan
Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka	11 September 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 3 unit rumah ringan, 3 KK 10 jiwa terdampak
Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka	11 September 2022	Angin kencang hujan deras beserta petir menyebabkan kWhmeter rumah warga rusak, 1 unit rumah rusak sedang, 1 KK 4 jiwa terdampak
Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang	12 September 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan pohon tumbang menimpa kabel listrik dan menghalangi jalan, aktivitas warga terganggu
Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	13 September 2022	Sambaran petir menyebabkan 1 unit rumah kontrakan terbakar, 10 jiwa terdampak
Perairan Tuing, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka	13 September 2022	Angin kencang mengguncang kapal yang mengalami kerusakan mesin dan sedang diperbaiki, akibatnya 1 orang ABK terlempar ke laut dan meninggal dunia
Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	18 September 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan pohon tumbang menimpa kabel listrik dan menghalangi jalan, aktivitas warga terganggu
Desa Pasir Putih Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan	18 September 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 1 unit rumah ringan, 1 musholla rusak ringan, 1 KK 3 jiwa terdampak
Desa Sadai, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan	19 September 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan pohon tumbang menimpa 1 unit rumah rusak ringan, 1 KK 7 jiwa terdampak
Dusun Ban Motor, Desa Lalang Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	23 September 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan pohon tumbang di beberapa titik menimpa 1 unit rumah rusak ringan, menimpa kabel listrik dan menghalangi jalan, aktivitas warga terganggu, 1 KK 3 jiwa terdampak
Dusun Taruna Mulya Desa Lalang Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	23 September 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan 1 unit rumah rusak ringan, 1 KK 4 jiwa terdampak

Lokasi	Tanggal	Keterangan
Dusun Harapan Jaya Desa Lalang Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	23 September 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan 1 unit rumah rusak ringan, 1 KK 2 jiwa terdampak
Dusun Numpang Empat Desa Mekar Jaya Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	23 September 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan 1 unit rumah rusak ringan, 1 KK 3 jiwa terdampak.
Dusun Numpang Empat Desa Mekar Jaya Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	24 September 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan pohon tumbang menghalangi ruas jalan, aktivitas warga terganggu
Desa Mekar Jaya Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	25 September 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan pohon tumbang menimpa halaman rumah warga, 1 KK 3 jiwa terdampak
Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang	4 Oktober 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan pohon tumbang menimpa 1 unit fasilitas umum, yaitu pagar bangunan sekolah dasar
Desa Gadong Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	4 Oktober 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan pohon tumbang menghalangi ruas jalan, aktivitas warga terganggu
Desa Air Begantong Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung	9 Oktober 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan pohon tumbang menghalangi ruas jalan, aktivitas warga terganggu
Kelurahan Lesung Batang Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung	11 Oktober 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan pohon tumbang menimpa rumah warga, 1 unit rumah rusak ringan, 1 KK 3 jiwa terdampak
Dusun Pejam, Desa Pelawan Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka	15 Oktober 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 7 unit rumah rusak ringan, 8 unit rumah rusak sedang, 3 unit rumah rusak berat, 1 orang warga terluka, 18 KK 53 jiwa terdampak
Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung	17 Oktober 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan pohon tumbang menghalangi ruas jalan, aktivitas warga terganggu
Kampung Seberang, Kelurahan Gedung Nasional, Kecamatan Taman Sari	26 Oktober 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan pohon tumbang menghalangi ruas jalan dan pekarangan, aktivitas warga terganggu
Dusun 1,2, dan 4 Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka	26 Oktober 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 9 unit rumah rusak ringan, 1 unit rumah rusak sedang, 1 unit Taman Pendidikan Alquran rusak sedang, 10 KK 39 jiwa terdampak
Perairan Karang Berang Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat	26 Oktober 2022	Angin kencang hujan deras merobohkan bagan milik masyarakat,

Lokasi	Tanggal	Keterangan
		3 nelayan jatuh ke laut, 1 orang meninggal dunia
Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka	26 Oktober 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 7 unit rumah rusak ringan, 1 unit fasum rusak ringan, 7 KK 34 jiwa terdampak
Kelurahan Lontong Pancur, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang	4 November 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan pohon tumbang menghalangi ruas jalan dan pekarangan, aktivitas warga terganggu
Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan	6 November 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 7 unit rumah rusak ringan, 3 KK 13 jiwa terdampak
Air Duren Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka	12 November 2022	Petir menyambar 2 unit kWhmeter rumah warga, 2 unit rumah rusak ringan
Dusun Kampung Simpang Desa Lubuk Besar Kabupaten bangka Tengah	17 November 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan 1 unit rumah rusak sedang, 1 KK 4 jiwa terdampak
Dusun Seberang desa Selinsing Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur	17 November 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan 1 unit rumah rusak berat, 1 KK 4 jiwa terdampak
Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur	17 November 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan 1 unit rumah rusak sedang, 1 KK 2 jiwa terdampak
Dusun Koperasi Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit	17 November 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan 1 unit rumah rusak sedang, 1 KK 2 jiwa terdampak
Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	17 November 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan pohon tumbang menghalangi ruas jalan dan pekarangan, aktivitas warga terganggu
Desa Rambak Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka	17 November 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan 1 unit rumah rusak ringan, 1 KK 3 jiwa terdampak
Dusun Mentabak Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka	17 November 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan 1 unit rumah rusak ringan, 1 KK 1 jiwa terdampak
Desa Air Ketekok Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung	18 November 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan pohon tumbang menghalangi ruas jalan dan pekarangan, aktivitas warga terganggu
Desa Sadap Perlang Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah	21 November 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan 1 unit rumah rusak sedang, 1 KK 7 jiwa terdampak
Desa Kelapa Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	21 November 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 7 unit rumah rusak ringan, 1 unit rumah rusak sedang, 3 KK 14 jiwa terdampak

Lokasi	Tanggal	Keterangan
Desa Terentang Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	21 November 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 1 unit rumah rusak sedang, 1 KK 3 jiwa terdampak
Dusun Tutut, Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka	21 November 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 3 unit rumah rusak ringan, 1 KK 13 jiwa terdampak
Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang	23 November 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan 1 unit rumah rusak ringan, 1 KK 4 jiwa terdampak
Kelurahan air Salemba Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang	23 November 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan pohon tumbang menimpa kabel listrik sehingga aliran ke rumah warga terganggu
Desa Kelapa Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	29 November 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan jembatan penghubung antara wilayah RT 11 dan RT 03 putus
Dusun Cendil Desa Cendil Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur	3 Desember 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 20 unit rumah rusak ringan, 3 unit rumah rusak sedang, dan 6 unit rumah rusak berat, serta 1 fasilitas umum berupa GOR Desa rusak sedang, 29 KK 88 jiwa terdampak
Desa Kepoh Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	11 Desember 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 1 unit rumah rusak ringan, 1 KK 4 jiwa terdampak
Perumahan Meranti Kelurahan Simpang Jongkong Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah	12 Desember 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan pohon tumbang menimpa rumah warga dan ruas jalan, 1 unit rumah rusak ringan, akses jalan warga terhambat
Pantai Batu Kapur Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	17 Desember 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan pohon tumbang, sebuah rumah makan rusak sedang
Desa Pagarawan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka	18 Desember 2022	Angin puting beliung mengakibatkan 2 unit rumah rusak ringan, 2 KK 8 jiwa terdampak
Desa Air Duren (Pohin) Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka	22 Desember 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan 1 unit rumah rusak ringan, 1 KK 3 jiwa terdampak
Desa Kota, Kecamatan Tanjungpandan	22 Desember 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan pohon tumbang menghalangi ruas jalan dan pekarangan, aktivitas warga terganggu
Dusun IV Ranggam, Desa Belo Laut, Kecamatan mentok, Kabupaten Bangka Barat	30 Desember 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan 1 unit rumah rusak ringan, 1 KK terdampak
Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat	30 Desember 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan 1 unit rumah rusak ringan, 1 KK terdampak

Lokasi	Tanggal	Keterangan
Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat	30 Desember 2022	Angin kencang hujan deras menyebabkan 1 unit rumah rusak ringan, 1 KK terdampak

Sumber: BPBD Babel, 2023, berbagai media online, 2022

b. Kebakaran

Kebakaran bangunan sepanjang tahun 2022 tercatat oleh BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan dukungan data dari BPBD kabupaten/kota sebanyak 49 kejadian dengan didominasi oleh korsleting listrik sebagai penyebab utamanya. Penyebab lain adalah pembakaran sampah dan kayu oleh pekerja proyek perbaikan sebuah gedung olahraga milik Kabupaten Bangka Barat yang apinya merambat dan membakar gedung olahraga tersebut, juga adanya pembakaran kayu oleh warga untuk mengusir tawon kemudian terkena dinding rumah, serta anak-anak bermain api membakar kayu kemudian terkena dinding dapur yang terbuat dari bahan kayu.



Gambar 2.4. 48 Proses pemadaman api kebakaran pada sebuah ruko perusahaan ekspedisi Tan Express di kawasan Pasar Pembangunan, Kota Pangkalpinang yang terjadi pada tanggal 4 Januari 2022.

Sumber: Bangka Pos, 2022



Gambar 2.4. 49 Proses pemadaman api pada kebakaran Gudang Agen Minyak Premium Solar (AMPS) di Manggar Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 29 Maret 2022.
Sumber: Bangka Pos, 2022

Kebakaran besar terjadi di Manggar, Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 29 Maret 2022. Sebuah Gudang Agen Minyak Premium Solar (AMPS) terbakar hebat akibat adanya percikan api pada mesin pompa saat memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dari mobil tangki. Gudang tersebut terbakar habis oleh jago merah yang juga membakar 1 buah mobil tangka serta 5 unit sepeda motor, dan kerugian seluruhnya ditaksir +/- Rp.700.000.000,-, serta 6 orang pegawai mengalami luka bakar serius hingga 50 persen (Posbelitung.co, 2022).

Tabel 2.4. 6 Kejadian Bencana Kebakaran

Lokasi	Tanggal	Keterangan
Desa Sinar Sari, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	3 Januari 2022	1 unit rumah rusak berat, 1 KK 4 jiwa terdampak kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik
Ruko Tan Express (Ekspedisi) Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang	4 Januari 2022	1 unit ruko rusak sedang akibat kebakaran karena korsleting listrik
Desa Air Limau Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat	8 Januari 2022	1 unit fasilitas umum yaitu <i>sporthall</i> rusak ringan akibat pembakaran sampah dan kayu proyek oleh pekerja

Lokasi	Tanggal	Keterangan
Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung	9 Januari 2022	1 unit rumah semi permanen yang dijadikan gudang barang bekas rusak berat akibat terbakar dengan penyebab belum diketahui
Desa Tepus, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan	14 Januari 2022	1 unit rumah rusak ringan, 1 rumah rusak berat, 2 KK 6 jiwa terdampak kebakaran penyebab belum diketahui, dan dinding berbahan kayu
Jl. Kampung Melayu Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang	15 Januari 2022	1 unit rumah yang dijadikan tempat usaha ayam geprek rusak sedang akibat kebakaran karena korsleting listrik dan dinding berbahan dasar kayu
Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	25 Januari 2022	1 unit rumah rusak berat, 1 KK 2 jiwa terdampak kebakaran yang disebabkan oleh penggunaan kompor berbahan bakar minyak tanah dan dinding berbahan dasar kayu
Dusun III, Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat	31 Januari 2022	1 unit rumah rusak sedang, 1 KK 3 jiwa terdampak kebakaran yang disebabkan oleh penggunaan kompor gas yang kurang baik dan dinding berbahan dasar kayu
Kampung Sekip Lama, Pal 2 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat	13 Februari 2022	1 unit rumah rusak berat, 1 KK 2 jiwa terdampak kebakaran. Dinding berupa papan dan atap berbahan dasar asbes, penyebab kebakaran belum diketahui
Jl. Pilang RT. 9b RW 02 Desa Dukong, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	15 Februari 2022	1 unit rumah rusak berat, 1 KK 3 jiwa terdampak kebakaran yang belum diketahui penyebabnya
Jl SDN 3 RT. 06 Desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah	23 Februari 2022	1 unit rumah rusak ringan, penyebab korsleting listrik
Jl Haji Abdul Manan Desa Kimak Dusun 03 Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka	25 Februari 2022	1 unit rumah rusak ringan, penyebab korsleting listrik
Desa Tukak Sadai Kecamatan Tukak Sadai	7 Maret 2022	1 unit rumah rusak berat, 1 KK 3 jiwa terdampak. Penyebab karena penggunaan obat nyamuk bakar
Jl. Bukit Permai Gg. Amal RT 07 RW 03 Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	26 Maret 2022	1 unit rumah rusak berat, 1 KK 3 jiwa terdampak. Penyebab pembakaran tumpukan kayu oleh anak korban, bagian dapur yang berdinding papan
APMS Bentaian Jl. Raya Manggar, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	29 Maret 2022	1 unit Gudang Agen Minyak Premium Solar (AMPS) beserta 1 unit mobil tangki berisi BBM jenis Pertalite dan 6 unit sepeda motor, 6 orang mengalami luka bakar hingga 50

Lokasi	Tanggal	Keterangan
		persen. Kerugian ditaksir sebesar +/- Rp.700.000.000,-
Pal 6 Dusun I RT 02 RW 01 Air Belo Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat	29 Maret 2022	1 unit rumah rusak berat, 1 KK 3 jiwa terdampak. Penyebab pembakaran belum diketahui karena terjadi ketika penghuni sedang ke kebun
Dusun Cangu Desa Gantung Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur	30 Maret 2022	2 unit rumah yang berdempetan rusak berat, 2 KK 4 jiwa terdampak. Penyebab pembakaran diperkirakan berasal dari lampu pelita pada peternakan jangkrik
Jl. Polwan RT 17 Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah	16 April 2022	1 unit rumah rusak berat, 1 KK 3 jiwa terdampak. Penyebab korsleting listrik dan kerugian +/- Rp.300.000.000,-
Jl Pasir Ketapang No. 2 Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang	25 April 2022	1 unit Gudang Kasur Bigland rusak sedang, penyebab korsleting listrik, kerugian ditaksir +/- Rp.500.000.000,-
Jl. Wahab Aziz RT 08 RW 04 Kelurahan Damai Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung	27 April 2022	1 unit rumah rusak berat, 1 KK 3 jiwa terdampak dan penyebab kebakaran belum diketahui
Pantai Pasir Padi, Kota Pangkalpinang	28 April 2022	1 unit mobil rusak berat akibat korsleting listrik, kerugian hingga +/- Rp.50.000.000,-
Jl. Mentok Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang	1 Mei 2022	1 unit rumah rusak ringan akibat korsleting listrik
Jl. Trem, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang	4 Mei 2022	1 unit Gudang buah beserta 1 unit mobil jenis truk rusak berat terbakar akibat korsleting listrik
RT 25 TW 06 Dusun Langkang Desa Lintang Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur	5 Mei 2022	1 unit rumah rusak ringan, 1 KK 4 jiwa terdampak kebakaran akibat korsleting listrik lampu tidur
Jl. Soekarno Hatta RT 14 RW 04 Kecamatan Pangkalan Baru	10 Mei 2022	1 unit ruko rusak berat terbakar karena korsleting listrik
Desa Baru Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	16 Mei 2022	1 unit fasum rusak berat terbakar akibat korsleting listrik
Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka	4 Juni 2022	1 unit gudang dan 6 unit kandang rusak berat terbakar, penyebab belum diketahui
Desa Belo Laut Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat	7 Juni 2022	1 unit rumah rusak berat, 1 KK 2 jiwa terdampak kebakaran akibat puntung rokok
Desa Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung	14 Juni 2022	1 unit rumah rusak berat, penyebab kebakaran adalah sambaran petir pada trafo listrik.

Lokasi	Tanggal	Keterangan
Desa Air Gantang, RT 11 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat	9 Agustus 2022	1 unit rumah rusak sedang, 1 KK 23 jiwa terdampak kebakaran akibat korsleting listrik
JL.Jend. Sudirman Belakang Hotel Yasmin Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat	12 Agustus 2022	1 unit rumah rusak berat, 1 KK 1 jiwa terdampak kebakaran akibat dibakar oleh anak korban yang mengalami gangguan jiwa
Perumahan Guru Kelurahan Berok RT.03 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah	17 Agustus 2022	1 unit rumah rusak berat, 1 unit rumah rusak ringan, 2 KK 7 jiwa terdampak kebakaran akibat korsleting listrik
Desa Tebing Kecamatan Kelapa	19 Agustus 2022	1 unit fasilitas umum yaitu kantor SDN 3 rusak sedang terbakar akibat korsleting listrik
Jl. Pantai RT 01 RW 04 Kelurahan Tanjung Binga Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung	2 September 2022	1 unit gudang penyimpanan ikan asin rusak berat, 1 unit sepeda motor rusak ringan akibat terbakar dengan penyebab belum diketahui
Jl. Sekolah No. 28 RT 02 Kelurahan Berok Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah	7 September 2022	1 unit rumah rusak sedang, 1 KK 4 jiwa terdampak kebakaran penyebab belum diketahui
Jl. Mayor Syafrie Rachman/Lorong 1 Pasar Lama, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat	14 September 2022	1 buah toko elektronik rusak sedang, penyebab korsleting listrik, kerugian senilai +/- Rp.60.000.000,-
Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung	22 September 2022	1 unit warung seluas 3 x 6 meter rusak sedang, penyebab belum diketahui
Jl. Jenderal Sudirman, Dusun Batu Penyus, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur	22 September 2022	1 unit rumah dan 3 unit sepeda motor rusak berat, 2 KK 3 jiwa terdampak kebakaran, penyebab dibakar oleh anggota keluarga yang dalam pengaruh alkohol
Parit 5 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	3 Oktober 2022	1 unit rumah rusak ringan terbakar penyebab korsleting listrik
Jl. Selanget No. 33 Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang	21 Oktober 2022	1 unit rumah rusak ringan terbakar penyebab korsleting listrik
Jl. Pilang Pelataran RT 17 RW 05 No. 187 Dusun Pilang Desa Dukong Kecamatan Simpang Pesak	31 Oktober 2022	1 unit gudang rongsokan rusak berat terbakar karena penggunaan api untuk mengisur tawon
Jl. Sriwijaya RT 01 RW 01 Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui	3 November 2022	1 unit rumah rusak berat, 1 KK 1 jiwa terdampak kebakaran yang diduga api berasal dari tungku
Perumahan Bumi Arwana Air Ruai Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka	7 November 2022	1 unit rumah rusak ringan, 1 KK 4 jiwa terdampak kebakaran disebabkan tabung freon kulkas terbakar

Lokasi	Tanggal	Keterangan
Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar	29 November 202	2 unit ruko rusak sedang (ruko servis lampu dan ruko laundry), penyebab adanya percikan api dari pengering pakaian
Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat	1 Desember 2022	1 unit rumah rusak ringan pada bagian teras, akibat petir menyambar pom mini dan percikan api mengenai teras rumah warga, berdampak pada 1 KK 4 jiwa
Dusun Baru Selatan RT 17 RW 08 Desa Baru Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	12 Desember 2022	1 unit rumah rusak sedang, 1 KK 4 jiwa terdampak kebakaran penyebab korsleting listrik
Jl. Gudang Subur RT 08 RW 03 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui	18 Desember 2022	1 unit rumah rusak berat, 1 KK 1 jiwa terdampak kebakaran akibat korsleting listrik dan 1 orang meninggal dunia
Jl. Merdeka Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung	23 Desember 2022	1 unit kios BBM rusak ringan

Sumber: BPBD Babel, 2023, berbagai media online, 2022

c. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan yang selanjutnya disebut dengan karhutla menjadi bencana ketiga dengan kejadian terbanyak sepanjang tahun 2022 yaitu 35 kejadian atau 13 persen dari seluruh kejadian bencana yang dicatat oleh BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyebab karhutla terbanyak adalah karena tidak diketahui penyebabnya. Namun ada juga karena dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab, puntung rokok yang dibuang sembarangan serta akibat pembakaran sampah. Keterangan lebih detail mengenai kejadian bencana karhutla, lokasi, tanggal kejadian serta penyebabnya dapat dilihat pada tabel 2.4.7.

Tabel 2.4. 7 Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Lokasi	Tanggal	Keterangan
Jl. Raya Tanjung Kelayang, Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung	26 Januari 2022	Luas area terbakar 1,5 Ha, penyebab tidak diketahui
Kelurahan Berok, RT 12, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah	29 Januari 2022	Luas area terbakar 0,5 Ha, penyebab dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab

Lokasi	Tanggal	Keterangan
Dusun Pal 4, Desa Penyak, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah	30 Januari 2022	Luas area terbakar 1,5 Ha, penyebab tidak diketahui
Desa Arung Dalam Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah	2 Februari 2022	Luas area terbakar 0,5 Ha, penyebab puntung rokok yang dibuang sembarangan
Jl. Tanjung Bunga Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	7 Februari 2022	Luas area terbakar 0,2 Ha, penyebab tidak diketahui
Belakang Kantor Camat Koba Jl. Kencana 2 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah	14 Februari 2022	Luas area terbakar 1 Ha, penyebab dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab
Dusun I Ahoy Desa Belo Laut Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat	15 Februari 2022	Luas area terbakar 1 Ha, penyebab tidak diketahui
Jl. Pantai Tanjung Langka Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah	19 Februari 2022	Luas area terbakar 0,5 Ha, penyebab tidak diketahui
Daerah Kolong 2 Belakang Puskesmas Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	22 Februari 2022	Luas area terbakar 0,5 Ha, penyebab tidak diketahui
Jl. Simpang Renggang Dusun Jaya Desa Lenggang Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur	25 Februari 2022	Luas area terbakar 3 Ha, penyebab tidak diketahui
Kolong 2 Belakang Puskesmas Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	27 Februari 2022	Luas area terbakar 1 Ha, penyebab pembukaan lahan dengan membakar
Pantai Tanjung Langka Kelurahan Padang Mulya Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah	28 Februari 2022	Luas area terbakar 15 Ha, penyebab tidak diketahui
Jl. Kuala Baru Kelurahan Berok Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah	28 Februari 2022	Luas area terbakar 1,5 Ha, penyebab pembukaan lahan dengan membakar
Dusun Jaya Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur	13 Maret 2022	Luas area terbakar 1,5 Ha, penyebab dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab
Belakang Bengkel Mobil RT 01 Desa Selinsing Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur	14 April 2022	Luas area terbakar 6 Ha, penyebab tidak diketahui
Dusun Urisan Jaya Desa Padang Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	9 Juli 2022	Luas area terbakar 0,03 Ha, penyebab yaitu pembakaran sampah
Belakang Gedung BI Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	9 Juli 2022	Luas area terbakar 2,5 Ha, penyebab tidak diketahui
Samping Spam Tebat Gadong Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	27 Juli 2022	Luas area terbakar 0,03 Ha, penyebab tidak diketahui

Lokasi	Tanggal	Keterangan
Kolong Kero Dekat Warkop Andi dan Perumahan Istana Padang Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	7 Agustus 2022	Luas area terbakar 0,5 Ha, penyebab tidak diketahui
Kolong Kero Desa Padang Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	9 Agustus 2022	Luas area terbakar 1 Ha, penyebab dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab
Kolong Kero Desa Padang Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	10 Agustus 2022	Luas area terbakar 0,01 Ha, penyebab dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab
Jl. Kolong Kero Dusun Padang 1, RT 11 RW 05 Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	25 Agustus 2022	Luas area terbakar 0,15 Ha, penyebab dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab
Dusun Sumping RT 03, Desa Batu Penyu Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	25 Agustus 2022	Luas area terbakar 2 Ha, penyebab tidak diketahui
Perumahan Kantor Bupati Kabupaten Bangka Selatan	6 September 2022	Luas area terbakar 0,2 Ha, penyebab tidak diketahui
Jl. Lapangan Bola SMP N 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	6 September 2022	Luas area terbakar 0,15 Ha, penyebab puntung rokok yang dibuang sembarangan
Jl. Kolong Kero Dusun Padang II RT 11 RW 05 Desa Padang Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	9 September 2022	Luas area terbakar 0,02 Ha, penyebab dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab
Jl. Raya Damar, Desa Suka Mandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur	15 September 2022	Luas area terbakar 0,03 Ha, penyebab dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab
Jl. Jagal Dusun Padang II, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	15 September 2022	Luas area terbakar 0,075 Ha, penyebab dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab
Kolong Kero Desa Padang Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	17 September 2022	Luas area terbakar 1 Ha, penyebab dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab
RT 01 RW 01 Kelurahan Bacang kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	22 September 2022	Luas area terbakar 0,5 Ha, penyebab tidak diketahui
Dekat kompleks Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang	28 September 2022	Luas area terbakar 1 Ha, penyebab tidak diketahui
Dusun Sekip Desa Lalang Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	28 September 2022	Luas area terbakar 1 Ha, penyebab tidak diketahui
Dusun Seberang Desa Selinsing Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur	29 September 2022	Luas area terbakar 3 Ha, penyebab tidak diketahui
Jl. Fajar Dalam RT 38 RW 13 Desa Aik Rayak Kecamatan	1 Oktober 2022	Luas area terbakar 0,5 Ha, penyebab pembukaan lahan dengan membakar

Lokasi	Tanggal	Keterangan
Tanjungpandan, Kabupaten Belitung		
Jl. Ujung Lintang pertigaan arah Jalan Parit Tebu RT 01 Desa Gantung Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur	15 Oktober 2022	Luas area terbakar 0,005 Ha, penyebab tidak diketahui
Jl. Baher Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	2 November 2022	Luas area terbakar 0,5 Ha, penyebab tidak diketahui
Desa Padang Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	28 Desember 2022	Luas area terbakar 1 Ha, penyebab tidak diketahui

Sumber: BPBD Babel, 2023, berbagai media online, 2022



Gambar 2.4. 50 Upaya pemadaman api yang berasal dari kejadian bencana karhutla pada tanggal 11 April 2022 di Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, api bermula dari pembakaran sampah oleh warga di pekarangan belakang rumah yang kemudian merambat ke lahan melalui pohon aren dan didukung oleh keadaan cuaca yang terik serta angin yang berhembus cukup kencang.

Sumber: Bangkapos.com, 2022

d. Banjir dan Banjir Rob

Mayoritas banjir pada tahun 2022 tercatat terjadi di kawasan pesisir, dan terjadinya banjir ini ketika hujan lebat yang bersamaan dengan pasang air laut atau dikenal dengan banjir rob atau banjir yang disebabkan oleh meluapnya air pasang. Terdapat beberapa lokasi yang telah sering terjadi

lokasi banjir seperti wilayah Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat.



Gambar 2.4. 51 Kondisi kejadian banjir rob yang bersamaan dengan turunnya hujan lebat pada tanggal 5 Januari 2022 di Kampung Tanjung Laut, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat.

Sumber: BPBD Babel, 2022

Tabel 2.4. 8 Kejadian Bencana Banjir dan Banjir Rob

Lokasi	Tanggal	Keterangan
Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang	4 Januari 2022	Disebabkan oleh hujan lebat dan pasang air laut, 144 KK 183 jiwa terdampak
Kampung Sebrang, Kelurahan Gedung Nasional, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang	4 Januari 2022	Disebabkan oleh hujan lebat dan pasang air laut, 150 KK 230 jiwa, serta 1 fasilitas umum berupa PAUD terdampak
Kelurahan Tanjung, Kampung Tanjung Laut, Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat	4 Januari 2022	Disebabkan hujan lebat dan pasang air laut, wilayah pemukiman dataran rendah, saluran air yang tidak memadai, serta kondisi sungai, 84 KK 336 jiwa terdampak
Kelurahan Tanjung, Kampung Tanjung Tengah, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat	5 Januari 2022	Disebabkan hujan lebat dan pasang air laut, 30 KK 120 jiwa terdampak
Desa Pangkal Niur, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka	11 Januari 2022	Disebabkan hujan lebat, 2 KK 9 jiwa terdampak
Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	4 Mei 2022	Disebabkan hujan lebat dan aktivitas TI yang membuang limbahnya ke aliran sungai membuat aliran

Lokasi	Tanggal	Keterangan
		terhambat dan meluap ke rumah warga, 27 KK 81 jiwa terdampak
Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	4 Mei 2022	Disebabkan hujan lebat, 67 KK 201 jiwa terdampak
Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	4 Mei 2022	Disebabkan hujan lebat, 17 KK 51 jiwa terdampak
Dusun Arab Desa Kurnia Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	15 Juni 2022	Akibat hujan deras dan pasang air laut, 23 KK 66 jiwa terdampak
Kampung Laut Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat	16 Juni 2022	Disebabkan hujan deras dan pasang air laut, 74 KK 320 jiwa terdampak
Kelurahan Aik Pelempang Jaya Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	30 Agustus 2022	Disebabkan hujan deras, 2 KK 9 jiwa terdampak
Kampung Tanjung Laut Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat	12 Desember 2022	Disebabkan hujan deras, 60 KK 250 jiwa terdampak
Kelurahan Padang Mulia, Sinar Laut Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah	25 Desember 2022	Disebabkan hujan deras dan pasang air laut, 10 KK 42 jiwa terdampak
Kampung Tanjung Laut Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat	26 Desember 2022	Disebabkan hujan deras dan pasang air laut, 50 KK 200 jiwa terdampak

Sumber: BPBD Babel, 2023, berbagai media online, 2022

e. Kecelakaan Transportasi

Pada bencana akibat kecelakaan transportasi BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya mencatat 2 (dua) kejadian pada tahun 2022 yang keduanya berkaitan dengan bencana alam hujan lebat dan kondisi cuaca yaitu,

- Berlokasi di Jalan Raya Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, sebuah minibus Xenia bertabrakan dengan truk, 2 orang penumpang dan sopir minibus meninggal dunia, hujan sangat lebat mengguyur saat peristiwa ini terjadi pada tanggal 19 Januari 2022;

- Sebuah helikopter milik Badan Pertahanan dan Keamanan (Baharkam) Polri dari Pangkalan Bun hendak ke Tanjungpandan hilang kontak di perairan Pulau Bukulimau, Kabupaten Belitung Timur. Diketahui saat dinyatakan hilang kontak helikopter yang mengangkut 4 (empat) orang anggota Polri dilaporkan sedang melewati cuaca buruk pada tanggal 27 November 2022. Kondisi cuaca buruk ini dibenarkan oleh Kepala Desa Bukulimau yang mengatakan saat itu terjadi hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Pada Senin, tanggal 28 November 2022 satu jenazah ditemukan dan telah teridentifikasi di perairan Kabupaten Belitung Timur tepatnya sekitar 3 mil dari pantai Burung Mandi bersama beberapa bagian badan helikopter. Selanjutnya keempat personil Polri penumpang helikopter dinyatakan gugur. (Kompas.com, 2022).



Gambar 2.4. 52 Dokumentasi sebelum helikopter terbang dari Pangkalan Bun ke Tanjungpandan, salah satunya merupakan helikopter yang jatuh di perairan Pulau Bukulimau karena tidak berhasil melewati kondisi cuaca buruk pada 27 November 2022.
Sumber: Dok. Pusdalop BPBD Babel, 2022

f. Abrasi

Akibat gelombang pasang pada 14 November 2022, sebanyak 9 unit rumah warga di Pulau Gersik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung rusak terkikis hantaman gelombang tersebut, bahkan 6 unit diantaranya rusak berat hingga rubuh pada beberapa bagian. Pada kejadian ini tercatat sebanyak 9 KK (Kepala Keluarga) terdampak. Menurut Kepala Desa Pulau Gersik, abrasi ini sudah terjadi bertahun-tahun, namun tahun 2022 merupakan yang terparah (Bangkapos.com, 2022).



Gambar 2.4. 53 Kondisi rumah warga Pulau Gersik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung terdampak pasca gelombang pasang yang menyebabkan abrasi pantai pada 14 November 2022.

Sumber: Bangkapos.com, 2022

g. Kecelakaan Laut

Terjadi kecelakaan tabrakan antara 2 unit kapal yaitu Roro MV Serasi 1 yang mengangkut 495 unit kendaraan dan MV Batangharimas yang bermuatan kargo pada tanggal 1 Desember 2022 di perairan Sebagin, Selat Bangka, Kabupaten Bangka Selatan. Pada insiden ini Roro MV Serasi 1 mengalami karam, namun seluruh awak kapal yang berjumlah 17 orang

yang telah beraada dalam sekoci (*lifecraft*) berhasil diselamatkan oleh KM Lotus Ungu yang melintas di lokasi kejadian dan kemudian diserahkan kepada Tim Basarnas yang melanjutkan mengantar hingga ke Tanjungkalian.



Gambar 2.4. 54 Proses evakuasi awak kapal Roro MV Serasi 1 dari KM Lotus Ungu ke kapal milik Basarnas pada tanggal 1 Desember 2022 karena mengalami karam setelah bertabrakan dengan MV Batanghari Mas.

Sumber: Kompas.com, 2022

II.4.4 Impact

Impact atau dampak adalah perubahan pada *state* yang dapat berdampak pada kesehatan manusia, ekologi, atau biaya (Lee, 2013). Sunarti, dkk, 2017 dalam menganalisis tentang bencana terkait penambangan menyebutkan dampak bencana akibat kegiatan PETI di daerah Merangin, Jambi sebagai berikut:

- Terhadap manusia: gangguan pola penghidupan masyarakat, kesehatan, kesejahteraan, bahkan kemiskinan;
- Pada sisi sosial: perubahan pola interaksi masyarakat;
- Pada sisi ekonomi: kerugian finansial;

- Pada sisi budaya: kemerosotan kearifan lokal masyarakat, dan dapat terjadi konflik sosial.

Soulisa, 2019, pada penelitian mengenai perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Negeri Hema Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah pasca bencana banjir Wae Ela membagi dampak menjadi tiga tingkatan:

- pada tingkat makro, akibat bencana banjir pendapatan dan penghasilan masyarakat turun secara drastis karena hilangnya mata pencaharian, serta banyak harta benda yang hanyut akibat banjir dan mereka harus memulai hidup yang baru;
- pada tingkat mezo, terjadi perubahan pada kelompok masyarakat yang tidak terkena langsung, namun mereka harus menampung saudara mereka yang terkena banjir;
- pada tingkat mikro, terjadi perubahan pola interaksi masyarakat antara satu dengan yang lain karena korban banjir harus tinggal di tenda pengungsian dan harus berhadapan dengan model hidup yang sebelumnya mereka alami, sehingga dapat mempengaruhi pola hidup individu masyarakat.

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

II.4.4.1 Dampak Bencana

Sepanjang tahun 2022 BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencatat dampak yang timbul akibat bencana yang terjadi. Hasil *update* Bulan Januari hingga Bulan Desember 2022 terdapat sebanyak 263 kejadian bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari jenis cuaca ekstrem dan puting beliung, banjir termasuk banjir rob,

kebakaran, karhutla, abrasi, kecelakaan transportasi, hingga laka laut. Total terdampak yakni 2.354 KK terdampak dengan total jiwa sebanyak 7.735 jiwa. Korban jiwa meninggal sebanyak 13 Orang, 2 Hilang, Luka Ringan 16 Orang, Luka Sedang 11 Orang dan Luka Berat 1 Orang. Sementara kerusakan bangunan sebanyak 1.277 rusak ringan, 114 rusak sedang, dan 51 rusak berat). Sedangkan lahan terdampak akibat bencana karhutla sebanyak 50,400 Ha, serta fasilitas umum termasuk rumah ibadah, sekolah, dan ruas jalan sebanyak 41 buah fasilitas terdampak, 23 Rusak ringan, 10 Rusak Sedang dan 14 Rusak Berat.

II.4.4.2 Penyakit Pascabencana

Mengacu pada situs milik Kementerian Kesehatan RI, penyakit penyerta bencana khususnya banjir dapat terjadi setelah kejadian banjir yang mengganggu kesehatan masyarakat (pusatkrisis.kemkes.go.id, 2022). Penyakit tersebut antaranya adalah diare, demam berdarah, leptospirosis, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), penyakit kulit, penyakit saluran cerna lain seperti demam tifoid, serta memburuknya penyakit kronis karena penurunan daya tahan tubuh akibat musim hujan yang berkepanjangan.

Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023 penyakit ISPA mendominasi penyakit paling banyak diderita oleh masyarakat Bangka Belitung setiap tahunnya. Data yang ada sejak 2016 hingga 2020 ISPA selalu berada di urutan pertama dari 10 penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat, jumlah penderitanya ribuan setiap tahun. Ditelusuri lebih lanjut oleh [Bangkapos.com](https://bangkapos.com), 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat mencatat sepanjang Bulan Januari hingga September 2022 terdapat 6.360 kasus penyakit ISPA dan menempati kasus penyakit paling banyak di Kabupaten Bangka Barat. Selain di Kabupaten Bangka Barat, di Kabupaten Bangka Selatan ISPA juga menduduki peringkat paling tinggi tahun 2022 yang diderita masyarakat di wilayah tersebut. Meskipun jumlah penderita ISPA di Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka, angka penderita penyakit ISPA masih masuk menjadi 5

terbesar dari 10 penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat di kedua wilayah tersebut.

II.4.4.2 Kondisi Indeks Risiko Bencana

Hasil perhitungan Indeks Risiko Bencana di Provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 oleh BNPB, 2023 menunjukkan nilai 158,52. Meskipun terus mengalami penurunan dari tahun 2021 dengan nilai 160,98 dan tahun 2020 dengan nilai 161,54, namun angka tersebut masih berada diatas nilai 144 yaitu berada di klasifikasi risiko bencana kelas tinggi. Nilai ini juga masih menempatkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai peringkat ke tiga provinsi dengan risiko bencana tertinggi di Indonesia. Menurut Ratnasari dan Wildawati, 2022 risiko bencana berkaitan erat dengan tiga faktor yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Pada KRB Tahun 2021-2026 yang disusun oleh BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kapasitas penanggulangan bencana diukur dengan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang merupakan hasil survey sebagai metodologi penilaian oleh BNPB. Hasil kajian IKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 oleh BNPB bernilai 0,31 yang tergolong dalam Tingkat Kapasitas Rendah.

II.4.5 Responses

Response merupakan tanggapan yang dilaksanakan berbagai pihak untuk mencegah, menanggulangi, atau untuk mengurangi dampak yang muncul. Sebagai salah satu misi dalam mencapai cita-cita mewujudkan Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi, upaya-upaya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan kemampuan dan kecepatan mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana serta menurunkan risiko bencana. Disadari bahwa upaya-upaya ini tidak dapat

dilaksanakan hanya oleh pemerintah daerah namun juga dibantu oleh pemerintah pusat dan *stake holder* terkait.

II.4.5.1 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pengelolaan lingkungan hidup erat kaitannya dengan kejadian bencana baik bencana alam, maupun bencana non alam, serta bencana yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Anggaran pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan kebencanaan yang dihubungkan dengan Pilar Lingkungan Hidup pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) disajikan pada tabel 2.4.9. Dapat terlihat pada tabel anggaran lingkungan hidup yang dikelompokkan menurut program yang berkaitan dengan Pilar Lingkungan Hidup yaitu Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, serta 15 pada tahun 2022 jumlahnya sebesar Rp.198.653.032.293,00 dan pada tahun 2023 naik 118,4 persen menjadi Rp.433.150.471.112,00. Terwujudnya anggaran pengelolaan lingkungan hidup ini merupakan bentuk sinergi kemitraan antara legislatif dan eksekutif bersama saling mendukung dan berkontribusi dalam koridor sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.4. 9 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

Uraian TPB	Perangkat Daerah	Program	Jumlah Anggaran Tahun 2022	Jumlah Anggaran Tahun 2023
Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	34.143.043.750,00	120.839.726.023,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.512.891.160,00	30.582.464.550,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	62.348.841,00	802.372.487,00
	Bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	22.778.750.383,00	47.718.101.313,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.533.062.000,00	249.998.500,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	598.720.000,00	2.854.343.719,00
	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	42.497.359,00	368.339.000,00
Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4.334.204.024,00	4.052.180.980,00
	Bidang Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	3.856.983.362,00	5.519.963.016,00
		Program Penyelenggaraan Jalan	105.160.574.193,00	166.254.819.099,00
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.189.146.293,00	1.803.624.000,00

Uraian TPB	Perangkat Daerah	Program	Jumlah Anggaran Tahun 2022	Jumlah Anggaran Tahun 2023
		Program Penatagunaan Tanah	0,00	0,00
		Program Penataan Bangunan Gedung	0,00	18.725.350.348,00
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1.198.950.000,00	1.556.619.288,00
		Program Pengembangan Perumahan	441.089.873,00	1.556.619.288,00
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	3.369.709.414,00	3.885.909.734,00
	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	935.240.200,00	1.142.609.500,00
Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	54.003.600,00	309.777.020,00
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	55.205.240,00	101.999.600,00
Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	0,00	83.600.000,00
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	69.737.006,00	449.892.700,00
	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	41.825.564,00	401.000.000,00
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	41.877.000,00	109.975.000,00
	Bidang Pengembangan dan Penelitian	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	491.287.692,00	225.050.000,00
Tujuan 14. Ekosistem Lautan	Bidang Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil	138.998.209,00	1.240.710.380,00

Uraian TPB	Perangkat Daerah	Program	Jumlah Anggaran Tahun 2022	Jumlah Anggaran Tahun 2023
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	7.014.397.422,00	11.633.954.173,00
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	352.835.056,00	773.437.800,00
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	430.450.316,00	1.168.852.003,00
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	0,00	469.810.850,00
Tujuan 15. Ekosistem Daratan	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengelolaan Hutan	1.496.468.538,00	5.797.080.620,00
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	88.247.669,00	647.069.200,00
		Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	82.148.000,00	729.963.454,00
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	138.340.129,00	513.988.500,00
TOTAL			198.653.032.293,00	433.150.471.112,00

Sumber: Bakuda Babel, 2023

II.4.5.2 Dokumen Kajian Risiko Bencana

Adanya Kajian Risiko Bencana, dapat diketahui tingkat bahaya dan kerentanan untuk semua jenis potensi bencana yang dapat terjadi di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya dapat diidentifikasi dan dievaluasi kondisi kerentanan untuk dapat dianalisis dan diestimasi kemungkinan timbulnya potensi bahaya yang dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan jiwa serta kerugian harta, benda, mata pencaharian, dan kerusakan lingkungan berikut mitigasinya.

Selain itu dengan telah disusunnya Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka tersedia data spasial risiko bencana yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup dengan metode tumpang susun, sehingga dalam perencanaan-perencanaan pembangunan dapat diketahui lokasi-lokasi kerawanan bencana dan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kajian Risiko Bencana ini telah dimanfaatkan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* (2022), KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2043, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan pemutakhiran Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Beberapa peta risiko bencana disajikan dalam gambar-gambar berikut.



Gambar 2.4. 55 Peta Bahaya Banjir di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sumber: BPBD Babel, 2022



Gambar 2.4. 56 Peta Bahaya Cuaca Ekstrem di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sumber: BPBD Babel, 2022



Gambar 2.4. 57 Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sumber: BPBD Babel, 2022

II.4.5.3 Memasukkan Unsur Bidang Kebencanaan pada Proses Validasi KLHS Kabupaten/Kota dan Berbagai Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup

Salah satu tahapan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun oleh Kabupaten/Kota adalah validasi KLHS yang dilaksanakan oleh Gubernur sesuai kewenangannya melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam pelaksanaannya terdapat proses pravalidasi yaitu berupa penyampaian masukan dan saran terhadap KLHS tersusun. Agar memenuhi unsur komprehensif atau menyeluruh terhadap pelaksanaan KLHS oleh Kabupaten Kota, aspek kebencanaan juga merupakan salah satu unsur penilaian. Tim Kelompok Kerja Validasi KLHS Kabupaten Kota yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung keanggotaannya melibatkan unsur terkait seperti dari BPBD, Badan

Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Penelitian Daerah (Bappelitbangda), serta unsur kehutanan yaitu dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XIII.

Instansi Bidang Kebencanaan juga dilibatkan dalam keanggotaan tim kelompok kerja penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2043, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan pemutakhiran Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), agar mendapatkan saran masukan serta bahan pertimbangan dari sisi kebencanaan.

II.4.5.4 Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan

Pengawasan terhadap izin lingkungan dilaksanakan sebagai upaya pengendalian dalam pemanfaatan dan/atau eksploitasi sumber daya alam seperti bahan tambang, pariwisata, serta kegiatan yang berpotensi menghasilkan pencemaran terhadap lingkungan. Sepanjang tahun 2022 telah dilakukan kegiatan pengawasan terhadap 100 pemrakarsa yang memiliki izin lingkungan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 6 persen diantaranya tidak beroperasi. Sebanyak 23 persen memperoleh hasil tidak taat dan memperoleh Sanksi Administratif Paksaan dari Pemerintah. Selebihnya mendapat kategori taat bahkan memperoleh peringkat dalam Proper baik Proper Biru, Hijau, maupun Emas.

II.4.5.5 Produk Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dalam bidang pengelolaan persampahan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki produk hukum melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan gubernur ini menetapkan target pengurangan dan target penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga tingkat provinsi hingga per tahun hingga tahun 2025. Diharapkan target pengelolaan sampah dapat mencapai 100 persen melalui pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen. Disadari bersama bahwa lingkungan dan pembangunan merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan, sehingga Gubernur bersama DPRD bersinergi dalam harmonisasi membuat kebijakan yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Produk hukum bidang lingkungan lainnya terangkum dalam tabel 2.4.10.

Tabel 2.4. 10 Produk Hukum Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020-2023

No.	Jenis Produk	Nomor dan Tanggal	Tentang	Dokumen
1.	Peraturan Daerah	Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 27 April 2020	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040	Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020- 2040
2.	Peraturan Daerah	Nomor 10 Tanggal 30 Desember 2020	Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i>	-
3.	Peraturan Daerah	Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021	Perlindungan Lingkungan Geologi Dan Pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>)	-
4.	Peraturan Gubernur	Nomor 32 Tanggal 20 Mei Tahun 2020	Pedoman Pengendalian Pencemaran Air Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Budidaya Tambak Udang	-

No.	Jenis Produk	Nomor dan Tanggal	Tentang	Dokumen
5.	Peraturan Gubernur	Nomor 37 Tanggal 29 Mei 2020	Pedoman Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-
6.	Peraturan Gubernur	Nomor 48 Tanggal 16 Juli 2020	Pedoman Umum Program Pengembangan Rumah Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease 19</i> (Covid-19) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020	-
7.	Peraturan Gubernur	Nomor 52 Tanggal 27 Juli 2020	Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022	
8.	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	Nomor 2 Tanggal 27 Februari 2023	Pengelolaan Wilayah Konservasi Keanekaragaman Hayati	

Sumber: JDIH Babel, 2022

II.4.5.6 Peningkatan Kapasitas Kebencanaan

Menurut Ratnasari dan Wildawati, 2022, faktor ancaman dan kerentanan terkait risiko bencana merupakan dua hal yang sifatnya sulit untuk diubah, terkait dengan anggaran dan sosial ekonomi masyarakat. Satu faktor yang lebih memungkinkan dilakukan adalah kapasitas, baik itu kapasitas masyarakat maupun pemerintah. Peningkatan kapasitas menjadi upaya yang realistis dalam mengurangi risiko bencana.

Kapasitas merupakan kekuatan dan sumber daya yang ada pada tiap individu dan lingkungan yang mampu mencegah, melakukan mitigasi, siap menghadapi dan pulih dari akibat bencana dengan cepat. Lebih jauh menurut Ratnasari dan Wildawati, 2022, berdasarkan fakta dari kejadian bencana, yang menyelamatkan masyarakat dari bencana, lebih dari 96% adalah dirinya sendiri, keluarga, tetangga dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu untuk memperkecil risiko bencana yang ditimbulkan adalah dengan cara meningkatkan kemampuan/kapasitas untuk menghadapi ancaman bencana dengan cara mengurangi tingkat kerentanan. Pelibatan masyarakat tidak lagi sebagai objek dalam bencana, tetapi sudah menjadi subjek yang berdaya. Karena itu BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan upaya penanggulangan bencana dengan melaksanakan peningkatan kapasitas bidang kebencanaan seluas-luasnya kepada *stakeholder* dan lintas sektor.



Gambar 2.4. 58 Kegiatan Simulasi Penanggulangan Bencana: Penanganan Bencana Banjir.

Sumber: BPBD Babel, 2023



Gambar 2.4. 59 Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Sumber: BPBD Babel, 2023



Gambar 2.4. 60 Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana bagi Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Belitung.

Sumber: BPBD Babel, 2023

II.4.5.7 Program Gule Kabung

Program Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Bersama Membangun Bangka Belitung atau disingkat Program Gule Kabung yang merupakan program kerja Pj. Gubernur Suganda untuk memberi wadah kolaborasi program Pemerintah Daerah (Pemda), guna mendorong kerja-kerja kolaborasi antar instansi tidak hanya di tingkat provinsi, namun juga hingga kabupaten, kota, hingga desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Pj. Gubernur Suganda, filosofi gule kabung (gula merah/gula aren) sederhana namun dalam. Walaupun semua daerah di Bangka Belitung mempunyai pohon kabung atau pohon aren, pohonnya tidak pernah merusak lingkungan bahkan mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Akarnya dalam, namun tidak mengganggu lingkungan, malah memberikan manfaat, baik akar, buah, batang, maupun daunnya.

Beberapa kegiatan dari Program Gule Kabung yang telah dilaksanakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kebencanaan:

1. Penanaman pohon di Lapangan Bola Depan Kantor Desa Lubuk Besar, Bangka Tengah pada tanggal 27 Juli 2023.
2. Sosialisasi Pembangkit Listrik Tenaga Thorium di Gedung Kesenian Desa Batu Beriga, Lubuk Besar, Bangka Tengah pada tanggal 27 Juli 2023. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai salah satu alternatif energi terbarukan yang dilaksanakan oleh Thorcon Power ini direncanakan akan dibangun di Pulau Gelasa. Ditargetkan sudah beroperasi pada tahun 2026 mendatang, saat ini sedang dalam tahap kajian ekologi lingkungan.
3. Kegiatan penanaman Pohon Belangeran di Kawasan Lapangan Bola Isora Sijuk pada tanggal 30 Mei 2023. Pohon varietas khas Pulau Belitung ini biasa digunakan sebagai junjung sahang, yaitu kayu untuk menyangga tanaman lada, sifatnya sangat kuat, dan bisa hidup sampai puluhan tahun.
4. Sosialisasi Bank Sampah kepada masyarakat bertempat di Lapangan Bola Isora Sijuk pada tanggal 30 Mei 2023.



Gambar 2.4. 61 Posko layanan DLHK pada salah satu kegiatan Program Gule Kabung.
Sumber: DLHK Babel, 2023



Gambar 2.4. 62 Sosialisasi Bank Sampah 'EL HA KA' pada salah satu kegiatan Program Gule Kabung.
Sumber: DLHK Babel, 2023



Gambar 2.4. 63 Gerakan Jumat Bersih yang rutin menjadi salah satu kegiatan Program Gule Kabung.

Sumber: DLHK Babel, 2023



Gambar 2.4. 64 Pembagian Kantong Belanja 'Belanja Asik tanpa Kantong Plastik' kepada masyarakat yang sedang berbelanja di pasar sebagai upaya pengurangan sampah plastik.

Sumber: DLHK Babel, 2023

II.5 Perkotaan

Konstruksi, pembangunan, dan pertumbuhan perkotaan terbentuk oleh berbagai macam faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang saling berinteraksi, mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan menimbulkan konsekuensi pada ekologi, spesies, populasi, fungsi ekosistem, hingga kesehatan dan kesejahteraan penduduk kota (Parris, 2016). Pembangunan perkotaan yang identik dengan penghilangan tutupan vegetasi dan peningkatan area lahan terbangun yang kedap air cenderung mengganggu keberadaan habitat alami yang telah ada sebelumnya. Fragmentasi dan isolasi habitat oleh jalan dan infrastruktur perkotaan lainnya cenderung membatasi penyebaran individu dari satu bidang habitat ke bidang habitat lainnya (Parris, 2016). Selain itu, pembangunan infrastruktur perkotaan juga dapat mengganggu berbagai fungsi ekosistem sehingga kemampuan alam untuk menyediakan layanan atau jasa lingkungan semakin menurun. Bertambahnya lapisan kedap air sudah dipastikan mengganggu berbagai siklus alami yang ada di alam, seperti siklus hidrologi (Septriana et al., 2020), siklus hara, dan siklus-siklus alami lainnya. Berbagai dampak negatif pada lingkungan yang berpotensi muncul akibat terganggunya berbagai siklus tersebut, di antaranya adalah banjir atau kekeringan, berkurangnya persediaan air bersih, berkurangnya kesuburan tanah, dan hilang atau musnahnya suatu spesies.

Berbagai konsekuensi akibat pembangunan perkotaan juga terjadi pada aspek ekonomi dan sosial-budaya penduduk di perkotaan. Pembangunan perkotaan pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup penduduk yang semakin meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas ekonomi yang lengkap di perkotaan telah menarik banyak penduduk untuk tinggal di wilayah perkotaan sehingga terjadi fenomena urbanisasi yang menyebabkan kepadatan penduduk di perkotaan (*urban area*) jauh lebih tinggi daripada daerah pedesaan (*rural area*).

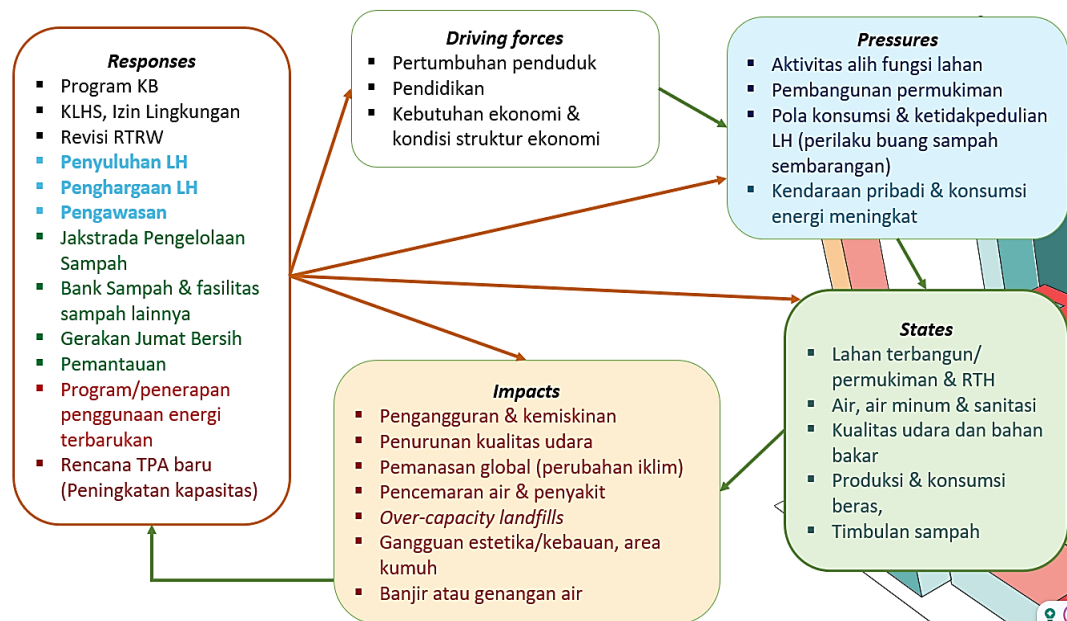
Kondisi tersebut menyebabkan tuntutan kebutuhan dan gaya hidup yang lebih tinggi di perkotaan sehingga berdampak pada aspek ekonomi dan sosial-budaya di perkotaan. Selain kondisi perekonomian yang lebih maju, konsekuensi negatif juga terjadi di daerah perkotaan, seperti dampak-dampak negatif yang telah disebutkan di atas, pencemaran udara, kepadatan lalu lintas, pengangguran, munculnya area kumuh, hingga tindakan kriminalitas.

Pola urbanisasi yang terjadi di negara berkembang cenderung ditandai dengan wilayah perkotaan yang menarik perpindahan penduduk dari desa ke kota sehingga perlu upaya pengendalian yang besar dari pemerintah untuk memaksimalkan dampak positif pada kesejahteraan dan perekonomian penduduk, serta meminimalkan dampak negatif yang timbul. Pola urbanisasi ini sangat berbeda dengan yang terjadi di negara maju, di mana terjadi proses yang mengimbangi urbanisasi yang telah terjadi, yaitu berkurangnya jumlah penduduk di kota-kota besar bersamaan dengan kenaikan jumlah penduduk di kota-kota kecil dan menengah (Horvat et al., 2018). Berdasarkan kondisi pola urbanisasi tersebut, maka perlu upaya yang lebih besar dari pemerintah untuk mengendalikan dampak-dampak yang muncul akibat pembangunan perkotaan, termasuk arus urbanisasi.

Sebagai salah satu provinsi di negara berkembang, pola pembangunan perkotaan di Kepulauan Bangka Belitung juga memerlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah daerah untuk pengendalian dampak yang muncul agar dapat diarahkan untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Perkotaan yang berkelanjutan tentu akan berperan sangat besar dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama pada tujuan ke-1 (tanpa kemiskinan), tujuan ke-2 (tanpa kelaparan), tujuan ke-3 (kehidupan sehat dan sejahtera), tujuan ke-4 (pendidikan yang berkualitas), tujuan ke-6 (air bersih dan sanitasi layak), tujuan ke-7 (energi bersih dan terjangkau), tujuan ke-8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), tujuan ke-9 (industri, inovasi, dan infrastruktur), tujuan ke-10 (pengurangan kesenjangan), tujuan ke-11 (kota dan permukiman yang

berkelanjutan), dan tujuan ke-12 (produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab).

Dalam rangka mengoptimalkan pengendalian pembangunan perkotaan di Kepulauan Bangka Belitung, maka analisis masalah perkotaan diperlukan untuk memahami berbagai macam penyebab, kondisi terkini, dampak-dampak yang ditimbulkan, maupun berbagai upaya yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil analisis dan pemahaman tersebut, maka berbagai macam alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah perkotaan dapat dirumuskan. Kerangka DPSIR menetapkan rantai hubungan sebab akibat antara faktor sosial ekonomi (*driving forces*) yang mendorong aktivitas antropogenik yang memberi tekanan (*pressures*) pada kondisi lingkungan atau keadaan (*states*), dan memberikan konsekuensi pada lingkungan (*impacts*) sehingga perlu dilakukan tindakan (*responses*) untuk meningkatkan keadaan tersebut (Ramos et al., 2018). Berdasarkan pertimbangan tersebut, analisis masalah perkotaan di Kepulauan Bangka Belitung dilakukan menggunakan kerangka DPSIR. Gambar berikut menyajikan secara ringkas kerangka DPSIR yang digunakan untuk analisis perkotaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 2.5.1 Kerangka DPSIR Analisis Perkotaan

II.5.1 *Driving forces*

Faktor sosial ekonomi yang selalu menjadi *driving forces* dalam masalah perkotaan, di antaranya adalah jumlah penduduk, kebutuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan struktur ekonomi daerah. Jumlah penduduk semakin meningkat dari tahun ke tahun, meskipun laju pertumbuhannya melambat. Penduduk yang semakin padat ini memiliki kebutuhan yang semakin meningkat sehingga menyebabkan peningkatan berbagai macam aktivitas antropogenik (kegiatan ekonomi). Jumlah penduduk di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5. 1 Jumlah Penduduk Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

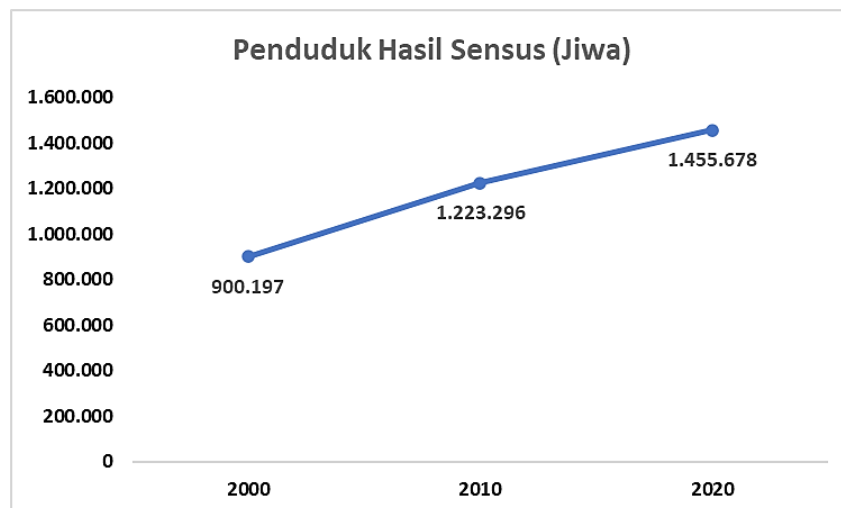
Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
Bangka	3.016,85	334.344	1,41	111
Belitung	2.270,70	186.331	1,33	82
Bangka Barat	2.851,41	209.413	1,33	58
Bangka Tengah	2.259,98	205.510	1,87	91
Bangka Selatan	3.598,24	202.263	1,17	71
Belitung Timur	2.588,82	130.463	1,54	50
Pangkalpinang	104,54	226.297	2,01	2.165
Kepulauan Bangka Belitung	16.690,54	1.494.621	1,52	90

Sumber: (BPS, 2023)

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Bangka memiliki jumlah penduduk terbesar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, namun jika dibandingkan dengan luas daerah, maka penduduk terpadat ada di ibukota provinsi, yaitu Pangkalpinang. Pertumbuhan penduduk tertinggi juga terjadi di Pangkalpinang. Fenomena ini terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia, di mana kota selalu menjadi pusat berbagai macam kegiatan sosial-ekonomi dan menarik penduduk untuk pindah ke kota. Kondisi ini

juga sama seperti pola urbanisasi yang umumnya terjadi di negara-negara berkembang (Horvat et al., 2018).

Jika dibandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya, maka jumlah penduduk dan kepadatannya di Kepulauan Bangka Belitung semakin meningkat, meskipun laju pertumbuhannya semakin rendah. Kenaikan jumlah dan kepadatan penduduk ini menjadi faktor pendorong berbagai macam aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin bertambah, bukan lagi sekedar kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Gambar berikut menyajikan tren pertambahan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan hasil sensus penduduk sepuluh tahunan. Terlihat bahwa populasi semakin meningkat, sementara laju pertumbuhan penduduk semakin melambat.



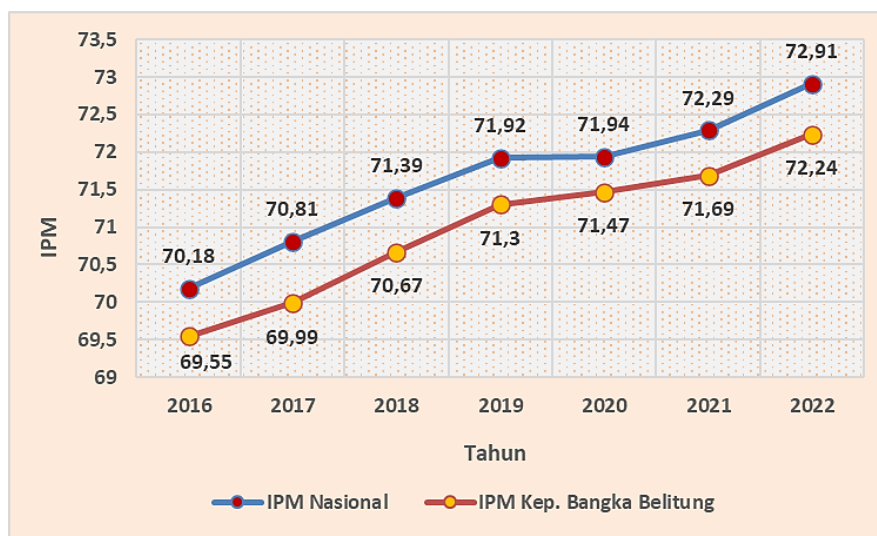
Gambar 2.5. 2 Tren Pertambahan Penduduk di Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: (BPS, 2002, 2010, 2021a), data telah diolah kembali

Pertambahan jumlah penduduk harus diimbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu modal pembangunan agar aktivitas ekonomi yang dilakukan berlangsung secara berkelanjutan. Kondisi SDM ini menjadi salah satu faktor pendorong terlaksananya berbagai aktivitas ekonomi dan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Kualitas SDM yang menjalankan roda perekonomian dan pembangunan akan menentukan sifat kegiatan ekonomi yang dilakukan,

apakah bersifat merusak lingkungan ataukah bersifat produktif dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kualitas SDM sering menjadi tantangan utama di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, yang pada dasarnya adalah investasi tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi/kesejahteraan penduduk (Yuliansyah, 2021). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran gabungan dari pencapaian rata-rata suatu negara/daerah dalam tiga aspek dasar pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup (WHO, 2011). Dengan demikian, IPM adalah salah satu bentuk capaian pembangunan kualitas SDM. Kondisi capaian kualitas SDM ini dapat menjadi faktor pendorong berbagai macam aktivitas antropogenik untuk pembangunan ekonomi. Gambar berikut menyajikan tren IPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017–2022.



Gambar 2.5. 3 IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Sumber: (BPS, 2022a, 2023), data telah diolah kembali

Pada gambar di atas, terlihat bahwa IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kecenderungan untuk meningkat, akan tetapi selalu ada di bawah rata-rata IPM nasional. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan manusia di Kepulauan Bangka Belitung. Dimensi penyusun IPM terdiri atas:

- Umur panjang dan hidup sehat yang diindikasikan dengan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir,
- Pengetahuan yang diilustrasikan dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah,
- Standar hidup layak yang diindikasikan dengan pengeluaran riil per kapita.

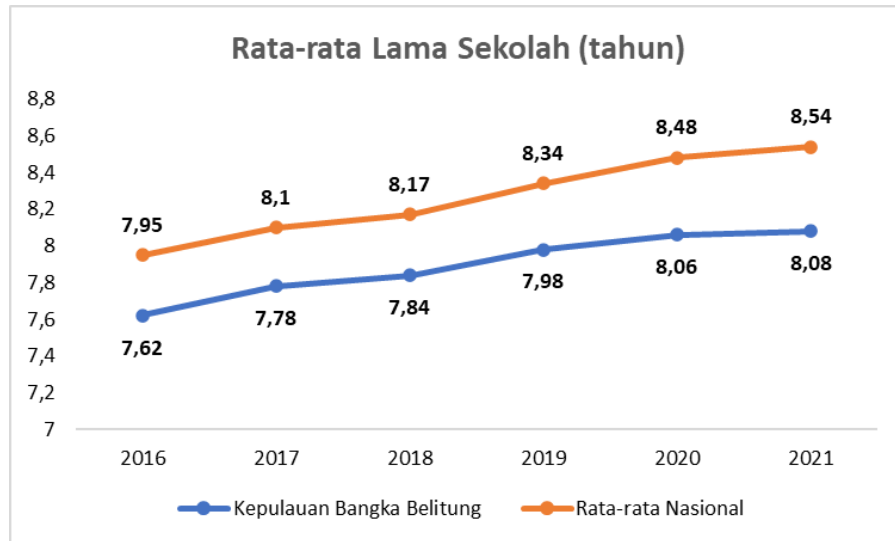
Di antara ketiga dimensi penyusun IPM di atas, dimensi pengetahuan memegang peranan sangat penting dalam rangka menjalankan aktivitas perekonomian. Berikut ini adalah ilustrasi dimensi pengetahuan di Kepulauan Bangka Belitung yang diindikasikan dengan rata-rata lama sekolah. Di antara tujuh kabupaten/kota, rata-rata lama sekolah terbesar dari tahun ke tahun ada di Kota Pangkalpinang. Pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah di Pangkalpinang yaitu 10,13 tahun (setingkat dengan SMA), sementara rata-rata lama sekolah provinsi pada tahun 2021 adalah 8,08 tahun (setingkat dengan SMP). Hal ini mengindikasikan bahwa fasilitas pendidikan (aspek sosial-budaya) di perkotaan cenderung lebih baik daripada daerah lainnya.

Tabel 2.5. 2 Rata-rata Lama Sekolah di Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bangka	7,96	8,19	8,2	8,23	8,24	8,25
Belitung	8,1	8,11	8,15	8,41	8,46	8,47
Bangka Barat	6,89	7,06	7,18	7,21	7,22	7,44
Bangka Tengah	6,71	6,79	6,8	7,13	7,19	7,2
Bangka Selatan	5,96	6,12	6,36	6,42	6,67	6,71
Belitung Timur	7,95	8	8,14	8,15	8,22	8,47
Kota Pangkalpinang	9,76	9,77	9,78	9,8	9,92	10,13
Kepulauan Bangka Belitung	7,62	7,78	7,84	7,98	8,06	8,08

Sumber: (BPS, 2022f)

Berdasarkan gambar berikut ini dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga selalu ada di bawah rata-rata lama sekolah nasional sehingga patut menjadi perhatian khusus pemerintah provinsi. Kondisi pendidikan ini perlu menjadi perhatian khusus karena menjadi faktor pendorong yang tak terlihat, yang akan mengarahkan roda perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung.

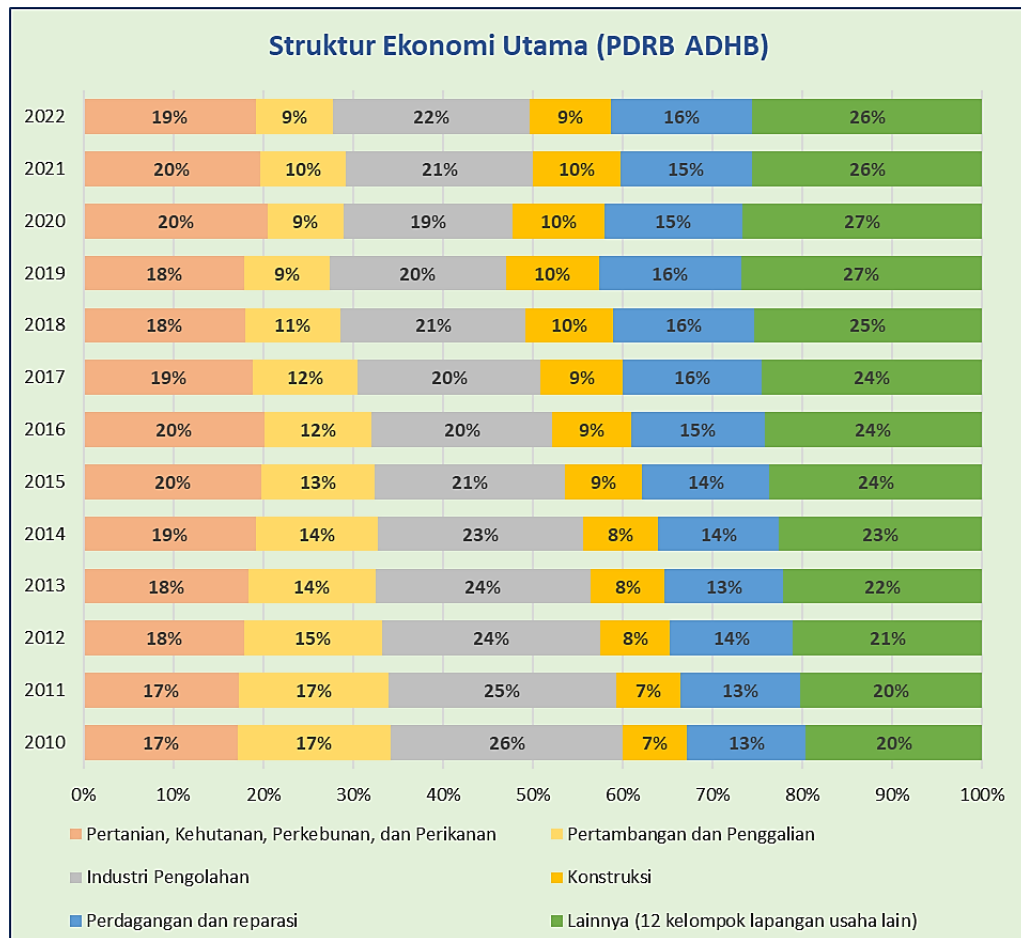


Gambar 2.5. 4 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi dengan Nasional

Sumber: (BPS, 2022a)

Faktor pendorong lainnya adalah faktor ekonomi yang terilustrasikan dengan kondisi struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi provinsi. Berikut ini adalah kondisi struktur ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2010-2022 yang diilustrasikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha. Pada gambar berikut terlihat bahwa struktur ekonomi utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun ke tahun selalu didominasi oleh lima kelompok lapangan usaha, yaitu kelompok pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan; kelompok industri pengolahan; kelompok pertambangan dan penggalan, kelompok perdagangan dan reparasi; serta kelompok konstruksi/bangunan. Struktur ekonomi ini

menggambarkan aktivitas ekonomi yang dominan dilakukan di Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 2.5. 5 PDRB ADHB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2022

Sumber: (BPS, 2023), data telah diolah kembali

Terlihat pada gambar di atas bahwa tren kelompok pertambangan dan penggalian cenderung semakin menurun persentasenya meskipun selalu masuk ke dalam lima komponen utama PDRB. Tren penurunan ini juga terjadi pada persentase kelompok industri pengolahan yang salah satunya mengolah produk pertambangan. Di sisi lain, kelompok pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan; kelompok perdagangan dan reparasi; serta kelompok konstruksi/bangunan cenderung sedikit meningkat. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran kondisi perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung yang mulai bergeser dari

sektor pertambangan ke sektor lainnya. Kedua belas kelompok lapangan usaha lainnya yang komponennya dalam PDRB lebih kecil adalah: 1) transportasi dan pergudangan; 2) pengadaan listrik dan gas; 3) pengadaan air; 4) penyediaan akomodasi dan makan minum; 5) informasi dan komunikasi; 6) *real estate*; 7) administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; 8) jasa keuangan; 9) jasa perusahaan; 10) jasa pendidikan; 11) jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta 12) jasa lainnya. Kedua belas kelompok lapangan usaha lainnya ini juga memiliki peran dalam upaya pergeseran perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung yang memperlihatkan tren diversifikasi lapangan usaha agar tidak terlalu bergantung pada aktivitas pertambangan.

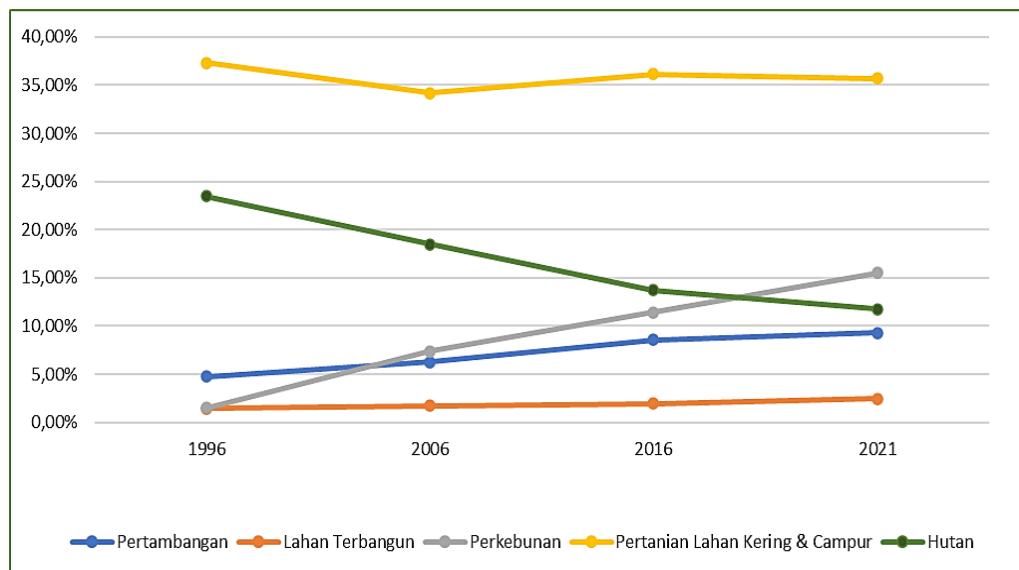
Kondisi perekonomian di atas menjadi faktor pendorong dilakukannya berbagai macam aktivitas antropogenik (aktivitas ekonomi) dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sehingga menyebabkan berbagai perubahan kondisi pada lingkungan. Faktor ekonomi ini mengilustrasikan kebutuhan pembangunan ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat. Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor pendorong yang dapat menentukan apakah aktivitas ekonomi yang dilakukan memang bersifat efektif dan berkelanjutan atau justru bersifat eksploitatif dan cenderung merusak lingkungan.

II.5.2 Pressures

Aktivitas antropogenik untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk menjadi *pressure* (tekanan) pada kondisi lingkungan. Kegiatan ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung yang dominan dapat dilihat pada struktur ekonomi berdasarkan komponen PDRB ADHB seperti yang telah disajikan sebelumnya. Ada lima komponen lapangan usaha utama di Kepulauan Bangka Belitung, yang sesuai persentasenya dalam PDRB ADHB pada tahun 2022, dapat diurutkan: 1) kelompok pertanian, kehutanan, perkebunan,

dan perikanan; 2) kelompok pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan; 3) kelompok perdagangan dan reparasi; 4) kelompok konstruksi/bangunan; dan 5) kelompok pertambangan dan penggalian.

Kelima lapangan usaha utama ini juga tergambarkan di dalam peta penutup lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diwarnai oleh penutup lahan perkebunan, pertanian, dan pertambangan. Industri pengolahan yang ada di provinsi ini juga didominasi oleh industri pengolahan bijih logam timah (smelter) dan industri makanan, terutama industri *crude palm oil* (CPO) yang mengolah produk perkebunan kelapa sawit. Berikut ini disajikan tren penggunaan lahan yang menunjukkan adanya kesesuaian antara penggunaan lahan dengan lapangan usaha utama di Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 2.5. 6 Tren Persentase Penggunaan Lahan untuk Aktivitas Antropogenik

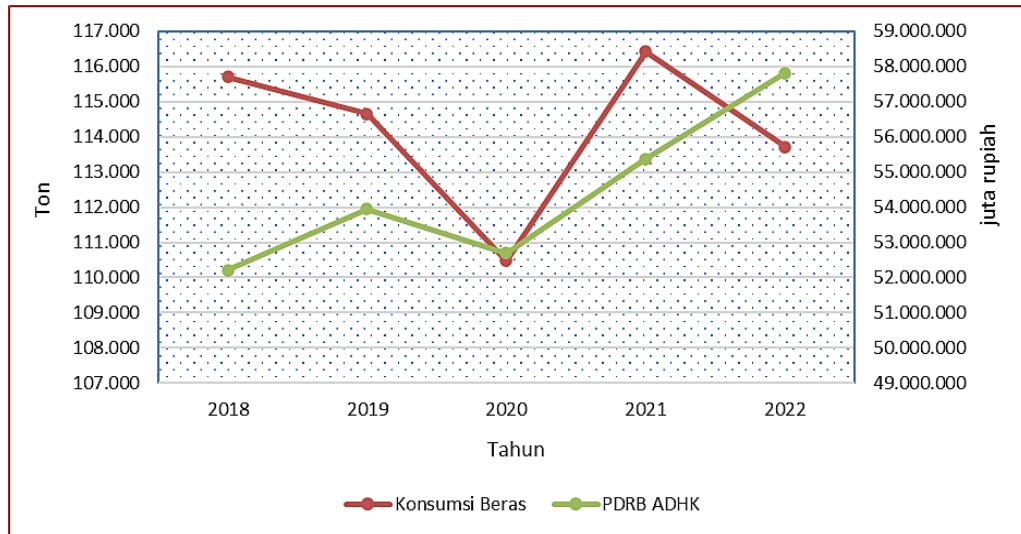
Sumber: Dokumen DDDTLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (telah diolah kembali)

Pada gambar di atas terlihat tren penggunaan lahan berdasarkan persentase penutup lahan pertambangan, lahan terbangun/permukiman, perkebunan/kebun, pertanian lahan kering & campur, dan hutan tahun 1996–2021. Persentase penutup hutan yang disajikan terdiri atas hutan lahan kering primer & sekunder, hutan rawa primer & sekunder, serta hutan mangrove primer & sekunder. Berdasarkan tren beberapa penggunaan

lahan di atas dapat dibaca bahwa persentase luas penggunaan lahan untuk pertambangan, perkebunan, dan lahan terbangun/permukiman semakin meningkat. Sebaliknya, persentase penggunaan lahan untuk hutan dan pertanian lahan kering semakin berkurang. Penurunan luas hutan terlihat sangat tajam. Hal ini menunjukkan adanya alih fungsi lahan hutan untuk penggunaan lahan lainnya.

Lahan pertanian yang cenderung menurun juga mengindikasikan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan jenis lainnya. Alih fungsi lahan pertanian menjadi jenis lahan lainnya akan berpengaruh pada produksi pertanian dan kondisi ketahanan pangan daerah. Ketahanan pangan adalah kondisi di mana semua atau sebagian besar penduduk dalam suatu populasi memiliki akses harian yang cukup terhadap pangan bergizi untuk hidup aktif dan sehat (Miller & Spoolman, 2016). Alih fungsi lahan pertanian akan berpotensi mengurangi kemampuan daerah untuk memproduksi pangan. Kebutuhan pangan adalah salah satu kebutuhan pokok yang bersifat strategis dan harus dipenuhi karena menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan permintaan bahan pangan yang juga meningkat. Jenis bahan pangan beras masih menjadi makanan pokok di Kepulauan Bangka Belitung, meskipun lebih dari 50% persediaan beras di Kepulauan Bangka Belitung didatangkan dari daerah lain. Sebagai ilustrasi aktivitas konsumsi bahan pangan di Kepulauan Bangka Belitung, berikut ini disajikan gambar yang menunjukkan tren konsumsi kelompok bahan pangan beras tahun 2018-2022 yang dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang diilustrasikan dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Perhitungan PDRB ADHK tersebut mengacu pada harga konstan tahun 2010. Jika mengacu pada konsumsi beras tahun 2018-2022, maka konsumsi beras per kapita selama seminggu di Kepulauan Bangka Belitung sekitar 1,460–1,524 kg per jiwa per minggu.



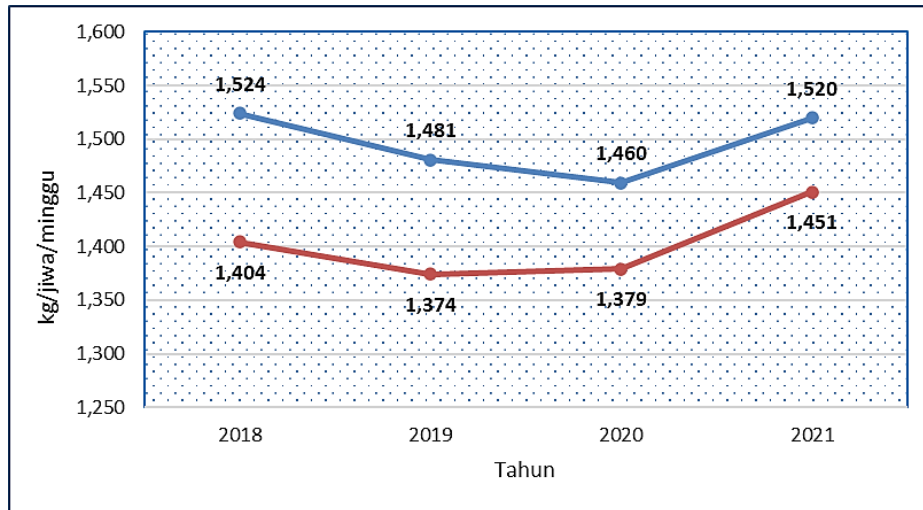
Gambar 2.5. 7 Konsumsi Beras dan PDRB ADHK Tahun 2018-2022

Sumber: (BPS, 2022e, 2023), data telah diolah kembali

Berdasarkan tren konsumsi beras di atas, konsumsi beras pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan karena terkait dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang berlangsung cukup lama. Masalah ketersediaan pangan hingga fluktuasi harga bahan pokok terjadi di berbagai daerah, sebagai dampak penerapan kebijakan penanganan Covid-19, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan tersebut mempengaruhi aktivitas ekonomi di berbagai sektor, termasuk pertanian. Terlihat jelas pada gambar di atas bahwa pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan erat dengan konsumsi pangan penduduk. Pasca pandemi, produksi beras kembali naik dan konsumsi beras juga kembali meningkat.

Aktivitas konsumsi pangan penduduk ini akan terus meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk. Ketergantungan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung pada bahan pangan beras juga menjadi tekanan tersendiri pada kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan, terutama di wilayah perkotaan. Gambar berikut menyajikan tren konsumsi beras per kapita per minggu di Kepulauan Bangka Belitung yang dibandingkan dengan rata-rata nasional. Pada gambar tersebut terlihat jelas bahwa konsumsi beras per kapita di Kepulauan Bangka Belitung selalu ada di atas rata-rata konsumsi beras per kapita nasional. Konsumsi beras yang diperkirakan akan

terus meningkat seiring pertambahan penduduk ini tentunya harus diantisipasi lebih awal dengan perencanaan yang matang tentang suplai bahan pangan di Kepulauan Bangka Belitung. Alih fungsi lahan pertanian juga harus segera diatasi.



Gambar 2.5. 8 Konsumsi Beras Per Kapita Per Minggu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dibandingkan dengan Rata-rata Nasional

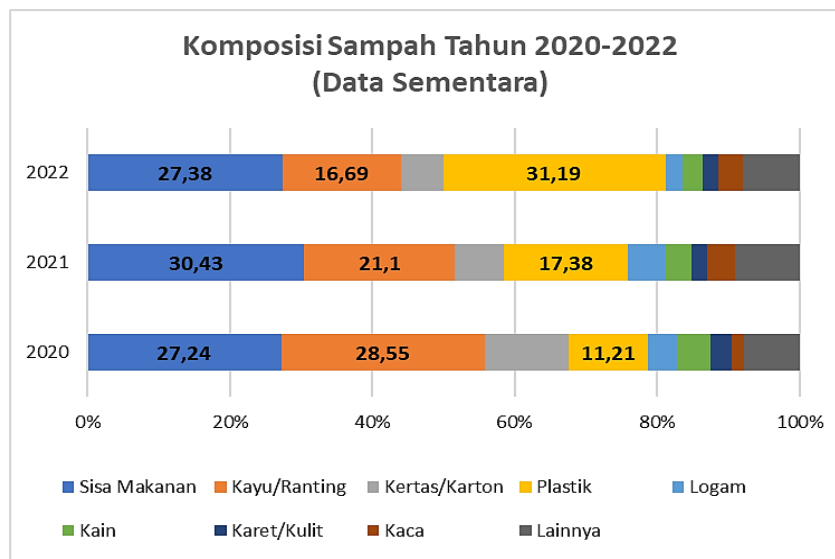
Sumber: (BPS, 2022e), data telah diolah kembali

Berkebalikan dengan persentase penggunaan lahan hutan dan pertanian, persentase penggunaan lahan pertambangan, perkebunan, dan lahan terbangun/permukiman semakin meningkat. Tren ini dapat menunjukkan adanya aktivitas antropogenik di sektor terkait yang juga meningkat. Kenaikan aktivitas ini tentunya didorong oleh kebutuhan penduduk dan pembangunan yang semakin meningkat dan menuntut untuk dipenuhi. Pembangunan yang dilakukan seharusnya bukan hanya meningkatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, tetapi juga menjaga kondisi lingkungan agar berkelanjutan.

Aktivitas antropogenik yang sangat berpengaruh pada masalah perkotaan adalah penggunaan lahan permukiman/lahan terbangun yang semakin meningkat. Peningkatan luas permukiman/lahan terbangun di perkotaan didorong oleh kepadatan penduduk yang semakin besar dan faktor sosial-ekonomi lainnya, seperti proyek-proyek pembangunan untuk

fasilitas publik dan bisnis. Permukiman yang semakin padat akan menyebabkan munculnya berbagai masalah di perkotaan, seperti timbunan sampah, kawasan kumuh, keterbatasan air bersih & fasilitas sanitasi, pengangguran, dan kriminalitas.

Kepadatan penduduk yang diiringi dengan pergeseran gaya hidup, kondisi kesejahteraan yang meningkat, dan ketidakpedulian pada lingkungan akan mendorong aktivitas konsumsi dengan pola yang kurang bertanggung jawab pada lingkungan, seperti konsumsi produk dengan kemasan yang *non-degradable*, contohnya bahan plastik. Pola konsumsi yang tidak bertanggung jawab lainnya adalah perilaku membuang sampah sembarangan dan tidak ada kesadaran untuk mengurangi sampah ataupun mengelola sampah yang dihasilkan. Pola konsumsi ini terilustrasikan dalam grafik tren komposisi sampah berikut ini.



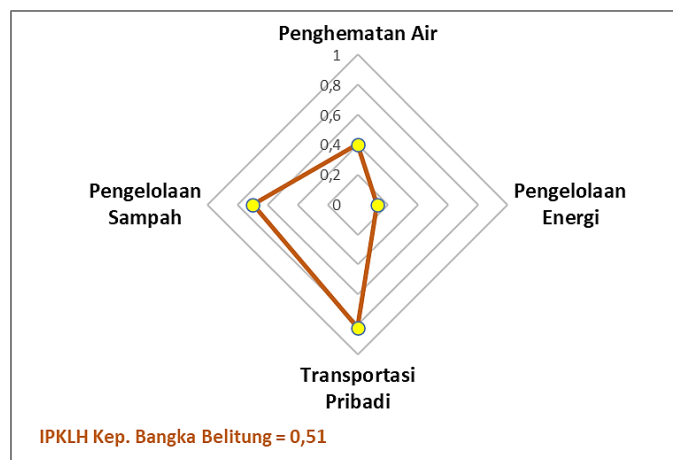
Gambar 2.5. 9 Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah Tahun 2020-2022

Sumber: (SIPSN, 2022)

Pada gambar di atas terlihat bahwa jenis sampah yang mendominasi di Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas sisa makanan, kayu/ranting, dan plastik. Pada rentang waktu 3 tahun terakhir, jenis sampah sisa makanan selalu memiliki persentase terbesar atau terbesar ke dua. Hal ini menunjukkan pola konsumsi penduduk, termasuk industri makanan dan

perdagangan makanan yang berkembang pesat di Kepulauan Bangka Belitung. Jenis sampah kayu/ranting adalah sampah alami yang berasal dari pepohonan atau vegetasi yang tumbuh. Jenis sampah plastik dengan tren persentasenya yang semakin naik dalam tiga tahun terakhir menunjukkan pola konsumsi penduduk yang cenderung memiliki gaya hidup konsumtif dan cenderung memilih produk dengan kemasan yang praktis atau terbuat dari bahan yang *non-degradable* seperti plastik.

Selain pola hidup konsumtif, ketidakpedulian penduduk pada lingkungan juga tercermin pada perilaku membuang sampah sembarangan. Dalam rangka mengukur perilaku peduli lingkungan dengan pendekatan kerangka kerja *Department for Environment Food and Rural Affairs* (DEFRA), pada tahun 2018 BPS membentuk Indikator Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH) yang dibentuk oleh empat dimensi utama, yaitu dimensi pengelolaan air, transportasi pribadi, pengelolaan energi, dan pengelolaan sampah. Nilai IPKLH ada pada rentang 0–1, dengan tingkat ketidakpedulian lingkungan semakin tinggi apabila indeks mendekati 1. Nilai IPKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 0,51. Berikut ini adalah nilai indeks masing-masing dimensi dalam IPKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu penghematan air (0,40), pengelolaan energi (0,13), transportasi pribadi (0,82), dan pengelolaan sampah (0,80).



Gambar 2.5. 10 Nilai IPKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: (BPS, 2018a)

Berdasarkan nilai indeks pada masing-masing dimensi tersebut, dapat dilihat bahwa ketidakpedulian lingkungan masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung yang tinggi ada pada dimensi transportasi pribadi dan pengelolaan sampah. Hal ini sangat sesuai dengan realitas bahwa sebagian besar masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung menggunakan kendaraan pribadi, serta masalah kesadaran membuang sampah pada tempatnya dan pengelolaannya yang belum selesai hingga saat ini. Kondisi ini menjadi tekanan/beban bagi lingkungan dan harus segera diselesaikan.

Sebagai ilustrasi aktivitas penggunaan kendaraan di Kepulauan Bangka Belitung, berikut ini tersaji data jumlah kendaraan bermotor yang memiliki kemungkinan bersifat pribadi dalam penggunaannya (sepeda motor dan mobil penumpang). Data berikut diolah dari *database* Samsat *online*. Pada tabel berikut terlihat bahwa Jumlah sepeda motor dan mobil penumpang tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup besar dari tahun sebelumnya. Penggunaan kendaraan pribadi yang semakin meningkat ini akan berpengaruh pada emisi yang dikeluarkan akibat pembakaran bahan bakar kendaraan. Pada tahun 2022, penggunaan bahan bakar fosil (bensin dan solar) meningkat dari tahun sebelumnya, meskipun ada beberapa kendaraan yang sudah menggunakan sumber energi listrik.

Tabel 2.5. 3 Penggunaan Kendaraan Pribadi Tahun 2021 dan 2022

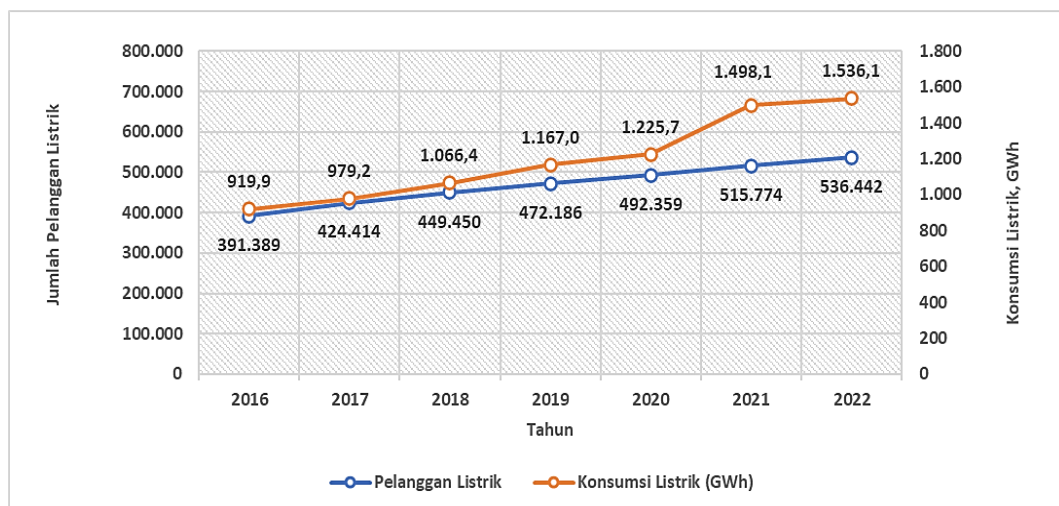
Jenis Kendaraan Pribadi	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Jumlah (Unit)	Bahan Bakar	Jumlah (Unit)	Bahan Bakar
Sepeda Motor	751.795	▪ bensin: 751.795 unit	1.054.869	▪ bensin: 1.054.789 unit ▪ listrik: 80 unit
Mobil Penumpang	78.594	▪ bensin: 72.722 unit ▪ solar: 5.872 unit	97.715	▪ bensin: 89.561 unit ▪ solar: 8.142 unit ▪ listrik: 12 unit

Sumber: Samsat Online, 2022 (data telah diolah)

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka penggunaan kendaraan pribadi yang semakin meningkat menjadi faktor tekanan pada kondisi lingkungan

perkotaan yang berpotensi menimbulkan perubahan kualitas udara, kemacetan, hingga dampak yang lebih luas terkait perubahan iklim. Penggunaan listrik sebagai sumber energi juga masih terbatas dan belum menjamin apakah sumber energi listrik yang digunakan adalah sumber energi yang berkelanjutan. Sebagian besar energi listrik di Kepulauan Bangka Belitung disediakan menggunakan bahan bakar fosil yang tidak berkelanjutan.

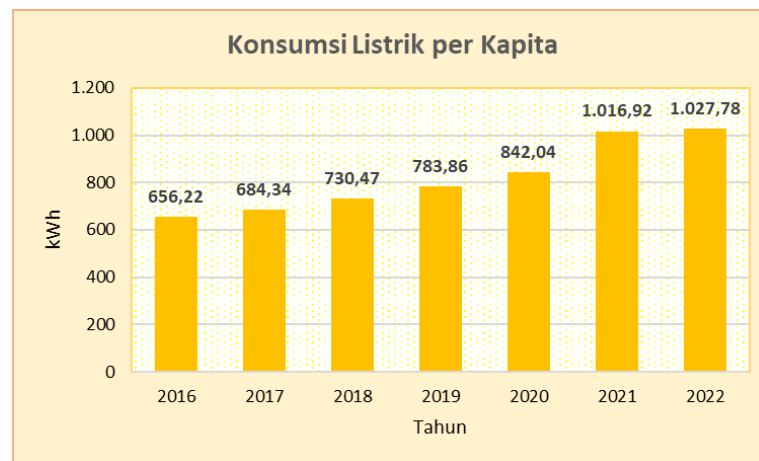
Aktivitas antropogenik lainnya yang memberikan tekanan pada kondisi lingkungan adalah konsumsi energi. Konsumsi energi yang semakin meningkat menandakan adanya aktivitas perekonomian yang juga semakin meningkat. Konsumsi energi yang terlihat jelas peningkatannya akibat pertambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi energi listrik. Konsumsi listrik per kapita sering dijadikan sebagai indikator kemajuan suatu wilayah karena diasumsikan bahwa listrik tersebut digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang memberikan nilai tambah ekonomi (RUED, 2019). Peningkatan konsumsi energi listrik yang tidak dibarengi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi menandakan adanya pemborosan energi (Fandari et al., 2014).



Gambar 2.5. 11 Konsumsi Listrik dan Jumlah Pelanggan PLN Tahun 2016-2022

Sumber: PLN, 2021; (BPS, 2020, 2021b, 2023), data telah diolah kembali

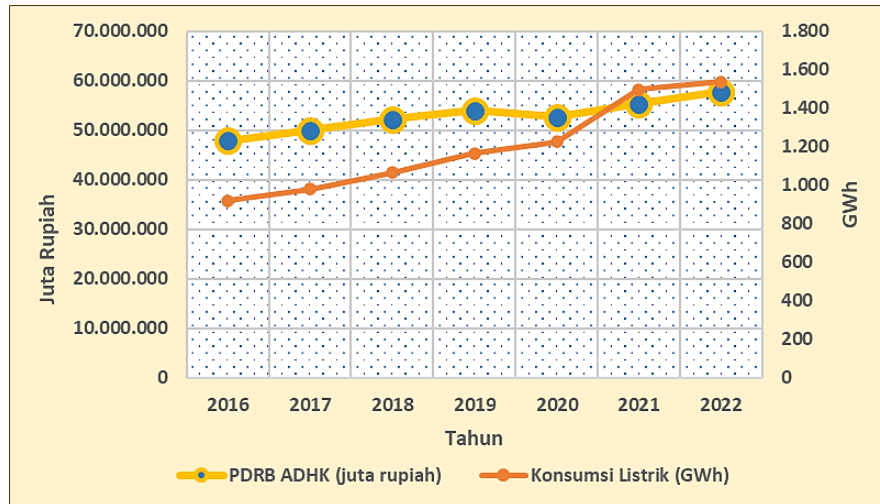
Di atas adalah gambar yang menyajikan tren konsumsi listrik dan jumlah pelanggan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) sejak tahun 2016 hingga tahun 2022. Pada gambar di atas terlihat adanya tren kenaikan konsumsi energi listrik yang lebih tajam daripada pertambahan jumlah pelanggan listrik. Kondisi tersebut menandakan adanya konsumsi yang lebih besar pada setiap pelanggan listrik. Konsumsi listrik per pelanggan yang semakin besar menandakan adanya aktivitas antropogenik yang lebih banyak yang dilakukan oleh pelanggan. Berikut ini tersaji data konsumsi listrik per kapita yang membandingkan data konsumsi listrik dengan jumlah penduduk. Data berikut dapat digunakan untuk melihat kemajuan aktivitas ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung yang dilihat berdasarkan pendekatan konsumsi listrik per kapita.



Gambar 2.5. 12 Konsumsi Listrik Per Kapita Tahun 2016-2022

Sumber: PLN, 2021; (BPS, 2020, 2021b, 2023), data telah diolah kembali

Berdasarkan gambar di atas, konsumsi listrik per kapita yang semakin meningkat menandakan kemajuan ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun demikian, peningkatan konsumsi listrik tersebut jika tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi, maka tidak akan efisien atau justru menandakan adanya pemborosan energi. Pada gambar berikut tersaji perbandingan tren konsumsi listrik dengan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung yang diindikasikan dengan PDRB ADHK.



Gambar 2.5. 13 Konsumsi Energi Listrik dan Pertumbuhan Ekonomi 2016-2022

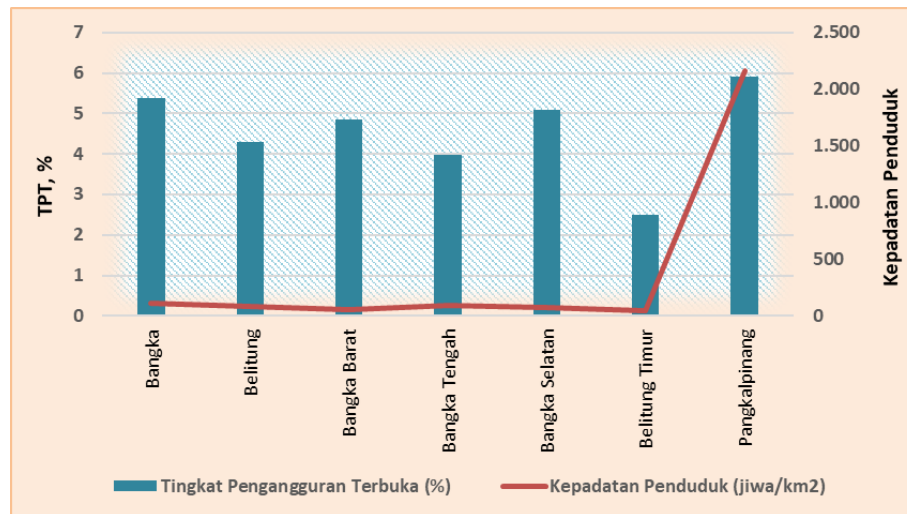
Sumber: PLN, 2021; (BPS, 2020, 2021b, 2023), data telah diolah kembali

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa laju kenaikan konsumsi energi listrik lebih cepat daripada laju pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi tersebut menandakan adanya pemborosan energi karena kenaikan konsumsi energi tidak dibarengi dengan produktivitas ekonomi. Kondisi ini tentu menjadi tekanan bagi kondisi lingkungan maupun kondisi sosial masyarakat, karena aktivitas antropogenik yang besar dan menimbulkan tekanan pada lingkungan ternyata tidak terlalu produktif meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

II.5.3 States

Berbagai macam aktivitas antropogenik yang telah dideskripsikan sebelumnya memberikan tekanan pada kondisi lingkungan, termasuk juga kondisi sosial-ekonomi Kepulauan Bangka Belitung. Penduduk yang semakin padat, khususnya di area perkotaan memerlukan kecukupan pangan dan tempat tinggal yang ketersediaan lahannya semakin terbatas. Penduduk juga memerlukan pekerjaan yang layak untuk mencukupi kebutuhan yang semakin bertambah dan beragam, namun karena ketersediaan lapangan kerja yang terbatas ataupun kualitas tenaga kerja yang tidak sesuai, maka muncul fenomena pengangguran.

Kondisi (*state*) persebaran kepadatan penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di setiap kabupaten/kota dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut. Pada gambar tersebut terlihat bahwa TPT tertinggi ada di Pangkalpinang yang merupakan wilayah ibukota provinsi dan memiliki penduduk paling padat di antara kabupaten lainnya. Perbedaan kepadatan penduduk yang tajam antara wilayah perkotaan dengan wilayah lainnya sangat terlihat jelas.

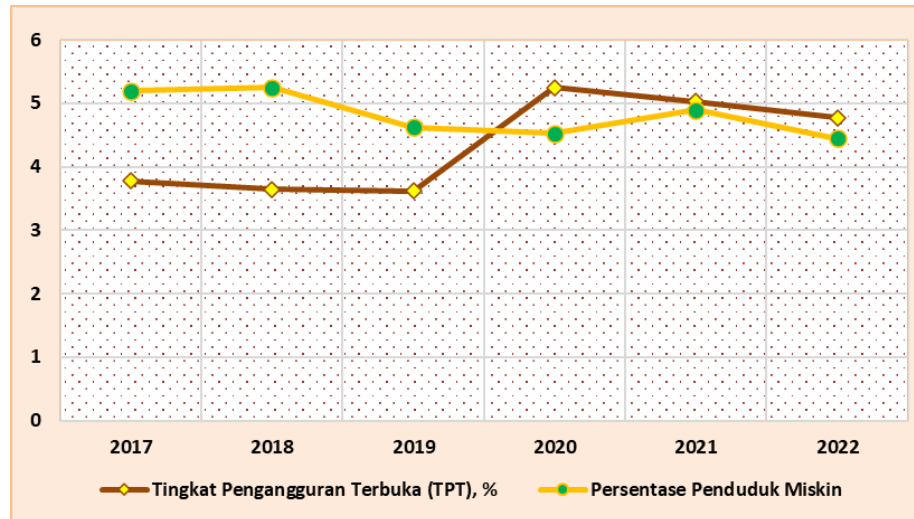


Gambar 2.5. 14 Persebaran Kepadatan Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022

Sumber: (BPS, 2023), data telah diolah kembali

Nilai TPT menunjukkan perbandingan dalam bentuk persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Nilai TPT di Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, namun dua tahun terakhir, sejak tahun 2021, TPT mulai menunjukkan tren menurun meskipun tren keseluruhan masih menunjukkan tren yang meningkat. Berikut ini tersaji nilai TPT yang disandingkan dengan persentase jumlah penduduk miskin tahun 2017 sampai dengan 2022. Persentase penduduk miskin ditentukan berdasarkan jumlah penduduk miskin pada Bulan Maret (semester 1) setiap tahunnya dibandingkan dengan data jumlah penduduk pada tahun tersebut. Terlihat bahwa persentase penduduk miskin dan TPT memiliki tren yang mirip dari

tahun ke tahun. Penurunan persentase penduduk miskin dan TPT dalam dua tahun terakhir menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang juga mulai meningkat.



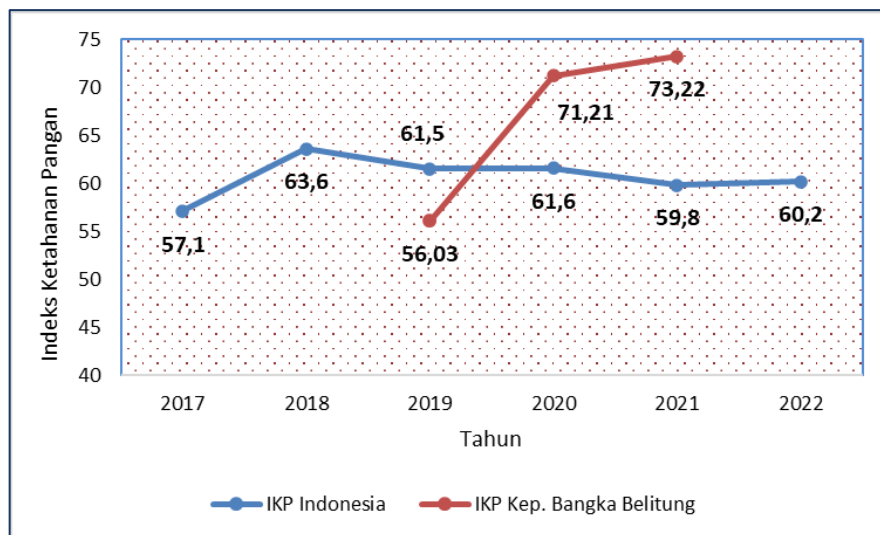
Gambar 2.5. 15 Persentase Penduduk Miskin dan TPT Tahun 2017-2022

Sumber: (BPS, 2023), data telah diolah kembali

Sebagai gambaran kesejahteraan masyarakat, kondisi ketahanan pangan juga menjadi hal yang esensial dalam pembangunan. Tekanan dari adanya alih fungsi lahan pertanian dan konsumsi beras penduduk yang cenderung tinggi mempengaruhi kondisi ketahanan pangan di Kepulauan Bangka Belitung. Ketahanan pangan dipengaruhi oleh banyak faktor, yang dapat dikelompokkan menjadi faktor ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan (baik dalam hal akses fisik maupun ekonomi), kualitas pemanfaatan (utilitas) pangan, dan stabilitas pangan (FAO, 2009; Pujiati *et al.*, 2020). Ketahanan pangan di Indonesia diindikasikan dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang ditentukan dengan mengacu pada faktor-faktor tersebut (*affordability, availability, quality & safety, dan sustainability & adaptation*).

Berikut ini adalah tren ketahanan pangan Indonesia tahun 2017-2022 berdasarkan data *Global Food Security Index* (GFSI) dan skor IKP di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019-2021 berdasarkan data Kementerian Pertanian. Berdasarkan data tersebut, skor IKP Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019-2021 mengalami kenaikan, hingga ada di atas

IKP secara nasional. Jika dilihat dari faktor ketersediaan pangan (*availability*), tentunya ketersediaan pangan di Kepulauan Bangka Belitung sangat terbatas dan bergantung pada daerah lain untuk memenuhi suplai di dalam daerah. Hal ini dikarenakan lahan pertanian (khususnya pertanian padi yang menjadi sumber makanan pokok) yang terbatas, bahkan terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan peruntukan lainnya. Kenaikan skor IKP di Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan karena faktor keterjangkauan (*affordability*) yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat (persentase penduduk miskin lebih rendah dari angka kemiskinan nasional, dan garis kemiskinan lebih tinggi dari garis kemiskinan daerah-daerah lain di Indonesia).

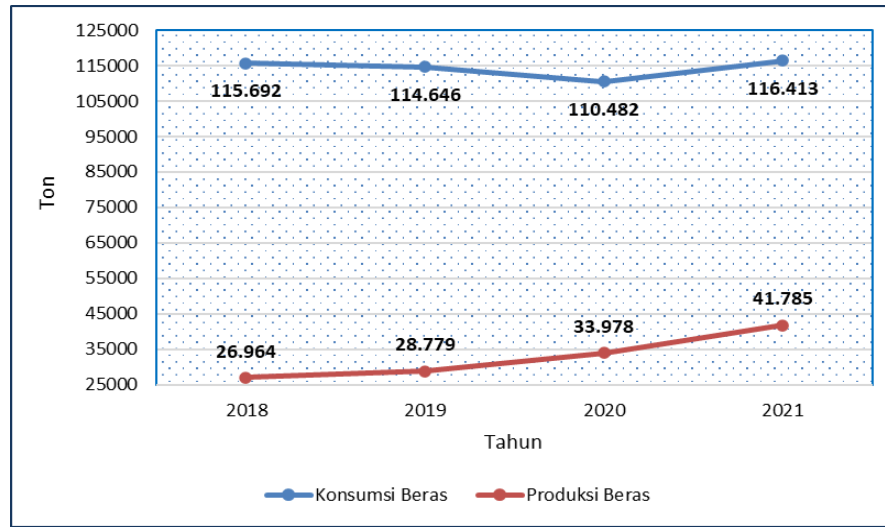


Gambar 2.5. 16 Tren IKP Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2021 Dibandingkan IKP Nasional

Sumber: (Kementerian Pertanian, 2022), data telah diolah

Sebagai gambaran tentang kondisi suplai beras di Kepulauan Bangka Belitung, berikut ini tersaji tren produksi beras tahun 2018-2021. Tren produksi beras terus meningkat, akan tetapi jika dibandingkan dengan permintaan konsumsi beras penduduk, maka produksi beras dalam daerah hanya dapat mencukupi sekitar 23,3%–35,9% konsumsi beras dalam daerah. Sebagian besar beras untuk mencukupi kebutuhan tersebut didatangkan dari daerah lain. Kondisi ini tidak menjadi masalah serius jika

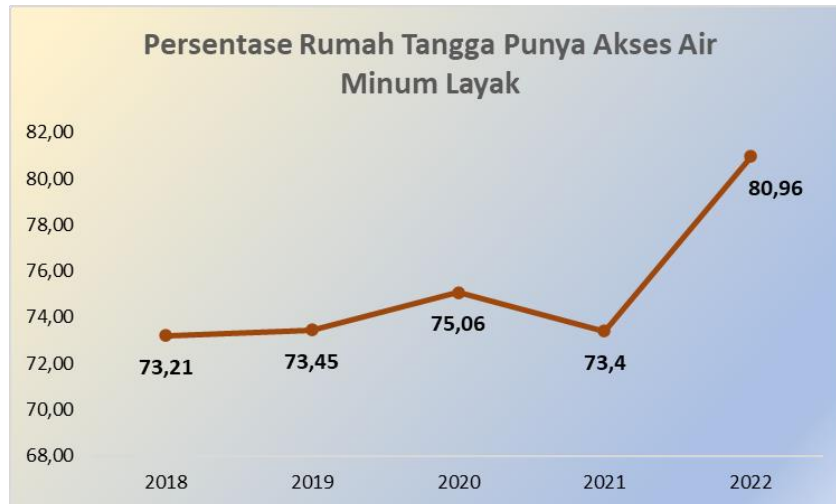
suplai beras dari daerah lain tetap terpenuhi dan kondisi ekonomi masyarakat tetap baik sehingga dapat menjamin keterjangkauan beras dalam daerah. Hal lain yang dapat dilakukan terkait kondisi ini adalah dengan menangani alih fungsi lahan pertanian dan menerapkan diversifikasi bahan pangan di dalam daerah (mengurangi ketergantungan pada bahan pangan beras).



Gambar 2.5. 17 Produksi dan Konsumsi Beras Tahun 2018-2021

Sumber: (BPS, 2022c)

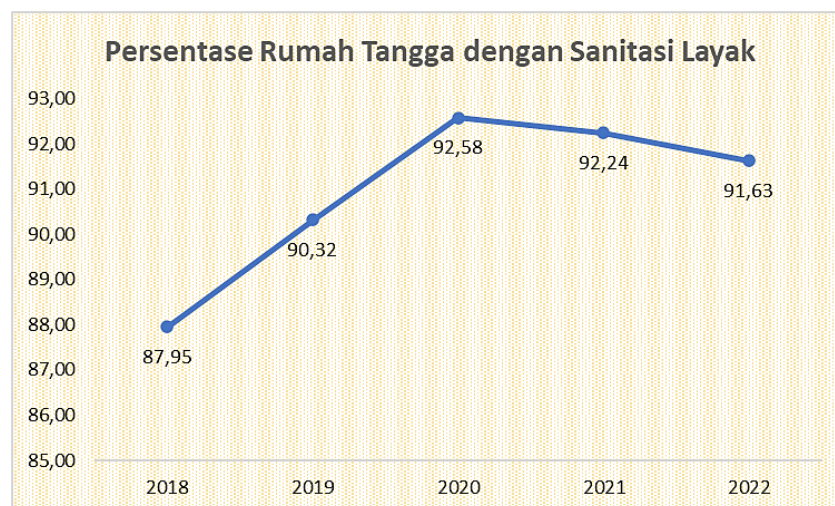
Kondisi lainnya yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat yang terpengaruh oleh aktivitas antropogenik adalah aksesibilitas sumber air minum layak dan sanitasi layak. Gambar berikut menyajikan data persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air minum layak tahun 2018-2022. Terlihat bahwa persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air minum layak semakin meningkat. Dalam gambar berikut, yang dimaksud air minum layak adalah sumber air minum utama yang digunakan meliputi ledeng, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.



Gambar 2.5. 18 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2018-2022

Sumber: (BPS, 2023), data telah diolah

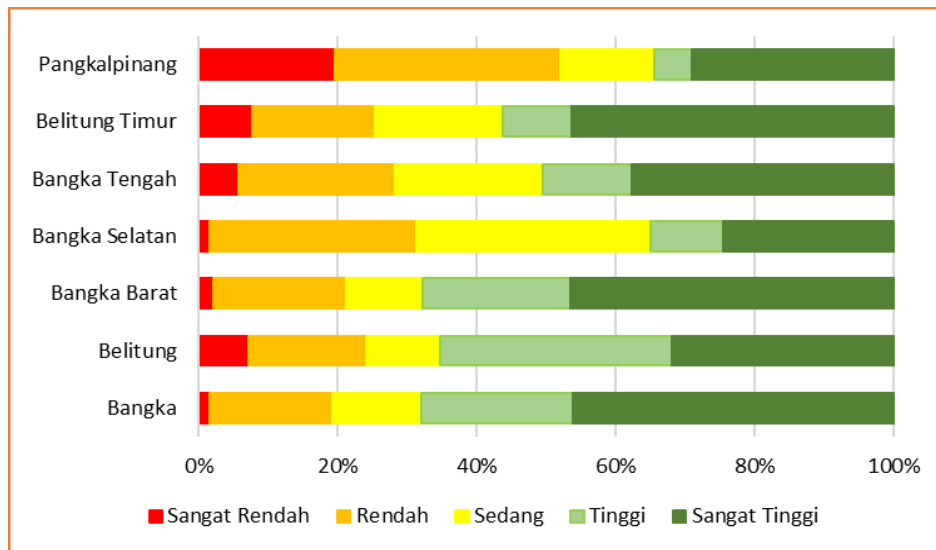
Sanitas layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau Instalasi/Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL/ SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri, bersama dengan rumah tangga lain tertentu, ataupun di MCK Komunal. Berikut ini tersaji data persentase rumah tangga dengan sanitasi layak.



Gambar 2.5. 19 Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Tahun 2018-2022

Sumber: (BPS, 2023), telah diolah kembali

Selain kondisi sosial-ekonomi masyarakat, sangat terlihat jelas bahwa kondisi aspek lingkungan/ekologi juga terpengaruh oleh adanya aktivitas antropogenik. Lingkungan perkotaan dengan tutupan lahan terbangun atau permukiman yang padat serta kurangnya area dengan tutupan vegetasi akan berpengaruh pada kondisi *ecosystem services* (jasa lingkungan). Sebagai gambaran, berikut ini tersaji secara ringkas kondisi indikatif jasa lingkungan penyediaan air di tujuh kabupaten/kota.



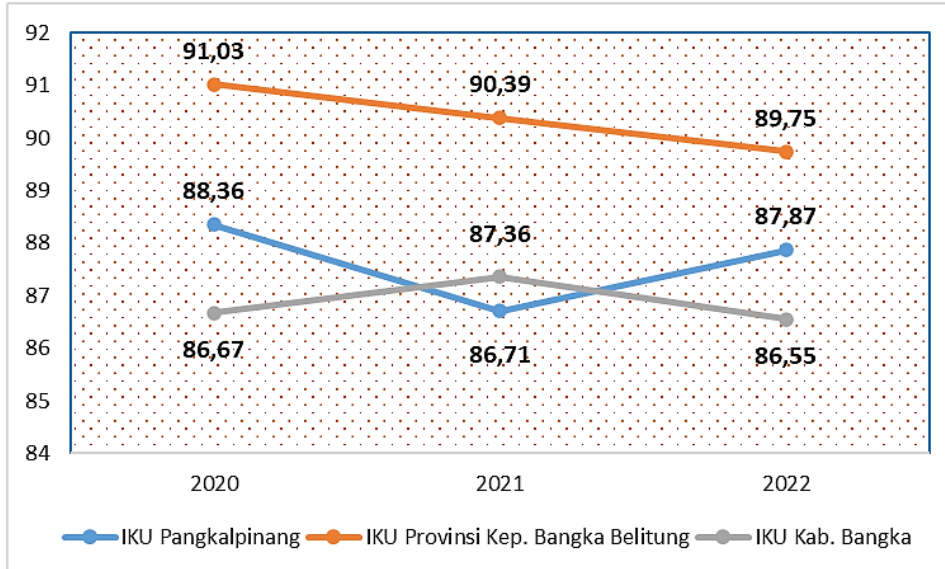
Gambar 2.5. 20 Distribusi Indikasi Jasa Lingkungan Penyediaan Air di Pangkalpinang dan Enam Kabupaten Tahun 2021

Sumber: DDDTLH Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2022 (data telah diolah kembali)

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan luas wilayahnya, Pangkalpinang memiliki persentase luas area dengan jasa penyediaan air kelas sangat rendah dan kelas rendah yang paling besar dibandingkan 6 kabupaten lainnya. Kondisi tersebut dapat memberikan gambaran tentang kondisi jasa lingkungan di Pangkalpinang yang proporsi lahan terbangunnya cukup besar. Di antara tujuh kabupaten/kota, Pangkalpinang memiliki luas wilayah yang paling kecil, tetapi kepadatan penduduk dan proporsi area terbangunnya adalah yang paling besar. Hal tersebut berdampak pada ekologi di perkotaan Pangkalpinang sehingga menurunkan kemampuan lingkungan untuk memberikan layanan/jasa, atau dengan kata lain lingkungan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Kondisi lingkungan lainnya yang dipengaruhi oleh tekanan dari aktivitas antropogenik di perkotaan adalah ketersediaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang semakin terbatas. Di area ibukota provinsi (Kota Pangkalpinang), realisasi RTH hingga tahun 2022 masih mencapai 11% luas kota, sedangkan perencanaan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah 20,30% (Marlianto, 2022). Berbagai penyebab terbatasnya lahan untuk RTH ini, di antaranya adalah pembangunan permukiman yang semakin meningkat dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lahan mereka sebagai RTH. Kondisi ini terlihat jelas pada tren lahan permukiman/lahan terbangun di Kepulauan Bangka Belitung yang semakin naik, sebagaimana disajikan pada bagian sebelumnya.

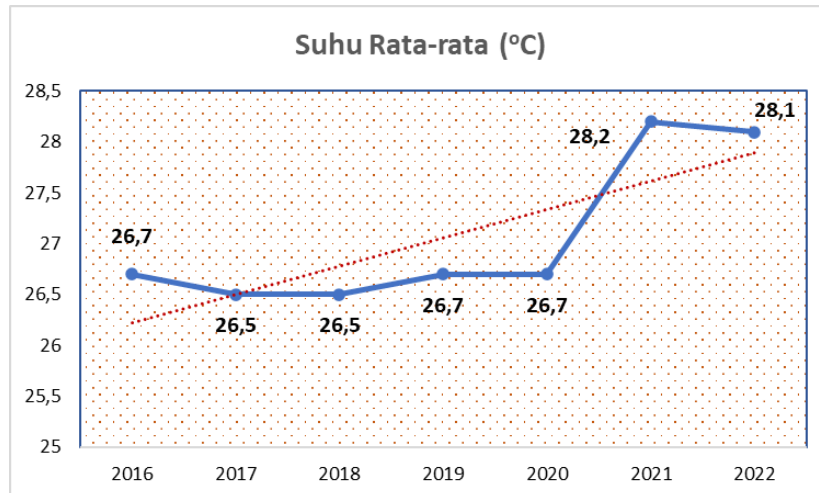
Permukiman penduduk di wilayah perkotaan memerlukan RTH yang cukup untuk mengontrol kualitas dan suhu udara, resapan air, meredam kebisingan, maupun menciptakan suasana teduh dan nyaman bagi penduduk perkotaan. Kondisi kualitas udara di Kepulauan Bangka Belitung secara umum dapat ditandai dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) yang menjadi salah satu komponen dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Berikut ini tersaji tren nilai IKU di Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota yang penduduknya paling padat di area perkotaan, yaitu Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka selama tiga tiga tahun terakhir (tahun 2020-2022).



Gambar 2.5. 21 Perbandingan IKU Provinsi, Pangkalpinang, dan Kab. Bangka

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2023

Pada gambar di atas terlihat jelas bahwa area perkotaan (Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka) dengan penduduk yang padat memiliki nilai IKU yang cenderung lebih rendah daripada rata-rata IKU di provinsi. Tren IKU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kualitas udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meskipun nilai IKU tersebut masih tergolong baik. Sebagai gambaran kondisi udara, terutama yang terkait dengan unsur iklim, berikut ini disajikan tren suhu rata-rata berdasarkan hasil pengamatan dari Stasiun BMKG, yang tercantum dalam data BPS. Berdasarkan data berikut dapat dilihat bahwa suhu rata-rata di Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kecenderungan tersebut tidak terlepas dari akibat aktivitas antropogenik manusia yang menghasilkan emisi, khususnya emisi GRK yang menyebabkan pemanasan global.



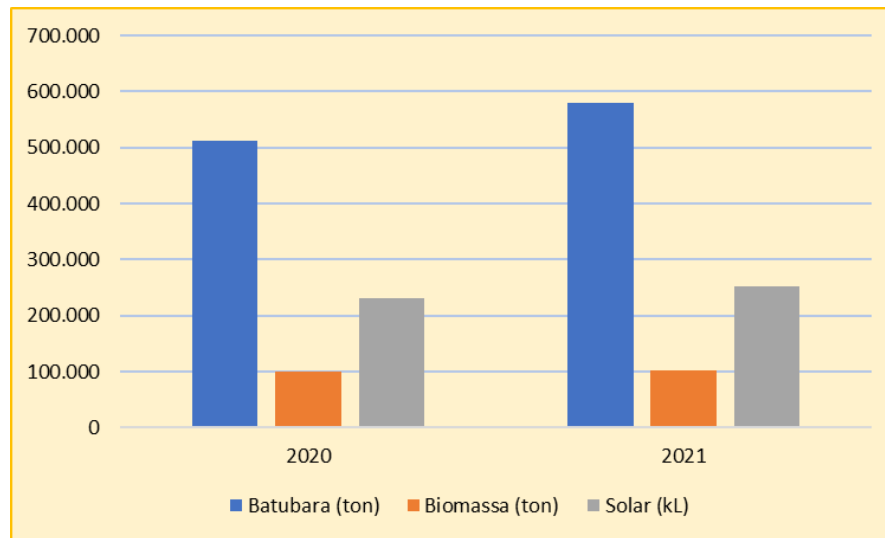
Gambar 2.5. 22 Suhu Rata-rata Unsur Iklim Tahun 2016-2022

Sumber: (BPS, 2018b, 2019, 2022d, 2023), data telah diolah

Selain faktor RTH, kualitas udara juga dipengaruhi oleh berbagai macam aktivitas antropogenik lainnya, seperti emisi dari proses pembakaran bahan bakar di kegiatan industri, pembangkit listrik, kendaraan bermotor, maupun rumah tangga. Sebagaimana pembahasan pada bagian sebelumnya, penggunaan kendaraan pribadi di Kepulauan Bangka Belitung terus meningkat disertai dengan ketidakpedulian penduduk tentang dampak perilaku penggunaan kendaraan pribadi. Hal tersebut memberikan tekanan pada kondisi lingkungan, khususnya kondisi kualitas udara. Bahan bakar kendaraan bermotor sebagian besar adalah bahan bakar fosil (bensin) sebagaimana tercantum dalam Tabel II.5.3 sehingga cenderung tidak berkelanjutan.

Berikut ini disajikan kondisi jenis bahan bakar yang digunakan di unit pembangkit listrik tahun 2020 dan 2021. Sebagian besar bahan bakar yang digunakan di pembangkit listrik adalah batubara. Penggunaan batubara di pembangkit listrik meningkat dari 511.262 ton pada tahun 2020 menjadi 579.939 ton pada tahun 2021. Penggunaan solar & biosolar juga sedikit meningkat dari 230.232 kL menjadi 252.807 kL. Penggunaan biomassa sedikit sekali mengalami peningkatan dari 100.387 ton menjadi 102.823 ton. Berdasarkan kondisi ini maka dapat disimpulkan bahwa pembangkit listrik di Kepulauan Bangka Belitung kecenderungannya menggunakan

bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar terbarukan yang mulai banyak diterapkan adalah biomassa dan beberapa pembangkit listrik di pabrik ada yang menggunakan bahan bakar biogas. Meskipun demikian, berdasarkan kondisi tren ini maka dapat dilihat kecenderungan pemilihan bahan bakar fosil saat terjadi peningkatan produksi listrik akibat permintaan dari para pelanggan listrik.



Gambar 2.5. 23 Perbandingan Bahan Bakar Pembangkit Tahun 2020 dan 2021

Sumber: Dinas ESDM, 2023; SignSmart, 2023 (data telah diolah)

Penggunaan bahan bakar di skala rumah tangga memiliki kecenderungan yang lebih baik daripada sektor transportasi. Berikut ini tersaji data penggunaan bahan bakar di rumah tangga tahun 2020 dan 2021. Sebagian besar rumah tangga menggunakan bahan bakar *Liquefied Petroleum Gas* (LPG). Penggunaan minyak tanah berkurang, sementara penggunaan LPG meningkat. Kondisi ini menunjukkan adanya peralihan bahan bakar rumah tangga dari minyak tanah ke LPG. Pembakaran LPG lebih berkelanjutan bagi lingkungan daripada pembakaran minyak tanah karena LPG menghasilkan hingga 90% lebih sedikit karbon dioksida dan tidak beracun. Selain itu, LPG tidak mengandung belerang sehingga ketika dibakar untuk bahan bakar, LPG tidak melepaskan banyak karbon ke atmosfer, tidak seperti bahan bakar lain seperti batu bara dan minyak.

Penggunaannya per kilogram jauh lebih efisien daripada bahan bakar fosil yang juga dapat menghasilkan solusi yang hemat biaya. Selain itu, LPG jauh lebih mudah disimpan karena kemampuannya untuk memampatkannya menjadi larutan yang lebih padat daripada minyak dan batu bara.

Emisi yang terlepas dari hasil pembakaran bahan bakar sebagai sumber energi adalah salah satu produk aktivitas antropogenik manusia yang dilepaskan ke lingkungan dan cenderung berdampak negatif pada kondisi lingkungan. Produk lainnya yang sangat terlihat dilepaskan ke lingkungan dari aktivitas antropogenik sehari-hari adalah sampah.

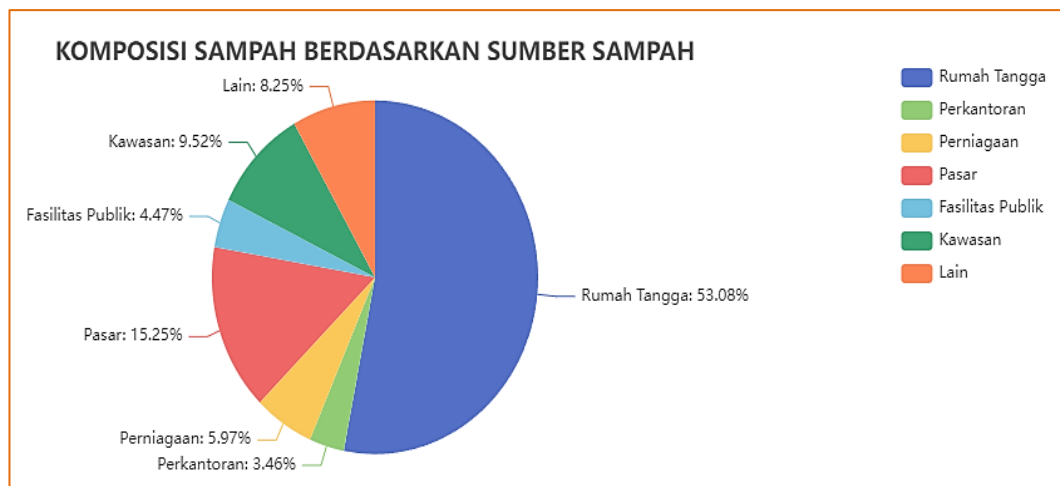
Tabel 2.5. 4 Timbulan Sampah Tahun 2022

Kabupaten	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (m ³ /hari)	Timbulan Sampah (kg/hari)
Bangka	334.344	405,27	133.738
Belitung	186.331	223,04	73.602
Bangka Barat	209.413	255,42	84.290
Bangka Tengah	205.510	249,57	82.359
Bangka Selatan	202.263	346,61	114.380
Belitung Timur	130.463	156,61	51.680
Pangkalpinang	226.297	496,94	163.990
Kep. Bangka Belitung	1.494.621	2.133,45	704.038

Sumber: BPS, 2023; SIPSN, 2022 (telah diolah kembali)

Berdasarkan data pada tabel di atas, timbulan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 sebesar 2.133,45 m³/hari. Timbulan sampah terbesar ada di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka dengan penduduk yang paling padat. Data tersebut cukup memberi gambaran tentang aktivitas konsumsi di area perkotaan yang relatif lebih tinggi/konsumtif dibandingkan daerah lain. Konsumsi yang tinggi ini tentu dipengaruhi oleh tuntutan sosial-budaya dan kondisi perekonomian yang lebih maju di perkotaan. Selain itu, tingkat kesadaran tentang pengelolaan sampah yang cukup rendah juga turut menyebabkan timbulnya kondisi tersebut.

Lebih dari 50% timbulan sampah di Kepulauan Bangka Belitung dihasilkan dari aktivitas rumah tangga. Timbulan terbesar ke-2 adalah aktivitas pasar. Tren komposisi sumber sampah ini berlangsung dari tahun ke tahun, yang mana aktivitas rumah tangga adalah sumber sampah utama. Hal ini wajar mengingat aktivitas pemenuhan kebutuhan penduduk di tingkat hilir (rumah tangga/individu) berlangsung terus-menerus untuk kebutuhan hidup. Kondisi ini dapat menjadi pertimbangan awal dalam upaya pengelolaan sampah. Peningkatan kesadaran dan kepedulian pada lingkungan sangat penting ditingkatkan di kalangan masyarakat. Berikut ini tersaji gambar tentang komposisi sumber sampah di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022.



Gambar 2.5. 24 Komposisi Sumber Timbulan Sampah Tahun 2022

Sumber: SIPSN, 2022

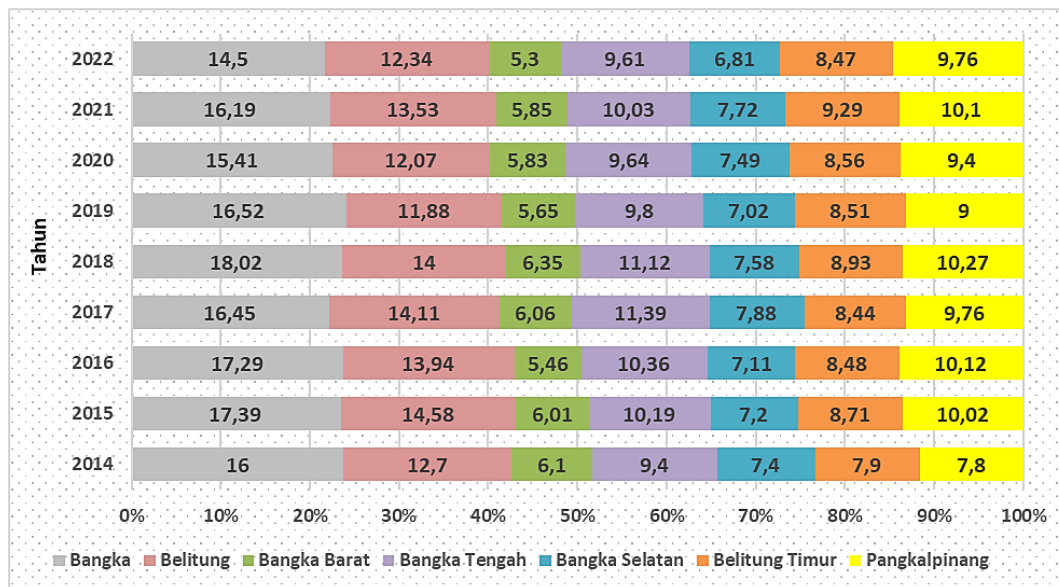
II.5.4 Impacts

Beberapa *impacts* (dampak) yang timbul akibat berbagai macam perubahan kondisi lingkungan maupun kondisi sosial ekonomi di perkotaan yang disebabkan oleh aktivitas antropogenik, di antaranya adalah pengangguran, penurunan kualitas udara, pencemaran air, masalah kesehatan masyarakat, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang melebihi kapasitasnya, gangguan estetika dan kebauan, banjir atau

genangan air, hingga memperparah masalah pemanasan global. Berikut ini dibahas beberapa dampak tersebut.

II.5.4.1 Pengangguran dan kemiskinan

Masalah pengangguran dapat diindikasikan dengan TPT yang telah disajikan kondisinya pada bagian sebelumnya (**Gambar 2.5. 15**), disandingkan dengan persentase penduduk miskin. Tren TPT dan persentase penduduk miskin memiliki kemiripan. Hal ini menunjukkan kaitan yang jelas antara keduanya bahwa pengangguran adalah salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan. Jika dilihat pada jumlah penduduk miskin di setiap kabupaten/kota, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk miskin ada di Kabupaten Bangka dan Belitung. Komposisi penduduk miskin di Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh penduduk di pedesaan. Gambar berikut menyajikan lebih detail persebaran penduduk miskin di setiap kabupaten/kota tahun 2014-2022.



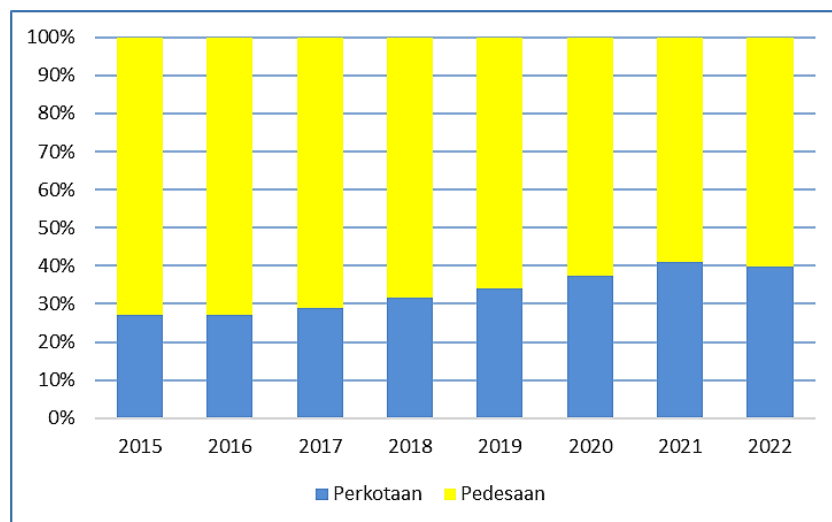
Gambar 2.5. 25 Persebaran Penduduk Miskin Di Tujuh Kabupaten/Kota

Sumber: (BPS, 2022b, 2023), data telah diolah kembali

Gambar di atas mengilustrasikan persentase penduduk miskin Kepulauan Bangka Belitung di tujuh kabupaten/kota. Jika dilihat tren

persebaran penduduk miskin tahun 2014-2022, maka persentase terbesar selalu ada di Kabupaten Bangka. Kondisi ini sepadan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bangka yang selalu paling besar di antara kabupaten/kota lainnya. Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin yang besar di Kabupaten Bangka ini perlu diselesaikan. Persentase terbesar kedua ada di Kabupaten Belitung yang sebagian besar adalah daerah pedesaan dan kepadatan penduduknya tidak setinggi kepadatan penduduk di Kabupaten Bangka maupun Kota Pangkalpinang.

Gambar berikut ini menyajikan tren persentase penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan tahun 2015-2022. Berdasarkan gambar berikut, terlihat bahwa persentase penduduk miskin di pedesaan selalu lebih besar daripada di perkotaan. Kondisi ini menandakan kondisi sosial-ekonomi di perkotaan yang lebih baik. Selain itu, kondisi ini juga dapat menjadi pertanda adanya ketimpangan pembangunan di area pedesaan dan area perkotaan sehingga pemerataan pembangunan di berbagai aspek perlu ditingkatkan. Gambar berikut ini juga menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan persentase penduduk miskin di perkotaan yang menjadi pertanda semakin banyaknya masalah sosial-ekonomi di daerah perkotaan.

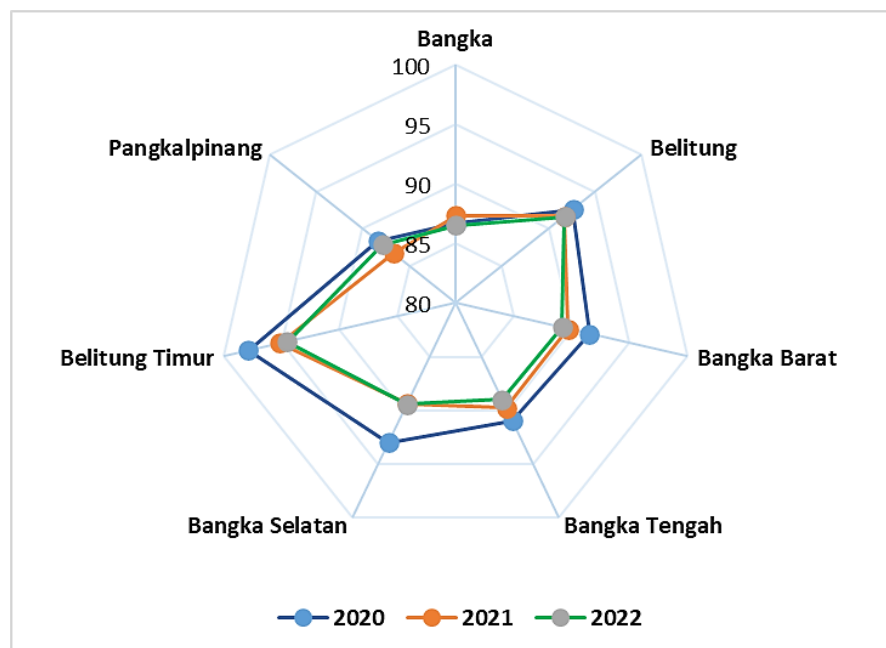


Gambar 2.5. 26 Persentase Penduduk Miskin Di Perkotaan dan Pedesaan

Sumber: (BPS, 2023), data telah diolah

II.5.4.2 Penurunan kualitas udara

Kondisi udara yang telah disajikan pada bagian sebelumnya (**Gambar 2.5. 21**) menunjukkan tren kualitas udara di Kepulauan Bangka Belitung yang cenderung mengalami penurunan. Kualitas udara di perkotaan yang padat penduduknya cenderung lebih rendah dibandingkan kualitas udara di daerah lainnya dan berkontribusi pada penurunan nilai IKU provinsi. Berikut ini tersaji secara lebih lengkap perbandingan IKU di semua kabupaten/kota pada tahun 2020-2022. Pada gambar berikut terlihat perbedaan yang cukup tajam antara IKU Kota Pangkalpinang & Kabupaten Bangka dengan IKU kabupaten lainnya. Perbedaan yang cukup tajam juga terjadi di Pulau Belitung, yaitu antara Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Perbedaan ini diperkirakan karena adanya perbedaan kepadatan aktivitas ekonomi di kedua kabupaten ini.

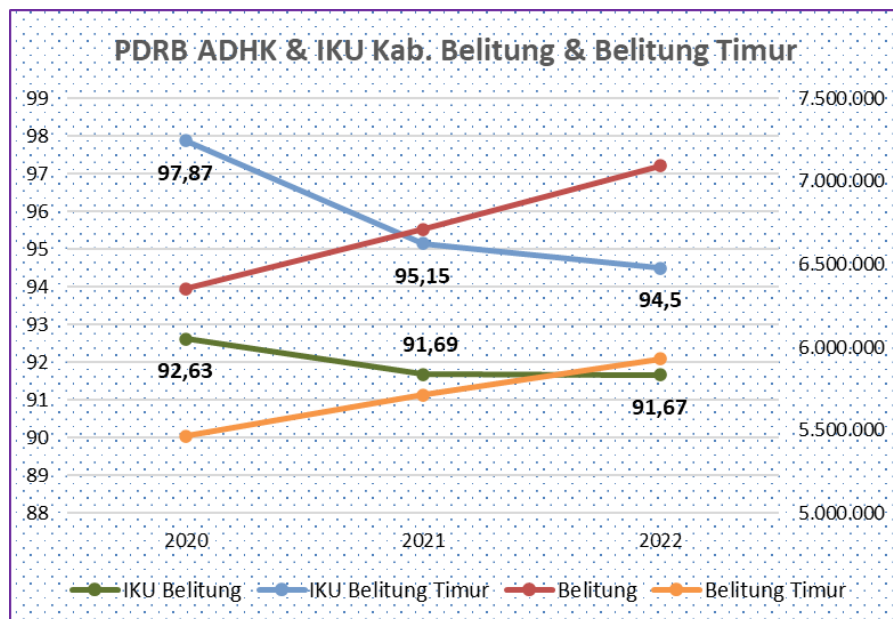


Gambar 2.5. 27 Perbandingan IKU Kabupaten/Kota

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2023

Kepadatan penduduk yang meningkatkan aktivitas ekonomi di setiap kabupaten/kota dapat diindikasikan dengan PDRB ADHK yang sering menjadi indikator pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Sebagai gambaran keterkaitan antara kegiatan ekonomi dan dampaknya pada

kualitas udara di berbagai kabupaten/kota, berikut ini disajikan gambar yang menunjukkan salah satu perbandingan tren PDRB ADHK dan IKU di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Pada gambar berikut terlihat jelas bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung lebih tinggi daripada Kabupaten Belitung Timur. Sebaliknya, IKU di Kabupaten Belitung jauh lebih rendah daripada IKU di Kabupaten Belitung Timur. Begitu juga tren dari waktu ke waktu yang menunjukkan bahwa jika semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka nilai IKU semakin turun. Fakta ini banyak terjadi di berbagai daerah, bahkan di berbagai negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi sering diupayakan dengan langkah/metode yang tidak berkelanjutan atau tidak disertai dengan upaya pengendalian dampak yang tepat. Kecenderungan penurunan kualitas udara dan pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ini harus segera ditangani dan dikendalikan ke arah yang lebih berkelanjutan.



Gambar 2.5. 28 Keterkaitan PDRB ADHK dan IKU

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2023

Penurunan IKU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini harus segera dicegah/dikontrol meskipun masih dalam kategori baik, agar tidak

terus menerus terjadi penurunan. Kualitas udara suatu area dapat mempengaruhi kualitas udara di area sekitarnya karena pergerakan udara yang mengikuti arah angin sehingga pengendalian kualitas udara diperlukan strategi yang lebih efektif.

II.5.4.4 TPA Sampah yang Melebihi Kapasitas

Jumlah timbulan sampah perkotaan yang semakin bertambah dan tidak tereduksi menyebabkan permasalahan pada TPA Sampah. Sistem penanganan sampah di TPA yang bersifat *landfill* (baik *control landfill* maupun *sanitary landfill*), bahkan pengoperasian TPA yang mendekati cara *open dumping* menyebabkan semakin sempitnya lahan untuk menampung sampah di TPA. Di sisi lain, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas antropogenik yang selalu memanfaatkan lahan dan sumber daya alam, ketersediaan lahan akan semakin berkurang.

Kondisi TPA yang sudah melebihi kapasitasnya adalah dampak yang terlihat dan terukur dari perubahan kondisi timbulan sampah yang berasal dari aktivitas antropogenik manusia (khususnya di perkotaan yang penduduknya relatif lebih padat). Sebagaimana penjelasan pada bagian sebelumnya, perubahan kondisi timbulan sampah ini terjadi karena tekanan dari aktivitas konsumsi penduduk yang disertai dengan ketidakpedulian lingkungan sehingga memiliki pola yang kurang bertanggung jawab. Sebagai ilustrasi tentang dampak ini, berikut ini tersaji data kondisi TPA di kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.5. 5 Kondisi TPA di Kabupaten/Kota Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Nama TPA	Jenis TPA	Luas (Ha)	Kapasitas (m ³)	Volume (m ³)
Bangka	Kenanga	Sanitary Landfill	4,95	540.000	125.925
Bangka	Belinyu	Sanitary Landfill	1,2	300.000	19.710
Bangka Selatan	Junjung Besaoh	Control Landfill	11	80.000	85.350

Kabupaten/Kota	Nama TPA	Jenis TPA	Luas (Ha)	Kapasitas (m ³)	Volume (m ³)
Bangka Selatan	Junjung Besaoh	Control Landfill	5	47.375	340
Bangka Tengah	Simpang Jongkong	Sanitary Landfill	40	70.000	90.000
Bangka Barat	Air Belo	Sanitary Landfill	4,2	115.875	140.919
Pangkalpinang	Parit Enam	Control Landfill	4,9	216.000	>216.000
Belitung	Gunung Sadai	Sanitary Landfill	8,5	500.000	305.220
Belitung Timur	Trafo Mayang	Sanitary Landfill	12	120.000	33.000

Sumber: DLH Kabupaten/Kota, 2023

Kota Pangkalpinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus akan berkembang dan telah nyata adanya masalah keterbatasan lahan untuk TPA sampah. Kondisi TPA Kota Pangkalpinang yang sudah melebihi kapasitasnya menimbulkan berbagai dampak negatif turunan, seperti kebauan dan gangguan estetika. Sebagian sampah bahkan terbawa aliran air permukaan ataupun air sungai dan masuk ke laut sehingga mengganggu estetika di daerah pantai. Aktivitas pariwisata di pantai yang menimbulkan banyak sampah juga kurang terkelola dengan baik sehingga perlu upaya yang lebih besar dalam pengelolaan sampah di Pangkalpinang, baik di pusat kotanya, maupun di area pantai dekat kota. Kondisi TPA Paritenam dengan luas 4,9 ha yang dioperasikan secara *control landfill* (sebagian kecil) dan *open dumping* saat ini diketahui sudah tidak layak dan tidak dapat menangani sampah yang masuk ke TPA dengan baik. Hal serupa juga terjadi di TPA Air Belo Kabupaten Bangka Barat dan TPA Simpang Jongkong Kabupaten Bangka Tengah, yang volumenya saat ini telah melebihi kapasitas.

Sebaliknya di daerah non perkotaan (*rural area*), mendapatkan lahan untuk perluasan atau pembukaan TPA baru lebih mudah dilakukan daripada di daerah perkotaan. Hal ini terjadi di Kabupaten Bangka Selatan yang telah memperluas lahan TPA-nya sehingga masih dapat menampung

sampah yang masuk ke TPA Junjung Besaoh. Hal ini juga terjadi di TPA yang ada di Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur yang volumenya masih jauh di bawah kapasitas TPA.

II.5.4.5 Gangguan estetika dan kebauan

Sampah yang tidak ditangani dengan baik memiliki *multiplier effect* baik sektor sosial-ekonomi maupun lingkungan karena akan mengakibatkan pencemaran air, tanah, dan udara, berkontribusi pada perubahan iklim, munculnya bibit penyakit, serta menimbulkan bau tidak sedap dan secara estetika merusak pemandangan kota. Sampah rumah tangga yang dibuang ke saluran drainase, ujungnya bermuara ke laut sehingga menambah sampah di laut. Berdasarkan pernyataan PBB dalam situs <https://www.unenvironment.org/> bahwa Indonesia adalah sumber pencemar plastik di lautan nomor dua di dunia setelah China. Isu pencemaran plastik di laut dapat mempengaruhi citra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu tujuan wisata, serta lebih lanjut hal ini dapat menjadi faktor penurunan kedatangan wisatawan karena gangguan estetika dan akan berdampak langsung terhadap kemajuan bidang pariwisata. Dampak kebauan yang timbul dari timbunan sampah di TPA Parit Enam Pangkalpinang juga telah dirasakan pengguna jalan raya yang lokasinya di dekat lokasi TPA. Dampak kebauan ini juga terkadang dirasakan di wilayah perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berbagai macam gangguan estetika dan kebauan ini menunjukkan adanya urgensi pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan. Gangguan estetika dan kebauan lainnya akibat pengelolaan sampah yang kurang tepat atau tidak optimal adalah munculnya area kumuh di perkotaan. Pada awal tahun 2022, ada kawasan kumuh di Pangkalpinang seluas 85,30 Ha yang tersebar di enam kelurahan. Berikut ini tersaji tabulasi data luasan area kumuh di keenam kelurahan tersebut.

Tabel 2.5. 6 Kawasan Kumuh di Pangkalpinang

Kecamatan	Kelurahan	Luas Area Kumuh (Ha)
Rangkui	Keramat	12,5
	Parit Lalang	32,09
	Bintang	3,94
	Pintu Air	7,74
Taman Sari	Kejaksaan	18,13
Gabek	Selindung	10,9
Total		85,3

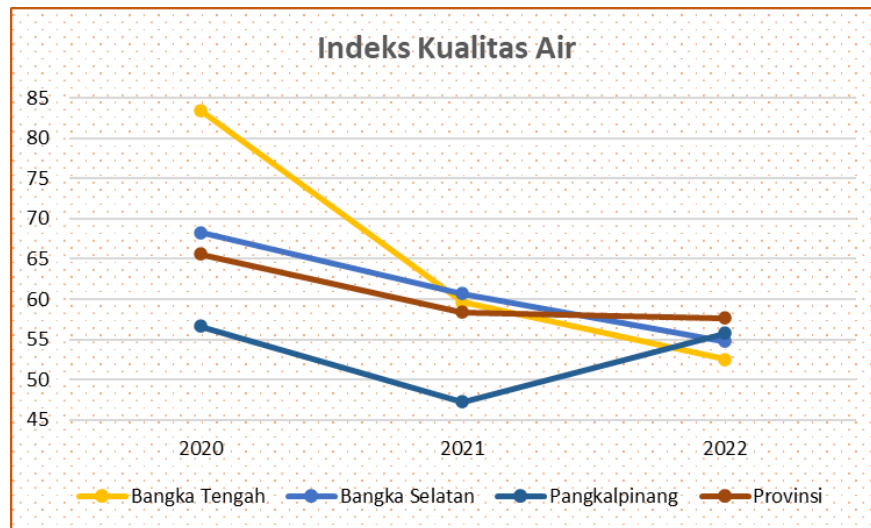
Sumber: (Disperkim Pangkalpinang, 2022)

Beberapa area di atas dapat dikategorikan kumuh karena beberapa kriteria. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, kriteria kekumuhan dilihat dari kondisi bangunan Gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, dan kondisi proteksi kebakaran. Pada berbagai kriteria tersebut, terlihat bahwa kondisi pengelolaan sampah menjadi salah satu kriteria dalam penentuan tingkat kekumuhan.

II.5.4.6 Pencemaran air dan penyakit

Selain berdampak negatif pada estetika dan menimbulkan kebauan, timbulan sampah yang tidak terkelola juga menyebabkan pencemaran air, udara, tanah, dan laut. Berbagai aspek lingkungan terkena *multiplier effect* dari tidak terkelolanya sampah. Pencemaran air terjadi karena sampah yang terbawa aliran air permukaan ke sungai ataupun karena sampah basah yang meresap dan mencemari air tanah dan air permukaan. Perilaku tidak peduli lingkungan yang sengaja membuang sampah secara praktis ke sungai atau badan air juga menyebabkan tercemarnya air permukaan. Pencemaran air akan berdampak pada habitat dan biota di dalamnya. Berikut ini tersaji data

tren Indeks Kualitas Air (IKA) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan IKA kabupaten/kota yang kecenderungannya di bawah IKA provinsi.



Gambar 2.5. 29 Nilai IKA Provinsi dan Kabupaten/Kota Dengan IKA Di Bawah Provinsi

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa IKA Kota Pangkalpinang selalu di bawah IKA provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kualitas air di Pangkalpinang relatif lebih rendah dibandingkan kualitas air di kabupaten lainnya. Pangkalpinang sebagai daerah perkotaan memiliki aktivitas ekonomi yang padat dan menghasilkan sampah & limbah yang lebih besar daripada daerah lainnya. Kondisi ini dapat dilihat berdasarkan data timbulan sampah yang telah disajikan pada bagian sebelumnya (**Tabel 2.5. 4**). Kabupaten Bangka Tengah yang berbatasan langsung dengan Kota Pangkalpinang juga memiliki kecenderungan nilai IKA yang semakin menurun selama tahun 2020-2022. Selain itu, Kabupaten Bangka Selatan juga memiliki tren penurunan IKA yang mirip, namun penurunannya tidak sebesar IKA di Bangka Tengah. Selain aktivitas perkotaan, penurunan IKA disebabkan juga oleh aktivitas pertambangan yang tidak diragukan lagi mencemari lahan dan air di area pertambangan, bahkan mencemari air sungai dan laut. Dengan demikian, dengan melihat gambar di atas dapat disimpulkan bahwa nilai IKA ketiga kabupaten/kota tersebut memberikan pengaruh yang besar pada penurunan IKA provinsi. Nilai IKA Pangkalpinang

yang merupakan daerah perkotaan adalah yang paling konsisten nilainya selalu di bawah IKA provinsi.

Selain berdampak pada kualitas air, aktivitas dan kondisi lingkungan di perkotaan dapat juga berdampak negatif pada kesehatan penduduk yang memanfaatkan air yang tercemar, terutama penduduk yang tidak memiliki akses pada sanitasi layak. Gangguan pada kesehatan penduduk, khususnya di perkotaan, juga dapat disebabkan oleh gaya hidup yang kurang sehat. Sebagai ilustrasi, berikut ini disajikan data jenis penyakit utama yang diderita penduduk di Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.5. 7 Jenis Penyakit Utama Penduduk

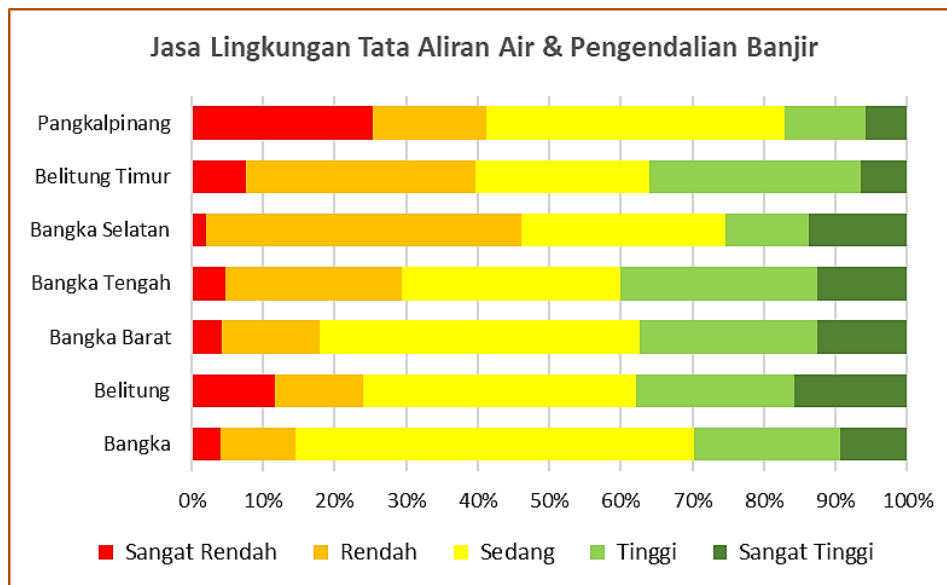
Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
Hipertensi	248.104
Diabetes Melitus	28.555
Kanker Serviks dan Payudara	26.387
HIV	276
AIDS	42

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penderita terbanyak pada tahun 2022 adalah penderita penyakit hipertensi. Salah satu penyebab hipertensi yang sering terjadi adalah karena pola hidup yang tidak sehat, termasuk gaya hidup merokok dan konsumsi makanan yang tidak seimbang. Berdasarkan deskripsi sebelumnya (**Gambar 2.5. 9** dan **Gambar 2.5. 24**), sampah yang berasal dari rumah tangga dan sampah makanan di Kepulauan Bangka Belitung memiliki proporsi yang paling besar. Pola seperti ini menjadi salah satu pemicu banyaknya penderita hipertensi. Selain itu, beberapa jenis penyakit lainnya yang muncul akibat timbunan sampah atau lingkungan yang kotor juga dijumpai di Kepulauan Bangka Belitung, seperti penyakit tuberkulosis (TBC), kusta, demam berdarah, dan malaria.

Banjir

Banjir adalah salah satu tanda terganggunya sistem hidrologi di suatu daerah. Pembangunan di perkotaan yang cenderung memperbanyak fragmentasi, memperluas area yang kedap air, serta mengurangi lahan bervegetasi menyebabkan berbagai siklus alam tidak berfungsi dengan baik, termasuk siklus air. Pembangunan perkotaan menyebabkan sistem hidrologi mengalami perubahan drastis sehingga jasa lingkungan pengendalian banjir juga terganggu. Perencanaan pembangunan perkotaan harus didesain sedemikian rupa agar dapat mengendalikan tata aliran air, mencegah banjir & bencana lainnya, sehingga menjadi kota yang berkelanjutan. Berikut ini tersaji kondisi indikatif jasa lingkungan pengatur tata aliran air dan pengendalian banjir di tujuh kabupaten/kota.



Gambar 2.5. 30 Distribusi Indikasi Jasa Lingkungan Tata Aliran Air dan Pengendalian Banjir di Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

Sumber: DDDTLH Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2022 (data telah diolah kembali)

Berdasarkan gambar di atas, indikasi jasa lingkungan tata aliran air dan pengendalian banjir di Kota Pangkalpinang memiliki luasan kelas sangat rendah yang terbanyak dibandingkan keenam kabupaten. Hal tersebut adalah salah satu kondisi yang timbul akibat pembangunan di perkotaan yang tidak disertai dengan perencanaan pengendalian banjir yang baik.

Secara umum, sistem drainase merupakan serangkaian bangunan air yang berfungsi mengurangi dan membuang kelebihan air (banjir) dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan dengan optimal, namun seringkali fungsi vital ini terganggu karena menurunnya kualitas drainase akibat sampah rumah tangga (Ardana et al., 2023). Kapasitas saluran drainase yang belum memadai, pembangunan pemukiman di sepanjang saluran drainase yang dapat mengurangi luas penampang basah saluran, serta ditemukannya sampah rumah tangga pada saluran drainase dan buangan tanah/pasir merupakan permasalahan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Proporsi Cara Pengelolaan Sampah di Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Riskesdas 2018							
Cara Pengelolaan Sampah Rumah Tangga							
Kabupaten/ Kota	Diangkut	Ditanam	Dibuat kompos	Dibakar	Dibuang ke kali/selokan/laut	Dibuang sembarang tempat	N Tertimbang
Bangka	29,62	3,56	1,07	43,21	1,99	20,55	787
Belitung	26,21	1,17	0,28	64,37	0,79	7,18	455
Bangka Barat	32,11	2,21	0,94	50,26	0,10	14,38	506
Bangka Tengah	61,33	1,69	0,03	22,19	6,42	8,34	436
Bangka Selatan	34,43	1,49	0	30,34	8,10	25,63	479
Belitung Timur	25,11	2,24	0	66,10	0,91	5,64	313
Pangkal Pinang	78,27	0	0	15,92	2,54	3,27	506
Bangka Belitung	40,83	1,90	0,42	40,70	2,94	13,23	3.483

Catatan : ¹ Diangkut artinya diangkut oleh petugas ke TPS atau dibawa sendiri oleh anggota rumah tangga ke TPS

Gambar 2.5. 31 Proporsi Cara Pengelolaan Sampah di Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota

Sumber: (Tim Riskesdas 2018, 2018)

Berdasarkan Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 Kepulauan Bangka Belitung, cara pengelolaan sampah rumah tangga sebesar 2,94% adalah dengan dibuang ke kali/selokan/laut. Hal ini menyebabkan sumbatan pada sistem drainase sehingga dapat menyebabkan genangan/banjir. Pada tahun 2022, banjir yang terjadi di beberapa area perkotaan, seperti di Kelurahan Tanjung (Kecamatan Mentok) Bangka Barat dan di Kota Pangkalpinang, yaitu di Kelurahan Opas

Indah, Gedung Nasional, Kampung Seberang, dan Rawa Bangun (Data BPBD Babel, 2022).

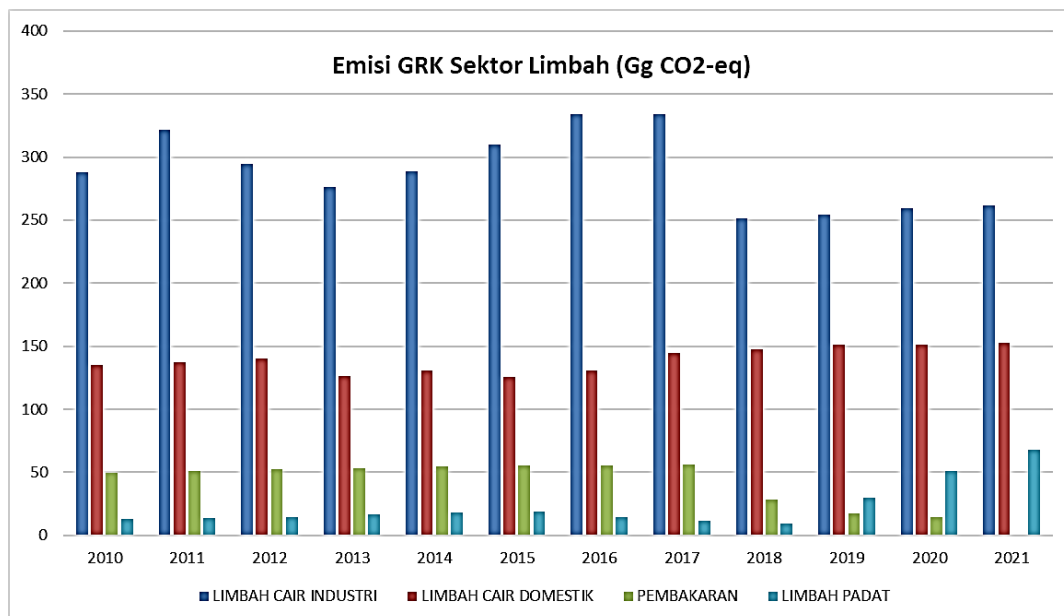
II.5.4.7 Kenaikan suhu rata-rata (pemanasan global)

Berdasarkan data kondisi lingkungan yang telah disajikan pada bagian sebelumnya (**Gambar 2.5. 22**), suhu rata-rata di Kepulauan Bangka Belitung semakin meningkat. Kenaikan suhu rata-rata yang disebabkan adanya pemanasan global adalah salah satu bentuk dampak negatif perubahan iklim yang dampaknya dirasakan di berbagai sektor kehidupan dan bersifat *multiplier effect*. Karena dampaknya yang tidak terbatas oleh ruang (lintas negara) dan terakumulasi dalam jangka panjang, maka perubahan iklim menjadi isu global yang dihadapi semua negara. Dampak perubahan iklim yang dirasakan di suatu wilayah dapat berasal dari aktivitas antropogenik yang mengemisikan Gas Rumah Kaca (GRK) di wilayah lain ataupun dalam wilayah itu sendiri.

Emisi GRK dapat timbul akibat sampah yang tidak terkelola, khususnya sampah organik. TPA yang seharusnya berfungsi sebagai tempat pemrosesan akhir, jika dioperasikan dengan cara *open dumping*, maka akan berfungsi sebagai tempat pembuangan akhir sampah. Dengan demikian, TPA yang memiliki timbunan sampah dalam jumlah besar (terutama sampah organik) memiliki potensi untuk mengalami proses degradasi anaerobik dan menghasilkan gas-gas penyebab pemanasan global, seperti gas metana. Jenis emisi GRK yang memiliki nilai *Global Warming Potential* (GWP) paling besar dari sektor pengelolaan sampah & limbah adalah gas metana (CH_4) yang timbul dari proses degradasi anaerobik timbunan limbah padat organik ataupun limbah perkotaan yang tidak diolah (dibuang ke laut, sungai, dan badan air lainnya). Gas metana juga dapat diemisikan dari sistem pengelolaan limbah yang sengaja memproduksi gas metana untuk energi atau dari sistem pengomposan limbah padat. Selain itu, pemrosesan sampah dan limbah juga mengemisikan gas karbon dioksida (CO_2) dan dinitrogen oksida (N_2O) yang juga merupakan jenis GRK. Gas N_2O berasal

dari kegiatan pengomposan/pembakaran limbah padat dan proses biologi limbah cair perkotaan, sementara gas karbon dioksida berasal dari pembakaran limbah padat.

Emisi sektor limbah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdata bersumber dari limbah cair industri, hasil pembakaran, limbah cair rumah tangga, dan limbah padat. Gambar berikut menyajikan tren kecenderungan emisi sektor limbah dari berbagai sumber tersebut. Pada gambar berikut terlihat bahwa emisi sektor limbah yang paling besar komponennya adalah emisi dari limbah cair industri yang kecenderungannya semakin menurun karena berbagai penerapan teknologi pemrosesan limbah dan proses pengawasan dari pemerintah. Pada gambar juga dapat dilihat bahwa limbah rumah tangga (domestik), khususnya limbah padat semakin meningkat emisinya. Kondisi ini sejalan dengan fakta penambahan jumlah penduduk & aktivitasnya, serta pola hidup penduduk yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

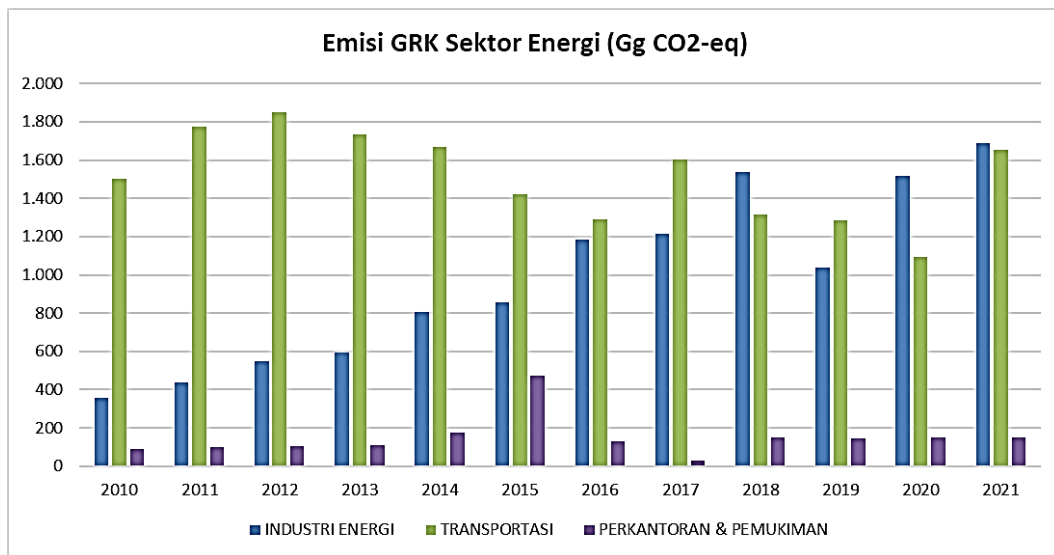


Gambar 2.5. 32 Emisi Sektor Limbah

Sumber: (SignSmart, 2022b), data diolah kembali

Selain emisi dari sektor limbah, sumber GRK pada aktivitas perkotaan juga timbul dari hasil penggunaan energi. Konsumsi energi memang

sebanding dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, akan tetapi di sisi lain menghasilkan emisi yang justru menyebabkan lingkungan (termasuk aspek ekonomi itu sendiri) tidak berkelanjutan. Berikut ini adalah gambar yang menyajikan tren emisi sektor energi di Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan jenis sumbernya. Pada gambar berikut terlihat bahwa penyumbang terbesar emisi sektor energi adalah aktivitas transportasi. Hal ini mendukung adanya fakta bahwa penduduk di Kepulauan Bangka Belitung memiliki kecenderungan yang sangat tinggi untuk menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Selain itu, emisi dari pembangkit listrik juga semakin meningkat karena adanya tuntutan produksi listrik yang semakin besar sesuai dengan konsumsi energi listrik para pelanggan listrik. Kondisi ini semakin memperkuat hasil analisis sebelumnya, bahwa konsumsi energi listrik di Kepulauan Bangka Belitung semakin tinggi, termasuk konsumsi per kapitanya. Hal ini tidak terjadi pada penggunaan energi di permukiman dan perkantoran karena sebagian besar telah beralih ke LPG yang lebih berkelanjutan sebagai bahan bakar dalam rumah tangga.



Gambar 2.5. 33 Emisi Sektor Energi

Sumber: (SignSmart, 2022a)

II.5.5 Responses

Respon yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap permasalahan di perkotaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu respon pada bagian hulu permasalahan, yaitu pada unsur *driving forces*, respon pada unsur *pressures*, respon pada unsur *states*, dan respon langsung pada impacts.

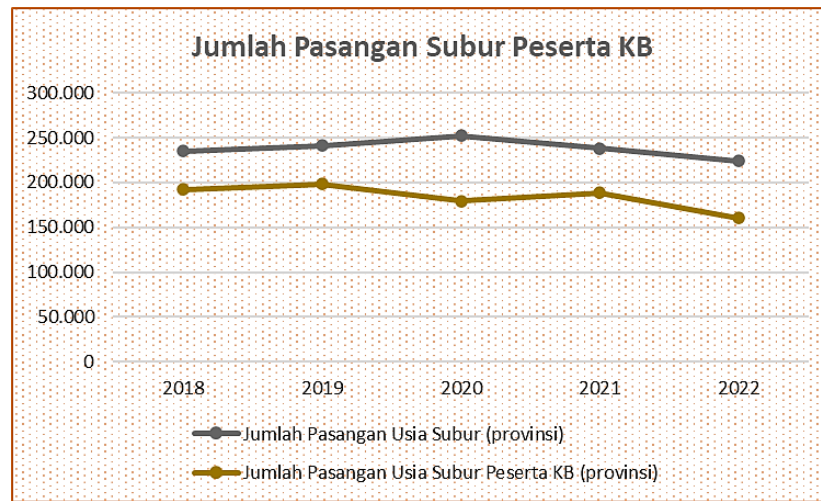
II.5.5.1 Respon pada driving forces

Respon masalah perkotaan pada unsur *driving forces* dapat dilakukan dengan pengendalian jumlah penduduk dan memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok penduduk, serta perencanaan matang yang memastikan kebijakan pembangunan telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Respon pada unsur *driving forces* memang tidak secara langsung terlihat sebagai solusi suatu dampak yang timbul, tetapi cukup efektif sebagai pencegahan masalah dari awal. Berikut ini disajikan beberapa hal yang menjadi respon pemerintah daerah pada unsur *driving forces*.

a. Program Keluarga Berencana (KB)

Pada tahun 2023, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpartisipasi untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 (PPK23), yang berlangsung sejak tanggal 1 hingga 31 Juli 2023. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menduduki peringkat tertinggi nasional dalam progres PPK23 sampai saat ini (Arif, 2023). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah provinsi untuk menyukseskan program KB. Berikut ini tersaji data terakhir jumlah pasangan subur dan jumlah pasangan subur peserta KB. Pada gambar berikut terlihat bahwa jumlah pasangan subur setiap tahun semakin berkurang, akan tetapi yang menjadi peserta KB juga semakin berkurang. Upaya yang lebih besar dari pemerintah untuk sosialisasi dan implementasi

program KB secara lebih masif diperlukan untuk menyukseskan program KB dan mengontrol jumlah penduduk.



Gambar 2.5. 34 Jumlah Pasangan Subur Peserta KB

Sumber: (SDI, 2023), data telah diolah

Di wilayah perkotaan Pangkalpinang, Wali Kota Pangkalpinang menerima penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN pada tahun 2021. Penghargaan tersebut diterima sebagai wujud apresiasi atas prestasi menonjol dan komitmen serta kepemimpinan wali kota dalam upaya menggerakkan program KB. Penghargaan ini juga diterima oleh Bupati Bangka (Hardi, 2021).

b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Dokumen Persetujuan Lingkungan

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan yang mengatur Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, KLHS didefinisikan sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Berbagai materi

KRP di provinsi diwajibkan KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi di dalamnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan KRP lainnya yang berdampak/berisiko pada lingkungan hidup.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyelenggarakan berbagai jenis KLHS sejak diterapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 pada tahun 2017, yaitu KLHS RPJMD 2017-2022 dan perubahannya, KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), KLHS Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Sadai, dan KLHS Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate*. Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan KLHS RPJPD 2025-2045 dan KLHS RTRW 2023-2043 yang merevisi RTRW sebelumnya serta mengintegrasikan tata ruang laut dan darat. Berbagai macam penyelenggaraan KLHS tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah provinsi untuk mengintegrasikan konsep keberlanjutan dalam pembangunan.

Pemerintah provinsi juga melakukan pembinaan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan KLHS, termasuk melakukan proses validasi KLHS yang disusun kabupaten/kota. Pada tahun 2023, pemerintah provinsi sedang menyelenggarakan kegiatan validasi KLHS RPJPD dan RTRW kabupaten/kota. Pembinaan ini juga dilakukan untuk menjalankan fungsi koordinatif pemerintah provinsi pada wilayah administratif di dalam wilayah provinsi.

Penyelenggaraan KLHS adalah salah satu metode untuk mengendalikan dampak lingkungan sejak dari hulu. Berbagai dampak muncul karena adanya kebijakan atau pembangunan dari pemerintah yang kurang terencana dengan baik, terutama terkait aspek lingkungannya. Instrumen KLHS menjadi instrumen pencegahan pencemaran dan

kerusakan lingkungan bersama dengan instrumen lainnya seperti Amdal, UKL-UPL, perizinan, dan tata ruang.

Pada level proyek, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan melalui berbagai jenis dokumen lingkungan yang menjadi syarat persetujuan lingkungan. Sejak tahun 2002, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan pemrosesan dokumen lingkungan untuk berbagai jenis usaha dan/atau kegiatan sebanyak 224 dokumen lingkungan, baik dalam bentuk Amdal, UKL-UPL, DELH, DPLH, maupun adendum berbagai dokumen tersebut. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan dan/atau usaha terencana dengan baik aspek pengelolaan lingkungannya sehingga dampak-dampak negatif dapat diminimalkan dan dampak-dampak positif dapat dimaksimalkan.

c. Revisi RTRW

Pada tahun 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang dalam proses penyusunan RTRW yang direvisi dari RTRW sebelumnya. Proses penyusunan RTRW yang mengintegrasikan tata ruang darat dan laut ini dibarengi dengan proses KLHS. Revisi RTRW dilakukan karena berbagai pertimbangan, yaitu perlunya penyesuaian dengan peraturan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang kemudian pada tahun 2023 ini ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta aturan-aturan turunannya (Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 dan 14 Tahun 2021). Selain itu, integrasi tata ruang darat dan laut serta perubahan nomenklatur alokasi ruang perlu diselesaikan mengacu pada peraturan terbaru, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021).

Selain dasar-dasar regulasi yang mendasari revisi RTRW di atas, revisi RTRW ini menjadi salah satu bentuk respon pemerintah daerah pada berbagai isu pembangunan berkelanjutan. Penataan kembali tata ruang di

darat dan di laut yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui proses KLHS dapat digunakan sebagai instrumen untuk mematangkan perencanaan pembangunan wilayah, bersamaan dengan penyusunan RPJPD dan RPJMD pada tahun selanjutnya. Revisi RTRW ini juga dilakukan di pemerintah kabupaten/kota karena adanya berbagai penyesuaian pola ruang. Penataan kembali tata ruang ini menjadi bentuk upaya untuk menyelesaikan masalah perkotaan dengan mengevaluasi kembali kebijakan, rencana, dan program pembangunan yang telah ada, termasuk tata ruang permukiman dan bangunan infrastruktur lainnya, peruntukan ruang untuk RTH, maupun ruang untuk kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya yang menjadi penyumbang utama PDRB di Kepulauan Bangka Belitung, seperti pertanian, kehutanan, perikanan, perkebunan, pertambangan, serta sektor pariwisata yang potensinya cukup besar di Kepulauan Bangka Belitung. Penataan kembali pola ruang dan struktur ruang ini diharapkan dapat mengendalikan berbagai macam aktivitas ekonomi selanjutnya untuk jangka panjang.

II.5.5.2 Respon pada *pressures*

Berdasarkan pembahasan unsur *pressures* sebelumnya, berbagai aktivitas antropogenik yang menjadi tekanan pada kondisi lingkungan perkotaan adalah aktivitas alih fungsi lahan, pembangunan permukiman, pola konsumsi yang tidak disertai dengan kepedulian lingkungan, penggunaan kendaraan pribadi, dan konsumsi energi yang semakin meningkat. Beberapa respon pada unsur *pressures* yang telah dilakukan pemerintah provinsi, di antaranya sebagai berikut.

a. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Peningkatan kapasitas masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan, hingga perkuliahan/pengajaran. Peningkatan kapasitas masyarakat diharapkan dapat memperbaiki pola pikir dan perilaku masyarakat agar lebih peduli lingkungan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk kegiatan-kegiatan berikut ini:

- a) Fasilitasi perjanjian kerja sama sekolah dan swasta (perusahaan) di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Belitung Timur, dan Kabupaten Bangka dalam persemaian bibit asam menggunakan sampah/bekas wadah plastik dan penanaman di lokasi yang membutuhkan penghijauan (tahun 2018).
- b) Perjanjian kerja sama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PT Sahabat Mewah dan Makmur pada tahun 2019-2020 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup Bagi Sekolah di Kabupaten Belitung Timur, dan tahun 2020 tentang Pendidikan Saka Kalpataru Bagi Siswa-Siswi Pramuka di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ruang lingkup kerja sama mencakup upaya pembinaan dan pendidikan Saka Kalpataru, di antaranya adalah pendidikan Krida 3R (Reduce, Reuse, Recycle), Krida Perubahan Iklim, dan Krida Konservasi Keanekaragaman Hayati bagi siswa-siswi pramuka di Kabupaten Belitung Timur.
- c) Pelatihan pengolahan sampah rumah tangga menjadi pupuk kompos organik dan kompos cair, di kabupaten/kota (tahun 2019).
- d) Sosialisasi dan Pelatihan Bank Sampah (tahun 2019) yang dilaksanakan merata pada tujuh kabupaten/kota. Materi yang disampaikan yaitu cara mendirikan bank sampah, mengaktifkan kembali bank sampah yang pasif, dan cara memilah sampah menjadi sampah bernilai ekonomis.
- e) Gerakan bersih laut dan pantai kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan dalam Pelaksanaan World Cleanup Day (WCD) Tahun 2020.
- f) Penyuluhan/edukasi tentang lingkungan hidup, khususnya tentang sampah kepada sekolah maupun masyarakat yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun (dimulai tahun 2020).

- g) Pembinaan dan pendampingan pada kelompok peduli lingkungan hidup di Desa Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat (tahun 2021). Masyarakat Desa Tanjung, mendapatkan beberapa program CSR dari Unmet PT Timah wilayah Mentok, diantaranya program pembibitan, penanganan sampah (pembuatan kompos) dan peternakan.
- h) Dilaksanakan lomba bank sampah tingkat provinsi pada tahun 2022.
- i) Pembinaan sekolah adiwiyata provinsi menuju adiwiyata nasional. Pembinaan sekolah adiwiyata ini juga dilaksanakan rutin setiap tahun. Pada tahun 2022 ada lima sekolah yang dibina dan mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata nasional yaitu SMPN 1 Kelapa, SMPN 6 Tanjungpandan, SDN 30 Pangkalpinang, SDN 37 Pangkalpinang, dan SDN 23 Tanjungpandan;
- j) Program Gubernur "HIJAU BIRU BABELKU" dengan melaksanakan gerakan bersih pantai di beberapa lokasi pantai dan penanaman di berbagai titik area tanam di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (tahun 2022/2023).
- k) Workshop pengelolaan sampah dan penanaman pohon bersama pramuka (tahun 2022/2023).
- l) Pada tahun 2023 ini melalui Program "GULE KABUNG" (Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Bersama Urang Bangka Belitung), Pj. Gubernur langsung turun ke lapangan untuk mengetahui permasalahan dan komunikasi secara langsung kepada masyarakat, dengan melibatkan berbagai perangkat daerah terkait. DLHK mendapatkan tugas untuk memberikan penyuluhan & edukasi kepada masyarakat di kabupaten/kota, di antaranya materi tentang bank sampah, *eco-brick*, dan *eco-enzym*.
- m) Aksi bersih sampah dalam rangka peringatan hari lingkungan hidup tahun 2023.
- n) Dukungan pada praktisi akademisi yang peduli lingkungan untuk menerapkan ilmu yang dipelajari di masyarakat, seperti dukungan pelaksanaan kuliah umum, dukungan program kemanusiaan (praktik

merdeka belajar kampus merdeka) untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) (tahun 2023).

b. Penghargaan lingkungan hidup

Pada tahun 2022, jenis penghargaan lingkungan yang diberikan oleh pemerintah provinsi ataupun gubernur terdiri atas penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi, Bank Sampah Terbaik, serta Apresiasi Bank Sampah Aktif dan Mandiri. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi diberikan pada 4 sekolah tingkat SD, 8 sekolah tingkat SMP, dan 1 sekolah tingkat SMK yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Adiwiyata adalah salah satu program yang dilakukan pemerintah untuk mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah untuk melestarikan lingkungan. Sekolah Adiwiyata berperan dalam pembentukan sikap dan karakter siswa dan warga sekolah terhadap lingkungan. Hal ini diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari, serta kurikulum hijau yang mengintegrasikan materi lingkungan ke dalam program pembelajaran. Penghargaan Sekolah Adiwiyata ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan memotivasi warga sekolah untuk berperilaku peduli lingkungan. Berikut ini adalah daftar 13 sekolah yang mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi.

Tabel 2.5. 8 Daftar Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi 2022

Nama Sekolah	Pemberi Penghargaan	Tahun
SMK Negeri 1 Tanjung Pandan	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
SMP Negeri 1 Puding Besar	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
SMP Negeri 2 Sijuk	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
SMP Negeri 3 Sijuk	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
SMP Negeri 5 Tanjungpandan	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
SMP Negeri 2 Membalong	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
SMP Negeri 2 Muntok	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
SMP Negeri 5 Muntok	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022

Nama Sekolah	Pemberi Penghargaan	Tahun
SMP Negeri 2 Simpang Teritip	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
SD Negeri 21 Sungailiat	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
SD Negeri 17 Tanjungpandan	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
SD Negeri 30 Tanjungpandan	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
SD Negeri 3 Parittiga	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022

Selain penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi oleh gubernur, ada 5 sekolah yang mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penghargaan Adiwiyata ini menjadi respon pemerintah daerah pada pola perilaku penduduk yang kurang atau tidak peduli pada lingkungan, sehingga diharapkan dapat mengurangi *pressure* (tekanan) pada lingkungan.

Penghargaan lainnya yang diberikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah Bank Sampah Terbaik I, II, III, IV, dan V, serta Apresiasi Bank Sampah Aktif dan Mandiri yang diberikan pada tujuh bank sampah. Penghargaan pada bank sampah ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk mengaktifkan kembali bank sampah dan mengoperasikannya secara konsisten, meningkatkan aktivitas pengelolaan sampah, dan menabung di bank sampah.

Penghargaan lainnya adalah penghargaan Adipura yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Pemerintah Kabupaten Bangka, Bangka Selatan, dan Belitung Timur. Program Adipura dapat dikatakan cukup berhasil untuk menilai pengelolaan sampah di Indonesia per tahun. Berikut ini daftar penerimaan penghargaan Adipura di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.5. 9 Penerimaan Penghargaan Adipura Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kota	Tahun						Jenis Kota
	2015	2016	2017	2018	2019	2022	
Pangkalpinang	-	-	Piagam Adipura	-	-	-	Sedang
Sungailiat, Kab. Bangka	-	-	Adipura	Adipura	Adipura	Adipura	Kecil
Tanjungpandan, Kab. Belitung	-	-	-	-	-	-	Kecil
Toboali, Kab. Bangka Selatan	-	Piagam Adipura	Adipura	Adipura	Adipura	Adipura	Kecil
Muntok, Kab. Bangka Barat	-	-	-	-	Piagam Adipura	-	Kecil
Koba, Kab. Bangka Tengah	Piagam Adipura	-	Adipura	Adipura	Adipura	-	Kecil
Manggar, Kab. Belitung Timur	-	Piagam Adipura	Piagam Adipura	-	Adipura	Piagam Adipura	Kecil

Sumber: DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Dalam empat tahun terakhir yaitu tahun 2017–2022, jumlah kota yang mendapat Piala Adipura semakin bertambah. Tahun 2020 dan 2021 tidak dilaksanakan penilaian Adipura karena kondisi pandemi COVID-19.

Selain itu, ada juga penghargaan PROPER yang diterima oleh 63 perusahaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada awalnya, sebagai salah satu instrumen penataan hukum lingkungan yang bersifat sukarela, PROPER memiliki peran dalam upaya pengendalian dampak lingkungan, terutama dengan pengendalian pencemaran oleh perusahaan, melalui pendekatan secara lunak (sukarela). Seiring berjalannya waktu, keikutsertaan perusahaan dalam PROPER menjadi wajib jika telah ditunjuk. Diharapkan agar PROPER dapat memotivasi perusahaan untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan. Penyelenggaraan PROPER adalah salah satu respon pemerintah pada pola perilaku penduduk, dalam hal ini perusahaan, agar taat pada hukum lingkungan, atau bahkan berperan aktif dalam upaya perlindungan lingkungan, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan energi, ataupun penurunan emisi GRK. Penerapan instrumen PROPER ini tentu akan lebih

efektif jika dipadukan dengan instrumen lainnya, seperti instrumen *command and control* dan instrumen ekonomi lingkungan.

c. Pengawasan

Selain penghargaan lingkungan hidup, pengawasan dan penegakan hukum penting dilakukan untuk mengendalikan perilaku dengan meningkatkan ketaatan pada hukum lingkungan. Pengawasan dan penegakan hukum termasuk ke dalam ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pengawasan pelaksanaan izin/persetujuan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 dilaksanakan pada 99 perusahaan/kegiatan/usaha. Sebanyak 6 perusahaan/kegiatan/usaha tidak operasional, 23 perusahaan/kegiatan/usaha tidak taat dan mendapatkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, sementara sisanya taat.

II.5.5.3 Respon pada *states*

Berdasarkan kondisi lingkungan maupun sosial-ekonomi perkotaan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka dapat diidentifikasi berbagai respon yang dilakukan pemerintah provinsi pada kondisi tersebut. Dalam rangka merespon timbulan sampah yang semakin bertambah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada). Di dalam Jakstrada, target pencapaian pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah disusun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Capaian pengurangan dan penanganan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memang masih jauh dari target Jakstrada,

tetapi ada peningkatan capaian pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.

Tabel 2.5. 10 Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2020-2021

Indikator	Capaian 2020 (%)	Capaian 2021(%)
Pengurangan Sampah	11,11	12,97
Penanganan Sampah	47,99	53,73
Total Pengelolaan Sampah	59,10	66,70

Sumber: SIPSN, 2022

a. Kebijakan dan peraturan daerah

Sebagai bentuk respon pada kondisi timbulan sampah yang tidak terkelola ataupun belum dikelola dengan tepat, pemerintah daerah di wilayah Kepulauan Bangka Belitung merumuskan kebijakan dan peraturan daerah. Berikut ini beberapa kebijakan daerah yang telah dirumuskan dan masih berlaku.

Tabel 2.5. 11 Kebijakan Daerah Menanggapi Timbulan Sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Jenis Kebijakan	Nomor dan Tanggal	Tentang
1.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	Nomor 48 Tahun 2019 Tanggal 22 Juli 2019	Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Surat Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	Nomor 660/0191/DLHK Tanggal 26 April 2023	Gerakan Jumat Bersih dan Babel Menanam
2.	Kabupaten Bangka		
	Peraturan Bupati Bangka	Nomor 43 tahun 2018 Tanggal 13 Agustus 2018	Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Bangka
	Peraturan Bupati Bangka	Nomor 42 tahun 2020	Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai
3.	Kabupaten Belitung		
	Peraturan Bupati Belitung	Nomor 59 Tahun 2022	Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
	Peraturan Bupati Belitung	Nomor 15 tahun 2021 Tanggal 11 Juni 2021	Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

No.	Jenis Kebijakan	Nomor dan Tanggal	Tentang
	Peraturan Bupati Belitung	Nomor 23 Tahun 2019	Tata Cara Penerapan Sanksi Pelanggaran atas Larangan Membuang Sampah Tidak Pada Tempat yang Telah Ditentukan atau Disediakan
	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung	Nomor 11 Tahun 2015 Tanggal 17 Desember 2015	Pengelolaan Sampah
4.	Kabupaten Bangka Tengah		
	Peraturan Bupati Bangka Tengah	Nomor 52 tahun 2018 Tanggal 13 Agustus 2018	Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Bangka Tengah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah	Nomor 4 Tahun 2013 Tanggal 24 Mei 2013	Pengelolaan Sampah
5.	Kabupaten Bangka Barat		
	Peraturan Bupati Bangka Barat	Nomor 99 Tahun 2018 Tanggal 30 Oktober 2018	Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Bangka Barat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat	Nomor 3 tahun 2012 Tanggal 17 April 2012	Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan
6.	Kabupaten Bangka Selatan		
	Peraturan Bupati	Nomor 51 Tahun 2018 Tanggal 12 Oktober 2018	Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bangka Selatan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
7.	Kabupaten Belitung Timur		
	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Nomor 9 Tahun 2020	Retribusi Jasa Umum
	Peraturan Bupati Belitung Timur	Nomor 36 Tahun 2018	Kebijakan dan Strategi Kabupaten Belitung Timur dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Nomor 8 Tahun 2014 Tanggal 20 Oktober 2014	Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan
8.	Kota Pangkalpinang		
	Peraturan WaliKota Pangkalpinang	Nomor 101 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019	Kebijakan dan Strategi Kota Pangkalpinang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
	Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang	Nomor 6 Tahun 2013 Tanggal 28 November 2013	Pengelolaan Sampah

Sumber: JDIH Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dokumen Jakstrada akan menjadi dasar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengevaluasi program Penghargaan Adipura dengan melihat bagaimana komitmen dan keseriusan kota dalam menyusun perencanaan kota dalam pengelolaan sampah. Program Adipura harus dapat menjawab (merespon) Jakstranas, sehingga Program Adipura harus dapat mendorong kota-kota di Indonesia pada tahun 2025 sistem pengelolaan sampahnya 100% (30% pengurangan dan 70% penanganan).

b. Peningkatan kinerja fasilitas pengelolaan sampah

Fasilitas pengelolaan sampah berupa bank sampah, rumah kompos, pusat daur ulang dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika fasilitas pengelolaan sampah tersebut berfungsi secara optimal maka akan mengurangi beban TPA, karena sampah yang masuk ke TPA hanya residu. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kinerja fasilitas pengelolaan sampah, yaitu sebagai berikut:

a) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Bidang Lingkungan Hidup

Salah satu upaya pengurangan sampah yaitu pendauran ulang sampah yang dilakukan di Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R). Sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap pengurangan sampah adalah dengan memberikan dana bantuan keuangan untuk bantuan operasional TPS 3R yang telah terbangun. Pelaksanaan bantuan keuangan pada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola TPS 3R penerima sesuai dengan Keputusan Gubernur Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor: 188.4/64/DLH/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020. Ada sembilan TPS 3R yang

mendapatkan bantuan keuangan masing-masing berupa anggaran sebesar Rp. 100.000.000.

b) Program Bank Sampah

Program bank sampah adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan persampahan. Dasar hukum program bank sampah adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa paradigma pengelolaan sampah harus berubah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan pada sumbernya dan daur ulang sumber daya. Program bank sampah akan lebih bermanfaat jika dipadukan dengan kreatifitas yang memberi nilai ekonomis bagi sampah sehingga menjadi produk daur ulang yang bermanfaat. Ada cukup banyak bank sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bank sampah digolongkan menjadi dua, yaitu bank sampah unit dan bank sampah induk. Bank sampah unit adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi. Bank sampah induk adalah pengumpulan sampah anorganik yg dilakukan oleh masyarakat, yang nasabahnya dari bank sampah unit maupun perorangan dan menghasilkan nilai ekonomi sehingga akhirnya dibawa ke industri daur ulang. Bank sampah diharapkan dapat bersemangat kembali dengan diadakannya pembinaan melalui perlombaan Bank Sampah Terbaik Tingkat Provinsi. Penilaian bank sampah tingkat provinsi dilaksanakan untuk menilai kinerja bank sampah yang tersebar di kabupaten/kota tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 2.5. 35 Sosialisasi Bank Sampah El Ha Ka DLHK Provinsi Kep. Bangka Belitung pada Acara Gule Kabung

Gambar di atas adalah beberapa hasil dokumentasi tahun 2023 yang mengilustrasikan sosialisasi Bank Sampah El Ha Ka yang dikelola DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sosialisasi pada gambar di atas dilakukan saat acara Gule Kabung yang digagas Pj. Gubernur untuk turun langsung ke lapangan dan mendengarkan keluhan kesah masyarakat secara langsung. Selain Bank Sampah El Ha Ka, masih banyak bank sampah lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (data lengkapnya terlampir dalam daftar tabel data). Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 17 bank sampah dari total 45 bank sampah, ternyata tidak aktif. Dalam rangka mengaktifkan kembali bank sampah, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah provinsi adalah memberikan penghargaan pada bank sampah yang aktif dan mandiri.

c. Evaluasi pemantauan sampah laut

Direktorat Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Pesisir Dan Laut (PPKPL) terus memperbanyak lokasi pemantauan tiap tahunnya yang disesuaikan dengan ketersediaan APBN dari tahun 2017-2021. Pemantauan sampah laut tahun 2021 dilaksanakan dalam dua kali periode pemantauan (Periode I: April-Mei, Periode II: Agustus-September) di Pulau Belitung, yang menghasilkan data:

- Berat Sampah Per Jenis Sampah Tahun 2021
- Kepadatan Sampah Per Jenis Sampah Tahun 2021
- Berat Sampah Per Jenis Sampah Tahun 2021
- Kepadatan Sampah Per Jenis Sampah Tahun 2021

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pemantauan tersebut, tren berat sampah menurun dan kepadatan sampah naik. *Top three* sampah berdasarkan berat yaitu plastik, busa plastik, dan kain. Penurunan tersebut dapat terjadi disebabkan karena fenomena pandemi COVID-19. Data yang diperoleh tersebut sangat penting untuk menggambarkan kondisi sampah laut di Kepulauan Bangka Belitung agar dapat dirumuskan strategi penanganannya.

Rekomendasi penanganan sampah laut bagi pemerintah daerah yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu melakukan edukasi/sosialisasi/pelatihan kepada masyarakat tentang sampah laut di berbagai kalangan mulai dari institusi pendidikan, kelompok masyarakat, maupun masyarakat umum di masing-masing daerah; memperbanyak aksi dan kampanye pentingnya pengelolaan sampah dan bahaya sampah laut dengan melakukan aksi bersih pantai. Rekomendasi ini telah dilakukan rutin setiap tahun dengan bantuan tenaga penyuluh lingkungan dan peringatan hari-hari besar lingkungan hidup.

d. Gerakan Jumat Bersih

Gerakan Jumat Bersih yang diinisiasi DLHK bertujuan untuk membersihkan lingkungan kawasan perkantoran pemerintah provinsi setiap

hari Jumat, dilakukan oleh beberapa perangkat daerah terkait. Gerakan ini muncul sebagai bentuk respon pada timbulan sampah yang sering dijumpai di lingkungan perkantoran pemerintah provinsi, sekaligus untuk memberi contoh sebagai masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.

II.5.5.4 Respon pada impacts

Respon yang dilakukan pada kondisi (*states*) di atas cenderung bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah terlihat keadaan atau perubahan lingkungan. Sebagaimana respon pada unsur *states*, respon pada unsur *impacts* juga bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah dampak negatif terjadi dan teramati atau dirasakan masyarakat. Berikut ini beberapa respon pada *impacts* masalah perkotaan.

a) Pengolahan sampah menjadi energi

Sejak tahun 2019, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya pemerintah Kabupaten Bangka Selatan bersinergi dengan PT PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung untuk mengolah sampah melalui program *waste to energy*. Bersama Kelompok Swadaya Masyarakat Sekar Rukun, PT PLN dan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengolah sampah menjadi sumber energi listrik Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang hasilnya disalurkan untuk memenuhi kebutuhan listrik. Hal ini dilaksanakan dengan teknologi peuyemisasi yaitu sampah organik dan anorganik difermentasi menjadi pellet sampah sebagai sumber energi listrik yang diolah menggunakan teknologi gasifier. Kegiatan pengolahan sampah di KSM Sekar Rukun masih berjalan sampai dengan sekarang.

Dalam rangka meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan, sampah di TPA Parit Enam Kota Pangkalpinang dimanfaatkan sebagai Bahan Bakar Jumptan Padat (BBJP) untuk co-firing PLTU Air Anyir, dimulai pada bulan Oktober tahun 2022. BBJP adalah bahan bakar yang berasal dari limbah (sampah) yang telah melalui proses pemilahan dan diolah melalui proses fermentasi menggunakan bakteri yang kemudian dicacah menjadi

ukuran butir kecil sekitar 5 mm yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Manfaat BBJP dapat membantu penanganan potensi sampah di TPA Parit Enam sebesar 47,52 ton per hari atau 17.107,20 ton per tahun.

b) Perencanaan TPA Regional

Sistem penanganan sampah di TPA yang cenderung dioperasikan secara *control landfill*, bahkan secara *open dumping* menyebabkan semakin sempitnya lahan untuk menampung sampah di TPA. Kebutuhan lahan untuk TPA baru, khususnya untuk menangani sampah perkotaan semakin darurat. Pemerintah provinsi telah melakukan kajian lokasi TPA regional yang terus berproses hingga saat ini. Berbagai hasil kajian lokasi telah dilakukan dengan menghasilkan beberapa alternatif lokasi, tetapi terkendala karena adanya penolakan masyarakat sekitar yang khawatir terhadap potensi munculnya dampak dari timbunan sampah di TPA regional tersebut. Dengan demikian, untuk memperlancar proses penentuan wilayah TPA Regional diperlukan upaya pendekatan sosial atau edukasi yang dapat mengubah pola pikir masyarakat. Hal ini memerlukan waktu yang sangat panjang.

Rencana pengelolaan TPA Regional akan dilakukan secara bersama-sama dengan upaya produksi energi, yaitu dengan pelet sampah yang akan menjadi bahan bakar di pembangkit listrik. Selain itu, pengelolaan TPA juga akan dilakukan dengan pendekatan konsep *zero waste* sehingga TPA dapat digunakan dalam jangka panjang secara berkelanjutan, serta terhindar dari kejadian *over-capacity*. Manajemen pengelolaan akan melibatkan BUMDes sehingga menjadi bentuk pemberdayaan & edukasi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat diterapkan dan dapat mengoptimalkan pengelolaan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain kendala tersebut, kendala lain yang muncul juga terkait dengan biaya pengelolaan sampah. Berikut ini tersaji data hasil penelitian tentang rasio biaya pengelolaan sampah dengan PDRB di Kota

Pangkalpinang. Terlihat bahwa biaya total pengelolaan sampah yang diperlukan di Kota Pangkalpinang hampir sebesar PDRB-nya. Hal ini tentu menjadi kendala finansial untuk dapat menerapkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kendala finansial ini harus dapat diatasi dan diintegrasikan berbagai macam alternatif solusinya di dalam perencanaan pengelolaan sampah, khususnya di perkotaan.

Tabel 2.5. 12 Perbandingan Biaya Pengelolaan Sampah dan PDRB

Tahun	Biaya Total Pengelolaan Sampah (milyar/tahun)	PDRB (milyar/tahun)	Rasio Biaya Pengelolaan terhadap PDRB
2015	42,93	41,81	1,0268
2020	55,35	65,52	0,8448

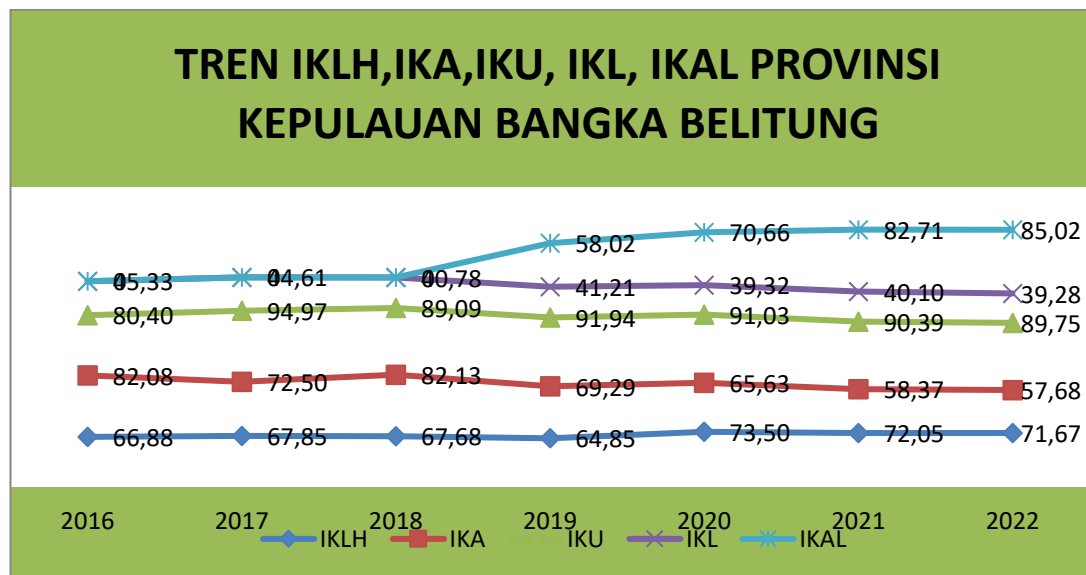
Sumber: (Prajati et al., 2015)

II.6 Tata Kelola

Tata Kelola Lingkungan Hidup (*Environmental Governance*) merupakan suatu interaksi multilevel antara lokal, nasional, internasional/global, namun tidak terbatas pada interaksi tiga aktor utama yaitu *state*, *private*, dan *civil society* yang dilakukan baik secara formal maupun informal dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan untuk merespons tuntutan dan masukan dari masyarakat terkait lingkungan sehingga tercapai pembangunan berkelanjutan (Chazienul Ulum, M., Ngindana, R, 2017). Selaras dengan pernyataan UNEP, 2023 bahwa "*Environmental governance is a key driver for the achievement of sustainable development.*" Pengelolaan Lingkungan hidup yang baik (*Good Environmental Governance*) merupakan suatu konsep yang dapat dijalankan jika seluruh *stakeholders* yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berperan aktif dan partisipatif (Anugrah, F.N, 2021). Prinsip-prinsip seperti inklusivitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas serta keadilan sosial membentuk dasar dari *Good Governance*.

Pengelolaan lingkungan hidup yang baik menjadi urgen sifatnya untuk menopang keseimbangan ekosistem saat ini. Negara – negara di dunia pun sudah menyadari dan mengupayakan perbaikan kondisi lingkungan dengan menggelar konsolidasi tingkat dunia dalam hal perubahan iklim. Melalui pembentukan *Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change* (INC/FCCC) sebagai wadah tunggal proses negosiasi antar pemerintah di bawah naungan Majelis Umum PBB. Semua pihak penandatanganan UNFCCC termasuk Indonesia pun menggelar pertemuan tahunan guna membahas strategi menghadapi perubahan iklim. Pertemuan ini disebut *Conference of the Parties* (COP) atau konferensi pihak-pihak terkait dalam UNFCCC. Pada COP ke-27 di Mesir, Menteri LHK Indonesia, Siti Nurbaya menyatakan bahwa Indonesia dalam NDC akan meningkatkan target menurunkan emisi

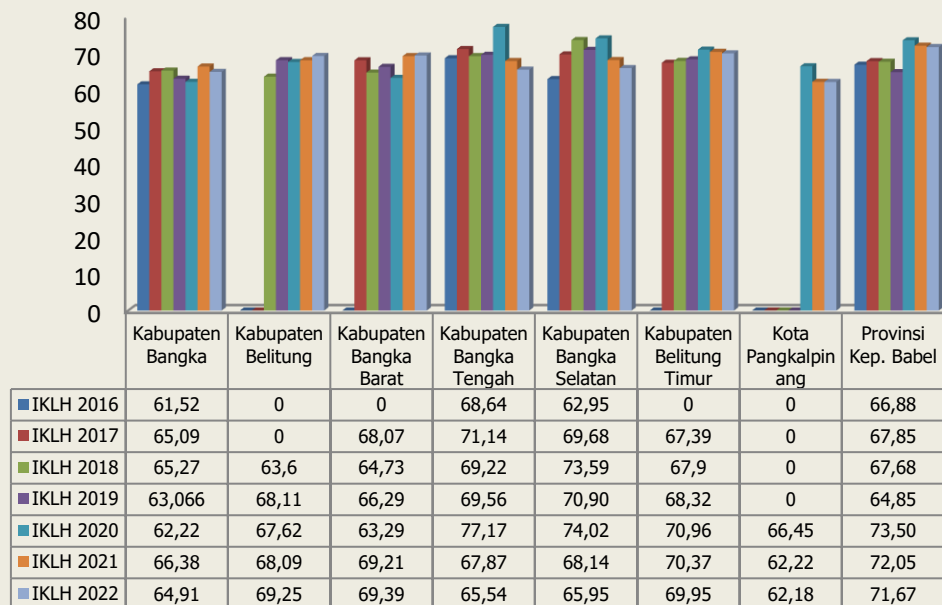
gas rumah kaca sebesar 31,89% dengan upaya sendiri (unconditional), dan sebesar 43,20% jika mendapat dukungan dari internasional (conditional). NDC atau komitmen kontribusi nasional adalah tugas masing-masing negara untuk menahan pemanasan suhu bumi hingga 1,5°C hingga tahun 2030. Kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.



Grafik 2.6. 1 Tren Nilai IKA, IKU, IKL, dan IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2022

Sumber: KLHK, 2022 dan DLHK Babel, 2023, diolah

TREN IKLH DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KABUPATEN/KOTA



Grafik 2.6. 2 Tren Nilai IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2022

Sumber: KLHK, 2022 dan DLHK Babel, 2023, diolah

Tabel 2.6. 1 Kriteria Nilai IKLH

No	Predikat	Nilai IKLH
1.	Sangat Baik	IKLH > 80
2.	Baik	70 < IKLH ≤ 80
3.	Cukup Baik	60 < IKLH ≤ 70
4.	Kurang Baik	50 < IKLH ≤ 60
5.	Sangat Kurang Baik	40 < IKLH ≤ 50
6.	Waspada	IKLH ≤ 40

Sumber: KLHK, 2023

Jika dilihat pencapaian nilai IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022, nilai IKLH berada dibawah target yang telah ditetapkan, namun masih berada pada predikat baik. Untuk nilai Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara (IKU) masih dalam predikat baik dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dalam kondisi baik, namun untuk indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) walaupun terdapat kenaikan indeks dari kondisi eksisting IKTL tahun 2020, nilai IKTL tersebut masih dalam kriteria sangat kurang baik jika

dilihat dengan standar Kriteria IKTL pada IKLH. Sehingga upaya-upaya peningkatan nilai IKLH selain mempertahankan kondisi pencapaian IKA dan IKU yang sudah dalam kriteria baik perlu meningkatkan Indeks Tutupan Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Salah satu dari enam misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pernyataan misi ini mengandung makna bahwa tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu berada dalam koridor target pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup yang baik dan terjaga. Maknanya adalah kondisi minimal yang perlu dicapai yaitu kualitas dan kualitas lingkungan hidup berada pada kondisi stabil dan optimum dalam mendukung perikehidupan masyarakat. Indeks kualitas lingkungan hidup dalam jangka panjang dapat berarti menjaga kualitas dan ketersediaan air, udara maupun tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi lingkungan hidup dikatakan layak apabila kualitas air di Perkotaan khususnya area permukiman penduduk tidak melebihi ambang batas baku pencemaran; kawasan ruang terbuka hijau perkotaan dapat dipertahankan dan ditingkatkan luasannya; perbaikan sistem tata kelola transportasi seperti pengaturan volume kendaraan di perkotaan dan sistem tata kelola kegiatan ekonomi utama seperti industri, jasa dan perdagangan baik di bidang pariwisata maupun non-pariwisata untuk menghindari terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah serta kawasan rentan dan bernilai penting tetap terjaga serta berkurangnya kejadian bencana alam, penyakit, dan bencana lain yang disebabkan oleh rusaknya kondisi lingkungan. Penjagaan kualitas air dan udara menjadi bagian terpenting dari target IKLH jangka panjang karena sangat berpengaruh terhadap seluruh kondisi ekosistem di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2022 ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meraih penghargaan Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Pejabat Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin. Penghargaan Nirwasita Tantra adalah penghargaan dari pemerintah yang diberikan kepada Kepala Daerah atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan dan/atau program kerja sesuai dengan prinsip metodelogi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya. Green Leadership Nirwasita Tantra merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah kepada Pimpinan Daerah baik eksekutif maupun legislatif yang berhasil merumuskan dan menerapkan kebijakan dan program kerja sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan menuju green economy

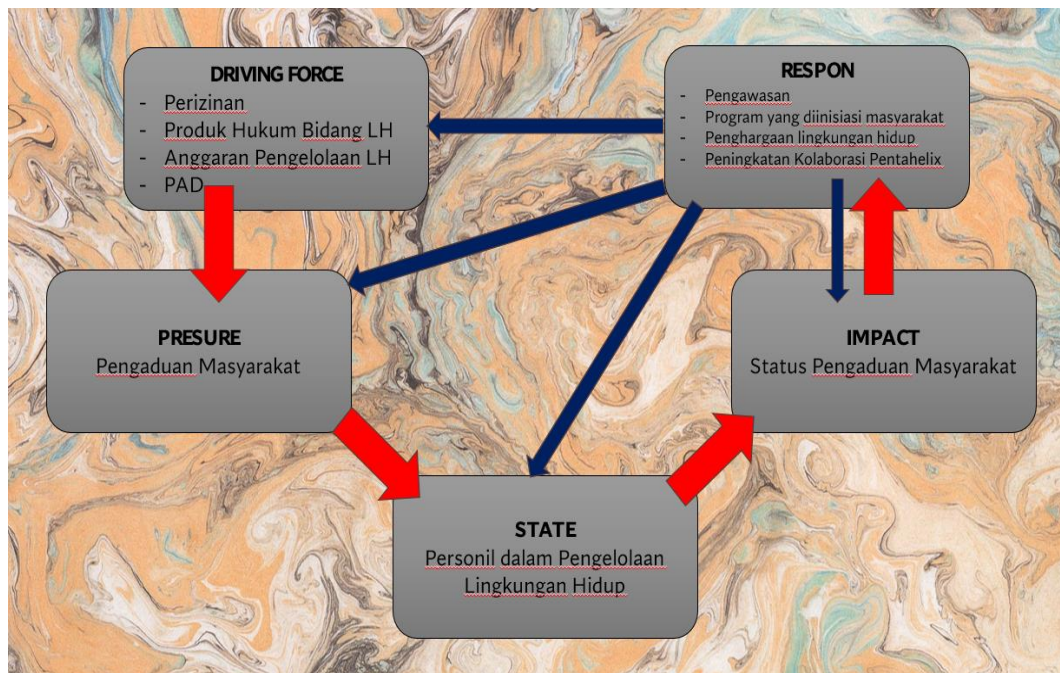


Gambar 2.6. 1 Pejabat Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin (tengah) saat menerima penghargaan Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Sumber: ANTARA/HO-Diskominfo Babel

Melalui penghargaan ini, Pj Gubernur Ridwan berharap semua elemen bersinergi mulai dari kepala daerah di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota untuk menerapkan prinsip *Green Leadership* dalam rangka mewujudkan kebijakan dan program daerah yang holistik. Sehingga, semua kebijakan maupun program pemerintah akan lebih terintegrasi dalam

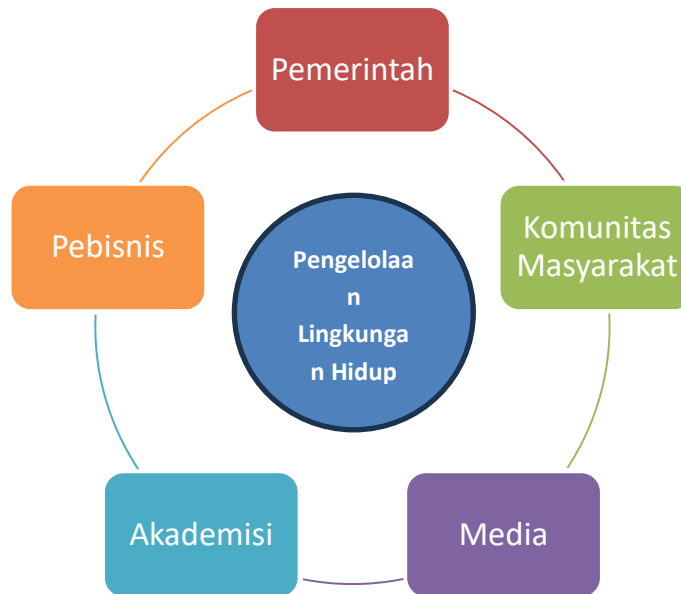
mencapai percepatan perbaikan kualitas lingkungan hidup. Selain Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menerima Penghargaan Nirwasita Tantra kategori Kabupaten Kecil Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Barat sedangkan katagori Kota sedang Pangkalpinang, serta DPRD Kabupaten Bangka Tengah dan DPRD Kota Pangkalpinang yang juga meraih Penghargaan Nirwasita Tantra.



Gambar 2.6. 2 Kerangka DPSIR Tata Kelola

Tata Kelola lingkungan menjadi isu penting karena pengelolaan lingkungan menekankan keterkaitan antar berbagai aktor. Pengelolaan lingkungan tidak bisa dieksekusi secara parsial namun menuntut adanya pengelolaan secara komprehensif dan berkelanjutan. Permasalahan lingkungan yang timbul disuatu daerah bukan tidak mungkin membutuhkan bantuan, komitmen atau upaya *stakeholder* dari daerah lain yang merupakan hulu atau hilir dari permasalahan lingkungan. Kesamaan persepsi kesamaan tujuan dari *stakeholder* atau aktor penting untuk pencapaian pemecahan masalah lingkungan. Hubungan dan komitmen antar Gubernur dan Bupati/Walikota harus selaras dan sinergi dalam

menyusun kebijakan, pengelolaan anggaran, pembagian kewenangan dan tugas. Pemerintah dengan regulasi dan kewenangannya juga tidak mampu dalam menyelesaikan isu – isu lingkungan dengan upaya sendiri. Dibutuhkan kolaborasi bersama masyarakat, dunia usaha, akademisi serta media publikasi.



Gambar 2.6. 3 Model Kolaborasi Pentahelix dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mengacu pada penelitian Nurulwahida, 2020, pemerintah sebagai regulator dan mempunyai fungsi *controler* memiliki peraturan dan melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, promosi, alokasi keuangan, perizinan, program, kebijakan publik, fasilitator kemitraan antara publik dan swasta. Sedangkan pebisnis/dunia usaha berperan sebagai *enabler*, dengan memberikan dukungan atau sumbangsih anggaran, perancangan teknologi, infrasturktur yang memberi nilai tambah dalam sebuah program pemerintah. Akademisi dibutuhkan sebagai pengembangan dan inovasi untuk percepatan pencapaian dan efisiensi program. Media dianggap sebagai stakeholder yang sangat berpengaruh dalam membuat *brand* atau *image* sebuah program pemerintah terutama terhadap masyarakat sebagai bahan pertimbangan masyarakat sebagai

subjek dan objek dari pembangunan. Partisipasi dan inisiatif dari masyarakat menjadi poin yang menentukan dalam eksekusi program – program pemerintah. Sosial dan budaya setiap daerah juga mempengaruhi pola pikir dan karakteristik dari masyarakat dalam menerima setiap informasi dan program pembangunan daerah. Sebuah komunitas biasanya sengaja dibentuk atau terbentuk dengan inisiatif sendiri dengan tujuan menjadi jembatan atau perantara antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengembangan sebuah program.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meluncurkan sebuah program **GULE KABUNG** (*Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Bersama Urang Bangka dan Belitung*) yang mengimplementasikan kolaborasi terutama kolaborasi antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan sasaran adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Didalam pelaksanaan kegiatannya pemerintah menggandeng UMKM, Media, masyarakat, kelompok masyarakat peduli lingkungan dan mendapat support dari pihak ketiga dalam hal ini pihak perbankan dan perusahaan. Bentuk kegiatan berupa koordinasi antar pemangku kepentingan dengan membahas permasalahan dan kendala pembangunan di daerah kabupaten/kota dan sinergisitas dengan program yang ada di pemerintah provinsi kemudian dilanjutkan dengan pembukaan stand pelayanan public diantaranya, pelayanan KB, pembuatan KTP elektronik, pemeriksaan Kesehatan, bazar UMKM, sosialisasi Bank Sampah dan penanaman pohon. Lokasi kegiatan bergiliran dari desa ke desa di Kabupaten/Kota.



Gambar 2.6.4. Kegiatan Pelayanan Publik pada acara Gule Kabung, 2023
Sumber: DLHK, 2023

II.6.1 Driving Force

II.6.1.1 Perizinan

Salah satu indikator terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang (*good governance*) adalah terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas khususnya pada pelayanan perizinan. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja maka penyelesaian hambatan perizinan berusaha harus ditindaklanjuti secara sistematis. Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 11 Tahun 2021 tentang satuan tugas percepatan investasi yang disebut satgas investasi dimana salah satu tugasnya yaitu menyelesaikan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) untuk sektor-sektor usaha yang terkendala perizinan berusaha dalam rangka investasi. Menteri KLHK menegaskan dalam siaran pers tanggal 7 desember tahun 2020 bahwa persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. Integrasi persetujuan lingkungan ke dalam perizinan berusaha merupakan solusi untuk menyederhanakan regulasi perizinan yang selama ini dinilai relatif rumit.

Penyederhanaan ini dilakukan agar kemanfaatannya lebih cepat tanpa mengurangi ketegasan dalam menjalankan pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial yang seimbang dan berkelanjutan.

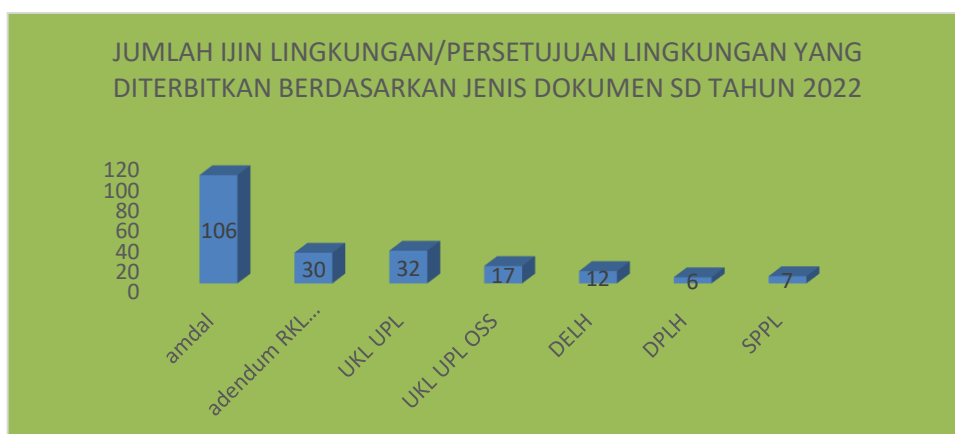
Sampai dengan tahun 2022, Persetujuan Lingkungan sebelumnya dikenal dengan Izin Lingkungan sebagai dasar pengelolaan lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2002 s.d. 2022 sebanyak 227 Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan.

A. Ijin Lingkungan/Persetujuan lingkungan



Grafik 2.6. 3 Jumlah Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan Tahun 2016 sd tahun 2022

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023



Grafik 2.6. 4 Jumlah Perizinan Lingkungan yang telah diterbitkan sampai dengan tahun 2022 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Dokumen Lingkungan berupa AMDAL, UKL – UPL, SPPL merupakan salah satu instrument tata Kelola lingkungan hidup dalam hal pencegahan dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan. Namun dari berbagai permasalahan lingkungan yang ada seperti halnya dokumen lingkungan baru berfungsi sebagai instrument perizinan yang menjadi syarat untuk mendapatkan perizinan berusaha. Jika pola pikir para pemrakarsa masih demikian maka tidak heran jika banyak terjadi pencemaran sebagai dampak dari ketidaktaatan perusahaan dalam upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen lingkungan.

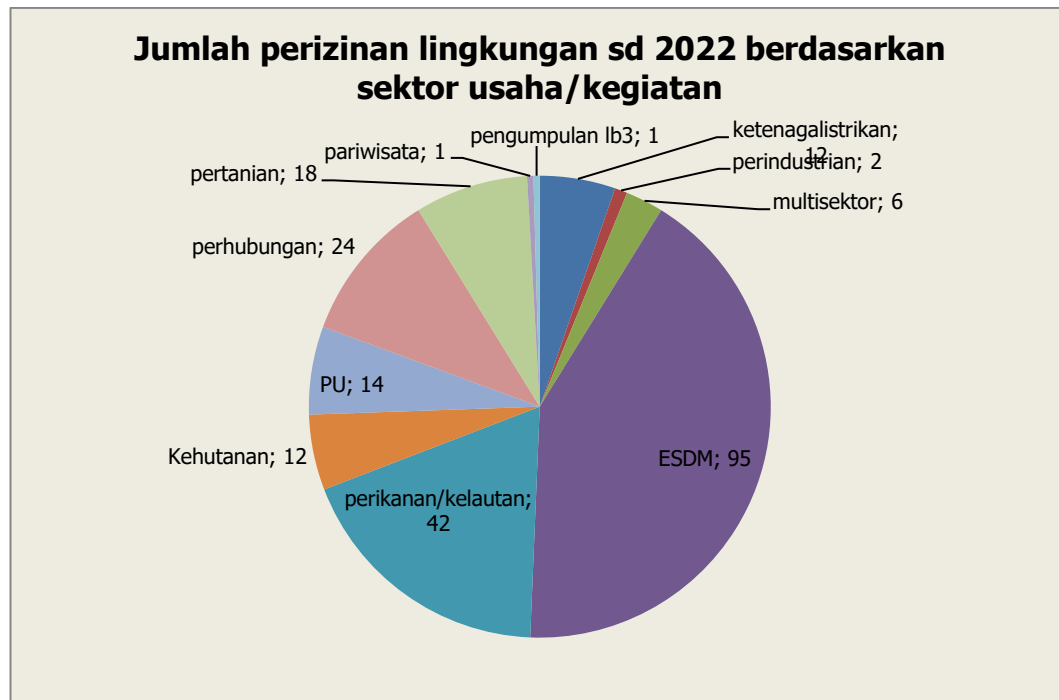
Terbitnya Undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang disahkan dan diundangkan tanggal 2 November 2020 merubah peraturan perundangan teknis yang mengatur tentang perizinan lingkungan yang saat ini disebut persetujuan lingkungan. Dengan disahkannya undang-undang cipta kerja maka terdapat penyesuaian terkait teknis pelaksanaan terhadap hal-hal yang diatur di dalamnya sehingga ditetapkan peraturan-peraturan pelaksana teknis terkait dengan persetujuan lingkungan sebagai berikut:

Tabel 2.6. 2 Peraturan Perundangan Turunan UU 11 Tahun 2021

No	Nomor Peraturan	Tentang	Tanggal ditetapkan
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2 Februari 2022
2.	Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 5 tahun 2021	Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko	2 Februari 2021
3.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021	Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 April 2021
4.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki	1 April 2021

No	Nomor Peraturan	Tentang	Tanggal ditetapkan
	Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	
5.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021	Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan	1 April 2021
6.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021	Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	1 April 2021
7.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021	Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam	19 Mei 2021

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang beresiko bagi manusia dan lingkungan hidup memerlukan pengelolaan yang wajib dilakukan dengan pendekatan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Setelah berlakunya UU Cipta kerja maka izin pengelolaan limbah yang sebelumnya wajib terlebih dahulu mendapatkan izin PPLH sebagai syarat mendapatkan izin lingkungan, saat ini berubah menjadi persetujuan teknis. Namun untuk usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan LB3 dan melakukan penyimpanan sementara sebelum dilakukan pengangkutan oleh pihak ketiga yang berizin pengolahan atau pengumpulan LB3 diwajibkan untuk terlebih dahulu menyusun rincian teknis yang terintegrasi dengan dokumen lingkungan.



Grafik 2.6. 5 Jumlah Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan berdasarkan sector usaha sd tahun 2022
Sumber: data DLHK, 2023

Dilihat dari 227 izin lingkungan yang telah diterbitkan, data menunjukan sektor ESDM memang masih menjadi tumpuan perekonomian di Bangka Belitung khususnya pada kegiatan pertambangan. Adapun sektor perikanan dan kelautan yang mana didominasi oleh kegiatan budidaya udang vaname mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sejak tahun 2019 sampai 2022 terdapat 42 kegiatan budidaya udang vaname yang memperoleh izin. Selain itu di sektor perhubungan juga cukup besar proporsinya setelah sektor ESDM dan perikanan kelautan. Menyesuaikan dengan kondisi alam Kepulauan bangka Belitung yang merupakan daerah kepulauan, dibutuhkan kelancaran sirkulasi pertukaran barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lainnya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, kebutuhan bahan bakar minyak, keluar masuk komoditi dan lain-lain sehingga membutuhkan sarana prasarana penunjang berupa Pelabuhan, dermaga dan jetty. Selain itu untuk mendukung kemajuan sektor pariwisata, dilakukan peningkatan jalan di beberapa ruas jalan di Kepulauan

bangka Belitung. Sebanyak 14 usaha dan/atau kegiatan sektor pekerjaan umum diterbitkan izin lingkungannya, sedangkan untuk izin Pengumpulan LB3 yang memiliki izin lingkungan hanya satu.

Usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin sudah semestinya menaati ketentuan yang tertera didalam dokumen lingkungan. Upaya pengelolaan dan penantauan lingkungan harus dilaksanakan secara rutin sebagai upaya pencegahan pencemaran dan konflik sosial. Masyarakat sebagai penerima dampak memiliki peran sebagai control dari jalannya usaha dan/atau kegiatan, sehingga jika terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh sebuah usaha dan/atau kegiatan masyarakat dapat melakukan pengaduan ke pos pengaduan di Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.

B. Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (IUPJLWA)

Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung yang selanjutnya disebut IUPJLWA adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan wisata alam pada hutan lindung berupa Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJLWA-PJWA) dan Penyedia Sarana Wisata Alam (IUPJLWA-PSWA). Berikut ini adalah IUPJLWA yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik yang ditetapkan oleh Bupati dan juga Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dimana sebagian besar adalah ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam di lokasi pantai. Luas keseluruhan IUPJLWA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 269,86 Ha.

Tabel 2.6. 3 Daftar IUPJLWA Yang Sudah Mempunyai Izin Sampai Dengan Tahun 2022

No.	Jenis IUPJLWA			SK
	Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	
1	PDAM Tirta Bangka	9	-	Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/205/Hutbun/2010 Tanggal 11 Januari 2010
2	Yayasan Alam Bukit Betung	-	30	Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/958/Dishut/2016 Tanggal 19 Oktober 2016
3	CV. Panorama Lintas Timur	-	18,16	Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1122/Dishut Tanggal 31 Desember 2018
4	PT. Pantai Indah Rebo	-	69,38	Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/694.a/Dishut/2019 Tanggal 17 Juli 2019
5	PT. Wattana Segar Alam	-	3,2	Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1094.k /Dishut/2019 Tanggal 30 Desember 2019
6	PT. Tunas Propindo Lestari	-	25,72	Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1046.a/Dishut/2019 Tanggal 13 Desember 2019
7	PT. Timah Tbk	-	72	Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/499/Dishut/2020 Tanggal 28 Juli 2020
8	CV. Pesona Alam Asri	-	16,32	Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/703/Dishut/2020 Tanggal 17 September 2020

No.	Jenis IUPJLWA			SK
	Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	
9	CV. Mulia Asri Sukhitata	-	26,08	Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/702/Dishut/2020 Tanggal 17 September 2020

C. Izin LB3

Tidak ada perubahan terhadap jumlah daftar perusahaan yang mempunyai izin penyimpanan dan pengumpulan LB3 dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Dengan terbitnya UUCK menurunkan beberapa peraturan teknis terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup diantaranya Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. Dimana untuk Pengolahan Limbah Cair, Pengolahan Emisi, dan Limbah B3 sudah terintegrasi didalam proses penyusunan dokumen lingkungan dan bukan merupakan perizinan tersendiri. Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ditetapkan dalam rangka mengintegrasikan persetujuan teknis dan/atau surat kelayakan operasional pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ke dalam persetujuan lingkungan. Dari 17 perusahaan yang memiliki izin terkait pengelolaan LB3, 15 perusahaan diantaranya memiliki jenis izin penyimpanan dan 2 perusahaan memiliki izin pengumpulan LB3.

Tabel 2.6. 4 Daftar Perusahaan Yang Mempunyai Izin Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah B3

No	Nama Perusahaan	Jenis Izin
1	PT. Tata Hamparan Eka Persada	Penyimpanan Sementara
2	PT. Forestalestari Dwikarya (Tanjung Kembiri Mill)	Penyimpanan Sementara
3	PT. Timah, Tbk UPDB-Bidang Pengawasan Tambang dan Pengangkutan Bangka Barat	Penyimpanan Sementara
4	PT. Astika Murni Utama	Penyimpanan Sementara
5	PT. Menara Cipta Mulia	Penyimpanan Sementara
6	PT. Refined Bangka Tin	Penyimpanan Sementara
7	PT. Timah Tbk - Unit Metalurgi	Penyimpanan Sementara
8	PT. Belitung Energy	Penyimpanan Sementara
9	PT. Timah Tbk - UPDB Pengawasan Produksi dan Pengangkutan Bangka	Penyimpanan Sementara
10	PT. Steelindo Wahana Perkasa	Penyimpanan Sementara
11	PT. Sawindo Kencana	Penyimpanan Sementara
12	PT. Belitung Industri Sejahtera	Penyimpanan Sementara
13	PT. Bumi Permai Lestari - PKS Bukit Perak	Penyimpanan Sementara
14	PT. Gemilang Cahaya Mentari	Penyimpanan Sementara
15	PT. Bumi Sawit Sukses Pratama - Palm Oil Mill	Penyimpanan Sementara
16	PT. Valten Cahaya Anugrah	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3
17	PT. Sarana Telaga Mandiri Utama	Izin pengumpulan LB3

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

II.6.1.2 Produk hukum bidang pengelolaan lingkungan hidup

Secara konstitusional tujuan kebijakan hukum pengelolaan lingkungan terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUDNRI 1945. Dalam ayat (3) ditegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan dalam ayat (4) ditegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Apalagi dalam Pasal 28H ditegaskan, bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

merupakan bagian dari hak asasi manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum yang tidak pro-lingkungan dan mengakibatkan rusaknya lingkungan adalah pelanggaran hak asasi manusia.

Akib (2009) berpendapat pembagian wewenang daerah dalam pengelolaan lingkungan belum dilandaskan pada politik hukum lingkungan yang berlandaskan keberlanjutan, karena lebih difokuskan pada aspek pengendalian dampak lingkungan dan hanya sebagian kecil tentang konservasi. Kelembagaan lingkungan daerah selain nomenklaturanya sangat beragam, juga tidak kuat karena hanya berstatus sebagai lembaga teknis yang tidak memiliki wewenang pengawasan dan penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut, disarankan. Perlu dilakukan reorientasi kebijakan hukum otonomi daerah dan lingkungan hidup yang memadukan aspek demokratisasi dan keberlanjutan ekosistem yang disertai tata kelola pemerintahan yang baik, dan Pembagian wewenang pengelolaan lingkungan seharusnya tidak difokuskan pada aspek pengendalian dampak, tetapi selaras dengan UU No. 32 Tahun 2009 yang meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dengan adanya dukungan regulasi diharapkan upaya pengelolaan lingkungan hidup semakin optimal. Meskipun tidak jarang ditemukan banyak kendala dalam penerapan regulasi tersebut.

Tabel 2.6. 5 Produk Hukum Bidang Lingkungan Hidup

Jenis Produk Hukum Bidang Lingkungan Hidup	Nomor dan Tanggal	Tentang
Peraturan Daerah	No. 3 Tahun 2020	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040
Peraturan Daerah	No. 10 Tahun 2020	Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

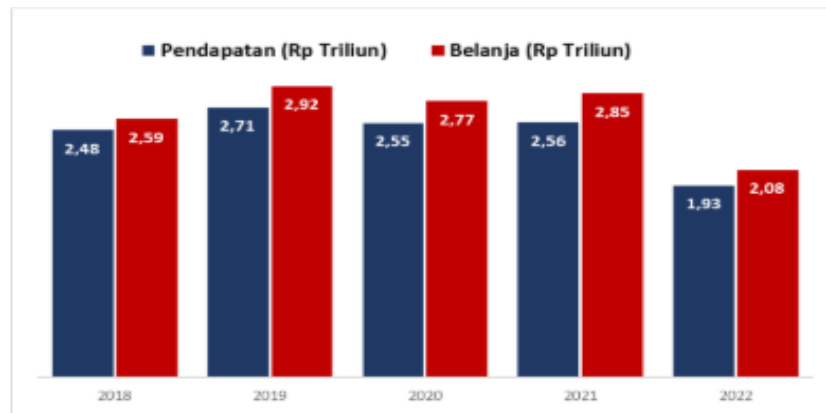
Jenis Produk Hukum Bidang Lingkungan Hidup	Nomor dan Tanggal	Tentang
Peraturan Daerah	No. 5 Tahun 2021	Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan Taman Bumi (Geopark)
Peraturan Gubernur	No. 32 Tahun 2020	Pedoman Pengendalian Pencemaran Air Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Budidaya Tambak Udang
Peraturan Gubernur	No. 33 Tahun 2020	Pendanaan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Kewenangan Provinsi Yang Dibebankan Kepada Pemrakarsa/Pelaku Usaha
Peraturan Gubernur	No. 37 tahun 2020	Pedoman Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Peraturan Gubernur	No. 52 Tahun 2020	Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022
Peraturan Gubernur	No. 48 Tahun 2020	Pedoman Umum Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Masa Pandemicorona Virus Disease 2019 (Covid-19) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020

Sumber: JDIH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

II.6.1.3 Anggaran pengelolaan lingkungan

Ulfa, Farida (2008) menyimpulkan dalam berdasarkan penelitiannya bahwa anggaran tahunan pemerintah yang biasa disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mempunyai peran yang penting dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan didaerah karena didalam APBD terdapat item pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan yang menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan. Sehingga dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan,

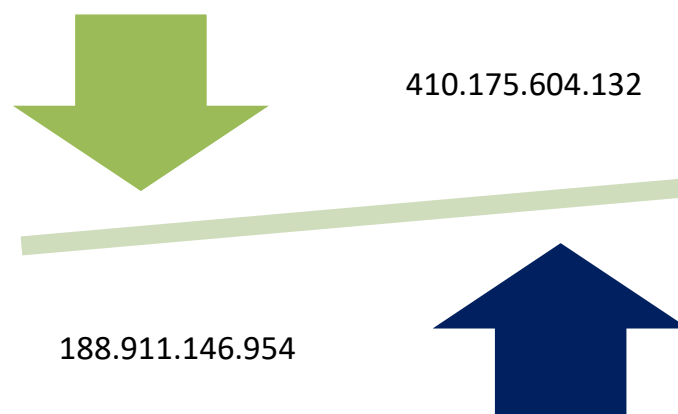
pemerintah harus mengacu pada APBD tersebut agar pembangunan sesuai dengan kemampuan daerah dan aspirasi masyarakat.



Grafik 2.6. 6 Perkembangan Pagu Anggaran APBD 2018-2022

Sumber: Lampiran perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Bank Indonesia, 2022

Berdasarkan laporan perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tahun 2022, bahwa pagu anggaran pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan sebesar 24,61%. Sedangkan anggaran pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2021 yaitu Rp. 188.911.146.954 pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp.410.175.604.132 pada tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut ini.



Grafik 2.6. 7 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2022.

Sumber: Bakuda, 2022, data olahan SIPD, 2022

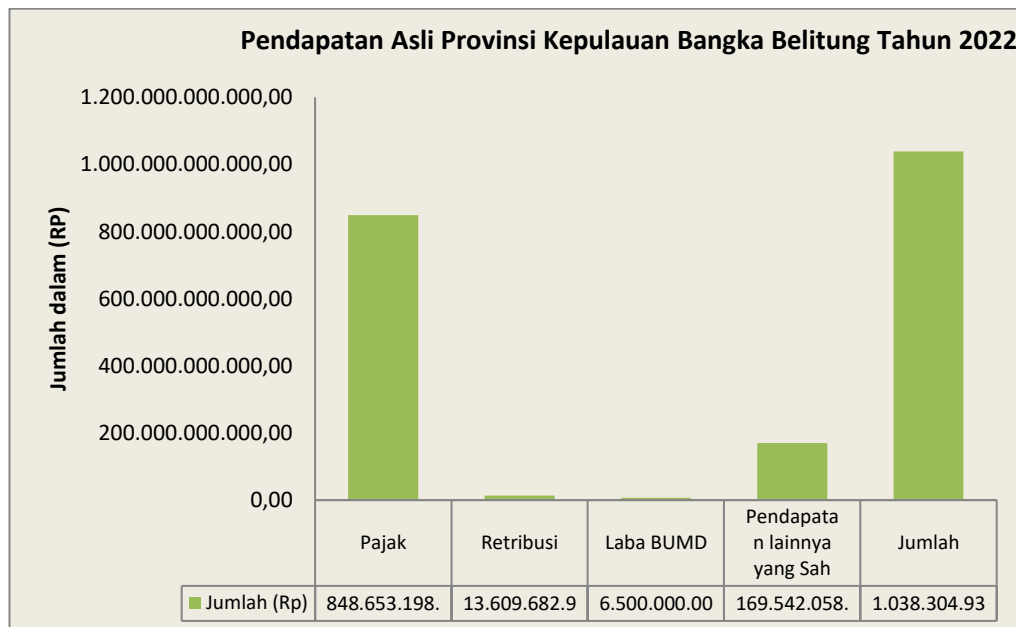
II.6.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Tata kelola publik yang baik mutlak harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah (provinsi). Peningkatan dalam mekanisme tata kelola publik dapat memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian Puspitasari, 2020 menunjukkan bahwa tata kelola publik dan pendapatan asli daerah mempengaruhi secara positif kinerja pemerintah daerah. Sebaliknya, total aset tidak mempengaruhi secara positif kinerja pemerintah daerah. Mengaskan posisi PAD bahwa peningkatan pendapatan asli daerah akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah (provinsi).

Tabel 2.6. 6 Pendapatan Asli Daerah

No.	Sumber	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Pajak	848.653.198.396,00
2	Retribusi	13.609.682.900,00
3	Laba BUMD	6.500.000.000,00
4	Pendapatan lainnya yang Sah	169.542.058.250,00
5	Jumlah	1.038.304.939.546,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023



Grafik 2.6. 8 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

II.6.2 Pressure

II.6.2.1 Pengaduan Masyarakat

Cita cita bangsa dan negara dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan aspirasi masyarakat adalah salah satu prasyarat wajib yang harus diwujudkan. Tata pemerintahan yang baik mengatur proses interaksi sosial antara kedua belah pihak yang mana pada akhirnya dapat mengakomodir kepentingan pemerintah dan masyarakat secara adil dan berimbang sesuai dengan salah satu prinsip *good governance* yaitu berkeadilan (*equity*). Ketidakadilan yang terjadi atau dirasakan oleh masyarakat akan memicu konflik sosial dan lingkungan. Sudah semestinya pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun masalah yang dilihat atau dirasakan oleh mereka dengan membuka pos pengaduan masyarakat dalam hal permasalahan lingkungan.

Tabel 2.6. 7 Daftar Aduan Masyarakat Terkait Masalah Lingkungan

No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan
(1)	(2)	(3)
1	Bupati Belitung Timur	Pertambangan di kawasan mangrove di lokasi IUP Timah kecamatan Burung mandi Belitung Timur
2	Media	Pencemaran udara akibat cerobong boiler PT. Mutiara Agro lestrari (MAL) Kabupaten Bangka Tengah
3	Media	Dugaan Pencemaran Tambak Udang oleh CV Gunung Prima di Bangka Tengah
4	HTI IKK (Istana kawi Kencana)	Tambak udang atas nama Koperasi Produsen Nuansa Berkat Cemerlang Lokasi tambak udang overlap dengan HTI IKK
5	Kepala Desa Simpang Yul Fathurrohman	Dugaan pencemaran Limbah sawit PT. Payung Mitra Jaya Mandiri Maras Senang yang merusak Ekosistem Sungai di desa Simpang Yul
6	HTI APS (Agro pratama Sejahtera) Penagan	Perambahan Hutan produksi (HP) Sungai Sembulan oleh perambah
7	HKM Gempita Kurau	Pembuangan Limbah Tambak Udang di duga mencemari kawasan hutan bakau dan belum memiliki izin pinjam pakai
8	Organisasi Masyarakat Pemuda Bangka Belitung Bersatu	Laporan adanya dumping (pembuangan) Limbah Tambak Udang di Laut rambak Sungailiat Kabupaten Bangka diduga milik Bpk Amen

No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan
(1)	(2)	(3)
9	Nelayan Desa pangkal Niur: Adan, Rusatam (Ketua POKMAS TKL), Arafik, Armin	Laporan penambangan timah ilegal dan Perusakan lingkungan di lokasi pantai tanjung sunor (pencemaran air laut, rusaknya sempadan pantai, kerusakan terumbu karang dan mangrove
10	PT. Agro Pratama Sejahtera Desa Terong Kabupaten Belitung	Aktifitas perambahan pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat di desa terong Kecamatan Sijuk Diduga dilakukan atas nama Adi menggunakan alat mekanik PC
11	Pemdes Desa Tanjung Pura Kecamatan Sungai Selan Kab. Bangka Tengah	Jual Beli Kawasan Hutan Produksi di Register 22 Sungai Sembulan di Desa Tanjung Pura
12	PT. Agro Pratama Sejahtera Desa Air Seru Kabupaten Belitung	Aktifitas perambahan pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat di desa Air Seru Kecamatan Sijuk Diduga dilakukan atas nama Fery menggunakan alat mekanik PC mekanik PC
13	Serikat Pemerhati Lingkungan Hidup Nusantara	Nomor Surat 0134/SPLH NUSANTARA/UI/2022 Tindak Lanjut pertanggungjawaban HUKUM Terhadap Pelanggaran Koorporasi dan pertambangan tTimah secara Ilegal di daerah Dusun III kelurahan penagan kec. Mendo barat
14	Kantor Hukum Forum Pemuda Kalimantan barat	001/Dumas-LBH F-PKB?VII/2022 Perbuatan Melawan Hukum oleh Oknum bernama Achen atas tindakan illegal mining yang terjadi
15	PT. Bangun Rimba Sejahtera	Respon pemberitaan media online (citizen journal, lensa Digital &Global Investigasi News) tentang kegiatan Penambangan Timah illegl di desa teluk Limau parittiga Bangka barat
16	PT. Bangun Rimba Sejahtera	Respon Pemberitaan Media Online lensa Digital tentang Kegiatan Penanaman Sawit di Kawasan Hutan Sdr. Asiong warga dusun jebu Darat Desa Kelabat
17	HKM Matras Alami Sejahtera	Adanya dugaan Penambangan dalam kawasan HKM Matras Alami Sejahtera termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Sungailiat Mapur
18	PT. Bangun Rimba Sejahtera	Respon pemberitaan Media Lokal terkait larangan plang JBA
19	UPTD KPHP Rambat Menduyung	Aktivitas Tambak udang Vaname dengan system bioflok di kawasan Hutan Lindung tanjung Ular
20	Organisasi Masyarakat Pemuda Bangka Belitung ersatu	Penambangan pasir di desa jeruk milik unyil
21	PT. Bangun Rimba Sejahtera//No:064/SSD-BRS/XII-2022	Respon pemberitaan media Suara Melayu & babel news Update, terkait tambang Ilegal di Desa Cupat Bangka Barat

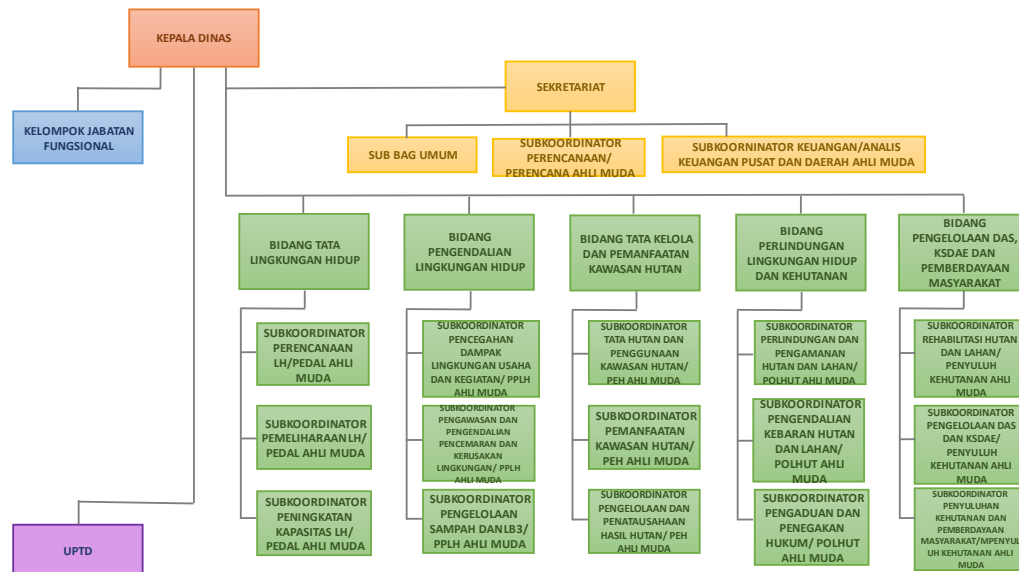
No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan
(1)	(2)	(3)
22	DPD Gerakan pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM-Gempur)	Pencemaran air akibat adanya aktifitas tambak udang (berupa intrusi air asin ke sumber air/sumur warga di Dusun tegek, Desa Benteng Kota kecamatan Tempilang Kab. Bangka Barat
23	Laporan dari UPTD KPHP Sembulan	Perambahan Hutan berupa aktivitas tambang ilegal (TI Rajuk).
24	DPD Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Bangka Belitung a.n : Mayrest Kurniawan A.Md alamat : Jl. Belibis No. 185 Bukit merapin Pangkalpinang No Hp: 082279788182 (mayrestk@gmail.com)	Pengaduan Dugaan Perambahan Kawasan Hutan. Kawasan Hutan Lindung Kota Waringin Kec. Mendo Barat Kabupaten Bangka dan kawasan Hutan Produksi Kota Waringin Bangka Koordinat 2°10.365'S-105°46.437'E (-2.1169330, 105.7414220) Jenis Kegiatan : Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang beralih fungsi menjadi kebun sawit dalam wilayah kebun sawit dalam wilayah yang berada dalam wilayah Kelompok Tani Hutan Cahaya Mandiri milik Sdr. Upe Setiadi maupun Wilayah yang diakui oleh KTH Tunas Kelapa sejak tahun 2016 sampai sekarang.
25	Kantor Hukum Haris Sucahyo SH	Laporan Pengaduan adanya pengrusakan dan Kegiatan Tambang Ilegal di Hutan Kawasan HP. Sungai Sembulan kelurahan Sungai Selan Atas Kecamatan Sungai Selan
26	DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia	Sawit diduga mengelola hutan lindung di Belitung
27	Kantor pemberitaan Belitung TV	dugaan adanya pemanfaatan sumber air baku di Hutan Lindung Gunung Tajam secara Ilegal di Kabupaten Belitung Oleh CV. Gunung Tajam

II.6.3 State

II.6.3.1 Jumlah personel dalam pengelolaan lingkungan hidup

Salah satu unsur penentu keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah Sumber Daya Manusia yang mempunyai budaya kerja yang baik. SDM yang mumpuni adalah SDM yang mempunyai kompetensi dan selalu berkomitmen meningkatkan kualitas diri yang akan mendukung pencapaian target kinerja individu dan organisasi. Budaya Kerja BERAKHLAK yang dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia agar menjadi fondasi budaya kerja ASN yang professional. BERAKHLAK sendiri

merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Dalam konteks pembangunan yang berwawasan lingkungan, respon yang baik, efektif dan efisien dari SDM sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan aktifitas kegiatan yang bermuara pada perwujudan sasaran pembangunan (Nahrudin,2018).



Gambar 2.6. 4 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Tabel 2.6. 8 Tingkat Pendidikan Pegawai di DLHK Babel

No.	Tingkat Pendidikan	Laki -laki	Perempuan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	18	18	36
2	Sarjana (S1)	98	38	136
3	Diploma 3 (D3)	13	9	22
4	SMA/SMK	20	4	24
5	SD	1		1
	Jumlah	150	69	219

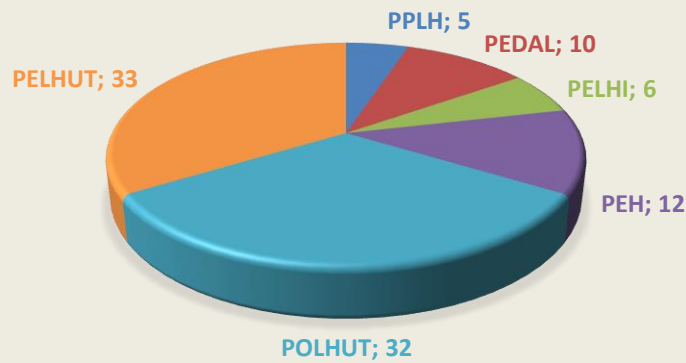
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 219 orang ASN yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi yaitu meningkatkan IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan tingkat pendidikan yang terendah

sampai dengan tertinggi yaitu SD sampai dengan Pasca Sarjana (S2), jumlah ASN dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1) merupakan jumlah terbanyak yaitu 136 orang. 1 (satu) orang dengan tingkat pendidikan SD merupakan ASN dengan tugas *Cleaning Service*. Dilihat dari tingkat pendidikan, DLHK merupakan instansi yang mempunyai pondasi yang cukup kuat sebanding dengan tugas dan tanggungjawab organisasi yang cukup berat.

Sulaiman dan Asanudin, 2020 menyimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan mempunyai peran penting dalam meningkatkan kinerja pegawai organisasi dan berpengaruh besar dalam organisasi. Suatu organisasi melaksanakan pendidikan dan pelatihan dengan harapan memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai kemampuan yang baik. Pengadaan pejabat fungsional dalam formasi perekrutan CPNS sangat diutamakan karena jabatan fungsional sangat dibutuhkan dalam dinamika pelaksanaan program dan kegiatan dengan segala peluang, tantangan dan kendala yang dihadapi oleh sebuah institusi pemerintahan. Tentu saja pada jabatan fungsional, butir kegiatan dan pembagian kewenangan sangat jelas dan tertata sehingga memudahkan seseorang pegawai untuk membentuk jiwa profesionalisme didalam dirinya untuk memberikan kontribusi dalam rangka percepatan pencapaian tujuan organisasi dan pembangunan. Namun untuk membentuk profesionalisme pejabat fungsional dibutuhkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan dasar sesuai dengan nomenklatur jabatan.

JUMLAH STAF FUNGSIONAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2022



Grafik 2.6. 9 Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Tabel 2.6. 9 Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2022

Jabatan Fungsional	Jumlah	Mengikuti Diklat	%
PPLH	5	2	40
PEDAL	10	7	70
PELHI	6	0	0
PEH	12	6	50
POLHUT	32	23	71,8
PELHUT	33	32	96,96
	98	70	71,42










Begitu pula dalam pengelolaan lingkungan hidup, terdapat 6 (enam) rumpun yaitu PPLH, PEDAL, PELHI, PEH, POLHUT dan PELHUT. Dari 98 jumlah keseluruhan pejabat fungsional yang ada, sebesar 70 orang yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan atau sebesar 71,42%. Persentase tertinggi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan adalah jabatan penyuluh kehutanan (PELHUT) yaitu 96,96% artinya hampir semua PELHUT telah memiliki kompetensi teknis dalam menjalankan tugas penyuluhan dibidang kehutanan. Berbanding terbalik dengan jabatan

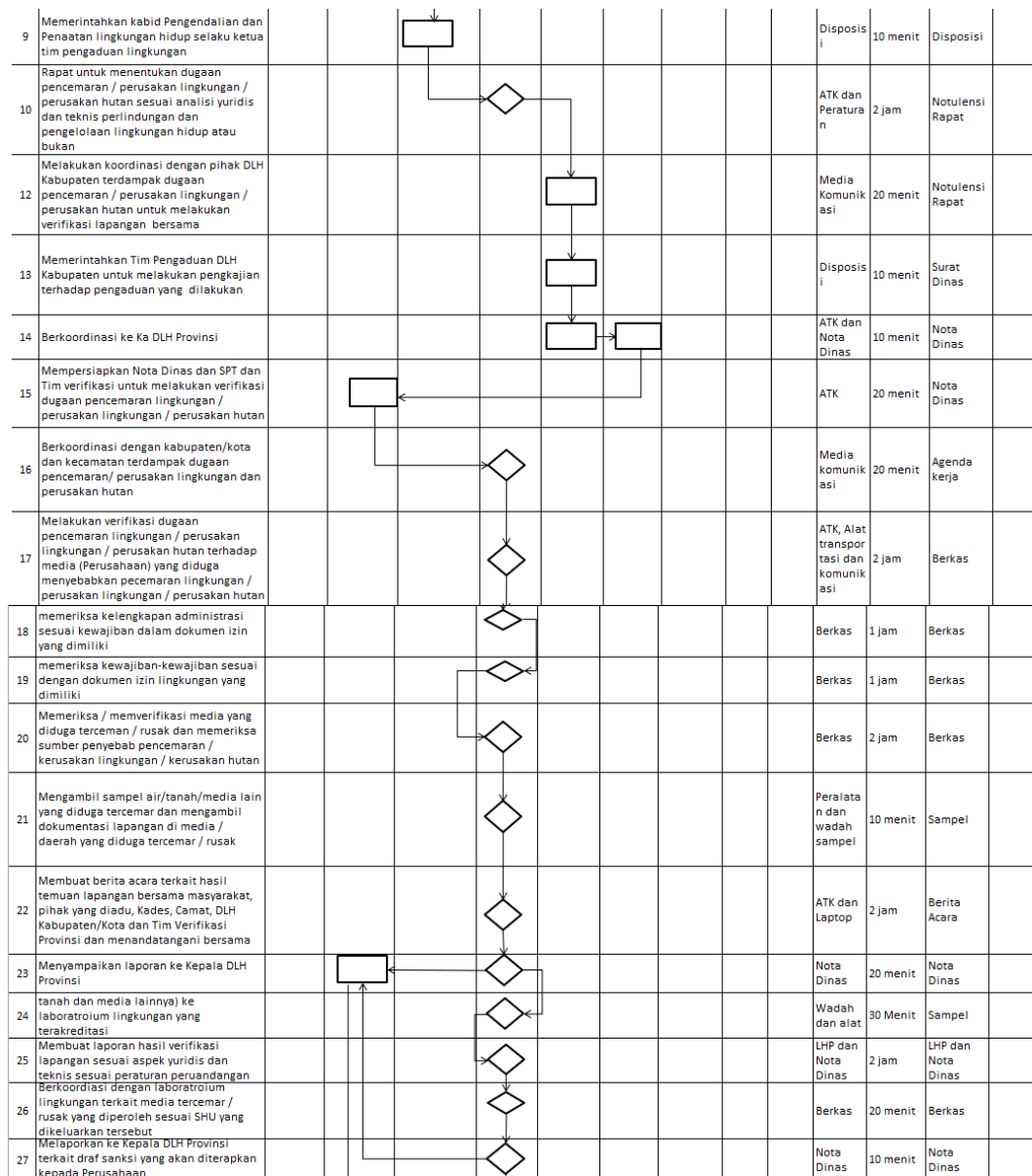
penyuluh lingkungan hidup (PELHI) yang belum semua pejabat fungsional mendapatkan pendidikan dan pelatihan karena memang jabatan PELHI merupakan rumpun jabatan fungsional baru yang dibuka formasinya oleh KLHK pada awal tahun 2020 mengingat dibutuhkan penggerak masyarakat dalam meningkatkan indeks kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup terutama pengelolaan sampah dimana indeks ketidakpedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah mencapai angka 0,71 yang artinya ketidakpedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat tinggi mendekati angka 1 (BPS,2018).

II.6.4 Impact

II.6.4.1 Status Pengaduan Masyarakat

Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ditandai dengan pelayanan masyarakat yang paripurna termasuk dalam menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain SDM yang kompeten dan professional serta mempunyai integritas, dibutuhkan *tools* berupa peraturan perundangan dan SOP yang jelas untuk melaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat yang komprehensif.

No.	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku				Ket
		Masyarakat / Pengadu	Kepala DLH Provinsi	Kabid Pengendalian dan Penataan Lingkungan Hidup	Tim Terpadu	Kepala DLH Kabupaten/ Kota	Tim Kabupaten/ Kota dan Kecamatan	Perusahaan (Terduga) Pencemar/ Perusak	Satker Teknis Lainnya	JFU	Bahan	Waktu	Output	
1	Masyarakat / pengadu datang langsung atau melalui media melakukan pengaduan kepada DLH Provinsi dilengkapi dengan bukti foto atau contoh										Surat	10 menit	Surat pengaduan dan media	
2	Menerima surat pengaduan (atau melalui media pengaduan) masyarakat terdampak pencemaran/perusakan lingkungan / perusakan hutan										Agenda kerja	30 menit	Agenda kerja	
3	Ka DLH Provinsi memerintahkan Tim Terpadu										Nota Dinas	10 menit	Disposisi	
4	Mengisi formulir pengaduan sesuai format atau petugas membuat formulir pengaduan (jika melalui media pengaduan)										Formulir	10 menit	Formulir	
5	Mencatat dalam buku register pengaduan dan memberikan tanda terima pengaduan										Formulir	20 menit	Formulir	
6	Melaporkan kepada kepala DLH Provinsi, Kepulauan Babel										Atk	20 menit	Nota Dinas	
7	Meneliti dan menelaah materi surat pengaduan dugaan pencemaran/ perusakan lingkungan / perusakan hutan					konflik tenurial hutan					ATK dan Peraturan	1 jam	Berkas, Rekomendasi	
8	Dalam hal pengaduan konflik tenurial kawasan hutan instansi penanggung jawab meneruskan pengaduan kepada tim pengelolaan konflik tenurial kawasan hutan				kasus lingkungan						Disposisi	2 jam	Disposisi	



Gambar 2.6. 5 SOP Proses Pengaduan Masyarakat

Sumber: <http://dlhk.babelprov.go.id>

Dari 27 daftar kasus pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan, sebagian besar atau 21 kasus sudah ditangani sampai dengan tahap verifikasi teknis namun belum sampai pada keputusan apakah diberikan sanksi atau tidak. Terdapat 1 (satu) kasus yang sudah berada pada status penindakan yaitu adanya dugaan penambangan dalam kawasan HKM Matras Alami Sejahtera yang termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Sungailiat Mapur. Jenis permasalahan yang diadukan diantaranya terkait dengan pencemaran oleh aktivitas tambak udang, penambangan

dikawasan konservasi dan hutan lindung, penambangan timah illegal, perambahan kawasan hutan serta menanggapi atau merespon pemberitaan dari media cetak dan elektronik terkait permasalahan lingkungan yang diduga terjadi pencemaran dan pengrusakan sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 2.6. 10 Daftar Progress Pengaduan Masyarakat

No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bupati Belitung Timur	Pertambangan di kawasan mangrove di lokasi IUP Timah kecamatan Burung mandi Belitung Timur	Sudah verifikasi teknis bulan Febuari 2022
2	Media	Pencemaran udara akibat cerobong boiler PT. Mutiara Agro lestrari (MAL) Kabupaten Bangka Tengah	Sudah verifikasi Teknis Bulan Mei 2022
3	Media	Dugaan Pencemaran Tambak Udang oleh CV Gunung Prima di Bangka Tengah	Sudah verifikasi Teknis Bulan Mei 2022
4	HTI IKK (Istana kawi Kencana)	Tambak udang atas nama Koperasi Produsen Nuansa Berkat Cemerlang Lokasi tambak udang overlap dengan HTI IKK	Sudah verifikasi Teknis Bulan 20 Mei 2022
5	Kepala Desa Simpang Yul Fathurrohlim	Dugaan pencemaran Limbah sawit PT. Payung Mitra Jaya Mandiri Maras Senang yang merusak Ekosistem Sungai di desa Simpang Yul	Sudah dilaksanakan verifikasi Bulan 30 Mei 2022
6	HTI APS (Agro pratama Sejahtera) Penagan	Perambahan Hutan produksi (HP) Sungai Sembulan oleh perambah	Sudah di proses/ambilalih Gakkum Kemterian LHK Bulan 31 Mei 2022
7	HKM Gempita Kurau	Pembuangan Limbah Tambak Udang di duga mencemari kawasan hutan bakau dan belum memiliki izin pinjam pakai	Verifikasi lapangan Bulan Juni 2022
8	Organisasi Masyarakat Pemuda Bangka Belitung Bersatu	Laporan adanya dumping (pembuangan) Limbah Tambak Udang di Laut rambak Sungailiat Kabupaten Bangka diduga milik Bpk Amen	Verifikasi lapangan Bulan 08 Juni 2022
9	Nelayan Desa pangkal Niur: Adan, Rusatam (Ketua POKMAS TKL), Arafik, Armin	Laporan penambangan timah illegal dan Perusakan lingkungan di lokasi pantai tanjung sunor (pencemaran air laut, rusaknya	Proses Registrasi Bulan 13 Juni 2022

No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
		sempadan pantai, kerusakan terumbu karang dan mangrove	
10	PT. Agro Pratama Sejahtera Desa Terong Kabupaten Belitung	Aktifitas perambahan pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat di desa terong Kecamatan Sijuk Diduga dilakukan atas nama Adi menggunakan alat mekanik PC	Tercatat-verifikasi administrasi Bulan 03 Juni 2022
11	Pemdes Desa Tanjung Pura Kecamatan Sungai Selan Kab. Bangka Tengah	Jual Beli Kawasan Hutan Produksi di Register 22 Sungai Sembulan di Desa Tanjung Pura	Tercatat-verifikasi administrasi Bulan 06 Juni 2022
12	PT. Agro Pratama Sejahtera Desa Air Seru Kabupaten Belitung	Aktifitas perambahan pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat di desa Air Seru Kecamatan Sijuk Diduga dilakukan atas nama Fery menggunakan alat mekanik PC	Tercatat-verifikasi administrasi Bulan 21 Juni 2022
13	Serikat Pemerhati Lingkungan Hidup Nusantara	Nomor Surat 0134/SPLH NUSANTARA/UI/2022Tindak Lanjut pertanggungjawaban HUKUM Terhadap Pelanggaran Koorporasi dan pertambangan tTimah secara Ilegal di daerah Dusun III kelurahan penagan kec. Mendo barat	Tercatat-verifikasi administrasi Bulan 25 Agustus 2022
14	Kantor Hukum Forum Pemuda Kalimantan barat	001/Dumas-LBH F-PKB?VII/2022Perbuatan Melawan Hukum oleh Oknum bernama Achen atas tindakan illegal mining yang terjadi	Tercatat-verifikasi administrasi Bulan 29 Agustus 2022
15	PT. Bangun Rimba Sejahtera	Respon pemberitaan media online (citizen journal, lensa Digital &Global Investigasi News) tentang kegiatan Penambangan Timah illegl di desa teluk Limau parittiga Bangka barat	Dilaksanakan verifikasi Bulan 24 September 2022
16	PT. Bangun Rimba Sejahtera	Respon Pemberitaan Media Online lensa Digital tentang Kegiatan Penanaman Sawit di Kawasan Hutan Sdr. Asiong warga dusun jebu Darat Desa Kelabat	Dilaksanakan verifikasi Bulan 24 September 2022
17	HKM Matras Alami Sejahtera	Adanya dugaan Penambangan dalam kawasan HKM Matras Alami Sejahtera termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Sungailiat Mapur	Sudah terlaksana penindakan Bulan 29 September 2022

No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
18	PT. Bangun Rimba Sejahtera	Respon pemberitaan Media Lokal terkait larangan plang JBA	Verifikasi lapangan Bulan 25 Oktober 2022
19	UPTD KPHP Rambat Menduyung	Aktivitas Tambak udang Vaname dengan system bioflok di kawasan Hutan Lindung tanjung Ular	Tercatat-verifikasi oleh KPHP bulan 24 November 2022
20	Organisasi Masyarakat Pemuda Bangka Belitung Bersatu	Penambangan pasir di desa jeruk milik unyil	Tercatat-verifikasi administrasi bulan 2 November 2022
21	PT. Bangun Rimba Sejahtera//No:064/SS D-BRS/XII-2022	Respon pemberitaan media Suara Melayu & babel news Update, terkait tambang Ilegal di Desa Cupat Bangka Barat	Tercatat 29 Desember 2022 //5 januari 2023
22	DPD Gerakan pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM-Gempur)	Pencemaran air akibat adanya aktifitas tambak udang (berupa intrusi air asin ke sumber air/sumur warga di Dusun tegek, Desa Benteng Kota kecamatan Tempilang Kab. Bangka Barat	Verifikasi 02/01/2023
23	Laporan dari UPTD KPHP Sembulan	Perambahan Hutan berupa aktivitas tambang ilegal (TI Rajuk).	Verifikasi Januari 2023
24	DPD Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Bangka Belitung a.n : Mayrest Kurniawan A.Md alamat : Jl. Belibis No. 185 Bukit merapin Pangkalpinang No Hp: 082279788182 (mayrestk@gmail.com)	Pengaduan Dugaan Perambahan Kawasan Hutan. Kawasan Hutan Lindung Kota Waringin Kec. Mendo Barat Kabupaten Bangka dan kawasan Hutan Produksi Kota Waringin Bangka Koordinat 2°10.365'S-105°46.437'E (- 2.1169330, 105.7414220) Jenis Kegiatan : Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang beralih fungsi menjadi kebun sawit dalam wilayah kebun sawit dalam wilayah yang berada dalam wilayah Kelompok Tani Hutan Cahaya Mandiri milik Sdr. Upe Setiadi maupun Wilayah yang diakui oleh KTH Tunas Kelapa sejak tahun 2016 sampai sekarang..	Tercatat 07/02/2023
25	Kantor Hukum Haris Sucahyo SH	Laporan Pengaduan adanya pengrusakan dan Kegiatan Tambang Ilegal di Hutan Kawasan HP. Sungai Sembulan kelurahan Sungai Selan Atas Kecamatan Sungai Selan	Verifikasi Administrasi-lapangan14/02/2023

No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
26	DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia	Sawit diduga mengelola hutan lindung di Belitung	Verifikasi Administrasi-lapangan 07/03/2023
27	Kantor pemberitaan Belitung TV	dugaan adanya pemanfaatan sumber air baku di Hutan Lindung Gunung Tajam secara Ilegal di Kabupaten Belitung Oleh CV. Gunung Tajam	Verifikasi Administrasi-lapangan 18/05/2023

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023



Pelaksanaan verifikasi aduan masyarakat bersama dengan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dugaan adanya pemanfaatan sumber air baku di Hutan Lindung Gunung Tajam secara Ilegal di Kabupaten Belitung, pada hari Selasa-Jumat tanggal 23-26 Mei 2023. Sampai saat ini masih pembuatan draft sanksi administrasi oleh Tim bersama KLHK dan Dinas LHK Provinsi Kep. Bangka Belitung.



Melaksanakan verifikasi aduan masyarakat ke Kantor Desa Benteng Kota, Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atas dugaan pencemaran air yang berasal dari kegiatan/usaha Tambak pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sampai saat ini sudah dilakukan penggantian air bersih akibat rembesan air reservoir tambak di sumur sumur warga.

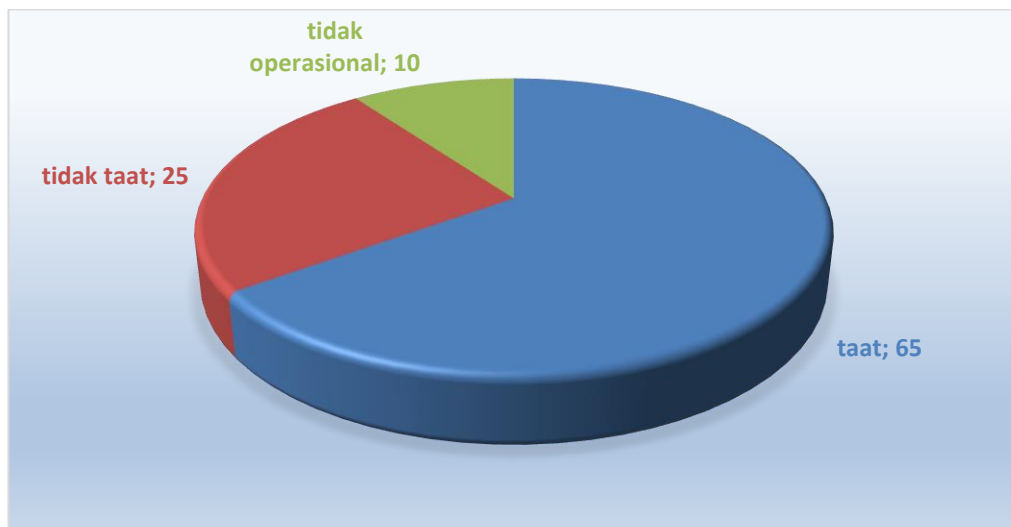
Gambar 2.6. 6 Pelaksanaan Verifikasi Aduan Masyarakat Oleh Tim DLHK Provinsi Babel Dengan Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

II.6.5 Response

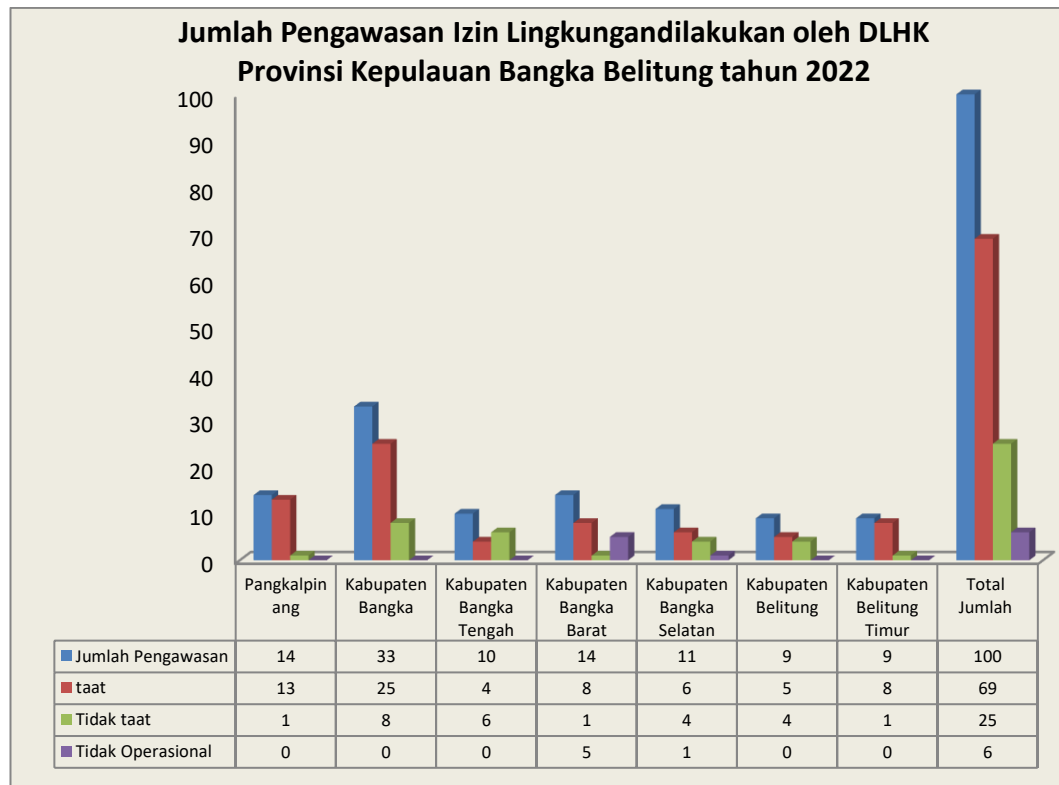
II.6.5.1 Pengawasan

Jumlah pelaksanaan pengawasan bergantung pada ketersediaan anggaran karena selain dibutuhkan biaya transportasi juga dibutuhkan jumlah SDM, pelayanan laboratorium yang memadai. Dari 227 jumlah izin lingkungan/ persetujuan lingkungan yang diterbitkan, tidak semua perusahaan yang telah memiliki izin berusaha dan memiliki persetujuan lingkungan dilakukan pengawasan. Namun demikian jumlah pengawasan mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebanyak 35 perusahaan yang dilakukan pengawasan, pada tahun 2022 sebanyak 100 perusahaan yang dilakukan pengawasan. Namun secara persentase, perusahaan dengan status taat mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 83% (29/35), sedangkan pada tahun 2022 sebesar 65% (65/100) sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut:



Grafik 2.6. 10 Hasil Pengawasan Tahun 2022

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023



Grafik 2.6. 11 Hasil Pengawasan Tahun 2022

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Peningkatan jumlah pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki izin lingkungan/persetujuan lingkungan pada tahun 2022 tercapai karena salah satunya adalah faktor penambahan jumlah personel Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang semula hanya ada 1 orang sampai dengan tahun 2021, pada tahun 2022 Jabatan Fungsional Tertentu PPLH bertambah menjadi 5 orang yang didapat melalui jalur invasing dan juga hasil dari penyederhanaan birokrasi.



Kegiatan Pengawasan Kegiatan Pertambangan



Gambar 2.6. 7 Kegiatan Pengawasan Lingkungan yang dilakukan oleh DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Beberapa hal yang perlu diupayakan agar pengawasan dapat berjalan optimal sehingga efektifitas pengawasan sebagai instrument pencegahan dampak usaha dan/atau kegiatan meningkat adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan dan peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan pengawasan dan penataan pengelolaan lingkungan hidup mengingat masih banyak jumlah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi sesuai kewenangan akan tetapi belum dapat dilakukan pengawasan sebagaimana ketentuan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Adanya prioritas untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan bagi sumber daya manusia perusahaan dan perlu dibuatkan ruang informasi dan konsultasi lingkungan serta up grade pengetahuan terkait pengelolaan dan penataan lingkungan hidup.

II.6.5.2 Program yang diinisiasi masyarakat

Pengaruh masyarakat sangat besar dalam menentukan status dan kondisi lingkungan. Dimana keadaan orang-orang yang berada didalam sebuah lingkungan tergambarkan dari status lingkungannya. Komponen – komponen yang membentuk sebuah lingkungan saling berkaitan dengan interaksi yang berbeda dan bersinergi agar keseimbangan ekosistem selalu terjaga. Terkait dengan permasalahan lingkungan yang ada maka salah satu cara dalam menanggulangnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat. Dalam Yazid dan Alhidayatillah (2017), Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan mental dan emosi orang-orang untuk menyumbangkan ide-ide dalam proses pembangunan. Keterlibatan secara mental dan emosi muncul dalam bentuk kepedulian, rasa memiliki, aksi nyata, dan perilaku yang mendukung untuk membersihkan lingkungan. Individu yang mau terlibat dalam menjaga kondisi lingkungan akan membuat kegiatan dan terobosan-terobosan baru untuk menjaga lingkungan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berarti masyarakat ikut dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan menikmati hasil pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan program pemerintah tentu saja sangat ditentukan pada kebermanfaatan program yang dapat menyentuh masyarakat secara luas yang berarti pula bahwa tata Kelola pemerintahan telah dilaksanakan dengan baik (*good governance*). Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dilihat dari bagaimana antusias partisipasi dalam pembangunan salah satunya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Keswadayaan masyarakat merupakan *important value* bagi pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap program yang dijalankan. Terbentuknya kelompok/individu yang mempunyai kesamaan tujuan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk percepatan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Beberapa komunitas yang bergerak dibidang lingkungan hidup ikut aktif melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dengan bantuan maupun swadaya sebagaimana yang dilakukan oleh komunitas BECAK Babel yang mempunyai agenda kegiatan yang sudah diselenggarakan pada tahun 2022 – 2023.

Tabel 2.6. 11. Agenda Kegiatan Yang Sudah Terselenggara Oleh BECAK Babel Tahun 2022 – 2023

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengolahan Sampah Organik harian di Markas BECAK-BABEL	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
2	Budidaya Maggot Black Soldier Fly di Markas BECAK-BABEL	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
3	Pembinaan Komunitas dan Pemuda Peduli Lingkungan	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
4	Pembinaan dan Pendampingan Gerakan Sedekah Sampah AL-BINA Bangka Desa Sempan	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
5	Edukasi Pendidikan dan Sekolah Adiwiyata (Pengolahan Sampah / Perubahan Iklim / Peduli Lingkungan)	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
6	Edukasi Masyarakat Pengelolaan Sampah	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
7	Aksi Bersih Pantai / Cleanup	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
8	Penghijauan / Penanaman / Rehabilitasi Lahan	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
9	Aksi Bersih Masjid (SIMAS) dan Bantuan peralatan kebersihan masjid	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
10	Pelestarian Ligkungan di Pulau-Pulau Kecil	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
11	Pembuatan Lubang Resapan Biopori	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
12	Menyelenggarakan Peringatan Hari Peduli	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
	Sampah Nasional (HPSN) 2016-2023			
13	Menyelenggarakan Peringatan World Clean Day (WCD) 2018-2022	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
14	Menyelenggarakan Peringatan Hari Air Seduni 2020-2023	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
15	Menyelenggarakan Peringatan Hari Mangrove Sedunia di Tj. Sunor Lestari 2020-2023	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
16	Menyelenggarakan Sosialisasi Peduli Sungai bersama BWS Babel	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
17	Menyelenggarakan kegiatan Rembuk Sampah bagi Komunitas Peduli Lingkungan	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
18	Menggalakkan Gerakan Sedekah Sampah di Kabupaten Bangka	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
19	Menggalakkan Gerakan QURBAN MINIM SAMPAH di Kabupaten Bangka	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
20	Aksi Pembagian Tumbler Gratis untuk Pengendalian Sampah Plastik	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023

Sumber: Data Primer BECAK Babel, 2022

Selain komunitas BECAK BABEL, sekelompok pemuda yang menamakan dirinya ***Recycle Generation*** juga ikut berpartisipasi melakukan gerakan peduli lingkungan hidup dengan berbagai kegiatan. 27 kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2022 terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa diantaranya yaitu:

1. Upaya konservasi



Nama Kegiatan : Penyemaian Bibit Mangrove
Waktu Pelaksanaan : 20 Juni 2019, Kelurahan Matras
Peran Peserta : Koordinator Kegiatan
Deskripsi Kegiatan : Propagul yang sudah siap untuk tumbuh akan dimanfaatkan dalam kegiatan penanaman untuk merehabilitasi pesisir pantai yang terkena abrasi



Nama Kegiatan : Memperingati Hari Penanggulangan Degradasi Lahan Dan Kekeringan Internasional
Waktu Pelaksanaan : 20 Juni 2020, Kecamatan Tempilang
Peran Peserta : Koordinator Kegiatan
Deskripsi Kegiatan : Membagikan ribuan bibit tanaman buah bertujuan untuk melakukan pelestarian lingkungan dalam mengajak masyarakat mengkampanyekan budaya bercocok tanam di perkarangan rumah

2. Pengelolaan sampah



Nama Kegiatan : World Clean Up Day
Waktu Pelaksanaan : 25 September 2021, Pantai Rambak Sungailiat
Peran Peserta : Fasilitator
Deskripsi Kegiatan : Melaksanakan Clean Up di Pantai Rambak bersama komunitas lingkungan dalam menyukkseskan kegiatan World Clean Up Day



Nama Kegiatan	: Hari Peduli Sampah Nasional 2022
Waktu Pelaksanaan	: 25 Februari 2022, Pantai Koala Jembatan Emas
Peran Peserta	: Koordinator Kegiatan
Deskripsi Kegiatan	: Memperingati HPSN dilakukan dengan kolaborasi bersama komunitas lingkungan yang tergabung dengan kegiatan mutik pilah sampah dan seminar pemuda sadar lingkungan

II.6.5.3 Penghargaan lingkungan hidup

Penghargaan lingkungan hidup dan kehutanan tidak hanya diperuntukan kepada masyarakat namun kepada pemerintah daerah yang berkomitmen tinggi dalam pengelolaan lingkungan juga diberikan penghargaan baik melalui tahapan pengajuan dan pengusulan yang sifatnya *voluntary* maupun yang bersifat *mandatory* seperti ADIPURA.

Pentingnya penghargaan sebagai bentuk pembinaan, pendampingan dan motivasi dari pemerintah kepada pemerintah daerah atau masyarakat membangun *image* bahwa pemerintah tidak hanya menghimbau, menginstruksikan atau hanya sekedar mengeluarkan peraturan saja, namun juga dapat memberikan stimulan atau daya ungkit keberhasilan sebuah program pembangunan. Penghargaan juga dilaksanakan sebagai hasil dari monitoring dan evaluasi bahkan sebagai bentuk pengawasan dari pelaksanaan sebuah peraturan atau sebuah program.

A. Adipura

Adipura bukan hanya sebuah penghargaan melainkan lebih diposisikan sebagai instrumen pengawasan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota yang kuat dalam membangun pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau perkotaan yang bersih, teduh, dan

berkelanjutan. Pada program Adipura 2022, pengklasifikasian kabupaten/kota dilakukan berdasarkan pada dokumen Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada), kapasitas terpasang sistem pengelolaan sampah dengan basis sistem teruji dan data yang akurat terverifikasi melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Operasional TPA, dan Ruang Terbuka Hijau serta pengintegrasian kuantitas Program Kampung Iklim.

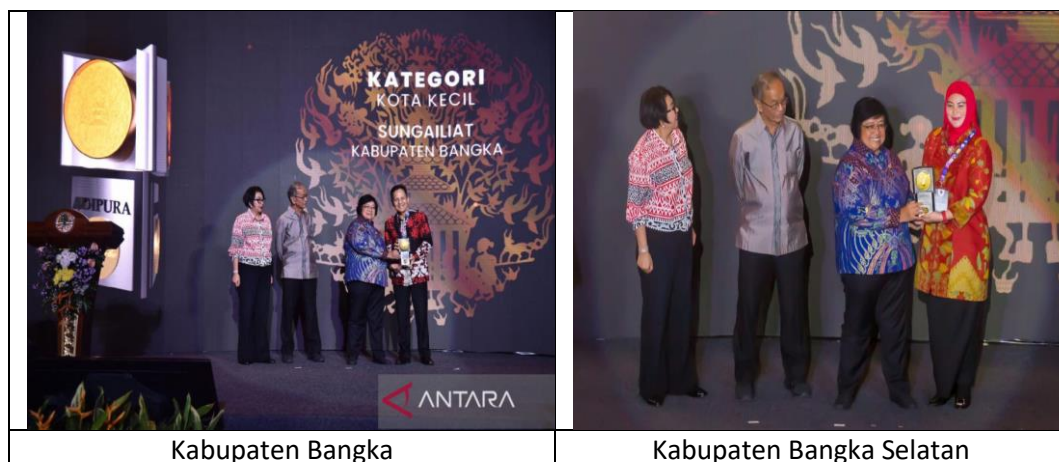
Program Adipura bertujuan untuk mendorong kepemimpinan dan komitmen pemerintah kabupaten/kota serta membangun partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat untuk berperan menselaraskan pertumbuhan ekonomi hijau, fungsi sosial, dan fungsi ekologis dalam proses pembangunan dengan menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Pada tahun 2022 dari 7 kota di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hanya 5 Kota saja yang dilakukan pemantauan dan penilaian yaitu Kota Manggar Kabupaten Belitung Timur, Kota Sungailiat Kabupaten Bangka, Kota Koba Kabupaten Bangka Tengah, Kota Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan Kota Pangkalpinang. Sedangkan Kota Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan Kota Mentok Kabupaten Bangka Barat tidak dilakukan pemantauan karena kurangnya kelengkapan data yang diinput di SIPSN atau tidak melakukan input data sdan pelaporan jakstrada sama sekali. Kemudian dari 5 Kota yang dipantau, hasil akhir penilaian adalah 2 Kota meraih anugerah adipura yaitu Kota Sungailiat dan Kota Toboali serta 1 Kota meraih sertifikat adipura yaitu Kota Manggar. Berikut tren peraihan anugerah adipura di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014 sd 2022:

Tabel 2.6. 12 Tren Pencapaian ADIPURA Tahun 2013 - 2022

NO.	KOTA	KABUPATEN/KOTA	TAHUN					2019	2020	2021	2022	JENIS KOTA
			2014	2015	2016	2017	2018					
1	PANGKALPINANG	KOTA PANGKALPINANG	-	-	PIAGAM ADIPURA	-	-				-	SEDANG
2	SUNGAILIAT	KAB. BANGKA	-	-	ADIPURA	ADIPURA	ADIPURA				ADIPURA	KECIL
3	TANJUNGPANDAN	KAB. BELITUNG	-	-	-	-	-	dilakukan pemantauan tetapi tidak ada pengumuman	covid 19, tidak ada pemantauan	covid 19, tidak ada pemantauan	-	KECIL
4	TOBOALI	KAB. BELITUNG TIMUR	-	PIAGAM ADIPURA	ADIPURA	ADIPURA	ADIPURA				ADIPURA	KECIL
5	MUNTOK	KAB. BANGKA BARAT	-	-	-	-	PIAGAM ADIPURA				-	KECIL
6	KOBA	KAB. BANGKA TENGAH	PIAGAM ADIPURA	-	ADIPURA	ADIPURA	ADIPURA				-	KECIL
7	MANGGAR	KAB. BELITUNG TIMUR	-	PIAGAM ADIPURA	PIAGAM ADIPURA	-	ADIPURA				PIAGAM ADIPURA	KECIL

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023



Gambar 2.6. 8 Kabupaten yang Meraih Anugerah Adipura Katagori Kota Kecil yaitu Kota Sungailiat dan Kota Toboali

B. Adiwiyata

Melalui program Adiwiyata, diharapkan perilaku peduli dan berbudaya lingkungan hidup dapat diintegrasikan melalui pendidikan formal dengan sasaran warga sekolah mulai dari tingkat SD/ sederajat sampai dengan SLTA/ sederajat. Adiwiyata merupakan sebuah penghargaan yang diberikan kepada sekolah yang berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS). Diharapkan pemberian penghargaan adiwiyata mampu menjadi daya ungkit warga sekolah untuk melaksanakan gerakan PBLHS secara optimal dan berkelanjutan, bukan

hanya sekedar mengejar penghargaan saja. Berikut daftar sekolah peraih penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Tahun 2023:

Tabel 2.6. 13 Daftar Sekolah Adiwiyata Provinsi Tahun 2023

No	Nama Sekolah	Alamat
1	SMK Negeri 1 Tanjung Pandan	Jl.Jendral Sudirman Km.7 Perawas Kecamatan Tanjungpandan
2	SMP Negeri 1 Puding Besar	Jalan raya Pangkalpinang-Muntok, Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar
3	SMP Negeri 2 SIJUK	Jl. Tanjung Kelayang RT.001 RW.001, Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk
4	SMP Negeri 3 SIJUK	Jl. Inti Alam Raya, Air Seru, Kec. Sijuk
5	SMP Negeri 5 TANJUNGPANDAN	Jl. Jenderal Sudirman KM. 7, Perawas, Kecamatan Tanjung Pandan
6	SMP Negeri 2 MEMBALONG	Jl. Raya Membalong, Simpangrusa, Kecamatan Membalong
7	SMP Negeri 2 Muntok	Jl. Tanjung Kalian Kecamatan Muntok
8	SMP Negeri 5 Muntok	Jl. Raya Desa Air Putih Kecamatan Muntok
9	SMP Negeri 2 Simpang Teritip	Jl. Lintas Pangkalpinang – Muntok Desa Mayang kecamatan Simpang Teritip
10	SD Negeri 21 Sungailiat	Jl. Cut Nyak Dien Tunghin, Kelurahan Surya Timur Kecamatan Sungailiat
11	SD Negeri 17 TANJUNGPANDAN	Jl. Ahim, Lesung Batang, Kecamatan Tanjung Pandan
12	SD Negeri 30 TANJUNGPANDAN	Jl. Perumnas, Aik Pelempang Jaya, Kecamatan Tanjung Pandan
13	SD Negeri 3 Parittiga	Jl. Raya puput Atas Desa Puput Kecamatan Parittiga

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajukan 11 usulan Calon sekolah adiwiyata tingkat nasional dan mandiri pada tahun 2022 ke KLHK yaitu 2 sekolah diajukan sebagai Calon sekolah adiwiyata mandiri dan 9 sekolah diajukan sebagai calon

sekolah adiwiyata nasional. Namun setelah melalui verifikasi dokumen dan pemenuhan kriteria sekolah adiwiyata dan yang berhasil menjadi sekolah adiwiyata nasional hanya 5 sekolah dan 2 sekolah yang diajukan menjadi sekolah adiwiyata mandiri belum berhasil mendapatkan predikat tersebut. Pencapaian tersebut ditetapkan melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.1176/MENLHK/P2SDM/SDM.2/2022 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Nasional tahun 2022. Menjadi tugas dari tim pembina untuk mengevaluasi serta meningkatkan pelaksanaan Gerakan PBLHS yang dilakukan oleh sekolah. Pendampingan secara intensif juga dibutuhkan untuk menjaga ritme dan motivasi dari warga sekolah dalam melaksanakan Gerakan PBLHS.

Tabel 2.6. 14 Daftar sekolah adiwiyata Provinsi Tahun 2023

No	Nama Sekolah	Alamat
1	SMP Negeri 1 Kelapa	Jl. Pusuk, No. 6 Kelapa, Kab. Bangka Barat, Prov. Kep. Bangka Belitung, Kode Pos 3336
2	SMP Negeri 6 Tanjungpandan	Jl. A. Yani No.03 Tanjungpandan, Kabupaten Belitung
3	SD Negeri 30 Pangkalpinang	Jl. Girmaya Kelurahan Bukit Besar, Pangkalpinang, Kode Pos 33145
4	SD Negeri 37 Pangkalpinang	JL. DEPATI BARIN, Opas Indah, Kec. Taman Sari, Kota Pangkalpinang Prov. Kepulauan Bangka Belitung
5	SD Negeri 23 Tanjungpandan	Jl. Pak Tahau, AIR SAGA, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung Prov. Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023



Gambar 2.6. 9 Sekolah Adiwiyata Provinsi Tahun 2023

Kriteria untuk mendapatkan sekolah adiwiyata tingkat provinsi memiliki nilai terendah 80,00 untuk aspek konservasi air, pengelolaan sampah, aspek konservasi energi, kegiatan PLH di sekolah ataupun masyarakat, kerjasama terkait lingkungan hidup. Selain itu juga, terkait tanaman hijau, kantin sehat dan inovasi pembelajaran terkait lingkungan hidup. Penyerahan penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi ini diberikan langsung oleh Bapak Dr. Ir. RIDWAN DJAMALUDIN, M.Sc, Pj. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung se usai upacara peringatan Hari Jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di halaman Kantor Gubernur Babel pada Senin, 21 November 2022.

Berdasarkan daftar lampiran surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nomor: 660/1.738/DLHK, tanggal: 15 November 2022, sekolah di kabupaten Belitung yang meraih penghargaan sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi yaitu.

1. SMK Negeri 1 Tanjungpandan
2. SMP Negeri 2 Sijuk
3. SMP Negeri 3 Sijuk
4. SMP Negeri 5 Tanjungpandan
5. SMP Negeri 2 Membalong
6. SD Negeri 17 Tanjungpandan

7. SD Negeri 30 Tanjungpandan
8. SMP Negeri 2 Muntok,
9. SMP Negeri 5 Muntok,
10. SMP Negeri 2 Simpang Teritip,
11. dan SD Negeri 3 Parittiga

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS oleh tim pembina dan/atau pelaksanaan Gerakan PBLHS oleh warga sekolah antara lain:

- Mutasi atau pergantian kepala sekolah mempengaruhi semangat warga sekolah dalam melanjutkan pelaksanaan Gerakan dan menyebabkan tim pembina harus mengulang kembali melakukan pendekatan dan advokasi kepada kepala sekolah terkait pelaksanaan Gerakan dan program adiwiyata.
- Motivasi sekolah untuk melaksanakan gerakan PBLHS masih rendah di beberapa sekolah. Masih banyak sekolah yang berorientasi hanya kepada peraihan penghargaan namun tidak melakukan Gerakan PBLHS dengan sungguh - sungguh.
- Inisiatif dari sekolah untuk melaksanakan Gerakan PBLHS masih rendah karena pola pikir warga sekolah masih beranggapan bahwa sekolah adiwiyata harus baik secara fisik namun sebetulnya perubahan perilaku menjadi ramah lingkungan yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan Gerakan PBLHS. Oleh karena itu banyak sekolah yang merasa tidak mampu melakukan Gerakan dikarenakan keterbatasan anggaran untuk perbaikan kondisi fisik sekolah.
- Masih kurangnya pemahaman dari tim pembina Gerakan PBLHS Kabupaten/Kota dalam hal membina sekolah melaksanakan Gerakan PBLHS.
- Sinergitas dan kolaborasi antar instansi terkait khususnya Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama yang masih kurang dalam pelaksanaan pembinaan dan penguatan Gerakan PBLHS.

- Inovasi dalam upaya peningkatan perilaku ramah lingkungan hidup di sekolah yang masih rendah dan butuh kemitraan dalam pengembangannya.
- Dengan jumlah sekolah yang ada, dibutuhkan lebih banyak SDM untuk membina agar setiap sekolah sasaran mendapatkan informasi dan pembinaan yang adil dan merata.

C. Bank Sampah Terbaik

Penilaian lomba Bank Sampah Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dilaksanakan dengan maksud untuk melaksanakan evaluasi kinerja bank sampah sekaligus memberikan motivasi kepada pembina dan pengelola bank sampah yang ada di Kabupaten/Kota. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Pasal 16 bahwa Pemerintah dan/atau melakukan evaluasi kinerja Pengelolaan Sampah oleh Bank Sampah berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pengelola bank sampah kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Selanjutnya berdasarkan pasal 17 bahwa pemerintah dapat memberikan insentif kepada:

- a) Pemerintah Daerah yang dalam wilayah administratifnya terdapat Bank Sampah dengan kinerja baik; dan/atau
- b) Pengelola Bank Sampah dengan kinerja baik.

Insentif dapat berupa penghargaan, publikasi kinerja baik Bank Sampah, pemberian rekomendasi bantuan pembiayaan pengelolaan sampah, pelatihan di bidang pengelolaan sampah dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 2.6. 10 Tim Penilai DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Melakukan Penilaian Bank Sampah

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Sehubungan dengan hal tersebut, DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan penilaian lomba Bank Sampah sebagai wujud pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada peraturan diatas. Tahapan pelaksanaan penilaian lomba Bank Sampah Tingkat Provinsi berpedoman pada Juknis Lomba Bank Sampah Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penilaian lomba diperuntukan kepada Bank Sampah yang aktif keberadaannya paling sedikit 3 bulan terakhir. Setiap Kabupaten/Kota diperkenankan mengirim 3 utusan terbaik sebagai peserta lomba, namun tidak semua Kabupaten/Kota memiliki Bank Sampah dengan kondisi status

aktif sehingga ada beberapa Kabupaten/Kota yang hanya mengirimkan 2 atau 1 bank sampah. Jumlah total peserta lomba sebanyak 13 bank sampah.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan kepada 13 bank sampah di 7 Kabupaten/Kota menggambarkan bahwa sebagian besar bank sampah sempat tidak operasional selama masa pandemi Tahun 2020/2021 sehingga operasional bank sampah pada tahun 2022 belum begitu optimal dengan SDM dan sumber daya lainnya yang ada saat ini *pasca covid 19*. Berdasarkan penilaian langsung ke lapangan terhadap 13 Bank Sampah, didapat resume penilaian sebagai berikut:

- 100% bank sampah dalam status aktif
- Dari segi manajemen operasional bank sampah tercatat bahwa sebagian besar pencatatan masih manual menggunakan buku catatan, sedangkan 4 bank sampah sudah menggunakan komputer antara lain Bank Sampah Setara, Beres, Papin dan Yapentob.
- Semua bank sampah belum berpedoman pada Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 untuk struktur organisasinya.
- Beberapa bank sampah memiliki SDM yang pernah mendapatkan pelatihan tentang pengelolaan bank sampah atau pelatihan lainnya terkait dengan pengelolaan sampah, namun belum semua pengurus mendapatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas pengelolaan bank sampah.
- Sebagian besar sudah mencetak buku tabungan mulai dari buku yang berbentuk modern persis seperti buku bank sampai dengan buku yang dicetak sederhana. Hanya ada 1 bank sampah yang tidak mencetak buku tabungan untuk nasabah yaitu bank sampah Teratai.
- Jumlah nasabah yang paling banyak dari bank sampah Papin sebanyak 447 orang, bank sampah Beres sebanyak 279 orang dan bank sampah akar berebat sebanyak 170 orang, kisaran jumlah nasabah pada 10 bank sampah lainya mulai dari 12 orang sd 91 orang.

- Seluruh bank sampah memiliki SOP dan jadwal pelayanan bank sampah.
- Seluruh bank sampah memiliki bangunan fisik meskipun beberapa diantaranya masih menggunakan teras rumah dan bangunan masih bersifat semi permanen. Kepemilikan sarpras penunjang seperti timbangan, kendaraan penjemput sampah atau kendaraan roda tiga pun bervariasi, ada yang memiliki dengan kondisi baik dan rusak sedang hingga rusak berat.
- Omset yang didapat perbulan oleh bank sampah juga bervariasi, ada 4 bank sampah dengan omset diatas 1 juta rupiah, sedangkan 9 bank sampah lainnya berkisar 150 ribu rupiah sampai dengan 1 juta.
- Dalam menjalankan operasionalnya, pengurus bank sampah menjalin kemitraan baik kemitraan dalam hal penjualan maupun kemitraan dalam hal penguatan kelembagaan bank sampah. Dalam hal penjualan bank sampah bekerja sama dengan pengepul lokal yang terdekat dengan lokasi bank sampah. Dalam hal penguatan kelembagaan, bank sampah bekerja sama dengan instansi, kelompok masyarakat penggiat lingkungan, dunia usaha dan sekolah terutama sekolah adiwiyata.
- Beberapa media promosi yang digunakan oleh bank sampah antara lain Instagram, *youtube*, *web*, poster dan aplikasi *whatsapp*. Media promosi digunakan untuk menarik minat bank sampah dan menyebarkan informasi terkait pelayanan bank sampah antar nasabah.
- Inovasi yang dilakukan oleh bank sampah antara lain:

Tabel 2.6. 15 Daftar Inovasi Bank Sampah

Nama bank sampah	Inovasi
Setara	Sedekah sampah setiap jumat
Sri Menanti Berkarya	Baypass (Bayar Pajak Pakai Sampah) dan kreatifitas buat sabun dari minyak jelantah
Sepakat	inovasi tukar sampah dengan sembako, tukar sampah dengan biaya BPJS, <i>doorprze</i> bagi penabung yang terbanyak

Nama bank sampah	Inovasi
	setiap minggu yang bekerjasama dengan <i>dealer</i> HONDA setempat.
Papin	Tukar poin sampah dengan pulsa
Beres	Tukar poin sampah dengan alat tulis

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

- Kondisi lingkungan sekitar lokasi bank sampah dari semua bank sampah terlihat rapi dan bersih.
- Beberapa kendala yang dihadapi oleh pengurus bank sampah dalam menjalankan operasional bank sampah antara lain kurangnya SDM yang terlatih, keterbatasan sarpras pengangkutan sampah dan pemilahan, ketidakstabilan keberadaan pengepul sebagai *offtaker* sampah terpilah, kesadaran dan kebiasaan pilah sampah dari rumah yang masih rendah oleh masyarakat.

Bagi bank sampah yang mendapatkan peringkat I sampai dengan VI diberikan hadiah uang tunai dan piagam, sedangkan yang tidak mendapatkan peringkat tetap diberikan piagam apresiasi karena bisa mempertahankan keberadaannya meskipun dalam kondisi sulit pasca pandemi. Pembagian hadiah pemenang lomba bank sampah diberikan langsung oleh Penjabat Gubernur pada tanggal 21 November 2022 bertepatan dengan hari jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di halaman Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

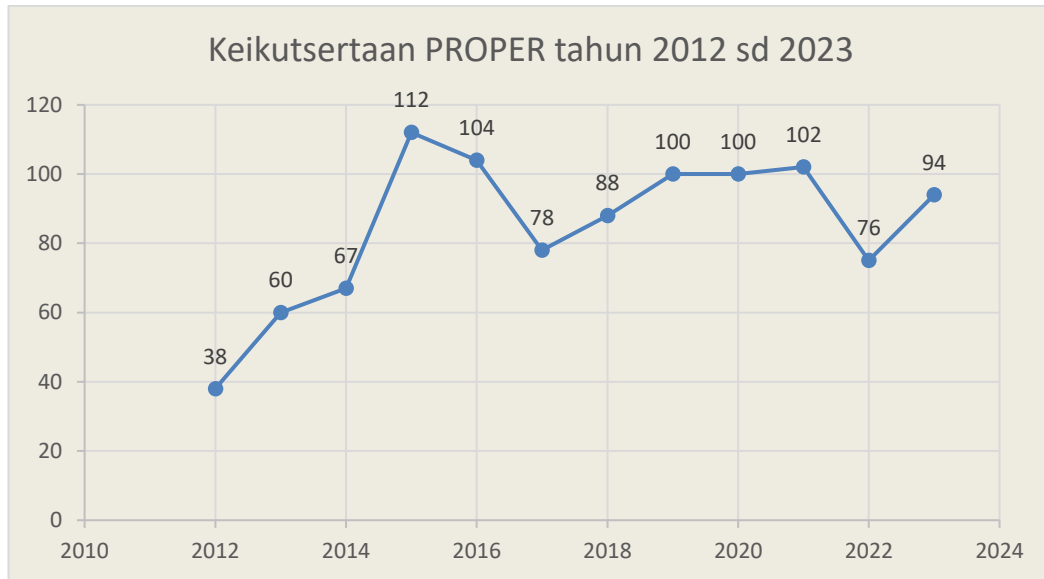
Berikut nama pemenang dan uang hadiah serta sertifikat yang diberikan.

1. Bank Sampah Papin Pangkalpinang, Hadiah sebesar Rp. 5.000.000,-
2. Bank Sampah Setara Sungailiat, Hadiah sebesar Rp. 3.500.000,-
3. Bank Sampah Akar Berebat Tanjungpandan Hadiah sebesar Rp. 2.500.000,-
4. Bank Sampah Sepakat Kab. Bangka Barat, Hadiah sebesar Rp. 2.000.000,-
5. Bank Sampah Beres Tanjungpandan, Hadiah sebesar Rp. 1.500.000,-
6. Bank Sampah Sri Menanti Sungailiat, Hadiah sebesar Rp. 1.000.000,-

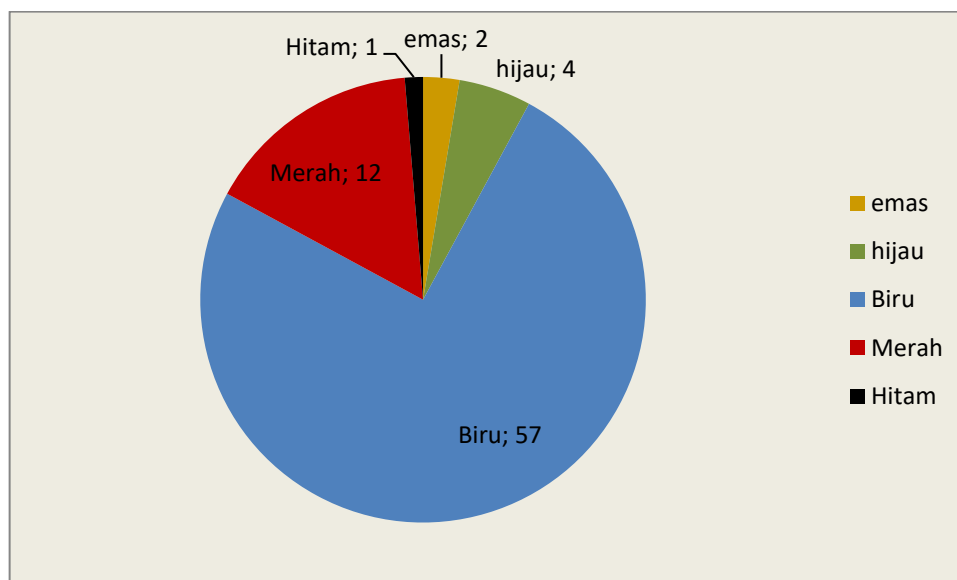
D. Proper

PROPER merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya PROPER juga merupakan perwujudan transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Penerapan instrumen ini merupakan upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk menerapkan sebagian dari prinsip-prinsip *good governance* (transparansi, berkeadilan, akuntabel, dan pelibatan masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan. Dalam dalam 1 (satu) dekade, jumlah keikutsertaan perusahaan dalam penghargaan PROPER sangat fluktuatif dari tahun ke tahun.

Proper adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sejak tahun 1995, untuk mendorong perusahaan meningkatkan pengelolaan lingkungannya. Dari penilaian proper, perusahaan akan memperoleh citra/reputasi sesuai bagaimana pengelolaan lingkungannya. Citra tersebut dinilai dengan warna emas, hijau, biru, merah dan hitam. Proper emas merupakan proper yg terbaik, artinya perusahaan tersebut sudah menerapkan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh dan kontinu. Jika sebuah perusahaan mendapat 2x warna hitam secara berturut2, perusahaan tersebut bisa dituntut dan usaha akan dihentikan.

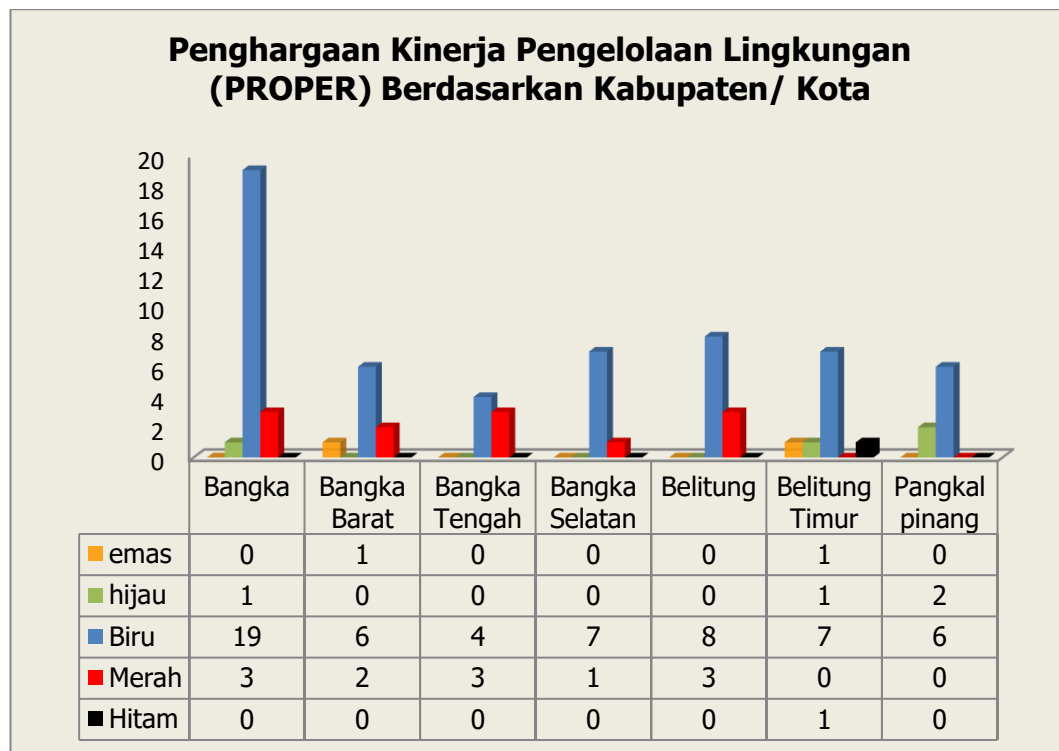


Grafik 2.6. 12 Tren Jumlah Peserta PROPER Tahun 2012 Sd 2023
Sumber: DLHK, hasil olah data 2012 sd 2023



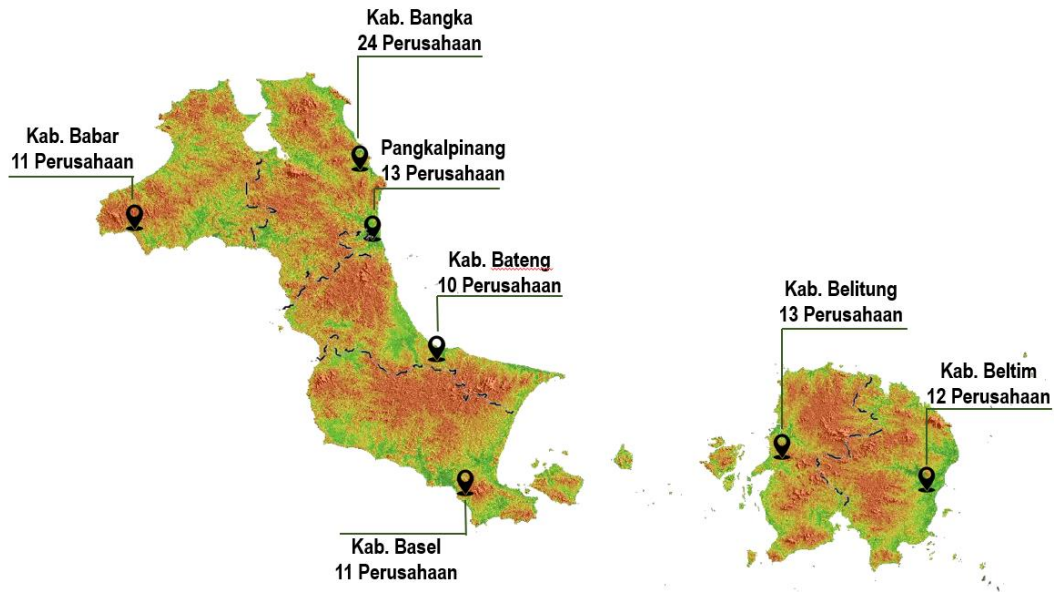
Grafik 2.6. 13 Peraihan Kategori PROPER Tahun 2012 Sd 2023
Sumber: DLHK, hasil olah data 2012 sd 2023

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1299/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2022 Tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meraih Proper emas ada 2 perusahaan, 4 hijau, sedangkan yang paling banyak proper biru ada 57 perusahaan tetapi ada juga yang meraih 12 perusahaan proper merah dan proper 1 Hitam.



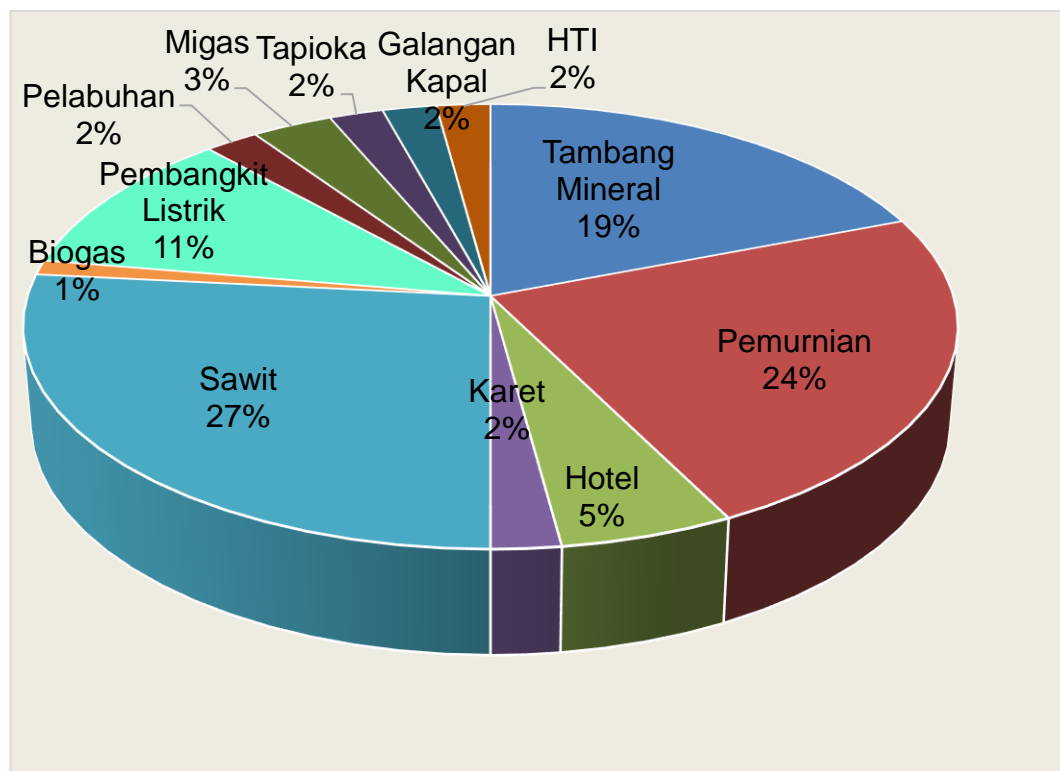
Grafik 2.6. 14 Penghargaan Kinerja Pengelolaan Lingkungan (PROPER)

Ada 76 perusahaan meraih proper (emas, hijau, biru, merah dan hitam), berdasarkan Grafik Penghargaan Kinerja Pengelolaan Lingkungan (PROPER) berdasarkan kabupaten/ Kota, Ada 2 Kabupaten yang meraih proper emas (1 Kabupaten Bangka Barat dan 1 Kabupaten Belitung Timur), proper Hijau ada 3 Kabupaten (Bangka, belitung Timur dan Pangkal Pinang), paling banyak Proper Biru sebanyak 57 (19 Bangka, 8 Belitung, 7 Bangka Selatan, 7 Belitung Timur, 6 bangka Barat, 4 bangka Tengah), 12 proper merah (3 Bangka, 3 Bangka Tengah, 3 Belitung, 2 Bangka Barat dan 1 Bangka Selatan), masih ada yang meraih proper 1 hitam (Belitung Timur).



Gambar 2.6. 11 Jumlah Peserta PROPER Tahun 2023

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023



Grafik 2.6. 15 . Sebaran peserta PROPER berdasarkan sektor usaha tahun 2023

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023



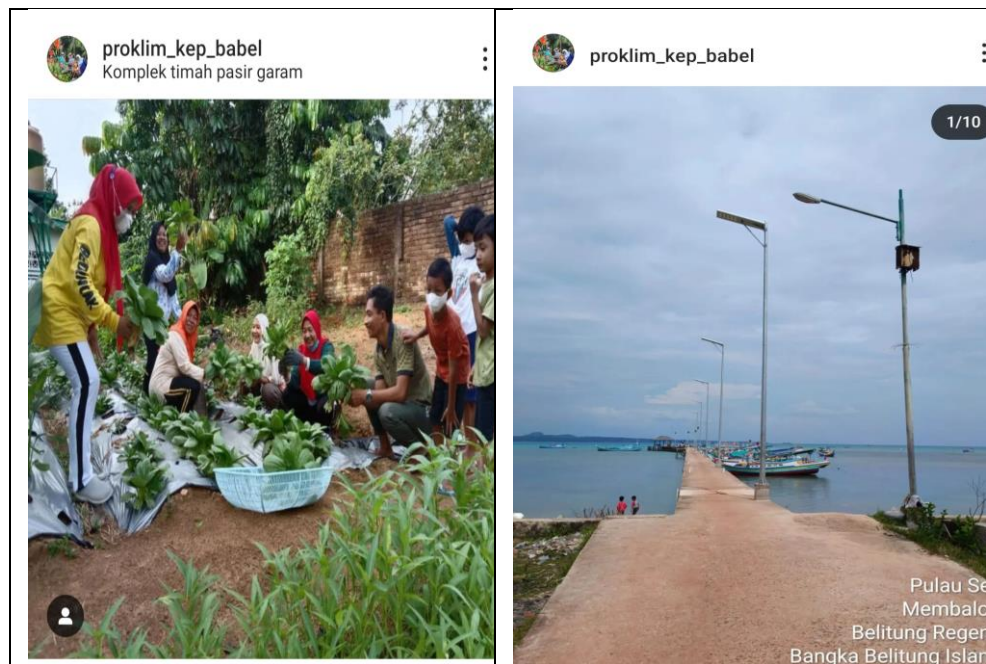
Gambar 2.6. 12 PT.Timah Tbk Meraih Proper Emas

PT. Timah, Tbk -unit Metalurgi Muntok dan PT Sahabat Mewah dan Makmur Meraih PROPER Emas menunjukkan komitmen dan kemajuan dalam aspek pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dimana ada beberapa aspek yang menjadi penilaian seperti tingkat ketaatan perusahaan lingkungan terhadap peraturan lingkungan dapat terus memacu semangat inovasi perusahaan dalam meningkatkan standar pengelolaan dan pelestarian lingkungan serta pemberdayaan masyarakat dan terus berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan yang tujuannya untuk memperluas cakupan pengelolaan lingkungan ramah lingkungan. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 1 perusahaan yang Proper Hitam, proper hitam peringkat paling bawah dalam mengelola lingkungan, belum melakukan upaya dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan sehingga berpotensi mencemari lingkungan, dan beresiko untuk ditutup ijin usahanya oleh KLHK dalam bidang.

E. Proklam

Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan program penghargaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada kelompok

masyarakat di tingkat tapak setingkat RW/Dusun atas upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim di lingkungannya baik terhadap komponen kegiatan pengendalian banjir, longsor dan kekeringan, ketahanan pangan dengan pemanfaatan lahan perkarangan rumah ditanami tanaman obat, sayuran dan lainnya, pengendalian penyakit akibat perubahan iklim, pengelolaan sampah, upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta upaya penghijauan di area dusun/RW dalam mendukung komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2030 sebesar 29% hingga 41 %.

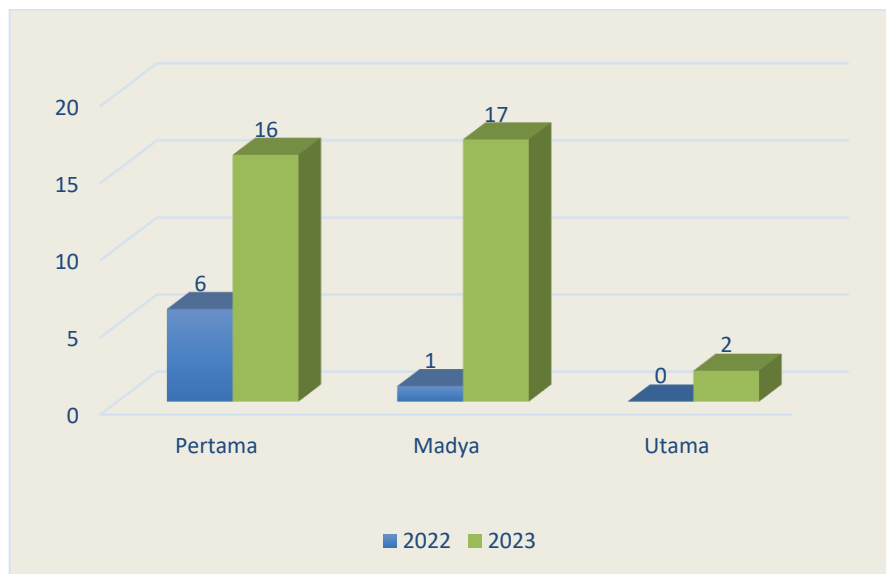


Gambar 2.6. 13 Kegiatan Proklam Babel

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Saat ini untuk program penghargaan terhadap aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat di nilai oleh KLHK bagi lokasi Proklam yang telah teregistrasi dan terdokumentasi dalam aplikasi Sistem Registrasi Nasional (SRN KLHK). Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Indonesia menargetkan terbentuknya Proklam sejumlah 20.000 unit/lokus pada tahun 2024. Melalui Proklam diharapkan semua individu, masyarakat dapat bersama – sama menjadi pelopor dan penggerak gaya hidup bersih,

sehat dan Tangguh bencana di lingkungannya masing-masing. Penting sekali meningkatkan kolaborasi antar semua pihak untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dukungan dari *stakeholder* seperti pemerintah dan swasta dapat memperkuat pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan menjamin keberlanjutan dari program ini.



Grafik 2.6. 16 Penghargaan Proklim Perkategori Tahun 2022 Sd 2023
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Dari tahun 2022 s.d. 2023, ada peningkatan penghargaan proklim perkategori pertama 6, Madya 1 tahun 2022, ditahun 2023 ada Peningkatan penghargaan proklim perkategori pertama sebanyak 18, madya sebanyak 17, dan utama sebanyak 2.

BAB III

ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa komponen lingkungan saling berinteraksi membentuk kesatuan dan saling mempengaruhi, termasuk manusia dan perilakunya. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam undang-undang, manusia dan perilakunya dipandang sebagai bagian dari lingkungan. Dengan pemahaman tersebut, maka manusia saling berinteraksi dengan alam sehingga perilakunya bukan hanya berdampak pada alam atau komponen lingkungan lainnya, tetapi juga berdampak pada manusia itu sendiri. Pemahaman seperti ini akan memotivasi manusia untuk mengelola lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya karena dampaknya akan kembali kepada kelangsungan perikehidupan manusia.

Di sisi lain, paham antroposentrisme dalam etika lingkungan menganggap bahwa manusia sebagai pusat alam, sedangkan semua makhluk lain adalah sarana untuk tujuan manusia (Kopnina et al., 2018). Pemahaman ini akan mempengaruhi perilaku manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya yang cenderung tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Pemahaman seperti ini sering memposisikan manusia bukan sebagai bagian dari lingkungan sehingga manusia cenderung untuk mengeksploitasi lingkungan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Paham antroposentrisme sering disalahkan sebagai pendorong terjadinya berbagai kerusakan lingkungan. Terlepas dari berbagai pemahaman tentang etika lingkungan, manusia dan perilakunya yang memanfaatkan sumber daya alam dan jasa-

jasa lingkungan di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun untuk pembangunan ekonomi yang tidak disertai dengan pengelolaan lingkungan yang sesuai memang menjadi penyebab berbagai kerusakan lingkungan.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beberapa isu atau masalah lingkungan hidup bahkan belum dapat diselesaikan dalam kurun waktu bertahun-tahun, seperti masalah pengelolaan sampah dan kerusakan lahan. Isu-isu tersebut sering dibahas dalam berbagai dokumen perencanaan lingkungan selama bertahun-tahun. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang selama ini telah dilakukan untuk menangani isu-isu tersebut masih perlu ditingkatkan dan dievaluasi agar lebih efektif/optimal.

III.1 Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup

Isu lingkungan hidup daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 diidentifikasi dari hasil analisis yang dilakukan oleh Tim Penulis menggunakan pendekatan DPSIR. Hasil identifikasi tersebut kemudian dibahas bersama secara partisipatif dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen IKPLHD yang komponennya terdiri atas perwakilan dari beberapa perangkat daerah yang terkait, perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perwakilan perguruan tinggi (akademisi).

Selanjutnya, daftar isu hasil FGD dinilai menggunakan skala dengan rentang nilai 1–10. Semakin besar nilai yang diberikan, maka isu tersebut semakin diprioritaskan. Penilaian dilakukan oleh responden yang berasal dari berbagai instansi terkait, dengan menggunakan fasilitas *google form* (https://bit.ly/ISU_IKPLHD2023). Kriteria yang digunakan untuk pertimbangan saat dilakukan penilaian adalah:

1. *Urgency* (isu yang dinilai mendesak untuk segera diselesaikan atau ditangani),

2. *Seriousness* (isu yang dinilai menimbulkan dampak serius dan membahayakan),
3. *Growth* (isu yang dinilai terus berkembang dan sulit dicegah),
4. *Rationally* (isu yang dinilai bersifat rasional untuk diselesaikan dengan waktu dan sumber daya yang tersedia).

Daftar isu hasil FGD yang dilakukan penilaian terdiri atas isu-isu lingkungan hidup berikut:

1. Eksploitasi dan alih fungsi lahan,
2. Erosi dan sedimentasi,
3. Penurunan kualitas air,
4. Peningkatan konsumsi energi fosil,
5. Penurunan kualitas udara,
6. Bencana akibat cuaca ekstrim (banjir, angin kencang/puting beliung),
7. Belum optimalnya pengelolaan sampah,
8. Masalah ketahanan pangan,
9. Belum optimalnya tata kelola dan manajemen lingkungan hidup,
10. Kerusakan pesisir dan laut.

Penilaian Isu Lingkungan Hidup Daerah

Mohon untuk mengisi form di bawah dengan memilih skor/nilai yang sesuai untuk masing-masing kriteria pada setiap isu/permasalahan yang disebutkan. Semakin besar nilai yang dipilih, maka isu yang dinilai akan semakin diprioritaskan (nilai minimal 1, maksimal 10). Berikut ini arti kriteria yang tercantum:

Urgency: Mendesak untuk segera diselesaikan/ditangani
Seriousness: Menimbulkan dampak serius dan membahayakan
Growth: Masalah terus berkembang dan sulit dicegah
Rationally: Rasional/masuk akal untuk diselesaikan dengan waktu & sumber daya yang ada

Isu yang tertulis adalah hasil pengelompokan dari daftar isu sebelumnya. Berikut ini rumusannya:

- eksploitasi & alih fungsi lahan (termasuk juga kebakaran hutan & lahan)
- erosi & sedimentasi
- rendahnya kualitas air (termasuk juga pembuangan limbah ke badan air)
- peningkatan konsumsi energi fosil
- penurunan kualitas udara (termasuk juga peningkatan suhu udara rata-rata harian)
- bencana karena cuaca ekstrim (termasuk banjir/rob, gelombang air, angin kencang & puting beliung)
- timbunan sampah yang tidak terkelola
- ketahanan pangan (termasuk terbatasnya bahan pangan, konsumsi pangan yang meningkat, dan masalah pengangguran)
- manajemen/tata kelola dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan (termasuk masalah pengaduan masyarakat dan pelayanan)
- kerusakan pesisir dan laut

Terima kasih atas partisipasinya.

* Indicates required question

Eksploitasi & alih fungsi lahan *

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urgency	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Seriousness	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Growth	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rationally	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Erosi & sedimentasi *

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urgency	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Gambar 3. 1 Formulir Penilaian Isu Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023

Gambar di atas menyajikan bentuk formulir penilaian isu lingkungan hidup yang digunakan. Prioritas isu disusun berdasarkan total nilai yang diperoleh dengan menganggap semua kriteria yang digunakan memiliki

bobot yang sama dalam penilaian. Hasil rekapitulasi nilai isu-isu lingkungan hidup tersebut sesuai dengan tingkat prioritasnya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Nilai Isu Lingkungan Hidup

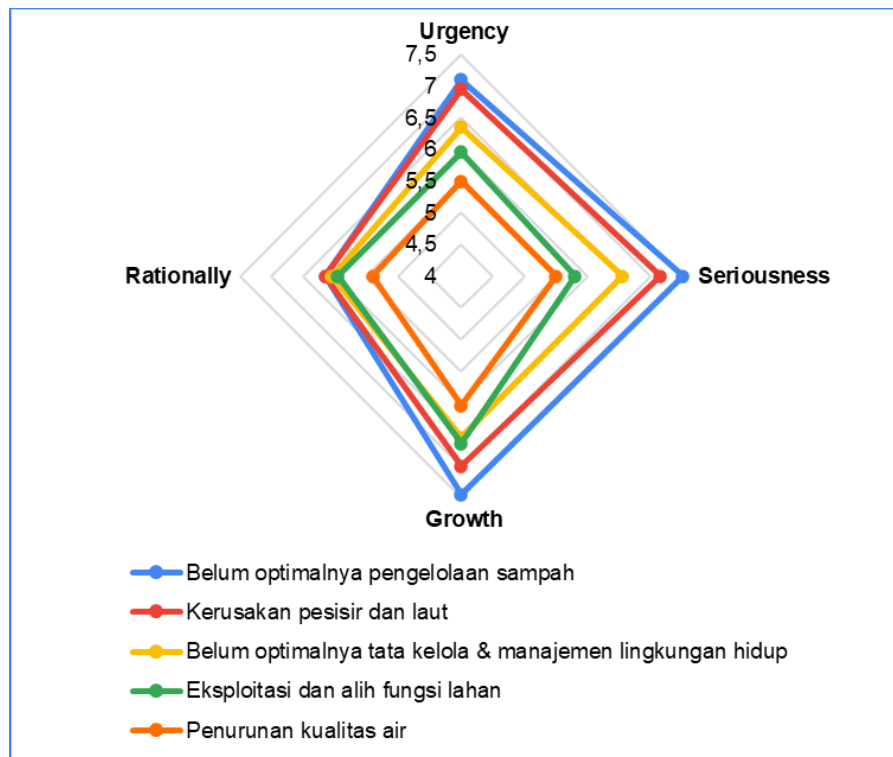
Isu Lingkungan Hidup	Total Skor				Total	Peringkat Prioritas
	Urgency	Seriousness	Growth	Rationally		
Belum optimalnya pengelolaan sampah	142	150	149	123	564	1
Kerusakan pesisir dan laut	139	143	140	123	545	2
Belum optimalnya tata kelola & manajemen lingkungan hidup	127	131	131	121	510	3
Masalah ketahanan pangan	125	125	127	115	492	4
Eksplorasi dan alih fungsi lahan	119	116	133	119	487	5
Penurunan kualitas air	110	110	121	108	449	6
Bencana akibat cuaca ekstim	105	112	109	113	439	7
Erosi dan sedimentasi	107	108	118	104	437	8
Peningkatan konsumsi energi fosil	105	114	116	99	434	9
Penurunan kualitas udara	100	100	120	102	422	10

Hasil pengolahan tersebut selanjutnya didiskusikan lebih lanjut oleh Tim Penulis dan Kelompok Kerja sehingga disepakati bersama bahwa masalah ketahanan pangan, yang sebagian besar karena masalah alih fungsi lahan pertanian dan masalah inflasi, akan dikelompokkan menjadi satu kesatuan dengan isu eksploitasi dan alih fungsi lahan. Permasalahan terkait inflasi menjadi bagian dari masalah perkotaan karena terkait langsung dengan penghidupan/kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dengan mempertimbangkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 yang meningkat 2,01 poin dari tahun sebelumnya (Yulianti, 2023), maka diputuskan bahwa masalah ketahanan pangan tidak menjadi isu yang dibahas tersendiri. Dengan

demikian, Kelompok Kerja menyetujui kelima isu lingkungan hidup daerah sesuai urutan prioritasnya sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan sampah,
2. Kerusakan pesisir dan laut,
3. Belum optimalnya tata kelola dan manajemen lingkungan hidup,
4. Eksploitasi dan alih fungsi lahan,
5. Penurunan kualitas air.

Perbandingan skala hasil penilaian kelima isu tersebut berdasarkan empat kriteria yang digunakan dapat disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3. 2 Perbandingan Nilai Keempat Kriteria dalam Isu Prioritas Lingkungan Hidup

Berdasarkan gambar di atas, menurut tingkat urgensinya, belum optimalnya pengelolaan sampah memiliki tingkat urgensi yang paling tinggi untuk segera ditangani dibandingkan isu-isu lainnya. Hasil ini dapat dimengerti karena beberapa alasan, seperti kondisi beberapa TPA sampah yang sudah melebihi kapasitasnya dan pengelolaannya yang cenderung menggunakan metode *landfill* yang merupakan bentuk peralihan dari *open dumping*

sehingga timbunan sampah yang tidak terkelola terus-menerus bertambah. Kondisi TPA yang sudah tidak layak tersebut sangat terlihat pada TPA Parit Enam di Kota Pangkalpinang yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan masalahnya. Penentuan lokasi TPA Regional yang belum ditetapkan hingga saat ini menaikkan tingkat urgensi pengelolaan sampah di Kepulauan Bangka Belitung. Pemrosesan akhir sampah sangat berperan dalam pengurangan timbunan sampah, selain upaya pengurangan sampah, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah yang bisa dilakukan mulai dari level konsumen.

Selain itu, isu belum optimalnya pengelolaan sampah juga memiliki tingkat *seriousness*, *growth*, dan *rationality* tertinggi. Keseriusan masalah yang timbul sebagai dampak pengelolaan sampah yang kurang tepat ataupun tidak optimal meliputi permasalahan kesehatan masyarakat, estetika & kebauan, banjir, munculnya area kumuh, pencemaran air, kerusakan habitat biota laut, hingga masalah pemanasan global. Timbunan sampah juga tidak terelakkan lagi akan terus bertambah seiring pertambahan penduduk dan aktivitas konsumsinya sehingga memiliki tingkat *growth* yang tinggi. Masalah pengelolaan sampah juga telah banyak diteliti dan dipelajari di berbagai bidang studi sehingga tersedia berbagai macam alternatif solusi untuk penyelesaiannya. Dengan demikian, tingkat *rationality*-nya juga tinggi.

Berikut ini diuraikan secara ringkas hasil analisis masing-masing isu prioritas menggunakan pendekatan DPSIR. Analisis tersebut telah dilakukan di Bab II disertai berbagai macam dukungan data yang terkait.

III.2 Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah

Berdasarkan hasil analisis menggunakan kerangka DPSIR yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, masalah belum optimalnya pengelolaan sampah timbul karena berbagai macam faktor pendorong dan penyebab. Faktor pendorong awalnya adalah faktor pertumbuhan penduduk dan

pertumbuhan ekonomi yang akhirnya menyebabkan kegiatan konsumsi yang tidak disertai dengan kesadaran dalam pengelolaan lingkungan. Hal tersebut menyebabkan perubahan kondisi lingkungan dengan bertambahnya timbulan sampah yang perlu dikelola. Di sisi lain, lahan TPA yang menjadi tempat pemrosesan akhir sampah semakin terbatas, terutama di daerah perkotaan. Berbagai dampak negatif telah dirasakan penduduk, terutama dampak kebauan dan estetika yang sangat jelas terlihat oleh mata.

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah mengacu pada berbagai skema untuk mengelola dan membuang sampah, bisa dengan membuang langsung, menghancurkan, mengolah, mendaur ulang, menggunakan kembali, atau mengendalikan timbulan sampah & limbah. Tujuan utama dari pengelolaan sampah dan limbah adalah untuk mengurangi jumlah bahan yang tidak dapat digunakan dan untuk mencegah potensi bahaya kesehatan dan lingkungan.

Pengelolaan limbah berkelanjutan (*sustainable waste management*) mengacu pada pengumpulan, pengangkutan, harga, dan pembuangan berbagai jenis sampah & limbah, dengan cara yang tidak membahayakan lingkungan, kesehatan manusia, atau generasi mendatang. Tujuan pengelolaan sampah berkelanjutan adalah untuk mengurangi jumlah sumber daya alam yang dikonsumsi, menggunakan kembali bahan yang diambil dari alam sebanyak mungkin, dan menghasilkan sampah seminimal mungkin. Konsep-konsep *sustainable waste management* ini telah banyak diteliti dan dimuat dalam regulasi persampahan yang ada di Indonesia, hanya saja penerapannya yang belum optimal.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, target

pengelolaan sampah pada tahun 2025 adalah 100% yang terdiri atas pengurangan sampah sebanyak 30% dan penanganan sampah sebanyak 70%. Berikut ini tersaji kondisi capaian pengelolaan sampah di Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan target Jakstrada.

Tabel 3. 2 Gap Capaian Pengelolaan Sampah dan Target Jakstrada

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Timbulan Sampah (kg/hari)	236.816,49	661.476,62	704.038,30	-	-	-
Sampah dikelola (kg/hari)	139.958,55	441.204,91	belum diketahui	-	-	-
Sampah dikelola (%)	59,10%	66,70%	belum diketahui	-	-	-
Pengurangan Sampah (%)	11,11%	12,97%	belum diketahui	-	-	-
Penanganan Sampah (%0	47,99%	53,73%	belum diketahui	-	-	-
Target Jakstrada	97,00%	98,00%	99,00%	99,00%	99,00%	100,00%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa *gap* antara capaian pengelolaan sampah (dari pengurangan dan penanganan sampah) masih jauh di bawah target dalam Jakstrada. *Gap* ini menjadi permasalahan yang harus segera diatasi, sekaligus menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan *sustainable waste management* yang efektif. Selain itu, dukungan data sangat diperlukan dalam penyusunan strategi maupun evaluasi pengelolaan sampah agar dapat diperbaiki di waktu yang akan datang. Keberhasilan dalam pengelolaan sampah dapat dilihat menggunakan beberapa pendekatan indikator kriteria keberhasilan dalam penyelesaian masalah keberlanjutan, yaitu:

1. *Environmentally sustainable*. Pengelolaan sampah selalu bertujuan untuk mencapai keberlanjutan lingkungan, apapun metode yang digunakan. Agar berkelanjutan secara lingkungan, maka dampak negatif yang timbul akibat pengelolaan sampah harus diminimalkan atau dikelola sehingga menjadi dampak positif.

2. *Economically profitable*. Pengelolaan sampah harus berkelanjutan secara ekonomi, yaitu menguntungkan masyarakat. Berbagai konsep ekonomi sirkular ataupun pendekatan konsep *zero waste* yang memanfaatkan sampah sebagai bahan baku untuk produk lainnya, seperti barang kerajinan, sumber energi, dan kompos semakin diminati karena menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.
3. *Technologically manageable*. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai teknologi pengelolaan sampah telah ditemukan dan dikaji kelayakannya untuk diterapkan.
4. *Socially acceptable*. Pengelolaan sampah yang dilakukan harus dapat diterima masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini yang paling menghambat penerapan pengelolaan sampah di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu terkait penerimaan masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan penetapan lokasi TPA.

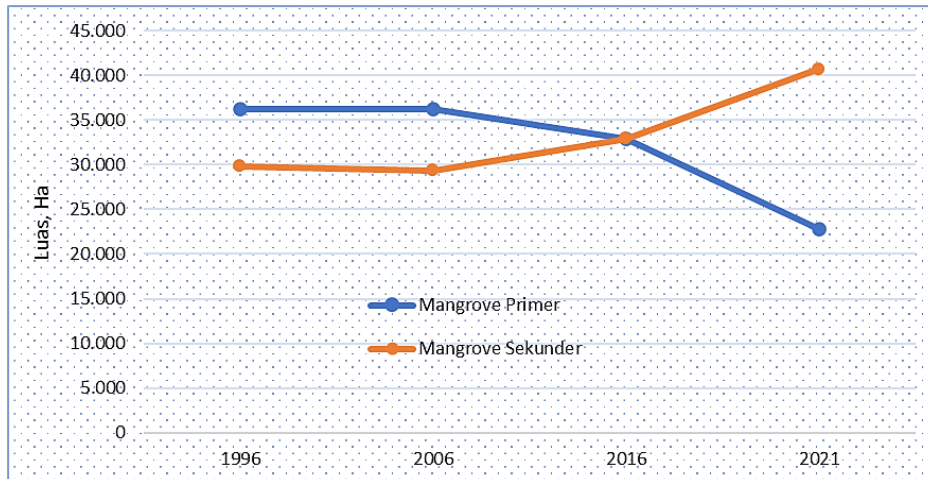
III.3 Kerusakan Pesisir dan Laut

Berdasarkan hasil analisis pada tata guna lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan pendekatan DPSIR, dapat diketahui bahwa kemudahan berinvestasi telah mendorong berbagai macam aktivitas alih fungsi lahan, termasuk alih fungsi lahan pesisir untuk dipergunakan sebagai lahan tambak udang. Kegiatan tambak udang yang dalam beberapa tahun terakhir marak dilakukan adalah salah satu aktivitas antropogenik manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kegiatan tambak udang telah menimbulkan tekanan pada kondisi lingkungan pesisir. Pemanfaatan ruang di wilayah pesisir untuk kegiatan budidaya udang yang seharusnya memperhatikan kesesuaian ruang, ternyata beberapa diantaranya telah merambah masuk ke wilayah sempadan pantai yang menjadi kawasan perlindungan setempat, bahkan ada yang berekspansi hingga memasuki kawasan hutan lindung. Selain aktivitas tambak udang di pesisir, pertambangan di wilayah laut, terutama tambang ilegal, juga menimbulkan tekanan pada kondisi pesisir dan laut.

Berbagai macam aktivitas eksploitasi sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut menimbulkan berbagai macam perubahan kondisi lingkungan maupun kondisi sosial-ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung. Di satu sisi, aktivitas-aktivitas tersebut meningkatkan pendapatan daerah, tetapi di sisi lain juga merusak lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dampak negatif yang timbul dari kegiatan/usaha belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, serta instrumen pengendalian kerusakan lingkungan belum berjalan optimal. Berikut ini adalah data utama yang dapat menunjukkan kondisi wilayah pesisir dan laut di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu kondisi mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Ketiga habitat ini berfungsi penting untuk melindungi wilayah pesisir dari bencana abrasi atau dari gempuran ombak, pemecah gelombang laut, menyediakan makanan & tempat berlindung biota laut, menjaga kelestarian biota laut, stabilisasi sedimen, dan keseimbangan ekosistem.

1. Kondisi tutupan mangrove

Pada gambar berikut terlihat tren perubahan tutupan mangrove primer yang masih alami dan mangrove sekunder yang telah mengalami kerusakan atau bekas tebangan. Dapat dilihat bahwa luasan mangrove primer semakin turun, sementara mangrove sekunder semakin meningkat. Hal ini menunjukkan terjadinya kerusakan mangrove sehingga tutupan mangrove primer berubah menjadi mangrove sekunder, atau terjadi penanaman/rehabilitasi mangrove yang tidak seimbang dengan laju pembukaan mangrove yang telah ada.



Gambar 3. 3 Perubahan Tutupan Mangrove Primer dan Sekunder

Sumber: Peta Penutupan Lahan 1996-2021 (data telah diolah)

2. Kondisi terumbu karang

Luas ekosistem terumbu karang yang tercatat dalam Dokumen RZWP3K yaitu seluas 17.744,85 Ha, dengan 12.474,54 Ha (70%) berkategori baik dan 5.270,31 Ha (30%) berkategori rusak. Hasil pengukuran lapangan di 23 titik wilayah perairan Pulau Bangka menunjukkan bahwa rata-rata persentase *live coral* sebesar 33%, sementara di 37 lokasi titik perairan Pulau Belitung menunjukkan rata-rata persentase *live coral* sebesar 49%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kerusakan terumbu karang yang semakin bertambah, sekaligus menunjukkan bahwa kerusakan terumbu karang di perairan Pulau Bangka lebih parah daripada perairan di Pulau Belitung. Aktivitas pembangunan dermaga serta penambangan timah di pesisir dan laut membuat laju sedimentasi meningkat dan hal ini berbahaya karena butiran sedimen dapat menutupi polip karang hingga menimbulkan kerusakan hingga kematian karang di wilayah tersebut.

3. Kondisi padang lamun

Berdasarkan dokumen RZWP3K, ekosistem padang lamun semula tersebar hampir di seluruh pesisir wilayah Pulau Belitung serta di pesisir timur Pulau Bangka dengan luasan sekitar 11.646,90 Ha. Berdasarkan

Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun, maka ekosistem lamun di Pulau Bangka masuk dalam kondisi buruk dengan status kurang kaya atau kurang sehat, sementara persentase tutupan lamun di Pulau Belitung menunjukkan tutupan lamun yang lebih merata dengan kondisi <29% dan masuk kategori rusak dengan status miskin. Di Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung, persentase tutupan lamunnya dikategorikan baik atau sehat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar padang lamun di Kepulauan Bangka Belitung kondisinya kurang baik

Selain kondisi ketiga habitat di atas, dari hasil analisis masalah perkotaan dapat diketahui bahwa timbulan sampah di perkotaan, khususnya Kota Pangkalpinang telah menyebar hingga ke daerah pantai karena terbawa arus sungai. Selain itu, perilaku yang kurang bertanggung jawab dari aktivitas pariwisata juga menyebabkan timbulan sampah yang tidak terkelola di area pantai. Berdasarkan hasil pemantauan dan hasil kegiatan bersih pantai, terlihat adanya komposisi sampah plastik yang cukup besar di daerah pantai.

Berdasarkan uraian kondisi ketiga habitat kunci di atas, serta kondisi timbulan sampah di pantai, maka dapat diketahui bahwa telah terjadi kerusakan di pesisir dan laut yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Dampak dari kerusakan ini telah terasa oleh nelayan yang hasil tangkapan ikannya berkurang, terganggunya estetika di beberapa pantai yang menjadi obyek wisata, serta kasus matinya biota laut. Dampak lain yang terlihat adalah adanya perubahan garis pantai dan penurunan keanekaragaman hayati. Dampak dari eksploitasi sumber daya pesisir dan laut yang kurang bertanggung jawab tentu bukan hanya di sektor lingkungan/ekologi, tetapi juga sektor sosial-ekonomi.

Berbagai respon dari pemerintah yang lebih tepat dan efektif sangat diperlukan untuk mengatasi isu ini, baik terkait kebijakan penataan ruang pesisir & laut, tata kelola pertambangan laut, maupun kebijakan ruang di darat yang aktivitasnya secara tidak langsung juga berdampak pada ekosistem pesisir dan laut.

III.4 Belum Optimalnya Tata Kelola dan Manajemen Lingkungan Hidup

Aktivitas antropogenik untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Aktivitas pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia tersebut, selain berdampak positif pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, juga berdampak negatif pada lingkungan. Pada akhirnya, dampak tersebut dirasakan oleh manusia sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Siklus ini selalu terjadi di lingkungan karena manusia adalah bagian dari lingkungan. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sudah dipastikan membentuk lingkungan buatan, seperti perkebunan, sawah, tambak, perumahan, industri, perkotaan, dan sebagainya. Keseimbangan antara lingkungan alami dan lingkungan buatan sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan.

Permasalahan lingkungan (pencemaran dan kerusakan lingkungan) sering terjadi karena terganggunya keseimbangan lingkungan alami dan buatan. Dalam rangka penyelesaian permasalahan lingkungan, maka tata kelola dan manajemen lingkungan sangat diperlukan. Manajemen lingkungan didefinisikan sebagai suatu pengelolaan yang membantu untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, mencegah terjadinya degradasi atau kerusakan lingkungan yang lebih buruk, serta menunjang kehidupan dan menjamin adanya pembangunan berkelanjutan (Utomo et al., 2015).

Definisi yang lebih luas melekat pada konsep tata kelola lingkungan (*environmental governance*). Tata kelola lingkungan adalah konsep atau kerangka pikir pengelolaan negara dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup melalui interaksinya dengan rakyat, yang bertujuan untuk memastikan arah dan derajat perubahan lingkungan sesuai dengan yang bisa ditoleransi oleh ekosistem, bukan kemampuan negara mengubah kondisi bio-fisik (Purniawati et al., 2020). Pemerintahan yang telah

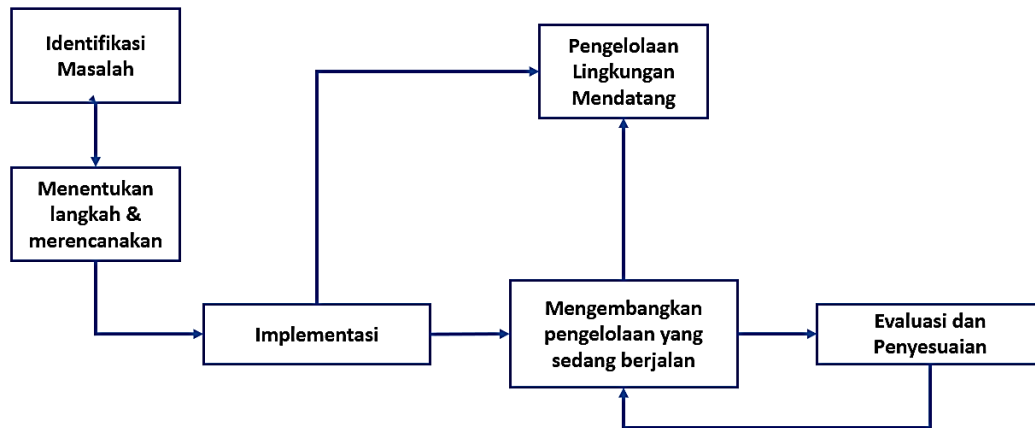
menerapkan *good governance* belum tentu memiliki kepedulian pada keberlanjutan lingkungan, sehingga konsep *good governance* yang selama ini dianut perlu menerapkan prinsip keberlanjutan lingkungan dalam kebijakan-kebijakannya sehingga menjadi *good environmental governance*. Manajemen lingkungan adalah hal yang harus dilakukan dalam *good environmental governance*.

Berdasarkan hasil analisis Tata Kelola Lingkungan di bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa berbagai macam pemanfaatan jasa dan sumber daya lingkungan, serta persetujuan kegiatan/usaha telah mendorong dan memberikan tekanan pada kondisi lingkungan. Dampak dari perubahan kondisi lingkungan (munculnya berbagai permasalahan lingkungan) dirasakan oleh masyarakat sehingga muncul pengaduan dari masyarakat kepada pemerintah daerah. Masalah yang banyak diadukan oleh masyarakat adalah masalah yang terkait dengan dampak kegiatan tambak udang, pertambangan di kawasan mangrove, pencemaran udara dari boiler pabrik, tumpang tindih peruntukan tambak dengan hutan tanaman industri, dugaan pencemaran sungai dari limbah sawit, perambahan kawasan hutan, pembukaan lahan dan pertambangan timah ilegal, serta pencemaran dan pembuangan limbah ke laut (Tabel 2.6.7).

Tipe/karakteristik permasalahan yang diadukan oleh masyarakat tersebut banyak sekali yang berkaitan dengan tata kelola dan manajemen lingkungan. Tumpang tindih peruntukan lahan, kesesuaian ruang, pengelolaan dampak pencemaran, aspek legalitas, hingga penegakan hukum mewarnai karakteristik masalah yang diadukan oleh masyarakat. Hal itu menunjukkan adanya permasalahan dalam tata kelola dan manajemen lingkungan yang selama ini diterapkan.

Permasalahan dapat terjadi pada konsep atau cara berpikir yang digunakan, pendekatan yang dilakukan, masalah pada pelaku/aparat, ataupun masalah sumber daya manusia. Permasalahan tata kelola dan manajemen lingkungan ini juga nampak pada masalah pengelolaan sampah dan penataan kota yang masih harus dioptimalkan. Kejadian banjir dan

genangan air yang sering terjadi di area perkotaan menunjukkan buruknya perencanaan dalam pembangunan perkotaan (pola ini tidak hanya terjadi di perkotaan yang ada di Kep. Bangka Belitung, tetapi juga perkotaan lain di Indonesia).



Gambar 3. 4 Praktik Manajemen Lingkungan yang Banyak Diadopsi Di Indonesia

Sumber: (Utomo et al., 2015), telah disusun ulang

Gambar di atas menyajikan alur praktik manajemen lingkungan yang banyak diadopsi di Indonesia, mulai dari identifikasi masalah dan kebutuhan, hingga tersusunnya rencana pengelolaan yang akan datang. Ada banyak pendekatan dan metode yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen lingkungan, namun pada dasarnya, untuk dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan, maka harus dianut prinsip-prinsip pokok: *environmentally sustainable*, *socially acceptable*, *economically profitable*, dan *technologically manageable* (Utomo et al., 2015). Contoh kasus di Kepulauan Bangka Belitung yang belum selesai permasalahannya karena tidak dipenuhinya prinsip-prinsip tersebut adalah permasalahan pengelolaan sampah. Pembuatan TPA Regional yang hingga saat ini tidak *socially acceptable* dan *economically profitable* ternyata belum dapat diwujudkan.

Tata kelola dan manajemen lingkungan menjadi isu penting karena kondisi permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas. Selain itu, tata kelola dan manajemen lingkungan menekankan keterkaitan multi-sektor

dan multi-aktor sehingga menambah kompleksitas masalahnya. Seperti yang telah disebutkan di bab sebelumnya, bahwa pengelolaan lingkungan tidak bisa dieksekusi secara parsial, namun menuntut adanya pengelolaan secara komprehensif dan berkelanjutan.

III.5 Eksploitasi dan Alih Fungsi Lahan

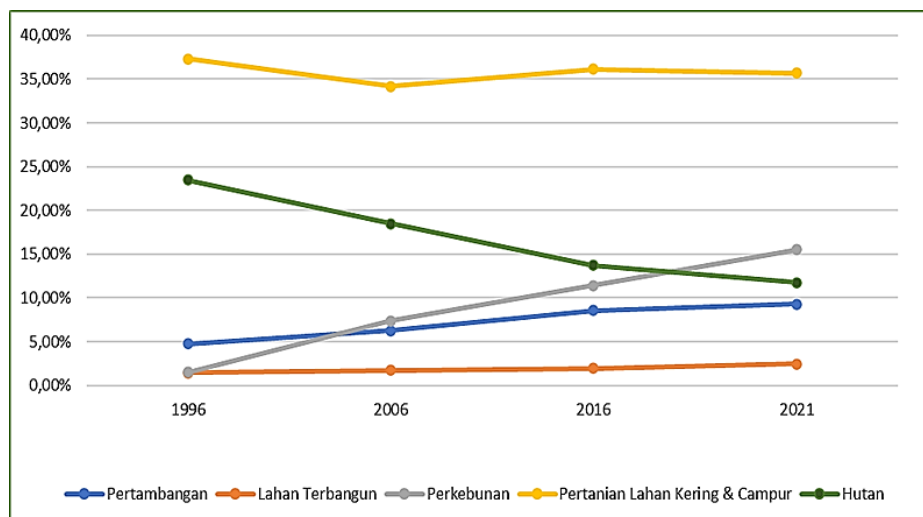
Analisis Tata Guna Lahan pada bab sebelumnya menunjukkan adanya kecenderungan eksploitasi lahan yang akan terus berlangsung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kekayaan alam di Kepulauan Bangka Belitung memang menjadi potensi pembangunan ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini terbukti dengan komposisi sektor pertambangan, konstruksi, dan perkebunan/pertanian yang banyak memanfaatkan lahan di dalam PDRB provinsi yang cukup besar. Selain itu, pada aspek perkotaan, kebutuhan lahan permukiman di area perkotaan tidak terelakkan lagi harus selalu dipenuhi karena menyangkut kebutuhan pokok penduduk yang semakin padat.

Di sisi lain, eksploitasi lahan untuk aktivitas-aktivitas di atas menimbulkan berbagai alih fungsi lahan dan memberi tekanan pada kondisi lingkungan sehingga menimbulkan dampak yang kembali dirasakan penduduk. Berbagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang mengeksplotasi lahan tersebut telah dibahas di bab sebelumnya, di antaranya adalah penurunan kemampuan lingkungan untuk menyediakan jasa/layanan, baik jasa penyediaan, pengaturan, maupun jasa pendukung. Dampak yang sangat terlihat adalah pada jasa penyediaan air, pengaturan air, pencegahan banjir, dan pengaturan siklus hara. Dampak lainnya adalah peningkatan emisi GRK dan perubahan iklim, kejadian bencana banjir, dan penurunan keanekaragaman hayati. Kompleksitas permasalahan tata guna lahan yang selalu diperlukan berbagai sektor untuk menjalankan aktivitas ekonomi sudah tidak diragukan lagi. Hal ini menyebabkan permasalahan lahan yang belum selesai hingga saat ini di Kepulauan Bangka Belitung, baik

permasalahan pada pola ruangnya, tutupan vegetasinya, jasa lingkungannya, konflik ruang, dan sebagainya.

Aktivitas antropogenik yang memanfaatkan lahan selalu mendorong terjadinya alih fungsi lahan, sementara kecenderungan alih fungsi lahan adalah ke arah negatif, yaitu mengubah lahan yang semula bervegetasi menjadi lahan terbuka. Di sisi lain, aktivitas pemanfaatan lahan tersebut memberikan keuntungan ekonomi yang tidak sepadan dengan kerusakan yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, banyak sekali dijumpai penggunaan ruang/lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau rencana pola ruangnya. Sebagai gambaran tentang alih fungsi lahan di Kepulauan Bangka Belitung, berikut ini tersaji tren luasan beberapa jenis penggunaan lahan.



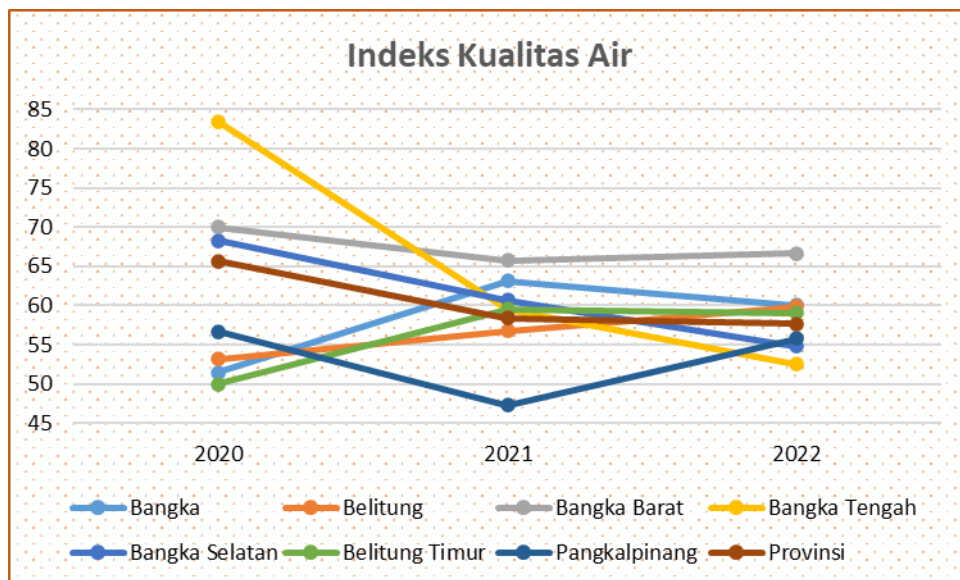
Gambar 3. 5 Tren Alih Fungsi Lahan di Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa alih fungsi lahan hutan banyak terjadi, sementara penggunaan lahan untuk aktivitas perkebunan, pertambangan, dan permukiman semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tersebut menjadi sumber terjadinya alih fungsi lahan. Berdasarkan uraian di atas, dan data pendukung lainnya yang sangat kompleks dan banyak dari dokumen lain, maka alih fungsi lahan beserta eksploitasinya menjadi isu yang sangat penting dan masih perlu

diselesaikan, meskipun isu ini selalu muncul sepanjang tahun. Selain itu, Kepulauan Bangka Belitung yang ciri khasnya adalah pertambangan timah yang sifatnya membuka lahan, tata guna lahan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

III.6 Penurunan Kualitas Air

Kualitas air di Kepulauan Bangka Belitung dapat ditandai dengan nilai IKA yang menjadi komponen IKLH. Berikut ini tersaji gambar yang menunjukkan kecenderungan nilai IKA dari tahun ke tahun. Berdasarkan gambar berikut, dapat diketahui bahwa kualitas air cenderung mengalami penurunan. Di antara tujuh kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung, hanya Kabupaten Bangka dan Belitung Timur yang memiliki kecenderungan untuk naik IKA-nya. Penurunan kualitas air yang terjadi secara perlahan ini akan semakin parah jika tidak dikendalikan sejak dini.



Gambar 3. 6 Tren Kualitas Air yang Ditandai dengan IKA

Berdasarkan hasil analisis kualitas air menggunakan pendekatan DPSIR di bab sebelumnya dapat diketahui bahwa aktivitas pemanfaatan air dan tata guna lahan adalah faktor pendorong sekaligus penyebab terjadinya pencemaran air, erosi dan sedimentasi, yang akhirnya menurunkan kualitas

air. Hal ini tentu saja menimbulkan dampak negatif berupa penurunan kesehatan masyarakat, kerugian ekonomi, kerusakan ekosistem, hingga perubahan iklim. Berdasarkan hasil analisis ini terlihat bahwa dampak negatif dari penurunan kualitas air kembali ke manusia ini sendiri sebagai pelaku ekonomi.

Mengacu pada data hasil pemantauan, dapat dikatakan bahwa semua sungai yang dipantau di Kepulauan Bangka Belitung ada dalam kondisi tercemar, terlepas dari apapun tingkat tercemarnya. Berdasarkan fakta kondisi IKA dan data kualitas air dalam bab sebelumnya (Tabel 2.2.6), dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan kualitas air di Kepulauan Bangka Belitung masih sangat kurang, padahal aktivitas antropogenik yang menjadi penyebab penurunan kualitas air sangat banyak dan beragam, baik dari aktivitas rumah tangga, industri, pertambangan, perkebunan, pertanian, dan sebagainya. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah provinsi untuk menyusun strategi dan menerapkan pengelolaan kualitas air yang lebih berkelanjutan.

BAB IV

INOVASI DAERAH

DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

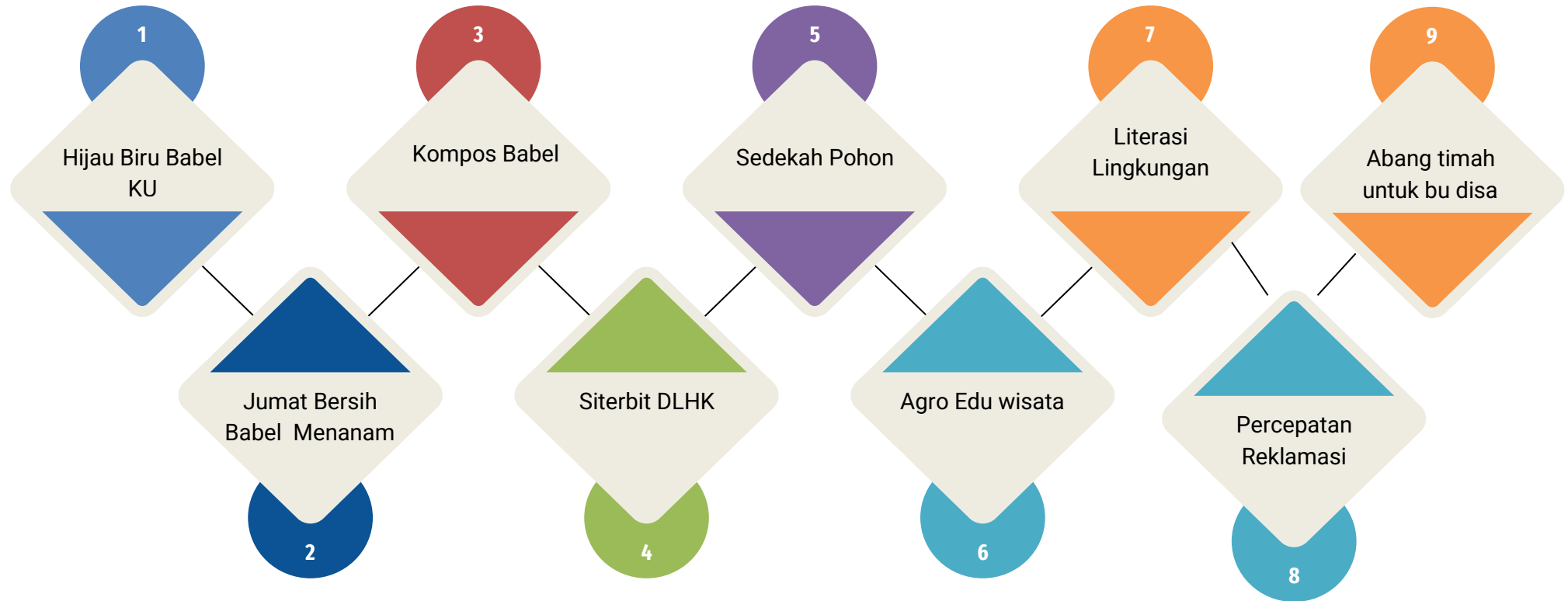
Berbagai isu strategis dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2023 telah di sajikan pada bab 2 dan bab 3. Perkembangan isu strategis ini kedepan akan semakin besar dengan faktor-faktor pendorong (*Driving Force*) terhadap isu tersebut. Tentunya penyelesaian isu prioritas yang dihadapi tidak dapat dalam jangka pendek, namun membutuhkan keterpaduan, jejaring relasi yang kuat antara pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat karena permasalahan-permasalahan lingkungan hidup bukan merupakan permasalahan teknis semata namun harus disikapi dengan multidimensi dan multidisiplin.

Peran inovasi sangat diperlukan untuk menciptakan terobosan dan solusi baru untuk mengatasi kondisi eksisting seperti pencemaran serta kerusakan Lingkungan hidup dan kedepan mampu memberikan solusi untuk meminimalkan degradasi Lingkungan. Dalam rangka melaksanakan misi pembangunan dan mencapai visi pembangunan jangka panjang, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama masyarakat, perusahaan dan akademisi telah melakukan beberapa inovasi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup. Tentunya berbagai inovasi ini sebagai bentuk upaya pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten /Kota, akademisi, Masyarakat dan Pelaku Usaha yang secara bersinergi melakukan upaya percepatan pemulihan lingkungan. Esensi sebuah inovasi diantaranya terjadi pertukaran gagasan, ide –ide baru sehingga terjadi perubahan kearah yang lebih baik dan dapat diadopsi oleh masyarakat sehingga terjadi pembelajaran kolektif untuk kearah perubahan yang lebih baik terutama dalam perbaikan lingkungan.

IV.I. Inovasi Pengelolaan Lahan

Permasalahan Alih fungsi lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi isu prioritas yang harus dilakukan berbagai intervensi kebijakan sehingga degradasi terhadap lahan dapat di minimalkan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menghadapi berbagai permasalahan kerusakan dan degradasi terhadap lingkungan diantaranya luasnya lahan kritis yang salah satunya disebabkan oleh aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan data lahan kritis yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung total **lahan kritis dan sangat kritis 167.104 Hektar** dengan sebaran lahan kritis hampir di semua Kabupaten/Kota dengan proporsi lahan kritis di Kabupaten Belitung Timur 38.884 Hektar (23,27 % dari total lahan Kritis), Kabupaten Bangka Selatan 31.232 Hektar (18,69 % dari luas total lahan kritis) , Kabupaten Bangka Tengah 30.948 Hektar (18,52 % dari total lahan kritis), Kabupaten Bangka 24.463 Hektar (14,64 % dari luas total lahan kritis), Kabupaten Belitung 21.919 Hektar (13,12 % dari luas total lahan kritis), Kabupaten Bangka Barat 19.592 Hektar (11,71 % dari luas total) dan Kota Pangkalpinang 96 Hektar (0,06 % dari luas total lahan kritis). Selain itu Indeks Kualitas Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengalami degradasi pada tahun 2022 indeks kualitas lahan sebesar 39,28 dan turun 0,82 poin dari tahun 2021 sebesar 40,1. Tentunya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan berbagai upaya sebagai bentuk tanggung jawab dengan melakukan berbagai perbaikan dan inovasi sebagai berikut:

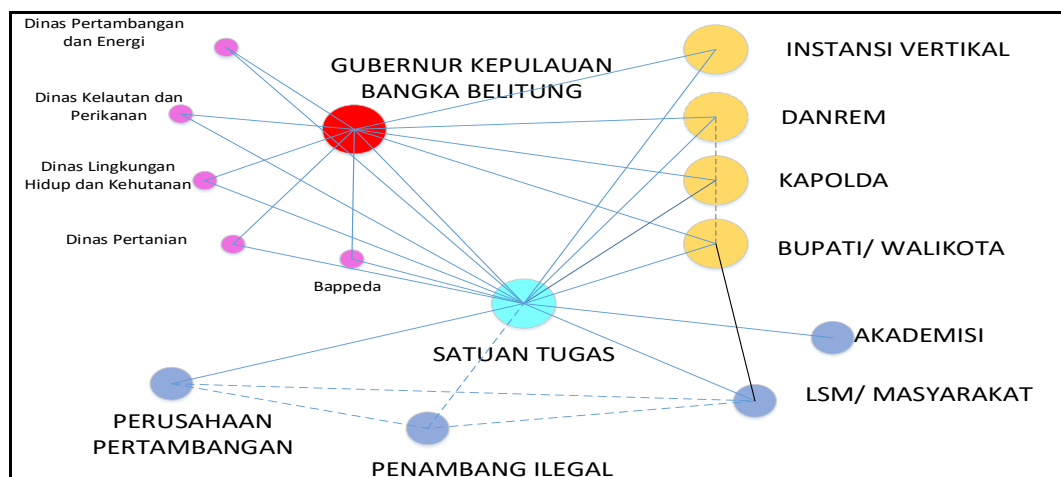
1. Inovasi Untuk Tata Guna Lahan (Isu Strategis DIKPLHD Peningkatan Eksploitasi dan Alih Fungsi Lahan)



Gambar 4.1 Visualisasi Skematik Inovasi Tata Guna Lahan

1. Hijau Biru BabelKu

Inovasi “Hijau Biru Babelku” merupakan inovasi yang diinisiasi oleh PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berangkat dari kerusakan lingkungan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akibat pertambangan baik di darat maupun di wilayah pesisir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung harus dilakukan upaya untuk meminimalkan kerusakan lahan dengan melakukan penanaman kembali lahan-lahan kritis akibat aktivitas pertambangan. Pernyataan PJ. Gubernur “Gerakan ini harus terakomodir dan tidak menunggu lagi, sebab akan terus ditunda, siapkan data dan peta lahan yang akan ditanami”.



Gambar 4. 2 Jejaring Inovasi Hijau Biru BabelKu

Berangkat dari semangat menghijaukan kembali lahan pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, inisiasi program Hijau Biru Babelku oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membutuhkan peran berbagai lembaga secara massif. Sejak di *launching* program ini berbagai pihak dilibatkan secara aktif diantaranya Bupati dan walikota, Kapolda, Danrem serta peranserta masyarakat secara massif sehingga inovasi yang di inisiasi Gubernur ini dapat secara inklusif bagi perbaikan lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung.

Sabtu 09 Juli 2022, 07:59 WIB

Program Hijau Biru Babelku Perbaiki Kualitas Lingkungan di Babel

Mediaindonesia.com | Nusantara



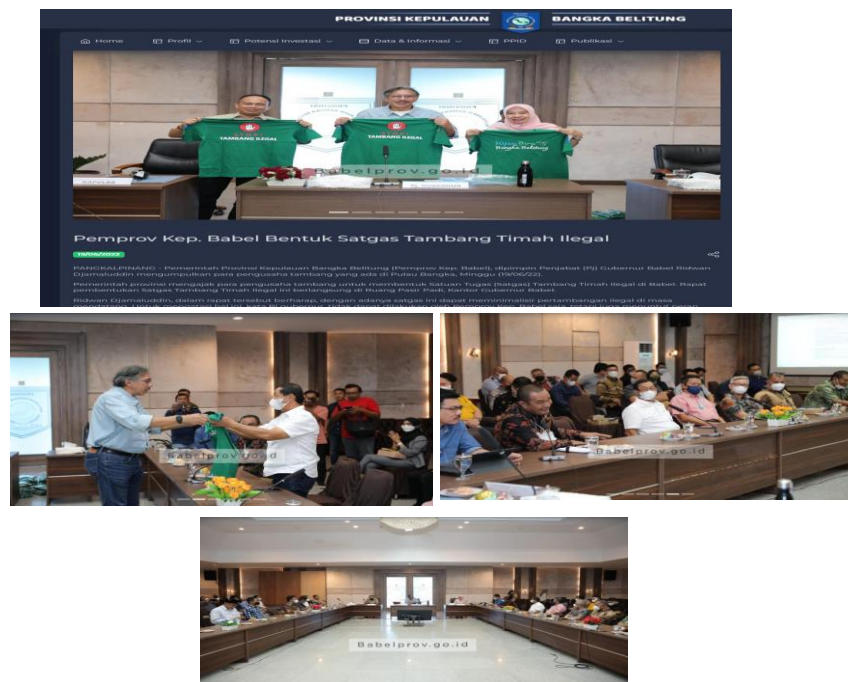
PENJABAT (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel), Ridwan Djamaluddin kembali mengagas program penanaman hutan di Kep. Babel.



Gambar 4.3 Inisiasi Awal Dan Launching Program Hijau Biru Babelku

Keterlibatan secara masiff berbagai *stakeholder* dalam program ini memegang kunci keberhasilan inovasi yang dilakukan. Program ini tidak hanya sekedar seremonial belaka kongkritnya dilakukan berbagai tahapan program diantaranya:

1. Pembentukan Satgas Tambang Timah Ilegal



Gambar 4.4 Pembentukan satgas Pertambangan Ilegal

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dipimpin PJ. Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin mengumpulkan para pengusaha tambang yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah provinsi mengajak para pengusaha tambang untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tambang Timah Ilegal di Babel. Rapat pembentukan Satgas Tambang Timah Ilegal ini berlangsung di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel.



Gambar 4.5 Kegiatan Hijau Biru Babelku

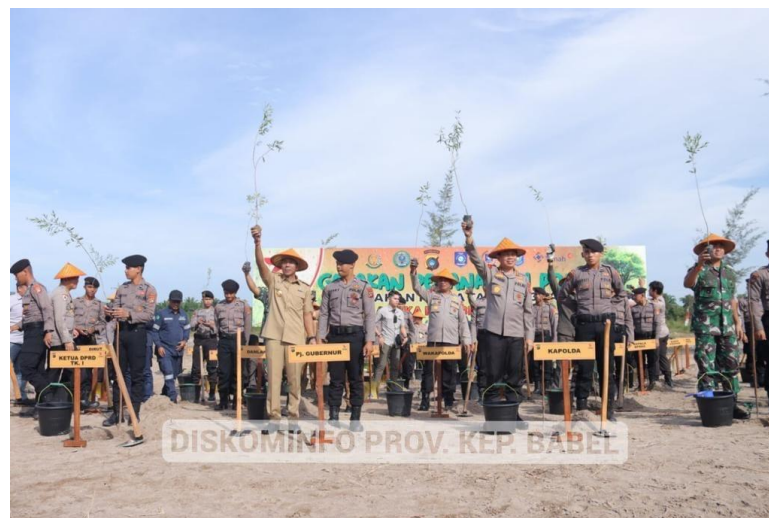
PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin, dalam rapat tersebut berharap, dengan adanya satgas ini dapat meminimalisir pertambangan ilegal di masa mendatang. Untuk mengatasi hal ini, tidak dapat dilakukan oleh Pemprov Kep. Babel saja, tetapi juga menuntut peran masyarakat, serta pihak keamanan. Gubernur meminta para kolektor bijih timah agar mulai sekarang tidak lagi membeli bijih timah dari penambang ilegal, sebagai salah satu langkah menertibkan tambang timah ilegal ini. Kebijakan ini, katanya, bukan untuk menutup usaha masyarakat, tetapi menjalankan pertambangan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah. ***"Saya ingin agar tidak ada pembelian dari pasir timah yang ditambang dari tambang ilegal."***

Kalau itu bisa kita laksanakan, maka tambang ilegal akan berhenti dengan sendirinya,"

Pada pembentukan satgas ini mendapat dukungan penuh dari Kapolda Bangka Belitung, Kejati Babel, Danrem para pelaku pertambangan. Dengan inisiasi program ini diharapkan peran berbagai stakeholder dapat meningkatkan perbaikan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


2. Program Jum'at Bersih dan Babel Menanam

Esensi sebuah inovasi adalah keberlanjutan dan apakah sebuah inovasi tersebut memberikan dampak bagi perbaikan kehidupan kita, terutama kualitas lingkungan. Melanjutkan Inovasi terdahulu, **PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Bapak Suganda Pandapotan Pasaribu** menginisiasi Program Jum'at Bersih dan Babel Menanam. Gerakan Babel menanam ini dilengkapi instruksi langsung oleh PJ.Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan surat edaran yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), masyarakat, pemerintah Kabupaten/Kota.



Gambar 4.6 Program Penanaman yang dilakukan oleh PJ. Gubernur Babel Bapak Suganda Pandapotan Pasaribu

PJ. Gubernur berkomitmen untuk melakukan perbaikan lahan terutama lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti pernyataan yang disampaikan dalam acara penanamna pohon sebagai berikut: "Pohon merupakan simbol dari kehidupan, pertumbuhan, dan keberlanjutan. Setiap pohon yang ditanam hari ini, adalah langkah maju dalam menjaga bumi. Mari kita lanjutkan penanaman pohon ini dengan penuh semangat. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjaga lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang,".


GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Pangkalpinang, 26 April 2023

Nomor : 660 / 0193 / DLHK
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Gerakan Jumat Bersih dan Babel Menanam


Yth.
Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di -
TEMPAT

Dalam upaya melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, diketahui bahwa salah satu elemen penting dalam pengelolaan sampah adalah pengurangan sampah yang dihasilkan oleh kegiatan perkantoran. Dan untuk meningkatkan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu dilaksanakan gerakan menanam di lahan-lahan kritis.

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui **Program dan Aksi Menuju Babel Luar Biasa dan Modern** diminta kepada Saudara untuk menggalakkan di Perangkat Daerah masing-masing **Gerakan Jumat Bersih dan Gerakan Babel Menanam** dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyediakan sarana pemilah sampah untuk jenis organik dan anorganik serta memilah dan mengumpulkan sampah tersebut dalam kemasan berbeda;
2. Menjaga kebersihan dalam dan luar masing-masing kantor dan melakukan pembinaan terhadap kantin untuk mengurangi penyediaan makanan yang menggunakan kemasan berbahan plastik 1 (satu) kali pakai;
3. Membantu memelihara kebersihan, kerapian trotoar dan median jalan pada masing-masing kantor dan sekitarnya. Untuk lokasi trotoar dan median jalan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah adalah sesuai dengan warna OPD masing-masing sebagaimana terlampir. Peta lokasi dapat diunduh di <http://bit.ly/petaiklasifikasijumbatbersih>;
4. Melakukan penyetoran sampah yang dapat di daur ulang kepada Bank Sampah terdekat dan yang telah ditunjuk Pemerintah Daerah. Khusus kantor yang berdomisili di Kompleks Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dapat menyortir kepada Bank Sampah "El Ha Ka" dengan kontak person Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Perangkat Daerah diminta untuk dapat menjaga keasrian kantor masing-masing dengan menanam pohon/tanaman hias dan jika ada kegiatan Family Gathering atau kegiatan lapangan lainnya diharapkan dapat dilaksanakan kegiatan menanam. Untuk bibit tanaman dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


SDGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Faximile (0717) 439320 Pangkalpinang 33148 Email : sektadprovbabel@babelprov.go.id


GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Pangkalpinang, 26 April 2023

Nomor : 660 / 0193 / DLHK
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Adipura Tahun 2023

Yth.
Kepala
Bupati/Walikota
se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di -
Tempat

Menujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/SETJEN/MENLHK/KUM.1/10/2019 tentang Adipura, bahwa Adipura merupakan Instrumen pengawasan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh, dan berkelanjutan.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal terkait dengan pelaksanaan Adipura Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Agar dapat mengintegrasikan **"Program dan Aksi menuju Babel Luar Biasa dan Modern"** dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu dengan menggaikikan **Gerakan Jumat Bersih dan Gerakan Babel Menanam** di daerah masing-masing;
2. Klasifikasi Kabupaten/Kota yang dilakukan pemantauan adalah klasifikasi 1 sampai dengan klasifikasi 4, oleh karena itu diharapkan untuk melakukan peningkatan terhadap status jakstrada, kapasitas pengelolaan sampah, dan operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dalam hal ini Bupati dan Walikota dapat menugaskan operator dari Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan entry data pengelolaan sampah ke aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) secara lengkap serta melakukan pengelolaan sampah dari setiap sumber, khususnya sumber yang menjadi titik pantau Adipura;
3. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) perlu diupayakan persiapan yang lebih baik untuk pencapaian klasifikasi Adipura di tahun-tahun yang akan datang;
4. Terdapat indikator penilaian tambahan diluar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.76/SETJEN/MENLHK/KUM.1/10/2019 tentang Adipura yaitu kuantitas kampung iklim di daerah yang di pantau;
5. Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat mengupayakan dan mengoptimalkan seluruh indikator-indikator penilaian agar memenuhi standar yang ditentukan, sehingga seluruh Kabupaten/Kota dapat menerima Anugerah Adipura Tahun 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


SDGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Faximile (0717) 439320 Pangkalpinang 33148 Email : sektadprovbabel@babelprov.go.id

Gambar 4.7 Edaran Gubernur untuk Jumat bersih dan Babel Menanam

4. KOMPOS BABEL

Permasalahan Degradasi lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akibat berbagai aktifitas menyebabkan makin bertambahnya lahan kritis. Untuk melakukan perbaikan kualitas lahan tentunya membutuhkan usaha yang cukup besar karena lahan kritis membutuhkan treatment lahan sebelum dilakukan proses reklamasi/ penanaman kembali. Kehadiran inovasi kompos Babel menjawab permasalahan ini, inovasi ini memang telah berjalan dan dalam DIKPLHD tahun 2021 ini Kompos Babel masih dipandang sangat penting, karena keberhasilan sebuah inovasi bisa dilihat seberapa inklusif sebuah inovasi tersebut dapat diterapkan dan fungsional sehingga memberikan manfaat yang besar bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hadirnya inovasi kompos blok ini di khususkan pada perbaikan lahan eks tambang. Lahan-lahan bekas tambang ini akan berubah menjadi lahan kritis, yaitu lahan yang tidak produktif lagi karena kandungan unsur haranya yang minim. Pemulihan kualitas lahan kritis bekas tambang memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan tidak mungkin untuk memulihkan kondisi lahan utuh seperti semula. Langkah-langkah yang mungkin dilakukan, di antaranya adalah melakukan reklamasi atau rehabilitasi terhadap lahan bekas tambang tersebut. Mengingat kondisi lahan kritis yang kandungan haranya sangat sedikit, maka proses penanaman sangat sulit dilakukan. Mengatasi hal tersebut, muncul inovasi pemberian “Kompos Babel” pada lahan-lahan bekas tambang sebelum dilakukan penanaman, yang diinisiasi oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Baturusa Cerucuk.



Gambar 4.8 Proses Pembuatan Kompos Babel

Kompos Babel ini terbuat dari bahan-bahan utama yang sangat mudah ditemui di lingkungan Bangka Belitung, seperti seresah dan kompos ternak. Seresah merupakan sampah-sampah organik yang berupa tumpukan dedaunan, ranting, dan sisa vegetasi lainnya yang sudah mengering dan berubah dari warna aslinya. Komposisi bahan yang digunakan untuk membuat Kompos Babel adalah 50% seresah dan 50% kompos ternak.

Penggunaan Kompos Babel untuk penanganan lahan bekas tambang memberikan beberapa kelebihan sebagai berikut ini.

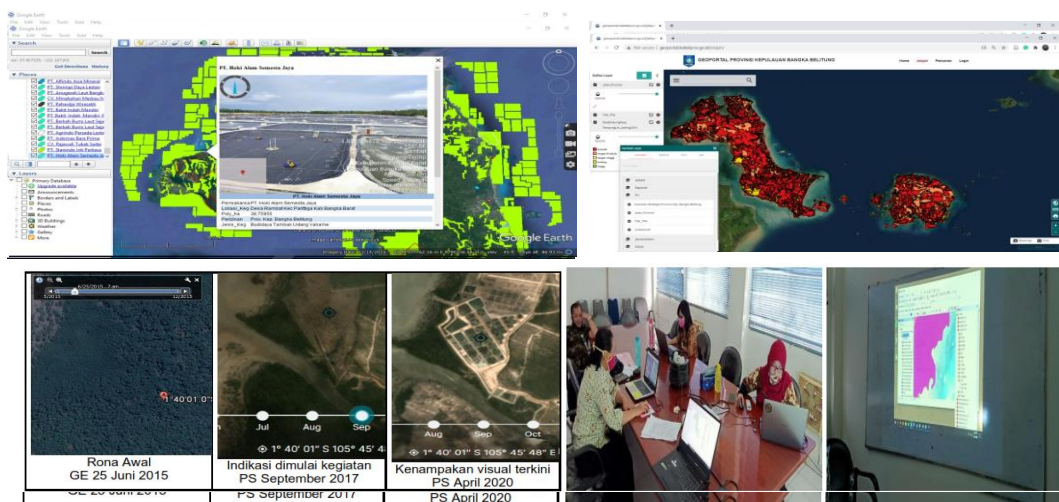
1. Lebih praktis karena bentuknya blok dan mudah dibawa ke lokasi penanaman.
2. Komposisi nutrisi bagi tanaman sesuai, dan kebutuhan nutrisi tanaman dapat terpenuhi selama 2 tahun (pertumbuhan tanaman terjamin).
3. Lebih efisien dalam pembiayaan dan pemeliharaan dibanding produk serupa.

Selain Kompos Babel, bentuk inovasi lainnya di bidang pengelolaan lahan di Kepulauan Bangka Belitung yang teridentifikasi adalah proses pemanfaatan kearifan lokal di Desa Jada Barin untuk menjaga dan mengelola lahan-lahan milik desa agar tidak dipergunakan oleh pihak lain, yang selanjutnya lahan-lahan desa ini dimanfaatkan dan diolah untuk perkebunan karet, hutan desa, dan lain-lain demi pelestarian lingkungan.

Hasil dari pengolahan lahan desa ini digunakan untuk pembiayaan biaya kesehatan dan pendidikan bagi warga desa yang kekurangan.

4. Aplikasi “Si Terbit DLHK”

Tentunya permasalahan tata guna lahan dan alih fungsi lahan dimulai dari penggunaan dan pemanfaatan ruang. Selain memastikan berbagai penggunaan dan pemanfaatan ruang melalui fungsi Forum penataan ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga sesuai aturan Rencana Tata Ruang Wilayah baik Provinsi maupun rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan trobosan dengan inovasinya yaitu “Si Terbit DLHK” merupakan inovasi yang dapat digunakan dalam pemberian perizinan, melihat tumpang tindih penggunaan lahan serta perubahan penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Aplikasi ini berbasis “Sistim informasi perizinan lingkungan terintegrasi, mudah diakses masyarakat berbasis teknologi untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas serta Akuntabilitas kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis spasial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”.



Gambar 4. 9 Aplikasi “Si Terbit DLHK” dan proses pengecekan dan pemantauan penggunaan lahan

Dengan penggunaan aplikasi ini selain dimanfaatkan untuk perizinan atau persetujuan izin lingkungan, aplikasi ini dapat digunakan dalam proses perencanaan pengelolaan lingkungan hidup berbasis spasial, sehingga perencanaan lingkungan dapat secara integrative, tematik dan spasial dan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan lingkungan dapat dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pemantauan kerusakan pesisir dan laut juga dapat menggunakan aplikasi ini seperti kerusakan ekosistem mangrove serta alih fungsi kawasan pesisir didukung dengan pengecekan citra satelit sehingga memberikan gambaran yang cukup komprehensif terkait perubahan rona lingkungan dari awal sampai perubahan yang terjadi.

5. SEDEKAH POHON

Inovasi selanjutnya dalam pengelolaann lahan yang menjadi isu prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu **SEDEKAH POHON**. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perbaikan kualitas lahan dengan tigeline "*menanam untutk amal jariah*". Diharapkan timbul kesadaran kolektif masyarakat dalam meningkatkan kegiatan penghijauan dengan menanam pohon sebagai bentuk adopsi dari inovasi ini. Pohon yang ditanam akan memberikan manfaat secara ekologis dan sedekah jariah merupakan sedekah yang akan terus mengalir pahalanya. Maka manfaat pohon itu akan terus mengalir pahala sedekah jariyahnya meski si penanam pohon telah meninggal. Tentunya sukses kegiatan ini selain didukung oleh inisiator inovasi seperti Dinas Lingkungan Hidup, LSM lingkungan, masyarakat serta swasta juga harus didukung oleh tokoh-tokoh agama. Berbagai kegiatan sedekah pohon telah terdokumentasi dan dilaksanakan pada tahun 2019-2020 diantaranya sebagai berikut:



Gambar 4.10 Kegiatan Sedekah Pohon

6. Agro Edu Wisata Inovasi Perusahaan Dengan Pemerintah Daerah Bangka Belitung Dan Masyarakat

Selain inovasi yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah, Keterlibatan masyarakat, pelaku usaha dan perusahaan memegang peranan penting dalam keberhasilan sebuah inovasi, sehingga inovasi bisa diterapkan secara inklusif kesemua lapisan masyarakat dan pertukaran gagasan baru bisa diimplemetasikan. Berbagai inovasi juga dilakukan dan diinisiasi oleh berbagai perusahaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengatasi permasalahan lahan. Berbagai inovasi ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap reklamasi lahan dengan memberikan konsep tidak hanya reklamasi secara umum tapi adanya peningkatan ekonomi dari pelaksanaan inovasi yang diterapkan misalnya yang dilakukan oleh PT. Timah dengan sinergitas dengan pemerintah daerah, PT. Sahabat Mewah Makmur (SMM) di Belitung sebagai berikut:

PT. Timah, Tbk Agro Eduwisata Serta Pemanfaatan Kolong Pasca Tambang



Gambar 4.11 Reklamasi PT. Timah Air Jangkang

Bentuk inovasi yang ditawarkan yaitu program eduwisata merupakan aksi tindaklanjut pasca tambang, dengan mengembangkan Kawasan reklamasi pasca tambang dengan berbagai berbagai pertanian, perkebunan, peternakan yang terintegrasi. Disatu sisi keberhasilan reklamasi dapat dicapai namun disisi lain peningkatan ekonomi masyarakat juga dapat dikembangkan dan memunculkan destinasi wisata baru.

Berdasarkan data, PT. Timah sudah melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan reklamasi eks lahan tambang dengan berbagai inovasi terhadap pengelolaan lahannya, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Realisasi Reklamasi Darat PT. Timah,TbK 2011-2020

No.	Kabupaten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (sd Nov)	TOTAL
1	BANGKA	12,78	0,00	3,02	74,64	69,82	60,73	47,11	55,14	58,97	124,10	506,31
2	BANGKA BARAT	45,07	0,00	0,00	65,14	20,21	58,57	38,02	49,32	39,58	60,42	376,33
3	BANGKA TENGAH	42,05	0,00	1,95	38,53	36,26	29,57	30,86	31,03	31,78	12,00	254,03
4	BANGKA SELATAN	6,94	0,00	24,05	7,57	28,43	26,40	21,09	23,48	22,90	8,00	168,86
5	BELITUNG	0,00	0,00	0,00	56,90	30,43	26,88	26,12	24,37	19,00	27,00	210,70
6	BELITUNG TIMUR	14,31	0,00	0,00	87,48	73,41	67,43	61,90	60,07	58,94	68,13	491,67
7	LINTAS KABUPATEN	28,89	25,12	18,97	69,14	79,92	82,29	85,34	87,65	89,83	76,95	644,10
JUMLAH		150,04	25,12	47,99	399,40	338,48	351,87	310,44	331,06	321,00	376,60	2.652,00

Sumber: PT. Timah, Tbk (Paparan penambangan Laut Maras 12 Desember 2020)



Gambar 4. 12 Reklamasi Lahan Pasca Tambang Dengan Tanaman Produktif

7. LITERASI LINGKUNGAN

Program literasi lingkungan ini diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengikut sertakan pihak-pihak swasta untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dengan melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah dalam penyediaan bibit yang akan ditanam, proses pembibitan di lakukan di sekolah-sekolah kemudian bibit tersebut di beli oleh perusahaan unttuk penghijauan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disatu sisi kegiatan ini menimbulkan literasi akan pentingnya pelestarian lingkungan kepada siswa dan sekolah-sekolah dan meningkatkan peran serta masyarakat swasta untuk berkontribusi dalam meminimalkan kerusakan lingkungan, sehingga terjadi *collective learning* dan inovasi yang di hasilkan menimbulkan *added value* untuk perbaikan lingkungan dan masyarakat Bangka Belitung.

Memberikan pemahaman kepada siswa akan pentingnya menjaga lingkungan dengan kegiatan ini, dapat memberikan efek perbaikan jangka Panjang. Bangka Belitung sebagai daerah tambang penting untuk

memperhatikan perkembangan SDM masyarakat sehingga dengan literasi ini anak-anak usia sekolah tidak terjerumus dalam kegiatan pertambangan yang mempunyai dimensi etik pekerja anak pada daerah pertambangan serta merubah *mindset* anak-anak dari pekerja tambang inkonvensional yang merusak lingkungan kearah perbaikan lingkungan dengan memasukkan unsur ekonomi (*benefit*) dari literasi lingkungan dengan kegiatan pembibitan yang akan dibeli oleh perusahaan.



Gambar 4.13 MOU Kegiatan Literasi Lingkungan

Sebagai bentuk keberlanjutan inovasi Literasi lingkungan tahun sebelumnya, maka pada tahun 2020 tetap berjalan dengan realisasi pembelian bibit yang sudah ditanam oleh Sekolah-sekolah untuk penghijauan dan dibeli oleh perusahaan yang sudah menjalin kerjasama (MOU) pada tahun 2019. Berbagai Benefit di dapatkan dari kegiatan ini

diantaranya pemahaman kepada siswa didik akan pentingnya pelestarian lingkungan dengan melakukan pembibitan dan penanaman bibit untuk penghijauan, disisi lain efek ekonomi juga didapatkan sekolah.

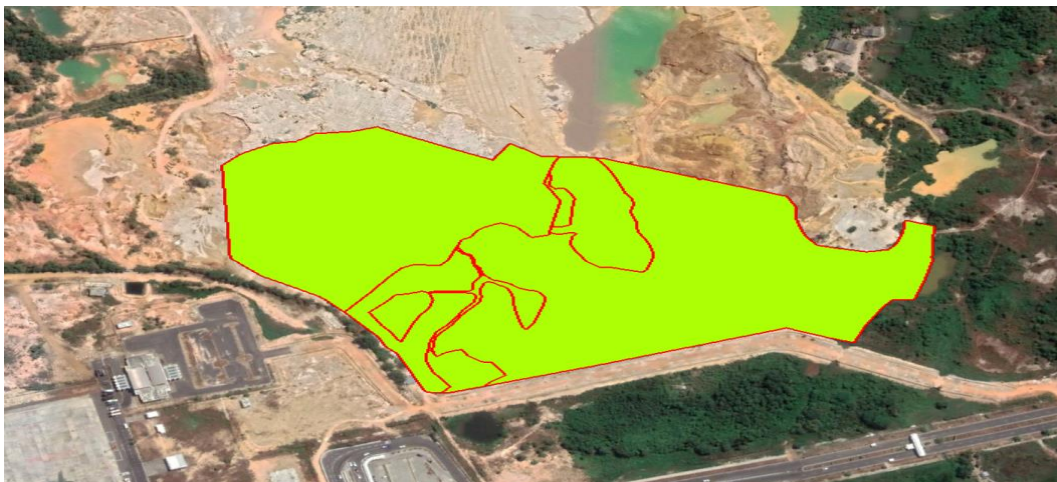


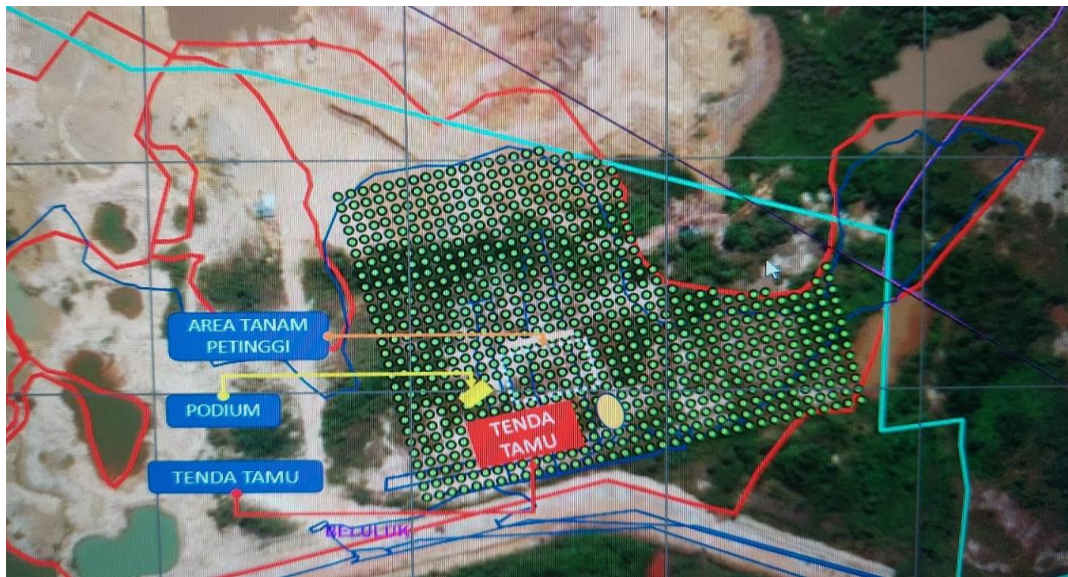
Gambar 4.14 Pembelian bibit tanaman program literasi lingkungan oleh PT. RBT

8. Percepatan Reklamasi

Berbagai kegiatan percepatan reklamasi dilaksanakan pada tahun 2022-2023 sesuai tanggung jawab perusahaan, rehabilitasi lahan eks tambang juga dilakukan pemerintah daerah serta masyarakat, swasta dan akademisi. Beberapa kegiatan reklamasi diantaranya:

a. Penanaman Tanaman Energi oleh IA-ITB Bandung, Desember 2022





Gambar 4. 15 Lokasi penanaman Tanaman Energi-IA ITB

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan tutupan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama untuk lahan kritis eks tambang di lokasi penanaman. Bekerjasama antara IA-ITB, PT. Timah dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kegiatan ini masih berjalan dengan perawatan yang terus dilakukan.

b. Penanaman oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung



Gambar 4.16 Penanaman Pohon penghijauan oleh Polda Kep.Babel

Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menanam 2.000 bibit kayu putih di kawasan Hutan Lindung Bukit Rebo Bangka dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke-77. Percepatan reklamasi lahan eks tambang juga dilakukan melalui rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) pada tahun 2022-2023.

9. Lahan Bekas Tambang Timah Untuk Budidaya Padi Sawah (Abang Timah untuk Bu Disa)

Berdasarkan data Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Bangka Belitung (JIPP Babel), Inovasi “Abang Timah untuk Bu Disa” berhasil memanfaatkan lahan kritis bekas tambang timah menjadi lahan produktif dengan menggunakan pendekatan kongkrit dan holistik-sistemik. Inovasi ini mulai diusahakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dan Kelompok Tani Mekar di Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, dilakukan dengan memanfaatkan lahan bekas penambangan timah dan luas lahan yang dikelola hingga saat ini mencapai 8 Hektar. Penerapan teknologi budidaya padi secara tepat guna disertai dengan mengintegrasikan sawah-sapi, menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang benar, dan melibatkan semua pemangku kepentingan adalah bagian dari faktor keberhasilan. Dari aspek efektifitas inovasi ini mampu menghasilkan padi secara signifikan dengan rata-rata produktivitas 4,8 ton/hektar, dengan *Revenue per Cost* rata-rata sebesar 1,9.

Lahan bekas penambangan terdapat lubang yang menganga, kontur yang tidak beraturan, lahan marginal miskin unsur hara dan tidak produktif untuk budidaya pertanian sehingga menjadi ancaman bagi ketahanan pangan. Dampak yang dihasilkan dari perubahan ini sangat signifikan yaitu aktifitas pertanian yang semakin meningkat dalam pemanfaatan lahan kritis bekas penambangan dan dapat mendukung **10 (sepuluh)** pencapaian agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (**SDGs**). Inovasi mudah diterapkan dikarenakan menggunakan teknologi yang sederhana sehingga mudah di replikasi dan telah menginspirasi petani di Kabupaten Bangka untuk mengembangkan tanaman pangan lainnya, sayur-sayuran, dan buah-buahan seluas lebih kurang 575,3 Hektar.

IV.2. INOVASI "GULE KABUNG".

Inovasi ini diinisiasi PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung **Bapak Suganda Pandapotan Pasaribu**. Program Gule Kabung (Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Membangun Bangka Belitung) menjadi wadah kolaborasi program Pemerintah Daerah (Pemda), guna mendorong kerja-kerja kolaborasi antar instansi yang tidak hanya di tingkat provinsi, namun juga hingga kabupaten/kota dan desa di Babel. Adapun terkait program lingkungan, dalam program Gele Kabung PJ. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini terdapat beberapa kegiatan seperti penghijauan, sosialisasi terkait persampahan disamping fokus PJ. Gubernur untuk menyerap aspirasi dari masyarakat secara langsung. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintahan desa, Kabupaten/Kota dan Proovinsi di bangun melewati kegiatan ini.



Gambar 4.17 Beberapa Program Gule Kabung PJ. Gubernur di 7 Kabupaten/Kota terkait persampahan



Gambar 4. 18 Beberapa Program Gule Kabung PJ. Gubernur di 7 Kabupaten/Kota penanaman Pohon Penghijauan

Program Gule Kabung yang di inisiasi oleh PJ.Gubernur selain menyerap aspirasi langsung dari masyarakat, selain terdapat program Lingkungan hidup program ini juga fokus kedalam pengentasan stunting, malnutrisi, kemiskinan serta pengendalian inflasi dan mendorong iklim usaha produktif serta program-program strategis yang telah dibentuk oleh PJ.Gubernur sebelumnya serta Program mengutamakan nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean governance*, juga sebagai wujud komitmen untuk menegakkan integritas,"



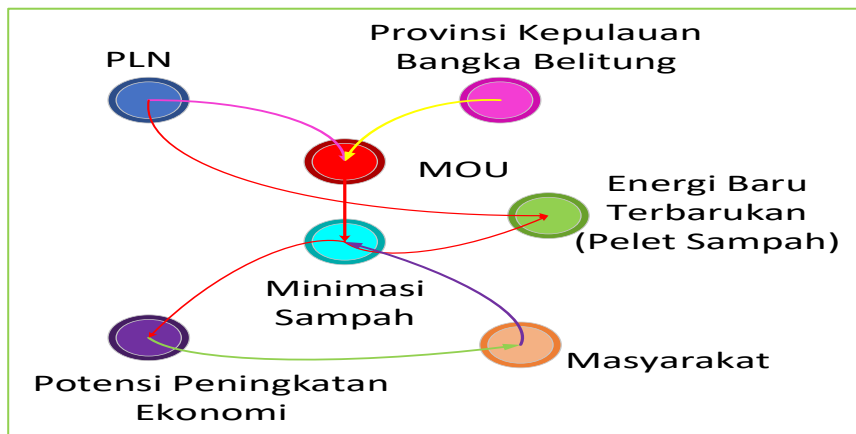
Gambar 4.19 Penyerapan aspirasi masyarakat dalam Program Gule Kabung

IV.3. Inovasi Persampahan



Gambar 4. 20 Visualisasi Skematik Inovasi Persampahan

1. Pelet sampah



Gambar 4.21 Jejaring Inovasi Pelet Sampah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bersama PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung mengembangkan energi baru terbarukan. Penandatanganan MOU langsung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan GM PLN Wilayah Bangka Belitung dilakukan di Ruangannya Tanjung Pendam Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.





Gambar 4.22 Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam MOU antara PLN dengan Pemprov Babel Tahun 2019

Proses pembuatan pellet sampah ini merupakan terobosan yang diambil untuk mewujudkan *green energy* di Kepulauan Bangka Belitung sekaligus meminimalkan timbulan sampah yang ada. Proses pembentukan pellet sampah ini dimulai dengan proses pengeringan selama lebih kurang sepuluh hari diberi bioaktivator dicincang kemudian dijadikan pellet untuk digunakan di *reactor gasifier*.

Dengan inovasi ini akan meminimalkan timbulan sampah yang ada terutama sampah rumah tangga serta mengatasi penumpukan sampah yang tidak tertangani. Selain itu terdapat *Added Value* terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, tidak hanya sisi lingkungan yang menerima manfaatnya namun dari sosial ekonomi masyarakat juga dapat meningkat dengan penjualan pellet sampah yang dibeli oleh PLN.

Diharapkan kegiatan ini terus berlanjut untuk menjadikan Bangka Belitung sebagai provinsi yang mengusung *green energy* tidak hanya PLTGs dari sampah kedepan namun akan ada penggunaan energi baru dan terbarukan tentunya.

Sebagai tindak lanjut MOU antara Gubernur dengan PLN, kegiatan inovasi "Peuyemisasi" sampah menjadi pellet sebagai bahan baku pembakar pembangkit tetap dijalankan pada tahun 2020 dengan dibangunnya

pembangkit listrik tenaga sampah di Pulau Tinggi Kabupaten Bangka Selatan dengan kapasitas 16 KW dan membutuhkan pellet sampah Dengan pola operasi 24 jam, dibutuhkan 400 kg pelet sampah per hari, atau 12.000 kg pelet sampah per bulan, atau 144.000 kg pelet sampah per tahun. Hal ini berpotensi mengurangi timbunan sampah yang ada di masyarakat.



Gambar 4.23 Proses Pembuatan Sampah



Gambar 4.24 Proses Pembuatan Pelet Sampah dan Tindak lanjut MOU

2. Pelatihan Komposting Sampah Rumah Tangga

Pelatihan pengolahan sampah rumah tangga dan dilaksanakan sesuai dengan target perencanaan, yaitu di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, dan Kabupaten Bangka Tengah. Total kelompok masyarakat yang mendapatkan pelatihan adalah sebanyak 35 kelompok. Kepada masing-masing kelompok dibagikan satu set peralatan komposter, terdiri dari satu unit komposter padat dan satu unit komposter cair. Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah domestik rumah tangga serta meningkatkan kemampuan untuk melakukan pengelolaan sampah melalui komposting.



Gambar 4.25 Komposter yang digunakan dalam pelatihan

Tabel 4.2 Daftar Literasi Lingkungan Dibidang Persampahan tahun 2019-2020

<i>Nama Kegiatan/Lokasi</i>	<i>Lokasi</i>	<i>Waktu Pelaksanaan</i>	<i>Peserta</i>
Sosialisasi dan Pelatihan Bank Sampah. Materi: <ul style="list-style-type: none"> - cara mendirikan bank sampah; - Mengaktifkan kembali bank sampah yang pasif; - Cara memilah sampah menjadi sampah bernilai ekonomis. 	Kota Pangkalpinang	10 Oktober 2019	1. KSM Kawa Begawe; 2. Rumah Aspirasi; 3. KSM Berkah; 4. KSM Sukun Mandiri; 5. KSM Melati.
	Kabupaten Bangka	9 Oktober 2019	1. PKK Kabupaten Bangka; 2. Bank Sampah Karya Mandiri; 3. Bank Sampah Setara; 4. KSM Sahabat Alam Sungai Upang; 5. KSM Sri Menanti Berkarya; 6. KSM Pemali.
	Kabupaten Belitung	17 Oktober 2019	1. PKK Kabupaten Belitung; 2. KSM Desa APJ; 3. KSM Perincong Kelekak; 4. KSM Beringin Mandiri;

Nama Kegiatan/Lokasi	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Peserta
			5. KSM Lebah Kabupaten Belitung.
	Kabupaten Bangka Tengah	5 November 2019	1. Bank Sampah simpang Perlang; 2. Bank Sampah Teratai; 3. PKK Koba; 4. PKK Guntung; 5. PKK Padang Mulia; 6. PKK Namang; 7. PKK Kurau Timur; 8. PKK Kurau Barat; 9. PKK Arung Dalam; 10. PKK Belilik; 11. PKK Berok; 12. PKK Cambai; 13. PKK Nibung; 14. PKK Penyak.
	Kabupaten Bangka Barat	24 Oktober 2019	1. Bank Sampah Sepakat Desa Air Limau; 2. Bank Sampah Kelapa; 3. KSM Maju Besaoh; 4. KSM Perigi Batu; 5. PKK Tanjung; 6. PKK Kecamatan Kelapa; 7. PKK Kelurahan Sungai Baru; 8. PKK Kelurahan Sungai Daeng.
	Kabupaten Bangka Selatan	14 Oktober 2019	1. Bank Sampah Desa Rias; 2. Bank Sampah Parittiga Toboali; 3. Bank Sampah Yapentob, Toboali; 4. KSM TPST Gadung; 5. Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangka Selatan.
Penyuluhan Tentang Lingkungan Hidup Pada Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Kepramukaan (Cinta Lingkungan) Demi Masa Depan MAN IC.	Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia, Kabupaten Bangka Tengah	13 November 2020	Siswa kelas X dan XII MAN IC
Bakti Sosial Dan Edukasi Tentang Pemanfaatan Dan Pengolahan Sampah Bernilai Ekonomis Di Desa Tuik, Kab. Bangka Barat	Desa Tuik, Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat	6 November 2020	Komunitas Pencinta Alam-Sosial Syaikh Abdurrahman Siddik (KOPASSAS) Bangka Belitung dan masyarakat Desa Tuik
Gerakan bersih laut dan pantai. - Hal ini didasari oleh Intruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.211/II/1/DJPL/2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Bersih Lingkungan Kerja Secara Rutin di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan dan demi ketertiban keselamatan pelayaran dalam melindungi lingkungan lingkungan maritim.	Pantai Menara Suar Tanjung Ular Kabupaten Bangka Barat	6 Februari 2020	Staf Ahli Gubernur Kepulauan Bangka Belitung bidang ekonomi dan pembangunan, Kepala KSOP Pangkalbalam, Kapolres Bangka Barat, perwakilan dari Kejaksaan, KSOP Muntok, Dandim 0431/BB, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, PT. Timah Tbk, DPRD Bangka Barat, Pos Angkatan Laut, Bea cukai, OPD terkait baik dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, serta masyarakat Desa Air Putih

Nama Kegiatan/Lokasi	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Peserta
- Total sampah terkumpulkan sekitar 2.150 Kg yang terdiri dari 127,5 kg sampah anorganik, 1.650 kg balok-balok kayu sisa bagan apung, 372,5 kg sampah organik campur.			
Aksi bersih pantai dalam Pelaksanaan World Cleanup Day (WCD) Tahun 2020	Pantai Koala-Jembatan Emas Kabupaten Bangka	19 September 2020	Perwakilan OPD Pemprov. Kep. Bangka Belitung, Universitas UBB, Saka Kalpataru, dan masyarakat sekitar

Sumber: DLHK Prov.Bangka Belitung 2020



Gambar 4.26 Pelatihan Komposting dan sedekah pohon tahun 2023 kepada Pramuka SMA di Pangkalpinang

3. Pelatihan Ecobrick dan Eco Enzyme

3.1 Pelatihan Eco Brick

Ecobrick adalah sebuah inovasi visioner yang dikembangkan sebagai solusi pengolahan limbah plastik. Diambil dari dua kata pembentuknya, eco dan brick, secara sederhana didefinisikan sebagai bata ramah lingkungan. *Ecobrick* sendiri diciptakan oleh Rusel Maier seorang seniman dari Kanada di Filipina. Sangat populer di dunia saat ini dan juga sering dikenal dengan nama-nama seperti Bottle Brick atau Ecoladrillo. Dikembangkan dari material plastik atau sampah plastik, *Ecobrick* ini memiliki sifat dasar dari plastik tersebut yaitu kuat, anti air, dan awet. Manfaat ecobrick diketahui sering menjadi material dasar dalam memproduksi sebuah barang. Mulai dari pembuatan furnitur, perabotan indoor, hingga material pembentuk sebuah bangunan semisal dinding sebuah ruang. Meskipun sederhana bentuknya, *Ecobrick* benar-benar dapat menjadi material substitusi bangunan seperti batu bata merah atau batako.



Gambar 4.27 Pelatihan pembuatan Ecobrick

3.2 Pelatihan Eco Enzim

Eco-enzyme adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah dan sayuran, gula (gula coklat, gula merah atau gula tebu), dan air. Warnanya coklat gelap dan memiliki aroma fermentasi asam manis yang kuat. Komposisi sampah yaitu 54% berasal dari sampah organik. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara aktif melakukan pelatihan pembuatan Eco Enzim ini. Terdapat beberapa manfaat eco enzim ini antara lain: sebagai cairan pembersih, pupuk tanaman, pengusir hama dan melestarikan Lingkungan karena dapat menggantikan cairan kimia yang selama ini digunakan dan yang paling utama meningkatkan pengelolaan sampah rumah tangga, karena dari data komposisi sampah rumah tangga penyumbang sampah terbesar di Provinsi



Gambar 4.28 Proses Pembuatan Eco Enzim

4. Costal Clean Up



Gambar 4.29 Coastal Clean Up PLN- Prov.Kep.Babel , 11 Juni 2023

5. Program Adiwiyata Provinsi

Program Adiwiyata merupakan program membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung aktif melakukan pembinaan sekolah adiwiyata.

6. Operasional Insinerator



Gambar 4.30 Insinerator di Kawasan Industri Sadai

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan Bantuan Insinerator dari KLHK untuk B3 dan Non B3 untuk fasilitas layanan Kesehatan (Fasyankes), diharapkan dengan pengoperasian incinerator ini dapat meminimalisasi sampah B3 dan non B3 dari Fasyankes di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7. Instruksi Gubernur, Peraturan Gubernur dalam Pengelolaan Sampah

Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan Bangka Belitung dalam pengelolaan persampahan beberapa instruksi Gubernur dan Peraturan Gubernur terkait diantaranya:

- a. Peraturan gubernur No. 48 tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- b. Surat Edaran Pengurangan minuman kemasan plastik di ruang pertemuan dan hotel di Bangka Belitung



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 14 Oktober 2019

Kepada
Yth. Bupati dan Walikota
se-Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 065 / 1051 / Disbudpar/ 2019

TENTANG

**PENGURANGAN MINUMAN KEMASAN PLASTIK DI RUANG PERTEMUAN
DAN HOTEL DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka melaksanakan kebijakan nasional tentang pengelolaan sampah melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Instruksi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 120/ 00939/ DLH/ 2019 tentang Pengurangan Sampah Anorganik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dengan ini disampaikan kepada seluruh Bupati/ Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dapat mendukung pengurangan sampah plastik dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

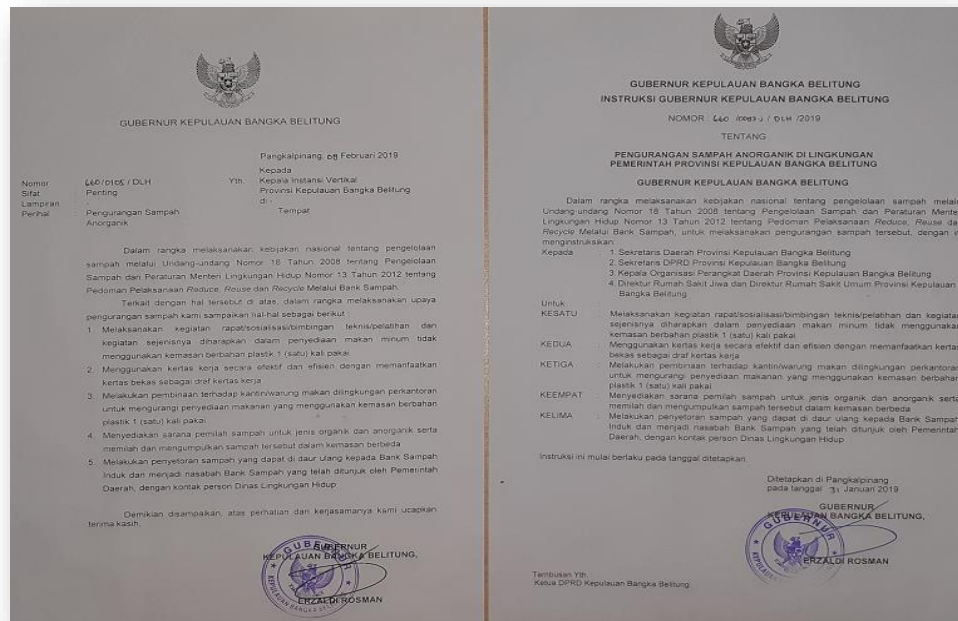
1. Dalam pelaksanaan kegiatan rapat/ sosialisasi/ bimbingan teknis/ pelatihan dan kegiatan sejenisnya yang dilaksanakan di hotel ataupun ruang pertemuan, diharapkan dalam penyediaan minuman tidak menggunakan kemasan berbahan plastik 1(satu) kali pakai;
2. Melakukan pembinaan terhadap hotel/penyedia ruang rapat untuk menyediakan dispenser atau sejenisnya pada saat kegiatan yang diadakan oleh pemerintah daerah untuk menggantikan air minum dalam kemasan.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
ERZANTHROS MAN

- Tersutan Yth.
1. Kepala Dinas Pariwisata se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 3. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

C. Instruksi Gubernur Pengurangan sampah Anorganik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Pada tahun 2020, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan TPA regional, tentunya hal ini sebagai wujud pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan persampahan.

IV.4. INOVASI PENGELOLAAN EKOSISTEM PESISIR

Permasalahan kerusakan ekosistem pesisir di Bangka Belitung akan meningkat seiring meningkatnya aktivitas pemanfaatan wilayah pesisir dan eksploitasi sumberdaya alam. Berbagai upaya sebagai bentuk inovasi di wilayah pesisir dan laut pulau Bangka Belitung, terus dilakukan dari tahun 2017- sampai sekarang. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan berbagai kegiatan pembinaan transplantasi terumbu karang oleh Universitas Bangka Belitung bersama Dinas Kelautan dan Perikanan beserta masyarakat nelayan di Pulau Semujur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dan di Dusun Tuing, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka.

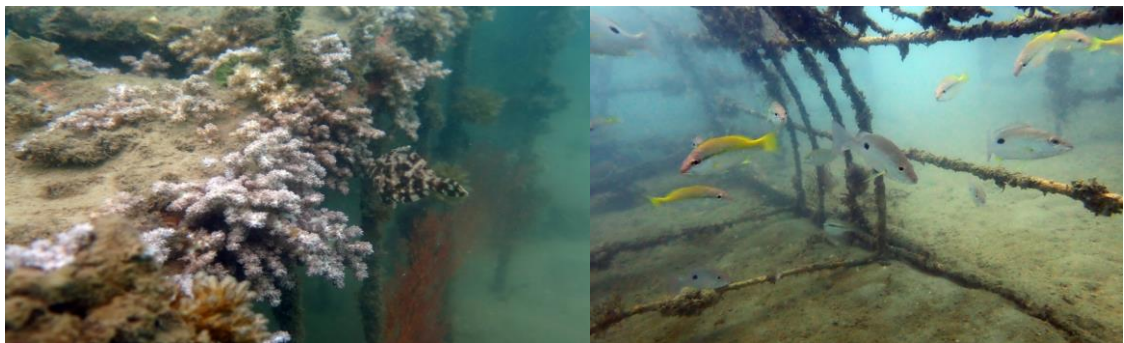


Gambar 4.31 Bimbingan Transplantasi karang di Desa Tuing

Pada tahun 2020 dan 2021 berbagai upaya untuk perbaikan kerusakan terumbu karang dilakukan terutama oleh PT.Timah,Tbk selain merupakan tanggung jawab perusahaan, dilakukan berbagai penelitian dan inovasi terhadap transplantasi, restocking ikan dengan pemasangan *Fish shelter* dan restocking cumi-cumi di perairan Bangka. Kegiatan ini sudah dilakukan mulai tahun 2016 dan dipantau keberhasilan dari kegiatan yang dilaksanakan.



Gambar 4.32 Restocking telur cumi tahun 2020



Gambar 4.33 Trasplantasi Terumbu Karang Dan Fish Shelter Tahun 2020

Pada tahun 2020, PT. Timah telah melakukan berbagai kegiatan reklamasi laut berupa pemasangan fish shelter, transplantasi terumbu karang serta restocking cumi.

Tabel 4.3 Data Reklamasi di perairan Laut Matras dan Pesaren

NO	Lokasi	DU	Jenis Reklamasi Laut	Jumlah (unit)					Total
				2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pesaren	Luar IUP	Fish Shelter	50					50
2	Matras	1555	Fish Shelter	20	20	20	25	25	110
			Transplantasi Karang	20	20	20	25	25	110
3	Pulau Putri	1550, 1560, 1561	Fish Shelter	155	155	155	205	210	880
			Transplantasi Karang	105	105	105	105	105	525

Sumber: PT. Timah, TBK

Kerusakan daerah pesisir di sebabkan pula oleh pembukaan kawasan hutan mangrove tentunya dengan berbagai aktivitas seperti maraknya pembukaan usaha tambak udang yang massif terjadi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menganggap penting permasalahan ini. Peningkatan perekonomian daerah tentunya menjadi fokus dan target pencapaian namun *sustainability* lingkungan juga menjadi faktor yang diperhatikan. Untuk itu kepastian alokasi ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah baik Kabupaten/Kota dan Provinsi menjadi dasar dalam pemberian perizinan melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang.

Aplikasi **"Si Terbit DLHK"** juga digunakan dalam melihat dan menganalisis perubahan tutupan lahan dan data-data perizinan terutama pada kawasan pesisir dan laut, sehingga dapat meminimalkan Degradasi dan tumpeng tindih terhadap kawasan pesisir dan laut.



Gambar 4.34 Implementasi Inovasi "Si Terbit DLHK" terhadap Kawasan ekosistem pesisir

IV.5. INOVASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) ENERGI BARU TERBARUKAN

a. Rencana Pembangunan PLTS pada lahan eks tambang

Pada tahun 2020 Gubernur Bangka Belitung melakukan berbagai kegiatan salah satunya audiensi rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya untuk di daerah eks tambang, investasi sekitar 4-5 MW dari 1.250 MW pada lahan ekstambang yang konsesinya telah kembali ke Pemprov. Babel serta program konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) dari PLN di lokasi sulit BBM.



Gambar 4.35 Audiensi Gubernur Pengembangan PLTS PT Faireness Indonesia Daya

b. Pembangunan PLTS *Rooftop* pada atap gedung perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2020 telah dilakukan pemasangan PLTS Rooftop di beberapa perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) *Rooftop* pada gedung-gedung pemerintahan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pembangunan PLTS Rooftop ini merupakan terobosan baru di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga dapat menjadi penerapan energi baru dan terbarukan sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap Pembangkit Listrik tenaga uap (PLTU) dan PLTD yang notabennya penghasil limbah dan polusi udara.



Gambar 4.36 PLTS Rooftop di Labkesda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BAB V

PENUTUP

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dengan meminimalkan dampak-dampak serta potensi degradasi dan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Dalam proses mewujudkan tujuan tersebut tentunya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan lingkungan hidup di satu sisi tuntutan pemenuhan pertumbuhan ekonomi daerah disisi lain terdapat permasalahan lingkungan hidup dari eksploitasi sumber daya alam dan aktivitas antropogenetik masyarakat terhadap kerusakan lingkungan. Berbagai permasalahan yang terangkum dalam isu prioritas yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dianalisis dengan metode atau kerangka berpikir dengan *Driving Force – Pressure – State – Impact - Response (DPSIR)* dalam Dokumen ini. Terdapat empat isu prioritas yang telah ditetapkan dengan Surat Pernyataan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor: 660/0457 /DLHK dengan isu prioritas sebagai berikut: (1) Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah, (2) Kerusakan Pesisir dan Laut, (3) Belum Optimalnya Tata Kelola dan Manajemen Lingkungan Hidup, (4) Peningkatan Eksploitasi dan Alih Fungsi Lahan, (5) Penurunan Kualitas Air.

V.1. KESIMPULAN

Isu Lingkungan hidup dan isu Prioritas telah dilakukan proses analisis dengan metodologi DPSIR. Berdasarkan analisis DPSIR terhadap isu-isu prioritas dapat Disimpulkan sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah

- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi masalah serius di persampahan. Hampir semua TPA sudah mendekati kapasitas optimumnya dan beberapa TPA sudah *Over capacity* diantaranya Kapasitas TPA Parit Enam di Pangkalpinang, sedangkan di Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan juga sudah mendekati kapasitas optimum TPA nya. Timbulan sampah di Bangka Belitung 56,9 % berasal dari rumah tangga, sedangkan Komposisinya 33 % merupakan sampah makanan. Sehingga perlu berbagai upaya pengelolaan sampah domestik rumah tangga.
- Timbulan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 sebesar 2.133,45 m³/hari. Timbulan sampah terbesar ada di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka dengan penduduk yang paling padat. Data tersebut cukup memberi gambaran tentang aktivitas konsumsi di area perkotaan yang relatif lebih tinggi/konsumtif dibandingkan daerah lain.
- Berbagai aktivitas sebagai bentuk respons penanganan sampah pada tahun 2022-2023 telah dilakukan diantaranya: Penerbitan regulasi kebijakan daerah tentang persampahan antara lain: Peraturan Gubernur No. 49 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mengeluarkan instruksi Pj. Gubernur tentang Gerakan Jumat Bersih dan Babel Menanam Mengajukan Rancangan Perda Pengelolaan TPA Regional, Percepatan Pembangunan TPA Regional, Peningkatan 3R dan Bank sampah, peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan, pelatihan masyarakat, pelajar dalam pengelolaan sampah, sosialisasi pembuatan eco enzim, eco brick, kegiatan Adiwiyata dan adipura serta berbagai inovasi di bidang persampahan juga telah dilakukan.

2. Kerusakan Pesisir dan Laut

Berbagai faktor pendorong dari berbagai pemanfaatan pesisir dan laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti penambangan, investasi tambak udang yang masif menyebabkan tekanan (*pressure*) bagi lingkungan, diantaranya terjadinya pembukaan dan penurunan luasan hutan mangrove di pesisir karena aktivitas pertambangan, sedimentasi dan tingginya Padatan tersuspensi (TSS), kerusakan terumbu karang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya sebagai bentuk intervensi dalam mengatasi degradasi ekosistem pesisir diantaranya: Pengesahan Perda RZWP3K dan implementasi pelaksanaannya pada tahun 2020, Menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 32 tahun 2020 tentang Tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Air Bagi Usaha atau Kegiatan Tambak Udang, serta berbagai kegiatan Reklamasi dan rehabilitasi mangrove serta transplantasi terumbu karang aktif dilakukan.

3. Belum Optimalnya Tata Kelola dan Manajemen Lingkungan Hidup

Tata Kelola dan manajemen Lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu melakukan perbaikan tata Kelola pemanfaatan sumber daya alamnya dengan berbagai regulasi yang dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Kongkritnya tata Kelola pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan, bertanggung jawab, dan mengutamakan pelestarian Lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Pada sektor pertambangan, tata Kelola pertambangan yang baik (*good mining practice*) mutlak dilaksanakan sehingga potensi kerusakan Lingkungan dapat diminimalkan dengan dan fungsi pengawasan dijalankan dengan ketat. Partisipatif masyarakat dan berbagai stakeholder diperlukan dalam mewujudkan tata Kelola yang baik dalam pemanfaatan sumber daya alam, didukung dengan keterbukaan informasi publik dan transparansi serta *Good Governance* dijalankan.

4. Peningkatan Eksploitasi Dan Alih Fungsi Lahan

Peningkatan jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan laju pertumbuhan lahan terbangun. Permintaan akan lahan terbangun yang terus meningkat ini tidak seimbang dengan persediaan lahan yang cenderung terbatas. Kondisi ini kemudian menjadi salah satu pemicu terjadinya perubahan penutup lahan atau alih fungsi lahan. Kebijakan investasi dan pemenuhan perekonomian juga menjadi faktor terjadinya alih fungsi lahan.

Berdasarkan analisis perubahan penutupan lahan disimpulkan:

- Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami tren penurunan, pada tahun 2022 IKL mengalami penurunan sebesar 0,82 poin menjadi 39,28 hal ini dipengaruhi oleh konversi semak belukar menjadi penutup lahan lainnya.
- Penutupan lahan pertambangan: terjadi peningkatan lahan pertambangan selama periode tahun 2019-2020 meningkat sebesar 8.742,13 ha dari yang sebelumnya 146.426,21 ha menjadi 155.166,33 ha
- Penutupan lahan hutan: Terjadi degradasi hutan mangrove ,penurunan terbesar dialami oleh kelas hutan mangrove primer yaitu sebesar 10.858 ha sedangkan penurunan paling kecil dialami oleh kelas hutan lahan kering primer yaitu seluas 45,01 ha. Berdasarkan hasil analisis spasial diketahui bahwa sekitar 9.545,31 ha atau 87,91 % dari penurunan luasan yang terjadi telah berubah menjadi hutan mangrove sekunder.
- Terjadi penurunan kualitas lahan, keanekaragaman hayati serta luasan ekosistem pesisir (mangrove) akibat alih fungsi lahan.
- Lahan Kritis masih cukup tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung total **lahan kritis dan sangat kritis 167.104 Hektar** dengan sebaran lahan kritis hampir di semua Kabupaten/Kota dengan proporsi lahan kritis di Kabupaten Belitung Timur 38.884 Hektar (23,27 % dari total lahan Kritis), Kabupaten Bangka Selatan 31.232 Hektar (18,69 % dari

luas total lahan kritis) , Kabupaten Bangka Tengah 30.948 Hektar (18,52 % dari total lahan kritis), Kabupaten Bangka 24.463 Hektar (14,64 % dari luas total lahan kritis), Kabupaten Belitung 21.919 Hektar (13,12 % dari luas total lahan kritis), Kabupaten Bangka Barat 19.592 Hektar (11,71 % dari luas total) dan Kota Pangkalpinang 96 Hektar (0,06 % dari luas total lahan kritis).

- Deforestasi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan hasil alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan, pertambangan, permukiman maupun pertanian lahan kering campur semak. Kabupaten Bangka Tengah merupakan wilayah administrasi yang paling banyak mengalami deforestasi hutan dengan luasan sekitar 12.336 hektar disusul oleh Kabupaten Bangka Barat seluas 11.753 hektar; Kabupaten Belitung Timur 11.240 hektar; Kabupaten Bangka Selatan seluas 10.237 hektar; Kabupaten Belitung seluas 10.024 hektar serta Kota Pangkalpinang seluas 220 hektar.
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjadikan alih fungsi lahan menjadi prioritas yang harus ditangani. Berbagai aktivitas sebagai bentuk respons dan intervensi pemerintah daerah dilakukan diantaranya: Kebijakan penataan ruang daerah didasarkan pada kesesuaian alokasi ruang RTRW, Pengendalian pemanfaatan ruang dengan membentuk tim penataan ruang daerah dan perizinan pemanfaatan ruang didasarkan pada kesesuaian tata ruang wilayah, penerapan sanksi dan penertiban terhadap pelanggaran tata ruang, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan pada tahun 2023.

5. Penurunan Kualitas Air.

- Pada tahun 2022 Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 57,68, nilai ini menurun sebesar 0,69 poin dari tahun sebelumnya dan masuk dalam kategori sedang. Penurunan

nilai IKA menunjukkan bahwa upaya pengelolaan air yang dilakukan selama ini belum cukup optimal.

- Status mutu sungai Batu rusa dan Sungai Buding menunjukkan status cemar ringan hingga cemar sedang (Sungai lintas Kabupaten/Kota yang merupakan kewenangan Provinsi).
- Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 85,02 yang merupakan nilai rerata dari 25 titik sampling, kondisi IKAL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini masih dalam kategori baik.

V.2. Rekomendasi Tindak Lanjut


Berdasarkan uraian dan data-data yang tersaji dalam Dokumen IKPLHD ini, beberapa hal berikut ini menjadi rekomendasi tindak lanjut bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Kebijakan penataan ruang, Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang harus diterapkan secara terpadu antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota yang mempunyai wilayah administratif sehingga pemanfaatan ruang benar-benar didasarkan pada alokasi ruang yang tercantum pada RTRW dan aturan pemanfaatan ruang.
2. Jika secara sederhana mensimulasikan perhitungan IKL dengan mengabaikan faktor koreksi kanal gambut maka untuk menaikkan IKL dari 40,10 di tahun 2021 menjadi 43,34 di tahun 2022 sesuai dengan target diatas maka paling tidak dibutuhkan penambahan luasan penutup lahan hutan kurang lebih sebesar 59.000 hektar atau kurang lebih sebesar 98.000 hektar luas RTH atau rehabilitasi hutan dan lahan dalam waktu 1 (satu) tahun, tentunya ini membutuhkan upaya (*effort*) yang cukup besar bagi pemerintah daerah untuk merespons hal tersebut dibutuhkan pendanaan, kebijakan (regulasi), peran aktif

- masyarakat, membenahan tata Kelola baik pertambangan maupun fungsi-fungsi pengawasan dan pengendalian ruang.
3. Pemberian Persetujuan izin lingkungan memperhatikan persetujuan teknis sesuai PP Nomor 22 tahun 2021 untuk meminimalkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, menghitung potensi limbah yang akan dikeluarkan/ diemisikan ke lingkungan terutama limbah-limbah outlet IPAL yang masif di Bangka Belitung saat ini yaitu tambak udang.
 4. Menciptakan tindakan antisipatif untuk pencegahan kerusakan lahan yang lebih parah. Salah satu upaya yang bisa dilaksanakan adalah dengan mengaplikasikan inovasi-inovasi yang aplikatif untuk merehabilitasi lahan, baik lahan hutan yang mengalami kerusakan maupun lahan bekas pertambangan tentunya dengan peran aktif pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat.
 5. Perlu dilaksanakan sosialisasi terkait pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga dengan intensitas yang lebih sering kepada masyarakat dan pelaku usaha.
 6. Penerapan teknologi yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, serta mempercepat terwujudnya TPA Regional.
 7. Segera menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat aktivitas pertambangan, terutama pertambangan di wilayah laut yang menyebabkan kerusakan ekosistem. Perbaikan Tata Kelola dan Manajemen Lingkungan terutama pada sektor pertambangan terus dilaksanakan.
 8. Diperlukan transformasi pemenuhan ekonomi masyarakat sehingga tidak menggantungkan kepada ekstraksi dan eksplorasi sumber daya alam terutama pertambangan dan mengembangkan potensi lokal daerah seperti perkebunan dan pariwisata kongkritnya Bangka Belitung harus mempersiapkan perekonomian yang tidak hanya bertumpu pada pertambangan namun menuju perekonomian yang berbasis industri pengolahan dan jasa berdasarkan potensi daerah.

9. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka akan dibentuk kawasan-kawasan strategis yang memiliki peran penting terhadap kemajuan perekonomian. Pembangunan kawasan-kawasan strategis tersebut harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mengacu pada RPPLH provinsi yang telah disusun, serta memperhatikan dan mengintegrasikan hasil KLHS ke dalam materi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, R. (2022). Permintaan Perumahan di Pangkalpinang Naik Tiap Tahun, Gerus RTH dan Resapan Air. Faktaberita.Co.Id. Diakses pada 7 Agustus 2022.
- Agustika, S. (2022). Listrik di Bangka Sering Padam, GM PLN Bangka Belitung Sebut Ini Penyebabnya. Bangka Pos. Diakses pada 7 Agustus 2022.
- Akib, Muhammad, 2009. Jurnal Media Hukum. POLITIK HUKUM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN REFLEKSINYA DALAM PRODUK HUKUM OTONOMI DAERAH. Vol.16 No.3. diakses pada tanggal 23 Juli 2023.
<https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/15378/7483>
- Aleva, G.J.J., Bon, E.H., Nossin, J.J., Sluiter, W.J. (1973). A Contribution to the Geology of Part of the Indonesia Tinbelt: the Sea Areas Between Singkep and Bangka Islands and Around the Karimata Islands. Geol. Soc. Malaysia, Bulletin 6, July 1973.
- Anih Sri Suryani. (2014). PERAN BANK SAMPAH DALAM EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS BANK SAMPAH MALANG) The Significance of Waste Bank in Waste Management Effectiveness (A Case Study of MalangWaste Bank), Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta, Indonesia
- Antonella, P. (2011). Air Quality indices: a review. Springer Science and Business. Diakses pada 17 Juli 2023.
- Anugrah, F.N, 2021, Kewenangan Tata Kelola Lingkungan Hidup Oleh Pemerintahan Daerah dalam Prespektif Otonomi Daerah (The Authority of Environmental Governance by Regional Governments in the Perspective of Regional Autonomy). Jendela Informasi dan Gagasan Hukum,p-ISSN No.2337-4667, e-ISSN NO.1359957835. Jurnal WASAKA HUKUM Vol.9 No.2, Februari 2021. <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/43/40>
- Ardana, P. D. H., Soriarta, I. K., & Harumaja, N. (2023). EVALUASI KINERJA SALURAN DRAINASE PADA KAWASAN PERMUKIMAN MEKAR JAYA, DESA PEMOGAN, DENPASAR SELATAN. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 27(1), 28. <https://doi.org/10.24843/JITS.2023.v27.i01.p04>
- 

Arif, E. (2023). *Bangka Belitung Pegang Komitmen, Duduki Peringkat Tertinggi Nasional PPK23 KK*. BKPSDMD Kep. Bangka Belitung. <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/bangka-belitung-pegang-komitmen-duduki-peringkat-tertinggi-nasional-ppk23-kk>

Asmarhansyah. (2015). Charracteristic of Physical and Chemical Properties of Former-Tin Mining Areas for Crop Production in Bangka Island. *Prosiding Nasional Sistem Informasi dan Pemetaan Sumber Daya Lahan Mendukung Swaseembada Pangan*, 181-190

Badan Meteorologi dan Geofisika. (2023). *Ekstrem Perubahan Iklim*. Retrieved from Badan Meteorologi dan Geofisika: <https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=ekstrem-perubahan-iklim>

BPS. (2002). *Hasil Sensus Penduduk 2000* (Issue 26). Badan Pusat Statistik.

BPS. (2010). Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010. In *Badan Pusat Statistik*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/>

BPS. (2018a). Environment Indifferent Behaviour Index Report of Indonesia 2018. In *BPS-Statistics Indonesia: Vol. ISBN: 978-*.

BPS. (2018b). *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2018*. Badan Pusat Statistik.

BPS. (2019). *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2019*. Badan Pusat Statistik.

BPS. (2020). *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka*.

BPS. (2021a). Berita Resmi Statistik: Hasil Sensus Penduduk 2020. In *bps.go.id* (Issue 27). Badan Pusat Statistik. <https://papua.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/336/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-papua-tahun-2017.html>

BPS. (2021b). *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik.

BPS. (2022a). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022* (Issue 62).

BPS. (2022b). *Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)*. Babel.Bps.Go.Id. babel.bps.go.id/indicator/23/573/1/jumlah-penduduk-miskin.html

BPS. (2022c). *Produksi Beras Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Badan Pusat Statistik. <https://babel.bps.go.id/indicator/53/1101/1/produksi-beras-provinsi-kepulauan-bangka-belitung.html>

BPS. (2022d). *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2022*. Badan Pusat Statistik.



- BPS. (2022e). *Rata-rata Konsumsi Perkapita Seminggu Menurut Kelompok Padi-Padian Per Kabupaten/kota (Satuan Komoditas)*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/5/2094/1/rata-rata-konsumsi-perkapita-seminggu-menurut-kelompok-padi-padian-per-kabupaten-kota.html>
- BPS. (2022f). *Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun), 2019-2021*. Badan Pusat Statistik. <https://babel.bps.go.id/indicator/26/563/1/rata-rata-lama-sekolah.html>
- BPS. (2023). *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2023*.
- Catanese, A. J., & Snyder, J. C. (1988). *Urban Planning* (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
- Chazienul Ulum, M., Ngindana, R., (2017). *Environmental Governance, Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. ISBN: 978-602-432-187-1. UB Press. Malang, Indonesia
- Disperkim Pangkalpinang. (2022). *Pelaksanaan Rapat Pleno Pengurangan Luasan Kumuh Di Kota Pangkalpinang*. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pangkalpinang. <https://disperkim.pangkalpinangkota.go.id/pelaksanaan-rapat-pleno-pengurangan-luasan-kumuh-di-kota-pangkalpinang/>
- Ecoton. (2022). Press release perairan tercemar mikroplastik Bangka barat darurat pengelolaan sampah plastic. Ecoton.or.id. Diakses tanggal 27 Juli 2023.
- Fandari, A., Daryanto, A., & Suprayitno, G. (2014). Pengembangan Energi Panas Bumi yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Semesta Teknika*, 17(1), 68–82.
- FAO. (2009). Lesson 1 Establishment of a Food Security Policy Framework. In *Food Security Policies Formulation and Implementation*. European Union.
- Hamuna B, et al. 2018. Kajian Kualitas Air Laut dan Indeks Pencemaran Berdasarkan Parameter Fisika - Kimia Di Perairan Distrik Depapre, Jayapura. *Jurnal Ilmu LIngkungan*. 16(1): 35-43.
- Hisyam ES, Shodiq F. (2019). Kajian Erosi Dan Sedimentasi Pada Daerah Aliran Sungai Deniang Kabupaten Bangka. *Fropil*. 7 (1).
- Horvat, M., Noll, M., Riegler, J., Brink, M., Schylberg, K., Wu, C., Liu, Y., Li, Y., Zhang, J., & Zhu, P. (2018). *Sustainable Urban Development* (Issue May).
- 

<https://babel.antaranews.com/berita/332820/bps-angka-kelahiran-bayi-di-babel-turun-dratis> . BPS: Angka kelahiran bayi di Babel turun dratis. Diakses tanggal 21 Juli 2023.

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=p3ZODwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=tata+kelola+lingkungan+hidup&ots=tc8pj4VzIL&sig=bgISl_OZjvvz8-w7vRnzHop2yGo&redir_esc=y#v=onepage&q=tata%20kelola%20lingkungan%20hidup&f=false

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9W_sDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR2&dq=tata+kelola+lingkungan+hidup&ots=O8WGVQCsj4&sig=wpDQ5hGm55pZSDp-f0BAz2Vs4PY&redir_esc=y#v=onepage&q=tata%20kelola%20lingkungan%20hidup&f=false

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022. Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. diakses pada tanggal 23 20 Juli 2023.
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Kepulauan-Bangka-Belitung-Februari-2022.pdf>

Kementerian Pertanian. (2022). *Statistik Ketahanan Pangan Tahun 2022* (Vol. 2, Issue 1). Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Khotimah SK, Nasruddin. (2022). Pencemaran Sungai Martapura Akibat Perilaku Masyarakat Membuang Sampah Di Sungai, Limbah Industri Dan Pertambangan (Human Behavior Environmental Analysis). Jurnal Penelitian Multi Disiplin. 1 (2).

Kopnina, H., Washington, H., Taylor, B., & J Piccolo, J. (2018). Anthropocentrism: More than Just a Misunderstood Problem. *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, 31(1), 109–127.
<https://doi.org/10.1007/s10806-018-9711-1>

Lestari RI, Ramadhani R, Sherawali, Yudha AT. (2021). Air dan Dampak Kelangkaannya Bagi Perekonomian Masyarakat Urban: Studi Pustaka Pulau Jawa. *OECOMICUS Journal of Economics*. 6 (1).

Malgorzata, K., et.al (2009). Air quality index and its significance in environmental health risk communication. *Researchgate.net*. Diakses pada 7 Juli 2023.

Marlianto, C. (2022). *Baru Tercapai 11 Persen dari Target, RTH Jadi PR Kota Pangkalpinang*. Bangka Pos.



<https://bangka.tribunnews.com/2022/08/09/baru-tercapai-11-persen-dari-target-rth-jadi-pr-kota-pangkalpinang?page=all>

Masykur HZ , Amin B, Jasril , Husein Siregar SH. (2018). Analisis Status Mutu Air Sungai Berdasarkan Metode STORET Sebagai Pengendalian Kualitas Lingkungan (Studi Kasus: Dua Aliran Sungai di Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau). *Dinamika Lingkungan Indonesia*. 5 (2).

Merliyana(2017). Analisis Status Pencemaran Air Sungai Dengan Makrobentos Sebagai Bioindikator di Aliran Sungai Sumur Putri Teluk Betung. Skripsi. UIN Raden Intan. Lampung : Indonesia.

Miller, G. T., & Spoolman, S. E. (2016). *Environmental Science* (Fifteenth). Cengage Learning.

Muhsinin N. (2019). Pengolahan Air Limbah Domestik Secara Fitoremediasi Sistem Constructed Wetland Dengan Tanaman *Pandanus Amaryllifolius* Dan *Azolla Microphylla*. Tesis. Universitas Gajahmada. Yogyakarta : Indonesia.

Mujiburrahmad1, Hamid AH, Nufus T. (2021). Pola Migrasi dan Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Migrasi Penduduk di Kecamatan Padang Tiji. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. 10. (03).

Neha Khanna . (2000). Measuring environmental quality : an index of pollution. Elsevier Pub. Diakses pada 20 Juli 2023


Nurulwahida, Siti (2020) KOLABORASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN MODEL PENTAHHELIX DALAM PENGEMBANGAN WISATA HARITAGE KAJOETANGAN DI KOTA MALANG. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang. <https://eprints.umm.ac.id/59661/>


Oesterwind D, Rau A, Zaik A. (2016). Drivers and pressures e Untangling the terms commonly used in marine science and policy. *Journal of Environmental Management*. 181.


Parris, K. M. (2016). *Ecology of Urban Environments*. John Wiley & Sons.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. (2016). Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2019-2050, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>



- Prajati, G., Damanhuri, T. P., & Rahardyan, B. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Dan Kependudukan Terhadap Timbulan Sampah Di Ibu Kota Provinsi Jawa Dan Sumatera. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 21(1), 39–47. <https://doi.org/10.5614/jtl.2015.21.1.5>
- Priyanta, M. (2021). Implikasi Konsep Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan. *Jurnal Wawasan Yuridika*.
- Pujiati, S., Pertiwi, A., Silfia, C. C., Ibrahim, D. M., & Nur Hafida, S. H. (2020). Analisis Ketersediaan, Keterjangkauan Dan Pemanfaatan Pangan Dalam Mendukung Tercapainya Ketahanan Pangan Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 16(2), 123–133. <https://doi.org/10.20956/jsep.v16i2.10493>
- Purniawati, P., Kasana, N., & Rodiyah, R. (2020). Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Management). *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(1), 43–56. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37328>
- Puspitasari, D., 2020. Pengaruh tata kelola publik, pendapatan asli daerah dan total aset terhadap kinerja Pemerintah Daerah. AL Tijarah. Vol 6. No 1. (2020) diakses pada 23 Juli 2023.
- Ramos, T. B., Darouich, H., Gonçalves, M. C., Brito, D., Branco, M. A. C., Martins, J. C., Fernandes, M. L., Pires, F. P., Morais, M., & Neves, R. (2018). An integrated analysis of the eutrophication process in the Enxoe reservoir within the DPSIR framework. *Water (Switzerland)*, 10(11), 1–20. <https://doi.org/10.3390/w10111576>
- Richard C. Flagan. et al (1988) Fundamentals Of Air Pollution Engineering, Pretince Hall, New jersey, USA
- Rohmawati Y dan Kustomo (2020). Analisis Kualitas Air pada Reservoir PDAM Kota Semarang Menggunakan Uji Parameter Fisika, Kimia, dan Mikrobiologi, serta Dikombinasikan dengan Analisis Kemometri. *Walisongo Journal of Chemistry* Vol. 3 (2).
- Sabri F. (2017). Kajian Erosi & Sedimentasi Akibat Perubahan Tataguna Lahan Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus DAS Betung Sub DAS Pebari-Jelitik Kabupaten Bangka). Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Secara Terpadu 2017.
- Saragih G,M, Hadrah, Prayoga Ekki. (2022). Analisis Pengaruh Limbah Domestik terhadap Kualitas Air Anak Sungai Asam. *Jurnal Daur Lingkungan*. 5 (2).
- 

- Sari NI. (2013). Konsumsi Air Untuk Industri Dalam Negeri Tidak Wajar. Merdeka.com. Diakses pada 21 Juli 2023.
- Sari EF, Zulfansyah, Rimrawarman. (2011). Konsumsi Air Dan Potensi Penghematan Pada Proses Produksi CPO PT. Perkebunan Nusantara V Pabrik CPO Sei Galuh. Prosiding SNTK TOPI.
- Sasongko EB, Widyastuti E, Priyono RE. (2014). Kajian Kualitas Air Dan Penggunaan Sumur Gali Oleh Masyarakat Di Sekitar Sungai Kaliyasa Kabupaten Cilacap. Jurnal Ilmu Lingkungan. 12 (2)
- "Sejarah Dunia Memerangi Perubahan Iklim" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151128130323-134-94617/sejarah-dunia-memerangi-perubahan-iklim>
- Septriana, F. E., Alnavis, N. B., Gustia, R., Wirawan, R. R., Putri, N. P., Hasibuan, H. S., & Tambunan, R. P. (2020). Dampak Perubahan Tutupan Lahan Pada Sistem Hidrologi Di Jakarta. *Majalah Ilmiah Globe*, 22(1), 51. <https://doi.org/10.24895/mig.2020.22-1.1150>
- Setioningrum RNK, Sulistyorini L, Rahayu WI. (2020). Gambaran Kualitas Air Bersih Kawasan Domestik Dijawa Timur Pada Tahun 2019. Jurnal Ikesma. 16 (2).
- Setyowati, RD. (2011). Studi Literatur Pengaruh Penggunaan Lahan Terhadap Kualitas Air. Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik - Sistem , 12 (1).
- SDI. (2023). *Data Elemen Periode 2023*. Sdi.Babelprov.Go.Id. <https://sdi.babelprov.go.id/sektoral/elemen/periode/61C2802CDB99E/2023#>
- SignSmart. (2022a). *Emisi Sektor Energi*. KLHK. <https://signsmart.menlhk.go.id/v2.1/app/chart/energy>
- SignSmart. (2022b). *Emisi Sektor Limbah*. KLHK. <https://signsmart.menlhk.go.id/v2.1/app/chart/waste>
- SIPSN. (2022). *Komposisi Sampah*. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>
- Soegianto, A. (2010). Ekologi Perairan Tawar. Pusat Penerbitan dan percetakan AUP. Jakarta : Indonesia.
- Suheri A, Kusmana C, Purwanto MY, Setiawan Y. (2019). Model Prediksi Kebutuhan Air Bersih Berdasarkan JumlahPenduduk di Kawasan Perkotaan Sentul City. Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan. 04 (03).
- 

Sulaiman, Asanudin, 2020. ANALISIS PERANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI, Jurnal Akuntanika, ISSN 2407 – 1072. Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2020
<file:///C:/Users/HUAWEI/Downloads/140-258-1-SM.pdf>

Supangat AB. (2008). Pengaruh Berbagai Penggunaan Lahan Terhadap Kualitas Air Sungai Di Kawasan Hutan Pinus Di Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam. V (3).

Suriah, D. (2022, Agustus 8). *Pemanfaatan Kompos Blok dalam rehbilitasi Hutan dan Lahan*. Retrieved from dlhk.babelprov@go.id.

Syari, I. A., Nugraha, M. A., & Hudatwi, M. (2022, April). Dampak Penambangan Timah di Laut Terhadap Ekosistem Terumbu Karang di Pulau Kemuja dan Karang Malang, Kabupaten Bangka Barat Provnsi Kepulauan Bangka Belitung. *Journal of Tropica Marne Science*, 63-69.

Tim Riskesdas 2018. (2018). *Laporan Riskesdas 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.

Ulfa, Farida (2008) Peranan anggaran sebagai salah satu alat perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah: Studi pada pengelolaan dana pembangunan sarana dan prasarana di Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). Pemerintah Republik Indonesia.

UNEP,2023.diakses tanggal 11 Juli 2023. <https://www.unep.org/explore-topics/environmental-governance/about-environmental-governance/environmental-governance>

Utomo, S. W., Sulistyowati, L., & Yulianto, G. (2015). Teori dan Konsep Sistem Manajemen Lingkungan. In *Modul 1*.

WHO. (2011). *Human development index*. World Health Organization. <https://www.who.int/data/nutrition/nlis/info/human-development-index#:~:text=The HDI is a summary composite measure of a country's,knowledge and standard of living>.

World Meteorological Organization. (2023, January 12). *Past eight years confirmed to be the eight warmest on record*. Retrieved from



<https://public.wmo.int/>: <https://public.wmo.int/en/media/press-release/past-eight-years-confirmed-be-eight-warmest-record>


Yasril Yazid1) , Nur Alhidayatillah (2017). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN. Jurnal RISALAH, Vol. 28, No. 1, Juni 2017: 1-9 diakses pada tanggal 23 Juli 2023. <https://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/risalah/article/view/5538/3238>

Yasril Yazid1) , Nur Alhidayatillah (2017). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN. Jurnal RISALAH, Vol. 28, No. 1, Juni 2017: 1-9 diakses pada tanggal 23 Juli 2023. <https://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/risalah/article/view/5538/3238>

Yuliansyah. (2021). Analysis of the human Development Index (HDI) in Indonesia. *Cross-Border Journal of Business Management*, 1(2), 244–256.

Yulianti, A. R. (2023). *Media Briefing Kinerja Fiskal dan Ekonomi Regional, Kemenkeu Kepulauan Babel: Ketahanan Pangan Harus Menjadi Perhatian*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/31571/Media-Briefing-Kinerja-Fiskal-dan-Ekonomi-Regional-Kemenkeu-Kepulauan-Babel-Ketahanan-Pangan-Harus-Menjadi-Perhatian.html#:~:text=“Indeks Ketahanan Pangan Bangka Belitung,tahun 2021%2C” ungkap Edih>

Zulfan Nahrudin, 2018. ISU-ISU STRATEGIS PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP. <file:///C:/Users/HUAWEI/Downloads/ISU-ISU%20STRATEGIS%20PERMASALAHAN%20LINGKUNGAN%20HIDUP.pdf>



LAMPIRAN

PENGOLAHAN DATA ISU



PENGOLAHAN DAN SKORING ISU PRIORITAS

Menggunakan *google form* (https://bit.ly/ISU_IKPLHD2023)

Daftar isu hasil FGD yang dilakukan penilaian terdiri atas isu-isu lingkungan hidup berikut:

1. Eksploitasi dan alih fungsi lahan,
2. Erosi dan sedimentasi,
3. Penurunan kualitas air,
4. Peningkatan konsumsi energi fosil,
5. Penurunan kualitas udara,
6. Bencana akibat cuaca ekstrem (banjir, angin kencang/puting beliung),
7. Belum optimalnya pengelolaan sampah,
8. Masalah ketahanan pangan,
9. Belum optimalnya tata kelola dan manajemen lingkungan hidup,
10. Kerusakan pesisir dan laut.

Kriteria yang digunakan untuk pertimbangan saat dilakukan penilaian adalah:

1. *Urgency* (isu yang dinilai mendesak untuk segera diselesaikan atau ditangani),
2. *Seriousness* (isu yang dinilai menimbulkan dampak serius dan membahayakan),
3. *Growth* (isu yang dinilai terus berkembang dan sulit dicegah),
4. *Rationally* (isu yang dinilai bersifat rasional untuk diselesaikan dengan waktu dan sumber daya yang tersedia).

Penilaian Isu Lingkungan Hidup Daerah

Mohon untuk mengisi form di bawah dengan memilih skor/nilai yang sesuai untuk masing-masing kriteria pada setiap isu/permasalahan yang disebutkan. Semakin besar nilai yang dipilih, maka isu yang dinilai akan semakin diprioritaskan (nilai minimal 1, maksimal 10). Berikut ini arti kriteria yang tercantum:

Urgency: Mendesak untuk segera diselesaikan/ditangani
 Seriousness: Menimbulkan dampak serius dan membahayakan
 Growth: Masalah terus berkembang dan sulit dicegah
 Rationally: Rasional/masuk akal untuk diselesaikan dengan waktu & sumber daya yang ada

Isu yang tertulis adalah hasil pengelompokan dari daftar isu sebelumnya. Berikut ini rumusannya:

- eksploitasi & alih fungsi lahan (termasuk juga kebakaran hutan & lahan)
- erosi & sedimentasi
- rendahnya kualitas air (termasuk juga pembuangan limbah ke badan air)
- peningkatan konsumsi energi fosil
- penurunan kualitas udara (termasuk juga peningkatan suhu udara rata-rata harian)
- bencana karena cuaca ekstrim (termasuk banjir/rob, genangan air, angin kencang & puting beliung)
- timbunan sampah yang tidak terkelola
- ketahanan pangan (termasuk terbatasnya bahan pangan, konsumsi pangan yang meningkat, dan masalah pengangguran)
- manajemen/tata kelola dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan (termasuk masalah pengaduan masyarakat dan pelayanan)
- kerusakan pesisir dan laut

Terima kasih atas partisipasinya.

* Indicates required question

Eksplotasi & alih fungsi lahan *

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urgency	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Seriousness	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Growth	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rationally	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Erosi & sedimentasi *

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urgency	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

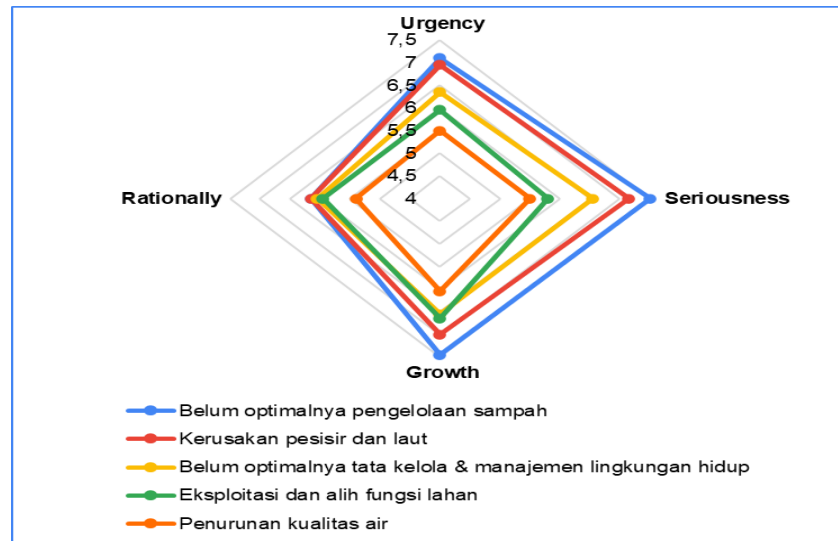
Formulir Penilaian Isu Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023

Gambar di atas menyajikan bentuk formulir penilaian isu lingkungan hidup yang digunakan. Prioritas isu disusun berdasarkan total nilai yang diperoleh dengan menganggap semua kriteria yang digunakan memiliki bobot yang sama dalam penilaian. Hasil rekapitulasi nilai isu-isu lingkungan hidup tersebut sesuai dengan tingkat prioritasnya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Nilai Isu Lingkungan Hidup

Isu Lingkungan Hidup	Total Skor				Total	Peringkat Prioritas
	Urgency	Seriousness	Growth	Rationally		
Belum optimalnya pengelolaan sampah	142	150	149	123	564	1
Kerusakan pesisir dan laut	139	143	140	123	545	2
Belum optimalnya tata kelola & manajemen lingkungan hidup	127	131	131	121	510	3
Masalah ketahanan pangan	125	125	127	115	492	4

Isu Lingkungan Hidup	Total Skor				Total	Peringkat Prioritas
	<i>Urgency</i>	<i>Seriousness</i>	<i>Growth</i>	<i>Rationally</i>		
Peningkatan Eksploitasi dan alih fungsi lahan	119	116	133	119	487	5
Penurunan kualitas air	110	110	121	108	449	6
Bencana akibat cuaca ekstrim	105	112	109	113	439	7
Erosi dan sedimentasi	107	108	118	104	437	8
Peningkatan konsumsi energi fosil	105	114	116	99	434	9
Penurunan kualitas udara	100	100	120	102	422	10



Kelompok Kerja menyetujui kelima isu lingkungan hidup daerah sesuai urutan prioritasnya sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan sampah.
2. Kerusakan pesisir dan laut.
3. Belum optimalnya tata kelola dan manajemen lingkungan hidup.
4. Peningkatan Eksploitasi dan alih fungsi lahan.
5. Penurunan kualitas air.

LAMPIRAN

TABEL DATA DIKPLHD





TABEL DATA DOKUMEN IKPLHD 2023

P R O V I N S I
K E P U L A U A N B A N G K A B E L I T U N G



Tabel - 1 Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2022

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangan	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kawasan Lindung	Kawasan Lindung terhadap Kawasan Bawahannya	1. Kawasan Hutan Lindung		183.625,04	163.730,11	1.406,02	13.163,97	1.398,34
		2. Kawasan Bergambut		0,00				
		3. Kawasan Resapan Air		55.474,34	47.265,52	2.239,74	5.394,73	625,60
	Kawasan Perlindungan Setempat	1. Sempadan Pantai		13.690,95	12.108,05	640,51	686,11	148,09
		2. Sempadan Sungai		5.994,63	3.894,32	139,47	985,96	889,09
		3. Kawasan Sekitar Danau		0,00				
		4. Ruang Terbuka Hijau		0,00				
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	1. Kawasan Suaka Alam		0,00				
		2. Kawasan Suaka Laut dan Perairannya		0,00				
		3. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut		0,00				
		4. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut		0,00				
		5. Kawasan Pantai Berhutan Bakau		0,00				
		6. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut		17.286,01	16.784,89	25,26	350,61	109,20
		7. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut		6.624,59	7.038,67	5,51	3,98	123,17
		8. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan		0,00				
	Kawasan Rawan Bencana	1. Kawasan Rawan Tanah Longsor		13.701,49	13.670,19	27,93	3,37	0,00
		2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang		0,00				
		3. Kawasan Rawan Banjir		0,00				
	Kawasan Lindung Geologi	1. Kawasan Cagar Alam	i. Kawasan Keunikan	0,00				



Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangu n	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Batuan dan Fosil					
			ii. Kawasan Keunikan Bentang Alam	0,00				
			iii. Kawasan Keunikan Proses Geologi	0,00				
		2. Kawasan Rawan Bencana	i. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi	0,00				
			ii. Kawasan Rawan Gempa Bumi	0,00				
			iii. Kawasan Rawan Gerakan Tanah	0,00				
			iv. Kawasan yang Terletak di Zona Patahan Aktif	0,00				
			v. Kawasan Rawan Tsunami	0,00				
			vi. Kawasan Rawan Abrasi	0,00				
			vii. Kawasan Rawan Gas Beracun	0,00				
		3. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah	i. Kawasan Imbuhan Air Tanah	0,00				
			ii. Sempadan Mata Air	0,00				
		1. Cagar Biosfir		0,00				

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2023



Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kawasan Lindung Lainnya	2. Ramsar		0,00				
		3. Taman Buru		0,00				
		4. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah		0,00				
		5. Kawasan Pengungsian Satwa		0,00				
		6. Terumbu Karang		0,00				
		7. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa atau Biota Laut yang Dilindungi		0,00				
Kawasan Budidaya				1.362.864,65	1.159.085,86	38.192,65	136.011,72	12.159,86

Sumber : Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, Peta Penutup Lahan Skala 1:250.000, BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, SK 6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA/10/2021 BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang



Tabel - 2 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2023

No.	Kabupaten/	Luas Lahan Non Pertanian (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Hutan (Ha)	Luas Lahan Badan Air (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	BANGKA	34.665,10	1.123,50	180.673,40	48.267,30	25.081,80	25.081,80
2	BANGKA BARAT	32.248,50	1.487,70	154.015,90	50.631,50	34.759,80	34.759,80
3	BANGKA SELATAN	27.556,00	4.467,70	245.886,90	17.375,40	37.282,10	37.282,10
4	BANGKA TENGAH	30.568,40	0	118.757,30	35.261,90	23.019,20	23.019,20
5	BELITUNG	31.466,40	58,8	74.495,20	67.494,70	40.501,90	40.501,90
6	BELITUNG TIMUR	45.978,00	588,3	90.229,30	56.677,70	43.275,70	43.275,70
7	KOTA PANGKAL PINANG	3.842,40	0	5.900,60	0	206,6	206,6
	JUMLAH	206.324,80	7.726,00	869.958,70	275.708,50	204.127,00	6.083,70

Sumber: IGT Penutup Lahan BPKH wilayah XIII Pangkalpinang Skala 1:250.000 Tahun 2021, 2022; Batas Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termutakhir sesuai Kepmendagri 050-145 Tahun 2022

Tabel-2. A. Perubahan Penutup Lahan Bervegetasi pada Tahun 2015 Menjadi Penutup Lahan Non Vegetasi di Tahun 2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2022

Nama Penutup Lahan	Luas (ha)	Stok Karbon (ton C/ha)	Total Stok Karbon (Ton C)	Emisi Karbon (Ton CO ₂)
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	111	30	3,335	12,230
Total	111	30	3,335	12,230

Sumber: Peta Penutup Lahan Skala 1:250.000, BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, SK 6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA/10/2021 BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang

Tabel – 2. B. Perubahan PL vegetasi di tahun 2015 menjadi PL Lahan Terbuka di tahun 2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2022

Nama Penutup Lahan	Luas (ha)	Stok Karbon (ton C/ha)	Total Stok Karbon (Ton C)	Emisi Karbon (Ton CO ₂)
Belukar	1,948	30	58,427	214,231
Belukar Rawa	442	30	13,259	48,616
Hutan Mangrove	158	227	35,924	131,723
Hutan Mangrove Sekunder	196	53	10,396	38,120
Hutan Rawa Primer	26	110	2,839	10,410
Hutan Rawa Sekunder	813	76	61,562	225,726
Hutan Sekunder	1,512	91	137,784	505,208
Pemukiman	58	4	233	856
Perkebunan	77	63	4,826	17,695
PLK	14	10	137	502
PLKCS	1,524	30	45,730	167,676
Savana	99	4	395	1,449
Total	6,867	729	371,512	1,362,211

Sumber: Peta Penutup Lahan Skala 1:250.000, BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, SK 6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA/10/2021 BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang



Tabel – 2. C. Perubahan PL vegetasi di tahun 2015 menjadi PL Permukiman di tahun 2021

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2022

Nama Penutup Lahan	Luas (ha)	Stok Karbon (ton C/ha)	Total Stok Karbon (Ton C)	Emisi Karbon (Ton CO ₂)
Belukar	1,097	30	32,898	120,625
Belukar Rawa	126	30	3,776	13,845
Hutan Mangrove	34	227	7,630	27,977
Hutan Mangrove Sekunder	50	53	2,632	9,651
Hutan Sekunder	47	91	4,254	15,599
Pemukiman	26,316	4	105,265	385,973
Perkebunan	216	63	13,605	49,885
Pertanian Lahan Kering	3,817	10	38,169	139,953
PLKCS	7,284	30	218,506	801,190
Savana	75	4	300	1,100
Total	39,060	542	427,036	1,565,799

Sumber: Peta Penutup Lahan Skala 1:250.000, BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, SK 6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA/10/2021 BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang



Tabel – 2. D. Perubahan PL vegetasi di tahun 2015 menjadi PL Pertambangan di tahun 2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2021

Nama Penutup Lahan	Luas (ha)	Stok Karbon (ton C/ha)	Total Stok Karbon (Ton C)	Emisi Karbon (Ton CO ₂)
Belukar	2,455.55	30.00	73,666.37	270,110.03
Belukar Rawa	1,133.89	30.00	34,016.56	124,727.38
Hutan Mangrove	1.73	227.30	393.24	1,441.89
Hutan Mangrove Sekunder	734.86	52.98	38,932.96	142,754.20
Hutan Rawa Sekunder	48.65	75.70	3,682.90	13,503.96
Hutan Sekunder	103.25	91.12	9,408.13	34,496.49
Lahan Terbuka	204.31	2.50	510.78	1,872.85
Pemukiman	1,524.42	4.00	6,097.67	22,358.13
Perkebunan	6,409.39	63.00	403,791.71	1,480,569.59
Pertanian Lahan Kering	398.20	10.00	3,982.03	14,600.77
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	3,703.07	30.00	111,092.17	407,337.94
Sawah	92.78	2.00	185.57	680.41

Sumber: Peta Penutup Lahan Skala 1:250.000, BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, SK 6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA/10/2021 BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, data diolah



Tabel – 2. E. Perubahan PL vegetasi di tahun 2015 menjadi PL Pertambangan di tahun 2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2021

E. Perubahan PL vegetasi di tahun 2015 menjadi PL Tambak di tahun 2021					Grand Total
Belukar	137.49				253.793243
Belukar Rawa	101.95				306419.822
Hutan Mangrove Sekunder	11.01				73470.02809
Hutan Rawa Sekunder	39.25				487.2873871
Lahan Terbuka	239.27				83909.49304
Pemukiman	4.67				22155.93967
Pertambangan	65.53				39776.19918
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	188.85				0.153966413
Rawa	3.34				277.808105
Sawah	56.33				49247.37961
Tambak	472.22				8391.854781

Sumber: Peta Penutup Lahan Skala 1:250.000, BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, SK 6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA/10/2021 BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, data diolah

Tabel – 2. F. Stock Karbon dan emisi karbon Emisi Karbon (Ton CO₂) dari perubahan Penutupan Lahan Vegetasi tahun 200- tahun 2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2021

A. Perubahan PL vegetasi di tahun 2020 menjadi PL Lahan Terbuka di tahun 2021				
Nama Penutup Lahan	Luas (ha)	Stok Karbon (ton C/ha)	Total Stok Karbon (Ton C)	Emisi Karbon (Ton CO ₂)
Belukar	1819.289291	30	54,579	200,122
Belukar Rawa	403.9178425	30	12,118	44,431
Hutan Lahan Kering Sekunder	632.0040521	91	57,588	211,157
Hutan Mangrove Sekunder	49.37072474	53	2,616	9,591
Hutan Rawa Sekunder	1178.481329	76	89,211	327,107
Perkebunan	128.8414974	63	8,117	29,762
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	1042.178988	30	31,265	114,640
Savana	53.35705653	4	213	783
Total	5,307	377	255,707	937,592
B. Perubahan PL vegetasi di tahun 2020 menjadi PL Permukiman di tahun 2021				
Nama Penutup Lahan	Luas (ha)	Stok Karbon (ton C/ha)	Total Stok Karbon (Ton C)	Emisi Karbon (Ton CO ₂)
Belukar	419.6	30	12,588	46,156
Belukar Rawa	26.9	30	808	2,964



Hutan Lahan Kering Sekunder	5.8	91	526	1,928
Hutan Mangrove Sekunder	3.1	53	167	611
Perkebunan	206.7	63	13,023	47,750
Pertanian Lahan Kering	289.3	10	2,893	10,607
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	3703.1	30	111,092	407,337
Savana	42.2	4	169	618
Total	4,697	311	141,265	517,971
C. Perubahan PL vegetasi di tahun 2020 menjadi PL Pertambangan di tahun 2021				
Nama Penutup Lahan	Luas (ha)	Stok Karbon (ton C/ha)	Total Stok Karbon (Ton C)	Emisi Karbon (Ton CO ₂)
Belukar	3089.9	30	92697.4	339890.6
Belukar Rawa	1323.6	30	39708.3	145597.2
Hutan Lahan Kering Sekunder	461.8	91.12	42075.4	154276.5
Hutan Mangrove Primer	39.6	227.3	8996.2	32986.0
Hutan Mangrove Sekunder	131.0	52.98	6941.1	25450.6
Hutan Rawa Sekunder	51.5	75.7	3900.8	14303.0
Perkebunan	921.6	63	58063.6	212899.7
Pertanian Lahan Kering	514.3	10	5143.1	18858.2
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	3649.0	30	109469.2	401387.2
Savana	156.5	4	626.1	2295.7
Total	10,339	614	367,621	1,347,944

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2023



D. Perubahan PL vegetasi di tahun 2020 menjadi PL Tambak di tahun 2021				
Nama Penutup Lahan	Luas (ha)	Stok Karbon (ton C/ha)	Total Stok Karbon (Ton C)	Emisi Karbon (Ton CO ₂)
Belukar	175.4	30	5262.0	19294.2
Belukar Rawa	92.4	30	2770.6	10158.7
Hutan Mangrove Sekunder	11.0	52.98	584.9	2144.6
Hutan Rawa Sekunder	100.6	75.7	7618.2	27933.2
Perkebunan	22.8	63	1435.4	5263.0
Pertanian Lahan Kering	119.8	10	1198.1	4392.9
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	187.5	30	5623.8	20620.6
Total	709	292	24,493	89,807
Total A+B+C+D (Ton CO ₂)				2,893,315

Sumber: Peta Penutup Lahan Skala 1:250.000, BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, SK 6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA/10/2021 BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, data diolah



Tabel-3. Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun : 2022

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1.	Hutan Produksi	435,197.38
2.	Hutan Lindung	186,426.25
3.	Taman Nasional	17,244.84
4.	Taman Wisata Alam	7,155.11
5.	Taman Buru	
6.	Cagar Alam	
7.	Suaka Margasatwa	
8.	Taman Hutan Raya	11,953.89
B. Berdasarkan Status Hutan		
1.	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	659,014
2.	Hutan Hak/Hutan Rakyat	-
3.	Hutan Kota	-
4.	Taman Hutan Raya	11,900.38
5.	Taman Keanekaragaman Hayati	-

Sumber : SK .6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Tahun 2020



Tabel-3.A Fungsi Kawasan Hutan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2022

Fungsi Kawasan								
APL	HL	HP	HPK	Tahura	TN	TORA	TWA	Grand Total
2341	1227	1112	2		109		123	4914
257								257
73786	21463	52802	219	2410	3274	70	121	154146
24625	14966	35127	95		1060	23	1891	77787
2210	18354	3220	0		750	13	1304	25852
11105	15756	11525	29		2202	14	141	40771
322		165						487
104		277						381
8714	7743	33626			52	10		50145
19158	34522	28730		1231	2106	6	1577	87329
3930	935	3311			44	13	4	8236
39086	1082	1223		11	25	268	5	41701
231705	14281	28186		1437	8	137		275755
88717	12191	53746	44	1307	306	220		156531
30885	4301	16153	213	64	573	355	219	52763
452566	34121	162258	79	5493	6733	614	1769	663633
8365	705	1422	13					10505
2484	4452	1785				24		8744
7439	195	93						7726
1147	129	64						1340



Fungsi Kawasan								
APL	HL	HP	HPK	Tahura	TN	TORA	TWA	Grand Total
		374						374
1008947	186421	435197	695	11954	17242	1767	7155	1669379

Sumber : SK .6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Tahun 2020, data diolah

Tabel-3.B Luas Tutupan Hutan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2021

Tutupan	APL	HL	HP	HK	TORA
Hutan Mangrove	2,210.5	18,354.2	3,220.5	2,054.3	12.7
Hutan Mangrove Sekunder	11,105.1	15,755.5	11,524.5	2,343.0	14.0
Hutan Primer	321.9		164.9	0.0	
Hutan Rawa Primer	103.5		277.3	0.0	
Hutan Rawa Sekunder	8,713.9	7,743.3	33,626.0	51.6	9.9
Hutan Sekunder	19,158.2	34,521.6	28,729.7	4,914.2	5.6

Sumber : SK .6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Tahun 2020, data diolah



Tabel-4. Keadaan Flora dan Fauna
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data: 2023

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Mamalia	<i>Arctictis binturong</i>	Binturong			✓	
	<i>Rusa unicolor</i>	Rusa Sambar		✓	✓	
	<i>Arctogalidia trivirgata</i>	Musang Akar				✓
	<i>Tragulus napu</i>	Pelanduk		✓	✓	
	<i>Nycticebus bancanus</i>	Kukang	✓	✓	✓	
	<i>Muntiacus muntjak</i>	Kijang		✓	✓	
	<i>Chepalophacus bancanus</i>	Mentilin	✓	✓	✓	
	<i>Manis javanica</i>	Trenggiling		✓	✓	
	<i>Callosciurus prevostii</i>	Tupai 3 Warna				✓
	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>	Musang Pandan				✓
2. Aves	<i>Haliastur indus</i>	Elang Bondol			✓	
	<i>Anthracosceros malayanus</i>	Rangkong Hitam			✓	
3. Reptil	<i>Crocodylus porosus</i>	Buaya Muara			✓	
	<i>Chelonia mydas</i>	Penyu hijau		✓	✓	
	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Penyu Sisik		✓	✓	
	<i>Python reticulatus</i>	Sanca Kembang				✓
4. Mamalia Laut	<i>Orcaella brevirostris</i>	Pesut		✓	✓	
5. Flora yang Dilindungi	<i>Amorphophallus titanum</i>	Bunga Bangkai		✓	✓	



Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Lipistona spp</i>	Palem Kipas				✓
	<i>Nephentes spp</i>	Ketuyut				✓
7. Tumbuhan	<i>Aquilaria malaccensis</i>	Gaharu				✓
8. Moltri	<i>Trochus Niloticus</i>	Lola Merah			✓	

Sumber : BKSDA Resort Bangka Belitung, 2023

Tabel-5. Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2023

No.	Nama Perusahaan	SK	Jenis Satwa yang Ditangkarkan
1	2	3	4
1	Wijaya, SH	SK.22/IV-K.8/2015 tanggal 14 Januari 2015	Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>), rusa totol (<i>Axis axis</i>)
2	Danny Widjaya	SK.44/IV-K.8/2015 tanggal 25 Februari 2015	Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>), rusa totol (<i>Axis axis</i>)
3	PD. Budiman	SK.106/IV-SET/2015 tanggal 9 April 2015	Buaya muara (<i>Crocodylus porosus</i>), Buaya senyulong (<i>Tomistoma schlegelii</i>)
4	PT. Timah (Persero), Tbk	SK.76/IV-K.8/2015 tanggal 15 April 2015	Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>), Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>)
5	Hero Tio	SK.103/IV-K.8/2015 tanggal 11 Juni 2015	Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>), rusa timor (<i>Rusa timorensis</i>), kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>), rusa totol (<i>Axis axis</i>)
6	Benny Setiawan	SK.129/IV-K.8/2015 tanggal 28 Juli 2015	Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>), Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>)

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2023



Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Reva Vergano	SK.146/IV-K.7/2015 tanggal 2 Oktober 2015			Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>), rusa totol (<i>Axis axis</i>)	
8	M. Hasbi JR	SK.25/K.12/TU/KSA/3/2017 tanggal 7 Maret 2017			Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>), Rusa Totol (<i>Axis axis</i>)	
9	Agita Sulistiana Permadi	SK.29/K.12/TU/KSA/3/2017 tanggal 8 Maret 2017			Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>)	
10	Andy Evans Gunady	SK.85/K.12/TU/KSA/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017			Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>), Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>), Rusa Totol (<i>Axis axis</i>)	
11	Yanti Lioe	SK.33/K.12/TU/KSA/1/2018 tanggal 22 Januari 2018			Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>), Rusa Totol (<i>Axis axis</i>)	
12	Gun An	SK.71/K.12/TU/KSA/3/2018 tanggal 5 Maret 2018			Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>), Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>), Rusa Totol (<i>Axis axis</i>)	
13	Zunaria	SK.72/K.12/TU/KSA/3/2018 tanggal 5 Maret 2018			Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>), Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>), Rusa Totol (<i>Axis axis</i>)	
14	Muhamad Adystia Sunggara	SK.188/K.12/TU/KSA/7/2018 tanggal 13 Juli 2018			Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>), Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>), Rusa Totol (<i>Axis axis</i>)	
15	Indra Setiawan	SK.193/K.12/TU/KSA/7/2018 tanggal 18 Juli 2018			Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>), Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>), Rusa Totol (<i>Axis axis</i>)	
16	Dawin	SK.208/K.12/TU/KSA/7/2018 tanggal 30 Juli 2018			Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>), Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>), Rusa Totol (<i>Axis axis</i>)	
17	Budiman	SK.344/K.12/TU/KSA/8/2018 tanggal 23 Agustus 2018			Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>), Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>), Rusa Totol (<i>Axis axis</i>)	
18	Hendry	SK.347/K.12/TU/KSA/8/2018 tanggal 24 Agustus 2018			Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>), Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>), Rusa Totol (<i>Axis axis</i>)	
19	Replianto	SK.20/K.12/TU/KSA/1/2019 tanggal 10 Januari 2019			Rusa Timor (<i>Rusa timorensis</i>), Rusa Totol (<i>Axis axis</i>)	



Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	Ongky Budiato Tjhin	SK. 26/K.12/TU/KUM/1/2022 Tanggal 21 Januari 2020			Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>), Rusa Timor (<i>Rusa timorensis</i>), Rusa Totol (<i>Axis axis</i>) dan Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>)	
21	PT. Timah Tbk	SK.845/KSDAE/SET.3/KSA.2/8/2021 Tanggal 4 Agustus 2021			Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>) dan Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>)	

Keterangan: Laporan Inventarisasi Potensi Kawasan dan Patroli Kawasan Tahun 2023

Sumber: Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, 2023

Tabel-6. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2022

No.	Kabupaten/Kota	Kritis (Ha)		Sangat Kritis (Ha)		Potensial Kritis (Ha)		Agak Kritis (Ha)		Tidak Kritis (Ha)	
		Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bangka	8	4	203	19	30	127	3	4	52	61,33
2	Bangka Barat	10,134	1,456	0	0	26,678	98,287	1,613	1,456	77,95	59,194
3	Bangka Selatan	17,682	4,741	323	20	65,857	173,372	2,738	4,741	53,125	38,41
4	Bangka Tengah	20,213	2,406	696	3	44,022	58,811	3,673	2,406	55,773	20,373
5	Belitung	7,828	2,223	0	0	25,347	49,316	5,984	2,223	45,389	75,907
6	Belitung Timur	9,307	2,561	34	0	21,696	63,588	4,144	2,561	65,025	64,581
7	Pangkalpinang	0	1,2	0	0	0	5,018	0	1,2	0	4,255

Keterangan:

Menurut UU 37 tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air

Menurut Peraturan Dirjen nomor P.3/PDASHL/SET/KUM.1/7/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis

Sumber: BPDASHL, 2019; Keputusan MenLHK Nomor SK.6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLH.2/10/2021; Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 7. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun : 2019

No.	Tebal Tanah	Ambang Kritis Erosi (PP 150/2000) (mm/10 tahun)	Besaran erosi (mm/10 tahun)	Status Melebihi/Tidak
1	< 20 cm	0,2 - 1,3	NA	NA
2	20 - < 50 cm	1,3 - < 4	NA	NA
3	50 - < 100 cm	4,0 - < 9,0	NA	NA
4	100 - 150	9,0 - 12	NA	NA
5	> 150 cm	> 12	NA	NA

Keterangan : Tidak dilakukan pemantauan akibat erosi

Sumber: DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel-8. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering
Provinsi : Kepulauan Bangka Tengah (Bangka Tengah)
Tahun : 2022

No	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a	Perkebunan Karet di Desa Air Mesu, Kabupaten Bangka Tengah				
1		Ketebalan Solum	< 20 cm	> 20 cm	Melebihi
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	< 40 %	Tidak
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	71 % pasir*	Melebihi
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	0,5 g/cm ³	Tidak
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-
6		Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0 cm/jam	-	-
7		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	5.0	Melebihi
8		Daya Hantar Listrik /DHL	> 4,0 mS/cm	0.030	Melebihi
9		Redoks	< 200 mV	491	Melebihi
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1,08 x 10 ⁷	Melebihi
b	Perkebunan Singkong di Desa Puput, Kabupaten Bangka Tengah				
1		Ketebalan Solum	< 20 cm	> 20 cm	Melebihi
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	0	Tidak
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	70 % pasir*	Melebihi
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	0,5 g/cm ³	Tidak
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-



No	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
6		Derajat Pelulutan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0 cm/jam	-	-
7		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	4.8	Melebihi
8		Daya Hantar Listrik /DHL	> 4,0 mS/cm	0.090	Melebihi
9		Redoks	< 200 mV	500	Melebihi
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1,96 x 10 ⁷	Melebihi
c	Perkebunan Kopi di Desa Teru, Kabupaten Bangka Tengah				
1		Ketebalan Solum	< 20 cm	> 20 cm	Melebihi
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	0	Tidak
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	52 % pasir*	Melebihi
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	0,5 g/cm ³	Tidak
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-
6		Derajat Pelulutan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0 cm/jam	-	-
7		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	5.0	Melebihi
8		Daya Hantar Listrik /DHL	> 4,0 mS/cm	0.050	Melebihi
9		Redoks	< 200 mV	489	Melebihi
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1,14 x 10 ⁷	Melebihi
d	Perkebunan Lada di Desa Pinang Sebatang, Kabupaten Bangka Tengah				
1		Ketebalan Solum	< 20 cm	> 20 cm	Melebihi
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	37.50%	Tidak
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	33 % pasir*	Melebihi
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	0,5 g/cm ³	Tidak
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-
6		Derajat Pelulutan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0 cm/jam	-	-
7		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	4.5	Melebihi
8		Daya Hantar Listrik /DHL	> 4,0 mS/cm	0.063	Melebihi
9		Redoks	< 200 mV	496	Melebihi
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1,52 x 10 ⁷	Melebihi
e	Perkebunan Singkong di Desa Perlang, Kabupaten Bangka Tengah				
1		Ketebalan Solum	< 20 cm	> 20 cm	Melebihi
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	18.75%	Tidak
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	69 % pasir*	Melebihi
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	0,5 g/cm ³	Tidak
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-
6		Derajat Pelulutan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0 cm/jam	-	-
7		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	4.8	Melebihi
8		Daya Hantar Listrik /DHL	> 4,0 mS/cm	0.036	Melebihi
9		Redoks	< 200 mV	457	Melebihi
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	2,76 x 10 ⁷	Melebihi
f	Hutan Taman Industri Bangkanesia di Desa				
1		Ketebalan Solum	< 20 cm	> 20 cm	Melebihi
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	12.50%	Tidak
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	49 % pasir*	Melebihi
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		

No	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
4	Perlang, Kabupaten Bangka Tengah	Berat Isi	$> 1,4 \text{ g/cm}^3$	$0,5 \text{ g/cm}^3$	Tidak
5		Porositas Total	$< 30 \% ; > 70 \%$	-	-
6		Derajat Pelulusan air	$< 0,7 \text{ cm/jam} ; > 8,0 \text{ cm/jam}$	-	-
7		pH (H_2O) 1 : 2,5	$< 4,5 ; > 8,5$	4.8	Melebihi
8		Daya Hantar Listrik /DHL	$> 4,0 \text{ mS/cm}$	0.029	Melebihi
9		Redoks	$< 200 \text{ mV}$	426	Melebihi
10		Jumlah Mikroba	$< 10^2 \text{ cfu/g tanah}$	$1,36 \times 10^7$	Melebihi

Keterangan : Inventarisasi dan Pengelolaan Lahan Kritis Kabupaten Bangka Tengah

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Tabel 9. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Tahun : 2022

No	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persawahan Namang di Desa Namang	Subsidensi Gambut di Atas Pasir Kuarsa	$> 35 \text{ cm/tahun}$ untuk ketebalan gambut $\geq 3 \text{ m}$ atau $10\% /5 \text{ tahun}$ untuk ketebalan gambut $< 3 \text{ m}$	-	-
2	Persawahan Namang di Desa Namang	Kedalaman Lapisan Berpirit dari Permukaan Tanah	$< 25 \text{ cm}$ dengan $\text{pH} \leq 2,5$	0	Tidak melebihi
3	Persawahan Namang di Desa Namang	Kedalaman Tanah Air Dangkal	$> 25 \text{ cm}$	22 cm	Tidak melebihi
4	Perkebunan Kelapa di Desa Kurau	Subsidensi Gambut di Atas Pasir Kuarsa	$> 35 \text{ cm/tahun}$ untuk ketebalan gambut $\geq 3 \text{ m}$ atau $10\% /5 \text{ tahun}$ untuk ketebalan gambut $< 3 \text{ m}$	-	-
5	Perkebunan Kelapa di Desa Kurau	Kedalaman Lapisan Berpirit dari Permukaan Tanah	$< 25 \text{ cm}$ dengan $\text{pH} \leq 2,5$	0	Tidak melebihi
6	Perkebunan Kelapa di Desa Kurau	Kedalaman Tanah Air Dangkal	$> 25 \text{ cm}$	25 cm	Melebihi

Keterangan : Kegiatan Pemantauan Kualitas Tanah Tahun 2021

Sumber : DIKPLHD Kabupaten/Kota 2021

Tabel 10. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove
Provinsi : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun : 2022

No	Lokasi	Luas Lokasi (Ha)	Persentase tutupan (%)	Kerapatan (pohon/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	54.94	< 50%	< 1000
		229.66	≥ 50% - < 75%	≥ 1000 - < 1500
		4,882.23	≥ 75%	≥ 1500
2	Kabupaten Belitung	10.35	< 50%	< 1000
		19.83	≥ 50% - < 75%	≥ 1000 - < 1500
		9,350.51	≥ 75%	≥ 1500
3	Kabupaten Bangka Barat	29.63	< 50%	< 1000
		116.59	≥ 50% - < 75%	≥ 1000 - < 1500
		3,557.10	≥ 75%	≥ 1500
4	Kabupaten Bangka Tengah	16.34	< 50%	< 1000
		124.95	≥ 50% - < 75%	≥ 1000 - < 1500
		4,559.00	≥ 75%	≥ 1500
5	Kabupaten Bangka Selatan	18.63	< 50%	< 1000
		32.10	≥ 50% - < 75%	≥ 1000 - < 1500
		9,729.76	≥ 75%	≥ 1500
6	Kabupaten Belitung Timur	-	< 50%	< 1000
		26.42	≥ 50% - < 75%	≥ 1000 - < 1500
		4,981.58	≥ 75%	≥ 1500
7	Kota Pangkalpinang	0.89	< 50%	< 1000
		24.76	≥ 50% - < 75%	≥ 1000 - < 1500
		502.50	≥ 75%	≥ 1500

Keterangan:

Sumber : Informasi Geospasial Tematik Mangrove Tahun 2021 yang diakses melalui aplikasi SIGAP KLHK, 2022

Tabel 11. Luas dan Kerusakan Padang Lamun
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2022

No	Kabupaten	Luas (Ha)	Persentase Area Kerusakan (%)
1	2	3	4
	Kabupaten Bangka Tengah		
1	Pulau Ketawai	-	0,59
2	Pulau Semujur	-	0,26
	Kabupaten Bangka Selatan		
3	Pulau Kelapan	-	0,04
4	Pulau Seniur	-	0,01
5	Pulau Seniur	-	0,03
6	Pulau Ibul	-	0,03
7	Pulau Lepar (Penutuk)	-	0,55
8	Desa Tukak	-	0,05
9	Desa Tukak	-	0,27
	Kabupaten Belitung		
10	Pantai Bukit Berahu	-	0,48
11	Pantai Bukit Berahu	-	0,02
12	Pantai Tanjung Binga (Pelabuhan)	-	0,18
13	Pantai Tanjung Binga (PT.Belpi)	-	0,18
14	Pantai Tanjung Binga (PT.Belpi)	-	0,16
15	Pantai Tanjung Kelayang	-	0,28
16	Pantai Tanjung Kelayang	-	0,08
17	Pulau Seliu, Membalong	-	0,42
18	Pulau Seliu, Membalong	-	0,18
19	Pulau Buloh	-	0,06
20	Selat Nasik	-	0,38
21	Selat Nasik	-	0,3
22	Selat Nasik	-	0,37
23	Selat Nasik	-	0,38
	Belitung Timur		
24	Pantai Aik Lanun	-	0,05
25	Pantai Aik Lanun	-	0,15
26	Pantai Aik Lanun	-	0,15
27	Pantai Aik Lanun	-	0,36
28	Pantai Aik Lanun	-	0,27
29	Pantai Aik Lanun	-	0,17
30	Pantai Aik Lanun	-	0,23
31	Pantai Aik Lanun	-	0,1
32	Pantai Aik Lanun	-	0,1
33	Pantai Aik Lanun	-	0,04
34	Pantai Aik Lanun	-	0,08



No	Kabupaten	Luas (Ha)	Persentase Area Kerusakan (%)
1	2	3	4
35	Pantai Aik Lanun	-	0,04
36	Pantai Aik Lanun	-	0,05
37	Pantai Aik Lanun	-	0,05
38	Pantai Aik Lanun	-	0,03
39	Pantai Aik Lanun	-	0,12
40	Pantai Aik Lanun	-	0,04
41	Pantai Aik Lanun	-	0,17
42	Pantai Aik Lanun	-	0,16
43	Pantai Setinggi	-	0,12
44	Pulau Melidang, Gantong	-	0,04
45	Pulau Melidang, Gantong	-	0,05
46	Pulau Melidang, Gantong	-	0,01
47	Pulau Melidang, Gantong	-	0,15

Keterangan:

Sumber : DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel-12. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang

Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2017

No.	Kab./Kota	Luas Tutupan (Ha)	Sangat Baik (%)	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak (%)
1	Kabupaten Bangka	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Bangka Barat	-	-	-	-	-
3	Kabupaten Bangka Tengah	-	-	-	-	-
4	Kabupaten Bangka Selatan	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Belitung	-	-	-	-	-
6	Kabupaten Belitung Timur	-	-	-	-	-
7	Kota Pangkalpinang	-	-	-	-	-

Keterangan : Hanya dilakukan pengambilan sampel pada beberapa titik, sesuai format Tabel 10.A.

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023



Tabel 12.a Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2018

Nomor	Waktu Pengambilan Data	Koordinat		Lokasi	Hard Coral life (%)	Dead Coral (%)	Algae (%)	Other (%)	Sand/Rubble (%)	Soft Coral	Sponge	Fleshy Seaweed	Kategori
		Lintang	Bujur										
1	17 Oktober 2018	-27.093	1.084.335	Utara Pulau Memperak	85,43%	8,34%	6,23%	0,00%	0,00%	-	-	-	sangat baik
2	18 Oktober 2018	-27,112	1.084.399	Timur Pulau Memperak	77,97%	11,80%	4,97%	2,10%	3,17%	-	-	-	sangat baik
3	19 Oktober 2018	-27.187	1.084.398	Timur Pulau Memperak	28,40%	14,70%	48,80%	4,40%	2,47%	-	-	-	sedang
4	20 Oktober 2018	-2.714	1.084.308	Selatan Pulau Memperak	48,23%	20.702	9.235	0,33%	0	-	-	-	baik
5	12-20 November 2018	-2.492	1.085.406	Utara Pulau Nangka	69,20%	0,13%	25,73%	0,27%	2,60%	0,6			
6	12-20 November 2018	-25.046	1.085.512	Selatan Pulau Nangka	39,80%	0,00%	41,60%	0,67%	14,60%	2,20%	0,20%	0,93%	baik
7	12-20 November 2018	-27.095	1.084.335	Pulau Memperak (Timur)	54,67%	0,00%	40,53%	0,80%	1,33%	0,00%	0,20%	2,47%	baik
8	12-20 November 2018	-27.229	1.084.242	Karang Nenek	67,27%	0,00%	27,20%	1.205	3,53%	0,40%	0,27%	0,13%	baik
9	12-20 November 2018	-30.496	1.073.592	Pulau Bangkai (Timur)	59,84%	0,07%	28,69%	0,40%	6,47%	0,07%	0,40%	4,07%	baik
10	12-20 November 2018	-3.053	1.073.659	Pulau Buntar (Barat)	65,18%	0,00%	31,29%	0,80%	1,93%	0,00%	0,73%	0,07%	baik
11	12-20 November 2018	-30.591	1.073.692	Pulau Buntar (Timur)	51,47%	0,00%	41,93%	1,67%	4,47%	0,07%	0,20%	0,20%	baik
12	12-20 November 2018	-2.876	1.073.485	Pulau Mendanau (Barat)	35,87%	0,00%	56,87%	0,13%	3,47%	0,00%	0,93%	2,73%	cukup baik
13	12-20 November 2018	-28.108	1.074.483	Pulau Mendanau (Utara)	61,67%	0,00%	35,80%	1,20%	0,53%	0,00%	0,47%	0,33%	baik
14	12-20 November 2018	-27.774	1.075.279	Kali Mambang	27,87%	0,00%	57,07%	3,47%	10,54%	0,00%	0,20%	0,87%	cukup baik

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



No.	Waktu Pengambilan Data	Koordinat		Lokasi	Hard Coral Life	Dead Coral	Algae	Other	Sand/Rubble	Kategori
					(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	18-11-2016	2° 51' 48.934" S	106° 44' 8.770" E	Timur Laut P. Burung	23,92%	1,80%	0,00%	18,50%	55,78%	BURUK
2	18-11-2016	2° 52' 31.994" S	106° 44' 55.885" E	Utara P. Burung	27,80%	1,50%	9,90%	5,30%	55,50%	SEDANG
3	18-11-2016	2° 52' 51.272" S	106° 48' 1.480" E	Tanjung Sangkar	24,14%	0,90%	48,88%	0,30%	25,78%	BURUK
4	18-11-2016	2° 50' 42.480" S	106° 47' 8.330" E	Barat Daya P. Seniur	0,00%	1,76%	27,08%	1,68%	69,48%	BURUK
5	18-11-2016	2° 49' 58.590" S	106° 47' 5.370" E	Karang Aji	58,06%	20,74%	0,00%	3,90%	17,30%	BAIK
6	18-11-2016	2° 50' 18.740" S	106° 48' 17.580" E	Tanjung Ular	24,88%	0,00%	0,00%	2,86%	72,26%	BURUK
7	18-11-2016	2° 51' 4.388" S	106° 49' 34.871" E	Karang Gajah Mas	28,50%	6,22%	43,60%	0,48%	21,20%	SEDANG
8	21 - 11 - 2016	2° 50' 35.167" S	106° 51' 15.167" E	Timur Laut P. Kelapan	60,34%	35,72%	0,00%	3,54%	0,40%	BAIK
9	20-11-2016	2° 51' 28.627" S	106° 51' 25.884" E	Barat P. Kelapan	18,78%	21,56%	45,50%	0,40%	13,76%	BURUK
10	21 - 11 - 2016	2° 54' 46.278" S	106° 50' 54.002" E	Timur Laut P. Lepar	20,02%	38,06%	22,84%	9,44%	9,64%	BURUK
11	21 - 11 - 2016	2° 55' 38.867" S	106° 53' 3.977" E	Timur Laut P. Lepar	51,26%	40,82%	2,20%	2,70%	3,02%	BAIK
12	21 - 11 - 2016	2° 55' 57.338" S	106° 54' 11.966" E	Selatan P. Ketawai	19,72%	55,14%	14,36%	7,98%	2,80%	BURUK
13	19-11-2016	2° 51' 44.809" S	107° 0' 53.168" E	Barat Daya P. Gusung Asam	47,04%	4,30%	22,96%	5,56%	20,14%	SEDANG
14	20-11-2016	2° 48' 45.583" S	107° 3' 15.224" E	Barat P. Ketawai	60,16%	31,14%	1,24%	6,02%	1,44%	BAIK
15	20-11-2016	2° 49' 32.074" S	107° 4' 16.745" E	Utara P. Ketawai	38,86%	24,66%	27,44%	4,68%	4,36%	SEDANG
16	20-11-2016	2° 52' 31.548" S	107° 5' 54.546" E	Timur P. Pongok	17,04%	4,90%	11,60%	22,96%	43,50%	BURUK
17	20-11-2016	2° 55' 16.324" S	107° 4' 55.834" E	Selatan P. Pongok	19,72%	51,52%	25,62%	3,14%	0,00%	BURUK
18	19-11-2016	2° 53' 38.774" S	107° 1' 52.590" E	Barat daya P. Pongok	7,64%	29,44%	42,22%	4,10%	16,60%	BURUK
19	21-11-2016	2° 53' 55.086" S	106° 50' 9.593" E	Timur Laut P. Lepar	4,50%	0,00%	60,26%	3,16%	32,08%	BURUK
20	19-11-2016	2° 54' 50.501" S	107° 3' 5.818" E	Selatan P. Kelapan	75,80%	23,32%	0,00%	0,62%	0,26%	SANGAT BAIK
21	20-11-2016	2° 50' 43.768" S	107° 5' 22.682" E	Timur P. Kelapan	63,68%	19,14%	14,16%	0,44%	2,58%	BAIK
22	19-11-2016	2° 50' 15.950" S	107° 2' 1.198" E	Barat P. Kelapan	57,56%	13,04%	25,58%	0,56%	3,26%	BAIK
23	21-11-2016	2° 55' 33.262" S	106° 52' 30.590" E	Mayora P. Lepar	16,88%	27,64%	14,98%	6,64%	33,86%	BURUK
24	18-11-2016	2° 50' 27.540" S	106° 50' 13.960" E	Utara P. Kelapan	8,10%	6,92%	75,26%	0,00%	9,72%	BURUK
25	18-11-2016	2° 51' 48.934" S	106° 44' 8.770" E	Timur Laut P. Burung	20,94%	76,88%	0,00%	0,98%	1,20%	BURUK
26	18-11-2016	2° 52' 31.994" S	106° 44' 55.885" E	Utara P. Burung	57,32%	9,38%	28,90%	4,40%	0,00%	BAIK

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2023



No.	Waktu Pengambilan Data	Koordinat		Lokasi	Hard Coral Life	Dead Coral	Algae	Other	Sand/Rubble	Kategori
					(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
27	18-11-2016	2° 52' 51.272" S	106° 48' 1.480" E	Tanjung Sangkar	54,02%	32,98%	2,16%	0,56%	10,28%	BAIK
28	18-11-2016	2° 50' 42.480" S	106° 47' 8.330" E	Barat Daya P. Seniur	58,96%	0,00%	30,40%	0,42%	10,22%	BAIK
29	18-11-2016	2° 49' 58.590" S	106° 47' 5.370" E	Karang Aji	72,74%	15,90%	2,60%	0,90%	7,86%	BAIK
30	18-11-2016	2° 50' 18.740" S	106° 48' 17.580" E	Tanjung Ular	70,10%	29,90%	0,00%	0,00%	0,00%	BAIK
31	18-11-2016	2° 51' 4.388" S	106° 49' 34.871" E	Karang Gajah Mas	58,60%	41,40%	0,00%	0,00%	0,00%	BAIK
32	21 - 11 - 2016	2° 50' 35.167" S	106° 51' 15.167" E	Timur Laut P. Kelapan	31,60%	52,80%	0,60%	0,00%	15,00%	SEDANG
33	20-11-2016	2° 51' 28.627" S	106° 51' 25.884" E	Barat P. Kelapan	57,00%	39,00%	0,60%	1,10%	2,30%	BAIK
34	21 - 11 - 2016	2° 54' 46.278" S	106° 50' 54.002" E	Timur Laut P. Lepar	75,46%	18,18%	3,70%	0,00%	2,66%	SANGAT BAIK
35	21 - 11 - 2016	2° 55' 38.867" S	106° 53' 3.977" E	Timur Laut P. Lepar	65,30%	22,62%	9,64%	0,36%	2,08%	BAIK
36	21 - 11 - 2016	2° 55' 57.338" S	106° 54' 11.966" E	Selatan P. Ketawai	66,58%	32,96%	0,00%	0,46%	0,00%	BAIK
37	19-11-2016	2° 51' 44.809" S	107° 0' 53.168" E	Barat Daya P. Gusung Asam	34,42%	31,50%	21,14%	0,26%	12,68%	SEDANG
38	20-11-2016	2° 48' 45.583" S	107° 3' 15.224" E	Barat P. Ketawai	42,86%	54,64%	0,00%	1,98%	0,52%	SEDANG
39	20-11-2016	2° 49' 32.074" S	107° 4' 16.745" E	Utara P. Ketawai	72,94%	24,52%	0,00%	1,30%	1,24%	BAIK
40	20-11-2016	2° 52' 31.548" S	107° 5' 54.546" E	Timur P. Pongok	27,96%	63,44%	3,86%	0,38%	4,36%	SEDANG
41	20-11-2016	2° 55' 16.324" S	107° 4' 55.834" E	Selatan P. Pongok	70,80%	28,70%	0,00%	0,50%	0,00%	BAIK
42	19-11-2016	2° 53' 38.774" S	107° 1' 52.590" E	Barat daya P. Pongok	69,44%	29,14%	0,00%	1,42%	0,00%	BAIK
43	21-11-2016	2° 53' 55.086" S	106° 50' 9.593" E	Timur Laut P. Lepar	76,38%	14,40%	2,92%	1,82%	4,48%	SANGAT BAIK
44	19-11-2016	2° 54' 50.501" S	107° 3' 5.818" E	Selatan P. Kelapan	14,00%	54,90%	0,00%	0,00%	31,10%	BURUK
45	20-11-2016	2° 50' 43.768" S	107° 5' 22.682" E	Timur P. Kelapan	40,58%	45,12%	3,92%	0,30%	10,08%	SEDANG
46	19-11-2016	2° 50' 15.950" S	107° 2' 1.198" E	Barat P. Kelapan	21,00%	1,36%	51,14%	1,26%	25,24%	BURUK
47	21-11-2016	2° 55' 33.262" S	106° 52' 30.590" E	Mayora P. Lepar	14,98%	13,46%	52,00%	1,10%	18,46%	BURUK
48	18-11-2016	2° 50' 27.540" S	106° 50' 13.960" E	Utara P. Kelapan	51,26%	43,96%	0,00%	0,60%	4,18%	BAIK
49	18-11-2016	2° 51' 48.934" S	106° 44' 8.770" E	Timur Laut P. Burung	12,94%	40,18%	37,10%	0,74%	9,04%	BURUK
50	18-11-2016	2° 52' 31.994" S	106° 44' 55.885" E	Utara P. Burung	86,90%	12,08%	0,00%	0,44%	0,58%	SANGAT BAIK
51	18-11-2016	2° 52' 51.272" S	106° 48' 1.480" E	Selatan P. Memperak	68,80%	28,72%	0,70%	0,00%	1,78%	BAIK
52	18-11-2016	2° 50' 42.480" S	106° 47' 8.330" E	P. Bakau	69,88%	20,46%	4,78%	3,26%	1,62%	BAIK
53	18-11-2016	2° 49' 58.590" S	106° 47' 5.370" E	Karang Aji	61,40%	37,90%	0,00%	0,00%	0,70%	BAIK

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2023



No.	Waktu Pengambilan Data	Koordinat		Lokasi	Hard Coral Life	Dead Coral	Algae	Other	Sand/Rubble	Kategori
					(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
54	18-11-2016	2° 50' 18.740" S	106° 48' 17.580" E	Tanjung Ular	62,90%	31,90%	0,00%	0,60%	4,60%	BAIK
55	18-11-2016	2° 51' 4.388" S	106° 49' 34.871" E	Karang Gajah Mas	62,90%	31,90%	0,00%	0,60%	4,60%	BAIK
56	21 - 11 - 2016	2° 50' 35.167" S	106° 51' 15.167" E	Timur Laut P. Kelapan	36,10%	45,52%	16,34%	0,00%	2,04%	SEDANG
57	20-11-2016	2° 51' 28.627" S	106° 51' 25.884" E	Barat P. Kelapan	35,54%	61,70%	0,00%	1,02%	1,74%	SEDANG
58	21 - 11 - 2016	2° 54' 46.278" S	106° 50' 54.002" E	Selatan Pulau kera	45,88%	50,74%	1,62%	1,12%	0,64%	SEDANG
59	21 - 11 - 2016	2° 55' 38.867" S	106° 53' 3.977" E	Karang Tengah Selat Nasik	11,08%	6,30%	35,12%	3,32%	44,18%	BURUK
60	21 - 11 - 2016	2° 55' 57.338" S	106° 54' 11.966" E	Selatan P. Ketawai	16,90%	23,80%	50,60%	0,00%	8,70%	BURUK

Keterangan: -

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 12.b Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2023

No.	Luas Tutupan (ha)	Kondisi (ha)				Kondisi (%)			
		Baik	Sedang	Rusak	Tidak Teridentifikasi	Baik	Sedang	Rusak	Tidak Teridentifikasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	17.744,85	12.474,54		5.270,31		70		30	

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023



Tabel 13. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2022

No.	Jenis Penggunaan Baru	Luas Lama (Ha)	Luas Baru (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Permukiman	17.928	19.814
2.	Industri	0	0
3.	Tanah kering	0	0
4.	Perkebunan	51.789	61.352
5.	Semak belukar	86.180	33.241
6.	Tanah kosong	0	0
7.	Perairan/kolam	4.064	4.330
8.	Lahan Terbuka	2.019	1.449
9	Tambak	305	457
10	Pertambangan	50.633	50.562

Sumber: Pola Ruang Kawasan Pertanian RTRW Prov Kep Bangka Belitung Tahun 2014-2034; Penutup Lahan Tahun 2020 dan 2021- BPKH Wil XIII Pangkalpinang (data telah diolah)

Tabel-14. Jenis Pemanfaatan Lahan
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun : 2019

No.	Jenis Pemanfaatan	Jumlah	Skala Usaha	Luas (Ha)	Keterangan
1.	Tambang		Besar		
			Menengah		
			Kecil		
			Rakyat		
2.	Perkebunan		Besar	391,064	
			Menengah		
			Kecil		
			Rakyat		
3.	Pertanian		Besar		



No.	Jenis Pemanfaatan	Jumlah	Skala Usaha	Luas (Ha)	Keterangan
			Menengah		
			Kecil		
			Rakyat	151,531	
4.	Pemanfaatan		Besar		
			Menengah		
			Kecil		
			Rakyat	43,315	

Keterangan : Data yang tersedia tidak dikelompokkan menjadi skala besar, sedang, kecil, atau rakyat

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2019

Tabel-14.a Luas Lahan Menurut Penggunaan Per Kabupaten/Kota
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2022

Penggunaan Lahan/ <i>land use</i>	Luas
I. Lahan Pertanian/ Agriculture Area:	
I.1 Lahan Sawah/ <i>Paddy wetfield</i>	4.705,22
I.2 Lahan Tegalan/ Ladang	601.351,49
II. Lahan Bukan Pertanian	
II.1 Perkebunan	253.359,81
II.2 Pertambangan	155.168,33
II.3 Permukiman	38.845,94
II.4 Tambak	522,24
II.5 Bandara/ Pelabuhan	253,51
II.6 Transmigrasi	2.416,80

Sumber : Data Penutup Lahan BPKH wilayah XIII Pangkalpinang Tahun 2021, Data diolah 2022



Tabel-15. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2022

No	Lokasi		Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas IUP (Ha)	Luas Areal Produksi (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
	Kabupaten/Kota	Desa/Kecamatan					
1	Belitung Timur	Desa Limbongan Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Hamparan Mineralindo Abadi	198,00		
2	Bangka Tengah	Desa Perlang, Kec. Lubuk Besar	Pasir Kuarsa	PT. Mitra Persada Resources	71,00	0	0
3	Belitung	Desa Badau, Kec. Badau	Kaolin	CV. Putra Belitung Mandiri	38,07		
4	Belitung Timur	Desa Lilangan Kec. Gantung,	Pasir Kuarsa	PT. Kurnia Mandiri Adiperkasa	362,00	4,5	174,793
5	Bangka Selatan	Desa Pasir Putih Kec. Tukak Sadai	Pasir Kuarsa	PT. Babel Pasir Persada	135,20		
6	Bangka	Desa Gunung Pelawan, Kec. Belinyu	Kaolin	CV. Gunung Lebak	4,82	0,5	5,097
7	Belitung	Desa Badau, Kec. Badau	Kaolin	CV. Mitra Maju Bersama	117,90		
8	Bangka Tengah	Desa Perlang, Kec. Lubuk Besar	Pasir Kuarsa	PT. Walie Tampas Citratama	150,40	0,3	63,182
9	Bangka Tengah	Desa Perlang, Kec. Lubuk Besar	Pasir Kuarsa	PT. Walie Tampas Citratama	46,20	0	0
10	Bangka Tengah	Desa Perlang, Kec. Lubuk Besar	Pasir Kuarsa	PT. Mitra Persada Resources	32,84	0,86	53,704
11	Bangka Tengah	Lubuk Besar	Pasir Kuarsa	PT. Tambang Jaya Indah	189,30	0	0
12	Bangka Barat	Desa Kelabat Kecamatan Jebus	Kaolin	PT. Putra Kusuma Abadi	10,00		
13	Bangka Selatan	Desa Sebagian Kec. Simpang Rimba	Pasir Kuarsa	CV. Prima Sari Utama	120,00		
14	Belitung Timur	Desa Dukong Kec Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT. Belitung Sand Mining	186,00	0	0
15	Belitung Timur	Desa Dukong Kec Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT. Belitung Sand Mining	192,00	5,04	321,341
16	Belitung Timur	Desa Simpang Pesak, Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT. Belitung Sand Mining	71,30	0	0
17	Belitung Timur	Desa Limbongan, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Belitung Sand Mining	1.088,00	9,49	967,326
18	Belitung Timur	Desa Limbongan, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Belitung Sand Mining	539,70	0	0
19	Belitung Timur	Desa Limbongan, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT Sriyudi Alam Antarnusa	164,10		
20	Belitung Timur	Desa Lenggang, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Pacific Dipta Karya	197,00	0,26	10
21	Belitung Timur	Desa Jangkar Asam, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Hero Progres International	198,00	0,66	26,592
22	Belitung Timur	Desa Jangkar Asam, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Hero Progres International	180,00	0,2	15
23	Belitung Timur	Desa Jangkar Asam, Kec. Gantung	Kaolin	CV. Iripau Hero	188,00		
24	Belitung Timur	Desa Jangkar Asam, Kec. Gantung	Kaolin	CV. Iripau Hero	181,50	0,8	28,889



No	Lokasi		Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas IUP (Ha)	Luas Areal Produksi (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
	Kabupaten/Kota	Desa/Kecamatan					
25	Belitung Timur	Desa Lilangan, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Karya Cipta Lahanindo	43,00	0,4	4,574
26	Belitung Timur	Desa Lilangan, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Karya Cipta Lahanindo	132,40	0,23	4,01
27	Belitung Timur	Desa Limbongan, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Karya Emas Multisani	487,00		
28	Belitung Timur	Desa Lilangan, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Sejahtera Utama Mitra Jaya	190,00	0,05	3,688
29	Belitung	Desa Badau, Kec. Badau	kaolin	CV. Dua Satu	49,52	0,5	10,472
30	Belitung	Desa Badau, Kec. Badau	Kaolin	PT. Arya Prima Sentosa	46,20		
31	Belitung	Desa Mentigi, Kec. Membalong	Kaolin	PT. Prima Bundiarta Nusa	69,80	0	0
32	Belitung	Desa Air Seruk, Kec. Sijuk	kaolin	PT. Bumi Sentosa Progress	33,20	0,05	3
33	Belitung	Desa Membalong, Kec. Membalong	Kaolin	PT. Sandeir Setia Brothers	162,60	0,96	45,349
34	Belitung	Desa Aik Rayak, Kec. Tanjungpandan	Kaolin	CV. Bonanza	60,00	0,1	5,484
35	Belitung	Desa Badau, Kec. Badau	Kaolin	PT. Belitung Kaolin Murni	47,00		
36	Belitung	Desa Air Seruk, Kec. Sijuk	Kaolin	PT. Garuda Artha Resources	199,20	1,2	22,702
37	Belitung	Desa Aik Rayak, Kec. Tanjungpandan	Kaolin	PT. Aneka Kaolin Utama	66,00		
38	Belitung	Desa Badau, Kec. Badau	Kaolin	PT. Stepa Wirausaha Adiguna	48,53	1,4	51,292
39	Belitung	Desa Cerucuk, Kec. Badau	Kaolin	PT. Intisuperindo Pratama	197,00		
40	Belitung	Desa Perawas, Kec. Tanjungpandan	Kaolin	PT. Kaolin Belitung Utama	103,50	0	0
41	Belitung	Desa Seruk, Kec. Sijuk	Kaolin	PT. Alter Abadi Tbk	709,52	0,3	73,197
42	Belitung	Desa Badau, Kec. Badau	Kaolin	PT. Nippindo Kaolin Abadi	233,80	0,3	15204
43	Belitung	Desa Air Seruk, Kec. Sijuk	Kaolin	PT. Kaolindo Sakti Perkasa	281,10		
44	Belitung	Desa Cerucuk, Kec. Badau	Kaolin	PT. Mitra Kaolin Mujur Selalu	117,90	0	0
45	Belitung	Desa Ibul, Kec. Badau	Kaolin	PT. Mineral Putra Belitung Mandiri	25,00		
46	Belitung	Desa Badau, Kec. Badau	Kaolin	PT. Sriyudi Globalindo Perkasa	199,70	0	0
47	Belitung	Desa Badau, Kec. Badau	Kaolin	PT. Belitung Cinindo Antarbuana	199,70		
48	Belitung	Desa Badau, Kec. Badau	Kaolin	PT. Kian Sukses Mandiri	78,00	0,22	10,9
49	Belitung	Desa Badau, Kec. Badau	Kaolin	PT. Xinrun Sukses International	177,70	0,5	240
50	Bangka Selatan	Desa Sebagian Kec. Simpang Rimba	Pasir Kuarsa	CV. Bumi Bangka Jaya Perkasa	115,00		
51	Bangka Selatan	Desa Sebagian Kec. Simpang Rimba	Pasir Kuarsa	PT. Rumpun Alam Sinergi	28,50		
52	Bangka Selatan	Desa Sebagian Kec. Simpang Rimba	Pasir Kuarsa	PT. Bangka Belitung Mineral Sejalan	50,00		
53	Belitung Timur	Desa Lilangan dan Limbongan, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Wijaya Mandiri Teknik Kreasi	565,50	1,5	40
54	Belitung Timur	Desa Limbongan, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Belitung Sand Mining	186,00		



No	Lokasi		Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas IUP (Ha)	Luas Areal Produksi (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
	Kabupaten/Kota	Desa/Kecamatan					
55	Belitung Timur	Desa Lilangan, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	CV. Selingsing Anugerah Mining	100,00		
56	Belitung Timur	Desa Simpang Pesak, Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	CV. Babel Makmur Sedjahtra	135,60		
57	Belitung	Desa Mentigi, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	PT. Mitra Pasir Berlian	43,00		
58	Belitung	Desa Air Seruk, Kec. Sijuk	Pasir Kuarsa	CV. Harapan Rejeki Bungsu	83,50	0	0
59	Belitung	Desa Badau, Kec. Badau	Pasir Kuarsa	CV. Belitung Berehun Barokah	43,05		
60	Bangka Tengah	Desa Jelutung, Kecamatan Namang	Pasir Kuarsa	PT. Alam Sinergi Sebalai	76,98		
61	Belitung	Desa Mentigi, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	PT. Sriyudi Alam Perkasa	39,40	2,24	124,543
62	Bangka	Desa Mapur, Kec. Riau Silip	Pasir Kuarsa	PT. Mitra Persada Resources	85,11	0,05	4,689
63	Belitung Timur	Desa Limbongan, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Sumber Alam Antarnusa	164,10	1,89	120,518
64	Bangka	Desa Mapur, Kec. Riau Silip	Pasir Kuarsa	PT. Cinta Mapur Indonesia	137,00	0,05	34,643
65	Bangka	Desa Mapur, Kec. Riau Silip	Pasir Kuarsa	PT. Kwarsa Lumpur Pratama	76,43		
66	Belitung	Desa Tanjung Rusa, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	PT. Sinar Kuarsa Utama	27,6		
67	Belitung	Desa Air Seruk, Kec. Sijuk	Pasir Kuarsa	CV. Billiton Jaya	9,86		
68	Belitung	Desa Sungai Samak, Kec. Badau	Pasir Kuarsa	CV. Bersatu Bangun Pertiwi	79,16	0,56	70
69	Belitung	Desa Padang Kandis, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	CV. Iripau Hero	91,59	5,26	227,358
70	Belitung	Desa Membalong, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	CV. Iripau Hero	49,50	1,73	51,9
71	Belitung Timur	Desa Batu Itam, Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	CV. Dhika Yogatama	152,70		
72	Bangka Tengah	Desa Perlang, Kec. Lubuk Besar	Pasir Kuarsa	PT. Walie Tampas Citratama	26,20	0	0
73	Bangka Tengah	Desa Perlang, Kec. Lubuk Besar	Pasir Kuarsa	PT. Walie Tampas Citratama	82,50	1,1	63,271
74	Belitung Timur	Desa Lilangan, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Sejahtera Utama Mitra Jaya	165,20	0,11	3,686
75	Belitung	Desa Cerucuk, Kec. Badau	Pasir Kuarsa	CV. Cahaya Bumi Resource	44,40		
76	Belitung	Desa Mentigi, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	PT. Jabel Tri Bersaudara	54,12		
77	Belitung	Desa Mentigi, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	PT. Jabel Tri Bersaudara	35,55		
78	Belitung Timur	Desa Simpang Pesak, Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT. Mitra Bumi Utama	197,72		
79	Bangka	Desa Pugul, Kec. Riau Silip	Kaolin	PT. Kaolindo Bangka Sejahtera	12,71	0,2	5,7
80	Bangka	Desa Mapur, Kec. Riau Silip	Pasir Kuarsa	PT. Timah Investasi Mineral	157,42	0	0
81	Belitung Timur	Desa Dukong, Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT. Bumi Pasundan Mining	98,70		
82	Bangka	Desa Pugul, Kec. Riau Silip	Kaolin	PT. Telaga Intan Putih	44,00	0,5	7,474



No	Lokasi		Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas IUP (Ha)	Luas Areal Produksi (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
	Kabupaten/Kota	Desa/Kecamatan					
83	Bangka Selatan	Kelurahan Gunung Namak, Kec. Toboali	Pasir Kuarsa	PT. Dua Karya Sukses	62,51		
84	Bangka	Desa Bantam, Kec. Belinyu	Zirkon	PT. Putraprima Mineral Mandiri	112,50	3,19	16,632
85	Belitung Timur	Desa Sukamandi, Kecamatan Damar	Pasir Kuarsa	CV. Putra Maju Kamex	49,80	-	-
86	Belitung	Desa Cerucuk, Kec. Badau	Pasir Kuarsa	CV. Mandiri Sejahtera Abadi	105,00		
87	Belitung Timur	Desa Tanjung Batu Itam, Kecamatan Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT. Prima Bundiarta Nusa	92,00	1,69	69,562
88	Belitung	Desa Air Seruk, Kec. Sijuk	Pasir Kuarsa	CV. Lestari Alam Semesta	9,74		
89	Belitung	Desa Sijuk Kec. Sijuk	Zirkon	PT. Mualim Putra Pratama	15,62	0,6	2,249
90	Belitung Timur	Desa Sukamandi, Kecamatan Damar	Pasir Kuarsa	CV. Alfindo	114,70		
91	Belitung Timur	Desa Limbongan, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Berkah Sumber Alam	151,40	5,7	172,263
92	Belitung	Desa Lasar, Kec. Membalong, Belitung	Pasir Kuarsa	PT. Belitung Jaya Gemilang	198,90		
93	Belitung	Desa Gunung Riting Kec Membalong	Pasir Kuarsa	PT. Royal Artha Pratama	87,00		
94	Belitung	Desa Gunung Riting Kec Membalong	Pasir Kuarsa	PT. Karunia Alam Bangka Belitung	27,44		
95	Bangka Tengah	Kel. Nibung Kecamatan Koba	Zirkon	PT. Bangka Cipta Pratama	120,49	0	0
96	Belitung Timur	Desa Sukamandi, Kec Damar	Pasir Kuarsa	PT. Timah Investasi Mineral	198,40	11,5	248,753
97	Bangka Tengah	Desa Perlang Kec Lubuk Besar	Zirkon	PT. Putraprima Mineral Mandiri	74,99	0	0
98	Belitung Timur	Desa Simpang Pesak dan Tanjung Kelumpang Kec Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT. Mundu Cirebon Mining	114,00		
99	Belitung	Desa Membalong dan Padang Kandis, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	PT. Parit Mujur Sejahtera	94,20	0	0
100	Belitung	Desa Simpang Pesak Kec Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT. Karya Putera Bangka Belitung	153,50	0	0
101	Belitung Timur	Desa Tg Kelumpang dan Tg Batu Itam, Kec. Simpang Pesak Kab Belitung Timur	Pasir Kuarsa	PT. Bintang Maju Raharja	195,37	0	0
102	Belitung	Desa Sungai Samak, Kec. Badau	Pasir Kuarsa	CV. Cahaya Mandiri Abadi	18,66		
103	Belitung	Desa Padang Kandis, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	PT. Prima Bundiarta Nusa	49,64	3,76	57,314
104	Belitung Timur	Desa Batu Penyau, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Karya Emas Multisani	49,58		
105	Belitung Timur	Desa Limbongan, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Prima Bundiarta Nusa	68,00	0,94	55,088
106	Belitung	Desa Air Seruk dan Air Merbau Kecamatan Sijuk dan Tanjungpandan	Kaolin	PT. Kaolin Indonesia Belitung	36,60		
107	Belitung Timur	Desa Tanjung Kelumpang Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	CV. Permata Batu Hitam	40,80		



No	Lokasi		Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas IUP (Ha)	Luas Areal Produksi (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
	Kabupaten/Kota	Desa/Kecamatan					
108	Belitung Timur	Desa Batu Penyu Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Bintang Delapan Enam	455,00	0	0
109	Belitung Timur	Desa Simpang Pesak dan Tanjung Batu Itam Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT. Bintang Delapan Enam	622,00	0	0
110	Belitung Timur	Desa Gantung dan Desa Batu Penyu Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Bintang Delapan Enam	49,5	0	0
111	Belitung	Desa Membalong Kec. Membalong	Zirkon	PT. Prima Zircon Mineral	49,00	0	0
112	Belitung	Desa Bantan, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	PT. Timah Investasi Mineral	60,56		
113	Belitung	Desa Sijuk Kec. Sijuk	Pasir Kuarsa	PT. Timah Investasi Mineral	24,48		
114	Belitung	Desa Sijuk Kec. Sijuk	Pasir Kuarsa	PT. Timah Investasi Mineral	82,67		
115	Belitung	Desa Bantan, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	PT. Timah Investasi Mineral	96,68		
116	Bangka	Kel. Bukit Ketok Kec. Belinyu	Zirkon	PT. Prima Zircon Mineral	48,90	0,9	660
117	Bangka	Kel. Bantan Kec. Belinyu	Zirkon	PT. Silika Utama Sejahtera	48,50		
118	Bangka Selatan	Desa Air Gegas Kecamatan Air Gegas	Zirkon	PT. Bangka Mineral Abadi	193,70	0	0
119	Belitung	Desa Mentigi, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	PT. Sriyudi Alam Perkasa	49,47		
120	Belitung Timur	Desa Jangkar Asam, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Timah Investasi Mineral	144,10		
121	Bangka	Desa Mapur Kec. Riau Silip	Pasir Kuarsa	CV. Sejahtera Mineral Babel	44,00		
122	Belitung Timur	Desa Tanjung Kelumpang Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT. Karya Melati Belitung	49,50	2,3	60,732
123	Belitung	Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk	Kaolin	PT. Intan Alam Abadi	49,80		
124	Belitung	Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk	Kaolin	PT. Mega Alam Makmur	24,03	0	0
125	Belitung	Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk	Kaolin	CV. Kaolindo Investama Sentosa	46,55		
126	Belitung Timur	Desa Lilangan Kec. Gantung	Operasi Produksi	CV. 3G Trust	123,90		
127	Belitung Timur	Desa Tanjung Batu Itam, Kecamatan Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT. Oetama Konstruksi Energy	234,30		
128	Belitung Timur	Desa Simpang Pesak dan Tanjung Batu Itam Kec. Simpang Pesak	Zirkon	CV. Berkas Sahabat Jaya	161,00		
129	Belitung	Desa Mentigi, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	PT. Usaha Mandiri Persada	147,50		
130	Belitung	Desa Padang Kandis dan Membalong	Pasir Kuarsa	PT. Hero Progres International	28,021		
131	Belitung	Desa Mentigi, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	CV. Elyska Indo Plantation	89,40	0,51	47,655
132	Pangkalpinang	Temberan Bukit Intan	Zirkon	PT. Sundaland Internusa			
133	Pangkalpinang	Temberan Bukit Intan	Zirkon	PT. Megah Mineral Sejahtera			
134	Pangkalpinang	Ketapang	Zirkon	PT. Indomas Bara Prima			
135	Bangka Selatan	Laut Sadai	Pasir Kuarsa	PT. Cahaya Bangun Pelangi			



No	Lokasi		Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas IUP (Ha)	Luas Areal Produksi (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
	Kabupaten/Kota	Desa/Kecamatan					
136	Belitung Timur	Desa Gantung Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Mega Mandiri Resource			
137	Bangka Selatan	Laut Sadi	Pasir Kuarsa	PT. Nusa Inti Internasional			
138	Bangka	Pelabugan Jelitik Sungailiat	Pasir Kuarsa	PT. Pulomas Sentosa			
139	Bangka	Dusum Batu Rusa II Desa Batu Rusa Kec. Merawang	Zirkon	PT. Bersahaja Berkat Sahabat Jaya			
140	Belitung	Desa Bintet dan Bukit Lepang Kec. Belinyu Kab. Bangka	Zirkon	PT. Mineral Alam Babel	198,7		
141	Belitung Timur	Simpang Pesak dan Tanjung Batu Itam Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	CV. Berkah Sahabar Jaya	161		
142	Belitung Timur	Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT. Cinta mapur Indonesia	550,93		
143	Belitung	Desa Air Selumar Kec. Sijuk	Kaolin	PT. Kencana Koalin Industri	85,9		
144	Belitung Timur	Desa Limbongan Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Prima Bundiarta Nusa	66		
145	Belitung	Desa Sungai Samak Kec. Tanjung Pandan	Kaolin	PT. Hasil Alam Murni			
146	Belitung Timur	Desa Sukamandi Kec. Damar	Pasir Kuarsa	PT. Rimbunan Makmur			
147	Belitung	Desa Bantan, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	CV. Garuda Belitong Berehun	178,4		
148	Bangka	Desa/Kel. Cit Kec. Riau Silip	Pasir Kuarsa	PT Horizon Energi Nusantara	599,76		
149	Belitung Timur	Desa/Kel. Jangkar Asam Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT Satunusa Cakra Mineral	540		
150	Belitung Timur	Desa Sukamandi, Desa/Kelurahan Sukamandi, Kec. Damar, Kab. Belitung Timur	Pasir Kuarsa	PT Bumi Ore Sejahtera	49,91		
151	Belitung Timur	Desa Mengkubang Kec. Damar	Pasir Kuarsa	PT Amin Makmur Bersama	73,56		
152	Belitung Timur	Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT Sumber Alam Antarnusa	787,25		
153	Belitung Timur	Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT Bersahaja Berkat Sahabat jaya	121,4		
154	Belitung Timur	Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT Bersahaja Berkat Sahabat jaya	270,2		
155	Belitung	Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	CV Iripau Hero	49,7		
156	Belitung Timur	Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT Hero Progres International	37,32		
157	Belitung	Kec. Membalong	Kaolin	PT Sandeir Setia Brothers	47,36		
158	Belitung	Kec. Membalong	Kaolin	PT Iripau Hero Progres	20,57		
159	Belitung	Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	CV Silica Jaya Utama	44,7		
160	Belitung	Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	CV Silica Jaya Sejahtera	98		
161	Belitung	Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	CV Silica Jaya	40		
162	Belitung Timur	Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	CV Berkah Bangka Maju	117,5		
163	Bangka	Kec. Belinyu	Kaolin	CV Gunung Lebak	6,3		
164	Belitung Timur	Kec. Kelapa Kampit	Pasir Kuarsa	PT Indahsana Lestari Jaya	205		



No	Lokasi		Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas IUP (Ha)	Luas Areal Produksi (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
	Kabupaten/Kota	Desa/Kecamatan					
165	Belitung Timur	Kec. Kelapa Kampit	Pasir Kuarsa	PT Archie Experenza Manunggal	49,5		
166	Bangka	Kev. Belinyu	Pasir Kuarsa	PT Bangka Samudra Pratama	98		
167	Bangka Selatan	Kec. Tukak Sadai	Pasir Kuarsa	PT Mutiara Lautan Bangka	98,00		
168	Bangka Selaatan	Kec. Pangkalan Baru	Pasir Kuarsa	PT PSR Mutiara Abadi	98		
169	Bangka	Kec. Sungailiat	Pasir Kuarsa	PT Lautan Cahaya Silica	98		
170	Belitung Timur	Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	CV Cahaya Surya Mentari	99		
171	Bangka	Kec. Sungailiat	Pasir Kuarsa	PT Baskara Silica Makmur	98		
172	Belitung Timur	Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT Kurnia Mandiri Adiperkasa	98,88		
173	Bangka Tengah	Kec. Namang	Pasir Kuarsa	PT Silica Lautan Mutiara	98		
174	Belitung	Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	PT Industri Mineral Belitung	99		
175	Belitung Timur	Kec. Kelapa Kampit	Pasir Kuarsa	PT Indahsana Lestari Jaya	36,84		
176	Bangka	Kec. Sungailiat	Pasir Kuarsa	PT Swaminindo Sntosa Abadi	244		
177	Belitung Timur	Desa Tanjung kelumpang, Desa/Kelurahan Tanjung Kelumpang, Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT Beltim Makmur Jaya	168,41		
178	Belitung Timur	Desa Gantung, Desa/Kelurahan Gantung, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT Perkasa Parama Biliton	198,73		
179	Belitung Timur	Dusun Sekip, Desa/Kelurahan Lalang, Kec. Manggar	Pasir Kuarsa	PT Kemilau Kursu Utama	196,81		
180	Bangka Tengah	Desa Lubuk Besar, Desa/Kelurahan Lubuk Besar, Kec. Lubuk Besar	Pasir Kuarsa	PT Bimbim Trasmineratama Sejahtera	340,06		
181	Belitung	Desa Air Selumar, Desa/Kelurahan Air Selumar, Kec. Sijuk	Kaolin	PT Kaolin Belitung Perkasa	99,7		
182	Belitung Timur		Silika	PT Prosper Karya Mandiri	99,54		
183	Belitung Timur	Dusun Batu Belida, Desa/Kelurahan Tanjung Kelumpang, Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT Belantara Jaya Lestari	98		
184	Belitung Timur	Desa Tanjung Kelumpang dan Desa Tanjung Batu Itam Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT Albeta Sukses Makmur	49,15		
185	Belitung Timur	Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung,	Pasir Kuarsa	PT Duta Watu Geotek	99,5		
186	Belitung Timur	Desa Sukamandi, Desa/Kelurahan Sukamandi, Kec. Damar,	Pasir Kuarsa	PT Putera Sukses Mineral	99,7		
187	Bangka Selatan	Desa Sebagian, Kec. Simpang Rimba	Batuan (Tanah Urug)	CV. Cahaya Permis Gemilang	48,66		
188	Belitung	Desa Membalong Kec. Membalong, Belitung	Batuan (Tanah Liat)	CV. Tiana Perkasa Prima	188,70		
189	Belitung	Desa Padang Kandis Kec. Membalong	Batuan (Pasir Bangunan)	PT. Karya Mandiri Persada Belitung	187,10		



No	Lokasi		Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas IUP (Ha)	Luas Areal Produksi (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
	Kabupaten/Kota	Desa/Kecamatan					
190	Belitung	Desa Padang Kandis Kec. Membalong, Belitung	Batuan (Tanah Liat)	PT. Karya Cipta Mandiri Persada	190,70		
191	Belitung Timur	Desa Lenggang Kec. Gantung Kab. Belitim	Batuan (Tanah Liat)	PT. Hero Ceramas	195,00	0,93	34,205
192	Belitung Timur	Desa Kelumpang dan Tanjung Batu Itam Kec. Simpang Pesak	Batuan (Tanah Liat)	PT. Setia Maju Pratama	196,00		
193	Bangka	Desa Jurung, Kec. Merawang	Batuan (Granit)	PT. Aditya Buana Inter	12,86	0	29,376
194	Bangka	Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu	Batuan (Granit)	CV. Karya Mulya	50,00		
195	Belitung Timur	Desa Tanjung Kelumpang, Kec. Simpang Pesak	Pasir Bangunan	PT. Bina Usaha Cipta Pratama	189,20	0	0
196	Belitung Timur	Desa Lilangan, Kec. Gantung	Pasir Bangunan	PT. Karya Cipta Lahanindo	64,00	0,2	4,003
197	Belitung Timur	Desa Limbongan, Kec. Gantung	Tanah Liat	PT. Roda Tatamas	151,40	0	0
198	Belitung Timur	Desa Lilangan, Kec. Gantung	Tanah Liat	PT. Sejahtera Utama Mitra Mandiri	389,70		
199	Belitung Timur	Desa Lilangan, Kec. Gantung	Tanah Liat	PT. Sejahtera Utama Mitra Jaya	181,50		
200	Belitung Timur	Desa Selingsing, Kec. Gantung	Pasir Bangunan	Wahyu Epan Yudhistira	5,00		
201	Belitung	Desa Mentigi Kec. Membalong	Pasir Bangunan	PT. Jabel Tri Bersaudara	151,64	2,62	116,929
202	Belitung	Desa Padang Kandis, Kec. Membalong	Pasir Bangunan	PT. Prima Bundiarta Nusa	123,10	5,88	226,641
203	Belitung	Desa Air Seruk, Kec. Sijuk	Pasir Bangunan	PT. Bumi Sentosa Progress	18,20		
204	Belitung	Desa Buluh Tumbang, Kec. Tanjungpandan	Pasir Bangunan	CV. Iripau Hero	35,40	0,7	29,058
205	Belitung	Desa Membalong, Kec. Membalong	Tanah Liat	CV. Iripau Hero	70,76		
206	Belitung	Desa Sungai Samak, Kec. Badau	Tanah Liat	PT. Iripau Hero Progres	150,00	1,23	77,745
207	Belitung	Desa Kacang Butor, Kec. Badau	Batu Granit	PT. Anugerah Kreatif Mandiri	105,26	0	19,604
208	Belitung	Desa Kacang Butor, Kec. Badau	Batu Granit	PT. Belitung Cipta Mandiri	151,82		
209	Belitung	Desa Kacang Butor, Kec. Badau	Batu Granit	PT. Belitung Mitra Mandiri	135,90		
210	Belitung	Desa Perepat, Kec. Membalong	Tanah Liat	CV. Sriyudi Litajaya	500,00	0	0
211	Belitung	Desa Mentigi, Kec. Membalong	Tanah Liat	PT. Sriyudi Alam Perkasa	88,89	0,87	8,903
212	Belitung	Desa Badau, Kec. Badau	Pasir Bangunan	CV. Putra Belitung Perkasa	61,40		
213	Belitung	Desa Membalong, Kec. Membalong	Pasir Bangunan	CV. Sriyudi Alam Lestari	162,90		
214	Belitung	Desa Membalong, Kec. Membalong	Batu Granit	PT. Gerabelindo	178,35		
215	Belitung	Desa Mentigi, Kec. Membalong	Batu Granit	PT. Ludai Gede Billitonite	138,00		
216	Belitung	Desa Lassar, Kec. Membalong	Tanah Liat	PT. Makin Maju Makmur	199,40		



No	Lokasi		Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas IUP (Ha)	Luas Areal Produksi (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
	Kabupaten/Kota	Desa/Kecamatan					
217	Belitung	Desa Cerucuk, Kec. Badau	Pasir Bangunan	PT. Mitra Cinindo Perkasa	51,30		
218	Bangka Selatan	Desa Gadung, Kec. Toboali	Pasir Bangunan	CV. Empat Bersaudara	18,60		
219	Belitung Timur	Desa Limbongan, Kec. Gantung	Tanah Liat	PT. Prima Bundiarta Nusa	46,00		
220	Belitung Timur	Desa Mentigi Kec. Membalong	Tanah Liat	PT. Prima Bundiarta Nusa	106,00	2,54	97,466
221	Belitung Timur	Desa Limbongan, Kec. Gantung Kab Belitung Timur	Tanah Liat	PT. Jabel Tri Bersaudara	187,80	1,39	43,604
222	Belitung	Desa Mentigi, Kec. Membalong	Tanah Liat	CV. Tunas Mandiri	106,80	0,65	95,956
223	Belitung	Desa Air Seruk Kec. Sijuk	Batuan	CV. Lestari Alam Semesta	9,74		
224	Belitung Timur	Desa Dukong, Kec. Simpang Pesak Kab Belitung Timur	Pasir Bangunan	PT. Prima Sumber Alam Makmur	18,05		
225	Belitung	Desa Padang Kandis, Kec. Membalong	Tanah Liat	PT. Hero Progres International	49,89	0,15	13,571
226	Belitung Timur	Desa Tanjung Kelumpang dan Tanjung Batu Itam, Kec. Simpang Pesak	Tanah Liat	PT. Albeta Maju Sukses	129,70	1,69	24
227	Belitung Timur	Desa Limbongan Kec. Gantung	Tanah Liat	PT. Sumber Alam Antar Nusa	49,60		
228	Belitung Timur	Desa Batu Itam dan Tanjung Kelumpang	Tanah Liat	PT. Albeta Maju Sukses	40,80		
229	Belitung	Desa Padang Kandis Kec. Membalong	Tanah Urug	PT Sandeir Setia Brother	42,51		
230	Belitung Timur	Desa Simpang Pesak dan Desa Dukong Kec. Simpang Pesak	Penggalian Tanah dan Tanah Liat	PT. Albeta Maju Sukses	192,50		
231	Bangka Tengah	Desa Air Mesu Timur Kec. Pangkalan Baru	Granit	PT Tanjung Bukit Menunggal	46,77		
232	Bangka	Kec. Sungailiat	Pasir	Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Bangka Koperasi			
233	Belitung Timur	Kec. Gantung	Tanah Liat	PT Hero Progres International	200,15		
234	Bangka	Kec. Sungailiat	Pasir	PT Adara Jala Samudera	28,00		
235	Bangka	Kec. Riau Silip	Granit	PT Babelindo Trijaya Perkasa	23,00		
236	Belitung Timur	Desa Tanjung kelumpang, Desa/Kelurahan Tanjung Kelumpang, Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT Beltim Makmur Jaya	168,41		
237	Kab. Bangka	Desa Cambai, Desa/Kelurahan Cambai, Kec. Namang	Granit	PT Arventa Karya Gemilang	49,52		
238	Bangka Tengah	Desa Jeruk, Desa/Kelurahan Jeruk, Kec. Pangkalan Baru	Granit	PT Lotus Esge Sejahtera	76,80		

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023



Tabel-15. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2022

No.	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pasir Bangunan	CV. HARAPAN REZEKI BUNGSU		83,5	180.000
2	Pasir Bangunan	PT. PRIMA BUNDIARTA NUSA		123,1	444.000
3	Pasir Bangunan	PT. JABEL TRI BERSAUDARA		151,64	440.000
4	Pasir Bangunan	CV. Irpau Hero		35,40	114.227
5	Pasir Bangunan	CV. Irpau Hero		91,59	122.247
6	Pasir Bangunan	CV. DHIKA YOGATAMA		152,7	228.000
7	Pasir Bangunan	PT. DAGO PASIR ALAM		80,3	408.000
8	Pasir Bangunan	CV. ALFINDO		114,7	180.000
9	Pasir Bangunan	CV. BUMI PASUNDAN		98,7	240.000
10	Pasir Bangunan	PT. SEJAHTERA UTAMA MITRA JAYA		165,2	300.000
11	Pasir Kuarsa	PT. SRIYUDI ALAM PERKASA		39,2	120.000
12	Pasir Kuarsa	PT. SRIYUDI ALAM PERKASA		23,65	300.000
13	Pasir Kuarsa	PT. PRIMA BUNDIARTA NUSA		49,64	240.000
14	Pasir Kuarsa	PT. MITRA PASIR BERLIAN		30,6	180.000



No.	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
15	Pasir Kuarsa	CV. HARAPAN REJEKI Bungsu		83,5	480.000
16	Pasir Kuarsa	PT. KURNIA MANDIRI ADIPERKASA		190	331.500
17	Pasir Kuarsa	PT SUMBER ALAM ANTARNUSA		164,1	180.000
18	Pasir Kuarsa	PT. KARYA CIPTA LAHANINDO		132,4	360.000
19	Pasir Kuarsa	PT. BELITUNG SAND MINING		177,9	200.000
20	Pasir Kuarsa	PT. BELITUNG SAND MINING		192	400.000
21	Pasir Kuarsa	PT. BELITUNG SAND MINING		71,3	200.000
22	Pasir Kuarsa	PT. HAMPARAN MINERALINDO ABADI		198	277.500
23	Pasir Kuarsa	PT. SEJAHTERA UTAMA MITRA JAYA		190	300.000
24	Pasir Kuarsa	PT. Facific Dipta Karya		197	92.000
25	Tanah Liat	PT. Hero Ceramas		195,00	81.473
26	Pasir Kuarsa	PT. Hero Progres Internasional		198	101.728
27	Pasir Kuarsa	PT. Hero Progres Internasional		180	89.229
28	Pasir Kuarsa	PD. DUTA LESTARI		1,3	1.300
29	Pasir Kuarsa	PT. MITRA PERSADA RESOURCES		82,31	71.001
30	pasir kuarsa	PT.CINTA MAPUR INDONESIA		137	172.872
31	pasir kuarsa	CV. Dersan Silica Indonesia		40,00	371.250
32	pasir kuarsa	PT. MITRA PERSADA RESOURCES		32,84	135.000
33	pasir kuarsa	PT. MITRA PERSADA RESOURCES		71	127.008



No.	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
34	Pasir Kuarsa	PT. WALIE TAMPAS CITRATAMA		150,4	149.940
35	Pasir Kuarsa	PT. WALIE TAMPAS CITRATAMA		46,2	780.000
36	Pasir Kwarsa	PT. MUTIARA TERANG RESOURCES		170	100.000
37	Batu Granit	PT. ANUGERAH KREATIF MANDIRI		105,261	23.750
38	Granit	PT. Ludai Gede Bilitonite		138,00	86.262
39	Batu Granit	PT. ADITYA BUANA INTER		12,86	180.000
40	Batu Granit	PT. MANDIRI KARYA MAKMUR		150	360.000
41	Granit	PT. BUMIWARNA AGUNG PERKASA		150	480.000
42	Tanah Liat	PT. SRIYUDI ALAM PERKASA		88,89	48.000
43	Tanah liat	PT. PRIMA BUDIARTA NUSA		106	160.000
44	Tanah Liat	CV. SRIYUDI LITA JAYA		500	15.000
45	Tanah Liat	CV. Harapan Aldi Sejahtera		150,00	86.632
46	Tanah Liat	CV. Irpau Hero		28,3	110.000
47	Tanah Liat	PT. JABEL TRI BERSAUDARA		92	80.000
48	Tanah Liat	PT. Hero Ceramas		195,00	81.473
49	Tanah Liat	PT. Setia Maju Pratama		196,00	96.000

Sumber: Dinas ESDM, 2020



Tabel-15A. Pertambangan yang Belum/Tidak Beroperasi

Kabupaten: Bangka Tengah

Tahun Data: 2019

No	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Areal (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Timah	PT. Bangka Timah Utama Sejahtera	114.00
2	Timah	PT. Sarana Marindo	519.70
3	Timah	PT. Mutiara Prima Sejahtera	1,220.00
4	Timah	PT. Mitra Stania Prima	1,648.00
5	Timah	CV. Serumpun Sebalai	441.63
6	Timah	PT. Bangka Belitung Timah Sejahtera	164.00
7	Timah	PT. Teluk Kijing Energi	182.70
8	Timah	PT. Lumbung Mineral Alam	2,305.00
9	Timah	CV. Dua Sekawan	66.00
10	Timah	PT. Timah (Persero) Tbk	32,110.34
11	Granit	PT. Mandiri Karya Makmur	150.00
12	Pasir Kuarsa	PT. Tri Bintang Abadi	20.00
13	Pasir Kuarsa	PT. Wali Tampas Citratama	196.60
14	Pasir Kuarsa	PT. Tambang Jaya Indah	189.30
15	Pasir Kuarsa	PT. Mitra Persada Resources	32.84
16	Pasir Kuarsa	PT. Vitrama Properti	32.84
Keterangan :			

Tidak beroperasi dikarenakan : untuk jenis galian batuan (sirtukil) disebabkan karena air sungai yang dalam alasan karena tidak potensial lagi karena biaya operasional sudah tidak ada



Tabel 16. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2021

No.	Kabupaten/Kota	Lokasi Penanaman	Penghijauan				Reboisasi		
			Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)	Jumlah Pohon Hidup (batang)	Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Bangka		14	13	8,125		395	353	1,644,225
2	Belitung		5	5	3,125		987	300	3,521,100
3	Bangka Barat		16	14.2	8,875		410	410	1,353,000
4	Bangka Tengah		4	4	2,500		145	53	523,600
5	Bangka Selatan		10	10	6,250		530	110	1,749,000
6	Belitung Timur		5.3	5.3	3,313		1,483	1,204	5,957,457
7	Pangkalpinang		0	0	0		10	665	33,000

Keterangan:

Sumber: DLHK Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2022



Tabel 16. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 203

NO	NAMA INSTANSI	TANGGAL	LOKASI PENANAMAN			STATUS LAHAN		JENIS TANAMAN	JUMLAH TANAMAN (Batang)	LUAS PENANAMAN (Ha)
			Administrasi	x	y	Kawasan Hutan	Areal penggunaan Lain			
1	UPTD KPHP Rambat Menduyung	- 20 Juni 2023	Desa Belo Laut	522585	9771115	HL Tanjung Punai		Rizhopora	4,000	1
		- 20 Mar 2023	Desa Pelangas	541674	9786733		APL	Alpukat	100	0,5
Jumlah									4,100	1.5
2	POLDA Babel	20-06-2023	Desa Rebo, Kec. Merawang, Kab. Bangka	627281.4855	9779005.965	Eks Tambang		Kayu Putih	2,000	7
		20-06-2023	Pantai Pait, Desa Belo Laut, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat	5222585	9771115	HL		Rizhopora	4,000	5
		20-06-2023	Pantai Tanjung Bunga	630741.8052	9763456.293	Eks Tambang		Mangrove	1,000	1
			Kel. Temberan,							
			Pangkalpinang							



		20-06-2023	Desa Penyak, Kec. Koba				pantai	Prepat	1,000	2
			Kab. Bangka Tengah							
		20-06-2023	Parit 3 Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan	666104.5243	9664854.437	Eks Tambang		Jambu Mete	1,500	3
		20-06-2023	Dusun Teluk Dalam, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung	790762.3485	9664617.876	Eks Tambang		- Kayu Putih	1,000	4
								- Jambu Mete	1,000	
		20-06-2023	Desa Mengkubang, Kec. Damar, Kab. Belitung Timur	790762.3485	9664617.876	Eks Tambang		Mangrove	2,500	4
	Jumlah								14,000	26
3	UPTD KPHP Muntai	23-06-2023	Kelurahan Toboali	666072	9664885	HL		Jambu Mete	3,000	1
	Palas									
	Jumlah								3,000	1
4	DLH Kab. Bangka	19-05-2023	Kelurahan Toboali	790762.3485	9664617.876		Hutan Kota	- Jambu Mete	500	2.88
	Selatan							- Alpukat	500	



								- Durian	500	
								- Pucuk Merah	250	
								- Ketapang Kencana	250	
		26-06-2023	Desa Tukak	790762.3485	9664617.876		Hutan Mangrove	Mangrove	2,000	2
	Jumlah								4,000	4.88
5	DLH Kab. Belitung	20-03-2023	Desa Dukong, Kec.	795519	9691586		APL	Tanaman Berkayu	1,000	0.5
			Tanjungpandan							
	Jumlah								1,000	0.5
	Jumlah keseluruhan								26,100	33.88

Lampiran 2 : Data Penanaman Pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PHHK)/Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2023

NO	NAMA PERUSAHAAN	TANGGAL	LOKASI PENANAMAN			STATUS LAHAN		JENIS TANAMAN	JUMLAH TANAMAN	LUAS PENANAMAN
			Administrasi	x	y	Kawasan Hutan	Areal penggunaan Lain		(Batang)	(Ha)
1	PT. Indo Sukses Lestari	31-01-2023	- Jangkar Asam	166576.2635	9668022.666	HP		Karet	13,176	25.83
	Makmur	30-04-2023	- Dendang	831669.7792	9664707.86	HP		Karet	3,425	6.84
		31-05-2023	- Sp. Pesak	166506.9845	9662780.58	HP		Karet	1,628	3.46
	Jumlah								18,229	36.13



2	PT. Hutan Lestari Raya	Jan 2023		604328.2927	9699367.964	HP		- Kaliandra	200	0,6
								- Akasia	500	
		Feb 2023		604065.2472	9699618.558	HP		- Akasia	700	0,6
		Maret 2023		578715.0668	9700641.728	HP		- Akasia	5,650	4.5
		April 2023		602606.2999	9700915.07	HP		- Akasia	1,486	1.2
	Jumlah								8,536	6.9
3	PT. Inhutani V Unit		Desa Cit, Kab. Bangka	602606.2999	9700915.07	HP Sungailiat Mapur		- Jengkol	4,403	29
	Bangka							- Agroforestry Singkong	400,000	40
			Desa Bintet, Kab. Bangka	602606.2999	602606.2999	HP Sungailiat Mapur		- MPTS	28,232	71
				602606.2999	9700915.07	HP Sungailiat Mapur		- Karet	18,414	17
	Jumlah								451,049	157
4	PT. Istana Kawi Kencana	Maret 2023	Desa Pugul, Kec. Riau	602606.2999	602606.2999			- Akasia	1,000	1.5
			Silip, Kab. Bangka	602606.2999	602606.2999			- Kaliandra	356	0.5
				602606.2999	602606.2999			- Lamtoro	725	1



		Mei 2023	Desa Gunung Pelawan	602606.2999	602606.2999			- Lamtoro	556	0.5
			Kab. Bangka	602606.2999	602606.2999			- Akasia	460	0.5
	Jumlah								3,097	4
	Jumlah Keseluruhan								480,911	204.03



Tabel-17 Luas dan Kerusakan Lahan Gambut

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2022

No	Kabupaten/Kota	Lokasi	Luas (Ha)	kedalaman (m)	Prosentase Kerusakan (%)	Penyebab Kerusakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kabupaten Bangka	Mendo Barat	100,16	< 3 m	3,48	Lahan Terbuka
			24,26	< 3 m	0,84	Pertambangan
			317,21	< 3 m	11,01	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
		Riau Silip	201,97	< 3 m	7,01	Perkebunan
			76,80	< 3 m	2,67	Pertambangan
			299,56	< 3 m	10,40	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
		Sungailiat	8,55	< 3 m	0,30	Pemukiman
			24,45	< 3 m	0,85	Pertambangan
			523,01	< 3 m	18,16	Pertanian Lahan Kering
		Bakam	2	< 3 m	1	Pertambangan
		Merawang	0,02	< 3 m	7	Pertanian Lahan Kering
		Belinyu	5,96	< 3 m	0,21	Perkebunan
2	Kabupaten Bangka Barat	Jebus	41,35	< 3 m	0,45	Lahan Terbuka
			241,23	< 3 m	2,60	Pertambangan
			612,93	< 3 m	6,60	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
		Kelapa	4,43	< 3 m	0,05	Pemukiman
			398,63	< 3 m	4,29	Pertanian Lahan Kering



No (1)	Kabupaten/Kota (2)	Lokasi (3)	Luas (Ha) (4)	kedalaman (m) (5)	Prosentase Kerusakan (%) (6)	Penyebab Kerusakan (7)
		Tempilang	186,43	< 3 m	2,01	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
			700,14	< 3 m	7,54	Perkebunan
			1,23	< 3 m	0,01	Pemukiman
			121,93	< 3 m	1,31	Pertanian Lahan Kering
		Simpang Teritip	199,95	< 3 m	2,15	Pertambangan
			487,46	< 3 m	5,25	Pertanian Lahan Kering
			769,34	< 3 m	8,29	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
			27,01	< 3 m	0,29	Lahan Terbuka
		Parittiga	24,10	< 3 m	0,26	Pertambangan
			29,66	< 3 m	0,32	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
			3,33	< 3 m	0,02	Lahan Terbuka
			23,25	< 3 m	0,16	Perkebunan
3	Kabupaten Bangka Selatan	Air Gegas	218,13	< 3 m	1,47	Pertanian Lahan Kering
			1586,97	< 3 m	10,67	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
		Simpang Rimba	73,04	< 3 m	0,49	Lahan Terbuka
			154,49	< 3 m	1,04	Pertambangan
		Lepar Pongok	403,23	< 3 m	2,71	Perkebunan
			51,78	< 3 m	0,35	Pertanian Lahan Kering
			127,61	< 3 m	0,86	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
			245,56	< 3 m	1,65	Pertanian Lahan Kering Campur Semak



No (1)	Kabupaten/Kota (2)	Lokasi (3)	Luas (Ha) (4)	kedalaman (m) (5)	Prosentase Kerusakan (%) (6)	Penyebab Kerusakan (7)
4	Kabupaten Bangka Tengah	Toboali	4935,05	< 3 m	33,17	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
			440,49	< 3 m	2,96	Pertambangan
			288,37	< 3 m	1,85	Lahan Terbuka
			14,69	< 3 m	0,09	Pemukiman
			1314,85	< 3 m	8,43	Perkebunan
			59,76	< 3 m	0,38	Pertambangan
			123,22	< 3 m	0,79	Pertanian Lahan Kering
						Pertanian Lahan Kering Campur Semak
		Sungai Selan	1031,87	< 3 m	6,62	Pemukiman
			60,83	< 3 m	0,39	Perkebunan
			516,55	< 3 m	3,31	Pertambangan
			560,46	< 3 m	3,59	Pertanian Lahan Kering
		Lubuk Besar	201,26	< 3 m	1,29	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
			593,00	< 3 m	3,80	Perkebunan
			80,64	< 3 m	0,52	Pertambangan
		Namang	15,53	< 3 m	0,10	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
			4,05	< 3 m	0,03	Lahan Terbuka
5	Kota Pangkalpinang		26,745	< 3 m	1,22	Pemukiman
			372,95	< 3 m	16,95	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
			158,03	< 3 m	7,18	Tambak
		Gabek	28,68	< 3 m	1,30	Pemukiman
			63,38	< 3 m	2,88	Pertambangan
		Bukitintan	17,09	< 3 m	0,78	



No	Kabupaten/Kota	Lokasi	Luas (Ha)	kedalaman (m)	Prosentase Kerusakan (%)	Penyebab Kerusakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			915,08	< 3 m	41,60	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
			40,35	< 3 m	1,83	Tambak
			300,28	< 3 m	13,65	Pemukiman
		Pangkal Balam	8,29	< 3 m	0,38	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
		Taman Sari	14,93	< 3 m	0,68	Pemukiman

Keterangan:

Sumber: Peta Digital Penutup Lahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Skala 1:250.000, BPHP Wilayah V dan Peta Digital Lahan Gambut Skala 1:250.000, Kementan; data spasial diolah

Tabel-18. Jumlah dan Produksi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data: 2023

No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kabupaten Bangka	PT. Inhutani V Unit Bangka		16.73	SK.377/Menhut-II/2009 tanggal 25 Juni 2009
2	Kabupaten Bangka	PT. Istana Kawi Kencana		13.44	SK.136/Menhut-II/2010 tanggal 25 Maret 2010
3	Kabupaten Bangka	KTH Panca Lestari II		405	SK.1615/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2020



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Kabupaten Bangka	KTH Plasma Nutfah		29	SK.688/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2018
5	Kabupaten Bangka	KTH Panca Indah Lestari		11	SK.2040/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017
6	Kabupaten Bangka	KTH Panca Lestari		680	SK.1714/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2020 jo
7	Kabupaten Bangka	Deniang Lestari		330	SK. 1616/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2020
8	Kabupaten Belitung	KTH Lestari		81	SK.768/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2018
9	Kabupaten Belitung	KTH Lestari		149	SK. 5631/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018
10	Kabupaten Belitung	KTH Maju Jaya		53	SK.770/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2018
11	Kabupaten Belitung	KTH Bukit Harapan		27	SK.767/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2018
12	Kabupaten Belitung	Maju Bersama		420	SK. 4801/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2019
13	Kabupaten Belitung	Gapoktan Kembiri Lestari		837	SK. 7114/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2018
14	Kabupaten Belitung	KTH Mekar Jaya		244	SK. 6841/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2018
15	Kabupaten Belitung	KTH Libut Jaya		127	522/536.a/DPK/2013
16	Kabupaten Belitung	KTH Padang Jaya		107	522/803/DPK/2013
17	Kabupaten Belitung	KTH Simpor Lestari		81	SK.4003/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017
18	Kabupaten Belitung	KTH Berutak Angus		47	SK.4004/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017
19	Kabupaten Belitung	Gamalina		87	406/SK/DTPHP2KKP
20	Kabupaten Belitung	Kelompok Tani Hutan Sengkelik		320	SK.7059/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017
21	Kabupaten Belitung	Kelompok Tani Hutan Aik Kemang		418	SK.7060/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017
22	Kabupaten Belitung	KTH Sumber Rezeki		34	SK.4006/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23	Kabupaten Belitung	Kelompok Tani Hutan Tunas Mekar		28	SK.7058/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017
24	Kabupaten Belitung	KTH Nyurok Jaya		47	SK.4005/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017
25	Kabupaten Belitung	KTH Tunas Jaya		25	522/802/DPK/2013
26	Kabupaten Belitung	Kan Jaya		31	404/SK/DTPHP2KKP
27	Kabupaten Belitung	Akasia Mangium		85	403/SK/DTPHP2KKP
28	Kabupaten Belitung	Mahoni		110	402/SK/DTPHP2KKP
29	Kabupaten Belitung	Sengon		75	405/SK/DTPHP2KKP
30	Kabupaten Belitung	KTH Maju Bersama		420	SK. 5781/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018
31	Kabupaten Bangka Barat	PT. Bangun Rimba Sejahtera		57.235	SK.336/Menhut-II/2013 tanggal 16 Mei 2013 jo SK.639/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2018
32	Kabupaten Bangka Barat	Salimin Tandan (KTH Air Belo I)		1,28	188.45/361/2.02.01/2012
33	Kabupaten Bangka Barat	Hariyadi (KTH Air Belo I)		2,50	188.45/385/2.02.01/2012
34	Kabupaten Bangka Barat	KTH Mayang I		28,24	SK.2045/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017
35	Kabupaten Bangka Barat	Awin (KTH Air Belo I)		1,11	188.45/391/2.02.01/2012
36	Kabupaten Bangka Barat	Dona (KTH Air Belo I)		0,95	188.45/377/2.02.01/2012
37	Kabupaten Bangka Barat	Muszul (KTH Air Belo I)		1,07	188.45/390/2.02.01/2012
38	Kabupaten Bangka Barat	Sahrul Umar (KTH Air Belo I)		0,53	188.45/384/2.02.01/2012
39	Kabupaten Bangka Barat	Saldin (KTH Air Belo I)		2,50	188.45/389/2.02.01/2012
40	Kabupaten Bangka Barat	Asmadi (KTH Air Belo I)		1,17	188.45/383/2.02.01/2012
41	Kabupaten Bangka Barat	Rusduan (KTH Air Belo I)		13,80	188.45/388/2.02.01/2012
42	Kabupaten Bangka Barat	Falen Atma Sagita (KTH Air Belo I)		2,15	188.45/376/2.02.01/2012
43	Kabupaten Bangka Barat	Jufri (KTH Air Belo I)		1,99	188.45/387/2.02.01/2012
44	Kabupaten Bangka Barat	Amadin (KTH Air Belo I)		2,30	188.45/382/2.02.01/2012
45	Kabupaten Bangka Barat	Kud (KTH Air Belo I)		0,69	188.45/365/2.02.01/2012
46	Kabupaten Bangka Barat	Abil (KTH Air Belo I)		2,00	188.45/386/2.02.01/2012
47	Kabupaten Bangka Barat	Daini (KTH Air Belo I)		1,80	188.45/367/2.02.01/2012

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2023



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
48	Kabupaten Bangka Barat	Gapar (KTH Air Belo I)		0,78	188.45/375/2.02.01/2012
49	Kabupaten Bangka Barat	Agus (KTH Air Belo I)		0,80	188.45/381/2.02.01/2012
50	Kabupaten Bangka Barat	Nasran (KTH Air Belo I)		5,70	188.45/380/2.02.01/2012
51	Kabupaten Bangka Barat	Arli (KTH Air Belo I)		1,06	188.45/374/2.02.01/2012
52	Kabupaten Bangka Barat	KSU Penyambung Permai		90,27	SK.2044/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017
53	Kabupaten Bangka Barat	Samin (KTH Air Belo I)		1,90	188.45/379/2.02.01/2012
54	Kabupaten Bangka Barat	Jais (KTH Air Belo I)		3,75	188.45/366/2.02.01/2012
55	Kabupaten Bangka Barat	Waris (KTH Air Belo I)		0,30	188.45/378/2.02.01/2012
56	Kabupaten Bangka Barat	Kimin (KTH Air Belo I)		2,70	188.45/373/2.02.01/2012
57	Kabupaten Bangka Barat	Jamisa (KTH Air Belo I)		0,82	188.45/372/2.02.01/2012
58	Kabupaten Bangka Barat	Amin (KTH Air Belo I)		3,30	188.45/371/2.02.01/2012
59	Kabupaten Bangka Barat	Zulhaidir (KTH Air Belo I)		1,52	188.45/370/2.02.01/2012
60	Kabupaten Bangka Barat	Panudin (KTH Air Belo I)		1,21	188.45/369/2.02.01/2012
61	Kabupaten Bangka Barat	Rima Melati (KTH Air Belo I)		8,00	188.45/368/2.02.01/2012
62	Kabupaten Bangka Barat	KSU Sekar Biru Sejahtera		308,54	SK.2043/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017
63	Kabupaten Bangka Barat	Sakirin (KTH Air Belo I)		1,00	188.45/364/2.02.01/2012
64	Kabupaten Bangka Barat	Sarli (KTH Air Belo I)		1,38	188.45/363/2.02.01/2012
65	Kabupaten Bangka Barat	Sadimin Dul Hadi (KTH Air Belo I)		4,00	188.45/362/2.02.01/2012
66	Kabupaten Bangka Barat	Eva Afriani (KTH Air Belo I)		14,00	188.45/392/2.02.01/2012
67	Kabupaten Bangka Barat	KTH Air Menduyung II		50,15	188.45/205/2.02.02/2014
68	Kabupaten Bangka Barat	KTH Air Menduyung I		49,98	188.45/206/2.02.02/2014
69	Kabupaten Bangka Barat	KTH Air Belo II		37,10	188.45/207/2.02.02/2014
70	Kabupaten Bangka Barat	KTH Air Menduyung III		45,62	188.45/462/2.02.02/2014
71	Kabupaten Bangka Tengah	PT. Agrindo Persada Lestari		26.259,00	SK.338/Menhut-II/2014 tanggal 27 Maret 2014
72	Kabupaten Bangka Tengah	KTH Beruang Abadi		142,02	SK. 3741/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2017



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
73	Kabupaten Bangka Tengah	KTH Katis Maju		27,33	188.45/618/DPK/2015
74	Kabupaten Bangka Tengah	KTH Tunas Harapan		18,8	188.45/621/DPK/2015
75	Kabupaten Bangka Tengah	KTH Kawa Bae		86,41	SK. 3743/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2017
76	Kabupaten Bangka Tengah	KTH Selan Jaya II		16,51	SK. 3746/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2017
77	Kabupaten Bangka Tengah	KTH Selan Jaya II		9,75	SK. 3745/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2017
78	Kabupaten Bangka Tengah	KTH Laju Mandiri		23,22	SK. 3744/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2017
79	Kabupaten Bangka Tengah	KTH Bejunjung		14,72	SK. 3742/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2017
80	Kabupaten Bangka Tengah	KTH Selan Jaya		3,29	188.45/622/DPK/2015
81	Kabupaten Bangka Selatan	PT. Hutan Lestari Raya		31.630,00	19/1/IUPPHK-HI/PMDN/2017
82	Kabupaten Bangka Selatan	KSU Mandiri Bina Pribumi Permai		2045	SK.1204/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018
83	Kabupaten Belitung Timur	PT. Indo Sukses Lestari Makmur		10.025,19	SK.114/Menlhk/Setjen/PLA.2/2/2019
84	Kabupaten Belitung Timur	PT. Andalan Karya Pertiwi		29,14	SK.8/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2015
85	Kabupaten Belitung Timur	Ahidin Said (KTH Aik Kubing)		2,30	503/ 022/ IUPHHK-HTR/ BPMP- BELTIM/ IV/ 2013
86	Kabupaten Belitung Timur	Jemahi		5,73	503/023/IUPHHK-HTR/BPPT- BELTIM/IX/2012
87	Kabupaten Belitung Timur	Suryadin (Senyubuk II)		3,00	503/103/IUPHHK-HTR/BPMP- BELTIM/VII/2013
88	Kabupaten Belitung Timur	Tami		0,26	503/003/IUPHHK-HTR/BPPT- BELTIM/IX/2012
89	Kabupaten Belitung Timur	Jahatim		3,43	503/011/IUPHHK-HTR/BPPT- BELTIM/IX/2012
90	Kabupaten Belitung Timur	Arpendi		0,71	503/004/IUPHHK-HTR/BPPT- BELTIM/IX/2012
91	Kabupaten Belitung Timur	Rahmadani Saputra		3,42	503/005/IUPHHK-HTR/BPPT- BELTIM/IX/2012
92	Kabupaten Belitung Timur	Timan		2,83	503/012/IUPHHK-HTR/BPPT- BELTIM/IX/2012



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
93	Kabupaten Belitung Timur	Satia Raharja		4,11	503/001/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
94	Kabupaten Belitung Timur	Musliadi		1,49	503/006/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
95	Kabupaten Belitung Timur	Rohandi		3,98	503/002/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
96	Kabupaten Belitung Timur	Tri Sutrisno		2,01	503/021/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
97	Kabupaten Belitung Timur	Darsono		0,36	503/013/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
98	Kabupaten Belitung Timur	Buhri		3,95	503/007/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
99	Kabupaten Belitung Timur	Rohani		3,81	503/008/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
100	Kabupaten Belitung Timur	Indratno		1,05	503/014/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
101	Kabupaten Belitung Timur	Irwandi		3,64	503/009/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
102	Kabupaten Belitung Timur	Narjo		7,11	503/022/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
103	Kabupaten Belitung Timur	Zulkarnaen		3,23	503/010/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
104	Kabupaten Belitung Timur	Agus Setiawan		0,09	503/015/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
105	Kabupaten Belitung Timur	Rosmidi		2,13	503/016/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
106	Kabupaten Belitung Timur	Hasnuri		1,69	503/017/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
107	Kabupaten Belitung Timur	Leo Sulastrio		2,59	503/018/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
108	Kabupaten Belitung Timur	Basri		0,80	503/019/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
109	Kabupaten Belitung Timur	Rustadi		0,33	503/020/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
110	Kabupaten Belitung Timur	Belihan (KTH Karya Luhur Lestari)		3,70	503/ 037/ IUPHHK-HTR/ BPMPPT-BELTIM/ IV/ 2013
111	Kabupaten Belitung Timur	Amran		1,76	503/024/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2023



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
112	Kabupaten Belitung Timur	Anto		2,13	503/025/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
113	Kabupaten Belitung Timur	Suriyala		2,30	503/026/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
114	Kabupaten Belitung Timur	Herman Sawiran		2,49	503/027/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
115	Kabupaten Belitung Timur	Hariadi (KTH Aik Kubing)		1,60	503/ 001/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
116	Kabupaten Belitung Timur	Sudarjo (KTH Aik Kubing)		1,40	503/ 002/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
117	Kabupaten Belitung Timur	Hartanto (KTH Aik Kubing)		3,20	503/ 003/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
118	Kabupaten Belitung Timur	Dewi (KTH Aik Kubing)		0,60	503/ 004/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
119	Kabupaten Belitung Timur	Karyadi (KTH Aik Kubing)		6,70	503/ 005/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
120	Kabupaten Belitung Timur	Marzuli (KTH Aik Kubing)		3,70	503/ 006/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
121	Kabupaten Belitung Timur	Jemaer Jahan (KTH Aik Kubing)		2,60	503/ 007/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
122	Kabupaten Belitung Timur	Rosdianto (KTH Aik Kubing)		2,70	503/ 008/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
123	Kabupaten Belitung Timur	Juriandi (KTH Aik Kubing)		0,30	503/ 009/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
124	Kabupaten Belitung Timur	Junaidi Jenamin (KTH Aik Kubing)		1,20	503/ 010/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
125	Kabupaten Belitung Timur	Juherman (KTH Aik Kubing)		2,20	503/ 011/ IUPHHK-HTR/ BPMPT BELTIM/ IV/ 2013
126	Kabupaten Belitung Timur	Ridwan (KTH Aik Kubing)		3,20	503/ 012/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
127	Kabupaten Belitung Timur	Karyandi (KTH Aik Kubing)		0,60	503/ 013/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
128	Kabupaten Belitung Timur	Supardi (KTH Aik Kubing)		1,70	503/ 014/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
129	Kabupaten Belitung Timur	Sumadi (KTH Aik Kubing)		0,80	503/ 015/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
130	Kabupaten Belitung Timur	Ardia Yansah (KTH Aik Kubing)		1,00	503/ 016/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2023



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
131	Kabupaten Belitung Timur	Suparjo (KTH Aik Kubing)		0,80	503/ 017/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
132	Kabupaten Belitung Timur	Sobli Sapa (KTH Aik Kubing)		1,20	503/ 018/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
133	Kabupaten Belitung Timur	Yaman (KTH Aik Kubing)		3,60	503/ 019/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
134	Kabupaten Belitung Timur	Hamija (KTH Aik Kubing)		7,20	503/ 020/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
135	Kabupaten Belitung Timur	Muslin (KTH Aik Kubing)		5,10	503/ 021/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
136	Kabupaten Belitung Timur	Suyudi (KTH Aik Kubing)		3,00	503/ 023/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
137	Kabupaten Belitung Timur	Herwanto (KTH Karya Luhur Lestari)		5,00	503/ 024/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
138	Kabupaten Belitung Timur	Hikardi (KTH Karya Luhur Lestari)		1,50	503/ 025/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
139	Kabupaten Belitung Timur	Hisno (KTH Karya Luhur Lestari)		3,30	503/ 026/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
140	Kabupaten Belitung Timur	Espandi (KTH Karya Luhur Lestari)		1,70	503/ 027/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
141	Kabupaten Belitung Timur	Arjani (KTH Karya Luhur Lestari)		2,60	503/ 028/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
142	Kabupaten Belitung Timur	Aridi (KTH Karya Luhur Lestari)		1,00	503/ 029/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
143	Kabupaten Belitung Timur	Syahrindi Ali (KTH Karya Luhur Lestari)		2,20	503/ 030/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
144	Kabupaten Belitung Timur	Zuhirman (KTH Karya Luhur Lestari)		2,80	503/ 031/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
145	Kabupaten Belitung Timur	Atrisno (KTH Karya Luhur Lestari)		2,20	503/ 032/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
146	Kabupaten Belitung Timur	Ahrozi (KTH Karya Luhur Lestari)		1,70	503/ 033/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
147	Kabupaten Belitung Timur	Darmawan (KTH Karya Luhur Lestari)		0,50	503/ 034/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2023



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
148	Kabupaten Belitung Timur	Hendri Gunawan (KTH Karya Luhur Lestari)		0,60	503/ 035/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
149	Kabupaten Belitung Timur	Asnawi (KTH Karya Luhur Lestari)		1,70	503/ 036/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
150	Kabupaten Belitung Timur	Supran (KTH Karya Luhur Lestari)		2,50	503/ 038/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
151	Kabupaten Belitung Timur	Hartoni (KTH Karya Luhur Lestari)		1,20	503/ 039/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
152	Kabupaten Belitung Timur	Yusman (KTH Karya Luhur Lestari)		1,90	503/ 040/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
153	Kabupaten Belitung Timur	Donny (KTH Karya Luhur Lestari)		1,40	503/ 043/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
154	Kabupaten Belitung Timur	Wasri (KTH Karya Luhur Lestari)		1,60	503/ 042/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
155	Kabupaten Belitung Timur	Sutrisno (KTH Karya Luhur Lestari)		2,00	503/ 041/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
156	Kabupaten Belitung Timur	Agung Budi Laksono (KTH Karya Luhur Lestari)		0,90	503/ 045/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
157	Kabupaten Belitung Timur	Sarwandi (KTH Anugrah Alam)		0,80	503/ 047/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
158	Kabupaten Belitung Timur	Saharoni (KTH Karya Luhur Lestari)		1,50	503/ 044/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
159	Kabupaten Belitung Timur	Yayat (KTH Anugrah Alam)		4,60	503/ 056/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
160	Kabupaten Belitung Timur	Hardiyanto (KTH Karya Luhur Lestari)		1,60	503/ 046/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
161	Kabupaten Belitung Timur	Bahasa (KTH Anugrah Alam)		1,40	503/ 050/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
162	Kabupaten Belitung Timur	Sanan (KTH Anugrah Alam)		5,70	503/ 048/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
163	Kabupaten Belitung Timur	Johandi (KTH Anugrah Alam)		1,20	503/ 053/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2023



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
164	Kabupaten Belitung Timur	Bahara (KTH Anugrah Alam)		5,30	503/ 049/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
165	Kabupaten Belitung Timur	Supardi (KTH Anugrah Alam)		0,60	503/ 051/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
166	Kabupaten Belitung Timur	Samsani (KTH Aik Kayu Kubor)		5,10	503/ 060/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
167	Kabupaten Belitung Timur	Juriadi (KTH Anugrah Alam)		2,50	503/ 052/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
168	Kabupaten Belitung Timur	Samsuli (KTH Anugrah Alam)		4,20	503/ 054/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
169	Kabupaten Belitung Timur	Zulkarnaen (KTH Anugrah Alam)		2,10	503/ 057/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
170	Kabupaten Belitung Timur	Elwita (KTH Anugrah Alam)		3,00	503/ 055/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
171	Kabupaten Belitung Timur	Sadri Sani (KTH Air Ketiau)		4,90	503/ 070/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
172	Kabupaten Belitung Timur	Marzono (KTH Aik Kayu Kubor)		5,00	503/ 061/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
173	Kabupaten Belitung Timur	Muhammad DS (KTH Aik Kayu Kubor)		5,00	503/ 058/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
174	Kabupaten Belitung Timur	Junaidi S (KTH Aik Kayu Kubor)		7,80	503/ 065/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
175	Kabupaten Belitung Timur	Siswadi (KTH Aik Kayu Kubor)		5,00	503/ 059/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
176	Kabupaten Belitung Timur	Sadikin (KTH Air Ketiau)		2,90	503/ 076/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
177	Kabupaten Belitung Timur	Jupri (KTH Aik Kayu Kubor)		7,70	503/ 062/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
178	Kabupaten Belitung Timur	Susino (KTH Aik Kayu Kubor)		5,00	503/ 066/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
179	Kabupaten Belitung Timur	Pirdaus YZ (KTH Aik Kayu Kubor)		5,00	503/ 063/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
180	Kabupaten Belitung Timur	Sumini (KTH Air Ketiau)		1,10	503/ 071/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
181	Kabupaten Belitung Timur	Kadri Umar (KTH Aik Kayu Kubor)		5,10	503/ 064/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
182	Kabupaten Belitung Timur	Zuliadi (KTH Aik Kayu Kubor)		5,00	503/ 067/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
183	Kabupaten Belitung Timur	Kadarusmadi (Segantang Lestari)		2,70	503/083/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
184	Kabupaten Belitung Timur	Eddy Harun (KTH Aik Kayu Kubor)		4,90	503/ 068/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
185	Kabupaten Belitung Timur	Muhaizir (KTH Air Ketiau)		0,90	503/ 072/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
186	Kabupaten Belitung Timur	Suherman Salam (KTH Aik Kayu Kubor)		5,00	503/ 069/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
187	Kabupaten Belitung Timur	Malori (KTH Air Ketiau)		2,10	503/ 077/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
188	Kabupaten Belitung Timur	Kamsul (Senyubuk I)		0,30	503/091/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
189	Kabupaten Belitung Timur	Maryono (KTH Air Ketiau)		3,50	503/ 073/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
190	Kabupaten Belitung Timur	Maidi (KTH Air Ketiau)		2,10	503/ 078/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
191	Kabupaten Belitung Timur	Teli Melinda (KTH Air Ketiau)		3,90	503/ 074/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
192	Kabupaten Belitung Timur	Poniman (Segantang Lestari)		1,90	503/084/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
193	Kabupaten Belitung Timur	Alek (KTH Air Ketiau)		3,20	503/ 075/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
194	Kabupaten Belitung Timur	Dalima Dulhamat (KTH Air Ketiau)		0,90	503/ 079/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
195	Kabupaten Belitung Timur	Ramli (Segantang Lestari)		2,30	503/085/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
196	Kabupaten Belitung Timur	Asri (Segantang Lestari)		1,60	503/080/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
197	Kabupaten Belitung Timur	Kuncoro Gairudin (Senyubuk I)		2,00	503/092/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
198	Kabupaten Belitung Timur	Cuaidi (Segantang Lestari)		2,30	503/081/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
199	Kabupaten Belitung Timur	Suwandi (Segantang Lestari)		1,90	503/086/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
200	Kabupaten Belitung Timur	Edy Saputra (Segantang Lestari)		1,70	503/082/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
201	Kabupaten Belitung Timur	Yuli Supratno (Senyubuk II)		2,10	503/101/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
202	Kabupaten Belitung Timur	Lupito (Senyubuk I)		0,40	503/093/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
203	Kabupaten Belitung Timur	Yetno (Segantang Lestari)		2,00	503/087/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
204	Kabupaten Belitung Timur	Asrin (Senyubuk I)		0,30	503/088/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
205	Kabupaten Belitung Timur	Maswan (Senyubuk I)		0,70	503/094/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
206	Kabupaten Belitung Timur	Edy Pratama (Senyubuk I)		1,10	503/089/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
207	Kabupaten Belitung Timur	Syurman (Senyubuk II)		0,70	503/102/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
208	Kabupaten Belitung Timur	Fatimah (Senyubuk I)		1,80	503/090/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
209	Kabupaten Belitung Timur	Rusman (Senyubuk I)		1,60	503/095/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
210	Kabupaten Belitung Timur	Selani (Senyubuk I)		0,80	503/096/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
211	Kabupaten Belitung Timur	Sugianur (Senyubuk I)		0,80	503/097/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
212	Kabupaten Belitung Timur	Sumardi M (Senyubuk I)		0,30	503/098/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
213	Kabupaten Belitung Timur	Yeyensi (Senyubuk I)		0,50	503/099/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
214	Kabupaten Belitung Timur	Sukardi HJ (Senyubuk II)		1,20	503/100/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
215	Kabupaten Belitung Timur	Yulianto (Maju Makmur Lestari)		1,90	503/144/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
216	Kabupaten Belitung Timur	Rizani (Senyubuk II)		1,20	503/104/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
217	Kabupaten Belitung Timur	Idwar (Senyubuk II)		0,10	503/105/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
218	Kabupaten Belitung Timur	Haryanto Supendi (Senyubuk II)		0,70	503/106/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2023



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
219	Kabupaten Belitung Timur	Firman Saputra (Senyubuk II)		1,70	503/107/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
220	Kabupaten Belitung Timur	Haidir (Senyubuk II)		0,20	503/108/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
221	Kabupaten Belitung Timur	Edi Sopian (Senyubuk II)		1,20	503/109/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
222	Kabupaten Belitung Timur	Darmawan (Senyubuk II)		0,70	503/110/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
223	Kabupaten Belitung Timur	Abidin Duahid (Senyubuk II)		0,60	503/111/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
224	Kabupaten Belitung Timur	Arie (Jangkar Mandiri)		2,50	503/112/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
225	Kabupaten Belitung Timur	Dedy (Jangkar Mandiri)		2,00	503/113/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
226	Kabupaten Belitung Timur	Farto (Jangkar Mandiri)		1,80	503/114/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
227	Kabupaten Belitung Timur	Haryono (Jangkar Mandiri)		2,10	503/115/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
228	Kabupaten Belitung Timur	Irfandi (Jangkar Mandiri)		1,90	503/116/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
229	Kabupaten Belitung Timur	Iryanto (Jangkar Mandiri)		2,30	503/117/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
230	Kabupaten Belitung Timur	Maryadi (Jangkar Mandiri)		2,10	503/118/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
231	Kabupaten Belitung Timur	Sukri Tutok (Jangkar Mandiri)		1,70	503/119/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
232	Kabupaten Belitung Timur	Yusri (Jangkar Mandiri)		2,30	503/120/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
233	Kabupaten Belitung Timur	Andri (Rimba Lestari)		2,80	503/121/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
234	Kabupaten Belitung Timur	Harni (Rimba Lestari)		3,00	503/122/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
235	Kabupaten Belitung Timur	Marhazan (Rimba Lestari)		3,00	503/123/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
236	Kabupaten Belitung Timur	Maryadi (Rimba Lestari)		3,00	503/124/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
237	Kabupaten Belitung Timur	Sobri (Rimba Lestari)		2,90	503/125/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2023



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
238	Kabupaten Belitung Timur	Sandri (Rimba Lestari)		2,90	503/126/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
239	Kabupaten Belitung Timur	Solihin (Rimba Lestari)		3,00	503/127/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
240	Kabupaten Belitung Timur	Surmiwati (Rimba Lestari)		2,90	503/128/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
241	Kabupaten Belitung Timur	Abdul Hasyim (Maju Makmur Lestari)		1,00	503/129/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
242	Kabupaten Belitung Timur	Aris Dinata (Maju Makmur Lestari)		1,10	503/130/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
243	Kabupaten Belitung Timur	Darwin (Maju Makmur Lestari)		0,40	503/131/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
244	Kabupaten Belitung Timur	Fredy Utoyo (Maju Makmur Lestari)		3,00	503/132/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
245	Kabupaten Belitung Timur	Haniton (Maju Makmur Lestari)		1,30	503/133/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
246	Kabupaten Belitung Timur	Karidi (Maju Makmur Lestari)		2,90	503/134/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
247	Kabupaten Belitung Timur	Kusmawan (Maju Makmur Lestari)		0,90	503/135/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
248	Kabupaten Belitung Timur	Kerli (Maju Makmur Lestari)		1,30	503/136/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
249	Kabupaten Belitung Timur	Megiyarto (Maju Makmur Lestari)		0,50	503/137/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
250	Kabupaten Belitung Timur	Muhari (Maju Makmur Lestari)		1,30	503/138/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
251	Kabupaten Belitung Timur	Mulyadi (Maju Makmur Lestari)		1,10	503/139/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
252	Kabupaten Belitung Timur	Mislam (Maju Makmur Lestari)		1,30	503/140/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
253	Kabupaten Belitung Timur	Salman (Maju Makmur Lestari)		1,70	503/141/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
254	Kabupaten Belitung Timur	Suriono (Maju Makmur Lestari)		0,50	503/142/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
255	Kabupaten Belitung Timur	Wedi Darsono (Maju Makmur Lestari)		1,50	503/143/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
256	Kabupaten Belitung Timur	Yandi (Maju Makmur Lestari)		0,90	503/145/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
257	Kabupaten Belitung Timur	Yukasiwi (Maju Makmur Lestari)		1,20	503/146/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
258	Kabupaten Belitung Timur	Ardawi (Bersatu)		2,74	503/147/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
259	Kabupaten Belitung Timur	Fengky F (Bersatu)		2,50	503/150/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
260	Kabupaten Belitung Timur	Surian (Bersatu)		2,00	503/149/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
261	Kabupaten Belitung Timur	Subandi (Bersatu)		1,30	503/148/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
262	Kabupaten Belitung Timur	Sofriadi (Bersatu)		2,80	503/152/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/X/2013
263	Kabupaten Belitung Timur	Fredy (Bersatu)		0,50	503/151/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/X/2013
264	Kabupaten Belitung Timur	Zuhardin (Bersatu)		1,50	503/153/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/X/2013
265	Kabupaten Belitung Timur	Edi Sopyan		63,90	503/153/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/XII/2013
266	Kabupaten Belitung Timur	KTH Jawa I		15,17	503/014/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/2014
267	Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan	PT. Bangkanesia		51205	SK.639/Menhut-II/2009 tanggal 9 Oktober 2009
268	Kabupaten Bangka dan Belitung	PT. Agro Pratama Sejahtera		30773	SK.208/Menhut-II/2011 tanggal 12 April 2011

Sumber :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023
2. Buku Basis Data Geospasial KLHK 2021



Tabel-19 Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data: 2022

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Bangka (KPH Bubus Panca)	KTH Remodong Bersatu	47	Izin Perhutanan Sosial
2		KTH Citra Maju	255	Izin Perhutanan Sosial
3		KTH Sukses Makmur	20	Izin Perhutanan Sosial
4		KTH Penyusuk Permai	35	Izin Perhutanan Sosial
5		KTH Kapitan Hijau	39	Izin Perhutanan Sosial
6		KTH Mangrove Lestari	94	Izin Perhutanan Sosial
7		KTH Mapur Jaya Bersama	50	Izin Perhutanan Sosial
8		KTH Padang Lestari	50	Izin Perhutanan Sosial
9		KTH Karya Abadi	90	Izin Perhutanan Sosial
10		KTH Alam Jaya Mandiri	31	Izin Perhutanan Sosial
11		KTH Taruna Tani Bantam	98	Izin Perhutanan Sosial
12		KTH Penyusuk Timur	110	Izin Perhutanan Sosial
13	Bangka (KPH Sigambir Kota waringin)	KTH Pantai Tanjung Karang Lestari	59	Izin Perhutanan Sosial
14		KTH Cahaya Mandiri	140	Izin Perhutanan Sosial
15		KTH Wanamina	244	Izin Perhutanan Sosial
16		KTH Penagan Hijau	23	Izin Perhutanan Sosial
17		KTH Penagan Lestari	50	Izin Perhutanan Sosial
18		KTH Hijau Bumi Babel	30	Izin Perhutanan Sosial
19		KTH AN. Nihlah	72	Izin Perhutanan Sosial
20		KTH Mutiara Timur	13	Izin Perhutanan Sosial
21	Bangka Tengah (KPH Sungai Sembulan)	KTH Junjung Besauh	205	Izin Perhutanan Sosial
22		KTH Gempita	148	Izin Perhutanan Sosial
23		KTH Gempa 01	213	Izin Perhutanan Sosial
24		KTH Belilik Jaya	128	Izin Perhutanan Sosial
25		KTH Karomah	295	Izin Perhutanan Sosial
26		Gapoktan Tani Makmur	2819	Izin Perhutanan Sosial
27		KTH Tunas Harapan	300	Izin Perhutanan Sosial



No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Keterangan
1	2	3	4	5
28		KTH Nadi Lestari	191	Izin Perhutanan Sosial
29	Bangka Selatan (KPH Muntai Palas)	Pokdarwis Sadar Wisata Tanjung Labun	72	Izin Perhutanan Sosial
30		Pokdarwis Sadar Wisata Bukit Gebang	21	Izin Perhutanan Sosial
31		KTH Tanjung Batu Bedaun	41	Izin Perhutanan Sosial
32	Bangka Barat (Jebu Bembang Antan)	KTH Gunung Tujuh	39.00	Izin Perhutanan Sosial
33		Gapoktan Tumbek Bulun	234.00	Izin Perhutanan Sosial
34	Bangka Barat (Rambat Menduyung)	Gapoktan Nibung Barokah	471.00	Izin Perhutanan Sosial
35	Belitung (Belantu Mendanaw)	KTH Rimba Petaling	1919	Izin Perhutanan Sosial
36		KTH Bukit Bujang	2252	Izin Perhutanan Sosial
37		KTH Moyang Gersik	805	Izin Perhutanan Sosial
38		KTH Air Buntar	120	Izin Perhutanan Sosial
39		KTH Suka Maju	303	Izin Perhutanan Sosial
40		KTH Air Terjun Linsum Kawai	177	Izin Perhutanan Sosial
41		KTH Kelekak Duren Gunung Sang	203	Izin Perhutanan Sosial
42		KTH Belantu Jaye	995	Izin Perhutanan Sosial
43		KTH Gual Lestari	2639	Izin Perhutanan Sosial
44		KTH Senas Community	1160	Izin Perhutanan Sosial
45		Gapoktan Batu Bedil	933	Izin Perhutanan Sosial
46		KTH Padang Samak	187	Izin Perhutanan Sosial
47		KTH Seberang Bersatu	757	Izin Perhutanan Sosial
48		KTH Gunong Tajam	228	Izin Perhutanan Sosial
49		KTH Gurok Beraye	120	Izin Perhutanan Sosial
50		KTH Bukit Tembali Simpor Laki	62	Izin Perhutanan Sosial
51		KTH Mitra Tebalu Betua	41	Izin Perhutanan Sosial
52		KTH Arsel Community	115	Izin Perhutanan Sosial
53		KTH Bakau Pemuda Nelayan Pecinta Alam	205	Izin Perhutanan Sosial
54		KTH Teluk Munsang	460	Izin Perhutanan Sosial
55	Belitung Timur (Gunung Duren)	Gapoktan Mangjaya	597	Izin Perhutanan Sosial
56		KTH Aik Ruak I	107	Izin Perhutanan Sosial
57		KTH Aik Ruak II	1120	Izin Perhutanan Sosial



No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Keterangan
1	2	3	4	5
58		KT Aik Kunyit Cemerlang	682	Izin Perhutanan Sosial
59		KEPPAK	385	Izin Perhutanan Sosial
60		KTH Harapan Bersama	571	Izin Perhutanan Sosial
61		Bangsek Gurok Meranti	433	Izin Perhutanan Sosial
62		Pokdarwis GEMA	96	Izin Perhutanan Sosial
63		Gapoktan Air Sambar	244	Izin Perhutanan Sosial
64		KTH Teluk Balok	298	Izin Perhutanan Sosial
65		Gapoktan Balok Bersatu	323	Izin Perhutanan Sosial
66		KTH Gunung Legau	1148	Izin Perhutanan Sosial
67	Jumlah Total		26412	

Sumber : DLHK 2023 dan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Keterangan : NA = Tidak ada ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang dikeluarkan

Tabel-20. Perdagangan Satwa dan Tumbuhan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2023

No.	Nama Spesies	Bagian-bagian yang diperdagangkan	Status menurut CITES
1	2	3	4
1	Labi-labi/Bulus	Seluruh bagian	Apendix II
2	Kura Kura Ambon	Seluruh bagian	Apendix II
3	Ular Gendang Merah	Kulit	Apendix II
4	Ular Sanca Kembang	Kulit	Apendix II
5	Biawak Air	Kulit	Apendix II
6.	Lola Merah (<i>Rochia nilotica</i>)	Utuh/Kg	Not Evaluated

Sumber : Balai Konservasi Sumbar Daya Alam Resort Bangka, 2023



Tabel 21. Jumlah dan Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2023

No.	Jenis IUPJLWA							SK
	Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Pemanfaatan Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PDAM Tirta Bangka		9.00					Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/205/Hutbun/2010 Tanggal 11 Januari 2010
2	Yayasan Alam Bukit Betung			30.00				Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/958/Dishut/2016 Tanggal 19 Oktober 2016
3	CV. Panorama Lintas Timur			18.16				Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1122/Dishut Tanggal 31 Desember 2018
4	PT. Pantai Indah Rebo			69.38				Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/694.a/Dishut/2019 Tanggal 17 Juli 2019



No.	Jenis IUPJLWA							SK
	Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Pemanfaatan Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	PT. Wattana Segar Alam			3.20				Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1094.k /Dishut/2019 Tanggal 30 Desember 2019
6	PT. Tunas Propindo Lestari			25.72				Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1046.a/Dishut/2019 Tanggal 13 Desember 2019
7	PT. Timah Tbk			72.00				Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/499/Dishut/2020 Tanggal 28 Juli 2020
8	CV. Pesona Alam Asri			16.32				Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/703/Dishut/2020 Tanggal 17 September 2020
9	CV. Mulia Asri Sukhitata			26.08				Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/702/Dishut/2020 Tanggal 17 September 2020

Keterangan :

Sumber: DLHK Babel, 2023



Tabel-22. Kualitas Air Sumur
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2022

No	Lokasi Sumur Kabupaten Bangka Tengah	Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Temperatur (°C)	pH	Kekeruhan	Warna	Rasa	Bau	TDS
			Lintang	Bujur							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Sumur Lubuk Besar	3/16/2022	2° 33' 19,4195"	106° 38' 21,4541"	29	5.35	-	jernih	-	tidak ada	30
2	Sumur Simpangkatis	3/17/2022	2° 11' 34,0821"	106° 04' 09,7163"	-	-	-	jernih	-	tidak ada	-
3	Sumur Namang	3/18/2022	2° 21' 34,6852"	106° 12' 53,9233"	28.6	6.09	-	jernih	-	tidak ada	574
4	Sumur Koba	3/21/2022	2° 32' 10,1439"	106° 25' 02,6790"	27.6	4.94	-	jernih	-	tidak ada	17
5	Sumur Pangkalanbaru	3/22/2022	2° 09' 13,1795"	106° 07' 50,4062"	28.6	5.48	-	jernih	-	tidak ada	96



No	Lokasi Sumur	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	Total Phosphat sebagai P (mg/L)	NO ₃ sebagai N (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	Arsen (mg/L)	Kobalt (mg/L)	Barium (mg/L)	Boron (mg/L)
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Sumur Lubuk Besar	2.49	22.7	-	-	-	0.181	-	-	-	-
2	Sumur Simpangkatis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumur Namang	2.84	-	-	< 0,0312	0.7	0.1	-	-	-	-
4	Sumur Koba	-	-	-	-	0.545	-	-	-	-	-
5	Sumur Pangkalanbaru	2.88	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Lokasi Sumur	Selenium (mg/L)	Kadmium (mg/L)	Khrom (VI) (mg/L)	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)	Klorida (mg/L)
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
1	Sumur Lubuk Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumur Simpangkatis	-	-	-	-	-	< 1.610	-	-	-	-
3	Sumur Namang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sumur Koba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sumur Pangkalanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



No	Lokasi Sumur	Sianida (mg/L)	Flourida (mg/L)	Nitrit sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin Bebas (mg/L)	Belarang sebagai H2S(mg/L)	Fecal Colliform (jml/100ml)	Total Colliform (jml/100ml)	Gross- A(Bq/L)	Gross- B (Bq/L)
(1)	(2)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)
1	Sumur Lubuk Besar	-	-	-	-	-	-	-	20.0	-	-
2	Sumur Simpangkatis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumur Namang	0.004	-	< 0,00632	-	-	-	-	-	-	-
4	Sumur Koba	0.004	-	-	-	-	-	-	8.1	-	-
5	Sumur Pangkalanbaru	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-

No	Lokasi Sumur	Minyak dan Lemak	TSS (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sumur Lubuk Besar	-	-
2	Sumur Simpangkatis	< 1.610	-
3	Sumur Namang	-	7.0
4	Sumur Koba	-	-
5	Sumur Pangkalanbaru	-	3.0

Keterangan : 1. Sertifikat Hasil Uji Tahun 2022

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah, 2022



Tabel-22. A Kualitas Air Sumur
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2020

No	Lokasi Sumur	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Lintang	Bujur	Tempelatur (°C)	pH	Kekeruhan	Warna	Rasa	Bau	TDS	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)
1	Kabupaten Bangka	11 Maret 2020	-2.05381	106.1001	28.6	5.83	0.75	<25,0	Tidak berasa	Tidak berbau	108	2.01	4.33	4.23
2	Kabupaten Belitung	20 Februari 2020	-2.73246	107.6288	28.8	6.44	0.4	<25,0	Tidak berasa	Tidak berbau	229	1.91	4.18	4.13
3	Kabupaten Bangka Barat	12 Maret 2020	-2.05456	105.1759	28.9	4.23	0.36	<25,0	Tidak berasa	Tidak berbau	197	2.11	5.48	4.23
4	Kabupaten Bangka Tengah	12 Maret 2020	-2.48992	106.4124	27.2	6.07	1.64	<25,0	Tidak berasa	Tidak berbau	184	1.91	3.9	4.23
5	Kabupaten Bangka Selatan	17 Maret 2020	-3.01258	106.4506	27.4	5.87	0.34	<25,0	Tidak berasa	Tidak berbau	134	2.11	5.48	4.53
6	Kabupaten Belitung Timur	20 Februari 2020	-2.96905	108.1621	29.7	5.73	0.6	<25,0	Tidak berasa	Tidak berbau	68.6	1.71	3.69	4.03
7	Kota Pangkalpinang	13 Maret 2020	-2.13793	106.1548	30.7	4.86	0.58	<25,0	Tidak berasa	Tidak berbau	110	2.32	3.11	4.13



No	Lokasi Sumur	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Lintang	Bujur	Total Fosfat sbg P (mg/L)	NO 3 sebagai N (mg/L)	NH3-N (mg/L)	Arsen (mg/L)	Kobalt (mg/L)	Barium (mg/L)	Boron (mg/L)	Selenium (mg/L)
1	Kabupaten Bangka	11 Maret 2020	-2.05381	106.1001	<0,0316	1.02	0.0322	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Belitung	20 Februari 2020	-2.73246	107.6288	0.15	0.665	<0,0172	-	-	-	-	-
3	Kabupaten Bangka Barat	12 Maret 2020	-2.05456	105.1759	<0,0316	0.655	0.815	-	-	-	-	-
4	Kabupaten Bangka Tengah	12 Maret 2020	-2.48992	106.4124	<0,0316	0.78	0.128	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Bangka Selatan	17 Maret 2020	-3.01258	106.4506	<0,0316	0.68	0.0178	-	-	-	-	-
6	Kabupaten Belitung Timur	20 Februari 2020	-2.96905	108.1621	<0,0316	0.735	<0,0172	-	-	-	-	-
7	Kota Pangkalpinang	13 Maret 2020	-2.13793	106.1548	<0,0316	0.66	0.71	-	-	-	-	-

No	Lokasi Sumur	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Lintang	Bujur	Kadmium (mg/L)	Khrom (VI) (mg/L)	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)	Khlorida (mg/l)
1	Kabupaten Bangka	11 Maret 2020	-2.05381	106.1001	<0,00456	-	<0,0164	<0,0113	<0,0250	0.0522	-	<0,00676	0.5
2	Kabupaten Belitung	20 Februari 2020	-2.73246	107.6288	<0,00456	-	<0,0164	0.136	<0,0250	0.0331	-	<0,00676	17.5
3	Kabupaten Bangka Barat	12 Maret 2020	-2.05456	105.1759	<0,00456	-	<0,0164	0.166	<0,0250	<0,0197	-	<0,00676	31.2
4	Kabupaten Bangka Tengah	12 Maret 2020	-2.48992	106.4124	<0,00456	-	<0,0164	0.0894	<0,0250	<0,0197	-	0.0087	41
5	Kabupaten Bangka Selatan	17 Maret 2020	-3.01258	106.4506	<0,00456	-	<0,0164	0.0165	<0,0250	<0,0197	-	<0,00676	16.5



No	Lokasi Sumur	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Lintang	Bujur	Kadmium (mg/L)	Khrom (VI) (mg/L)	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)	Khlorida (mg/l)
6	Kabupaten Belitung Timur	20 Februari 2020	-2.96905	108.1621	<0,00456	-	<0,0164	0.166	<0,0250	0.0352	-	0.0275	0.75
7	Kota Pangkalpinang	13 Maret 2020	-2.13793	106.1548	<0,00456	-	0.0174	0.0518	<0,0250	<0,0197	-	<0,00676	55.7

No	Lokasi Sumur	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Lintang	Bujur	Sianida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Nitrit sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin bebas (mg/L)	Belereng sebagai H ₂ S (mg/L)	Fecal coliform (jml/100 ml)	Total coliform (jml/100 ml)	Gross-A (Bq /L)	Gross-B (Bq /L)
1	Kabupaten Bangka	11 Maret 2020	-2.05381	106.1001	0.0075	-	0.0124	15	<0,02	-	22	24	-	-
2	Kabupaten Belitung	20 Februari 2020	-2.73246	107.6288	0.003	-	0.122	<3,18	0.02	-	11	430	-	-
3	Kabupaten Bangka Barat	12 Maret 2020	-2.05456	105.1759	0.002	-	0.0213	35.9	<0,02	-	<1,80	2	-	-
4	Kabupaten Bangka Tengah	12 Maret 2020	-2.48992	106.4124	0.0035	-	0.00786	52	<0,02	-	14	17	-	-
5	Kabupaten Bangka Selatan	17 Maret 2020	-3.01258	106.4506	<0,002	-	0.0178	31.3	<0,02	-	15	22	-	-
6	Kabupaten Belitung Timur	20 Februari 2020	-2.96905	108.1621	<0,002	-	0.0101	<3,18	<0,02	-	<1,80	18.9	-	-
7	Kota Pangkalpinang	13 Maret 2020	-2.13793	106.1548	<0,002	-	0.00537	20.4	<0,02	-	<1,8	<1,8	-	-

Keterangan: tanda - menunjukkan bahwa tidak dilakukan pengujian terhadap parameter dimaksud

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kep. Bangka Belitung, 2020



Tabel-23. Kualitas Air Laut
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2023

No	Nama Lokasi/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	Warna (Mt)	Bau	Kecerahan (M)	Kekeruhan (NTU)	TSS (mg/l)
			Lintang	Bujur						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pertambangan	17/03/2022	1°54'42,480"	106°12'28,390"	Pantai Rebo	-	Tidak berbau	2,00	1,60	9,03
2	Pertambangan	18/03/2022	1°50'48,620"	106°9'2,002"	Batu Bedaon	-	Tidak berbau	3,50	1,25	8,55
3	Pariwisata	18/03/2022	1°48'16,240"	106°8'18,532"	Pantai Parai	-	Tidak berbau	3,50	0,45	9,34
4	Pertambangan	18/03/2022	1°44'19,849"	106°4'54,250"	Bedukang	-	Tidak berbau	8,50	0,34	8,15
5	Pertambangan	18/03/2022	1°33'29,048"	106°2'32,168"	Pantai Tuing	-	Tidak berbau	8,00	0,24	8,13
6	Pertambangan	18/03/2022	1°32'36,539"	106°33'16,409"	Romodong	-	Tidak berbau	1,00	7,54	8,78
7	Pertambangan	18/3/2022	1°36'44,050"	106°41'1,298"	Pelabuhan Belinyu	-	Tidak berbau	1,00	8,90	9,00
8	Pertambangan	17/03/2022	2°8'26,272"	106°12'16,369"	Muara Pasirpadi	-	Tidak berbau	2,50	3,01	9,80
9	Pelabuhan	17/03/2022	2°5'32,910"	106°11'21,581"	Tanjungbunga	-	Tidak berbau	2,50	1,69	10,81
10	Perikanan tangkap	17/03/2022	2°4'29,392"	106°12'35,881"	Air Anyir	-	Tidak berbau	3,50	0,35	10,31



No	Nama Lokasi/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	Warna (Mt)	Bau	Kecerahan (M)	Kekeruhan (NTU)	TSS (mg/l)
			Lintang	Bujur						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11	Pelabuhan	15/03/2022	2°44'48,804"	107°37'55,272"	Pelabuhan Kapal Ikan	-	Tidak berbau	1,00	3,82	9,73
12	Pelabuhan	15/03/2022	2°44'31,416"	107°36'24,732"	Pantai Tanjungpendam	-	Tidak berbau	2,00	1,36	9,00
13	Perikanan tangkap	15/03/2022	2°45'49,464"	107°34'10,668"	Gusong Bugis	-	Tidak berbau	2,50	0,89	10,27
14	Perikanan tangkap	15/03/2022	2°49'19,668"	107°34'18,516"	Sungai Penjelit	-	Tidak berbau	6,00	0,18	9,38
15	Perikanan tangkap	15/03/2022	2°42'59,328"	107°36'25,920"	Muara Sungai Kubu	-	Tidak berbau	3,00	0,72	9,13
16	Pariwisata	15/03/2022	2°35'50,964"	107°37'20,244"	Tempat Pengolahan ikan	-	Tidak berbau	4,00	0,73	9,65
17	Pariwisata	15/03/2022	2°35'30,696"	107°37'51,420"	Teluk Binga	-	Tidak berbau	3,00	0,70	10,58
18	Pelabuhan	15/03/2022	2°52'49,548"	107°33'15,228"	PLTU Suge	-	Tidak berbau	5,50	0,13	8,28
19	Pelabuhan	15/03/2022	2°53'10,572"	107°32'56,400"	Tanjungbatu	-	Tidak berbau	6,50	0,11	8,55
20	Pariwisata	15/03/2022	2°54'40,356"	107°31'56,892"	Tanjungular	-	Tidak berbau	3,50	0,43	10,45
21	Pertambangan	18/03/2022	1°31'23,700"	106°42'33,660"	Batu Atap	-	Tidak berbau	1,50	4,62	9,79
22	Perikanan budidaya	18/03/2022	1°47'29,904"	106°6'22,680"	Sinar Baru	-	Tidak berbau	1,00	5,65	8,10
23	Pertambangan	17/03/2022	1°58'34,118"	106°9'36,342"	Batu Ampar	-	Tidak berbau	6,00	0,64	10,50

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2023



No	Nama Lokasi/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	Warna (Mt)	Bau	Kecerahan (M)	Kekeruhan (NTU)	TSS (mg/l)
			Lintang	Bujur						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
24	Pertambangan	17/03/2022	2°14'17,844"	106°13'15,708"	Cambai	-	Tidak berbau	3,50	1,77	8,69
25	Pariwisata	17/03/2022	2°10'17,400"	106°11'30,048"	Batu Belubang	-	Tidak berbau	1,00	9,35	9,03

No	Nama Lokasi/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	Sampah	Lapisan Minyak	Temperatur (°C)*	pH*	Salinitas (‰)	DO(mg/l)
			Lintang	Bujur							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Pertambangan	17/03/2022	1°54'42,480"	106°12'28,390"	Pantai Rebo	nihil	nihil	30,60	8,00	32,90	3,10
2	Pertambangan	18/03/2022	1°50'48,620"	106°9'2,002"	Batu Bedaon	nihil	nihil	29,00	8,10	33,70	5,90
3	Pariwisata	18/03/2022	1°48'16,240"	106°8'18,532"	Pantai Parai	nihil	nihil	29,00	8,00	25,70	5,40
4	Pertambangan	18/03/2022	1°44'19,849"	106°4'54,250"	Bedukang	nihil	nihil	29,80	7,90	33,00	8,10
5	Pertambangan	18/03/2022	1°33'29,048"	106°2'32,168"	Pantai Tuing	nihil	nihil	29,30	7,50	32,70	5,50
6	Pertambangan	18/03/2022	1°32'36,539"	106°33'16,409"	Romodong	nihil	nihil	29,20	7,70	35,70	4,70
7	Pertambangan	18/3/2022	1°36'44,050"	106°41'1,298"	Pelabuhan Belinyu	nihil	nihil	30,10	7,00	33,20	4,50
8	Pertambangan	17/03/2022	2°8'26,272"	106°12'16,369"	Muara Pasirpadi	nihil	nihil	35,60	7,70	20,40	4,70
9	Pelabuhan	17/03/2022	2°5'32,910"	106°11'21,581"	Tanjungbunga	nihil	nihil	30,10	7,80	25,30	5,80

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2023



No	Nama Lokasi/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	Sampah	Lapisan Minyak	Temperatur (°C)*	pH*	Salinitas (‰)	DO(mg/l)
			Lintang	Bujur							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
10	Perikanan tangkap	17/03/2022	2°4'29,392"	106°12'35,881"	Air Anyir	nihil	nihil	34,90	8,00	28,00	5,30
11	Pelabuhan	15/03/2022	2°44'48,804"	107°37'55,272"	Pelabuhan Kapal Ikan	nihil	nihil	30,90	6,10	31,50	4,70
12	Pelabuhan	15/03/2022	2°44'31,416"	107°36'24,732"	Pantai Tanjungpendam	nihil	nihil	29,30	6,20	33,30	4,90
13	Perikanan tangkap	15/03/2022	2°45'49,464"	107°34'10,668"	Gusong Bugis	nihil	nihil	29,60	6,20	31,30	4,80
14	Perikanan tangkap	15/03/2022	2°49'19,668"	107°34'18,516"	Sungai Penjelit	nihil	nihil	32,00	6,80	33,70	5,70
15	Perikanan tangkap	15/03/2022	2°42'59,328"	107°36'25,920"	Muara Sungai Kubu	nihil	nihil	28,00	6,30	33,80	4,60
16	Pariwisata	15/03/2022	2°35'50,964"	107°37'20,244"	Tempat Pengolahan ikan	nihil	nihil	27,70	7,50	34,30	6,50
17	Pariwisata	15/03/2022	2°35'30,696"	107°37'51,420"	Teluk Binga	nihil	nihil	27,60	7,60	34,50	5,40
18	Pelabuhan	15/03/2022	2°52'49,548"	107°33'15,228"	PLTU Suge	nihil	nihil	28,70	7,00	33,10	5,20
19	Pelabuhan	15/03/2022	2°53'10,572"	107°32'56,400"	Tanjungbatu	nihil	nihil	28,80	7,10	33,60	5,40
20	Pariwisata	15/03/2022	2°54'40,356"	107°31'56,892"	Tanjungular	nihil	nihil	27,80	7,10	34,00	5,20
21	Pertambangan	18/03/2022	1°31'23,700"	106°42'33,660"	Batu Atap	nihil	nihil	28,00	7,60	36,20	5,00
22	Perikanan budidaya	18/03/2022	1°47'29,904"	106°6'22,680"	Sinar Baru	nihil	nihil	29,30	7,90	32,50	5,00
23	Pertambangan	17/03/2022	1°58'34,118"	106°9'36,342"	Batu Ampar	nihil	nihil	34,20	7,80	48,00	4,80

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2023



No	Nama Lokasi/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	Sampah	Lapisan Minyak	Temperatur (°C)*	pH*	Salinitas (‰)	DO(mg/l)
			Lintang	Bujur							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
24	Pertambangan	17/03/2022	2°14'17,844"	106°13'15,708"	Cambai	nihil	nihil	35,80	7,50	32,70	4,60
25	Pariwisata	17/03/2022	2°10'17,400"	106°11'30,048"	Batu Belubang	nihil	nihil	35,30	7,60	29,60	5,90

No	Nama Lokasi/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	BOD5 (mg/l)	COD (mg/l)	Amonia total (mg/l)	NO2-N (mg/l)	NO3-N (mg/l)
			Lintang	Bujur						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Pertambangan	17/03/2022	1°54'42,480"	106°12'28,390"	Pantai Rebo	2,52	-	<0,016	-	0,02
2	Pertambangan	18/03/2022	1°50'48,620"	106°9'2,002"	Batu Badaon	2,67	-	<0,016	-	0,02
3	Pariwisata	18/03/2022	1°48'16,240"	106°8'18,532"	Pantai Parai	2,67	-	<0,016	-	0,02
4	Pertambangan	18/03/2022	1°44'19,849"	106°4'54,250"	Bedukang	2,37	-	<0,016	-	0,02
5	Pertambangan	18/03/2022	1°33'29,048"	106°2'32,168"	Pantai Tuing	2,22	-	<0,016	-	0,02
6	Pertambangan	18/03/2022	1°32'36,539"	106°33'16,409"	Romodong	2,82	-	<0,016	-	0,02
7	Pertambangan	18/3/2022	1°36'44,050"	106°41'1,298"	Pelabuhan Belinyu	2,67	-	<0,016	-	0,02
8	Pertambangan	17/03/2022	2°8'26,272"	106°12'16,369"	Muara Pasirpadi	2,82	-	<0,016	-	0,02
9	Pelabuhan	17/03/2022	2°5'32,910"	106°11'21,581"	Tanjungbunga	2,37	-	<0,016	-	0,02



No	Nama Lokasi/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	BOD5 (mg/l)	COD (mg/l)	Amonia total (mg/l)	NO2-N (mg/l)	NO3-N (mg/l)
			Lintang	Bujur						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
10	Perikanan tangkap	17/03/2022	2°4'29,392"	106°12'35,881"	Air Anyir	2,22	-	<0,016	-	0,02
11	Pelabuhan	15/03/2022	2°44'48,804"	107°37'55,272"	Pelabuhan Kapal Ikan	2,97	-	<0,016	-	0,02
12	Pelabuhan	15/03/2022	2°44'31,416"	107°36'24,732"	Pantai Tanjungpendam	2,82	-	<0,016	-	0,02
13	Perikanan tangkap	15/03/2022	2°45'49,464"	107°34'10,668"	Gusong Bugis	2,67	-	<0,016	-	0,02
14	Perikanan tangkap	15/03/2022	2°49'19,668"	107°34'18,516"	Sungai Penjelit	2,37	-	<0,016	-	0,02
15	Perikanan tangkap	15/03/2022	2°42'59,328"	107°36'25,920"	Muara Sungai Kubu	2,67	-	<0,016	-	0,02
16	Pariwisata	15/03/2022	2°35'50,964"	107°37'20,244"	Tempat Pengolahan ikan	2,52	-	<0,016	-	0,02
17	Pariwisata	15/03/2022	2°35'30,696"	107°37'51,420"	Teluk Binga	3,27	-	<0,016	-	0,02
18	Pelabuhan	15/03/2022	2°52'49,548"	107°33'15,228"	PLTU Suge	2,82	-	<0,016	-	0,02
19	Pelabuhan	15/03/2022	2°53'10,572"	107°32'56,400"	Tanjungbatu	2,52	-	<0,016	-	0,02
20	Pariwisata	15/03/2022	2°54'40,356"	107°31'56,892"	Tanjungular	3,27	-	<0,016	-	0,02
21	Pertambangan	18/03/2022	1°31'23,700"	106°42'33,660"	Batu Atap	2,52	-	<0,016	-	0,02
22	Perikanan budidaya	18/03/2022	1°47'29,904"	106°6'22,680"	Sinar Baru	2,37	-	<0,016	-	0,02
23	Pertambangan	17/03/2022	1°58'34,118"	106°9'36,342"	Batu Ampar	2,52	-	<0,016	-	0,02



No	Nama Lokasi/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	BOD5 (mg/l)	COD (mg/l)	Amonia total (mg/l)	NO2-N (mg/l)	NO3-N (mg/l)
			Lintang	Bujur						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
24	Pertambangan	17/03/2022	2°14'17,844"	106°13'15,708"	Cambai	2,52	-	<0,016	-	0,02
25	Pariwisata	17/03/2022	2°10'17,400"	106°11'30,048"	Batu Belubang	2,97	-	<0,016	-	0,02

No	Nama Lokasi/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	PO4-P (mg/l)	Sianida (CN-) (mg/l)	Sulfida (H2S) (mg/l)	Klor (mg/l)	Minyak bumi (mg/l)	Fenol (mg/l)	Pestisida (mg/l)	PCB (mg/l)
			Lintang	Bujur									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
1	Pertambangan	17/03/2022	1°54'42,480"	106°12'28,390"	Pantai Rebo	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
2	Pertambangan	18/03/2022	1°50'48,620"	106°9'2,002"	Batu Bedaon	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
3	Pariwisata	18/03/2022	1°48'16,240"	106°8'18,532"	Pantai Parai	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
4	Pertambangan	18/03/2022	1°44'19,849"	106°4'54,250"	Bedukang	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
5	Pertambangan	18/03/2022	1°33'29,048"	106°2'32,168"	Pantai Tuing	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
6	Pertambangan	18/03/2022	1°32'36,539"	106°33'16,409"	Romodong	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
7	Pertambangan	18/3/2022	1°36'44,050"	106°41'1,298"	Pelabuhan Belinyu	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
8	Pertambangan	17/03/2022	2°8'26,272"	106°12'16,369"	Muara Pasirpadi	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
9	Pelabuhan	17/03/2022	2°5'32,910"	106°11'21,581"	Tanjungbunga	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005



No	Nama Lokasi/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	PO4-P (mg/l)	Sianida (CN-) (mg/l)	Sulfida (H2S) (mg/l)	Klor (mg/l)	Minyak bumi (mg/l)	Fenol (mg/l)	Pestisida (mg/l)	PCB (mg/l)
			Lintang	Bujur									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
10	Perikanan tangkap	17/03/2022	2°4'29,392"	106°12'35,881"	Air Anyir	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
11	Pelabuhan	15/03/2022	2°44'48,804"	107°37'55,272"	Pelabuhan Kapal Ikan	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
12	Pelabuhan	15/03/2022	2°44'31,416"	107°36'24,732"	Pantai Tanjungpendam	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
13	Perikanan tangkap	15/03/2022	2°45'49,464"	107°34'10,668"	Gusong Bugis	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
14	Perikanan tangkap	15/03/2022	2°49'19,668"	107°34'18,516"	Sungai Penjelit	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
15	Perikanan tangkap	15/03/2022	2°42'59,328"	107°36'25,920"	Muara Sungai Kubu	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
16	Pariwisata	15/03/2022	2°35'50,964"	107°37'20,244"	Tempat Pengolahan ikan	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
17	Pariwisata	15/03/2022	2°35'30,696"	107°37'51,420"	Teluk Binga	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
18	Pelabuhan	15/03/2022	2°52'49,548"	107°33'15,228"	PLTU Suge	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
19	Pelabuhan	15/03/2022	2°53'10,572"	107°32'56,400"	Tanjungbatu	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
20	Pariwisata	15/03/2022	2°54'40,356"	107°31'56,892"	Tanjungular	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
21	Pertambangan	18/03/2022	1°31'23,700"	106°42'33,660"	Batu Atap	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
22	Perikanan budidaya	18/03/2022	1°47'29,904"	106°6'22,680"	Sinar Baru	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
23	Pertambangan	17/03/2022	1°58'34,118"	106°9'36,342"	Batu Ampar	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2023



No	Nama Lokasi/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	PO4-P (mg/l)	Sianida (CN-) (mg/l)	Sulfida (H2S) (mg/l)	Klor (mg/l)	Minyak bumi (mg/l)	Fenol (mg/l)	Pestisida (mg/l)	PCB (mg/l)
			Lintang	Bujur									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
24	Pertambangan	17/03/2022	2°14'17,844"	106°13'15,708"	Cambai	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0.0002	-	<0,005
25	Pariwisata	17/03/2022	2°10'17,400"	106°11'30,048"	Batu Belubang	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0.0002	-	<0,005

Keterangan :

Sumber: DLHK, 2023

Tabel-24. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2022

No.	Nama dan Lokasi Stasiun Pengamatan	Titik Koordinat		Bulan											
		Latitude	Longitude	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang	-2,163	106,137	260,2	147,3	328,6	238,0	156,5	201,1	136,3	282,5	213,7	378,1	412,9	215,7
2	Stasiun Meteorologi Kelas III Hanandjoedin Tanjung Pandan Kabupaten Belitung	-2,75	107,75	198,1	126,0	192,8	341,8	257,4	478,9	239,3	425	434,5	666,5	380	389,1

Keterangan :

Sumber: Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir, 2022



Tabel-25. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2021

No.	Kabupaten/Kota	Mata air	Ledeng/PAM	Sumur	Sungai	Hujan	Kemasan (liter)	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kabupaten Bangka	630	2,442	19,335	136	0	45,852	16,697
2	Kabupaten Belitung	942	0	6,042	14	217	37,602	3,429
3	Kabupaten Bangka Barat	584	346	18,805	622	0	21,656	12,086
4	Kabupaten Bangka Tengah	252	213	11,184	359	0	25,952	10,544
5	Kabupaten Bangka Selatan	765	296	10,419	0	158	30,569	8,792
6	Kabupaten Belitung Timur	308	208	3,685	80	0	25,668	3,551
7	Kota Pangkalpinang	0	49	2,802	0	0	41,836	9,413

Keterangan:

Sumber: BPS Babel, 2022,
diolah



Tabel-26. Kualitas Air Hujan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2022

Lokasi Pemantauan	Titik koordinat		Waktu Pemantauan	pH	DHL (μ s/cm)	SO ₄ (mg/L)	NO ₃ (mg/L)	Cr	NH ₄ (mg/L)	Na	Ca ²⁺	Mg ²⁺
	Latitude	Longitude										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kota Pangkalpinang	-2,156395	106,162623	Jan	5,16	21,2	5,17	0,5		<0,0351			
Kota Pangkalpinang	-2,156395	106,162623	Feb	5,01	25,0	8,80	0,565		0,184			
Kota Pangkalpinang	-2,156395	106,162623	Mar									
Kota Pangkalpinang	-2,156395	106,162623	Apr	5,91	25,9	8,45	0,6		0,175			
Kota Pangkalpinang	-2,156395	106,162623	Mei	5,50	24,3	4,43	0,585		0,195			
Kota Pangkalpinang	-2,156395	106,162623	Jun	5,76	19,9	5,25	0,6		<0,0377			
Kota Pangkalpinang	-2,156395	106,162623	Jul	5,91	9,65	2,66	0,3		<0,0377			



Lokasi Pemantauan	Titik koordinat		Waktu Pemantauan	pH	DHL (μ s/cm)	SO ₄ (mg/L)	NO ₃ (mg/L)	Cr	NH ₄ (mg/L)	Na	Ca ²⁺	Mg ²⁺
	Latitude	Longitude										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kota Pangkalpinang	-2,156395	106,162623	Ags	5,13	20,1	2,81	0,6		0,0697			
Kota Pangkalpinang	-2,156395	106,162623	Sep	5,23	24	2,48	0,3		<0,0377			
Kota Pangkalpinang	-2,156395	106,162623	Okt	5,76	7,62	3,77	0,8		0,00403			
Kota Pangkalpinang	-2,156395	106,162623	Nop	5,85	2,3	3,93	<0,230		<0,0377			
Kota Pangkalpinang	-2,156395	106,162623	Des	5,5	8,06	5,19	0,4		0,138			

Keterangan:

Sumber: DLHK Babel, 2023



Tabel-27. Kondisi Sungai
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2022

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
	Kab. Bangka Barat						
1	Sungai Sekip	2000	2	2	-	-	-
2	Sungai Kampung Ulu	2000	5	5	-	-	-
3	Sungai Air Kemang	4200	5	5	-	-	-
4	Sungai Kampak	12000	34	15	15	163.2	108.8
5	Sungai Kerenah	6000	10	10	-	-	-
6	Sungai Kayu Arang	1000	50	50	-	-	-
7	Sungai Suntai	8000	6	6	-	-	-
8	Sungai Peradong	9000	8	8	-	-	-
9	Sungai Jering	8000	10	10	-	-	-
10	Sungai Sukal	6000	10	10	-	-	-
11	Sungai Menduyung	7000	8	8	-	-	-
12	Sungai PLN	3000	5	5	-	-	-
13	Sungai Muntok	-	5	-	1.5	-	-
	Kab. Bangka Selatan	-	-	-		-	-
1	Sungai Gusung	-	6.5	-	7.5	-	-
2	Sungai Nyirih	-	4	-	6	-	-
3	Sungai Kepoh	-	30	-	7.5	-	-



No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
4	Sungai Pinang	-	5	-	1	-	-
5	Sungai Air Timur	-	6	-	1	-	-
6	Sungai Acau	-	5	-	2	-	-
7	Sungai Melanau	-	2	-	2	-	-
	Kab. Bangka Tengah (Kec. Sungai Selan)	-	-	-	-	-	-
1	Sungai Tanjung	7228	-	-	-	-	-
2	Sungai Tawar	1507	-	-	-	-	-
3	Sungai Pelabur	16253	-	-	-	-	-
4	Sungai Bedengung	13372	-	-	-	-	-
5	Sungai jirak	3921	-	-	-	-	-
6	Sungai Sisil	9978	-	-	-	-	-
7	Sungai Petaling	2832	-	-	-	-	-
8	Sungai Kabung	14189	-	-	-	-	-
9	Sungai Selan	129082	-	-	-	-	-
10	Sungai Tiangtara	5250	-	-	-	-	-
11	Sungai Kambu	4482	-	-	-	-	-
12	Sungai Kurau	37027	-	-	-	-	-
13	Sungai Puput	3747	-	-	-	-	-
14	Sungai Seruk	17644	-	-	-	-	-
15	Sungai Buah	22318	-	-	-	-	-
16	Sungai Tjelau	15327	-	-	-	-	-



No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
17	Sungai gelang	14347	-	-	-	-	-
18	Sungai Kambuk	15176	-	-	-	-	-
19	Sungai Mengkuang	3855	-	-	-	-	-
20	Sungai Parak	7683	-	-	-	-	-
21	Sungai Kepuh	14048	-	-	-	-	-
22	Sungai Bangkakota	70076	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka Tengah (Kec. Simpangkatis)	-	-	-	-	-	-
1	Sungai Puput	5217	-	-	-	-	-
2	Sungai Jirak	6430	-	-	-	-	-
3	Sungai Kabung	10883	-	-	-	-	-
4	Sungai Liba	3842	-	-	-	-	-
5	Sungai Kambu	10894	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka Tengah (Kec. Pangkalan Baru)	-	-	-	-	-	-
1	Sungai Lantai	3538	-	-	-	-	-
2	Sungai Pelawan	5952	-	-	-	-	-
3	Sungai Mesu	3441	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka Tengah (Kec. Namang)	-	-	-	-	-	-
1	Sungai Benuang	1181	-	-	-	-	-



No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
2	Sungai Pelawan	19619	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka Tengah (Kec. Koba)	-	-	-	-	-	-
1	Sungai Tempurung	1929	-	-	-	-	-
2	Sungai Duren	3546	-	-	-	-	-
3	Sungai Kengkanang	2280	-	-	-	-	-
4	Sungai Risi	11759	-	-	-	-	-
5	Sungai Menyarut	5654	-	-	-	-	-
6	Sungai Melansat	7960	-	-	-	-	-
7	Sungai Tamiang	10279	-	-	-	-	-
8	Sungai Lubuk	4157	-	-	-	-	-
9	Sungai Jering	1549	-	-	-	-	-
10	Sungai Kabung	3306	-	-	-	-	-
11	Sungai Gemuru	2121	-	-	-	-	-
12	Sungai Bakung	2888	-	-	-	-	-
13	Sungai Sabut	12201	-	-	-	-	-
14	Sungai Cambai	5660	-	-	-	-	-
15	Sungai Mesirak	3495	-	-	-	-	-
16	Sungai Manggis	6157	-	-	-	-	-
17	Sungai Bedaru	5131	-	-	-	-	-
18	Sungai Kurau	37027	-	-	-	-	-
19	Sungai ketera	3282	-	-	-	-	-
20	Sungai Binjaimasem	2492	-	-	-	-	-



No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
21	Sunga Lemateng	5100	-	-	-	-	-
22	Sungai bara	13809	-	-	-	-	-
23	Sungai Palas	7822	-	-	-	-	-
24	Sungai bansir	2551	-	-	-	-	-
25	Sungai Bunsir	3194	-	-	-	-	-
26	Sungai Paku	3385	-	-	-	-	-
27	Sungai Katel	2406	-	-	-	-	-
28	Sungai Bemban	16406	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka Tengah (Kec. Lubuk Besar)	-	-	-	-	-	-
1	Sungai Titimalu	7514	-	-	-	-	-
2	Sungai Tubur	5724	-	-	-	-	-
3	Sungai Talau	1568	-	-	-	-	-
4	Sungai Terentang	2155	-	-	-	-	-
5	Sungai Pelekat	3835	-	-	-	-	-
6	Sungai Pasir	1840	-	-	-	-	-
7	Sungai Merbak	2828	-	-	-	-	-
8	Sungai Mempatang	4197	-	-	-	-	-
9	Sungai Bakong	5320	-	-	-	-	-
10	Sungai malang	5550	-	-	-	-	-
11	Sungai Tempilang	3120	-	-	-	-	-
12	Sungai Lambar	7569	-	-	-	-	-



No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
13	Sungai Kayuara	11773	-	-	-	-	-
14	Sungai Liat	8363	-	-	-	-	-
15	Sungai Murem	3246	-	-	-	-	-
16	Sungai Rangkeru	1603	-	-	-	-	-
17	Sungai Bunut	1330	-	-	-	-	-
18	Sungai Gelam	3269	-	-	-	-	-
19	Sungai Kulit	2133	-	-	-	-	-
20	Sungai Palas	13896	-	-	-	-	-
21	Sungai Macan	1796	-	-	-	-	-
22	Sungai Iobang	5824	-	-	-	-	-
23	Sungai Hijau	1815	-	-	-	-	-
24	Sungai Makie	1462	-	-	-	-	-
25	Sungai Putih	2393	-	-	-	-	-
26	Sungai Menggin	2434	-	-	-	-	-
27	Sungai Paya Adep	4817	-	-	-	-	-
28	Sungai Karusuk	2182	-	-	-	-	-
29	Sungai Tilang	2080	-	-	-	-	-
30	Sungai Sabu	1351	-	-	-	-	-
31	Sungai Sadap	5238	-	-	-	-	-
32	Sungai Perlang Kecil	5650	-	-	-	-	-
33	Sungai Cingkaro	1275	-	-	-	-	-
34	Sungai Malik Ecil	3550	-	-	-	-	-
35	Sungai Meringau	5755	-	-	-	-	-



No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
36	Sungai Batangraya	8997	-	-	-	-	-
37	Sungai Papan	2444	-	-	-	-	-
38	Sungai Kayuasanggar	1756	-	-	-	-	-
39	Sungai Trubus	5407	-	-	-	-	-
40	Sungai Payamalu	5089	-	-	-	-	-
41	Sungai Payakuku	2071	-	-	-	-	-
42	Sungai Lubang	2176	-	-	-	-	-
43	Sungai Lengko	5563	-	-	-	-	-
44	Sungai Tekung	1757	-	-	-	-	-
45	Sungai Bakas	4154	-	-	-	-	-
46	Sungai Sampur	2170	-	-	-	-	-
47	Sungai bumbun	2020	-	-	-	-	-
48	Sungai Rangau	18333	-	-	-	-	-
49	Sungai Payalutung	3241	-	-	-	-	-
50	Sungai Lekang	5917	-	-	-	-	-
51	Sungai Perlang	8128	-	-	-	-	-
52	Sungai ketiak	1991	-	-	-	-	-
53	Sungai Goang	2023	-	-	-	-	-
54	Sungai Risi	9867	-	-	-	-	-
55	Sungai Nadi	11479	-	-	-	-	-
56	Sungai Lingkuk	3506	-	-	-	-	-
57	Sungai Merapin	8194	-	-	-	-	-



No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
58	Sungai Payalangka	1672	-	-	-	-	-
59	Sungai Binjai	4107	-	-	-	-	-
60	Sungai Mendulang	2429	-	-	-	-	-
61	Sungai Batang	3932	-	-	-	-	-
62	Sungai Raya	7900	-	-	-	-	-
63	Sungai Malik	8351	-	-	-	-	-
64	Sungai beringin	3773	-	-	-	-	-
65	Sungai kekuru	2670	-	-	-	-	-
66	Sungai Telang	2228	-	-	-	-	-
67	Sungai Belimbing	6387	-	-	-	-	-
68	Sungai Kulur	12584	-	-	-	-	-
69	Sungai Ketiak	40772	-	-	-	-	-
70	Sungai Kelup	2078	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka (Kec. Belinyu)		-	-	-	-	-
1	Sungai Panji	10000	-	-	-	-	-
2	Sungai Pasir	4724	-	-	-	-	-
3	Sungai Pejem	4500	-	-	-	-	-
4	Sungai Tengkalak	2000	-	-	-	-	-
5	Sungai Jeliti	3000	-	-	-	-	-
6	Sungai Bayat	9000	-	-	-	-	-
7	Sungai Layang	12000	-	-	-	-	-
8	Sungai Jelutung	12000	-	-	-	-	-



No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
9	Sungai Belinyu	6000	-	-	-	-	-
10	Sungai Berok	6000	-	-	-	-	-
11	Sungai Romodong	3000	-	-	-	-	-
12	Sungai Bubus	4000	-	-	-	-	-
13	Sungai Sembuang	5000	-	-	-	-	-
14	Sungai Sekak	5000	-	-	-	-	-
15	Sungai Buntang	1500	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka (Kec. Riau Silip)		-	-	-	-	-
1	Sungai Tengkalak	5000	-	-	-	-	-
2	Sungai Bedukang	900	-	-	-	-	-
3	Sungai Deniang Laut	1300	-	-	-	-	-
4	Sungai Mapur	21250	-	-	-	-	-
5	Sungai Semubur	3000	-	-	-	-	-
6	Sungai Perimping	2750	-	-	-	-	-
7	Sungai Layang	32500	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka (Kec. Bakam)		-	-	-	-	-
1	Sungai Telang	5000	-	-	-	-	-
2	Sungai Mabat	15000	-	-	-	-	-
3	Sungai Layang	32500	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka (Kec. Merawang)		-	-	-	-	-



No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
1	Sungai Baturusa	31250	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka (Kec. Puding Besar)		-	-	-	-	-
1	Sungai Perai	10000	-	-	-	-	-
2	Sungai Kerang	800	-	-	-	-	-
3	Sungai Kotawaringin	20000	-	-	-	-	-
4	Sungai Air Pandan	20000	-	-	-	-	-
5	Sungai Kayubesi	500	-	-	-	-	-
6	Sungai Jeruk	15000	-	-	-	-	-
7	Sungai Lubang	6000	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka (Kec. Mendo Barat)		-	-	-	-	-
1	Sungai Menduk	26500	-	-	-	-	-
2	Sungai Rukan	20000	-	-	-	-	-
3	Sungai Sembilang	2000	-	-	-	-	-
4	Sungai Penagan	2500	-	-	-	-	-
5	Sungai Penjirang	5000	-	-	-	-	-
6	Sungai Kelapbingil	3000	-	-	-	-	-
	Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur		-	-	-	-	-
1	Sungai Buding	10400	-	-	-	-	-
2	Sungai Cerucuk	16720	-	-	-	-	-
3	Sungai Pela	14440	-	-	-	-	-



No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
4	Sungai Bepang	10620	-	-	-	-	-
5	Sungai Cerucuk	16720	-	-	-	-	-
6	Sungai Air Raya	5030	-	-	-	-	-
7	Sungai Dendang	7930	-	-	-	-	-
8	Sungai Kampit	12780	-	-	-	-	-
9	Sungai Manggar	26190	-	-	-	-	-
10	Sungai Membalong	11410	-	-	-	-	-
11	Sungai Padang	2270	-	-	-	-	-
12	Sungai Purang	9950	-	-	-	-	-
13	Sungai Samak	23170	-	-	-	-	-
14	Sungai Sembuluh	11640	-	-	-	-	-
15	Sungai Sijuk	1690	-	-	-	-	-

Keterangan

: Sebagian belum dilakukan pendataan

Sumber:

Data DIKPLHD Kabupaten/Kota



Tabel- 28 Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung

Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2022

No.	Nama Danau/Waduk/Situ/Embung	Luas (Ha)	Volume (m3)
1	Embung Air Baku Gunung Mentas	9,34	720.000
2	Embung Bhay Park Kolong Polda	2,40	0
3	Kolam Retensi Pasar Ikan, Sungai Pedindang	3,63	20.000
4	Kolong Air Besar	2,60	90.000
5	Kolong Air Kelubi	10,44	480.000
6	Kolong Babi	2,00	50.000
7	Kolong Bacang	6,00	240.000
8	Kolong Bahar	6,00	240.000
9	Kolong Bakam	1,07	15.000
10	Kolong Beguruh	7,50	80.000
11	Kolong Bikang	0,10	150.000
12	Kolong Celuak	2,18	70.000
13	Kolong Dam Jepang	6,44	188.000
14	Kolong Dendang	4,12	102.500
15	Kolong Dukong	8,49	240.000
16	Kolong Enam Sungai Mayang	5,77	50.000
17	Kolong Gantung	0,00	600.000
18	Kolong Genangan Mentukul	12,00	2.592.000
19	Kolong Gudang Padi	4,36	120.000
20	Kolong Juru Seberang	14,00	240.000
21	Kolong Kacang Pedang	39,09	1.104.000
22	Kolong Kace Kab. Bangka	2,68	60.000
23	Kolong Kampit	3,12	480.000
24	Kolong Kebintik	1,85	62.000
25	Kolong Kepoh	1,80	55.000
26	Kolong Kerang	0	60.000
27	Kolong Kerasak	2,23	59.750
28	Kolong Lalang	4,22	320.000
29	Kolong Manggar 1	21,06	1.250.000
30	Kolong Manggar 2/Pancur	0	900.000
31	Kolong Mempadin	4,86	137.500
32	Kolong Mempayak	4,12	960.000
33	Kolong Menjelang	1,80	320.000
34	Kolong Mentabak	0	20.000
35	Kolong Merawang	5,89	600.000



No.	Nama Danau/Waduk/Situ/Embung	Luas (Ha)	Volume (m3)
36	Kolong Mingki	0	100.000
37	Kolong Muis	2,41	180.000
38	Kolong Namang	2,07	60.000
39	Kolong Nangka	0,30	30.000
40	Kolong Nibung	34,06	60.000
41	Kolong Nona	10,54	125.000
42	Kolong Pasar ikan	0	120.000
43	Kolong Pasir Merah	19,95	262.500
44	Kolong Pedindang	4,69	120.000
45	Kolong Pemali Dam 3	55,90	1.200.000
46	Kolong Penganak	2,54	61.000
47	Kolong Perawas	4,15	0
48	Kolong Pice Besar	2128,19	77.192.000
49	Kolong PLN	8,42	15.000
50	Kolong Pumpung	5,56	267.000
51	Kolong Ramadan	0,00	25.000
52	Kolong Rindik	2,55	70.000
53	Kolong Sekar Biru	4,22	62.500
54	Kolong Sekuk 1 & 2	4,39	250.000
55	Kolong Selumar	0,23	7.500
56	Kolong Senyubuk	34,71	450.000
57	Kolong Simpur	18,65	495.000
58	Kolong Sinar jaya	6,06	150.000
59	Kolong Sinar Surya	2,89	52.500
60	Kolong Spritus	2,60	85.000
61	Kolong Sungai Selan	0	150.000
62	Kolong Tebat Gadung	23,14	320.000
63	Kolong Teluk Dalam	4,12	75.000
64	Kolong Terabek	0,56	75.000
65	Kolong Teru	2,83	37.500
66	Kolong Tujuh Sungai Mayang	5,77	85.000
67	Kolong Tukak Sadai	2,06	53.000
68	Kolong Yamin	9,60	331.000
69	T.O. Pemali	18,6	120.000

Sumber: BBWS Sumatera VIII dan hasil pengelolaan data spasial, 2022



Tabel 29- Kualitas Air Sungai

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data: 2022

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C) (*)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)
				Lintang	Bujur						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Sungai Mabet	Kabupaten Bangka	Hulu Sungai Mabet	1°54'57.802"	105°55'50,401"	1 Juni 2022	26,4	6,22	68,2	136	13
2	Sungai Mabet	Kabupaten Bangka	Hulu Sungai Mabet	1°54'57.802"	105°55'50,401"	23 Juli 2022	27,4	6,89	55,3	153	15
3	Sungai Mabet	Kabupaten Bangka	Hulu Sungai Mabet	1°54'57.802"	105°55'50,401"	5 Oktober 2022	27,8	6,96	60,2	138	15
4	Sungai Kayu Besi	Kabupaten Bangka	Tengah Sungai Kayu Besi	1° 54' 57,8"	105° 59' 22,4"	1 Juni 2022	26,5	6,27	86,6	146	14
5	Sungai Kayu Besi	Kabupaten Bangka	Tengah Sungai Kayu Besi	1° 54' 57,8"	105° 59' 22,4"	25 Juli 2022	28,0	6,92	75,4	189	19
6	Sungai Kayu Besi	Kabupaten Bangka	Tengah Sungai Kayu Besi	1° 54' 57,8"	105° 59' 22,4"	5 Oktober 2022	28,0	7,12	80,2	176	16
7	Sungai Limbung	Kabupaten Bangka	Sungai Limbung, Desa Limbung	02° 00' 46,4"	106° 02' 07,8"	1 Juni 2022	26,8	6,38	167	162	17
8	Sungai Limbung	Kabupaten Bangka	Sungai Limbung, Desa Limbung	02° 00' 46,4"	106° 02' 07,8"	24 Juli 2022	27,8	6,90	123	213	20
9	Sungai Limbung	Kabupaten Bangka	Sungai Limbung, Desa Limbung	02° 00' 46,4"	106° 02' 07,8"	6 Oktober 2022	27,2	7,02	140	224	19



No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C) (*)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)
				Lintang	Bujur						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Sungai Baturusa	Kabupaten Bangka	Hilir Sungai Baturusa	02° 01' 44,0"	106° 06' 42,90"	31 Mei 2022	27,4	6,46	855	142	18
11	Sungai Baturusa	Kabupaten Bangka	Hilir Sungai Baturusa	02° 01' 44,0"	106° 06' 42,90"	25 Juli 2022	28,3	6,87	557	234	22
12	Sungai Baturusa	Kabupaten Bangka	Hilir Sungai Baturusa	02° 01' 44,0"	106° 06' 42,90"	25 Juli 2022	28,0	6,95	552	226	19
13	Sungai Selindung	Kota Pangkalpinang	Muara Sungai Selindung	2° 3' 48,20"	106° 7' 19,39"	31 Mei 2022	27,6	6,82	68,4	352	22
14	Sungai Selindung	Kota Pangkalpinang	Muara Sungai Selindung	2° 3' 48,20"	106° 7' 19,39"	24 Juli 2022	28,3	7,0	55,8	321	30
15	Sungai Selindung	Kota Pangkalpinang	Muara Sungai Selindung	2° 3' 48,20"	106° 7' 19,39"	6 Oktober 2022	28,0	7,10	60,4	344	28
16	Sungai Pangkalbalam	Kota Pangkalpinang	Hilir Sungai Pangkalbalam	2° 5' 37,41"	106° 8' 23,34"	31 Mei 2022	28,2	6,86	98,0	598	28
17	Sungai Pangkalbalam	Kota Pangkalpinang	Hilir Sungai Pangkalbalam	2° 5' 37,41"	106° 8' 23,34"	24 Juli 2022	28,4	7,03	88,4	611	43
18	Sungai Pangkalbalam	Kota Pangkalpinang	Hilir Sungai Pangkalbalam	2° 5' 37,41"	106° 8' 23,34"	6 Oktober 2022	27,6	6,83	90,2	590	38
19	Sungai Limbung	Kabupaten Bangka	Sungai Selindung Hilir	02° 3' 56,90"	106° 7' 3,40"	31 Mei 2022	27,5	6,38	106	286	20
20	Sungai Limbung	Kabupaten Bangka	Sungai Selindung Hilir	02° 3' 56,90"	106° 7' 3,40"	24 Juli 2022	28,7	6,80	195	342	29
21	Sungai Limbung	Kabupaten Bangka	Sungai Selindung Hilir	02° 3' 56,90"	106° 7' 3,40"	6 Oktober 2022	27,6	6,85	214	316	24
22	Sungai Rangkui	Kota Pangkalpinang	Hilir Sungai Rangkui	2° 6' 2,00"	106° 8' 19,00"	31 Mei 2022	28,0	6,94	83,4	420	25



No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C) (*)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)
				Lintang	Bujur						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
23	Sungai Rangkui	Kota Pangkalpinang	Hilir Sungai Rangkui	2° 6' 2,00"	106° 8' 19,00"	24 Juli 2022	27,6	7,12	90,7	398	34
24	Sungai Rangkui	Kota Pangkalpinang	Hilir Sungai Rangkui	2° 6' 2,00"	106° 8' 19,00"	6 Oktober 2022	28,0	7,04	92,4	400	32
25	Sungai Aik Batu Buding	Kabupaten Belitung	Hulu Sungai Aik Batu Buding	2° 44' 27,56"	107° 55' 22.55"	2 Juni 2022	27,8	6,45	179	122	12
26	Sungai Aik Batu Buding	Kabupaten Belitung	Hulu Sungai Aik Batu Buding	2° 44' 27,56"	107° 55' 22.55"	21 Juli 2022	28,0	7,01	156	176	14
27	Sungai Aik Batu Buding	Kabupaten Belitung	Hulu Sungai Aik Batu Buding	2° 44' 27,56"	107° 55' 22.55"	8 Oktober 2022	27,8	7,14	180	150	14
28	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 1	02° 42' 55,04"	107° 59' 16,51"	2 Juni 2022	27,8	6,38	22,6	142	15
29	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 1	02° 42' 55,04"	107° 59' 16,51"	21 Juli 2022	28,3	7,01	102	195	17
30	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 1	02° 42' 55,04"	107° 59' 16,51"	8 Oktober 2022	27,8	7,15	86,6	214	16
31	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 2	02° 41' 46,30"	107° 59' 16,90"	2 Juni 2022	28,2	6,23	59,7	182	20
32	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 2	02° 41' 46,30"	107° 59' 16,90"	21 Juli 2022	28,0	7,08	50,8	217	22
33	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 2	02° 41' 46,30"	107° 59' 16,90"	8 Oktober 2022	27,6	6,92	51,4	236	20
34	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 3	02° 41' 46,10"	107° 59' 17,15"	3 Juni 2022	28,8	6,58	45,6	204	22
35	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 3	02° 41' 46,10"	107° 59' 17,15"	20 Juli 2022	27,9	7,22	76,3	276	28
36	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 3	02° 41' 46,10"	107° 59' 17,15"	8 Oktober 2022	27,4	7,14	50,5	260	25

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2023



No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C) (*)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)
				Lintang	Bujur						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
37	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 4	02° 41' 0,67"	108° 0' 14,90"	3 Juni 2022	28,9	6,47	89,6	196	19
38	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 4	02° 41' 0,67"	108° 0' 14,90"	20 Juli 2022	28,0	7,30	112	229	24
39	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 4	02° 41' 0,67"	108° 0' 14,90"	8 Oktober 2022	27,6	7,24	98,8	210	21
40	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding	02° 38' 56,60"	108° 1' 50,60"	3 Juni 2022	27,5	6,30	138	160	17
41	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding	02° 38' 56,60"	108° 1' 50,60"	20 Juli 2022	28,4	7,03	144	172	18
42	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding	02° 38' 56,60"	108° 1' 50,60"	8 Oktober 2022	28,2	6,84	128	166	16
43	Sungai Aik Jangkat	Kabupaten Belitung Timur	Hilir Muara Aik Jangkat	02° 41' 22,20"	107° 59' 26,20"	3 Juni 2022	27,8	6,44	9,34	178	18
44	Sungai Aik Jangkat	Kabupaten Belitung Timur	Hilir Muara Aik Jangkat	02° 41' 22,20"	107° 59' 26,20"	20 Juli 2022	27,3	7,03	10,6	199	20
45	Sungai Aik Jangkat	Kabupaten Belitung Timur	Hilir Muara Aik Jangkat	02° 41' 22,20"	107° 59' 26,20"	8 Oktober 2022	27,5	6,95	8,56	178	18
46	Sungai Muara Aik Rengas	Kabupaten Belitung Timur	Hilir Muara Aik Rengas	02° 43' 1,78"	107° 59' 48,23"	2 Juni 2022	27,5	6,42	183	134	14
47	Sungai Muara Aik Rengas	Kabupaten Belitung Timur	Hilir Muara Aik Rengas	02° 43' 1,78"	107° 59' 48,23"	21 Juli 2022	27,3	7,11	164	150	12
48	Sungai Muara Aik Rengas	Kabupaten Belitung Timur	Hilir Muara Aik Rengas	02° 43' 1,78"	107° 59' 48,23"	8 Oktober 2022	27,6	6,98	190	146	12



No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	DO (mg/L)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	NO2 (mg/l)	NO3 (mg/l)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)
				Lintang	Bujur								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Sungai Mabet	Kabupaten Bangka	Hulu Sungai Mabet	1°54'57.802"	105°55'50,401"	1 Juni 2022	5,22	1,93	12,4	<0,0015	1,15	<0,0030	<0,011
2	Sungai Mabet	Kabupaten Bangka	Hulu Sungai Mabet	1°54'57.802"	105°55'50,401"	23 Juli 2022	4,98	2,24	14,8	0,0017	2,33	<0,0030	0,012
3	Sungai Mabet	Kabupaten Bangka	Hulu Sungai Mabet	1°54'57.802"	105°55'50,401"	5 Oktober 2022	4,90	2,24	13,6	<0,0015	1,67	<0,0030	<0,011
4	Sungai Kayu Besi	Kabupaten Bangka	Tengah Sungai Kayu Besi	1° 54' 57,8"	105° 59' 22,4"	1 Juni 2022	5,10	2,01	14,0	<0,0015	1,30	<0,0030	<0,011
5	Sungai Kayu Besi	Kabupaten Bangka	Tengah Sungai Kayu Besi	1° 54' 57,8"	105° 59' 22,4"	25 Juli 2022	4,88	2,40	17,3	<0,0015	3,06	<0,0030	<0,011
6	Sungai Kayu Besi	Kabupaten Bangka	Tengah Sungai Kayu Besi	1° 54' 57,8"	105° 59' 22,4"	5 Oktober 2022	4,92	2,30	15,8	<0,0015	2,54	<0,0030	<0,011
7	Sungai Limbung	Kabupaten Bangka	Sungai Limbung, Desa Limbung	02° 00' 46,4"	106° 02' 07,8"	1 Juni 2022	4,90	2,09	17,2	<0,0015	1,36	<0,0030	<0,011
8	Sungai Limbung	Kabupaten Bangka	Sungai Limbung, Desa Limbung	02° 00' 46,4"	106° 02' 07,8"	24 Juli 2022	4,75	2,53	19,6	0,0021	4,45	<0,0030	0,012
9	Sungai Limbung	Kabupaten Bangka	Sungai Limbung, Desa Limbung	02° 00' 46,4"	106° 02' 07,8"	6 Oktober 2022	4,88	2,12	18,4	<0,0015	3,87	<0,0030	<0,011
10	Sungai Baturusa	Kabupaten Bangka	Hilir Sungai Baturusa	02° 01' 44,0"	106° 06' 42,90"	31 Mei 2022	4,83	1,85	15,2	<0,0015	1,58	<0,0030	<0,011



No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	DO (mg/L)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	NO2 (mg/l)	NO3 (mg/l)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)
				Lintang	Bujur								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
11	Sungai Baturusa	Kabupaten Bangka	Hilir Sungai Baturusa	02° 01' 44,0"	106° 06' 42,90"	25 Juli 2022	4,80	2,34	14,2	0,0018	3,84	<0,0030	0,012
12	Sungai Baturusa	Kabupaten Bangka	Hilir Sungai Baturusa	02° 01' 44,0"	106° 06' 42,90"	25 Juli 2022	4,72	2,20	16,6	<0,0015	2,74	<0,0030	<0,011
13	Sungai Selindung	Kota Pangkalpinang	Muara Sungai Selindung	2° 3' 48,20"	106° 7' 19,39"	31 Mei 2022	4,57	2,58	20,8	<0,0015	1,78	<0,0030	0,014
14	Sungai Selindung	Kota Pangkalpinang	Muara Sungai Selindung	2° 3' 48,20"	106° 7' 19,39"	24 Juli 2022	4,60	2,46	19,3	0,0018	5,21	<0,0030	0,013
15	Sungai Selindung	Kota Pangkalpinang	Muara Sungai Selindung	2° 3' 48,20"	106° 7' 19,39"	6 Oktober 2022	4,54	2,38	21,5	<0,0015	4,41	<0,0030	0,013
16	Sungai Pangkalbalam	Kota Pangkalpinang	Hilir Sungai Pangkalbalam	2° 5' 37,41"	106° 8' 23,34"	31 Mei 2022	4,96	2,66	23,2	0,0088	2,34	0,010	0,016
17	Sungai Pangkalbalam	Kota Pangkalpinang	Hilir Sungai Pangkalbalam	2° 5' 37,41"	106° 8' 23,34"	24 Juli 2022	4,26	2,88	24,2	0,0075	5,22	0,0060	0,018
18	Sungai Pangkalbalam	Kota Pangkalpinang	Hilir Sungai Pangkalbalam	2° 5' 37,41"	106° 8' 23,34"	6 Oktober 2022	4,38	2,76	24,8	0,0031	4,63	0,0096	0,017
19	Sungai Limbung	Kabupaten Bangka	Sungai Selindung Hilir	02° 3' 56,90"	106° 7' 3,40"	31 Mei 2022	4,62	2,26	20,6	<0,0015	1,60	<0,0030	<0,011
20	Sungai Limbung	Kabupaten Bangka	Sungai Selindung Hilir	02° 3' 56,90"	106° 7' 3,40"	24 Juli 2022	4,51	2,67	22,80	0,0026	4,80	<0,0030	0,013
21	Sungai Limbung	Kabupaten Bangka	Sungai Selindung Hilir	02° 3' 56,90"	106° 7' 3,40"	6 Oktober 2022	4,70	2,40	20,2	<0,0015	3,17	<0,0030	<0,011



No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	DO (mg/L)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	NO2 (mg/l)	NO3 (mg/l)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)
				Lintang	Bujur								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
22	Sungai Rangkui	Kota Pangkalpinang	Hilir Sungai Rangkui	2° 6' 2,00"	106° 8' 19,00"	31 Mei 2022	4,48	2,66	21,2	<0,0015	1,84	0,0083	0,016
23	Sungai Rangkui	Kota Pangkalpinang	Hilir Sungai Rangkui	2° 6' 2,00"	106° 8' 19,00"	24 Juli 2022	4,40	2,76	23,4	0,0032	4,86	0,0043	0,015
24	Sungai Rangkui	Kota Pangkalpinang	Hilir Sungai Rangkui	2° 6' 2,00"	106° 8' 19,00"	6 Oktober 2022	4,60	2,58	22,6	0,0024	4,55	0,0088	0,015
25	Sungai Aik Batu Buding	Kabupaten Belitung	Hulu Sungai Aik Batu Buding	2° 44' 27,56"	107° 55' 22.55"	2 Juni 2022	5,54	1,77	10,8	<0,0015	1,15	<0,0030	<0,011
26	Sungai Aik Batu Buding	Kabupaten Belitung	Hulu Sungai Aik Batu Buding	2° 44' 27,56"	107° 55' 22.55"	21 Juli 2022	5,01	2,35	14,6	<0,0015	2,03	<0,0030	0,012
27	Sungai Aik Batu Buding	Kabupaten Belitung	Hulu Sungai Aik Batu Buding	2° 44' 27,56"	107° 55' 22.55"	8 Oktober 2022	5,12	2,26	12,8	<0,0015	1,87	<0,0030	<0,011
28	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 1	02° 42' 55,04"	107° 59' 16,51"	2 Juni 2022	5,14	2,01	12,8	<0,0015	1,50	<0,0030	<0,011
29	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 1	02° 42' 55,04"	107° 59' 16,51"	21 Juli 2022	4,77	2,55	17,2	0,0018	3,18	<0,0030	0,013
30	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 1	02° 42' 55,04"	107° 59' 16,51"	8 Oktober 2022	4,82	2,48	15,8	<0,0015	2,52	<0,0030	<0,011
31	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 2	02° 41' 46,30"	107° 59' 16,90"	2 Juni 2022	4,58	2,42	19,3	<0,0015	2,14	<0,0030	<0,011



No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	DO (mg/L)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	NO2 (mg/l)	NO3 (mg/l)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)
				Lintang	Bujur								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
32	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 2	02° 41' 46,30"	107° 59' 16,90"	21 Juli 2022	4,50	2,65	21,4	0,0020	3,22	<0,0030	0,013
33	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 2	02° 41' 46,30"	107° 59' 16,90"	8 Oktober 2022	4,45	2,52	20,2	<0,0015	2,65	<0,0030	<0,011
34	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 3	02° 41' 46,10"	107° 59' 17,15"	3 Juni 2022	4,50	2,50	20,4	<0,0015	2,26	<0,0030	<0,011
35	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 3	02° 41' 46,10"	107° 59' 17,15"	20 Juli 2022	4,43	2,71	22,3	0,0017	3,40	<0,0030	0,012
36	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 3	02° 41' 46,10"	107° 59' 17,15"	8 Oktober 2022	4,50	2,58	20,4	<0,0015	3,22	<0,0030	<0,011
37	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 4	02° 41' 0,67"	108° 0' 14,90"	3 Juni 2022	4,52	2,74	22,6	<0,0015	2,74	<0,0030	<0,011
38	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 4	02° 41' 0,67"	108° 0' 14,90"	20 Juli 2022	4,37	2,86	24,2	0,0016	2,87	<0,0030	0,012
39	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 4	02° 41' 0,67"	108° 0' 14,90"	8 Oktober 2022	4,40	2,75	23,5	<0,0015	3,18	<0,0030	<0,011
40	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding	02° 38' 56,60"	108° 1' 50,60"	3 Juni 2022	4,88	2,17	15,5	<0,0015	1,83	<0,0030	<0,011
41	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding	02° 38' 56,60"	108° 1' 50,60"	20 Juli 2022	4,80	2,43	16,9	<0,0015	2,76	<0,0030	0,012
42	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding	02° 38' 56,60"	108° 1' 50,60"	8 Oktober 2022	4,85	2,40	16,0	<0,0015	2,64	<0,0030	<0,011



No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	DO (mg/L)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	NO2 (mg/l)	NO3 (mg/l)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)
				Lintang	Bujur								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
43	Sungai Aik Jangkat	Kabupaten Belitung Timur	Hilir Muara Aik Jangkat	02° 41' 22,20"	107° 59' 26,20"	3 Juni 2022	4,74	2,26	15,8	<0,0015	1,92	<0,0030	<0,011
44	Sungai Aik Jangkat	Kabupaten Belitung Timur	Hilir Muara Aik Jangkat	02° 41' 22,20"	107° 59' 26,20"	20 Juli 2022	4,54	2,60	20,5	0,0018	3,15	<0,0030	0,012
45	Sungai Aik Jangkat	Kabupaten Belitung Timur	Hilir Muara Aik Jangkat	02° 41' 22,20"	107° 59' 26,20"	8 Oktober 2022	4,60	2,58	18,8	<0,0015	2,80	<0,0030	<0,011
46	Sungai Muara Aik Rengas	Kabupaten Belitung Timur	Hilir Muara Aik Rengas	02° 43' 1,78"	107° 59' 48,23"	2 Juni 2022	5,32	1,93	12,0	<0,0015	1,52	<0,0030	<0,011
47	Sungai Muara Aik Rengas	Kabupaten Belitung Timur	Hilir Muara Aik Rengas	02° 43' 1,78"	107° 59' 48,23"	21 Juli 2022	4,98	2,10	13,5	<0,0015	1,88	<0,0030	<0,011
48	Sungai Muara Aik Rengas	Kabupaten Belitung Timur	Hilir Muara Aik Rengas	02° 43' 1,78"	107° 59' 48,23"	8 Oktober 2022	5,20	2,20	14,4	<0,0015	1,90	<0,0030	<0,011

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	T.P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	F. Coli (jml/100 ml)	T. Coli (jml/100ml)	Sianida (mg/l)	H2S (mg/l)
				Lintang	Bujur									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
1	Sungai Mabet	Kabupaten Bangka	Hulu Sungai Mabet	1°54'57.802"	105°55'50,401"	1 Juni 2022	<0,14	<0,0010	0,20	<0,0031	70	120	<0,0033	-
2	Sungai Mabet	Kabupaten Bangka	Hulu Sungai Mabet	1°54'57.802"	105°55'50,401"	23 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,30	0,005	170	220	<0,0033	-
3	Sungai Mabet	Kabupaten Bangka	Hulu Sungai Mabet	1°54'57.802"	105°55'50,401"	5 Oktober 2022	0,067	<0,0010	0,30	<0,0031	210	320	<0,0033	-



No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	T.P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	F. Coli (jml/100 ml)	T. Coli (jml/100ml)	Sianida (mg/l)	H2S (mg/l)
				Lintang	Bujur									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
4	Sungai Kayu Besi	Kabupaten Bangka	Tengah Sungai Kayu Besi	1° 54' 57,8"	105° 59' 22,4"	1 Juni 2022	<0,14	<0,0010	0,20	<0,0031	110	170	<0,0033	-
5	Sungai Kayu Besi	Kabupaten Bangka	Tengah Sungai Kayu Besi	1° 54' 57,8"	105° 59' 22,4"	25 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,20	0,0055	240	350	<0,0033	-
6	Sungai Kayu Besi	Kabupaten Bangka	Tengah Sungai Kayu Besi	1° 54' 57,8"	105° 59' 22,4"	5 Oktober 2022	0,0480	<0,0010	0,20	<0,0031	310	380	<0,0033	-
7	Sungai Limbung	Kabupaten Bangka	Sungai Limbung, Desa Limbung	02° 00' 46,4"	106° 02' 07,8"	1 Juni 2022	<0,14	<0,0010	0,20	<0,0031	150	210	<0,0033	-
8	Sungai Limbung	Kabupaten Bangka	Sungai Limbung, Desa Limbung	02° 00' 46,4"	106° 02' 07,8"	24 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,30	0,006	400	470	<0,0033	-
9	Sungai Limbung	Kabupaten Bangka	Sungai Limbung, Desa Limbung	02° 00' 46,4"	106° 02' 07,8"	6 Oktober 2022	0,080	<0,0010	0,20	0,0063	470	540	<0,0033	-
10	Sungai Baturusa	Kabupaten Bangka	Hilir Sungai Baturusa	02° 01' 44,0"	106° 06' 42,90"	31 Mei 2022	<0,14	<0,0010	0,20	<0,0031	220	280	<0,0033	-
11	Sungai Baturusa	Kabupaten Bangka	Hilir Sungai Baturusa	02° 01' 44,0"	106° 06' 42,90"	25 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,30	0,0083	320	390	<0,0033	-
12	Sungai Baturusa	Kabupaten Bangka	Hilir Sungai Baturusa	02° 01' 44,0"	106° 06' 42,90"	25 Juli 2022	0,056	<0,0010	0,30	0,0083	700	940	<0,0033	-
13	Sungai Selindung	Kota Pangkalpinang	Muara Sungai Selindung	2° 3' 48,20"	106° 7' 19,39"	31 Mei 2022	<0,14	<0,0010	0,20	<0,0031	350	540	<0,0033	-
14	Sungai Selindung	Kota Pangkalpinang	Muara Sungai Selindung	2° 3' 48,20"	106° 7' 19,39"	24 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,30	0,0067	450	630	<0,0033	-



No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	T.P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	F. Coli (jml/100 ml)	T. Coli (jml/100ml)	Sianida (mg/l)	H2S (mg/l)
				Lintang	Bujur									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
15	Sungai Selindung	Kota Pangkalpinang	Muara Sungai Selindung	2° 3' 48,20"	106° 7' 19,39"	6 Oktober 2022	0,072	<0,0010	0,30	<0,0031	940	1200	<0,0033	-
16	Sungai Pangkalbalam	Kota Pangkalpinang	Hilir Sungai Pangkalbalam	2° 5' 37,41"	106° 8' 23,34"	31 Mei 2022	<0,14	<0,0010	0,30	<0,0031	2400	3500	<0,0033	-
17	Sungai Pangkalbalam	Kota Pangkalpinang	Hilir Sungai Pangkalbalam	2° 5' 37,41"	106° 8' 23,34"	24 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,40	0,010	3500	5400	<0,0033	-
18	Sungai Pangkalbalam	Kota Pangkalpinang	Hilir Sungai Pangkalbalam	2° 5' 37,41"	106° 8' 23,34"	6 Oktober 2022	0,094	<0,0010	0,30	0,0070	1100	1700	<0,0033	-
19	Sungai Limbung	Kabupaten Bangka	Sungai Selindung Hilir	02° 3' 56,90"	106° 7' 3,40"	31 Mei 2022	<0,14	<0,0010	0,20	<0,0031	240	350	<0,0033	-
20	Sungai Limbung	Kabupaten Bangka	Sungai Selindung Hilir	02° 3' 56,90"	106° 7' 3,40"	24 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,30	0,011	350	540	<0,0033	-
21	Sungai Limbung	Kabupaten Bangka	Sungai Selindung Hilir	02° 3' 56,90"	106° 7' 3,40"	6 Oktober 2022	0,060	<0,0010	0,20	<0,0031	840	1200	<0,0033	-
22	Sungai Rangkui	Kota Pangkalpinang	Hilir Sungai Rangkui	2° 6' 2,00"	106° 8' 19,00"	31 Mei 2022	<0,14	<0,0010	0,30	<0,0031	450	840	<0,0033	-
23	Sungai Rangkui	Kota Pangkalpinang	Hilir Sungai Rangkui	2° 6' 2,00"	106° 8' 19,00"	24 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,40	0,0083	1600	2400	<0,0033	-
24	Sungai Rangkui	Kota Pangkalpinang	Hilir Sungai Rangkui	2° 6' 2,00"	106° 8' 19,00"	6 Oktober 2022	0,082	<0,0010	0,30	<0,0031	920	1100	<0,0033	-
25	Sungai Aik Batu Buding	Kabupaten Belitung	Hulu Sungai Aik Batu Buding	2° 44' 27,56"	107° 55' 22,55"	2 Juni 2022	<0,14	<0,0010	0,20	<0,0031	94	150	<0,0033	-
26	Sungai Aik Batu Buding	Kabupaten Belitung	Hulu Sungai Aik Batu Buding	2° 44' 27,56"	107° 55' 22,55"	21 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,20	<0,0031	140	200	<0,0033	-
27	Sungai Aik Batu Buding	Kabupaten Belitung	Hulu Sungai Aik Batu Buding	2° 44' 27,56"	107° 55' 22,55"	8 Oktober 2022	0,054	<0,0010	0,20	<0,0031	200	240	<0,0033	-

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2023



No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	T.P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	F. Coli (jml/100 ml)	T. Coli (jml/100ml)	Sianida (mg/l)	H2S (mg/l)
				Lintang	Bujur									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
28	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 1	02° 42' 55,04"	107° 59' 16,51"	2 Juni 2022	<0,14	<0,0010	0,20	<0,0031	170	280	<0,0033	-
29	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 1	02° 42' 55,04"	107° 59' 16,51"	21 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,30	0,0047	400	470	<0,0033	-
30	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 1	02° 42' 55,04"	107° 59' 16,51"	8 Oktober 2022	0,092	<0,0010	0,20	<0,0031	350	540	<0,0033	-
31	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 2	02° 41' 46,30"	107° 59' 16,90"	2 Juni 2022	<0,14	<0,0010	0,20	<0,0031	1600	3500	<0,0033	-
32	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 2	02° 41' 46,30"	107° 59' 16,90"	21 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,30	0,005	3500	5400	<0,0033	-
33	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 2	02° 41' 46,30"	107° 59' 16,90"	8 Oktober 2022	0,069	<0,0010	0,20	<0,0031	1700	2800	<0,0033	-
34	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 3	02° 41' 46,10"	107° 59' 17,15"	3 Juni 2022	<0,14	<0,0010	0,30	<0,0031	2400	5400	<0,0033	-
35	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 3	02° 41' 46,10"	107° 59' 17,15"	20 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,40	0,0082	4500	6300	<0,0033	-
36	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 3	02° 41' 46,10"	107° 59' 17,15"	8 Oktober 2022	0,092	<0,0010	0,30	<0,0031	840	1200	<0,0033	-
37	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 4	02° 41' 0,67"	108° 0' 14,90"	3 Juni 2022	<0,14	<0,0010	0,30	<0,0031	2800	9200	<0,0033	-
38	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 4	02° 41' 0,67"	108° 0' 14,90"	20 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,30	0,0068	5400	9200	<0,0033	-
39	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 4	02° 41' 0,67"	108° 0' 14,90"	8 Oktober 2022	0,089	<0,0010	0,30	<0,0031	3500	5400	<0,0033	-



No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	T.P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	F. Coli (jml/100 ml)	T. Coli (jml/100ml)	Sianida (mg/l)	H2S (mg/l)
				Lintang	Bujur									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
40	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding	02° 38' 56,60"	108° 1' 50,60"	3 Juni 2022	<0,14	<0,0010	0,20	<0,0031	280	350	<0,0033	-
41	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding	02° 38' 56,60"	108° 1' 50,60"	20 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,20	0,004	630	840	<0,0033	-
42	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding	02° 38' 56,60"	108° 1' 50,60"	8 Oktober 2022	0,087	<0,0010	0,20	<0,0031	540	920	<0,0033	-
43	Sungai Aik Jangkat	Kabupaten Belitung Timur	Hilir Muara Aik Jangkat	02° 41' 22,20"	107° 59' 26,20"	3 Juni 2022	<0,14	<0,0010	0,20	<0,0031	1600	2400	<0,0033	-
44	Sungai Aik Jangkat	Kabupaten Belitung Timur	Hilir Muara Aik Jangkat	02° 41' 22,20"	107° 59' 26,20"	20 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,30	0,0069	2200	2800	<0,0033	-
45	Sungai Aik Jangkat	Kabupaten Belitung Timur	Hilir Muara Aik Jangkat	02° 41' 22,20"	107° 59' 26,20"	8 Oktober 2022	0,090	<0,0010	0,20	<0,0031	460	630	<0,0033	
46	Sungai Muara Aik Rengas	Kabupaten Belitung Timur	Hilir Muara Aik Rengas	02° 43' 1,78"	107° 59' 48,23"	2 Juni 2022	<0,14	<0,0010	0,20	<0,0031	140	210	<0,0033	
47	Sungai Muara Aik Rengas	Kabupaten Belitung Timur	Hilir Muara Aik Rengas	02° 43' 1,78"	107° 59' 48,23"	21 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,20	<0,0031	260	390	<0,0033	
48	Sungai Muara Aik Rengas	Kabupaten Belitung Timur	Hilir Muara Aik Rengas	02° 43' 1,78"	107° 59' 48,23"	8 Oktober 2022	0,077	<0,0010	0,20	<0,0031	240	350	<0,0033	-

Keterangan:

Sumber: IKLH KLHK, 2023



Tabel-30 Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Tahun : 2022

No	Nama	Lokasi	Titik Koordinat		Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)
			Lintang	Bujur						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Danau Linau	Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar	2°37' 26,19 "	106°31' 38,29"	-	-	-	5.13	-	-
2	Kolong Block 8	Desa Lubuk Lingkok, Kecamatan Lubuk Besar	2°34' 13,23"	106°39' 35,58"	-	-	-	5.91	-	-
3	Kolong Sarkawi	Desa Nibung, Kecamatan Koba	2°19' 52,07"	106°13' 59,93"	-	-	-	5.21	-	-
4	Embung Namang	Desa Namang, Kecamatan Namang	2°19' 15,82"	106°11' 05,49"	-	-	-	5.01	-	-
5	Embung Teru	Desa Teru, Kecamatan Simpangkatis	2°25' 25,39"	106°07' 51,16"	-	-	-	5.61	-	-
6	Kolong Mentabak	Desa Keretak Atas, Kecamatan Sungaiselan	2°17' 05,08 "	106°02' 57,96"	-	-	-	5.09	-	-



No	Nama	Lokasi	Titik Koordinat		TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)
			Lintang	Bujur				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Danau Linau	Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar	2°37' 26,19 "	106°31' 38,29"	5	4.3	2.73	12.6
2	Kolong Block 8	Desa Lubuk Lingku, Kecamatan Lubuk Besar	2°34' 13,23"	106°39' 35,58"	6	4.58	2.49	21.5
3	Kolong Sarkawi	Desa Nibung, Kecamatan Koba	2°19' 52,07"	106°13' 59,93"	5	4.05	2.97	23
4	Embung Namang	Desa Namang, Kecamatan Namang	2°19' 15,82"	106°11' 05,49"	8	4.85	2.56	22.1
5	Embung Teru	Desa Teru, Kecamatan Simpangkatis	2°25' 25,39"	106°07' 51,16"	45	4.25	2.88	22.4
6	Kolong Mentabak	Desa Keretak Atas, Kecamatan Sungaiselan	2°17' 05,08 "	106°02' 57,96"	3	4.20	2.72	18.9



No	Nama	Lokasi	Titik Koordinat		NO ₂ (mg/L)	NO ₃ (mg/L)	NH ₃ (mg/L)	Klorin Bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (mg/L)	Minyak dan lemak (mg/L)	Detergen (mg/L)	Fecal Colliform (Jmlh/100 ml)	Total Colliform (Jmlh/100 ml)	Sianida (mg/L)	H ₂ S (mg/L)
			Lintang	Bujur												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
1	Danau Linau	Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar	2°37' 26,19 "	106°31' 38,29"	-	0.695	-	-	<0,0312	-	-	-	32.1	-	-	-
2	Kolong Block 8	Desa Lubuk Lingku, Kecamatan Lubuk Besar	2°34' 13,23"	106°39' 35,58"	-	0.650	-	-	<0,0312	-	-	-	11	-	-	-
3	Kolong Sarkawi	Desa Nibung, Kecamatan Koba	2°19' 52,07"	106°13' 59,93"	-	0.650	-	-	0.0329	-	-	-	<1,80	-	-	-
4	Embung Namang	Desa Namang, Kecamatan Namang	2°19' 15,82"	106°11' 05,49"	-	0.555	-	-	<0,0312	-	-	-	17	-	-	-
5	Embung Teru	Desa Teru, Kecamatan Simpangkatis	2°25' 25,39"	106°07' 51,16"	-	0.600	-	-	0.0431	-	-	-	6.1	-	-	-
6	Kolong Mentabak	Desa Keretak Atas, Kecamatan Sungaiselan	2°17' 05,08 "	106°02' 57,96"	-	0.680	-	-	0.108	-	-	-	<1,80	-	-	-

Keterangan:

Sumber : Data DIKPLHD Kabupaten/Kota 2022



Tabel-30 A Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun : 2020

No.	Nama	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Lintang	Bujur	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/ L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)
1	Kolong Bangka	11/3/2020	-1,93294	106,1564	32,7	126	3,5	6,91	225	126	3,5
2	Kolong Biru	12/3/2020	-2,54894	106,3524	31,6	8,5	2	4,19	15,9	8,5	2
3	Kolong PDAM	17/03/2020	-3,03009	106,6946	29,8	9,83	40	4,29	18,2	9,83	40

No.	Nama	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Lintang	Bujur	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin Bebas (mg/L)	T-P (mg/L)
1	Kolong Bangka	11/3/2020	-1,93294	106,1564	4,13	2,52	17,6	< 0.00495	0,59	0,0461	< 0.02	0,104
2	Kolong Biru	12/3/2020	-2,54894	106,3524	4,13	2,72	14,2	< 0.00495	0,675	0,0449	< 0.02	< 0.0316
3	Kolong PDAM	17/03/2020	-3,03009	106,6946	4,43	2,52	16,3	0,014	0,7	0,0636	< 0.02	< 0.0316



No.	Nama	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Lintang	Bujur	Fenol (ug/L)	Minyak dan Lemak (ug/L)	Detergen (ug/L)	Fecal coliform (jmlh / 100 ml)	Total coliform (jmlh / 100 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
1	Kolong Bangka	11/3/2020	-1,93294	106,1564	0	< 943	0	10	24	0,005	0
2	Kolong Biru	12/3/2020	-2,54894	106,3524	0	< 943	0	< 1,80	< 1.80	0,004	0
3	Kolong PDAM	17/03/2020	-3,03009	106,6946	0	< 943	0	2	7,8	0,016	0

Keterangan: tanda - menunjukkan tidak dilakukan pengujian terhadap parameter dimaksud

Sumber: Dinas Lingkungan dan Kehutanan Hidup Prov. Kep. Bangka Belitung, 2023



Tabel-31. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2021

No.	Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota/Kec.	Jumlah KK	Fasilitas Tempat Buang Air Besar			
			Sendiri	Bersama	Umum	Sungai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kabupaten Bangka	85,100	81449	706	247	2689
2	Kabupaten Belitung	48,300	44388	1420	193	2294
3	Kabupaten Bangka Barat	54,100	50281	1114	298	2402
4	Kabupaten Bangka Tengah	48,500	44853	1023	640	1984
5	Kabupaten Bangka Selatan	51,000	44457	1275	5141	128
6	Kabupaten Belitung Timur	33,500	28612	1658	660	2573
7	Kota Pangkalpinang	54,100	52466	1217	200	216

Keterangan:

Sumber: BPS Babel, 2022, diolah



Tabel-32. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2018

No.	Kabupaten	Tidak Sekolah		SD		SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2 & S3			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Bangka	19,14	21,32	26,64	21,4	21,99	23,59	24,49	26,28	3,01	2,05	4,24	5,33	0,49	0,12		
2	Belitung	18,45	19,82	26,11	28,42	20,05	19,94	25,36	24,17	4,57	2,59	5,12	4,87	0,34	0,19		
3	Bangka Barat	21,85	26,06	29,35	25,87	19,28	21,15	22,57	19,7	2,15	2,86	4,8	4,14	0	0,22		
4	Bangka Tengah	30,39	31,7	27,6	24,65	18,01	17,29	19,26	20,24	2,26	2,2	2,42	3,83	0,06	0,09		
5	Bangka Selatan	28,45	29,6	31,57	34,07	15,25	15,95	20,06	16,18	0,91	1,12	3,63	3,08	0,13	0		
6	Belitung Timur	15,65	19,42	26,57	28,5	24,78	20,84	26,84	22,42	2,63	3,47	3,44	5,24	0,09	0,11		
7	Pangkalpinang	12,26	14,05	14,26	17,91	19,64	18,1	41,06	36,15	2,73	3,9	9,42	9,27	0,63	0,62		
	Kepulauan Bangka Belitung	20,91	23,01	26	25,22	19,81	19,86	25,59	24,03	2,63	2,5	4,78	5,18	0,28	0,2		

Sumber Data : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Keterangan : Data jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan S3 menjadi satu dengan tingkat pendidikan S2



Tabel-32. A Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2021

No.	Kabupaten/Kota	Tidak/belum Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2	S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Kabupaten Bangka	90,382	82,804	40,912	59,029	5,602	9,524	489	28
2.	Kabupaten Belitung	33,995	44,637	25,863	36,323	4,146	6,094	204	3
3.	Kabupaten Bangka Barat	33,803	67,642	31,808	34,369	2,805	4,603	108	5
4.	Kabupaten Bangka Tengah	39,503	71,467	22,043	27,999	2,293	4,903	171	7
5.	Kabupaten Bangka Selatan	48,106	77,440	20,553	24,336	1,944	4,207	126	3
6.	Kabupaten Belitung Timur	26,055	34,355	17,915	21,470	2,410	3,536	107	5
7.	Kota Pangkalpinang	51,251	34,218	26,958	62,721	7,792	14,915	1,246	70

Keterangan :

Sumber: Kemendagri, 2022



Tabel-33. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2022

No.	Lokasi	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bangka Belitung	Hipertensi	248.104
2	Bangka Belitung	Diabetes Melitus	28.555
3	Bangka Belitung	Kanker Serviks dan Payudara	26.387
4	Bangka Belitung	HIV	276
5	Bangka Belitung	AIDS	42

Keterangan :

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

Tabel-34. Jumlah Rumah Tangga Miskin

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2021

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga (Keluarga)	Jumlah Rumah Tangga Miskin	Prosentase Rumah Tangga Miskin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	85,100	3,550	4.17
2	Kabupaten Belitung	48,300	2,967	6.14
3	Kabupaten Bangka Barat	54,100	1,283	2.37
4	Kabupaten Bangka Tengah	48,500	2,200	4.54
5	Kabupaten Bangka Selatan	51,000	1,693	3.32
6	Kabupaten Belitung Timur	33,500	2,037	6.08
7	Kota Pangkalpinang	54,100	2,215	4.09

Keterangan:

Sumber: Kemendagri, 2022; BPS, 2022 (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun 2022), data diolah



Tabel-34. A Jumlah Penduduk Miskin

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2022

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Kabupaten Bangka	14,50	4,26
2	Kabupaten Belitung	12,34	6,45
3	Kabupaten Bangka Barat	5,30	2,46
4	Kabupaten Bangka Tengah	9,61	4,86
5	Kabupaten Bangka Selatan	6,81	3,22
6	Kabupaten Belitung Timur	8,47	6,49
7	Kota Pangkalpinang	9,76	4,55

Keterangan:

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka, 2023



Tabel-35. Jumlah Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber pencemaran

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data: 2022

No	Sumber Pencemaran	Lokasi	Tipe/Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m ³ /hari)	Volume Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m ³ /tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.	Bergerak	-	-	-	-	-	-	-
1	PT. Angkasa Pura	Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalanbaru	Bandar Udara	152.8	2.0827	-	-	-
B.	Tidak Bergerak							
1	CV. Mutiara Alam Lestari	Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba	Perkebunan dan PKS	752	-	387.21	1.094	-
2	PT. Putera Bangka Tani	Desa Belilik, Kecamatan Namang	Perkebunan dan PKS	767.08	-	335.493	0.394	-
3	PT. Mutiara Hijau Lestari	Desa Guntung, Kecamatan Koba	Perkebunan dan PKS	1240.9	-	419.46	-	-
4	R.S. Siloam	Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalanbaru	Rumah Sakit	12.5366	-	30	15.5538	-
5	RSUD Koba	Kelurahan Koba, Kecamatan Koba	Rumah Sakit	5.7828	0.07	69	14.77	-



No	Sumber Pencemaran	Lokasi	Tipe/Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m ³ /hari)	Volume Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m ³ /tahun)
6	Rumah Sakit Pratama	Desa Namang, Kecamatan Namang	Rumah Sakit	2.6642	0.065	-	0.41	-
7	PLTD Koba	Kelurahan Koba, Kecamatan Koba	Pembangkit Listrik	0.9375	-	0.12	1.37	-

Sumber : Data DIKPLHD Kabupaten Kota 2022

Tabel-36. Suhu Udara Rata-Rata Bulanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data: 2022

No.	Nama dan Lokasi Stasiun	Lokasi	Titik Koordinat		Suhu Udara Rata-Rata Bulanan (°C)											
			Latitude	Longitude	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)											
1	Stasiun Meteorologi Depati Amir	Pangkalpinang	-2.163	106.137	26,4	26,7	26,7	27,1	27,5	26,3	27,2	27,0	26,7	26,1	26,3	26,2
2	Stasiun Meteorologi Hanandjoedin	Tanjung Pandan Kabupaten Belitung	-2,75	107,75	26,5	26,5	26,8	26,5	27,1	26,0	26,6	26,5	26,5	26,0	26,3	26,3

Keterangan :

Sumber: Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir, 2022; Data Online BMKG, diakses 2023



Tabel-37. Kualitas Udara Ambien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2022

Lokasi	Titik koordinat		Lama Pengukuran	SO2 (µg/Nm3)	CO (µg/Nm3)	NO2 (µg/Nm3)	O3 (µg/Nm3)
	Latitude	Longitude					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Transportasi, Jl. Jenderal Sudirman, Sungailiat, Kabupaten Bangka	-1,855510	106,117953	14 hari	8,02	-	7,53	-
Transportasi, Jl. Jenderal Sudirman, Sungailiat, Kabupaten Bangka	-1,855510	106,117953	14 hari	9,08	-	6,14	-
Industri/Agroindustri, PT. Refined Bangka Tin, Kasawan Industri Jelitik, Kabupaten Bangka	-1,860922	106,133660	14 hari	12,90	-	7,87	-
Industri/Agroindustri, PT. Refined Bangka Tin, Kasawan Industri Jelitik, Kabupaten Bangka	-1,860922	106,133660	14 hari	12,76	-	11,41	-
Pemukiman, Rumah Bapak Sugianto, Kampung Jawa, Kabupaten Bangka	-1,860838	106,112848	14 hari	8,07	-	7,11	-
Pemukiman, Rumah Bapak Sugianto, Kampung Jawa, Kabupaten Bangka	-1,860838	106,112848	14 hari	6,50	-	8,87	-
Perkantoran/Komersial, Kantor DLH Kabupaten Bangka	-1,895509	106,105630	14 hari	12,05	-	8,55	-



Lokasi	Titik koordinat		Lama Pengukuran	SO2 (µg/Nm3)	CO (µg/Nm3)	NO2 (µg/Nm3)	O3 (µg/Nm3)
	Latitude	Longitude					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perkantoran/Komersial, Kantor DLH Kabupaten Bangka	-1,895509	106,105630	14 hari	8,03	-	6,60	-
Transportasi, Terminal Bis Tanjung Pandan, Jl. Jend. Sudirman, Kabupaten Belitung	-2,747972	107,655361	14 hari	7,55	-	4,00	-
Transportasi, Terminal Bis Tanjung Pandan, Jl. Jend. Sudirman, Kabupaten Belitung	-2,747972	107,655361	14 hari	7,14	-	5,96	-
Industri/Agroindustri, Kawasan Industri Suge Jl. TS RUU, Kabupaten Belitung	-2,857556	107,599139	14 hari	4,31	-	5,84	-
Industri/Agroindustri, Kawasan Industri Suge Jl. TS RUU, Kabupaten Belitung	-2,857556	107,599139	14 hari	6,27	-	1,63	-
Pemukiman, Kantor Desa Aik Palembang Jl. Nusantara RT 04 RW 02, Kabupaten Belitung	-2,7195	107,651083	14 hari	10,2	-	7,14	-
Pemukiman, Kantor Desa Aik Palembang Jl. Nusantara RT 04 RW 02, Kabupaten Belitung	-2,7195	107,651083	14 hari	7,27	-	6,09	-
Perkantoran/Komersial, Puskesmas Air Saga Jl. Pattimura, Kabupaten Belitung	-2,722778	107,630083	14 hari	5,1	-	11,91	-



Lokasi	Titik koordinat		Lama Pengukuran	SO2 (µg/Nm3)	CO (µg/Nm3)	NO2 (µg/Nm3)	O3 (µg/Nm3)
	Latitude	Longitude					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perkantoran/Komersial, Puskesmas Air Saga Jl. Pattimura, Kabupaten Belitung	-2,722778	107,630083	14 hari	5,1	-	11,47	-
Transportasi, Jl KejaksaanTaman Locomobil Muntok, Kabupaten Bangka Barat	-2,062719	105,164269	14 hari	12,18	-	6,94	-
Transportasi, Jl KejaksaanTaman Locomobil Muntok, Kabupaten Bangka Barat	-2,062719	105,164269	14 hari	6,51	-	9,21	-
Industri/Argoindustri, UNMET PT Timah Persero, Tbk., Peltim Muntok, Kabupaten Bangka Barat	-2,07263	105,177129	14 hari	12,14	-	0	-
Industri/Argoindustri, UNMET PT Timah Persero, Tbk., Peltim Muntok, Kabupaten Bangka Barat	-2,07263	105,177129	14 hari	11,38	-	6,35	-
Pemukiman, Komplek Perumahan Peltim, Masjid Al- Huda Muntok, Kabupaten Bangka Barat	-2,06886	105,183923	14 hari	5,71	-	5,23	-
Pemukiman, Komplek Perumahan Peltim, Masjid Al- Huda Muntok, Kabupaten Bangka Barat	-2,06886	105,183923	14 hari	6,5	-	3,89	-



Lokasi	Titik koordinat		Lama Pengukuran	SO2 (µg/Nm3)	CO (µg/Nm3)	NO2 (µg/Nm3)	O3 (µg/Nm3)
	Latitude	Longitude					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perkantoran/komersial, Dinas Komunikasi dan Informatika Komplek Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat, Muntok	-2,056887	105,203015	14 hari	7,76	-	5,8	-
Perkantoran/komersial, Dinas Komunikasi dan Informatika Komplek Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat, Muntok	-2,056887	105,203015	14 hari	7,4	-	5,43	-
Transportasi, Belakang Pos Polisi depan Pasar Modern, Koba, Kabupaten Bangka Tengah	-2,48825	106,407056	14 Hari	4,17	-	7,28	-
Transportasi, Belakang Pos Polisi depan Pasar Modern, Koba, Kabupaten Bangka Tengah	-2,48825	106,407056	13 Hari	5,82	-	6,67	-
Industri/Argoindustri, Unit PLTD Koba PLN Rayon, Kabupaten Bangka Tengah	-2,499889	106,401194	14 Hari	3,06	-	11,07	-
Industri/Argoindustri, Unit PLTD Koba PLN Rayon, Kabupaten Bangka Tengah	-2,499889	106,401194	13 Hari	3,5	-	9,32	-
Pemukiman, Jl. Syafri Rahman, Koba, Kabupaten Bangka Tengah	-2,489361	106,412722	14 Hari	4,79	-	5,95	-



Lokasi	Titik koordinat		Lama Pengukuran	SO2 (µg/Nm3)	CO (µg/Nm3)	NO2 (µg/Nm3)	O3 (µg/Nm3)
	Latitude	Longitude					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pemukiman, Jl. Syafri Rahman, Koba, Kabupaten Bangka Tengah	-2,489361	106,412722	13 Hari	6,26	-	6,72	-
Perkantoran/komersial, Gedung Serba Guna, Kabupaten Bangka Tengah	-2,516806	106,4225	14 Hari	7,42	-	3,47	-
Perkantoran/komersial, Gedung Serba Guna Kabupaten Bangka Tengah	-2,516806	106,4225	13 Hari	5,25	-	4,11	-
Transportasi, Jl. Jend. Sudirman, Bank Sumsel Babel, Kabupaten Bangka Selatan	-3,010585	106,456728	13 Hari	11,28	-	8,47	-
Transportasi, Jl. Jend. Sudirman, Bank Sumsel Babel, Kabupaten Bangka Selatan	-3,010585	106,456728	13 Hari	7,02	-	10,14	-
Industri/Argoindustri, Kawasan Industri Sadai, Kabupaten Bangka Selatan	-3,013567	106,741833	13 Hari	7,69	-	4,35	-
Industri/Argoindustri, Kawasan Industri Sadai, Kabupaten Bangka Selatan	-3,013567	106,741833	13 Hari	10,59	-	5,04	-



Lokasi	Titik koordinat		Lama Pengukuran	SO2 (µg/Nm3)	CO (µg/Nm3)	NO2 (µg/Nm3)	O3 (µg/Nm3)
	Latitude	Longitude					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pemukiman, Perumahan Bukit Permai Jl. Kampung Bukit, Kabupaten Bangka Selatan	-3,0117	106,4601	13 Hari	8,9	-	12,13	-
Pemukiman, Perumahan Bukit Permai Jl. Kampung Bukit, Kabupaten Bangka Selatan	-3,0117	106,4601	13 Hari	8,43	-	4,95	-
Perkantoran/komersial, Jl. Perkantoran Pemkab Bangka Selatan	-3,02185	106,511617	13 Hari	6,67	-	0,31	-
Perkantoran/komersial, Jl. Perkantoran Pemkab Bangka Selatan	-3,02185	106,511617	13 Hari	8,36	-	2,43	-
Transportasi, depan Pos Polisi Jl. Jendral Sudirman, Manggar, Kabupaten Belitung Timur	-2,857372	108,286529	14 Hari	7,48	-	5,05	-
Transportasi, depan Pos Polisi Jl. Jendral Sudirman, Manggar, Kabupaten Belitung Timur	-2,857372	108,286529	14 Hari	5,98	-	3,29	-
Industri/Argoindustri, area Pabrik CPO PT. Steelindo Wahana Perkasa, Kabupaten Belitung Timur	-2,724195	108,066353	14 Hari	9,6	-	3,26	-



Lokasi	Titik koordinat		Lama Pengukuran	SO2 (µg/Nm3)	CO (µg/Nm3)	NO2 (µg/Nm3)	O3 (µg/Nm3)
	Latitude	Longitude					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Industri/Argoindustri, area Pabrik CPO PT. Steelindo Wahana Perkasa, Kabupaten Belitung Timur	-2,724195	108,066353	14 Hari	2,47	-	4,7	-
Pemukiman, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	-2,851768	108,295059	14 Hari	4,85	-	5,24	-
Pemukiman, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	-2,851768	108,295059	14 Hari	6	-	2,67	-
Perkantoran/komersial, Kompleks Perkantoran Manggarawan Jl. Raya Manggara-Gantung Desa Padang, Kabupaten Belitung Timur	-2,88442	108,238686	14 Hari	5,24	-	4,46	-
Perkantoran/komersial, Kompleks Perkantoran Manggarawan Jl. Raya Manggara-Gantung Desa Padang, Kabupaten Belitung Timur	-2,88442	108,238686	14 Hari	6,38	-	2,69	-
Transportasi, Klinik Lany Jl. MS. Rahman, Kota Pangkalpinang	-2,13225	106,117	14 Hari	11,85	-	17,66	-
Transportasi, Klinik Lany Jl. MS. Rahman, Kota Pangkalpinang	-2,13225	106,117	14 Hari	10,04	-	20,22	-



Lokasi	Titik koordinat		Lama Pengukuran	SO2 (µg/Nm3)	CO (µg/Nm3)	NO2 (µg/Nm3)	O3 (µg/Nm3)
	Latitude	Longitude					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Industri/Argoindustri, Perum Air Mangkok Jl. Air Mawar, Kota Pangkalpinang	-2,114222	106,136472	14 Hari	6,9	-	9,08	-
Industri/Argoindustri, Perum Air Mangkok Jl. Air Mawar, Kota Pangkalpinang	-2,114222	106,136472	14 Hari	8,03	-	7,58	-
Pemukiman, Perum Bukit Merapin Masjid Al-Fitrah, Kota Pangkalpinang	-2,117444	106,093333	14 Hari	6,65	-	5,03	-
Pemukiman, Perum Bukit Merapin Masjid Al-Fitrah, Kota Pangkalpinang	-2,117444	106,093333	14 Hari	5	-	3,57	-
Perkantoran/komersial, UPTD. Laboratorium Jl. Delima Siam VI Kota Pangkal Pinang	-2,143944	106,117139	14 Hari	6,88	-	7,11	-
Perkantoran/komersial, UPTD. Laboratorium Jl. Delima Siam VI Kota Pangkal Pinang	-2,143944	106,117139	14 Hari	8,25	-	6,3	-

Keterangan :

Sumber : IKLH, KLHK, 2023



Tabel-38. Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data: 2021

No.	Penggunaan	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah (KL)	Gas	Batubara	LPG (MT)	Briket	Kayu Bakar	Biomassa	Bensin	Solar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Industri											
1.	Pembangkit Listrik					511,262				100,387		230,232
B	Rumah Tangga			5,866			43,264					
C	Transportasi										290,486	142,042

Keterangan :

Sumber: signsmart.menlhk.go.id, diakses pada 13 Juli 2022



Tabel-38.a Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Tahun : 2021

No.	Penggunaan	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah (kL)	Gas	Batubara (ton)	LPG (ton)	Briket	Kayu Bakar	Biomassa	Bensin	Solar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Industri											
1.	Pembangkit Listrik					579.939						252.807
B	Rumah Tangga			390			46.446					
C	Transportasi										373.487	

Keterangan:

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023



**Tabel-38a. Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

I. Pembakaran Bahan Bakar di Pembangkit Listrik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pembangkit)

TAHUN	HSD (Kilo Liter)	Solar B30 (Kilo Liter)	IDO (Kilo Liter)	MFO (Kilo Liter)	Batu Bara (Ton)	Gas Alam (MMSCF)	Other Biomassa (Ton)
2021	100.109	152.698			579.939		
2020	96.480	133.752			511.262		
2019	60.621	148.314			355.314		

II. Data Bahan Bakar Untuk Transportasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Transport)

TAHUN	RON 88 (Kilo Liter)	RON 90 (Kilo Liter)	RON 92 (Kilo Liter)	RON 95 (Kilo Liter)	Bio + solar (Kilo Liter)	CN 48 Bio Solar (Kilo Liter)	CN 51 Dexlite (Kilo Liter)	CN 53 Pertamina Dex (Kilo Liter)
2021	114.485	238.728	20.274			167.137	18.989	915
2020	165.014	117.363	8.109		142.042			
2019	168.841	148.163	11.337		174.612			

TAHUN	Minyak Tanah (Kilo Liter)	LPG (Ton)	Gas Alam (MMSCF)	Kayu Bakar (Ton)
2021	390	46.446		
2020				
2019				

Keterangan :

Sumber: Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023



Tabel 39. Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Bahan Bakar yang di gunakan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2022

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (Unit)				Listrik
		Jumlah	Bensin	Solar	Gas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sepeda Motor	1.054.869	1.054.789	0	0	80
2	Mobil Penumpang	98	90	8	0	12
3	Mobil Bus	88	7	81	0	0
4	Mobil Barang	53	30	23	0	0
5	Kendaraan Khusus	718	446	272	0	0
	TOTAL	1.206.253	1.174.534	31,627	0	92

Sumber: Bakuda Babel, 2022

Tabel 40. Tabel Perubahan Penambahan Ruas Jalan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2023

No.	Kelas Jalan	Panjang Jalan dua tahun terakhir (km)	
		(3)	(4)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jalan Bebas Hambatan		
2	Jalan Raya		
3	Jalan Sedang		
4	Jalan Kecil		
5	Jalan Nasional	600,4	600,4
6	Jalan Provinsi	850,99	850,99

Ket: Sesuai dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan pasal 31 ayat 3 menyatakan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang dan jalan kecil

Sumber: Open Data KemenPUPR, 2023, DPUPRPRKP Babel, 2023



Tabel-41. Dokumen Izin Lingkungan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2022

No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2002	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet serta Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sahabat Mewah dan Makmur	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/504/Bapedalda/2002 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 13 Desember 2002 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
2	2003	AMDAL	Pembangunan Komplek Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Air Itam, Kecamatan Pangkalan Baru dan Bukit Intan, Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/145/BAPEDALDA/2003 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 30 Mei 2003 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	2004	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pelabuhan di Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Steelindo Wahana Perkasa	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/215/Bapedalda/2004 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal : 30 Juni 2004 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
4	2004	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Parit Sembada	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/262/Bapedalda/2004 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal : 11 Agustus 2004 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
5	2005	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV PLTU Air Anyir, Gardu Induk Pangkalpinang – Gardu Induk Sungailiat	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. PLN (Persero) Wilayah BABEL	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/302/BAPEDALDA/2005 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 28 Februari 2005 (SK Kelayakan LH yang



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
6	2006	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan di Kecamatan Membalong dan Badau Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Palmino Billiton Berjaya	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/459/Bapedalda/2006 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 7 November 2006 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
7	2007	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Sijuk dan Badau, Kabupaten Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Agro Makmur Abadi	Surat Keputusan. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/186/BAPEDALDA/2007 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 14 Mei 2007 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8		AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Membalong dan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Forestalestari Dwikarya	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/450.C/BAPEDALDA/2007 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 28 September 2007 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
9	2008	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Riau Silip dan Belinyu Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Gunung Pelawan Lestari	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/195.A/Bapedalda/2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 28 Maret 2008 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
10	2008	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Timah Lepas Pantai (offshore) di Laut Tanjung Penyusuk, Simpang, S. Belinyu, Danta, Kabupaten Bangka dan Laut Rambat, Kabupaten Bangka	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sarana Marindo	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/270/Bapedalda/2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 5 Mei 2008 (SK Kelayakan LH yang



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
11	2008	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan dan Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Swarna Nusa Sentosa	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/313/Bapedalda/2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 19 Mei 2008 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
12	2008	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Desa Pugul, Riau dan Silip, Kecamatan Riausilip, Kabupaten Bangka	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Tata Hampanan Eka Persada	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/428/BLHD/2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Juli 2008 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	2008	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka dan Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Putra Bangka Mandiri	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/473/BLHD/2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 25 Agustus 2008 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
14	2008	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa di Kecamatan Air Gegas dan Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangka Inti Besaoh	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/688/BLHD/2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Oktober 2008 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
15	2008	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Payung dan Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangka Plasma Besaoh	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/689/BLHD/2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Oktober 2008 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	2008	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Badau, Sijuk dan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung serta di Kecamatan Gantung dan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Rebinmas Jaya	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/717/BLHD/ 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 19 November 2008 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
17	2009	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK – HTI) di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah serta Kecamatan Air Gegas dan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangka Nesia	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/029/BLHD/ 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 23 Januari 2009 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18		AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK – HTI) di Kecamatan Belinyu, Sungailiat dan Riausilip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Inhutani V SPHK-BABEL	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/094/BLHD/2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 24 Februari 2009 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
19		AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Timah (Persero) Tbk	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44 / 381 / BLHD / 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Juli 2009 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
20		DPPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pelabuhan Pangkalbalam di Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka		PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pangkalbalam	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44 / 387.E/ BLHD / 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Juli 2009 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
21		AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI) di Kecamatan Belinyu dan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Istana Kawi Kencana	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44 / 432 / BLHD / 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Agustus 2009 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
22		AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peningkatan Jalan Toboali – Sadai ± 44.55 Km di Kecamatan Toboali dan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas PU Provinsi Kep. Bangka Belitung - Satuan Kerja SNVT P2JJ BABEL	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44 / 532/ BLHD / 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 30 Oktober 2009 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
23	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Berbasis Kompetensi Inti Industri Daerah di Kelurahan Bacang dan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan,	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pangkalpinang	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44 / 020/ BLHD / 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 14 Januari 2010 (SK Kelayakan LH yang



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
24	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah di Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Prov. Kep. Babel.	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Mitra Stania Prima	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44 / 091/ BLHD / 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 4 Maret 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
25	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah di Perairan Laut Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Aega Prima	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44 / 316/ BLHD / 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Maret 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Desa Rajik dan Permis, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangka Prima Tin	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44 / 320/ BLHD / 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Maret 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
27	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit ± 10.101 Ha di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Hasil Sawit Bina Sejahtera	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44 / 434 / BLHD / 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 14 Mei 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
28	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peleburan dan Pemurnian Bijih Timah di Kawasan Industri Ketapang Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Stanindo Inti Perkasa	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44 / 443 / BLHD / 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 18 Mei 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (UPHHK-HTI) di Kec. Simpang Rimba, Payung, Air Gegas dan Pulau Besar, Kabupaten Basel dan di Kecamatan Muntok, Simpang Teritip, Jebus, Kelapa dan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangun Rimba Sejahtera	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/555/BLHD/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 7 Juli 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
30	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Laut di Desa Air Kelik dan Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Halaban Primavestama	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/635/BLHD/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 18 Agustus 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Laut di Desa Air Kelik dan Desa Mayang, Kec. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur, Prov. Kep. Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Kampit Tin Utama	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/637/BLHD/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 18 Agustus 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
32	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Laut di Desa Air Kelik dan Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Billiton Jaya Utama	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/636/BLHD/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 18 Agustus 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
33	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Kompleks Olahraga (Sport Center) dan Fasilitasnya di Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/677/BLHD/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 30 Agustus 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Puncak Hall (Pembangunan Hotel dan Parkir) di Kelurahan Gedung Nasional, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Puncak Prima Lestari	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/678/BLHD/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 30 Agustus 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
35	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Kab. Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Babel Tinindo	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/775/BLHD/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 19 Oktober 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
36	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Kabupaten Bangka Barat, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Cirindo Mining Utama	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/776/BLHD/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 19 Oktober 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Kabupaten Bangka Barat, Bangka dan Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Mitra Abadi Berkatindo	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/777/BLHD/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 19 Oktober 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
38	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Mitra Sukses Globalindo	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/778/BLHD/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 19 Oktober 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
39	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (UPHHK-HTI) di Kecamatan Puding Besar dan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, dan di Kecamatan Sijuk dan Membalong, Kabupaten Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Agro Pratama Sejahtera	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/897/BLHD/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 21 Desember 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40	2011	DPLH	Usaha dan/atau Kegiatan PLTD di Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat; di Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah; di Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung; di Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. PLN (PERSERO) Wilayah Bangka Belitung	Surat Rekomendasi Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/495/BLHD/2010 tentang Rekomendasi atas DPLH kegiatan PLTD dan Perkantoran PT. PLN (Persero) Wilayah Babel, tanggal 23 Desember 2010 (Rekomendasi Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipersamakan dengan SKIL)
41	2011	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Operasi Produksi Penambangan Bahan Galian Timah di Kecamatan Payung, Kecamatan Air Gegas dan Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangka Serumpun	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/106/BLHD/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 21 Februari 2011 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
42	2011	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Wilayah Laut Pasir Padi, Kota Pangkalpinang	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Stanindo Inti Perkasa	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/198/BLHD/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 22 Maret 2011 (SK Kelayakan LH yang



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
43	2011	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Laut Kelambui, Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangka Prima Tin	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/199/BLHD/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 22 Maret 2011 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
44	2011	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pabrik Peleburan Bijih Timah (Smelter) di Desa Batu Peny, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Tommy Utama	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/362/BLHD/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 18 Mei 2011 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
45	2011	AMDAL	Rencana usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai (offshore) di Desa Rajik dan Permis, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Synergy Maju Bersama	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/460/BLHD/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 20 Juni 2011 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
46	2011	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau kegiatan UPHHK – HTI di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Indosukses Lestari Makmur	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/597.b/BLHD/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 27 Juli 2011 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
47	2011	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau kegiatan Pembangunan T/L 70 kV Dukong-Manggar dan Gardu Induk Terkait di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II	Surat Rekomendasi Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/319/BLHD/2011 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL, tanggal 16 Agustus 2011 (Rekomendasi Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipersamakan dengan SKIL)



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
48	2011	DELH	Usaha dan/atau Kegiatan Operasional Pelabuhan Khusus di Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	CV. Sejahtera Utama	Surat Keputusan Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/371.a/BLHD/2011 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Pelabuhan Khusus di Desa Lilangan, Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Oleh CV. Sejahtera utama, tanggal 30 September 2011 (Keputusan Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipersamakan dengan SKIL)
49	2012	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bumi Makmur Sejahtera Jaya	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/029/BLHD/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 10 Januari 2012 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50	2012	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Laut Rambat dan Keranji, di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sentra Tinindo	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/061/BLHD/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 24 Januari 2012 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
51	2012	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau kegiatan UPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi di Kecamatan Koba, Namang, Simpang Katis dan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Agrindo Persada Lestari	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/078/BLHD/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 25 Januari 2012 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
52	2012	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Eksploitasi Bahan Galian Timah Lepas Pantai di Tanjung Pemuja Desa Tayu Ketap, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sinar Mutiara Sejahtera	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/079/BLHD/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 25 Januari 2012 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
53	2012	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan T/L 150 kV Pangkalpinang-Kelapa-Mentok dan Gardu Induk Terkait	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II	Surat Rekomendasi Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/098/BLHD/2012 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL, tanggal 3 Februari 2012 (Rekomendasi Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipersamakan dengan SKIL)
54	2012	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Oli Bekas sebagai Bahan Bakar Tanur untuk Peleburan Timah di Unit Metalurgi di Desa Sungai Baru, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Timah (Persero) Tbk	Surat Rekomendasi Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/129/BLHD/2012 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL, tanggal 10 Februari 2012 (Rekomendasi Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipersamakan dengan SKIL)
55	2012	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai (Offshore) di Desa Air Gantang dan Desa Kelabat, Kabupaten Bangka Barat	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sumber Jaya Indah	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/331/BLHD/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 22 Juni 2012 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
56	2012	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan T/L 150 kV Pangkalpinang-Koba-Toboali dan Gardu Induk Terkait	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II	Surat Rekomendasi Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/528/BLHD/2012 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL, tanggal 22 Juni 2012 (Rekomendasi Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipersamakan dengan SKIL)
57	2012	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peleburan dan Pemurnian Timah (Smelter) di Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	CV. United Smelting	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/475/BLHD/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 18 September 2012; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/698/BLHD/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 17 Oktober 2012



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
58	2012	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau kegiatan UPHHK-HTI di Kecamatan Dendang dan Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur seluas ±9.485 Ha	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Greenland Diorama	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/716.n/BLHD/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Oktober 2012; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/794/BLHD/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 30 November 2012
59	2012	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan T/L 150 kV Pangkalpinang-Koba-Toboali dan Gardu Induk Terkait	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II	- Surat Rekomendasi Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/528/BLHD/2012 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL, tanggal 22 Juni 2012; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/852/BLHD/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 26 Desember 2012



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60	2013	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Jembatan Teluk Belinyu yang menghubungkan Tanjung Gudang Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dengan Tanjung Ru Kelurahan Bakit Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas PU Provinsi Kep. Bangka Belitung	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/133.d/BLHD/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 28 Maret 2013; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/341/BLHD/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 25 April 2013
61	2013	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri di Tanjung Ular, di Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Timah (Persero) Tbk	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/337/BLHD/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 25 April 2013; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/385/BLHD/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 16 Mei 2013



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
62	2013	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai (Offshore) di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Goshen Bangka Mulia	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/201.n /BLHD/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 15 April 2013; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/580/BLHD/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 27 Juni 2013
63	2013	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai (Offshore) di Kabupaten Bangka Selatan	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Goshen Bangka Mulia	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/201.L /BLHD/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 15 April 2013; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/581/BLHD/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 27 Juni 2013



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
64	2013	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau kegiatan UPHHK-HTI di Kec. Kelapa Kampit, Gantung, Simpang Pesak, Dendang dan Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur seluas ± 29.418 Ha	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Andalan Karya Pertiwi	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/577 /BLHD/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 27 Juni 2013; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/672/BLHD/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 4 Juli 2013
65	2013	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Timah (Smelter) di Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	CV. Tiga Sekawan	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1192 /BLHD/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 9 Desember 2013; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1193/BLHD/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 9 Desember 2013



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
66	2014	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran di Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel dan Babel	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/040/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 27 Januari 2014; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/039/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 27 Januari 2014
67	2014	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Swiss-Bel Hotel di Kelurahan Gedung Nasional, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangun Mega Lestari	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/080.c/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 7 Februari 2014; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/080.d/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 7 Februari 2014



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
68	2014	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Desa Air Mesu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangka Prima Tin	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/271/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 1 Juli 2014; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/272/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 1 Juli 2014
69	2014	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Sarana Penunjang Tambang di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Silika Tiga Mas	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/645.a/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 21 Oktober 2014; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/645.b/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 21 Oktober 2014



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
70	2014	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai (Offshore) di Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Babel Sumber Pratama Mineral	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/698.a/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Oktober 2014; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/698.c/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Oktober 2014
71	2014	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai (Offshore) di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Cipta Mineral Bumi Selaras	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/698.b/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Oktober 2014; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/698.d/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Oktober 2014



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
72	2014	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai (Offshore) di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Hasil Alam Sukses Pratama	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/698.e/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Oktober 2014; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/698.f/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Oktober 2014
73	2014	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai (Offshore) di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Arsed Indonesia	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/698.h/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Oktober 2014; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/698.g/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Oktober 2014



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
74	2014	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Bandar Udara H.A.S Hanandjoeddin di Desa Buluh Tumbang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/698.i/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Oktober 2014; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/698.j/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Oktober 2014
75	2015	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Mutiara Prima Sejahtera	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/380/BLHD/2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 18 Mei 2015; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/33.a/LH/BP2TPM/2015 tentang Izin Lingkungan, tanggal 18 Mei 2015
76	2015	AMDAL	Rencana kegiatan pembangunan Bendungan Pice Besar Daerah Irigasi Selingsing dengan luas	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan	Kementerian Pekerjaan Umum,	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			tampungan 3.182,40 Ha di Desa Lenggang dan Desa Selingsing, Kecamatan Gantong, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Belitung	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	188.44/1044/BLHD/2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 23 Oktober 2015; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/68.b/LH/BP2TPM/2015 tentang Izin Lingkungan, tanggal 23 Oktober 2015
77	2015	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Peleburan Bijih Timah dengan kapasitas produksi tambahan 10 ton/hari di Dusun Bangek, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Billitin Makmur Lestari	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/018/BLHD/2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 19 Januari 2015; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/24/LH/BP2TPM/2015 tentang Izin Lingkungan, tanggal 30 Maret 2015



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
78	2015	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah dengan Tambahan Kegiatan Ponton Isap Produksi (PIP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Timah (Persero) Tbk	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/401/BLHD/2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 29 Mei 2015; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/38/LH/BP2TPM/2015 tentang Izin Lingkungan, tanggal 19 Juni 2015
79	2015	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	rencana usaha pembangunan mill-plant pengolahan mineral logam timah (relokasi) dengan kapasitas pengolahan 100 ton ore (bongkah)/hari pada lahan seluas 3,3, Ha di Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Menara Cipta Mulia	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/766/BLHD/2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 14 Agustus 2015; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/52/LH/BP2TPM/2015 tentang Izin Lingkungan, tanggal 26 Agustus 2015
80	2015	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Usaha Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) dengan Tambahan Kapasitas Produksi 7.000 ton/tahun di Kawasan Industri Jelitik,	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Mitra Stania Prima	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/543/BLHD/2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 26 Juni 2015;



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.			- Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/64/LH/BP2TPM/2015 tentang Izin Lingkungan, tanggal 28 Agustus 2015
81	2015	DELH	Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Lepas Pantai (Offshore) di Perairan Laut Bubus, Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu dan Kabupaten Bangka	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Hasil Alam Gemilang Pratama	- Surat Keputusan Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/969/BLHD/2015 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Lepas Pantai (Offshore) di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Oleh PT. Hasil Alam Gemilang Pratama, 3 September 2015; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/65/LH/BP2TPM/2015 tentang Izin Lingkungan, tanggal 25 September 2015



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
82	2015	DELH	Usaha dan/atau Kegiatan Kepelabuhan Pangkalbalam di Jl. Yos Sudarso No. 1 Kel. Lontong Pancur, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Pangkalbalam	- Surat Rekomendasi Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/985/BLHD/2015 tentang Rekomendasi atas DPLH kegiatan Kepelabuhan Pangkalbalam oleh PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Pangkalpinang di Pangkalpinang, 7 September 2015; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/68/LH/BP2TPM/2015 tentang Izin Lingkungan, tanggal 30 September 2015
83	2015	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana usaha pengolahan dan pemurnian bijih timah (mill plant dan smelter) dengan kapasitas terpasang 100 ton ore/hari untuk mill plant dan kapasitas tanur terpasang 2 x 20 ton/heat/hari untuk smelter dalam areal seluas 3,3 Ha di Dusun Gumbak, Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Menara Cipta mulia	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1025/BLHD/2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 22 Oktober 2015; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/68.a/LH/BP2TPM/2015



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						tentang Izin Lingkungan, tanggal 22 Oktober 2015
84	2015	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana usaha pengolahan dan pemurnian bijih timah (smelter) dengan kapasitas tanus terpasang 4 x 6 ton konsentrat/heat pada lahan seluas 15.721 m ² di Desa Pasir Putih, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Synergy Maju Bersama	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1100/BLHD/2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 28 Oktober 2015; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/76/LH/BP2TPM/2015 tentang Izin Lingkungan, tanggal 13 November 2015



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
85	2015	AMDAL	Rencana perubahan usaha pengolahan dan pemurnian bijih timah (smelter) dengan kapasitas tanur terpasang 4 x 6 ton konsentrat/heat pada lahan seluas 15.721 m ² di Desa Pasir Putih, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa perubahan kepemilikan dari PT. Synergy Maju Bersama menjadi PT. Lautan Harmonis Sejahtera	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Lautan Harmonis Sejahtera	Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/85/LH/BP2TPM/2015 tentang Izin Lingkungan, tanggal 18 Desember 2015
86	2015	DELH	Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Prima Timah Utama	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/1377/BLHD/2015 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Oleh PT. Prima Timah Utama, 23 Desember 2015; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Bangka Belitung Nomor 503/109/LH/BP2TPM/2015 tentang Izin Lingkungan, tanggal 31 Desember 2015
87	2016	Laporan Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Perubahan rencana usaha dan/atau kegiatan perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan luas HGU 11.337,582 Ha dan kapasitas pabrik 60 ton TBS/jam di Kecamatan Membalong, Badau dan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Forestalestari Dwikarya	Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/21.A/LH/BP2TPM/2016 tentang Izin Lingkungan, tanggal 26 Februari 2016



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
88	2016	DELH	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Timah (Smelter) di Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	CV. Dua Sekawan	- Surat Keputusan Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/259/BLHD/2016 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Timah (Smelter) di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh CV. Dua Sekawan, tanggal 11 Februari 2016; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/22/LH/BP2TPM/2016 tentang Izin Lingkungan, tanggal 29 Februari 2016



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
89	2016	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana usaha peleburan dan pemurnian bijih timah (smelter) dengan perubahan kapasitas produksi sebesar 38,4 ton/hari di Kawasan Industri Ketapang, Jl. TPI Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Tinindo Inter Nusa	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/184/BLHD/2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 29 Februari 2016; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/45/LH/BP2TPM/2016 tentang Izin Lingkungan, tanggal 14 April 2016
90	2016	DELH	Usaha dan/atau Kegiatan Peleburan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Desa Kayu Besi, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	CV. Bangka Timah Makmur	- Surat Keputusan Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/1381/BLHD/2015 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Kabupaten Bangka Tengah, Prov Kep Babel Oleh CV. Bangka Timah Makmur, tanggal 23 Desember 2015; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						503/93.A/LH/BP2TPM/2016 tentang Izin Lingkungan, tanggal 27 Juni 2016
91	2016	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan dermaga dengan panjang ± 102 m dan lapangan penumpukan seluas ± 5.265 m ² di Desa Air Jukung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Pelindo II (Persero)	- Surat Rekomendasi Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 651/865/BLHD/2016 tentang Rekomendasi UKL-UPL, 8 Agustus 2016; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/109/LH/BP2TPM/2016 tentang Izin Lingkungan, tanggal 18 Agustus 2016
92	2016	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Perubahan usaha dan/atau kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah (smelter) di Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa perubahan mengganti teknologi produksi dari tanur pendam menjadi tanur listrik	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Donna Kembara Jaya	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/772.F/BLHD/2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 29 Agustus 2016; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 117.A/LH/BP2TPM/



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			dengan kapasitas produksi 30 ton/hari dan perubahan nama perusahaan dari CV. Donna Kembara Jaya menjadi PT. Donna Kembara Jaya			2016 tentang Izin Lingkungan, tanggal 29 Agustus 2016
93	2016	AMDAL	Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang berupa perubahan kepemilikan dari PT. Donna Kembara Jaya menjadi PT. Bangka Serumpun	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangka Serumpun	Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/132/LH/BP2TPM/ 2016 tentang Izin Lingkungan, tanggal 11 Oktober 2016



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
94	2016	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Perubahan usaha dan/atau kegiatan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Desa Pelempang, Desa Air Bulu, Desa Rukam, Desa Cengkong Abang, Desa Kota Kapur, Desa Petaling, dan Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, berupa perubahan kapasitas produksi dari 60 ton/hari menjadi 120 ton/hari dan penambahan unit pengolahan kernel	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Putra Bangka Mandiri	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1139/BLHD/2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 25 Oktober 2016; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/163/LH/BP2TPM/ 2016 tentang Izin Lingkungan, tanggal 25 Oktober 2016
95	2016	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Embung Air Baku dengan luas 12,6 Ha, kedalaman 6 m dan daya tampung 720.000.000 m ³ di Desa Kacang Butor, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas PU Kab. Belitung Timur	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1077/BLHD/2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 25 Oktober 2016; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/142.A/LH/BP2TPM/ 2016 tentang Izin Lingkungan, tanggal 25 Oktober 2016



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
96	2016	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambahan Kapasitas Produksi Pembangkit PLTD Muntok-Padang dengan kapasitas 25.285 KW dan 31.040 KW berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No. 94 PAL II, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat dan di Jalan Simpang Renggang-Manggar, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. PLN (Persero) Wilayah Babel	- Surat Rekomendasi Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/153/BP2TPM/2016 tentang Rekomendasi UKL-UPL, 15 November 2016; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/158/LH/BP2TPM/2016 tentang Izin Lingkungan, tanggal 15 November 2016
97	2017	UKL -UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV Pkp-Kelapa-Mentok dan SUTT Pangkalpinang-Koba-Toboali dan Gardu Induk Terkait di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Basel	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan	- Surat Rekomendasi Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/09/DPMPTSP/2017 tentang Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 17 Januari 2017; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/10/LH/PMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 17 Januari 2017



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
98	2017	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Timah (Smelter) di Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah berupa perubahan kepemilikan dari CV. Serumpun Sebalai menjadi PT. Premium Tin Indonesia	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Premium Tin Indonesia	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/16/LH/DPMPSTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 27 Januari 2017
99	2017	AMDAL	Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) seluas ± 33,494 Ha di Desa Pergam, Kec. Air Gegas, di Desa Bedengung, Irat, Kecamatan Payung, di Desa Jelutung II, Gudang, Kecamatan Simpang Rimba, dan di Desa Batu Betumpang, Panca Tunggal, Fajar Indah, Suka Jaya, Sumber Jaya Permai, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Hutan Lestari Raya	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/379/DLH/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 30 Maret 2017; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/148.A/LH/DPMPSTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 4 April 2017



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
100	2017	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) dengan luas areal \pm 4.482 m ² dan kapasitas tanur terpasang 3.600 Ton Ore/Tahun di Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangka Belitung Timah Sejahtera	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/387/DLH/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 30 Maret 2017; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/49/LH/DPMPTSP/ 2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 13 April 2017
101	2017	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Jln. Ketapang, Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang berupa perubahan peningkatan kapasitas tanur terpasang 2 x 15 ton/hari menjadi 2 x 20 ton/hari dan perubahan jenis tanur bakar menjadi tanur listrik.	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. DS Jaya Abadi	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/376/DLH/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 29 Maret 2017; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/50/LH/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 18 April 2017



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
102	2017	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengerukan Alur Sungai Manggar dengan volume kerukan 279.308,48 m ³ dan dumping area 2051'18,65"S 108028'1,74"E serta dengan kedalaman 20 m oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur di Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur	- Surat Rekomendasi Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/56/DPMPTSP/2017 tentang Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 12 Mei 2017; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/60/LH/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 12 Mei 2017
103	2017	Laporan Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa perubahan pengelolaan lingkungan hidup dengan bertambahnya kerjasama kemitraan dengan BUMD, BUMDes, CV. Koperasi dan bentuk kemitraan lainnya	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Timah (Persero) Tbk Perubahan Pengelolaan	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/61/LH/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 22 Mei 2017



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
104	2017	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Instalasi Karantina Hewan (IKH) Pengamanan Maksimum Pulau Naduk seluas ± 206,23 Ha di Desa Petaling, Kecamatan Selat Nasik, Kab. Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/64/LH/DPMPTSP/ 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Mei 2017; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/65/LH/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 31 Mei 2017
105	2017	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Embung Jernang dengan daya tampung embung sebesar 510.383,59 m ³ di Desa Batu Betumpang, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VIII Prov. Bangka Belitung Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/66/LH/DPMPTSP/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Mei 2017; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/67/LH/DPMPTSP/ 2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 31 Mei 2017



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
106	2017	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Jalan Angkut Produksi dan Peningkatan Dermaga Terminal Khusus Tanjung Resing untuk Menunjang Kegiatan Operasional Kebun dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan luas areal jalan 4,5 Ha (Kawasan Hutan : 3,92 Ha dan areal peruntukan lain : 0,58 Ha) dan luas areal terminal khusus (APL) : 14,96 Ha di Desa Dendang, Kec. Dendang, Kab. Belitim	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sahabat Mewah Makmur	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/74/LH/DPMPTSP/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 14 Juni 2017; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/75/LH/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 14 Juni 2017
107	2017	DPLH	kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 529,93 ha di Desa Berang-Ibul dan Pelangas, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat dan Desa Balunijuk dan Merawang, Kecamatan Merawang serta Desa Air Duren-Bukit Tabir, Kecamatan Pemali, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Tata Hampanan Eka Persada	- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/734/DLH/2017 tentang Rekomendasi atas DPLH kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT. THEP di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka, tanggal 14 Juni 2017; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						188.4/76/LH/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 14 Juni 2017
108	2017	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambahan Kapasitas Produksi Pembangkit PLTD Koba dari 8.836 KW menjadi 13.854 KW dan PLTD Selat Nasik dari 400 KW menjadi 2.670 KW di Jalan Listrik Nomor 1, Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dan Kelurahan Selat Nasik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung Sektor Pembangkitan Bangka Belitung	- Surat Rekomendasi Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/85/DPMPTSP/2017 tentang Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 25 Juli 2017; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/86/LH/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 25 Juli 2017



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
109	2017	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di di Laut Pasir Padi, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang berupa perubahan penggunaan kapal isap dengan metode Bore Hole Mining (BHM) (2 Unit) yang operasinya mampu mencapai target solid sebesar 60.000 m3/bulan dan tidak melakukan cut and fill pada dasar laut dengan luas 238,84 Ha	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Stanindo Inti Perkasa	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/94/LH/DPMPTSP/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 9 Agustus 2017; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/95/LH/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 9 Agustus 2017
110	2017	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Jl. Raya Pangkalpinang-Sungailiat Km 18,5, Desa Merawang No. 449, Kec. Merawang, Kab. Bangka berupa rencana perubahan status badan usaha CV. Keranji Jaya Mandiri PT. Kijang Jaya Mandiri, pembangunan dan peningkatan tanur terpasang dari 6.000 ton/tahun menjadi 11.700 ton/tahun, peningkatan luas areal dari 2,3 ha menjadi 12,4 Ha dan	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Kijang Jaya Mandiri	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/114/LH/DPMPTSP/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 30 September 2017; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/115/LH/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 30 September 2017



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			perubahan teknologi tanur bakar menjadi tanur listrik			
111	2017	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah Jl. Air Mawar Dalam RT. 001, Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kawasan Industri Ketapang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh CV Tiga Sekawan berupa rencana perubahan kapasitas tanur terpasang dari 3.500 ton/tahun menjadi 6.900 ton/tahun dan perubahan jenis tanur bakar menjadi tanur listrik	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	CV. Tiga Sekawan	<ul style="list-style-type: none">- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/119/LH/DPMPTSP/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Oktober 2017;- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/120/LH/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 11 Oktober 2017



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
112	2017	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Laut dengan luas 143 ha di Laut Penyusuk, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan kepemilikan dari PT. Sentra Tin Indo menjadi PT. Sentra Tin Indo Sentosa	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sentra Tin Indo Sentosa	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/121/LH/DPMPTSP/2017 Tentang Izin Lingkungan, tanggal 11 Oktober 2017
113	2017	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Laut dengan luas 57 ha di Laut Penyusuk, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan kepemilikan dari PT Sentra Tin Indo menjadi PT Sentra Tin Indo Makmur	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sentra Tin Indo Makmur	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/122/LH/DPMPTSP/2017 Tentang Izin Lingkungan, tanggal 11 Oktober 2017
114	2017	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Laut dengan luas 118,61 ha di Laut Bubus, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan kepemilikan dari PT.	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sentra Tin Indo Cemerlang	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/123/LH/DPMPTSP/2017 Tentang Izin Lingkungan, tanggal 11 Oktober 2017



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Sentra Tin Indo menjadi PT. Sentra Tin Indo Cemerlang			
115	2017	DELH	Usaha dan/atau Kegiatan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Nusantara Sungailiat dengan jumlah estimasi volume yang dikeruk pada alur muara sungai dan perairan laut sungailiat sebesar 34.299,040 m ³ dan jumlah estimasi volume yang dikeruk pada alur dan kolam pelabuhan perikanan nusantara sungailiat sebesar 900.000 m ³	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT Pulomas Sentosa	- Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/1249/DLH/2017 tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), tanggal 26 Oktober 2017; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/131/LH/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 2 November 2017
116	2017	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah Jl. Air Mawar Dalam RT. 001, Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kawasan Industri Ketapang, Kota Pangkalpinang, Provinsi	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Rajehan Ariq	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/133/LH/DPMPTSP/2017 Tentang Izin Lingkungan, tanggal 7 November 2017



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Kepulauan Bangka Belitung oleh CV Tiga Sekawan berupa rencana perubahan kepemilikan dari CV. Tiga Sekawan menjadi PT. Rajehan Ariq			
117	2017	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Bandara Depati Amir di Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka dan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Angkasa Pura II	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44 /196/ BLHD/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 26 Maret 2012; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/163/LH/DPMPTSP/ 2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 28 Desember 2017
118	2017	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peleburan dan Pemurnian Timah (Smelter) di Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	CV. Venus Inti Perkasa	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/255.T/ BLHD / 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 23 April 2012; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/165/LH/DPMPTSP/ 2017



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						tentang Izin Lingkungan, tanggal 28 Desember 2017
119	2017	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Khusus seluas 0,3 Ha di Desa Gantong, Kecamatan Gantong, Kabupaten Belitung Timur	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Hero Progres Internasional	- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/620/BLHD/2012 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL, tanggal 24 Juli 2012; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/164/LH/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 28 Desember 2017
120	2018	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Timah Lepas Pantai (Offshore) dengan luas 247 Hektar di Laut Rambat, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat berupa perubahan kepemilikan dari PT. Sarana Marindo menjadi PT. Jelajah Marindo Persada	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Jelajah Marindo Persada	Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/06/LH/DPMPTSP/2018 Tentang Izin Lingkungan, tanggal 31 Januari 2018



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
121	2018	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah di laut dengan metode Bore Hole dengan luas area 108.753 Ha di Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Timah (Persero) Tbk	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/23/LH/DPMPTSP/2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 21 Februari 2018; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/24/LH/DPMPTSP/2018 tentang Izin Lingkungan, tanggal 21 Februari 2018
122	2018	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai (Offshore) dengan luas 778 Hektar di Laut Penganak, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Rencana perubahan kepemilikan dari PT Goshen Bangka Mulia menjadi PT. Agung Persada	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Agung Persada Sejahtera	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/26/LH/DPMPTSP/2018 Tentang Izin Lingkungan, tanggal 26 Februari 2018



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
123	2018	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai (Offshore) dengan luas 3.295 Hektar di Laut Rebo, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Rencana perubahan kepemilikan dari PT Goshen Bangka Mulia menjadi PT. Permata Indah Menumbing	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Permata Indah Menumbing	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/27/LH/DPMPTSP/2018 Tentang Izin Lingkungan, tanggal 26 Februari 2018
124	2018	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai dengan luas 200 Hektar di Laut Pasir Padi, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan kepemilikan dari PT. Tinindo Inter Nusa menjadi PT. Tin Industri Nasional	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Tin Industri Nasional	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/35/LH/DPMPTSP/2018 Tentang Izin Lingkungan, tanggal 05 Maret 2018
125	2018	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai (Offshore) dengan luas 2.099 Hektar di Laut Sebagian, Kecamatan Simpang	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Tin Industri Abadi	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/36/LH/DPMPTSP/2018 Tentang Izin Lingkungan, tanggal 05 Maret 2018



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan kepemilikan dari PT Tinindo Inter Nusa menjadi PT Tin Industri Abadi			
126	2018	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Desa Pasir Putih, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan kapasitas tanur terpasang dari 4 x 6 ton/heat menjadi 20 ton/hari (1 x 20 ton/hari) dan perubahan teknologi tanur bakar menjadi tanur listrik	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Lautan Harmonis Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/41/LH/DPMPTSP/2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 26 Maret 2018; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/42/LH/DPMPTSP/2018 tentang Izin Lingkungan, tanggal 26 Maret 2018



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
127	2018	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Jl. TPA Kenanga RT 01 Lingkungan Air Kenanga, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan kepemilikan dari CV. Dua Sekawan menjadi PT Masbro Alam Stania dan perubahan jenis tanur dari tanur bakar menjadi tanur listrik dengan kapasitas produksi tetap 3.500 ton/tahun serta perubahan unit genset dari 2 unit genset kapasitas @ 150 kVA menjadi 2 unit genset kapasitas @ 1.100 kVA	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Masbro Alam Stania	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/54/LH/DPMPTSP/2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 30 April 2018; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/55/LH/DPMPTSP/2018 tentang Izin Lingkungan, tanggal 30 April 2018
128	2018	AMDAL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Pabrik Peleburan Bijih Timah (Smelter) Di Kota Pangkalpinang berupa perubahan kepemilikan dari PT Alam Lestari Kencana menjadi PT Mitra Sukses Globalindo	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Mitra Sukses Globalindo	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/58/LH/DPMPTSP/2018 Tentang Izin Lingkungan, tanggal 30 April 2018



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
129	2018	UKL - UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 70 kV Dukong – Manggar dan Gardu Induk Terkait di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan	- Surat Rekomendasi Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/56/DPMPTSP/2018 tentang Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 30 April 2018; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/57/LH/DPMPTSP/2018 tentang Izin Lingkungan, tanggal 30 April 2018
130	2018	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Desa Pasir Putih, Kec. Tukak Sadai, Kab. Bangka Selatan berupa rencana perubahan kepemilikan dari CV Sabang Tin Industries menjadi PT Rajawali Rimba Perkasa dan perubahan peningkatan kapasitas tanur terpasang 28 ton/hari menjadi 43 ton/hari serta perubahan teknologi tanur bakar menjadi tanur listrik	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Rajawali Rimba Perkasa	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/60/LH/DPMPTSP/2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 07 Mei 2018; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/61/LH/DPMPTSP/2018 tentang Izin Lingkungan, tanggal 07 Mei 2018



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
131	2018	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan pengerukan pasir laut seluas 1.800 Ha di Perairan Selat Lepar, Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan berupa perubahan judul dokumen lingkungan hidup dari pendalaman alur pelayaran pelabuhan sadai menjadi pengerukan pasir laut serta perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Mitra Bangka Resources	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/69/LH/DPMPTSP/2018 Tentang Izin Lingkungan, tanggal 31 Mei 2018
132	2018	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pabrik Peleburan Timah di Dusun Kelekak Datuk, Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung berupa rencana perubahan penggunaan alat-alat produksi	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Babel Surya Alam Lestari	<ul style="list-style-type: none">- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/73.A/LH/DPMPTSP/2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 7 Juni 2018;- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/73.B/LH/DPMPTSP/2018 tentang Izin Lingkungan, tanggal 7 Juni 2018



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
133	2018	UKL-UPL	Rencana Usaha dan/atau kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Bukan Logam (Zirkon dan Kuarsa) di Jl. Ketapang Kawasan Industri RT/RW. 01/01, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Megah Mineral Sejahtera	- Surat Rekomendasi Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/74/DPMPTSP/2018 tentang Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 08 Juni 2018; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/75/LH/DPMPTSP/2018 tentang Izin Lingkungan, tanggal 08 Juni 2018
134	2018	DELH	Usaha dan/atau kegiatan Ruas-Ruas Jalan yang telah beroperasi (Eksisting), sepanjang 570,56 Km di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	- Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/693/DLH/2018 tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), tanggal 14 Mei 2018; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/65/LH/DPMPTSP/2018 tentang Izin Lingkungan, tanggal 25 Mei 2018



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
135	2018	UKL-UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Air Anyir - Pangkalpinang 2 dan GI 150 kV Pangkalpinang 2, di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumbagsel	- Surat Rekomendasi Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/105/DPMPTSP/2018 tentang Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 20 September 2018; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 8120003820135, tanggal 20 September 2018
136	2018	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Timah (Smelter) di Kawasan Industri Jelitik, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka berupa rencana perubahan teknologi dari 5 tanur pantul menjadi 2 tanur pantul dan 3 tanur listrik, perubahan peningkatan sistem pengelolaan limbah domestik dan sirkulasi air proses serta pemisahan kajian smelter dan tambang dari dokumen AMDAL sebelumnya	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Refined Bangka Tin	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/120/LH/DPMPTSP/2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 21 November 2018; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/121/LH/DPMPTSP/2018 tentang Izin Lingkungan, tanggal 21 November 2018



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			(terpadu) menjadi tersendiri/terpisah			
137	2019	Amdal	Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Lepas Pantai dengan luas 258 Hektar di Laut Bubus, Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, berupa perubahan kepemilikan dari PT Sarana Marindo menjadi PT Putera Sarana Shakti	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT Putera Sarana Shakti	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/05/LH/DPMPTSP/2019 tentang Izin Lingkungan, tanggal 15 Januari 2019
138	2019	Amdal	Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan Penambangan Bahan Galian Timah Lepas Pantai (Offshore) dengan luas 108 Hektar di Laut Sungai Belinyu, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, berupa perubahan kepemilikan dari PT Sarana Marindo menjadi PT Lautan Sarana Mandiri	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT Lautan Sarana Mandiri	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/22.a/LH/DPMPTSP/2019 tentang Izin Lingkungan, tanggal 29 Maret 2019



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
139	2019	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah (smelter) di Jalan Raya Ketapang, RT.001/001, Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kawasan Industri Ketapang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan peningkatan kapasitas tanur terpasang yang semula 15.000 ton/tahun dengan menggunakan 6 unit tanur bakar menjadi 20.000 ton/tahun dengan menggunakan 6 unit tanur bakar dan dengan menambah 2 unit tanur listrik, peningkatan luas areal yang semula 5.740 m ² menjadi 58.825 m ² dan peningkatan luas bangunan yang semula 3.312 m ² menjadi 8.526 m ²	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sariwiguna Bina Sentosa	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/22.b/LH/DPMPTSP/2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 29 Maret 2019; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/22.c/LH/DPMPTSP/2019 tentang Izin Lingkungan, tanggal 29 Maret 2019



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
140	2019	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah (smelter) yang berada di Jalan Ketapang Raya, Kawasan Industri Ketapang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, berupa rencana perubahan kepemilikan dari PT. Bangka Timah Utama Sejahtera menjadi PT Mitra Sukses Globalindo dan perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yaitu perubahan kapasitas tanur bakar terpasang sebesar 3.000 Ton/Tahun dan penambahan tanur listrik dengan kapasitas terpasang sebesar 12.000 Ton/Tahun	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Mitra Sukses Globalindo	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/39/LH/DPMPTSP/2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Mei 2019; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/40/LH/DPMPTSP/2019 tentang Izin Lingkungan, tanggal 31 Mei 2019



141	2019	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	<p>Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan pertambangan timah di Prov. Kep. Bangka Belitung berupa perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yaitu:</p> <p>1. Penambangan Timah di darat di Pulau Bangka dan Pulau Belitung, yang kegiatannya berupa:</p> <p>a) Tambang Kecil Terintegrasi (TKT) menggunakan bore hole mining</p> <p>b) Pengoperasian gudang bijih timah sementara yang selanjutnya disebut stasiun pengumpul</p> <p>c) Pengoperasian gudang biji timah</p> <p>2. Penambangan timah di perairan laut di Pulau Bangka, meliputi:</p> <p>a) Kapal produksi yang peralatan pencuciannya menjadi satu dengan peralatan penambangan</p> <p>b) Kapal produksi yang peralatan pencuciannya terpisah dengan peralatan penambangan</p>	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT Timah, Tbk	<p>- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/43/LH/DPMPTSP/2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Mei 2019;</p> <p>- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/44/LH/DPMPTSP/2019 tentang Izin Lingkungan, tanggal 31 Mei 2019</p>
-----	------	---------------------------------	--	---	---------------	---



			<p>3. Pengolahan bijih timah dengan sistem mekanik di tambang darat Pulau Bangka dan Belitung</p> <p>4. Pengolahan bijih timah dengan sistem basah dan kering di PPBT Pulau Bangka dan Pulau Belitung meliputi:</p> <p>a) PPBT di Muntok, di Jebus dan Tanjung Ular Kabupaten Bangka Barat</p> <p>b) PPBT di Pemali, di Batu Rusa dan Belinyu Kabupaten Bangka</p> <p>c) PPBT di Kabupaten Bangka Tengah</p> <p>d) PPBT di Toboali Kabupaten Bangka Selatan</p> <p>e) PPBT di Selingsing Kabupaten Belitung Timur</p> <p>5. Pembangunan dan pengoperasian Fuming dan Ausmelt di Unmet Muntok Kabupaten Bangka Barat, berupa:</p> <p>a) Pembangunan dan pengoperasian Fuming</p> <p>b) Pembangunan dan pengoperasian Ausmelt</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			<p>6. Pembangunan dan pengoperasian PPBT dan peleburan di Kabupaten Belitung Timur, yang kegiatannya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Pembangunan dan pengoperasian PPBT (Pusat Pencucian Bijih Timah)b) Pembangunan dan pengoperasian peleburan bijih timahc) Laboratorium			
--	--	--	---	--	--	--



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
142	2019	Amdal	Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Timah Lepas Pantai (Offshore) dengan luas 30 Hektar di Laut Danta, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka berupa perubahan kepemilikan dari PT Sarana Marindo menjadi PT Marindo Sukses Samudera	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Marindo Sukses Samudera	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/45/LH/DPMPTSP/2019 tentang Izin Lingkungan, tanggal 29 Maret 2019
143	2019	UKL-UPL	Rencana Usaha dan/atau kegiatan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Kelapa-Belinyu serta Gardu Induk 150 kV Belinyu di Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat dan Kec. Bakam dan Kec. Riau Silip, Kab. Bangka	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Rekomendasi Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/48/DPMPTSP/2019 tentang Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 17 Juni 2019; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 8120003820135, tanggal 17 Juni 2019



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
144	2019	Amdal	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Timah (Smelter) di Kawasan Industri Jelitik, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Putera Sarana Shakti	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/59/LH/DPMPTSP/2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 26 Juli 2019; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/70/LH/DPMPTSP/2019 tentang Izin Lingkungan, tanggal 26 Juli 2019
145	2019	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Usaha dan/atau kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah (smelter) di Jalan Ketapang Raya, Kawasan Industri Ketapang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang berupa perubahan kepemilikan dari PT. Bangka Putra Karya menjadi CV Venus Inti Perkasa dan perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang meliputi peningkatan kapasitas tanur terpasang (total) : 25.000 ton/tahun, penggunaan tanur tetap (tanur bakar) kapasitas	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	CV. Venus Inti Perkasa	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/69/LH/DPMPTSP/2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 2 Agustus 2019; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/70/LH/DPMPTSP/2019 tentang Izin Lingkungan, tanggal 2 Agustus 2019



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			terpasang : 11.000 ton/tahun dan penambahan tanur listrik (kapasitas terpasang) : 14.000 ton/tahun			
146	2019	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah (smelter) di Jl. TPA Kenanga Permai, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka berupa rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang meliputi rencana perubahan penggantian 2 unit tanur bakar menjadi 2 unit tanur listrik, peningkatan kapasitas tanur terpasang dari 3.000 ton/tahun menjadi 12.000 ton/tahun dan durasi operasi 1 x	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Artha Cipta Langgeng	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/71/LH/DPMPTSP/2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 2 Agustus 2019; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/72/LH/DPMPTSP/2019 tentang Izin Lingkungan, tanggal 2 Agustus 2019



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			18 jam/hari menjadi 2 x 12 jam/hari			
147	2019	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Timah (Smelter) di Kawasan Industri Jelitik, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang meliputi perubahan penggantian 2 unit tanur pantul menjadi 2 unit tanur listrik.	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Refined Bangka Tin	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/116/LH/DPMPTSP/2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 22 Oktober 2019; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/117/LH/DPMPTSP/2019 tentang Izin Lingkungan, tanggal 22 Oktober 2019
148	2019	UKL-UPL	Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan Tambak Udang Vannamei di Jalan Raya Koba, Desa Penyak, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. SHRIMPI	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/118/LH/DPMPTSP/2019 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 25 Oktober 2019; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						9120104450782, tanggal 25 Oktober 2019
149	2020	DELH	Usaha dan/atau kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Kelurahan Air Itam, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Stanindo Inti Perkasa	- Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/181/DLH/2020 tentang Pengesahan DELH, 20 Januari 2020; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/007/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan, tanggal 27 Januari 2020
150	2020	Adendum ANDAL dan RKL-RPL Tipe B	Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang meliputi perubahan penggunaan metode carbon, dioxide (CO ₂) racker dan metode static expansion pada penambangan	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Timah, Tbk	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/008/LH/DPMPTSP/2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 27 Januari 2020; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/009/LH/DPMPTSP/2020



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			timah di darat (TN-TSK/TK) di Desa Paku, Kec. Payung, Kab. Bangka Selatan dan Desa Tempilang, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat serta Sambung Giri, Kec. Merawang, Kab. Bangka			tentang Izin Lingkungan, tanggal 27 Januari 2020
151	2020	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname, Luas Area ± 48 Ha di Desa Penyak, Kec. Koba, Kab Bangka Tengah	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Anugerah Laut Bangka	- Surat Keputusan Kepala DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/010/LH/DPMPSTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 27 Januari 2020; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 9120104522995, tanggal 27 Januari 2020



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
152	2020	AMDAL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Balunijuk (UBB) – Pelempang sepanjang ± 34,3 Km di Kota Pangkalpinang dan Kab. Bangka	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/012/DPMPTSP/2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Januari 2020; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/013/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan, tanggal 31 Januari 2020
153	2020	AMDAL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Trans Belitung sepanjang 357,357 Km di Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/021/DPMPTSP/2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 18 Februari 2020; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/024/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan, tanggal 18 Februari 2020



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
154	2020	AMDAL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Pangkalpinang – Batu Beriga – Sadai sepanjang 190 Km di Kota Pangkalpinang, Kab. Bangka Tengah dan Kab. Bangka Selatan	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/023/DPMPTSP/2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 18 Februari 2020; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/024/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan, tanggal 18 Februari 2020
155	2020	AMDAL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Trans Bangka sepanjang 447,49 Km di Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka, Kab. Bangka Tengah dan Kab. Bangka Selatan	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/025/DPMPTSP/2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 18 Februari 2020; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/026/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan, tanggal 18 Februari 2020



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
156	2020		Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah di Kota Pangkalpinang berupa perubahan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan yaitu perubahan penanggung jawab		PT. Rajehan Ariq	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/045/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan, tanggal 11 Maret 2020
157	2020	DPLH	Usaha dan/atau kegiatan Perkantoran, Pembenihan, Produksi dan Pembesaran Udang pada lahan seluas ± 62.500 m2 di Desa Pasir Putih, Kec. Tukak Sadai, Kab. Bangka Selatan	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	UPTD BALAI PEMULIAAN IKAN, DKP PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	<ul style="list-style-type: none">- Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/1606/DLH/2019 tentang Pengesahan DPLH, tanggal 26 Desember 2019;- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/044/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan, tanggal 11 Maret 2020



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
158	2020	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname ± 16,7 Ha dan ± 6,5 Ha dengan total ± 23,2 Ha di Desa Bakit, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Prov. Kep Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. BAKIT INDAH MANDIRI	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/051/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 08 April 2020; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 9120218001506, tanggal 08 April 2020
159	2020	AMDAL	Rencana usaha dan/atau kegiatan PLTU-4 Bangka Belitung (PLTU Suge Belitung) dengan kapasitas 2 x 16,5 MW dan luas lahan 20 Ha di Dusun Suge, Desa Pegantungan, Kec. Badau, Kab. Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Pembangkitan Jawa Bali (PT. PJB) Unit Bisnia Jasa Operation & Maintenance Luar Jawa – 2	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/052/DPMPTSP/2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 09 April 2020; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 8120002971007, tanggal 09 April 2020



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
160	2020	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname dengan Luas Area \pm 40.000 m ² di Desa Tukak, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	Tukimin Foeng (Perseorangan)	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/054/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 17 April 2020; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 9120401733514, tanggal 17 April 2020
161	2020	UKL-UPL Non OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular dengan panjang dermaga 80 m dan luas dermaga 800 m ² di Dusun Tj. Ular, Desa Air Putih, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/056/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 06 Mei 2020; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/057/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan, tanggal 06 Mei 2020



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
162	2020	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname \pm 30,3 Ha di Dusun I Rambat, Desa Rambat, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Hoki Alam Semesta Jaya	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/058/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 06 Mei 2020; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 9120201581864, tanggal 06 Mei 2020
163	2020	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Eko-Wisata seluas \pm 15 Ha dan Budidaya Tambak Udang Vaname seluas \pm 10,98 Ha dengan luas total \pm 25,98 Ha di Desa Penyak, Kecamatan Koba, Kab. Bangka Tengah	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Berkah Bumi Laut Sentosa	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/063/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 29 Mei 2020; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 9120201762031, tanggal 29 Mei 2020



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
164	2020	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangun Dermaga Jetty (Tipe Dolpin) (Sarana Prasarana Terminal Tengki Penampungan BBM Solar Industri) dengan panjang trestle dermaga ± 215 m, panjang dermaga ± 174 m, kedalaman tambatan – 6,5 LWS dan bobot maksimal kapal sandar 15.000 DWT di Jl. Yos Sudarso, Kawasan Pelabuhan Tanjung Gudang, Desa Air Jangkung, Kec. Belinyu, Kab. Bangka	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Rahardja Wirasakti Jaya Mandiri	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/065/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 02 Juni 2020; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 9120017021573, tanggal 02 Juni 2020
165	2020	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname ± 12,2934 Ha di Dusun Merbau, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Prov Kepulauan Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Minabahari Merbau Mandiri	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/066/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 05 Juni 2020; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 9120109821159, tanggal 05 Juni 2020



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
166	2020	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname ± 6,99 Ha di Desa Batu Beriga, Kec. Lubuk Besar, Kab. Bangka Tengah	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	CV. Gunung Prima	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/071/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 30 Juni 2020; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 8120216131665, tanggal 30 Juni 2020
167	2020	DPLH	Usaha dan/atau kegiatan Terminal Khusus (Tersus) dengan fasilitas dermaga dengan bentuk konstruksi massif dengan panjang dermaga 190 m dan luas 1.900 m ² di Tanjung Batu Burok, Desa Mengkubang, Kec. Damar, Kab. Belitung Timur	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Alfindo Asia Minerals	- Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/752/DLH/2020 tentang Pengesahan DPLH, tanggal 18 Juni 2020; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/070/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan, tanggal 23 Juni 2020



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
168	2020		Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Jalan Ketapang RT/RW 19/02, Kel. Bacang, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang berupa perubahan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan yaitu perubahan kepemilikan dari PT. DS. Jaya Abadi menjadi PT. Stanindo Inti Perkasa		PT. Stanindo Inti Perkasa	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/074/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan, tanggal 14 Juli 2020
169	2020	DELH	Usaha dan/atau kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Ikutan Timah (Peningkatan Kadar Zirkon dan Ilmenit) dengan luas lahan 18.293 m2 di Kawasan Industri Ketapang, Kel. Air Mawar, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Indomas Bara Prima	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/212/DLH/2020 tentang Pengesahan DELH, tanggal 24 Januari 2020; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/081/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan, tanggal 04 Agustus 2020



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
170	2020	DELH	Usaha dan/atau kegiatan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kalian dengan fasilitas dermaga bentuk konstruksi sheet pile dengan luas dermaga ± 17.806 m2 dan luas pelabuhan 25.855 m2 di Jalan Raya Tanjung Kalian, Kec. Muntok, Kab. Babar	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	<ul style="list-style-type: none">- Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/482/DLH/2020 tentang Pengesahan DELH, tanggal 11 Maret 2020;- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/080/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan, tanggal 04 Agustus 2020



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
171	2020	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah (smelter) di Dusun Padang, Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang meliputi rencana perubahan penambahan 2 unit tanur listrik, penambahan kapasitas produksi 10.000 ton/tahun, penggantian genset kapasitas 2 x 275 KVA dengan genset yang berkapasitas 2 x 1.250 KVA dan penambahan sumber daya energi listrik,	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Menara Cipta Mua	<ul style="list-style-type: none">- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/091/LH/DPMPTSP/2020 Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/1025/BLHD/2015 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Mill-Plant dan Smelter) di Kabupaten Belitung Timur oleh Perseroan Terbatas (PT.) Menara Cipta Mulia, tanggal 23 September 2020;- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/093/DPMPTSP/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/68.a/LH/BP2TPM/2015 tentang Pemberian Izin Lingkungan Rencana Usaha



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Mill-Plant dan Smelter) di Kabupaten Belitung Timur oleh Perseroan Terbatas (PT.) Menara Cipta Mulia, tanggal 23 September 2020



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
172	2020	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang seluas ± 36,52 hektar (dengan rincian luas lahan darat 36 hektar dan luas area laut 0,52 hektar) di Jalan Raya Air Anyir (Lintas Timur), Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kep Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Babel Citra Mandiri	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/092/LH/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 23 September 2020; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 912031309288, tanggal 23 September 2020
173	2020		Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah di Desa Kayu Besi, Kec. Namang, Kab. Bangka Tengah berupa perubahan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan yaitu perubahan kepemilikan dari CV. Bangka Timah Makmut menjadi PT. Fataba Pasifik Kopan		PT. Fataba Pasifik Kopan	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/099/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan, tanggal 07 Oktober 2020



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
174	2020	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang seluas ± 31,86 Hektar (dengan rincian luas lahan darat ± 31,61 Hektar dan luas area laut 0,26 Hektar) di Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	CV. Bangka Sukses Bersama	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/104/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 16 Oktober 2020; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 9120411112504, tanggal 16 Oktober 2020
175	2020	Laporan Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah berupa Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) yaitu perubahan jumlah ponton isap produksi (PIP) yang beroperasi di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi Perseroan Terbatas (PT) Timah Tbk yang sudah ada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) berlaku sebagaimana tercantum dalam dokumen		PT. Timah Tbk	Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/108/DPMPTSP/2020 Tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/381/BLHD/2009 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Perseroan



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Adendum ANDAL dan RKL-RPL dengan Surat Keputusan Kelayakan Nomor : 188.44/401/BLHD/2015, tanggal 29 Mei 2015 dan Surat Keputusan Izin Lingkungan Nomor : 503/38/LH/BP2TPM/2015, tanggal 19 Juni 2015			Terbatas (PT.) Timah,Tbk, tanggal 26 Oktober 2020
176	2020	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname seluas ± 3,41 Hektar (dengan rincian luas lahan darat 2,99 Hektar dan luas area laut 0,42 Hektar) di Dusun Sika, Desa Tanjung Niur, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Agro Bahari Nusantara	- Surat Keputusan Kepala DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/104/DPMPSTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 16 Oktober 2020; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 9120411112504, tanggal 16 Oktober 2020



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
177	2020	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan Peleburan Bijih Timah (Sn) di Jl. TPA Kenanga, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka berupa perubahan usaha dan/atau kegiatan berpengaruh terhadap lingkungan	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Artha Cipta Langgeng	<ul style="list-style-type: none">- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/119/DPMPTSP/2020 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/471/LH/2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Peleburan Bijih Timah (Sn) PT. Artha Cipta Langgeng, tanggal 03 Desember 2020;- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/120/DPMPTSP/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Izin Lingkungan Kegiatan Peleburan Bijih Timah (Sn) PT. Artha Cipta Langgeng, tanggal 03 Desember 2020



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
178	2020	UKL-UPL Non OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Daerah Irigasi Sungai Buleng seluas ± 688,01 Ha di Desa Pangkalniur dan Desa Banyuasin, Kec. Riau Silip, Kab. Bangka dan Desa Kelapa, Beruas dan Tuik, Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/117/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 03 Desember 2020; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/118/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 03 Desember 2020
179	2020	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname seluas ± 30,20 Hektar (dengan rincian luas lahan darat ± 30 Hektar dan luas area laut 0,20 Hektar) di Dusun Pesaren, Desa Bintet, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	CV. Gelora Sukses Abadi	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/131/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 15 Desember 2020; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 9120000772479, tanggal 15 Desember 2020



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
180	2020	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname dengan teknologi intensif seluas $\pm 35,8$ Hektar (dengan rincian luas lahan darat $\pm 35,6$ Hektar dan luas area laut 0,20 Hektar) di Desa Sukamandi, Kec. Damar, Kab. Belitung Timur	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Belitung Mina Bahari	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/132/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 23 Desember 2020; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 0281000912494, tanggal 23 Desember 2020
181	2020	UKL-UPL Non OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Dermaga Jetty dengan panjang dermaga 180 m dan lebar dermaga 3 m di Desa Air Menduyung, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/140/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 28 Desember 2020; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/141/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 28 Desember 2020



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
182	2020	UKL-UPL Non OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Dermaga Jetty dengan panjang dermaga 150 m dan lebar dermaga 3 m di Dusun Sukal, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/133/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 28 Desember 2020; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/134/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 28 Desember 2020
183	2020	UKL-UPL Non OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Dermaga Jetty dengan panjang dermaga \pm 150 m dan lebar dermaga \pm 3 m di Desa Tanjung Binga, Kec. Sijuk, Kab. Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/135/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 28 Desember 2020; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/136/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 28 Desember 2020



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
184	2020	UKL-UPL Non OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Dermaga Jetty dengan panjang dermaga ± 93 m dan lebar dermaga 3 m di Desa Tanjung Pura, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/137/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 28 Desember 2020; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/139/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 28 Desember 2020
185	2021	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Laut dengan luas 40 Hektar di Perairan Laut Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Rencana perubahan penciutan/pengurangan luas areal usaha dan/atau kegiatan	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sinar Logindo Alam	Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 188.4/01/DPMPTSP/2021 Tentang Izin Lingkungan, tanggal 20 Januari 2021



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
186	2021	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Laut dengan luas 40 Hektar di Perairan Laut Air Kantung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Rencana perubahan kepemilikan dari PT Sinar Logindo Alam menjadi PT. Sejahtera Logindo Alam	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sejahtera Logindo Alam	Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 188.4/02/DPMPTSP/2021 Tentang Izin Lingkungan, tanggal 20 Januari 2021
187	2021	Laporan Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) yaitu Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah berupa perubahan jumlah ponton isap produksi (PIP) yang beroperasi di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi Perseroan Terbatas (PT.) Timah Tbk yang sudah ada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) berlaku sebagaimana tercantum dalam dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL dengan Surat Keputusan		PT. Timah, Tbk	Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/03/DPMPTSP/2021 Tentang Perubahan Ketujuh atas Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Perseroan Terbatas (PT) Timah,Tbk, tanggal 29 Januari 2021



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Kelayakan Nomor : 188.44/401/BLHD/2015, tanggal 29 Mei 2015 dan Surat Keputusan Izin Lingkungan Nomor : 503/38/LH/BP2TPM/2015, tanggal 19 Juni 2015 serta Surat Keputusan Izin Lingkungan Nomor : 503/108/DPMPTSP/2020, tanggal 26 Oktober 2020			
188	2021	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname dengan teknologi intensif seluas ± 24,28 Hektar (dengan rincian luas lahan darat ± 23,96 Hektar dan luas area laut 0,32 Hektar) di Dusun Sika, Desa Tanjung Niur, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL- UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Budi Agri Sejahtera	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/04/DPMPTSP/2021 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 19 Februari 2021; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 8120004900585, tanggal 19 Februari 2021
189	2021	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan terminal khusus dan stockpile dengan panjang dermaga ± 50 Hektar	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan	PT. Mitra Persada Resources	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/05/DPMPTSP/2001



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			dan lebar ± 10 Hektar, stockpile dengan luas ± 18.000 m ² (1,8 Ha), jalan darat dengan panjang ± 710 m dan lebar ± 10 m di Desa Mapur dan Desa Deniang, Kec. Riau Silip, Kab. Bangka	Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)		tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 19 Februari 2021; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 0264010281855, tanggal 19 Februari 2021
190	2021	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname dengan teknologi intensif seluas $\pm 4,04$ Hektar (dengan rincian luas lahan darat ± 4 Ha dan luas area laut 0,04 Hektar) di Dusun Sika, Desa Tanjung Niur, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Bahari Bio Makmur	Surat Keputusan Kepala DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/06/DPMPSTSP/2021 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 05 Maret 2021
191	2021	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname dengan teknologi intensif seluas 63,22 Hektar (dengan rincian luas lahan darat 62,32 Ha dan luas area laut 0,45 Hektar) di Desa Penyak, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	CV. Gunung Prima	Surat Keputusan Kepala DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/07/DPMPSTSP/2021 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 16 Maret 2021



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
192	2021	AMDAL	Rencana usaha dan/atau kegiatan peningkatan jalan ruas Lumut-Puding Gebak sepanjang $\pm 7,6$ Km di Desa Berbura, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumsel	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/09/DPMPTSP/2021 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 07 Juni 2021
193	2021	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan pemgolahan dan pemurnian bijih timah (Smelter) di Jl. Ketapang Dalam, Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang berupa rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan pada penggunaan alat produksi, kapasitas tanur terpasang dan produksi, penggunaan sumber daya pada genset, penggunaan bahan bakar	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Mutiara Prima Sejahtera	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/08/DPMPTSP/2021 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 07 Juni 2021
194	2021	DPLH	Rencana usaha dan/atau kegiatan kawasan pelabuhan perikanan pantai (PPP) muara Sungai Baturusa dengan luas dermaga $\pm 5,22$ Ha (termasuk perairan ± 1 Ha) dan dengan fasilitas dermaga bentuk	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/10/DPMPTSP/2021 tentang Persetujuan DPLH, tanggal 07 Juli 2021



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			konstruksi sheet pile dengan panjang dermaga 50 m, lebar dermaga 10 m dan panjang trestle 5 m di Jl. PPI, kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang			
195	2021	SPPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan budidaya tambak udang vaname dengan luas 9,5 Ha di Jl. Mayor Syafri Rahman, Kel. Tanjung Ketapang, Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan		CV. Dunia Vaname	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/706/DLHK/2021, tanggal 7 Juli 2021
196	2021	DPLH	Rencana usaha dan/atau kegiatan Operasional Dermaga Tambat Labuh Perahu seluas 200 m ² dengan panjang dermaga 100 meter dan lebar dermaga 2 meter di Dusun Tanjung Berikat, Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/12/DPMPTSP/2021 tentang Persetujuan DPLH, tanggal 14 Juli 2021



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
197	2021	UKL-UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Pelabuhan Pulau Kuil seluas 2,3 Hektar dengan panjang dermaga 112,5 meter dan lebar dermaga 3 meter di Pulau Kuil, Dusun Kuil, Desa Gersik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/13/DPMPTSP/2021 tentang Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 20 Agustus 2021
198	2021	UKL-UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muara Sungai Baturusa dengan luas lahan 5,22 Hektar, luas bangunan 0,9 Hektar dan tinggi bangunan 9 meter di Jalan PPI, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/14/DPMPTSP/2021 tentang Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 20 Agustus 2021



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
199	2021	UKL-UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan budidaya tambak udang vaname dengan teknologi intensif seluas 31,92 Hektar dengan rincian luas lahan darat \pm 31,60 Hektar dan luas area laut \pm 0,32 Hektar di Desa Tanjung Niur, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Fenco Pasifik Indonesia	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/15/DPMPTSP/2021 tentang Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 06 Oktober 2021
200	2021	UKL-UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan budidaya tambak udang vaname dengan teknologi intensif seluas 45,41 Hektar dengan rincian luas lahan darat \pm 45,15 Hektar dan luas area laut \pm 0,26 Hektar di Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	CV. Samudera Terus Jaya	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/16/DPMPTSP/2021 tentang Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 06 Oktober 2021
201	2021	UKL-UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Meditasi Center (Wisata Rohani) seluas 4,89 Hektar di Kawasan Hutan Lindung Bukit Rebo, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat,	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	Yayasan Bangka Alam Lestari	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/17/DPMPTSP/2021 tentang Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Lingkungan Hidup, tanggal 19 Oktober 2021
202	2021	UKL-UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan budidaya tambak udang vaname dengan teknologi intensif seluas 49,29 Hektar di darat dan 3,28 Hektar di perairan ruang laut di Jalan Raya Tanjung Kelumpang, Desa Tanjung Kelumpang, Kecamatan Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Indomakmur Alam Raya	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/18/DPMPTSP/2021 tentang Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 01 November 2021
203	2021	UKL-UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname dengan teknologi intensif dengan luas lahan darat ± 66.55 Ha dan luas area pemanfaatan laut ± 0,35 Ha di Desa Bakit, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Bakit Indah Mandiri	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/19/DPMPTSP/2021 tentang Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 04 November 2021



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
204	2021	UKL-UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname dengan teknologi intensif dengan luas lahan darat 55,76 Ha dan luas area pemanfaatan laut \pm 0,02 Ha di Jl. Pantai Kerasak, Desa Pasir Putih, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	CV. Sumber Vaname Lestari	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/20/DPMPTSP/2021 tentang Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 15 November 2021
205	2022	DELH	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname dengan luas area total 18,407 Ha di Dusun Bintet, Desa Bintet, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Prov. Kep. Babel	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	CV. Mavindo Karya Lestari	Keputusan Kepala DPMPTSP Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/04/DPMPTSP/2022 Tentang : Persetujuan DELH Tanggal : 18 April 2022
206	2022	AMDAL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Kurau di Desa Kurau dan Desa Kurau Barat, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung	Kepala DPMPTSP Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/06/DPMPTSP/2022 Tentang : Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Tanggal : 01 Agustus 2022



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
207	2022	UKL-UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname seluas ± 16 Hektar di Desa Pasir Putih, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kep. Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. BANGKA BELITUNG MARITIM SEJAHTERA	Keputusan Kepala DPMPTSP Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/01/DPMPTSP/2022 Tentang : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanggal : 03 Januari 2022
208	2022	UKL-UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname seluas ± 50 Hektar di Desa Tukak, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	CV. RAJAWALI TUKAK SADAI	Keputusan Kepala DPMPTSP Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/02/DPMPTSP/2022 Tentang : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanggal : 31 Januari 2022
209	2022	UKL-UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname dengan luas lahan 29 Ha di Desa Pasir Putih, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Prov. Kep. Babel	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Babasel Mitra Abadi	Keputusan Kepala DPMPTSP Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/03/DPMPTSP/2022 Tentang : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanggal : 16 Maret 2022



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
210	2022	UKL-UPL	Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dengan luas bangunan ± 10.000 m2, luas bangunan ± 300 m2, dan tinggi bangunan ± 10 m2 di Jalan Pasir RT 005, RW 002, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Provinsi Kep Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Sarana Telaga Mandiri	Kepala DPMPSTSP Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/05/DPMPSTSP/2022 Tentang : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanggal : 17 Mei 2022
211	2022	UKL-UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname dengan teknologi semi intensif seluas lahan 45,77 Ha (dengan rincian luas lahan darat ± 45,54 Ha dan luas area laut 0,23 Ha) Di Jln Raya Teluk Gembira RT. 004, RW. 002 di Desa Membalong, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Bivanky Jaya Sejahtera	Kepala DPMPSTSP Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/07/DPMPSTSP/2022 Tentang : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanggal : 14 Oktober 2022
212	2022	UKL-UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Pabrik Pemisah Udara (Air Separation Plant) dengan luas lahan ± 2.500 m2 dan kapasitas produksi terpasang sebesar 14.400.000 Nm3/Tahun Di Komplek Peleburan Timah, Jl Raya Peltim No. 1, RT. 001, RW.001 Kel. Sungai Baru, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Samator Gas Industri	Kepala DPMPSTSP Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/08/DPMPSTSP/2022 Tentang : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanggal : 14 Oktober 2022



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
213	2022	SPPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname seluas 3,30 Hektar di Desa Tanjung Nyiur, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kep. Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup	PT AGRO BAHARI INTERNASIONAL	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 660/86/DLHK Tentang : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Tanggal : 17 Januari 2022 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 660/86/DLHK Tentang : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Tanggal : 17 Januari 2022
214	2022	SPPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname seluas 2,98 Hektar di Kelurahan Benteng Kota, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kep. Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup	FA TERUS JAYA	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 660/87/DLHK Tentang : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Tanggal : 17 Januari 2022



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
215	2022	SPPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname seluas 7,76 Hektar di Kelurahan Benteng Kota, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kep. Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup	PT BANGKA AQUA CULTURE	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 660/88/DLHK Tentang : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Tanggal : 17 Januari 2022
216	2022	SPPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname dengan teknologi intensif dengan luas lahan efektif 7,88 Ha dan luas area pemanfaatan laut 0,11 Ha di Dusun Bukit Beting, Desa Bintet, Kec. Belinyu, Kab. Bangka,, Prov. Kep. Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup	CV. Beting Tambak Belijong	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 660/1517DLHK/2022 Tentang : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Tanggal : 27 Januari 2022
217	2022	SPPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname dengan luas lahan 9,2 Ha di Jalan Raya Teluk Limau, Desa Teluk Limau, Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat, Prov. Kep. Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup	PT. Emas Sempurna Anugerah	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 660/357/DLHK/2022 Tentang : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Tanggal : 14 Februari 2022



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
218	2022	SPPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Penggalian Pasir di Jalan Simpang Jurung Kep. Babel. Merawang Jurung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup	CV. Bangka Utama Karya	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung Tentang : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Tanggal : 24 Januari 2022
219	2022	SPPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Penggalian Pasir di Jalan Simpang Jurung Kep. Babel. Merawang Jurung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup	CV. Bangka Utama Karya	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung Tentang : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Tanggal : 24 Januari 2022
220	2022	SPPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Penggalian Pasir di Jalan Simpang Jurung Kep. Babel. Merawang Jurung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup	CV. Bangka Utama Karya	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung Tentang : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Tanggal : 24 Januari 2022

Keterangan:

Sumber: DLHK Babel, 2022



Tabel-42. Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2023

No	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2018	PT. Tata Hampan Eka Persada	Desa Puding, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka	Agroindustri	Penyimpanan Sementara	188.4/04/PY-LB3/DINPMP2KUKM/V/2018	DPLH
2	2017	PT. Forestalestari Dwikarya (Tanjung Kembiri Mill)	Desa Tanjung Kembiri, Kabupaten Belitung	Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Penyimpanan Sementara	188.46/002/KEP/LB3/DMPPTSPP/2017	UKL-UPL
4	2018	PT. Timah, Tbk UPDB-Bidang Pengawasan Tambang dan Pengangkutan Bangka Barat	Kabupaten Bangka Barat	Pertambangan	Penyimpanan Sementara	188.45/269/2.12.1.1/2018	AMDAL
7	2018	PT. Astika Murni Utama	Jln. Yos sudarso no. 302 rt. 007 rw,002 Tanjung Pandan, Belitung	Jasa	Penyimpanan Sementara	188.46/004/KEP/LB3/DPMPTSP/2018	UKL-UPL



No	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	2018	PT. Menara Cipta Mulia	Dusun Padang Desa Mentawak Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	Peleburan dan Pemurnian Timah	Penyimpanan Sementara	503/05/IPSLB3/DPMPTSP/VIII/2018	Adendum ANDAL dan RKL-RPL
13	2018	PT. Refined Bangka Tin	Kawasan Industri Jelitik 33215 Sungailiat Kepulauan Bangka Belitung	Pengolahan Bijih Timah (smelter)	Penyimpanan Sementara	188.4/02/PY-LB3/DINPMP2KUKM/IV/2018	Adendum ANDAL dan RKL-RPL
14	2018	PT. Timah Tbk - Unit Metalurgi	Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat	Pertambangan (Pengolahan dan Pemurnian)	Penyimpanan Sementara	188.45/255/2.12.1.1/2018	UKL-UPL
15	2018	PT. Belitung Energy	Desa Mempaya, Kecamatan Damar, Belitung Timur	Ketenagalistrikan	Penyimpanan Sementara	503/04/IPSLB3/DPMPTSP/II/2018	UKL-UPL
18	2017	PT. Timah Tbk - UPDB Pengawasan Produksi dan Pengangkutan Bangka	Kabupaten Bangka	Pertambangan	Penyimpanan Sementara	188.4/36/PY-LB3/DINLH/VII/2017	
21	2018	PT. Steelindo Wahana Perkasa	Desa Senyubuk, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	Perkebunan, Pengolahan Kelapa Sawit,	Penyimpanan Sementara	503/02/IPSLB3/DPMPTSP/II/2018	AMDAL



No	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan/U saha	Jenis Izin	Nomor SK	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pengolahan CPO, dan Pengolahan Inti Sawit			
22	2017	PT. Sawindo Kencana	Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat	Agroindustri Pabrik Kelapa Sawit	Penyimpanan Sementara	188.45/20.A/2.5.1.1/2017	Adendum ANDAL dan RKL-RPL
26	2018	PT. Belitung Industri Sejahtera	Air Merbau (Jalan Sijuk KM 4) Tanjung Pandan Kabupaten Belitung	Pengolahan Bijih Timah (smelter)	Penyimpanan Sementara	188.46/001/Kep/LB3/DPMPTSP/2018	UKL-UPL
30	2017	PT. Bumi Permai Lestari - PKS Bukit Perak	Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Penyimpanan Sementara	188.45/287/2.12.1.1/2017	AMDAL
33	2017	PT. Gemilang Cahaya Mentari	Desa Tiangtara, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka	Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit	Penyimpanan Sementara	188.4/32/PY-LB3/DINLH/VI/2017	AMDAL
35	2017	PT. Bumi Sawit Sukses Pratama - Palm Oil Mill	Desa Malik, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Penyimpanan Sementara	188.45/219/DPKPLH/2017	UKL-UPL



No	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan/U saha	Jenis Izin	Nomor SK	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
36	2018	PT. Valten Cahaya Anugrah	Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka	Pengelolaan Limbah B3 Kegiatan Pengumpulan Limbah B3	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3	188.4/22/DINLH/2018	UKL-UPL
37.	2021	PT. Sarana Telaga Mandiri Utama	Jalan Pasir, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	Kegiatan Pengumpulan LB3	Izin pengumpulan LB3		UKL-UPL

Keterangan:

Sumber: DLHK Babel, 2022

Tabel-43 Pengawasan Izin Lingkungan(AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung

Tahun : 2022

No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pangkalpinang	2021	PT. STANINDO INTI PERKASA	14/04/2021	Taat
2	Pangkalpinang	2021	PT.BUKIT TIMAH	22/04/2021	Taat
3	Pangkalpinang	2021	PT. MITRA SUKSES GLOBALINDO	4/23/2021	Taat



No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Pangkalpinang	2021	CV. VENUS INTI PERKASA	4/26/2021	Taat
5	Pangkalpinang	2021	PT.INDOMAS BARA	4/26/2021	Tidak Operasional
6	Pangkalpinang	2021	PT.MEGAH MINERAL SEJAHTERA	4/26/2021	Tidak Operasional
7	Pangkalpinang	2021	PT. SARIWIGUNA BINA SENTOSA	4/22/2021	Taat
8	Pangkalpinang	2021	PT.PRIMA TIMAH UTAMA	4/23/2021	Taat
9	Pangkalpinang	2021	PT.COCA COLA DISTRIBUTION INDONESIA	5/4/2021	Taat
10	Pangkalpinang	2021	PT.DEWA PUTRA BANGKA	4/27/2021	Tidak Operasional
11	Pangkalpinang	2021	PT. PELINDO II CABANG PELABUHAN PANGKAL BALAM	4/27/2021	Taat
12	Pangkalpinang	2021	PT.SARIWIGUNA BINA SENTOSA	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat
13	Pangkalpinang	2021	PT. DOK DAN PERKAPALAN AIR KANTUNG UNIT GALANGAN SELINDUNG	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat
14	Pangkalpinang	2021	PT.SUNDALAND INTERNUSA	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat
15	Kabupaten Bangka	2021	PT.BANGKA TIN INDUSTRY	10/28/2021	Taat
16	Kabupaten Bangka	2021	PT. PUTRA BANGKA MANDIRI	11/2/2021	Taat
17	Kabupaten Bangka	2021	PT. INHUTANI V SPHK-BABEL	11/2/2021	Taat
18	Kabupaten Bangka	2021	PT.ISTANA KAWI KENCANA	11/4/2021	Taat
19	Kabupaten Bangka	2021	PT.SEMESTA SURYA PERSADA	11/8/2021	Taat
20	Kabupaten Bangka	2021	PT.MITRA SUKSES GLOBALINDO	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Tidak Operasional
21	Kabupaten Bangka	2021	PT.PLN (PERSERO) PLTU AIR ANYIR	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat



No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	Kabupaten Bangka	2021	PT.MITRA STANIA PRIMA	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat
23	Kabupaten Bangka	2021	PT. PLN (Persero)-PLTD MERAWANG	11/9/2021	Taat
24	Kabupaten Bangka	2021	PT. REFINED BANGKA TIN	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat
25	Kabupaten Bangka	2021	PT. TIMAH (Persero), Tbk. - KETEKNIKAN DAN SARANA (BALAIKARYA)	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat
26	Kabupaten Bangka	2021	PT. TIMAH, Tbk. - UPTP PEMALI	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat
27	Kabupaten Bangka	2021	PT.ARTHA CIPTA LANGGENG	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat
28	Kabupaten Bangka	2021	PT.BANGKA BIOGAS SYNERGY	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat
29	Kabupaten Bangka Tengah	2021	PT. SWARNA NUSA SENTOSA	11/3/2021	Tidak Taat (Sanksi Administrasi)
30	Kabupaten Bangka Tengah	2021	CV. MUTIARA ALAM LESTARI	4/27/2021	Taat
31	Kabupaten Bangka Barat	2021	PT. BANGUN RIMBA SEJAHTERA	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat
32	Kabupaten Bangka Barat	2021	PT. SINAR MUTIARA SEJAHTERA	11/11/2021	Taat
33	Kabupaten Bangka Barat	2021	PT. BAKIT INDAH MANDIRI	9/24/2021	Taat
34	Kabupaten Bangka Selatan	2021	PT.RAJAWALI RIMBA PERKASA	4/21/2021	Taat



No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35	Kabupaten Bangka Selatan	2021	PT.BANGKA BELITUNG MARITIM SEJAHTERA dan PT. SEJAHTERA INDAH PERKASA	2/4/2021	Tidak Taat (Sanksi Administrasi)

Sumber: DLHK, 2023

Tabel-44. Bencana Banjir, Korban, dan Kerugian
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2022

No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kabupaten Bangka Barat	Desa Sinar Sari, Kecamatan Kelapa	Kebakaran	-	-	-	-
2	Kota Pangkalpinang	Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Taman Sari	Banjir	-	-	-	-
		Kelurahan Gedung Nasional, Kecamatan Taman Sari	Banjir	-	-	-	-
		Kelurahan Kampung Seberang, Kecamatan Taman Sari	Banjir	-	-	-	-
		Kelurahan Rawa Bangun, Kecamatan Taman Sari	Banjir	-	-	-	-
3	Kabupaten Bangka Barat	Kelurahan Tanjung, Kampung Tanjung Laut, Kecamatan Mentok	Banjir	-	-	-	-



No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Kota Pangkalpinang	Ruko Tan Express (Ekspedisi) Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui	Kebakaran	-	-	-	-
5	Kabupaten Bangka Barat	Kelurahan Tanjung, Kampung Tanjung Tengah, Kecamatan Mentok	Banjir	-	-	-	-
6	Kabupaten Bangka Barat	Desa Air Limau Kecamatan Mentok	Kebakaran	-	-	-	-
7	Kabupaten Belitung	Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk	Kebakaran	-	-	-	-
8	Kabupaten Belitung	Desa Air Saga, Kecamatan Belitung	Cuaca Ekstrem	-	-	-	-
9	Kabupaten Bangka	Desa Pangkal Niur, Kecamatan Riau Silip	Banjir	-	-	-	-
10	Kota Pangkalpinang	Perairan Karang Miyang, Pasir Padi	Cuaca Ekstrem	-	-	1 orang	-
11	Kabupaten Bangka selatan	Desa Tepus, Kecamatan Air Gegas	Kebakaran	-	-	-	-
12	Kota Pangkalpinang	RT. 05 RW. 02 JL. KAMPUNG MELAYU KEL. BUKIT SARI KEC. GERUNGGANG	Kebakaran	-	-	-	-
13	Kabupaten Bangka Tengah	JL. RAYA DESA KURAU TIMUR KEC. KOB	Kecelakaan Transportasi	-	-	2 orang	-
14	Kabupaten Belitung Timur	Desa Padang, Kecamatan Manggar	Kebakaran	-	-	-	-
15	Kabupaten Belitung	Jl. Raya Tanjung Kelayang, Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk	Karhutla	1,5 Ha	-	-	-



No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	Kabupaten Bangka Tengah	Kelurahan Berok, RT 12, Kecamatan Koba	Karhutla	0,5 Ha	-	-	-
17	Kabupaten Bangka Tengah	Dusun Pal 4, Desa Penyak, Kecamatan Koba	Karhutla	1,5 Ha	-	-	-
18	Kabupaten Bangka Barat	DUSUN III PINANG YANG DESA AIR NYATOH, KEC. SIMPANG TERITIP	Kebakaran	-	-	-	-
19	Kabupaten Bangka Tengah	Desa Arung Dalam Kecamatan Koba	Karhutla	0,5 Ha	-	-	-
20	Kabupaten Belitung	Dusun Teluk Dalam, Desa Juru Seberang, Kecamatan Tanjungpandan	Cuaca Ekstrim	-	-	1 Orang	-
21	Kota Pangkalpinang	JL. TANJUNG BUNGA KEL. AIR ITAM KEC. BUKIT INTAN	Karhutla	0,2 Ha	-	-	-
22	Kota Pangkalpinang	JL. BAWAL RT. 02 RW. 001 KEL. AMPUI KEC. PANGKALBALAM	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
23	Kabupaten Bangka Barat	KP. SEKIP LAMA, PAL 2 KEL. SUNGAI DAENG KEC. MUNTOK	Kebakaran	-	-	-	-
24	Kabupaten Bangka Tengah	BELAKANG KANTOR CAMAT Koba JL. KENCANA 2 KEC. Koba	Karhutla	1 Ha			
25	Kabupaten Belitung	JL. PILANG RT. 9B RW 02 DESA DUKONG, KEC. TANJUNG PANDAN	Kebakaran	-	-	-	-
26	Kabupaten Bangka Barat	DUSUN I AHOY DESA BELO LAUT KEC.MUNTOK	Karhutla	1 Ha			



No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
27	Kabupaten Bangka Tengah	JL. PANTAI TANJUNG LANGKA KEL. PADANG MULIA KEC. Koba	Karhutla	0,5 Ha			
28	Kabupaten Bangka Selatan	DAERAH KOLONG 2 BELAKANG PUSKESMAS TOBOALI	Karhutla	0,5 Ha			
29	Kabupaten Bangka Tengah	JL SDN 3 RT. 06 DESA LUBUK PABRIK KEC. LUBUK BESAR	Kebakaran	-	-	-	-
30	Kabupaten Bangka	JL HAJI ABDUL MANAN DESA KIMAK DUSUN 03 KEC. MERAUWANG	Kebakaran	-	-	-	-
31	Kabupaten Belitung Timur	JL. SIMPANG RANGGIANG DUSUN JAYA DESA LENGKANG KEC. GANTUNG	Karhutla	3 Ha	-	-	-
32	Kabupaten Bangka Selatan	KOLONG 2 BELAKANG PUSKESMAS KEC. TOBOALI	Karhutla	1 Ha	-	-	-
33	Kabupaten Bangka Tengah	PANTAI TANJUNG LANGKA KEL. PADANG MULYA KEC. Koba	Karhutla	15 Ha	-	-	-
		JL. KUALA BARU KEL. BEROK KEC. Koba	Karhutla	1,5 Ha	-	-	-
34	Kabupaten Bangka	KEL. BUKIT BETUNG KEC. SUNGAILIAT	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
		DESA BOKOR KEC. PEMALI	Angin Puting Beliung	-	-	-	-



No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		DESA AIR HANYUT KEL. KUDAI KEC. SUNGAILIAT	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
		DESA KOTA KAPUR KEC. MENDO BARAT	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
		KEL. JELITIK KEC. SUNGAILIAT	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
		JLN. BUKIT INTAN KEL. KELIK RT 01 KEC. SUNGAILIAT	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
35	Kabupaten Bangka Selatan	DESA TUKAK SADAI KEC.TUKAK SADA	Kebakaran	-	-	-	-
36	Kabupaten Bangka Selatan	DUSUN PULAU PANJANG DESA PENUTUK KEC, LEPAR PONGOK	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
37	Kabupaten Bangka Tengah	DESA BATU BELUBANG KEC. PANGKALAN BARU	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
		DESA KEBINTIK KEC. PANGKALAN BARU	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
38	Kabupaten Belitung Timur	DUSUN JAYA DESA LENGANG KEC,GANTUNG	Karhutla	1,5 Ha	-	-	-
39	Kabupaten Bangka	DESA LABU KEC, PUDING BESAR	Angin Puting Beliung	-	-	-	-



No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		DESA BAKAM KEC. BAKAM	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
40	Kabupaten Bangka	DUSUN KALI BENING DESA BATURUSA KEC.MERAWANG	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
41	Kabupaten Bangka Barat	DESA SINAR SARI KEC. KELAPA	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
42	Kota Pangkalpinang	JL.DEPATI HAMZAH RT 007 RW002 SEMABUNG LAMA	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
43	Kabupaten Belitung Timur	DUSUN ASSALAM RT35 RW 15 DESA BARU KEC.MANGGAR	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
44	Kabupaten Bangka selatan	JLN. BUKIT PERMAI GG. AMAL RT 07 RW 03 KEC. TOBOALI	Kebakaran	-	-	-	-
45	Kabupaten Belitung Timur	APMS BENTAIAJ JL. RAYA MANGGAR	Kebakaran	-	-	-	+/- 700.000.000
46	Kabupaten Bangka Tengah	DESA KEBINTIK KEC. PANGKALAN BARU	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
47	Kota Pangkalpinang	Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Bukit Intan	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
48	Kabupaten Bangka Barat	Pal 6 Dusun I RT 02 RW 01 Air Belo Kecamatan Mentok	Kebakaran	-	-	-	-
49	Kabupaten Belitung Timur	DUSUN CANGGU DESA GANTUNG KEC. GANTUNG	Kebakaran	-	-	-	-



No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50	Kabupaten Bangka Barat	KAMPUNG SAWAH KEL. TANJUNG KEC. MUNTOK	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
51	Kabupaten Bangka Barat	Jl. Gang Naim, Kel. Kelapa, Kec. Kelapa	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
52	Kabupaten Bangka Barat	Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
53	Kabupaten Bangka	Desa Petaling Dusun 1,2,3, dan 4	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
		Desa Petaling Jaya	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
		Desa Kemuja Dusun 4 dan Dusun 2	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
54	Kabupaten Bangka Tengah	Desa Keretak Kecamatan Sungai Selan	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
		Desa Keretak Atas Kecamatan Sungai Selan	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
55	Kabupaten Bangka	Desa Air Buluh Kecamatan Mendo Barat	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
56	Kabupaten Bangka Selatan	Desa Nangka Kecamatan Air Gegas	Angin Puting Beliung	-	-	-	-



No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
57	Kabupaten Belitung Timur	Desa Baru Kecamatan Manggar	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
58	Kabupaten Belitung Timur	Desa Air Kelik Kecamatan Damar	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
59	Kabupaten Bangka	Desa Cit Kecamatan Riau Silip	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
60	Kabupaten Bangka Barat	Desa Mislak Kecamatan Jebus	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
		Desa Jebu Laut, Kecamatan Parittiga	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
61	Kabupaten Belitung Timur	Belakang Bengkel Mobil RT 01 Desa Selinsing Kecamatan Gantung	Karhutla	6 Ha	-	-	-
62	Kabupaten Bangka Tengah	Jl. Polwan RT 17 Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru	Kebakaran	-	-	-	+/- 300.000.000
63	Kota Pangkalpinang	Jl Pasir Ketapang No. 2 Kecamatan Pangkalbalam	Kebakaran	-	-	-	+/- 500.000.000
64	Kabupaten Belitung	Jl. Wahab Aziz RT 08 RW 04 Kelurahan Damai Kecamatan Tanjungpandan	Kebakaran	-	-	-	-
65	Kota Pangkalpinang	Pantai Pasir Padi	Kebakaran	-	-	-	/- 50.000
66	Kota Pangkalpinang	Jl. Mentok Kecamatan Rangkui	Kebakaran	-	-	-	-
67	Kabupaten Bangka Selatan	Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali	Banjir	-	-	-	-



No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali	Banjir	-	-	-	-
		Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali	Banjir	-	-	-	-
68	Kota Pangkalpinang	Jl. Trem, Kecamatan Girimaya	Kebakaran	-	-	-	-
69	Kabupaten Belitung Timur	RT 25 TW 06 Dusun Langkang Desa Lintang Kecamatan Simpang Renggang	Kebakaran	-	-	-	-
70	Kabupaten Bangka Tengah	Jl. Soekarno Hatta RT 14 RW 04 Kecamatan Pangkalan Baru	Kebakaran	-	-	-	-
71	Kabupaten Belitung Timur	Desa Baru Kecamatan Manggar	Kebakaran	-	-	-	-
72	Kabupaten Belitung Timur	Desa Air Madu Kecamatan Simpang Renggang	Cuaca Ekstrem	-	-	-	-
73	Kabupaten Bangka	Kawasan Industri Air Kantung	Cuaca Ekstrem	-	-	-	-
74	Kabupaten Bangka	Desa Jelutung RT 008 Kelurahan Sinar Jaya Kecamatan Sungailiat	Cuaca Ekstrem	-	-	-	-
		Desa Rambak RT 02. Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat	Cuaca Ekstrem	-	-	-	-
		Jl. Sri Pemandang Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat	Cuaca Ekstrem	-	-	-	-
		Dusun Air Layang, Dusun Sidomulyo, Kelurahan Bukit Layang Kecamatan Bakam	Cuaca Ekstrem	-	-	-	-
75	Kota Pangkalpinang	Perairan Karang Gading	Cuaca Ekstrem	-	-	-	-



No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
76	Kabupaten Bangka Selatan	Desa Air Gegas Kecamatan Air Gegas	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
77	Kabupaten Bangka	Desa Maras Senang	Cuaca Ekstrem	-	-	-	-
78	Kota Pangkalpinang	Jl Lintas Timur Gg. Al Barokah RT 007 RW 001 Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek	Cuaca Ekstrem	-	-	-	-
		Jl. Lapangan Bola RT 02 RW 03 Parit Lalang Kecamatan Rangkui	Cuaca Ekstrem	-	-	-	-
		Jln Kerapu RT 03 RW 02 Kel Lontong Pancur, Kec Pangkal Balam	Cuaca Ekstrem	-	-	-	-
		Jln Tenggiri I RT 07 RW03, Kel Ketapang, Kec Pangkalbalam	Cuaca Ekstrem	-	-	-	-
		Jln Sekolah RT 04 RW 01, Kel Selindung, Kec Gabek	Cuaca Ekstrem	-	-	-	-
		Jln Perbakin Rt 09 Rw 03 Kel Sriwijaya, Kec Grimaya	Cuaca Ekstrem	-	-	-	-
		Jl. Batu Kaldera Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan	Cuaca Ekstrem	-	-	-	-
		Kolong Kepoh, Kelurahan Semabung lama	Cuaca Ekstrem	-	-	-	-
79	Kabupaten Bangka Tengah	Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba	Cuaca Ekstrem	-	-	-	-
		Desa Mesu Barat Kecamatan Pangkalan Baru	Cuaca Ekstrem	-	-	-	-



No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
		Desa Nibung Kecamatan Koba	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
		Desa Teru Kecamatan Simpang Katis	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
		Desa Pasir Garam Kecamatan Simpang Katis	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
		Desa Mesu Timur Kecamatan Pangakalan Baru	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
		Desa Kulur Ilir Kecamatan Lubuk Besar	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
		Kelurahan Berok, Kecamatan Koba	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
		Desa Penyak Kecamatan Koba	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
		Desa Terak Kecamatan Simpang Katis	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
		Desa Beruas Kecamatan Simpang Katis	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
		Desa Sungkap Kecamatan Namang	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
		Desa Cambai Kecamatan Namang	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
		Desa Puput Kecamatan Namang	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
		Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
		Kelurahan Koba Kecamatan Koba	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-



No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Desa Padang Mulia Kecamatan Pangkalan Baru	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
		Desa Lubuk Besar Kecamatan lubuk Besar	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
80	Kabupaten Belitung Timur	Gunung Kik Kara Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit	Cuaca Ekstrim	-	-	1	-
81	Kabupaten Bangka Barat	Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
82	Kota Pangkalpinang	Jl. Sekolah RT 01 RW 01 Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
83	Kota Pangkalpinang	Jl. Mentok Kecamatan Rangkui	Cuaca Ekstrim (tersambar petir)	-	-	2	-
84	Kabupaten Bangka	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang	Kebakaran	-	-	-	-
85	Kabupaten Bangka Barat	Desa Belo Laut Kecamatan Mentok	Kebakaran	-	-	-	-
86	Kabupaten Belitung	Desa Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan	Kebakaran	-	-	-	-
87	Kabupaten Belitung Timur	Dusun Arab Desa Kurnia Kecamatan Manggar	Banjir Rob	-	-	-	-
88	Kabupaten Bangka Selatan	Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
89	Kabupaten Bangka Barat	Kampung Laut Kelurahan Tanjung	Banjir Rob	-	-	-	-



No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
90	Kabupaten Belitung Timur	Kantor Kesbangpol	Cuaca Ekstrim Pohon Tumbang	-	-	-	-
		Dusun Damai Baru Desa Mengkubang Kecamatan Damar	Cuaca Ekstrim Pohon Tumbang	-	-	-	-
		Desa Bentaian Kecamatan Manggar	Cuaca Ekstrim Pohon Tumbang	-	-	-	-
91	Kabupaten Bangka Selatan	Desa Sidoharjo Kecamatan Air Gegas	Cuaca Ekstrim tersambar petir	-	-	-	-
92	Kabupaten Bangka	Desa Mapur Kecamatan Riau Silip	Cuaca Ekstrim tersambar petir	-	-	-	-
93	Kabupaten Bangka Barat	Dusun Jampan, Desa Kelabat, Kecamatan Parittiga	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
94	Kabupaten Bangka Tengah	Desa Guntung, Kecamatan Koba	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
95	Kabupaten Belitung Timur	Dusun Urisan Jaya Desa Padang Kecamatan Manggar	Karhutla	0,03 Ha	-	-	-
96	Kota Pangkalpinang	Belakang Gedung BI Kecamatan Bukit Intan	Karhutla	2,5 Ha	-	-	-



No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
97	Kabupaten Bangka	GG. H. ALI CANDUK JL. SINAR RAYA DESA SEMPAN KEC. PEMALI	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
98	Kabupaten Bangka Barat	KP. TANJUNG RT 002 RW 003 KEC. MUNTOK	CUACA EKSTRIM	-	-	-	-
99	Kabupaten Bangka Barat	DESA PANGKAL BERAS KEC. KELAPA	CUACA EKSTRIM	-	-	-	-
100	Kabupaten Belitung Timur	Samping Spam Tebat Gadong Kecamatan Manggar	Karhutla	0,03 Ha			
101	Kabupaten Belitung Timur	KOLONG KERO DEKAT WARKOP ANDI DAN PERUMAHAN ISTANA PADANG KEC. MANGGAR	Karhutla	0,5 Ha			
102	Kabupaten Bangka Barat	DESA AIR GANTANG, RT 11 DESA AIR GANTANG KEC. PARITTIGA	Kebakaran	-	-	-	-
103	Kabupaten Belitung Timur	KOLONG KERO DESA PADANG KEC. MANGGAR	Karhutla	1 Ha			
104	Kabupaten Belitung Timur	KOLONG KERO DESA PADANG KEC. MANGGAR	Karhutla	0,01 Ha			
105	Kabupaten Bangka Barat	JL.JEND.SUDIRMAN BELAKANG HOTEL YASMIN KEC.MENTOK	Kebakaran	-	-	-	-
106	Kabupaten Bangka Tengah	DESA PENYAK KEC. KOB, DESA PERLANG DAN DESA TRUBUS KEC. LUBUK BESAR	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
107	Kabupaten Bangka selatan	KEC.AIR GEGAS, DESA RANGGAS,DESA AIR GEGAS,DESA AIR BARA	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-



No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
108	Kabupaten Bangka Tengah	PERUMAHAN GURU KEL.BEROK RT.03 KEC.KOBA	Kebakaran	-	-	-	-
109	Kabupaten Bangka Barat	KANTOR SDN 3 DESA TEBING KEC.KELAPA	Kebakaran	-	-	-	-
110	Kota Pangkalpinang	KEL.SINAR BULAN KEC. BUKIT INTAN	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
111	Kabupaten Belitung Timur	JL. KOLONG KERO DUSUN PADANG 1, RT 11 RW 05 KEC. MANGGAR	Karhutla	0,15 Ha	-	-	-
112	Kabupaten Belitung Timur	DUSUN SUMPING RT 03, DESA BATU PENYU KEC. MANGGAR	Karhutla	2 Ha	-	-	-
113	Kabupaten Belitung	JALAN AIK BAIK RT 06 RW 001 KEL. AIR PELEMPANG JAYA KEC. TANJUNG PANDAN	Banjir	-	-	-	-
114	Kabupaten Bangka Barat	DESA MAYANG KEC. SIMPANG TERITIP	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
		DESA IBUL KEC. SIMPANG TERITIP	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
115	Kabupaten Belitung	JL. PANTAI RT 01 RW 04 KEL TANJUNG BINGA KEC. SIJUK	Kebakaran	-	-	-	-
116	Kabupaten Bangka Barat	DESA IBUL KEC. SIMPANG TERITIP	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
117	Kabupaten Bangka Tengah	DESA AIR MESU TIMUR RT 08 KEC. PANGKALAN BARU	Kebakaran	-	-	-	-
118	Kabupaten Bangka Selatan	PERUMAHAN KANTOR BUPATI	Karhutla	0,2 Ha	-	-	-
		JL.LAPANGAN BOLA SMP N 2 TOBOALI	Karhutla	0,15 Ha	-	-	-



No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
119	Kabupaten Bangka Tengah	JL. SEKOLAH NO. 28 RT 02 KEL. BEROK KEC. KOBAB	Kebakaran	-	-	-	-
120	Kabupaten Bangka Barat	DESA PUSUK KEC. KELAPA	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
121	Kabupaten Bangka Barat	DESA BENTENG KOTA, KEC. TEMPILANG	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
122	Kabupaten Belitung Timur	JL. KOLONG KERO DUSUN PADANG II RT 11 RW 05 DESA PADANG KEC. MANGGAR	Karhutla	0,02 Ha	-	-	-
123	Kota Pangkalpinang	KEL SRIWIJAYA KEC. GIRIMAYA	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
		KEL. MELINTANG KEC. RANGKUI	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
		KEL. PINTU AIR KEC. RANGKUI	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
		KEL. PARIT LALALNG KEC. RANGKUI	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
		RT 06 KEL KAMPUNG BINTANG KEC. RANGKUI	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
		KEL. GAJAH MADA KEC. RANGKUI	Angin Puting Beliung	-	-	-	-



No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		KEL. KEJAKSAAN KEC. TAMAN SARI	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
124	Kota Pangkalpinang	JL. BATIN ISO KEL. PINTU AIR KEC. RANGKUI	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
		BELAKANG KANTOR KESBANGPOL KOTA PANGKA PINANG KEC. BUKIT INTAN	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
		BELAKANG RUMAH SAKIT KIM KEC. GERIMAYA	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
125	Kabupaten Belitung Timur	DUSUN TARUNA MULYA RT 02 RW 01 DESA LALALANG KEC. MANGGAR	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
126	Kabupaten Bangka	DESA BUKIT LAYANG KEC. BAKAM	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
		Simpang Telkom Kec. Sungailiat	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
127	Kabupaten Bangka	Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
128	Kota Pangkalpinang	Jl Puyuh Raya, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
129	Kabupaten Bangka Selatan	Jl. Damai, RT 05 RW 05 Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
130	Kabupaten Bangka	Perairan Tuing, Kecamatan Belinyu	Cuaca Ekstrim	-	-	1	-



No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
131	Kabupaten Bangka Barat	Jl. Mayor Syafrie Rachman/Lorong 1 Pasar Lama, Kecamatan Mentok	Kebakaran	-	-	-	+/- Rp.60.000.000
132	Kabupaten Belitung Timur	Jl. Raya Damar, Desa Suka Mandi, Kecamatan Damar	Karhutla	0,03 Ha	-	-	-
		Jl. Jagal Dusun Padang II, Desa Padang, Kecamatan Manggar	Karhutla	0,075 Ha	-	-	-
133	Kabupaten Belitung Timur	Kolong Kero, Desa Padang, Kecamatan Manggar	Karhutla	1 Ha	-	-	-
134	Kota Pangkalpinang	Jl. Nilam, Kelurahan Bacang, Kecamatan Mukit Intan	Cuaca Ekstrem	-	-	-	-
135	Kabupaten Bangka Selatan	Desa Pasir Putih Kecamatan Simpang Rimba	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
136	Kabupaten Bangka Selatan	Desa Sadai RT.1 Kecamatan Tukak Sadai	Cuaca Ekstrem	-	-	-	+/- Rp.3.000.000
137	Kabupaten Belitung	Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan	Kebakaran	-	-	-	-
138	Kota Pangkalpinang	RT 01 RW 01 Kelurahan Bacang kecamatan Bukit Intan	Karhutla	0,5 Ha	-	-	-
139	Kabupaten Belitung Timur	Jl. Jenderal Sudirman, Dusun Batu Penyu, Kecamatan Gantung	Kebakaran	-	-	-	-
140	Kabupaten Belitung Timur	Dusun Ban Motor, RT 01 RW 01 Desa Lalang Kecamatan Manggar	Cuaca Ekstrem	-	-	-	-
		DUSUN TARUNA MULYA DESA LALALANG KEC. MANGGAR	Cuaca Ekstrem				



No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Dusun Harapan Jaya Desa Lalang Kecamatan Manggar	Cuaca Ekstrem	-	-	-	-
		Dusun Numpang Empat RT 03 RW 02 Desa Mekar Jaya Kecamatan Manggar	Cuaca Ekstrem	-	-	-	-
141	Kabupaten Belitung Timur	Dusun Numpang Empat RT 02 RW 01 Desa Mekar Jaya Kecamatan Manggar	Cuaca Ekstrem	-	-	-	-
142	Kabupaten Belitung Timur	Jl. Jenderal Sudirman, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manggar	Cuaca Ekstrem	-	-	-	-
143	Kota Pangkalpinang	Dekat kompleks Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	Karhutla	1 Ha	-	-	-
144	Kabupaten Belitung Timur	Dusun Sekip Desa Lalang Kecamatan Manggar	Karhutla	1 Ha	-	-	-
145	Kabupaten Belitung Timur	Dusun Seberang Desa Selinsing Kecamatan Gantung	Karhutla	3 Ha	-	-	-
146	Kabupaten Belitung	Jl. Fajar Dalam RT 38 RW 13 Desa Aik Rayak Kecamatan Tanjungpandan	Karhutla	0,5 Ha	-	-	-
147	Kota Pangkalpinang	Parit 5 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan	Kebakaran	-	-	-	-
148	Kota Pangkalpinang	Depan SDN 30 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya	Cuaca Ekstrem	-	-	-	-
149	Kabupaten Bangka Selatan	Desa Gadong Kecamatan Toboali	Cuaca Ekstrem	-	-	-	-
150	Kabupaten Belitung	Jl. Gunung Tajam Desa Air Begantong Kecamatan Badau	Cuaca Ekstrem	-	-	-	-



No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
151	Kabupaten Belitung	Jl. Anwar Perumahan Bukit Warakas RT 25 RW 10 Kelurahan Lesung Batang Kecamatan Tanjungpandan	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
152	Kabupaten Bangka	Dusun Pejam, Desa Pelawan Kecamatan Belinyu	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
153	Kabupaten Belitung Timur	Jl. Ujung Lintang pertigaan arah Jalan Parit Tebu RT 01 Desa Gantung Kecamatan Gantung	Karhutla	0,005 Ha	-	-	-
154	Kabupaten Belitung	Samping Masjid Jamik Al Maburur RT 12 RW 03 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
155	Kota Pangkalpinang	Jl. Selanget No. 33 Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam	Kebakaran	-	-	-	-
156	Kabupaten Bangka	Dusun 1,2, dan 4 Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
		DESA KOTA KAPUR KEC. MENDO BARAT	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
157	Kota Pangkalpinang	Jl. Teratai Trem Kampung Seberang Kecamatan Taman Sari	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-
158	Kabupaten Bangka Barat	Perairan Karang Berang Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip	Cuaca Ekstrim	-	-	1	-



No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
159	Kabupaten Belitung	Jl. Pilang Pelataran RT 17 RW 05 No. 187 Dusun Pilang Desa Dukong Kecamatan Simpang Pesak	Kebakaran	-	-	-	-
160	Kabupaten Bangka Selatan	Jl. Baher Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali	Karhutla	0,5	-	-	-
161	Kota Pangkalpinang	Jl. Sriwijaya RT 01 RW 01 Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui	Kebakaran	-	-	-	-
162	Kota Pangkalpinang	Jl. KKO Usman Kelurahan Lontong, Kecamatan Pangkalbalam	Cuaca Ekstrim (pohon tumbang)	-	-	-	-
163	Kabupaten Bangka Selatan	Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
164	Kabupaten Bangka	Perumahan Bumi Arwana Air Ruai Kecamatan Pemali	Cuaca Ekstrim (pohon tumbang)	-	-	-	+/- Rp.30.000.000
165	Kabupaten Bangka	Jl. Kafhin Air Duren Kecamatan Pemali	Cuaca Ekstrim (rumah tersambar petir)	-	-	-	-
166	Kabupaten Belitung	Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik	Gelombang Pasang (Abrasi Pantai)	-	-	-	-



No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
167	Kabupaten Bangka Tengah	RT 02 Dusun Kampung Simpang Desa Lubuk Besar	Cuaca Ekstrim (angin kencang)	-	-	-	-
168	Kabupaten Belitung Timur	RT 02 Dusun Seberang desa Selinsing Kecamatan Gantung	Cuaca Ekstrim (angin kencang)	-	-	-	-
		Dusn Penirukan RT 02 RW 01 Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit	Cuaca Ekstrim (angin kencang)	-	-	-	-
		Dusun Koperasi RT 05 RW 02 Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit	Cuaca Ekstrim (angin kencang)	-	-	-	-
		Belakang Kantor BKPSDM	Cuaca Ekstrim (angin kencang)	-	-	-	-
169	Kabupaten Bangka	Desa Rambak Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat	Cuaca Ekstrim (angin kencang)	-	-	-	-
		Dusun Mentabak Kecamatan Pemali	Cuaca Ekstrim (angin kencang)	-	-	-	-



No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
170	Kabupaten Belitung	Jl. Sijuk RT 37 RW 06 Desa Air Ketekok Kecamatan Tanjungpandan	Cuaca Ekstrim (pohon tumbang)	-	-	-	-
171	Kabupaten Bangka Barat	Desa Kelapa Kecamatan Kelapa	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
		Desa Terentang Kecamatan Kelapa	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
172	Kabupaten Bangka	Dusun Tutun Desa Penyamun Kecamatan Pemali	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
173	Kabupaten Bangka Tengah	Desa Sadap Perlang Kecamatan Lubuk Besar	Cuaca Ekstrim (angin kencang)	-	-	-	-
174	Kota Pangkalpinang	Jl. Gudang Subur kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui	Cuaca Ekstrim (angin kencang)	-	-	-	-
		Jl. Lembawai Kelurahan air Salemba Kecamatan Gabek	Cuaca Ekstrim (angin kencang)	-	-	-	-
175	Kabupaten Belitung Timur	Perairan Belitung Timur	Kecelakaan Transportasi	-	-	3	-
176	Kabupaten Belitung Timur	Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar	Kebakaran	-	-	-	-



No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
177	Kabupaten Bangka Barat	Desa Kelapa Kecamatan Kelapa	Cuaca Ekstrim (angin kencang)	-	-	-	-
178	Kabupaten Bangka Selatan	Perairan Selat Bangka	Laka laut	-	-	-	-
179	Kabupaten Bangka Barat	Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang	Kebakaran	-	-	-	-
180	Kabupaten Belitung Timur	Dusun Cendil Desa Cendil Kecamatan Kelapa Kampit	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
181	Kabupaten Bangka Selatan	Desa Kepoh Kecamatan Toboali	Angin Puting Beliung	-	-	-	-
182	Kabupaten Belitung Timur	Dusun Baru Selatan RT 17 RW 08 Desa Baru Kecamatan Manggar	Kebakaran	-	-	-	-
183	Kabupaten Bangka Barat	Kampung Tanjung Laut Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok	Banjir Rob	-	-	-	-
184	Kabupaten Bangka Tengah	Komplek Perumahan Meranti Simpang Jongkong Kecamatan Koba	Cuaca Ekstrim (pohon tumbang)	-	-	-	-
185	Kabupaten Bangka Selatan	Pantai Kapur Kecamatan Ketapang	Cuaca Ekstrim (pohon tumbang)	-	-	-	-
186	Kabupaten Bangka	Desa Pagarawan RT 04 Kecamatan Merawang	Angin Puting Beliung	-	-	-	-



No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
187	Kota Pangkalpinang	Jl. Gudang Subur RT 08 RW 03 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui	Kebakaran	-	-	1	-
188	Kabupaten Bangka	Desa Pohin Kecamatan Pemali	Cuaca Ekstrim (angin kencang)	-	-	-	-
189	Kabupaten Belitung	Jl. Merdeka Kecamatan Tanjungpandan	Cuaca Ekstrim (pohon tumbang)	-	-	-	-
190	Kabupaten Belitung	Jl. Merdeka Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan	Kebakaran	-	-	-	-
191	Kabupaten Bangka Tengah	Kelurahan Padang Mulia, Sinar Laut Kecamatan Koba	Banjir Rob	-	-	-	-
192	Kabupaten Bangka Barat	Kampung Tanjung Laut Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok	Banjir Rob	-	-	-	-
193	Kabupaten Belitung Timur	DESA PADANG KEC.MANGGAR	Karhutla	1 Ha			
194	Kabupaten Bangka Barat	DUSUN IV RANGGAM RT 02 DESA BELO LAUT	Cuaca Ekstrim (angin kencang)	-	-	-	-
		KELURAHAN SUNGAI DAENG RT 01 RW 03	Cuaca Ekstrim (angin kencang)	-	-	-	-
		KELURAHAN SUNGAI BARU RT 03 RW 01	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-



No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			(angin kencang)				

Keterangan : Tidak ada data terkait luasan area terdampak dan perkiraan kerugian

Sumber : BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Tabel-45 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun: 2022

No.	Kabupaten/Kota	Luas (km2)	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bangka	3.016,85	334.344	1,41	111
2	Belitung	2.270,70	186.331	1,33	82
3	Bangka Barat	2.851,41	209.413	1,33	58
4	Bangka Tengah	2.259,98	205.510	1,87	91
5	Bangka Selatan	3.598,24	202.263	1,17	71
6	Belitung Timur	2.588,82	130.463	1,54	50



No.	Kabupaten/Kota	Luas (km2)	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Pangkalpinang	104,54	226.297	2,01	2.165

Keterangan:

Sumber: Bangka Belitung dalam angka, BPS 2023

Tabel 46. Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2022

No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	Nama TPA	Jenis TPA	Luas TPA (Ha)	Kapasitas (m3)	Volume Eksisting (m3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten Bangka	Kenanga	Kenanga	Sanitary Landfill	4.95	135,000	125,925
2	Kabupaten Bangka	Belinyu	Belinyu	Sanitary Landfill	15	50,000	19,710
3	Kabupaten Bangka Selatan	Kepoh	Junjung Besaoh	Sanitary Landfill	15	160,000	
4	Kabupaten Bangka Tengah	Koba	Simpang Jongkong	Sanitary Landfill	40	70,000	90,000
5	Kabupaten Bangka Barat	Muntok	Air Belo	Sanitary Landfill	4.2	115,875	140,919



6	Kota Pangkalpinang	Pangkalpinang	Parit Enam	Control Landfill	4.9	216,000	>216.000
7	Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	Gunung Sadai	Sanitary Landfill	8.5	500,000	305,220
8	Kabupaten Belitung Timur	Manggar	Trafo Mayang	Sanitary Landfill	12	120,000	33,000

Keterangan:

Sumber: DLH Kabupaten/Kota, 2022 (telah diolah kembali)



Tabel-47 : Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2022

No	Kabupaten	Lokasi	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (m3/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bangka	Bangka	334,344	405.27
2	Belitung	Belitung	186,331	223.04
3	Bangka Barat	Bangka Barat	209,413	255.42
4	Bangka Tengah	Bangka Tengah	205,510	249.57
5	Bangka Selatan	Bangka Selatan	202,263	346.61
6	Belitung Timur	Belitung Timur	130,463	156.61
7	Pangkalpinang	Pangkalpinang	226,297	496.94

Keterangan:

Sumber: BPS, 2023; SIPSN, 2022; DLH Kabupaten/Kota, 2023 (data telah diolah)



Tabel-47. A : Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari 2020-2021

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2021

No	Kabupaten/Kota	Lokasi	Jumlah Penduduk		Timbulan Sampah (m3/hari)	
			2020	2021	2020	2021
1	Kabupaten Bangka	Bangka	326,265	329911	389.76	399.89
2	Kabupaten Belitung	Belitung	182,079	184004	215.12	223.04
3	Kabupaten Bangka Barat	Bangka Barat	204,612	206786	264.85	267.66
4	Kabupaten Bangka Tengah	Bangka Tengah	198,946	201861	242.09	244.68
5	Kabupaten Bangka Selatan	Bangka Selatan	198,189	200051	241.24	242.49
6	Kabupaten Belitung Timur	Belitung Timur	127,018	128564	152.94	155.84
7	Kota Pangkalpinang	Pangkalpinang	218,569	221988	460.09	470.88

Keterangan: Estimasi timbulan sampah di kabupaten 0,4 kg/orang/hari, di kota 0,7 kg/orang/hari

Sumber: BPS, 2022; Hasil Perhitungan



Tabel. 48 Jumlah Bank Sampah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2022

No.	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (kg/bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung (Orang)	Jumlah Karyawan (Orang)	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SEPAKAT	188.45/464/2.5.1.1/2019	65	Aktif	Kecamatan Mentok, Bangka Barat	96	7	916.000/bulan
2	WALAH	188.45/524/2.5.1.1/2017	-	Tidak aktif	Kecamatan Mentok, Bangka Barat	-	-	-
3	UNIT METALURGI	188.45/525/2.5.1.1/2017	-	Tidak aktif	Kecamatan Mentok, Bangka Barat	-	-	-
4	MUTIK PILAH SAMPAH	-	-	Tidak aktif	Kecamatan Mentok, Bangka Barat	-	-	-
5	Bank Induk PAPIN	-	3010	Aktif	Pangkalpinang	533	8	38,000,000
6	Kawabegawe	07/SKBS/kel-sld/XII/2017	4030	Aktif	Pangkalpinang	400	4	36,000,000
7	Berkah	-	-	Tidak aktif	Pangkalpinang	360	3	-
8	Sukun Mandiri	11/SKM/Kel-BST/V/2010	-	Tidak aktif	Pangkalpinang	215	4	-
9	Tua Tunu Indah	14/PTtn/Kel-TT/VII/2013	-	Tidak aktif	Pangkalpinang	271	5	-
10	Pondok Kreasi	016/SK/AKT-GTG/IV/2021	2080	Aktif	Pangkalpinang	54	4	12,000,000
11	Aik Pelempang Jaya	141/II/KEP/APJ/XII/2015	250	Aktif	Desa Aik Pelempang Jaya, Kec	50	13	500,000



No.	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (kg/bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung (Orang)	Jumlah Karyawan (Orang)	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Tanjungpandan, Belitung			
12	Karya Pemuda	018/ TAHUN 2015	-	TidakAktif	Desa Tanjung Tinggi, Kec. Sijuk, Belitung	-	11	-
13	Desa Keciput	014/KPTS/KC/2016	-	TidakAktif	Desa Keciput, Kec. Sijuk, Belitung	-	10	-
14	Akar Berebat	188.46/140/KEP/DLH/2021	1300	Aktif	DLH Kab. Belitung	170	17	3,869,750
15	Rimbaan Tuan	188.46/150/KEP/DLH/2021	300	Aktif	Desa Kacang Butor, Kec. Badau, Belitung	50	7	600,000
16	Beres (Universal)	050/SK/YKUB/III/2020	173.1	Aktif	Sekolah Universal, Belitung	267	7	600,000
17	RSUD dr.H. Marsidi Judono	445/0354/KEP/RSUD dr. H.M.JD/I/2018	300	Aktif	RSUD dr.H. MARSIDI JUDONO, Belitung	40	11	600,000
18	Bank Sampah Nyiur Karya Lestari (Bank Sampah Unit)	Keputusan Kepala Desa Lalang Nomor 37 Tahun 2021	141	Aktif	Dusun Sawah, Dusun Terang Bulan dan Dusun Sekip	289	6	



No.	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (kg/bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung (Orang)	Jumlah Karyawan (Orang)	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19	Bank Sampah Pelangi Nusa (Bank Sampah Induk)	Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2013	1,411	Aktif	Seluruh Wilayah Kabupaten Belitung Timur	3 Bank Sampah Unit	27	
20	Bank Sampah Pelangi SMP Negeri 6 Manggar (Bank Sampah Unit)	Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 6 Manggar Nomor :422/063/SK/SMPN 6 MANGGAR/II/2022	2.98	Aktif	KELUBI	78	15	53,280
21	Jalan Samratulangi RT 002 Kelurahan Srimenanti Kecamatan Sungailiat	188.45/1065/DINLH/2017	594	Aktif	Ibukota Kabupaten	65	2	900,000
22	Jalan Ahmad Yani Jalur II Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat	188.45/732/DINLH/2019	841.2	Aktif	Ibukota Kabupaten	71	4	1,100,000
23	Jalan Duyung Raya Blok E RT 007 RW 11 Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali	-	615	Aktif	Ibukota Kabupaten	83	10	1,300,000



No.	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (kg/bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung (Orang)	Jumlah Karyawan (Orang)	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24	Temiang Jaya	188.4/15/19.04.01.2006/2019 tanggal 02 Januari 2019	3644.5	Aktif	Desa Guntung	15	5	400,000
25	Berpanen	188/57/19.04.01.2008/2019 tanggal 02 Januari 2019	400	Aktif	Desa Terentang III	40	4	200,000
26	Bejebeu Lilai	188.45/007.sk/19.04.01.07/2016 tanggal 4 Januari 2016	3400	Aktif	Desa Penyak	35	2	1,500,000
27	Bersampan	141/54/19.04.01.2003/2019 tanggal 12 Februari 2019	100	Aktif	Desa Kurau Timur	5	4	150,000
28	Bumbu Masak	188.4/03/19.04.01.1003/2019 tanggal 02 Januari 2019	400	Aktif	Pasar Modern Koba	10	5	151,000
29	Bersaung Maju	188.4/38/19.04.01.1003/2020 tanggal 08 Januari 2020	450	Aktif	Kelurahan Berok	15	4	350,000
30	Berlilik Berseri	188.4/037/19.04..20005/2021 tanggal 04 Januari 2021	550	Aktif	Desa Belilik	38	2	600,000
31	Butterfly Sped Bank	188.45/6a/19.04.05.2007/2018 tanggal 31 Januari 2019	1720	Aktif	Desa Bukit Kijang	53	2	1,200,000
32	Teratai	188.5/50/19.04.01.1005/2018	1000	Aktif	Kelurahan Simpang Perlang	21	3	250,000
33	Teratai	188.45/45/19.04.02.2010/2019 tanggal 03 Januari 2019	824	Aktif	Desa Benteng	13	4	500,000
34	Trubus Berjaya	188.4/39/19.04.06.2007/2022	20	Aktif	Desa Trubus	10	10	100,000
35	Bank Sampah SMK Yapentob	188.45/15/BLH/2016	1400	Aktif	Sekolah SMK Yapentob dan sekitarnya	200	9	2,000,000



No.	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (kg/bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung (Orang)	Jumlah Karyawan (Orang)	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Bank Sampah Gadung Maju	188.45/15/BLH/2016	4000	Tidak Aktif	Kecamatan Toboali	111	15	-
37	Bank Sampah Pondok Mandiri	188.45/15/BLH/2016	3500	Tidak Aktif	Kelurahan Toboali	125	10	625,000
38	Bank Sampah Kopi	188.45/15/BLH/2016	400	Tidak Aktif	Kompleks Bukit Permai	17	9	625,000
39	Bank Sampah Kophi	188.45/15/BLH/2016	700	Tidak Aktif	Desa Gadung	30	8	1,455,000
40	Bank Sampah Manahula	188.45/15/BLH/2016	300	Tidak Aktif	Kelurahan Teladan	50	13	525,000
41	Bank Sampah SMPN 1	188.45/35.A/BLH/2017	600	Tidak Aktif	Sekolah SMPN 1 Toboali	100	6	975,000
42	Bank Sampah SMA N 1	188.45/35.A/BLH/2017	500	Tidak Aktif	Sekolah SMA N 1 Toboali	75	4	925,000
43	Bank Sampah Salima	188.45/35.A/BLH/2017	1000	Tidak Aktif	Kelurahan Toboali	25	3	1,755,000
44	Bank Sampah Kecamatan Toboali	188.45/35.A/BLH/2017	400	Tidak Aktif	Kecamatan Toboali	4		725,000
45	Bank Sampah De eL Ha	188.4/33.a/DLH/2022	200	Aktif	Komplek Perkantoran	76	17	550,000

Keterangan :

Sumber: DLHK Babel, 2022



Tabel-49. Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2023

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kegiatan Aksi bersih Peringatan Hari Ozon	Taman Dealova Pangkalpinang	DLHK dengan kolaborasi PEPELINGASIH Bangka Belitung
2	Lomba Bank Sampah Tingkat Provinsi	Bank sampah di 7 Kab/Kota	DLHK
3	workshop pengelolaan sampah dan penanaman pohon bersama pramuka	Bukit Baru	DLHK (Pinsaka Kalpataru Tk Daerah)
4	Giat bakti lingkungan dengan mengelola sampah plastik menjadi ecobrick	SMP N 9 Pangkalpinang (pramuka)	DLHK (Pinksaka Kalpataru Tk Daerah)
5	Peransaka Nasional	Bumi Perkemahan Kwarda Bangka Belitung, balun Ijuk	Kwarnas, Kwarda, 11 pinsaka Tk daerah Bangka Belitung
6	Pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah (PBLHS)	sekolah - sekolah calon adiwiyata dan sekolah adiwiyata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	DLHK
7	Gerakan Jumat bersih (2023)	lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan bangka Belitung	Seluruh Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi kepulauan Bangka Belitung , Siswa siswi SMA/SMK /sederajat
8	Gule Kabung	7 Kabupaten/Kota	Seluruh Instansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Keterangan : -

Sumber : DLHK Prov. Kep. Babel dan website babelprov.go.id, 2023



Tabel-50. Status Pengaduan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data: 2023

No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bupati Belitung Timur	Pertambangan di kawasan mangrove di lokasi IUP Timah kecamatan Burung mandi Belitung Timur	Sudah verifikasi bulan Febuari 2022
2	Media	Pencemaran udara akibat cerobong boiler PT. Mutiara Agro Iestrari (MAL) Kabupaten Bangka Tengah	Sudah verifikasi Teknis Bulan Mei 2022
3	Media	Dugaan Pencemaran Tambak Udang oleh CV Gunung Prima di Bangka Tengah	Sudah verifikasi Teknis Bulan Mei 2022
4	HTI IKK (Istana kawi Kencana)	Tambak udang atas nama Koperasi Produsen Nuansa Berkat Cemerlang Lokasi tambak udang overlap dengan HTI IKK	Sudah verifikasi Teknis Bulan 20 Mei 2022
5	Kepala Desa Simpang Yul Fathurrohlim	Dugaan pencemaran Limbah sawit PT. Payung Mitra Jaya Mandiri Maras Senang yang merusak Ekosistem Sungai di desa Simpang Yul	Sudah dilaksanakan verifikasi Bulan30 Mei 2022
6	HTI APS (Agro pratama Sejahtera) Penagan	Perambahan Hutan produksi (HP) Sungai Sembulan oleh perambah	Sudah di proses/ambilalih Gakkum Kemterian LHK Bulan 31 Mei 2022



No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)
7	HKM Gempita Kurau	Pembuangan Limbah Tambak Udang di duga mencemari kawasan hutan bakau dan belum memiliki izin pinjam pakai	Verifikasi lapangan Bulan Juni 2022
8	Organisasi Masyarakat Pemuda Bangka Belitung Bersatu	Laporan adanya dumping (pembuangan) Limbah Tambak Udang di Laut rambak Sungailiat Kabupaten Bangka diduga milik Bpk Amen	Verifikasi lapangan Bulan 08 Juni 2022
9	Nelayan Desa pangkal Niur: Adan, Rusatam (Ketua POKMAS TKL), Arafik, Armin	Laporan penambangan timah ilegal dan Perusakan lingkungan di lokasi pantai tanjung sunor (pencemaran air laut, rusaknya sempadan pantai, kerusakan terumbu karang dan mangrove	Proses Registrasi Bulan 13 Juni 2022
10	PT. Agro Pratama Sejahtera Desa Terong Kabupaten Belitung	Aktifitas perambahan pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat di desa terong Kecamatan Sijuk Diduga dilakukan atas nama Adi menggunakan alat mekanik PC	Tercatat-verifikasi administrasi Bulan 03 Juni 2022
11	Pemdes Desa Tanjung Pura Kecamatan Sungai Selan Kab. Bangka Tengah	Jual Beli Kawasan Hutan Produksi di Register 22 Sungai Sembulan di Desa Tanjung Pura	Tercatat-verifikasi administrasi Bulan 06 Juni 2022
12	PT. Agro Pratama Sejahtera Desa Air Seru Kabupaten Belitung	Aktifitas perambahan pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat di desa Air Seru Kecamatan Sijuk Diduga dilakukan atas nama Fery menggunakan alat mekanik PC mekanik PC	Tercatat-verifikasi administrasi Bulan 21 Juni 2022
13	Serikat Pemerhati Lingkungan Hidup Nusantara	Nomor Surat 0134/SPLH NUSANTARA/UI/2022Tindak Lanjut pertanggungjawaban HUKUM Terhadap Pelanggaran Koorporasi dan pertambangan	Tercatat-verifikasi administrasi Bulan 25 Agustus 2022



No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)
		tTimah secara Ilegal di daerah Dusun III kelurahan penagan kec. Mendo barat	
14	Kantor Hukum Forum Pemuda Kalimantan barat	001/Dumas-LBH F-PKB?VII/2022Perbuatan Melawan Hukum oleh Oknum bernama Achen atas tindakan illegal mining yang terjadi	Tercatat-verifikasi administrasi Bulan 29 Agustus 2022
15	PT. Bangun Rimba Sejahtera	Respon pemberitaan media online (citizen journal, lensa Digital &Global Investigasi News) tentang kegiatan Penambangan Timah illegl di desa teluk Limau parittiga Bangka barat	Dilaksanakan verifikasi Bulan 24 September 2022
16	PT. Bangun Rimba Sejahtera	Respon Pemberitaan Media Online lensa Digital tentang Kegiatan Penanaman Sawit di Kawasan Hutan Sdr. Asiong warga dusun jebu Darat Desa Kelabat	Dilaksanakan verifikasi Bulan 24 September 2022
17	HKM Matras Alami Sejahtera	Adanya dugaan Penambangan dalam kawasan HKM Matras Alami Sejahtera termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Sungailiat Mapur	Sudah terlaksana penindakan Bulan 29 September 2022
18	PT. Bangun Rimba Sejahtera	Respon pemberitaan Media Lokal terkait larangan plang JBA	Verifikasi lapangan Bulan 25 Oktober 2022
19	UPTD KPHP Rambat Menduyung	Aktivitas Tambak udang Vaname dengan system bioflok di kawasan Hutan Lindung tanjung Ular	Tercatat-verifikasi oleh KPHP bulan 24 November 2022



No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)
20	Organisasi Masyarakat Pemuda Bangka Belitung Bersatu	Penambangan pasir di desa jeruk milik unyil	Tercatat-verifikasi administrasi bulan 2 November 2022
21	PT. Bangun Rimba Sejahtera//No:064/SSD-BRS/XII-2022	Respon pemberitaan media Suara Melayu & babel news Update, terkait tambang ilegal di Desa Cupat Bangka Barat	Tercatat 29 Desember 2022 //5 januari 2023
22	DPD Gerakan pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM-Gempur)	Pencemaran air akibat adanya aktifitas tambak udang (berupa intrusi air asin ke sumber air/sumur warga di Dusun tegek, Desa Benteng Kota kecamatan Tempilang Kab. Bangka Barat	Verifikasi 02/01/2023
23	Laporan dari UPTD KPHP Sembulan	Perambahan Hutan berupa aktivitas tambang ilegal (TI Rajuk).	Verifikasi Januari 2023
24	DPD Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Bangka Belitung a.n : Mayrest Kurniawan A.Md alamat : Jl. Belibis No. 185 Bukit merapin Pangkalpinang No Hp: 082279788182 (mayrestk@gmail.com)	Pengaduan Dugaan Perambahan Kawasan Hutan. Kawasan Hutan Lindung Kota Waringin Kec. Mendo Barat Kabupaten Bangka dan kawasan Hutan Produksi Kota Waringin Bangka Koordinat 2°10.365'S-105°46.437'E (-2.1169330, 105.7414220) Jenis Kegiatan : Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang beralih fungsi menjadi kebun sawit dalam wilayah kebun sawit dalam wilayah yang berada dalam wilayah Kelompok Tani Hutan Cahaya Mandiri milik Sdr. Upe Setiadi maupun Wilayah yang diakui oleh KTH Tunas Kelapa sejak tahun 2016 sampai sekarang..	Tercatat 07/02/2023



No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)
25	Kantor Hukum Haris Sucahyo SH	Laporan Pengaduan adanya pengrusakan dan Kegiatan Tambang Ilegal di Hutan Kawasan HP. Sungai Sembulan kelurahan Sungai Selan Atas Kecamatan Sungai Selan	Verifikasi Administrasi-lapangan14/02/2023
26	DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia	Sawit diduga mengelola hutan lindung di Belitung	Verifikasi Administrasi-lapangan07/03/2023
27	Kantor pemberitaan Belitung TV	dugaan adanya pemanfaatan sumber air baku di Hutan Lindung Gunung Tajam secara Ilegal di Kabupaten Belitung Oleh CV. Gunung Tajam	Verifikasi Administrasi-lapangan 18/05/2023

Keterangan :

Sumber: DLHK Babel, 2023



Tabel-51. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup Provinsi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2022

No.	Nama LSM	Akta Pendirian	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	LSM Aliansi Lingkungan Hidup (ALIH) Bangka	-	Jln. Kacang Pedang no. 77A Pangkalpinang
2	Yayasan Lembaga Penelitian, Pengkajian Pembangunan dan Lingkungan Hidup (YP3LH)	-	Jln. Depati Bahrin no. 75 Pangkalpinang
3	Team Operasional Penyelamatan Lingkungan Kep. Bangka Belitung (TOPEL)	-	Jln. Pasar Mambo no. 95 Pangkalpinang
4	Himpunan Pelestari Hutan Andalan (HPMA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	601/BKBPPM/2004	Jalan Irian No. 10 Kel. Asam Pangkalpinang
5	Forum Lingkungan Hidup (FOLHI)	628/BKBPPM/2004	Jln. Pasar Mambo no. 95 Pangkalpinang
6	Yayasan Babel Hijau	677/BKBPPM/2007	Jln. Belibis I no. 167 RT 05 RW 02 Pangkalpinang
7	LSM Garda Lingkungan Hidup (GALIH)	388/BKBPPM/2010	Jl. Belinjo No. 195 Bukit Merapin Gerunggang Pangkalpinang Telp. 0717 434834
8	Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	408/BKBPPM/2010	Jl. Kapt. Munzir Thalib No. 23 Kec. Taman Sari Pangkalpinang
9	Yayasan Bangka Belitung Lestari	19/BKBPPM/2011	Jl. Lumba-Lumba I No.21 A Kel. Gabek I Kec. Gabek Pangkalpinang Telp. (0717) 424570
10	Lembaga Peduli Lingkungan Hidup (LPHP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	220/13/BKBPPM/II/2013	Jl. Kampung Melayu Dalam Rt.07 Rw.03 Kel. Tuatunu Indah Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang
11	Yayasan Cinta Lestari Lingkungan Hidup	220/23/BKBPPM/2013	Jl. RE. Martadinata Kel. Opas Indah Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang



No.	Nama LSM	Akta Pendirian	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan (GEMPA)	SKT BATENG 200/120/130/0003/VIII/2014	Jln. Soekarno Hatta II Gg. Sukma Rt. 09/12 Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah
13	Organisasi Pelestarian Flora dan Fauna (Alobi) ¹	Nomor 3 Tanggal 28 September 2017	Jl. Sumedang Gg. H.Sani Rt.001/004 Kel.Kejaksan Kec.Taman Sari Pangkalpinang
14	Wahana Lingkungan Hidup Kepulauan Bangka Belitung ²	-	Jl. Belanak Raya No. 64 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Air Salemba Kecamatan Pangkalbalam, Kota pangkalpinang 33118
15	Yayasan Terumbu Karang Soubad ³	Nomor 2 Tanggal 05 Februari 2020	Jl. Slamet Tikung Yaden RT. 008 RW. 005 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan
16	Perhimpunan Pencinta dan Pelestari Tanaman Bangka (Bangka Flora Society) ⁴	Nomor 2 Tanggal 05 Februari 2020	Jl. Slamet Tikung Yaden RT. 008 RW. 005 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan
17	Yayasan Sayang Babel Kite	Nomor 6 Tanggal 9 November 2011	Jl. Diponegoro No. 59 RT.07 Kel. Bukit Betung, Kec. Sungailiat Kabupaten Bangka
18	Yayasan Ikatan Keluarga Besar Kenanga (IKEBANA) ⁵	AHU-2263.AH.01.04 Tahun 2009 tanggal 23 Juli 2009	Jl. Raya Kenanga, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka
19	Botanical Group For Environment Project	-	Jln. Desa Tanjung Gunung, Kabupaten Bangka Tengah
20	BECAK BABEL	-	Komplek RSS. Pemda. Sungailiat
21	Pemuda Peduli lingkungan asri dan bersih Indonesia_Babel	-	GOR Sahabudin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
22	Recycle Generation	-	-

Keterangan :

Sumber : DLHK 2023

¹ Alobi, 2020

² Walhi Babel, 2020

³ Soubad, 2020

⁴ Bangka Flora Society, 2020

⁵ IKEBANA, 2022



Tabel-52. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data: 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Laki -laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pasca Sarjana (S2)	18	18	36
2	Sarjana (S1)	98	38	136
3	Diploma 3 (D3)	13	9	22
4	SMA/SMK	20	4	24
5	SD	1		1
	Jumlah	150	69	219

Keterangan :

Sumber : DLHK 2023

Tabel-53. Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan Dan Staf Yang Telah Mengikuti Diklat

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2023

No.	Nama Instansi	Staf Fungsional			Staf Yang Sudah Diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki -laki	Perempuan	Laki – laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengawas Lingkungan Hidup	5	0	2	0
		Pengendali Dampak Lingkungan	3	7	1	6
		Pengendali Ekosistem Hutan	3	2	0	0
		Penyuluh Kehutanan	2	1	1	1
		Penyuluh Lingkungan Hidup	0	6	0	0
		Polisi Kehutanan	4	1	2	0
2	UPTD Laboratorium Lingkungan	Pengendali Dampak Lingkungan	0	0	0	0



No.	Nama Instansi	Staf Fungsional			Staf Yang Sudah Diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki - laki	Perempuan	Laki – laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	UPTD KPHP Rambat Menduyung (Unit I)	Pengendali Ekosistem Hutan	0	1	0	1
		Penyuluh Kehutanan	1	1	1	1
		Polisi Kehutanan	1	1	1	0
4	UPTD KPHP Jebu Bembang Antan (Unit II)	Pengendali Ekosistem Hutan	0	1	0	0
		Penyuluh Kehutanan	3	0	3	0
		Polisi Kehutanan	1	0	0	0
5	UPTD KPHP Bubus Panca (Unit III)	Pengendali Ekosistem Hutan	0	0	0	0
		Penyuluh Kehutanan	3	0	3	0
		Polisi Kehutanan	1	0	1	0
6	UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin (Unit IV)	Pengendali Ekosistem Hutan	0	1	0	1
		Penyuluh Kehutanan	2	2	2	2
		Polisi Kehutanan	2	0	2	0
7	UPTD KPHP Sungai Sembulan (Unit V)	Pengendali Ekosistem Hutan	1	0	1	0
		Penyuluh Kehutanan	3	1	3	1
		Polisi Kehutanan	2	0	2	0
8	UPTD KPHP Muntai Palas (Unit VIII)	Pengendali Ekosistem Hutan	1	0	1	0
		Penyuluh Kehutanan	3	0	3	0
		Polisi Kehutanan	3	0	2	0
9	UPTD KPHL Belantu Mendanau (Unit X)	Pengendali Ekosistem Hutan	1	0	1	0



No.	Nama Instansi	Staf Fungsional			Staf Yang Sudah Diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki - laki	Perempuan	Laki – laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penyuluh Kehutanan	2	4	2	4
		Polisi Kehutanan	8	1	8	0
10	UPTD KPHP Gunung Duren (Unit XIII)	Pengendali Ekosistem Hutan	0	1	0	1
		Penyuluh Kehutanan	4	1	4	1
		Polisi Kehutanan	7	0	5	0
		Jumlah	66	32	51	19

Keterangan :

Sumber: DLHK Prov. Kep. Bangka Belitung, 2023

Tabel-54. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data: 2023

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemerintah Kabupaten Bangka	Adipura	menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan RI	2022
2	Pemerintah Kabupaten bangka Selatan	Adipura	menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan RI	2022
3	Pemerintah kabupaten Belitung Timur	Sertifikat Adipura	menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan RI	2022
4	Bank Sampah Setara	Bank Sampah Terbaik II	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
5	Sri menanti berkarya	Bank Smapah Terbaik V	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022



No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Bank Sampah karya makmur	Apresiasi Bank Sampah Aktif dan Mandiri	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
7	bank Sampah papin	Bank Sampah Terbaik I	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
8	Bammk Sampah Akar Berebat	Bank Sampah Terbaik III	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
9	Bank Sampah Beres	Bank Sampah terbaik VI	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
10	Bank Sampah Nyiur lestari	Apresiasi Bank Sampah Aktif dan Mandiri	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
11	Bank Sampah Pelangi	Apresiasi Bank Sampah Aktif dan Mandiri	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
12	Bank Sampah SEPAKAT	Bank Sampah Terbaik IV	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
13	Bnak Sampah guntung	Apresiasi Bank Sampah Aktif dan Mandiri	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
14	Bank Sampah belilik	Apresiasi Bank Sampah Aktif dan Mandiri	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
15	Bank Sampah teratai	Apresiasi Bank Sampah Aktif dan Mandiri	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
16	Bank Sampah yapentob	Apresiasi Bank Sampah Aktif dan Mandiri	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
17	SMK Negeri 1 Tanjung Pandan	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
18	SMP Negeri 1 Puding Besar	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
19	SMP Negeri 2 SIJUK	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
20	SMP Negeri 3 SIJUK	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022



No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	SMP Negeri 5 TANJUNGPANDAN	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
22	SMP Negeri 2 MEMBALONG	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
23	SMP Negeri 2 Muntok	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
24	SMP Negeri 5 Muntok	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
25	SMP Negeri 2 Simpang Teritip	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
26	SD Negeri 21 Sungailiat	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
27	SD Negeri 17 TANJUNGPANDAN	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
28	SD Negeri 30 TANJUNGPANDAN	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
29	SD Negeri 3 Parittiga	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Kepulauan bangka Belitung	2022
30	SMP N 1 Kelapa	Sekolah Adiwiyata Nasional	menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan RI	2022
31	SMP N 6 Tanjungpandan	Sekolah Adiwiyata Nasional	menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan RI	2022
32	SD N 30 Pangkalpinang	Sekolah Adiwiyata Nasional	menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan RI	2022
33	SD N 37 Pangkalpinang	Sekolah Adiwiyata Nasional	menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan RI	2022
34	SD N 23 Tanjungpandan	Sekolah Adiwiyata Nasional	menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan RI	2022
	PT. Timah, Tbk -unit Metalurgi Muntok	Peringkat Emas	menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan RI	2022



No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PT Sahabat Mewah dan Makmur	Peringkat Emas	menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan RI	2022
	PT Refined Bangka Tin	Peringkat Hijau	menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan RI	2022
	PT Timah, Tbk. -UPTP Batu Besi	Peringkat Hijau	menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan RI	2022
	PT Pertamina Patra Niaga - Regional Sumbagsel Fuel Terminal Pangkal Balam	Peringkat Hijau	menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan RI	2022
	PT Sariwiguna Bina Sentosa	Peringkat Hijau	menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan RI	2022
	PT. Gunung Maras Lestari	Peringkat Biru	menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan RI	2022
	PT. Karini Utama	Peringkat Biru	menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan RI	2022
	PT. Artha Cipta Langgeng	Peringkat Biru	menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan RI	2022
	PT ATD Makmur Mandiri	Peringkat Biru	menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan RI	2022
	PT Bangka Biogas Synergy	Peringkat Biru	menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan RI	2022
	PT. Gemilang Cahaya Mentari	Peringkat Biru	menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan RI	2022
	PT. Gunung Maras Lestari	Peringkat Biru	menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan RI	2022
	PT. Gunung Pelawan Lestari	Peringkat Biru	menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan RI	2022
	P. PT Karini Utama	Peringkat Biru	menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan RI	2022
	PT. Mitra Stania Prima	Peringkat Biru	menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan RI	2022



No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PT. Mitra Stania Prima	Peringkat Biru	menteri Lingkung Hidup dan Kehutanan RI	2022
	PT PLN Batam -PLTG MPP Air Anyir Bangka	Peringkat Biru	menteri Lingkung Hidup dan Kehutanan RI	2022
	PT PLN (Persero) -Wilayah Bangka Bangka Belitung Sektor Pembangkitan PLTU 3 Babel	Peringkat Biru	menteri Lingkung Hidup dan Kehutanan RI	2022
	PT PLN (Persero)Sektor Pembangkitan Babel - PLTD Merawang	Peringkat Biru	menteri Lingkung Hidup dan Kehutanan RI	2022
	PT Putra Bangka Mandiri	Peringkat Biru	menteri Lingkung Hidup dan Kehutanan RI	2022
	PT Tata Hampanan Eka Persada	Peringkat Biru	PROPER	2022
	PT Timah, Tbk. -Keteknikan dan Sarana (Balaikarya)	Peringkat Biru	PROPER	2022
	PT Timah, Tbk. - UnitTambang Darat Sungailiat	Peringkat Biru	PROPER	2022
	PT Timah, Tbk. - Unit Pertambangan Timah Primer Pemali	Peringkat Biru	PROPER	2022
	PT Bumi Permai Lestari	Peringkat Biru	PROPER	2022
	PT. Gunung Sawit Bina Lestari	Peringkat Biru	PROPER	2022
	PT. MP Ledong West Indonesia	Peringkat Biru	PROPER	2022
	PT. PLN (Persero)-Sektor Pembangkitan Babel-PLTD Muntok	Peringkat Biru	PROPER	2022
	PT. Sawindo Kencana	Peringkat Biru	PROPER	2022
	PT. Timah (Persero), Tbk. -UPDB BPP Bangka Barat	Peringkat Biru	PROPER	2022
	PT Artha Prima Nusa Jaya	Peringkat Biru	PROPER	2022
	PT Artha Prima Nusa Jaya Sembilan	Peringkat Biru	PROPER	2022
	PT. Bumi Sawit Sukses Pratama	Peringkat Biru	PROPER	2022
	PT. PLN (Persero)-Sektor Pembangkitan Babel-PLTD Toboali	Peringkat Biru	PROPER	2022
	PT Prisma Multi Karya III	Peringkat Biru	PROPER	2022

Keterangan :

Sumber: DLHK Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2022



Tabel-55. Kegiatan/Program Yang Diinisiasi Masyarakat

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data: 2022

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengolahan Sampah Organik harian di Markas BECAK-BABEL	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
2	Budidaya Maggot Black Soldier Fly di Markas BECAK-BABEL	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
3	Pembinaan Komunitas dan Pemuda Peduli Lingkungan	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
4	Pembinaan dan Pendampingan Gerakan Sedekah Sampah AL-BINA Bangka Desa Sempan	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
5	Edukasi Pendidikan dan Sekolah Adiwiyata (Pengolahan Sampah / Perubahan Iklim / Peduli Lingkungan)	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
6	Edukasi Masyarakat Pengelolaan Sampah	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
7	Aksi Bersih Pantai / Cleanup	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
8	Penghijauan / Penanaman / Rehabilitasi Lahan	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
9	Aksi Bersih Masjid (SIMAS) dan Bantuan peralatan kebersihan masjid	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
10	Pelestarian Liganungan di Pulau-Pulau Kecil	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
11	Pembuatan Lubang Resapan Biopori	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
12	Menyelenggarakan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2016-2023	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
13	Menyelenggarakan Peringatan World Cleaup Day (WCD) 2018-2022	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
14	Menyelenggarakan Peringatan Hari Air Seduni 2020-2023	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
15	Menyelenggarakan Peringatan Hari Mangrove Sedunia di Tj. Sunor Lestari 2020-2023	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
16	Menyelenggarakan Sosialisasi Peduli Sungai bersama BWS Babel	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
17	Menyelenggarakan kegiatan Rembuk Sampah bagi Komunitas Peduli Lingkungan	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
18	Menggalakkan Gerakan Sedekah Sampah di Kabupaten Bangka	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
19	Menggalakkan Gerakan QURBAN MINIM SAMPAH di Kabupaten Bangka	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023
20	Aksi Pembagian Tumbler Gratis untuk Pengendalian Sampah Plastik	BECAK BABEL	masyarakat	2022 - 2023

Sumber: Laporan Kegiatan Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi, DLH Prov. Kep. Bangka Belitung



Tabel-55.A Kegiatan/Program Yang Diinisiasi Masyarakat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data: 2020

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelatihan Pengolahan Sampah Rumah Tangga	DLH Prov. Kep. Bangka Belitung	Kelompok masyarakat di 7 kabupaten/ kota	2019
2	Sosialisasi dan Pelatihan Bank Sampah	DLH Prov. Kep. Bangka Belitung	Kelompok masyarakat di 7 kabupaten/ kota	2019
3.	Sosialisasi Pemanfaatan dan Pengolahan Sampah Bernilai Ekonomi	Komunitas Alam Pencinta Sosial Syaikh Abdurahman Sidik (KOPASSAS) Bangka Belitung		

Sumber: Laporan Kegiatan Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi, DLH Prov. Kep. Bangka Belitung

Tabel-56. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data: 2023

No.	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya, 2021* (juta rupiah)	Satu Tahun Sebelumnya, 2022** (juta rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PERTANIAN	16.887.329,98	18.287.196,74
	a. Pertanian Sempit	9.410.112,10	10.732.702,27
	- Tanaman Bahan Makanan	464.664,32	479.787,37
	- Tanaman Hortikultura	1.555.298,77	1.674.514,60
	- Tanaman Perkebunan	6.215.309,37	7.287.398,94
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya	973.860,15	1.074.164,85
	- Jasa Pertanian dan Perburuan	200.979,49	216.836,51



No.	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya, 2021* (juta rupiah)	Satu Tahun Sebelumnya, 2022** (juta rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Kehutanan	260.011,16	257.673,73
	c. Perikanan	7.217.206,72	7.296.820,74
2.	Pertambangan dan Penggalian	8.212.561,55	8.196.802,42
	a. Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi	466.653,76	594.887,27
	b. Pertambangan Bijih Logam	5.228.106,81	5.073.862,66
	c. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	2.517.800,98	2.528.052,49
3.	Industri Pengolahan	17.932.375,90	20.809.809,36
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	111.056,94	109.048,77
	a. Ketenagalistrikan	102.952,01	100.743,19
	b. Pengadaan Gas dan Produksi Es	8.104,93	8.305,58
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.680,46	18.649,95
6.	Bangunan	8.314.318,48	8.661.288,85
7.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	12.684.563,02	14.979.194,07
	a. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	1.979.604,51	2.120.092,53
	b. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	10.704.958,51	12.859.101,54
8.	Transportasi dan Pergudangan	3.093.015,12	4.195.578,93
	a. Angkutan Darat	1.262.841,21	1.478.523,90
	b. Angkutan Laut	530.438,74	609.864,11
	c. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	47.933,46	63.190,35
	d. Angkutan Udara	757.941,01	1.459.285,47
	e. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	493.860,70	584.715,10
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.579.054,52	2.933.522,65
	a. Penyediaan Akomodasi	87.116,28	105.579,42
	b. Penyediaan Makan Minum	2.491.938,24	2.827.943,23
10.	Informasi dan Komunikasi	1.787.423,41	1.988.099,91



No.	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya, 2021* (juta rupiah)	Satu Tahun Sebelumnya, 2022** (juta rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Real Estate	3.011.649,93	3.260.684,48
12.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.099.559,81	5.069.815,66
13.	Jasa-jasa	6.230.701,29	6.775.740,63
	- Jasa keuangan dan asuransi	1.560.353,70	1.792.591,05
	- Jasa perusahaan	230.562,61	268.479,65
	- Jasa pendidikan	2.520.497,66	2.656.354,78
	- Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1.222.128,90	1.280.430,21
	- Jasa lainnya	697.158,42	777.884,94
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	85.961.290,41	95.285.432,42
	PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS	85.494.636,65	94.690.545,15

Keterangan: * angka sementara; ** angka sangat sementara; satuan dalam juta rupiah

Sumber: BPS, 2023

<https://babel.bps.go.id/indicator/52/8/1/-tahunan-pdrb-menurut-lapangan-usaha-atas-dasar-harga-berlaku.html>

Access Time: July 13, 2023, 7:14 pm



Tabel-57. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Provinsi/Kabupaten/Kota:
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2023

No.	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya, 2021* (juta rupiah)	Satu Tahun Sebelumnya, 2022** (juta rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PERTANIAN	10.768.716,72	10.878.405,81
	a. Pertanian Sempit	6.809.278,92	7.067.658,73
	- Tanaman Bahan Makanan	314.643,15	308.818,22
	- Tanaman Hortikultura	1.015.024,13	1.020.090,84
	- Tanaman Perkebunan	4.768.154,69	4.993.671,12
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya	583.849,23	613.729,73
	- Jasa Pertanian dan Perburuan	127.607,72	131.348,82
	b. Kehutanan	148.898,70	137.116,74
	c. Perikanan	3.810.539,10	3.673.630,34
2.	Pertambangan dan Penggalan	6.450.677,08	6.474.560,62
	a. Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi	266.374,15	232.516,05
	b. Pertambangan Bijih Logam	4.603.829,97	4.696.857,76
	c. Pertambangan dan Penggalan Lainnya	1.580.472,96	1.545.186,81
3.	Industri Pengolahan	11.873.923,26	12.485.311,74
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	61.027,84	58.958,46
	a. Ketenagalistrikan	55.603,65	53.467,62
	b. Pengadaan Gas dan Produksi Es	5.424,19	5.490,84
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.195,34	10.607,99
6.	Bangunan	4.897.577,00	4.845.588,21
7.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	7.663.257,30	8.477.746,73
	a. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	1.218.533,29	1.274.714,64
	b. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	6.444.724,01	7.203.032,09
8.	Transportasi dan Pergudangan	1.879.607,93	2.273.516,43
	a. Angkutan Darat	736.371,69	809.632,16
	b. Angkutan Laut	362.796,43	400.530,31



No.	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya, 2021* (juta rupiah)	Satu Tahun Sebelumnya, 2022** (juta rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	26.199,04	32.888,91
	d. Angkutan Udara	460.591,20	705.673,35
	e. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	293.649,57	324.791,70
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.414.895,96	1.561.277,01
	a. Penyediaan Akomodasi	53.148,93	63.396,62
	b. Penyediaan Makan Minum	1.361.747,03	1.497.880,39
10.	Informasi dan Komunikasi	1.571.707,64	1.726.625,91
11.	Real Estate	1.928.668,73	2.027.402,62
12.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.137.402,82	3.109.829,75
13.	Jasa-jasa	3.711.988,69	3.873.366,57
	- Jasa keuangan dan asuransi	972.780,24	1.027.003,97
	- Jasa perusahaan	125.504,53	139.299,08
	- Jasa pendidikan	1.402.512,85	1.446.428,29
	- Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	804.542,57	821.939,04
	- Jasa lainnya	406.648,50	438.696,19
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	55.369.646,31	57.803.197,85
	PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS	55.103.272,16	57.570.681,80

Keterangan: * angka sementara; ** angka sangat sementara; menurut harga konstan tahun 2010; satuan dalam juta rupiah

Sumber: BPS, 2023

<https://babel.bps.go.id/indicator/52/32/1/-tahunan-pdrb-menurut-lapangan-usaha-atas-dasar-harga-konstan-2010-100-.html>

Access Time: July 14, 2023, 10:39 am



Tabel-58. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data: 2023

No.	Jenis Produk Hukum Bidang Lingkungan Hidup	Jenis Produk Hukum Bidang Kehutanan	Nomor dan Tanggal	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peraturan Daerah		No. 3 Tahun 2020	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040
2	Peraturan Daerah		No. 10 Tahun 2020	Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
3	Peraturan Daerah		No. 5 Tahun 2021	Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan Taman Bumi (Geopark)
4	Peraturan Gubernur		No. 32 Tahun 2020	Pedoman Pengendalian Pencemaran Air Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Budidaya Tambak Udang
5	Peraturan Gubernur		No. 33 Tahun 2020	Pendanaan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Kewenangan Provinsi Yang Dibebankan Kepada Pemrakarsa/Pelaku Usaha
6	Peraturan Gubernur		No. 37 tahun 2020	Pedoman Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
7	Peraturan Gubernur		No. 52 Tahun 2020	Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022
8	Peraturan Gubernur		No. 48 Tahun 2020	Pedoman Umum Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Masa Pandemicorona Virus Disease 2019 (Covid-19) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020

Sumber: jdih.babelprov.go.id, 2023



Tabel-59. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2023

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun 2021(Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		BIDANG KESEHATAN	35,718,283,751	152,224,563,060
	PAD	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	34,143,043,750	120,839,726,023
	DAK Non Fisik - BOKB-KB			
	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan			
	PAD, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	62,348,841	802,372,487
	PAD	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1,512,891,160	30,582,464,550
2		BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	143,270,002,156	244,241,055,620



No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun 2021(Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PAD, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	22,778,750,383	47,718,101,313
	PAD	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7,533,062,000	249,998,500
	PAD	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0	473,991,619
	PAD	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	598,720,000	2,854,343,719
	PAD	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1,198,950,000	1,556,619,288
	PAD	Program Pengembangan Perumahan	441,089,873	718,298,000
	PAD	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	3,369,709,414	3,885,909,734
	PAD	Program Penyelenggaraan Jalan	105,160,574,193	166,254,819,099
	PAD	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2,189,146,293	1,803,624,000
	PAD	Program Penatagunaan Tanah	0	0
	PAD	Program Penataan Bangunan Gedung	0	18,725,350,348
3		BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	7,253,594,406	14,773,760,210
	PAD	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	935,240,200	1,142,609,500



No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun 2021(Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PAD	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4,334,204,024	4,052,180,980
	PAD	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	0	131,500,000
	PAD	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	54,003,600	309,777,020
	PAD	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	69,737,006	449,892,700
	PAD	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0	83,600,000
	PAD	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	55,205,240	101,999,600
	PAD	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0	584,869,836
	PAD	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0	229,228,800
		Program Pengelolaan Hutan	1,496,468,538	5,797,080,620
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	88,247,669	647,069,200



No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun 2021(Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	82,148,000	729,963,454
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	138,340,129	513,988,500
4		BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	126,199,923	879,314,000
	PAD	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	42,497,359	368,339,000
	PAD	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	41,825,564	401,000,000
	PAD	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	41,877,000	109,975,000
5		BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN	491,287,692	225,050,000
	PAD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	491,287,692	35,000,000
	DANA HIBAH RISET			149,050,000
	DANA ALOKASI RISET DARI PENELITIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			41,000,000
6		Bidang Penanggulangan Bencana	3,856,983,362	5,519,963,016



No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun 2021(Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PAD	Program Penanggulangan Bencana	3,856,983,362	5519963016
		TOTAL	190,716,351,290	417,863,705,906

Keterangan : *)Data diolah dari sistem SIPD APBD induk TA. 2023

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022



Tabel-60. Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2022

No.	Sumber	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Pajak	848.653.198.396,00
2	Retribusi	13.609.682.900,00
3	Laba BUMD	6.500.000.000,00
4	Pendapatan lainnya yang Sah	169.542.058.250,00
5	Jumlah	1.038.304.939.546,00

Keterangan : *) Data diolah dari Lampiran 1 PERGUB ABPD INDUK TA.2023

Sumber: Badan Keuangan Daerah Prov.Kep.Babel



Tabel-61. Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2023

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
1	2	3	4	5
1	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota	Hijau Biru Babelku	Merupakan inovasi yang diinisiasi oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghidupkan kembali Provinsi Kepulauan Bangka Belitung upaya untuk menjaga alam dan untuk menghidupkan kembali bukaan lahan akibat aktivitas tambang ilegal dari kerusakan akibat pertambangan baik di darat maupun pertambangan laut, yang terintegrasi dengan regulasi, sosialisasi dan pendanaan serta aksi-aksi yang dilakukan untuk perbaikan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	
2.	Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang	Pengolahan sampah menjadi pelet sebagai bahan bakar energi listrik	Sampah diolah menjadi bahan bakar energi listrik dengan proses Peuyeumisasi. Peuyeumisasi sampah dilakukan dengan persiapan cara Probiotik, fermentasi dan pemrosesan secara komposting serta peragian. Pelet sampah yang dihasilkan dari proses tersebut kemudian mengalami proses gasifikasi menghasilkan gas bahan bakar untuk generator engine	Kesepakatan bersama antara Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung dengan PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung NOMOR: 671.11/13/DLH/2019 NOMOR: 002.MOU/HKM.00.01/UIW.BABEL/2019 tentang



No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
				Pengembangan Energi Listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DLHK)	Aplikasi "Si Terbit DLH"	Merupakan inovasi yang dapat digunakan dalam pemberian perizinan, melihat tumpang tindih penggunaan lahan serta perubahan penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	
4.	BPDAS/ Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kompos BABEL	Kompos blok ini di khususkan pada perbaikan lahan eks tambang, untuk percepatan reklamasi lahan eks tambang	
5.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DLHK)	Sedekah Pohon	Inovasi ini diharapkan mamapu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perbaikan kualitas lahan dengan tigeline <i>"menanam untutk amal jariah"</i> . Diharapkan timbul kesadaran kolektif masyarakat dalam meningkatkan kegiatan penghijauan dengan menanam pohon sebagai bentuk adopsi dari inovasi	
6.	Kabupaten Bangka Tengah	Abang Timah untuk Bu Disa	Lahan bekas tambang timah untuk budidaya padi sawah, memanfaatkan lahan kritis bekas tambang timah menjadi lahan produktif dengan menggunakan pendekatan kongkrit dan holistik-sistemik.	



No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
7.	PT.Timah,Tbk dan PT.SMM	Inovasi perusahaan dengan pemerintah daerah bangka belitung dan masyarakat	Inovasi pengelolaan lahan, Energi dan pesisir dan laut	
9.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DLHK)	Literasi Lingkungan	Program literasi lingkungan ini diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengikut sertakan pihak-pihak swasta untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dengan melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah dalam penyediaan bibit yang akan ditanam, proses pembibitan di lakukan di sekolah-sekolah kemudian bibit tersebut di beli oleh perusahaan unttuk penghijauan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
10.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Inovasi pembangkit listrik tenaga surya (plts) energi baru terbarukan	Pemasangan PLTS Rooftop di Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka belitung	



No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
11.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BPBD)	siTangguh GIMA	Kehadiran aplikasi ini sangat membantu karena fitur kebencanaan menampilkan variable waktu bencana, titik koordinat, jenis bencana, kronologis serta kerugian, bantuan, luas terdampak dan korban jiwa serta informasi pendukung seperti profil desa dan kelurahan disertai parameter RT/RW/KK , luas wilayah, populasi , jenis kelamin, penduduk rentan maupun informasi rawan bencana	
12.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Eco Brick	Metode eco brik ini merupakan metode untuk mengurangi sampah plastik serta mendaur ulangnya dengan metode botol plastik di jadikan benda lain yang lebih berguna.	
13.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pembuatan BBM dengan teknologi pirolisis sampah	Pengolahan sampah plastik menjadi BBM dilakukan menggunakan metode pirolisis, yaitu proses degradasi suatu material dengan suplai panas yang berjalan tanpa melibatkan oksigen atau dengan oksigen namun dengan jumlah sangat sedikit menghasilkan produk dalam bentuk padat, cair, dan gas	

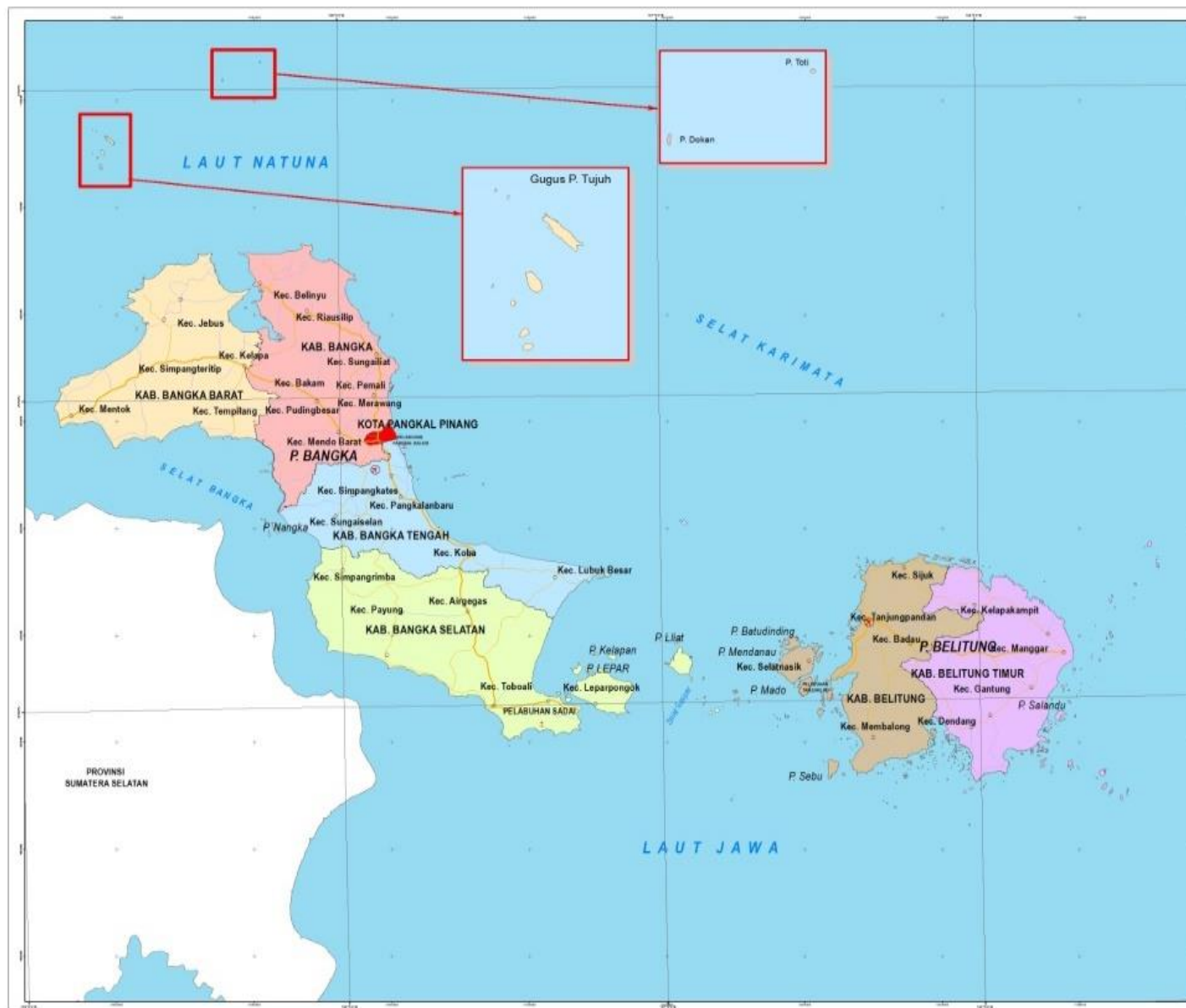


No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
14	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kampung Keluarga Cikar	Inovasi ini diinisiasi oleh DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk peningkatan kesejahteraan dan sumber daya manusia di desa-desa. Adanya Kampung Keluarga Cikar ini, pendataan akte kelahiran meningkat, jumlah industri rumahan meningkat, jumlah perlindungan anak terpadu serta keikutsertaan program Keluarga Berencana juga meningkat	Pergub Nomor 40 Tahun 2018, kemudian disempurnakan kembali melalui Pergub No 56 tahun 2020.
15	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kampung bebas malaria Kampung Sinergi Bebas Malaria (KAMPUNG SIBEMA)	Inisiasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
16	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Si Centing (siap cegah stunting)	Diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk pencegahan stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
17.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Gule Kabung	Inisiasi oleh PJ. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
18.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Gerakan Jumat Bersih	Inisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
19.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Babel Menanam	Inisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung, 2023

LAMPIRAN DATA SPASIAL





PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2014 - 2034

**PETA ADMINISTRASI
PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Sekala 1 : 650.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Gnd : Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 Zone 48 Selatan

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

BATAS ADMINISTRATIF	IBUKOTA ADMINISTRATIF
----- Batas Kabupaten	● Batukaca Kabupaten
----- Batas Kecamatan	● Batukaca Kecamatan
PERHUBUNGAN	PERAIRAN
----- Jalan Utama	----- Garis Pantai
----- Jalan Kolektor	
----- Jalan Lain	

WILAYAH ADMINISTRASI

 KAB. BANGKA
 KAB. BANGKA BARAT
 KAB. BANGKA SELATAN
 KAB. BANGKA TENGAH
 KAB. BELITUNG
 KAB. BELITUNG TIMUR
 KOTA PANGKAL PINANG

Sumber Peta :

- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000, Badan Informasi Geospasial, 2005

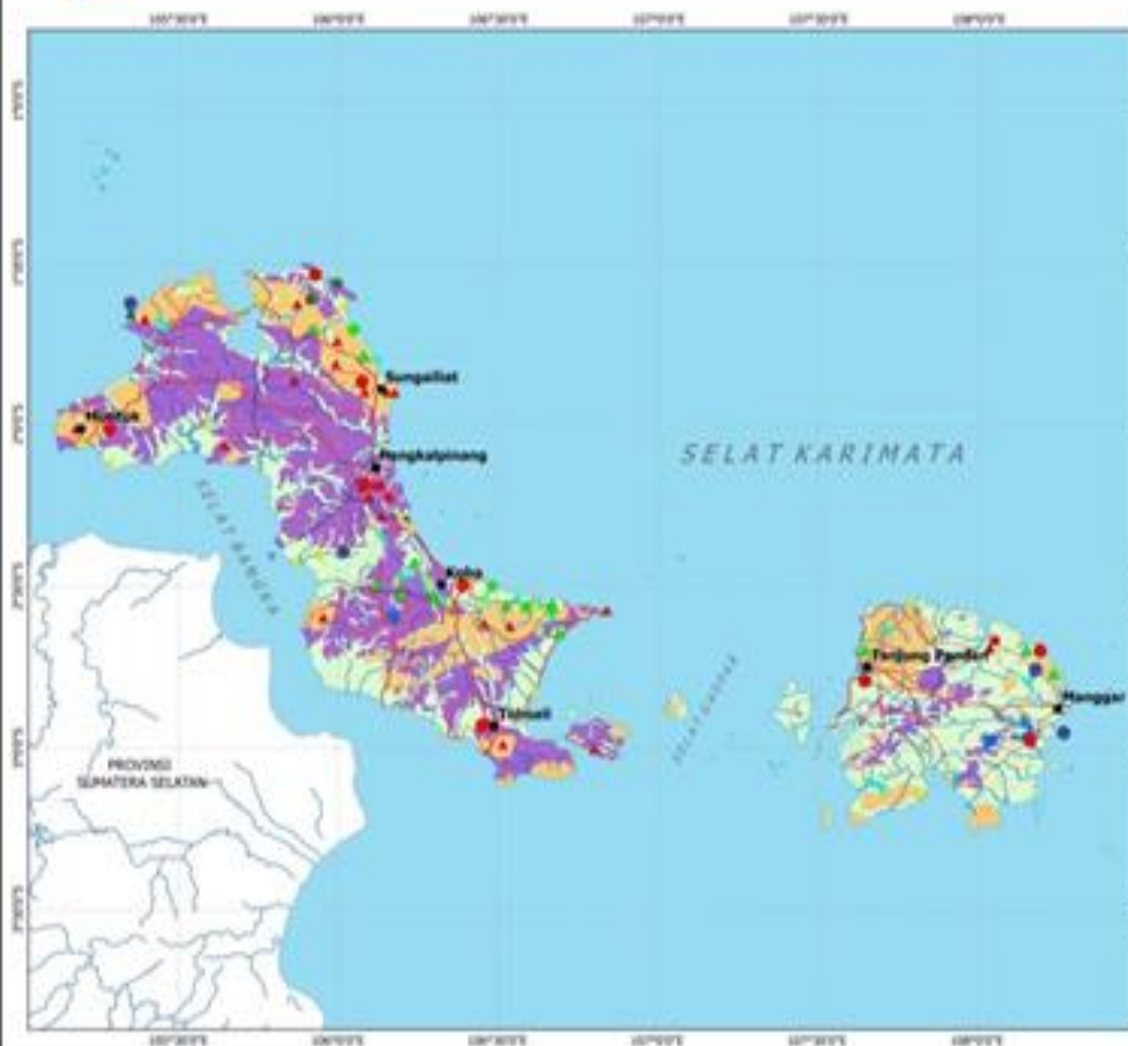
- Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- BAKPEK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



PETA SEBARAN POTENSI MINERAL DAN BATUAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017

Proyeksi: UTM
Datum: WGS 84
Datum Reference: 1974
Scale: 1:500,000
Date: 2017



Keterangan

— Batas Kabupaten — Batas Kecamatan — Batas Desa
— Batas Kabupaten/Kota — Batas Kecamatan — Batas Desa

Geologi Sederhana

— Satuan Batuan Tesis/Pra-Tesis
— Satuan Batuan Sedimen/Metasedimen
— Satuan Batuan Vulkanik Kuarter

Komoditas	Potensi (Ton)	Komoditas	Potensi (Ton)
Orakel	11.000.000.000	Bauksit	800.000
Granit	300.000.000.000	Batu Bara	10.000.000
Kalkir	7.000.000.000	Marsit	100.000
Lampung	10.000.000	Pasir	700
PSB	1.000.000.000	Sing	10.000
Sel / Batu Bara	200.000	Tanah	1.000.000
Pasir Zirkon	30.000	Tanah	400.000
Pasirkuara	7.000.000.000	Tanah Pasir	10.000
		Kasut	30.000

Sumber Peta:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia 1:50.000 (2007)
2. Profil Geologi: Peta Geologi Lantai Bangsa Utara (1994), Bangka Selatan (1995) dan Belitung (1995)
3. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2014)
4. Data Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bangka (2005)

Inset Peta



DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



COME & EXPLORE
Bangka Belitung

PEMERINTAH PROVINSI
BANGKA BELITUNG



KAJIAN STRATEGI PENGEMBANGAN
DESTINASI UNGGULAN DAN DESA WISATA
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PETA
STRUKTUR PERWILAYAHAN PARIWISATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Proyeksi: Transverse Mercator
Datum: WGS 84 Zone 48 Selatan



KETERANGAN

BATAS ADMINISTRATIF
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan

IBUKOTA ADMINISTRATIF
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan

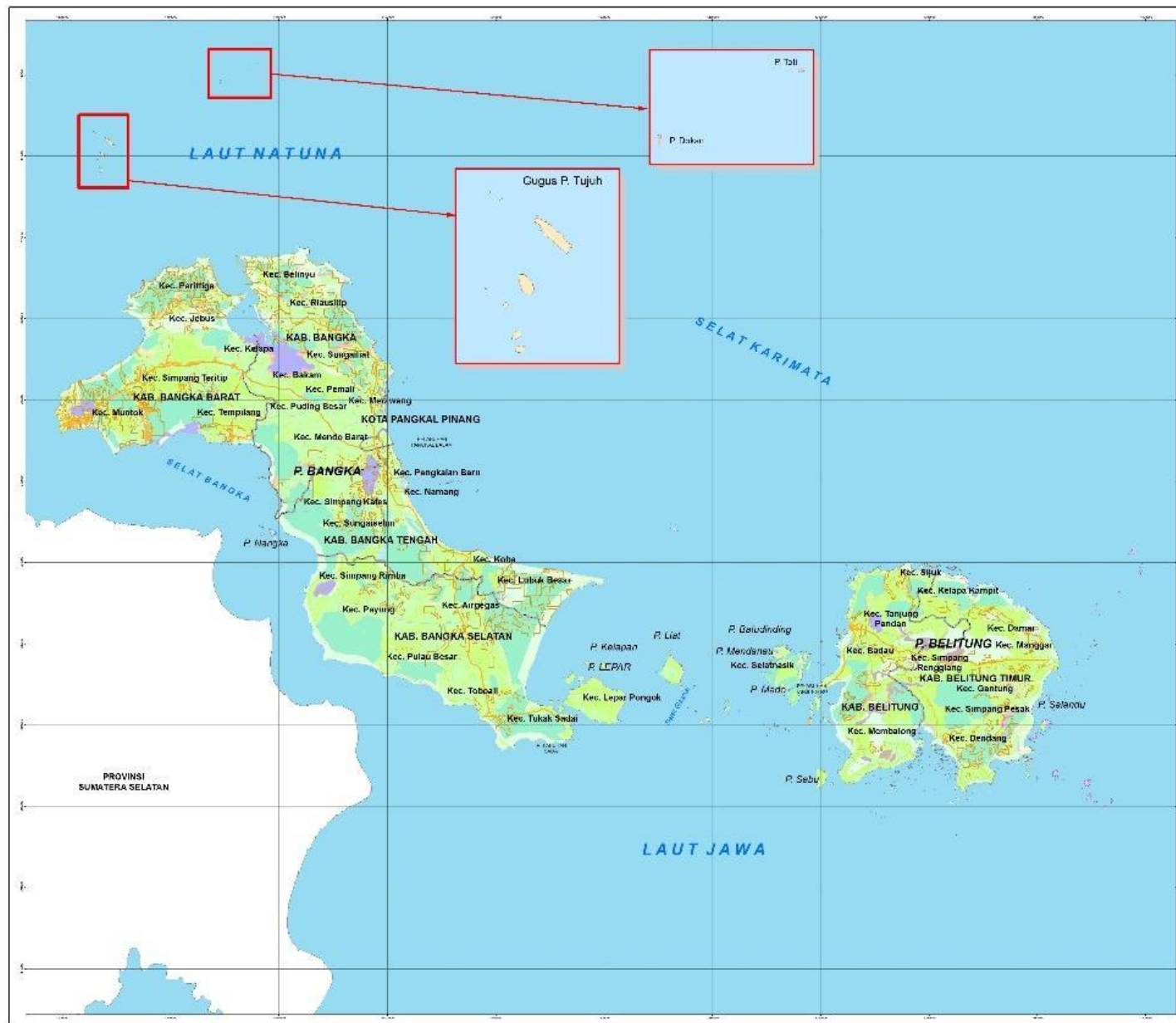
PERHUBUNGAN
Jalan Utama
Jalan Kolektor
Jalan Lain

PERAIRAN
Garis Pantai

- | | |
|--|--|
| 1. Pantai dan Mercusuar Tanjung Kelian | 28. Agrowisata Desa Nyelanding |
| 2. Kota Tua Muntok | 29. Benteng Toboali |
| 3. Pesanggrahan Menumbing | 30. Pantai Tanjung Kerauak |
| 4. Pembuatan empe-empe Desa Belo Laut | 31. Pulau Lepar |
| 5. Pantai Romodong | 32. Pantai Liat |
| 6. Pantai Penyusuk | 33. Pulau Mendanau |
| 7. Kampung Gedong | 34. Kepulauan Salman |
| 8. Pantai Pasi Tenggil | 35. Kota Tanjung Pandan |
| 9. Pantai Tanjung Pesona | 36. Pantai Bukit Berahu dan Desa Tanjung Binga |
| 10. Pantai Matras | 37. Pantai Tanjung Keliyung |
| 11. Pantai Air Anyer | 38. Pantai Tanjung Tinggi |
| 12. Civic Centre | 39. Pulau Lengkuas |
| 13. Pantai Pasi Padi | 40. Pantai Burung Mandi |
| 14. Hutan Kota Tuatutu | 41. Kepulauan Mempoak |
| 15. Museum Tanah | 42. Desa Langgang 'Laskar Pelangi' |
| 16. Situs Kota Kapur | 43. Pantai Punal |
| 17. Agrowisata Desa Namang | 44. Pantai Penyabong |
| 18. Desa Nelayan Kurau | 45. Tamsus Batu Mentas |
| 19. Pulau Ketawai | |

Destinasi primer
 Pusat Pelayanan Pariwisata Provinsi
 Pusat Pelayanan Destinasi Unggulan

Sumber peta dasar:
RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010-2030



PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2012 - 2032

**PETA RENCANA POLA RUANG
PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Skala 1 : 650.000

Proyeksi: Sistem UTM Transverse Mercator
Datum: Indonesia 1960
Garis UTM: 48
Garis Meridian: 105° 48' 00" Bujur Timur

DIAGRAM LOKASI

Skala 1 : 21.000.000

KETERANGAN

DATAS ADMINISTRATIF	IBUKOTA ADMINISTRATIF
Wilayah Kecamatan	ibu kota Kabupaten
Wilayah Kecamatan	ibu kota Kecamatan

PERHUBUNGAN

Jalan Utama
Jalan Kolektor
Jalan Lain

PERAIRAN

Garis Pantai

Kawasan Lindung

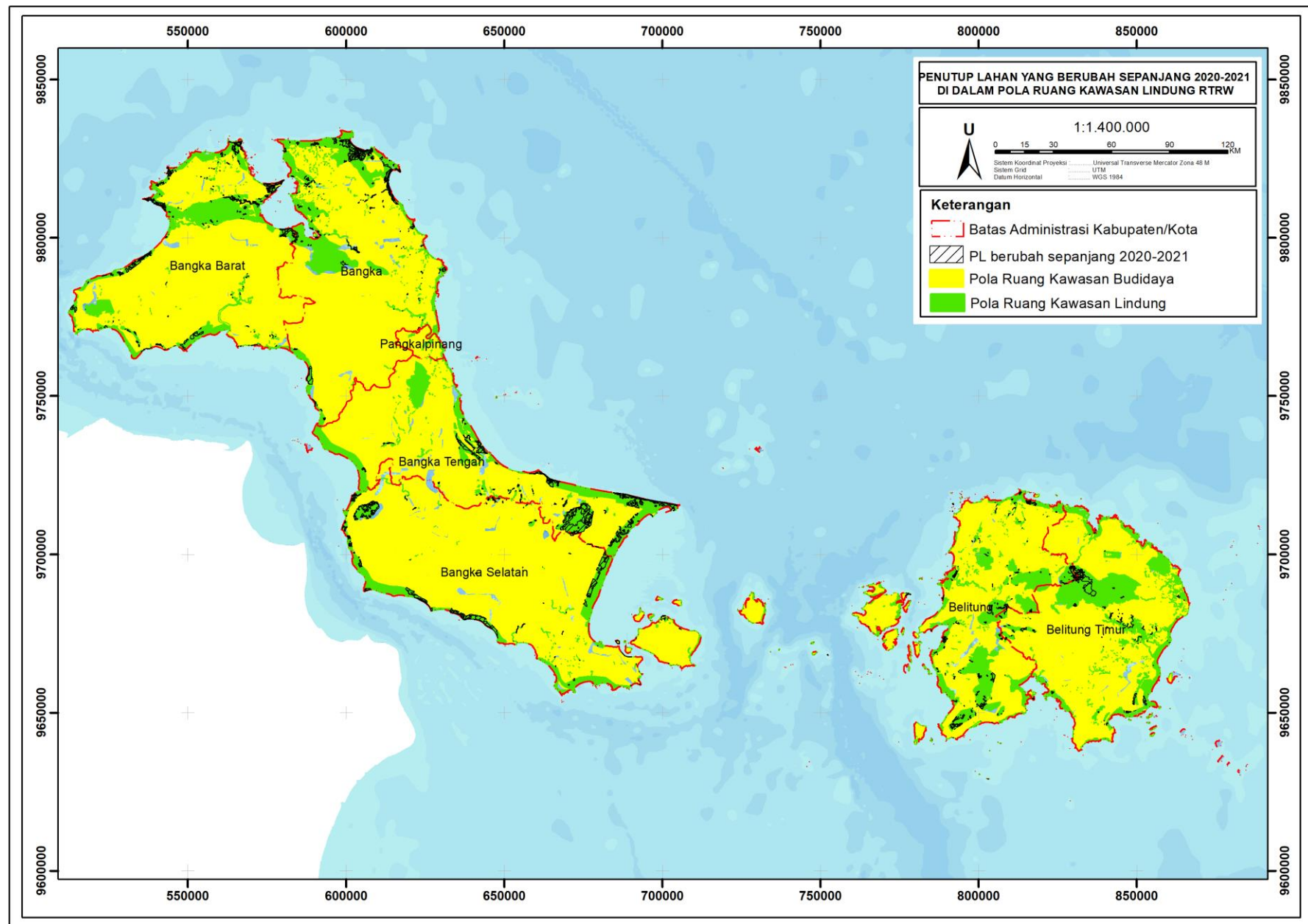
Hutan Lindung
Hutan Konservasi
Kawasan Strategis Air
Sampah Bersih Pantai
Sampah Bersih
Kawasan Strategis Lintas

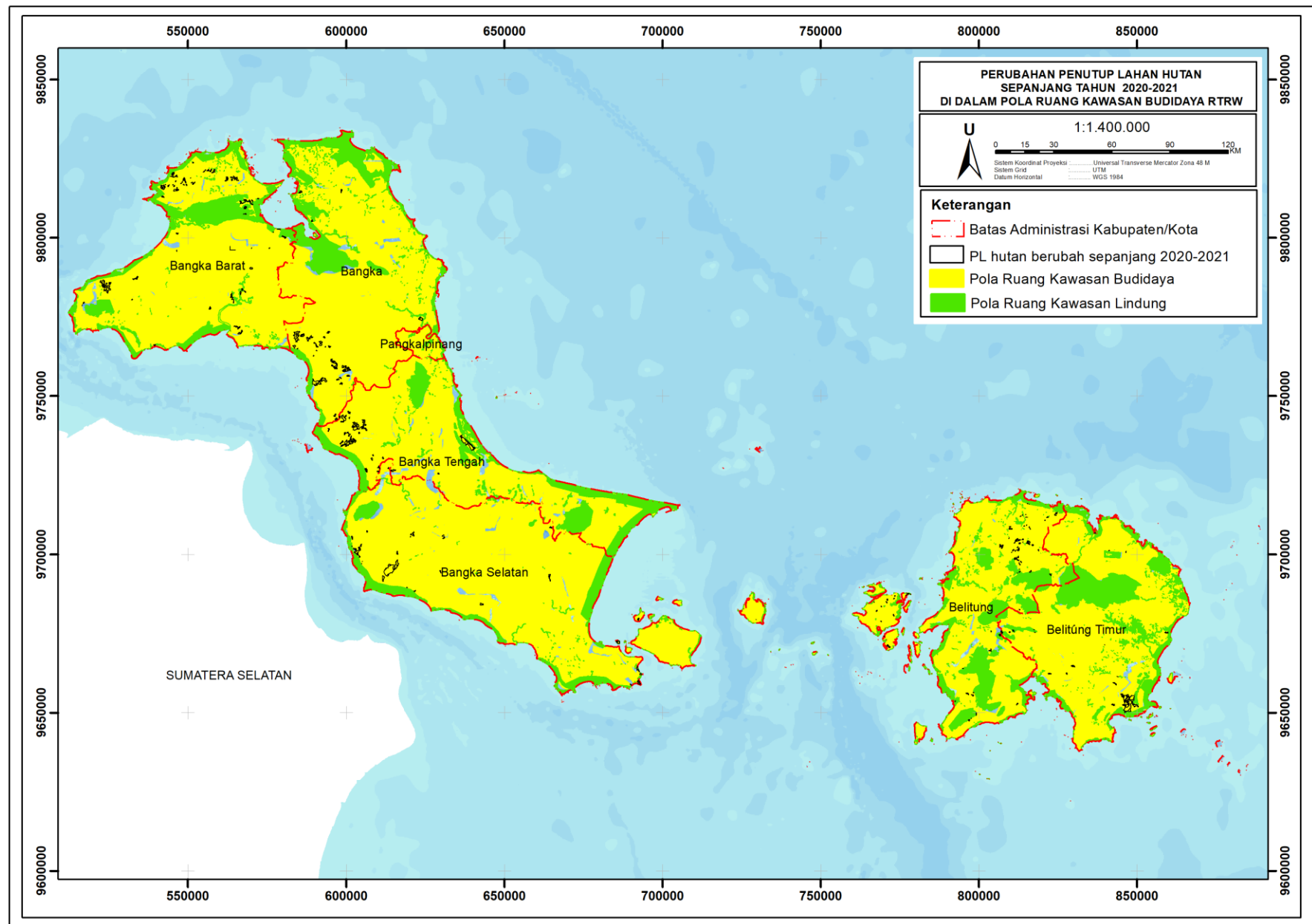
Kawasan Budidaya

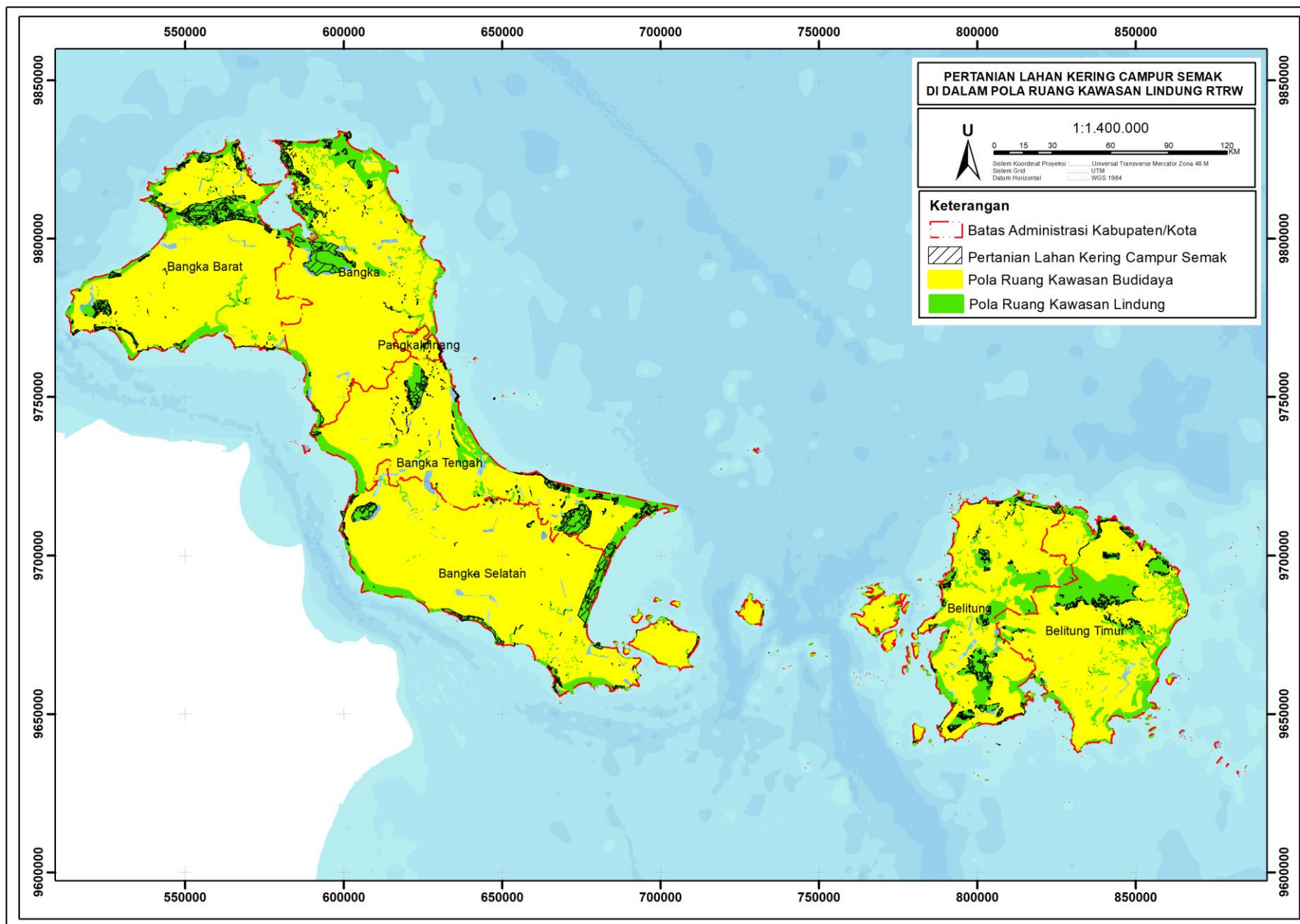
Hutan Produksi Tetap
Kawasan Pertanian
Kawasan Perikanan
Kawasan Perikanan

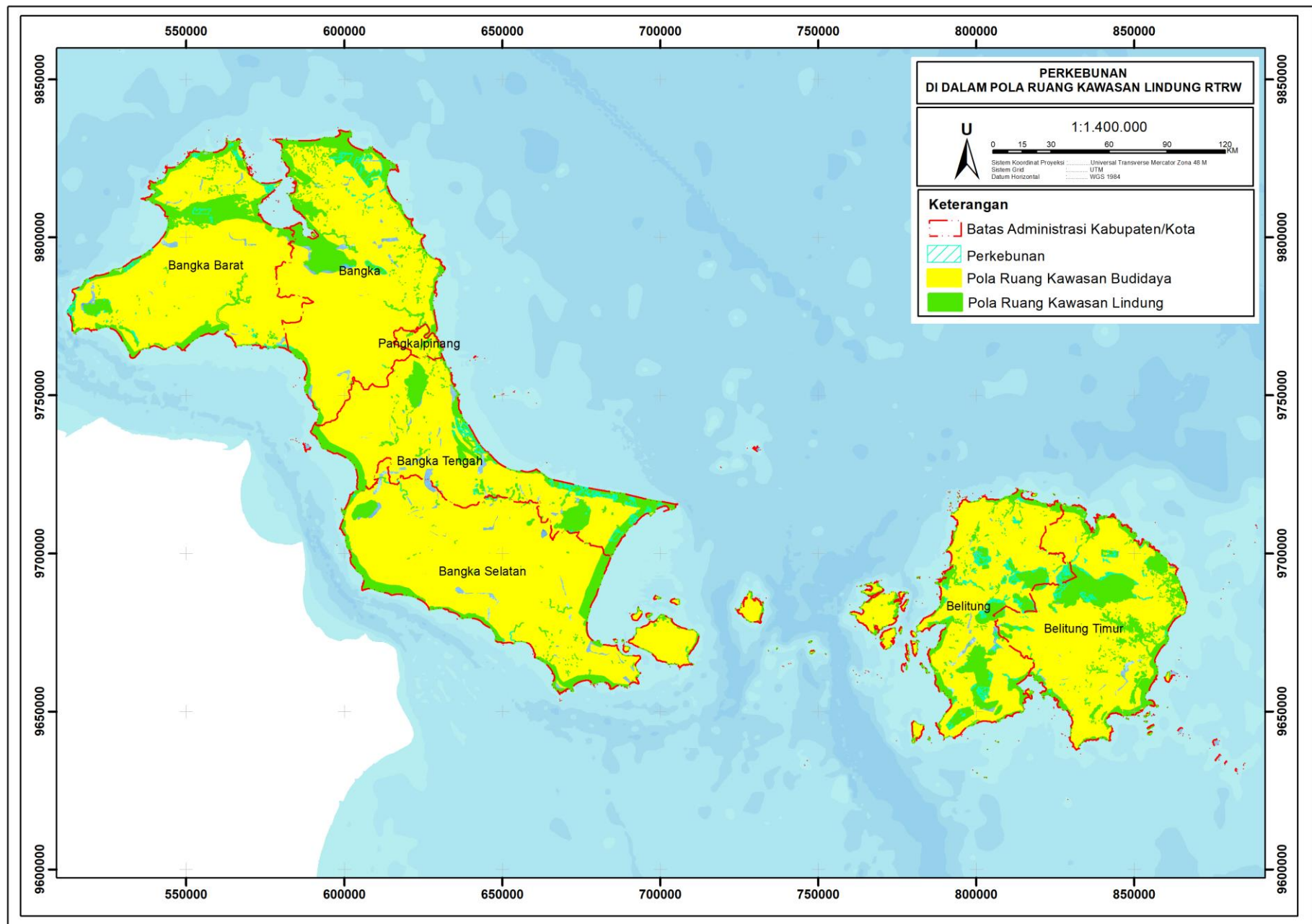
Sumber Peta:
1. Data Geospasial Tahun 2011
2. Data Geospasial Tahun 2012
3. Data Geospasial Tahun 2013
4. Data Geospasial Tahun 2014
5. Data Geospasial Tahun 2015
6. Data Geospasial Tahun 2016
7. Data Geospasial Tahun 2017
8. Data Geospasial Tahun 2018
9. Data Geospasial Tahun 2019
10. Data Geospasial Tahun 2020
11. Data Geospasial Tahun 2021
12. Data Geospasial Tahun 2022
13. Data Geospasial Tahun 2023
14. Data Geospasial Tahun 2024
15. Data Geospasial Tahun 2025
16. Data Geospasial Tahun 2026
17. Data Geospasial Tahun 2027
18. Data Geospasial Tahun 2028
19. Data Geospasial Tahun 2029
20. Data Geospasial Tahun 2030

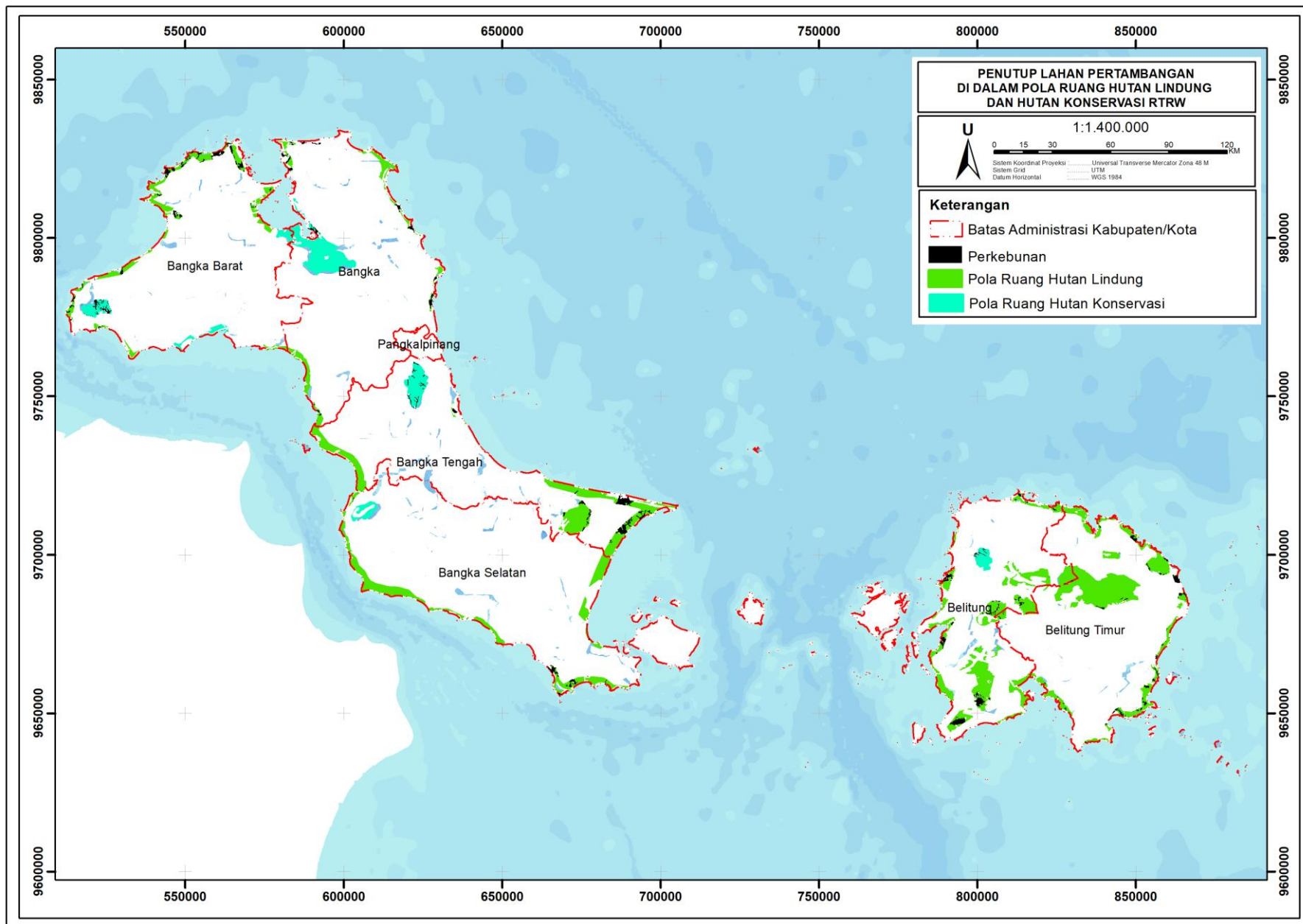
Catatan: Peta ini merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.





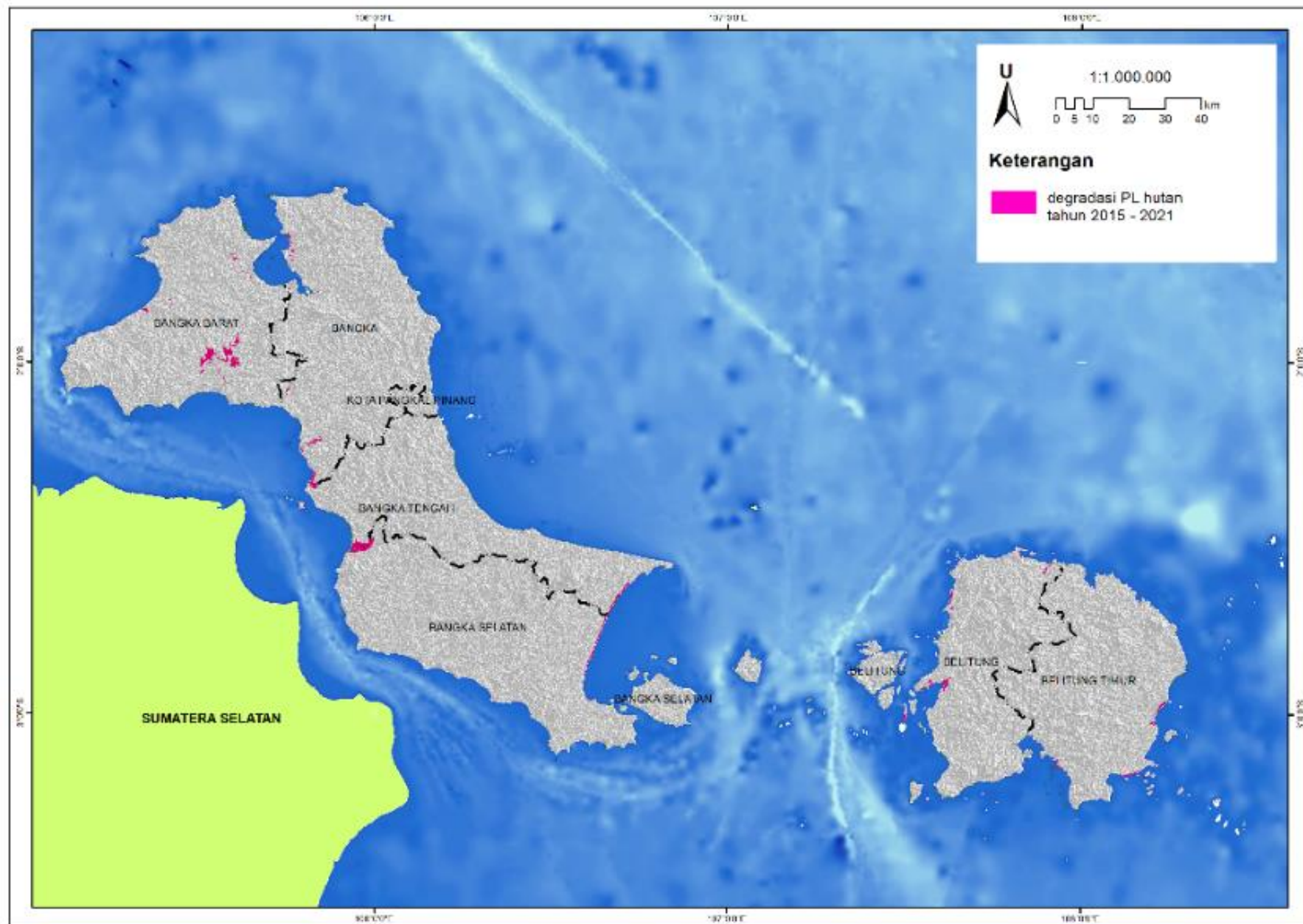


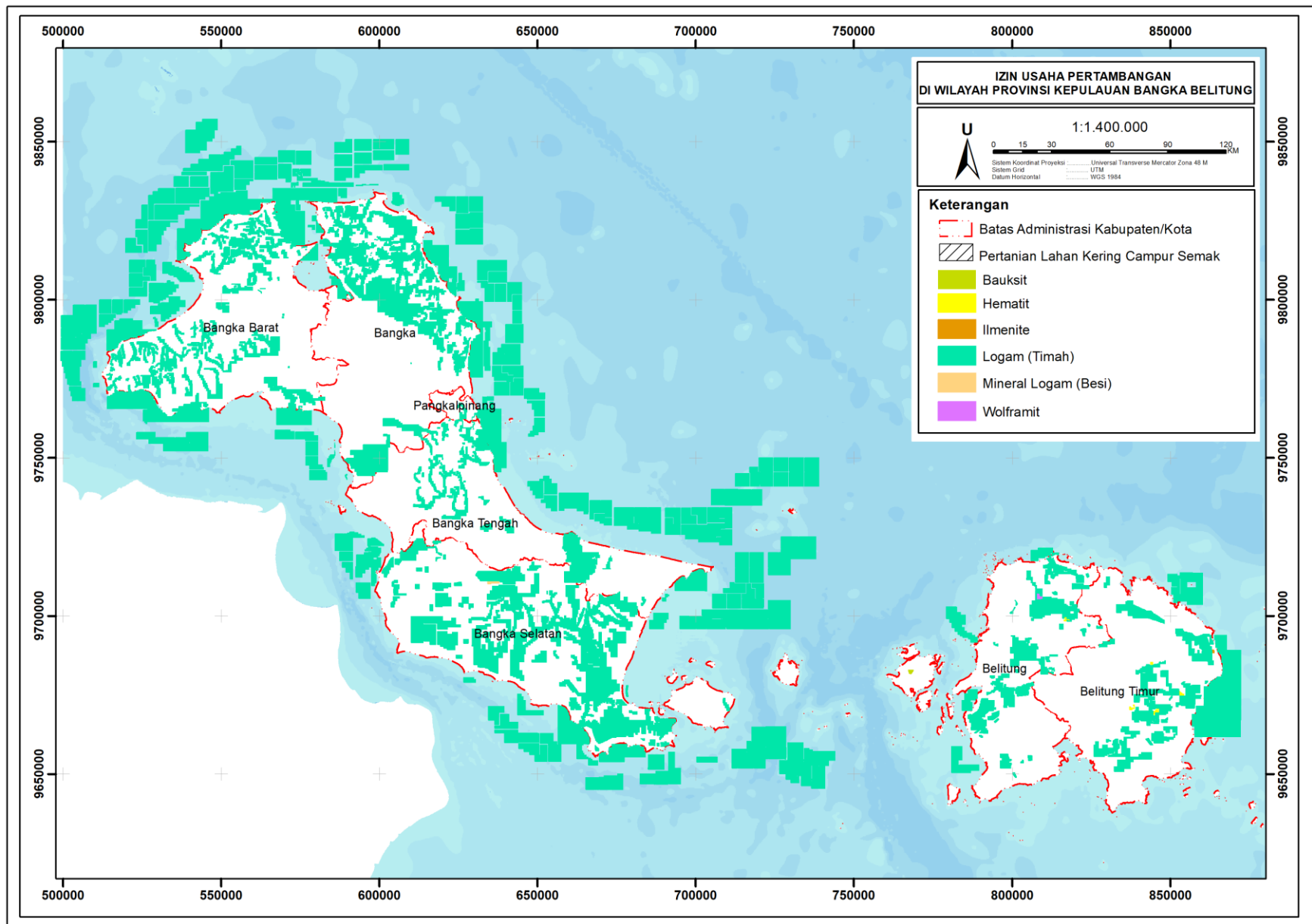


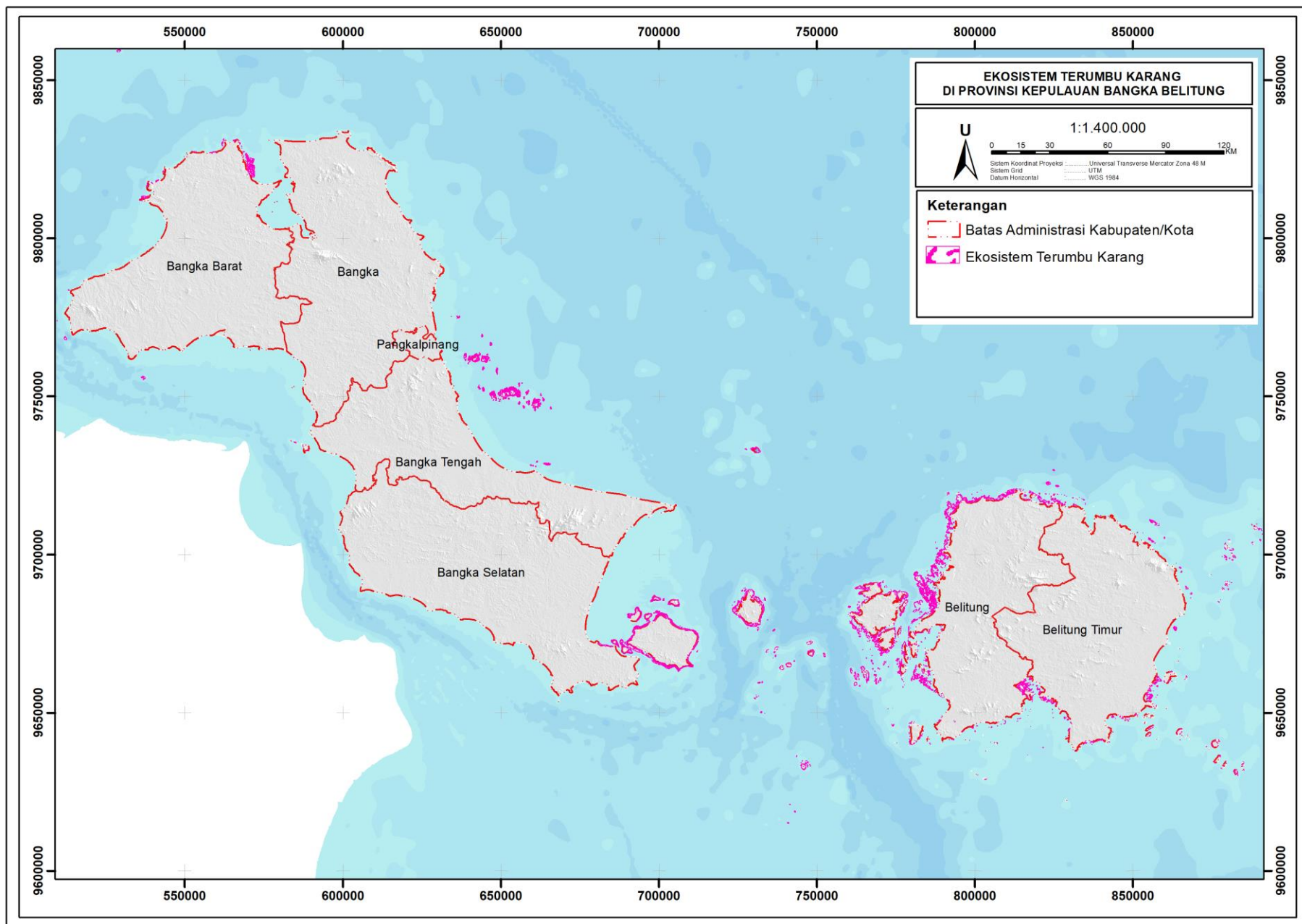


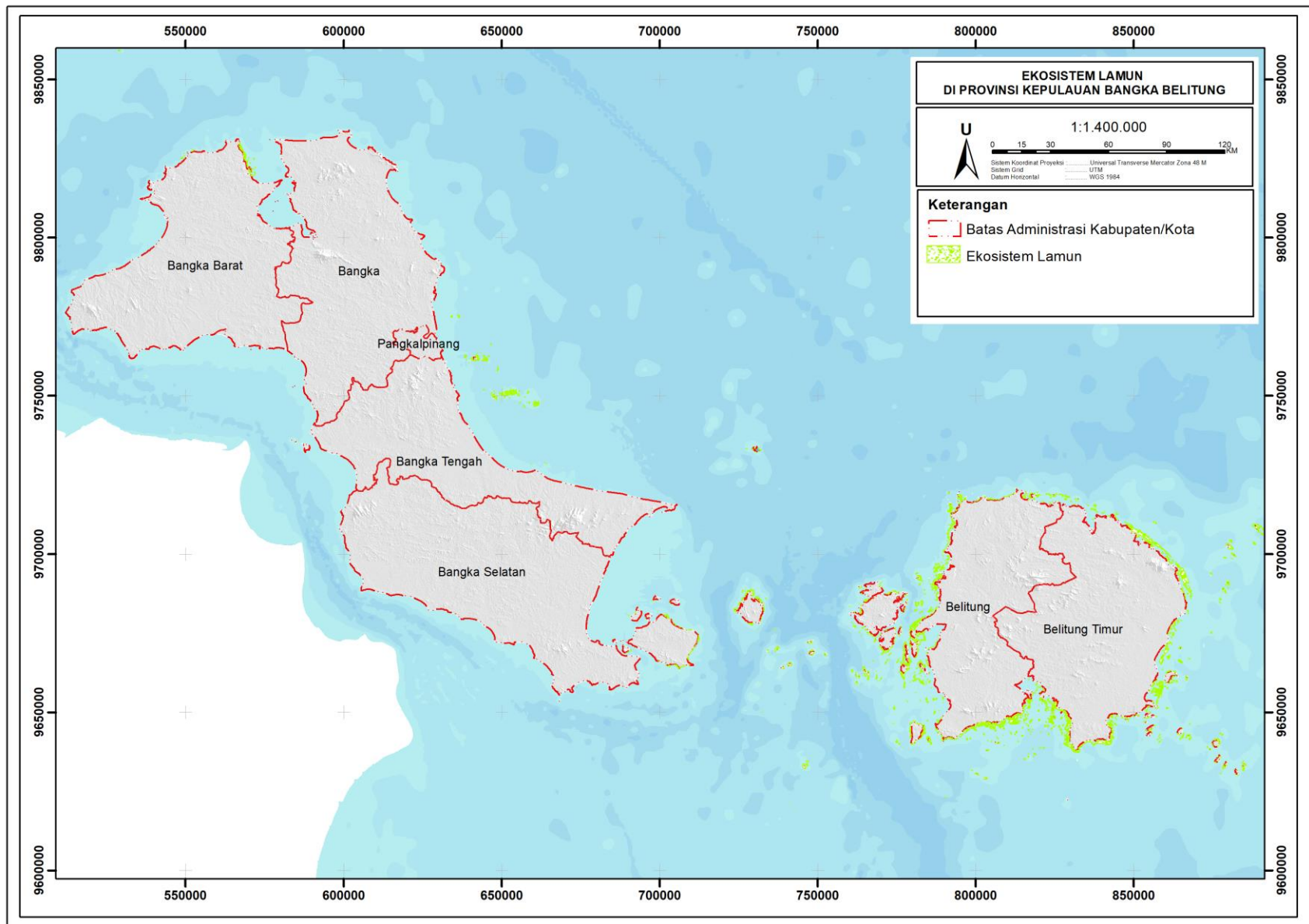
Perubahan Penutup lahan Vegetasi Tahun 2020 Menjadi Penutup Lahan Tak Bervegetasi di Tahun 2021

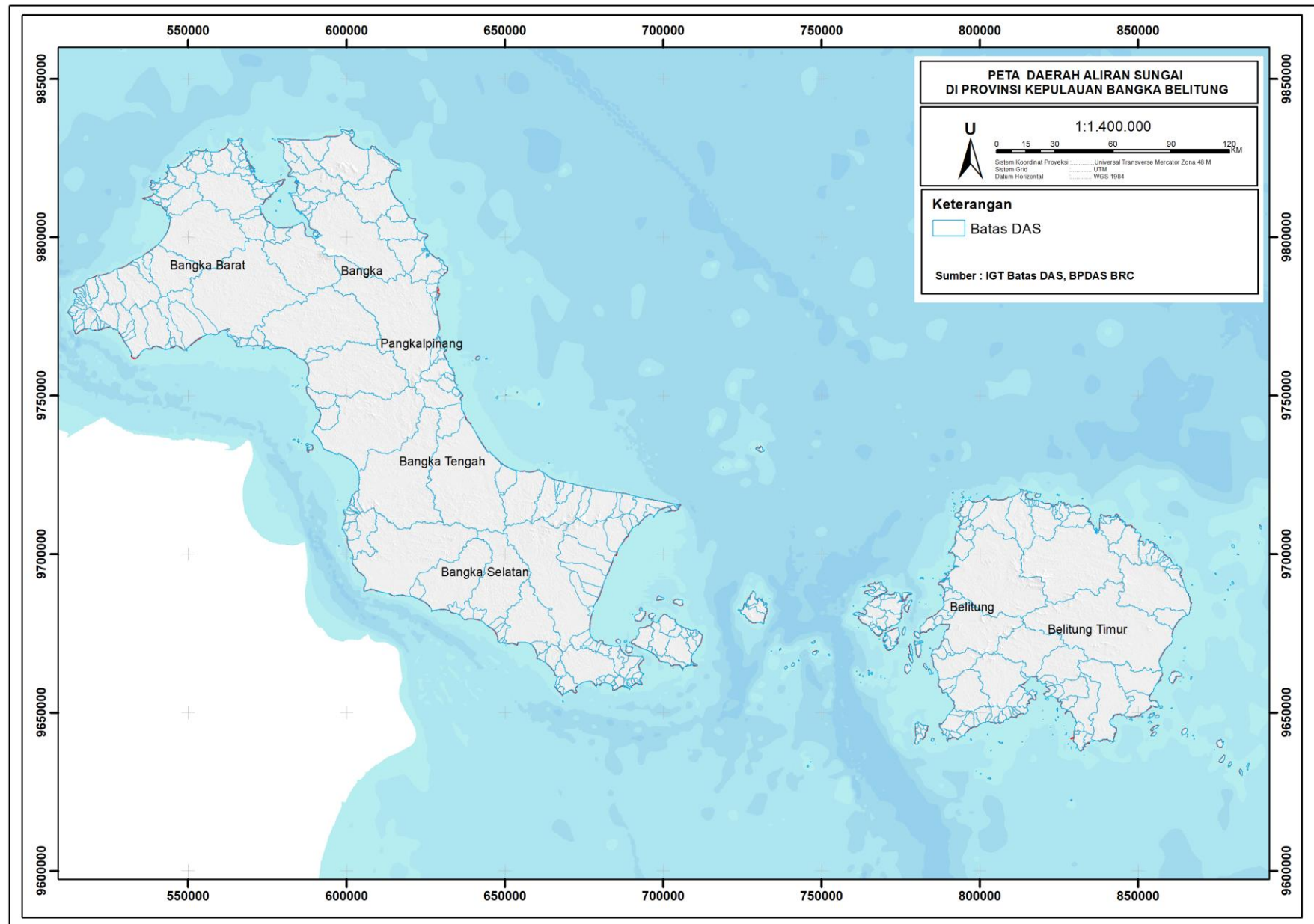


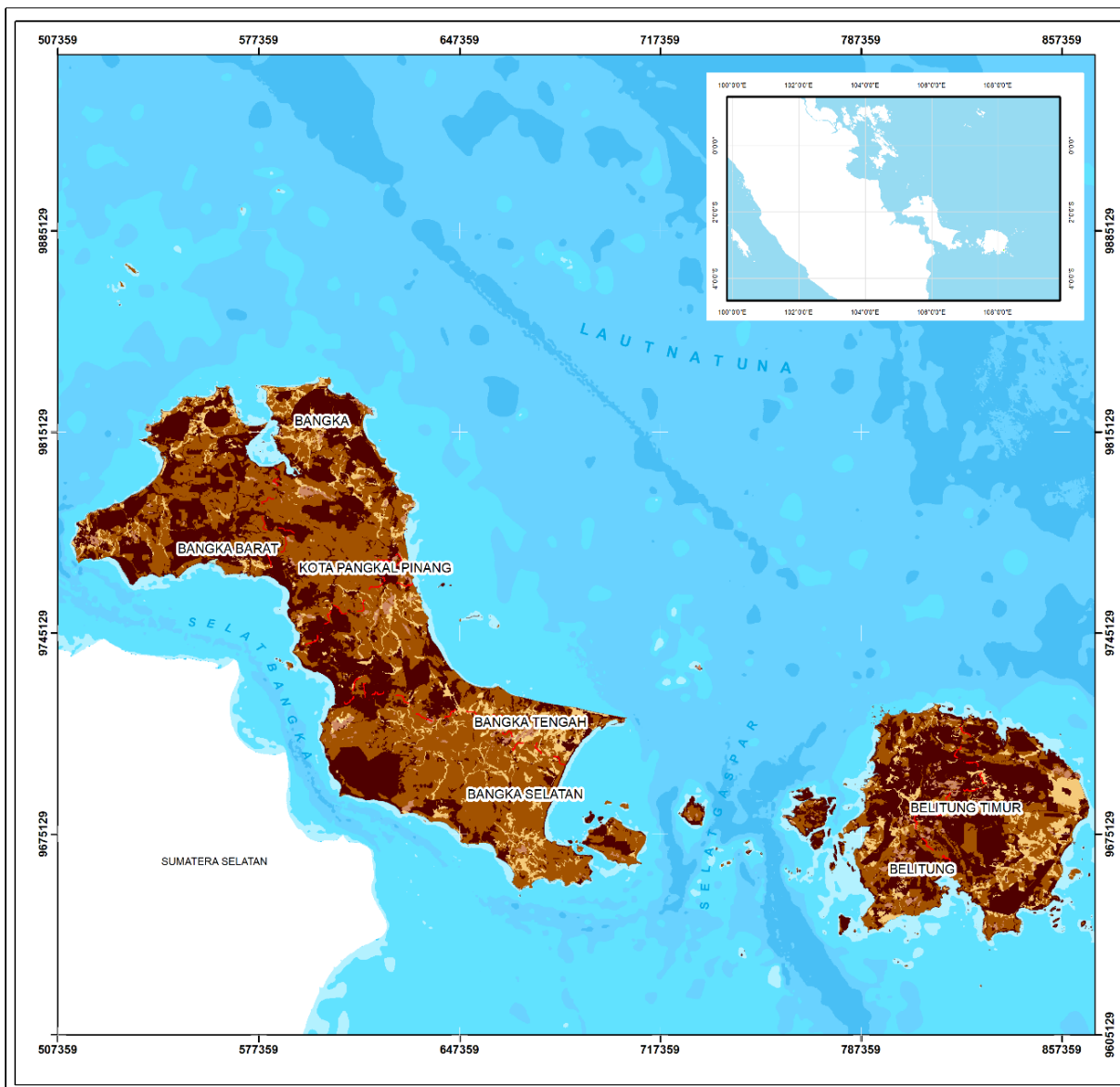














DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022

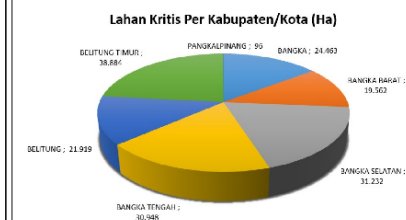
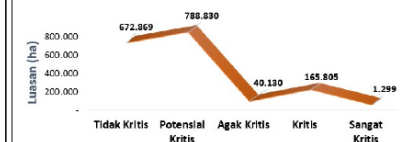
P E T A
PERSEBARAN LAHAN KRITIS
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BERD SK. DIRJEN PDAS NO. 49 /PDASRH/PPPDAS/
DAS.0/12/2022 TENTANG PENETAPAN
LAHAN KRITIS NASIONAL TAHUN 2022

U 1:1.300.000

 Sistem Koordinat Proyeksi : Universal Transverse Mercator Zona 48 M
 Sistem Grid : UTM
 Datum Horizontal : WGS 1984

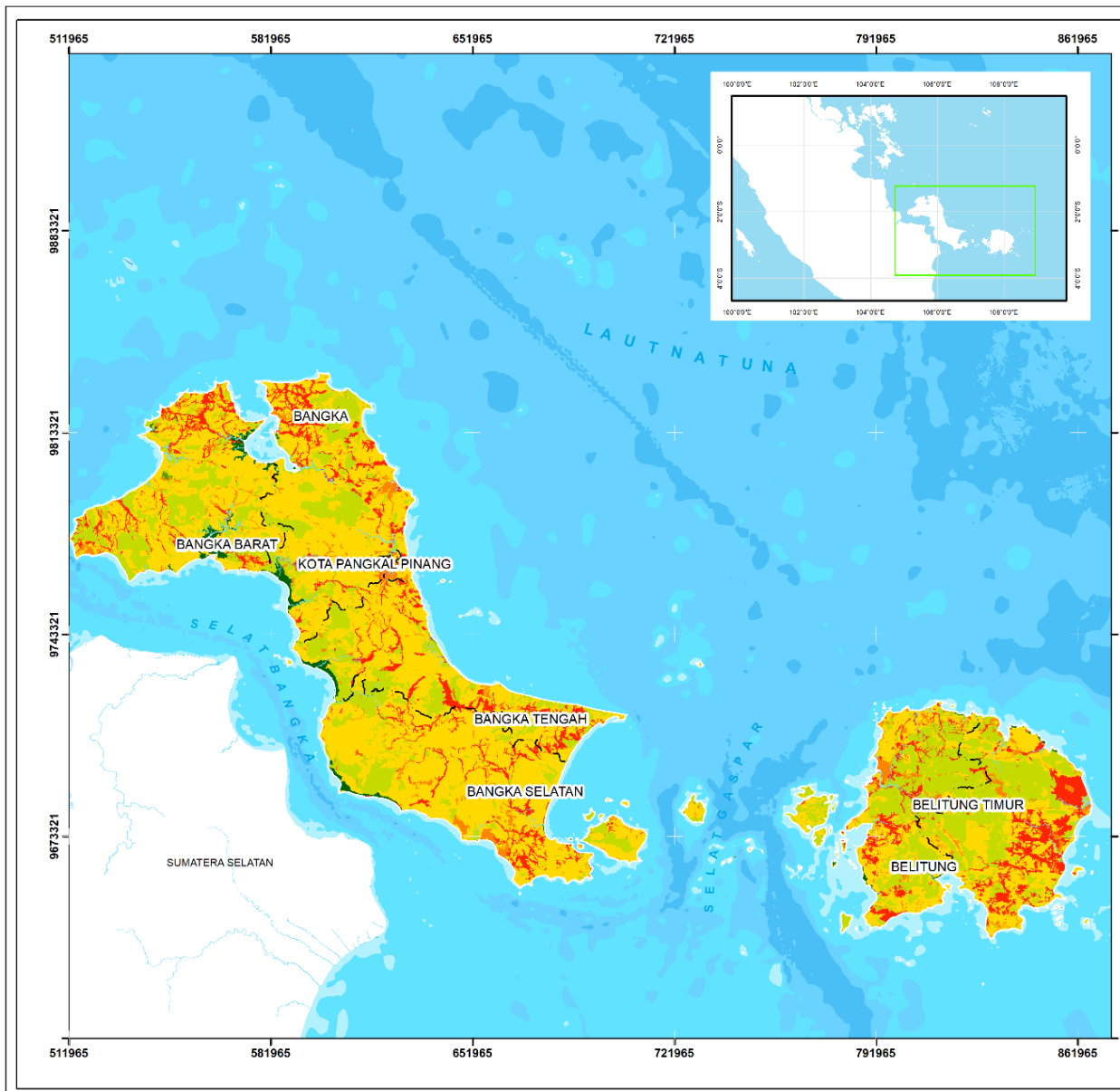
Keterangan


Laan Kritis		Kedalaman (m)	
	Tidak Kritis		40,82 -100,64
	Potensial Kritis		23,73 - 40,82
	Agak Kritis		2,36 - 23,73
	Kritis		0 - 2,36
	Sangat Kritis		

Tingkat	APL	HL	HP	HPK	HK	Total
Agak Kritis	18.496,5	11.212,6	4.203,9	6.217	40.130,4	
Kritis	92.255,1	27.266,3	41.286,4	145,7	4.852	165.805,0
Potensial Kritis	575.307,5	64.202,8	131.111,5	529,7	17.679	788.830,5
Sangat Kritis	38,6	636,3	220,0		404	1.298,7
Tidak Kritis	323.959,7	83.090,3	258.611,6	30,9	7.161	672.868,6
Grand Total	1.010.057,4	186.408,2	435.433,3	706,4	36.313	1.668.933,1



Sumber Data:
 1. SK. 48/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tg Penetapan LKrtis Nasional thn 2022. BP DAS BRC
 2. DEMNAS Prov Kep Babel, BIG
 3. BKTNAS Prov Kep Babel, BIG
 - Skala yang ditampilkan diatas untuk display pada kertas berukuran A3





**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023**

P E T A
PETA STOK KARBON
BERDASARKAN PENUTUP LAHAN TAHUN 2021
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

U 1:1.300.000

0 15 30 60 90 120 KM

Sistem Koordinat Proyeksi : Universal Transverse Mercator Zona 48 M
Sistem Grid : UTM
Datum Horizontal : WGS 1984

Keterangan

--- Batas Kabupaten/Kota
Jaringan Sungai

Stok Karbon (C per hektar)

- C ton per ha >=200
- 100 <= C ton per ha <200
- 50 <= C ton per ha <100
- 10 <= C ton per ha <50
- 0 <= C ton per ha <10
- Stok C per ha = 0

Kedalaman laut (m)

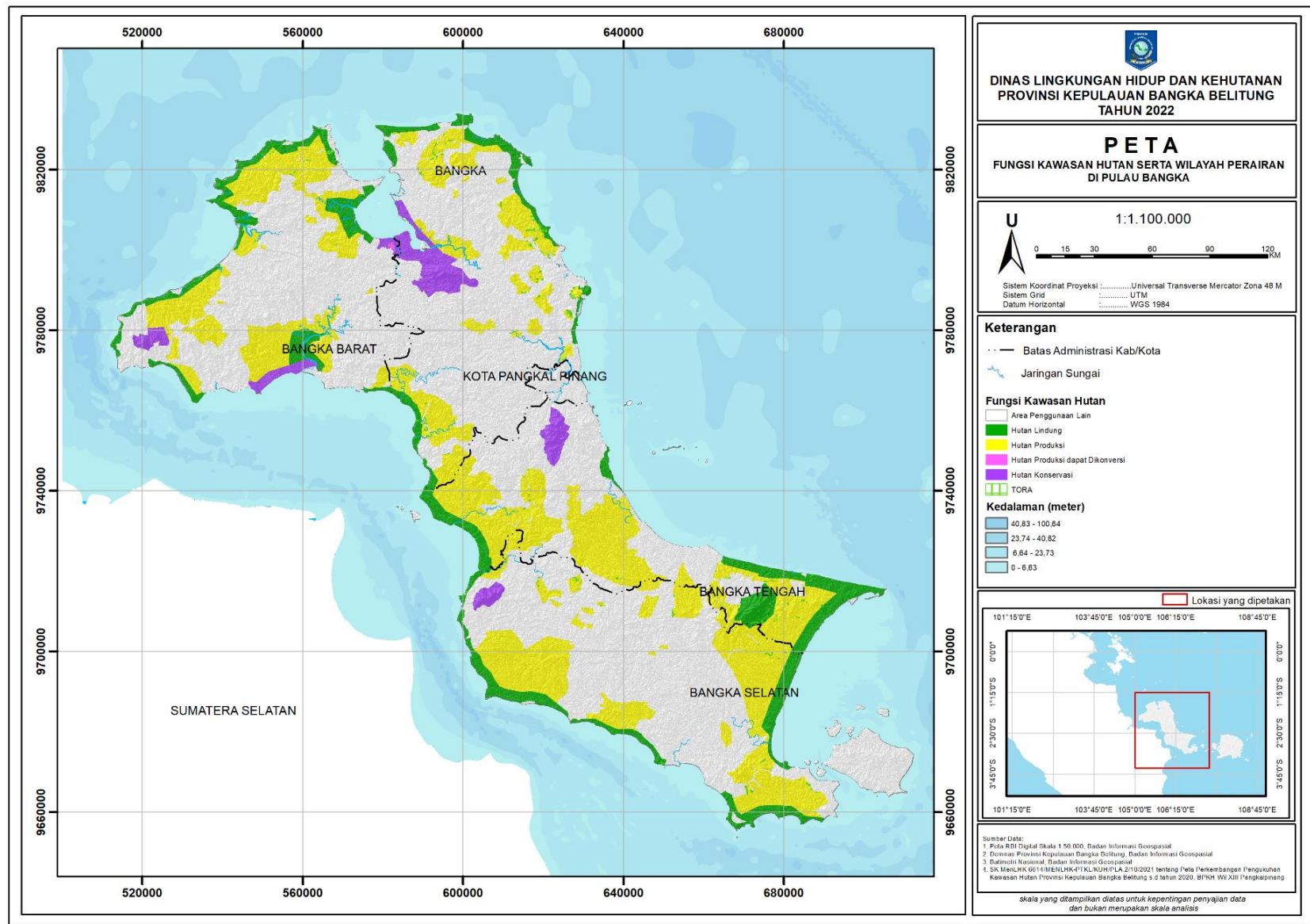
- 40,82 -100,64
- 23,73 - 40,82
- 2,36 - 23,73
- 0 - 2,36

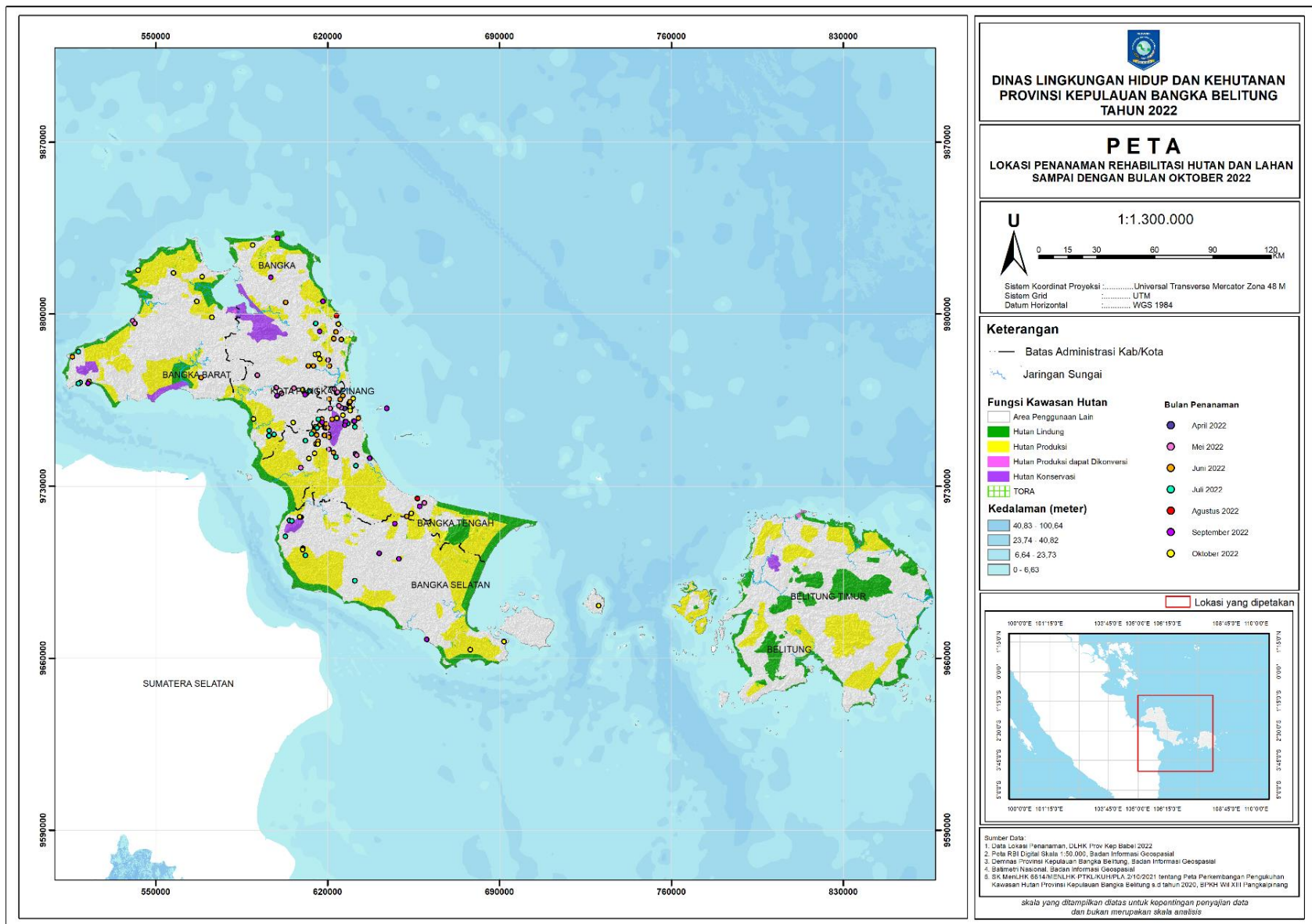
Tutupan	Luas (ha)	Stok C per ha	Total Stok Karbon
Air	4.934,52	0	0,00
Bandara	257,27	0	0,00
Belukar	154.146,17	30	4.624.383,57
Belukar Rawa	77.787,18	30	2.333.615,14
Hutan Mangrove	25.862,47	227,3	5.878.267,71
Hutan Mangrove Sekunder	40.772,21	52,5	2.160.096,67
Hutan Primer	486,77	134,2	65.367,90
Hutan Rawa Primer	380,79	110,4	42.046,80
Hutan Rawa Sekunder	50.144,72	75,6	3.795.959,27
Hutan Sekunder	87.337,64	91,1	7.958.226,47
Lahan Terbuka	8.235,89	2,5	20.589,72
Pemukiman	41.700,63	4	166.803,26
Perkebunan	275.755,00	63	17.372.568,04
Perumahan	156.531,29	0	0,00
Pertanian Lahan Kering	52.763,07	10	527.630,66
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	663.633,17	30	19.908.983,33
Rawa	10.504,60	0	0,00
Sewana	8.744,35	4	34.977,39
Sawah	7.725,96	2	15.451,92
Tambak	1.340,45	0	0,00
Transmigrasi	374,28	10	3.742,83
Grand Total	1.669.387,81	877,00	64.906.675,88

Sumber Data:

- Penutup Lahan Skala 1:50.000 Tahun 2021, BPKHTL XII
- Batas Administrasi Prov Kep Babel, DPU/PRRP, 2022
- Serapan dan Emisi Karbon, KLHK 2014
- DEHNAS Prov Kep Babel, B/C
- BATNAS Prov Kep Babel, B/C
- Pengolahan data, 2023

arsas yang ditampilkan diatas untuk digigit pada kertas berukuran A3

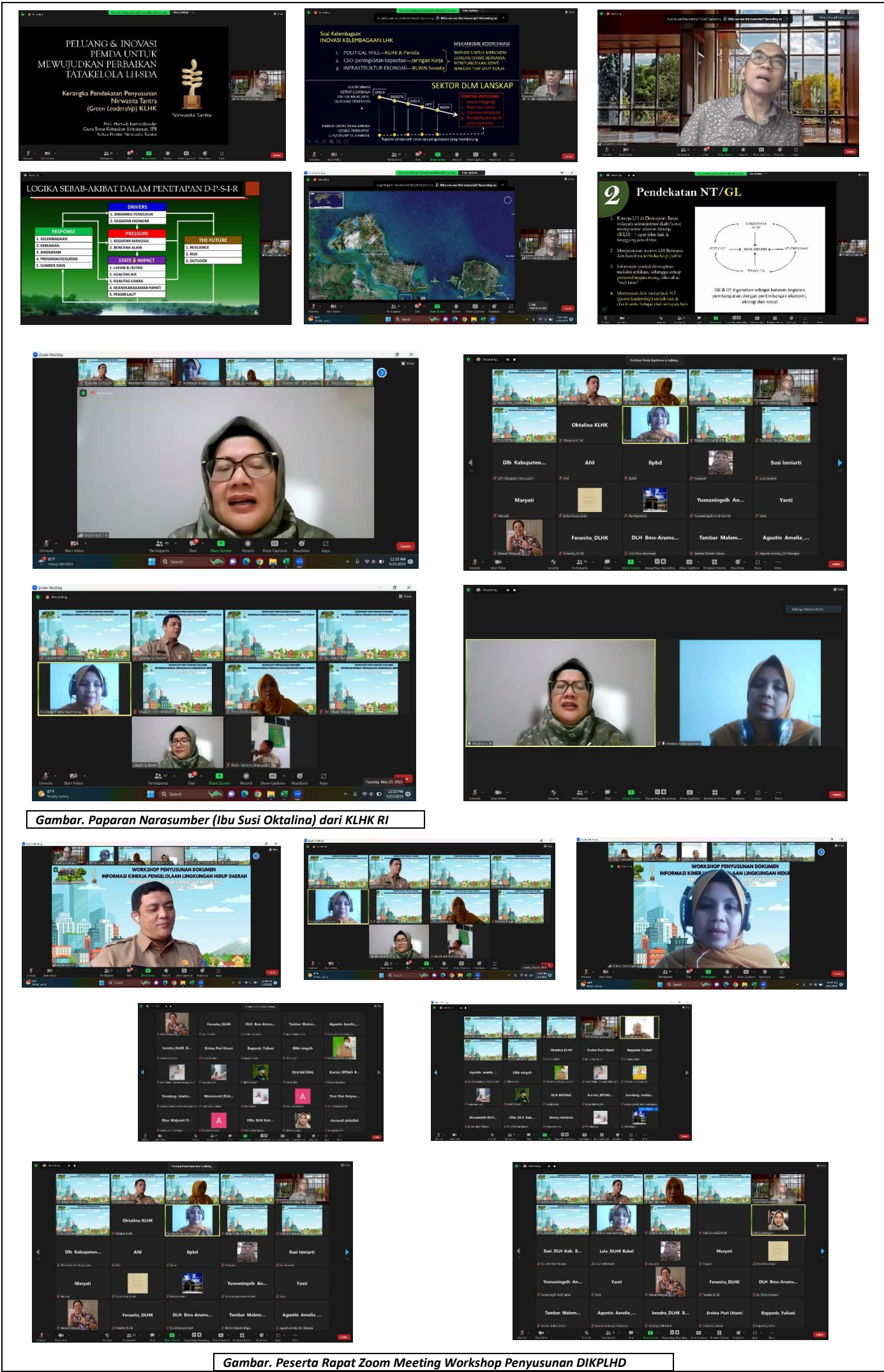




LAMPIRAN DOKUMENTASI



Dokumentasi Rapat *Workshop* Penyusunan Dokumen IKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 23 Mei 2023



Gambar. Paparan Narasumber (Ibu Susi Oktalina) dari KLHK RI

Gambar. Peserta Rapat Zoom Meeting Workshop Penyusunan DIKPLHD

**Dokumentasi Rapat *Focus Grup Discussion* (FGD) Analisis
Driving Force, Pressure, State, Impact dan *Responses* (DPSIR)
Isu Lingkungan Hidup Daerah Penyusunan Dokumen IKPLHD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023, Tanggal 06 Juni 2023**



LAMPIRAN

SK TIM POKJA





GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/224 /DLHK/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengembangan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu membentuk Tim Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;
- b. bahwa Tim yang disebutkan namanya dalam Keputusan Gubernur ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Pembina, melakukan pembinaan dalam rangka terselenggaranya Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;
 - b. Pengarah, mengarahkan pelaksanaan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;
 - c. Penanggung jawab, mengemban tanggung jawab dalam hal pelaksanaan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;
 - d. Ketua, memimpin seluruh jalannya proses Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;
 - e. Sekretaris, membantu ketua dan bertanggungjawab dalam hal mengadministrasi serta hal-hal operasional proses Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;
 - f. Anggota:
 1. menetapkan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) isu prioritas yang didasarkan proses secara partisipatif melibatkan pemangku kepentingan dan analisis menggunakan pendekatan *Driving Force, Pressure, State, Impact and Response* (DPSIR);
 2. menginventarisasi dan menginput data terbaru dari stakeholder terkait yang diperlukan untuk penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;
 3. melakukan analisis data dengan pendekatan *Driving Force, Pressure, State, Impact and Response* di dalam sebuah *focus group discussion*;
 4. merangkum inovasi yang telah dilakukan daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup;
 5. menyusun Buku Ringkasan Eksekutif dan Buku Laporan Utama Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;

6. berkoordinasi dan menyampaikan hasil penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 kepada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera untuk memperoleh rekomendasi penilaian;
7. memberikan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan kepatuhan terhadap Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota; dan
8. mengikuti dan berkoordinasi pada setiap tahapan kegiatan Tim Kelompok Kerja.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pj. Gubernur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 Mei 2023



Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/224/DLHK/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2023

TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| I. Pembina | : | Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung |
| II. Pengarah | : | Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| III. Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| IV. Ketua | : | Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| V. Sekretaris | : | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| VI. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Yuliani
Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung2. Yudistira, A.Md
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung3. Asep Rahmat Hidayat, S.Hut
Surveyor Pemetaan Ahli Pertama pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIII Pangkalpinang4. Ervina Puri Utami, S.T
Penyelidik Bumi Ahli Muda pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung5. Abdul Halim Yudistira, S.T
Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |

6. Jimmy Margomgom Tambunan, S.Pi., M.Si
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda
pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
7. Nades Triyani, S.Si., M.Si
Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan
Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8. Kartini Eko Wiharjo, S.Hut., M.E., MPP, Pengendali
Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Balai
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa
Cerucuk
9. Bagastama Iqbalil Fathir, S.Tr.Stat
Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10. Dr. Ismet Inonu, M.Si
Universitas Bangka Belitung
11. Langka Sani
Yayasan Pelestarian Flora Fauna Alobi *Bangka
Belitung*
12. Abdurrahman, S.E, M.M
Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
13. Ayubi Nasution, S.T
Penelaah Dampak Lingkungan pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
14. Iskandar, S.H
Analisis Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
15. Lala Lazuardina, S.T.
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
16. Edwin Setiady, S.T., M.T
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
17. Harfiyanto, S.Si
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

18. Fianda Revina Widyastuti, S.KM., M.Si
Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
19. Elza Rizkiawalia, S.T., M.Si
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
20. Fentinur Evida Septriana, S.T., M.Si
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
21. Refa Riskiana, S.Si., M.Si
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
22. Ningsih Tassri, S.T., M.Sc.
Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
23. Feranita, S.Si., M.Sc
Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
24. Lorri Prahara, S.Si., M.T
Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
25. Mahendra, A.Md
Pengelola Lingkungan pada Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

EJ. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SUGANDA PRADAPOTAN PASARIBU

LAMPIRAN

BIODATA TIM PENYUSUN



CURRICULUM VITAE

Edwin Setiady, S.T., M.T.

PENGALAMAN KERJA

2005-2007

Indo Keramik Intiwiidya -*Division Head* Indokeramik Inti Widya, Tangerang

2007-2010

Petrochemical P.T. Gajah Tunggal, Tbk Div. Styrene Butadiene Rubber – Supervisor Produksi

2010 -2013

PNS BLHD Kota Pangkalpinang

2013-2018

PNS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pengendali Dampak Lingkungan

2018-Sekarang

PNS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PENDIDIKAN

Institut Teknologi Bandung

- 2016-2018 – Studi Pembangunan- SAPPK (S2)

Institus Teknologi Nasional Bandung

- 2000-2005 - Teknik Kimia (S1)

PELATIHAN PROFESIONAL

- 2007 - Waste Water Treatment Plant- Nalco Indonesia
- 2007 Healt Saefty Environment, Polymerization, Utility, Reverse Osmosis (RO), Coagulation Process, GT SBR- Merak
- 2011 – Pelatihan Pengendalian Pencemaran Udara-KLH Serpong
- 2011 - Pelatihan pemantauan kerusakan tanah untuk produksi biomassa, Batam
- 2011- Pelatihan Dasar-Dasar Pengawas Lingkungan Angkatan VII, KLH- Serpong



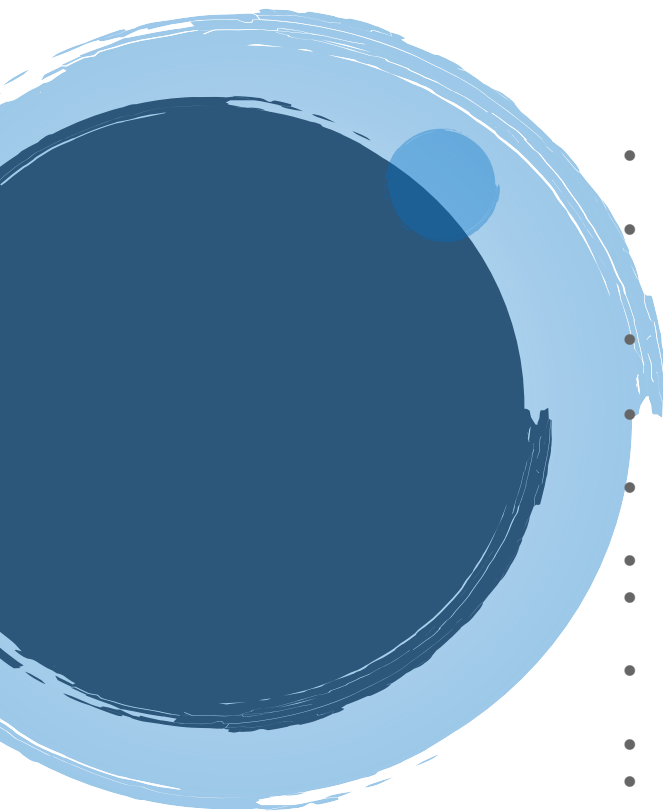
Jl. Basuki Rachmat No.288
Pangkalpinang



08176443446



edwinblhd@gmail.com



- 2013- Peningkatan Kapasitas Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kegiatan Pengelolaan Limbah, KLHK-Bandung
- 2013- Pelatihan Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Sungai dengan menggunakan Qual2K serta Inventarisasi Sumber Pencemaran, PPE Sumatera KLHK- Batam
- 2014 -Praktek Kerja Iso 17025 tingkat lanjut-2, Pusarpedal KLHK-Serpong
- 2014- Pelatihan Pejabat Pengendali Dampak Lingkungan Angkatan XIII Tahun 2014, Pusarpedal KLHK- Serpong Tangerang Selatan
- 2018- Bimbingan Teknis Kajian Lingkungan Hidup Strategis Regional Sumatera, KLKHK-Batam
- 2020- Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, PSLH ITB-Bandung
- 2020-Pemanfaatan Teknologi Pengindraan Jauh Dalam Pengelolaan Sumber Daya Indonesia- Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
- 2020- Pelatihan System Dynamics, System Dynamics Bandung BootCamp-Bandung
- 2020- Bimbingan Teknis Penyusunan KLHS RPJMD, KLHK
- 2022- Pelatihan Perencana Lingkungan dalam Pembangunan-Bappenas- Magister Ilmu Lingkungan UNDIP.
- 2023- Bimtek Pertek Pembuangan Emisi, PT Sinergi Enviro Nusantara
- 2023- Bimbingan Teknis Pengisian Indeks Respon Kinerja Daerah (IRKD) Program Langit Biru dan Sosialisasi Aplikasi Uji Emisi Nasional (SI-UMI).
- 2023- Pelatihan Daya Tampung Sumber Pencemar dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai Indonesia-KLHK

PENGALAMAN PENYUSUNAN KLHS:

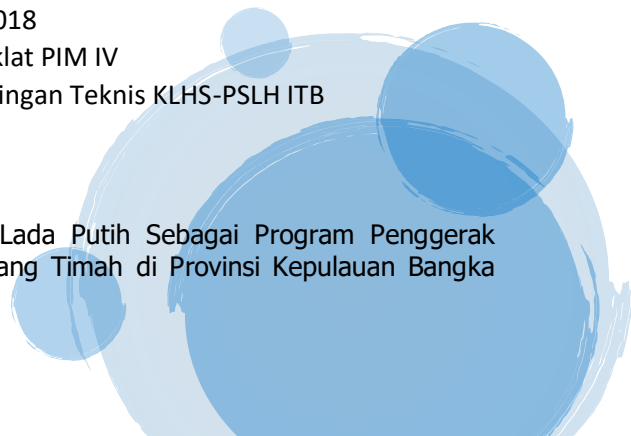
- KLHS RRTR KSP KIPT Sadai, Tahun 2018
- KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022, Tahun 2019
- KLHS RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2019
- KLHS RRTR Kawasan Strategis Provinsi KIPT Tanjung Ular, Tahun 2019
- KLHS Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Food Estate, Tahun 2021-2022.
- KLHS RTRW Prov. Kep.Babel Tahun 2023-2043 (proses penyusunan)

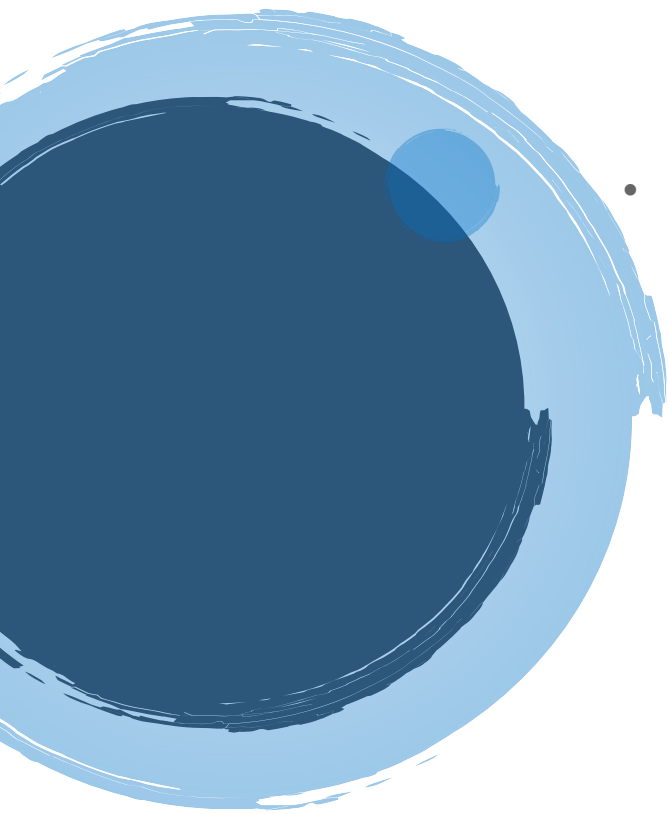
PENGHARGAAN/BEASISWA

- 2018 – Lulusan Terbaik Studi pembangunan ITB- 2018
- Beasiswa Bappenas 2016-2018
- 2019 – Peserta Terbaik-I Diklat PIM IV
- 2020- Peserta Terbaik Bimbingan Teknis KLHS-PSLH ITB

PENGALAMAN PUBLIKASI

- 2018- Analisis Revitalisasi Lada Putih Sebagai Program Penggerak Perekonomian Pasca Tambang Timah di Provinsi Kepulauan Bangka





Belitung dengan Menggunakan Sistem Dynamics- Jurnal SAPPK ITB

- 2007 – *Perancangan Heatexchanger 501 PT.Gajah Tunggal TBK*



Fianda Revina Widyastuti



Jl. Melati Gg.Dahlia VII No
470 Rt.03 Rw.01 Bukit
Merapin Pangkalpinang



0812 257 3163



fiandawidyastuti@gmail.co
m

PENGALAMAN KERJA

2009 – Juni 2018

Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Penyuluh Keluarga Berencana - Dinas Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Prov Kep. Bangka Belitung

Juli 2018 – Februari 2020

Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Kasi Kajian Dampak Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Prov Kep. Bangka Belitung

Maret 2020 – Juni 2021

Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Kasi Peningkatan Kapasitas lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Prov Kep. Bangka Belitung

Juli 2021 – sekarang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Pengendali Dampak Lingkungan (Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup) - Dinas Lingkungan Hidup Prov Kep. Bangka Belitung

PENDIDIKAN

Universitas Dian Nuswantoro, Semarang

- 2007 – Kesehatan Masyarakat (S1)

Universitas Diponegoro, Semarang

- 2013 – Magister Ilmu Lingkungan (S2)

PELATIHAN PROFESIONAL

- 2018 – Diklat Dasar – Dasar AMDAL, PPLH UNDIP

PENGHARGAAN/ BEASISWA

- 2012- Beasiswa Bappenas (Magister Ilmu Lingkungan, UNDIP)

PENGALAMAN PENELITIAN/KARYA TULIS ILMIAH

- 2013- Biogas Potential from the Treatment of Solid Waste of Dairy Cattle: Case Study at Bangka Botanical Garden Pangkalpinang-International Journal of Waste Resources 03(02) DOI:10.4172/2252-5211.1000128
- 2013-Analisis penerapan produksi bersih pada usaha pertanian terpadu: studi kasus Bangka Botanical Garden pangkalpinang

SILVIA RIVANDA



PENGALAMAN KERJA

April 2023 - Sekarang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Analis Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan dan Kehutanan Prov Kep. Bangka Belitung

31 Agustus 2021 – 30 Maret 2023

Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Kabid. Pembinaan dan Pengawasan LH - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah

Januari 2017- 31 Agustus 2021

Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Kabid. Penataan dan Penataan LH - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah

3 November 2014- Januari 2017

Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Kabid. Pengawasan Lingkungan Hidup Kabid. Konservasi, Pemantuan dan Pengawasan Lingkungan Hidup - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah

09 Agustus 2009 - 3 November 2014

Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Kasi Pemantuan dan Pemulihan lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah

06 Juli 2006 – 09 Agustus 2009

Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Plt. Kasi Pemantuan dan Pemulihan lingkungan – Dinas Pertambangan, energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah

2 Januari 2005 -06 Juli 2006

Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Perencanaan Lingkungan Hidup Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah

PENDIDIKAN

Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan (STTL) “YLH” Yogyakarta

- 2003 – Teknik Lingkungan (S1)

PELATIHAN PROFESIONAL

- 2019 - Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD – KLHK



Jalan Sumedang no. 132 Gang ikhlas
RT.003/RW.002, Ke.Kejaksaan, Kec.
Taman Sari, Pangkalpinang Provinsi Kep.
Bangka Belitung



081373168852



silviarivanda3gmail.com



Harfiyanto

PENGALAMAN KERJA

Desember 2021 - Sekarang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda/Subkoordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung

Juni 2021 - Desember 2021

Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung

Januari 2020 - Juni 2021

Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung

April 2009 - Januari 2020

Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Analis Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Prov, Kep. Bangka Belitung

PENDIDIKAN

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

- 2008 - Biologi (S1) - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

PELATIHAN PROFESIONAL

- 2023 - Bimbingan Teknis pembangunan Taman keanekaragaman Hayati Tahun 2023 - Direktorat Jenderal KSDAE Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem
- 2022 - Training GIS Monitoring Kerusakan Hutan (Deforestasi, Degradasi Hutan Dan Dekomposisi Gambut) Emisi Karbon Dioksida (CO₂) Potensi/Stok Karbon Potensi Emisi Karbon Dioksida (CO₂) - Indonesia Mapping Community
- 2022 - Pelatihan Petugas Pengambilan Contoh Uji Air (SKKNI 2008 - 209, SKKNI 2015-347 & SKKNI 2016-168) & Uji Udara (SKKNI 2008-209)
- 2014 - Pelatihan Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Angkatan XIII - Pusdiskreskrim Polri Megamendung
- 2013 - Pelatihan Dasar - Dasar AMDAL Angkatan 85 - PSLH UGM
- 2012 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tim Proper - KLHK
- 2010 - Pelatihan Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan - KLHK
- 2009 - Pelatihan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan-KLH



Jl. Gegading No. 58,
RT.007/RW 002, Kel.
Melintang, Kec. Rangkui,
Pangkalpinang



0812 9016 2004



Harfie.babel@gmail.com



Lorri Prahara, S.Si., M.T

PENGALAMAN KERJA

2010–Sekarang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Analis Lingkungan - Dinas Lingkungan Hidup
Prov Kep. Bangka Belitung

PENDIDIKAN

Universitas Indonesia, Depok

- 2018 - Bidang Studi Teknik Sipil – Lingkungan (S2)

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

- 2004 - Bidang Studi Kimia (S1)

PELATIHAN PROFESIONAL

- 2020 – Sertifikasi SML : Pengendali Limbah Cair – BNSP PPSDM Kementrian ESDM
- 2015 - Penentuan Daya Tampung Sungai - BLHD Prov Kep. Bangka Belitung
- 2014 - Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) - KLH
- 2013 - *Laboratory Proficiency Testing* - SPIN
- 2013 - Pelatihan Analisis Air - UGM
- 2012 - Bimtek Teknik Laboratorium Lingkungan - PUSARPEDAL KLH
- 2011 - SNI/IEC 17025 : 2008 - BSN
- 2008 - OHSAS 18001 : 2007 dan SMK3 - IKRCS

PENGHARGAAN/BEASISWA

- 2018 - Beasiswa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PENGALAMAN PENELITIAN/KARYA TULIS ILMIAH

- 2019 - UBC *Recycling Value Chain Project*
- 2018 - *Utilization of non-woven geotextile as insulation on bio-drying reactor*



Jl. Melati No.494B, Bukit
Merapin
Pangkalpinang



08111906507



lorriprahara@gmail.com



Ningsih Tassri

PENGALAMAN KERJA

Februari 2020 - Sekarang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Analis Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan dan Kehutanan Prov Kep. Bangka Belitung

2010 - Januari 2020

Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Pengelola Laboratorium - Dinas Lingkungan Hidup Prov Kep. Bangka Belitung

2006 - 2009

Quality Control Analyst - PT Surya Utama Sawit - Prov Sumatera Selatan

PENDIDIKAN

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

- 2019 - Bidang Studi Penginderaan Jauh (S2) - Fakultas Geografi

Universitas Sriwijaya, Palembang

- 2005 - Bidang Studi Teknik Kimia (SI) - Fakultas Teknik

PELATIHAN PROFESIONAL

- 2023 - Pelatihan Model Sistem Dinamik untuk Pengelolaan Hutan Tingkat Dasar - Indonesia Mapping Community
- 2022 - Bimbingan Teknis Pemetaan dan Sistem Informasi Geospasial Inventarisasi Mutu Laut - Ditjen PPKL KLHK
- 2022 - Pelatihan pemetaan menggunakan drone level basic - Indonesia Mapping Community
- 2022 - Training GIS Monitoring Kerusakan Hutan (Deforestasi, Degradasi Hutan Dan Dekomposisi Gambut) Emisi Karbon Dioksida (CO₂) Potensi/Stok Karbon Potensi Emisi Karbon Dioksida (CO₂) - Indonesia Mapping Community
- 2022 - Diklat GTA Data Science - BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2021 - Bimtek Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup - DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan P3E Sumatera
- 2021 - Diklat Perencanaan Lingkungan Kerjasama Bappenas dan Universitas Diponegoro




Jl. Gang Nasir RT 09 RW 002
Kel. Sinar Bulan, KecBukit Intan
Pangkalpinang 33149



0812-7300040



ningsihtassri0@gmail.com

- 
- 2021 - Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup - KLHK
 - 2021 - Training Pemodelan Bencana Longsor dengan GIS - Universitas Mulawarman
 - 2021 - Diklat Dasar Manajemen Bencana - BKPSDMD
 - 2020 - Bimtek Penentuan Titik *Ground Control Point* (GCP) - DPUPR Prov Kep. Bangka Belitung
 - 2020 - Pelatihan Aplikasi Google Earth Engine - Geospasial Education
 - 2018 - Bimtek Penulisan Artikel Ilmiah - Fakultas Geografi UGM
 - 2017 - *ESA Sentinel Application Platform Introduction n Processing - Institut of Applied Geosciences, Berlin - UGM*
 - 2017 - Bimtek Penyusunan Peta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup - Pusat Pengelola Ekoregion Sumatera
 - 2016 - Prosedur Pengecekan Antara dan Verifikasi Spektrofotometer - PT Akurasi Prima
 - 2014 - Shimadzu AAS *Operational Training* - PT Ditek Jaya
 - 2013 - Pengambilan Contoh Uji Air - BLHD Prov Kep. Bangka Belitung
 - 2013 - *Laboratory Proficiency Training* - Sinergi Prima Inti
 - 2013 - Analisis Kualitas Air Parameter Lingkungan - Fak MIPA UGM
 - 2013 - Diklat Pengelolaan Laboratorium Lingkungan - Pusdiklat KLHK
 - 2011 - Metode Pengujian dan Validasi/Verifikasi Metode Sesuai Dengan ISO 17025 : 2008 - BLHD Prov Kep. Bangka Belitung
 - 2011 - Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Sesuai ISO 17025 : 2008 - BLHD Prov Kep. Bangka Belitung
 - 2010 - Peningkatan Kapasitas SDM Kabupaten/Kota Tingkat Menengah I - BLHD Prov Kep. Bangka Belitung

PENGALAMAN PUBLIKASI

- 2019 - Proyeksi Serapan Emisi Karbondioksida Berdasarkan Analisis Citra Landsat dalam Perubahan Penutup Lahan Bervegetasi Terkait Aktivitas Penambangan di Sebagian Wilayah Kabupaten Bangka - Program Tubel - APBD Prov Kep. Bangka Belitung (Tesis)
 - 2019 - *Multitemporal Analysis of Vegetated Land Cover Changes Related to Tin Mining Activities in Bangka Regency Using Multitemporal Landsat Imagery* - Proceeding SPIE
 - 2021 - Pemetaan Tambak Udang Vaname di Pesisir Kepulauan Bangka Belitung Menggunakan Citra Sentinel 2A MSI - Prosiding BIG
- 

- 2022 - Changes in Carbondioxide Sequestration as an Impact of Tin Mining Activities Based on Remote Sensing Imagery - Indonesian Journal of Geography (Review)



Elza Rizkiawalia, S.T., M.S.i



Jl. Stania Gg. Masjid 202
Kel. Taman Bunga
Kec. Gerunggang
Pangkalpinang 33122



081367196665



elza.rizkiawalia@gmail.com

PENGALAMAN KERJA

2010–Sekarang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Analis Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Prov Kep. Bangka Belitung

PENDIDIKAN

Universitas Diponegoro, Semarang

- 2017 - Prodi Magister Ilmu Lingkungan (S2)

Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran", Yogyakarta

- 2003 - Jurusan Teknik Kimia (S1)

PELATIHAN PROFESIONAL

- 2020 - Sistem Informasi Geografis Tingkat Dasar - Technogis Indonesia
- 2019 - Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) - PSLH ITB
- 2018 - Dokumentasi sesuai ISO/IEC 17025:2017 - SPIN
- 2016 - Dasar-dasar AMDAL - PPLH Undip

PENGHARGAAN/BEASISWA

- 2018 - Beasiswa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PENGALAMAN PENELITIAN/KARYA TULIS ILMIAH

- 2017 - Kajian Peluang dan Kelayakan Penerapan Produksi Bersih di Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Prov Kep. Bangka Belitung



CURRICULUM VITAE

Fentinur Evida Septriana, S.T., M.Si.

PEKERJAAN SEKARANG

PNS – Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sarjana: Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta

Master: Ilmu Lingkungan, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia
Jakarta

PELATIHAN

- **Pengendalian Dampak Lingkungan** – 2015 oleh Pusdiklat KLHK
- **Pelatihan Dasar-dasar AMDAL** – 2015 oleh Pusdiklat KLHK
- **Pelatihan Penilaian AMDAL** – 2016 oleh Pusdiklat KLHK
- **Pelatihan KLHS** – 2017 oleh PSLH UGM
- **Pelatihan *System Dynamics*** – 2020 oleh Asosiasi Sistem Dinamik Indonesia (ASDI)
- **Pelatihan *System Dynamics* Tingkat Madya** – 2021 oleh PPSML UI
- **Bimbingan Teknis Penyusunan Peta DDDTLH** – DLHK & P3ES 2021
- **Pelatihan GIS Perhitungan Emisi CO₂, Stok Karbon, dan Potensi Emisi Deforestasi, Degradasi Hutan, dan Dekomposisi Gambut** – 2022 oleh Indonesia Mapping Community
- **Perencanaan Lingkungan Dalam Pembangunan** – 2022 oleh Bappenas dan Undip
- **Clean Energy and Emission Reduction** – Singapore Cooperation Programme, 2022

PENGALAMAN PEKERJAAN DI BIDANG PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

- ❖ **Tim Penyusunan DDDTLH Provinsi Kep. Bangka Belitung 2018**
- ❖ **Tim Penyusunan Dokumen IKPLHD, IKLH, dan RPPLH**
- ❖ **Tim KLHS Provinsi Kep. Bangka Belitung:**
KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (2017)



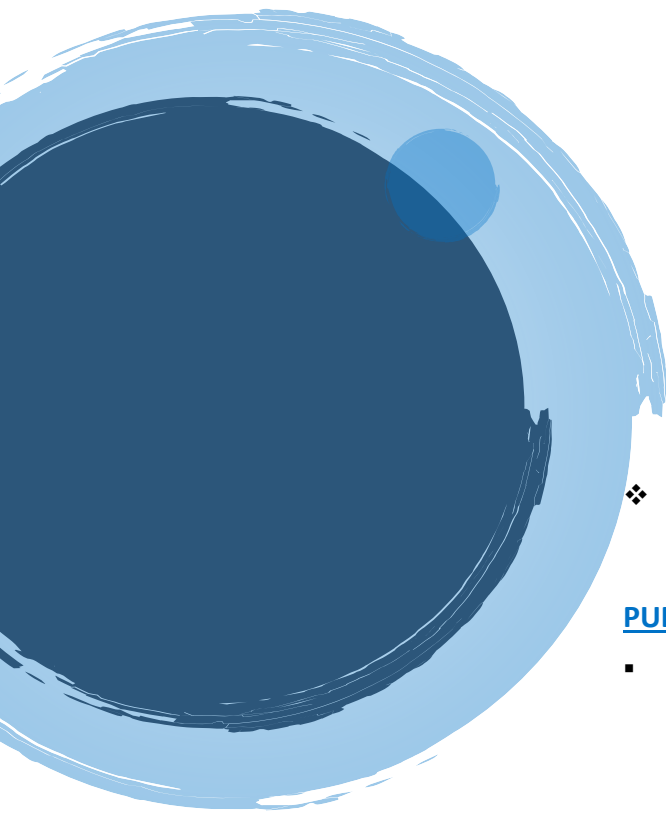
<https://www.linkedin.com/in/fentinur-evida-septriana-763a6630/>



+62 822 8062 5554



fenti_ana@yahoo.com



KLHS KIPT Sadai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2018)
KLHS RPJMD Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 (2019)
KLHS RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019)
KLHS Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate Prov. Kep. Bangka Belitung (2021-2022)

❖ Tim Validasi KLHS

PUBLIKASI

- **Dampak Perubahan Tutupan Lahan pada Sistem Hidrologi di Jakarta (*The Effect of Land Cover Change to Hydrological System in Jakarta*)**
Majalah Ilmiah Globe, Geospatial Information Agency of Indonesia, 2020
- **Sustainability Indicators for Biogas Production from Palm Oil Mill Effluent: A Case Study in Indonesia**
Lecture Notes in Civil Engineering, SPRINGER, 2021
- **Biogas Power Generation from Palm Oil Mill Effluent (POME): Techno-Economic and Environmental Impact Evaluation**
Energies, MDPI, 2022

Scopus Profile:

<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57236202800>

ORCID: 0000-0003-2499-0443

Google Scholar:

<https://scholar.google.com/citations?user=wIJsKuwAAAAJ&hl=id&oi=ao>





Feranita

PENGALAMAN KERJA

Februari 2021 – sekarang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Analis Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung

Februari 2020 – Januari 2021

Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan - Dinas Lingkungan dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung

2010 - Januari 2020

Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Pengelola Laboratorium - Dinas Lingkungan Hidup Prov, Kep. Bangka Belitung

PENDIDIKAN

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

- 2019 - Bidang Studi Penginderaan Jauh (S2) – Fakultas Geografi

Universitas Sriwijaya, Palembang

- 2013 - Kimia (S1) – Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

PELATIHAN PROFESIONAL

- 2023 – Bimbingan Teknis pembangunan Taman keanekaragaman Hayati Tahun 2023 – Direktorat Jenderal KSDAE Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem
- 2023 – Pelatihan Kewirausahaan Bidang Keterampilan Usaha Produktif/Pembuatan Minyak Atsiri Sapu-sapu
- 2022 – Training GIS Monitoring Kerusakan Hutan (Deforestasi, Degradasi Hutan Dan Dekomposisi Gambut) Emisi Karbon Dioksida (CO₂) Potensi/Stok Karbon Potensi Emisi Karbon Dioksida (CO₂) – Indonesia Mapping Community
- 2022 – Diklat GTA Analis Media Sosial – BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2021 – Pelatihan Perencanaan Lingkungan dan Pembangunan – Kerjasama Bappenas dan Universitas Padjajaran Bandung
- 2021 – Diklat Dasar Manajemen Bencana – BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Jl. Letkol Soleh Ode No.210
, Kacang Pedang,
Pangkalpinang



081311491907



feranita340@yahoo.com





Jl. Letkol Soleh Ode Gang
Merak - Pangkalpinang



081532945344



refariskiana@gmail.com

CURRICULUM VITAE

Refa Riskiana, S.Si., M.Si

PENGALAMAN KERJA

2021 - Sekarang

PNS – Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2010 – 2021

PNS – Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan,
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PENDIDIKAN

Institut Pertanian Bogor, Bogor

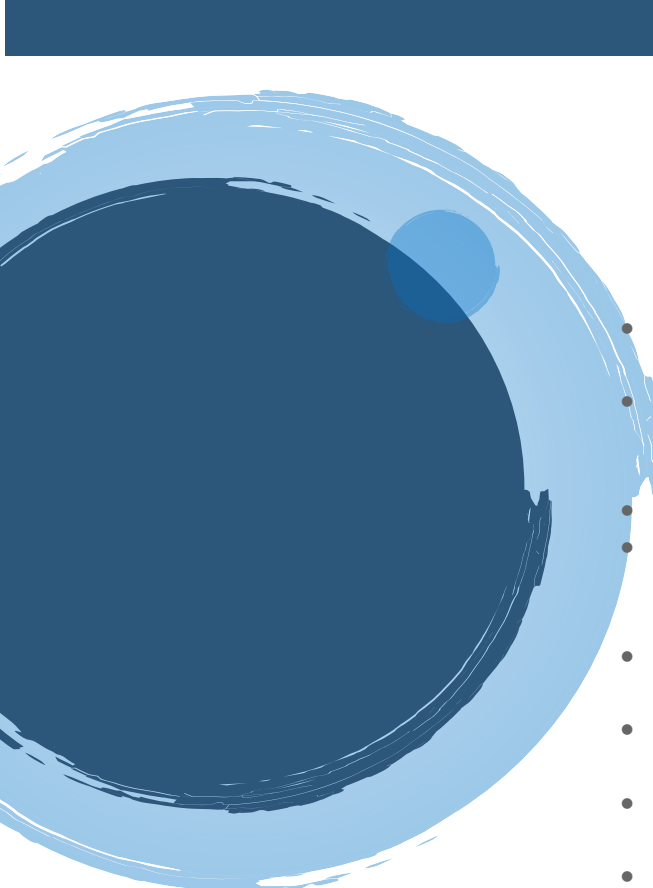
- 2018-2021 – Pengelolaan Sumberdaya Perairan, Sekolah Pasca Sarjana (S2)

Universitas Sriwijaya, Inderalaya

- 2002-2006 – Biologi – Fakultas MIPA (S1)

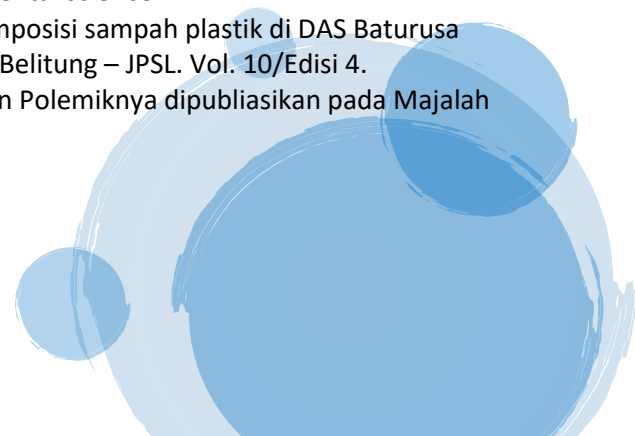
PELATIHAN PROFESIONAL

- 2023 – Pelatihan Pengelolaan, Analisis Data dan Pelaporan – Balai Pelatihan LHK Bogor
- 2022 Diklat GTA Data Science - BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2022 Diklat GTA Data Science - BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2022 – Training GIS Monitoring Kerusakan Hutan (Deforestasi, Degradasi Hutan Dan Dekomposisi Gambut) Emisi Karbon Dioksida (CO₂) Potensi/Stok Karbon Potensi Emisi Karbon Dioksida (CO₂) – Indonesia Mapping Community
- 2022 – Diklat Perencanaan Lingkungan Kerjasama Bappenas dan Universitas Diponegoro
- 2021 – Bimtek Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup – DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan P3E Sumatera
- 2019 – Mentoring program in scientific career development – IPB University & DAAD long term lecturer, Bogor

- 
- 2017- workshop pembuatan DRKPL dan Dokumen Hijau PROPER – BENEFITA, Jakarta
 - 2016- workshop pendampingan dan percepatan penyusunan laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan (PEP) dan Rencana Kaji Ulang RAD-GRK – Bappenas RI, Medan
 - 2015 -Training of Trainer (TOT) PROPER – KLH, Jakarta Selatan
 - 2014– Peningkatan kapasitas penilaian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim bagi pemangku kepentingan daerah – KLH, Tanjung Pandan
 - 2013 – Pelatihan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan – KLH, Serpong
 - 2013 - Pelatihan Dasar - Dasar Pengawas Lingkungan Hidup - PPE Sumatera, Pekanbaru
 - 2012 - The EUMRVCB Project, in collaboration with Indonesia's Ministry of the Environment – GIZ dan KLH, Bali
 - 2012 - Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca dan Penghitungan Bau Baseline – KLHK, Bandung

PENGALAMAN PUBLIKASI

- 2022 - Selamat datang Nirwasita Tantra, penghargaan *green leadership* bagi pemerintah daerah.
<https://serumpun.babelprov.go.id/selamat-datang-nirwasita-tantra-penghargaan-green-leadership-bagi-pemerintah-daerah>. 22 Juli 2022.
- 2022 - Mekanisme Dampak Negatif Akrilamida Pada Pencemaran Lingkungan Dan Terjadinya Penyakit Kanker: Review - Jurnal Pengendalian Pencemaran Lingkungan (JPPL). Volume 4 Nomor 2.
- 2022 - Institusional Analysis And Development (IAD) Framework Pada Pengelolaan Lebak Lebung Untuk Pemanfaatan Berkelanjutan – Prosiding Economic, Social Science, Computer, Agriculture And Fisheries (Escaf) 1st 2022.
- 2022 -Mendulang berkah, mengembalikan marwah kelapa – Surat Kabar Harian Rakyat Pos edisi 24 Maret 2022
- 2021- Abundance and distribution of microplastics in Baturusa Watershed of Bangka Belitung Islands Province – IOP Conference series : Earth and environmental science.
- 2020 – Kelimpahan dan komposisi sampah plastik di DAS Baturusa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung – JPSP. Vol. 10/Edisi 4.
- 2012 - Pertambangan Timah dan Polemiknya dipublikasikan pada Majalah Suara Bumi Th. VIII/Edisi 1.





PENGALAMAN PUBLIKASI

- 2019 – Analisis *Sebaran Total Suspended Solid* Kolong Kacang Pedang Dengan Citra Planetscope – Seminar Nasional Geografi III Program Studi Pascasarjana Geografi Fakultas Geografi UGM





CURRICULUM VITAE

Lala Lazuardina, S.T.

PENGALAMAN KERJA

2008-2010

Satuan Kerja Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kepulauan Bangka Belitung-Kementerian Pekerjaan Umum, Bidang Pelaksanaan

2010-2014

PNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Subbag. Perencanaan

2015 - sekarang

PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pengendali Dampak Lingkungan

PENDIDIKAN

Universitas Pasundan Bandung

- 2004-2008 – Teknik Lingkungan

PELATIHAN PROFESIONAL

- 2009 – Pelatihan Pengolahan Air (Identifikasi Kebocoran), Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I Kementerian PU-Bekasi
- 2011 - Bimbingan Teknik Pengolahan Sampah, Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I Kementerian PU-Bekasi
- 2012 – Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, PPLH IPB-Bogor
- 2015 – Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Pengendali Dampak Lingkungan, Pusarpedal KLHK - Serpong Tangerang Selatan
- 2019 – Bimbingan Teknik Pendampingan Penyusunan Pedoman Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, KLHK – Batam
- 2019 - Workshop pelaporan capaian penurunan emisi di daerah dan Launching pengenalan perangkat pemantauan, evaluasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) , BAPPENAS - Jakarta



Jl. Yos Sudarso Gg.
Palapinang II, Gabek 2
Pangkalpinang



081321296265



lazuardina86@gmail.com